

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
(**RKPD**)
PROVINSI PAPUA
TAHUN 2021**



Pemulihan Kehidupan Masyarakat
Melalui Peningkatan Kualitas Hidup Dan
Ekonomi Daerah Yang Inklusif
Dan Berkelanjutan



GUBERNUR PAPUA

PERATURAN GUBERNUR PAPUA

NOMOR 68 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Lampiran : 1 (satu).

GUBERNUR PAPUA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 263 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, dan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan, RKPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - b. bahwa untuk pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2021, Pemerintah Provinsi Papua wajib menyusun RKPD Tahun 2021 yang digunakan sebagai pedoman untuk evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Papua Tahun 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang/2

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4142);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 21 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Papua Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor 21);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2021.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Papua.
2. Provinsi adalah Provinsi Papua.
3. Gubernur ialah Gubernur Papua.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Papua, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua.
5. Sekretaris Daerah, yang selanjutnya disebut SEKDA ialah Sekretaris Daerah Provinsi Papua.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan, mensinergikan dan mengharmonisasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
8. Rencana Kerja SKPD, yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Strategis SKPD, yang selanjutnya disebut Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.

BAB II
KEDUDUKAN DAN RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 2

- (1) RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. evaluasi hasil kinerja pembangunan daerah;
 - b. rancangan kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah;
 - c. prioritas pembangunan daerah; dan
 - d. rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (3) Evaluasi hasil kinerja pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, memuat evaluasi hasil kinerja pembangunan daerah dalam satu (1) tahun anggaran.
- (4) Rancangan kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, memuat gambaran kondisi ekonomi, kemampuan pendanaan dan pembiayaan pemerintah daerah.

(5) Program/5

- (5) Program prioritas pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, memuat program-program yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkelanjutan.
- (6) Rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, memuat kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

**Bagian Kedua
Ruang Lingkup
Pasal 3**

- (1) Ruang Lingkup RKPD dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. Pendahuluan, yang terdiri dari Latar Belakang, Hubungan Antar Dokumen, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan Dokumen RKPD;
 - b. Gambaran Umum Kondisi Daerah, yang terdiri dari Kondisi Umum Daerah, Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD, dan Permasalahan Pembangunan Daerah;
 - c. Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah, yang terdiri dari Arah Kebijakan Ekonomi Daerah, dan Arah Kebijakan Keuangan Daerah;
 - d. Sasaran dan Priotitas Pembangunan Daerah, yang terdiri dari Tujuan dan Sasaran Pembangunan, Tema Pembangunan Provinsi Papua, Prioritas Pembangunan Provinsi Papua Tahun 2021, Arah Pembangunan Wilayah;
 - e. Otonomi Khusus Provinsi Papua Tahun 2021, yang terdiri dari Kebijakan Otonomi Khusus, Regulasi Otonomi Khusus, Implementasi Otonomi Khusus, Penganggaran Otonomi Khusus, dan Tantangan dan Permasalahan Otonomi Khusus;
 - f. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah, yang terdiri dari Rencana Kerja, dan Pendanaan Daerah;
 - g. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang terdiri dari Indikator Kinerja Utama, Indikator Kinerja Kunci; dan
 - h. Penutup.
- (2) Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Maksud
Pasal 4**

- (1) Penetapan RKPD dimaksudkan sebagai pedoman untuk penyusunan :
 - a. RKPD, KUA dan PPAS, serta APBD Provinsi Tahun Anggaran 2021; dan
 - b. RKPD, KUA dan PPAS, serta APBD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2021.
- (2) Penyusunan RKPD Provinsi sebagai penjabaran dari RPJMD Provinsi Tahun 2018-2023, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebagai berikut :
 - a. persiapan penyusunan RKPD, KUA dan PPAS serta APBD Provinsi Tahun 2021;
 - b. penyusunan rancangan awal RKPD, KUA dan PPAS, serta APBD Provinsi Tahun 2021;
 - c. penyusunan rancangan RKPD, KUA dan PPAS, serta APBD Provinsi Tahun 2021;

d. pelaksanaan/6

- d. pelaksanaan musyawarah RKPD;
 - e. perumusan rancangan akhir RKPD, KUA dan PPAS, serta APBD Provinsi Tahun 2021; dan
 - f. penetapan RKPD, KUA dan PPAS, serta APBD Provinsi Tahun 2021.
- (3) Penyusunan RKPD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selaras dan konsisten dengan prioritas, sasaran dan program yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.
- (4) Penyusunan RKPD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan kewenangan dan hasil inventarisasi personil, pendanaan sarana dan prasarana serta dokumen.
- (5) Penyusunan RKPD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada pencapaian nasional dan arah kebijakan pemerintah.

Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 5

Penetapan RKPD bertujuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Papua.

BAB IV
PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 23 Oktober 2020

GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
LUKAS ENEMBE, SIP, MH

Diundangkan di Jayapura
pada tanggal 27 Oktober 2020
Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Papua
CAP/TTD

DOREN WAKERKWA, SH
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2020 NOMOR 68

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



Y. DEREK HEGEMUR, SH., MH
NIP. 19661202 198603 1 002

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dihaturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas Berkah dan Karunia-Nya sehingga proses penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Papua Tahun 2021 dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen RKPD Provinsi Papua Tahun 2021 merupakan dokumen wajib yang dipersyaratkan untuk dibuat sebagai dasar pelaksanaan satu tahun rencana pembangunan.

Sebagaimana yang diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, pada pasal 12 ayat 3 bahwa RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

RKPD Provinsi Papua Tahun 2021 kali ini merupakan RKPD tahun ke-III pelaksanaan RPJMD Provinsi Papua tahun 2019-2023, dengan tema "Melanjutkan Peningkatan Kualitas SDM Dan Perekonomian Daerah Berbasis Wilayah Dan Berkelanjutan Disertai Pemantapan Rasa Aman Dan Tata Kelola" tema ini merupakan landasan kita dalam pembangunan untuk tahun 2021 yang akan didukung oleh 5 (lima) prioritas pembangunan, yaitu : 1). Peningkatan Kualitas SDM dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar; 2). Pemantapan Rasa Aman, Tenram dan Kedewasaan Berdemokrasi; 3.)Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan; 4). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi; dan 5). Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan. Diharapkan dengan tema dan

prioritas ini dapat menjawab tantangan pembangunan di Provinsi Papua tahun 2021 mendatang.

Dokumen RKPD ini akan menjadi rujukan dan pegangan bagi seluruh stakeholders di Provinsi Papua tanpa terkecuali, untuk bersama-sama mewujudkan visi **KITA** bersama yaitu **Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera yang Berkeadilan.**

Jayapura, _____2020

GUBERNUR PAPUA

LUKAS ENEMBE, SIP, MH

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	4
1.3. Hubungan Antar Dokumen	5
1.4. Maksud Dan Tujuan.....	8
1.5. Sistematika Penulisan Dokumen RKPD 2021	8
BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH	11
2.1. Kondisi Umum Daerah	11
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD	71
2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah	138
BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH	141
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	141
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	169
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	198
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah	198
4.2 Tema Pembangunan Provinsi Papua Tahun 2021	201
4.3 Prioritas Pembangunan Tahun 2021	202

BAB V	OTONOMI KHUSUS PROVINSI PAPUA TAHUN 2021	212
	5.1. Kebijakan Otonomi Khusus	212
	5.2. Regulasi Otonomi Khusus	214
	5.3. Implementasi Otonomi Khusus	214
	5.4. Penganggaran Otonomi Khusus	215
	5.5. Tantangan dan Permasalahan Otonomi Khusus	220
BAB VI	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	176
	5.1. Program dan Kegiatan Prioritas RKPD Tahun 2021	212
	5.2. Rencana Kerja Perangkat Daerah Dan Pendanaannya.....	214
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	223
	7.1. Indikator Kinerja Utama	224
	7.2. Indikator Kinerja Kunci	225
BAB VIII	PENUTUP.....	252
	LAMPIRAN RKPD FORM PEMETAAN PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019	254

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Kondisi Wilayah Administratif Provinsi.....	21
Tabel 2.2 Panjang Sungai dan Luas Daerah Tangkapan di Provinsi Papua	15
Tabel 2.3 Keadaan Penduduk di Provinsi Papua Tahun 2018.....	23
Tabel 2.4 Gini Rasio Kabupaten/Kota Tahun 2014-2018	33
Tabel 2.5 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Papua Tahun 2013-2017.....	38
Tabel 2.6 Angka Melek Huruf (AMH) Penduduk Usia 15-24 Tahun Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2015-2018.....	43
Tabel 2.7 Angka Penduduk Usia 15 Tahun Menurut Jenis Kegiatan Utama Provinsi Papua, Februari 2017 – Agustus 2019	50
Tabel 2.8 Angka Partisipasi Sekolah dan Putus Sekolah Tahun 2013-2019.....	57
Tabel 2.9 Jumlah Guru SMU/SMK dan Sekolah Kondisi Baik SMU/SMK Tahun 2013-2019	57
Tabel 2.10 Kriteria Penilaian Konsistensi Program RPJMD 2019-2023 dengan RKPD 2019..	65
Tabel 2.11 Kriteria Penilaian Konsistensi Program RKPD 2019 dengan APBD 2019	73
Tabel 2.12 Kriteria Penilaian Konsistensi Program Prioritas RKPD 2019 dengan APBD 2019.....	75
Tabel 2.13 Evaluasi Peruntukkan dan Realisasi Capaiannya	76
Tabel 2.14 Evaluasi Capaian Indikator Sasaran Menurut Prioritas Daerah.....	78
Tabel 2.15 Kriteria Penilaian Berdasarkan Rasio Pencapaian Kinerja	80
Tabel 2.16 Kinerja Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan Seluruh SKPD/OPD Tahun 2019	80
Tabel 2.17 Capaian Kinerja Program dan Anggaran Dinas Pendidikan Tahun 2019.....	83
Tabel 2.18 Capaian Kinerja Program dan Anggaran Dinas Kesehatan Tahun 2019	85
Tabel 2.19 Capaian Kinerja Program dan Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Tahun 2019.....	87
Tabel 2.20 Capaian Kinerja Program dan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2019	89
Tabel 2.21 Capaian Kinerja Program dan Anggaran Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Tahun 2019.....	83

Tabel 2.22	Capaian Kinerja Program Dan Anggaran Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2019	83
Tabel 2.23	Capaian Kinerja Program Dan Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Tahun 2019.....	83
Tabel 2.24	Capaian Kinerja Program Dan Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tahun 2019	83
Tabel 2.25	Capaian Kinerja Program Dan Anggaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2019	83
Tabel 2.26	Capaian Kinerja Program Dan Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2019.....	83
Tabel 2.27	Capaian Kinerja Program Dan Anggaran Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2019	83
Tabel 2.28	Capaian Kinerja Program Dan Anggaran Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Tahun 2019	83
Tabel 2.29	Capaian Kinerja Program Dan Anggaran Dinas Kebudayaan Tahun 2019	83
Tabel 2.30	Capaian Kinerja Program Dan Anggaran Dinas Olah Raga dan Pemuda Tahun 2019.....	83
Tabel 2.31	Capaian Kinerja Program Dan Anggaran Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Tahun 2019	83
Tabel 2.32	Capaian Kinerja Program Dan Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2019.....	83
Tabel 2.33	Capaian Kinerja Program Dan Anggaran Dinas Pariwisata Tahun 2019	83
Tabel 2.34	Capaian Kinerja Program Dan Anggaran Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2019	83
Tabel 2.35	Capaian Kinerja Program Dan Anggaran Dinas Perkebunan Tahun 2019.....	83
Tabel 2.36	Capaian Kinerja Program Dan Anggaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2019	83
Tabel 2.37	Capaian Kinerja Program Dan Anggaran Dinas Kehutanan Tahun 2019	83
Tabel 2.38	Capaian Kinerja Program Dan Anggaran Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Tahun 2019	83
Tabel 2.39	Capaian Kinerja Program Dan Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2019	83

Tabel 2.40	Capaian Kinerja Program Dan Anggaran Sekretariat Daerah Tahun 2019.....	83
Tabel 2.41	Capaian Kinerja Program Dan Anggaran Biro Tata Pemerintahan Tahun 2019..	83
Tabel 2.42	Capaian Kinerja Program Dan Anggaran Biro Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri Tahun 2019	83
Tabel 2.43	Capaian Kinerja Program Dan Anggaran Biro Hukum Tahun 2019	83
Tabel 2.44	Capaian Kinerja Program Dan Anggaran Biro Organisasi Tahun 2019	83
Tabel 2.45	Capaian Kinerja Program Dan Anggaran Biro Umum Tahun 2019.....	83
Tabel 2.46	Capaian Kinerja Program Dan Anggaran Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam Tahun 2019	83
Tabel 2.47	Capaian Kinerja Program Dan Anggaran Biro Humas dan Protokol Tahun 2019	83
Tabel 2.48	Capaian Kinerja Program Dan Anggaran Biro Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Tahun 2019.....	83
Tabel 2.49	Capaian Kinerja Program Dan Anggaran Biro Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2019	83
Tabel 2.50	Capaian Kinerja Program Dan Anggaran Biro Otonomi Khusus Tahun 2019.....	83
Tabel 2.51	Capaian Kinerja Program Dan Anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2019	83
Tabel 2.52	Capaian Kinerja Program Dan Anggaran Sekretariat Majelis Rakyat Papua Tahun 2019	83
Tabel 2.53	Capaian Kinerja Program Dan Anggaran Badan Penghubung Daerah Tahun 2019.....	83
Tabel 2.54	Capaian Kinerja Program Dan Anggaran Badan Pengembanganm Sumber Daya Manusia Tahun 2019	83
Tabel 2.55	Capaian Kinerja Program Dan Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2019	83
Tabel 2.56	Capaian Kinerja Program Dan Anggaran Inspektorat Tahun 2019	83
Tabel 2.57	Capaian Kinerja Program Dan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2019	83
Tabel 2.58	Capaian Kinerja Program Dan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Tahun 2019	83

Tabel 2.59	Capaian Kinerja Program Dan Anggaran Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 2019	83
Tabel 2.60	Capaian Kinerja Program Dan Anggaran Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2019.....	83
Tabel 2.61	Capaian Kinerja Program Dan Anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2019	83
Tabel 3.1	Indonesia Provincial Competitiveness Ranking & Score Overall Competitiveness	146
Tabel 3.2	Tingkat Inflasi Bulanan Provinsi Papua Januari 2013 – Juli 2019 (dalam %).....	147
Tabel 3.3	Perkembangan Ketenagakerjaan Provinsi Papua 2013 – 2019 (dalam jiwa)	152
Tabel 3.4	Distribusi Pendapatan Menurut Wilayah Di Provinsi Papua Maret 2016 – Maret 2019	155
Tabel 3.5	Target dan Proyeksi Pembangunan Sosial Ekonomi Makro Daerah Provinsi Papua Tahun 2020-2021	168
Tabel 3.6	Ringkasan Pendapatan Daerah Dan Perubahannya Pada APBD Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2016-2018 (dalam milyar rupiah).....	172
Tabel 3.7	Realisasi dan Proyeksi / Target Pendapatan Provinsi Papua Tahun 2017 s.d tahun 2021 (dalam Rp.).....	178
Tabel 3.8	Ringkasan Belanja Daerah Dan Perubahannya Pada APBD Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2016-2018 (dalam milyar rupiah).....	185
Tabel 3.9	Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun Tahun 2017 s.d tahun 2021 (dalam Rp.).....	187
Tabel 3.10	Target Dan Proyeksi Belanja Daerah Yang Bersumber Dari Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Tahun 2020 dan 2021 (dalam Rp.)	192
Tabel 3.11	Target Dan Proyeksi Alokasi Dana Otonomi Khusus Untuk Kabupaten/Kota Di Provinsi Papua Tahun 2020 dan 2021 (dalam Rp.).....	194
Tabel 3.12	Target Dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Provinsi Papua Tahun 2020 dan 2021 (dalam Rp.).....	196
Tabel 4.1	Keselarasn Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	206
Tabel 5.1	Penerimaan Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Tahun 2002 – 2020	218
Tabel 6.1	Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Pemerintah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2021.....	222

Tabel 7.1	Indikator Kinerja Utama Tahun 2021	224
Tabel 7.2	Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Tahun 2021	225

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1	Jadwal Dan Tahapan Penyusunan RKPD Dan KUA-PPAS 2021	3
Gambar 1.2	Proses Penyusunan dan Keterkaitan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	7
Gambar 2.1	Peta Batas Administrasi Provinsi Papua.....	12
Gambar 2.2	Peta Kemiringan Lereng	15
Gambar 2.3	Peta Satuan Wilayah Sungai Provinsi Papua.....	18
Gambar 2.4	Grafik Intensitas Curah Hujan.....	20
Gambar 2.5	Peta Rawan Bencana Alam.....	21
Gambar 2.6	Piramida Penduduk Provinsi Papua Tahun 2019	22
Gambar 2.7	Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk.....	23
Gambar 2.8	Laju Pertumbuhan dan serta Distribusi PDRB dengan Pertambahan dan Penggalian Beberapa Lapangan Usaha Triwulan IV-2019	26
Gambar 2.9	Laju Pertumbuhan dan serta Distribusi PDRB Menurut Pengeluaran Triwulan III-2019 Provinsi Papua	28
Gambar 2.10	Perkembangan Indeks Harga Konsumen dan Inflasi	28
Gambar 2.11	Laju Inflasi Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Berdasarkan Angka Deflator Tahun 2014-2017 (%)	29
Gambar 2.12	Tingkat Kemahalan Provinsi Papua.....	30
Gambar 2.13	PDRB Per Kapita Tahun 2010-2019 (juta Rp)	31
Gambar 2.14	Perkembangan Rasio Gini di Provinsi Papua Tahun 2010- September 2017....	33
Gambar 2.15	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin dan Garis KemiskinanMaret 2018- Maret 2019	35
Gambar 2.16	Tingkat Kemiskinan di Provinsi Papua (%).....	36
Gambar 2.17	Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan Provinsi Papua (%).....	37
Gambar 2.18	Indeks Pembangunan Manusia di Papua Tahun 2019.....	40
Gambar 2.19	IPM Nasional menurut Provinsi dan Status Pembenagunan Manusia Tahun 2019	41
Gambar 2.20	Tingkat Pertumbuhan IPM di Provinsi Papua Tahun 2019.....	42

Gambar 2.21	Harapan dan Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Papua Tahun 2013-2019.....	44
Gambar 2.22	Angka Harapan Hidup (AHH) di Provinsi Papua	46
Gambar 2.23	Angka Harapan Hidup (AHH) tingkat Kab/Kota Provinsi Papua.....	47
Gambar 2.24	Status Gizi Anak Balita Umur 0 - 23 Bulan Berdasarkan Indeks BB/U di Provinsi Papua dan Indonesia Tahun 2015 - 2017 (%).....	48
Gambar 2.25	Angka Stunting Tertinggi di Indonesia Tahun 2017 (%).....	49
Gambar 2.26	Tingkat Pengangguran Tahun 2018 (%).....	51
Gambar 2.27	Tingkat Pengangguran Tahun 2018 (%).....	52
Gambar 2.28	Rasio Usia Ketergantungan Tahun 2013-2019.....	53
Gambar 2.29	Produktifitas Total Daerah Tahun 2013-2019	54
Gambar 2.30	Prosentase Angkatan Kerja yang berpendidikan Tinggi Provinsi Tahun 2013-2019	55
Gambar 2.31	Angka kematian bayi dan Ibu Melahirkan Tahun 2013-2018	58
Gambar 2.32	Rasio Puskesmas dan Rasio Tenaga Medis per 10.000 Penduduk Provinsi Papua Tahun 2013-2018	59
Gambar 2.33	Rasio Panjang Jalan dan Proporsinya Tahun 2013-2018.....	60
Gambar 2.34	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Tahun 2013-2018.....	61
Gambar 2.35	Penduduk yang bekerja dan pertumbuhan penyerapan tenaga kerja menurut lapangan usaha Provinsi Papua Tahun 2017-2019	62
Gambar 2.36	Indeks Pemberdayaan gender dan Indeks Pembangunan Gender Provinsi Papua Tahun 2013-2017	63
Gambar 2.37	Perkembangan Kredit UKM dan Penggunaannya Provinsi Papua Tahun 2018-2019	64
Gambar 2.38	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Papua	65
Gambar 2.39	Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan	66
Gambar 2.40	Jumlah Fasilitas Olahraga Provinsi Papua.....	67
Gambar 2.41	Rata-rata Lama Menginap Wisatawan Manca Negara dan Domestik di Provinsi Papua Tahun 2017-2019.....	68
Gambar 2.42	Kontribusi Sektor-Sektor terhadap PDRB Provinsi Papua Tahun 2013-2018...	69
Gambar 2.43	Perbandingan Dana OTSUS dan Perkembangan IPM Papua Tahun 2010-2019	70
Gambar 3.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Papua Tahun 2014-2018 (dalam %)	144

Gambar 3.2	Pertumbuhan Investasi, COR Dan ICOR Provinsi Papua Tahun 2013-2018.....	145
Gambar 3.3	Tingkat Inflasi Tahunan Provinsi Papua 2014-2019 (dalam %)	149
Gambar 3.4	Indeks Kemahalan Kontruksi Provinsi Papua 2013-2018 (dalam %)	150
Gambar 3.5	Nilai Kurs Rupiah Terhadap US\$ Periode Januari 2018 – Juli 2019 (dalam Rp/US\$)	151
Gambar 3.6	Tingkat Pengangguran Dan Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Papua 2013-2019 (dalam %).....	153
Gambar 3.7	Tingkat Kemiskinan Menurut Wilayah Di Provinsi Papua Maret 2018 – Maret 2019 (dalam %).....	154
Gambar 3.8	Tingkat Ketimpangan Menurut Angka Gini Ratio Di Provinsi Papua Maret 2013- Maret 2019.....	155
Gambar 3.8	Struktur Belanja Daerah Provinsi Papua Rata-Rata Selama Tahun 2013-2017 (dalam %)	183
Gambar 4.1	Kebijakan Umum Pengembangan Wilayah Papua	183
Gambar 5.1	Histori dan Keadaan Rakyat Konfigurasi Pemerintahan Daerah	213
Gambar 5.2	Grafik Pembiayaan Pelayanan Urusan Otonomi Khusus	217
Gambar 5.3	Sumber Dana Otonomi Khusus Terhadap Total APBD Provinsi Papua Tahun 2019	219

Lampiran : Peraturan Gubernur Papua
Nomor : 68 Tahun 2020
Tanggal : 23 Oktober 2020

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

“**Papua Bangkit, Mandiri Dan Sejahtera Yang Berkeadilan**” adalah visi Provinsi Papua 2018-2023 yang mempedomani tolok ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam merealisasikan program dan kegiatan. RKPD adalah dokumen perencanaan tahunan daerah, yang merupakan penjabaran dari RPJMD. Secara operasional, RKPD memuat arahan untuk mencapai kinerja pemerintahan yang menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD). untuk mewujudkan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 3 telah mengamanatkan bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah disusun secara terpadu oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Dimana salah satu dokumen dari perencanaan pembangunan daerah yang disebutkan adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah disingkat RKPD, yang merupakan rencana pembangunan tahunan daerah. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah di Pasal 260 juga mengamanatkan bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

RKPD Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2021 disusun berdasarkan pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (*top-down*), dan bawah-atas (*bottom-up*). Pendekatan politik bermakna bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana pembangunan.

Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan oleh Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah yang disepakati bersama DPRD. Sedangkan perencanaan melalui pendekatan teknokratis dilaksanakan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah yang dilaksanakan oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsi memiliki tugas untuk itu. Adapun perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang kepentingan (*stakeholder*) terhadap pembangunan, di mana pelibatan para pihak tersebut dimaksudkan untuk menjaring aspirasi dan menumbuhkembangkan rasa memiliki. Terakhir, untuk pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselenggarakan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat Nasional, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota. Selain itu, penyusunan RKPD 2021 juga diperkuat dengan pendekatan Holistik-Tematik, Integratif dan Spasial (HITS) dengan memperhatikan pada beberapa hal yaitu :

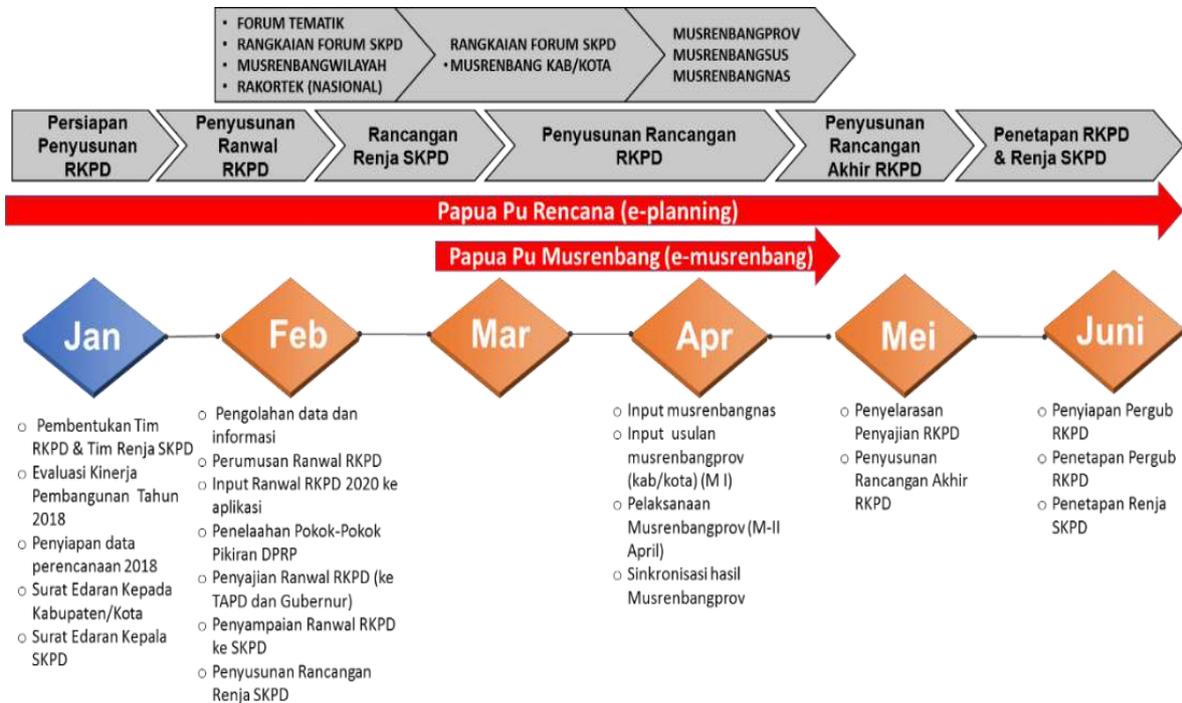
1. Pengendalian perencanaan;
2. Konsistensi antara perencanaan dengan penganggaran;
3. Perencanaan berbasis kewilayahan, berkeadilan dan berkelanjutan;
4. Integrasi sumber pendanaan.

Selanjutnya, untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi, penyusunan RKPD 2021 menggunakan *e-planning* dan *e-musrenbang*. Melalui penerapan berbasis IT (Informasi dan Teknologi) tersebut diharapkan RKPD 2021 akan lebih berkualitas, yang dapat memenuhi beberapa kriteria antara lain:

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya;
2. Program dan kegiatan prioritas dalam RKPD konsisten dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang;
3. Program dan kegiatan prioritas dalam RKPD dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (*outcome*) untuk program dan indikator kinerja keluaran (*output*) untuk kegiatan, yang bersifat realistis dan terukur;
4. Program dan kegiatan dalam RKPD dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Untuk menghasilkan dokumen RKPD yang berkualitas tersebut, maka proses penyusunan RKPD 2021 dilaksanakan dalam beberapa tahap, sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 16 Permendagri Nomor 86 tahun 2017, meliputi : (a) persiapan penyusunan; (b) penyusunan rancangan awal; (c) penyusunan rancangan; (d) pelaksanaan Musrenbang; (e) perumusan rancangan akhir; dan (f) penetapan. Semua ini dijabarkan dalam skedul dan tahapan penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Provinsi Papua 2021 sebagai berikut :

Gambar 1.1
Jadwal Dan Tahapan Penyusunan RKPD Dan KUA-PPAS 2021



Untuk itu pondasi yang dibangun melalui RKPD 2021 harus lebih baik yang diwujudkan dengan perumusan prioritas daerah yang komprehensif dan holistik, yang dijabarkan secara integratif dan spasial, serta disusun secara teknokratik, partisipatif, politik, *bottom-up* dan *top-down*. Semua ini merupakan rangkaian proses sistematis dan terstruktur yang diimplementasikan melalui *e-planning Papua Pu Rencana* yang menjadi inovasi dari penyusunan RKPD Provinsi Papua saat ini, oleh karena hirarkinya semakin bertambah kuat dan terkendali yang akan menjamin dan memastikan terintegrasiya RKPD 2020 dengan RPJMD 2018-2023, RENSTRA-PD 2018-2023, RENJA-PD 2021, dan kepentingan seluruh *stakeholder* pembangunan.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Peraturan perundang-undangan yang menjadi rujukan penyusunan RKPD Provinsi Papua Tahun 2021 adalah:

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat;
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
8. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang (RPJP) Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Presiden Nomor 02 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

11. Inpres Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
15. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Papua 2005-2025;
16. Perdasus Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 25 Tahun 2013 tentang tentang Pembagian Penerimaan dan Pengelolaan Keuangan Dana Otonomi Khusus;
17. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Tahun 2013-2033;
18. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Pembagian Penerimaan Dan Pengelolaan Keuangan Dana Otonomi Khusus, yang selanjutnya mengalami perubahan kedua kali melalui Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Pembagian Penerimaan Dan Pengelolaan Keuangan Dana Otonomi Khusus.
19. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Papua Tahun 2019-2023.

20. Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Papua Tahun 2020.

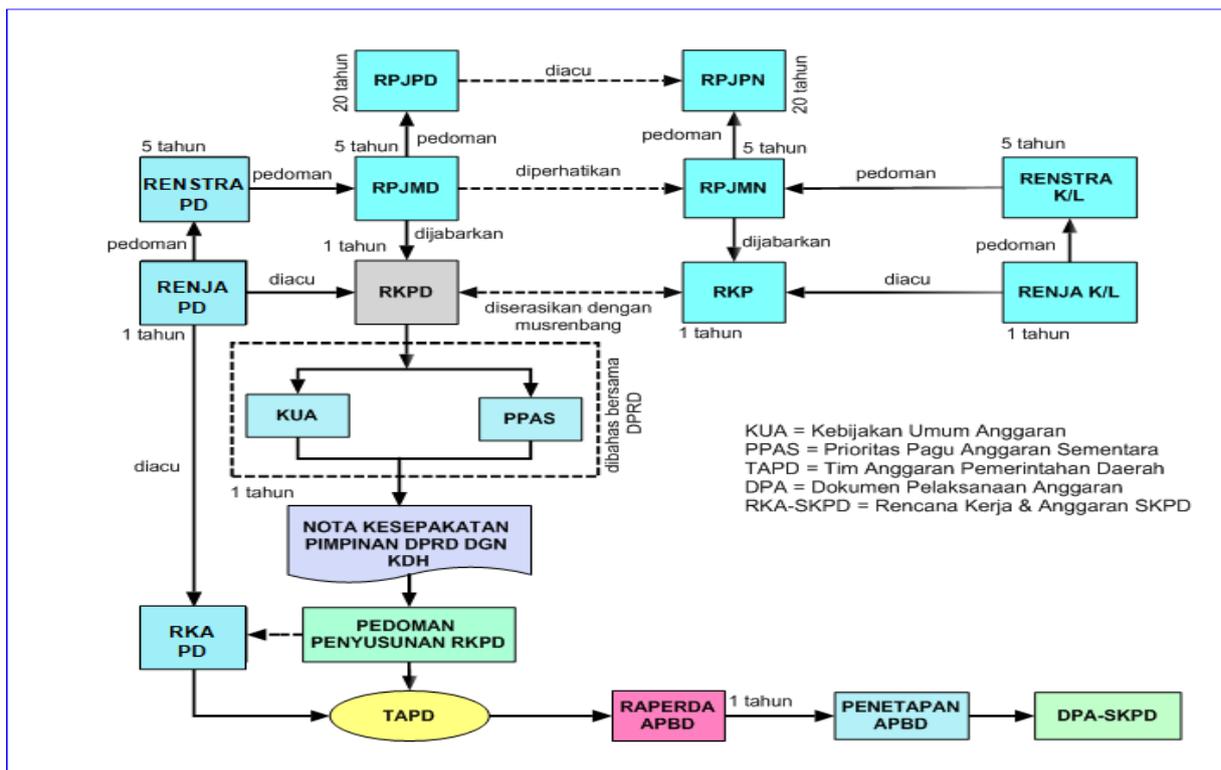
1.3. Hubungan Antar Dokumen

RKPD Provinsi Papua Tahun 2021 selain disusun dengan mempedomani RPJMD Provinsi Papua Tahun 2018-2023, juga berpedoman pada dokumen perencanaan pembangunan lainnya, seperti rencana tata ruang, RPJPD, RPJP dan RPJM Nasional. Di samping itu, RKPD Provinsi Papua Tahun 2021 ini disusun dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, faktor-faktor keberhasilan, evaluasi kinerja pembangunan 2 (dua) tahun sebelumnya serta isu-isu strategis yang berkembang.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) disusun dari proses penjabaran atas visi, misi dan program Kepala Daerah. RPJMD berperan sebagai acuan dasar dalam menentukan arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah yang pada intinya memuat mengenai arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Sebagai suatu produk perencanaan, RPJMD tetap tidak dapat dipisahkan keberadaannya dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya. RPJMD ini terintegrasi dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen perencanaan lainnya baik di tingkat nasional maupun daerah, terutama dengan dokumen perencanaan dan penganggaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah. Adapun dokumen perencanaan dan penganggaran tersebut meliputi (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), (2) Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD), (3) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).

Semua dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud di atas, dari sisi waktu mencakup 3 kerangka waktu, yaitu rencana jangka panjang (20 tahun), rencana jangka menengah (5 tahun) dan rencana jangka pendek (1 tahun). Secara substansi, keberadaan RKPD 2020 ini dengan dokumen perencanaan tersebut membentuk keterkaitan yang bersifat hierarkis, yaitu dokumen dengan jangka waktu yang lebih panjang menjadi rujukan bagi dokumen dengan jangka waktu yang lebih pendek. Diagramatis keterkaitan hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.2. sebagai berikut :

Gambar 1.2
Proses Penyusunan dan Keterkaitan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Mengacu pada Gambar 1.2 tersebut dapat diketahui bahwa secara rinci hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya, adalah: (1) RKPD disusun dengan memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam RPJP Nasional dan RPJM Nasional melalui mekanisme Musrenbangnas, (2) RKPD disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMD yang didalamnya memuat mengenai visi, misi dan arah pembangunan daerah. (3) selanjutnya RKPD ini menjadi pedoman bagi penyusunan Renja-PD yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi dari tiap OPD. Dengan demikian dokumen ini akan bermanfaat bagi OPD dalam rangka mewujudkan keterpaduan dan mensinergikan pembiayaan pembangunan dari berbagai sumber misalnya APBN dan APBD. Oleh karena itu, program-program pembangunan yang tertuang dalam RKPD tahun 2021, menjadi acuan dalam penyusunan KUA-PPAS APBD Provinsi Papua tahun 2021 dan selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD tahun 2021.

Memperhatikan hubungan keterkaitan sebagaimana dijelaskan di atas, maka penyusunan RKPD Provinsi Papua Tahun 2021 ini harus selaras dengan dokumen perencanaan tingkat pusat dan dokumen perencanaan tingkat provinsi serta memperhatikan dokumen-dokumen perencanaan di kabupaten/kota di Provinsi Papua sehingga terjadi sinergitas perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota.

1.4. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Pemerintah (RKPD) yang memuat rancangan ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, pendanaan dan perkiraan maju adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud : (1). Menentukan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2021, (2). Mewujudkan sinergi rancangan program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah tahun 2021.

Sedangkan tujuannya adalah : (1). Sebagai pedoman seluruh perangkat daerah dalam penyusunan rencana kerja (Renja) tahun 2021; (2). Menjadi landasan bagi tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) dalam menyusun kebijakan umum Anggaran (KUA) serta prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS), sebagai dasar penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Provinsi Papua Tahun Anggaran 2021; (3). Menjadi acuan penyusunan RKPD tahun 2021 bagi kabupaten/kota di Provinsi Papua; (4). Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan monitoring evaluasi pembangunan.

1.5. Sistematika Penulisan Dokumen RKPD 2021

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah, dan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka sistematika penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Papua Tahun 2021 meliputi :

BAB I PENDAHULUAN. Memuat Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Hubungan Antar Dokumen, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Dokumen RKPD.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH. Menjelaskan mengenai kondisi faktual daerah yang dijabarkan menjadi Kondisi Umum Daerah mencakup Aspek Geografi dan Demografi, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum, Aspek Daya Saing Daerah, serta dilengkapi dengan hasil Evaluasi Pelaksanaan

Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan, Pengelolaan Otonomi Khusus, dan Permasalahan Pembangunan Daerah.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH. Bab ini terdiri atas Arah Kebijakan Ekonomi Daerah, dan Arah Kebijakan Keuangan Daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH. Memuat Tujuan dan Sasaran Pembangunan, serta Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2021.

BAB V OTONOMI KHUSUS PROVINSI PAPUA TAHUN 2021. Memuat Kebijakan Otonomi Khusus, Regulasi Otonomi Khusus, Implementasi Otonomi Khusus, Penganggaran Otonomi Khusus dan Tantangan dan Permasalahan Otonomi Khusus.

BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH. Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJPD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH. Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

BAB VIII PENUTUP. Merupakan bab terakhir, yang pada dasarnya memuat tentang rumusan kaidah-kaidah pelaksanaan RKPD 2021 yang menjadi komitmen bagi seluruh *stakeholder* baik yang langsung menjadi pelaksana program kegiatan maupun pihak lain yang ikut berperan dalam pembangunan daerah Provinsi Papua.

BAB II

GAMBARAN KONDISI DAERAH

2.1 Kondisi Umum Daerah

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah

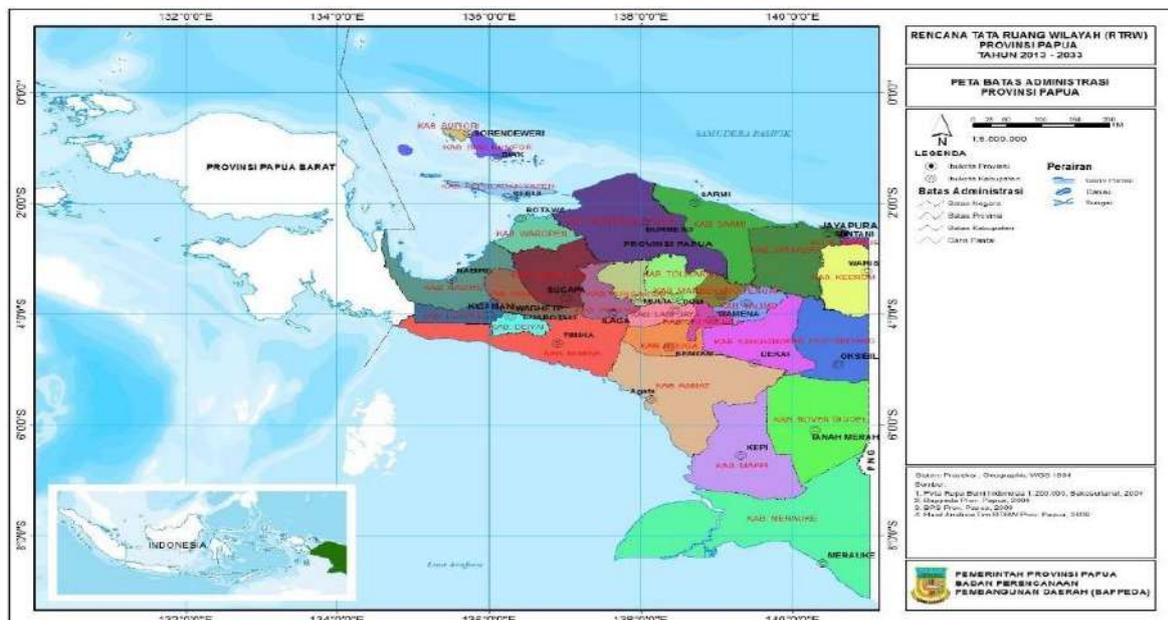
Posisi Provinsi Papua secara geografis terletak antara garis koordinat 01°00' LU - 9°10' LS dan 134°00' BT - 141°05' BT dengan luas 32.027.839 hektar. Wilayah administrasi Provinsi Papua terdiri dari 28 kabupaten dan 1 kota, yang terbagi menjadi 470 Distrik dan 4.378 Kampung. Secara administratif Provinsi Papua berbatasan dengan:

- a. sebelah utara : Samudra Pasifik
- b. sebelah selatan : Laut Arafuru
- c. sebelah barat : Papua Barat
- d. sebelah timur : Papua New Guinea

Sementara jika diperhatikan dari luas wilayah, terlihat jelas bahwa Kabupaten Sarmi memiliki luas yang paling besar di Papua yakni mencapai 3.558.900 hektar, dan yang paling kecil adalah Kabupaten Supiori hanya seluas 52.800 hektar. Sedangkan bila diamati menurut wilayah adat, berturut-turut luas wilayah yang paling besar adalah Wilayah Mamta seluas 8.624.691 hektar, kemudian Anim Ha seluas 8.215.000 hektar, La Pago seluas 7.467.900 hektar, Mee Pago seluas 5.507.848 hektar, dan terakhir Saireri seluas 2.212.400 hektar.

Gambar 2.1

Peta Batas Administrasi Provinsi Papua



Tabel. 2.1.

Kondisi Wilayah Administratif Provinsi Papua Tahun 2018

Wilayah Adat	Kabupaten/ Kota	Luas Wilayah (km2)*	Ibu Kota	Jumlah Distrik	Jumlah Kampung	Jumlah Kelurahan	Keterangan
Anim Ha	Merauke	47.406,90	Merauke	20	176	13	Dataran Mudah Akses
	Asmat	24.687,57	Agats	23	217	4	Dataran Sulit Akses
	Boven Digoel	24.665,98	Tanah Merah	20	105	5	
	Mappi	23.178,45	Keppi	15	162	2	
La Pago	Jayawijaya	2.331,19	Wamena	40	316	15	Pegunungan Tengah
	Lanny Jaya	3.439,79	Tiom	39	356	-	
	Mamberamo Tengah	3.384,14	Kobakma	5	59	-	
	Nduga	5.381,47	Kenyam	32	248	-	
	Pegunungan Bintang	14.655,36	Oksibil	34	277	-	
	Puncak	5.618,84	Ilaga	25	206	-	
	Puncak Jaya	2.446,50	Mulia	26	302	-	
	Tolikara	6.149,67	Karubaga	46	545	-	
	Yahukimo	15.057,90	Dekai	51	517	1	
	Yalimo	3.658,76	Elelim	5	300	-	
Mee Pago	Nabire	4.549,75	Nabire	15	80	9	Dataran Mudah Akses
	Mimika	2.300,37	Timika	18	123	24	Dataran Sulit Akses
	Deiyai	2.325,88	Waghete	5	67	-	Pegunungan Tengah
	Dogiyai	4.522,15	Kigamani	10	79	-	
	Intan Jaya	9.336,60	Sugapa	8	97	-	
	Paniai	20.686,00	Enarotali	24	208	-	

Wilayah Adat	Kabupaten/ Kota	Luas Wilayah (km2)*	Ibu Kota	Jumlah Distrik	Jumlah Kampung	Jumlah Kelurahan	Keterangan
Saireri	Biak Numfor	13.017,45	Biak	19	239	23	Dataran Mudah Akses
	Kepulauan Yapen	4.936,37	Serui	16	147	18	
	Supiori	634,24	Sorendiweri	5	37	1	
	Waropen	5.381,47	Waren	12	116	1	Dataran Sulit Akses
Mamta	Jayapura	14.390,16	Sentani	19	127	17	Dataran Mudah Akses
	Keerom	9.015,03	Arso	11	91	-	
	Sarmi	13.965,58	Sarmi	19	108	2	
	Mamberamo Raya	28.034,87	Burmeso	9	59	-	
	Kota Jayapura	950,38	Jayapura	5	16	23	Dataran Sulit Akses
	Total	316.552,6		576	5.380	158	

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Papua, Papua Dalam Angka 2019 (diolah)

Berdasarkan Tabel 2.1, terdapat 19 kabupaten di wilayah Papua yang berada di daerah dataran sulit akses dan pegunungan. Dari 5.380 kampung yang teridentifikasi melalui data statistik tahun 2018, sekitar 80,22% atau sebanyak 4.316 kampung terletak di daerah pegunungan dan sulit akses, dimana kurang lebih 80% dari seluruh kampung tersebut masih merupakan daerah yang terisolasi dari akses transportasi. Keragaan kondisi geografi wilayah kabupaten/kota yang tidak seimbang baik itu dilihat dari luas maupun letak wilayahnya, menjadi salah satu kendala bagi pemerintah provinsi selama ini dalam memberi pelayanan publik ke seluruh pelosok kampung secara optimal.

Masalah lainnya adalah yang terkait dengan wilayah administrasi, terutama sengketa tapal batas antarwilayah kabupaten. Misalkan Kabupaten Tolikara yang mengklaim memiliki luas 1.456.400 hektar menurut UU pemekaran selama ini mempunyai persoalan sengketa wilayah dengan beberapa kabupaten di sekelilingnya, seperti dengan Kabupaten Mamberamo Tengah dan Kabupaten Yahukimo. Begitu juga dengan Kabupaten Kepulauan Yapen yang memiliki luas wilayah 205.000 hektar bersengketa tapal batas dengan Kabupaten Nabire. Permasalahan tapal batas ini jika tidak ditangani segera akan menjadi penyulut pecahnya konflik horisontal yang lebih besar di masa mendatang

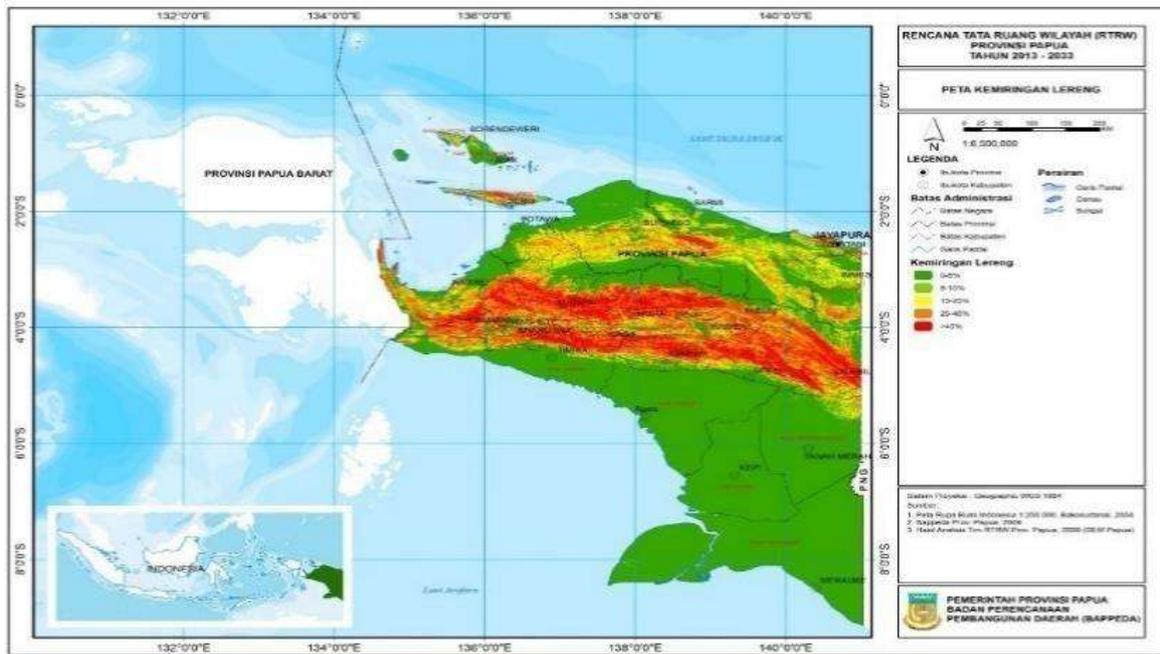
2.1.1.2 Topografi

Wilayah Provinsi Papua terdiri dari wilayah dataran rendah, pesisir, dan pegunungan yang terdiri atas tiga deretan pegunungan yaitu : 1) Pegunungan Utara di lingkaran luar, 2) deretan Pegunungan Selatan di lingkaran dalam, serta 3) deretan Pegunungan Tengah yang merupakan tepi dari *The Australian Continent*. Daerah pegunungan berada pada ketinggian di antara 3000-4000 dan lebih dari 4000 meter dari permukaan laut (mdpl). Wilayah tertinggi terdapat di Kabupaten Puncak Jaya dengan ketinggian 2.980 mdpl sedangkan yang paling rendah adalah Kota Jayapura dengan ketinggian rata-rata 4 mdpl.

Kelerengan yang mendominasi wilayah provinsi Papua adalah lereng landai (0–8)% menempati 45,9% dan lereng sangat terjal (>40%) menempati 43,3%, yang tersebar pada wilayah Haanim, Meepago, Mamta dan Laapago.

Kondisi topografi Papua yang sangat ekstrim (lihat 0 dan 2.3) menyebabkan pembangunan jaringan transportasi darat sangat sulit dilakukan dan membutuhkan biaya lebih besar dibandingkan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk juga dalam pembangunan jaringan fasilitas publik lainnya seperti listrik, air bersih, informasi dan komunikasi juga terkendala dengan kondisi topografi ini. Semuanya membutuhkan biaya besar dan sangat mahal yang tidak dapat ditangani sendiri oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Karenanya dalam hal pembangunan infrastruktur Papua, peran pemerintah pusat sangat diperlukan selama ini.

Gambar 2.2
Peta Kemiringan Lereng



2.1.1.3 Hidrologi

Provinsi Papua memiliki 64 Daerah Aliran Sungai (DAS) dengan total panjang sungai 35.924,737 km dan total luas daerah tangkapan 572.753, 823 km² (lihat Tabel 2.7). Banyaknya jumlah DAS menunjukkan bahwa Provinsi Papua memiliki kekayaan Sumber Daya Air yang berlimpah. Sungai-sungai besar yang terbentang dan danau yang tersebar di Papua dapat menjadi sumber energi listrik terbarukan sebagai modal dasar pembangunan ekonomi produktif, pendapatan asli daerah, dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

Tabel. 2.2.

Panjang Sungai dan Luas Daerah Tangkapan di Provinsi Papua

Nama DAS	Panjang Sungai (Km)	Luas Daerah Tangkapan (Km²)
Memberamo Hilir	660.457	80.099,16
Turitatu Hilir	788.626	47.872,90
Turiku Hilir	930.094	34.912,40
Apauwer	252.59	2.998,00
Wiru	155.114	2.494,80
Verkume	155.798	1.845,50

Nama DAS	Panjang Sungai (Km)	Luas Daerah Tangkapan (Km²)
Biri	116.087	2.173,00
Sermo	151.866	1.599,20
Tor	244.29	3.153,60
Van Dallen	513.64	8.585,15
Wediman	875.27	11.492,30
Digul Kanan	420.912	7.253,70
Digul Hilir	1,178.81	33.698,04
Digul Kiri	615.753	6.162,50
Digul Timur	196.058	3.189,91
Digul Barat	196.01	2.489,90
Ein Hilir	1,956.46	65.315,43
Ein Hulu	509.886	5.337,72
Wapoga	574.393	10.637,14
Sobger	1.262.169	35.174,80
Turitatu Tengah	662.304	20.312,70
Bigadu	315.5	9.103,53
Sirowo	150.915	4.013,00
Turiku Hulu	10.628.779	7.925,61
Maro	559.804	9.909,00
Tami	320.328	7.015,40
Omba	157.253	3.427,60
Yawe	147.289	4.170,30
Lorentz	747.383	8.717,65
Kumbe	262.015	3.282,00
Wanggar	361.35	4.776,20
Kapiraya	121.26	2.860,90
Peter	682.955	10.992,30
Otokwa	187.337	3.395,30
Sentani	35.04	968,60
Grime	110.725	1.050,00
Bunga	397.783	3.457,07
Vriendschaps	475.472	5.912.508,00
Bian	640.218	12.080,12
Kamura	118.525	2.187,60
Rombak	346.119	1.971,20
Nadubuai	222.608	1.971,20
Brazza	990.666	10.088,02
Parongga	31.33	593,20
Yawe	61.296	1.272,00
Akimuga	288.925	2.660,10
Mimika	477,71	4.670,01

Nama DAS	Panjang Sungai (Km)	Luas Daerah Tangkapan (Km²)
Aidoma	306.834	3.184.599,00
Minajerwi	447.597	5.054,70
Cemara	280.4	2.556,40
Otokwa	181.007	1.662,00
Nordwest	624.39	7.832,82
Odamun	264.36	6.808
Dolok	224.573	3.119,20
Bulaka	331.26	6.418,01
Siriwo	155.759	1.187,60
Kumbe	38.4	483,90
Paranggo	94.882	774,90
Kamura	270.438	2.243,20
Mappi	524.98	7.596,00
Biak	84.27	467,15
Supiori	83.457	245.917,00
Yapen	298.986	1.266.089,00
Gesa	457.979	5.551,02

Sumber: RPJPD Provinsi Papua 2005-2025

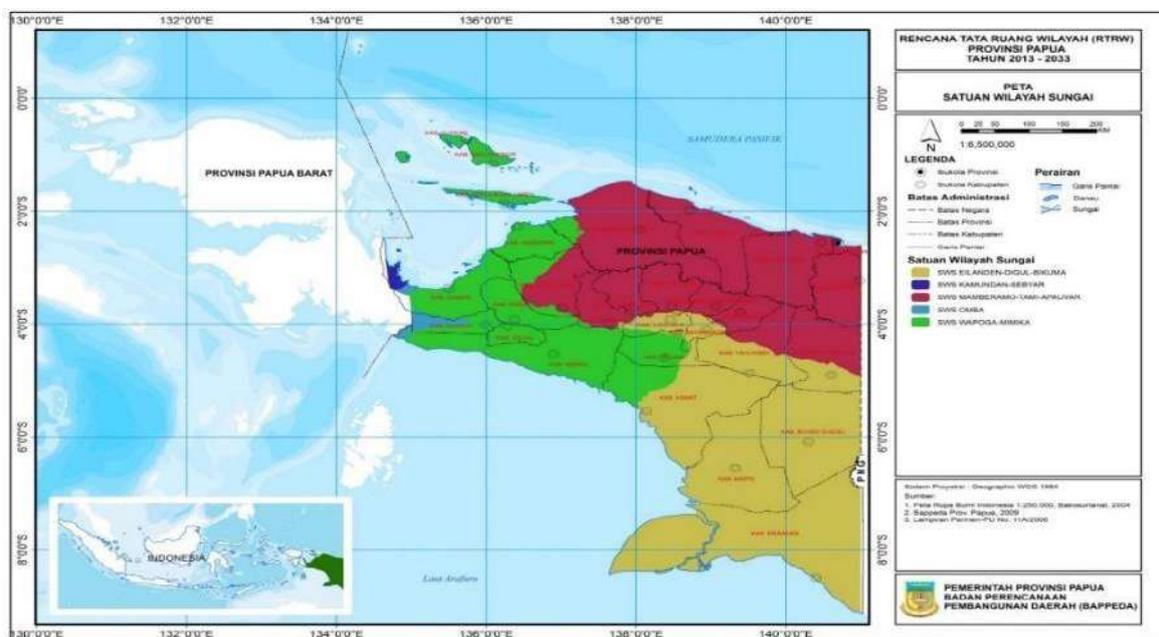
Adapun berdasarkan peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11A Tahun 2006 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai menetapkan pembagian wilayah sungai di Provinsi Papua sebagai berikut :

- 1) WS Mamberamo-Tami-Apauvar (kewenangan BWS Papua), terdiri atas beberapa DAS: DAS Mamberamo, DAS Gesa, DAS Bigabu, DAS Sobger, DAS Tariku, DAS Nawa, DAS Taritatu, DAS Van Dalen, DAS Tami, DAS Sermo, DAS Grimer dan DAS Sentani.
- 2) WS Einlanden-Digoel-Bikuma (kewenangan BWS Papua Merauke), terdiri atas beberapa daerah aliran sungai: DAS Einlanden, DAS Digoel, DAS Maro, DAS Kumber, DAS Bulaka, DAS Bian, DAS Dolak, DAS Digoel dan DAS Cemara.

3) Wilayah sungai Omba (lintas Provinsi Papua-Provinsi Papua Barat, kewenangan Papua Barat), terdiri atas WS Omba mencakup beberapa DAS:DAS Omba, DAS Lengguru, DAS Madefa, DAS Bedidi dan DAS Bomberai.

Wilayah sungai lintas kabupaten/kota terdiri atas WS WapogaMimika (kewenangan Dinas PU Provinsi), yang mencakup beberapa DAS:DAS Wapoga, DAS Aikimuga, DAS Otokwa, DAS Minarjerwi, DAS Kamura, DAS Mimika, DAS Yawe, DAS Parongga, DAS Aidoma, DAS Wanggar, DAS Siriwo, DAS Rombak, DAS Nadubuai, DAS Yapen, DAS Biak, DAS Supiori dan DAS Kemabu.

Gambar 2.3
Peta Satuan Wilayah Sungai Provinsi Papua



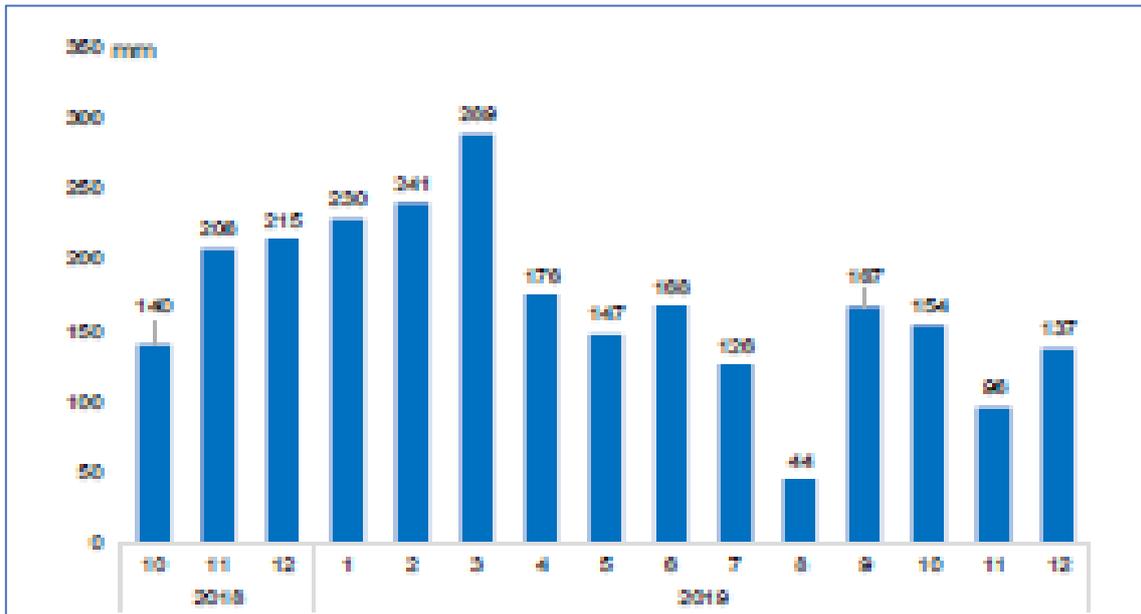
Instansi yang terlibat dalam pengelolaan DAS cukup banyak, misalkan Kementerian Kehutanan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pertanian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Lingkungan Hidup, Bakosurtanal, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Dengan banyaknya pihak yang terlibat, baik itu secara administrasi, perencanaan dan teknis dilapangan, maka diperlukan adanya koordinasi intensif berbagai pihak terkait baik lintas sektoral maupun lintas daerah.

Selain memberi peluang yang besar untuk dimanfaatkan dalam meningkatkan aktifitas ekonomi masyarakat, banyaknya sungai dan rawa juga merupakan tantangan dalam pembangunan infrastruktur di Papua. Pada wilayah yang dikelilingi rawa atau banyak rawa membuat pembangunan jalan di daerah-daerah tersebut membutuhkan konstruksi yang lebih kokoh dibanding biasanya, yang dipastikan mengeluarkan biaya yang lebih tinggi. Seringkali ditemukan pada pembangunan jalan di Papua, dalam satu lajur tidak sampai ratusan kilo ada perubahan formasi dari tanah keras ke tanah lunak, gambut dan rawa. Kondisi ini yang menyebabkan perkiraan biaya pembangunan jalan di wilayah Papua selalu bisa *over estimated*. Banyaknya sungai juga menjadi permasalahan tersendiri, karena pembangunan jalan harus dihubungkan juga dengan banyaknya jembatan yang dibangun di atas sungai, yang akhirnya membutuhkan biaya yang lebih besar.

2.1.1.4 Klimatologi

Iklim Papua termasuk dalam iklim hutan hujan tropis (*tropical rain forest*), yang dipengaruhi oleh musim kemarau, hujan, dan angin Muson yang menyebabkan Papua kaya dengan flora dan fauna khas hutan hujan tropis. Secara umum, musim kemarau di Papua terjadi di Bulan Juni-September, sedangkan musim hujan terjadi pada Bulan Desember-Maret, dengan masa peralihan pada Bulan April-Mei dan Bulan Oktober-November. Terdapat 32,4% tanah di wilayah Papua berada di kelas kemiringan di atas 40° dan rawa-rawa yang luas terutama di sepanjang pesisir pantai Selatan Papua yang terbentang hingga ke hulu sungai-sungai pedalaman. Curah hujan di Provinsi Papua cukup tinggi. Data curah hujan dan hari hujan dari berbagai stasiun lima tahun terakhir menunjukkan angka merata di hampir seluruh wilayah di provinsi Papua. Terdapat kecenderungan jumlah curah hujan meningkat sejalan dengan peningkatan ketinggian tempat. Pola penyebaran curah hujan menunjukkan adanya variasi antar wilayah, dari curah hujan sedang (1750 mm), tinggi (2500-4000mm), hingga sangat tinggi (>4000mm), secara umum dapat dikatakan tinggi.

Gambar 2.4
Grafik Intensitas Curah Hujan



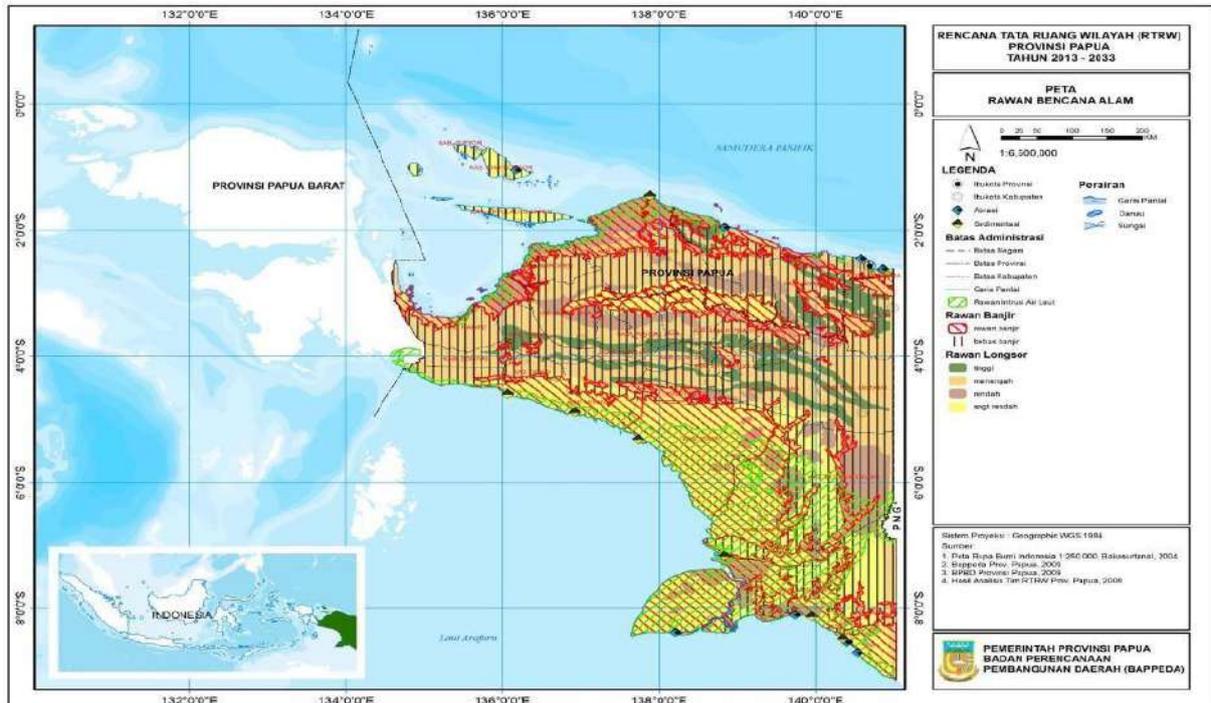
Sumber : Laporan BMKG, 2019

Dari grafik nampak bahwa curah hujan tinggi terjadi pada bulan Nopember-Maret sedangkan curah hujan rendah terjadi pada bulan Agustus. Oleh karena diperlukan perencanaan yang baik untuk mengantisipasi dua kondisi tersebut.

Selain memiliki potensi yang menguntungkan, curah hujan yang tinggi juga dapat memberikan permasalahan bagi bidang pertanian, perhubungan, infrastruktur jalan, dan sebagainya.

Gambar 2.5

Peta Rawan Bencana Alam



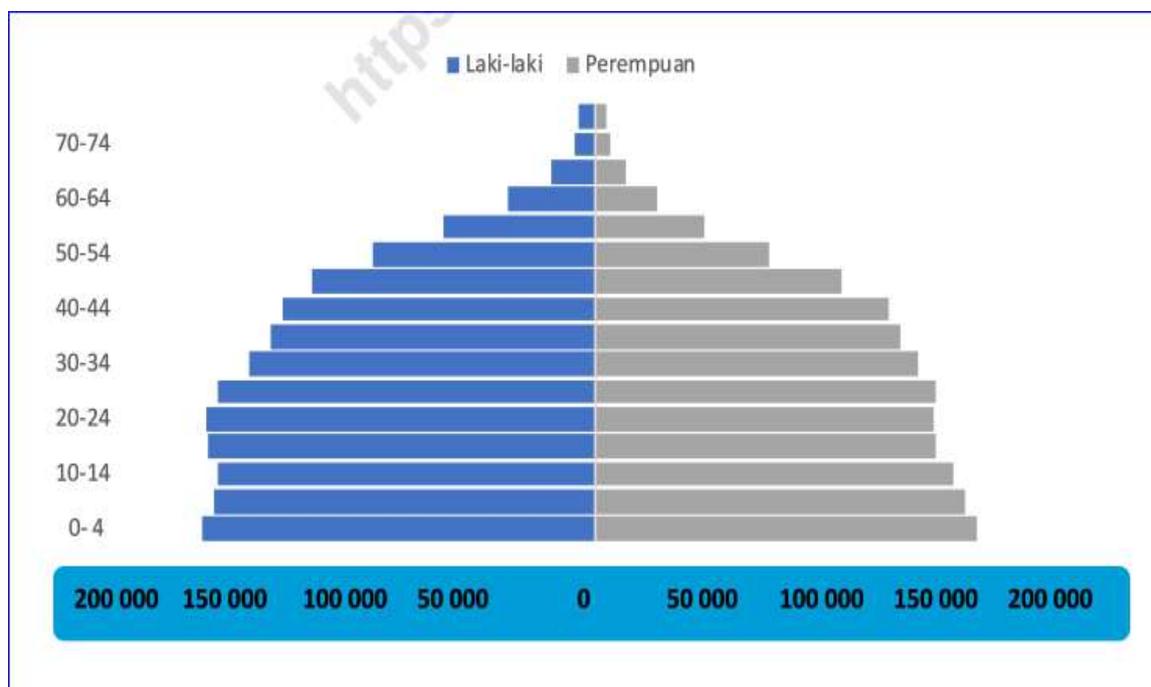
Dampak langsung dari curah hujan ada yang dirasakan seketika, dan ada yang dirasakan secara lambat. Dampak langsung seketika, misalnya curah hujan yang tinggi atau terus menerus dapat menimbulkan tanah longsor saat itu. Kondisi ini dapat dilihat sering terjadi di daerah-daerah pegunungan seperti di Yalimo, Lanni Jaya, Puncak Jaya, dan sebagainya.

Suhu udara di Provinsi Papua, sangat variatif. Pada daerah pegunungan dengan variasi ketinggian wilayah yang beragam memiliki suhu udara minimum 15°C dan daerah pesisir dan landai suhu maksimal mencapai 33°C. Kelembaban udara rata-rata yaitu 78-85% dan durasi penyinaran matahari di Provinsi Papua berada pada level 35-68% dengan tekanan udara rata-rata 1.008 mbs.

2.1.1.5 Demografi

Berdasarkan bentuk piramida penduduk yang ekspansif mencirikan struktur penduduk di Provinsi Papua selama ini adalah struktur penduduk muda. Baik itu di tahun 2013 maupun 2017 bentuk piramida penduduk Provinsi Papua kurang signifikan mengalami perubahan. Lihat Gambar 2.9 berikut ini.

Gambar 2.6
Piramida Penduduk Provinsi Papua Tahun 2019



Sumber: BPS Provinsi Papua, 2018

Menurut komposisi penduduk berdasarkan kelompok umurnya, sebagian besar penduduk Papua berada dalam kelompok umur muda. Hal ini ditunjukkan dari bentuk piramida penduduk Papua yang termasuk dalam kategori ekspansif (piramida penduduk muda) yang mengindikasikan cukup tingginya tingkat kelahiran dan pertumbuhan penduduk di Papua.

Dasar piramida yang cukup lebar menunjukkan relatif besarnya rasio ketergantungan penduduk muda, sementara puncak piramida yang menciut tajam menunjukkan rendahnya rasio ketergantungan penduduk tua. Rasio ketergantungan menunjukkan beban atau banyaknya penduduk usia nonproduktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas) yang harus ditanggung secara ekonomi oleh penduduk usia produktif (15-64 tahun). Secara umum, rasio ketergantungan di Papua tahun 2019 sebesar 44,32 yang berarti untuk setiap 100 penduduk usia produktif menanggung beban sekitar 45 penduduk usia nonproduktif. Selama hampir dua dekade terakhir (1999-2018) kondisi kesejahteraan masyarakat Papua kian membaik. Tercatat persentase penduduk

miskin menurun secara signifikan sebesar 27,32 persen poin dari 54,75 persen pada Maret 2018 menjadi 27,43 pada September 2018.

Gambar 2.7
Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk



Sumber: BPS Provinsi Papua, 2016 (data diolah)

Berdasarkan jenis kelaminnya, jumlah penduduk laki-laki di Provinsi Papua lebih besar dibanding jumlah penduduk perempuan (lihat Gambar 2.14). Jumlah penduduk laki-laki tahun 2013 tercatat 1.603.158 jiwa, dan meningkat menjadi 1.718.513 jiwa pada tahun 2017. Sementara jumlah penduduk perempuan pada tahun 2013 sebesar 1.429.330 jiwa, dan meningkat menjadi 1.546.689 jiwa pada tahun 2016. Hal ini menyebabkan angka Rasio Sex menjadi lebih besar dari 100, namun mempunyai kecenderungan angka yang relative menurun. Tahun 2013 angka Rasio Sex mencapai 112,16 dan menurun menjadi 111,11 di tahun 2017.

Tabel. 2.3.
Keadaan Penduduk di Provinsi Papua Tahun 2018

Wilayah Adat	Kabupaten/ Kota	Jumlah Penduduk 2018	Kepadatan 2018 (jiwa/km ²)	Pertumbuhan 2013-2018 (%)	Rasio Sex (Laki-laki per 100 perempuan)
Anim Ha	Merauke	223.389	4,76	1,56	105,02
	Boven Digoel	66.209	2,75	2,32	116,82
	Mappi	94.671	4,30	1,84	100,96
	Asmat	92.909	3,87	2,25	104,03

Wilayah Adat	Kabupaten/ Kota	Jumlah Penduduk 2018	Kepadatan 2018 (jiwa/km ²)	Pertumbuhan 2013-2018 (%)	Rasio Sex (Laki-laki per 100 perempuan)
	Total/Rata-rata	477.178	3,81	1,99	106,71
La Pago	Jayawijaya	212.811	91,29	1,18	105,40
	PuncakJaya	123.591	50,52	2,49	124,06
	Yahukimo	187.021	12,42	1,66	105,00
	Peg. Bintang	73.473	5,01	1,47	107,21
	Tolikara	136.576	22,21	2,17	118,91
	Nduga	97.012	16,65	3,09	123,99
	Lanny Jaya	176.687	51,37	2,34	114,66
	Mamb. Tengah	47.487	14,03	2,70	113,75
	Yalimo	60.822	16,62	2,59	114,13
	Puncak	107.822	19,19	1,92	109,78
	Total/Rata-rata	1.223.302	29,93	2,16	113,69
Mee Pago	Nabire	145.101	31,89	1,39	112,80
	Paniai	170.193	8,23	1,35	107,83
	Mimika	210.413	91,47	1,74	128,47
	Dogiyai	94.997	21,01	1,55	98,26
	Intan Jaya	48.318	5,18	2,72	100,57
	Deiyai	72.206	31,04	2,07	105,10
	Total/Rata-rata	741.228	31,47	1,80	108,84
Saireri	Kep. Yapen	95.007	19,25	1,88	105,70
	Biak Numfor	144.697	11,12	1,73	107,00
	Waropen	29.480	5,48	2,31	106,11
	Supiori	19.104	30,12	3,00	103,41
	Total/Rata-rata	288.288	16,49	2,23	105,55
Mamta	Jayapura	125.975	8,75	1,48	111,13
	Sarmi	38.210	2,74	1,85	114,48
	Keerom	55.018	6,10	1,53	115,46
	Mamb. Raya	22.313	0,80	3,06	104,35
	Kota Jayapura	293.690	309,02	1,89	115,98
	Total/Rata-rata	535.206	65,48	1,96	112,28
Provinsi Papua		3.265.202	10,31	1,87	111,11

Sumber : BPS Provinsi Papua, 2018 (data diolah)

Walaupun kepadatan penduduknya rendah, akan tetapi laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Mamberamo Raya selama tahun 2013-2017 terlihat paling tinggi di Provinsi Papua bersama dengan Kabupaten Nduga. Laju pertumbuhan penduduk di

Mamberamo Raya dan Nduga berkisar diantara 3,06-3,09% per tahun. Sedangkan pertumbuhan yang terendah di Kabupaten Jayawijaya hanya sebesar 1,18% per tahun untuk periode yang sama.

Jika diperhatikan pada perbandingan antara penduduk laki-laki dengan perempuan, terlihat di seluruh kabupaten/kota wilayah Papua mempunyai angka Rasio Sex di atas 100, terkecuali Kabupaten Dogiyai yang memiliki Rasio Sex di bawah 100 yakni 98,26 laki-laki per 100 perempuan, yang mengindikasikan bahwa diantara jumlah penduduk perempuan sebanyak 100 jiwa terdapat penduduk laki-laki sebanyak 98 jiwa. Dengan kata lain jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan penduduk laki-laki. Sementara daerah dengan angka rasio sex yang tertinggi adalah Kabupaten Nduga mencapai 123.99 laki-laki per 100 perempuan.

Ditinjau berdasarkan wilayah adat, diketahui bahwa wilayah yang paling banyak jumlah penduduknya adalah La Pago yakni sebanyak 1.223.302 jiwa, dengan tingkat pertumbuhannya sekitar 2,16% per tahun selama periode 2013-2017, serta kepadatan penduduk mencapai 29,93 per km², dan angka Rasio Sex sebesar 13,69 laki-laki per 100 perempuan. Adapun wilayah adat yang memiliki pertumbuhan penduduk paling tinggi adalah Saireri (2,23% per tahun), dengan total penduduk 288.288 jiwa yang terindikasi paling rendah untuk seluruh wilayah pembangunan. Wilayah Mamta dapat dikatakan merupakan wilayah pembangunan yang paling padat penduduknya, rata-rata sekitar 65.48 jiwa per km², namun dengan pertumbuhannya yang paling rendah bersama wilayah Mee Pago sebesar 1,96% per tahun.

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1 Pertumbuhan PDRB

1. PDRB Menurut Lapangan Usaha

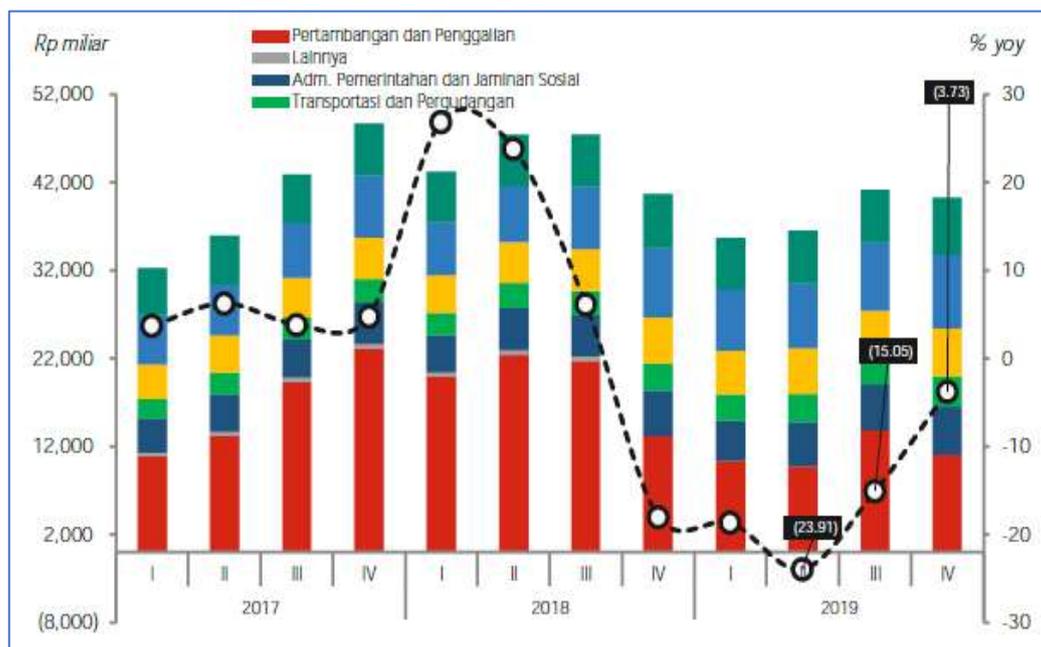
Ekonomi Papua triwulan III-2019 mengalami kontraksi -15,11 persen (y on y). Kontraksi pertumbuhan ini disebabkan oleh lapangan usaha pertambangan dan penggalian mengalami penurunan sebesar -38,31 persen akibat turunnya bijih logam PT. Freeport di Papua.

Pertumbuhan ekonomi triwulan III-2019 (q to q) mengalami pertumbuhan cukup tinggi sebesar 3,90 persen. Adanya beberapa event festival budaya daerah dan tahun ajaran baru pada triwulan III ini menyebabkan hampir seluruh lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif.

Lapangan usaha yang mengalami kontraksi pertumbuhan selama triwulan III-2019 adalah lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar -0,05 persen; lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar -0,05 persen dan Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar -0,02 persen.

Gambar 2.8

Laju Pertumbuhan dan serta Distribusi PDRB dengan Pertambangan dan Penggalian Beberapa Lapangan Usaha Triwulan IV-2019



Sumber Data: Indikator Penting Provinsi Papua, BPS Papua 2019

Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Papua triwulan III-2019 (y-on-y), Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian memiliki sumber pertumbuhan tertinggi jauh di atas lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar

Nilai PDRB per kapita Papua pada triwulan III-2019 sebesar Rp 14,84 juta, naik dibandingkan triwulan lalu yang sebesar Rp 13,40 juta atau naik sebesar 10,72 persen. Jika dilihat tanpa pertambahan dan penggalan, PDRB per kapita triwulan III-2019 sebesar Rp 10,77 juta, juga menunjukkan peningkatan dari triwulan II-2019 yang senilai Rp 10,54 juta atau meningkat sebesar 2,24 persen. 0,70 persen; Konstruksi sebesar 0,54 persen; Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 0,34 persen; Transportasi dan Pergudangan sebesar 0,31 persen; dan Informasi dan Komunikasi sebesar 0,19 persen.

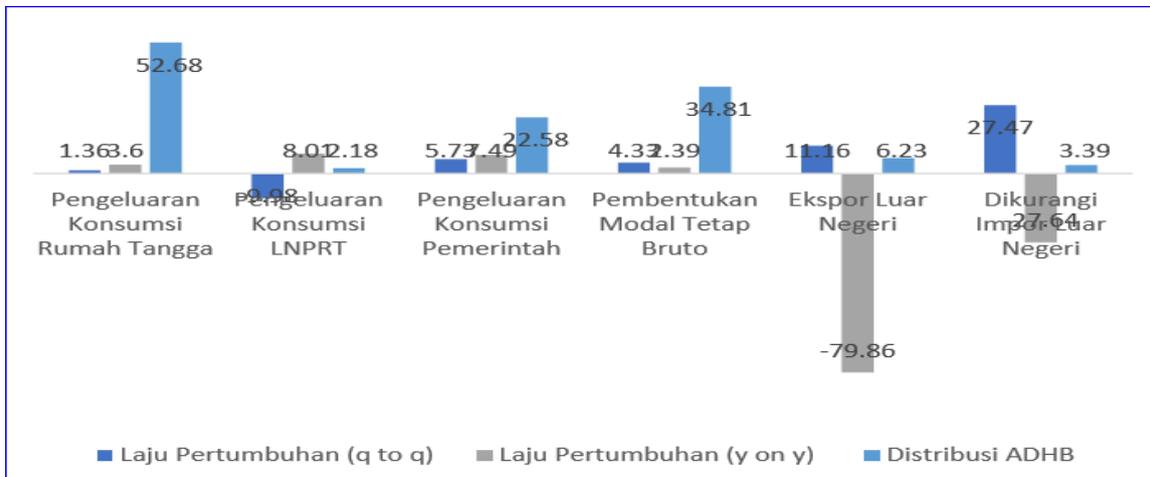
2. PDRB Menurut Pengeluaran

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi triwulan III-2019 mengalami kontraksi sebesar -15,11 persen. Kontraksi pertumbuhan ekonomi terdalam terjadi pada komponen Ekspor Luar Negeri sebesar -79,86 persen.

Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi triwulan III-2019 (y-on-y), Komponen PK-RT merupakan komponen dengan sumber pertumbuhan tertinggi, yakni sebesar 1,34 persen; diikuti Komponen PK-P sebesar 1,15 persen; dan Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto sebesar 0,61 persen. Sementara sumber pertumbuhan ekonomi dari komponen lainnya berada dibawah 0,50 persen. Ekonomi Papua Triwulan III-2019 jika dibandingkan Triwulan II-2019 (q to q) tumbuh sebesar 13,90 persen. Pertumbuhan tersebut terjadi pada komponen Impor Luar Negeri sebesar 27,47 persen, kemudian Ekspor Luar Negeri sebesar 11,16 persen, PK-P sebesar 5,73 persen, komponen PMTB sebesar 4,33 persen dan Komponen PK-RT sebesar 1,36 persen.

Gambar 2.9

Laju Pertumbuhan dan serta Distribusi PDRB Menurut Pengeluaran Triwulan III-2019 Provinsi Papua



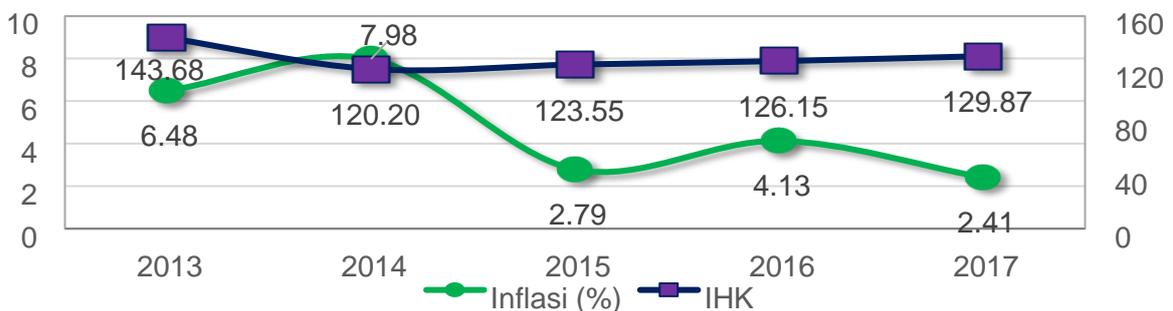
Sumber Data: Indikator Penting Provinsi Papua, BPS Papua 2019

2.1.2.2 Laju Inflasi

Kenaikan harga-harga di Provinsi Papua sepanjang tahun 2013-2017 cenderung terkendali. Meskipun sempat mengalami kenaikan tinggi di tahun 2014, namun untuk tahun 2015-2017 berikutnya terus mengalami penurunan, hingga mencapai titik terendah di tahun 2017 sebesar 2,41%. Kondisi ini mengindikasikan bahwa Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Papua yang dimotori oleh Bank Indonesia berperan efektif sehingga mampu mengendalikan inflasi.

Gambar 2.10

Perkembangan Indeks Harga Konsumen dan Inflasi

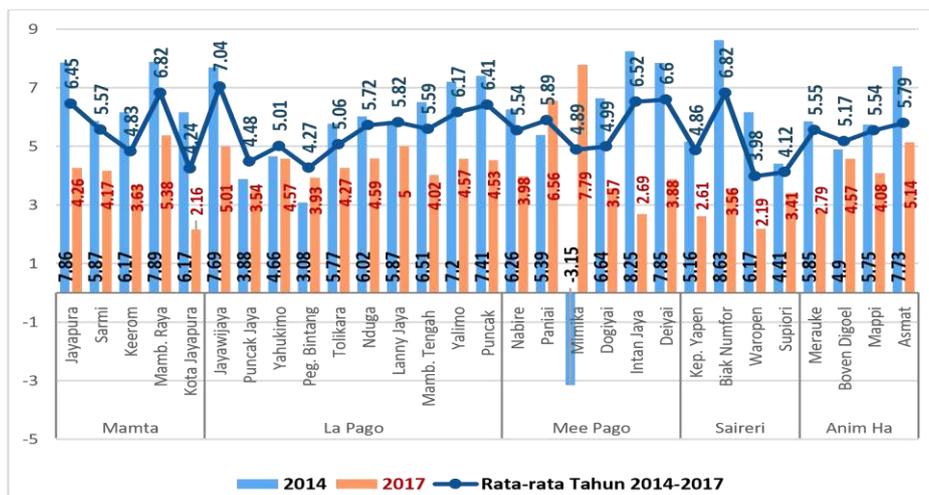


Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Papua, 2018 (diolah)

Laju inflasi dapat menjadi tolak ukur bagi kemampuan finansial daerah dan kemampuan daya beli masyarakat. Laju inflasi di berbagai wilayah Papua dapat dikatakan cukup terkendali karena bergerak diantara 3,98% hingga 7,04% (lihat Gambar 2.18). Inflasi tertinggi di wilayah adat Mamta tercatat di Mamberamo Raya sebesar 6,82% per tahun sepanjang periode 2014-2017. Sedangkan untuk La Pago di Jayawijaya sebesar 7,04% per tahun. Kemudian di Mee Pago di Intan Jaya sebesar 6,52% per tahun, untuk Saireri di Biak Numfor sebesar 6,82% per tahun, dan di Anim Ha pada Kabupaten Asmat sebesar 5,79% per tahun. Beberapa faktor yang menyebabkan kenaikan harga yang cukup tinggi di beberapa daerah (inflasi 5-7%) antara lain masih besarnya ketergantungan konsumsi pangan dari luar daerah (terutama beras), sulitnya akses transportasi perdagangan, tingginya harga BBM dan faktor stabilitas sosial yang berpengaruh pada tingkat kelancaran distribusi barang ke berbagai daerah pegunungan dan dataran rendah sulit akses.

Gambar 2.11

Laju Inflasi Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Berdasarkan Angka Deflator Tahun 2014-2017 (%)

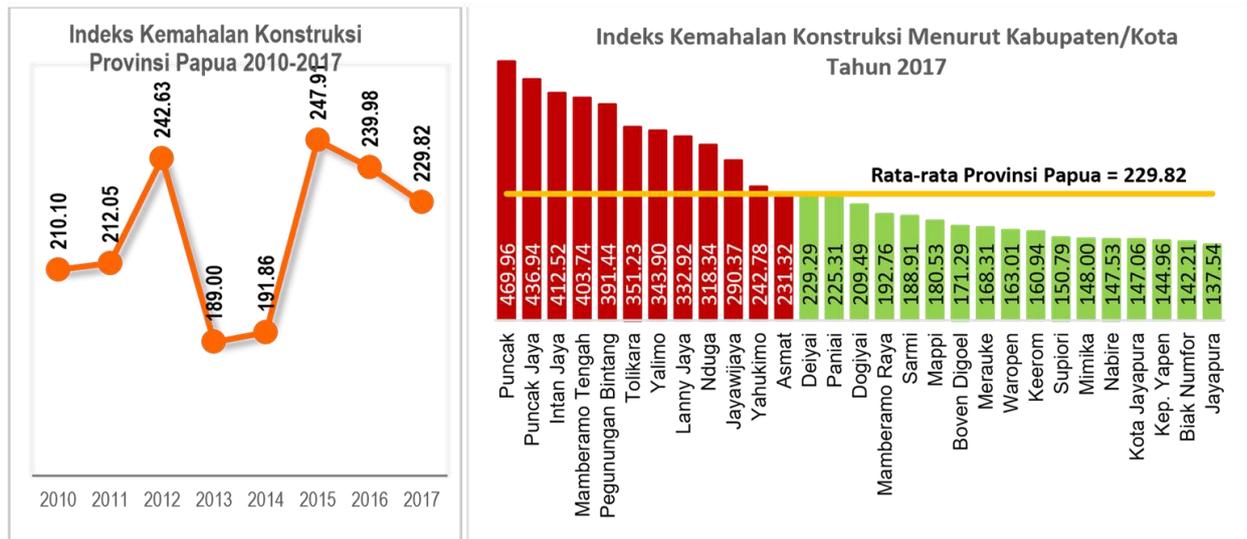


Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Papua, 2018 (data diolah)

Selain inflasi, permasalahan harga yang juga signifikan mempengaruhi kemiskinan di Papua selama ini adalah Tingkat Kemahalan Harga. Dalam Gambar 2.16 terlihat bahwa tingkat kemahalan harga yang direpresentasikan dengan IKK (Indeks

Kemahalan Kontruksi) sangat tinggi. Ada 15 kabupaten yang mempunyai IKK di atas 200%.

Gambar 2.12
Tingkat Kemahalan Provinsi Papua



Sumber: BPS RI dan BPS Papua, 2018 (data diolah)

Sebagian besar daerah kabupaten yang ada wilayah Papua, tampaknya belum begitu optimal untuk menekan tingkat kemahalan harga. Indikasinya dapat diperhatikan pada IKK (Indeks Kemahalan Kontruksi) setiap daerah di Papua yang semuanya di atas 100 poin, dimana ada 15 kabupaten yang mempunyai IKK di atas 200 poin, dengan IKK yang tertinggi karena sudah di atas 300 point yaitu Kabupaten Puncak, Puncak Jaya, Intan Jaya, Mamberamo Tengah, Pegunungan Bintang, Tolikara, Lanny Jaya, dan Nduga. Kebijakan subsidi untuk menekan tingkat kemahalan harga yang telah dijalankan belum efektif karena berfokus pada sisi konsumsi, yang belum diikuti dengan peningkatan kemampuan daerah untuk menghasilkan sendiri barang-barang produksi dan sekaligus meningkatkan pendapatan produsen lokal.

2.1.2.3 PDRB Perkapita

Secara makro kinerja ekonomi Provinsi Papua melalui upaya menaikkan PDRB per kapita menunjukkan kecenderungan yang cukup baik. Terlihat bahwa capaian PDRB perkapita provinsi Papua secara umum mengalami peningkatan positif. Nilai PDRB per kapita Papua pada Tahun 2019 sebesar Rp 56,14 juta, menurun jika dibandingkan tahun lalu yang sebesar Rp 63,43 juta atau turun sebesar -11,50 persen. Penurunan ini disebabkan terutama oleh lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian yang selama tahun 2019 mengalami penurunan produksi. Proporsi penduduk yang bekerja pada Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian sangat kecil, maka jika ingin melihat gambaran PDRB per Kapita masyarakat Papua secara umum lebih baik dengan melihat PDRB tanpa Pertambangan dan Penggalian. Jika tanpa pertambangan dan penggalian, PDRB per kapita Tahun 2019 sebesar Rp 42,88 juta, menunjukkan adanya peningkatan dari tahun 2018 yang senilai Rp 40,15 juta yaitu sebesar 6,79 persen.

Gambar 2.13

PDRB Per Kapita Tahun 2010-2019 (juta Rp)



Sumber: BPS Provinsi Papua, 2019

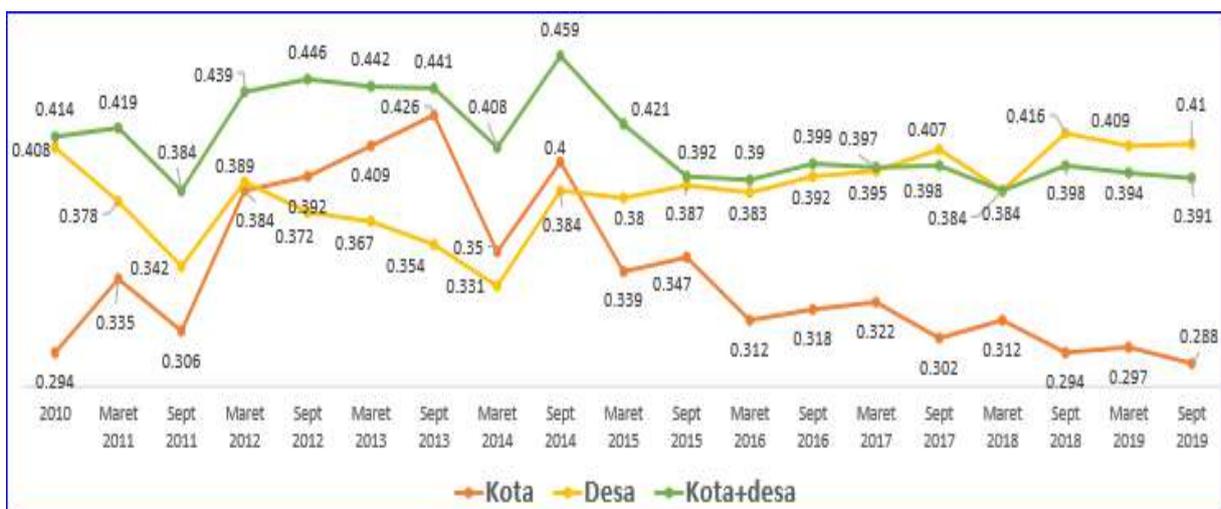
2.1.2.4 Indeks Gini

Secara umum, gini ratio di Papua selama kurun waktu 2010-2018 berfluktuasi. Tahun 2010, gini ratio Papua tercatat sebesar 0,414 dan meningkat menjadi 0,419 pada Maret 2011. Pada periode Maret 2012 hingga September 2014, nilai Gini Ratio berfluktuasi dan mencapai angka tertinggi pada September 2014 yaitu

sebesar 0,459. Pada Maret 2015 Gini Ratio mulai turun menjadi 0,421 dan terus menurun hingga mencapai angka 0,394 pada Maret 2019. Dalam rentang tahun 2010-2019. Secara umum menurut BPS 2020, nilai Gini Ratio Provinsi Papua mengalami penurunan sebesar 0,003 poin. Berdasarkan daerah tempat tinggal, *Gini Ratio* di daerah perkotaan pada September 2019 adalah sebesar 0,288 mengalami penurunan sebesar 0,006 poin dibanding September 2018 yang sebesar 0,294 dan menurun sebesar 0,009 poin dari Maret 2019 yang sebesar 0,297. Untuk daerah perdesaan, *Gini Ratio* pada September 2019 tercatat sebesar 0,410, turun 0,006 poin dibandingkan dengan kondisi September 2018 yang sebesar 0,416 dan naik sebesar 0,001 poin dari Maret 2019 yang sebesar 0,409. Artinya perubahannya baik pendapatan maupun wilayah perubahannya sangat kecil dalam upaya mempersempit tingkat kesenjangan. Selain kesenjangan pendapatan dan wilayah gini ratio juga bisa ditunjukkan dari klasifikasi distribusi pengeluaran menurut kelompok. Pada tahun 2019, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 15,35 persen. Artinya pengeluaran penduduk berada pada kategori tingkat ketimpangan sedang. Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 21,63 persen yang artinya berada pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 15,37 persen, yang berarti masuk dalam kategori ketimpangan sedang.

Gambar 2.14

Perkembangan Rasio Gini di Provinsi Papua Tahun 2010- Sept 2017



Sumber: BPS Provinsi Papua, 2018 (data diolah)

Apabila dilihat berdasarkan wilayah adat, Anim Ha merupakan wilayah adat yang cenderung mengalami perbaikan ketimpangan pendapatan sepanjang tahun 2014-2018. Sedangkan wilayah lainnya cenderung mengalami fluktuasi ketimpangan pendapatan.

Tabel. 2.4.
Gini Rasio Kabupaten/Kota Tahun 2014-2018

Wiayah Adat	Kabupaten	Rasio Gini Menurut Kabupaten/Kota					Rata- Rata	
		2014	2015	2016	2017	2018		
Anim Ha	Merauke	0.45	0.41	0.34	0.37	0.37	0.39	0.35
	Boven Digoel	0.35	0.36	0.33	0.35	0.34	0.35	
	Mappi	0.3	0.34	0.44	0.39	0.32	0.36	
	Asmat	0.39	0.34	0.31	0.23	0.33	0.32	
Mamta	Jayapura	0.32	0.39	0.31	0.28	0.26	0.31	0.33
	Sarmi	0.43	0.35	0.35	0.4	0.38	0.38	
	Keerom	0.31	0.36	0.35	0.36	0.36	0.35	
	Kota Jayapura	0.35	0.35	0.28	0.32	0.31	0.32	
	Mamberamo Raya	0.27	0.23	0.3	0.2	0.4	0.28	
Saereri	Biak Numfor	0.39	0.39	0.36	0.36	0.38	0.38	0.33
	Kepulauan Yapen	0.36	0.37	0.32	0.33	0.37	0.35	
	Supiori	0.24	0.28	0.31	0.25	0.32	0.28	
	Waropen	0.28	0.33	0.31	0.34	0.28	0.31	
La Pago	Jayawijaya	0.34	0.4	0.34	0.33	0.3	0.34	0.27
	Yahukimo	0.3	0.26	0.25	0.33	0.34	0.30	
	Pegunungan Bintang	0.22	0.27	0.29	0.34	0.33	0.29	
	Tolikara	0.22	0.37	0.38	0.3	0.27	0.31	
	Puncak Jaya	0.27	0.34	0.15	0.21	0.3	0.25	
	Lanny Jaya	0.22	0.3	0.28	0.31	0.31	0.28	
	Mamberamo Tengah	0.26	0.27	0.27	0.23	0.29	0.26	
	Yalimo	0.21	0.14	0.19	0.25	0.33	0.22	
	Puncak	0.25	0.33	0.19	0.18	0.15	0.22	
Nduga	0.22	-	0.25	0.21	0.2	0.22		
Mee pago	Nabire	0.35	0.39	0.3	0.38	0.33	0.35	0.30
	Paniai	0.25	0.32	0.46	0.46	0.33	0.36	
	Mimika	0.34	0.33	0.29	0.33	0.29	0.32	
	Dogiyai	0.25	0.2	0.25	0.22	0.27	0.24	
	Intan Jaya	0.38	0.27	0.29	0.26	0.25	0.29	
	Deiyai	0.26	0.28	0.25	0.24	0.19	0.24	
PROVINSI PAPUA		0.41	0.42	0.38	0.39	0.37	0.39	

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2019

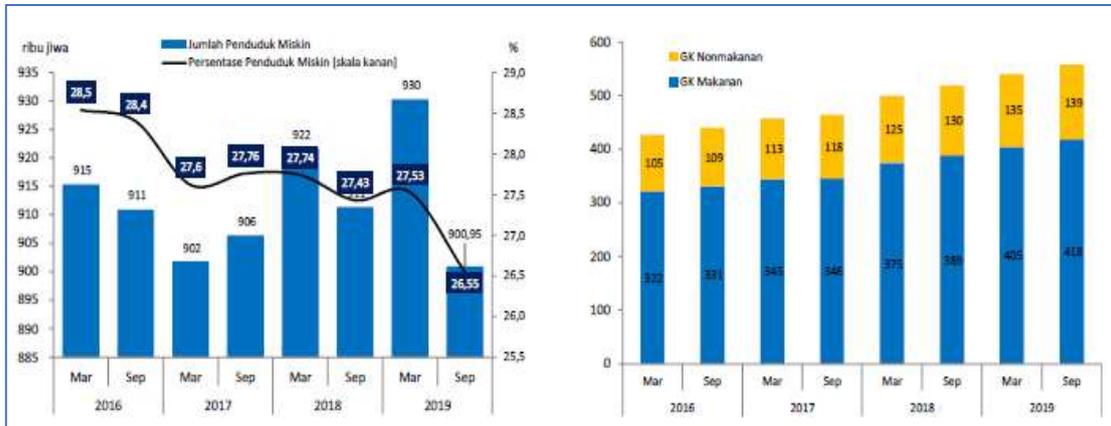
Sementara itu, Rata-rata Gini Rasio perwilayah adat, Anim Ha, memiliki ketimpangan yang lebih baik dari wilayah adat yang lain, yakni 0,35%, Mamta dan Saereri sama, yakni 0,33%, La Pago yang terendah, yakni 0,27% dan diikuti oleh Mee Pago.

Untuk Kabupaten/Kota, melihat tren perkembangan dari Tahu 2014-2018, maka secara keseluruhan mengalami fluktuasi, dimana gini Rasio tertinggi rata-rata tercatat di Kabupaten Merauke, yakni 0,39% dan terendah ada di beberapa Kabupaten, yakni Kabupaten Yalima, Puncak dan Nduga sebesar 0,22%.

2.1.2.5 Tingkat Kemiskinan

Persentase penduduk miskin di Papua selama enam bulan terakhir mengalami penurunan sebesar 0,98% poin yaitu dari 27,53% pada Maret 2019 menjadi 26,55% pada September 2019. Sementara itu untuk daerah perkotaan mengalami kenaikan sebanyak 0,27% poin menjadi 4,53% (4,26% pada Maret 2019) sedangkan perdesaan turun sebanyak 1,48% poin menjadi 35,36% (36,84% pada Maret 2019). Secara umum, pada periode Maret 2012-September 2019 tingkat kemiskinan mengalami penurunan baik dari sisi jumlah maupun persentase. Tercatat persentase penduduk miskin pada periode tersebut menurun secara sebesar 4,56% poin, yaitu dari 31,11% atau berjumlah 920,52 ribu jiwa pada Maret 2012 menjadi 26,55% atau 900,95 ribu jiwa pada September 2019. Persentase penduduk miskin di Papua selama enam bulan terakhir juga mengalami penurunan sebesar 0,98% poin yaitu dari 27,53% pada Maret 2019 menjadi 26,55% pada September 2019. Berbeda lagi jika dibandingkan dengan September 2018, terjadi penurunan 0,88 poin persen.

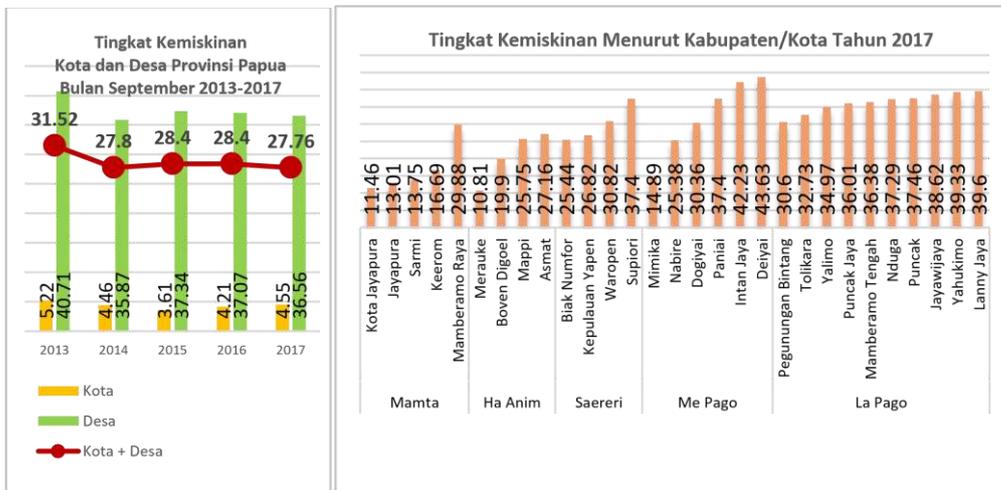
Gambar 2.15
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan
Maret 2018-Maret 2019



Sumber: BPS Papua, 2019 (data diolah)

Menurut kewilayahan, daerah yang paling miskin selama ini adalah di perdesaan. Sampai tahun 2017 (September) tercatat kemiskinan di perdesaan mencapai 36,56%, atau turun -0,51% dibandingkan tahun 2016. Sedangkan di perkotaan sebesar 4,55% yang juga turun dibandingkan tahun 2016.

Gambar 2.16
Tingkat Kemiskinan di Provinsi Papua (%)



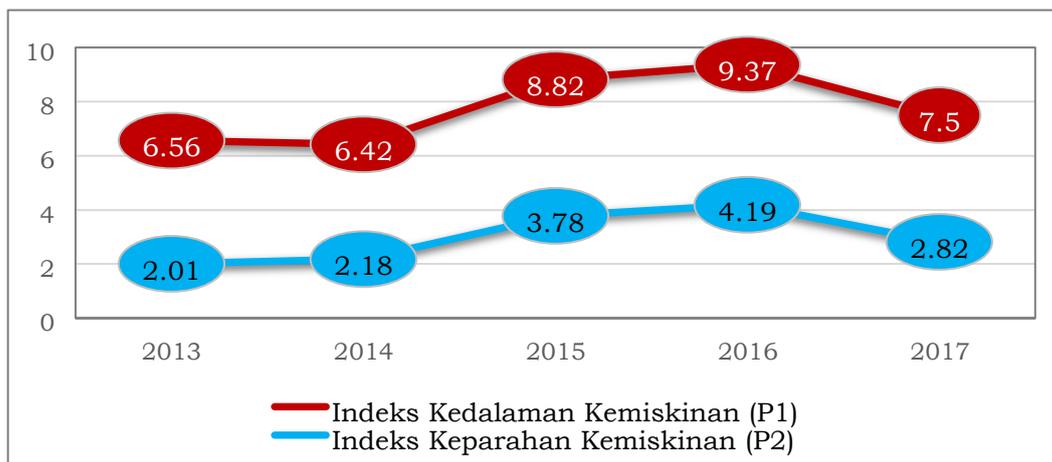
Sumber: BPS Provinsi Papua, 2018 (data diolah)

Secara kumulatif selama tahun 2017, jika dipilah berdasarkan kabupaten/kota, terlihat kabupaten Deiyai sebagai penyumbang terbesar kemiskinan

di Provinsi Papua (lihat Gambar 2.27). Tingkat kemiskinan di Kabupaten Deyiai adalah 43,63% yang masuk kawasan pembangunan Mee Pago. Posisi kedua terbesar adalah kabupaten Intan Jaya dengan angka 42,23% yang keduanya masuk kawasan pembangunan La Pago. Sedangkan kabupaten dengan tingkat kemiskinan terendah adalah kabupaten Merauke dengan angka 10,81% yang masuk kawasan pembangunan Mamta, yang diikuti oleh kota Jayapura dengan angka 11,46% dan kabupaten Jayapura dengan angka 13,01% yang keduanya masuk kawasan pembangunan Mamta. Jika diambil rata-ratanya per wilayah adat, dapat dikatakan bahwa wilayah La Pago mempunyai tingkat kemiskinan tertinggi di Papua yaitu sebesar 36,30%, menyusul wilayah Me Pago sebesar 32,32%, Saireri sebesar 30,12%, Ha Anim sebesar 20,91%, dan Mamta sebesar 16,96%.

Gambar 2.17

Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan Provinsi Papua (%)



Sumber: BPS Provinsi Papua, 2018 (data diolah)

Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, tingkat keberhasilan kebijakan pengentasan kemiskinan juga perlu diukur dari seberapa besar perubahan yang terjadi pada tingkat kedalaman (P1) dan keparahan (P2) dari kemiskinan. Dimana semakin tinggi nilai indeks P1 ini maka semakin besar rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, yang menggambarkan kehidupan ekonomi penduduk miskin semakin terpuruk. Berikutnya, semakin tinggi

angka indeks P2 maka sebaran pengeluaran di antara penduduk miskin itu semakin timpang dan sebaliknya.

Tingkat kedalaman kemiskinan di Provinsi Papua selama tahun 2013-2016 cenderung mengalami peningkatan yang cukup tinggi, rata-rata naik 2,81% per tahun. Kemudian menurun di tahun 2019 sebesar 6,37%, lebih rendah dibandingkan tahun 2013, sehingga rata-rata tingkat kedalaman kemiskinan di Provinsi Papua sepanjang tahun 2013-2019 fluktuatif tetap cenderung menurun. Demikian pula tren indeks keparahan kemiskinan.

2.1.2.6 Indeks Pembangunan Manusia

Kualitas pembangunan manusia di Provinsi Papua yang diindikasikan oleh IPM cenderung terus mengalami peningkatan, namun demikian masih dalam kategori IPM rendah, dan juga paling rendah di Indonesia. Dimana komponen pembentuk IPM yang paling cepat tumbuh selama ini adalah Harapan Lama Sekolah. Adapun untuk Angka Harapan Hidup, kontribusinya terhadap pertumbuhan IPM sangat rendah.

Tabel. 2.5.

Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Papua Tahun 2013-2017

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Angka Harapan Hidup (thn)	65,09	65,12	65,14	65,35	65,65
Harapan Lama Sekolah (thn)	9,95	10,23	10,54	10,83	11,05
Rata-Rata Lama Sekolah (thn)	5,99	6,15	6,27	6,52	6,65
Pengeluaran (Rp. ribu)	6.469	6.637	6.996	7.159	7.336
IPM	57,25	58,05	59,09	60,06	60,84
Rank IPM Papua Di Indonesia	34	34	34	34	34

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2019 (data diolah)

Angka Harapan Hidup (AHH), merupakan salah satu komponen dalam perhitungan IPM yang merefleksikan derajat kesehatan suatu masyarakat. Perkembangan AHH di provinsi Papua menunjukkan adanya peningkatan, namun berjalan lambat dan masih dibawah angka maksimum. Tahun 2015, Angka Harapan Hidup 65,09 tahun meningkat menjadi 65,65 tahun pada tahun 2019, dan masih belum mencapai angka maksimum 85 tahun.

Berdasarkan data capaian yang ada terlihat bahwa Angka Harapan Lama Sekolah maupun Angka Rata-rata Lama Sekolah masih jauh di bawah angka ideal dan bergerak sangat lambat. Meskipun demikian pergerakan kedua indikator tersebut sepanjang lima tahun ke arah yang lebih baik. Terlihat bahwa selama tahun 2015-2019, kenaikan rata-rata angka harapan lama sekolah mencapai 2.43 poin per tahun, sedangkan rata-rata lama sekolah sebesar 2.24 poin per tahunnya.

Adapun diskripsi peningkatan IPM dari 29 kabupaten/kota Tahun 2019 di Provinsi Papua, terdapat 1 (satu) yang kini masuk atau berada pada status "Sangat Tinggi" yaitu Kota Jayapura, sebesar 80,16. Sementara itu, ada 3 (tiga) kabupaten dengan status IPM "Tinggi" yaitu Kabupaten Jayapura, Biak Numfor, dan Mimika. Kabupaten dengan IPM berstatus "Sedang" sebanyak 8 (delapan) kabupaten yakni Merauke, Nabire, Kepulauan Yapen, Sarmi, Keerom, Waropen, Supiori dan Boven Digoel. Sementara itu, sebagian besar kabupaten berstatus "Rendah" sebanyak 17 kabupaten yakni Jayawijaya, Paniai, Puncak Jaya, Mappi, Asmat, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Tolikara, Lanny Jaya, Mamberamo Tengah, Yalimo, Puncak, Dogiyai, Intan Jaya, Deiyai, dan Mamberamo Raya, serta Nduga.

Kabupaten Nduga merupakan kabupaten dengan IPM terendah di Papua hanya sebesar 30,75. Dilihat menurut komponen pembentuk IPM, nilai setiap komponen Kabupaten Nduga menjadi yang paling rendah dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Papua. Nilai tiap komponen IPM tahun 2019 di Nduga yaitu: UHH saat lahir sebesar 55,12 tahun yang berarti tiap bayi yang baru lahir memiliki peluang untuk hidup hingga usia 55,12 tahun; HLS sebesar 3,29 tahun yang berarti anak-anak usia 7 tahun di Nduga memiliki peluang untuk bersekolah hanya selama 3,29 tahun atau hanya sampai kelas 3 SD; angka RLS sebesar 0,97 tahun yang berarti penduduk Nduga usia 25 tahun ke atas secara rata-rata hanya menempuh pendidikan 0,97 tahun atau tidak tamat kelas 1 SD; dan angka pengeluaran per kapita disesuaikan (harga konstan 2012) hanya Rp 4,18 juta per tahun. Kota Jayapura sebagai ibukota Provinsi Papua tercatat memiliki pembangunan manusia tertinggi dibandingkan kabupaten lainnya di Papua. Pada tahun 2019, IPM Kota Jayapura mencapai 80,16. Untuk dimensi pengetahuan dan dimensi standar hidup layak, Kota Jayapura juga menempati

posisi pertama dimana nilai untuk masing-masing indikatornya adalah HLS sebesar 15,00 tahun, RLS sebesar 11,55 tahun, dan pengeluaran per kapita disesuaikan (harga konstan 2012) mencapai Rp 15,18 juta per tahun. Kecuali untuk dimensi umur panjang dan hidup sehat, posisi pertama masih ditempati oleh Kabupaten Mimika dengan nilai UHH saat lahir mencapai 72,27 tahun.

Gambar 2.18

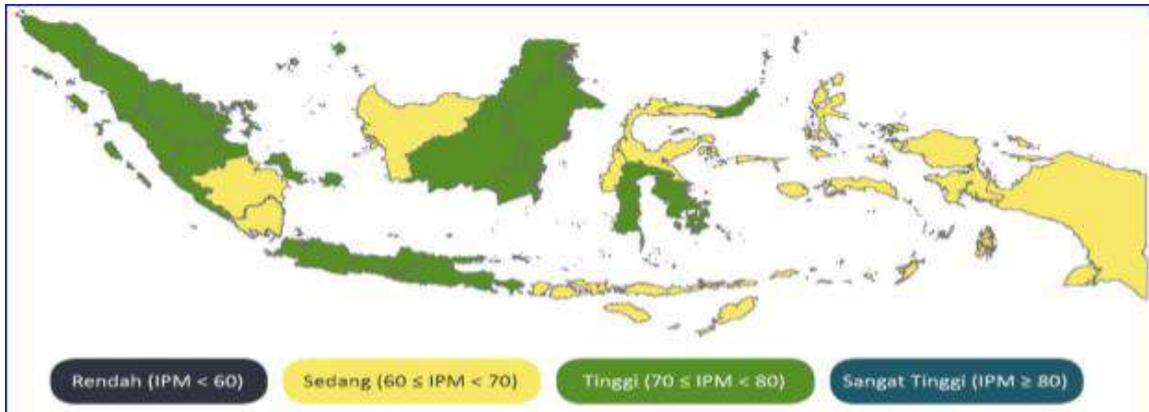
Indeks Pembangunan Manusia di Papua Tahun 2019



Sumber: BPS Provinsi Papua, 2019 (data diolah)

Gambar diatas memperlihatkan tampilan capaian IPM seluruh Kab/Kota di Provinsi Papua tahun 2019 yang dipetakan menurut warna. Warna hijau tua kategori sangat tinggi, warna ungu kategori tinggi, warna hijau kategori sedang dan warna kuning kategori rendah. Peningkatan IPM di tingkat provinsi juga tercermin pada level kabupaten/kota. Selama periode 2018 hingga 2019, seluruh kabupaten/kota di Papua mengalami kenaikan IPM. Kabupaten/kota dengan kemajuan pembangunan manusia paling cepat yaitu: Kabupaten Nduga (4,52 persen), Pegunungan Bintang (2,24 persen), dan Puncak (2,13 persen). Kemajuan pembangunan manusia di ketiga kabupaten tersebut didorong oleh peningkatan dimensi pendidikan. Secara nasional, peningkatan IPM tercermin pada level provinsi. Selama periode 2018 hingga 2019, seluruh provinsi mengalami peningkatan IPM. Pada periode ini, provinsi dengan kemajuan pembangunan manusia paling cepat yaitu: Provinsi Papua Barat (1,51 persen), Maluku Utara (1,39 persen), serta Nusa Tenggara Timur dan Papua yang memiliki pertumbuhan sama (1,30 persen).

Gambar 2.19
IPM Nasional menurut Provinsi dan Status Pembangunan Manusia
Tahun 2019

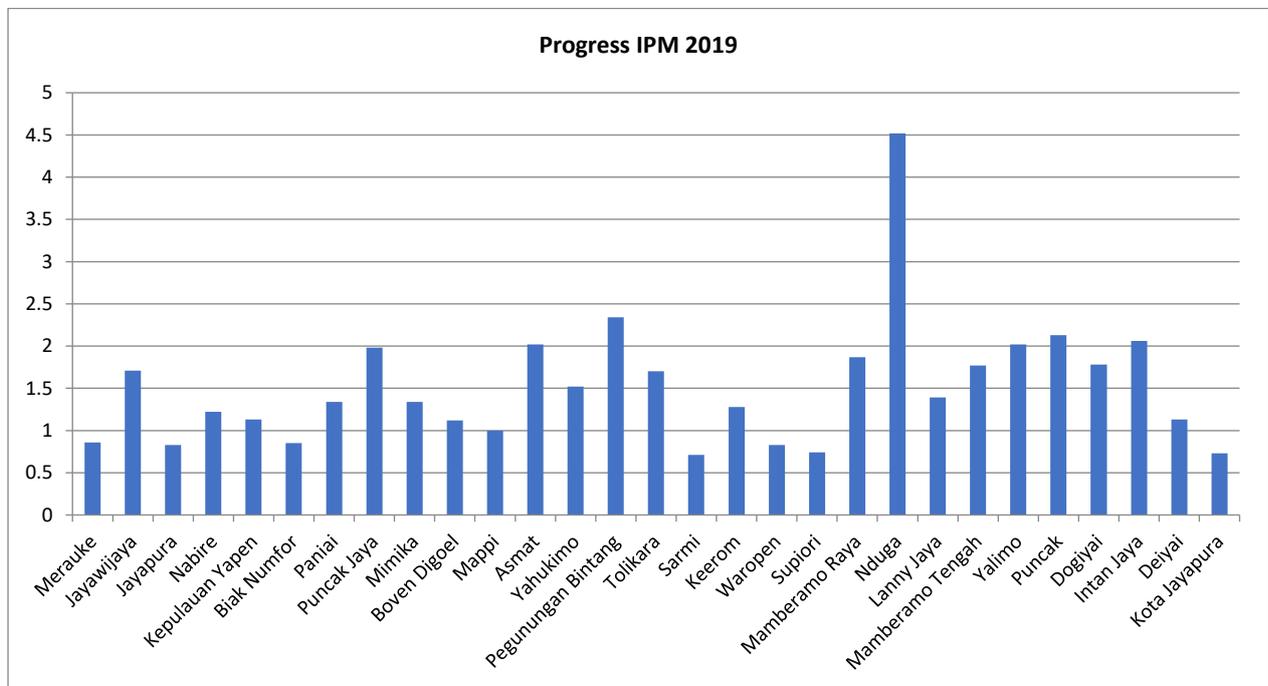


Sumber: BPS Papua, 2019

Dan selama tahun 2017-2019, Papua menjadi provinsi dengan kecepatan pertumbuhan IPM tertinggi se-Indonesia. Kondisi ini berdampak pada terjadi perubahan status pembangunan manusia Papua dari berstatus “rendah” menjadi berstatus “sedang”. Meski demikian urutannya tetap paling rendah dibandingkan provinsi lain di Indonesia, tingkat pertumbuhan IPM Papua dari diagram di bawah ini menunjukkan peningkatan yang pesat. Angka IPM Papua 60,84, naik 0,78 poin atau 1,30% di banding tahun sebelumnya. Dalam lima tahun terakhir, rata-rata pertumbuhan IPM Papua menunjukkan angka sebesar 0,90 point atau 1.57% per tahun. Angka tersebut merupakan yang tertinggi bila dibandingkan dengan capaian provinsi dengan IPM paling rendah seperti: Papua Barat (1,20%), NTB (1,13%), Kalimantan Barat (0,78%), Sulawesi Barat (1,10%), dan NTT (1,02) per tahun. Bahkan, capaian rata-rata pertumbuhan IPM Papua dalam lima tahun terakhir juga lebih tinggi bila dibandingkan secara nasional yang hanya sebesar 0,85% per tahun. Dengan capaian tersebut, bila dipertahankan diproyeksi dalam jangka waktu kurang dari 10 tahun IPM Papua akan melewati Papua Barat dan NTB yang masuk ke dalam lima provinsi dengan IPM level sedang. Bahkan 10 tahun setelahnya, IPM Papua diperkirakan akan melampaui empat provinsi lainnya dengan IPM antara 70-80 (IPM

tinggi) yaitu Kepulauan Riau, Banten, Kepulauan Bangka Belitung, dan Kalimantan Utara.

Gambar 2.20
Tingkat Pertumbuhan IPM di Provinsi Papua Tahun 2019



Sumber: Indikator Penting Provinsi Papua, BPS Provinsi Papua, 2019

2.1.2.7 Angka Melek Huruf

Angka melek huruf merupakan salah satu indikator yang sering digunakan untuk mengukur kondisi literasi suatu masyarakat disuatu daerah. Angka melek huruf ini merupakan salah satu komponen penentu tingkat kualitas pembangunan pendidikan di suatu daerah. Oleh karena itu Angka Melek huruf merupakan bagian dari indikator penting pembangunan daerah khususnya di bidang pendidikan. Provinsi Papua tampaknya kurang optimal untuk meningkatkan penduduk yang melek huruf sepanjang tahun 2015-2018.

Dalam tabel dibawah terlihat bahwa AMH (Angka Melek Huruf) Provinsi Papua pada tahun 2015 sebesar 87,11%, sampai dengan tahun 2018 meningkat menjadi 89,32%, dan pada tahun 2018 turun menjadi 88,44%, dimana ada beberapa kabupaten/kota di Papua yang mengalami fluktuasi dan Namun kalau dilihat per

kabupaten/kota di Provinsi Papua mengalami kenaikan yang signifikan dari tahun ke tahunnya, seperti pada tabel dibawah.

Tabel. 2.6.

Angka Melek Huruf (AMH) Penduduk Usia 15-24 Tahun Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2015-2018

Kabupaten	2015	2016	2017	2018
Merauke	97.67	100	100	99.88
Jayawijaya	86.38	81.41	92.79	92.01
Jayapura	99.77	99.78	100	98.99
Nabire	98.57	97.79	100	93.66
Kepulauan Yapen	100	97.8	100	97.7
Biak Numfor	99.49	100	100	99.85
Paniai	65.88	69.19	54.41	72.93
Puncak Jaya	74.66	80.82	80.65	89.59
Mimika	95.13	100	100	98.3
Boven Digoel	93.62	95.45	100	96.1
Mappi	92.41	92.19	91.85	95.96
Asmat	91.66	94.18	82.89	87.33
Yahukimo	65.85	80.87	58.49	79.19
Pegunungan Bintang	77.71	80.07	83.39	75.91
Tolikara	80.06	63.53	60.06	85.28
Sarmi	99.12	98.76	100	100
Keerom	96.03	93.95	100	97.17
Waropen	100	100	99.03	100
Supiori	98.38	99.4	100	99.52
Mamberamo Raya	94.06	100	96.81	97.1
Nduga	-	69.26	54.07	77.02
Lanny Jaya	81.25	71.77	100	74.4
Mamberamo Tengah	69.75	62.05	55.52	60.7
Yalimo	71.26	64.62	48.24	75.4
Puncak	58.27	63.55	54.13	64.9
Dogiyai	97.15	91.15	93.97	83.84
Intan Jaya	55.43	44.98	43.83	39.88
Deiyai	79.05	53.51	100	54.09
Kota Jayapura	100	99.93	100	100
Provinsi Papua	87.11	87.12	89.32	88.44

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2019 (data diolah)

Dari tabel diatas tampak jelas bahwa ada peningkatan yang signifikan dimana di tahun 2017 masih ada beberapa kabupaten yang mencapai AMH di bawah 70%. Dan

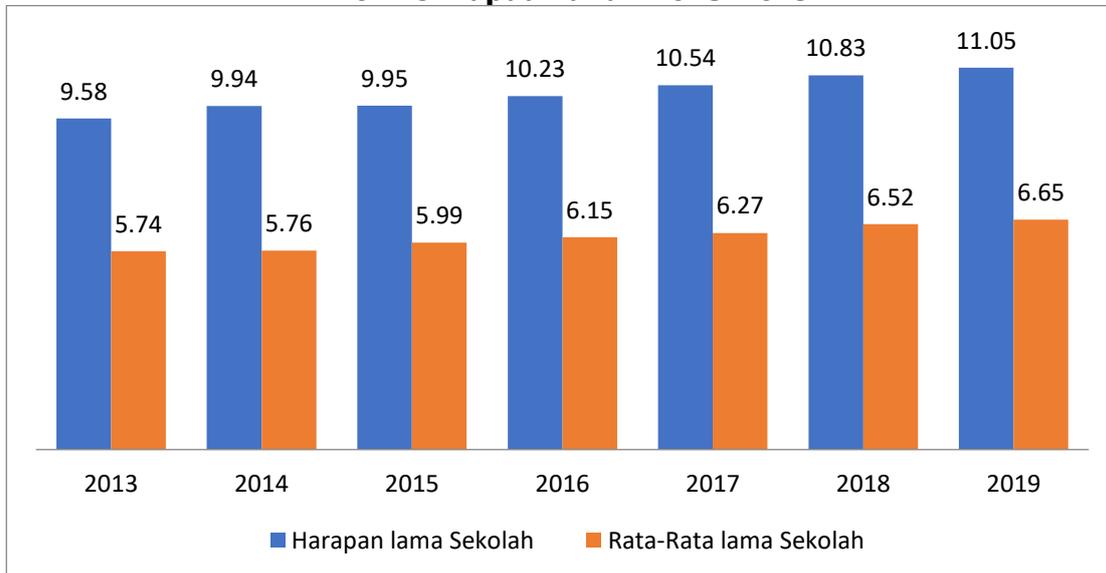
6 (enam) diantaranya dibawah 50% yaitu Kabupaten Nduga, Intan Jaya, Mamberamo Tengah, Yalimo, Puncak dan Paniai, namun di tahun 2018 hanya tinggal 1 kabupaten yakni Kabupaten Intan Jaya, dan yang tertinggi ada 2, yakni Kabupaten Sarmi dan Kota Jayapura, 100%, 10 kabupaten dengan rata-rata persentase 90%, 4 Kabupaten dengan rata-rata persentase 80%, 6 Kabupaten dengan rata-rata persentase 70%, 2 kabupaten dengan rata-rata persentase 60% dan 1 kabupaten dengan 50%.

2.1.2.8 Harapan dan Rata-Rata Lama Sekolah

Indikator penting capaian pembangunan pendidikan di daerah dapat dilihat dalam capaian Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Untuk menghitung Rata-rata Lama Sekolah dibutuhkan informasi tentang partisipasi sekolah, jenjang dan jenis pendidikan tertinggi yang pernah/sedang diduduki, ijazah tertinggi yang dimiliki, serta tingkat/kelas tertinggi yang pernah/sedang diduduki. Data ini digunakan untuk melihat akses penduduk dalam hal mengenyam pendidikan formal.

Gambar 2.21

**Harapan dan Rata-Rata Lama Sekolah
Provinsi Papua Tahun 2013-2019**



Sumber: BPS Provinsi Papua, 2017 (data diolah)

Akselerasi percepatan pembangunan pendidikan bila diukur dari pertumbuhan indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah menunjukkan Angka Harapan Lama Sekolah bertumbuh 2.48 tahun atau rata-rata 2,98% pertahun. Pada

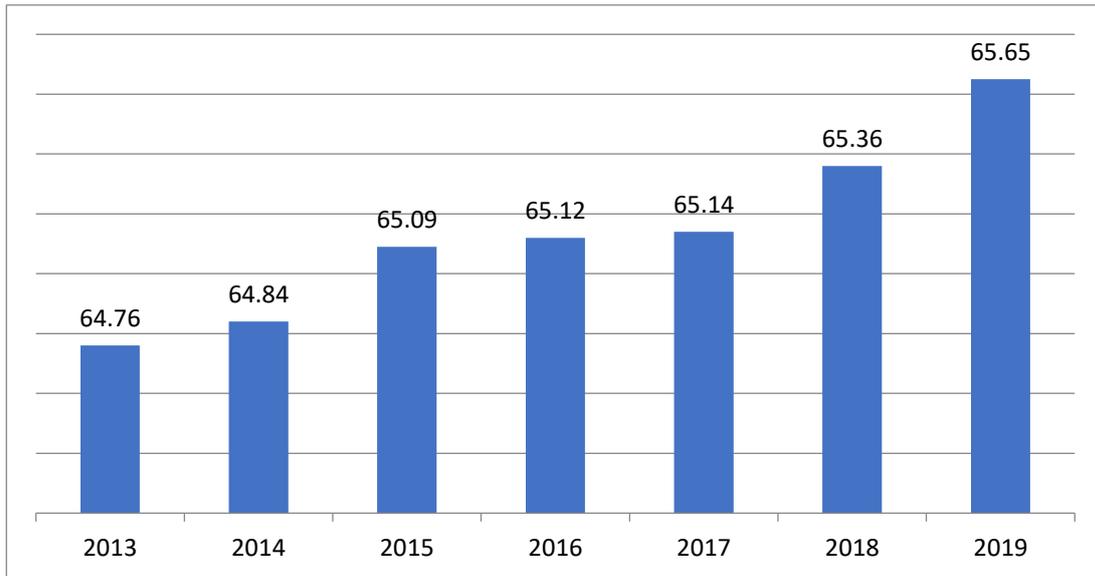
tahun 2019 telah mencapai 11,05 tahun dibandingkan tahun 2018 sebesar 10,83 tahun. Angka ini berarti bahwa anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk melanjutkan pendidikan sampai ke jenjang pendidikan SMA kelas 1. Sedangkan angka rata-rata lama sekolah di Provinsi Papua pada tahun 2019 tumbuh sebesar 1,99% atau 6,65 tahun dibandingkan tahun 2018 sebesar 6,52. Artinya secara rata-rata penduduk Papua usia 25 tahun ke atas telah mencapai 6,65 tahun, atau telah mengenyam pendidikan hingga kelas 6 SD

2.1.2.9 Angka Harapan Hidup

Mengenai fokus kesejahteraan sosial yang terkait dengan isu kesehatan, indikator penting yang perlu dianalisis adalah capaian Angka Harapan Hidup (AHH). AHH merupakan indikator pada level dampak yang mengindikasikan derajat kesehatan masyarakat secara umum pada suatu waktu tertentu. Berikut ini merupakan perkembangan AHH Provinsi Papua. Secara umum capaian AHH Provinsi Papua mengalami kecenderungan yang relatif meningkat dari tahun ke tahun hingga mencapai angka tertinggi di tahun 2017 sebesar 65,14 tahun, atau naik sebesar 0,4 tahun bila dibandingkan tahun 2013. Meningkatnya AHH menunjukkan adanya keberhasilan pembangunan kesehatan di Provinsi Papua.

Upaya mempercepat kenaikan AHH tidak semata hanya urusan bidang kesehatan saja. AHH ini sangat erat berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan kalori, kecukupan gizi, proporsi pengeluaran rumah tangga, aksesibilitas, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Sehingga diperlukan adanya integrasi dan sinkronisasi antarsektor dalam upaya mempercepat kenaikan AHH, yang sekaligus juga dapat mengurangi ketimpangan pembangunan kesehatan antar wilayah yang masih terasa sampai saat ini.

Gambar 2.22
Angka Harapan Hidup (AHH) di Provinsi Papua



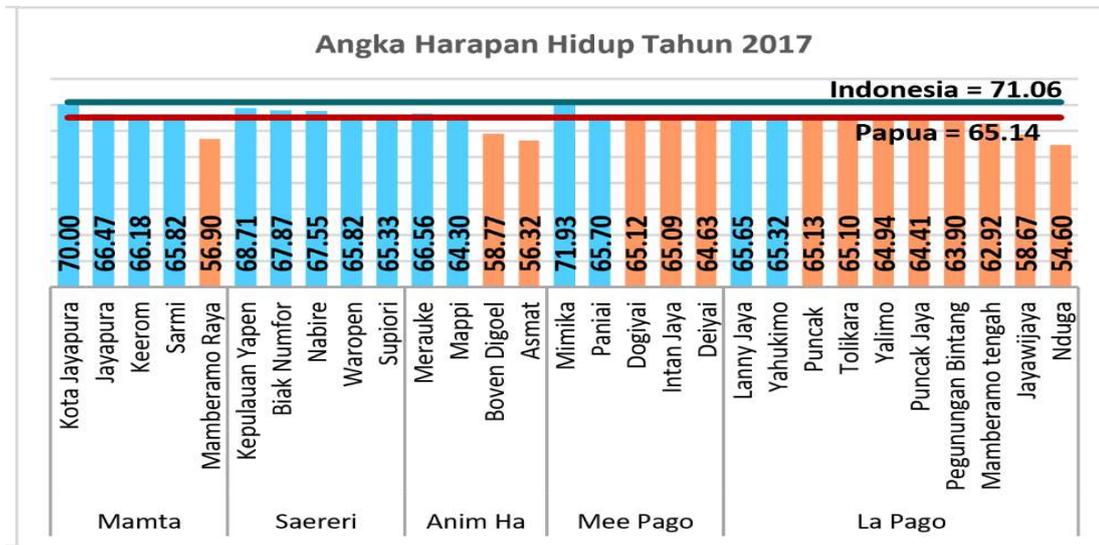
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Papua 2018

Selama periode 2010 hingga 2019, Papua telah berhasil meningkatkan Umur Harapan Hidup saat lahir sebesar 1,34 tahun. Pada tahun 2010 misalnya Umur Harapan Hidup saat lahir di Papua hanya sebesar 64,31 tahun, namun pada tahun 2019 telah mencapai 65,65 tahun. Beberapa tahun terakhir ini juga terdapat perbaikan di angka-angka Partisipasi Sekolah (APS) serta menurunnya Angka Putus Sekolah setiap tahun.

Adapun diskripsi Angka Harapan Hidup di Kab/Kota dipotret dari data Tahun 2017, ditampilkan sebagai berikut:

Gambar 2.23

Angka Harapan Hidup (AHH) tingkat Kab/Kota Provinsi Papua



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Papua 2018

Rata-rata capaian Angka Harapan Hidup (AHH) di 4 wilayah adat masih berada di bawah capaian AHH rata-rata Provinsi Papua. Saireri merupakan satu-satunya wilayah adat yang memiliki capaian rata-rata AHH di atas Provinsi Papua. Hal ini mengindikasikan ketimpangan ketersediaan dan kualitas penyelenggaraan layanan kesehatan diantara kabupaten/kota di Provinsi Papua. Kabupaten Kepulauan Yapen merupakan daerah dengan capaian AHH tertinggi di wilayah adat Saireri yang mencapai 68,71 tahun pada akhir tahun 2017. Namun, capaian tersebut masih berada di bawah AHH Kabupaten Mimika yang mencapai 71,93 tahun hingga akhir tahun 2017. Capaian AHH Kabupaten Mimika tersebut juga berada jauh di atas rata-rata AHH Provinsi Papua. Hal tersebut mengindikasikan bahwa ketersediaan dan kualitas layanan kesehatan di Kabupaten Mimika relatif jauh lebih optimal dibandingkan dengan kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Papua.

Sebaliknya, wilayah adat La Pago merupakan kawasan dengan rata-rata capaian AHH terendah di Provinsi Papua yaitu, 62,59 pada tahun 2017. Kabupaten Nduga merupakan daerah dengan capaian AHH terendah di wilayah adat Lapago yaitu sebesar 54,6 tahun sedangkan, Kabupaten Kabupaten Lanny Jaya merupakan daerah

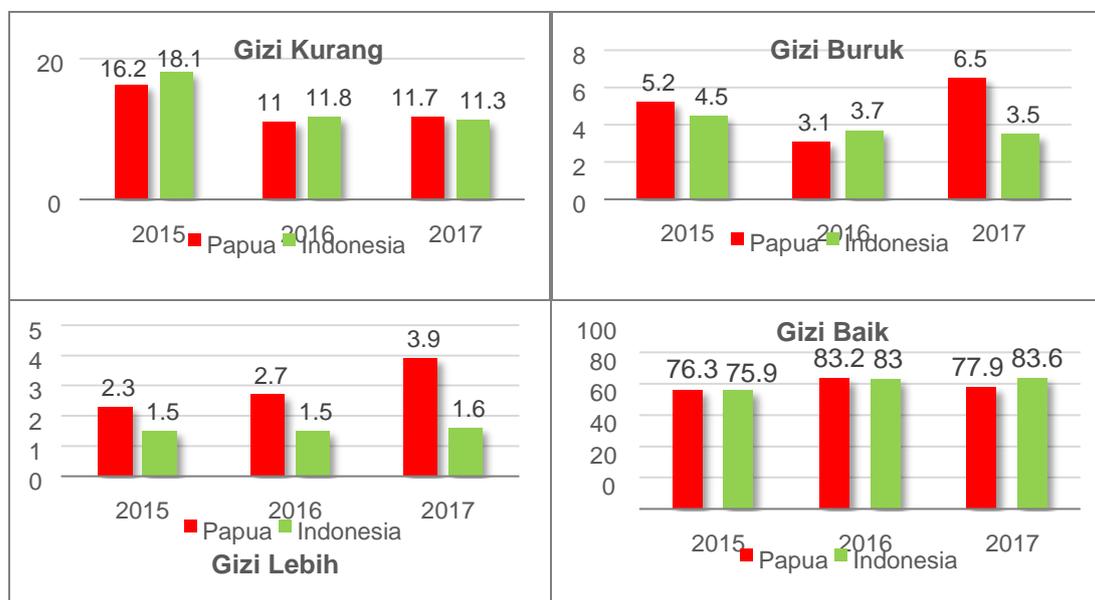
dengan capaian AHH tertinggi dibandingkan dengan seluruh kabupaten di wilayah adat La Pago.

2.1.2.10 Persentase Balita Gizi Buruk

Pemantauan Status Gizi (PSG) merupakan kegiatan pemantauan perkembangan status gizi balita yang dilaksanakan setiap tahun secara berkesinambungan untuk memberikan gambaran tentang kondisi status gizi balita. Status gizi buruk bayi usia 0-23 bulan di Provinsi Papua cukup memprihatinkan, karena selama tahun 2015-2017 kecenderungannya mengalami peningkatan, yakni dari 5,2% di tahun 2015 menjadi 6,5% di tahun 2017. Padahal untuk jangka waktu yang sama secara keseluruhan gizi buruk di Indonesia mengalami penurunan. Angka gizi buruk di Papua juga terlihat lebih tinggi dibandingkan rata-rata Indonesia yang pada tahun 2017 hanya sebesar 3,5%.

Gambar 2.24

Status Gizi Anak Balita Umur 0 - 23 Bulan Berdasarkan Indeks BB/U di Provinsi Papua dan Indonesia Tahun 2015 - 2017 (%)

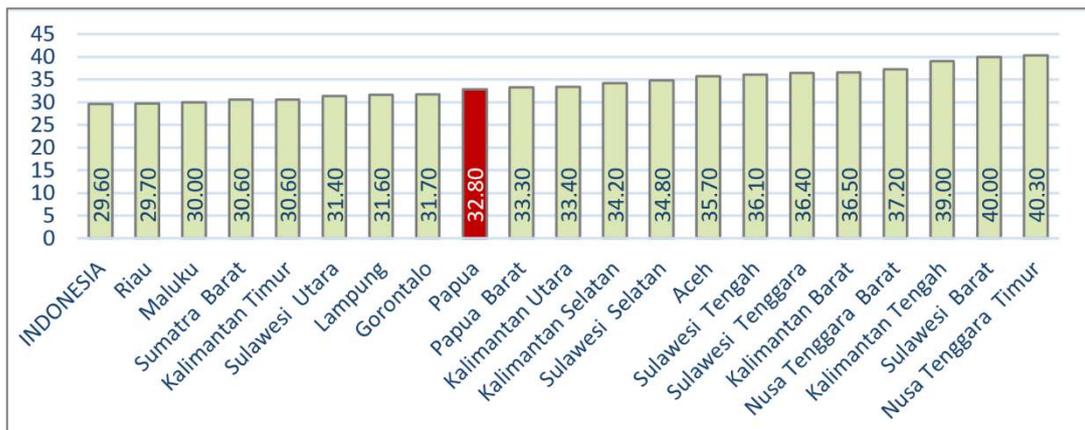


Sumber: Direktorat Gizi Masyarakat Kemenkes RI, 2018 (data diolah)

Stunting merupakan masalah gizi buruk kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu lama, umumnya karena asupan makan yang tidak sesuai kebutuhan gizi. Stunting terjadi mulai dari dalam kandungan dan baru terlihat saat anak berusia dua tahun. Provinsi Papua termasuk paling tinggi memiliki stunting di atas rata-rata Indonesia bersama 19 provinsi lainnya (lihat Gambar 2.25).

Gambar 2.25

Angka Stunting Tertinggi di Indonesia Tahun 2017 (%)



Sumber: Direktorat Gizi Masyarakat Kemenkes RI, 2018 (data diolah)

Keadaan stunting yang terlihat tinggi di Provinsi Papua ini, yaitu mencapai 32,80%, perlu ditangani segera dengan efektif, agar manfaat bonus demografi yang akan diterima selama periode 2020-2030 mendatang dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat Papua.

2.1.2.11 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Pada Agustus 2019, jumlah angkatan kerja dan penduduk yang bekerja di Papua menurun dibandingkan kondisi Februari 2019. Jumlah angkatan kerja mencapai 1,84 juta orang atau bertambah 6.240 ribu orang dibandingkan Agustus 2018.

Jumlah penduduk yang bekerja pada Agustus 2019 berkurang dibandingkan Agustus 2018. Sementara Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Papua pada Februari 2019 mengalami penurunan sekitar 2,19 persen dibanding Agustus 2018.

Jumlah pengangguran di Papua pada Agustus 2019 sebanyak 67.173 orang. Angka tersebut mengalami peningkatan sejak Februari 2019. Jumlah pengangguran bertambah 8.417 orang dibandingkan dengan keadaan tahun lalu pada periode sama. Sejalan dengan hal tersebut, indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) meningkat dari 3,20 persen pada Agustus 2018 menjadi 3,65 persen pada Agustus 2019.

Tabel. 2.7.

Angka Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama Provinsi Papua, Februari 2017 –Agustus 2019

Jenis Kegiatan Usaha	2017		2018		2019	
	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari	Agustus
Penduduk 15+	2 268 851	2 291 111	2.332.383	2.320.862	2.378.923	2,394,887
Angkatan Kerja	1 753 858	1 762 841	1.851.486	1.835.963	1.808.848	1,842,203
Bekerja	1 684 389	1 699 071	1.797.668	1.777.207	1.746.963	1,775,030
Penganggur	69 469	63 770	53.818	58.756	61.885	67,173
Bukan Angkatan Kerja	514 993	528 270	480.897	498.899	570.075	552,684
Sekolah	188 297	181 879	193.332	176.043	220.158	188,438
Mengurus RT	274 816	278 056	243.493	256.249	277.906	293,959
Lainnya	51 880	68 335	44.072	52.607	72.011	70,287
TPAK (%)	77,30	76,94	79,38	79,11	76,04	76,92
TPT (%)	3,96	3,62	2,91	3,20	3,42	3,65

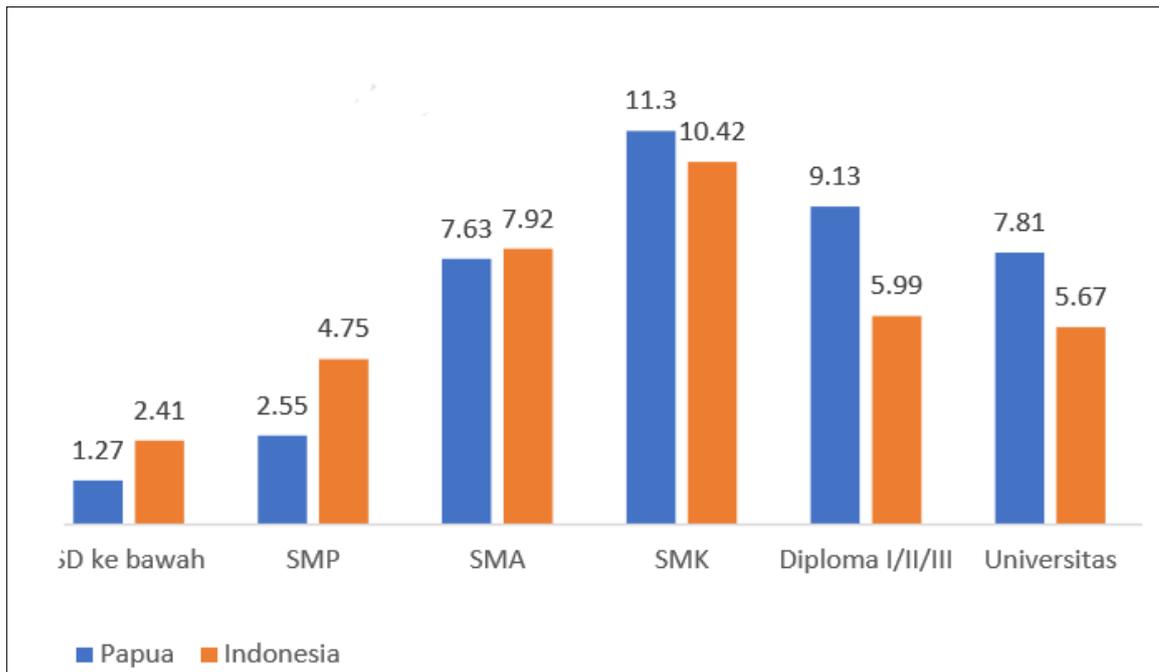
Sumber: BPS Provinsi Papua, 2019

Angka pengangguran di Papua masih berada jauh dibawah angka pengangguran nasional sebesar 5,28 persen. TPT tertinggi di Papua berada pada tingkat Sekolah Menengah Kejuruan yang mencapai 11,30 persen. Penganggur dengan tingkat Pendidikan sekolah lainnya yang memiliki TPT diatas lima persen yakni penganggur dengan tingkat Pendidikan Diploma I/II/ III (9,13 persen), Universitas (7,81 persen) dan Sekolah Menengah Atas (7,63 persen).

Pada Agustus 2019, TPT terkecil berada pada penganggur dengan tingkat pendidikan SD Ke bawah yaitu 1,27 persen Dari total penduduk yang bekerja 1.775.030 orang pada Agustus 2019 di Papua, status pekerjaan utama yang terbanyak adalah sebagai pekerja tidak dibayar/pekerja keluarga (30,27 persen) kemudian diikuti

oleh status berusaha dibantu butuh tidak tetap/tidak dibayar (29,87 persen). Adapun status pekerjaan dalam utama lainnya diatas 10 persen yakni berusaha sendiri (17,35 persen), dan buruh/karyawan (20,61 persen). Status berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar dan status pekerja bebas pertanian maupun non pertanian memiliki persentase kurang dari satu persen.

Gambar 2.26
Tingkat Pengangguran Tahun 2018 (%)



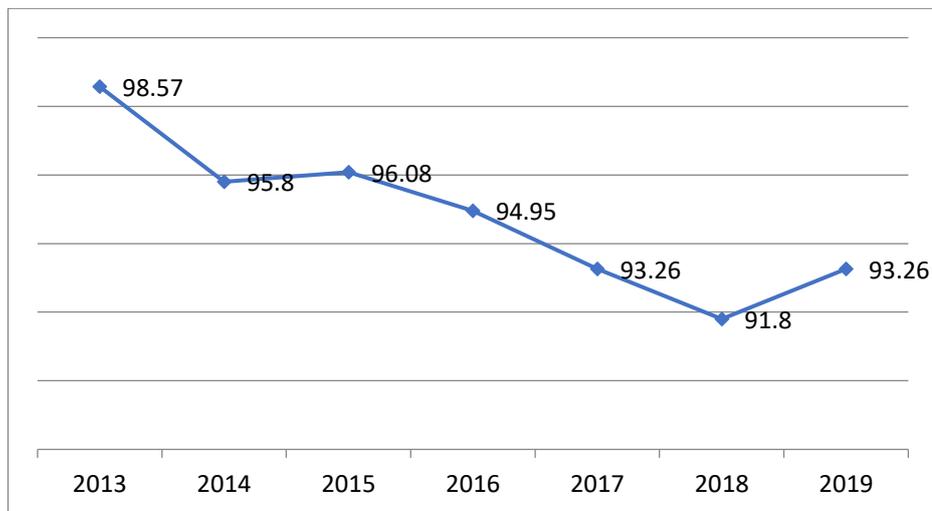
Sumber: BPS Provinsi Papua, 2019

2.1.3 Aspek Daya Saing

2.1.3.1 Daya Beli Petani

Adapun gambaran Nilai Tukar Petani di Provinsi Papua sangat berfluktuasi dari waktu ke waktu tergantung dari perkembangan harga barang yang dijual petani dan barang serta jasa yang dikonsumsi petani. Pada Gambar berikut ini diuraikan perkembangan NTP Provinsi Papua selama tahun 2013–2018.

Gambar 2.27
Tingkat Pengangguran Tahun 2018 (%)



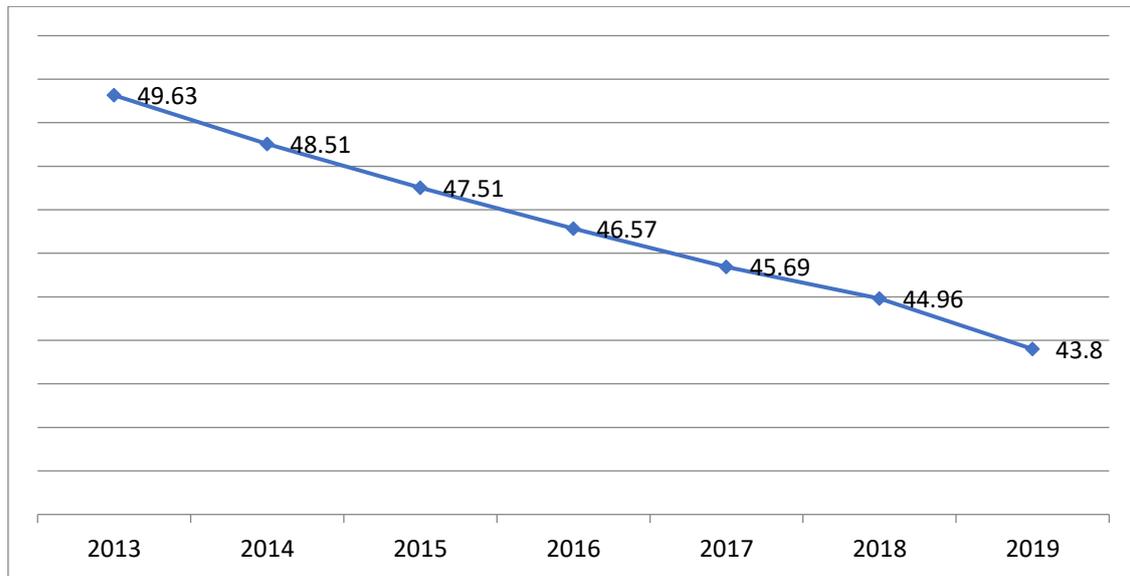
Sumber: BPS Provinsi Papua, 2019

Dalam kurun waktu 7 tahun tersebut, NTP Papua menunjukkan kecenderungan yang menurun hingga sampai tahun 2018 hanya sebesar 91,82%, kemudian naik pada tahun 2019 sebesar 93,26%, padahal pada tahun 2013 bisa mencapai 98,57%. Kecenderungan ini mengindikasikan bahwa kondisi petani di Papua mengalami defisit terus menerus, mulai tahun 2014, yakni kenaikan harga produksinya lebih rendah dibandingkan kenaikan harga konsumsinya sehingga pendapatan petani mengalami penurunan lebih jauh dari pengeluarannya. Dengan kata lain, tingkat kesejahteraan para petani semakin berkurang dibanding tingkat kesejahteraan sebelumnya.

2.1.3.2 Tingkat Ketergantungan Penduduk

Terdapat kecenderungan pertumbuhan penduduk usia produktif di Provinsi Papua lebih cepat dibandingkan penduduk usia non produktif. Jika diamati berdasarkan kelompok usia produktif 15-64 tahun, terlihat bahwa jumlah penduduk kelompok usia ini proporsinya cenderung meningkat. Trend rasio penduduk usia non produktif masih tergolong cukup besar di bandingkan dengan penduduk usia produktif di Provinsi Papua. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.28
Rasio Usia Ketergantungan Tahun 2013-2019



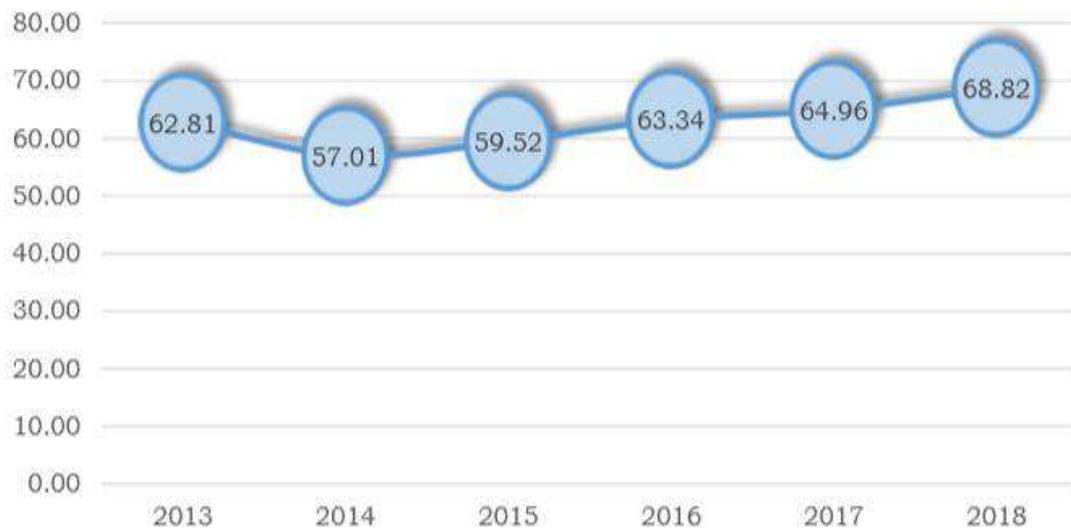
Sumber: BPS Provinsi Papua, 2019

Tercatat selama 7 (tujuh) tahun terakhir rasio ketergantungan di Provinsi Papua terus mengalami penurunan setiap tahunnya, yang artinya ada peningkatan ketergantungan penduduk usia non produktif terhadap usia produktif. Tercatat pada tahun 2013 rasio ketergantungan penduduk usia non produktif terhadap penduduk usia produktif adalah sebesar 49,63%, kemudian menurun pada tahun 2019 menjadi 43,80%.

2.1.3.3 Kemandirian Daerah

Ukuran produktifitas daerah dapat memvisualisasikan kapasitas dan daya saing tenaga kerja dalam menghasilkan satu satuan nilai tambah atau PDRB. Perkembangan produktivitas daerah Provinsi Papua selama tahun 2013-2018 cenderung mengalami peningkatan, dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 2% per tahun, serta rata-rata produktifitas Rp.62,74 juta per tenaga kerja per tahun. Perhatikan gambar di bawah ini:

Gambar 2.29
Produktifitas Total Daerah Tahun 2013-2019



Sumber: BPS Provinsi Papua, 2019

2.1.3.4 Angkatan Kerja Yang Berpendidikan Tinggi

Persentase angkatan kerja yang berpendidikan tinggi di Provinsi Papua terlihat memiliki trend yang positif dan cenderung meningkat walaupun tergolong cukup rendah. Pertumbuhan persentase angkatan kerja Pendidikan tinggi mencapai 8% setiap tahunnya. Meskipun demikian, sempat mengalami penurunan pada tahun 2014 sebesar 6,10% dari tahun sebelumnya, dan kembali meningkat dalam periode 2015-2018. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 2.30
Prosentase Angkatan Kerja yang berpendidikan Tinggi
Provinsi Tahun 2013-2019



Sumber: BPS Provinsi Papua, 2019

Tercatat pada tahun 2013 persentase angkatan kerja yang berpendidikan tinggi adalah sebesar 6,70%, kemudian menurun sebesar 0,6% menjadi 6,1% di tahun 2014, selanjutnya kembali meningkat hingga tahun 2018 menjadi 9,95%.

2.1.3.5 Daya Saing Investasi

Incremental Capital Output Ratio (ICOR) yang merupakan rasio antara tambahan output dengan tambahan modal dapat dijadikan suatu indikator penentu keberhasilan dalam meningkatkan daya saing investasi. Dengan adanya indikator ini, para penyusun rencana pembangunan ekonomi bisa mengetahui berapa investasi yang diperlukan agar ekonomi tumbuh sesuai dengan target yang telah ditentukan. Pakar ekonomi biasanya menggunakan nilai ICOR moderat antara 2 – 4 poin sebagai indikasi iklim investasi di suatu wilayah dalam kondisi yang menguntungkan. Sebagian besar pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Papua belum mampu menciptakan dan mempertahankan iklim investasi yang dapat menguntungkan investor. Fakta ini terekam pada nilai ICOR di setiap daerah yang cenderung lebih besar dari 4 poin, dan mengalami kenaikan rata-rata dalam interval 0,15% - 14% per tahun selama periode

2013-2017. Sehingga secara keseluruhan ICOR Provinsi Papua sebesar 5,13 pada tahun 2017, dan mengalami kenaikan sekitar 0,25% per tahun jika dibandingkan tahun 2014. ICOR sebesar 5,13 mempunyai arti bahwa untuk mencipatakan nilai PDRB sebesar 1 rupiah diperlukan tambahan investasi sebesar 5,13 rupiah. Dalam konteks kewilayahan, dapat dikatakan bahwa wilayah adat yang dapat memberikan keuntungan lebih baik bagi para investor adalah wilayah adat Anim Ha. Karena secara rata-rata ICOR untuk wilayah Anim Ha paling rendah, dan mendekati batas tertinggi ICOR moderat yakni sebesar 4,16 poin. Sementara untuk wilayah adat lainnya terlihat belum menguntungkan, terutama di wilayah adat Saireri dan La Pago masing-masing sebesar 7,59 poin dan 5,02 poin. Adapun untuk kabupaten/kota secara terpisah, teridentifikasi 6 kabupaten yang terlihat lebih menguntungkan para investor untuk berinvestasi yakni Kabupaten Jayawijaya dengan ICOR sebesar 3.78 poin, Kepulauan Yapen sebesar 3.41 poin, Merauke sebesar 2.73 poin, Nabire sebesar 2.25 poin, Jayapura sebesar sebesar 2.12 poin, dan yang paling rendah Mimika sebesar 1.60 poin.

2.1.4 Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan umum merupakan aspek krusial dalam pencapaian kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah melalui berbagai bentuk pelayanan umum memegang peranan penting dalam menentukan tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan pembangunan daerah. Dalam hal ini kewajiban pemerintah daerah adalah menyelenggarakan aspek pelayanan umum. Oleh karena itu deskripsi mengenai kondisi pelayanan umum terkini perlu dilakukan untuk menunjukkan permasalahan dan potensi penyelenggaraan pelayanan umum dalam kontribusinya mencapai tujuan pembangunan Data yang aka digambarkan di bagian ini, terbatas pada aspek yang benar-benar signifikan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Papua.

2.1.4.1 Urusan Wajib Terkait Dengan Pelayanan Dasar

2.1.4.1.1 Pendidikan dan Kesehatan

Aspek pelayanan umum yang diskripsikan dari pendidikan dipotret dari (1) Angka Partisipasi Sekolah dan Angka Putus Sekolah. (2) Perkembangan Guru dan murid serta Fasilitas Pendidikan. Empat indikator ini berkorelasi langsung dengan pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) suatu daerah. Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan proporsi dari semua anak yang masih sekolah pada suatu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur yang sesuai. Dengan demikian APS yang tinggi menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum. Secara tabel indikator-indikator dipilah menurut kewenangan dipilah sebagai berikut:

Tabel. 2.8.

Angka Partisipasi Sekolah dan Putus Sekolah Tahun 2013-2019

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK	53,28	61,63	61,96	62,07	63,35	63,46	
Angka Putus Sekolah (16-18) thn	1,78	1,78	1,13	1,75	0,86	0,83	

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2019 (diolah)

Adapun perkembangan guru dan murid serta fasilitas pendidikan sebagai berikut

:

Tabel. 2.9.

Jmlah Guru Kondisi Tahun 2013-2019

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Guru SMU/SMK	2,586	3,671	3,971	4,230	4,234	4,313	
Sekolah Kondisi Baik (SMU/SMK)	37,30	37,30	37,30	37,30	33,87	32,75	

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2019 (diolah)

Dibidang kesehatan indikator yang sering dijadikan terkait langsung dengan keberhasilan di bidang ini dipotret dari angka kematian bayi dan angka kamatian.

Selain itu fasilitas kesehatan dan proporsi tenaga medis. Adapun prefalensi angka kematian bayi dan ibu melahirkan ditunjukkan sebagai berikut:

Gambar 2.31

Angka kematian bayi dan Ibu Melahirkan Tahun 2013-2018



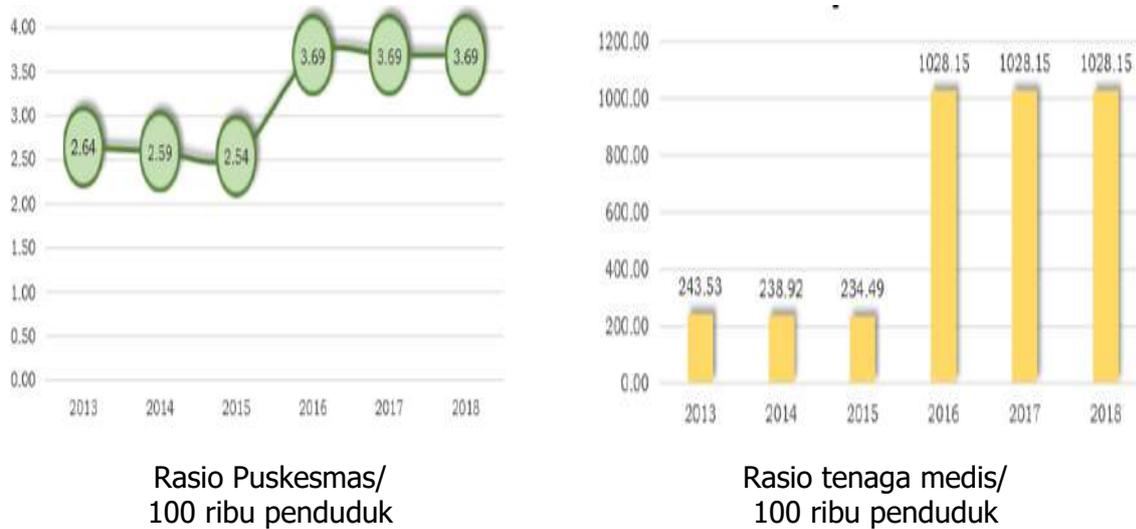
Sumber: BPS Provinsi Papua, 2019 (diolah)

Provinsi Papua memiliki kasus AKB yang cukup tinggi, namun cenderung menurun cukup pesat hingga tahun 2018. Kasus AKB yang terjadi di Provinsi Papua merupakan akumulasi dari 29 kabupaten/kota yang tersebar di 5 wilayah adat. Tercatat pada tahun 2013 kasus AKB mencapai hingga 54 kasus AKB, kemudian turun di tahun 2014 sebanyak 8 kasus namun kembali mengalami kenaikan yang cukup pesat di tahun 2015 sebesar 44 kasus. Namun dalam dua tahun terakhir kasus AKB mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu 8 kasus tahun 2016 dan 7 kasus di tahun 2017 dan 2018. Sedangkan kasus angka kematian ibu (AKI) Provinsi Papua per 100.000 penduduk selama ini dapat dikatakan cukup tinggi dan cenderung mengalami penurunan selama lima tahun terakhir.

Perkembangan kasus kematian bayi dan ibu melahirkan juga terkait erat dengan hadirnya fasilitas kesehatan seperti Puskesmas dan Jumlah tenaga medis di Provinsi Papua. Adapun rasio fasilitas kesehatan (Puskesmas) dan Tenaga Medis di Provinsi Papua dalam tahun 2013-2018 ditunjukkan sebagai berikut:

Gambar 2.32

Rasio Puskesmas dan Rasio Tenaga Medis per 10.000 Penduduk Provinsi Papua Tahun 2013-2018



Sumber: BPS Provinsi Papua, 2019 (diolah)

Dari Rasio puskesmas per 10.000 penduduk di provinsi Papua pada tahun 2013 menunjukkan 3 puskesmas melayani 10.000 penduduk meningkat pada tahun 2016 hingga tahun 2018 sebanyak 4 puskesmas melayani 10.000 penduduk. Sedangkan sebanyak 244 tenaga medis melayani 100 ribu penduduk pada tahun 2013, kemudian mengalami penurunan di tahun 2014 dan 2015 menjadi 239 dan 235 tenaga medis melayani 100 ribu penduduk. Pada tahun 2016 meningkat menjadi 1028 tenaga medis melayani 100 ribu penduduk

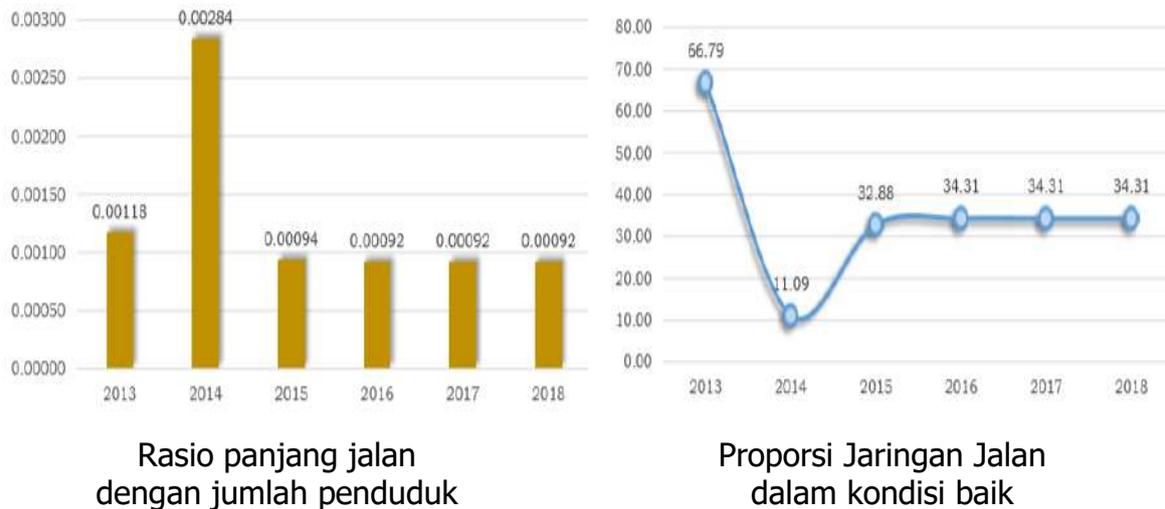
2.1.4.1.2 Pekerjaan Umum

Berdasarkan kondisi jaringan jalan dalam kondisi baik diprovinsi Papua pada tahun 2013 sebesar 66,79 persen dan mengalami penurunan di tahun 2014 menjadi 11,09 persen. Namun pada tahun 2015 hingga tahun 2018 proporsi jaringan jalan dalam kondisi baik meningkat menjadi 34,31 persen. Pembangunan infrastruktur jalan selama ini belum mampu menaikkan rasio mobilitas penduduk secara maksimal di Provinsi Papua. Peningkatan jalan dari tahun 2013-2017 tidak sebanding dengan penambahan jumlah penduduk, sehingga tidak serta merta dapat menaikkan rasio

mobilitas terutama di tahun 2015-2017. Rasio mobilitas tahun 2013 sebesar 0,00118 Km/jiwa naik menjadi 0,00284 km/jiwa di tahun 2014 kemudian terlihat menurun di tahun 2015 yaitu dari 0,00094 km/jiwa menjadi 0,00094 Km/jiwa di tahun 2016 dan 2017 dengan rata-rata penduduk dapat mengakses jalan sebesar 0,0015 Km/jiwa.

Gambar 2.33

Rasio Panjang Jalan dan Proporsinya Tahun 2013-2018



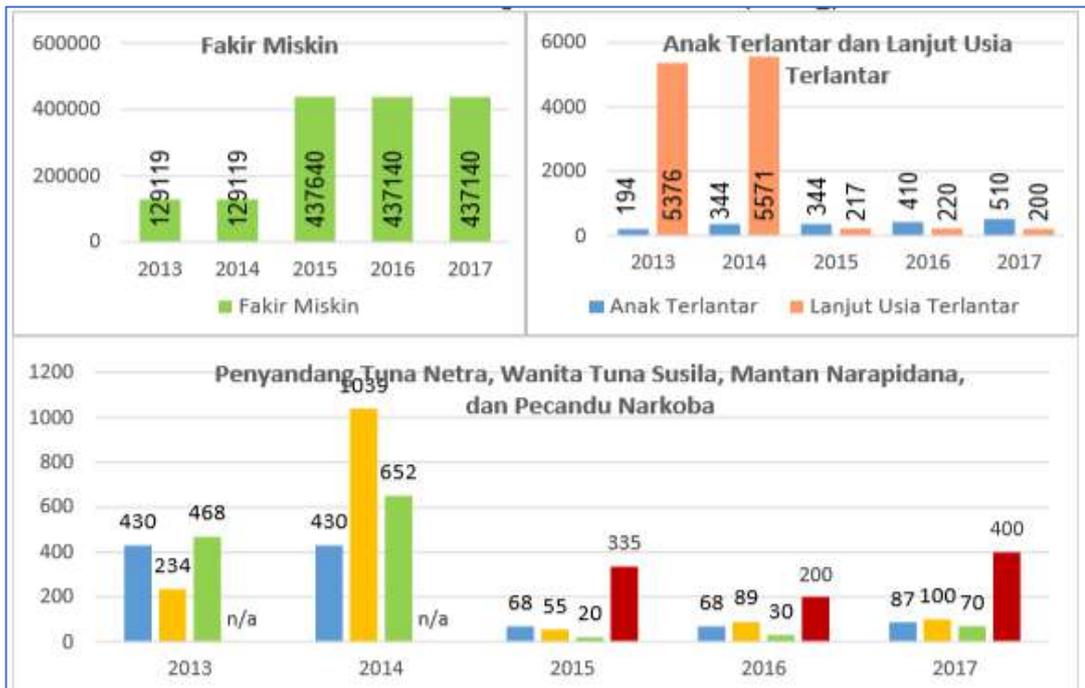
Sumber: BPS Provinsi Papua, 2019 (diolah)

2.1.4.1.3 Sosial

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilakukan Pemerintah Daerah belum secara optimal mengatasi masalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Provinsi Papua. Hal ini terindikasi melalui tingginya jumlah fakir miskin, anak terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat, wanita tuna susila, mantan narapidana, dan pecandu narkoba pada rentang tahun 2013-2017. Kondisi tersebut ditunjukkan sebagai berikut:

Gambar 2.34

Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial Tahun 2013-2018



Sumber: BPS Provinsi Papua, 2019 (diolah)

Pada lima tahun terakhir, jumlah anak terlantar mengalami peningkatan dari 194 anak (tahun 2013) menjadi 510 anak (tahun 2017). Peningkatan juga terjadi pada jumlah fakir miskin dari 129.119 orang (tahun 2013) menjadi 437.140 orang (tahun 2017). Peningkatan ini tergolong tinggi karena secara agregat meningkat 3 kali lipat dalam rentang waktu 5 tahun. Trend yang relatif menurun terjadi pada lanjut usia terlantar, yaitu 5376 orang (tahun 2013) menjadi 200 orang (tahun 2017). Kondisi yang fluktuatif namun cenderung meningkat terjadi pada penyanggah tuna netra, wanita tuna susila, mantan narapidana, dan pecandu narkoba. Jumlah wanita tuna susila pada tahun 2014 sebanyak 1.039 orang dan berkurang menjadi 55 orang pada tahun 2015. Namun, mengalami peningkatan kembali pada tahun 2017 menjadi 100 orang. Berkurangnya jumlah wanita tuna susila pada tahun 2015 dikarenakan peraturan Bupati Kabupaten Jayapura untuk menutup lokasi prostitusi Tanjung Elmo. Jumlah mantan narapidana di Provinsi Papua pada tahun 2013 sebanyak 468 jiwa meningkat menjadi 652 jiwa pada

tahun 2014. Namun terjadi penurunan pada tahun 2015 sebesar 20 jiwa dan pada tahun 2017 kembali meningkat menjadi 70 jiwa. Adapun jumlah pecandu narkoba yang teridentifikasi pada tahun 2015 sebanyak 335 orang, kemudian pada tahun 2016 turun menjadi 200 orang namun pada tahun 2017 kembali meningkat menjadi 400 orang. Kondisi ini belum sepenuhnya mencerminkan penyalahgunaan Napza di Papua karena masih banyak para pecandu narkoba yang belum teridentifikasi.

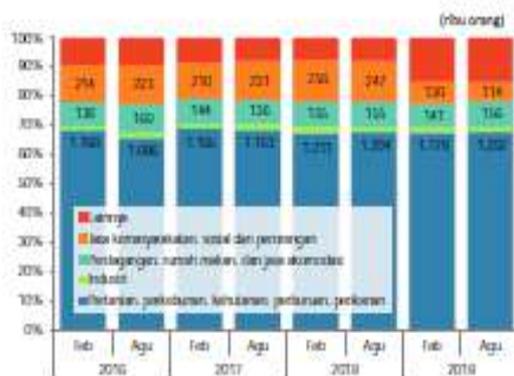
2.1.4.2 Urusan Wajib tidak terkait dengan Pelayanan Dasar

2.1.4.2.1 Tenaga Kerja

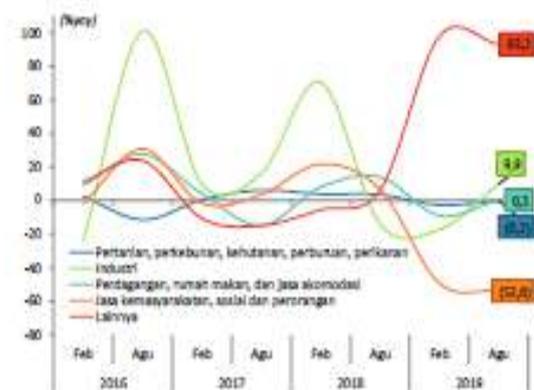
Jumlah penduduk yang bekerja sampai dengan Agustus 2019 di Provinsi Ppaua terus meningkat , namun demikian disertai pula dengan peningkatan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPT periode Agustus 2019 sebesar 3,65% lebih tinggi dibanding Pebruari 2019 sebesar 3,42%. Meskipun demikian angka ini lebih rendah dari angka nasional 5,28%.

Gambar 2.35

Penduduk yang bekerja dan pertumbuhan penyerapan tenaga kerja menurut lapangan usaha Provinsi Papua Tahun 2017-2019



Grafik 6.1 Penduduk yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama



Grafik 6.2 Pertumbuhan Penyerapan Tenaga Kerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama

Sumber: Laporan BI Tahun 2020 (diolah)

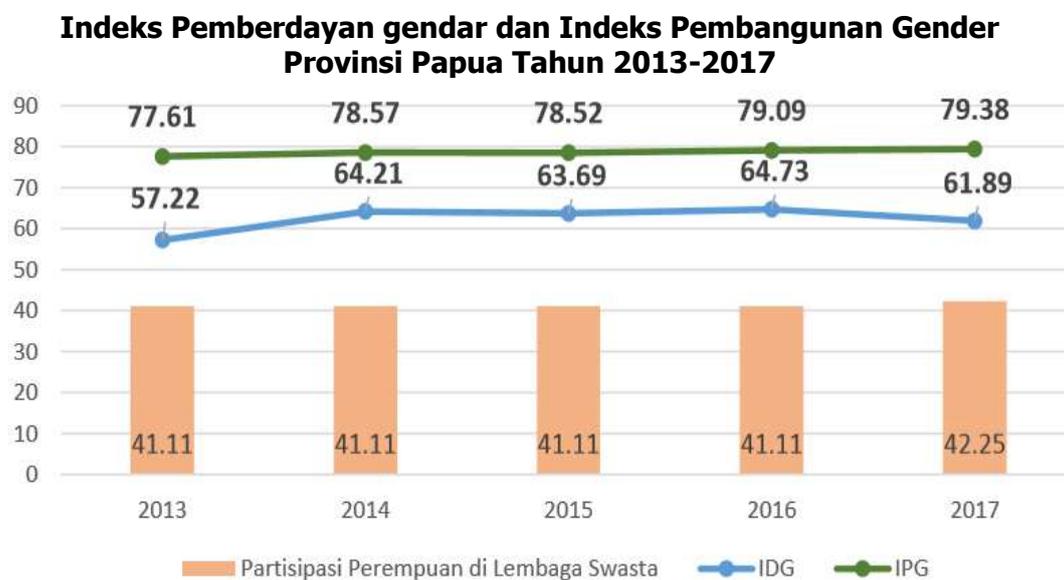
Dari pertumbuhan penyerapan tenaga kerja menurut lapangan usaha sampai saat ini belum terjadi transformasi, seperti ditunjukkan pada gambar (kanan).

Pertumbuhan tenaga kerja yang menyerap lapangan kerja masih didominasi sektor pertambangan sementara sektor pertanian, perkebunan dan kehutanan pertumbuhannya setiap tahun tidak terlalu signifikan.

2.1.4.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Indeks Pembangunan gender (IPG) merupakan indeks kemampuan pencapaian dasar pembangunan manusia dengan memperhatikan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan. Sedangkan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menunjukkan apakah perempuan dapat secara aktif berperan serta dalam kehidupan ekonomi dan politik. Indeks pemberdayaan gender tercatat memiliki nilai cenderung meningkat dalam lima tahun terakhir. Meskipun pada tahun 2014-2015 terlihat menurun sebesar 1%, namun kembali terjadi kenaikan bahkan sampai dengan tahun 2017. Selanjutnya, pada indeks pembangunan gender juga terlihat cenderung meningkat dalam lima tahun terakhir. Meskipun pada tahun 2014-2015 terlihat menurun walaupun tidak signifikan perubahannya, namun kembali terjadi kenaikan bahkan sampai dengan tahun 2017.

Gambar 2.36



Sumber: BPS Provinsi Papua, 2019 (diolah)

2.1.4.2.3 Koperasi dan UKM

Selama ini kinerja Koperasi dan UKM selalu dipotret dari indikator jumlah atau status aktif atau tidak. Indikator ini hanya menyoroti eksistensi koperasi dan Usaha Kecil Mikro pada tingkat demand (permintaan). Berikut ini indikator koperasi berdasarkan supply yang dirilis dari laporan Bank Indonesia tahun 2020. Indikator ini diukur dari perkembangan para UKM yang melakukan kredit di bank serta penggunaannya, seperti ditampilkan sebagai berikut :

Gambar 2.37

Perkembangan Kredit UKM dan Penggunaannya Provinsi Papua Tahun 2018-2019



Sumber: Laporan BI Tahun 2020 (diolah)

Pertumbuhan kredit Non UMKM dalam tahun 2018-2019 kecenderungannya menurun tetapi tahun 2019 naik. Sebaliknya kredit UMKM juga fluktuatif tetapi tahun 2019 menurun. Demikian pula kecenderungan para UMKM. Demikian pula halnya perkembangan kredit menurut penggunaannya lebih banyak diperuntukan sebagai modal kerja.

2.1.4.2.4 Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui kinerja pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi Papua, yang merupakan komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Deskripsi indikator-indikator tersebut ditunjukkan sebagai berikut:

Gambar 2.38

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Papua

Tahun	IKU	IKA	IKTL	IKLH
2013	88.67	58.00	97.28	82.91
2014	84.24	54.67	97.44	80.65
2015	84.24	80.00	79.35	81.01
2016	89.60	76.00	79.17	81.35
2017	90.91	77.33	78.18	81.47
Rata2 Pertumbuhan Provinsi Papua	0.54	5.51	- 6.03	- 0.45
Kontribusi Terhadap Nasional Tahun 2017	1.12	6.32	- 9.22	2.07

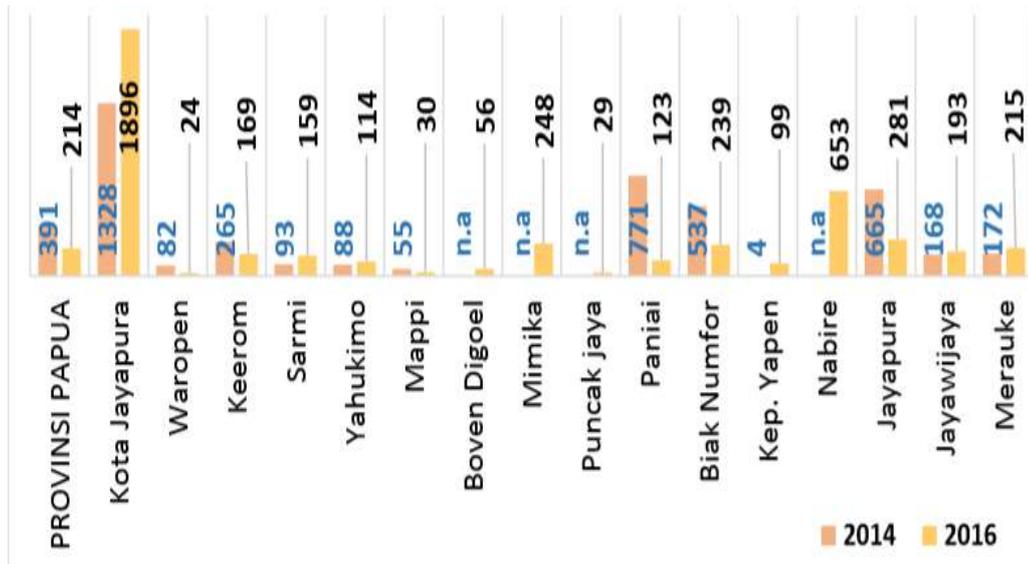
Sumber : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

2.1.4.2.5 Perhubungan

Data-data perhubungan yang diperlukan untuk memotret seagian fasilitas perhubungan berupa rasioa pangan jalan per jumlah kendaraan atau luas wilayah. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan menunjukkan ketersediaan jalan yang dapat diakses oleh sejumlah kendaraan. Berikut ini rasio panjang jalan perjumlah kendaraan di Provinsi Papua taun 2016-2017, ditunjukkan melalui gambar berikut:

Gambar 2.39

Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan



Dari data statistik yang diperoleh Kota Jayapura memiliki perbandingan yang paling besar di antara beberapa kabupaten lainnya yaitu mencapai 1;1,896 yang berarti bahwa dalam 1 km diakses oleh 1,896 unit kendaraan, jika dibandingkan dengan tahun 2014 berarti terjadi penambahan unit kendaraan baik roda empat, dua dan lainnya. Selain itu, terdapat juga kabupaten lain yang tercatat secara statistik memiliki rasio panjang jalan terhadap kendaraan meningkat di antaranya adalah Kabupaten Sarmi, Yahukimo, Kepulauan Yapen, Jayawijaya dan Merauke yang menandakan adanya peningkatan unit kendaraan. Sedangkan daerah lainnya seperti Kabupaten Waropen, Keerom, Mappi, Paniai, Biak Numfor, dan Kabupaten Jayapura memiliki nilai rasio yang menurun. Hal tersebut mengindikasikan adanya penambahan ruas jalan selama ini.

2.1.4.2.6 Komunikasi dan Informasi

Hingga awal 2018, total BTS yang telah didirikan tiga operator di seluruh wilayah Papua sebanyak 4.644 unit. Dengan jumlah terbanyak dibangun oleh Telkomsel. Anak perusahaan Telkom itu mengoperasikan 4.461 unit BTS. Jumlah tersebut sangat

berbeda jika dibandingkan dengan BTS milik Indosat 137 unit BTS, dan XL 46 unit BTS. Laporan Bappeda 2018, menyebutkan Proporsi individu yang menggunakan telepon genggam di Indonesia mencapai 56,92% pada tahun 2015 dan pada tahun 2016 mencapai 58,3%. Sedangkan di wilayah Provinsi Papua mencapai 32,04% dan meningkat menjadi 34,24%. Sementara proporsi individu yang menggunakan internet di Indonesia mencapai 21,96% pada tahun 2015, meningkat menjadi 25,37% pada tahun 2016. Di Provinsi Papua proporsi individu yang menggunakan internet sebesar 8,98% pada tahun 2015 kemudian meningkat menjadi 11,62% pada tahun 2016.

2.1.4.2.7 Kepemudaan dan Olahraga

Seiring dengan ditunjuknya Papua sebagai pelaksana PON XX bulan Oktober 2020, maka beberapa data yang harus dipenuhi antara lain. Jumlah fasilitas olahraga, jumlah iven dan prestasi atlit termasuk tenaga pelatih. Berikut ini data jumlah fasilitas olahraga yang tercatat sampai tahun 2017, yaitu:

Gambar 2.40

Jumlah Fasilitas Olahraga Provinsi Papua

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah sarana olahraga masyarakat, olahraga, pendidikan dan ruang publik bermutu	175	175	175	186	186
Jumlah Gedung olahraga	8	10	10	15	15
Jumlah sarana olahraga untuk pusat pertandingan	175	175	175	175	176

Sumber : Laporan Bappeda tahun 2019

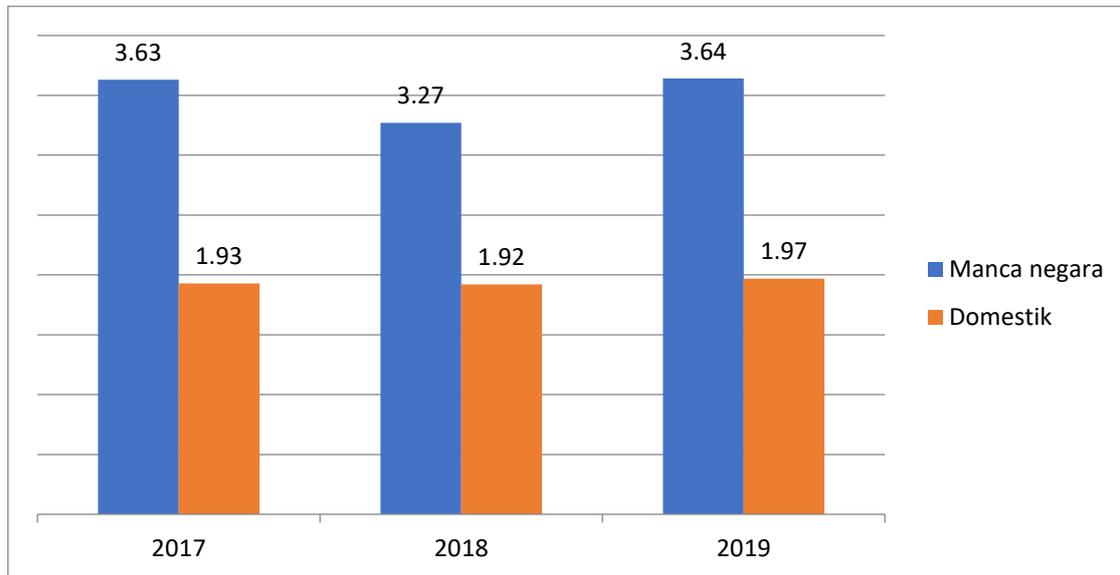
2.1.4.2.8 Pariwisata

Beberapa Indikator pariwisata yang biasa ditampilkan dalam mendiskripsikan kemajuan di sektor ini anatar lain, potensi jasa pariwisata, jumlah fasilitas penunjangnya, jumlah kunjungan tamu. Namun semua itu bisa dipotret dengan gamblang melalui lamanya para wisatawan berkunjung di Provinsi Papua. Adapun

rata-rata lama kunjungan wisatawan baik mancanegara maupun domestik di Provinsi Papua ditampilkan dalam gambar berikut:

Gambar 2.41

Rata-rata Lama Menginap Wisatawan Manca Negara dan Domestik di Provinsi Papua Tahun 2017-2019



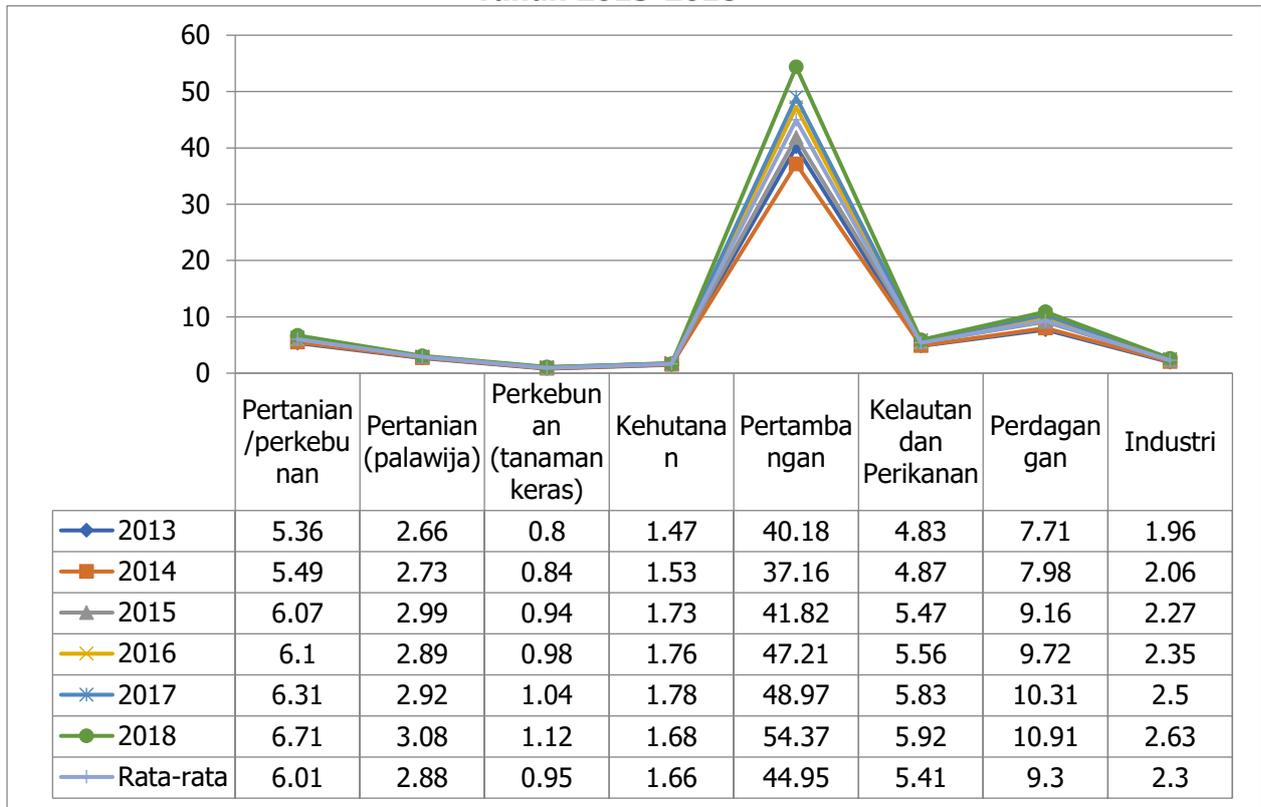
Sumber : Papua dalam Angka (diolah)

2.1.4.3 Urusan Pilihan

Urusan pilihan terdiri atas bidang pertanian/perkebunan, pertanian (palawijah), Perkebunan (tanaman keras), Kehutanan, Pertambangan dan Keluatan/perikanan. Kinerja bidang-bidang ini ditunjukkan melalui sumbanganya terhadap Produk Domestik Bruto Provinsi Papua dari Tahun 2013-2019, sebagai berikut:

Gambar 2.42

Kontribusi Sektor-Sektor terhadap PDRB Provinsi Papua Tahun 2013-2018



Sumber : Papua dalam Angka (diolah)

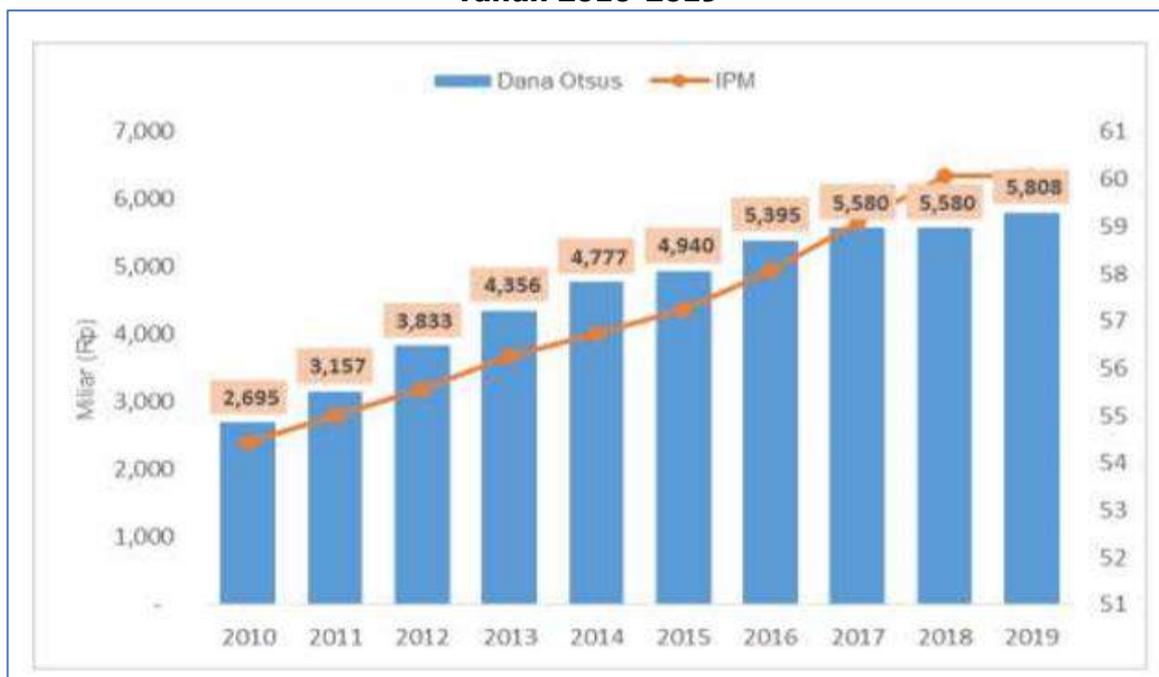
Seluruh potensi ekonomi di Provinsi Papua selama periode 2013-2018 memiliki trend yang positif dan cenderung terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada sektor pertanian/perkebunan tercatat pada tahun 2013 memiliki kontribusi sebesar 5,36% dan meningkat menjadi 6,71% pada tahun 2018, dengan rata-rata kontribusi pertahun sebesar 6,01% per tahun. Kemudian pada sektor pertanian (palawija) tercatat kontribusinya pada tahun 2013 adalah sebesar 2,66% dan meningkat menjadi 3,08%, dengan rata-rata pertahun mencapai 2,88% per tahunnya. Sama halnya dengan sektor Perkebunan (Tanamankeras), Kehutanan, Pertambangan, kelautan dan perikanan, Perdagangan dan Industri juga mengalami peningkatan setiap tahunnya.

2.1.5 Aspek Kekhususan (Otonomi Khusus)

Kebijakan Otonomi khusus bagi adalah dana yang ditujukan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa pemerintah daerah berdasarkan aspirasi dan hak dasar masyarakat Papua. Sesuai dengan UU No 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua, pemerintah pusat memberikan dana otonomi khusus kepada Provinsi Papua yang berlaku sejak tahun 2002. Dana otonomi khusus Provinsi Papua digunakan untuk meningkatkan taraf hidup, kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat serta pemenuhan hak dasar masyarakat Papua. Porsi dana otonomi khusus bidang pendidikan dan kesehatan diprioritaskan yaitu sekurang-kurangnya sebesar 30% untuk bidang pendidikan dan 15% untuk bidang kesehatan, besaran bidang kedua tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001.

Gambar 2.43

Perbandingan Dana OTSUS dan Perkembangan IPM Papua Tahun 2010-2019



Sumber : Laporan BI Tahun 2020

Peningkatan penerimaan dana otsus sejak tahun 2010 hingga 2019 yang diterima oleh Provinsi Papua diharapkan dapat mengurangi kesenjangan sosial,

pendidikan dan kesehatan. Dalam pelaksanaan otonomi khusus di Papua apabila dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Papua terus mengalami peningkatan selama periode 2010 hingga 2019.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Jika diperhatikan pada tingkat aspek kebijakan yang dituangkan dalam RKPD tahun 2018, terindikasi arah kebijakan yang disusun dan diimplementasikan selaras dengan RPJMD tahun 2013-2018 demikian pula RKPD 2019 dalam RPJMD 2019-2023. Terutama apabila disandingkan antara kebijakan RPJMD dengan prioritas pembangunan dalam RKPD. Namun hal tersebut belum menjamin bahwa ada keselarasan juga antara rencana program yang diimplementasikan dalam RKPD dengan RPJMD. Untuk itu penting sekali dipetakan dan dianalisis keselarasan program antara RKPD dengan RPJMD, sebelum ditunjukkan hasil evaluasi kinerja RKPD tahun 2019. Evaluasi kinerja RKPD tahun 2019 dilakukan mempedomani Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pembagian kewenangan didasarkan pada urusan wajib yang terbagi atas urusan wajib terkait pelayanan dasar dan tidak terkait serta urusan pilihan. **Terkait Pelayanan Dasar** terbagi: (1) Pendidikan, (2) Kesehatan, (3) Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, (4) Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman, (5) Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, dan (7) Sosial. **Tidak Terkait Pelayanan Dasar**, meliputi: (1) Tenaga Kerja, (2) Pemberdayaan Perempuan dan Pelayanan Anak, (3) Pangan, (4) Pertahanan, (5) Lingkungan Hidup, (6) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, (7) Pemberdayaan Masyarakat dan desa, (8) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, (9) Perhubungan, (10) Komunikasi dan Informasi, (11) Koperasi dan UKM, (12) Penanaman Modal, (13) Keper mudaan dan Olahraga, (14) Statistik, (15) Persandian, (16) Kebudayaan, (17) Perpustakaan, dan (18) Kearsipan. Kemudian **Urusan Pilihan** meliputi: (1) Kelautan dan Perikanan, (2) Pariwisata, (3) Pertanian, (4) Kehutanan, (5) Energi dan Sumber Daya Mineral, (6) Perdagangan, (7) Perindustrian, dan (8) Transmigrasi. **Urusan Penunjang** meliputi: (1) Perencanaan,

(2) Pengawasan, (3) Keuangan, dan (4) Penelitian dan Pengembangan. Kemudian urusan pendukung meliputi biro-biro yang bergabung dalam Sekretariat Daerah, Sekretariat MRP dan DPRD.

2.2.1 Evaluasi Tingkat Kepatuhan (Konsistensi Antara Program RPJMD 2019-2023 dengan RKPD 2019)

Evaluasi tingkat kepatuhan atau konsistensi antar program dilakukan berdasarkan pasal 177 Permendagri 86 Tahun 2017, menyatakan Program dan kegiatan dalam KUA dan PPAS dan RAPBD harus konsisten dengan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dokumen perencanaan pembangunan daerah yang dimaksud disebutkan dalam Pasal 11 Permendagri 86 Tahun 2017 terdiri dari dokumen pembangunan daerah dan dokumen perangkat daerah. Dokumen-dokumen tersebut adalah, RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA dan RENJA. Evaluasi ini bertujuan menelaah konsistensi program-program dari dokumen-dokumen perencanaan. Dalam hal ini program dalam RPJMD yang diturunkan ke RKPD tahun 2019 sampai APBD atau sebaliknya. Dari pernyataan tersebut notasi yang dirumuskan dalam evaluasi ini ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel. 2.10.

Kriteria Penilaian Konsistensi Program RPJMD 2019-2023 dengan RKPD 2019

No.	Interval	Kriteria Penilaian	Kategori
1.	$\dots \geq 75 \%$	Konsisten	Baik
2.	$\dots \leq 75 \%$	Konsisten	Kurang Baik
3.	0 (tidak ada)	Konsisten	Buruk

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Dari analisis yang telah dilakukan pada urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar diperoleh urusan Pendidikan, Perumahan dan Pemukiman konsisten (dibawah 75 %) dengan kategori kurang baik sedangkan urusan Kesehatan, Pekerjaan Umum serta Sosial kategori baik dengan tingkat konsisten (diatas 75%). Pada urusan wajib tidak terkait pelayanan dasar tingkat konsistennya kategori kurang

baik atau (dibawah 75%) yaitu urusan Perpustakaan dan Kearsipan dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak. Untuk urusan pilihan tingkat konsistensinya sebagian besar kategori kurang baik (dibawah 75%). Terdapat pula tingkat konsistensinya sangat kurang atau kategori buruk yaitu urusan pangan dan transmigrasi. Adapun Tingkat konsistensi Program pada urusan penunjang yang terdiri dari urusan perencanaan, pengawasan dan keuangan, rata-rata konsistennya (diatas 75%) kategori baik. Pada unsur pendukung yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan MRP termasuk urusan penghubung tingkat konsistensi programnya kategori baik semua dengan tingkat konsistensi (diatas 75%).

2.2.2 Evaluasi Tingkat Kepatuhan (Konsistensi antara program RKPD 2019 dengan APBD 2019)

Selanjutnya evaluasi tingkat kepatuhan atau konsistensi antar program antara RKPD Tahun 2019 dengan APBD Tahun 2019. Sumber data yang digunakan dari APBD adalah dikaji dari TP2K Tahun 2019. Seperti halnya evaluasi konsistensi antara RKPD dan RPJMD, evaluasi ini juga bertujuan menelaah konsistensi program lebih spesifik yang diimplementasikan dalam tahun 2019. Dari pernyataan tersebut notasi yang dirumuskan dalam evaluasi ini adalah :

Tabel. 2.11.

Kriteria Penilaian Konsistensi Program RKPD 2019 dengan APBD 2019

No.	Interval	Kriteria Penilaian	Kategori
1.	8	Konsisten	Baik sekali
2.	70 % ≤ 84 %	Konsisten	Cukup Baik
3.	51 % ≤ 69 %	Konsisten	Kurang baik
4.	.. ≤ 50 %	Konsisten	Buruk

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Dari analisis yang telah dilakukan pada urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar diperoleh urusan kesehatan, konsisten dengan kategori baik sekali karena (diatas 85 %) program dalam RKPD 2019 diakomodasi dalam APBD 2019.

Sedangkan urusan Pendidikan, Pekerjaan Umum, Sosial, ketentraman dan ketertiban kategori baik dengan tingkat konsisten cukup baik, karena program dalam RKPD sekitar diatas 70% diakomodasi dalam APBD 2019. Urusan perumahan berada ada kategori buruk karena dibawah 50% programnya tidak diakomodasi dalam APBD 2019. Pada urusan wajib tidak terkait pelayanan dasar tingkat konsistennya dengan kategori cukup baik yaitu urusan Perhubungan, Komunikasi dan Informasi, Koperasi dan UKM, Pemuda dan Olahraga, Persandian, Kebudayaan, Perpustakaan, Kerasipan, Kelautan dimana (didas 85%) programnya diakomodir dalam APBD 2019. Pada Urusan pilihan yang meliputi urusan Perikanan, Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kehutanan, Energi dan Sumberdaya Mineral, dan Perindustrian dimana (didas 85%) programnya diakomodir dalam APBD 2019 tingkat konsistensinya berada pada kategori cukup baik. Pada urusan pilihan konsisten dengan kategori kurang baik yaitu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Penanaman Modal karena (didas 50%) programnya diakomodir dalam APBD 2019. Sedangkan urusan pilihan yang konsisten dengan kategori buruk yaitu urusan Pangan, Lingkungan Hidup, Kependudukan dan Catatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, karena dibawah 50% program dalam RKPD terakomodir dalam APBD 2019. Pada urusan pendukung dalam hal ini SKPD yang tergabung dalam Sekretariat Daerah dan urusan penunjang seperti perencanaan, pengawasan dan keuangan tingkat konsistensinya baik sekali (didas 85%). Terdapat urusan pilihan yang sebagian programnya tidak diakomodasi dalam RKPD Tahun 2019 yaitu Lingkungan Hidup, Pemuda dan Olahraga, Perikanan dan Kelautan, Pertanian, Peternakan, Energi Sumberdaya Mineral, Tenaga Kerja, perumahan dan Perdagangan serta penelitian serta penelitian dan pengembangan. Urusan-urusan tersebut yang diakomodasi dalam APBD 2019 berupa Belanja Lintas SKPDnya.

2.2.3 Evaluasi Tingkat Kepatuhan (Konsistensi Antara Prioritas Program Dalam RKPD 2019 Dengan Program APBD 2019)

Evaluasi tingkat kepatuhan antara program-program prioritas yang telah dirumuskan dalam RKPD tahun 2019, yang diakomodir dalam APBD Tahun 2019

sangat penting. Hal ini dilakukan sesuai dengan Permendagri 86 Tahun 2017 mengisyaratkan bahwa sesungguhnya program-program yang dievaluasi dalam RKPD itu berupa program-program prioritas. Program prioritas dari setiap RKPD biasanya dirumuskan berdasarkan arah kebijakan dan hasil evaluasi untuk menjawab permasalahan pembangunan sebelumnya. Agar memudahkan rumusan evaluasi maka simplifikasi kajian diuraikan dan ditunjukkan dalam tabel berikut :

Tabel. 2.12.

Kriteria Penilaian Konsistensi Program Antara Prioritas RKPD 2019 Dengan APBD 2019

No.	Tingkatan	Kriteria Penilaian	Kategori
1.	Semua	Diakomodasi	Baik sekali
2.	Sebagian besar	Diakomodasi lebih dari 1 program	Baik
3.	Sebagian kecil	Diakomodasi hanya 1 program	Cukup Baik
4.	Tidak ada	Diakomodasi	Kurang baik

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Dari analisis yang telah dilakukan pada urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dari struktur belanja langsung diperoleh urusan Kesehatan dan Pekerjaan Umum kategori baik karena diakomodasi lebih dari satu program prioritasnya dalam APBD tahun 2019, Urusan Pendidikan kategori cukup baik, karena satu program prioritasnya diakomodasi dalam APBD 2019. Sebaliknya pada urusan Perumahan, Sosial, Ketentraman dan Ketertiban kategorinya kurang baik karena tidak ada programnya diakomodasi dalam APBD tahun 2019 sebagai prioritas. Pada urusan wajib tidak terkait dengan pelayanan dasar seperti urusan Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk, statistik, persandian, perpustakaan, kearsipan, pertanahan berada pada kategori kurang baik, karena dalam APBD Tahun 2019 tidak satupun programnya diakomodasi sebagai prioritas, sedangkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Lingkungan Hidup, Komunikasi dan Informasi, Penanaman Modal kategori cukup baik karena dalam APBD Tahun 2019 masing-masing satu programnya yang prioritas diakomodasi. Untuk urusan Perhubungan, Koperasi dan UKM, Pemuda

dan Olahraga, Kebudayaan dan kategori baik, karena lebih dari satu program prioritas diakomodasi dalam APBD Tahun 2019. Pada urusan pilihan terkait kelautan dan perikanan, Pariwisata dan kehutanan, Energi sumberdaya mineral, Perdagangan dan Perindustrian, kategori baik karena lebih dari satu program prioritas diakomodasi dalam APBD Tahun 2019. Di urusan pilihan yang kategori cukup baik adalah urusan pertanian, karena hanya satu program prioritas diakomodasi dalam APBD Tahun 2019. Pada kewenangan urusan penunjang terkait perencanaan dan keuangan kategori baik, karena lebih dari dua program prioritas diakomodasi dalam APBD 2019, sedangkan urusan-urusan lainnya yang melekat sekretariat daerah, DPRD, MRP, urusan penghubung, SDM, Kepegawaian dan Penelitian dan Pengembangan kategori kurang baik, karena tak satu pun programnya terpilih menjadi prioritas dan terakomodasi dalam APBD Tahun 2019.

2.2.4 Evaluasi Terhadap Peruntukan Prioritas dan Realiasi Capaiannya

Evaluasi Prioritas Provinsi dilakukan melalui pendekatan Metode Bayes menggunakan beberapa kriteria tertentu yang diadopsi dari Permendagri Nomor 86 tahun 2017 dengan mencluster program-program dalam RKPD Tahun 2019. Setelah itu dilakukan pemetaan konsistensi antara yang sesuai dengan yang tidak sesuai, dalam APBD Tahun 2019, kemudian ditelusuri realisasinya fisik dan keuangannya, hasilnya ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel. 2.13.
Evaluasi Peruntukkan dan Realisasi Capaiannya

No.	Prioritas Provinsi	Alokasi Anggaran Belanja (Rp.)	Realisasi	
			Keuangan	Fisik
1.	Peningkatan Pembangunan Manusia	125.382.510.000	42,82	43,95
2.	Peningkatan Ekonomi Daerah	362.926.666.146	81,22	74,70
3.	Peningkatan Pelayanan Umum	8.285.300.000	65,77	42,70
4.	Peningkatan Infrastruktur Wilayah	2.414.086.315.104	50,87	58,17
	Total	2.910.680.791.250		

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Dari tabel diatas nampak bahwa konsistensi penetapan prioritas tidak diikuti dengan pengalokasian anggaran (budget) sebagaimana mestinya. Contoh, Penetapan peningkatan pembangunan manusia sebagai prioritas pertama (top priority), mestinya mendapatkan alokasi anggaran terbesar tetapi hasil penelusuran dari anggaran yang diperuntukan berada pada urutan ke tiga, yaitu sebesar Rp 125.382.510.000. Sebaliknya peningkatan infrastruktur wilayah yang diprioritaskan keempat, justru mendapatkan alokasi anggaran (budget) terbesar yaitu sebesar Rp 2.414.086.315.104. Demikian pula penilaian realisasi keuangan dan fisik. Realisasi keuangan kurang baik berada pada prioritas pertama yakni pembangunan manusia sebesar 42,82%, sedangkan realisasi fisik berada pada prioritas ketiga peningkatan pelayanan umum, sebesar Rp 42,70 %. Ketidak konsistenan dalam mengalokasikan anggaran (budget) sesuai dengan urutan yang diprioritaskan dan serapa keierja baik fisik maupun keuangan akan berakibat pada pencapaian visi di akhir periode masa pemerintahan gubernur dan wakil gubernur, sebagaimana telah dirumuskan dalam sasaran-sasaran misi yang dicantumkan dan RPJMD Provinsi Papua Tahun 2019-2023.

2.2.5 Evaluasi Terhadap Capaian Indikator Sasaran Daerah Menurut Prioritas Daerah Tahunan 2019

Salah satu evaluasi substantif yang mestinya dilakukan dalam RKPD setiap tahun adalah evaluasi capaian indikator sasaran menurut prioritas. Evaluasi jenis ini dikandung maksud untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari prioritas-prioritas yang telah ditetapkan pada setiap tahun. Evaluasi jenis ini juga merupakan bagian dari evaluasi capaian RPJMD setiap tahun, karena setiap perumusan prioritas maka pemilihan indikatornya dilakukan dipilih dan dipilah dari indikator-indikator sasaran dalam RPJMD sesuai tahun RKPD. Manfaat lain dari evaluasi jenis ini juga diperlukan untuk membantu merumuskan priritas-prioritas selanjutnya.

Tabel. 2.14.

Evaluasi Capaian Indikator Sasaran Menurut Prioritas Daerah

PD	Prioritas Daerah	Sasaran Tahun 2019	Indikator Sasaran		Realisasi	Keterangan
			Uraian	Target		
PD1	Peningkatan Pembangunan Manusia		Agka rata-rata lama sekolah (tahun)	6,2	6,65	Terlampau
		Terwujudnya kualitas dan akses kesehatan dan gizi	Angka Harapan Hidup	65,8	65,65	Hampir tercapai
			Persentase angka kecukupan gizi (AKF)	100	-	Belum didiskripsikan
		Meningkatnya pemenuhan hak-hak kebutuhan dasar OAP	Prsentase pemenuhan kebutuhan pendidikan, kesehatan, perumahan dan ekonomi OAP	80	-	Belum didiskripsikan
PD2	Peningkatan ekonomi daerah	Terciptanya kawasan strategis yang mendukung pembangunan daerah	Indeks Gini Ratio	0,34	0,36	Tidak tercapai
		Meningkatnya perekonomian dan pengelolaan SDA secara lestari	Prosentase pertumbuhan PDRB	6,57	5,03	Tidak tercapai
PD3	Peningkatan Pelayanan Umum	Meningkatnya pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	-	Belum didiskripsikan
		Meningkatnya fungsi pengawasan dan Evaluasi penyelenggaraan pemerintah eksternal dan internal	Opini BPK	WTP	WTP	Tercapai
PD4	Peningkatan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya kualitas pelayanan infrastruktur	Indeks kepuasan	Baik	--	Belum didiskripsikan

Sumber : Tabel Prioritas dan Indikator Sasaran RKPd Tahunan 2019

Dari tabel di atas nampak bahwa peningkatan pembangunan SDM yang diukur dari indikator angka rata-rata lama sekolah targetnya terlampaui, sedangkan angka harapan hidup hampir tercapai. Adapun indikator persentase angka kecukupan gizi (AKF) dan Presentase pemenuhan kebutuhan pendidikan, kesehatan, perumahan dan ekonomi OAP belum diukur. Pada peningkatan ekonomi daerah yang diukur dari indikator gini ratio dan prosentase pertumbuhan PDRB realisasi targetnya tidak terpenuhi. Peningkatan pelayanan umum kecuali capaian opini BPK yang mengukur indikator Prioritas Pelayanan bisa didiskripsikan realisasinya, sedangkan indeks kepuasan masyarakat belum dapat. Begitu pula indikator indeks kepuasan pada peningkatan infrastruktur wilayah.

2.2.6 Evaluasi Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

Evaluasi kinerja SKPD/OPD dimaksudkan untuk melihat kinerja SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatan sepanjang tahun 2019. Evaluasi ini terbagi dua yakni evaluasi kinerja SKPD/OPD itu sendiri dan Evaluasi dari pelaksanaan Program dan Kegiatan secara rinci. Idealnya evaluasi ini ditujukan kepada indikator kinerja dari setiap kegiatan dan program, tetapi karena ketersediaan data yang terbatas, maka evaluasinya dilakukan pada kinerja capaian/serapan fisik dan anggaran. Adapun untuk perhitungan peringkat kinerja, sebagaimana yang dijelaskan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 menggunakan formula berikut :

1. Rata-rata kinerja (%) diisi dengan rata-rata capaian kinerja;
2. Baris rata-rata capaian kinerja (%) diisi dengan rata-rata capaian kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) setiap program, dengan menjumlahkan persentase realisasi kinerja dan anggaran yang dicapai seluruh kegiatan dibagi dengan jumlah kegiatan dalam program dimaksud;
3. Baris predikat kinerja diisi dengan gradasi nilai (skala intensitas) berdasarkan kinerja yang dicapai pada baris rata-rata capaian kinerja dengan skala nilai peringkat kinerja sebagai berikut:

Tabel. 2.15.**Kriteria Penilaian Berdasarkan Rasio Pencapaian Kinerja**

No.	Interval	Kriteria Penilaian	Notasi
1.	91 % ≤ 100%	Sangat Tinggi	ST
2.	76 % ≤ 90%	Tinggi	T
3.	66 % ≤ 75%	Sedang	S
4.	51% ≤ 65%	Rendah	R
5.	≤ 51%	Sangat Rendah	SR

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Apabila dianalisis secara parsial (masing-masing indikator), maka untuk kriteria penilaian yang Sangat Tinggi (ST) dan Tinggi (T) baik itu pada capaian kinerja maupun penyerapan anggaran dapat diinterpretasikan bahwa capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

Hasil evaluasi kinerja SKPD/OPD melalui serapan/capaian fisik dan anggaran di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Papua tahun 2019 terdiri 53 OPD/SKP. Dengan rata-rata capaian kinerja serapan fisik 19,41 % dan kinerja capaian anggaran sebesar 92,84 persen. Adapun capaian dari masing-masing OPD dapat dilihat pada uraian berikut ini:

Tabel. 2.16.**Kinerja Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan Seluruh SKPD/OPD Tahun 2019**

No	OPD/SKPD	Pagu Dalam DPA (Rp)	Realisasi	
			Keuangan	Fisik
1.	Dinas Pendidikan	342,186,899,000	92,84	19,41
2.	Dinas Kesehatan	267,536,145,700	69,58	0,00
3.	RSUD Jayapura	393,261,368,000	81,69	86,03
4.	RSUD Abepura	208,675,919,446	82,15	84,00
5.	Rumah Sakit Jiwa	61,002,000,000	93,42	60,95
6.	Dinas Pekerjaan Umum dan PR	1,983,536,025,277	73,46	77,95
7.	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Petanahan	1.150,000,000	93,16	19,02
8.	Badan Kesbangpol.	12,000,000,000	36,72	6,58

No	OPD/SKPD	Pagu Dalam DPA (Rp)	Realisasi	
			Keuangan	Fisik
9.	Satuan Polisi Pamong Praja	37,546,000,000	91,01	99,73
10.	Dinas Sosial, Kependudukan dan CAPIL	11,786,189,290	97,38	97,35
11.	Dinas Tenaga Kerja	1.150,000,000	97,22	14,51
12.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB	1,149,500,000	97,24	99,39
13.	Dinas Ketahanan Pangan	3,650,000,000	98,43	96,60
14.	Dinas Pengelola Lingkungan Hidup	3,400,000,000	98,43	94,94
15.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung	9,110,970,000	95,74	98,26
16.	Dinas Perhubungan	129,145,841,803	70,11	74,97
17.	Dinas Komunikasi dan Informasi	77,928,812,000	98,76	98,81
18.	Dinas Kopersi dan UKM	13,516,070,000	88,46	93,76
19.	Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu	7,037,500,000	97,61	95,57
20.	Dinas Olahraga dan Pemuda	1,080,632,480,010	84,73	45,18
21.	Dinas Kebudayaan	7,242,987,108	84,23	16,02
22.	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	1.150.000.000	89,86	100,00
23.	Dinas Kelautan dan Perikanan	60,648,141,000	92,78	91,32
24.	Dinas Pariwisata	15,398,211,000	96,84	100,00
25.	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	32,212,800,000	97,10	100,00
26.	Dinas Perkebunan	11,150,000,000	97,03	81,10
27.	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	15,000,000,000	74,52	78,48
28.	Dinas Kehutanan	113,107,786,980	95,61	95,46
29.	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral	54,300,000,000	98,27	99,71
30.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	10,497,694,675	88,67	7,17
31.	Sekretariat Daerah	1,272,744,500,494	100,17	95,93
32.	Biro Tata Pemerintahan	9,000,000,000	99,90	0,00
33.	Biro Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri	4,000,000,000	92,71	100,00
34.	Biro Hukum	125,133,732,000	98,84	99,83
35.	Biro Organisasi	7,000,000,000	96,33	100,00
36.	Biro Umum	79,281,316,436	71,47	15,09
37.	Biro Perkonomian Daerah dan SDA	600,000,000	99,60	11,17

No	OPD/SKPD	Pagu Dalam DPA (Rp)	Realisasi	
			Keuangan	Fisik
38.	Biro Humas dan Protokol	1,100,000,000	98,46	99,92
39.	Biro Kesra dan Kemasyarakatan	4,468,836,000	92,53	81,88
40.	Biro Layanan Barang dan Jasa	43,500,000,000	91,09	95,98
41.	Biro OTSUS	1,700,000,000	50,17	13,18
42.	Sekretariat DPRD	620,000,000,000	93,03	66,63
43.	Badan Penghubung Daerah	5,000,000,000	89,29	7,22
44.	Sekretariat MRP	239,650,740,000	68,52	65,73
45.	Badan Pengembangan SDM	19,490,600,000	89,98	97,03
46.	Badan Penanggulangan Bencana Darah	1,100,000,000	97,67	1,00
47.	Inspektorat	29,500,000,000	83,49	91,80
48.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	65,767,000,000	94,58	60,44
49.	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	75,341,400,000	85,13	63,58
50.	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	49.250.000.000	89,83	92,03
51.	Badan Kepegawaian Daerah	23,050,000,000	81,08	82,37
52.	Badan Penelitian dan Pengembangan	1.100,000,000	97,76	100

Sumber: Laporan TP2K Tahun 2019

Sepanjang tahun 2019 kinerja OPD/SKPD dari capaian anggaran didominasi kategori Sangat Tinggi (ST) kecuali Biro Otsus dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kategori Rendah (R). Dari kinerja Capaian Fisik juga demikian didominasi oleh kategori Sangat Tinggi (ST) namun terdapat beberapa SKPD yang kinerja capaian fisiknya kategori Rendah (R), yaitu Badan Penanggulangan Bencana, Badan Penghubung Daerah, Biro Perekonomian Daerah, Biro Umum, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Biro Tata Pemerintahan, Dinas Tenaga Kerja, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pencapaian/ realisasi kinerja pelaksanaan program pembangunan pada seluruh OPD/SKPD meskipun dari kinerja capaian anggaran dominan kategori Sangat Tinggi (ST) tetapi realisasi fisik masih jauh memenuhi target.

2.2.6.1 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD

Hasil evaluasi capaian kinerja dan anggaran seluruh OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua tahun 2019 berdasarkan urusan adalah terdiri atas 207 program dan 2,091 kegiatan. Dengan rata-rata capaian kinerja kegiatan sebesar 96,45 persen dan capaian kinerja anggaran mencapai 87,30 persen. Berikut ini diuraikan capaian dari masing-masing OPD berdasarkan tiap urusan pembangunan dapat dilihat pada uraian berikut ini:

2.2.6.1.1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar

2.2.6.1.1.1 Pendidikan

Dinas Pendidikan pada tahun 2019 melaksanakan 10 program dan 89 kegiatan. Secara keseluruhan rata-rata capaian kinerja fisik dari semua program dan kegiatan Dinas Pendidikan tergolong Sangat Rendah (ST) atau sebesar 19,41 persen. Hal ini sangat kontradiktif dengan pencapaian kinerja anggaran mencapai 92,20 persen atau kategori Sangat Tinggi (ST). Secara detail dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel. 2.17.

Capaian Kinerja Program dan Anggaran Dinas Pendidikan Tahun 2019

No	Program dan Kegiatan OPD	Kegiatan		Capaian Kinerja Anggaran (%)
		Jumlah	Capaian Kinerja Fisik (%)	
	Dinas Pendidikan	89	19.41	92.84
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	10	47,58	69,09
2.	Program Peningkatan Sarpras Aparatur	3	36,89	99,85
3.	Program Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	1	100,00	77,22
4.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1	00,00	18,13
5.	Program Pendidikan Menengah Atas	13	14,05	87,75
6.	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	11	24,25	85,10

7.	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	13	7,03	98,41
8.	Program Peningkatan SDM Pendidikan Tinggi	3	00,00	74,97
9.	Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus	18	24,82	96,60
10.	Program Pendidikan Menengah Kejuruan	16	4,82	96.60

Sumber : Data TP2K Tahun 2019 (diolah)

Pada tahun 2019, dari 10 program yang ada pada Dinas Pendidikan terdapat 4 program rutin yang 1 program capaian kinerja anggaran masuk kategori ST sedangkan 1 program masuk kategori tinggi, 1 program kategori sedang, sisanya kategori rendah. Demikian pula capaian kinerja fisiknya kecuali 1 program (Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur) kategori Sangat Tinggi (ST) 3 program lainnya kategori sangat rendah (SR). Untuk program-program di Belanja Langsung diantaranya Program Program Peningkatan Mutu Penduduk dan Tenaga Kependidikan, Manajemen Pelayanan Pendidikan, Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus dan Pendidikan Menengah Kejuruan, capaian kinerja Anggaran Sangat Tinggi (ST) sedangkan 1 program Peningkatan SDM Pendidikan Tinggi capaian kinerja Anggaranya kategori Sedang (S). Sementara itu realisasi capaian fisik dari 6 program-program tersebut kategori Rendag (R). Kondisi ini menunjukkan bahwa pencapaian/ realisasi kinerja pelaksanaan program pembangunan pada Dinas Pendidikan Tahu 2019, dari kinerja realisasi anggaran rata-rata kategori sangat tinggi (ST) namun realisasi fisik masih jauh memenuhi target.

2.2.6.1.1.2 Kesehatan

Dinas Kesehatan tahun 2019 melaksanakan 23 program dan 103 kegiatan. Secara keseluruhan rata-rata capaian kinerja fisik dari semua program dan kegiatan Dinas Kesehatan tergolong rendah (R) atau sebesar 0,00 persen dengan capaian kinerja anggaran mencapai 69,58 persen kategori Tinggi (T). Secara detail dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel. 2.18.**Capaian Kinerja Program dan Anggaran Dinas Kesehatan Tahun 2019**

No	OPD/SKPD	Kegiatan		Capaian Kinerja Anggaran
		Jumlah	Capaian Kinerja Fisik (%)	
	Dinas Kesehatan	103	0,00	69.58
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	12	0,00	91,88
2	Program Peningkatan Sarpras Aparatur	2	0,00	98,00
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	1	0,00	99,84
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	1	0,00	100
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja dan Keuangan	4	0,00	65,19
6	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	11	0,00	62,33
7	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	6	0,00	57,33
8	Program Pengawasan Obat Dan Makanan	1	0,00	42,39
9	Program Pengembangan Obat Asli Indonesia	5	0,00	82,92
10	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	1	0,00	52,15
11	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	3	0,00	6,78
12	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	2	0,00	99,68
13	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	11	0,00	80,84
14	Program Kemitraan Pelayanan kesehatan Masyarakat	1	0,00	96,02
15	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan anak balita	2	0,00	61,41
16	Program peningkatan keselamatan dan ibu melahirkan anak	1	0,00	96,18
17	Program kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan	4	0,00	92,69
18	Program Upaya Kesehatan Perorangan	2	0,00	72,57
19	Program Sumber daya kesehatan	13	0,00	37,20
20	Program peningkatan pelayanan laboratorium	5	0,00	97,06

No	OPD/SKPD	Kegiatan		Capaian Kinerja Anggaran
		Jumlah	Capaian Kinerja Fisik (%)	
21	Program peningkatan data dan informasi	2	0,00	94,97
22	Program peningkatan jiwa masyarakat	1	0,00	99,46
23	Program Upaya kesehatan perorangan	7	0,00	70,57

Sumber : Data TP2K Tahun 2019 (diolah)

Pada tahun 2018, dari 23 program yang ada pada Dinas Kesehatan terdapat 4 program rutin yang 3 program masuk kategori Sangat Tinggi (ST) dalam capaian kinerja anggaran dan 1 program kategori Sedang (S). Untuk program belanja langsung terdapat 7 program capaian kinerja anggaran kategori Sangat Tinggi (ST), yaitu program pengembangan lingkungan sehat, Program kemitraan pelayanan kesehatan, Program kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan, Program peningkatan pelayanan laboratorium, Program pengembangan data/informasi dan Program peningkatan jiwa masyarakat, 4 program kategori Tinggi (T), yang lainnya Sedang (S) bahkan Rendah (R) yaitu program Pengawasan Obat dan Makanan dan Program perbaikan gizi masyarakat. Keseluruhan capaian kinerja fisik di Dinas Kesehatan kategori Rendah (R) yaitu 0,00. Kondisi ini menunjukkan bahwa pencapaian/realisasi kinerja pelaksanaan program pembangunan pada Dinas Kesehatan untuk capaian kinerja anggaran kategori sedang (S) sebesar (69,58) termasuk kinerja capaian fisik belum cukup memenuhi target.

2.2.6.1.1.3 Evaluasi Kinerja Rumah Sakit

Pada tahun 2019 tiga rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura melaksanakan 13 program dan 52 kegiatan, setelah itu Rumah Sakit Umum Daerah Abepura terdiri atas 8 program dan 35 kegiatan, kemudian Rumah Sakit Jiwa terdiri 10 Program dan 41 Kegiatan. Secara keseluruhan capaian kinerja fisik dan anggaran Rumah Sakit Daerah Jayapura dan Abepura tergolong Sangat Tinggi (ST) dengan

capain serapan anggaran 85,75 persen, sedangkan kinerja capaian fisik kategori Tinggi (T) sebesar 76,99. Secara detail dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel. 2.19.

Capaian Kinerja Program dan Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Tahun 2019

No	OPD/SKPD	Kegiatan		Capaian Kinerja Anggaran
		Jumlah	Capaian Kinerja Fisik (%)	
I.	Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura	52	86.03	81.69
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	10	74,40	84,72
2	Program Peningkatan Sarpras Aparatur	5	96.00	93.40
3	Program peningkatan disiplin aparatur	1	100.00	99,92
4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	2	100.00	100,00
5	Program Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	5	76.60	59.57
6	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	2	68.13	68,13
7	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	1	98,84	99,24
8	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	3	81,29	81,16
9	Program Pengadaan, Peningkatan Sarpras Rumkit/rumah sakit jiwa/paru-paru/mata	17	89.97	82,80
10	Program Pemeliharaan Sarpras Rumkit/rumah sakit jiwa/paru-paru/mata	2	67,73	62,19
11	Program kebijakan dan Manajmen pembangunan kesehatan	2	100	100,00
12	Program upaya kesehatan perorangan	1	88,26	88,07
13	Program sumberdaya kesehatan	1	0	0
II	Rumah Sakit Umum Daerah Abepura	28	84,00	82.15
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	12	89.83	83.62
2	Program peningkatan sarpras aparatur	3	93,94	94,26
3	Program peningkatan disiplin aparatur	3	17,65	99,95
4	Program Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	5	100,00	100,00
5	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	3	94,43	87,55
6	Program Pengadaan, Peningkatan Sarpras Rumkit/rumah sakit jiwa/paru-paru/mata	6	72,67	74,83

No	OPD/SKPD	Kegiatan		Capaian Kinerja Anggaran
		Jumlah	Capaian Kinerja Fisik (%)	
7	Program Pemeliharaan Sarpras Rumkit/rumah sakit jiwa/paru-paru/mata	2	97,05	96,97
III	Rumah Sakit Jiwa Abepura	26	60,65	93,42
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	10	94,38	95,92
2	Program peningkatan sarpras aparatur	3	43,52	89,08
3	Program peningkatan disiplin aparatur	2	75,05	99,39
4	Program Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	4	87,42	100,00
5	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	1	100	97,00
6	Program Pengadaan, Peningkatan Sarpras Rumkit/rumah sakit jiwa/paru-paru/mata	6	55,67	96,31

Sumber : Data TP2K Tahun 2019 (diolah)

Berdasarkan tabel di atas, secara keseluruhan capaian kinerja fisik dan keuangan pada Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura kategori Tinggi (T), Demikian pula Rumah Sakit Umum Daerah Abepura, kecuali Rumah Sakit Jiwa Abepura capaian kinerja keuangan tergolong Sangat Tinggi (ST) tetapi capaian kinerja fisik Rendah (R) sebesar (60,95). Kondisi ini menunjukkan bahwa pencapaian/ realisasi kinerja pelaksanaan program pembangunan pada ke tiga rumah sakit tersebut untuk capaian kinerja anggaran kategori Sangat Tinggi (ST) sebesar tetapi capaian kinerja fisik kategori kecuali Rumah Sakit Jiwa kategori Rendah (R) sedangkan dua lainnya Sangat Tinggi (ST). Artinya kecuali kinerja capaian fisik di Rumah Sakit Jiwa Abepura, maka ketiganya cukup memenuhi target.

2.2.6.1.1.4 Evaluasi Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Prestasi kinerja pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang pada tahun 2019 yang terdiri atas 17 program dan 207 kegiatan. Secara keseluruhan rata-rata capaian kinerja fisik dari semua program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang tergolong Tinggi (T) atau sebesar 77, 95 persen dengan capaian kinerja

anggaran mencapai 73,96 persen. Secara detail dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel. 2.20.

Capaian Kinerja Program Dan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2019

No.	OPD/SKPD	Kegiatan		Capaian Kinerja Anggaran
		Jumlah	Capaian Kinerja Fisik	
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	207	77,95	73,46
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	13	99,56	86,53
2	Program Peningkatan Sarpras Aparatur	13	45,48	41,91
3	Program peningkatan disiplin aparatur	2	100	84,38
4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	2	100	99,24
5	Program Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	5	100	86,82
6	Program pembangunan jalan dan jembatan	27	77,73	75,47
7	Program pengembangan saluran drainase/gorong-gorong	5	27,70	31,80
8	Program turap/talur/brojong	27	96,15	82,48
9	Program rehab / pemeliharaan jalan dan jembatan	5	46,51	39,97
10	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	2	100,00	78,81
11	Program penyediaan dan pengolahan air baku	1	100	59,82
12	Program Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	11	55,88	39,75
13	Program Pengendalian Banjir	10	66,42	57,44
14	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	24	83,06	79,11
15	Program peningkatan jalan dan jembatan	39	84,77	82,41
16	Program Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan	2	100,00	82,11
17	Program pemeliharaan dan pengembangan konstruksi	20	99,47	81,46

Sumber : Data TP2K Tahun 2019 (diolah)

Pada tahun 2019, dari 17 program yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang terdapat 5 program rutin 4 program kinerja capaian fisik masuk

kategori ST 2 program masuk kategori Sedang (S) dan Rendah (R) yaitu program peningkatan sarpras aparatur sedangkan capaian kinerja anggaran satu-satunya program yang kategori Sangat Tinggi (ST) yaitu Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. Sedangkan 12 program lainnya 5 program dengan capaian kinerja fisik Sangat Tinggi (ST) yaitu di antaranya adalah Program turap/talur/brojong, Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya, Program penyediaan dan pengolahan air baku, Program Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan dan Program Pemeliharaan dan pengembangan konstruksi, sedangkan kinerja capain anggaran dengan kategori Sangat Tinggi (ST) tidak ada, atau sebagian besar berada pada kategori Tinggi (T). Hampir sebagian besar capaian kinerja fisik berada pada kategori Sedang (S) dan Tinggi (T) bahkan ada yang rendah (R), yaitu Program rehab / pemeliharaan jalan dan jembatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pencapaian/ realisasi kinerja pelaksanaan program pembangunan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang belum memenuhi target.

2.2.6.1.1.5 Evaluasi Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan

Prestasi kinerja pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan sampai dengan tahun 2019 yang terdiri atas 10 program dan 66 kegiatan. Secara keseluruhan rata-rata capaian kinerja fisik dari semua program dan kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan tergolong Sangat Tinggi (ST) atau sebesar 94,93 persen dengan capaian kinerja anggaran mencapai 78,04 persen sampai dengan tahun 2019. Secara detail dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel. 2.21.**Capaian Kinerja Program Dan Anggaran Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Tahun 2019**

No.	OPD/SKPD	Kegiatan		Capaian Kinerja Anggaran
		Jumlah	Capaian Kinerja Fisik	
	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	66	94.93	78.04
1	Program Lingkungan Sehat Perumahan	2	96.93	48.23
2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	10	96.19	88.75
3	Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	2	100.00	76.44
4	Program Pengembangan Perumahan	37	94.79	74.64
5	Program peningkatan disiplin aparatur	1	90.26	98.24
6	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	2	91.89	96.79
7	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	6	95.60	61.39
8	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	4	92.53	99.03
9	Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan	1	90.52	99.75
10	Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/social	1	94.28	96.16
11	Program Lingkungan Sehat Perumahan	66	94.93	78.04

Sumber : Data TP2K Tahun 2019 (diolah)

Pada tahun 2019, dari 10 program yang ada pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan terdapat 5 program rutin yang masuk kategori ST dan 5 program lainnya dengan capaian kinerja Sangat Tinggi (ST) yaitu di antaranya adalah Program Lingkungan Sehat Perumahan, Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, Program Pengembangan Perumahan, Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan dan Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial. Kondisi ini menunjukkan bahwa pencapaian/realisasi kinerja pelaksanaan program pembangunan pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan sudah cukup memenuhi target.

2.2.6.1.1.6 Evaluasi Kinerja Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil

Prestasi kinerja pada Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil sampai dengan tahun 2018 yang terdiri atas 11 program dan 34 kegiatan. Secara keseluruhan rata-rata capaian kinerja fisik dari semua program dan kegiatan Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil tergolong Sangat Tinggi (ST) atau sebesar 92,76 persen dengan capaian kinerja anggaran mencapai 89,62 persen sampai dengan tahun 2019. Secara detail dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel. 2.22.

Capaian Kinerja Program Dan Anggaran Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2019

No	OPD/SKPD	Kegiatan		Capaian Kinerja Anggaran
		Jumlah	Capaian Kinerja Fisik (%)	
	Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil	34	92.76	89.62
1	Pelayanan Kesejahteraan Sosial Berbasis Panti	4	92.96	98.88
2	Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Kesejahteraan Sosial	1	94.39	98.68
3	Perlindungan dan Jaminan Sosial	3	94.19	98.48
4	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	12	92.52	91.93
5	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	2	92.46	48.13
6	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	3	92.63	96.62
7	Program Penataan Administrasi Kependudukan	2	93.20	97.81
8	Program peningkatan disiplin aparatur	1	90.53	99.70
9	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	1	91.04	50.00
10	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1	92.38	46.87

No	OPD/SKPD	Kegiatan		Capaian Kinerja Anggaran
		Jumlah	Capaian Kinerja Fisik (%)	
11	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	4	92.86	93.97

Sumber : Data TP2K Tahun 2019 (diolah)

Pada tahun 2019, dari 11 program yang ada pada Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil terdapat 5 program rutin yang masuk kategori ST dan 6 program lainnya dengan capaian kinerja Sangat Tinggi (ST) yaitu di antaranya adalah Pelayanan Kesejahteraan Sosial Berbasis Panti, Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Kesejahteraan Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya dan Program Penataan Administrasi Kependudukan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pencapaian/realisasi kinerja pelaksanaan program pembangunan pada Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil sudah cukup memenuhi target.

2.2.6.1.1.7 Evaluasi Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung

Prestasi kinerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung sampai dengan tahun 2019 yang terdiri atas 10 program dan 35 kegiatan. Secara keseluruhan rata-rata capaian kinerja fisik dari semua program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung tergolong Sangat Tinggi (ST) atau sebesar 100 persen dengan capaian kinerja anggaran mencapai 93,58 persen sampai dengan tahun 2019. Secara detail dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel. 2.23.

Capaian Kinerja Program Dan Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Tahun 2019

No.	OPD/SKPD	Kegiatan		Capaian Kinerja Anggaran
		Jumlah	Capaian Kinerja Fisik	
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	35	100.00	93.58
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	9	100.00	97.73
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Kampung	3	100.00	99.81
3	Program Pengembangan Data/Informasi	4	100.00	79.99
4	Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan Distrik dan Kampung	3	100.00	90.98
5	Program peningkatan disiplin aparatur	1	100.00	99.81
6	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	1	100.00	63.46
7	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	1	100.00	100.00
8	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	7	100.00	99.77
9	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	2	100.00	100.00
10	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	4	100.00	85.46

Sumber : Data TP2K Tahun 2019 (diolah)

Pada tahun 2019, dari 10 program yang ada pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung terdapat 5 program rutin yang masuk kategori ST dan 5 program lainnya dengan capaian kinerja Sangat Tinggi (ST) yaitu di antaranya adalah Program Pemberdayaan Masyarakat Kampung, Program Pengembangan Data/Informasi, Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan Distrik dan Kampung, Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pencapaian/realisasi kinerja pelaksanaan program pembangunan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung sudah cukup memenuhi target.

2.2.6.1.1.8 Evaluasi Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Prestasi kinerja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sampai dengan tahun 2018 yang terdiri atas 6 program dan 27

kegiatan. Secara keseluruhan rata-rata capaian kinerja fisik dari semua program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana tergolong Sangat Tinggi (ST) atau sebesar 100 persen dengan capaian kinerja anggaran mencapai 97,25 persen sampai dengan tahun 2019. Secara detail dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel. 2.24.

Capaian Kinerja Program Dan Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tahun 2019

No	OPD/SKPD	Kegiatan		Capaian Kinerja Anggaran
		Jumlah	Capaian Kinerja Fisik (%)	
	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	27	100.00	97.25
1	Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam pembangunan	5	100.00	99.31
2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	9	100.00	92.73
3	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	5	100.00	99.77
4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	1	100.00	100.00
5	Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Perlindungan Perempuan dan Anak	5	100.00	99.15
6	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	2	100.00	100.00

Sumber : Data TP2K Tahun 2019 (diolah)

Pada tahun 2019, dari 10 program yang ada pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana terdapat 3 program rutin yang masuk kategori ST dan 3 program lainnya dengan capaian kinerja Sangat Tinggi (ST) yaitu di antaranya adalah Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam pembangunan, Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak dan Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Perlindungan Perempuan dan Anak. Kondisi ini menunjukkan bahwa pencapaian/realisasi kinerja

pelaksanaan program pembangunan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sudah cukup memenuhi target.

2.2.6.1.1.9 Evaluasi Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Prestasi kinerja pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sampai dengan tahun 2019 yang terdiri atas 8 program dan 37 kegiatan. Secara keseluruhan rata-rata capaian kinerja fisik dari semua program dan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tergolong Sangat Tinggi (ST) atau sebesar 95,54 persen dengan capaian kinerja anggaran mencapai 97,52 persen sampai dengan tahun 2019. Secara detail dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel. 2.25.

Capaian Kinerja Program Dan Anggaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2019

No	Pogram dan Kegiatan OPD	Kegiatan		Capaian Kinerja Anggaran (%)
		Jumlah	Capaian Kinerja Fisik (%)	
	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	37	95.54	97.52
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	10	92.55	99.62
2.	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	3	95.01	99.49
3.	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	3	96.67	91.73
4.	Program peningkatan disiplin aparatur	1	100.00	100.00
5.	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	1	93.77	89.50
6.	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	10	99.00	96.85

No	Pogram dan Kegiatan OPD	Kegiatan		Capaian Kinerja Anggaran (%)
		Jumlah	Capaian Kinerja Fisik (%)	
7.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	6	94.72	98.65
8.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	3	94.07	96.25

Sumber : Data TP2K Tahun 2019 (diolah)

Pada tahun 2019, dari 8 program yang ada pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terdapat 5 program rutin yang masuk kategori ST dan 3 program lainnya dengan capaian kinerja Sangat Tinggi (ST) yaitu di antaranya adalah Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah, Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa pencapaian/realisasi kinerja pelaksanaan program pembangunan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sudah cukup memenuhi target.

2.2.6.1.1.10 Evaluasi Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Prestasi kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sampai dengan tahun 2019 yang terdiri atas 8 program dan 32 kegiatan. Secara keseluruhan rata-rata capaian kinerja fisik dari semua program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tergolong Sangat Tinggi (ST) atau sebesar 100 persen dengan capaian kinerja anggaran mencapai 95,15 persen sampai dengan tahun 2019. Secara detail dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel. 2.26.

Capaian Kinerja Program Dan Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2019

No.	OPD/SKPD	Kegiatan		Capaian Kinerja Anggaran
		Jumlah	Capaian Kinerja Fisik	
	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	32	100.00	95.15
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	11	100.00	90.30
2	Program peningkatan disiplin aparatur	1	100.00	99.41
3	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	1	100.00	97.97
4	Program Peningkatan Pelayanan Perizinan Penanaman Modal	3	100.00	97.43
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	3	100.00	96.87
6	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	2	100.00	95.63
7	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	8	100.00	99.12
8	Program Peningkatan, Pengawasan, Pengendalian Penanaman Modal	3	100.00	95.70

Sumber : Data TP2K Tahun 2019 (diolah)

Pada tahun 2019, dari 8 program yang ada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdapat 5 program rutin yang masuk kategori ST dan 3 program lainnya dengan capaian kinerja Sangat Tinggi (ST) yaitu di antaranya adalah Program Peningkatan Pelayanan Perizinan Penanaman Modal, Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi dan Program Peningkatan, Pengawasan, Pengendalian Penanaman Modal. Kondisi ini menunjukkan bahwa pencapaian/realisasi kinerja pelaksanaan program pembangunan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sudah cukup memenuhi target.

2.2.6.1.1.11 Evaluasi Kinerja Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup

Prestasi kinerja pada Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup sampai dengan tahun 2019 yang terdiri atas 11 program dan 41 kegiatan. Secara keseluruhan rata-rata capaian kinerja fisik dari semua program dan kegiatan Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup tergolong Sangat Tinggi (ST) atau sebesar 95,24 persen dengan capaian kinerja anggaran mencapai 93,05 persen sampai dengan tahun 2019. Secara detail dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel. 2.27.

Capaian Kinerja Program Dan Anggaran Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2019

No	OPD/SKPD	Kegiatan		Capaian Kinerja Anggaran
		Jumlah	Capaian Kinerja Fisik (%)	
	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup	41	95.24	93.05
1	Program Mitigasi dan Adaptasi Dampak Perubahan Iklim	2	97.11	99.84
2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	8	94.74	93.34
3	Program pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan dikawasan-kawasan konservasi laut dan hutan	2	96.91	79.10
4	Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan SDA dan LH	5	95.06	99.75
5	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	8	96.05	99.40
6	Program peningkatan disiplin aparatur	1	90.88	100.00
7	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	1	90.10	97.79
8	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	2	95.09	100.00
9	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	5	94.05	88.60
10	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	6	96.76	83.76
11	Program Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	1	93.33	73.03

Sumber : Data TP2K Tahun 2019 (diolah)

Pada tahun 2019, dari 11 program yang ada pada Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup terdapat 5 program rutin yang masuk kategori ST dan 6 program lainnya dengan capaian kinerja Sangat Tinggi (ST) yaitu di antaranya adalah Program Mitigasi dan Adaptasi Dampak Perubahan Iklim, Program pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan dikawasan-kawasan konservasi laut dan hutan, Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan SDA dan LH, Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dan Program Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kondisi ini menunjukkan bahwa pencapaian/realisasi kinerja pelaksanaan program pembangunan pada Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup sudah cukup memenuhi target.

2.2.6.1.1.12 Evaluasi Kinerja Dinas Perhubungan

Prestasi kinerja pada Dinas Perhubungan sampai dengan tahun 2018 yang terdiri atas 8 program dan 48 kegiatan. Secara keseluruhan rata-rata capaian kinerja fisik dari semua program dan kegiatan Dinas Perhubungan tergolong Sangat Tinggi (ST) atau sebesar 95,80 persen dengan capaian kinerja anggaran mencapai 64,29 persen sampai dengan tahun 2019. Secara detail dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel. 2.28.

Capaian Kinerja Program Dan Anggaran Dinas Perhubungan Tahun 2019

No	OPD/SKPD	Kegiatan		Capaian Kinerja Anggaran
		Jumlah	Capaian Kinerja Fisik (%)	
	Dinas Perhubungan	48	95.80	64.29
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	13	94.40	84.54
2	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	3	95.29	35.33
3	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	22	97.55	48.98

No	OPD/SKPD	Kegiatan		Capaian Kinerja Anggaran
		Jumlah	Capaian Kinerja Fisik (%)	
4	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	1	90.32	23.98
5	Program peningkatan disiplin aparatur	2	95.21	96.66
6	Program peningkatan pelayanan angkutan	2	100.00	81.52
7	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1	92.32	38.10
8	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	4	91.62	96.22

Sumber : Data TP2K Tahun 2019 (diolah)

Pada tahun 2019, dari 8 program yang ada pada Dinas Perhubungan terdapat 4 program rutin yang masuk kategori ST dan 4 program lainnya dengan capaian kinerja Sangat Tinggi (ST) yaitu di antaranya adalah Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan, Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan, Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas dan Program peningkatan pelayanan angkutan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pencapaian/realisasi kinerja pelaksanaan program pembangunan pada Dinas Perhubungan sudah cukup memenuhi target.

2.2.6.1.1.13 Evaluasi Kinerja Dinas Kebudayaan

Dinas Kebudayaan pada tahun 2018 melakukan 6 program dan 16 kegiatan. Secara keseluruhan rata-rata capaian kinerja fisik dari semua program dan kegiatan Dinas Kebudayaan tergolong Sangat Rendah (ST) atau sebesar 16,02 persen dengan capaian kinerja anggaran mencapai 84,23 persen. Secara detail dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel. 2.29.**Capaian Kinerja Program Dan Anggaran Dinas Kebudayaan Tahun 2019**

No.	OPD/SKPD	Kegiatan		Capaian Kinerja Anggaran
		Jumlah	Capaian Kinerja Fisik	
	Dinas Kebudayaan	16	16,02	84.23
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	6	42.16	91.69
2	Program Peningkatan Sarpras Aparatur	2	79.81	100
3	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	2	93.77	99.92
4	Program Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	3	91.76	66.67
5	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	2	0,00	13,87
6	Pogram Pengelolaan Keberagaman Budaya	1	2,00	99,77
7	Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya	1	0,00	100,00

Sumber : Data TP2K Tahun 2019 (diolah)

Pada tahun 2019, dari 16 program yang ada pada Dinas Kabudayaaan terdapat 4 program rutin dan 3 program yang masuk kategori Sangat Tinggi (ST) kinerja capaian anggarannya dan 2 Program yangkinerja capaian fisiknya Sangat Tinggi (ST) . Pada program belanja langsung terdapat 2 Program yang capaian kinerja anggarannya kategori Sangat Tinggi (ST) yaitu Program Pengelolaan Keberagaman Budaya dan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya. Akan tetapi peningkatan capaian kinerja anggaran tidak signifikan dengan kinerja capaian fisik. Kondisi ini menunjukkan bahwa pencapaian/ realisasi kinerja pelaksanaan program pembangunan pada Dinas Kebudayaan kurang memenuhi target.

2.2.6.1.1.14 Evaluasi Kinerja Dinas Olah Raga dan Pemuda

Dinas Olah Raga dan Pemuda Pada tahun 2018 melaksanakan 15 program dan 56 kegiatan. Secara keseluruhan rata-rata capaian kinerja fisik dari semua program dan kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga tergolong Rendah (R) atau sebesar 45,18 persen dengan capaian kinerja anggaran mencapai 84,73 persen. Secara detail dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel. 2.30.**Capaian Kinerja Program Dan Anggaran Dinas Olah Raga dan Pemuda Tahun 2019**

No.	OPD/SKPD	Kegiatan		Capaian Kinerja Anggaran
		Jumlah	Capaian Kinerja Fisik	
	Dinas Olah Raga dan Pemuda	56	45,18	84,73
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	100.00	94,06
2	Program Peningkatan Sarpras Aparatur	3	100.00	58,55
3	Program peningkatan disiplin aparatur	10	100.00	30,60
4	Program Peningkatan Peren serta kepemudaan	4	97.75	46.28
5	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	3	100.00	96.90
6	Program Pengembangan Manajemen Olahraga	6	100.00	79.38
7	Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga	2	100.00	82.53
8	Program peningkatan sarpras olahraga	5	100.00	59.26
9	Pengembangan Prasarana PON	1	100.00	100.00
10	Program penyelenggaraan Kompetisi/PON/Kejuaraan Olahraga	2	95,52	84,02
11	Program peningkatan kordinasi dan sinergitas untuk penyelenggaraan PONXX Tahun 2020	4	33,26	95,46
12	Program pembangunan dan Pengembangan Sarpras Olahraga bertaraf Nasional dan Internasional	4	35,41	80,86
13	Program mendorong partisipasi dan peran aktif pemuda dalam berbagai bidang pembangunan	1	100,00	91,61
14	Program Pembinaan Atlit Muda dan Olahraga Prestasi	1	85,01	89,26
15	Program Penyelenggaraan PON	9	100.00	74.78

Sumber : Data TP2K Tahun 2019 (diolah)

Pada tahun 2019, dari 15 program yang ada pada Dinas Pemuda dan Olahraga terdapat 3 program rutin yang 1 program masuk kategori Sangat Tinggi (ST) dan program lainnya dengan capaian kinerja Rendah (R) yaitu di antaranya Program

Peningkatan Sarpras Aparatur dan Peningkatan Disiplin ASN. Pada Program Belanja Langsung terdapat 9 program dengan kategori kinerja capaian fisik Sangat Tinggi (ST) dan 3 program ketagori kinerja capaian anggaran Sangat Tinggi (ST) Kondisi ini menunjukkan bahwa pencapaian/realisasi kinerja pelaksanaan program pembangunan pada Dinas Olah Raga dan Pemuda sudah cukup memenuhi target.

2.2.6.1.1.15 Evaluasi Kinerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah

Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah tahun 2019 melaksanakan 4 program dan 19 kegiatan yang dilaksanakan. Secara keseluruhan rata-rata capaian kinerja fisik penyerapannya masuk kategori Tinggi (T) atau sebesar 100 persen dengan capaian kinerja anggaran mencapai 89,86 persen. Secara detail dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel. 2.31.

Capaian Kinerja Program Dan Anggaran Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Tahun 2019

No.	OPD/SKPD	Kegiatan		Capaian Kinerja Anggaran
		Jumlah	Capaian Kinerja Fisik	
	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	19	100,00	89,86
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	12	100,00	86,06
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	2	100,00	100,00
3	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	1	100,00	98,95
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	4	100,00	100,00

Sumber : Data TP2K Tahun 2019 (diolah)

Adapun capaian kinerja Program/Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Taun 2019, untuk kinerja capain fisik, 4 program menunjukkan kategori yang Sangat Tinggi (ST), sedangkan untuk kinerja capain Anggaran, terdapat 3 program menunjukkan kategori Sangat Tinggi (ST), dan 1 program menunjukkan kategori Tinggi (T). Dari kondisi ini menjelaskan bahwa

pencapaian target/ realisasi kinerja pelaksanaan program pembangunan pada Dinas Perpustakaan dan Asrip Daerah untuk kinerja anggaran dan kinerja fisik, sangat memenuhi target.

2.2.6.1.2 Urusan Pilihan

2.2.6.1.2.1 Kelautan dan Perikanan

Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2019 melaksanakan 13 program dan 48 kegiatan, secara keseluruhan rata-rata capaian kinerja fisik dan kinerja anggaran penyerapannya masuk kategori Sangat Tinggi (ST) atau sebesar 91,32 persen Kinerja fisik dan kinerja anggaran mencapai 93,82 persen. Secara detail dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel. 2.32.

Capaian Kinerja Program Dan Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2019

No	OPD/SKPD	Kegiatan		Capaian Kinerja Anggaran
		Jumlah	Capaian Kinerja Fisik (%)	
	Dinas Kelautan dan Perikanan	49	91,32	93,82
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	7	100,00	108,29
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1	100,00	138,48
3	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1	0,00	0,00
4	Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir	1	100,00	99,82
5	Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan	2	100,00	94,16
6	Program pengembangan budidaya perikanan	4	100,00	100,49
7	Program Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	3	96,78	99,95
8	Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	1	100,00	99,69
9	Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar	1	100,00	99,91
10	Program Pengembangan Data dan Informasi	1	100,00	100,00

No	OPD/SKPD	Kegiatan		Capaian Kinerja Anggaran
		Jumlah	Capaian Kinerja Fisik (%)	
11	Program Peningkatan Mutu Produksi Nelayan, Pengelolaan dan Pemasaran	6	99,92	99,93
12	Program Optimalisasi dan Pembangunan Prasarana Perikanan Tangkap	7	75,43	78,86
13	Program Optimalisasi Fungsi dan Pelayanan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD)	8	96,64	98,37
14	Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	6	83,54	99,06

Sumber : Data TP2K Tahun 2019 (diolah)

Adapun capaian kinerja Program yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2019, capaian kinerja fisik, 11 program menunjukkan kategori yang Sangat Tinggi (ST) pencapaiannya, 1 program kategori Tinggi (T), 1 Program kategori Sedang (S), dan 1 Program kategori Sangat Rendah (SR) , sedangkan untuk kinerja Anggaran 12 program penyerapannya menunjukkan kategori Sangat Tinggi (ST), 1 program menunjukkan kategori Tinggi (T). Pada tabel diatas nampak ada capaian kinerja anggaran yang melebihi 100,00 persen capaiannya, yaitu program Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Hal tersebut terjadi dikarenakan pendobolan meng update progress pada program tersebut (2 kali mengentry). Kondisi ini menjelaskan bahwa pencapaian target/realisasi kinerja pelaksanaan program pembangunan pada Dinas Kelautan dan Perikanan untuk kinerja anggaran dan kinerja fisik sangat memenuhi target.

2.2.6.1.2.2 Dinas Pariwisata

Dinas Pariwisata tahun 2019 melaksanakan 7 program dan 32 kegiatan, secara keseluruhan rata-rata capaian kinerja fisik penyerapannya masuk kategori Tinggi (T) atau sebesar 80,00 persen sedangkan capaian kinerja anggaran masuk kategori Sangat Tinggi (ST) yaitu mencapai 97,05 persen. Secara detail dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel. 2.33.**Capaian Kinerja Program Dan Anggaran Dinas Pariwisata Tahun 2019**

No.	OPD/SKPD	Kegiatan		Capaian Kinerja Anggaran
		Jumlah	Capaian Kinerja Fisik	
	Dinas Pariwisata	32	80,00	97,05
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	8	62,57	85,18
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	2	19,54	96,04
3	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	2	2,47	5,28
4	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	6	85,17	99,06
5	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	5	88,47	98,09
6	Program Pengembangan Kemitraan	5	81,25	98,12
7	program pengembangan kapasitas	4	31,58	98,91

Sumber : Data TP2K Tahun 2019 (diolah)

Adapun capaian kinerja Program yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata , untuk capaian kinerja fisik, 3 program menunjukkan kategori Tinggi (T) pencapaiannya, 1 program kategori Rendah (R), 3 Program kategori Sangat Rendah (SR). Untuk kinerja Anggaran, 5 program penyerapannya menunjukkan kategori Sangat Tinggi (ST), 1 program menunjukkan kategori Tinggi (T) dan 1 Program masuk kategori Sangat Rendah (SR). Kondisi ini menjelaskan bahwa pencapaian target/ realisasi kinerja pelaksanaan program pembangunan pada Dinas Pariwisata untuk kinerja anggaran dan kinerja fisik masih sangat memenuhi target.

2.2.6.1.2.3 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura tahun 2019 melaksanakan 7 program dan 19 kegiatan yang dilaksanakan, secara keseluruhan rata-rata capaian kinerja fisik dan capaian kinerja anggaran penyerapannya masuk kategori Sangat Tinggi (ST) atau sebesar 100,00 persen kinerja fisik dan mencapai 98,72 persen kinerja anggaran. Secara detail dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel. 2.34.**Capaian Kinerja Program Dan Anggaran Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2019**

No.	OPD/SKPD	Kegiatan		Capaian Kinerja Anggaran
		Jumlah	Capaian Kinerja Fisik	
	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	21	100,00	98,72
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		100,00	98,48
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		100,00	99,75
3	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)		100,00	98,43
4	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan		100,00	99,29
5	Program Perencanaan Pembangunan		100,00	99,73
6	Program Peningkatan Sumberdaya Pertanian		100,00	99,13
7	Pengembangan Tanaman Spesifik Lokal		100,00	99,74

Sumber : Data TP2K Tahun 2019 (diolah)

Dari 7 program yang dilaksanakan oleh Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura seperti pada tabel capaian kinerja diatas, menunjukkan kategori Sangat Tinggi (ST). Kondisi ini menjelaskan bahwa pencapaian target/ realisasi kinerja pelaksanaan program pembangunan pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura sangat memenuhi target.

2.2.6.1.2.4 Dinas Perkebunan

Dinas Perkebunan tahun 2019 melaksanakan 7 program dan 24 kegiatan yang dilaksanakan, secara keseluruhan rata-rata capaian kinerja fisik penyerapannya masuk kategori Sangat Rendah (SR) atau sebesar 31,23 persen dan capaian kinerja anggaran mencapai 105,97 persen kategori Sangat Tinggi (ST). Secara detail dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel. 2.35.**Capaian Kinerja Program Dan Anggaran Dinas Perkebunan Tahun 2019**

No.	OPD/SKPD	Kegiatan		Capaian Kinerja Anggaran
		Jumlah	Capaian Kinerja Fisik	
	Dinas Perkebunan	24	31,23	105,97
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	9	20,67	117,40
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	2	53,41	106,51
3	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	2	11,24	144,12
4	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	2	14,30	88,50
5	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	1	30,48	99,95
6	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	6	39,33	111,63
7	Program Perencanaan Pembangunan	2	55,91	100,00

Sumber : Data TP2K Tahun 2019 (diolah)

Pada tabel capaian kinerja diatas, dari 7 program yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan, untuk kinerja fisik, 2 program menunjukkan kategori yang Rendah (R) pencapaiannya, lainnya kategori Sangat Rendah (SR). Sedangkan untuk kinerja serapan anggaran, terdapat 6 program menunjukkan kategori Sangat Tinggi (ST), dan 1 program kategori Tinggi (T). 6 program diantara yang kategori Sangat Tinggi itu persentasenya melewati 100,00 persen. Hal tersebut terjadi dikarenakan Dinas yang bersangkutan kurang intens melakukan updating progress pada program tersebut terjadi pendobelan (mengentry realisasi 2 kali pada program yang sama). Kondisi ini menjelaskan bahwa pencapaian target/ realisasi kinerja pelaksanaan program pembangunan pada Dinas Perkebunan untuk kinerja anggaran sangat memenuhi target, sedangkan kinerja fisik belum memenuhi target.

2.2.6.1.2.5 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Prestasi kinerja pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2019 dari 10 program dan 27 kegiatan yang dilaksanakan, secara keseluruhan rata-rata capaian

kinerja fisik penyerapannya masuk kategori Tinggi (T) atau sebesar 78,48 persen sedangkan capaian kinerja anggaran mencapai 74,52 persen masuk kategori Sedang (T). Secara detail dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel. 2.36.

Capaian Kinerja Program Dan Anggaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2019

No	OPD/SKPD	Kegiatan		Capaian Kinerja Anggaran
		Jumlah	Capaian Kinerja Fisik (%)	
	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	27	78,48	74,52
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	9	97,65	97,65
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1	100,00	100,00
3	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	1	100,00	90,08
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1	100,00	100,00
5	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	3	99,89	99,85
6	Program peningkatan produksi hasil peternakan	6	72,29	67,38
7	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	1	100,00	100,00
8	Program Perencanaan Pembangunan	3	100,00	99,75
9	Program Peningkatan keamanan pangan dan ketahanan pangan asal hewan	1	100,00	98,84
10	Program Peningkatan Kelembagaan Penyuluh	1	100,00	100,00

Sumber : Data TP2K Tahun 2019 (diolah)

Pada tabel capaian kinerja diatas, dari 10 program yang dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, terdapat 9 program yang kinerja fisiknya menunjukkan kategori yang Sangat Tinggi (ST) pencapaiannya, dan 1 program kategori Sedang (S), sedangkan kinerja anggaran (penyerapan) 8 program menunjukkan kategori Sangat Tinggi (ST), 1 program kategori Tinggi (T) dan 1 program masuk kategori Sedang (S). Kondisi ini menjelaskan bahwa pencapaian

target/ realisasi kinerja pelaksanaan program pembangunan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sangat memenuhi target

2.2.6.1.2.6 Dinas Kehutanan

Prestasi kinerja pada Dinas Kehutanan tahun 2019 dari 11 program dan 105 kegiatan yang dilaksanakan, secara keseluruhan rata-rata capaian kinerja fisik dan kinerja anggaran penyerapannya masuk kategori Sangat Tinggi (ST) atau sebesar 95,46 persen kinerja fisik dan capaian kinerja anggaran mencapai 95,61 persen. Secara detail dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel. 2.37.

Capaian Kinerja Program Dan Anggaran Dinas Kehutanan Tahun 2019

No	OPD/SKPD	Kegiatan		Capaian Kinerja Anggaran
		Jumlah	Capaian Kinerja Fisik (%)	
	Dinas Kehutanan		95,46	95,61
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	14	97,98	103,93
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	10	95,69	94,50
3	Program peningkatan disiplin aparatur	2	100,00	98,40
4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	3	72,87	72,76
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	6	100,00	99,70
6	Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan	7	97,44	96,74
7	Program rehabilitasi hutan dan lahan	10	98,70	96,42
8	Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan	13	84,55	86,05
9	Program perencanaan dan pengembangan hutan	38	97,63	98,38
10	Program Pengelolaan hutan masyarakat hukum adat	1	100,00	100,00
11	Program Pencegahan Deforestasi	1	98,98	96,80

Sumber : Data TP2K Tahun 2019 (diolah)

Pada tabel capaian kinerja diatas, dari 11 program dan 105 kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan , terdapat 8 program menunjukkan kategori yang Sangat Tinggi (ST) baik kinerja fisik maupun kinerja serapan anggaran, dan masing-masing 1 program kategori Tinggi (T) dan Sedag (S). Kondisi ini menjelaskan bahwa pencapaian target/ realisasi kinerja pelaksanaan program pembangunan pada Dinas Kehutanan sangat memenuhi target.

2.2.6.1.2.7 Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral

Prestasi kinerja pada Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral tahun 2019 dari 15 program dan 40 kegiatan yang dilaksanakan, secara keseluruhan rata-rata capaian kinerja fisik dan capaian kinerja anggaran penyerapannya masuk kategori Sangat Tinggi (ST) atau sebesar 99,71 persen kinerja fisik dan capaian kinerja anggaran mencapai 98,36 persen. Secara detail dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel. 2.38.

Capaian Kinerja Program Dan Anggaran Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Tahun 2019

No.	OPD/SKPD	Kegiatan		Capaian Kinerja Anggaran
		Jumlah	Capaian Kinerja Fisik	
	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral	40	99,71	98,36
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	10	100,00	84,34
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	4	100,00	68,18
3	Program peningkatan disiplin aparatur	1	0,00	0,00
4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	1	100,00	74,92
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	4	100,00	98,32
6	Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan	2	100,00	79,81
7	Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan	1	100,00	84,82
8	Program evaluasi dan koordinasi perencanaan program pembangunan	1	100,00	24,49

9	Program pembinaan dan pemutakhiran sistem data dan informasi energi dan sumber daya mineral	1	0,00	0,00
10	Program Pelayanan Air Bersih	2	0,00	0,00
11	Program Penelitian, Mitigasi dan Pelayanan Geologi	3	100,00	90,99
12	Program Pengelolaan Listrik dan Pemanfaatan Energi	3	100,00	64,51
13	Program Penelitian dan Pengembangan Balai Latihan dan Laboratorium Pertambangan	2	76,05	73,57
14	Program pengawasan penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) dan bahan bakar gas (BBG)	3	100,00	73,37
15	Pengembangan & Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan	2	100,00	100,00

Sumber : Data TP2K Tahun 2019 (diolah)

Pada tabel capaian kinerja diatas, dari 15 program yang dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral, terdapat 11 program menunjukkan kategori yang Sangat Tinggi (ST) pencapaiannya dan 1 program kategori Tinggi (T). Sedangkan untuk kinerja anggarannya, 3 program menunjukkan kategori Sangat Tinggi (ST), 3 program kategori Tinggi (T), 4 program menunjukkan kategori Sedang (S), 1 program kategori Rendah (R) dan 1 program lagi kategori Sangat Rendah (SR). Hal tersebut mungkin terjadi dikarenakan Dinas yang bersangkutan belum meng update progress pada program tersebut sampai batas waktu yang telah ditentukan, namun Kondisi ini menjelaskan bahwa pencapaian target/ realisasi kinerja pelaksanaan program pembangunan pada Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral sangat memenuhi target.

2.2.6.1.2.8 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Prestasi kinerja pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan tahun 2019 dari 10 program dan 28 kegiatan yang dilaksanakan, secara keseluruhan rata-rata capaian kinerja fisik penyerapannya masuk kategori Sangat Rendah (SR) atau sebesar 7,17 persen sedangkan capaian kinerja anggaran masuk kategori Sangat Tinggi (ST) mencapai 100,02 persen. Secara detail dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel. 2.39.**Capaian Kinerja Program Dan Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2019**

No.	OPD/SKPD	Kegiatan		Capaian Kinerja Anggaran
		Jumlah	Capaian Kinerja Fisik	
	Perindustrian dan Perdagangan	28	7,17	100,12
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	9	16,13	98,88
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	3	0,56	126,97
3	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	1	0,00	85,24
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	4	75,64	34,27
5	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan	1	0,00	99,60
6	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	3	15,40	80,48
7	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	3	1,09	98,64
8	Pengembangan industri kecil dan menengah	3	2,39	97,42
9	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	1	7,07	92,56
10	Program Penataan Struktur Industri	1	0,00	99,84

Sumber : Data TP2K Tahun 2019 (diolah)

Pada tabel capaian kinerja diatas, dari 10 program dan 28 kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan, capaian kinerja program fisik rata-rata kategori Sangat Rendah, kecuali 1 program kategori Sedang (S). sedangkan untuk capaian kinerja anggaran rata-rata 7 program dalam ategori Sangat Tinggi (ST) lainnya kategori Tinggi (T) dan Rendah (R). Hal tersebut mungkin terjadi dikarenakan Dinas yang bersangkutan tidak intens melakukan updating progress pada program untuk kinerja fisik tersebut sampai batas waktu yang telah ditentukan, namun Kondisi ini menjelaskan bahwa pencapaian target/ realisasi kinerja pelaksanaan program pembangunan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan

untuk capaian kinerja fisik sangat rendah, namun untuk capaian kinerja anggaran sangat memenuhi target.

2.2.6.1.3 Urusan Pendukung Pemerintahan Daerah

2.2.6.1.3.1 Sekretariat Daerah

Prestasi kinerja pada Sekretariat Daerah tahun 2019 dari 5 program dan 33 kegiatan yang dilaksanakan, secara keseluruhan rata-rata capaian kinerja penyerapannya masuk kategori Sangat Tinggi (ST) atau sebesar 95,93 persen untuk capaian kinerja fisik dan capaian kinerja anggaran mencapai 100,00 persen. Secara detail dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel. 2.40.

Capaian Kinerja Program Dan Anggaran Sekretariat Daerah Tahun 2019

No.	OPD/SKPD	Kegiatan		Capaian Kinerja Anggaran
		Jumlah	Capaian Kinerja Fisik	
	Sekretariat Daerah	33	95,93	100,00
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	10	74,04	99,93
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	7	89,40	93,06
3	Program peningkatan disiplin aparatur	2	92,20	100,24
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	4	98,89	100,00
5	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	10	97,06	100,00

Sumber : Data TP2K Tahun 2019 (diolah)

Keseluruhan kinerja program fisik yang dilaksanakan Sekretraiat Daerah menunjukkan kategori yang Sangat Tinggi (ST) pencapaiannya kecualai 1 program. Sedangkan kinerja serapan anggaran seluruhnya kategori Sangat Tinggi (ST). Kondisi ini menjelaskan bahwa pencapaian target/ realisasi kinerja pelaksanaan program pembangunan pada Sekretariat Daerah berada pada kategori sangat memenuhi target.

2.2.6.1.3.2 Biro Tata Pemerintahan

Biro Tata Pemerintahan tahun 2019 melaksanakan 5 program dan 33 kegiatan, secara keseluruhan rata-rata capaian kinerja penyerapannya masuk kategori Sangat Tinggi (ST) atau sebesar 99,90 persen untuk capaian kinerja fisik dan capaian kinerja anggaran mencapai 96,33 persen. Secara detail dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel. 2.41.

Capaian Kinerja Program Dan Anggaran Biro Tata Pemerintahan Tahun 2019

No.	OPD/SKPD	Kegiatan		Capaian Kinerja Anggaran
		Jumlah	Capaian Kinerja Fisik	
	Biro Tata Pemerintahan		99,90	96,33
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5	99,90	99,90
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	2	98,45	98,45
3	Program Pembinaan dan Penataan Administrasi Pemerintahan	1	99,38	99,38
4	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Kampung di Provinsi Papua	1	98,83	98,83
5	Program Peningkatan Penyelenggaraan Otonomi Daerah	1	99,99	99,99

Sumber : Data TP2K Tahun 2019 (diolah)

Pada tabel capaian kinerja diatas, nampak 5 program yang dilaksanakan oleh Biro Tata Pemerintahan, menunjukkan kategori yang Sangat Tinggi (ST) pencapaiannya baik kinerja fisik, maupun kinerja anggaran. Kondisi ini menjelaskan bahwa pencapaian target/ realisasi kinerja pelaksanaan program pembangunan pada Biro Tata Pemerintahan berada pada kategori sangat memenuhi target.

2.2.6.1.3.3 Biro Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri

Tahun 2019 Biro Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri melaksanakan 6 program dan 13 kegiatan yang dilaksanakan, secara keseluruhan rata-rata capaian kinerja penyerapannya masuk kategori Sangat Tinggi (ST) atau sebesar 100,00 persen untuk

capaian kinerja fisik dan capaian kinerja anggaran mencapai 92,90 persen. Secara detail dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel. 2.42.
Capaian Kinerja Program Dan Anggaran Biro Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri Tahun 2019

No.	OPD/SKPD	Kegiatan		Capaian Kinerja Anggaran
		Jumlah	Capaian Kinerja Fisik	
	Biro Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri	13	100,00	92,90
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	6	100,00	88,96
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	2	100,00	100,00
3	Program peningkatan disiplin aparatur	1	100,00	100,00
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1	100,00	100,00
5	Program Pengelolaan Batas Wilayah dan Lintas Batas	2	100,00	97,37
6	Program Peningkatan Hubungan Kerjasama Luar Negeri	1	100,00	92,90

Sumber : Data TP2K Tahun 2019 (diolah)

Pada tabel capaian kinerja program diatas, terdapat 6 program, menunjukkan kategori yang Sangat Tinggi (ST) pencapaiannya baik kinerja fisik, maupun kinerja serapan anggaran. Kondisi ini menjelaskan bahwa pencapaian target/ realisasi kinerja pelaksanaan program pembangunan pada Biro Perbatasan dan Kerjasama Luar negeri berada pada kategori sangat memenuhi target.

2.2.6.1.3.4 Biro Hukum

Biro Hukum tahun 2019 melaksanakan 8 program dan 20 kegiatan, secara keseluruhan rata-rata capaian kinerja penyerapannya masuk kategori Sangat Tinggi

(ST) atau sebesar 99,83 persen untuk capaian kinerja fisik dan capaian kinerja anggaran mencapai 99,06 persen. Secara detail dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel. 2.43.

Capaian Kinerja Program Dan Anggaran Biro Hukum Tahun 2019

No.	OPD/SKPD	Kegiatan		Capaian Kinerja Anggaran
		Jumlah	Capaian Kinerja Fisik	
	Biro Hukum	20	99,83	99,06
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	8	100,00	92,66
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	4	100,00	96,84
3	Program peningkatan disiplin aparatur	1	100,00	100,00
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	2	0,00	0,00
5	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	1	100,00	99,48
6	Program Peningkatan Pemberian Bantuan Hukum dan Penegakan Perda	2	99,97	99,50
7	Program Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum	1	100,00	106,97
8	Program Dokumentasi dan Informasi Hukum	1	0,00	0,00

Sumber : Data TP2K Tahun 2019 (diolah)

Pada tabel capaian kinerja diatas, 6 program yang dilaksanakan oleh Biro Hukum, menunjukkan kategori yang Sangat Tinggi (ST) pencapaiannya baik kinerja fisik, maupun kinerja serapan anggaran. Namun terdapat 1 program dengan kinerja Sangat rendah. Namun Kondisi ini tidak mempengaruhi pencapaian target/ realisasi kinerja pelaksanaan program pembangunan pada Biro Hukum berada pada kategori sangat memenuhi target.

2.2.6.1.3.5 Biro Organisasi

Biro Organisasi tahun 2019 melaksanakan 4 program dan 23 kegiatan, secara keseluruhan rata-rata capaian kinerja penyerapannya masuk kategori Sangat Tinggi

(ST) atau sebesar 100,00 persen untuk capaian kinerja fisik dan capaian kinerja anggaran mencapai 97,88 persen. Secara detail dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel. 2.44.

Capaian Kinerja Program Dan Anggaran Biro Organisasi Tahun 2019

No.	OPD/SKPD	Kegiatan		Capaian Kinerja Anggaran
		Jumlah	Capaian Kinerja Fisik	
	Biro Organisasi	23	100,00	97,88
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	9	100,00	98,34
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	2	100,00	95,72
3	Program peningkatan disiplin aparatur	1	100,00	100,00
4	Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan	11	100,00	97,67

Sumber : Data TP2K Tahun 2019 (diolah)

Pada tabel capaian kinerja diatas, 4 program yang dilaksanakan oleh Biro Organisasi, menunjukkan kategori yang Sangat Tinggi (ST) pencapaiannya baik kinerja fisik, maupun kinerja anggaran. Kondisi ini menjelaskan bahwa pencapaian target/realisasi kinerja pelaksanaan program pembangunan pada Biro Organisasi berada pada kategori sangat memenuhi target.

2.2.6.1.3.6 Biro Umum

Biro Umum Setda Provinsi Papua pada tahun 2019 melaksanakan 3 program dan 18 kegiatan, secara keseluruhan rata-rata capaian kinerja penyerapannya masuk kategori Sedang (S) atau sebesar 71,47 persen untuk capaian kinerja fisik dan capaian kinerja anggaran mencapai 71,44 persen. Secara detail dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel. 2.45.**Capaian Kinerja Program Dan Anggaran Biro Umum Tahun 2019**

No.	OPD/SKPD	Kegiatan		Capaian Kinerja Anggaran
		Jumlah	Capaian Kinerja Fisik	
	Biro Umum	18	71,47	71,47
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	11	98,43	98,43
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	5	54,18	54,18
3	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	2	99,95	99,95

Sumber : Data TP2K Tahun 2019 (diolah)

Adapun capaian kinerja Program yang dilaksanakan oleh Biro Umum, 2 program pencapaian kinerja fisik menunjukkan kategori Sangat Tinggi (ST), 1 Program pencapaiannya kategori Rendah (R), demikian pula kinerja serapan anggaran. Walaupun 1 program menunjukkan kategori sangat rendah, tetapi rata-rata akumulasinya sedang. Kondisi ini menjelaskan bahwa pencapaian target/ realisasi kinerja pelaksanaan program pembangunan pada Biro Umum berada pada kategori sedang atau memenuhi target.

2.2.6.1.3.7 Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam melaksanakan 3 program dan 10 kegiatan, secara keseluruhan rata-rata capaian kinerja penyerapannya masuk kategori Sangat Tinggi (ST) atau sebesar 100,00 persen untuk capaian kinerja fisik dan capaian kinerja anggaran mencapai 100,00 persen. Secara detail dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel. 2.46.

Capaian Kinerja Program Dan Anggaran Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam Tahun 2019

No.	OPD/SKPD	Kegiatan		Capaian Kinerja Anggaran
		Jumlah	Capaian Kinerja Fisik	
	Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam	10	100,00	100,00
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	8	100,00	100,00
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1	100,00	100,00
3	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1	100,00	100,00

Sumber : Data TP2K Tahun 2019 (diolah)

Dari tabel capaian kinerja diatas nampak bahwa keseluruhan program yang dilaksanakan oleh Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam, baik kinerja fisik maupun serapan anggaran menunjukkan kategori yang Sangat Tinggi (ST). Kondisi ini menjelaskan bahwa pencapaian target/ realisasi kinerja pelaksanaan program pembangunan pada Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam berada pada kategori sangat memenuhi target.

2.2.6.1.3.8 Biro Humas dan Protokol

Biro Humas dan Protokol tahun 2019 melaksanakan 5 program dan 13 kegiatan, secara keseluruhan rata-rata capaian kinerja penyerapannya masuk kategori Sangat Tinggi (ST) atau sebesar 94,34 persen untuk capaian kinerja fisik dan capaian kinerja anggaran mencapai 96,43 persen. Secara detail dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel. 2.47.**Capaian Kinerja Program Dan Anggaran Biro Humas dan Protokol Tahun 2019**

No.	OPD/SKPD	Kegiatan		Capaian Kinerja Anggaran
		Jumlah	Capaian Kinerja Fisik	
	Biro Humas dan Protokol	13	94,34	96,43
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	6	94,34	96,90
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	2	100,00	100,00
3	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	2	100,00	100,00
4	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	1	100,00	100,00
5	Program Pengembangan Komunikasi, Informatika dan Media Massa	2	100,00	100,00

Sumber : Data TP2K Tahun 2019 (diolah)

Pada tabel capaian kinerja diatas, 4 program yang dilaksanakan oleh Biro Humas dan Protokol, menunjukkan kategori yang Sangat Tinggi (ST) pencapaiannya baik kinerja fisik, maupun kinerja serapan anggaran. Kondisi ini menjelaskan bahwa pencapaian target/ realisasi kinerja pelaksanaan program pembangunan pada Biro Humas dan Protokol berada pada kategori sangat memenuhi target.

2.2.6.1.3.9 Biro Kesejahteraan Rakyat dan Masyarakat

Biro Kesejahteraan Rakyat dan Masyarakat tahun 2019 melaksanakan 5 program dan 22 kegiatan, secara keseluruhan rata-rata capaian kinerja penyerapannya masuk kategori Sangat Tinggi (ST) atau sebesar 96,88 persen untuk capaian kinerja fisik dan capaian kinerja anggaran mencapai 92,53 persen. Secara detail dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel. 2.48.**Capaian Kinerja Program Dan Anggaran Biro Kesejahteraan Rakyat dan Masyarakat Tahun 2019**

No.	OPD/SKPD	Kegiatan		Capaian Kinerja Anggaran
		Jumlah	Capaian Kinerja Fisik	
	Biro Kesejahteraan Rakyat dan Masyarakat	22	96,88	92,53
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	8	99,36	99,36
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	3	98,44	98,44
3	Program peningkatan disiplin aparatur	1	99,61	99,61
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	4	100,00	100,00
5	Program Pembinaan Mental Spritual	1	99,80	99,80
6	Program Pemberdayaan Keagamaan	5	100,00	90,58

Sumber : Data TP2K Tahun 2019 (diolah)

Dari tabel capaian kinerja diatas, nampak bahwa secara keseluruhan baik capaian kinerja fisik maupun serapan anggaran menunjukkan kategori yang Sangat Tinggi (ST). Kondisi ini menjelaskan bahwa pencapaian target/ realisasi kinerja pelaksanaan program pembangunan pada Biro Kesejahteraan dan Masyarakat sangat memenuhi target.

2.2.6.1.3.10 Biro Layanan Pengadaan Barang dan Jasa

Biro Layanan Pengadaan Barang dan Jasa tahun 2019 melaksanakan 6 program dan 26 kegiatan, secara keseluruhan rata-rata capaian kinerja penyerapannya masuk kategori Sangat Tinggi (ST) dengan capaian 96,09 persen kinerja fisik dan capaian kinerja anggaran mencapai 95,02 persen. Secara detail dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel. 2.49.**Capaian Kinerja Program Dan Anggaran Biro Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2019**

No.	OPD/SKPD	Kegiatan		Capaian Kinerja Anggaran
		Jumlah	Capaian Kinerja Fisik	
	Biro Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa	26	96,09	95,02
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	8	94,47	93,48
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	6	96,54	91,19
3	Program peningkatan disiplin aparatur	1	100,00	99,65
4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	3	98,07	88,53
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	5	45,10	42,59
6	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	3	96,48	97,79

Sumber : Data TP2K Tahun 2019 (diolah)

Dari tabel capaian kinerja program diatas, nampak bahwa dari 6 program yang dilaksanakan oleh Biro Layanan Pengadaan Barang dan Jasa , terdapat 5 program baik capaian kinerja fisik maupun anggaran menunjukkan kategori sangat tinggi (ST) sedangkan 1 program pencapaiannya Sangat Rendah (SR), yaitu Program Peningkatan Pengembangan sistem capaian kinerja keuangan. Namun secara keseluruhan tidak mempengaruhi kriteria penilaian kinerja Biro Layanan Pengadaan Barang dan jasa dengan kategori Sangat Tinggi. Dengan demikian pencapaian target/realisasi kinerja pelaksanaan program pembangunan pada Biro Layanan Pengadaan Barang dan Jasa sangat memenuhi target.

2.2.6.1.3.11 Biro Otonomi Khusus

Pada tahun 2019 Biro Otonomi Khusus Papua mengerjakan 2 program dan 21 kegiatan. Secara keseluruhan rata-rata capaian kinerja masuk kategori Rendah (R)

dengan capaian 50,17 persen kinerja fisik dan capaian kinerja anggaran mencapai 50,17 persen. Secara detail dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel. 2.50.

Capaian Kinerja Program Dan Anggaran Biro Otonomi Khusus Tahun 2019

No.	OPD/SKPD	Kegiatan		Capaian Kinerja Anggaran
		Jumlah	Capaian Kinerja Fisik	
	Biro Otonomi Khusus	7	50,17	50,17
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5	85,21	85,21
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	2	8,44	8,44

Sumber : Data TP2K Tahun 2019 (diolah)

Pada tabel capaian kinerja diatas, nampak bahwa dari 2 program yang dilaksanakan, baik capaian kinerja fisik maupun anggaran terdapat 1 program menunjukkan kategori yang Tinggi (T) dan 1 program kategori Sangat Rendah (SR). Hal tersebut mungkin terjadi dikarenakan Biro Otonomi Khusus tidak kontinyu melakukan updateing progress sampai batas waktu yang telah ditentukan, sehingga kondisi ini menjelaskan bahwa pencapaian target/ realisasi kinerja pelaksanaan program pembangunan pada Biro Otonomi Khusus Rendah (belum memenuhi target).

2.2.6.1.3.12 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat tahun 2019 melaksanakan 6 program dan 46 kegiatan, secara keseluruhan rata-rata capaian kinerja fisik penyerapannya masuk kategori Sedang (S) atau sebesar 66,63 persen dan capaian kinerja anggaran mencapai 93,03 persen dengan kategori Sangat Tinggi (ST). Secara detail dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel. 2.51.**Capaian Kinerja Program Dan Anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2019**

No.	OPD/SKPD	Kegiatan		Capaian Kinerja Anggaran
		Jumlah	Capaian Kinerja Fisik	
	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat	46	66,63	93,03
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	14	66,81	85,60
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	11	88,11	95,36
3	Program peningkatan disiplin aparatur	2	83,90	83,84
4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	3	85,00	88,49
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	5	77,20	94,86
6	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	21	92,55	92,94

Sumber : Data TP2K Tahun 2019 (diolah)

Adapun capaian kinerja program yang dilaksanakan oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, dari 6 program terdapat 4 program menunjukkan kategori Tinggi (T), 1 program menunjukkan pencapaian Sangat Tinggi (ST) dan 1 program menunjukkan capaian kategori Sedang (S). Sedangkan capaian kinerja anggaran terdapat 3 kategori Sangat Tinggi (ST) lainnya pada kategori Sedang (S). Kondisi tersebut menjelaskan bahwa pencapaian target/ realisasi kinerja pelaksanaan program pembangunan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat sangat memenuhi target.

2.2.6.1.3.13 Sekretariat Majelis Rakyat Papua

Sekretariat Majelis Rakyat Papua tahun 2019 melaksanakan 6 program dan 56 kegiatan, secara keseluruhan rata-rata capaian kinerja fisik penyerapannya masuk kategori Rendah (R) atau sebesar 65,73 persen dan capaian kinerja anggaran 68,52 persen dengan kategori Sedang (S). Secara detail dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel. 2.52.**Capaian Kinerja Program Dan Anggaran Sekretariat Majelis Rakyat Papua Tahun 2019**

No.	OPD/SKPD	Kegiatan		Capaian Kinerja Anggaran
		Jumlah	Capaian Kinerja Fisik	
	Sekretariat Majelis Rakyat Papua	56	65,73	68,52
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	14	87,84	57,03
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	11	95,00	84,78
3	Program peningkatan disiplin aparatur	2	100,00	99,82
4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	3	32,29	28,29
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	5	48,93	15,08
6	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga MRP	21	64,75	70,61

Sumber : Data TP2K Tahun 2019 (diolah)

Adapun capaian kinerja Program yang dilaksanakan oleh Majelis Rakyat Papua, hanya terdapat 2 program menunjukkan kategori Sangat Tinggi (ST) pencapaiannya untuk kinerja fisik, 1 program kategori Sedang (S) sedangkan 2 program lainnya kategori Sangat Buruk (SR). Terkait kinerja anggarannya bervariasi dari yang kategori sangat Tinggi, sampai kategori sangat buruk (SB). Hal tersebut terjadi dikarenakan Majelis Rakyat Papua kurang meng update progress pada program-program tersebut sampai batas waktu yang telah ditentukan, akibatnya pencapaian target realisasi kinerja pelaksanaan program pembangunan pada Majelis Rakyat Papua rendah (belum memenuhi target).

2.2.6.1.4 Urusan Penunjang Pemerintahan

2.2.6.1.4.1 Badan Penghubung Daerah

Badan Penghubung daerah tahun 2019 melaksanakan 10 program dan 45 kegiatan yang dilaksanakan, secara keseluruhan rata-rata capaian kinerja fisik penyerapannya masuk kategori Sangat Rendah (SR) atau sebesar 2,19 persen dan capaian kinerja

anggaran masuk kategori Tinggi (T) mencapai 89,29 persen. Secara detail dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel. 2.53.

Capaian Kinerja Program Dan Anggaran Badan Penghubung Daerah Tahun 2019

No.	OPD/SKPD	Kegiatan		Capaian Kinerja Anggaran
		Jumlah	Capaian Kinerja Fisik	
	Badan Penghubung daerah	45	2,19	89,29
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	11	3,31	93,78
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	9	0,00	62,16
3	Program peningkatan disiplin aparatur	3	0,00	99,98
4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	2	0,00	0,00
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	5	0,00	54,55
6	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	1	0,00	89,22
7	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	4	0,00	91,30
8	Program Pengembangan Penataan dan Pentas Anjungan	5	0,00	92,94
9	Program Pembinaan Kemasyarakatan dan Mahasiswa	1	0,00	0,00
10	Program Pelayanan Informasi	4	0,00	79,73

Sumber : Data TP2K Tahun 2019 (diolah)

Pada tabel capaian kinerja diatas, dari 10 program dan 45 kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Penghubung daerah, rata-rata capaian kinerja fisiknya menunjukkan Sangat Rendah (SR) capaiannya, sedangkan untuk kinerja anggaran 4 Program kategori capaiannya masuk Tinggi (T), lainnya kategori Rendah (R) dan Sangat Rendah (SR). Hal tersebut mungkin terjadi dikarenakan Intansi yang bersangkutan tidak intensif melakukan updating progress pada program tersebut sampai batas waktu yang telah ditentukan, namun Kondisi ini menjelaskan bahwa pencapaian target/realisasi kinerja pelaksanaan program pembangunan pada Badan Penghubung

daerah untuk kinerja fisik belum memenuhi target dan kinerja anggaran sangat memenuhi target.

2.2.6.1.4.2 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia tahun 2019 melaksanakan 5 program dan 31 kegiatan yang dilaksanakan, secara keseluruhan rata-rata capaian kinerja fisik penyerapannya masuk kategori Sangat Tinggi (ST) atau sebesar 95,91 persen dan capaian kinerja anggaran masuk kategori Tinggi (T) mencapai 89,98 persen. Secara detail dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel. 2.54.

Capaian Kinerja Program Dan Anggaran Badan Pengembanganm Sumber Daya Manusia Tahun 2019

No.	OPD/SKPD	Kegiatan		Capaian Kinerja Anggaran
		Jumlah	Capaian Kinerja Fisik	
	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	31	95,91	89,98
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	8	100,00	94,17
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	2	95,00	86,88
3	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	4	93,33	99,75
4	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	12	92,11	89,91
5	Program Pendidikan Kedinasan	5	97,60	89,43

Sumber : Data TP2K Tahun 2019 (diolah)

Pada tabel capaian kinerja diatas, dari 5 program dan 31 kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, rata-rata capaian program menunjukkan kategori yang Sangat Tinggi (ST) pencapaiannya untuk kinerja fisik, sedangkan kinerja anggaran (penyerapan) 2 program menunjukkan kategori Sangat Tinggi (ST) lainnya kategori Tinggi (T). Kondisi ini menjelaskan bahwa pencapaian target/ realisasi kinerja pelaksanaan program pembangunan pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia sangat memenuhi target.

2.2.6.1.4.3 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Prestasi kinerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2019 dari 3 program dan 13 kegiatan yang dilaksanakan, secara keseluruhan rata-rata capaian kinerja fisik penyerapannya masuk kategori Sangat Rendah (SR) atau sebesar 1,00 persen dan capaian kinerja anggaran mencapai 97,67 persen masuk kategori Sangat Tinggi. Secara detail dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel. 2.55.

Capaian Kinerja Program Dan Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2019

No.	OPD/SKPD	Kegiatan		Capaian Kinerja Anggaran
		Jumlah	Capaian Kinerja Fisik	
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	13	1,00	97,67
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	8	1,42	103,78
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	3	0,00	96,13
3	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	2	0,00	30,77

Sumber : Data TP2K Tahun 2019 (diolah)

Pada tabel capaian kinerja diatas, dari 3 program yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah, rata-rata menunjukkan kategori yang Sangat Rendah (SR) pencapaiannya untuk kinerja fisik, sedangkan kinerja anggaran (penyerapan) 2 program masuk kategori Sangat Tinggi (ST) capaiannya yang lainnya Sangat Rendah (SR). Hal tersebut mungkin terjadi dikarenakan Badan yang bersangkutan kurang intensif melakukan updaing progres kinerja fisik pada program tersebut sampai batas waktu yang telah ditentukan, namun Kondisi ini menjelaskan bahwa pencapaian target/ realisasi kinerja pelaksanaan program pembangunan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sangat memenuhi target untuk capaian kinerja anggaran, namun untuk capaian kinerja fisik, belum memenuhi target.

2.2.6.1.4.4 Inspektorat

Prestasi kinerja pada Inspektorat tahun 2019 dari 9 program dan 45 kegiatan yang dilaksanakan, secara keseluruhan rata-rata capaian kinerja fisik penyerapannya masuk kategori Sangat Rendah (SR) atau sebesar 49,15 persen sedangkan capaian kinerja anggaran mencapai 83,54 persen masuk kategori Tinggi (T). Secara detail dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel. 2.56.

Capaian Kinerja Program Dan Anggaran Inspektorat Tahun 2019

No.	OPD/SKPD	Kegiatan		Capaian Kinerja Anggaran
		Jumlah	Capaian Kinerja Fisik	
	Inspektorat	45	49,15	83,54
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	13	81,08	87,57
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	6	38,25	85,31
3	Program peningkatan disiplin aparatur	1	90,00	99,40
4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	2	47,98	40,08
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	4	80,69	72,63
6	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	3	87,77	87,13
7	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	1	90,00	82,85
8	Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur	3	46,13	89,25
9	Program Peningkatan Kinerja Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan	12	31,60	76,39

Sumber : Data TP2K Tahun 2019 (diolah)

Pada tabel capaian kinerja diatas, dari 9 program dan 45 kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat, 5 program capaian kinerja fisiknya masuk kategori Tinggi (T) lainnya kategori Sangat Rendah (SR), Sedangkan kinerja sarapan anggaran 1 kategori Sangat Tinggi (ST) dan 5 program kategori Tinggi (T) serta lainnya Sangat Rendah (SR). Meskipun demikian secara komulatif menjelaskan bahwa pencapaian

target/ realisasi kinerja pelaksanaan program pembangunan pada Inspektorat untuk kinerja anggaran sangat memenuhi target namun kinerja fisik belum memenuhi target.

2.2.6.1.4.5 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Prestasi kinerja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2019 dari 12 program dan 90 kegiatan yang dilaksanakan, secara keseluruhan rata-rata capaian kinerja fisik penyerapannya masuk kategori Sangat Rendah (SR) atau sebesar 43,43 persen, sedangkan capaian kinerja anggaran mencapai 95,59 persen masuk kategori Sangat Tinggi (ST). Secara detail dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel. 2.57.

Capaian Kinerja Program Dan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2019

No.	OPD/SKPD	Kegiatan		Capaian Kinerja Anggaran
		Jumlah	Capaian Kinerja Fisik	
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	90	43,43	95,59
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	9	80,97	95,40
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	6	16,26	84,92
3	Program peningkatan disiplin aparatur	3	0,00	95,07
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	4	16,58	99,87
5	Program Pengembangan data/informasi	10	79,18	96,26
6	Program Pengembangan Kawasan	3	60,84	93,86
7	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	3	0,00	126,59
8	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	28	36,49	94,41
9	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	9	23,05	104,19
10	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	6	40,04	94,68
11	Program Perencanaan Pembangunan Fisik Prasarana dan Lingkungan Hidup	6	21,78	99,62
12	Program Perencanaan Tata Ruang	3	38,94	109,18

Sumber : Data TP2K Tahun 2019 (diolah)

Pada tabel capaian kinerja diatas, dari 12 program dan 90 kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 1 program capaian kinerja fisik menunjukkan kategori yang Tinggi (T) pencapaiannya, lainnya kategor Sangat Rendah (SR). Sedangkan untuk kinerja anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menunjukkan kategori dominan Sangat Tinggi (ST). Hal tersebut mungkin terjadi dikarenakan Intansi ini kurang intnsif melakukan updating progress pada program-program untuk kinerja fisik sampai batas waktu yang telah ditentukan, namun Kondisi ini menjelaskan bahwa pencapaian target/ realisasi kinerja pelaksanaan program pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sangat memenuhi target untuk capaian kinerja anggaran, namun kinerja fisik belum memenuhi target.

2.2.6.1.4.6 Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah

Pada tahun 2019 Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah melaksanakan 7 program dan 69 kegiatan, secara keseluruhan rata-rata capaian kinerja fisik penyerapannya masuk kategori Rendah (R) atau sebesar 54,50 persen sedangkan capaian kinerja anggaran mencapai 85,47 persen masuk kategori Tinggi (T). Secara detail dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel. 2.58.

Capaian Kinerja Program Dan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Tahun 2019

No.	OPD/SKPD	Kegiatan		Capaian Kinerja Anggaran
		Jumlah	Capaian Kinerja Fisik	
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah	69	54,50	85,47
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	10	78,79	90,15
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	8	83,27	89,26
3	Program peningkatan disiplin aparatur	2	56,22	93,39
4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	2	69,67	90,84

5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	4	29,10	75,87
6	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	38	37,53	82,38
7	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota	5	65,28	87,62

Sumber : Data TP2K Tahun 2019 (diolah)

Pada tabel capaian kinerja diatas, dari 7 program dan 69 kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah, rata-rata capaian kinerja fisik menunjukkan kategori yang Rendah (R), bahkan dominan Sangat Rendah (SR) kecuali 1 program kategori Tinggi (T) pencapaiannya , sedangkan untuk kinerja serapan Anggaran rata-rata menunjukkan kategori Tinggi (T) dan Sangat Tinggi (ST) penyerapannya. Hal tersebut terjadi dikarenakan Badan yang bersangkutan belum meng update progress pada program-program tersebut untuk realisasi fisik sampai batas waktu yang telah ditentukan, namun Kondisi ini menjelaskan bahwa pencapaian target/ realisasi kinerja pelaksanaan program pembangunan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah sangat memenuhi target untuk kinerja anggaran, namun kinerja fisik belum memenuhi target.

2.2.6.1.4.7 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Prestasi kinerja pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah tahun 2019 dari 9 program dan 33 kegiatan yang dilaksanakan, secara keseluruhan rata-rata capaian kinerja fisik penyerapannya masuk kategori Sangat Tinggi (T) atau sebesar 92,03 persen dan capaian kinerja anggaran mencapai 89,83 persen dengan kategori Tinggi (T). Secara detail dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel. 2.59.**Capaian Kinerja Program Dan Anggaran Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 2019**

No.	OPD/SKPD	Kegiatan		Capaian Kinerja Anggaran
		Jumlah	Capaian Kinerja Fisik	
	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	33	92,03	89,83
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	12	95,66	94,02
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	8	98,33	94,13
3	Program peningkatan disiplin aparatur	1	100,00	99,71
4	Program fasilitas pindah/purna tugas PNS	1	6,65	6,66
5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	1	88,42	59,82
6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	3	50,16	48,08
7	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	3	85,50	77,00
8	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	1	69,50	81,91
9	Program Peningkatan Pendapatan Daerah	3	82,92	95,92

Sumber : Data TP2K Tahun 2019 (diolah)

Pada tabel capaian kinerja diatas, dari 3 program dan 33 kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, rata-rata menunjukkan kategori yang Sangat Tinggi (ST) pencapaiannya untuk kinerja Fisik, 3 program kategori Tinggi (T) 1 program kategori Sedang (S) lainnya kategori sangat Rendah (R). Sedangkan kinerja serapan Anggaran menunjukkan 4 program kategori Sangat Tinggi (ST), 2 program kategori Tinggi (T) dan 1 program kategori Rendah (R) dan lainnya kategori Sangat Rendah (SR). Meskipun demikian Kondisi ini menjelaskan bahwa pencapaian target/realisasi kinerja program dan anggaran secara kumulatif pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah sangat memenuhi target.

2.2.6.1.4.8 Badan Kepegawaian Daerah

Prestasi kinerja pada Badan Kepegawaian Daerah tahun 2019 dari 11 program dan 54 kegiatan yang dilaksanakan, secara keseluruhan rata-rata capaian kinerja fisik dan kinerja anggaran penyerapannya masuk kategori Tinggi (T) atau sebesar 82,37 persen capaian kinerja fisik dan capaian kinerja anggaran mencapai 90,31 persen. Secara detail dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel. 2.60.

Capaian Kinerja Program Dan Anggaran Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2019

No.	OPD/SKPD	Kegiatan		Capaian Kinerja Anggaran
		Jumlah	Capaian Kinerja Fisik	
	Badan Kepegawaian Daerah	54	82,37	90,31
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	8	93,50	105,27
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	6	62,82	86,07
3	Program peningkatan disiplin aparatur	1	0,00	98,53
4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	3	90,91	90,65
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	4	100,00	55,76
6	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	4	27,53	90,61
7	Program Peningkatan Pemberian Bantuan Hukum dan Penegakan Perda	5	66,67	93,42
8	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	13	85,48	80,50
9	Program Pengembangan Data dan Informasi	3	100,00	55,28
10	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	4	100,00	166,08
11	Program Pendidikan Kedinasan	3	0,00	0,00

Sumber : Data TP2K Tahun 2019 (diolah)

Pada tabel capaian kinerja diatas, dari 11 program dan 54 kegiatan yang dilaksanakan, terdapat 5 program pencapaiannya masuk kategori Tinggi (ST), 1 program kategori Sedang (T) dan 2 program kategori Sangat Rendah (SR). Sedangkan kinerja serapan anggaran terdapat 4 program kategori Sangat Tinggi

(ST), 5 program kategori Tinggi (T) dan 1 program katgori Rendah (R), 1 program Sangat Rendah (SR). Diantara kinerja serapananggaran terdapat prosentase lebih dari 100%. Hal tersebut mungkin terjadi dikarenakan Badan yang bersangkutan tidak melakukan cek waktu updating progress pada program tersebut sampai batas waktu yang telah ditentukan, namun Kondisi ini menjelaskan bahwa pencapaian target/realisasi kinerja pelaksanaan program pembangunan pada Badan Kepegawaian Daerah sangat memenuhi target.

2.2.6.1.4.9 Badan Penelitian dan Pengembangan

Badan Penelitian dan Pengembangan tahun 2019 melakanakan 3 program dan 14 kegiatan yang dilaksanakan, secara keseluruhan rata-rata capaian kinerja fisik penyerapannya masuk kategori Sangat Rendah (SR) atau sebesar 24,34 persen sedangkan capaian kinerja anggaran Sangat Tinggi (ST), mencapai 74,22 persen. Secara detail dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel. 2.61.

Capaian Kinerja Program Dan Anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2019

No.	OPD/SKPD	Kegiatan		Capaian Kinerja Anggaran
		Jumlah	Capaian Kinerja Fisik	
	Badan Penelitian dan Pengembangan	14	24,34	98,44
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	8	31,60	97,94
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	3	0,00	99,98
3	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	3	32,83	99,61

Sumber : Data TP2K Tahun 2019 (diolah)

Pada tabel capaian kinerja diatas, dari 3 program dan 14 kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan, rata-rata pencapaian kinerja fisiknya menunjukkan kategori yang Sangat Rendah (SR). Sedangkan kinerja anggaran (penyerapan) rata-rata menunjukkan kategori Sangat Tinggi (ST). Hal tersebut

mungkin terjadi dikarenakan Badan yang bersangkutan belum melakukan updating progress pada program untuk capaian realisasi kinerja fisik tersebut sampai batas waktu yang telah ditentukan. Dari uraian diatas menjelaskan bahwa pencapaian target/ realisasi kinerja pelaksanaan program pembangunan pada Badan Penelitian dan Pengembangan sangat memenuhi target untuk kinerja anggarannya, namun untuk kinerja fisik belum memenuhi target.

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan pada RPJMD di tahun rencana serta prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatori. Dalam konteks ini, permasalahan pembangunan daerah yang ditemukan di Provinsi Papua terbagi dua besar, yaitu :

- A. Permasalahan yang dirangkum menurut aspek, yaitu ;
 - a. Kesejahteraan Masyarakat
 - Pertumbuhan ekonomi belum berkualitas, karena didominasi oleh sektor tambang belum maksimal menyentuh sektor basis
 - Penurunan tingkat kemiskinan belum diikuti dengan perbaikan tingkat kepatuhan dan kedalaman kemiskinan
 - Masih tingginya tingkat ketimpangan/kesenjangan baik antar pendapatan maupun wilayah
 - b. Daya Saing
 - Penurunan tingkat kesejahteraan petani
 - Tingginya usia ketergantungan belum diimbangi dengan tingkat produktifitas
 - c. Pelayanan Umum melalui urusan
 - 1) Pelayanan Wajib yang terkait kebutuhan dasar
 - Akses, Kualitas, kuantitas peningkatan pelayanan Kesehatan serta keterjangkauan pendidikan masih minim

- Penataan ruang Prasarana infradas dan konektivitasnya belum merata
 - Kondisi Jalan dan Proporisnya baik terhadap luas wilayah mapuan jumlah penduduk belum proporsional
 - Penanganan penyandang sosial dan komunitas adat terpencil belum optimal
- 2) Urusan Pelayanan Wajib tidak terkait dengan pelayanan dasar
- Akses prasarana perhubungan, jaringan telekomunikasi dan listrik masih terbatas
 - Peningkatan Partisipasi Perempuan dan perlindungan kekerasan terhadap anak dan perempuan belum optimal
 - Tingkat pengangguran rendah tetapi pendapatan pekerja juga rendah karena tingkat pendidikan yang bekerja rendah.
- 3) Urusan Pilihan
- Kontribusi sektor-sektor kelautan/perikanan, pertanian, perkebunan, pertambangan, industri, perdagangan, terhadap Produk Domestik Bruto masih didominasi sektor pertambangan dan industri. Kondisi ini kontradiktif dengan sektor basis yang merupakan dominan kehidupan masyarakat yaitu rumpun sektor pertanian
- 4) Urusan kekhususan
- Kontribusi pelaksanaan Otsus Papua telah mampu memberikan peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua, namun implementasi pemanfaatan dana OTSUS perlu diiringi pula transparansi dan akuntabilitas

- B. Permasalahan kinerja RKPD dari pelaksanaan program atau kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD/SKPD, yaitu ;
1. Tingkat kepatuhan pada konsistensi dokumen-dokumen perencanaan masih rendah,
 2. Capaian realisasi indikator-indikator dan target serta realisasi menurut prioritas masih rendah,

3. Capaian kinerja dan kinerja capaian anggaran serta fisik SKPD/OPD, tidak seimbang (balance)
4. Rata-rata Realisasi fisik dan keuangan Program/Kegiatan Tahun 2020 di atas 80 % kategori tinggi, namun belum optimal. Beberapa masalah yang menyebabkan daya serap terutama realisasi fisik kurang, dikarenakan :
 - Jadwal lelang yang terlambat
 - Terjadi keadaan luar biasa (force di mayore), beberapa diantaranya seperti permasalahan tanah, dll.
 - Keterlambatan pencairan, (proses keuangan).
5. SKPD/OPD kurang intensif mengisi Tabel F5 di TP2K sebagai soft pengendali Program/Kegiatan di Bappeda Provinsi Papua, sehingga tidak bisa menampilkan data kinerja program/kegiatan secara benar/utuh.

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Pada bagian ini sebagaimana arahan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, diuraikan dua point utama yakni Arah Kebijakan Ekonomi Daerah dan Arah Kebijakan Keuangan Daerah. Namun demikian, analisis perlu diperluas dalam lingkup pembangunan ekonomi, mengingat tujuan hakiki pembangunan ekonomi yakni kesejahteraan masyarakat tidak hanya ditunjukkan oleh indikator makroekonomi, namun juga tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan, sehingga arah kebijakan ekonomi menjadi arah kebijakan pembangunan ekonomi.

Rumusan Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah untuk Tahun 2021 tidak akan terlepas dari pencapaian pembangunan ekonomi pada Tahun 2019, proyeksi Tahun 2020 dan 2021. Dengan demikian pembahasan pada bagian ini diawali dengan Kondisi Pembangunan Ekonomi Provinsi Papua Tahun 2019/2020, selanjutnya tantangan dan prospek perekonomian daerah tahun 2020 dan 2021. Bagian akhir sub bab adalah poin-poin arah kebijakan pembangunan ekonomi dan keuangan daerah pada tahun 2021.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Papua 2019-2023, kebijakan ekonomi daerah diarahkan pada pemberdayaan ekonomi masyarakat dan peningkatan investasi melalui pengembangan ekonomi lokal yang unggul berbasis kewilayahan, berkeadilan dan berkelanjutan. Sebagaimana yang termuat dalam Misi ke-4 RPJMD Provinsi Papua 2019-2023 yaitu Penguatan dan Percepatan Perekonomian Daerah sesuai Potensi Unggulan Lokal dan Pengembangan Wilayah berbasis Kultural Secara Berkelanjutan.

Selain diselaraskan dengan RPJMD Provinsi Papua 2019-2023, arah kebijakan ekonomi daerah tahun 2021 perlu diselaraskan juga dengan arah kebijakan ekonomi nasional yang termuat dalam RKP (Rencana Kerja Pemerintah) 2021. Oleh karena RKP 2021 merupakan RKP transisi dan unik, maka penentuan struktur prioritas dan arah kebijakan masih menggunakan RKP sebelumnya yaitu RKP 2020, tidak merujuk kepada RPJMN 2020-2024 yang memang belum ada. Dan sesuai dengan RKP 2020 sebelumnya, maka arah kebijakan ekonomi nasional adalah :

1. Mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi di tengah tahun politik, dengan arahnya : (1) meningkatkan daya saing ekspor; (2) melanjutkan momentum peningkatan investasi; (3) memperkuat konsumsi masyarakat; (4) meningkatkan nilai tambah sektor.
2. Menjaga stabilitas makroekonomi ditengah tekanan eksternal, dengan arahnya : (1) menjaga stabilitas nilai tukar ditengah tekanan normalisasi kebijakan moneter negara maju; (2) menjaga defisit transaksi berjalan pada tingkat yang aman; (3) mempertahankan suistainabilitas fiskal; (4) menjaga inflasi pada tingkat yang stabil; (5) memperkuat resiliensi sistem keuangan.
3. Mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan, dengan arahnya : (1) meningkatkan produktifitas melalui reformasi struktural; (2) mendorong pemerataan dan penurunan tingkat kemiskinan; (3) mempertahankan keseimbangan lingkungan (4) mengantisipasi tantangan disrupsi ekonomi di masa depan.

Sesuai dengan RPJMD Provinsi Papua 2019-2023, pembangunan ekonomi Provinsi Papua tahun 2021 akan diarahkan pada 3 (tiga) orientasi pembangunan yaitu : (1) Orientasi Pembangunan Manusia; (2) Orientasi Pertumbuhan dan Potensi Unggulan; dan (3) Orientasi Pemerataan, Keadilan dan Kewilayahan. Ketiganya ini menjadi rujukan rumusan *grand strategy* pembangunan ekonomi 2021 yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Strategi pembangunan ekonomi berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar (*fullfilmen of basic needs*). Strategi ini bertujuan pada perbaikan kualitas hidup,

peningkatan produksi dan nilai tambah, penciptaan lapangan kerja baru, upah layak sehingga tercapai tingkat hidup minimal untuk seluruh masyarakat.

2. Strategi pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan yang bertumpu pada masyarakat (*people centered development*). Menurut Asian Development Bank, pertumbuhan inklusif ialah pertumbuhan yang tinggi dan berkelanjutan yang akan menciptakan dan memperluas kesempatan ekonomi, serta memastikan akses yang lebih luas kepada semua lapisan masyarakat. Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi harus dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi upaya pengentasan kemiskinan dan pemerataan pembangunan. Oleh karena itu pembangunan ekonomi harus dilaksanakan secara berkelanjutan dan inklusif.
3. Strategi pembangunan ekonomi kewilayahan kontekstual (*contextual regional economic development*). Makna kontekstual ini dapat diartikan sebagai makna yang muncul berdasarkan konteksnya. Papua adalah salah satu daerah di Indonesia yang sangat unik, karena terdiri atas ratusan suku bangsa dan bahasa, dengan zona ekologi kewilayahannya yang berbeda satu sama lainnya. Sehingga membangun Papua tidak dapat dilakukan secara simetris atau disamaratakan untuk semua wilayah. Dalam hal ini, pembangunan ekonomi kewilayahan di Papua yang kontekstual merupakan pembangunan yang memperhatikan : (1) *Zona Ekologi* yang meliputi ekologi dan sistem mata pencaharian, etika kerja, dan lingkungan lokal; (2) *Kearifan Lokal* yang mencakup sistem penguasaan tanah, agama dan sistem kepercayaan; dan (3) *Sosio Budaya* yang meliputi struktur sosial, nilai-nilai budaya dan sistem politik.

Guna menyusun rumusan kebijakan pembangunan ekonomi sebagai upaya untuk mewujudkan keberhasilan dari misi RPJMD Provinsi Papua 2019-2023, maka perlu dilihat terlebih dahulu gambaran umum tentang perkembangan perekonomian Papua tahun 2017/2018 serta proyeksinya untuk tahun 2020 dan 2021.

3.1.1. Perkembangan Ekonomi Provinsi Papua

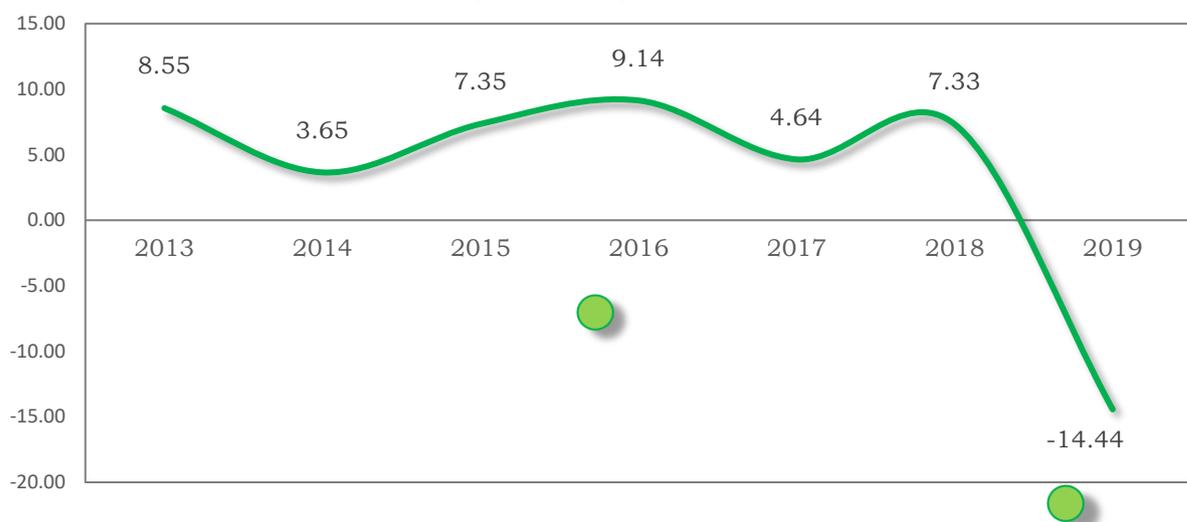
Secara agregat pertumbuhan ekonomi Papua tahun 2021, dicerminkan dari proyeksi pertumbuhan tahun 2020 menurut laporan Bank Indonesia, dipredikis bakal

bertumbuh dengan baik. Menurut Bank Indonesia diperkirakan ekonomi Papua akan tumbuh 5,8% - 6,3 % (YoY). Indikasi ini didasarkan pada asumsi bakal membaiknya kinerja PT Freeport dalam eksplorasi tambang metode baru serta bakal berlangsungnya PON XX di Papua bulan Oktober 2020 mendatang.

Namun merebahnya wabah pandemik Covid-19, kemungkinan akan merubah asumsi-asumsi tersebut. Oleh karena itu pertumbuhan ekonomi Papua tahun 2021 juga akan dipengaruhi oleh tingkat eskalasi wabah Covid-19. Seningga diperlukan proyeksi pertumbuhan dengan memasukan pengaruh wabah Covid-19 dalam memproyeksi pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua tahu 2021. Meskipun demikian laju pertumbuhan ekonomi dari tau 2013-2019 diperlihatkan sebagai berikut:

Gambar 3.1

**Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Papua Tahun 2014-2018
(dalam %)**



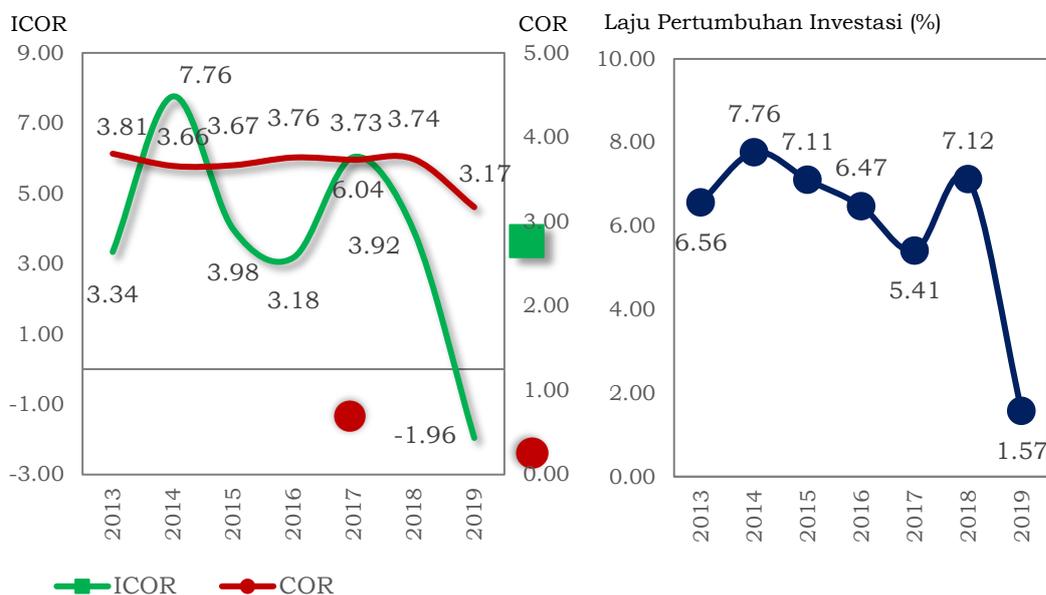
Sumber : BPS Provinsi Papua, 2019 (data diolah)

Selain laju pertumbuhan ekonomi, indikator pertumbuhan ekonomi lain yang perlu dicermati dalam mempreyeksi pertumbuhan ekonomi Papua tahun 2021 adalah pertumbuhan investasi COR dan ICOR. Instrumen-instrumen ini diperlukan dalam rangka menutup celah moneter jika memproyeksikan pertumbuhan ekonomi suatau daerah. Adapun pertumbuhan Investasu, COR dan ICOR Provinsi Papua tahun 2013-2019 ditampilkan sebagai berikut:

Struktur ekonomi Provinsi Papua menurut lapangan usaha sejak triwulan I 2017 sampai dengan triwulan IV 2019 masih dominan pada lapangan usaha pertambangan, namun kontribusinya terhadap pembentukan PDRB terlihat mengalami kontraksi menurun tajam terutama sejak triwulan II tahun 2018, meskipun demikian rata-rata kontribusi per triwulan masih terlampau tinggi mencapai 32% per tahun selama periode tersebut. Lihat Gambar 3.2.

Gambar 3.2

**Pertumbuhan Investasi, COR Dan ICOR
Provinsi Papua Tahun 2013-2018**



Sumber : BPS Provinsi Papua, 2019 (data diolah)

Dalam perkembangannya, pertumbuhan investasi di provinsi Papua tahun 2013-2019 terlihat mengalami fluktuasi. Pertumbuhan investasi tertinggi terjadi di tahun 2014 yaitu 7,76%, dengan ICOR yang sangat tinggi mencapai angka 7,76 poin dan COR sebesar 3,66 poin. Ini mengindikasikan bahwa meskipun investasi mengalami pertumbuhan sebesar, namun daya saingnya masih rendah, karena berdasarkan angka ICOR terlihat bahwa kebutuhan untuk menaikkan 1 unit output PDRB pada tahun 2014 dibutuhkan 7,89 unit modal jauh diatas angka moderat yang semestinya maksimal 4 unit modal, sehingga jika dilihat secara rata-rata selama 2013-2018 (ICOR positif) maka dapat dikategorikan Papua masih mengalami ekonomi

biaya tinggi dengan ICOR sebesar 4,70 poin, dan produktifitas investasi yang rendah sebesar 3,73 poin.

Perlunya memperbaiki daya saing investasi merupakan hal yang mendesak karena selama ini ranking daya saing Papua dalam penilaian Asia Competitiveness Institute Lee Kuan Yew School of Public Policy selalu berada dibawah pada urutan ke 31 (2014), 33 (2015), 33 (2016) dan 32 (2017), dengan score overall competitiveness rata-rata negatif 1,706 di tahun 2017 (lihat Tabel 3.7) yang diukur dengan 100 indikator terkelompok dalam 4 komponen besar lingkungan investasi yaitu (1) stabilitas makroekonomi; (2) kebijakan institusional dan pemerintah; (3) kondisi keuangan bisnis dan tenaga kerja; dan (4) pembangunan infrastruktur dan kualitas hidup.

Tabel. 3.1.

Indonesia Provincial Competitiveness Ranking & Score Overall Competitiveness

Rank				Province	Score 2017	Rank				Province	Score 2017
2014	2015	2016	2017			2014	2015	2016	2017		
1	1	1	1	DKI Jakarta	3.459	14	27	28	18	Jambi	-0.296
2	2	2	2	East Java	1.723	28	27	21	19	Gorontalo	-0.298
3	3	5	3	East Kalimantan (inc. North Kalimantan)	1.303	19	15	24	20	North Sumatra	-0.304
4	5	3	4	Central Java	1.035	18	19	17	21	West Kalimantan	-0.308
5	4	4	5	West Java	0.946	20	30	20	22	Bangka Belitung Islands	-0.403
12	9	11	6	Banten	0.741	29	21	16	23	Southeast Sulawesi	-0.412
14	12	7	7	Bali	0.687	16	17	22	24	South Sumatra	-0.460
7	10	6	8	South Sulawesi	0.557	13	24	26	25	Aceh	-0.526
6	6	10	9	DI Yogyakarta	0.423	22	26	19	26	West Nusa Tenggara	-0.582
11	7	12	10	Riau Islands	0.399	30	23	25	27	Bengkulu	-0.595
8	8	8	11	South Kalimantan	0.318	25	18	30	28	West Sulawesi	-0.597
21	20	14	12	Central Sulawesi	0.270	23	29	29	29	Maluku	-0.712
15	13	13	13	Central Kalimantan	0.090	32	32	32	30	East Nusa Tenggara	-1.238
24	25	18	14	Lampung	0.061	33	31	31	31	North Maluku	-1.304
17	22	23	15	West Sumatra	-0.018	31	33	33	32	Papua	-1.706
9	16	15	16	Riau	-0.093	26	28	27	33	West Papua	-1.891
10	11	9	17	North Sulawesi	-0.270						

Sumber : The World Bank Group & ACI Lee Kuan Yew School of Public Policy (2017)

Daya saing daerah selain dari investasi dapat diamati juga pada perkembangan ekspor wilayah. Perkembangan nilai ekspor luar negeri Provinsi Papua mengalami surplus, atau selalu lebih besar dari pada impor, namun dengan perkembangan yang berkontraksi sepanjang tahun 2011-2016. Tahun 2011 dan Tahun 2013, terlihat ekspor Papua mencapai angka tertinggi yaitu masing-masing sebesar Rp 33,91 Triliun dan Rp 32,14 triliun. Kondisi ini tidak berlangsung lama, karena mengalami penurunan

di tahun 2014 atau terendah sepanjang tahun 2011-2016. namun kemudian terlihat meningkat lagi di tahun-tahun berikutnya. Impor Luar Negeri Provinsi Papua tertinggi terlihat di Tahun 2014 yaitu sebesar Rp 11,19 triliun dan terendah di tahun 2013 yaitu sebesar Rp 5,45 triliun. Kondisi ini juga yang menyebabkan neraca perdagangan atau Balance of Trade (BOT) antar negara tahun 2013 menjadi tertinggi jika dibanding tahun tahun lainnya.

3.1.1.1. Perkembangan Inflasi dan Tingkat Kemahalan Di Provinsi Papua

Perkembangan inflasi bulanan Provinsi Papua sepanjang Januari 2013 sampai dengan Desember 2019 terlihat sangat fluktuatif dengan kecenderungan yang menurun, lihat Tabel 3.2.

Tabel. 3.2.
Tingkat Inflasi Bulanan Provinsi Papua
Januari 2013 – Juli 2019
(dalam %)

Bulan	Inflasi Umum Bulanan						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Januari	0.40	1.70	-0.42	0.76	0.12	-1.12	0.26
Februari	3.15	-0.26	-0.04	0.17	-0.77	1.05	-0.03
Maret	-2.63	0.68	0.71	0.30	0.95	2.10	0.26
April	-0.60	-1.79	-0.09	-0.32	0.73	-0.05	-0.26
Mei	0.97	1.01	0.07	0.70	-0.17	0.79	1.13
Juni	0.52	-0.44	0.80	1.78	1.02	1.07	-0.08
Juli	3.44	0.36	0.51	-1.10	-1.13	0.04	-0.41
Agustus	1.51	-0.10	-0.61	-0.18	0.22	-0.9	-0.14
September	-1.14	0.46	0.35	0.55	-0.64	0.45	-1.26
Oktober	0.46	0.71	-0.05	-0.09	-0.09	0.36	-0.35
November	0.56	1.24	0.11	-0.23	-0.09	1.13	0.85
Desember	1.48	4.26	1.45	1.76	2.28	1.62	2.34

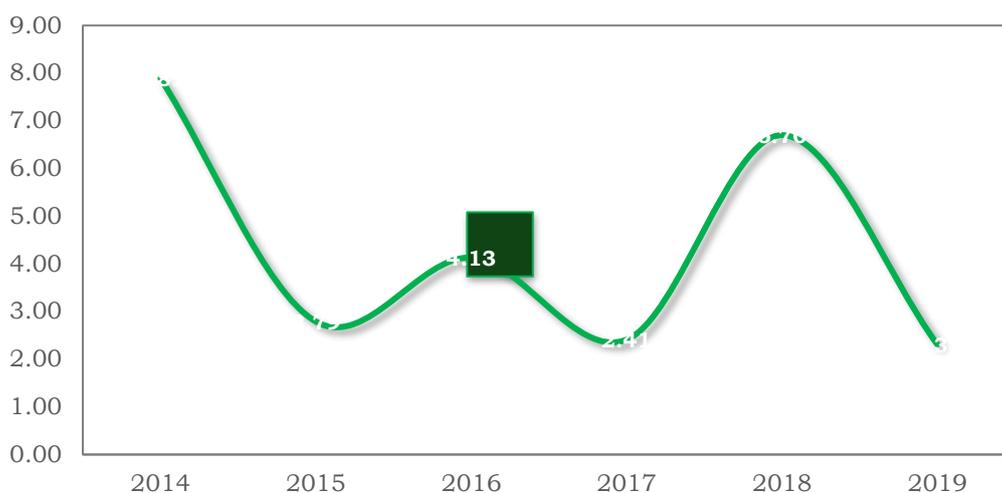
Sumber : BPS Provinsi Papua, 2019 (data diolah)

Tahun 2013, inflasi tertinggi pada bulan Juli 2013 sebesar 3,44% sedangkan deflasi terbesar terjadi pada bulan Maret sebesar -2,13%. Tahun 2014, inflasi tertinggi pada bulan Desember sebesar 4,26% dan deflasi terbesar pada bulan April sebesar -

1,79%. Pada tahun 2015, inflasi tertinggi pada bulan Desember sebesar 1,45% sedangkan terendah terjadi deflasi pada bulan Agustus sebesar -0,61%. Tahun 2016, inflasi tertinggi pada bulan Juni sebesar 1,78% dan terendah terjadi deflasi pada bulan Juli sebesar -1,10%. Tahun 2017, inflasi tertinggi pada bulan Desember sebesar 2,28% dan terendah terjadi deflasi pada bulan Juli sebesar -1,13%. Tahun 2018, inflasi tertinggi pada bulan Maret sebesar 2,10% sedangkan terendah terjadi deflasi pada bulan Januari sebesar -1,12%. Kemudian pada tahun 2019, inflasi tertinggi di bulan Mei sebesar 1,13% dan terendah terjadi deflasi di bulan Juni sebesar -0,08%. Inflasi bulanan provinsi Papua dominan terjadi pada bulan dimana terjadi perayaan hari besar keagamaan nasional dan tahun baru.

Secara keseluruhan tingkat inflasi tahunan provinsi Papua mengalami perkembangan yang fluktuatif mengecil dengan capaian inflasi tertinggi pada tahun 2013 sebesar 8,12%, kemudian semakin mengecil sampai dengan tahun 2015 menjadi 2,79%. Tahun 2016, inflasi tahunan provinsi Papua kembali membesar dibandingkan tahun sebelumnya menjadi 4,10% namun kemudian kecil kembali di tahun 2017 menjadi sebesar 2,43%. Selanjutnya di tahun 2018 meningkat cukup pesat hingga menjadi 6,54%. Dan terakhir di tahun 2019, tekanan inflasi kembali menurun, hanya mencapai 2,31%.

Gambar 3.3
Tingkat Inflasi Tahunan Provinsi Papua 2014-2019
(dalam %)

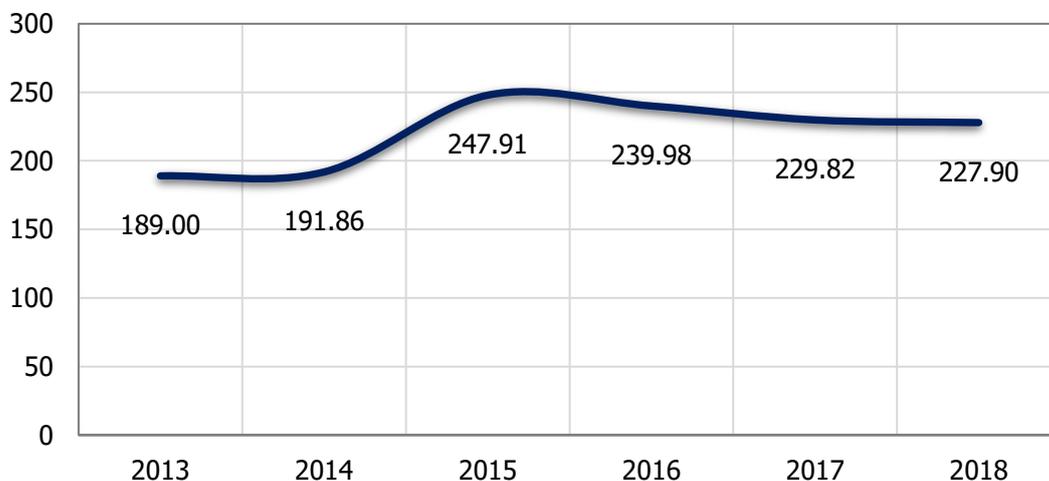


Sumber : BPS Provinsi Papua, 2019 (data diolah)

Selain tingkat inflasi, permasalahan harga yang juga selalu jadi perhatian pemerintah provinsi selama ini adalah tingkat kemahalan harga barang-barang konstruksi yang direpresentasikan dengan angka IKK (Indeks Kemahalan Kontruksi). IKK ini sangat mempengaruhi penyusunan APBD Pemerintah Provinsi, karena menjadi salah satu rujukan utama dalam penyusunan rancangan belanja fisik, dan selain itu juga sebagai acuan penetapan SSH (Standar Satuan Harga) barang dan jasa. Adapun perkembangan IKK Provinsi Papua selama ini dapat dilihat pada Gambar 3.8 berikut.

Gambar 3.4

**Indeks Kemahalan Kontruksi Provinsi Papua 2013-2018
(dalam %)**



Sumber : BPS RI, 2019 (data diolah)

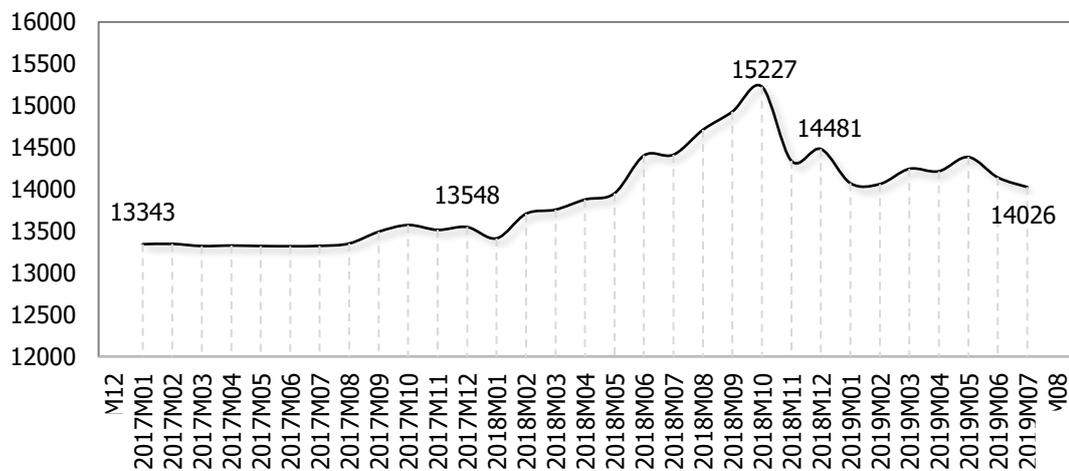
Sepanjang tahun 2013-2014 relatif IKK Provinsi Papua tidak banyak mengalami perubahan, dan tetap dalam posisi teratas di seluruh Indonesia. Adanya perubahan daerah acuan di tahun 2015, yaitu dari Kota Samarinda/Provinsi Kalimantan Timur ke Kota Surabaya/Provinsi Jatim mengakibatkan IKK Provinsi Papua naik hingga menjadi 247,91 poin. Ini berarti kenaikan IKK tersebut bukan terjadi secara struktural, namun lebih kepada teknis. Di tahun 2016 terjadi penurunan IKK dengan angka yang tipis hanya sebesar 7,93 point, sehingga IKK di tahun 2016 menjadi 239,98 poin, yang menandakan harga-harga bahan konstruksi di Provinsi Papua secara rata-rata lebih tinggi 139,88% dibandingkan daerah acuan (Kota Surabaya). Penurunan ini terus terjadi hingga di tahun 2018 IKK Papua sudah mencapai 227,90 poin, dengan kata lain

jika dibandingkan dengan wilayah acuan rata-rata harga bahan konstruksi di Papua lebih tinggi 127,90%.

Nilai tukar rupiah cenderung melemah sampai dengan bulan Oktober 2018 sebesar Rp15.227 per USD atau melemah sebesar 12,37% dibanding nilai tukar rupiah bulan Januari 2017 sebesar Rp13.343 per USD. Selanjutnya pergerakan rupiah terlihat cenderung menguat sampai dengan bulan juli 2019 dibanding kondisi tahun 2018. Nilai tukar rupiah bulan Desember 2018 sebesar Rp14.481 per USD menguat sebesar 5,15% dibanding nilai tukar rupiah bulan Oktober 2018. Selanjutnya nilai tukar pada bulan Juli 2019 sebesar Rp14.026 per USD menguat sebesar 3,24% dibandingkan nilai tukar rupiah pada bulan Desember 2018. Jika diperhatikan berdasarkan rata-rata tahunan, maka nilai tukar rupiah per USD tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 terlihat melemah.

Gambar 3.5

**Nilai Kurs Rupiah Terhadap US\$
Periode Januari 2018 – Juli 2019
(dalam Rp/US\$)**



Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas di provinsi Papua sepanjang tahun 2013 tercatat sebesar 1.864.589 jiwa dan tahun 2019 sebesar 2.378.923 jiwa atau bertambah sebanyak 514.334 jiwa dengan penambahan terbesar pada tahun 2015 sebesar 59.826 jiwa (lihat Tabel 3.3).

Tabel. 3.3.
Perkembangan Ketenagakerjaan Provinsi Papua 2013 – 2019
(dalam jiwa)

Indikator Ketenagakerjaan	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019*
Jumlah Penduduk 15 Tahun Ke Atas	1.864.589	2.129.404	2.189.230	2.245.462	2.291.111	2.320.862	2.378.923
Sekolah	186.011	192.348	174.949	195.635	181.879	176.043	220.158
Mengurus Rumah Tangga	221.403	204.659	23.029	268.585	278.056	256.249	277.906
Lainnya	54.808	57.284	42.046	59.080	68.335	52.607	72.011
Orang Bekerja	1.559.675	1.617.437	1.672.480	1.664.485	1.699.071	1.777.207	1.746.963
Pengangguran	50.809	57.676	69.465	57.677	63.770	58.756	61.885

Sumber : BPS Provinsi Papua, 2019 (data diolah)

* Kondisi Sampai Bulan Maret 2019

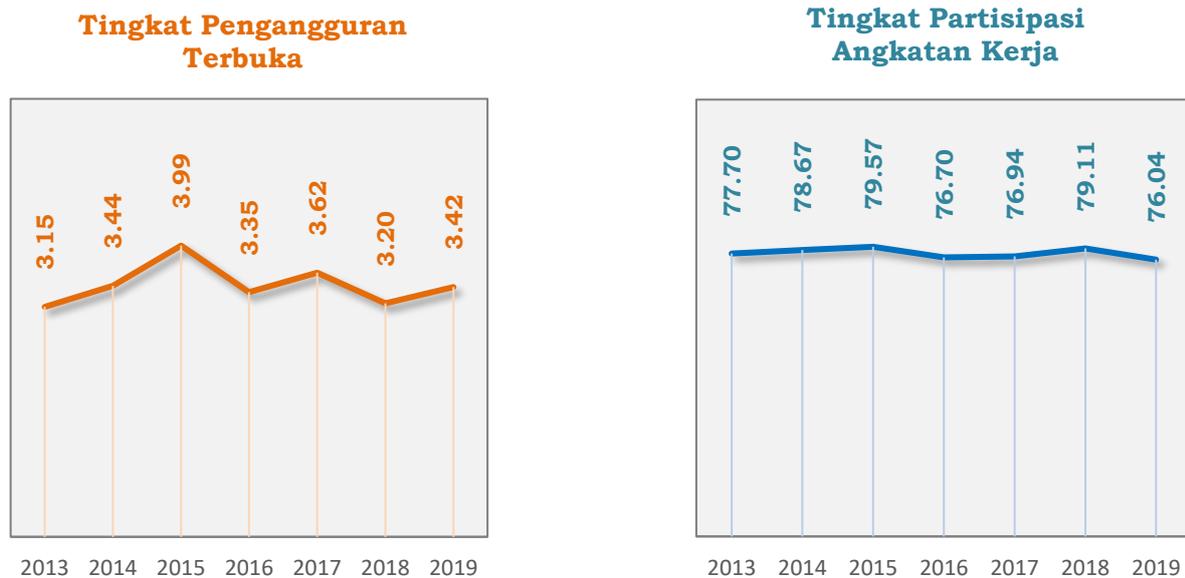
Jumlah penduduk usia kerja yang bersekolah perkembangannya terlihat fluktuatif meningkat yaitu 186.011 jiwa pada tahun 2013 meningkat menjadi 220.158 jiwa pada tahun 2019 atau bertambah sebanyak 34.147 jiwa. Penduduk usia kerja yang mengurus rumah tangga perkembangannya fluktuatif meningkat yaitu dari 221.403 jiwa pada tahun 2013 menjadi 277.906 jiwa pada tahun 2019 atau bertambah sebanyak 56.503 jiwa. Demikian juga penduduk yang bekerja perkembangannya fluktuatif meningkat pada tahun 2013 sebesar 1.559.675 jiwa bertambah menjadi 1.746.963 jiwa atau bertambah sebesar 187.288 jiwa dengan penambahan terbesar pada tahun 2018 sebanyak 78.138 jiwa dan penurunan terbesar pada tahun 2016 sebanyak 7.995 jiwa. Jumlah pengangguran di provinsi Papua terlihat bertambah sepanjang tahun 2013-2019 yaitu dari 50.809 jiwa tahun 2013 meningkat menjadi 61.885 jiwa pada tahun 2019 atau bertambah sebanyak 11.076 jiwa.

Persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja atau tingkat pengangguran terbuka (TPT) Provinsi Papua fluktuatif meningkat. Tahun 2015 TPT Provinsi Papua sebesar 3,99% atau meningkat dibandingkan TPT tahun sebelumnya

dan merupakan angka tertinggi dalam kurun waktu 2013-2019. Selanjutnya perkembangan TPT Provinsi Papua terlihat fluktuatif menurun hingga mencapai 3,42% pada tahun 2019. Besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di Provinsi Papua cenderung menurun sepanjang tahun 2013-2019. Tahun 2013 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mencapai 77,70% kemudian meningkat menjadi 79,57% tahun 2015 namun selanjutnya cenderung menurun hingga menjadi 76,04% pada tahun 2019. Kondisi ini menunjukkan bahwa semakin rendah pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam perekonomian Papua.

Gambar 3.6

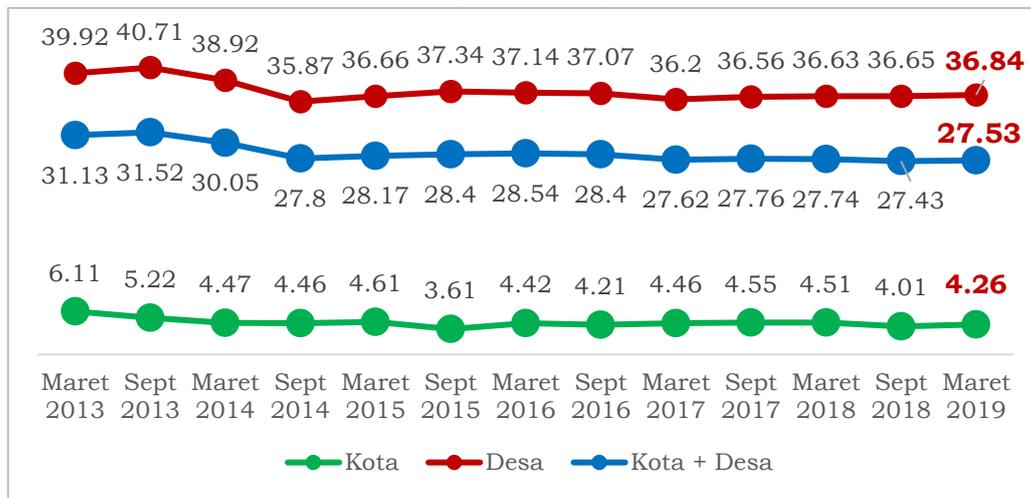
**Tingkat Pengangguran Dan Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Papua 2013-2019
(dalam %)**



Sumber : BPS Provinsi Papua, 2019 (data diolah)

* Kondisi Sampai Bulan Maret 2019

Gambar 3.7
Tingkat Kemiskinan Menurut Wilayah Di Provinsi Papua
Maret 2018 – Maret 2019
(dalam %)



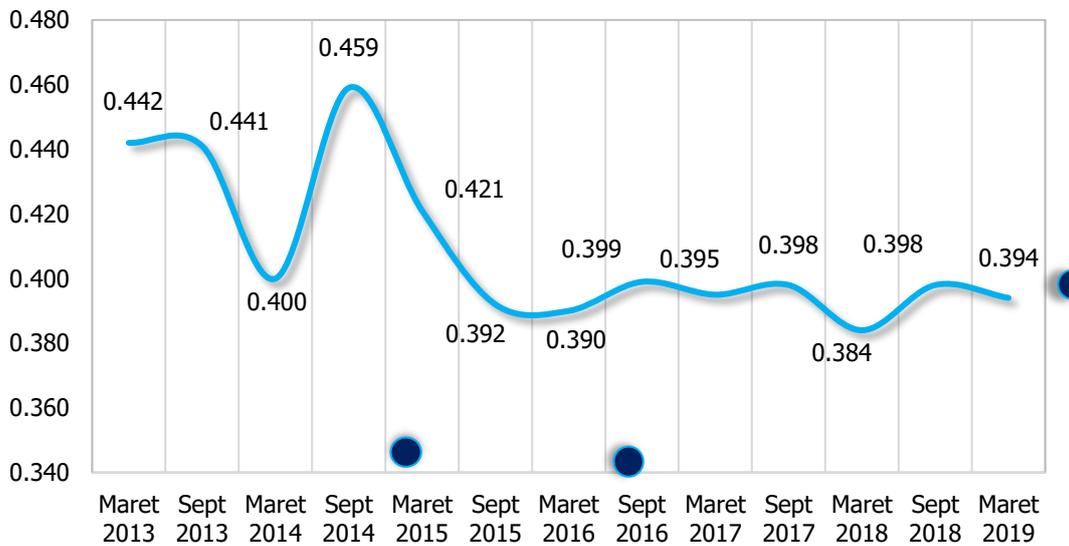
Sumber : BPS Provinsi Papua, 2019 (data diolah)

Sementara itu tingkat kemiskinan jika dipilah menurut wilayah desa-kota di Provinsi Papua, maka tingkat kemiskinan di desa jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan di kota. Seperti yang disajikan pada Gambar 3.13 di atas tingkat kemiskinan di desa perkembangannya cenderung menurun yaitu pada Maret 2013 sebesar 39,92% menjadi 36,84% pada Maret 2019. Tingkat kemiskinan tertinggi terdapat pada bulan April 2013 sebesar 40,71% dan terendah pada September 2014 sebesar 35,87%. Sedangkan di wilayah kota tingkat kemiskinan fluktuatif menurun yaitu pada Maret 2013 sebesar 6,11% menjadi 4,26% pada Maret 2019. Tingkat kemiskinan tertinggi terdapat pada bulan Maret 2013 sebesar 6,11% dan terendah pada September 2015 sebesar 3,61%.

Tingkat ketimpangan pendapatan di Provinsi Papua fluktuatif menurun yaitu dari 0,442 poin pada Maret 2013 menurun menjadi 0,394 poin pada Maret 2019 atau bergeser dari ketimpangan sedang ke ketimpangan rendah. Selama periode Maret 2013 sampai dengan Maret 2019, tingkat ketimpangan tertinggi terdapat pada September 2014 sebesar 0,459 poin dan terendah pada Maret 2018 sebesar 0,384 poin.

Gambar 3.8

**Tingkat Ketimpangan Menurut Angka Gini Ratio Di Provinsi Papua
Maret 2013 – Maret 2019**



Sumber : BPS Provinsi Papua, 2019 (data diolah)

Sementara itu ketimpangan distribusi pendapatan yang diukur dengan menghitung persentase jumlah pendapatan masyarakat dari kelompok yang berpendapatan rendah dibandingkan dengan total pendapatan penduduk berdasarkan wilayah kota dan desa di Provinsi Papua cenderung meningkat persentasenya sepanjang periode Maret 2016 - Maret 2019. Kondisi ini mengindikasikan bahwa semakin membaik distribusi pendapatan kota, desa dan kota+desa di Provinsi Papua. Distribusi pendapatan di kota pada maret 2013 mencapai 20,32% meningkat menjadi 21,63% pada maret 2019 dengan distribusi pendapatan tertinggi terdapat pada September 2018 sebesar 21,95% dan terendah pada Maret 2017 sebesar 20,30% atau masuk ketimpangan rendah.

Tabel. 3.4.

**Distribusi Pendapatan Menurut Wilayah Di Provinsi Papua
Maret 2016 – Maret 2019**

Tahun/Bulan		20% berpendapatan tinggi			40% berpendapatan sedang			40% berpendapatan rendah		
		Kota	Desa	Kota + Desa	Kota	Desa	Kota + Desa	Kota	Desa	Kota + Desa
2016	Maret	38.64	42.24	43.26	41.05	42.83	42.38	20.32	14.93	14.36

Tahun/Bulan		20% berpendapatan tinggi			40% berpendapatan sedang			40% berpendapatan rendah		
		Kota	Desa	Kota + Desa	Kota	Desa	Kota + Desa	Kota	Desa	Kota + Desa
	Sept	39.52	44.84	44.84	40.11	39.14	40.01	20.36	16.03	15.15
2017	Maret	40.24	44.19	44.16	39.47	40.81	41.13	20.30	15.00	14.71
	Sept	37.77	46.67	44.85	41.25	37.69	39.97	20.98	15.64	15.18
2018	Maret	39.47	43.90	43.42	39.79	40.10	41.03	20.74	16.00	15.55
	Sept	38.17	47.25	44.57	39.88	37.75	40.67	21.95	15.00	14.77
2019	Maret	38.36	46.89	44.55	40.01	37.74	40.10	21.63	15.37	15.35

Sumber : BPS Provinsi Papua, 2019 (data diolah)

Selanjutnya distribusi pendapatan di desa pada maret 2013 mencapai 14,93% meningkat menjadi 15,37% pada maret 2019 dengan distribusi pendapatan tertinggi terdapat pada September 2016 sebesar 6,03% dan terendah pada Maret 2016 sebesar 14,93% atau masuk ketimpangan sedang. Demikian juga jika distribusi pendapatan wilayah kota+desa menunjukkan perkembangan yang semakin besar persentasenya yaitu pada maret 2013 mencapai 14,36% meningkat menjadi 15,35% pada maret 2019 dengan distribusi pendapatan tertinggi terdapat pada Maret 2018 sebesar 15,55% dan terendah pada Maret 2016 sebesar 14,36% atau masuk ketimpangan sedang. Fakta yang menarik dari perkembangan 20% pendapatan tinggi di desa persentasenya meningkat yaitu dari Maret 2016 sebesar 42,34% meningkat menjadi 46,89% pada maret 2019 sebaliknya di kota semakin menurun yaitu dari 38,64% pada Maret 2013 menjadi 38,36% pada Maret 2019 sehingga jika digabung desa+kota maka semakin meningkat persentase penduduk yang berpendapatan tinggi. Selanjutnya untuk 40% berpendapatan sedang baik desa, kota dan desa+kota terlihat menurun persentasenya.

3.1.1.2. Perekonomian Domestik

Kondisi ekonomi global termasuk perang dagang AS dan China di prediksi akan terus berlanjut sampai dengan tahun 2021. Oleh karena itu antisipasi Indonesia sangat diperlukan karena tidak bisa berharap banyak pergerakan ekonomi dunia, dan harus bersiap untuk mengantisipasi perubahan ekonomi dunia yang mengarah ke krisis keuangan finansial 2021. Indonesia sudah melewati tahun 2018 dengan tidak mudah, yang mana banyak masalah perekonomian mulai dari fluktuasi menurun nilai tukar rupiah, masalah fiskal, menurunnya pendapatan dari ekspor, perang dagang AS dan China yang turut menjadi batu sandungan ekonomi Indonesia. Selain itu, tahun 2019 ini menjadi tahun politik yang sangat menentukan kondisi perekonomian Indonesia lima tahun kedepan. Tahun 2019, penuh ketidakpastian ekonomi dan politik sampai dengan terpilihnya presiden memunculkan ketidakpastian kebijakan ekonomi politik sampai dengan semester ke dua tahun 2019. Perlu penyesuaian kebijakan (time lag) jika ada pergantian pemerintahan yang akan membutuhkan waktu sampai dengan tahun 2021, sedangkan jika tidak ada pergantian pemerintahan tentunya kebijakan ekonomi dan program yang sama akan terus dijalankan, sehingga secara hitungan ekonomis lebih bermanfaat buat pasar dan investor, karena mereka sudah familier dengan pola kebijakan pada pemerintahan sebelumnya, sehingga mereka bisa melakukan hitungan ekonomis yang lebih jelas. Walaupun demikian Indonesia belum bebas dari berbagai permasalahan ekonomi yang kemungkinan besar akan lebih berat di tahun 2020 dan 2021. Pertumbuhan ekonomi Indonesia diprediksi belum akan menunjukkan pergerakan yang signifikan.

Dalam asumsi makro Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019, pemerintah dan DPR mematok pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3%. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution meyakini pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2019 bisa lebih tinggi dari yang dipatok APBN. Sedangkan ekonom dan lembaga local maupun internasional memprediksi mengenai perekonomian Indonesia 2019 ternyata akan lebih rendah dari yang ditargetkan. Bank Dunia (World Bank) dan Dana Moneter Internasional (IMF) menilai sulit mencapai target pertumbuhan 5,3%. Lembaga pemeringkat global, seperti Fitch dan S&P memprediksi perekonomian Indonesia tahun depan hanya akan mencapai 5,2%. Bahkan, proyeksi Moody's hanya 4,8%, lebih rendah dari tahun 2018. Hal ini disebabkan karena Indonesia dianggap masih rentan terhadap sentiment eksternal. Konsumsi masih akan menjadi penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Konsumsi akan membuat pertumbuhan kredit perbankan mencapai 12%. Diprediksi belanja pemerintah dan investasi

asing langsung (Foreign Direct Investment/FDI), berada di peringkat dua dan tiga penyumbang pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun depan. Menurut riset BPS, dari segi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi Indonesia tertinggi dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) yaitu sebesar 9,08%. Kemudian dari sisi produksi, sektor jasa sudah dominan dalam perekonomian yakni hampir mendekati 60%. BPS pun menyajikan perkembangan yang sama di mana dari sisi produksi pertumbuhan tertingginya justru dicapai oleh lapangan usaha jasa yakni sebesar 8,99%.

Permasalahan menahun yang dialami Indonesia sejak orde baru yaitu tingkat produktivitas (ekspor barang yang memiliki nilai tambah) yang sangat rendah dan ketergantungan pada impor bahan bakar minyak sepertinya terus menghantui nilai pergerakan Rupiah, inflasi dan kesehatan keuangan negara. Minimnya pendapatan negara dari sektor pajak, yang disebabkan oleh rendahnya nilai ekspor akan terus menggerus keuangan negara. Sementara itu, untuk meningkatkan produktivitas yang berbasis teknologi terapan dibutuhkan kualitas sumber daya manusia yang tinggi. Kalau dilihat dari kondisi pembangunan sumber daya manusia dari tingkat competitiveness index di tahun 2018 menunjukkan Indonesia berada di posisi ke 45 jauh tertinggal dari negara tetangga terdekat seperti Thailand, Malaysia dan Singapura, meskipun dalam kurun sepuluh tahun Indonesia sudah naik 10 digit dari posisi 55 ke 45. Selain harga batu bara dan Crude Palm Oil diprediksikan akan jatuh pada tahun 2019-2020, hal ini disebabkan, masing-masing negara membuat pengetatan belanja dan perubahan kebijakan ekonomi terutama negara-negara Eropa untuk mengantisipasi gejolak krisis ekonomi di tahun 2020. Melihat kondisi ini, Indonesia harus berbenah diri dengan membangun relasi ekonomi bilateral yang lebih kuat, mengingat sejak terpilihnya Trump dan Brexit terjadi pola kebijakan ekonomi dunia dari ekonomi terbuka ke ekonomi tertutup. Pemerintah harus bisa memperkuat dan membangun ekonomi regional yang kuat, mengingat perekonomian Indonesia masih sangat ditunjang oleh belanja nasional. Kesenjangan kualitas pembangunan infrastruktur fisik dan manusia di 35 provinsi di Indonesia harus terwujud, atau paling tidak di setiap pulau besar di Indonesia terdapat satu wilayah yang menjadi pusat dagang dan transformasi ekonomi berbasis teknologi terapan.

Tahun 2019 yang merupakan tahun politik menjadi peluang cukup besar untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Oleh karena, konsumsi khususnya non rumah tangga diprediksi mengalami kenaikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dengan adanya pesta demokrasi. Sisi investasi mengalami sedikit pelemahan karena investor atau pengusaha cenderung menunggu dan mencermati peluang investasi di tahun politik di 2020. Hal itu

disebabkan pelaku usaha, khususnya untuk sektor besar masih harus menunggu kepastian dari siapa yang menjadi presiden Indonesia pada 2019. Akan tetapi, melambatnya investasi bisa ditutup dengan kenaikan konsumsi non rumah tangga. Belanja barang seperti kaos, spanduk, stiker dan yang lainnya untuk kebutuhan kampanye meningkat cukup pesat. Hal inilah, yang menjadi dasar bahwa pertumbuhan ekonomi tahun depan tidak akan terlalu terganggu kegiatan politik.

Dari sisi domestik, INDEF menyebut Indonesia harus bergulat dengan pertumbuhan ekonomi yang stagnan di kisaran 5%. Selama ini 56% dari pertumbuhan Indonesia ditopang oleh konsumsi rumah tangga karena peran sektor investasi dan perdagangan global masih belum dominan. Selain itu, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) belum optimal membantu nilai Produk Domestik Bruto (PDB), karena kontribusinya hanya 32%. INDEF menilai, rumitnya perizinan investasi mengurangi minat investor asing untuk berinvestasi ke Indonesia. Penyerapan tenaga kerja dari investasi yang masuk juga tidak maksimal. Hal ini mengacu pada rencana pemerintah untuk mengumpulkan investasi pada industri pionir sebesar Rp 500 triliun dengan insentif berupa libur pajak (tax holiday). Defisit neraca transaksi berjalan diperkirakan masih terus terjadi hingga tahun 2020, yang apabila permasalahan impor minyak dan gas (migas) di Indonesia belum ditangani dengan baik, sementara konsumsi migas yang semakin besar akan menjadi masalah bagi neraca perdagangan dan defisit transaksi berjalan dan akan berlanjut sampai dengan 2021.

Bank Dunia dalam laporannya yang bertajuk "East Asia dan Pacific Economic Update October 2019: Weathering Growing Risk" , menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan untuk terus tumbuh dengan capaian sebesar 5,1% pada 2020 dan 5,2% pada 2021. Namun demikian Bank Dunia menekankan sejumlah tantangan yang akan dihadapi Indonesia pada tahun depan, yang salah satunya adalah perang dagang antara China dan Amerika Serikat yang masih diprediksi akan terus berlanjut. Eskalasi tersebut secara langsung akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia serta harga komoditas, dan dapat mengancam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Selain itu, kondisi tersebut juga berpotensi memperlebar defisit transaksi berjalan karena pendapatan dari sektor ekspor mengalami kontraksi. Sementara ekspor Indonesia diperkirakan mengalami pertumbuhan negatif dengan capaian sebesar -1% pada 2019 dan diproyeksikan akan kembali tumbuh pada 2020 dan 2021 dengan pertumbuhan sebesar 1,5% dan 2,8%.

Disisi lain, Lembaga keuangan internasional, Moody's Investor Service memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia akan berada dibawah 5 persen selama tiga tahun yaitu dari

2019 hingga 2021. Tahun ini Moody's memperkirakan PDB Indonesia hanya mampu tumbuh 4,9 persen. Prediksi ini lebih rendah dari asumsi makro APBN 2019 sebesar 5,3 persen. Senada dengan Moody's, Managing Director and Chief Credit Officer Michael Taylor mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung mampu naik tipis di 2021 menjadi 4,8 persen. Dengan masih berlanjutnya perang dagang antara AS dan China yang diprediksi sampai dengan akhir tahun 2020, maka kondisi ini dapat menekan pertumbuhan ekonomi China yang diprediksi akan turun pada tahun 2021 lebih rendah dari proyeksi tahun 2020 yang ditargetkan 5,8 persen. China diperkirakan akan melakukan rebalancing dan penurunan permintaan global. China sebagai negara ekonomi besar, dengan lesunya pertumbuhan China akan berimbas pada negara lain. Jika China berusaha mengatasinya dengan mengurangi konsumsi batu baranya, maka harga batu bara dapat tertekan. China sebagai pasar utama produk batu bara Indonesia akan dapat mempengaruhi lesunya pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Sedangkan menurut Deputy Gubernur Senior BI, Destry Damayanti mengatakan bahwa pihaknya optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2021 dapat mencapai 5,6 persen dengan bauran kebijakan yang dibuat bersama oleh pemerintah dan juga regulator. Perekonomian dunia masih dalam kondisi yang cukup tertekan, Namun melalui bauran kebijakan, akan mampu mengejar stabilitas untuk mendorong pertumbuhan yang diperkirakan akan mencapai 5,1-5,5 persen (yoy) pada 2020 dan optimis bahwa dalam jangka menengah Indonesia akan tumbuh 5,2-5,6 persen pada 2021. Faktor penentu suksesnya Indonesia dalam mencapai angka 5,6 persen, selama dua tahun ke depan adalah pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Sebab dengan dibangunnya infrastruktur secara berkelanjutan, akan lebih mudah untuk membuka akses ekonomi dan mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat.

3.1.1.3. Prospek Perekonomian Provinsi Papua Tahun 2021

Dalam konsep ekonomi makro pendapatan regional tersebut merupakan penjumlahan dari konsumsi rumah tangga (C), investasi (I), pengeluaran pemerintah (G), dan net ekspor (X-M), atau dalam bentuk persamaan pengeluaran agregate : $Y = C + I + G + X - M$. Persamaan ini menunjukkan bahwa jika faktor-faktor stimulus ekonomi (C, I, G, X) meningkat, baik itu secara keseluruhan atau salah satu diantaranya, sedangkan faktor leakage ekonomi yaitu impor (M) tidak berubah, maka dipastikan pendapatan regional akan naik yang menciptakan terjadinya pertumbuhan ekonomi. Dengan kata lain, jika ingin menaikkan

pertumbuhan ekonomi wilayah, dapat dilakukan dengan cara mendorong peningkatan pada variabel-variabel C, I, G dan X, serta dengan menekan M.

Berdasarkan konsep pemikiran diatas, maka proyeksi pertumbuhan ekonomi di tahun 2021 dapat ditentukan, menggunakan beberapa asumsi sebagai berikut.

1) Asumsi-asumi yang mendistorsi pertumbuhan ekonomi

- a. Perekonomian Papua masih akan menghadapi tekanan akibat dari perang dagang yang diperkirakan masih akan berlanjut sampai dengan tahun 2021. Tantangan ekspor ke negara Jepang, India dan China masih akan berlanjut sampai dengan tahun 2021 akibat melemahnya perekonomian Jepang, India dan China yang dapat berimbas pada menurunnya permintaan impor dari Papua;
- b. The Fed atau bank sentral Amerika Serikat (AS) diprediksi masih akan kembali mengerek suku bunga acuannya di 2021. Kondisi ini dapat menggoyang kebijakan di emerging market atau negara berkembang, termasuk Indonesia. Sebabnya adalah ketika The Fed menurunkan suku bunga acuannya, arus modal akan mengalir ke emerging market. Namun ketika The Fed menaikkan suku bunga acuannya maka modal tersebut akan keluar dari emerging market dan beramai-ramai masuk ke AS. Dampaknya nilai tukar (kurs) rupiah akan bergejolak di tahun 2021 atau menjadi Rp14.500. jika ini terjadi maka akan menyebabkan semakin memperbesar defisit neraca perdagangan Indonesia;
- c. Ketergantungan ekspor Provinsi Papua terhadap satu komoditi yaitu tambang tembaga yang diproduksi oleh PT. Freeport Indonesia yang mencapai kurang lebih 80 persen dari total ekspor Papua masih akan berlanjut hingga tahun 2021, seiring dengan transisi penambangan dari lubang terbuka ke bawah tanah, maka produksi PT FI diperkirakan akan meningkat di tahun 2021. Ini berarti volume ekspor logam (tembaga dan emas) diprediksi akan meningkat akibatnya ketergantungan perekonomian Papua akan semakin besar pada komoditi ini. Hal ini akan menyebabkan perekonomian Papua menjadi semakin penuh ketidakpastian.
- d. Tantangan Provinsi Papua untuk menaikkan IPM tahun 2021, hal ini terlihat dari tren perlambatan yang terjadi di tahun sebelumnya yang membuat provinsi Papua hanya menargetkan kenaikan IPM sebesar 1,07 poin untuk tahun 2020 dan 1,14 poin untuk proyeksi tahun 2021 dibanding tahun sebelumnya. Indonesia sendiri seperti yang dilaporkan BPS adanya peningkatan IPM Indonesia menjadi 71,39 di tahun 2018 dibanding tahun 2017, sedangkan Papua berhasil meningkatkan IPM untuk tahun yang

sama menjadi sebesar 60,06 atau meningkat 0,97 poin dibanding tahun 2017 namun masih menduduki posisi IPM terendah di Indonesia. Disparitas IPM yang cukup besar antar sebagian besar Kabupaten/kota di Papua akan menjadi tantangan tersendiri pemerintah provinsi Papua dalam mengejar target tahun 2020 walaupun sebenarnya Papua sendiri sudah meningkatkan statusnya dari rendah ke sedang. Kesenjangan pembangunan di wilayah Papua, turut menyebabkan masih terjadinya disparitas IPM antar wilayah Kabupaten/kota di Papua. Kota Jayapura, IPM mencapai 79,58 sementara di Kabupaten Nduga, hanya 29,4. Tentunya dapat dibayangkan keadaan kesenjangan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat antara Kota Jayapura dengan Kabupaten Nduga dan Kabupaten IPM rendah lainnya di Papua;

- e. Berkaitan dengan upaya meningkatkan IPM dan mengurangi kesenjangan antar Kabupaten/kota maka berbagai program pembangunan ekonomi yang diluncurkan oleh pemerintah Papua harus berkualitas dan berlandaskan nilai-nilai sosial dan mengedepankan pembangunan inklusif. Menjadi tantangan bagi pemerintah Papua dengan berbagai karakteristik dan sosial budayanya untuk berupaya memperbaiki kondisi sosial masyarakat secara berkesinambungan agar terwujud perbaikan kehidupan masyarakat atau sistem sosial secara keseluruhan. Untuk menuju kehidupan yang lebih baik atau lebih manusiawi perlu melakukan pendekatan pembangunan inklusif, yang mana pemerintah Papua dalam upayanya untuk membangun dan mengembangkan Kabupaten yang masih tertinggal, menjadi suatu keharusan untuk mengajak stakeholder dan mengikutsertakan semua orang dengan berbagai perbedaan latar belakang, karakteristik, kemampuan, status, kondisi, etnik, budaya dan lainnya agar teribat dalam proses pembangunan;
- f. Upaya mendorong peningkatan kesehatan, pendidikan dan ekonomi perlu difokuskan dan alokasi pendanaan yang dapat memacu dan meningkatkan kualitas pembangunan manusia. Untuk peningkatan kesehatan terutama infrastruktur kesehatan pada kabupaten tertinggal, misalnya sanitasi dan air bersih perlu direstrukturisasi yang semuanya akan mengarah pada peningkatan kualitas SDM, hal ini harus didukung juga dengan kebijakan pemerintah yang perlu diarahkan pada tahun 2021 agar belanja daerah lebih fokus ke belanja manusia guna tercipta pemerataan sarana dan akses kesehatan sehingga disparitas semakin kecil;
- g. Di bidang kesehatan, upaya-upaya untuk pemerataan pembangunan kesehatan masyarakat harus terus digalakkan, terutama diprioritaskan bagi Kabupaten dengan

disparitas yang cukup besar agar kesenjangan juga semakin mengecil. Angka Harapan Hidup antara Kabupaten Mimika sebagai Kabupaten dengan AHH tertinggi di Papua jika dibandingkan dengan Kabupaten Nduga dan Asmat masih terlihat masih cukup besar walaupun mulai menunjukkan perbaikan kesenjangan. Kesenjangan infrastruktur kesehatan pada Kabupaten terendah AHH dan kesulitan akses ke pelayanan kesehatan, factor spasial menjadi penghambat Kabupaten sulit akses mengejar ketertinggalan di bidang kesehatan;

- h. Tantangan bagi pemerintah untuk berupaya meningkatkan Angka Harapan Hidup yaitu dengan memperhatikan kondisi lingkungan tempat tinggal penduduk karena kondisi lingkungan yang tidak sehat akan mempengaruhi kualitas hidup, kemudian memberikan pemahaman perlunya hidup sehat dan menggalakkan upaya preventif promotive dan bagaimana meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memelihara dan meningkatkan kesehatannya. Selain itu untuk mencapai derajat kesehatan yang sempurna, baik fisik, mental, dan sosial, maka masyarakat harus mampu mengenal serta mewujudkan aspirasinya, kebutuhannya, dan mampu mengubah atau mengatasi lingkungannya baik lingkungan fisik, sosial budaya dan sebagainya. Untuk mencapai kesehatan secara optimal, memberikan pendidikan kesehatan kepada masyarakat menjadi hal yang utama, yang mana pemerintah Papua perlu melakukan kegiatan untuk membantu individu, kelompok, masyarakat dalam meningkatkan kemampuan dan perilakunya. Manfaat dari upaya preventif promotive, diharapkan dapat menurunkan angka kesakitan, meningkatkan presentase kasus yang dideteksi dini, menurunkan kejadian komplikasi dan meningkatkan kualitas hidup;
- i. Pendidikan di Papua mengalami perkembangan yang cukup baik, yang mana RLS penduduk Papua usia 25 tahun ke atas meningkat 0,8 tahun sepanjang 2013-2018. Namun disisi lain kesenjangan RLS Kabupaten/kota antara RLS Kota Jayapura (tertinggi) dengan Kabupaten Nduga (terendah) terlihat bergerak semakin melebar. Masih banyaknya anak yang tidak bersekolah usia 7-18 karena hambatan social, ekonomi, akses ke pelayanan pendidikan dan factor geografis akan mengakibatkan rendahnya rata-rata lama sekolah pada wilayah sulit akses di Papua dan menyulitkan pemerintah Kabupaten maupun Provinsi untuk mempercepat kenaikan rata-rata lama sekolah di Papua. Kesenjangan pendidikan antar kelompok ekonomi juga masih menjadi permasalahan dan semakin lebar seiring dengan semakin tingginya jenjang Pendidikan di Papua;

- j. Pengeluaran perkapita sebagai proxy dari dimensi standar hidup yang layak merupakan salah satu kunci penting dalam membangun kualitas hidup manusia. Tantangan bagi pemerintah Papua adalah bagaimana memperkecil kesenjangan pengeluaran perkapita antara kota Jayapura (tertinggi) dan Kabupaten Nduga (terendah) yang cenderung semakin melebar selama kurun waktu 2013-2019 yang berdampak semakin melebarnya kesenjangan antar wilayah di Papua;
- k. Tingkat kemiskinan terlihat menurun di Papua, yang disebabkan karena beberapa wilayah mudah akses, seperti Merauke, Jayawiya, Nabire, Keerom, Kota Jayapura terjadi penurunan signifikan sejak tahun 2014-2018, namun untuk wilayah sulit akses ada kecenderungan semakin meningkat tingkat kemiskinan. Masalah keamanan dan keterbatasan infrastruktur ekonomi menjadi isu utama yang menjadi penyebab terhambatnya aktivitas ekonomi masyarakat di Kabupaten sulit akses yang berdampak pada menurunnya pengeluaran perkapita masyarakat dan meningkatnya tingkat kemiskinan;
- l. Ketimpangan pendapatan Papua semakin menurun dan masuk kategori ketimpangan sedang ke rendah, namun jika diperhatikan persebaran pada Kabupaten/kota nampaknya ketimpangan yang rendah ini mengindikasikan meratanya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Kabupaten Puncak, Asmat, Mambero Raya, terlihat ketimpangan pendapatannya sepanjang tahun 2013-2017 menunjukkan angka di bawah 0,24. Factor pemicu meratanya penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan yaitu faktor kendala geografis yang luas dan penyebaran penduduk yang terpencar dan sulit diakses yang berdampak terhambatnya mobilitas antar distrik, kampung ke pusat pelayanan aktivitas kesehatan, pendidikan dan ekonomi, selanjutnya ketersediaan infratraktur ekonomi, Pendidikan, dan kesehatan juga masih terbatas dan biasanya hanya tersedia di distrik dan ibu kota kabupaten, ketergantungan pada bantuan pemerintah yang semakin tinggi juga dapat menghambat tumbuhnya kreatifitas masyarakat untuk mandiri secara ekonomi, aktivitas masyarakat miskin dan rentan dominan di sektor pertanian dengan produktifitas yang semakin rendah dan terbatasnya akses terhadap pasar turut menghambat peningkatan daya saing dan upaya pengurangan penduduk miskin.

2) Asumsi-asumsi yang menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi

- a. Kontribusi pengeluaran RT masih akan mendominasi pembentukan PDRB pengeluaran sampai dengan tahun 2021 yang akan meningkat. Adapun stimulus terbesar masih berasal dari pengeluaran konsumsi makanan dan minum serta transportasi;
- b. Dampak ekonomi yang positif dari Pelaksanaan PON XX di Papua pada tahun 2020 masih akan dirasakan seluruh masyarakat dan wilayah Papua pada umumnya di tahun 2021 namun tidak segenar pada awal dan akhir tahun 2020.
- c. Secara sektoral, kinerja sektor pertanian di tahun 2021 akan semakin baik kontribusi dan besarnya dalam penciptaan nilai tambah terkait dengan adanya wacana pengalihan dari anggaran subsidi input pertanian menjadi anggaran untuk membeli produksi pertanian ketika harganya sedang anjlok di bawah harga acuan. Adanya jaminan harga penjualan produk pertanian yang kerap jatuh kala masa panen melalui penerapan subsidi output, diharapkan petani bisa menikmati harga penjualan sesuai harga patokan dan terpacu untuk meningkatkan produktifitasnya;
- d. Sektor konstruksi dan transportasi, juga masih akan berperan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua tahun 2021. Terbukanya konektivitas Kota Jayapura dengan Kota Wamena di Jayawijaya akan lebih memacu perekonomian wilayah disekitar daerah-daerah pegunungan dan pesisir sulit akses, seperti Keerom, Yalimo dan Jayawijaya kedepannya, sehingga dapat mendorong faktor-faktor konsumsi, investasi dan ekspor antar wilayah;
- e. Peningkatan produktifitas tenaga kerja regional akan semakin baik dan dapat diandalkan sebagai salah satu stimulus pertumbuhan ekonomi wilayah di tahun 2021 selain karena adanya Bonus Demografi yang akan lebih dirasakan pada tahun 2020 juga dengan adanya program vokasi Indonesia bekerja akan semakin meningkatkan kompetensi produktifitas tenaga kerja di tahun 2021.
- f. Sejalan dengan misi pembangunan Papua yaitu memantapkan kualitas dan daya saing SDM Papua dilakukan untuk mendukung dan mewujudkan kebangkitan dan kemandirian, maka wujud dari keinginan masyarakat Papua untuk mandiri dengan memiliki kemauan, kreatif dan inovatif sebagai pelaku pembangunan bagi kemajuan daerah untuk mencapai kualitas hidup manusia. Oleh karena itu setiap orang harus dapat berkontribusi dalam upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat di Papua. Dengan adanya peningkatan IPM pada Kabupaten/kota di Papua yang terjadi merupakan bukti bahwa pembangunan manusia terus mengalami peningkatan nyata

dan juga bentuk keseriusan pemerintah dalam mensejahterakan masyarakatnya. Kebijakan pemerintah yang lebih memfokuskan alokasi pendanaan yang dapat memacu dan meningkatkan kualitas pembangunan manusia akan dapat menstimulus pencapaian target maupun proyeksi IPM. Kondisi ini sejalan dengan arahan pemerintah pusat agar belanja pemerintah untuk fokus ke belanja manusianya yang akan mendorong juga pertumbuhan ekonomi tinggi dan pada akhirnya IPM akan meningkat;

- g. Sepanjang tahun 2013-2018, angka harapan hidup penduduk di Papua bertambah 0,6 tahun. Tahun 2018, setiap bayi yang lahir diprediksi akan dapat hidup sampai dengan usia 65,4 tahun, usia ini bertambah 0,2 tahun dibanding tahun sebelumnya. Peningkatan usia harapan hidup di Papua, sebagian besar disebabkan oleh keberhasilan pemerintah menanggulangi penyakit menular (TB), penyakit terkait kehamilan, neonatal, stunting, dan penyakit-penyakit terkait gizi lainnya. Ke depan, tantangan usia harapan hidup juga akan meningkat yaitu dengan adanya peningkatan pelayanan dan ketersediaan obat-obatan akan meningkatkan pula peluang masyarakat untuk senantiasa menjaga kesehatannya sehingga peluang hidup lebih lama akan semakin meningkat. Selain itu dengan meningkatnya peluang hidup lebih lama akan menimbulkan juga adanya beban ganda penyakit yaitu banyaknya penyakit tidak menular seperti penyakit jantung, diabetes, stroke, kanker dll. Pendidikan kesehatan juga akan mempengaruhi pola pikir masyarakat untuk hidup lebih sehat, bersaha menjaga kesehatannya sehingga akan meningkatkan pula angka harapan hidup secara umum. Oleh karena itu, dengan upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah maka target dan proyeksi angka harapan hidup akan dapat tercapai, namun demikian pemerintah, masyarakat dan pemerhati kesehatan selain terus giat melakukan berbagai upaya untuk menurunkan infeksi penyakit menular seperti TB dan diare dan berbagai gangguan kesehatan ibu dan anak, maka disaat bersamaan juga pemerintah, masyarakat perlu meningkatkan upaya berbagai pencegahan penyakit-penyakit tidak menular yang pengobatannya juga membutuhkan biaya yang sangat besar;
- h. Rata-rata lama sekolah juga terlihat meningkat. Upaya meningkatkan rata-rata lama sekolah dengan menggalakan program kejar paket bagi penduduk yang sudah melewati usia sekolah agar meningkat Pendidikan formalnya akan meningkatkan indeks rata-rata lama sekolah. Program pemerintah yang ditawarkan yaitu pendidikan wajib sampai SMA atau paket C untuk setiap penduduk, baik masih usia sekolah

maupun telah lewat usia sekolah. Penggalakan kembali program ini jika berhasil maka rata-rata lama sekolah di Papua akan meningkat sehingga IPM Papua pada tahun 2021 menjadi 63,28 dapat diharapkan terwujud;

- i. Di bidang ekonomi, dari sisi mikro yaitu peningkatan produktivitas khususnya sector yang dominan menjadi penopang kehidupan masyarakat miskin dan rentan sehingga tercipta kemandirian ekonomi, mengurangi ketergantungan masyarakat miskin pada bantuan pemerintah dengan mendorong kepemilikan asset-asset yang produktif, mendorong dan membuka dan memudahkan masyarakat miskin dan rentan terhadap akses pembiayaan, meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat miskin dan rentan untuk dapat menciptakan nilai tambah, meningkatkan produktifitas usaha dan mendorong penciptaan daya saing produk, dan bantuan untuk mempermudah akses pasar. Dari sisi makro, upaya pengentasan kemiskinan pemerintah perlu terus menjaga stabilitas inflasi, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, menciptakan lapangan kerja produktif, menjaga iklim investasi dan regulasi perdagangan, meningkatkan produktivitas sektor dan mengembangkan infrastruktur di Kabupaten tertinggal. Pemerintah perlu membuat kebijakan agar masyarakat miskin dan rentan dapat mengakses sumber pendanaan untuk aktivitas dan inisiatif masyarakat yang terbukti memiliki dampak sosial ekonomi agar dapat meningkat menjadi kelompok ekonomi menengah;
- j. Upaya untuk mengurangi ketimpangan pendapatan sejalan dengan kebijakan pemerintah yang berupaya untuk mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan dan menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan Provinsi Papua tahun 2019-2023. Oleh karena itu target dan proyeksi terkait ketimpangan pendapatan dan pengurangan kemiskinan akan dapat diwujudkan dengan dijadikan sebagai prioritas pembangunan Papua selain peninglatan kualitas SDM. Komitmen pemerintah di bidang ekonomi, terkait upaya pengurangan kemiskinan dan kesenjangan distribusi pendapatan diwujudkan dalam bentuk perbaikan distribusi pendapatan, perbaikan pemerataan pendapatan antar daerah, perbaikan kesenjangan antara kampung, terjadinya proses afirmasi bagi orang asli Papua. Dalam bidang sosial, perbaikan akses terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan, serta pemerataan antara laki-laki dan perempuan. Untuk mengurangi kesenjangan pendapatan dan kemiskinan, bantuan untuk program pendidikan melalui beasiswa, kesehatan melalui Kartu Papua Sehat sebagai bukti nyata dari upaya tersebut.

Mengacu pada berbagai faktor distorsi dan stimulus fiskal maupun non fiskal di atas, serta merujuk kepada target-target indikator makro yang dimuat dalam RPJMD Provinsi Papua Tahun 2019-2023, maka secara deskriptif kuantitatif dapat disampaikan target 2020 dan proyeksi 2021 indikator pembangunan sosial ekonomi makro daerah Provinsi Papua sebagai berikut.

Tabel. 3.5.

Target dan Proyeksi Pembangunan Sosial Ekonomi Makro Daerah Provinsi Papua Tahun 2020-2021

Indikator Kinerja	Satuan	2018	2019	2020	2021
		Historis	On Time	Target RPJMD	Proyeksi
LPE PDRB Dengan Tambang	%	7.32	-15.72	5.56	5.64
LPE PDRB Tanpa Tambang	%	5.04	4.26	6.20	5.68
PDRB per kapita Dengan Tambang	Juta Rp	63.28	67.38	59.86	63.17
PDRB per kapita Tanpa Tambang	Juta Rp	40.03	43.10	44.77	45.60
ICOR	Indeks	3.92	-3.34	4.06	3.47
Laju Inflasi	%	6.54	2.31	6.41	5.72
Rasio penduduk yang Bekerja	%	96.80	96.35	97.50	96.57
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	79.11	76.92	77.68	78.41
Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3.20	3.65	2.50	3.02
IPM	indeks	60.06	61.07	62.14	63.28
Kemiskinan	%	27.43	26.48	25.88	25.29
Gini Rasio	indeks	0.384	0.3953	0.3919	0.3887

Sumber : data diolah (2019)

Dalam rangkaian perencanaan dan penganggaran tahun 2020-2021, secara ekonomi ada empat hal penting yang perlu diantisipasi menghadapi tantangan domestik, nasional dan global. Pertama, konsumsi rumah tangga harus dijaga bertahan dan terus tumbuh, sebab sekitar 43,68% (periode 2017-2019) ekonomi Papua masih digerakkan oleh sektor konsumsi rumah tangga. Kedua, investasi yang menjadi penggerak kedua ekonomi yang menyumbang sebesar 28,93% harus ditingkatkan. Melalui investasi diharapkan menambah penciptaan lapangan kerja baru, mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Transaction cost atau biaya transaksi dalam berinvestasi perlu ditekan agar tidak selalu terjadi high cost economy, dimana

penurunan biaya transaksi ini lebih diprioritaskan dengan menekan biaya transportasi, biaya administrasi dan biaya lobi (khususnya terkait pelepasan tanah hak ulayat). Ketiga adalah netto antara perdagangan keluar dan ke dalam daerah. Ini penting untuk menciptakan surplus perdagangan. Untuk itu selama tahun 2020-2021 mendatang, pemerintah provinsi perlu lebih serius untuk meningkatkan agribisnis pertanian dan perikanan guna memperlambat tekanan dari luar. Keempat, yang berkaitan dengan yang pembahasan Musrenbang yaitu belanja pemerintah daerah. efektivitas dan efisiensi belanja pemerintah daerah perlu dioptimalkan, sehingga kontribusi APBD Provinsi Papua tahun 2020-2021 mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan lebih tinggi lagi. Oleh sebab itu, sebagai provinsi yang memiliki SAKIP dengan nilai baik, Setiap aparatur harus mengubah mindset dari bermental membagi-bagi dan menghabiskan anggaran menjadi mental memberi manfaat dari hasil kerja yang dilakukan berdasarkan program-program prioritas.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, keuangan daerah memiliki peran yang sangat penting, hal ini tidak terlepas bahwa dalam rangka membiayai pelaksanaan pembangunan sangat tergantung dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang cermat dan akurat perlu dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik. Keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan pembangunannya tidak bisa dilepaskan dari faktor pengelolaan keuangan daerah yang dikelola dengan baik dan profesional.

Terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal telah menempatkan pengelolaan aset daerah secara profesional pada posisi yang amat potensial untuk menunjang penerimaan pemerintah daerah. Selain pendanaan melalui APBD, terdapat sumber pendanaan lainnya di luar APBD (Non APBD) antara lain pendanaan melalui APBN (Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan), dana kemitraan, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan dan Program Kemitraan serta bina

lingkungan di Provinsi Papua yang semuanya merupakan potensi sumber penerimaan guna menunjang beban belanja pembangunan daerah.

Kebijakan keuangan Provinsi Papua Tahun 2019 disusun dalam rangka mewujudkan prioritas daerah dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya.

3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Daerah merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun terkait. Berdasarkan ketentuan tersebut, dijelaskan bahwa sumber pendapatan daerah Provinsi terdiri atas: (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, (2) Dana Perimbangan yang meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK, Dana Bagi Hasil, dan (3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah, yang meliputi hibah, dana darurat, dana bagi hasil pajak dari pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan dana otonomi khusus, dana bantuan keuangan dari provinsi/kabupaten/kota lainnya, lain-lain penerimaan, dana transfer pusat dan dana insentif daerah. Sementara penerimaan pembiayaan bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran daerah tahun sebelumnya (SiLPA), penerimaan pinjaman daerah, Dana Cadangan Daerah (DCD), dan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, keuangan daerah memiliki peran yang sangat penting, hal ini tidak terlepas bahwa dalam rangka membiayai pelaksanaan pembangunan sangat tergantung dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang cermat dan akurat perlu dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik. Keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan pembangunannya tidak bisa

dilepaskan dari faktor pengelolaan keuangan daerah yang dikelola dengan baik dan profesional.

Terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal telah menempatkan pengelolaan aset daerah secara profesional pada posisi yang amat potensial untuk menunjang penerimaan pemerintah daerah. Selain pendanaan melalui APBD, terdapat sumber pendanaan lainnya di luar APBD (Non APBD) antara lain pendanaan melalui APBN (Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan), dana kemitraan, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan dan Program Kemitraan serta bina lingkungan di Provinsi Papua yang semuanya merupakan potensi sumber penerimaan guna menunjang beban belanja pembangunan daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Daerah merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun terkait. Berdasarkan ketentuan tersebut, dijelaskan bahwa sumber pendapatan daerah Provinsi terdiri atas: (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, (2) Dana Perimbangan yang meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK, Dana Bagi Hasil, dan (3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah, yang meliputi hibah, dana darurat, dana bagi hasil pajak dari pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan dana otonomi khusus, dana bantuan keuangan dari provinsi/kabupaten/kota lainnya, lain-lain penerimaan, dana transfer pusat dan dana insentif daerah. Sementara penerimaan pembiayaan bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran daerah tahun sebelumnya (SiLPA), penerimaan pinjaman daerah, Dana Cadangan Daerah (DCD), dan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. Perhatikan Tabel 3.6

Tabel. 3.6.

Ringkasan Pendapatan Daerah Dan Perubahannya Pada APBD Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2016-2018
(dalam milyar rupiah)

No	URAIAN	TA 2016				TA 2017				TA 2018			
		APBD-Induk 2016	APBD-Perubahan 2016	(+) Bertambah / (-) Berkurang	Persentase Perubahan	APBD-Induk 2017	APBD-Perubahan 2017	(+) Bertambah / (-) Berkurang	Persentase Perubahan	APBD-Induk 2018	APBD-Perubahan 2018	(+) Bertambah / (-) Berkurang	Persentase Perubahan
1	PENDAPATAN	12.438,14	13.065,98	627,84	5,05	13.968,88	14.116,82	147,95	1,06	13.548,51	13.767,81	219,30	1,62
1.1	Pendapatan Asli Daerah	1.097,66	1.161,42	63,76	5,81	1.308,28	1.367,16	58,88	4,50	1.008,76	1.096,06	87,30	8,65
1.1.1	Pendapat Pajak Daerah	789,79	879,02	89,23	11,30	1.030,42	1.045,48	15,05	1,46	760,90	819,44	58,54	7,69
1.1.2	Retribusi Daerah	101,16	83,19	-17,97	-17,76	82,93	82,93	0,00	0,00	118,80	116,25	-2,55	-2,15
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	30,25	52,81	22,56	74,58	52,81	52,81	0,00	0,00	53,58	73,96	20,38	38,03
1.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah	176,47	146,40	-30,07	-17,04	142,12	185,94	43,83	30,84	75,48	86,41	10,93	14,48
1.2	Dana Perimbangan	4.305,36	3.949,27	-356,09	-8,27	4.419,28	4.543,83	124,56	2,82	4.553,50	4.688,45	134,95	2,96
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	1.299,47	921,39	-378,07	-29,09	606,16	606,16	0,00	0,00	761,26	761,26	0,00	0,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	2.502,45	2.502,45	0,00	0,00	2.570,12	2.570,12	0,00	0,00	2.570,12	2.570,12	0,00	0,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	503,45	514,75	11,30	2,25	1.243,00	1.367,55	124,56	10,02	1.222,13	1.357,08	134,95	11,04
1.2.3	Dana Alokasi Khusus (Fisik)	0,00	10,68	10,68	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	7.035,12	7.955,29	920,17	13,08	8.241,32	8.205,83	-35,49	-0,43	7.986,25	7.983,30	-2,95	-0,04
1.3.1	Dana Hibah	7,50	7,50	0,00	0,00	0,50	0,68	0,18	35,00	6,10	3,15	-2,95	-48,35
1.3.4	Dana Penyesuaian/Dana BOS	427,57	560,23	132,67	31,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5	Dana Otonomi Khusus	5.395,05	5.395,05	0,00	0,00	5.615,82	5.580,15	-35,66	-0,64	5.580,15	5.580,15	0,00	0,00
1.3.7	Dana Tambahan Infrastruktur	1.200,00	1.987,50	787,50	65,63	2.625,00	2.625,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
1.3.7	Dana Insentif Daerah	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber : BPKAD Provinsi Papua, 2019 (data diolah)

Selama tahun 2016-2018 cenderung pendapatan daerah Provinsi Papua jika mengacu pada APBD Induk mengalami peningkatan sekitar 4,65% per tahun, dengan kenaikan tertinggi pada Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah mencapai 7,03% per tahun, kemudian Dana Perimbangan (DAPER) sebesar 6,32% per tahun. Sementara untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) terlihat mengalami penurunan kurang lebih sebesar -1,85% per tahun.

Peranan terbesar yang menginjeksi DAPER hingga tumbuh paling tinggi diantara semua komponen pendapatan adalah Dana Alokasi Khusus yang mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 72,61% per tahun selama periode 2016-2018. Adapun untuk Dana Otonomi Khusus, untuk waktu yang sama hanya mengalami peningkatan 1,73% per tahun, dimana sampai pada APBD Induk 2018 tercatat Dana Otonomi Khusus sebesar Rp. 5.580,15 milyar.

Hal lainnya yang terlihat pada Tabel 4.10 adalah nilai perubahan pendapatan daerah pada APBD Provinsi Papua selama tahun 2016-2018 selalu mengalami penambahan, rata-rata sebesar 2,58% bila dibandingkan dengan APBD Induk. Paling tinggi pada PAD mencapai 6,32% per tahun atau sekitar Rp. 69,98 milyar per tahunnya. Dimana koreksi perubahannya paling banyak terjadi pada Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yakni sebesar 37,54% per tahun atau Rp. 14,31 milyar. Sedangkan untuk Pajak Daerah rata-rata bertambah sebesar Rp. 54,28 milyar atau 6,82% selama periode 2016-2018.

Otonomi daerah dan desentralisasi berimplikasi pada semakin luasnya kewenangan daerah untuk mengatur dan mengelola pendapatan daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, maka secara bertahap daerah dituntut untuk mengupayakan kemandirian pendapatannya dengan mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan yang dimilikinya. Dalam konteks pengelolaan pendapatan daerah di Provinsi Papua, proporsi sumber pendapatan utama daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), diproyeksikan dengan proporsi bisa mencapai 10% dari total pendapatan daerah, atau sekitar Rp. 1.504,81 milyar, yang bersumber dari penerimaan Pajak Daerah kurang lebih Rp. 1.236,69 milyar, yang diestimasi naik sebesar Rp. 566,75 milyar dari APBD

Induk 2019 sebelum perubahan (lihat Tabel 4.10). Untuk mewujudkan kenaikan sebesar ini maka diperlukan adanya strategi-strategi dalam rangka peningkatan PAD di waktu yang akan datang. Disamping itu, sumber-sumber pendapatan lainnya juga perlu ditingkatkan, antara lain bagian laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Lain-Lain Pendapatan yang sah, Dana Perimbangan Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil bukan Pajak, sehingga dalam kurun waktu lima tahun mendatang, proporsi DAU dan Dana Otsus secara bertahap dapat mulai digantikan oleh sumber-sumber pendapatan yang dapat diupayakan oleh daerah berdasarkan penjabaran kondisi keuangan serta kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi perekonomian daerah.

Dana yang berasal dari DAU perlu dikelola dengan sebaik-baiknya, meskipun relatif sulit untuk memperkirakan jumlah realisasinya karena bergantung pada pemerintah pusat. Sumber dana yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) juga dapat diupayakan peningkatannya melalui penyusunan program-program unggulan yang dapat diajukan untuk dibiayai dengan DAK. Bagi hasil pajak provinsi dan pusat dapat diupayakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Pendapatan bagi hasil sangat terkait dengan aktivitas perekonomian daerah. Dengan demikian semakin meningkatnya aktivitas ekonomi akan berkorelasi dengan naiknya pendapatan yang berasal dari bagi hasil, oleh karena itu Pemerintah Daerah harus mendorong peningkatan aktivitas perekonomian.

Berdasarkan kebijakan perencanaan pendapatan daerah tersebut, dalam merealisasikan perkiraan rencana pendapatan daerah (target dan proyeksi), diperlukan strategi pencapaiannya sebagai berikut.

1. Strategi pencapaian target Pendapatan Asli Daerah, ditempuh melalui:
 - a. Penggalian dan peningkatan potensi sumber-sumber pendapatan (intensifikasi dan ekstensifikasi) terutama bagi sumber pendapatan pajak dan retribusi yang potensial;
 - b. Optimalisasi peran dan fungsi kelembagaan perangkat daerah penghasil;
 - c. Optimalisasi penggunaan teknologi dan sistem informasi untuk pengelolaan pendapatan daerah;

- d. Meningkatkan efisiensi, efektivitas serta kinerja BUMD dan perusahaan daerah guna peningkatan penerimaan bagi hasil (deviden);
- e. Meningkatkan pendayagunaan aset-aset daerah guna memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan daerah;
- f. Mendorong upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber penghasilan dana bagi hasil baik dari pajak maupun bukan pajak lainnya;
- g. Meningkatkan akurasi data dan sumber daya yang dijadikan instrumen dasar perhitungan dana perimbangan;
- h. Penataan kelembagaan, penyempurnaan dasar hukum pemungutan dan regulasi penyesuaian tarif pungutan serta penyederhanaan sistem prosedur pelayanan;
- i. Pelaksanaan pemungutan atas obyek pajak/retribusi baru dan pengembangan sistem operasi penagihan atas potensi pajak dan retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya;
- j. Peningkatan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran;
- k. Melaksanakan pelayanan dan pemberian kemudahan kepada masyarakat dalam membayar pajak;
- l. Penyebarluasan informasi di bidang pendapatan daerah dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat;
- m. Revitalisasi BUMD melalui berbagai upaya antar lain : pengelolaan BUMD secara profesional, peningkatan sarana, prasarana, kemudahan prosedur pelayanan terhadap konsumen/nasabah, serta mengoptimalkan peran Badan Pengawas, agar BUMD berjalan sesuai dengan peraturan sehingga mampu bersaing dan mendapat kepercayaan dari perbankan;
- n. Optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan aset yang diarahkan pada peningkatan pendapatan asli daerah;
- o. melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan pada tataran kebijakan, dengan POLRI dan kabupaten/kota termasuk dengan daerah perbatasan, dalam operasional pemungutan dan

pelayanan Pendapatan Daerah, serta mengembangkan sinergitas pelaksanaan tugas dengan OPD penghasil.

2. Strategi pencapaian target dana perimbangan, dilakukan melalui:
 - a. Sosialisasi secara terus menerus mengenai pungutan pajak penghasilan dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak;
 - b. Peningkatan akurasi data potensi baik potensi pajak maupun potensi sumber daya alam bekerjasama dengan Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Pajak sebagai dasar perhitungan Bagi Hasil;
 - c. Peningkatan keterlibatan pemerintah daerah dalam perhitungan lifting migas dan perhitungan sumber daya alam lainnya agar memperoleh proporsi pembagian yang sesuai dengan potensi;
 - d. Peningkatan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian teknis, Badan Anggaran DPR RI dan DPD RI untuk mengupayakan peningkatan besaran Dana Perimbangan (DAU, DAK dan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak).
3. Sedangkan Lain-lain Pendapatan yang sah, strategi yang ditempuh melalui :
 - a. Koordinasi dengan kementerian teknis dan lembaga non pemerintah, baik dalam maupun luar negeri;
 - b. Inisiasi dan pengenalan sumber pendapatan dari masyarakat.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan adanya pengalihan beberapa kewenangan kabupaten/kota menjadi kewenangan provinsi, dari provinsi ke kabupaten/kota, dari provinsi ke pusat, dan sebaliknya, menyebabkan terjadinya peningkatan yang cukup signifikan dalam komponen Pendapatan Asli Daerah dan dana perimbangan. Hal ini disebabkan adanya perubahan peralihan pada beberapa urusan pembangunan ke pemerintahan daerah.

Urusan yang mengalami perubahan antara lain Urusan Pendidikan terkait dengan Pengelolaan Pendidikan Menengah dan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah Dan Muatan Lokal Pendidikan Khusus sehingga Dana Alokasi Khusus (DAK)

mengalami kenaikan yang cukup signifikan dikarenakan pada DAK terdapat penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Tunjangan Profesi Guru, dana tersebut berasal dari pusat ditempatkan pada posting DAK non Fisik. Dari berbagai komponen pendapatan daerah, sumber utama penerimaan daerah adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), mengacu kepada peningkatan asumsi efektivitas KBM yang melakukan pembayaran PKB, sehingga diestimasi pada akhir tahun akan terealisasi cukup signifikan. Dengan tetap mengandalkan PKB sebagai sumber utama penerimaan daerah, maka setiap daerah harus segera melakukan upaya-upaya terobosan untuk mencari sumber-sumber alternatif pendapatan lainnya yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi sumber penerimaan daerah, sehingga mengurangi ketergantungan terhadap penerimaan dari pajak daerah yang bersifat terbatas (limitative).

Berdasarkan berbagai kondisi faktual perekonomian wilayah Papua dan dinamika urusan pembangunan, serta asumsi-asumsi di atas, maka target pendapatan daerah Provinsi Papua pada kurun waktu Tahun 2019, serta proyeksi pendapatan di Tahun 2020, disajikan pada Tabel 3.7 berikut ini

Tabel. 3.7.

Realisasi dan Proyeksi / Target Pendapatan Provinsi Papua Tahun 2017 s.d tahun 2021 (dalam Rp.)

No	URAIAN	JUMLAH				
		Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	Target Tahun 2019	Proyeksi Tahun 2020	Proyeksi/Target 2021
1	2	3	4	5	6	7
1.1	Pendapatan Asli Daerah	1,015,781,099,671	1,054,449,344,145	938,055,365,341	843,808,046,279	1,113,022,059,298
1.1.1	Pajak Daerah	756,688,629,518	802,674,672,858	669,939,278,125	575,691,959,063	880,000,000,000
1.1.2	Retribusi Daerah	77,988,433,617	59,316,519,857	41,604,581,700	41,604,581,700	55,022,059,298
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	720,598,381	11,911,412,021	53,580,182,602	53,580,182,602	28,000,000,000
1.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	180,383,438,155	180,546,739,409	172,931,322,914	172,931,322,914	150,000,000,000
1.2	Dana Perimbangan	3,780,551,017,562	4,414,240,479,168	4,407,385,762,146	3,940,829,022,046	4,959,000,000,000
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	413,012,330,146	924,041,168,288	648,886,536,000	443,984,334,000	882,000,000,000
1.2.2	Dana Alokasi Umum	2,338,200,799,000	2,571,298,119,000	2,616,545,381,000	2,354,890,842,900	2,977,000,000,000
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	1,029,337,888,416	918,901,191,880	1,141,953,845,146	1,141,953,845,146	1,100,000,000,000
1.3	Lain-lain Pendapatan daerah yang sah	8,210,480,547,693	8,021,444,565,000	8,632,676,695,000	8,632,676,695,000	9,771,000,000,000
1.3.1	Hibah	736,936,000	590,450,000			
1.3.2	Dana Darurat					
1.3.3	Bagi hasil pajak dari Provinsi dan dari Pemerintah daerah lainnya					
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	8,205,152,407,000	8,020,854,115,000	8,632,676,695,000	8,632,676,695,000	6,461,000,000,000
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi Pemerintah daerah lainnya**)					
1.3.6	Lain-lain pendapatan sesuai ketentuan yang berlaku	4,591,204,693				
1.3.7	Dana Tambahan Infrastruktur					3,310,000,000,000
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	13,006,812,664,927	13,490,134,388,313	13,978,117,822,487	13,417,313,763,325	15,843,022,059,298

Otonomi daerah dan desentralisasi berimplikasi pada semakin luasnya kewenangan daerah untuk mengatur dan mengelola pendapatan daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, maka secara bertahap daerah dituntut untuk mengupayakan kemandirian pendapatannya dengan mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan yang dimilikinya. Dalam konteks pengelolaan pendapatan daerah di Provinsi Papua, proporsi sumber pendapatan utama daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), masih diproyeksikan dengan proporsi rata-rata masih dibawah 10% dari total pendapatan daerah, maka perlu adanya strategi-strategi dalam rangka peningkatan PAD di waktu yang akan datang. Disamping itu, sumber-sumber pendapatan lainnya juga perlu ditingkatkan, antara lain bagian laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Lain-Lain Pendapatan yang sah, Dana Perimbangan Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil bukan Pajak, sehingga dalam kurun waktu lima tahun mendatang, proporsi DAU dan Dana Otsus secara bertahap dapat mulai digantikan oleh sumber-sumber pendapatan yang dapat diupayakan oleh daerah berdasarkan penjabaran kondisi keuangan serta kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi perekonomian daerah.

Dana yang berasal dari DAU perlu dikelola dengan sebaik-baiknya, meskipun relatif sulit untuk memperkirakan jumlah realisasinya karena bergantung pada pemerintah pusat. Sumber dana yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) juga dapat diupayakan peningkatannya melalui penyusunan program-program unggulan yang dapat diajukan untuk dibiayai dengan DAK. Bagi hasil pajak provinsi dan pusat dapat diupayakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Pendapatan bagi hasil sangat terkait dengan aktivitas perekonomian daerah. Dengan demikian semakin meningkatnya aktivitas ekonomi akan berkorelasi dengan naiknya pendapatan yang berasal dari bagi hasil, oleh karena itu Pemerintah Daerah harus mendorong peningkatan aktivitas perekonomian.

Berdasarkan kebijakan perencanaan pendapatan daerah tersebut, dalam merealisasikan perkiraan rencana pendapatan daerah (target dan proyeksi), diperlukan strategi pencapaiannya sebagai berikut.

1. Strategi pencapaian target Pendapatan Asli Daerah, ditempuh melalui:

- a. Penggalian dan peningkatan potensi sumber-sumber pendapatan (intensifikasi dan ekstensifikasi) terutama bagi sumber pendapatan pajak dan retribusi yang potensial;
- b. Optimalisasi peran dan fungsi kelembagaan perangkat daerah penghasil;
- c. Optimalisasi penggunaan teknologi dan sistem informasi untuk pengelolaan pendapatan daerah;
- d. Meningkatkan efisiensi, efektivitas serta kinerja BUMD dan perusahaan daerah guna peningkatan penerimaan bagi hasil (deviden);
- e. Meningkatkan pendayagunaan aset-aset daerah guna memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan daerah;
- f. Mendorong upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber penghasilan dana bagi hasil baik dari pajak maupun bukan pajak lainnya;
- g. Meningkatkan akurasi data dan sumber daya yang dijadikan instrumen dasar perhitungan dana perimbangan;
- h. Penataan kelembagaan, penyempurnaan dasar hukum pemungutan dan regulasi penyesuaian tarif pungutan serta penyederhanaan sistem prosedur pelayanan;
- i. Pelaksanaan pemungutan atas obyek pajak/retribusi baru dan pengembangan sistem operasi penagihan atas potensi pajak dan retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya;
- j. Peningkatan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran;
- k. Melaksanakan pelayanan dan pemberian kemudahan kepada masyarakat dalam membayar pajak.
- l. Penyebarluasan informasi di bidang pendapatan daerah dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat;
- m. Revitalisasi BUMD melalui berbagai upaya antar lain : pengelolaan BUMD secara profesional, peningkatan sarana, prasarana, kemudahan prosedur pelayanan terhadap konsumen/nasabah, serta mengoptimalkan peran Badan

- Pengawas, agar BUMD berjalan sesuai dengan peraturan sehingga mampu bersaing dan mendapat kepercayaan dari perbankan;
- n. Optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan aset yang diarahkan pada peningkatan pendapatan asli daerah;
 - o. melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan pada tataran kebijakan, dengan POLRI dan kabupaten/kota termasuk dengan daerah perbatasan, dalam operasional pemungutan dan pelayanan Pendapatan Daerah, serta mengembangkan sinergitas pelaksanaan tugas dengan OPD penghasil.
2. Strategi pencapaian target dana perimbangan, dilakukan melalui:
- a. Sosialisasi secara terus menerus mengenai pungutan pajak penghasilan dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak;
 - b. Peningkatan akurasi data potensi baik potensi pajak maupun potensi sumber daya alam bekerjasama dengan Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Pajak sebagai dasar perhitungan Bagi Hasil.
 - c. Peningkatan keterlibatan pemerintah daerah dalam perhitungan lifting migas dan perhitungan sumber daya alam lainnya agar memperoleh proporsi pembagian yang sesuai dengan potensi;
 - d. Peningkatan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian teknis, Badan Anggaran DPR RI dan DPD RI untuk mengupayakan peningkatan besaran Dana Perimbangan (DAU, DAK dan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak).
3. Sedangkan Lain-lain Pendapatan yang sah, strategi yang ditempuh melalui :
- a. Koordinasi dengan kementerian teknis dan lembaga non pemerintah, baik dalam maupun luar negeri.
 - b. Inisiasi dan pengenalan sumber pendapatan dari masyarakat.

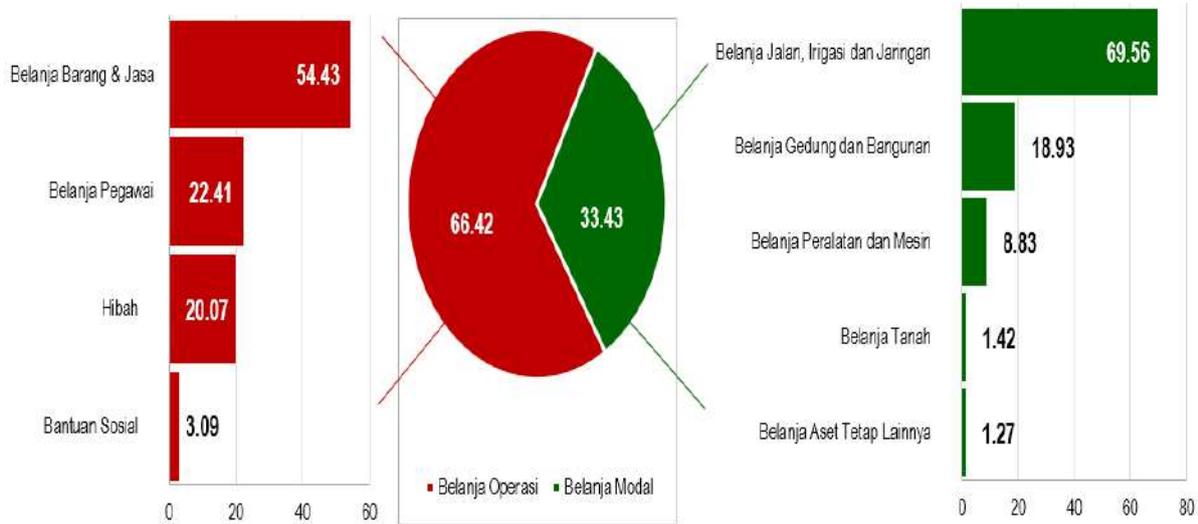
3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

3.2.2.1. Kebijakan Belanja Daerah Yang Bersumber Pada Dana PAD dan Transfer

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sedangkan menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, belanja daerah dikelompokkan menjadi Belanja Tidak Langsung (BTL) dan Belanja Langsung (BL). BTL yaitu belanja yang tidak memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi belanja pegawai, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Sedangkan BL merupakan belanja yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan program dan kegiatan yang meliputi: belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

Sebagaimana yang disajikan pada Gambar 3.9 struktur belanja daerah di Provinsi Papua masih dominan pada belanja operasi, kurang lebih proporsinya 66,42% dari total belanja. Sementara proporsi belanja modal sebesar 33,43%, dan hanya 0,14% untuk belanja tak terduga. Porsi belanja terbesar pada belanja operasi adalah untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan barang dan jasa yaitu sekitar 54,43% per tahun.

Gambar 3.9
Struktur Belanja Daerah Provinsi Papua
Rata-Rata Selama Tahun 2013-2017
(dalam %)



Sumber : Bappeda Papua, LKPJ Tahun 2013-2017 (data diolah)

Keterangan :

- * Porsi belanja operasi dan modal dirasiokan dengan total belanja daerah
- ** Struktur belanja operasi dirasiokan dengan total belanja operasi
- *** Struktur belanja modal dirasiokan dengan total belanja modal

Pada Tahun 2017 pemerintah telah merubah prinsip pengelolaan belanja daerah dari money follow function diubah menjadi money follow programme, artinya program dan kegiatan strategis yang memang menjadi prioritaslah yang mendapatkan anggaran. Hal ini juga yang menjadi pedoman untuk pelaksanaan tahun 2020-2021.

Kecenderungan semakin meningkatnya kebutuhan belanja, tidak berbanding lurus dengan peningkatan pendapatan daerah walaupun pendapatan daerah Provinsi Papua dari tahun ke tahun mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Seperti yang tergambarkan dalam perkembangan APBD Induk periode 2016-2018 (Lihat Tabel 3.14) tingkat pertumbuhan belanja daerah Pemerintah Provinsi Papua bisa mencapai 5,19% per tahun, yang lebih banyak dipacu oleh kenaikan Belanja Tidak Langsung sebesar 11,12% per tahun. Dimana tercatat disini Belanja Hibah dan Bantuan Sosial keduanya memiliki pertumbuhan paling tinggi diantara semua komponen belanja daerah, masing-masing sebesar 55,58% per tahun dan 25,29% per tahun untuk periode 2016-2018.

Sementara pada Belanja Langsung cenderung mengalami penurunan rata-rata per tahun sekitar -1.44% per tahun. Penurunan ini terjadi pada semua komponen belanja langsung selama tahun 2016-2018 yakni belanja pegawai mengalami penurunan rata-rata sebesar -9,02% per tahun, belanja barang dan jasa sebesar -0,56% per tahun, serta belanja modal sebesar -1,38% per tahun.

Tabel. 3.8.

**Ringkasan Belanja Daerah Dan Perubahannya Pada APBD Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2016-2018
(dalam milyar rupiah)**

No	URAIAN	TA 2016				TA 2017				TA 2018			
		APBD-Induk 2016	APBD-Perubahan 2016	(+) Bertambah / (-) Berkurang	Persentase Perubahan	APBD-Induk 2017	APBD-Perubahan 2017	(+) Bertambah / (-) Berkurang	Persentase Perubahan	APBD-Induk 2018	APBD-Perubahan 2018	(+) Bertambah / (-) Berkurang	Persentase Perubahan
2	BELANJA	12.908,14	13.601,16	693,02	5,37	15.083,88	15.654,66	570,79	3,78	14.091,77	14.832,72	740,95	5,26
2.1	Belanja Tidak Langsung	7.223,49	7.563,70	340,20	4,71	8.072,07	8.102,81	30,74	0,38	8.919,64	9.283,54	363,90	4,08
2.1.1	Belanja Pegawai	1.097,03	1.082,74	-14,29	-1,30	1.358,39	1.319,85	-38,54	-2,84	1.509,66	1.378,41	-131,25	-8,69
2.1.3	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00		40,00	40,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.1.4	Belanja Hibah	994,14	1.167,66	173,53	17,45	1.089,14	1.038,39	-50,76	-4,66	2.195,80	2.436,27	240,47	10,95
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	188,95	153,75	-35,20	-18,63	91,51	101,03	9,52	10,40	184,98	167,37	-17,61	-9,52
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kpd Kab/Kota	367,47	362,83	-4,64	-1,26	383,67	390,16	6,50	1,69	387,43	398,27	10,84	2,80
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	4.555,91	4.791,21	235,29	5,16	5.094,36	5.203,38	109,03	2,14	4.627,78	4.896,80	269,02	5,81
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	20,00	5,52	-14,48	-72,42	15,00	10,00	-5,00	-33,33	14,00	6,43	-7,57	-54,09
2.2	Belanja Langsung	5.684,65	6.037,47	352,82	6,21	7.011,81	7.551,85	540,04	7,70	5.172,13	5.549,18	377,05	7,29
2.2.1	Belanja Pegawai	266,51	260,97	-5,54	-2,08	278,96	274,07	-4,90	-1,76	215,63	210,49	-5,14	-2,38
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.667,33	2.838,48	171,14	6,42	3.202,63	3.821,94	619,31	19,34	2.524,18	2.749,21	225,03	8,92
2.2.3	Belanja Modal	2.750,81	2.938,03	187,22	6,81	3.530,22	3.455,85	-74,37	-2,11	2.432,32	2.589,48	157,15	6,46

Sumber : BPKAD Provinsi Papua, 2019 (data diolah)

Kondisi yang berbeda jika diperhatikan dari anggaran perubahan selama periode 2016-2018, cenderung seluruh komponen belanja daerah Provinsi Papua selalu mengalami peningkatan, terutama untuk Belanja Langsung. Terlihat tambahan belanja langsung pada anggaran perubahan rata-rata mencapai Rp. 423,31 milyar atau naik 7,07% per tahun jika dibandingkan dengan APBD Induk masing-masing tahun bersangkutan. Tambahan terbesar terlihat pada belanja barang dan jasa, dengan rata-rata sekitar Rp. 338,50 milyar atau naik sebesar 11,56% per tahun. Sedangkan untuk Belanja Tidak Langsung cenderung ditargetkan perubahannya kurang begitu banyak yakni hanya Rp. 244,95 milyar per tahun atau bertambah 3,06% per tahun sepanjang periode 2016-2018.

Berdasarkan fakta kecenderungan daya serap belanja selama ini, serta pertumbuhan belanja daerah dari tahun ke tahun relatif meningkat, selanjutnya pada tahun 2018 diperkirakan belanja tidak langsung mengalami kenaikan dikarenakan pada tahun tersebut ada kenaikan pada Belanja Pegawai sebagai konsekuensi dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu beralihnya gaji dan tunjangan tenaga kependidikan SMA/SMK seiring dengan beralihnya pengelolaan sekolah menengah dari urusan Kabupaten/Kota menjadi urusan Provinsi, sehingga besaran belanja pegawai mengalami kenaikan yang cukup signifikan, maka dari hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah, serta realisasi dan proyeksi pendapatan daerah tahun kedepan, arah kebijakan belanja daerah pada Tahun 2021 disajikan dalam Tabel 3.9 di bawah ini.

Tabel. 3.9.

Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun 2017 s.d tahun 2021 (dalam Rp.)

No	Uraian	Jumlah				
		Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	Target Tahun 2019	Proyeksi Tahun 2020	Proyeksi/Target 2021
1	2	3	4	5	6	7
2.1	Belanja Tidak Langsung					
2.1.1	Belanja Pegawai	1,110,723,063,509	158,040,619,633	2,728,997,543,848	2,865,447,421,040	3,008,719,792,092
2.1.2	Belanja Bunga					
2.1.3	Belanja Subsidi					

2.1.4	Belanja Hibah	1,025,283,304,735	-	1,212,829,878,600	1,273,471,372,530	1,337,144,941,157
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	96,897,363,512	-	65,380,508,471	100,000,000,000	100,000,000,000
2.1.6	Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa*	310,130,859,569	-	459,263,805,847	482,226,996,139	506,338,345,946
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa*	5,071,445,774,171	-	2,142,902,959,600	2,848,513,217,447	2,937,773,405,214
2.1.8	Belanja Tidak Terduga			25,000,000,000	25,000,000,000	25,000,000,000
B	JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG	7,614,480,365,496	158,040,619,633	6,634,374,696,366	7,594,659,007,156	7,914,976,484,409
2.2	Belanja Langsung					
2.2.1	Belanja Pegawai	248,630,252,397	33,068,947,500	280,798,315,300	294,000,000,000	308,700,000,000
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3,112,158,950,882	594,647,187,430	4,018,589,277,765	4,219,518,741,653	4,430,494,678,736
2.2.3	Belanja Modal	2,328,012,674,526	82,168,746,419	2,955,873,828,710	3,103,667,520,146	3,258,850,896,153
C	JUMLAH BELANJA LANGSUNG	5,688,801,877,805	709,884,881,349	7,255,261,421,775	7,617,186,261,799	7,998,045,574,889
D	TOTAL JUMLAH BELANJA	13,303,282,243,301	867,925,500,982	13,889,636,118,141	15,211,845,268,955	15,913,022,059,298

Penyusunan anggaran belanja tahun 2020 berpedoman pada Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, yang didasarkan pada beberapa hal yaitu : (1) Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kebijakan Pemerintah; (2) Prinsip penyusunan APBD; (3) Kebijakan penyusunan APBD; (4) Teknis penyusunan APBD; dan (5) Hal khusus lainnya.

RKP Tahun 2021 dimaksudkan sebagai pedoman bagi Kementerian/Lembaga dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021 dan menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021. RKPD digunakan sebagai pedoman dalam proses penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021. Berkaitan dengan itu, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota harus mendukung tercapainya 5 (lima) prioritas

pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing daerah, mengingat keberhasilan pencapaian prioritas pembangunan nasional

dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah dan pemerintah provinsi yang dituangkan dalam RKPD. 5 (lima) prioritas pembangunan nasional Tahun 2021 dimaksud, meliputi:

1. Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan;
2. Infrastruktur dan pemerataan wilayah;
3. Nilai tambah sektor riil, industrialisasi dan kesempatan kerja;
4. Ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup; dan
5. Stabilitas Pertahanan dan Keamanan.

Untuk itu, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam menyusun RKPD Tahun 2021 mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 mengenai Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021. Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dan pemerintah lebih lanjut dituangkan dalam rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021. KUA dan PPAS pemerintah provinsi Tahun 2020 berpedoman pada RKPD Tahun 2021 masing-masing provinsi yang telah disinkronisasikan dengan RKP Tahun 2020, sedangkan KUA dan PPAS pemerintah kabupaten/kota berpedoman pada RKPD Tahun 2021 masing-masing kabupaten/kota yang telah disinkronisasikan dengan RKP Tahun 2021 dan RKPD provinsi Tahun 2021.

Adapun untuk penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021 didasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah;
2. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

3. Berpedoman pada RKPD, KUA dan PPAS;
4. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
5. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan
6. Mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD;
7. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat; dan
8. Tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Penyusunan RKPD Tahun 2021 dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial, serta kebijakan anggaran belanja berdasarkan money follows program dengan cara memastikan hanya program yang benar-benar bermanfaat yang dialokasikan dan bukan sekedar karena tugas fungsi perangkat daerah yang bersangkutan. Hal ini mengisyaratkan bahwa pencapaian prioritas pembangunan daerah memerlukan adanya koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian prioritas daerah/program prioritas/kegiatan prioritas yang dilaksanakan dengan berbasis kewilayahan. Oleh karena itu arah kebijakan belanja daerah untuk Tahun 2021 yang mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJMD, program prioritas nasional dalam RKP, dan program strategis nasional yang ditetapkan untuk Provinsi Papua, dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Prioritas pembangunan, program prioritas dan kegiatan prioritas dengan pembagian, urusan pembangunan, Sustainable Development Goals (SDGs), penurunan kemiskinan dan ketimpangan;
2. Dukungan terhadap RPJMN 2020–2024, RKP 2020 dan RKP 2021;
3. Penggunaan dana fungsi pendidikan sebesar 20% dari total belanja;
4. Penggunaan dana fungsi kesehatan sebesar 10%;
5. Bantuan keuangan kabupaten/kota, bantuan pada pemerintahan kampung, hibah, Bansos dan subsidi;

6. Penggunaan Dana DAK, Dana Bagi Hasil, Dana Penyesuaian/BOS, dan Dana Otonomi Khusus;
7. Dukungan untuk optimalisasi penggunaan aset milik daerah;
8. Dukungan penyelenggaraan PON XX Tahun 2020;
9. Pembinaan bagi atlet berprestasi;
10. Dukungan terhadap DPRP dan MRP;
11. Pembangunan dan pengembangan pusat pelayanan publik dan sosial.
12. Penganggaran belanja kegiatan yang proporsional, rasional, efektif dan efisien berbasis program prioritas dalam rangka memenuhi janji politik dan program prioritas kepala daerah;
13. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan di jabarkan secara lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
14. Pemenuhan belanja untuk program dan kegiatan prioritas perangkat daerah dalam rangka pemenuhan target kinerja dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah;
15. Efisiensi Pemenuhan alokasi anggaran untuk pelayanan dan operasional perangkat daerah.

3.2.2.2. Kebijakan Belanja Daerah Yang Bersumber Pada Dana Otonomi Khusus

Terkait dengan pengelolaan Dana Otonomi Khusus, disebutkan dalam Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Pembagian Penerimaan Dan Pengelolaan Keuangan Dana Otonomi Khusus, pada Pasal 5 bahwa Sumber Penerimaan Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua adalah : (a) dana dalam rangka Otonomi Khusus setara 2% (dua perseratus) dana alokasi umum nasional, dan (b) dana tambahan infrastruktur.

Belanja yang bersumber dari dana Otonomi Khusus menurut Perdasus Nomor 13 Tahun 2016 di atas akan dikelola dengan melibatkan pemerintah kabupaten/kota,

melalui pembagian 20% untuk pemerintah provinsi, dan 80% untuk pemerintah kabupaten/kota, setelah dari total penerimaan dana Otonomi Khusus dikeluarkan untuk pembiayaan program strategis lintas kabupaten/kota. Sebagaimana yang telah diarahkan dalam Pasal 7 ayat 2 bahwa pembagian penerimaan dana otonomi khusus antara pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi di atur dengan terlebih dahulu dikurangi kebutuhan dana untuk program strategis lintas Kabupaten/Kota.

Selama tahun 2013-2016, program strategis lintas kabupaten/kota yang diamanatkan oleh Perdasus Nomor 13 Tahun 2016 tersebut telah diterjemahkan kedalam program-program strategis Otonomi Khusus yang lazim dikatakan Urusan Bersama (Program Strategis Lintas Kabupaten/Kota) yang mencakup kebijakan-kebijakan afirmatif yang strategis bagi Orang Asli Papua yaitu Prospek, KPS (Kartu Papua Sehat), Gerbangmas Hasrat Papua, Perumahan Rakyat dan Pendidikan. Serta Bangun Generasi Keluarga Papua (Bangga Papua) yang dimulai pada tahun 2018. Oleh karena itu berdasarkan realisasi penerimaan dana otsus tahun 2018, dan target di tahun 2019, serta merujuk kepada pembagian dana Otonomi Khusus untuk kabupaten/kota yang telah dilakukan selama ini, maka alokasi belanja yang bersumber dari dana Otonomi Khusus untuk tahun 2020 selengkapnya dijabarkan sebagai berikut.

Tabel. 3.10.

Target Dan Proyeksi Belanja Daerah Yang Bersumber Dari Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Tahun 2020 dan 2021 (dalam Rp.)

Uraian	Target 2020	Proyeksi 2021
Total Dana Otsus	5.808.230.158.000	6.054.499.117.000
Urusan Bersama	3.861.473.585.000	4.067.291.115.400
a. Beasiswa Siswa Unggulan Papua	733.679.981.150	735.724.430.000
b. Peningkatan Kesehatan Masyarakat	501.991.566.050	514.362.215.000
c. Ekonomi	77.229.471.700	78.969.381.000
d. Perumahan dan Fasilitas Umum	115.844.207.550	121.454.072.000
e. Perlindungan Sosial (Bangga Papua)	270.303.150.950	284.908.143.000
f. Keagamaan	77.229.471.700	77.229.471.700
g. Pengalihan Kewenangan (SMU/SMK dan Kehutanan)	772.294.717.000	780.163.411.000
h. PON XX (Pendidikan, Olahraga)	1.062.901.018.900	1.224.479.991.700

Uraian	Target 2020	Proyeksi 2021
i. MRP	250.000.000.000	250.000.000.000
C. Bagian Yang Di Bagi (A - B)	1.946.756.573.000	1.987.208.001.600
1. Provinsi Sebesar 20%	389.351.314.600	397.441.600.000
a. Pendidikan	116.805.394.380.00	119.232.480.000
b. Kesehatan	77.870.262.920.00	79.488.320.000
c. Ekonomi	58.402.697.190.00	59.616.240.000
d. Afirmasi	116.805.394.380.00	119.232.480.000
e. Pengawasan dan Pengendalian	19.467.565.730.00	19.872.080.000
2. Kabupaten/Kota Sebesar 80%	1.557.405.258.400	1.589.766.401.280

Sumber : data diolah (2019)

Menurut ketentuan Perdasus Nomor 13 Tahun 2016 bahwa pembiayaan program pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia yang bersumber pada Dana Otonomi Khusus dianggarkan sebagai belanja bantuan khusus pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia unggul Papua. Sedangkan pembiayaan program perumahan rakyat dianggarkan sebagai belanja bantuan khusus perumahan layak huni bagi orang asli Papua.

Pengelolaan belanja Dana Otsus yang merupakan pembagian 80% untuk pemerintah kabupaten/kota, dan 20% untuk pemerintah provinsi telah diarahkan alokasi belanjanya sebagai berikut :

- a. Pembiayaan pelayanan bidang pendidikan minimal 30% (tiga puluh perseratus) yang diarahkan untuk meningkatkan akses pendidikan bagi Orang Asli Papua, dengan penganggarannya untuk membiayai penuntasan buta aksara, pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar sembilan tahun, pendidikan menengah, pendidikan non formal, dan pendidikan tinggi;
- b. Pembiayaan pelayanan bidang kesehatan minimal 15% (lima belas perseratus) yang diarahkan untuk meningkatkan akses kesehatan bagi Orang Asli Papua, dengan penganggarannya dialokasikan untuk pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan rujukan, pencegahan dan pemberantasan penyakit, perbaikan gizi masyarakat, pembinaan kesehatan lingkungan dan sanitasi dasar, dan pelayanan kesehatan dalam situasi bencana;

- c. Pembiayaan pengembangan ekonomi kerakyatan minimal 25% (dua puluh lima perseratus) yang diarahkan untuk meningkatkan akses dan pemerataan ekonomi bagi Orang Asli Papua, dengan penganggarnya dialokasikan untuk pembentukan dan pembinaan peran dan fungsi lembaga profesi untuk pengembangan usaha kecil/mikro, perkreditan usaha ekonomi rakyat, subsidi harga kebutuhan bahan pokok, dan pengembangan komoditas unggulan;
- d. Pembiayaan pembangunan infrastruktur minimal 20% (dua puluh perseratus) yang dialokasikan untuk pembangunan prasarana perumahan rakyat, penerangan, air bersih dan telekomunikasi;
- e. Pembiayaan bantuan afirmasi kepada lembaga keagamaan, lembaga masyarakat adat asli, dan kelompok perempuan yang penganggarnya dialokasikan maksimal 6% (enam perseratus);
- f. Pembiayaan perencanaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan, dan pelaporan program dan kegiatan yang penganggarnya dialokasikan maksimal 2 % (dua perseratus); dan
- g. Pembiayaan program prioritas selain yang disebutkan di atas, dialokasikan maksimal 2% (dua perseratus).

Menurut Perdasus Nomor 13 Tahun 2016, bahwa pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana yang telah diarahkan di atas akan dikenakan sanksi administrasi berupa penundaan penyaluran atas Dana Otonomi Khusus bagian Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Dimana penundaan sebagaimana dimaksud dilakukan oleh Pemerintah Provinsi sampai Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersangkutan memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan.

Mengacu kepada target dan proyeksi pengelolaan belanja yang bersumber pada dana Otonomi Khusus di atas, serta kebutuhan belanja dalam rangka mengimplementasi amanat Perdasus Nomor 13 Tahun 2016, berikut ini disampaikan target dan proyeksi alokasi belanja dana Otonomi Khusus pada setiap pemerintah kabupaten/kota untuk tahun 2020 dan 2021 sebagai berikut.

Tabel. 3.11.

**Target Dan Proyeksi Alokasi Dana Otonomi Khusus Untuk Kabupaten/Kota Di
Provinsi Papua Tahun 2020 dan 2021
(dalam Rp.)**

Wilayah Adat Dan Kabupaten/Kota		Target 2020	Proyeksi 2021	Selisih
ANIMHA		232,103,024,357.08	236,925,866,000	4,822,841,642.92
1	Merauke	48,495,887,123.16	49,503,578,000	1,007,690,876.84
2	Mappi	61,685,777,431.10	62,967,539,000	1,281,761,568.90
3	Asmat	61,939,361,529.60	63,226,392,000	1,287,030,470.40
4	Boven Digoel	59,981,998,273.22	61,228,357,000	1,246,358,726.78
MAMTA		210,426,739,846.85	214,799,173,000	4,372,433,153.15
5	Kota Jayapura	31,867,021,099.00	32,529,182,000	662,160,901.00
6	Jayapura	46,073,463,891.39	47,030,819,000	957,355,108.61
7	Sarmi	44,404,979,591.99	45,327,666,000	922,686,408.01
8	Keerom	29,015,053,505.56	29,617,954,000	602,900,494.44
9	Mamberamo Raya	59,066,221,758.91	60,293,552,000	1,227,330,241.09
MEE PAGO		325,082,440,569.00	331,837,291,000	6,754,850,431.00
10	Nabire	45,756,973,242.93	46,707,752,000	950,778,757.07
11	Mimika	31,309,836,558.85	31,960,420,000	650,583,441.15
12	Paniai	64,189,783,336.76	65,523,575,000	1,333,791,663.24
13	Dogiyai	61,730,319,464.80	63,013,007,000	1,282,687,535.20
14	Intan Jaya	61,756,420,382.30	63,039,650,000	1,283,229,617.70
15	Deiyai	60,339,107,583.36	61,592,887,000	1,253,779,416.64
LA PAGO		624,311,440,273.37	637,283,935,000	12,972,494,726.63
16	Jayawijaya	51,356,987,511.63	52,424,128,000	1,067,140,488.37
17	Puncak Jaya	64,622,624,148.52	65,965,410,000	1,342,785,851.48
18	Puncak	64,316,106,423.53	65,652,523,000	1,336,416,576.47
19	Yahukimo	65,595,198,072.37	66,958,193,000	1,362,994,927.63
20	Peg. Bintang	62,592,857,239.28	63,893,467,000	1,300,609,760.72
21	Tolikara	64,759,842,666.91	66,105,480,000	1,345,637,333.09
22	Nduga	62,185,842,294.06	63,477,995,000	1,292,152,705.94
23	Lanny Jaya	65,793,806,208.36	67,160,928,000	1,367,121,791.64
24	Mamb. Tengah	61,543,588,793.15	62,822,396,000	1,278,807,206.85
25	Yalimo	61,544,586,915.56	62,823,415,000	1,278,828,084.44

Wilayah Adat Dan Kabupaten/Kota		Target 2020	Proyeksi 2021	Selisih
SAERERI		165,481,613,353.70	168,920,137,000	3,438,523,646.30
26	Biak Numfor	32,258,636,567.29	32,928,935,000	670,298,432.71
27	Supiori	43,402,635,532.33	44,304,494,000	901,858,467.67
28	Kepulauan Yapen	45,992,775,230.57	46,948,454,000	955,678,769.43
29	Waropen	43,827,566,023.51	44,738,254,000	910,687,976.49

Sumber : data diolah (2019)

3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA), transfer dari dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah. Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah timbul karena ada surplus/kelebihan anggaran. Pengeluaran pembiayaan daerah diantaranya diperuntukan bagi pembentukan dana cadangan, investasi (penyertaan modal dan pembelian surat berharga/saham), pembayaran pokok utang, pemberian pinjaman daerah, dan sisa lebih perhitungan.

Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah dalam RKPD Provinsi Papua Tahun 2019 belum merencanakan SiLPA. Kebijakan pembiayaan daerah Provinsi Papua diarahkan untuk menutup defisit dan mengalokasikan pada pos-pos pembiayaan. Dalam hal APBD mengalami defisit, maka kebijakan pembiayaan mengupayakan sumber pemasukan untuk menutup defisit tersebut (pembiayaan penerimaan). Apabila APBD mengalami selisih lebih, maka surplus tersebut akan dialokasikan dalam pembiayaan pengeluaran pada item-item pembiayaan yang diperkenankan oleh peraturan. Oleh karena itu, dengan menggunakan asumsi bahwa pada tahun 2018 belum memperkirakan SiLPA, serta dari analisis dan perkiraan sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah dan realisasi pengeluaran pembiayaan daerah dalam 4 (empat) tahun terakhir, maka proyeksi tahun rencana

dalam rangka perumusan arah kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah adalah sebagai berikut.

Tabel. 3.12.

**Target Dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Provinsi Papua Tahun 2020 dan 2021
(dalam Rp.)**

NO	Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Jumlah				
		Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	Target Tahun 2019	Proyeksi Tahun 2020	Proyeksi/Target 2021
1	2	3	4	5	6	7
3.1	Penerimaan Pembiayaan					
3.1.1	Sisa Lebih perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SILPA)	1,009,244,331,459	-	-	120,000,000,000	120,000,000,000
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-	-
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-	-	-	-
3.1.6	Penerimaan Piutang daerah	-	-	-	-	-
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN		1,009,244,331,459	-	-	120,000,000,000	120,000,000,000
3.2	Pengeluaran Pembiayaan					
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	65,462,264,136	-	-	-	-
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi Daerah)	75,000,000,000	50,500,000,000	50,000,000,000	50,000,000,000	50,000,000,000
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	-	-
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN		140,462,264,136	50,500,000,000	50,000,000,000	50,000,000,000	50,000,000,000
JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO		868,782,067,323	50,500,000,000	50,000,000,000	70,000,000,000	70,000,000,000

Sumber : data diolah (2019)

Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan rangkaian siklus Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang pelaksanaannya dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pemeriksaan sampai kepada pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberlakuan anggaran kinerja memungkinkan adanya surplus atau defisit pada penyusunan APBD. Untuk menutup defisit dan surplus diperlukan pembiayaan daerah. Jika pembiayaan diperlukan untuk menutup

defisit anggaran berjalan, arah pengelolaan pembiayaan harus berdasarkan prinsip kemampuan dan kesinambungan fiskal daerah. Pembiayaan defisit anggaran antara lain bersumber dari pinjaman daerah, sisa lebih perhitungan anggaran, dana cadangan dan penjualan aset. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hadiah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri, Pemerintah daerah berhak melakukan pinjaman daerah dengan ketentuan besaran pinjaman daerah tidak melebihi kemampuan daerah dalam mengembalikan pinjaman. Kewenangan yang diberikan kepada daerah untuk mengatur pembiayaan seperti mengatur defisit anggaran dan pinjaman daerah (sub national deficit, borrowing and debt) dan mengatur surplus anggaran dan penyertaan modal (investment).

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Penyusunan Prioritas dan Sasaran pembangunan daerah pada RKPD tahun 2021 dirumuskan dalam rangka untuk mencapai target Visi dan Misi sebagaimana yang dituangkan dalam RPJMD Provinsi Papua Tahun 2019-2023. Prioritas pembangunan daerah yang telah tersusun akan menjadi acuan dan pedoman bagi seluruh OPD/SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua dalam menjabarkan program dan kegiatan tahun 2021. Selain itu prioritas pembangunan daerah tersebut juga dimaksudkan untuk menjaga percepatan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional sebagaimana yang dimuat dalam RKP (Rencana Kerja Pemerintah) Tahun 2021.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan merupakan sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Sedangkan sasaran merupakan gambaran terhadap pencapaian tujuan. Rumusan terhadap tujuan dan sasaran diterjemahkan dari visi dan misi pembangunan daerah. Untuk memberi tuntunan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah, maka perlu diperhatikan visi pembangunan Provinsi Papua periode 2019 – 2023, adalah : **“PAPUA BANGKIT, MANDIRI DAN SEJAHTERA YANG BERKEADILAN”**.

Berkenaan dengan perwujudan visi pembangunan Provinsi Papua, elaborasi dari visi telah menghasilkan dan menetapkan 5 (lima) misi pembangunan Provinsi Papua periode 2019-2023, dengan penjelasan masing-masing sebagai berikut:

1. Memantapkan Kualitas dan Daya Saing SDM.

Memantapkan kualitas dan daya saing SDM Papua akan menjadi prioritas utama dalam pembangunan periode 2019-2023, yang berfokus pada bidang pendidikan, kesehatan, kependudukan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta pengembangan Ilmu pengetahuan dan Teknologi. SDM yang berdaya saing

juga akan tercapai jika SDM Papua terjaga pasokan pangannya terjamin dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi. Untuk itu kemandirian pangan dan gizi merupakan prioritas dalam pembangunan Papua.

2. Memantapkan Rasa Aman, Tenram dan Damai serta Kehidupan Demokrasi memperkuat Bingkai NKRI.

Terjaminnya ketentraman dan ketertiban akan menciptakan rasa aman bagi masyarakat Papua, merupakan jaminan bagi terlaksananya pembangunan. Oleh karena itu Pembangunan akan diarahkan untuk memperkuat kerukunan hidup umat beragama, menghargai nilai budaya masing-masing etnik sebagai suatu nilai keunggulan Provinsi Papua, penerapan dan penegakan hukum dan HAM yang dilaksanakan secara tegas dan profesional dengan tetap berdasarkan pada penghormatan HAM serta peningkatan perwujudan masyarakat yang mempunyai kesadaran hukum yang tinggi. Masyarakat yang demokratis merupakan landasan penting untuk tercapainya masyarakat yang mandiri. Untuk mewujudkan hal itu dilakukan dengan memperkuat kelembagaan sosial politik dan peran masyarakat, melaksanakan tata pemerintahan yang terdesentralisasi pada tingkat distrik dan kampung, meningkatkan partisipasi dan transparansi, mendorong peningkatan peran media massa dan pers dalam pembangunan.

3. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.

Peningkatan tata kelola pemerintahan merupakan salah satu faktor utama dalam meningkatnya daya saing suatu daerah. Wujud dari penguatan tata kelola adalah meningkatnya transparansi, partisipasi publik, dan akuntabilitas serta meningkatnya pelayanan kepada publik. Oleh karena itu langkah-langkah yang telah dilakukan akan dimantapkan dan diperkuat, demikian pula perubahan *mind-set*, *culture-set* dan pengembangan budaya kerja akan dilakukan secara lebih cepat dan terarah. Demikian juga upaya-upaya mencegah dan mempercepat pemberantas korupsi secara berkelanjutan, dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa (*good governance*), pemerintah

yang bersih (clean government) dan bebas KKN dilaksanakan secara sungguh-sungguh. Reformasi birokrasi ini juga akan memperkuat hubungan kelembagaan yang harmonis antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota dan kampung, untuk memastikan implementasi Otonomi Khusus Papua dengan baik, termasuk melalui pembiayaan bersama dan transfer anggaran yang mendukung pemerataan dan keadilan.

4. Penguatan dan Percepatan Perekonomian Daerah sesuai Potensi Unggulan Lokal dan Pengembangan Wilayah berbasis Kultural secara Berkelanjutan.

Penguatan dan percepatan perekonomian Provinsi Papua akan tetap melanjutkan pengembangan ekonomi daerah untuk memperkuat ekonomi daerah yang berbasis potensi masing-masing wilayah dan kampung. Dengan menitikberatkan pada hubungan antar wilayah/kampung didorong dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan antar wilayah/daerah yang kokoh serta berkesinambungan. Upaya-upaya tersebut dilakukan melalui pengembangan perwilayahan berdasarkan karakteristik/ kondisi wilayah dan potensi masing-masing wilayah serta peningkatan produktivitas sumber daya ekonomi secara berkelanjutan, meningkatkan mutu produk dan menciptakan nilai tambah. Pengembangan wilayah tetap dilakukan berbasis kultural yaitu wilayah ***La Pago, Mee Pago, Mamta, Saereni*** dan ***Animha***, yang akan difokuskan pada pembangunan berbasis kampung dengan prinsip kesetaraan pemenuhan kebutuhan hidup dan pencapaian kualitas hidup di seluruh wilayah Papua, sehingga mewujudkan pelayanan pemerintahan yang lebih mampu mendorong percepatan kemandirian masyarakat asli Papua.

5. Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Tertentu.

Pembangunan yang merata dan berkeadilan akan menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan Provinsi Papua tahun 2019-2023 mengingat

pelaksanaan pembangunan di masa lalu, belum mampu mewujudkan pemerataan dan keadilan yang menjadi harapan seluruh Masyarakat. Penyebabnya antara lain, proses pembangunan yang tidak adil sedemikian intensif pada masa lalu sehingga dampaknya tidak dapat diselesaikan atau diperbaiki dalam satu periode pelaksanaan pembangunan. Dalam lima tahun ke depan, penguatan pemerataan dan keadilan akan dilakukan untuk setiap kebijakan dan kegiatan. Langkah ini diharapkan dalam jangka pendek akan memberikan penghasilan tambahan bagi keluarga tersebut (memperbaiki distribusi pendapatan) dan dalam jangka panjang akan dihasilkan generasi baru yang lebih baik tingkat pendidikan dan kesehatannya. Pemerintah Daerah akan memperkuat pengawasan dan pengendalian dari semua program agar benar-benar menysasar orang Asli Papua khususnya yang berada di kampung-kampung. Selanjutnya pengurangan kemiskinan akan diprioritaskan bantuan langsung (cash transfer) kepada seluruh penduduk anak usia 4 tahun ke bawah dan usia 60 tahun keatas melalui Program Bangun Generasi dan Keluarga Papua Sejahtera (BANGGA PAPUA) dan perlindungan sosial melalui bantuan langsung dan program pembedayaan KAT dan bantuan sosial PMKS. Untuk memperkuat perekonomian di level wilayah akan menerapkan trilogi pengembangan ekonomi Papua, yaitu : 1) perubahan pola pikir masyarakat; 2) pengwilayahan komoditas unggulan daerah; 3) penerapan prinsip tanam, petik, olah dan jual.

4.2. Tema Pembangunan Provinsi Papua Tahun 2021

RKPD tahun 2021 merupakan tahapan ke tiga dari pelaksanaan RPJMD Provinsi Papua Tahun 2019-2023. Selain itu perumusannya harus memperhatikan kondisi yang sedang berlangsung (existing condition) dalam pembangunan yang tengah dilakukan. Terkait kondisi yang sedang berlangsung permasalahan yang sedang dihadapi adalah merebahnya wabah Covid-19 yang sampai hari ini belum bisa diatasi dengan maksimal. Perumusan tema pembangunan nasional pun mengalami pergeseran yang tadinya **"Meningkatkan Industri, Pariwisata Dan Investasi Di Berbagai Wilayah Didukung Oleh SDM, Infrastruktur Untuk Pertumbuhan**

Berkualitas”, menjadi **“Mempercepat Pemulihan Ketahanan Ekonomi dan Kehidupan Masyarakat dengan fokus: Pemulihan Industri, Pariwisata dan Investasi Penguatan Sistem Kesehatan Nasional”.** Rumusan tema RKPD Provinsi Papua Tahun 2021 pun juga mengalami penyesuaian, semula **“Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Untuk Mendukung Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perekonomian Daerah Yang Berkelanjutan”,** menjadi : **Pemulihan Kehidupan Masyarakat Melalui Peningkatan Kualitas Hidup, Dan Ekonomi Daerah Yang Inklusif Dan Berkelanjutan.** Rumusan tema tersebut, tetap memperhatikan fokus pembangunan tahun 2021 yang dirumuskan dalam RPJMD Tahun 2019-2023 yaitu: “Melanjutkan Peningkatan Kualitas SDM Dan Perekonomian Daerah Berbasis Wilayah Dan Berkelanjutan Disertai Pemantapan Rasa Aman Dan Tata Kelola”.

4.3. Prioritas Pembangunan Provinsi Papua Tahun 2021

Prioritas merupakan fokus penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RJPMD. Proses perumusannya memperhatikan Tema Pembangunan Provinsi Papua Tahun 2021, hasil evaluasi RKPD Tahun 2020 pada Bab II, Tema dan Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Nasional terhadap Provinsi Papua tahun 2021 yaitu “Optimisasi otonomi khusus dan pembangunan berbasis kearifan lokal. Strateginya yaitu Pengembangan sentra produksi pertanian, perkebunan, dan perikanan.

1. Pengembangan destinasi pariwisata alam dan budaya.
2. Pengembangan pusat-pusat pengembangan ekonomi lokal tama;
3. Pengembangan tol udara untuk memperkuat konektivitas wilayah.
4. Peningkatan kualitas SDM khususnya pendidikan vokasional pertanian, perkebunan, dan perikanan, serta pemerataan layanan kesehatan.
5. Optimalisasi pelaksanaan otonomi khusus: pemberdayaan masyarakat adat; percepatan pembangunan kawasan kampung; penguatan peran istri atau Kecamatan; penguatan kerjasama antar Kabupaten; dan pengembangan kawasan perbatasan secara terpadu

Selain itu pertimbangan berikutnya dari sasaran prioritas RPJPD Provinsi Papua. Dalam hal ini RKPD Provinsi Papua tahun 2021 memasuki fase transisi (peralihan) dari tahap ke III ketahap ke IV, berupa fase masyarakat Papua menuju tahap kemandirian. Elaborasi lainnya yang dijadikan diperhatikan pula adalah tujuan pembangunan berkelanjutan dan telaahan RTRW Provinsi Papua Tahun 2013-2033. Adapun tujuan pembangunan yang berkelanjutan yang beririsan dengan perumusan prioritas tahun 2021 yaitu :

- a. Menjaga dan memperbaiki transparansi, akuntabilitas, penegakan hukum dan koordinasi (tata kelola) Lingkungan hidup dan Sumberdaya Alam;
- b. Memastikan masyarakat Papua, khususnya OAP mendapatkan Pendidikan yang layak dan memadai, Kualitas Sanitasi dan Air Bersih yang layak, Asupan Gizi dan Kesehatan Lingkungan yang baik, Pemerataan Pembangunan dan Pembangunan Sumberdaya Manusia yang inklusif;
- c. Melakukan perencanaan dan menginternalisasi pembangunan ekonomi hijau dengan tetap menjaga dan melestarikan budaya masyarakat dan kearifan lokal dalam pembangunan dan tata guna lahan.

Sedangkan telaahan RTRW yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan, yakni :

1. Penetapan kawasan strategis provinsi;
2. Perencanaan tata ruang kawasan strategis provinsi;
3. Pemanfaatan ruang kawasan strategis provinsi;
4. Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis provinsi;
5. Pengaturan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan pemanfaatan ruang kawasan strategis provinsi dan kabupaten/kota;
6. Pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis provinsi.

Pedoman selanjutnya adalah memperhatikan isu strategis yang terdapat dalam RPJMD Provinsi Papua Tahun 2019-2023, yaitu

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Kesehatan dan Gizi), baik dari Status Golongan Pendapatan, Gender maupun Antar Wilayah

2. Pemantapan Rasa Aman dan Suasana Demokrasi yang Kondusif sebagai Landasan Utama Pembangunan
3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dalam Peningkatan Pelayanan Publik
4. Pertumbuhan Ekonomi yang Merata dan Berkelanjutan berbasis Komoditas dan Karakteristik Lokal didukung oleh Pembangunan Infrastruktur yang Memperhatikan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan.
5. Pengurangan Kesenjangan, Peningkatan Pemerataan Pembangunan dan Konektivitas antar Wilayah dan Kabupaten serta Peningkatan Kualitas Ekosistem dan Jasa Lingkungan

Dari parameter-parameter tersebut dengan mempertimbangkan hasil evaluasi RKPD Provinsi Papua tahun 2020, maka Prioritas pembangunan tahun 2021 Provinsi Papua yang dirumuskan dalam RKPD Tahun 2021 sebagai berikut :

- 1. Peningkatan Kualitas SDM dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar.**
- 2. Pemantapan Rasa Aman, Tenram dan Kedewasaan Berdemokrasi.**
- 3. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.**
- 4. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan.**

Dari 4 prioritas tersebut disesuaikan dengan kondisi yang tengah terjadi yakni diarahkan pada penanggulangan Covid-19 dilskuksn refokusing menjadi **Pemenuhan Kebutuhan Dasar Rakyat Dan Pembangunan Manusia, Pemulihan Ekonomi, Pemantapan Ketenteraman Dan Ketertiban Masyarakat Serta Tata Kelola Pemerintahan, Pengembangan Infrastruktur Dasar Melalui Pemantapan Konektifitas Antar Wilayah**

Prioritas dan refokusing prioritas pembangunan sebagaimana tersebut diatas akan menjadi petunjuk terhadap penentuan program prioritas dan kegiatan prioritas yang secara fungsional yang dirumuskan oleh Kabupaten/kota dan yang dikerjakan oleh Organisasi Perangkat Daerah di Provinsi Papua. Hal ini sejalan dengan pemikiran terhadap paradigma "**Money Follow Program Priority**" atau dalam terjemahan

“Uang Mengikuti Program Prioritas”. Perumusan program/kegiatan bagi Provinsi, Kab/Kota juga mempertimbangkan limitasi kewenangan dalam UU No 23 Tahun 2014. Pilihan penggunaan terhadap paradigma tersebut merubah paradigma sebelumnya yaitu ***“Money Follow Function”*** yang selama ini cenderung dilakukan oleh Kab/Kota atau SKPD/OPD Provinsi.

Dengan tersedianya prioritas pembangunan tahun 2021, akan memastikan bahwa ketersediaan anggaran terarahkan kepada pemenuhan pencapaian prioritas pembangunan sebagaimana yang telah ditetapkan untuk pelaksanaan pembangunan tahun 2021. Membutuhkan kemauan baik bersama dari Organisasi Perangkat Daerah untuk menyesuaikan keterhubungan antar dokumen pembangunan guna berkontribusi terhadap penentuan prioritas dan target daerah yang dikerjakan oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah.

Rumusan prioritas yang telah disusun diharapkan selaras pula dengan rumusan prioritas dengan RKP Nasional Tahun 2021, yang meletakkan isu Papua tidak lagi dirumuskan pada topik priritas tetapi dipetakan menurut kegiatan dalam RPJMN tahun 2020-2023, yaitu: **Major project pengembangan wilayah adat La Pago dan major project Pengembangan Kawasan Perbatasan PKSN Merauke, Pengembangan Kawasan Perbatasan (PKSN) Jayapura, diturunkan dalam Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) Biak di wilayah Saireri, SKPT Sarmi dan Kawasan Pedesaan Prioritas Nasional (KPPN) Arso di wilayah adat Mamta dan SKPT Timika di Meepago, serta KPPN Merauke di wilayah adat Ha Anim, pengembangan jalan trans (perbatasan) dan jembatan udara Papua (Wamena, Dekai, Oksibil, Elelim, Ilaga, Moses Kilangin, Pengembangan Program TOL bersubsidi (Mappi, Serui, Meruuke), pembangunan trans/lingkar Biak, pembangunan bandar udara dan PLTU Nabire, Pengendali Banjir dan IPLT Jayapura dan Merauke, Pembangunan 10 juta sambungan listrik rumah, Perluasan distribusi air bersih dan akses sanitasi, penyelesaian program 35.000 MV, penuntasan infrastruktur TIK /BTS, pengembangan 2 waduk multiguna.**

Tabel. 4.1
Keselarasan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi : Papua Bangkit, Mandiri Dan Sejahtera Yang Berkeadilan		
Misi	Tujuan	Sasaran
1. Memantapkan Kualitas dan Daya Saing SDM	Meningkatkan Kualitas SDM yang berdaya saing	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya Aksesibilitas, Mutu dan Tata Kelola Penyelenggaraan Pendidikan 2. Meningkatkan Budaya Baca pada Masyarakat 3. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 4. Sukses penyelenggaraan PON dan prestasi olahraga 5. Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah 6. Meningkatkan ketersediaan pangan yang berkelanjutan 7. Terwujudnya internalisasi nilai adat dan budaya asli Tanah Papua dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat
2. Memantapkan Rasa Aman, Tenang dan Damai serta Kehidupan Demokrasi memperkuat Bingkai NKRI	Meningkatkan keamanan, ketentraman dan ketertiban yang berbasis pada kohesivitas sosial dan harmonisasi keberagaman potensi kehidupan masyarakat Papua	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya suasana tertib, aman dan kepastian hukum 2. Meningkatnya Keharmonisan dan kohesivitas masyarakat 3. Meningkatnya penegakan HAM 4. Meningkatnya Kebebasan Sipil, Hak-Hak Politik dan Lembaga Demokrasi
3. Penguatan Tata Kelola	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kinerja Penyelenggaraan Otonomi Khusus Papua

Pemerintahan	yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	<ol style="list-style-type: none"> 2. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik 3. Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, dan pengendalian program, serta kegiatan pembangunan daerah 4. Meningkatnya sistem akuntabilitas dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah
4. Penguatan dan Percepatan Perekonomian Daerah sesuai Potensi Unggulan Lokal dan Pengembangan Wilayah berbasis Kultural dan Berkelanjutan	Pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pendayagunaan potensi sumber daya alam untuk penciptaan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas 2. Mengoptimalkan peranan sektor pertambangan dalam mengatasi ketimpangan pendapatan 3. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan aksi mitigasi perubahan iklim 4. Meningkatnya pengelolaan sumber daya kehutanan secara berkelanjutan 5. Membangun struktur perekonomian yang kokoh berbasis pada penciptaan nilai tambah yang optimal dan berkelanjutan 6. Meningkatnya pembangunan ekonomi maritim dan kelautan yang berbasis pada pendayagunaan potensi sumber daya secara berkelanjutan 7. Meningkatnya daya saing tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja 8. Meningkatnya daya saing dan realisasi investasi pada sektor-sektor andalan daerah

	<p>Mewujudkan Percepatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Infrastruktur Daerah Guna Menopang Pengembangan Wilayah Serta Akses Pada Layanan Dasar Dan Pasar,</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan akses transportasi berbasis antar moda dalam mendukung pengembangan ekonomi wilayah/daerah dan akses bagi seluruh wilayah 2. Implementasi Rencana Tata Ruang secara konsisten 3. Meningkatnya Ketersediaan sistem pengairan yang mendukung produktivitas wilayah 4. Meningkatnya Pemenuhan perumahan layak huni dan penataan pemukiman 5. Meningkatnya ketersediaan energi murah dan energi baru terbarukan 6. Meningkatnya jangkauan pelayanan sistem komunikasi dan Informasi antar wilayah
<p>5. Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Tertentu</p>	<p>Meningkatkan pemerataan pembangunan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kualitas pembangunan berbasis kampung 2. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar bagi OAP 3. Meningkatnya percepatan pembangunan wilayah perbatasan 4. Meningkatnya pemberdayaan terhadap KAT dan bantuan sosial PMKS 5. Meningkatnya kapasitas ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana melalui upaya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana 6. Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan daerah dan Upaya Perlindungan anak

4.4. Arah Pengembangan Wilayah

Dalam rangka mewujudkan Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera Berkadilán maka pelaksanaan pembangunan akan dilakukan secara simultan dengan tahapan-tahapan yang jelas dan sistematis, memperhatikan kebutuhan masyarakat dan kebutuhan pembangunan wilayah, memperhatikan dan menghormati nilai-nilai serta hak-hak adat masyarakat asli Papua. Arah kebijakan spasial akan berintegrasi dengan kebijakan sektoral untuk mewujudkan harmonisasi pembangunan wilayah yang dilaksanakan secara sektoral oleh SKPD maupun pelaku pembangunan lainnya. Dan sebagai landasannya, berikut ini disampaikan kerangka pengembangan kewilayahan Papua.

Gambar 4.1
Kebijakan Umum Pengembangan Wilayah Papua



Sumber : RPMJD Provinsi Papua tahun 2019-2023

Penjelasan masing-masing kerangka pengembangan kewilayahan di atas dapat diurai sebagai berikut :

a. Penguatan Pusat Pertumbuhan

- Peningkatan skill OAP untuk mengisi sektor unggulan di pusat pertumbuhan;

- Keterkaitan antar kegiatan sektor ekonomi secara berkeadilan & berkelanjutan;
 - Pengembangan industri pengolah produk pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan;
 - Penguatan pusat pertumbuhan tersebar setara.
- b. Peningkatan Kesejahteraan di Kawasan Perbatasan
- Pengintegrasian PLBN, PKSN, dengan lokasi prioritas
 - Penguatan kegiatan ekonomi lokal berbasis komoditas unggulan di kawasan PKSN Penguatan distrik sebagai ujung tombak koordinasi pembangunan di lokasi prioritas
 - Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan infrastruktur PLBN, PKSN, dan lokasi prioritas, Pelintas batas tradisional
- c. Percepatan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan Berbasis Sumber Daya Lokal Melalui Peningkatan Kemandirian kampung/ perkampungan. Budidaya dan nilai tambah lahan komunal untuk kegiatan ekonomi berkelanjutan berbasis sumber daya lokal
- Teknologi dan organisasi produksi pertanian berbasis sumber daya lokal
 - Pengolahan hasil produksi pertanian agar bernilai tambah lebih tinggi
 - Peningkatan akses produk lokal terhadap lokal, regional, dan nasional
 - Keterampilan masyarakat lokal dalam kerjasama pemanfaatan lahan komunal dengan pihak luar secara berkelanjutan . Efisiensi Perdagangan lokal
- d. Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Dasar, Pendidikan, dan Kesehatan
- Pemerataan fasilitas pendidikan dan kesehatan terutama untuk daerah pinggiran
 - Pemerataan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan di daerah pinggiran dengan insentif dan disinsentif untuk memastikan mereka dapat bekerja di wilayah tersebut
 - Memastikan keberadaan sekolah kecil di kampung dan sekolah berasrama untuk memastikan siswa dapat mengakses
 - Pengembangan kurikulum lokal berbasis budaya dan kearifan masyarakat

- Pemanfaatan keanekaragaman hayati untuk pengembangan obat-obatan tradisional
- e. Pengurangan Ketimpangan Antar Wilayah
- Pemerataan kesempatan ekonomi
 - Pemerataan infrastruktur dasar
 - Konsistensi penerapan penataan ruang
- f. Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah Melalui Pembangunan Infrastruktur yang memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan
- Menghubungkan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah dengan lokasi produksi komoditas berbasis sumber daya lokal, khususnya dalam pengembangan ekonomi Orang Asli Papua
 - Pemanfaatan Energi baru terbarukan
- g. Pengelolaan Urbanisasi
- Memastikan perencanaan dan penerapan tata guna lahan berkelanjutan
 - Penyediaan perumahan layak dan infrastruktur dasar di kawasan perkotaan
 - Pencegahan konflik horizontal
 - Pengendalian kerusakan lingkungan

4.5. Pokok-Pokok Pikiran (POKIR) DPRD Provinsi Papua

Perumusan RKPD salah satunya mencakup penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD, sehingga Pokok-Pokok Pikiran ini memiliki nilai yang strategis karena akan menjadi salah satu rujukan dalam menyusun perencanaan pembangunan di daerah. Bagi anggota DPRD penyusunan pokok pikiran ini sekaligus merupakan penyaluran aspirasi masyarakat yang diterima pada saat komunikasi dengan masyarakat. Penyusunan pokok-pokok pikiran ini telah diupayakan untuk selaras dengan RKPD 2021 sehingga ada kesinambungan pelaksanaan program dan kegiatan sebelumnya sebagaimana telah dirumuskan dalam RPJMD Provinsi Papua 2018-2023.

4.5.1. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

- a. Penyusunan pokok-pokok pikiran DPRP dimaksudkan sebagai salah satu upaya mengarahkan penyusunan program pembangunan di Provinsi Papua dengan tujuan mewujudkan aspirasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan melalui fungsi representasi DPRP Papua.
- b. Penyusunan pokok-pokok pikiran DPRP dimaksudkan sebagai upaya dalam mengarahkan dan mengawasi strategi pelaksanaan program pembangunan di Provinsi Papua.

2. Tujuan

Adapun tujuan disusunnya Pokok-Pokok Pikiran DPRP yaitu :

- a. Memberikan bahan, arahan sekaligus masukan kepada Pemerintah Provinsi Papua, dalam menyusun dokumen RKPD Tahun Anggaran 2021;
- b. Memudahkan dan mengefektifkan penyusunan dokumen RKPD, KUA, PPAS, RKA-SKPD dan RAPBD Tahun Anggaran 2021;
- c. Mengarahkan dan memfokuskan upaya pencapaian visi Provinsi Papua melalui perencanaan dan penganggaran APBD Tahun Anggaran 2021;
- d. Mengarahkan penyusunan kebijakan dan program pembangunan sesuai dengan RPJPD dan RPJMD;
- e. Mewujudkan aspirasi masyarakat Provinsi Papua dalam pelaksanaan pembangunan melalui fungsi representasi DPRP;
- f. Mendukung terwujudnya tingkat kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

4.5.2. Telaah POKIR DPRP Provinsi Papua

Penyampaian telaah pokok-pokok pikiran DPRP Provinsi Papua Tahun Anggaran 2021 yang akan dijadikan acuan menyusun konsep perencanaan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat adalah sebagai berikut :

Tabel. 4.2
Telaah POKIR DPRP
Provinsi Papua Tahun Anggaran 2021

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	Target	SKPD Penanggungjawab
1.01	Pendidikan				
1.01.16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun				
1.01.016.0001.01	Pembangunan gedung sekolah	Jumlah sekolah yang di bangun	Korupun	1	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
1.01.17	Program Pendidikan Menengah Atas				
1.01.017.10089.10089	Pembangunan Perpustakaan SMTK Orind Gidd	Jumlah Gedung Perpustakaan yang dibangun	Dekai	1 Unit	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
1.01.46	Program Pendidikan Menengah Kejuruan				
1.01.046.0080.01	Pembangunan Gedung/Rehap Gedung dan Pagar SMK	Jumlah bangunan Gedung sekolah yang terfasilitasi	Kuari	1 Unit	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
1.01.48	Pengembangan sarana dan prasarana pendidikan				
1.01.048.10007.10007	Pembangunan ruang kelas 2 lantai SD Yapis di Distrik Yapen Selatan	Jumlah ruang kelas yang di bangun	Yapen Selatan	2 Bh	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
1.01.048.10014.10014	Pembangunan Laboratorium SMU Negeri Kurima	Tersedianya laboratorium	Kukurima	1 Unit	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
1.01.048.10079.10079	Pembangunan fasilitas laboratorium praktek dan jaringan internet SMU Negeri 1 Biak Barat dan SMK Kelautan Biak	Jumlah laboratorium yang di bangun	Biak Kota, Biak Barat	2 Unit	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
1.01.048.10112.10112	Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP IT QURROTA AYUN	Peningkatan SDM untuk lebih baik	Yobe	3 Ruang	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
1.01.048.10113.10113	Pembangunan Pagar kampus Hidayatullah Holtekam Kota Jayapura	Meningkatnya fasilitas Pendidikan	Muara Tami	300 Meter	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
1.01.048.10119.10119	Pembangunan Ruang sekolah, Gedung Kantor, LAB Komputer (Satu Set), Perpustakaan	Tersedia Prasarana Pendidikan yang memadai	Paniai	11 Unit	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
1.02	Kesehatan				
1.02.15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan				
1.02.015.10081.10081	Pembangunan Gedung Farmasi	Jumlah Gedung Farmasi yang dibangun	Sela	1 Unit	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	Target	SKPD Penanggungjawab
1.02.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat				
1.02.016.10121.10121	Satuan Tugas Pelayanan Kesehatan Kaki Telanjang	Meningkatkan Kesehatan Masyarakat	Enarotali, Madi, Kigodide, Obaya Dimi, Dimiya, Makidimi	38 Orang	Dinas Kesehatan
1.02.26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata				
1.02.026.0020.01	Pengadaan ambulance/mobil jenazah	Jumlah Ambulance/ Mobil Jenazah yang diadakan	Semangga, Tanah Miring, Malind, Obaa	4 Unit	Dinas Kesehatan
1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
1.03.15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan				
1.03.015.10002.10002	pembangunan ruas jalan Sanggei - distrik Urfas	jarak yang akan di bangun	Waropen	4.125 Km	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.015.10003.10003	pembangunan ruas jalan jalur 2 timur - Ranbauri	jarak yang akan dibangun	Waropen	5 Km	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.015.10004.10004	Pembangunan Jembatan jalur 2 timur - Ranbauri	panjang jembatan yang akan di bangun	Waropen	750 Meter	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.015.10011.10011	pembangunan jalan kampung Akudiomi distrik Yaur Kabupaten Nabire	Panjang jalan yang akan di bangun	Yaur	7 Km	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.015.10012.10012	pembangunan jembatan gantung kali Adai Kampung Titinepa Distrik Piyaiyei kabupaten Dogiyai	Panjang Jembatan yang akan dibangun	Piyaiye	100 Meter	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.015.10013.10013	Pembangunan jalan lingkar danau Paniai Kabupaten Paniai	Panjang jalan yang akan di bangun	Paniai	10 Km	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	Target	SKPD Penanggungjawab
1.03.015.10021.10021	Pembangunan jalan jerambah beton di Ansus	Panjang jalan yang di bangun	Ansus	5 Km	Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.015.10023.10023	pembangunan jalan lingkungan di Serui	jarak yang akan dibangun	Serui Kota	2 Km	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.015.10025.10025	Pembangunan jembatan gantung sungai Baliem (Moai - Tulem) di Kabupaten Jayawijaya	Panjang jembatan yang di bangun	Jayawijaya	200 Meter	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.015.10033.10033	pembangunan jalan Deiyai - Distrik Kapiroya	jarak yang akan dibangun	Deiyai	67 Km	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.015.10034.10034	Pembangunan jalan Distrik Yaro 1 - Yaro 2	jarak yang akan dibangun	Yaro	10 Km	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.015.10035.10035	Pembangunan jalan distrik kamu - distrik obano	jarak yang akan dibangun	Kamu	10 Km	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.015.10043.10043	Pembangunan jalan kota distrik ilaga - distrik gome	jarak yang akan di kerjakan	Ilaga	40 Km	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.015.10045.10045	Jembatan kali Hitigima Distrik Asotipo	Panjang Jembatan yang dikerjakan	Nduga	200 Meter	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.015.10047.10047	Pembangunan Jembatan di jalan Sosial	Panjang jembatan yang di bangun	Jayapura	200 Meter	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.015.10050.10050	Pembangunan jalan yahukimo - silimo (Lanjutan)	jarak yang akan dibangun	Silimo	50 Km	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.015.10053.10053	Pembangunan jalan dan jembatan kota wamena-distrik kurima - Tangma-Ukha - Kabupaten Yahukimo	Jalan dan jembatan akses penghubung antar kabupaten	Kukurima, Tangma, Ukha	5.000 Meter	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	Target	SKPD Penanggungjawab
		dan distrik sepanjang 50 km			
1.03.015.10061.10061	Pembangunan ruas jalan yoka - arso 04 dan pengaspalan arso 03 - 05	jarak yang di kerjakan	Yoka	30 Km	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.015.10064.10064	Pembangunan Jembatan di Kampung Tabang Kuari Distrik Kemtuk Gresi	Pannjang Jembatan yang di bangun	Kemtuk Gresi	40 Meter	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.015.10065.10065	Pembangunan ruas jalan lingkaran genyem - nimbokrang dan Lokasi 400 - Benyom Jaya	Panjang jalan yang di bangun	Nimbokrang, Benyom Jaya I	50 Km	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.015.10069.10069	Pelebaran dan Peningkatan jalan poros distrik Kurik - distrik malind Kabupaten Merauke	Jarak ruas jalan yang di kerjakan	Merauke	50 Km	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.015.10070.10070	Pengaspalan jalan Neto distrik Tanah Miring Kabupaten Merauke	Jarak jalan yang di kerjakan	Tanah Miring	10 Km	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.015.10076.10076	Perbaikan ruas jalan biak - supiori di distrik Biak Barat	panjang jalan yang di kerjakan	Biak Barat	20 Km	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.015.10084.10084	Pembangunan Jembatan Kali Tahe distrik kwelendua kabupaten Yahukimo	Panjang Jembatan yang dibangun	Kwelemdua	15 M	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.015.10093.10093	Pembangunan Jembatan Gantung di Kali YU kampung Dolinggame distrik ILU kabupaten puncak Jaya	Panjang Jembatan yang dibangun	Dolinggame	20 M	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.015.10095.10095	Pembangunan Ruas Jalan Trans Yapen Mananayam - Yapen Timur	Jumlah Ruas Jalan yang terbangun	Yapen Timur, Mananayam	40 KM2	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.015.10096.10096	Pembangunan Jembatan Botawa	Panjang Jembatan yang bangun	Botawa	20 M	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.015.10097.10097	Pembangunan jalan Serui - Yapen Barat	Panjang Jalan yang bangun	Serui Kota, Ansus	20 Km	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	Target	SKPD Penanggungjawab
					dan Kawasan Permukiman
1.03.015.10098.10098	Pembangunan Jembatan Gantung	Panjang Jembatan Gantung yang tergantung	Papua	0 KM2	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.015.10107.10107	Pembangunan Jalan Dekai - Korupun	Mebutuhkan akses transportasi masyarakat	Dekai	1 Unit	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.015.10108.10108	Pembangunan Jembatan Kali Aso	Menghubungkan Perekonomian Rakyat	Korupun	1 Unit	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.015.10109.10109	Pembangunan Jalan Tradisional Dagitme - Duram Distrik Duram	Menghubungkan antar Kampung dan Distrik yang masih terisolasi	Duram	1 Unit	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.16	Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong				
1.03.016.0003.01	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Panjang saluran yang terbangun	Bayangkara, Trikora	1 Km	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.016.10042.10042	pembangunan drainase jalan dunlop sentani	panjang drainase yang di bangun	Sentani Kota	4 Km	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.016.10063.10063	Pembangunan drainase di Entrop samping Bank Syariah Mandiri - Hotel Horison	Jarak drainase yang di kerjakan	Entrop	1 Km	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.016.10091.10091	Pembangunan Drainase di Kampung Hamonggrang Distrik Nimbokrang	volume saluran yang di kerjakan	Nimbokrang	500 M2	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.016.10102.10102	PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE	JUMLAH SARANA YANG TERTATA	Kota Baru	131 M2	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.016.10104.10104	PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE / GORONG GORONG	PANJANG SALURAN DIBANGUN	Vim	9 M	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	Target	SKPD Penanggungjawab
1.03.016.10105.10105	PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE GORONG-GORONG	PANJANG SALURAN DIBANGUN	Vim	350 M	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.016.10106.10106	PEMBANGUNAN BOX CULVERT	PANJANG SALURAN DIBANGUN	Vim	200 M	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.17	Program Pembangunan turap/talud/brojong				
1.03.017.0003.02	Pembangunan turap/talud/bronjong	Volume talud yang dibangun	Biak Timur	50 M3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.017.0006.01	Pembangunan Talud Permukiman di Kota Jayapura	Panjang Talud Pengaman yang dibangun	Bayangkara, Trikora	500 Meter	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.017.10009.10009	pembangunan pengaman pantai di kali bobo kabupaten Nabire	panjang talud yang di bangun	Kali Bobo	600 M	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.017.10048.10048	Pembangunan talud di jalan sosial	Volume talud yang di bangun	Jayapura	300 M2	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.18	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan				
1.03.018.10026.10026	Peningkatan jalan ekonomi AMD - Tulem di Kabupaten Jayawijaya	panjang jalan yang di kerjakan	Jayawijaya	8 Km	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.018.10027.10027	Peningkatan jalan Moai - Elabukima Kabupaten Jayawijaya	panjang jalan yang dikerjakan	Jayawijaya	5 Km	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.018.10028.10028	Peningkatan jalan Noagalo - Yumugima Kabupaten Jayawijaya	panjang jalan yang akan dikerjakan	Jayawijaya	5 Km	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.018.10029.10029	Peningkatan jalan dalam kota Dekai kabupaten Yahukimo	Panjang jalan yang dikerjakan	Yahukimo	5 Km	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	Target	SKPD Penanggungjawab
1.03.018.10036.10036	Peningkatan jalan Deiyai - Distrik Kamuu	jarak yang akan di kerjakan	Dogiyai	35 Km	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.018.10037.10037	Pengaspalan Jalan Ibu kota - Distrik Dogiyai	Jarak yang akan dikerjakan	Dogiyai	15 Km	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.018.10041.10041	Peningkatan jalan Dunlop Sentani	Jarak yang dikerjakan	Sentani Kota	4 Km	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.018.10092.10092	Peningkatan Jalan danau Love - kawi di distrik Sentani Barat Kabupaten Jayapura	Panjang jalan yang di kerjakan	Sentani Barat	30 Km	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.018.10111.10111	Rehabilitasi Jalan Lingkungan BTN Skyline Residence Jalan Nuri dan Jalan Kasuari 1,2,3,4	Rehabilitasi Jalan Lingkungan BTN Skyline Residence Jalan Nuri dan Jalan Kasuari 1,2,3,4	Abepura	1.300 Meter	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.018.10115.10115	Peningkatan Jalan Lingkungan Gang Ondo Apner Kelurahan Dobonsolo Distrik Sentani Kota Kabupaten Jayapura	Tersedia fasilitas Infrastruktur yang baik bagi masyarakat	Sentani	500 Meter	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.018.10116.10116	Peningkatan Jalan Kompleks Lorenz Mano Distrik Abepura	Tersedianya Infrastruktur Yang Memadai	Abepura	800 Meter	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.23	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan				
1.03.023.10024.10024	Pembangunan gedung Gereja Pusat GPdi di Entrop Jayapura	Jumlah bangunan yang di bangun	Entrop	1 Unit	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.023.10117.10117	Pembangunan Gereja Kemah Injil Klasis Yatamo Jalan Kebouyaita	Peningkatan Prasarana Ibadah	Yatamo	1 Ruang	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.24	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	Target	SKPD Penanggungjawab
1.03.024.10016.10016	Pembangunan Waduk dikampung Benyum 1 dan 2 distrik Nimbokrang Kabupaten Jayapura	Jumlah waduk yang di bangun	Benyom	6 Bh	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.26	Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya				
1.03.026.0009.01	Pembangunan pengendali sedimen sungai	Volume bangunan pengendali sedimen	Entrop	1.500 M3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.026.10067.10067	Pembangunan jaringan air bersih di Desa Berap Nimbokrang	Jumlah titik pemasangan jaringan	Nimbokrang	30 Titik	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.27	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah				
1.03.027.0071.01	Pembangunan jaringan air bersih di kab Biak	Jumlah debit air bersih yang tersedia	Biak Timur, Oridek	100.000 Lt/dtk	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.027.0105.01	Pembangunan Jaringan Air Bersih di Kabupaten Kep. Yapen	Jumlah debit air bersih	Yapen Barat, Angkaisera	100.000 Lt/dtk	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.28	Program pengendalian banjir				
1.03.028.0108.01	Normalisasi Sungai Kali bobo Kabupaten Nabire	Panjang sungai yang akan di normalisasi	Kali Bobo	600 M2	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.028.10005.10005	Normalisasi Sungai Kampung Mariadei	Panjang sungai yang di kerjakan	Yapen Selatan	3 Km	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.028.10040.10040	Pengendalian Banjir Sungai Flavouw Sentani Kabupaten Jayapura	panjang drainase yang di bangun	Sentani Kota	2 Km	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.30	Program pembangunan infrastruktur pedesaan				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	Target	SKPD Penanggungjawab
1.03.030.0003.01	Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaaan	jumlah kampung yang terlayani air bersih	Kemtuk Gresi, Ebungfao, Pantai Timur, Bonggo Timur, Arso Barat, Bayangkara, Trikora	20 Kampung	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.030.10038.10038	Pembangunan Pasar mama-mama Papua di Distrik Dogiyai	Jumlah pasar yang di bangun	Dogiyai	1 Buah	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.030.10058.10058	Pembangunan toilet umum di Yahin Pinggiran Danau sentani	unit yang terbangun	Yahim	3 Unit	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.030.10059.10059	Pembangunan Pagar GKII Doyo Baru	panjang pagar yang terbangun	Doyo Baru	700 M2	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.030.10062.10062	Pembangunan pabrik Petatas di Arso 3	jumlah Bangunan yang dibangun	Arso	1 Buah	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.31	Peningkatan Jalan dan Jembatan				
1.03.031.10017.10017	Peningkatan Jalan Besum-Yanbra-Puai	Jarak jalan yang di kerjakan	Jayapura	45 Km	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.031.10018.10018	Peningkatan Jalan Kemiri - Depapre	Jarak jalan yang di kerjakan	Jayapura	24 Km	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.031.10019.10019	Peningkatan jalan Arso XIV - Sawia - Kwarja	jarak yang di kerjakan	Keerom	60 Km	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.031.10020.10020	Peningkatan jalan Sarmi - Arbais	jarak jalan yang di kerjakan	Sarmi	55 Km	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.031.10022.10022	Peningkatan jalan di hanyaan Entrop kota Jayapura	panjang jalan yang di kerjakan	Entrop	1 Km	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	Target	SKPD Penanggungjawab
					dan Kawasan Permukiman
1.03.031.10094.10094	peningkatan ruas jalan yomdori/wardo biak barat-kabupaten supiori	panjang ruas jalan yang dibangun	Biak Barat, Supiori	100 M	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.031.10118.10118	Peningkatan Ruas Jalan Distrik Paniai Barat - Distrik Idakebo	Tersedia Akses Jalan ke Daerah terpencil yang memadai	Paniai Barat, Dogiyai	10 Km	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.34	Program Perencanaan Tata Ruang				
1.03.034.10103.10103	PEMBANGUNAN SARANA PENDUKUNG GEDUNG GOR TYPE B KOYA TIMUR KOTA JAYAPURA	JUMLAH SARANA YANG TERTATA	Koya Timur	2.250 M2	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.39	Program Pelayanan Air Bersih				
1.03.039.10015.10015	Pembangunan Jaringan Air Bersih Kali Biru Beraf - Distrik Namblong Kabupaten Jayapura	jumlah jaringan air bersih yang di bangun	Namblong	50 Km	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.039.10031.10031	Pembangunan Jaringan Air Bersih Komplek Kantor Sinode GIDI Harapan Kabupaten Jayapura	Jumlah jaringan yang di bangun	Jayapura	12 Titik	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.039.10032.10032	Pembangunan Jaringan Air Bersih di Kampung Basal Distrik Korupun Kabupaten Yahukimo	jumlah jaringan yang di bangun	Korupun	30 Titik	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.039.10039.10039	Pembangunan jaringan air bersih di kampung Dogimani Distrik Dogiyai	jumlah jaringan yang di bangun	Dogiyai	25 Titik	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.039.10101.10101	PEMBANGUNAN JARINGAN AIR BERSIH	PEMBANGUNAN JARINGAN AIR BERSIH	Papua	10 KM2	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman				
1.04.15	Program Pengembangan Perumahan				
1.04.015.0016.01	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Nabire	Jumlah rumah layak huni yang dibangun	Nabire	100 Unit	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	Target	SKPD Penanggungjawab
1.04.015.0018.01	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Dogiai	Jumlah rumah layak huni yang dibangun	Dogiyai	100 Unit	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.04.015.0021.01	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Jayawijaya	Jumlah rumah layak huni yang dibangun	Itlay Hisage, Siepkosi, Wita Waya	30 Unit	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.04.015.0035.01	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Jayapura	Jumlah rumah layak huni yang dibangun	Kemtuk Gresi, Ebungfao, Pantai Timur, Bonggo Timur, Arso Barat	500 Unit	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.04.015.0079.01	Pembangunan Rumah Layak Huni	Jumlah rumah layak huni yang dibangun	Elelim, Apalapsili, Benawa	3 Unit	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.04.015.10008.10008	Pembangunan rumah layak huni bagi guru	jumlah yang akan dibangun	Yahukimo, Elelim, Abenaho	3 Unit	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.04.015.10030.10030	Pembangunan Gedung Gereja GIDI Yawarub Arso 8 Kabupaten Keerom	Jumlah gedung yang dibangun	Arso	1 Unit	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.04.015.10052.10052	Pembangunan rumah layak huni di distrik silimo	Jumlah rumah yang di bangun	Silimo	100 Unit	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.04.015.10072.10072	Pembangunan rumah layak huni di Kabupaten Merauke dan Kabupaten Mappi	jumlah rumah yang di bangun	Tubang, Obaa	100 Unit	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.04.015.10075.10075	Pembangunan kantor Keuskupan di Kabupaten Merauke	peningkatan urusan keagamaan	Merauke	1 Unit	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.04.16	Program Lingkungan Sehat Perumahan				
1.04.016.10006.10006	Pembangunan Perumahan Layak Huni di Distrik Mugi dan Yogosem Kabupaten Yahukimo	Jumlah yang akan dibangun	Yogosem, Mugi	20 Unit	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	Target	SKPD Penanggungjawab
1.04.17	Program Pemberdayaan komunitas Perumahan				
1.04.017.10046.10046	Pembangunan Gedung Kantor Klasis Kingmi Hitigima	Jumlah bangunan yang di bangun	Hitigima	1 Unit	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.06	Sosial				
1.06.27	Program Peningkatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Fasilitasi diBidang Bina Kesejahteraan Rakyat, Bina Mental Spiritual dan Bina Kemasyarakatan				
1.06.027.10085.10085	Pembangunan Gereja di Kampung Matabori, Kampung Yoke, Kampung Kapeso Distrik Mamberamo Hilir Kabupaten Mamberamo Raya	Jumlah Gedung yang dibangun	Mamberamo Raya, Kapeso, Yoke	3 Unit	Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.06.28	Program Peningkatan dan Pembinaan di Bidang Bina Kesejahteraan Rakyat, Bina Mental Spritual dan Bina Kemasyarakatan				
1.06.028.10100.10100	pembangunan Gedung Ibadah Kampung Mobigi Distrik Ilu Kabupaten Puncak Jaya	Pembangunan Gedung Ibadah	Papua	264 M2	Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.07	Pemberdayaan Masyarakat Desa				
2.07.21	Program Pemberdayaan Masyarakat Kampung				
2.07.021.10086.10086	Bantuan Modal UKM Sagu Forno, Ikan Asap Kerajinan tangan bahan baku Kelapa	Jumlah kelompok penerima	Kepulauan Yapen, Serui Kota, Biak Numfor, Supiori	30 Kelompok	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua
2.09	Perhubungan				
2.09.15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan				
2.09.015.10073.10073	Pengadaan speed boat di Kabupaten Mappi	Jumlah speed yang di adakan	Obaa	2 Buah	Dinas Perhubungan
2.09.015.10077.10077	Pembangunan dermaga kapal barang di Kabupaten Supiori	tersedianya dermaga kapal barang	Supiori	1 Unit	Dinas Perhubungan
2.09.015.10078.10078	Perbaikan Terminal Angkutan Umum di Biak Kota	Terbangunnya fasilitas Angkutan Umum	Biak Kota	1 Unit	Dinas Perhubungan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	Target	SKPD Penanggungjawab
2.09.18	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan				
2.09.018.10051.10051	pembangunan lapangan terbang di Distrik Silimo Kabupaten Yahukimo	Jumlah lapangan terbang yang di bangun	Silimo	1 Unit	Dinas Perhubungan
2.09.018.10055.10055	Pembangunan Dermaga tambatan perahu di Boroway	Panjang Dermaga yang bangun	Sentani Barat	30 Meter	Dinas Perhubungan
2.09.018.10099.10099	Pembangunan Dermaga Distrik Pulau Kurudu Kabupaten Yapen	panjang Dermaga yang dibangun	Pulau Kurudu	100 M	Dinas Perhubungan
2.09.018.10110.10110	Pembangunan Lapangan Terbang Basal Korupun Yahukimo	Membuka Akses Transportasi Udara	Korupun	1 Unit	Dinas Perhubungan
2.11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				
2.11.17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah				
2.11.017.10044.10044	Pembentukan Koperasi BUMD untuk Pertanian Sayur	Jumlah dokumen yang butuhkan	Puncak	10 Berkas	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
3.01	Kelautan dan Perikanan				
3.01.20	Program pengembangan budidaya perikanan				
3.01.020.0044.01	Bantuan Bibit Ikan dan Pakan kepada Pembudidaya Air Tawar	10 kelompok pembudidaya	Ebungfao	20 Kelompok	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.01.020.0053.01	Pengadaan Sarana Produksi Keramba Jaring Apung untuk Pembudidaya Ikan	Jumlah kelompok pembudidaya ikan penerima keramba jaring apung	Ebungfao	20 Kelompok	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.01.020.10071.10071	Pengadaan Jaring, motor tempel, perahu nelayan bagi masyarakat lokal	Jumlah kelompok penerima bantuan	Muting, Okaba, Kimaam, Semangga, Malind, Waan, Obaa	23 Kelompok	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.01.020.10120.10120	Pengadaan Peralatan Budidaya Ikan Air tawar	Meningkatkan Hasil Perikanan	Paniai	100 Pak	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.01.24	Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar				
3.01.024.0002.01	Pengadaan Sarana Produksi Keramba Jaring Apung untuk Pembudidaya Ikan	Tersedianya Sarana dan Prasarana	Sentani	50 Unit	Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	Target	SKPD Penanggungjawab
3.01.024.10056.10056	pengadaan keramba, waring dan bibit ikan air tawar di distrik waibu	jumlah sarana dan prasarana di bantu	Waibu	30 Kelompok	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.01.024.10080.10080	Pengadaan Keramba Apung dan Kapal bagi Masyarakat di Kabupaten Supiori	tersedianya sarana dan prasarana	Supiori Selatan, Supiori Timur	10 Kelompok	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.01.32	Program Pengembangan Prasarana Perikanan				
3.01.032.10082.10082	Perbaikan Kantor UPTD Balai Pembenihan Perikanan Provinsi Papua di Bosnik	tersedianya sarana dan prasarana	Bosnik Sup	1 Unit	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.01.032.10083.10083	Pengadaan Kendaraan mobil Operasional	Jumlah mobil yang tersedia	Biak Timur	2 Unit	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.02	Pariwisata				
3.02.16	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata				
3.02.016.10066.10066	Pengembangan Wisata Kali Biru di Genyem	Jumlah Pengembangan tempat wisata	Kemtuk Gresi	1 Tempat	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3.02.016.10088.10088	Pembangunan home stay di pulau wisata di Kabupaten Biak dan Kabupaten Supiori	Jumlah home stay yang di bangun	Biak Numfor, Supiori	20 Unit	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3.02.18	Program penyediaan saran Prasarana Pariwisata				
3.02.018.10001.10001	pembangunan pondok wisata	jumlah pondok yang dibangun	Ebungfao	10 Unit	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3.02.018.10087.10087	Pengembangan Wisata Aggaduber	tersedianya sarana dan prasarana	Biak Numfor	1 Unit	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3.02.018.10090.10090	Pengembangan wisata Mangrove di Kabupaten Biak dan Kabupaten Supiori	Tersedianya sarana dan prasarana	Biak Kota, Supiori	1 Kali	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3.03	Pertanian				
3.03.16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)				
3.03.016.10054.10054	Membuka lahan persawahan di Ibu Kota Dekai Yahukimo	Luas lahan yang di garap	Dekai	3 Hektar	Dinas Pertanian dan Pangan
3.03.016.10068.10068	Penyediaan bibit kelapa sawit dan pengembangan areal persawahan	jumlah lahan yang dibutuhkan	Sarmi	8 Hektar	Dinas Pertanian dan Pangan
3.03.016.10074.10074	Pengadaan Alsintan combain, alsintan hand tractor dan mesin pengering padi bagi Masyarakat	Jumlah alat yang di butuhkan	Semangga, Tanah Miring, Kurik, Obaa	16 Unit	Dinas Pertanian dan Pangan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	Target	SKPD Penanggungjawab
3.03.18	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan				
3.03.018.0002.02	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	Jumlah alat dan mesin pertanian yang diadakan	Puncak, Beoga, Sinak	30 Unit	Dinas Pertanian dan Pangan
3.03.018.10114.10114	Pengadaan 5 Unit Traktor dan Sarana Prasarana Pertanian Kelompok Tani	Meningkatnya Kesejahteraan Petani	Skanto, Muara Tami	5 Buah	Dinas Pertanian dan Pangan
3.03.22	Program peningkatan produksi hasil peternakan				
3.03.022.0003.01	Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat	tersalurnya bibit kepada masyarakat	Oneri	500 Bibit	Dinas Pertanian dan Pangan
3.03.022.10057.10057	Pengadaan bibit ternak bagi masyarakat di distrik waibu	tersediannya Jumlah bibit	Waibu	1.000 Ekor	Dinas Pertanian dan Pangan
3.03.022.10122.10122	Penyediaan dan Pendistribusian Bibit Ternak	Tersedia Bibit Ternak babi	Paniai	500 Ekor	Dinas Pertanian dan Pangan
3.03.24	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan				
3.03.024.10049.10049	Pengadaan bibit Babi dan Ayam potong	jumlah ternak yang di adakan	Sinakma, Jayapura	3.000 Ekor	Dinas Pertanian dan Pangan
3.05	Energi dan Sumberdaya Mineral				
3.05.28	Program Pengelolaan Listrik dan Pemanfaatan Energi				
3.05.028.10060.10060	Pemasangan Listrik di Arso 9	Jumlah titik yang terpasang	Arso	100 Titik	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral

Sumber : DPRP Papua, 2020 (ppr.papua.go.id)

BAB V

OTONOMI KHUSUS PROVINSI PAPUA TAHUN 2021

5.1. Kebijakan Otonomi Khusus

Histori terhadap keadaan rakyat telah menghasilkan kebijakan pemerintah terhadap konfigurasi pemerintahan di Provinsi Papua dalam sebutan desentralisasi asimetris atau dalam sebutan pemerintahan lainnya, Otonomi Khusus. Sebelumnya dapat terjelaskan periode pendekatan pembangunan di Papua dimulai dari tahun 1963 – 1969, dengan pendekatan integrasi/UNTEA, tahun 1969 – 1998, dengan pendekatan sentralistik, tahun 1998 – 2001, dengan pendekatan desentralisasi, tahun 2001 – sekarang, dengan pendekatan desentralisasi asimetris. Dapat dibuat semacam penjelasan lain terhadap perjalanan awal memulai pembangunan di Provinsi Papua, bahwa setelah melewati beberapa periode, pembangunan baru dan benar-benar dilaksanakan di Provinsi Papua sejak tahun 2001.

Sejak diberlakukan otonomi khusus Papua, diantar dalam asumsi bahwa dengan diberikannya otonomi khusus atau kewenangan yang lebih khusus, keadaan rakyat dapat dibawa keluar dari kemiskinan, kebodohan, keterisolasian, ketertinggalan, keterbelakangan, ketidakadilan, kematian. Asumsi tersebut sejalan dengan kepentingan yang melekat langsung terhadap pemberlakuan otonomi khusus dan ditambah pula bahwa dengan semangat memprakasai sendiri pembangunan dengan didukung oleh sumber daya alam yang memadai, maka dalam kurun waktu tertentu, keadaan Papua dapat dikatakan lebih maju atau sama dengan daerah-daerah yang lebih dulu maju di Indonesia. Histori dan keadaan rakyat sebagaimana telah terurai dapat dilihat pada gambar sebagai berikut.

Gambar 5.1

Histori dan Keadaan Rakyat Konfigurasi Pemerintahan Daerah



Sumber : Bappeda Provinsi Papua (Data Diolah) Tahun 2020

Dengan adanya otonomi khusus Papua, maka kepentingan pembangunan di Papua dirumuskan dalam cita-cita atau harapan sebagai perwujudan terhadap ringkasan keadaan rakyat, yang disebutkan sebagai kemanfaatan yang boleh diterima atau dirasakan langsung bahwa : mampu mengurangi ketimpangan pembangunan, ada pemberlakuan kewenangan yang luas dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, diberikannya tanggung jawab yang lebih besar, dapat memberikan perlindungan dan kesempatan yang luas bagi Orang Asli Papua, terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran.

Gambaran terhadap kebijakan otonomi khusus papua, dapat pula diilhami dari singkatan PAPUA, yakni : Proteksi, Afirmasi, Pemberdayaan, Universal, Akuntabilitas.

Didorong oleh keadaan rakyat dan guna menjaga keutuhan rakyat dalam bernegara, maka pilihan kebijakan yang menjadi pendekatan yang moderat, sedapatnya menghubungkan kembali keadaan rakyat dengan pemerintahan, keadaan rakyat dengan kepercayaan dan legitimasi terhadap pemerintah.

Sampai dengan proyeksi tahun 2021, pembangunan Papua dalam kebijakan otonomi khusus telah memasuki tahun ke 20. kesepakatan durasi waktu pemberlakuan otonomi khusus di Papua sebagai solusi alternatif terhadap keadaan rakyat akan dilakukan peninjauan kembali terhadap kepentingan politik kewenangan dan politik anggaran. Ada upaya evaluasi kembali dan memberikan masukan terhadap upaya rekonstruksi untuk menghasilkan formulasi berikut terhadap kepentingan otonomi khusus Papua dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5.2. Regulasi Otonomi Khusus

Sebutan kebijakan otonomi khusus kemudian diatur dengan undang-undang nomor 21 tahun 2001 juncto peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2008 juncto undang-undang nomor 35 tahun 2008 tentang otonomi khusus bagi provinsi papua. Dapat terjelaskan bahwa alasan dilakukan perubahan undang-undang sebagaimana tersebutkan, bahwa karena adanya pemekaran Provinsi Papua dengan terbentuknya Provinsi Papua Barat.

Dengan adanya undang-undang otonomi khusus, maka ada kedudukan sebagai batasan aturan main rakyat untuk mengkonsolidasi posisi politik dan hukum, sehingga dapat teratur kehidupan bersama dalam rangka terwujudnya kesetaraan. Berbagai kepentingan terhadap aturan main diturunkan kedalam beberapa peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah khusus sebagai petunjuk operasionalisasi.

5.3. Implementasi Otonomi Khusus

Konfigurasi otonomi khusus bagi Provinsi Papua secara kedudukan hukum berada di Provinsi Papua, namun dalam pelaksanaan, dilakukan beberapa ***Diskresi (kebebasan mengambil keputusan sendiri atas situasi yang dihadapi)*** oleh

Gubernur dengan ***Fidusia (pendelegasian wewenang dan pengelolaan uang)*** kepada Bupati/Walikota pada masing-masing Kabupaten/Kota.

Keterangan terhadap kepentingan diskresi tersebut dapat terlihat pada penjelasan sebagai berikut :

1. Periode 2002 – 2003, bentuk diskresi, 40% teralokasi kepada kabupaten/kota dan 60%, alokasi berada di provinsi dan diatur dengan Surat Keputusan Menteri Republik Indonesia Nomor 47/KM.07/2002 tanggal 21 Februari 2002 tentang tata cara penyaluran dana otonomi khusus Provinsi Papua.
2. Periode 2004 – 2006, bentuk diskresi, 60% teralokasi kepada kabupaten/kota dan 40%, alokasi berada di provinsi dan diatur dengan Peraturan Daerah Provinsi Nomor 2 tahun 2004 tentang pembagian penerimaan dalam rangka otonomi khusus.
3. Periode 2007 – 2013, bentuk diskresi, 60% teralokasi kepada kabupaten/kota dan 40%, alokasi berada di provinsi dan diatur dengan Peraturan Daerah Khusus Nomor 1 Tahun 2007 tentang pembagian dan pengelolaan penerimaan dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus Papua, namun Gubernur tidak mengesahkan dan tidak dimasukkan dalam lembaran daerah.
4. Periode 2014 – sekarang, bentuk diskresi, 80% teralokasi kepada kabupaten/kota dan 20%, alokasi berada di provinsi dan diatur dengan Peraturan Daerah Khusus Nomor 25 Tahun 2013 Juncto Peraturan Daerah Khusus Nomor 13 Tahun 2016 Juncto Peraturan Daerah Khusus Nomor 3 Tahun 2019 tentang pembagian penerimaan dan pengelolaan keuangan dana otonomi khusus.

Untuk point 4, bahwa setiap tahun mekanisme alokasi diatur dengan peraturan gubernur untuk jumlah nominal yang diterima oleh masing-masing kabupaten/kota dengan formulasi perhitungan berbasis alokasi dasar dan alokasi variable.

5.4. Penganggaran Otonomi Khusus

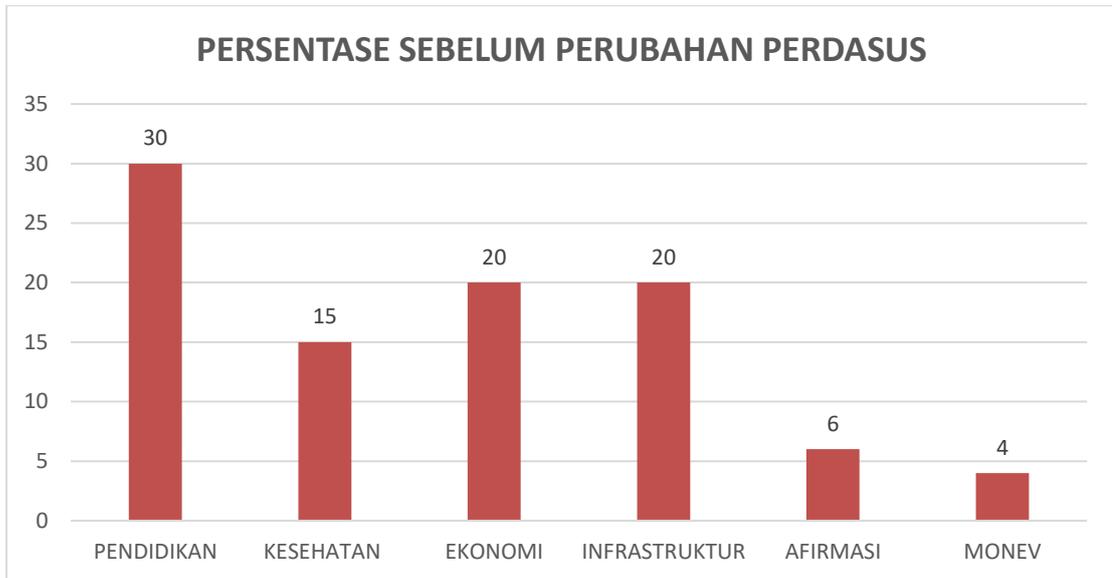
Pemberian otonomi khusus Papua, selain kewenangan juga diberi stimulasi dalam bentuk penganggaran yang bersumber dari **alokasi dana otonomi khusus setara 2% dana alokasi umum nasional dan dana tambahan otonomi khusus bagian infrastruktur**. Pada periode 2014 sampai dengan sekarang,

penganggaran otonomi khusus yang diterima, oleh diskresi Gubernur terpisahkan menjadi pembiayaan pelayanan bersama atau program strategis lintas kabupaten/kota dan pembiayaan pelayanan terhadap pembagian alokasi 80% untuk bagian penerimaan kabupaten/kota dan 20% untuk bagian yang dikelola oleh provinsi.

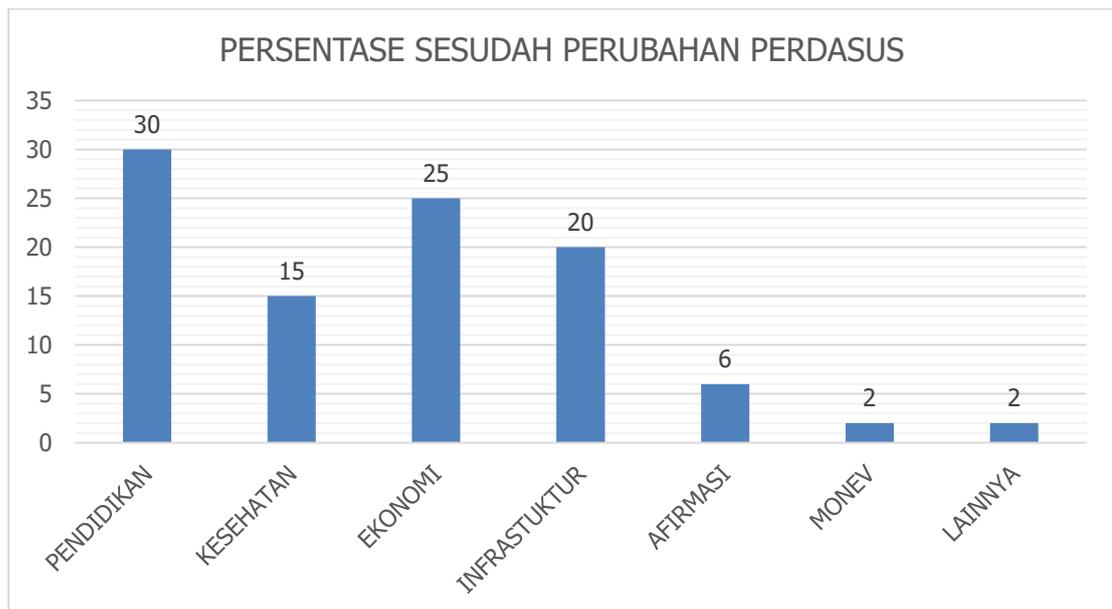
Pada pembiayaan pelayanan bersama atau program lintas strategis lintas kabupaten/kota diarahkan untuk membiayai pelayanan antara lain : program strategis pemberdayaan kampung (prospek), kartu papua sehat (KPS), gerakan membangun masyarakat harapan seluruh rakyat papua (gerbangmas hasrat papua), pendidikan, kesehatan dan perumahan rakyat. Perlu menjadi atensi bahwa, prospek dan gerbangmas hasrat papua, diskresinya telah ditiadakan, sedangkan kps diarahkan untuk integrasi kepada kebijakan kesehatan secara nasional.

Pembiayaan pelayanan terhadap pembagian alokasi 80% bagian penerimaan kabupaten/kota diatur dalam peraturan daerah khusus provinsi papua nomor 25 Tahun 2013 Juncto Peraturan Daerah Khusus Nomor 13 Tahun 2016 Juncto Peraturan Daerah Khusus Nomor 3 Tahun 2019 tentang pembagian penerimaan dan pengelolaan keuangan dana otonomi khusus, dengan diarahkan kepada : pendidikan minimal 30%, kesehatan minimal 15%, pemberdayaan ekonomi kerakyatan minimal 20% (perdasus 25/2013) dan minimal 25% (perdasus 13/2016), infrastruktur minimal 20%, afirmasi 6%, monitoring, evaluasi dan pengawasan 4% (perdasus 25/2013), 2% monitoring, evaluasi dan pengawasan, 2% lainnya (pembiayaan pelayanan sosial, kependudukan, tenaga kerja), (perdasus 13/2016). Persentase terhadap pembiayaan pelayanan sumber dana otsus alokasi 80% dapat dilihat pada gambar 5.2 sebagai berikut.

Gambar 5.2
Grafik Pembiayaan Pelayanan Urusan Otonomi Khusus



Sumber : Perdasus 25 Tahun 2013



Sumber : Perdasus 25 Tahun 2013 Juncto Perdasus 13 Tahun 2016

Pembiayaan pelayanan terhadap pengelolaan alokasi 20% bagian provinsi diarahkan kepada : pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan, infrastuktur, operasional lembaga majelis rakyat papua, lembaga keadaan 10% dari alokasi 20% yang dikelola pronvinsi, monitoring dan evaluasi.

Penganggaran dana otonomi khusus yang bersumber dari dana tambahan otonomi khusus bagian infrastuktur sepenuhnya diarahkan kepada kepentingan infrastuktur dalam perspektif luas dengan arahan oprerasionalisasi diatur dalam peraturan gubernur yang ditujukan untuk membiayai kepentingan pembangunan provinsi papua pada masing-masing kabupaten/kota.

Penganggaran dana otonomi khusus bagi provinsi papua sampai dengan tahun ke – 19 atau tahun 2020 berjumlah kurang lebih 92 Triliun yang bersumber dari dana otonomi khusus setara 2% dana alokasi umum nasional dan dana tambahan otonomi khusus bagian infrastruktur. Penjumlahan penerimaan terhadap nominal penganggaran otonomi khusus tersebut tentu saja dalam durasi waktu sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2020. Perkiraan penganggaran otonomi khusus tahun 2021 berjumlah kurang lebih 8 triliun, dengan penerimaan kurang lebih 6 triliun bersumber dari dana otonomi khusus setara 2% dana alokasi umum nasional dan kurang lebih 2 triliun bersumber dari dana tambahan otonomi khusus bagian infrastruktur. Adapun keterangan terhadap penganggaran Dana Otsus dari Tahun 2002 – 2020 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel. 5.1

**Penerimaan Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua
Tahun 2002 - 2020**

No	Tahun	Dana Otsus (Rp)	Dana Infrastruktur (Rp)	Total Otsus (Rp)
1	2002	1,382,300,000,000,00	-	1,382,300,000,000,00
2	2003	1,539,560,000,000,00	-	1,539,560,000,000,00
3	2004	1,642,617,943,000,00	-	1,642,617,943,000,00
4	2005	1,775,312,000,000,00	-	1,775,312,000,000,00
5	2006	2,913,284,000,000,00	536,374,689,000,00	3,449,658,689,000,00
6	2007	3,295,748,000,000,00	750,000,000,000,00	4,045,748,000,000,00
7	2008	3,590,142,897,000,00	330,000,000,000,00	3,920,142,897,000,00
8	2009	2,609,796,098,000,00	1,470,000,000,000,00	4,079,796,098,000,00
9	2010	2,694,864,788,000,00	800,000,000,000,00	3,494,864,788,000,00
10	2011	3,157,459,547,550,00	800,000,000,000,00	3,957,459,547,550,00
11	2012	3,833,402,135,000,00	571,428,571,000,00	4,404,830,706,000,00
12	2013	4,355,950,048,000,00	571,428,572,000,00	4,927,378,620,000,00
13	2014	4,777,070,975,000,00	2,000,000,000,000,00	6,777,070,975,000,00
14	2015	4,940,429,880,000,00	2,250,000,000,000,00	7,190,429,880,000,00

No	Tahun	Dana Otsus (Rp)	Dana Infrastruktur (Rp)	Total Otsus (Rp)
15	2016	5,395,051,859,400.00	1,200,000,000,000.00	5,595,051,859,400.00
16	2017	5,615,816,931,000.00	2,625,000,000,000.00	8,240,816,931,000.00
17	2018	5,580,152,407,000.00	2,400,000,000,000.00	7,980,152,407,000.00
18	2019	5,808,230,158,000.00	2,824,446,537,000.00	8,632,676,695,000.00
19	2020	5,861,910,600,000.00	2,853,973,800,000.00	8,715,884,400,000.00
	Total	70,769,100,266.950.00	21,982,652,169,000.00	91.751.752.435.950.00

Sumber : BPKAD Provinsi Papua (Data Diolah) Tahun 2020

Postur penerimaan anggaran otonomi khusus setiap tahun mengalami peningkatan dan kurang lebih 55% dari total anggaran pendapat dan belanja daerah provinsi papua dikontribusi oleh anggran otonomi khusus. Semacam kekwatiran, apabila setelah tahun 2021, kepentingan peninjauan kembali politik penganggaran tidak menghasilkan solusi, maka indikasi kolaps bisa menyeret dalam ketidaksanggupan penyelenggaraan pemerintah untuk memenuhi tiga tugas dasar : pelayanan administrasi pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Adapun keterangan kontribusi sumber dana otonomi khusus terhadap APBD dapat dilihat gambar sebagai berikut.

Gambar 5.3

Sumber Dana Otonomi Khusus Terhadap Total APBD Provinsi Papua Tahun 2019



Sumber : BPKAD Provinsi Papua Tahun 2020

5.5. Tantangan dan Permasalahan Otonomi Khusus

5.5.1 Tantangan Otonomi Khusus

Tahun 2021 merupakan perjalanan 20 tahun konfigurasi otonomi khusus bagi provinsi papua, sejak lahirnya pada tanggal 21 november 2001. Menjelang tahun ke – 20, teranjurkan dalam kepentingan konsensus alternatif, bahwa konfigurasi dan formulasi berikut terhadap kepentingan pembangunan di Papua perlu menjadi perhatian serius dari pemerintah. Tantangan yang diperhadapkan kepada pemerintah dari rakyat bahwa pada rakyat terbelah pada opini antara kepentingan segregasi dan agregasi politik. Ungkapan-ungkapan dalam rangka membangkitkan nasionalisme ganda menjadi keseringan ungkapan yang terdengar bahwa, setelah otonomi khusus berakhir tahun 2021, maka solusi baru untuk papua adalah merdeka.

Keterangan ungkapan ini bukan alasan untuk mengganggu psikologi kehidupan bangsa dan negara, namun keterangan tersebut dapat dijadikan masukan agar kepentingan rekonstruksi dan reformulasi terhadap kepentingan pembangunan di Papua menjadi keseriusan berpikir oleh pemerintah. Dalam pemahan kebijakan, ketika didapati ada keadaan rakyat yang gelisah, maka kebijakan yang diperbuat harus dapat memastikan bahwa rakyat boleh bebas dari gelisah dan ada dalam keutuhan memahami hubungan antar rakyat dan negara. Terhadap peninjauan kembali politik kewenangan dan politik anggaran, maka potret komprehensif harus dijadikan sebagai argumentasi dasar untuk melahirkan kebijakan permanen yang memastikan bahwa kehadiran pemerintah mampu mengantar rakyat pada kepastian pemenuhan keadaan yang berbeda atau keadaan yang beranjak lebih membaik.

Sekedar memberi masukan kembali, bahwa sejak phase pertama durasi waktu 20 tahun, esensi kebijakan otonomi khusus bagi provinsi papua tentang kewenangan atributif dan keadilan alokatif, belum sepenuhnya terwujud. Kepentingan menegaskan kewenangan atributif karena hak yang melekat dari pemberlakuan undang-undang otonomi khusus mengalami pengabaian terhadap prinsip hukum "*lex specialist derogate legi generali*", sehingga membangun opini lain, ada semacam upaya ketidakmenghargai dan ketidaktaatan bahkan ketidakpatuhan hukum. Pada bagian lain yang menarik lagi, bahwa keadilan alokatif yakni menghasilkan keadilan yang

memberi kegunaan terhadap pencapaian cita-cita dan harapan yang dirumuskan mengalami pengkaburan pada fakta.

5.5.2 Permasalahan Otonomi Khusus

Ketidakpatuhan hukum telah memberi kondisi baru bahwa ada kemungkinan penyimpangan terhadap pelaksanaan dapat ditemui. Sebagai contoh, perwujudan usulan pembangunan yang diintervensi oleh dana otonomi khusus pada pelayanan pendidikan mampu diarahkan pada semua jenjang dan jenis pendidikan, sedangkan pada rujukan berbasis undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, memberikan batasan penanganan urusan pelayanan pendidikan. Bahkan untuk pelayanan lainnya sebagaimana fokus pelayanan yang didanai dari dana otonomi khusus mengalami gesekan tajam yang melahirkan tafsir berbeda tentang pengarahannya kepada hal memperhatikan atau mengacu sebagai konsekuensi kepatuhan hukum.

Terdorong oleh pikiran sederhana, bahwa **uang pemerintah tidak bergerak tanpa regulasi, jika ada uang pemerintah yang bergerak tanpa regulasi, maka potensi terhukum menanti diujung.** Pertanyaan mendasarnya, kepada regulasi mana yang dijadikan dasar memperhatikan dan mengacu?? pertanyaan ini bukan untuk dibaca saja dan menjauhkan jawabnya! Pertanyaan ini mesti diajukan kepada pemerintah dan ditagih jawabnya agar kecurigaan terhadap penyimpangan berkenaan dengan pergerakan uang pemerintah tidak mengakibatkan kerugian atau mengakibatkan sebagian hak rakyat tidak terpenuhi untuk menerima pelayanan dari kehadiran pemerintah.

BAB VI

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana program dan kegiatan prioritas daerah, adalah bagian yang tidak terpisahkan yang penyusunannya memperhatikan batasan urusan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemeritahan Daerah. Sejalan dengan perubahan paradigma penganggaran “ money follow function kepada money follow program”, maka perlu dilakukan penjabaran secara operasional tentang program prioritas. Hal penting yang menjadi penekanan dalam perubahan paradigma tersebut, bahwa program prioritas wajib mendapat penguatan penganggaran, sehingga penganggaran untuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 merupakan rumusan penganggaran yang memiliki korelasi terhadap pembangunan daerah yang dimana penganggaran lebih fokus dan terarah kepada target capaian pembangunan daerah. Adapun penentuan program prioritas disusun berdasarkan :

- (1). Merupakan program prioritas pembangunan daerah Tahun 2021 sesuai dengan pentahapan tema RPJPD Provinsi Papua 2005-2025,
- (2). Merupakan program prioritas pembangunan daerah dalam rangka pencapaian Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2021 serta indikatornya.
- (3). Merupakan prioritas program ditingkat Perangkat Daerah yang berhubungan dengan permasalahan layanan dasar dan tugas/fungsi tiap Perangkat Daerah.

Pagu indikatif setiap program pembangunan dihitung berdasarkan capaian indikator program pembangunan yang dilakukan oleh tim penyusun RKPD,dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- (1). Menentukan rencana penggunaan kapasitas riil anggaran berupa alokasi belanja langsung dan belanja tidak langsung sebagaimana telah dihitung dalam perumusan kerangka pendanaan.
- (2). Menentukan keluaran/output setiap kegiatan.
- (3). Menghitung alokasi pagu dari setiap output kegiatan untuk setiap program.
- (4). Menghitung alokasi pagu setiap program setelah output kegiatan pada setiap program diverifikasi kebenarannya. Menghitung alokasi Perangkat Daerah berdasarkan program yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah. Elemen-elemen utama program prioritas memuat kegiatan yang akan

dilaksanakan, kerangka waktu pelaksanaan dan Perangkat Daerah yang bertanggungjawab. Program yang disusun harus dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan keterbatasan waktu, anggaran, kapasitas dan sumberdaya yang dimiliki daerah. Setiap program prioritas harus memiliki indikator kinerja yang jelas dan dapat diukur tingkat capaiannya. Pencapaian kinerja program merupakan akumulasi dari pencapaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan.

Program prioritas dan pagu indikatif yang telah ditetapkan untuk rancangan awal RKPD, disampaikan ke Perangkat Daerah sesuai program terkait beserta pagu indikatif untuk diproses lebih lanjut untuk mendapatkan kegiatan prioritas masing-masing program dimaksud. Dalam penyusunan prioritas kegiatan Perangkat Daerah juga memperhatikan kegiatan yang telah disusun dalam dokumen Renstra- Perangkat Daerah sehingga terjadi keselarasan dalam penyusunan program dan kegiatan yang telah disusun oleh Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah.

6.1 Program dan Kegiatan Prioritas RKPD Tahun 2021

Dalam mendukung pencapaian sasaran Prioritas Pembangunan, dirumuskan Program dan Kegiatan Prioritas RKPD Tahun 2020 untuk mendukung terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan pembangunan jangka menengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Papua Tahun 2019-2023. Program dan Kegiatan Prioritas pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Papua tahun 2021 yang telah disinkronkan dengan prioritas pembangunan nasional sebagaimana dijelaskan dalam Tabel 6.1 sebagai berikut :

Tabel. 6.1.

Program dan Kegiatan Prioritas RKPD Pemerintah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2021

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2021	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2021	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Target	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
<p>3. SDM berkualitas dan berdaya Saing; 4. Revolusi Mental dan Pembangunan kebudayaan</p>	<p>1. Peningkatan Kualitas SDM Dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar</p>	<p>1.1.1. Meningkatnya Aksesibilitas dan Mutu Penyelenggaraan Pendidikan; 1.1.2. Meningkatnya budaya baca pada masyarakat; 1.1.3. Sukses pelaksanaan PON dan prestasi olahraga; 1.1.4. Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah; 1.1.5. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat; 1.1.6. Meningkatkan ketersediaan pangan yang berkelanjutan; 1.2.1. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan sosial keagamaan; 1.2.2. Terwujudnya internalisasi nilai adat dan budaya asli Tanah Papua dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat</p>				

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2021	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2021	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Target	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
			Program Pendidikan Menengah Atas			
				Lomba Debat Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia dan Bahasa Jerman	100 Orang	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
				Honor Guru Kontrak SMA/SMK/SLB/PKPK	692 Orang	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
				Pelatihan Guru Bidang Studi SMA	300 Orang	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
				Pelatihan Kepala Tata Usaha Sekolah SMA	269 Orang	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
				DAK REGULER SMA	29 Lokasi	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
				pelatihan penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) SMA	269 Orang	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
				pelatihan penyusunan rencana kerja anggaran sekolah (RKAS) SMA	269 Orang	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
				pelaksanaan evaluasi diri sekolah (EDS) SMA	269 Sekolah	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
				Lomba Kompetensi Siswa SMA	269 Orang	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
				Lomba FLS2N SMA	100 Orang	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2021	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2021	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Target	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
				Lomba LCC 4 pilar SMA	100 Orang	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
				Lomba debat Bahasa Indonesia, Inggris dan Jerman SMA	100 Orang	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
				Lomba Adiwiyata SMA	29 Sekolah	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
				Lomba Karya Ilmiah siswa SMA	269 Orang	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
				Penyusunan Kurikulum Latihan Guru, Kepala Sekolah	269 %	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
			Program Pendidikan Non Formal			
				Rapat Koordinasi Tim Pengendali Percepatan Tuntas Buta Aksara Provinsi	100 Orang	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
			Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan			
				Pelaksanaan sertifikasi pendidik	220 Orang	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
				Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	200 Orang	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
				Penyediaan Bantuan Biaya MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran)	12 Kelompok	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2021	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2021	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Target	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
				Pembekalan dan Pengiriman Guru, Kepala Sekolah, Pengawas dan Tenaga Kependidikan Lainnya Yang Berprestasi dan Berdedikasi	145 Orang	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
				SERTIFIKASI GURU DAN PROGRAM KEAHLIAN SMK	600 Orang	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
				Magang Guru Produktif SMK	80 Orang	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
				Penguatan dan Sertifikasi Guru SMA/SMK/PKLG	384 Orang	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
				Workshop Musyawarah Kompetensi Kepala Sekolah SMA/SMK	40 Orang	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
				Pengembangan Sistem Pengendalian Disiplin dan Kinerja Guru TPP	385 Sekolah	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
				Pemetaan Guru dan Tenaga Kependidikan SMA/SMK/PKLG	87 Orang	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
			Program Manajemen Pelayanan Pendidikan			
				Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan	100 %	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
				Pelaksanaan Ujian Nasional dan Ujian Sekolah	100 %	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
				Peningkatan tenaga perencanaan dan ICT	12 %	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2021	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2021	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Target	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
				Pengelolaan PAK (pengelolaan angka kredit) guru, pengawas sekolah, dan pamong belajar	100 %	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
				Pengelolaan Personil, Pendanaan Prasarana dan Dokumen SMA SMK	269 Dokumen	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
				Pelayanan Terpadu Pendidikan	12 %	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
			Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus			
				Pembinaan dan Pengembangan PK/PLK	500 Orang	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
				Pembinaan Siswa SMANKOR Jayapura Mengikuti Kejuaraan	20 Orang	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
				Pengembangan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus	1 Unit	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
			Program Pendidikan Menengah Kejuruan			
				Lomba Ketrampilan Siswa (LKS-SMK)	100 Orang	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
				Lomba Debat Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia	100 %	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
				Penerapan dan Pelatihan MBS SMK	100 %	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2021	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2021	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Target	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
				TOT Penyusunan Kurikulum SMK	138 Orang	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
				Lomba O2SN SMK	100 Orang	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
				Lomba FLS2N SMK	100 Orang	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
				Lomba debat bahasa inggris dan indonesia	100 Orang	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
				Lomba Adiwiyata Mandala SMK	116 Sekolah	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
				Lomba Karya Ilmiah siswa SMK	138 Orang	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
				Lomba Keterampilan Siswa (LKS)	100 Orang	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
				Magang siswa produktif SMK	60 Orang	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
				Magang guru produktif SMK	100 Orang	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
				Praktek kerja industri siswa	100 Orang	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
				DAK Penugasan SMK	9600 Orang	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2021	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2021	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Target	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
				pelatihan penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) SMK	100 Orang	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
				pelatihan penyusunan rencana kerja anggaran sekolah (RKAS) SMK	100 Orang	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
				pelatihan manajemen berbasis sekolah (MBS) SMK	100 Orang	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
				Revitalisasi SMK	10 %	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
				Penyusunan Kurikulum Praktek Kerja Siswa SMA/SMK	200 %	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
			Program Obat dan Perbekalan Kesehatan			
				Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit	29 Kabupaten	Dinas Kesehatan
				Pengiriman dan Relokasi Obat buffer stok dan program provinsi ke Kab dan 14 titik terisolir	29 Kabupaten 29 Kabupaten	Dinas Kesehatan
				Pengadaan obat-obatan untuk program HIV/AIDS	21 Produk	Dinas Kesehatan
				Pengadaan Obat-obatan Program P2M	11 Produk	Dinas Kesehatan
				Pengadaan logistik Non Oat Provinsi Papua	4 Produk	Dinas Kesehatan
				Pengadaan reagen IMS Provinsi Papua	2 Produk	Dinas Kesehatan
				Pengelolaan Perbekalan Farmasi/Gudang Obat Buffer Stock Provinsi	1 Tahun	Dinas Kesehatan

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2021	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2021	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Target	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
				Bimbingan Teknis Kepada Sarana Penyalur Alat Kesehatan	60 Orang	Dinas Kesehatan
				Peningkatan Kapasitas SDM Kefarmasian di Apotek	35 Orang	Dinas Kesehatan
				Pengadaan Reagen Viral Load	1 Jenis	Dinas Kesehatan
				Pengadaan Logistik / RDT Malaria	1 Jenis	Dinas Kesehatan
				Penyediaan Dana Distribusi Obat, Vaksin dan Reagen dari Instalasi Farmasi Provinsi Ke IFK dan RS	29 Kabupaten	Dinas Kesehatan
				Pelatihan Pengelolaan obat sesuai standar bagi Pengelola Obat Instalasi Farmasi Kab/kota	50 Orang	Dinas Kesehatan
				Pelatihan Pengelolaan Obat sesuai standar bagi Pengelola Obat / Instalasi Farmasi Rumah Sakit Baru	29 Orang	Dinas Kesehatan
			Program Upaya Kesehatan Masyarakat			
				Peningkatan Pelayanan Medis Umum dan Masyarakat	500 Orang Bulan	Rumah Sakit Umum Daerah Abepura
				pelaksanaan Kartu Papua Sehat (KPS) Provinsi Papua	210 Orang 30 Orang Tahun 200000 Orang	Rumah Sakit Umum Daerah Abepura
			Program Pengembangan Obat Asli Indonesia			
				Pengembangan standarisasi tanaman obat bahan alam indonesia	12 Buah	Dinas Kesehatan
				Pengembangan Obat Asli Daerah	12 Jenis 60 % 12 Jenis	Dinas Kesehatan
				Workshop Obat Tradisional Berbasis Wilayah Adat	50 Orang	Dinas Kesehatan

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2021	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2021	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Target	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
				Penilaian Pemanfaatan TOGA	3 Dokumen 29 Orang 20 Kampung	Dinas Kesehatan
				KEGIATAN SENTRA P3T	2 Laporan	Dinas Kesehatan
				PELATIHAN AKUPRESSUR BAGI DOKTER	25 Orang	Dinas Kesehatan
				PELATIHAN AKUPRESSUR BAGI TENAGA MEDIS PUSKESMAS	26 Orang	Dinas Kesehatan
			Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat			
				Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	6 Kegiatan	Dinas Kesehatan
				Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	15 Jenis	Dinas Kesehatan
				Pengembangan Saka Bhakti Husada (SBH)	60 Orang	Dinas Kesehatan
				Pendataan Pengembangan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)	29 Dokumen	Dinas Kesehatan
				Pelatihan Promosi Kesehatan bagi petugas Kesehatan	29 Orang	Dinas Kesehatan
				Monitoring dan evaluasi program promosi dan pemberdayaan masyarakat di 5 Regional	29 Laporan	Dinas Kesehatan
				Advokasi dan sosialisasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	29 Kabupaten	Dinas Kesehatan
			Program Perbaikan Gizi Masyarakat			
				Pemberian tambahan makanan dan vitamin	1000 Orang	Dinas Kesehatan

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2021	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2021	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Target	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
				Pelatihan Surveillance Kewaspadaan Pangan, Gizi, Pemantauan Status Gizi di Daerah Bermasalah Kesehatan	87 Orang	Dinas Kesehatan
				Pertemuan pencatatan dan pelaporan program gizi	29 Kabupaten	Dinas Kesehatan
				Sosialisasi 1000 hari pertama Kehidupan	27 % 15 Kabupaten	Dinas Kesehatan
			Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular			
				Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit IMS-HIV/AIDS	450 Kasus 50 Orang	Dinas Kesehatan
				Pemberantasan penyakit DBD	85 % 50 Orang	Dinas Kesehatan
				Pemberantasan penyakit Malaria	220000 Kasus 95 %	Dinas Kesehatan
				Pemberantasan penyakit Filaria	90 % 2000000000 Orang	Dinas Kesehatan
				Pemberantasan Penyakit Diare	100 % 45000000 Orang	Dinas Kesehatan
				Pemberantasan Penyakit Kusta	29 Kabupaten 550000 Orang	Dinas Kesehatan
				Pemberantasan Penyakit Frambusia	40000 Orang 20 Kabupaten	Dinas Kesehatan
				Eradikasi Polio, reduksi Campak dan eliminasi Tetanus	20 Kasus 29 Kabupaten	Dinas Kesehatan
				Kolaborasi Penanganan Penderita TB-HIV/AIDS	100 Orang 100 %	Dinas Kesehatan
				Penanggulangan penyakit Taeniasis	15 Orang 15 Kabupaten	Dinas Kesehatan

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2021	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2021	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Target	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
				Peningkatan pelayanan Imunisasi di Provinsi dan Kabupaten.	10 Unit 29 Kabupaten	Dinas Kesehatan
				Peningkatan Manajemen program terpadu IMS,HIV/AIDS,TB & Malaria	50 Orang 29 Kabupaten	Dinas Kesehatan
				Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah	29 Kabupaten 29 Kasus	Dinas Kesehatan
				Penanggulangan penyakit TBC	80 %	Dinas Kesehatan
				Penanggulangan Penyakit Tidak Menular	29 Kabupaten 35 Orang	Dinas Kesehatan
				Penanggulangan Penyakit Hepatitis	29 Orang	Dinas Kesehatan
				Penguatan Kepemimpinan Program Tuberkulosis di Kab/Kota	22 Kabupaten	Dinas Kesehatan
				Peningkatan Akses layanan TBC yang bermutu dengan TOSS TBC	80 Persentase	Dinas Kesehatan
				Pengendalian Faktor Resiko Penularan TBC	21 Kabupaten	Dinas Kesehatan
				Peningkatan Kemitraan TB melalui Forum Kordinas TBC	21 Kabupaten	Dinas Kesehatan
				Peningkatan Kemandirian Masyarakat dalam Penanggulangan TBC	25 Persentase	Dinas Kesehatan
				Penguatan Sistem Manajemen Layanan TBC	100 Persentase	Dinas Kesehatan
				Pelatihan Konprehensip HIV	100 Orang	Dinas Kesehatan
				Pelatihan Layanan Tes HIV	100 Orang	Dinas Kesehatan
				Workshop Early Infant Diagnose	100 Orang	Dinas Kesehatan
				Pembinaan Teknis Program HIV ke Kab/Kota	29 Kabupaten	Dinas Kesehatan
				Dukungan Tatalaksana HIV/AIDS	240 Layanan	Dinas Kesehatan
				Pelatihan Mikroskopis Malaria	25 Orang	Dinas Kesehatan

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2021	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2021	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Target	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
				Pelayanan PME Malaria	5 Layanan	Dinas Kesehatan
				Pelayanan Kesehatan Penanggulangan Bencana	1400 Orang	Dinas Kesehatan
				Scalling Up Pencegahan, Diagnosis dan Tata Laksana Pengobatan Tepat Malaria	29 Orang	Dinas Kesehatan
				Penyusunan RAD Malaria	29 Dokumen	Dinas Kesehatan
				Assesment Pengendalian Vektor Malaria Terpadu	29 Dokumen	Dinas Kesehatan
				Workshop Tata Laksana Pengobatan Malaria	5 Orang	Dinas Kesehatan
				Workshop Elektronik Sistem Surveilans Malaria	4 Orang	Dinas Kesehatan
			Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata			
				Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit	50 Jenis 100 Unit	Rumah Sakit Jiwa
				Pengadaan Bahan Makanan untuk Penderita	200 Orang 200 Orang	Rumah Sakit Jiwa
				Pengadaan Bahan Habis Pakai Rumah Sakit	21 Jenis	Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura
			Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita			
				Peningkatan Kemampuan Bidan di Desa untuk pencegahan penularan HIV/AIDS dari ibu ke Janin	96 Orang	Dinas Kesehatan
				Peningkatan Kapasitas Tenaga dalam pencatatan dan pelaporan bagi pengelola data KIA	60 Orang	Dinas Kesehatan

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2021	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2021	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Target	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
				PMT 1000 hari Pertama Kelahiran	710000 Orang	Dinas Kesehatan
				Pelayanan bagi balita orang asli Papua	100 Orang	Dinas Kesehatan
			Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak			
				Pertolongan persalinan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu	50 Orang Kali	Dinas Kesehatan
				Penerapan MTBS /M	20 Orang	Dinas Kesehatan
				Perawatan secara berkala bagi ibu hamil bagi keluarga kurang mampu	29 Orang Kali	Dinas Kesehatan
				Pengadaan Alat, Bahan dan Obat dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak	10 Alat	Dinas Kesehatan
			Program Pembangunan Jalan dan Jembatan			
				Monitoring, evaluasi dan pelaporan	12 Laporan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial			
				Sosialisasi Penyalahgunaan Napza	60 Orang	Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)			
				Penanganan daerah rawan pangan	1 Dokumen 28 Lokasi	Dinas Pertanian dan Pangan
				Pengembangan cadangan pangan daerah	500 Ton	Dinas Pertanian dan Pangan

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2021	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2021	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Target	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
				Pengembangan desa mandiri pangan	8 Kampung	Dinas Pertanian dan Pangan
				Validasi/Update Data Ketahanan Pangan	2 Dokumen 2 Dokumen	Dinas Pertanian dan Pangan
				Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan	250 Kelompok	Dinas Pertanian dan Pangan
				Pengembangan Kelembagaan Keamanan dan Mutu Pangan Segar	5 Orang 15 Sampel 10 Sampel	Dinas Pertanian dan Pangan
				Pengembangan Distribusi dan Cadangan Pangan melalui Pola PUPM/TTI dan CPP	7 Unit	Dinas Pertanian dan Pangan
			Penyiapan Teknologi Informasi dan Komunikasi			
				Pembangunan Command Center PON XX	1 Unit	Dinas Komunikasi dan Informatika
				Pengadaan Media Center Utama PON XX	1 Website	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Program peningkatan peran serta kepemudaan			
				Pembinaan organisasi kepemudaan	50 Organisasi	Dinas Olah Raga dan Pemuda
				Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan	125 Orang	Dinas Olah Raga dan Pemuda
				Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan	100 Orang	Dinas Olah Raga dan Pemuda
				Pertukaran Pemuda antar Negara dan Provinsi	35 Orang	Dinas Olah Raga dan Pemuda
				Pembinaan PASKIBRAKA Provinsi dan Nasional	35 Orang	Dinas Olah Raga dan Pemuda

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2021	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2021	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Target	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
			Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda			
				Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda Menuju PON XX Tahun 2020 di Papua	25 Orang Kegiatan	Dinas Olah Raga dan Pemuda
			Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga			
				Peningkatan mutu organisasi dan tenaga keolahragaan	100 Orang Kegiatan	Dinas Olah Raga dan Pemuda
			Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga			
				Pelaksanaan identifikasi dan pengembangan olahraga unggulan daerah	750 Orang Lokasi	Dinas Olah Raga dan Pemuda
			Program Pengelolaan Keragaman Budaya			
				Festival Seni Kreasi Papua	800 Jenis	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
				Pesta Budaya Papua	5 Lembaga 29 Kelompok	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
				Pelatihan Kesenian di Kampung	50 Orang	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
			Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan			
				Kajian sistem administrasi kearsipan	1 Dokumen	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
			Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi			

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2021	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2021	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Target	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
				Peningkatan Pembinaan Kearsipan	52 SKPD 34 Kali	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
			Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan			
				Pengembangan Minat dan Budaya Baca	1 Orang Kali	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
				Penyediaan Bahan Pustaka Peprustakaan Umum dan Daerah	200 Buku	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
				Penyelenggaraan Peprustakaan Keliling	96 Kali 240 Kali	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
				Pendidikan dan Pelatihan Teknis/Manajemen Pengelola Perpustakaan	30 Orang	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
				Pemberdayaan dan Pengembangan Tenaga Fungsional Pustakawan	2 Orang	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
			Program Pengembangan Destinasi Pariwisata			
				Pelatihan pramuwisata selam		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
				Penyuluhan dan penguatan kelompok sadar wisata	50 Orang	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2021	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2021	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Target	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
7. Stabilitas Polhukhankam dan transformas pelayanan publik	2. Pemantapan Rasa Aman, Tentram Dan Kedewasaan Berdemokrasi	1.2.1. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan sosial keagamaan; 1.2.2. Terwujudnya internalisasi nilai adat dan budaya asli Tanah Papua dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat; 2.1.1. Meningkatnya penegakan HAM; 2.1.2. Meningkatnya suasana tertib, aman dan kepastian hukum; 2.1.3. Meningkatnya Keharmonisan dan kohesifitas masyarakat; 2.1.4. Meningkatnya Kebebasan Sipil, Hak-Hak Politik dan Lembaga Demokrasi				
			Program Pemeliharaan Kantratribmas dan Pencegahan Tindak Kriminal			
				Monitoring dan Evaluasi pelanggaran-pelanggaran Perda	6 Kabupaten	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah
				Pendidikan dan Latihan PPNS	5 Orang	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah
				Sosialisasi Perda / Perkada Provinsi Papua	100 Orang	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2021	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2021	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Target	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
3. SDM berkualitas dan berdaya Saing; 7. Stabilitas Polhukhankam dan transformas pelayanan publik	3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan	3.1.1. Meningkatnya kinerja Penyelenggaraan Otonomi Khusus Papua; 3.1.2. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik; 3.1.3. Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, dan pengendalian program, serta kegiatan pembangunan daerah; 3.1.4. Meningkatnya sistem akuntabilitas dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah				
			Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa			
				Pengembangan Aplikasi e-Government	8 Aplikasi	Dinas Komunikasi dan Informatika

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2021	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2021	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Target	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
1. Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan; 2. Pengembangan Wilayah untuk mengurangi Kesenjangan	4. Pemebrdayaan Ekonomi Masyarakat Dan Peningkatan Investasi	4.1.1. Mengembangkan pertanian modern di kampung-kampung guna menciptakan ketahanan pangan, peningkatan produktivitas wilayah, dan penurunan pengangguran; 4.1.2. Meningkatkan pembangunan ekonomi maritim dan kelautan yang berbasis pada pendayagunaan potensi sumberdaya secara berkelanjutan; 4.1.3. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan aksi mitigasi perubahan iklim; 4.1.4. Meningkatkan pengelolaan sumber daya kehutanan secara berkelanjutan; 4.1.5. Membangun struktur perekonomian yang kokoh berbasis pada penciptaan nilai tambah yang optimal dan berkelanjutan; 4.1.6. Mengoptimalkan peranan sektor pertambangan dalam mengatasi ketimpangan				

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2021	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2021	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Target	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
		pendapatan; 4.1.7. Meningkatnya daya saing tenaga kerja, kesempatan dan perluasan kesempatan kerja; 4.1.8. Meningkatnya daya saing dan realisasi investasi pada sektor-sektor andalan daerah; 4.2.1. Peningkatan akses transportasi berbasis antar moda dalam mendukung pengembangan ekonomi wilayah/daerah dan akses bagi seluruh wilayah; 4.2.2. Implementasi Rencana Tata Ruang secara konsisten				
			Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya			

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2021	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2021	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Target	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
				Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	10000 M	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Peningkatan Jaringan Irigasi	100 M	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Peningkatan Jaringan Rawa DIR Okaba		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Rehabilitasi Jaringan Irigasi DIR Okaba	17800 Meter	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Penyelenggaraan kelembagaan Komisi Irigasi di Provinsi Papua	3 Kegiatan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Peningkatan Jalan dan Jembatan			
				Peningkatan Jalan Berap - Nimbotong - Lereh - Tengon (110)	5 KM2	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Peningkatan Jalan Arso XIV - Sawia - kwarja (114)	13 KM2	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Peningkatan Jalan BTS Kota Merauke - Kumbe - Bian - Okaba (185), 88,05 Km	9 KM2	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2021	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2021	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Target	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
				Peningkatan Jalan Koya Tengah	1 KM2	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Peningkatan Jalan Sumberbaba - Dawai (060) 24,00 Km	8 Km	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Peningkatan Jalan Walelagama - Siepkosi	5 Km	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Peningkatan Jalan Taja - SP V - Kwarja	14 Km	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Peningkatan Jalan Kenyam - Bandara Baru	4 Km	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Program Peningkatan Kesempatan Kerja			
				Pamerran Bursa Tenaga Kerja (JOB FAIR) Provinsi Papua	40 Perusahaan	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
				Perluasan Kerja melalui sistem Padat Karya Produktif	3 Orang	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
				Penyebarluasan Informasi Pasar Kerja (IPK) di 20 Kab/Kota	15 Kabupaten	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2021	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2021	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Target	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
			Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah			
				Pengembangan UMKM Pengelola sumber daya Lokal	100 UMKM	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
				Pelatihan Kewirausahaan Berbasis Potensi Lokal Bagi UMKM	180 Orang	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
				Penguatan Usaha Ekonomi Produktif UKM Melalui Sarana Produksi Berbasis Komoditi Unggulan Daerah	30 Kelompok	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
				Pelatihan Manajemen bagi Usaha Kecil	200 Orang	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
			Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah			
				Pengembangan sarana pemasaran produk Usaha Mikro Kecil Menengah	1 Unit	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
				Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah	30 Orang	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
				Pengembangan Kebijakan dan program peningkatan ekonomi lokal	3 Orang	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2021	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2021	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Target	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
				Partisipasi Pameran Gelar Produk KUKM di SMESCO	10 Orang	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
			Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi			
				Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi	30 Unit	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
				Identifikasi Keragaman Koperasi	75 Unit	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
				Pengawasan dan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	75 Orang	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
				Monitoring dan Pengawasan Koperasi Aktif	145 Unit	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
				Bimtek tata cara pendirian koperasi	120 Unit	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
			Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi			
				Peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antar usaha besar dan Usaha Kecil Menengah	2	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				Pengembangan potensi unggulan daerah	1 Wilayah 2	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2021	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2021	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Target	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
			Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan			
				Pengawasan dan Pemantauan Kawasan Konservasi	1 Dokumen	Dinas Kelautan dan Perikanan
				Pembinaan Kelompok Sistem Pengawas Masyarakat	60 Kelompok	Dinas Kelautan dan Perikanan
				Pengadaan Speed Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (DAK)	1 Unit	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Program pengembangan budidaya perikanan			
				Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan	100 Kelompok	Dinas Kelautan dan Perikanan
				Pembinaan dan pengembangan perikanan	100 Orang	Dinas Kelautan dan Perikanan
				Bantuan sarana produksi kolam/karamba masyarakat	100 Kelompok	Dinas Kelautan dan Perikanan
				Bantuan Saprodi Kepada Pembudidaya Bandeng	10 Kelompok	Dinas Kelautan dan Perikanan
				Pencetakan Kolam Dengan Alat Berat Becho	30 Kolom	Dinas Kelautan dan Perikanan
				Optimalisasi Lahan Usaha Pembudidaya Pemula	100 Kelompok	Dinas Kelautan dan Perikanan
				Bantuan Bibit Ikan dan Pakan kepada Pembudidaya Air Tawar	100 Kelompok	Dinas Kelautan dan Perikanan
				Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudidaya Ikan	25 Kelompok	Dinas Kelautan dan Perikanan
				Pengadaan Sarana Produksi Keramba Jaring Apung untuk Pembudidaya Ikan	5 Kelompok	Dinas Kelautan dan Perikanan

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2021	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2021	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Target	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
				Pengembangan Calon Induk Ikan Unggul	10000 Ekor	Dinas Kelautan dan Perikanan
				Pengembangan Budidaya Rumput Laut	30 Kelompok	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Program Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap			
				Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap	50 Kelompok	Dinas Kelautan dan Perikanan
				Pengembangan lembaga usaha perdagangan perikanan tangkap	20 Kelompok	Dinas Kelautan dan Perikanan
				Pelatihan Penangkapan Ikan	50 Kelompok	Dinas Kelautan dan Perikanan
				Pelatihan Mesin Motor Perikanan	25 Orang	Dinas Kelautan dan Perikanan
				Pelatihan Pembuatan Rumpon	20 Kelompok	Dinas Kelautan dan Perikanan
				Bantuan Sarana Penangkapan Ikan (Rumpun)	6 Kelompok	Dinas Kelautan dan Perikanan
				Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Periaran Pedalaman	2 Wilayah	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan			
				Pelatihan Penyuluh Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua	25 Orang	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar			
				Pengadaan Sarana Produksi Keramba Jaring Apung untuk Pembudidaya Ikan	1 Unit	Dinas Kelautan dan Perikanan

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2021	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2021	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Target	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
			Program Peningkatan Mutu Produksi Nelayan, Pengelolaan dan Pemasaran			
				Pembangunan Cold Storage di Sentra-Sentra Nelayan	1 Unit	Dinas Kelautan dan Perikanan
				Pembinaan Mutu Produksi Perikanan	10 Kelompok	Dinas Kelautan dan Perikanan
				Pelatihan Pengolahan hasil perikanan	25 Kelompok	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)			
				Pengembangan Kawasan Lahan Pertanian Pangan Pokok Berkelanjutan dan GRK	5 Lokasi 5 Laporan	Dinas Pertanian dan Pangan
				Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman Pangan dan Hortikultura	500 Ha	Dinas Pertanian dan Pangan
				Pengembangan Laboratorium Pegamat hama dan penyakit	1 Unit	Dinas Pertanian dan Pangan
				Pengembangan Pupuk dan Alsintan Pertanian	12 Kegiatan	Dinas Pertanian dan Pangan
				Pengembangan Balai Benih Palawija	2 Unit 1500 Ha	Dinas Pertanian dan Pangan
				Pengembangan Balai Benih Hortikultura	5000 Kegiatan 1 Unit	Dinas Pertanian dan Pangan
				Pengembangan Kebun Bibit Hortikultura	1 Kegiatan 3000 Kegiatan 1 Unit	Dinas Pertanian dan Pangan

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2021	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2021	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Target	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
				Pengembangan Produksi Benih Tanaman Pangan	50 Kali 50 Ha 50 Ha	Dinas Pertanian dan Pangan
				Pengembangan Produksi Benih Hortikultura	5000 Ha 5 Ha	Dinas Pertanian dan Pangan
				Pengembangan Laboratorium Benih	1 Unit 6 Kabupaten	Dinas Pertanian dan Pangan
				Pengembangan Balai Benih Padi	25 Ha 2 Unit	Dinas Pertanian dan Pangan
				Peningkatan Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura	12 Kabupaten	Dinas Pertanian dan Pangan
			Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan			
				Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	50 Unit 2 Unit	Dinas Pertanian dan Pangan
			Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan			
				Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan	100 Orang	Dinas Pertanian dan Pangan
				Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan	500 Unit	Dinas Pertanian dan Pangan
				Pengembangan sistem data dan informasi penyuluhan pertanian	7 Unit	Dinas Pertanian dan Pangan
			Program peningkatan produksi hasil peternakan			
				Pembibitan dan perawatan ternak	400 Kegiatan 45000 Kg	Dinas Pertanian dan Pangan
				Pengembangan agribisnis peternakan	2500 Lokasi 300 Ekor	Dinas Pertanian dan Pangan

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2021	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2021	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Target	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
				Pengembangan sarana dan prasarana produksi ternak	15 Unit 1 Unit	Dinas Pertanian dan Pangan
				Pengembangan ternak besar	500 Kelompok	Dinas Pertanian dan Pangan
			Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan			
				Peningkatan kinerja pemanfaatan hasil hutan Kayu	20 Perusahaan	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
				Pemetaan Partisipatif Masyarakat Adat Pemilik Hak Ulayat	2 Lokasi	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
				Pengembangan Usaha Pemanfaatan Kayu Masyarakat Hukum Adat	10 Kelompok 10 Unit	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
				Pengembangan Industri Kayu Masyarakat Hukum Adat	5 Unit	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
			Program rehabilitasi hutan dan lahan			
				Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan	4 Kegiatan 6 Kelompok	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
				Pengembangan perbenihan tanaman hutan	2 Ha 2 Lokasi 2 Ha	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
				Pengembangan kawasan hutan mangrove	60 Hektar	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
				Pengembangan Aneka Usaha Kehutanan	10 Kelompok	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
				Pengembangan Persemaian Tanaman hutan	100000 Bibit	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
				Pengembangan area sumber daya genetik	2 Lokasi	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
			Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan			

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2021	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2021	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Target	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
				Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak perusakan hutan	5 Kelompok	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
				Pengelolaan wisata alam di kawasan konservasi	5 Unit	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
				Pengelolaan Taman Burung dan Taman Anggrek (TBTA) Biak	1 Persentase	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
				Pengembangan Wisata di TBTA Biak	1 Kegiatan	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Ekowisata	1 Unit	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelengkap Kebun Raya Koya Koso	2 Unit	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
			Pengembangan & Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan			
				Kegiatan Survey dan Perencanaan Teknis Potensi Tenaga Air	5 Dokumen	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
				Kegiatan Survey dan Perencanaan Teknis Potensi Tenaga Surya	5 Dokumen	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
				Kegiatan Revitalisasi PLTMH / PLTS	3 Unit	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
				Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS)	50 Unit	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
			Program Pengembangan ESDM			
				Kegiatan Pengembangan Energi Listrik	10 Unit 10 Laporan	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
			Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri			

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2021	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2021	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Target	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
				Pengembangan pasar dan distribusi barang / produk	2 Unit	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
				Pengembangan kelembagaan kerjasama kemitraan	2 Kelompok	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
			Pengembangan industri kecil dan menengah			
				Peningkatan produk buah merah	1 Kelompok	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
				Pengembangan kopi di wilayah pegunungan	15 Kelompok	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
				Pengembangan teknologi Pengolahan buah merah	10 Kelompok	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
			Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah			
				Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri	1 Kelompok 1 Kelompok 10	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2021	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2021	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Target	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
2. Pengembangan Wilayah untuk mengurangi Kesenjangan; 5. Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar	5. Pemantapan Infrastruktur Dasar Dan Pemerataan Pembangunan Yang Berkelanjutan	4.2.3. Meningkatnya Ketersediaan sistem pengairan yang mendukung produktivitas wilayah; 4.2.4. Meningkatnya Pemenuhan perumahan layak huni dan penataan pemukiman; 4.2.5. Meningkatnya ketersediaan energi murah dan energi baru terbarukan; 5.1.1. Meningkatnya kualitas pembangunan berbasis kampung; 5.1.2. Meningkatnya efektivitas upaya pemenuhan kebutuhan dasar bagi OAP; 5.1.3. Meningkatnya percepatan pembangunan wilayah-wilayah perbatasan; 5.1.4. Meningkatnya pemberdayaan terhadap KAT dan bantuan sosial PMKS; 5.1.5. Meningkatnya kapasitas ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana melalui upaya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana;				

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2021	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2021	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Target	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
		5.1.6. Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan daerah dan Upaya Perlindungan anak				
			Program Pendidikan Menengah Atas			
				DAK FISIK AFIRMASI	29 Orang	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
			Program Pembangunan Jalan dan Jembatan			

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2021	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2021	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Target	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
				Pembangunan Jalan Usku - Kesnar (115), 75 km	6 Km	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Pembangunan Jalan Burmeso - Gesa - Barapasi (118), 194,60 Km	30 Km	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Pembangunan Jalan Burmeso - Sikari (119)		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Pembangunan Jalan Keppi - Bade (181)	10 Km	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Pembangunan Jalan Kobakma - Megambilis (120), 112 Km	75 KM2	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Pembangunan Jalan Nume - Tiom	4 KM2	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Pembangunan Jalan Wamena- Sekan- Apalapsilii - Elelim	16 KM2 1 Km	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Pembangunan Jalan Ansus - Wooi/Natabui	3 Km	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2021	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2021	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Target	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
				Pembangunan Jalan Elelim (Yalimo) - Apalapsili - Anggruk (Yahukimo)	13 Km	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Pembangunan Jembatan Kali Kabu	1818 Meq	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Pembangunan Jembatan Toli 2	153 Meq	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Pembangunan Jembatan Sepa (80 M) (Ruas Jalan Elelim - Kobakma)	78 Meq	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Pembangunan Jalan Ninati - Yetetkun	2 Km	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Pembangunan Jalan Oksibil - Tarup - Denomngatupbin	16 Km	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Pembangunan Jalan Pattipi - Suator	2 Km	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Pembangunan Jalan dan Jembatan Prov Papua	30 Km	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2021	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2021	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Target	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
				Pembangunan Jembatan Kali Yungme	15 Meq	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Pembangunan Jembatan Kali Wollo	25 Meq	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Pembangunan Jembatan Gantung Kali Yugu Nemba	20 Meq	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Pembangunan Jembatan Kali Baliem Distrik Beam	25 Meq	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Pembangunan Jembatan Kali Mugi	40 Meq	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Pembangunan Jembatan Kali Hunen	30 Meq	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Pembangunan Jembatan Kali Libuk	30 Meq	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Pembangunan Jembatan Kali Wasile	30 Meq	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2021	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2021	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Target	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
				Pembangunan Jembatan Kali Weth	30 Meq	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Pembangunan Jembatan Kali Kayo	30 Meq	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Pembangunan Jembatan Kali Yesuke	30 Meq	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Pembangunan Jembatan Gantung Kali Baliem Distrik Negeyagin	200 Meq	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Pembangunan Jalan Fly Over Waena - Abepura (Segmen 1)	2 Km	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Pembangunan Jalan Fly Over Abepura - Kotaraja - Sky Line (Segmen 2)	2 Km	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Pembangunan Jalan Fly Over Abepura - T. Hitam (Segmen 3)		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Pembangunan Jalan Wamena - Yomote - Anggruk- Dekai	16 Km	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2021	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2021	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Target	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
				Pembangunan Jalan Gunung Susu - Sawarek- Wetalak - Wemanesili	6 Km	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Pembangunan Jalan Yamoneri - Jigemili	7 Km	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Pembangunan Jalan Beton Lingkar Asmat	2 Km	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Pembangunan Jalan Wangbe - Ogamaning	16 Km	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Pembangunan Jalan Gupura - Guna	3 Km	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Pembangunan Jembatan Kali Bumi Bawah	40 Meq	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Pembangunan Jalan Tiom - Jugunggi	3 Km	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Pembangunan Jembatan Kali Ilu (Distrik Ilugga)	40 Meq	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2021	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2021	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Target	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
				Pembangunan Jalan Mugi - Werima - Soba	4 Km	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Pembangunan Jalan Kanggime - Kambu (Mamit) - Umagi - Dou	10 Km 2 Km	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Pembangunan Jalan Obano - Uwebutu (Duntek - Munayepa/Iyei)	2 Km 5 Km	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Pembangunan Jembatan Kertosari IV B	2 Unit 909 Meq	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Pembangunan Jembatan Sirum (Raus Jalan Nimbotong - Lereh - Tengon)	1818 Meq	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Pembangunan Jembatan Nganhose (Raus Jalan Nimbotong - Lereh - Tengon)	1818 Meq	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Pembangunan Jembatan Hewa II (Raus Jalan Nimbotong - Lereh - Tengon)	1818 Meq	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Pembangunan Jembatan Kali Mugun	153 Meq	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2021	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2021	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Target	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
				Pembangunan Jembatan Nanifokei (Ruas Jalan Botawa - Koweda - Barapasi)	2727 Meq	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Pembangunan Jembatan Minaworuf (Ruas Jalan Serui - Menawi - Sumberbaba)	1818 Meq	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan			
				Pemeliharaan Jalan Wamena - Temia - Wogi (162)	6 Km	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Program penyediaan dan pengolahan air baku			
				Operasi dan Pemeliharaan. Jaringan Air Baku Kab. Biak Numfor	50 M	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Operasi dan Pemeliharaan. Jaringan Air Baku Kab. Waropen	50 M	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Pembangunan infrastruktur air baku di Kabupaten Kabupaten Supiori	1 Dokumen 50 M	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Pembangunan Infrastruktur Air Bersih/Baku Kabupaten Nduga	5 Lt/dtk	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2021	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2021	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Target	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
				Pembangunan Infrastruktur Air Baku di Kabupaten Biak Numfor	5 liter/detik	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Pembangunan Jaringan Air Bersih di Kabupaten Waropen	5 liter/detik	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Pembangunan Infrastruktur Air Baku di Kabupaten Kep. Yapen	5 liter/detik	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Pembangunan Infrastruktur Air Baku di Kabupaten Nabire	5 liter/detik	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Pembangunan Infrastruktur Air Baku di Kabupaten Paniai	5 liter/detik	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Pembangunan Infrastruktur Air Baku di Kabupaten Deiyai	5 liter/detik	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Pembangunan Infrastruktur Air Baku di Kabupaten Intan Jaya	5 liter/detik	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Pembangunan Infrastruktur Air Baku di Kabupaten Mimika	5 liter/detik	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2021	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2021	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Target	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
				Pembangunan Infrastruktur Air Baku di Kabupaten Asmat	5 liter/detik	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Perencanaan Infrastruktur Air Baku di Provinsi Papua	15 Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Program pengendalian banjir			
				Normalisasi Kali Holima	200 Meter	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Normalisasi Kali Kulagaima	200 Meter	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Pembangunan Pengaman Pantai Waren 1	200 M	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Pembangunan Pengaman Pantai Mambui	200 M	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Pembangunan Pengaman Pantai Paradoi	200 M	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Pembangunan Pengaman Pantai Nubuai	200 M	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2021	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2021	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Target	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
				Pembangunan Pengaman Pantai Pulau Nau	200 M	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Peningkatan Jalan dan Jembatan			
				Peningkatan Jalan Waren - Botawa - Sumiangga (126)		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Peningkatan Jalan Bolakme - Kelila - Bokondini (167) (61,5 Km)	83 Km	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Peningkatan Jalan SP II - Napan	5 Km	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Peningkatan Jalan Arimbet - Bukit - Ujung - Manggelum (164) 43.00Km	18 Km	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Peningkatan Jalan Kanggime - Mamit	5 Km	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Peningkatan Jalan Wamena - Temia - Wogi	3 Km	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Peningkatan Jalan dan Jembatan di Prov. Papua	15 Km	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2021	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2021	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Target	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
				Peningkatan Jalan Tiom- Iringgambut - Indawa	10 Km	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Peningkatan Jalan Nabire - Waroki - Karadiri (Bandara Baru)	3 Km	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Peningkatan Jalan Elelim - Kobakma	10 Km	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Peningkatan Jalan Mur - Keppi	8 Km	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Peningkatan Jalan Jalan Arso PIR II	15 Km	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Peningkatan Jalan Muai - Musatfak - Silo - Soekarno Doga	4 Km	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Peningkatan Jalan Melagaineri - Kuyawage	4 Km	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Peningkatan Jalan Melagaineri - Wabiragi	3 Km	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2021	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2021	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Target	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
				Peningkatan Jalan Kaugapu - SP V	5 Km	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Peningkatan Jalan Kurima - Tangma - Uka	3 Km	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Peningkatan Jalan Tiom - Gimbuk	3 Km	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Program Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan			
				Pengembangan Sistem Informasi Multimedia	1 Sistem	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Pengelolaan Data Dasar Bidang Ke-PU-an	1 Data	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Program Pengembangan Perumahan			
				Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Biak Numfor	7 Unit	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Supiori	5 Unit	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2021	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2021	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Target	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
				Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Kepulauan Yapen	10 Unit	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Waropen	5 Unit	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Nabire	10 Unit	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Paniai	10 Unit	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Dogiai	7 Unit	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Intan Jaya	9 Unit	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Deiyai	10 Unit	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Jayawijaya	20 Unit	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2021	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2021	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Target	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
				Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Puncak Jaya	15 Unit	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Lanny Jaya	7 Unit	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Puncak	17 Unit	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Nduga	10 Unit	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Mamberamo Tengah	30 Unit	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Yalimo	6 Unit	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Yahukimo	5 Unit	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Mimika	10 Unit	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2021	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2021	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Target	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
				Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Asmat	7 Unit	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Mamberamo Raya	19 Unit	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Sarmi	10 Unit	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Merauke	10 Unit	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Pegunungan Bintang	7 Unit	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Jayapura	12 Unit	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Tolikara	15 Unit	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kota Jayapura	15 Unit	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan			

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2021	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2021	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Target	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
				Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1 Dokumen	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
			Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup			
				Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura	4 Kabupaten	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
				Pengawasan Lingkungan Hidup	15 Perusahaan	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
				Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Air Sungai di Provinsi Papua	7 Kabupaten	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
				Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Udara Ambien	6 Kabupaten	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
				Validasi KLHS	7 Dokumen	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
			Program Mitigasi dan Adaptasi Dampak Perubahan Iklim			
				Identifikasi Gas Rumah Kaca	5 Kabupaten	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
				Pengolahan Sampah di Kab/kota (Pilot Project)	2 Unit 40 Unit	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
				Kampung Iklim Kabupaten/Kota di Provinsi Papua	10 Kampung	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
				Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	1 Dokumen	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
			Program Pengembangan data/informasi			

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2021	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2021	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Target	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
				Sosialisasi Mekanisme dan Tahapan Pembentukan Kampung Adat di 5 Wilayah Adat	100 Orang	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua
			Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan			
				Penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) tingkat Provinsi dan Nasional	1000 Orang	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua
			Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan			
				Rapat Konsultasi Tim Penggerak PKK Tingkat Provinsi dan Nasional	500 Orang	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua
				Kunjungan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Papua	29 Kabupaten	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua
			Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan			
				Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	22 Dokumen	Dinas Perhubungan
				Penyusunan UKL/UPL Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B di Kabupaten Keerom	1 Dokumen	Dinas Perhubungan
				Penyusunan UKL/UPL Pembangunan Pelabuhan Perintis Tagemon di Kabupaten Mappi	1 Dokumen	Dinas Perhubungan
				Penyusunan Sistem Informasi Infrastruktur Perhubungan	1 Aplikasi	Dinas Perhubungan
				Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan di Kabupaten Kepulauan Yapen	2 Dokumen	Dinas Perhubungan

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2021	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2021	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Target	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
				Studi Pemilihan Lokasi dan DED Dermaga Danau di Kabupaten Paniai	2 Dokumen	Dinas Perhubungan
				Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan di Kabupaten Waropen	1 Dokumen	Dinas Perhubungan
				Master Plan Pengembangan Transportasi Sungai Nawa Kabupaten Mamberamo Raya	2 Dokumen	Dinas Perhubungan
				Penyusunan Amdal Pelabuhan Teba dan Trimoris di Kabupaten Mamberamo Raya	2 Dokumen	Dinas Perhubungan
				Penyusunan UKL/UPL	3 Dokumen	Dinas Perhubungan
				Penyusunan RTT Sisi Udara dan Sisi Darat Pembangunan Bandar Udara	4 Dokumen	Dinas Perhubungan
				Penyusunan Peta Sebaran Fasilitas Perhubungan di Provinsi Papua	3 Dokumen	Dinas Perhubungan
				Penyusunan RTT Lapter Amuma di Kabupaten Yahukimo	1 Dokumen	Dinas Perhubungan
				Penyusunan RTT Lapter Sella di Kabupaten Yahukimo	1 Dokumen	Dinas Perhubungan
				Penyusunan UKL/UPL Pembangunan Pelabuhan Rakyat Samber di Kabupaten Biak Numfor	1 Dokumen	Dinas Perhubungan
				Penyusunan UKL/UPL Pembangunan Pelabuhan Rakyat Sanggei di Kabupaten Waropen	1 Dokumen	Dinas Perhubungan
				Penyusunan UKL/UPL Pembangunan Pelabuhan Rakyat Windesi di Kabupaten Kepulauan Yapen	1 Dokumen	Dinas Perhubungan
				Penyusunan Amdal Pelabuhan Pepera di Kabupaten Asmat	1 Dokumen	Dinas Perhubungan
				Penyusunan Amdal Pelabuhan Prabu Alaska di Kabupaten Boven Digoel	1 Dokumen	Dinas Perhubungan

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2021	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2021	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Target	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
				Penyusunan RTT Sisi Udara dan Sisi Darat Pembangunan Lapangan Terbang Kampung Bella di Kabupaten Mimika	2 Dokumen	Dinas Perhubungan
				Penyusunan RTT Sisi Udara dan Sisi Darat Pembangunan Lapangan Terbang Kampung Hoya di Kabupaten Mimika	2 Dokumen	Dinas Perhubungan
			Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ			
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan LLAJ	80 Unit Tahun 80 Bh	Dinas Perhubungan
				Rehabilitasi/Pemeliharaan Lampu APILL	2 Unit	Dinas Perhubungan
			Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan			
				Pembangunan Pelabuhan Laut Waren di Kabupaten Waropen	160 M1 72 Titik 160 Unit	Dinas Perhubungan
				Pembangunan Pelabuhan Perintis Pulau Mambor di Kabupaten Nabire	18 Titik 360 M2	Dinas Perhubungan
				Pembangunan Pelabuhan Perintis Bomakia di Kabupaten Boven Digoel	38 Titik 1 Unit	Dinas Perhubungan
				Pembangunan Pelabuhan Perintis Ampimoi di Kabupaten Kepulauan Yapen	60 Unit 60 Titik 200 M1	Dinas Perhubungan
				Pembangunan Bandar Udara Mamit di Kabupaten Tolikara	600 M1	Dinas Perhubungan
				Pembangunan Bandar Udara Fawi di Kabupaten Puncak Jaya	600 M1 1 Unit	Dinas Perhubungan
				Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B di Kabupaten Keerom	400 M1	Dinas Perhubungan

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2021	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2021	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Target	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
				Pembangunan Dermaga Sungai Sipu-Sipu Distrik Jita di Kabupaten Mimika	50 M2 100 M2	Dinas Perhubungan
				Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B di Kabupaten Jayawijaya	875 M2 400 M1 400 M1	Dinas Perhubungan
				Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B di Kabupaten Merauke	500 M1	Dinas Perhubungan
				Pembangunan bandar Udara Kuyawage di Kabupaten Lanny Jaya	600 M1	Dinas Perhubungan
				Pembangunan Pelabuhan Laut Depapre	200 M1	Dinas Perhubungan
				Pembangunan Bandar Udara Kasonaweja Baru (Weri Bilasi) di Kabupaten Mamberamo Raya	600 M1 200 M2 1200 M2 400 M3	Dinas Perhubungan
				Pembangunan Dermaga Danau Bunauwo di Kabupaten Dogiyai	250 M2	Dinas Perhubungan
			Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas			
				Survey Data Kendaraan dan Fasilitas Keselamatan Jalan di Provinsi Papua	1 Dokumen	Dinas Perhubungan
			Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor			
				Penyusunan PEP RAD-GRK dan Inventarisasi Emisi GRK sektor Transportasi	1 Dokumen	Dinas Perhubungan
			Program Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur Perhubungan			
				Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur Perhubungan	1 Laporan	Dinas Perhubungan

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2021	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2021	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Target	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
	99. RAKORTEK (BELUM DIKAITKAN DENGAN PRIORITAS DAERAH)					
			Program Pendidikan Menengah Atas			
				Penyediaan Bantuan Biaya Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA di lima wilayah adat	29 Orang	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
			Program Manajemen Pelayanan Pendidikan			
				Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan	5 %	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
				Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan	100 %	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
				Sosialisasi dan advokasi berbagai peraturan pemerintah di bidang pendidikan	100 %	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
				Lomba KIHAJAR Tk. Provinsi dan Nasional	100 %	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
				Pengembangan Website Pendidikan	100 %	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
				Supervisi dan Monitoring PBM di Sekolah	100 %	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
				Biaya Operasi Sekolah	360 Sekolah	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2021	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2021	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Target	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
				Penyediaan Biaya Penyelesaian Aset Sekolah (P3D)		Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
			Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus			
				Makan dan Minum Siswa SMA N 3 dan SMANKOR	455 Orang	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
				Biaya Operasional KPG,SMA N 3 Buper dan SMA N Keberbakatan Olahraga	5 Sekolah	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
				Pelaksanaan Lomba FLSN, O2SN Gebyard dan Pramuka SLB	100 Orang Kegiatan	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
				penyediaan biaya operasional PAUD bahasa ibu Paud Model di 10 lembaga	10 Sekolah	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
				Fasilitasi lomba O2SN SD tk Provinsi	100 Orang	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
				Fasilitasi Lomba OSN SMP tk Provinsi	100 Orang	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
				pengadaan peralatan latihan dan bertanding 8 CABOR untuk siswa SMANKOR	50 Alat	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
			Program Obat dan Perbekalan Kesehatan			
				Monitoring pemanfaatan buffer stock di GFK/RS/PKM dan pos obat kampung serta evaluasi hasil magang tenaga GF kab/kota	29 Kabupaten	Dinas Kesehatan
				Pengadaan obat buffer stock provinsi	87 Produk	Dinas Kesehatan

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2021	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2021	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Target	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
			Program Pengawasan Obat dan Makanan			
				Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya	50 Sekolah 5 Kali	Dinas Kesehatan
			Program Pengembangan Obat Asli Indonesia			
				Sosialisasi Asman TOGA, Akupresur bagi Dosen dan Mahasiswa di P.T Kesehatan	36 Orang	Dinas Kesehatan
			Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat			
				Penyebarluasan informasi melalui media masa	15 Jenis	Dinas Kesehatan
			Program Perbaikan Gizi Masyarakat			
				Monitoring, evaluasi dan pelaporan Perbaikan gizi masyarakat	29 Laporan	Dinas Kesehatan
			Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular			
				Pertemuan asistensi kejadian ikutan pasca Imunisasi (KIPI)	35 Orang 29 Kabupaten	Dinas Kesehatan
				Peningkatan Pengendalian dan Pencegahan ISPA di Wilayah Regional	80 Orang 29 %	Dinas Kesehatan
				Monev Terpadu (AIDS,TB,Malaria)	1 Kali 50 Orang	Dinas Kesehatan
				Peningkatan Pelayanan Pengamatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	29 Kabupaten	Dinas Kesehatan
			Program Pembangunan Jalan dan Jembatan			

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2021	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2021	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Target	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
				Pembangunan Jembatan Wosi (100 M") (Wosi - Wogi - Kimbim)	23 Meq	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Pembangunan Jembatan Kali Bian	200 Meq	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Pembangunan Jembatan Kali Kapare	50 Meq	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Pembangunan Jembatan Kali Aparuka	50 Meter	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Pembangunan Jalan Panaga - Taive	13.5 KM2 5 Km	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Pembangunan Jalan Eragayam - Kobakma	16 KM2 5 Km	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Pembebasan Lahan Jalan Bonggrang - Depapre	250000 M2	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Pembangunan Jembatan Demba I (60 M") (Botawa - Koweda - Barapasi (128))	58 Meq	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2021	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2021	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Target	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
				Pembangunan Jembatan Linggua (Ruas Keppi - Bade)	45 M ³	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				'Pembangunan Jalan Jagebob XIII - Bupul (STR.P)	5 KM2 5 Km	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Pembangunan Jembatan Aga I (Enarotali - Sugapa)	33 Meq	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Pembangunan Jembatan Aga II (Enarotali - Sugapa)	33 Meq	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Pembangunan Jembatan Kimi bawah (di ruas jalan Samabusa - Nabarua Bawah)	30 Meq	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Pembangunan Jalan Muliama-Wame-Makki	11 KM2 1 Km	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Pembangunan Jalan Oksibil - Borme	16 KM2	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Pembangunan Jembatan Aikima Atas (40 M") (Aikima - Siepkosi)	2308 Meq	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2021	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2021	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Target	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
				Pembangunan Jembatan Aikima Bawah (40 M") (Aikima - Siepkosi)	40 Meq	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Pembangunan Jalan Wamena - Pugima - Mugi	2 Km	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Pembangunan Jalan Kurima-Tangma-Uka	4 Km	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Pembangunan Jembatan Bogonuk (40 M) (Ruas Kanggime - Bogonuk)	153 Meq	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Pembangunan Jembatan Kali Kulugi (Ruas Wamena - Kurima - Tangma)	40 Meq	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Pembangunan Jembatan Kali Melage (Ruas Wamena - Kurima - Tangma)	40 Meq	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Pembangunan Jembatan Kali Kut (Ruas Wamena - Kurima - Tangma)	40 Meq	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Pembangunan Jembatan Kali Jetmi (Ruas Wamena - Kurima - Tangma)	40 Meq	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2021	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2021	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Target	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
				Pembangunan Jembatan Asset di Ruas Jalan Kepi-Bade	36 M ³	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Pembangunan Jembatan Sumbui (Serui - Ansus)	1818 Meq	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Pembangunan Jalan Legare - Samabusa	6 Km	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Pembangunan Jembatan Kawa (Berap - Nimbotong - Lereh - Tengon (110)	40 Meq	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Pembangunan Jembatan Yamuneri (Illu - Tiom)	58 Meq	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Pembangunan Jembatan Yali (Ruas Jalan Elelim (Hulikma)-Witlango-Kobakma (149)	2307 Meq	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Pembangunan Jembatan Ogotho (Ruas Jalan Kepi-Bade)	30 Meq	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Pembangunan Jembatan Konja (Ruas Jalan Elelim (Hulikma)-Witlango-Kobakma (149)	2307 Meq	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2021	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2021	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Target	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
				Pembangunan Jembatan Yomo 1 (Ruas Jalan Besum-Yanbra-Puay)	40 Meq	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Pembangunan Jembatan Yomo 2 (Ruas Jalan Besum-Yanbra-Puay)	36 Meq	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Pembangunan Jembatan Tagaemon (Ruas Jalan Kepi-Bade)	100 Meq	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Pembangunan Eligobel - Tanas	3 Km	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Pembangunan Jalan Tomer - Kondo	3 Km	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Pembangunan Jembatan Nasem (Distrik Naukenjerai)	15 Meq	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Program Pembangunan turap/talud/brojong			
				Pembangunan Talud Permukiman di Provinsi Papua	1000 Meter	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan			

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2021	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2021	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Target	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
				Monitoring, evaluasi dan pelaporan	12 Laporan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Pemeliharaan Jalan Warumbaim - Berap - Demta (109)	3434 Km	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Provinsi Papua	100 Km	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Pemeliharaan Jalan Jayapura - Dok V - Angkasa	10 Km	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Pemeliharaan Jalan Samabusa - Nabarua Bawah (138)	20 Km	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Pemeliharaan Jalan Dekai - Logpond - Pattipi (156)	50 Km	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Pemeliharaan Jalan Piramid - Bolakme (158)		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Pemeliharaan Jalan Manda - Wolo (159)	20 Km	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2021	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2021	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Target	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
				Pemeliharaan Jalan Wamena - Pugima - Mugi (160)	10 Km	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Pemeliharaan Jalan Kimbim - Wogi - Wosi (161)	10 Km	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya			
				Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi	10000 Meter	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Rehabilitasi Jaringan Rawa DR. Salor	23158 M	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Rehabilitasi Jaringan Rawa DR. Wasum-Nasem	18000 M	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Peningkatan Jaringan Irigasi DI Lereh		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Lereh	3000 Meter	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2021	Prioritas Pembangunan RKPDP Tahun 2021	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Target	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
				Peningkatan Jaringan Irigasi DI Legare		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Legare	3000 Meter	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Rehabilitasi Jaringan Irigasi DIR Kuprik - Sidomulyo	13500 Meter	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Rehabilitasi Jaringan Irigasi DIR Gudang Arang - Serapu	14000 Meter	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Program penyediaan dan pengolahan air baku			
				Pembangunan Infrastruktur Air Baku di Kabupaten Mamberamo Raya	5 liter/detik	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Pembangunan Infrastruktur Air Baku di Kabupaten Dogiyai	5 liter/detik	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Program pengendalian banjir			
				Pembangunan Pengamanan Pantai Kurudu Kep. Yapen	2000 M 2000 Laporan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2021	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2021	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Target	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
				Pembangunan Pengaman Pantai MAF Kabupaten Nabire	800 M 1 Laporan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Pembangunan Pengendali Banjir Sungai Uwe	1500 Meter	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Pembangunan Pengendali Banjir Sungai Bello	1500 Meter	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Pembangunan Pengendali Banjir Kali Entrop	500 Meter	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Pengendalian Banjir Kalibobo Kab. Nabire	500 Meter	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Pembangunan Pengaman Pantai Paradoi	800 Meter	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Pembangunan Pegaman Pantai Mambui	700 Meter	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai Kab. Biak Numfor	1000 Meter	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2021	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2021	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Target	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
				Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai Kab. Yapen	500 Meter	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Pembangunan Prasarana Pengendali Banjir Otonom Kota Jayapura (Mendukung PON)	200 M3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh			
				Pengelolaan Situs Web dan Penyebarluasan informasi Publik	1 Laporan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Penataan Kawasan Wisata Pantai Base-G Kota Jayapura.	5000 M2	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Pemeliharaan Sarana Prasarana Lapangan Olahraga Mandala	2500 M2	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Penataan Kawasan Patung Tuhan Yesus	1010000 M2	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Pembangunan Patung Tuhan Yesus	1 Unit	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Pembangunan Kawasan Sekolah Alkitab Mamit	5000 M2	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2021	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2021	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Target	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
				Penataan Kampung Nelayan Mandala	200 M2	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Informasi Pembangunan Bidang ke-PU-an Melalui Media Cetak dan Elektronik	2 Media	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Penataan Kawasan Wisata di Kabupaten Jayapura	5 Ha	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Penataan Kawasan Wisata di Kabupaten Jayawijaya	10 Ha	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Penataan Kawasan Wisata di Kabupaten Biak Numfor	10 Ha	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Penataan Kawasan Lingkungan Fasilitas Umum di Provinsi Papua	3 Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Penataan Kawasan Fasilitas Umum di Provinsi Papua	40000 M2	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Program pembangunan infrastruktur pedesaan			
				Penataan Sarana dan Prasarana Kawasan Permukiman di Kabupaten Boven Digoel	1000 M2	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2021	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2021	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Target	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
			Peningkatan Jalan dan Jembatan			
				Peningkatan Jalan Kemiri - Depapre (111)	5 KM2	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Peningkatan Jalan Kuprik - Jagebob - Erambu (183)	13 KM2	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Peningkatan Jalan Jayapura - Angkasa - Base"G - Dok II (101)	5 Km	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Peningkatan Jalan Junction - Wardo (130)	5 KM2	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Peningkatan Jalan Korem - Doubo (133)	3 KM2	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Peningkatan Jalan Wardo - Duber (134) 37,96 Km	4 KM2	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Peningkatan Jalan Dalam Kota Dekai	5 KM2	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Peningkatan Jalan Mapurujaya - Tipuka - Ayuka	5 KM2	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2021	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2021	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Target	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
				Peningkatan Jalan Illu (Puncak Jaya) - Tiom, (Lanny Jaya), (163)	10 KM2	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Peningkatan Jalan Tiom, (Lanny Jaya) - Illu (Puncak Jaya), (163)	16 KM2	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Peningkatan Jalan Dalam Kota Oksibil	5 KM2	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Peningkatan Jalan Legare - Samabusa	13 KM2	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Peningkatan Jalan Sisingamangaraja 2 Jalur		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Peningkatan Jalan Wardo - Sorendiwari	5 Km	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Peningkatan Jalan Munukania - Aurimi	6 KM2	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Peningkatan Jalan Karubaga - Panaga	714 KM2	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2021	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2021	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Target	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
				Peningkatan Jalan Muliama - Wame - Makki	6 KM2	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Peningkatan Jalan Karubaga - Wunim - Bokondini (154)	16 KM2	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Peningkatan Jalan Gamelia - Bolakme	3 Km	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Peningkatan Jalan Kuansu (Namlong)- Besum-Genyem. (107) 11,76 Km	4 KM2	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Peningkatan Jalan Besum - Yanbra - Pui (108)	6 KM2	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Peningkatan Jalan Lereh - Tengon	13 Km	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Peningkatan Jalan Karubaga - Mamit	2 KM2	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Peningkatan Jalan Manda - Wolo - Kobakma (169) (30 Km)	5 KM2	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2021	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2021	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Target	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
				Peningkatan Jalan Duntek (Dogiyai)-Munayepa/ Iyei (Paniai) (141)	5 KM2	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Peningkatan Jalan Duber - Sorendiwari - Korido (136)	5 KM2	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Peningkatan Jalan Kanggime - Bogunuk	5 Km	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Peningkatan Jalan Lingkar Pugima	3 Km	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Peningkatan Jalan Wamena - Sekan - Apalapsili	5 Km	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Peningkatan Jalan Waena - Arso V (100.K) 53 Km	13 Km	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Peningkatan Jalan Doubo - Sorendiwari - Amyas (133) 45.27 Km	6 Km	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Peningkatan Jalan Aikima - Siepkosi	3 Km	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Program Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan			

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2021	Prioritas Pembangunan RKPDP Tahun 2021	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Target	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
				Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan di Provinsi Papua	130 Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Penyusunan IRMS dan BMS Kebinamargaan	10 Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Koordinasi dan Perencanaan master.program Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1 Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Program Pembinaan dan Pengembangan Konstruksi			
				Monitoring dan Pengendalian Teknis bidang ke-PU-an	12 Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Pembinaan usaha jasa konstruksi pengusaha asli Papua	120 Orang Kegiatan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Pelatihan dan Sosialisasi Penyusunan Analisa Harga Satuan (PAHS)	80 Orang Kegiatan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Core Team Pengawasan Teknis Bidang Ke-PU-An	12 Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	500 Orang Kegiatan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2021	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2021	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Target	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
				Pengembangan dan pemanfaatan data KMN dan KMD	1 Laporan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Pelatihan Ketrampilan Tenaga Kerja Konstruksi dengan Mobile Training Unit (MTU)	100 Orang Kegiatan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Sertifikasi Ketrampilan Tenaga Kerja Konstruksi dengan Mobile Training Unit (MTU)	100 Orang Kegiatan 100 Orang Kegiatan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Penyusunan Basic dan Unit Price Bidang Ke PU-an	1 Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Kalibrasi Peralatan UPTD Balai Pengujian PU	70 Unit	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1 Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Bimtek Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)	100 Orang Kegiatan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Pengelolaan dan Penatausahaan Akuntansi ke-PU-an	1 Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2021	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2021	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Target	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
				Pengembangan dan Pengelolaan Kegiatan Penunjang Kegiatan UPTD Pengujian dan Laboratorium	1 Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Penelitian Material Infrastruktur Bidang Ke-PU-an	1 Dokumen 1 Obyek	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Pemeliharaan Peralatan Kegiatan UPTD Pengujian Dinas PU Provinsi Papua	20 Unit	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Pengadaan Peralatan Penunjang Jalan dan Jembatan	4 Unit	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Sosialisasi Pemanfaatan Laboratorium UPTD Bidang Ke-PU-an	50 Orang	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Pengujian Kualitas Pekerjaan Konstruksi Bidang Ke-PU-an	1 Sampel	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Survey dan Pemetaan Quarry di Provinsi Papua	15 Lokasi	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Pelatihan Teknisi UPTD Pengujian dan Laboratorium PU	25 Orang	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2021	Prioritas Pembangunan RKPDP Tahun 2021	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Target	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
				Sosialisai Perundang-undangan Jasa Konstruksi	150 Orang	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi bagi OAP	100 Orang	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Program Pengembangan Perumahan			
				Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan	6 Orang	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang perumahan	2 Kegiatan 29 Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat	15 Unit	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Keerom	5 Unit	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Mappi	10 Unit	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Boven Digoel	7 Unit	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2021	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2021	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Target	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
				Pembangunan rumah ramah lingkungan dengan konstruksi baja ringan di 3 Kab/Kota (pilot project)	2 Unit	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Pengadaan lahan kawasan perumahan ASN Provinsi Papua	1 Lokasi	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Penataan Peningkatan Infrastruktur Kawasan Pemukiman di Kota Jayapura	2 Lokasi	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Penataan Peningkatan Infrastruktur Kawasan Pemukiman di Kabupaten Nabire	2 Lokasi	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Penataan Peningkatan Infrastruktur Kawasan Pemukiman di Kabupaten Jayapura	2 Lokasi	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Penataan Peningkatan Infrastruktur Kawasan Pemukiman di Kabupaten Biak	1 Lokasi	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Penataan Peningkatan Infrastruktur Kawasan Pemukiman di Kabupaten Keerom	1 Lokasi	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Peningkatan Sarana Prasarana Permukiman Kampung Nelayan	6 Ha	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Program Lingkungan Sehat Perumahan			

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2021	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2021	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Target	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
				Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin	29 Lokasi	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Penataan Kawasan Permukiman Kawasan Danau Sentani	3 Unit	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya			
				Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin	225 KK	Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Penanggulangan Kemiskinan	130 KK	Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil	100 KK 100 KK 100 KK 100 Unit	Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Perlindungan dan Jaminan Sosial			
				Pelatihan dan Pengarahan Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	300 Orang	Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2021	Prioritas Pembangunan RKPd Tahun 2021	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Target	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
				Bantuan Kedaruratan Logistik Bencana alam dan sosial	7 Jenis	Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Penguatan Program Keluarga Harapan di 29 Kabupaten/Kota	3 Kabupaten	Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Bangun Generasi dan Keluarga Papua Sejahtera (BANGGA PAPUA)	44580 Orang	Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Pelayanan Kesejahteraan Sosial Berbasis Panti			
				Pelayanan dan Rehabilitasi sosial bagi anak dan remaja	80 Orang	Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Pelayanan dan Rehabilitasi sosial bagi Lanjut Usia terlantar	70 Orang	Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Pelayanan dan Rehabilitasi sosial bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)	60 Orang	Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Pelayanan dan Rehabilitasi sosial bagi Cacat Netra	18 Orang	Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Kesejahteraan Sosial			

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2021	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2021	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Target	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
				Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan	15 Dokumen	Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Penyusunan Data dan Informasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan	2 Dokumen	Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja			
				Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja	500 Orang	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
				Sosialisasi Standarisasi dan Sertifikasi Kompetensi Kerja	40 Kelompok 40 Orang	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
				Quality Management System (QMS) BLTKI	30 Orang	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
			Program Pengawasan Ketenagakerjaan			
				Penetapan Upah Minimum Provinsi Papua	1 Dokumen	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
				Sosialisasi Program jaminan Sosial di Perusahaan dan Kepesertaan Jaminan Sosial	30 Orang	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2021	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2021	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Target	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
			Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan			
				Pelatihan hukum positif bagi guru dan orang tua	30 Kegiatan 40 Orang	Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak			
				Fasilitasi FORDA Provinsi Papua	150 Orang	Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Monitoring dan evaluasi pelaksanaan PUG di OPD di Provinsi/Kab/Kota	7 Kabupaten	Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Sosialisasi dan advokasi pembentukan PAUD Holistik Integratif	40 Orang 40 Kegiatan	Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Fasilitasi Klinik PPRG Provinsi/Kabupaten/Kota	35 SKPD	Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Penguatan SDM Tim Driver Program Perencanaan Responsif Gender (PPRG) Provinsi Papua	30 Orang	Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Penguatan kapasitas Vocal Point gender	40 Orang	Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2021	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2021	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Target	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
			Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Perlindungan Perempuan dan Anak			
				Fasilitasi upaya perlindungan perempuan dan Anak terhadap tindak kekerasan	91 Orang 91 % 91 Orang	Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				TOT bagi Operator Simponi PPA	20 Orang	Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Pelatihan Psikososial bagi tenaga kepolisian dan P2TP2A Provinsi Papua	40 Orang	Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Penguatan kapasitas SDM pendamping korban kekerasan	60 Orang	Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Program Peningkatan Peran Serta dan Kesenjangan Gender dalam Pembangunan			
				Monitoring, evaluasi dan pelaporan	5 Kabupaten	Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Pemberdayaan ekonomi keluarga sejahtera	12 Kelompok	Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2021	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2021	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Target	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
				Penguatan kapasitas SDM Wirausaha perempuan papua	30 Kelompok	Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Pendidikan politik dan hukum bagi anggota legislatif, organisasi perempuan papua	50 Orang	Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Fasilitasi dan pemberdayaan bagi penyandang cacat dan difabel	70 Orang	Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Program peningkatan penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS			
				Penyuluhan penanggulangan narkoba dan PMS di sekolah	300 Orang	Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga			
				Pelatihan Tenaga Pendamping	250 Orang	Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Program pembangunan sistem pendaftaran tanah			
				Penyusunan data tanah	4 Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2021	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2021	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Target	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
			Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah			
				Rapat Koordinasi Penataan Pertanahan	100 Orang 4 Kegiatan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan			
				Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan	35 Kasus	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup			
				Pembinaan dan Pengawasan Limbah B3	13 Unit	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
				Peningkatan Kapasitas Komisi AMDAL Provinsi Papua	20 Orang	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
			Program Penataan Administrasi Kependudukan			
				Pelaksanaan Pembinaan, sosialisasi dan pengawasan penyelenggaraan Pencatatan sipil di wilayah Provinsi	65 Orang	Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Pengelolaan Dokumen Register Akta Catatan Sipil di Wilayah Provinsi Papua	150 Dokumen	Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa			

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2021	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2021	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Target	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
				Pengembangan fasilitas multi media/display	1 Set 1 Unit	Dinas Komunikasi dan Informatika
				Pengamanan, Pengendalian dan Pembuatan Sistem Pelaporan Operasionalisasi JARKOMDA	1 Kegiatan 550 Unit	Dinas Komunikasi dan Informatika
				Pengembangan Sistem Website Pemerintah Provinsi Papua	5 Website	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Penyiapan Teknologi Informasi dan Komunikasi			
				Jasa Berlangganan Fasilitas Komunikasi Data Antar SKPD Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Dan Masyarakat	132 Lokasi 250 Orang 33 SKPD	Dinas Komunikasi dan Informatika
				Pengembangan/pembangunan JARKOMDA di lingkungan pemerintah	110 Unit	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah			
				Pendataan UKM	1000 Unit	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
			Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi			
				Monitoring, evaluasi dan pelaporan	29 Dokumen	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
				Identifikasi kebutuhan pelatihan dan monev pasca pelatihan	10 Unit	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2021	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2021	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Target	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
				Pengawasan dan Pemeringkatan koperasi berprestasi	30 Unit	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
				Pendataan Koperasi	500 Dokumen	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
			Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi			
				Fasilitasi dan koordinasi percepatan pembangunan kawasan produksi daerah tertinggal (P2KPDT)	1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal	1 Kali	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	275 Kegiatan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan investasi	10	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				Penyelenggaraan pameran investasi	10 Kegiatan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi			
				Penyusunan Cetak Biru (Master Plan) pengembangan penanaman modal	1 Dokumen	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2021	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2021	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Target	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
				Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal	1 Dokumen	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				Kajian Kebijakan penanaman modal	1 Dokumen	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Program Peningkatan Pelayanan Perizinan Penanaman Modal			
				Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Penanaman Modal Melalui PTSP	1200 Jenis	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Perijinan dan Non Perijinan di Bidang Penanaman Modal	20 Buah	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				survey indeks kepuasan masyarakat terhadap perijinan	1200 Buah	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				Penyediaan Informasi Perijinan	5 Jenis	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				Pendataan Perijinan dan Non Perijinan di Kabupaten/Kota se Papua	1 Dokumen	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Program Peningkatan Daya Saing Investasi			
				Penyusunan Regulasi dan Insentif Investasi	1 Buah	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Program Peningkatan, Pengawasan, Pengendalian Penanaman Modal			

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2021	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2021	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Target	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
				Koordinasi Fasilitasi Penyelesaian Hambatan Pelaksanaan Penanaman Modal	20 Buah	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				Pemantauan Perkembangan Realisasi Perusahaan Penanaman Modal	260 Perusahaan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				Bimbingan Pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal Kepada Masyarakat Dunia Usaha	100 Perusahaan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				Pengelaan Data dan Sistem Informasi Penanaman modal	1 Sistem	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				Temu Usaha dan Dialog Investasi	1 Kali	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Program peningkatan peran serta kepemudaan			
				Jambore Pemuda Daerah	2500 Orang	Dinas Olah Raga dan Pemuda
			Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga			
				Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat	150 Orang Hari	Dinas Olah Raga dan Pemuda
				Penyelenggaraan kompetisi olahraga	2000 Orang Kegiatan	Dinas Olah Raga dan Pemuda
			Program Pembinaan Atlit Muda dan OLahraga Prestasi			
				Penyelenggaraan Pekan Olahraga Junior Tingkat Provinsi Papua	750 Orang Hari	Dinas Olah Raga dan Pemuda
			Program Pengelolaan Kekayaan Budaya			

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2021	Prioritas Pembangunan RKPd Tahun 2021	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Target	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
				Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya	100 Kegiatan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
			Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah			
				Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	5 Jenis	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
				Peningkatan Pengelolaan dan Penataan Arsip	1500 Boks	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
				Pelestarian Arsip-arsip yang Bernilai Guna Statis	100 Dokumen	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
				Penilaian dan Penyusutan Arsip	4750 Berkas 250 Berkas	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
			Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi			
				Layanan Informasi Kearsipan	100 Berkas	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
			Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan			
				Penyediaan Bantuan Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca di Daerah	8 Unit	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
				Pengembangan Deposit	50 Eksemplar	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2021	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2021	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Target	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
				Pemeliharaan Bahan Pustaka	5000 Eksemplar	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
				Otomasi Perpustakaan	500 Buku	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
				Reprografi bahan Pustaka	312 Eksemplar	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
				Identifikasi dan inventarisasi naskah kuno	3 Eksemplar	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
				Monitoring, evaluasi dan pelaporan Perkembangan perpustakaan didaerah	25 Laporan	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
			Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan			
				Patroli Rutin Perairan	100 Kali	Dinas Kelautan dan Perikanan
				Pembangunan Garasi (Stayger) speed boad Pengawasan SDKP (DAK)	500 M3	Dinas Kelautan dan Perikanan
				Pembangunan Gedung Pengawasan SDKP (DAK)	100 M3	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Program pengembangan budidaya perikanan			
				Rapat Evaluasi Pengembangan Budidaya Rumput Laut	1 Kegiatan	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Program Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap			

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2021	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2021	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Target	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
				Pelatihan Cek Fisik Kapal dan Mesin Kapal	5 Orang	Dinas Kelautan dan Perikanan
				Monitoring PPI Se- Papua	8 Kabupaten	Dinas Kelautan dan Perikanan
				Motorisasi perahu nelayan /armada kapal kecil	30 Kelompok	Dinas Kelautan dan Perikanan
				Fasilitasi Pelayanan Perizinan dan Pengendalian Usaha Perikanan Tangkap	150 Dokumen	Dinas Kelautan dan Perikanan
				Restocking Ikan di Perairan Umum dan Danau	150000 Ekor	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan			
				Penataan Kelembagaan Penyuluh dan Distribusi Tenaga Penyuluh	20 Orang	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan			
				Rehabilitasi unit Pengolahan Ikan (UPI) Skala Kecil - DAK	2 Unit	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Program Peningkatan Mutu Produksi Nelayan, Pengelolaan dan Pemasaran			
				Ekspose dan Promosi Investasi Kelautan dan Perikanan	2 Kegiatan	Dinas Kelautan dan Perikanan
				Kemitraan Usaha Pengolahan Ikan	2 Kegiatan	Dinas Kelautan dan Perikanan
				Lomba Masak Serba Ikan Tk. Provinsi dan Nasional	2 Kegiatan	Dinas Kelautan dan Perikanan
				Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Pemasaran bagi Nelayan	75 Unit	Dinas Kelautan dan Perikanan

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2021	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2021	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Target	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
				Pelaksanaan Peringatan Hari Nusantara dan HARKANAS,	2 Kegiatan	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Program Optimalisasi dan Pembangunan Prasarana Perikanan Tangkap			
				Penunjang Kegiatan PPI di Kab/Kota	8 Kegiatan	Dinas Kelautan dan Perikanan
				Pembangunan Cold Storage (DAK)	1 M3	Dinas Kelautan dan Perikanan
				PPI OMOR (DAK)	1 Unit	Dinas Kelautan dan Perikanan
				PPI Nabire (DAK)	1 Unit	Dinas Kelautan dan Perikanan
				PPI Hamadi (DAK)	1 Unit	Dinas Kelautan dan Perikanan
				PPI Fandoi (DAK)	1 Unit	Dinas Kelautan dan Perikanan
				PPI POMAKO (DAK)	1 Unit	Dinas Kelautan dan Perikanan
				PPI Kab Jayapura (DAK)	1 Unit	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Program Optimalisasi Fungsi dan Pelayanan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD)			
				Pembangunan dan Pengembangan BBIS (DAK)	10000 Ekor	Dinas Kelautan dan Perikanan
				Pembangunan dan Pengembangan BBIP (DAK)	15000 Ekor	Dinas Kelautan dan Perikanan
				Paket Pengukuran dan Pemeriksaan Kesehatan ikan BBIP Biak (DAK)	2 Kegiatan	Dinas Kelautan dan Perikanan

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2021	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2021	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Target	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
			Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil			
				Pemberdayaan Masyarakat Pulau-Pulau Terluar	3 Kelompok	Dinas Kelautan dan Perikanan
				Peningkatan Perananan Konsorsium Mitra Bahari dalam Penanganan Masalah Pesisir	3 Kegiatan	Dinas Kelautan dan Perikanan
				Dukungan Terhadap Coremap	2 Tahun	Dinas Kelautan dan Perikanan
				Pengembangan sistem Budidaya Wanamina sebagai mata pencaharian alternatif	4 Kelompok	Dinas Kelautan dan Perikanan
				Pembangunan Tambatan Perahu di Pulau-pulau Kecil (DAK)	400 M3	Dinas Kelautan dan Perikanan
				Transplantasi Terumbu Karang	1 Unit	Dinas Kelautan dan Perikanan
				Pondok Jaga Kawasan Konservasi (DAK)	500 Unit	Dinas Kelautan dan Perikanan
				Alat Komunikasi Lapangan Pengelolaan Kawasan Konservasi (DAK)	50 Unit	Dinas Kelautan dan Perikanan
				Pengadaan Alat Selam (DAK)	2 Unit	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata			
				Dukungan dan Penguatan Pada Festival Wisata Daerah	5 Kabupaten	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
				Renovasi Hotel Numbay dan Mapia	4800 M2	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
			Program Pengembangan Destinasi Pariwisata			

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2021	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2021	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Target	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
				pengembangan objek pariwisata unggulan	2 Unit	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
				peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	2 Lokasi	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
				Penataan Daya Tarik Wisata dan Amenitas Pariwisata (DAK)	5 Lokasi	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
				Pelatihan Pengelola Daya Tarik Wisata (DTW)	40 Orang	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
				Pengembangan dan Penataan Kampung Wisata	1 Kampung	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
			Program Pengembangan Kemitraan			
				Pelatihan ekonomi kreatif	30 Orang	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
				Pelatihan desain batik	30 Orang	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
				Pelatihan Seni Kerajinan Tangan (anyam noken, gerabah, ukir)	30 Orang	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
				Pengadaan Ruang Kreatif	1 Unit	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
				Pelatihan media kreatif (fotografi dan animasi)	30 Orang	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
				Pameran pekan budaya dan seni kreatif	10 Peserta	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
				Pengadaan Peralatan Ruang Kreatif	50 Buah	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
			Program Peningkatan Kesejahteraan Petani			
				Pelatihan Petani dan Pelaku Agrobisnis	60 Orang	Dinas Pertanian dan Pangan

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2021	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2021	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Target	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
				Peningkatan kemampuan lembaga petani	20 Kelompok 2 Lembaga	Dinas Pertanian dan Pangan
			Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)			
				DAK Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura	5 Kegiatan	Dinas Pertanian dan Pangan
			Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan			
				Pembangunan Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan	15 Unit	Dinas Pertanian dan Pangan
				Investasi dan Perijinan Usaha Perkebunan	7 Kegiatan	Dinas Pertanian dan Pangan
				Bimbingan Usaha Perkebunan	13 Kelompok	Dinas Pertanian dan Pangan
			Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan			
				Penelitian dan pengembangan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	1 Unit	Dinas Pertanian dan Pangan
				Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	300 Orang	Dinas Pertanian dan Pangan
			Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan			
				Penyediaan Perlengkapan dan Sarana Perkantoran UPTD/Balai Perbenihan/Produksi	10 Alat	Dinas Pertanian dan Pangan
			Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan			

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2021	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2021	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Target	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
				Peningkatan kapasitas kelembagaan pertanian	10 Unit 4 Unit	Dinas Pertanian dan Pangan
			Program peningkatan produksi hasil peternakan			
				Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak	6 Unit 3 Unit	Dinas Pertanian dan Pangan
				Penguatan Kelembagaan Inseminasi Buatan	3000 Dosis	Dinas Pertanian dan Pangan
			Program Peningkatan Sumberdaya Pertanian			
				Peningkatan Sarana Prasarana Diklat Pertanian	400 M2	Dinas Pertanian dan Pangan
				Peningkatan SDM Aparatur dan Non Aparatur Sekolah Pertanian	450 Orang	Dinas Pertanian dan Pangan
				Peningkatan Sarana Prasarana Sekolah Pertanian	250 M2	Dinas Pertanian dan Pangan
				Peningkatan SDM Aparatur dan Non Aparatur Balai Diklat Pertanian	250 Orang	Dinas Pertanian dan Pangan
			Program Peningkatan keamanan pangan dan ketahanan pangan asal hewan			
				Peningkatan mutu keamanan pangan asal hewan	10 Kali	Dinas Pertanian dan Pangan
			Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan			
				Pameran pembangunan kehutanan Papua	10 Komoditi	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
				Peningkatan Tertib Produksi dan Peredaran Hasil Hutan	20 Perusahaan	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2021	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2021	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Target	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
				Peningkatan Penatausahaan Iuran Kehutanan	180000000000 Rupiah 20 Perusahaan	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
				Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Silvikultur pada IUPHHK-HA	15 Perusahaan	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
				Pengembangan Sarana dan Prasarana Usaha Ekonomi Produktif melalui Kelompok Tani Hutan (KTH) (DAK)	10 Kelompok	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
			Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan			
				Pembebasan Lahan/Tanah Kebun Raya Koya Koso	100 Hektar	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
			Program perencanaan dan pengembangan hutan			
				Peningkatan Kinerja Pemanfaatan Hasil Hutan	4 Dokumen	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
			Program Penguatan Kelembagaan Pengelolaan Hutan			
				Pengelolaan kawasan hutan pada UPTD KPHP Unit XIX Kep. Yapen	1 Hektar	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
				Pengelolaan kawasan hutan pada UPTD KPHL Unit XX Biak	1 Hektar	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
			Program Pengelolaan Listrik dan Pemanfaatan Energi			
				Penyusunan Rencana Umum Energi Daerah Papua (RUED-P)	1 Dokumen	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
				Kegiatan Pelatihan Tenaga Teknik Operator Ketenagalistrikan Dan Energi Baru Terbarukan	60 Orang	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2021	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2021	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Target	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
				Kegiatan Pembinaan Dan Pengawasan Penyedia Dan Usaha Jasa Penunjang Ketenagalistrikan	3 Laporan	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
			Pengembangan & Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan			
				Pembangunan PLTMH	750 RT	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
				Kegiatan Pembangunan PLTS Terpusat	750 RT	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
			Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan			
				Koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen	1 Kegiatan	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
				Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa	5 Kegiatan	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
				operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah	1 Unit	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
				Pengawasan terhadap barang dan jasa bagi masyarakat	5 Komoditi	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
				Kegiatan sosialisasi undang-undang perlindungan konsumen dan perdas no. 15 tahun 2013	5 Kabupaten	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2021	Prioritas Pembangunan RKPDP Tahun 2021	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Target	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
				Sosialisasi pemberdayaan konsumen cerdas didaerah dalam rangka hari konsumen nasional	50 Kegiatan	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
			Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor			
				Pengenangan informasi peluang pasar perdagangan luar negeri	5 Dokumen	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
				Dukungan marketing poin didaerah perbatasan RI/PNG	2 Dokumen	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
				Melakukan join even pameran bersama di daerah perbatasan RI/PNG	5 Laporan	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
				Pameran dalam dan luar negeri dalam rangka promosi komoditi ekspor daerah	3 Dokumen	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
				Monitoring, Pendataan dan Penyusunan Program Perdagangan luar Negeri di Daerah	2 Dokumen	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
			Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri			
				Sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negri	1 Kegiatan	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
			Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah			

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2021	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2021	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Target	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
				Penyusunan kebijakan industri terkait dan industri penunjang industri kecil dan menengah	1 Kegiatan	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
				Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta	3 Kegiatan 25 Kelompok	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
			Program Penataan Struktur Industri			
				Penyediaan sarana maupun prasarana klaster industri	10	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
				Pembinaan keterkaitan produksi industri hulu hingga ke hilir	20 Orang	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja

Sumber : www.ppr.papua.go.id

6.2 Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pendanaannya

Rencana Program Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2021 beserta tolok ukur kinerja dan pagu indikatif sesuai Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah disampaikan secara detail pada Tabel 6.2 sebagai berikut :

Tabel. 6.2.

Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pendanaan Pemerintah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2021

Kode	Usuran / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
1	Usuran Wajib Pelayanan Dasar			14.684.680.647.536,00	
1.01	Pendidikan			1.034.795.498.070,00	
1.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran		7.530.103.000,00	
1.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang disediakan	1.000 Surat	3.000.000,00	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
1.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Jasa Layanan berlangganan Listrik,Air,Telepon, Transponder	12 Layanan	520.000.000,00	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
1.01.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	15 Unit	250.000.000,00	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
1.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Unit Mobil Dinas/Operasional yang terpelihara dan Terfasilitasi Perijinannya	9 Unit	250.000.000,00	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
1.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Luas Gedung dan Halaman yang disediakan jasa kebersihan	0 M2	865.453.000,00	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
		Jumlah tenaga kebersihan dan Fasilitas Pendukung kebersihan kantor	12 Orang		
		Jumlah Jenis Bahan dan Alat Kebersihan	0 Jenis		
1.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	50 Jenis	900.000.000,00	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
1.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan	16 Jenis	1.000.000.000,00	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
		Jumlah penggandaan	0 Lembar		
		Jumlah Jenis Barang Cetakkan yang Disediakan	10 Jenis		
		Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	16 Bulan		
1.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen Listrik yang disediakan	30 Buah	250.000.000,00	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
1.01.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	30 Unit	150.000.000,00	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
1.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	30 Jenis	70.000.000,00	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
1.01.01.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah liter bahan bakar untuk kendaraan operasional	0 Liter	31.650.000,00	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
		jumlah mobilitas termasuk tenaga angkat dan turun beras ke kantor	12 Kali		
1.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Pelaksanaan penyediaan makan dan minum	10 Kegiatan	900.000.000,00	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
		Pelaksanaan makan minum tamu dan rapat	0 Kali Tahun		
		Pelaksanaan makan minum saat olah raga (hari Jumat)	0 Kali		
		Tersediannya Makanan dan Minuman	0 Bulan		
		Jumlah orang yang disediakan makan dan minuman	0 Orang		
1.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	100 Orang	2.000.000.000,00	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
1.01.01.19	Penyediaan Jasa Pengamanan	Pelaksanaan pembayaran insentif bagi tenag operator dan penjaga X-Ray VIP Room Bandara Sentani	a0 Orang Bulan	340.000.000,00	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
		Pelaksanaan pembayaran honor bagi satpam	0 Orang Bulan		
		Pelaksanaan uang makan satpam	4 Orang Bulan		
		Jumlah tenaga pengamanan	6 Orang		
1.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	0 persen	34.236.200.000,00	
1.01.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan yang diadakan	2 Unit	500.000.000,00	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
		Jumlah kendaraan roda 2	0 Unit		
1.01.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan perlengkapan	50 Unit	300.000.000,00	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
1.01.02.10	Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur yang diadakan	50 Unit	1.000.000.000,00	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
1.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	2 Unit	150.000.000,00	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
		belanja sewa	0 Tahun		
1.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	0 Unit	100.000.000,00	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
		Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	9 Unit		
		sewa kendaraan	0 Bulan		
1.01.02.42	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Terlaksananya rehabilitasi gedung	10 M2	32.186.200.000,00	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
1.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	0 persen	920.000.000,00	
1.01.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	340 Stell	920.000.000,00	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
1.01.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	0 persen	780.000.000,00	
1.01.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	20 Orang	500.000.000,00	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
1.01.05.02	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	50 Orang	280.000.000,00	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
1.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya kualitas akuntabilitas OPD	0 persen	700.000.000,00	
1.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	3 Laporan	300.000.000,00	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
		Laporan LAKIP SKPD	0 Dokumen		
1.01.06.02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah pelaporan keuangan semesteran yang diselesaikan tepat waktu	2 Laporan	50.000.000,00	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
1.01.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	1 Laporan	50.000.000,00	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
1.01.06.05	Penyusunan Renja, RKA dan Perubahan APBD	Jumlah dokumen	5 Dokumen	300.000.000,00	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
1.01.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	96 persen	0,00	
		Persentase OAP usia dini yang mengikuti PAUD	47 persen		
1.01.15.58	Pengembangan pendidikan anak usia dini	Jumlah PAUD berbasis Bahasa Ibu	0 Unit	0,00	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
1.01.15.74	BOP PAUD-SD, PKBM, Pos Yandu Model, TK TUT Wuri Handayani, PAUD Kasih Mama	Terfasilitasinya BOP PAUD Binaan	0 %	0,00	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
1.01.15.95	Pelatihan dan Pendampingan Bahasa Ibu	Terselenggaranya Program Bahasa Ibu di Kabupaten Sasran	0 %	0,00	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
1.01.15.122	Apresiasi GTK PAUD Tingkat Provinsi Dan Tingkat Nasional	Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD yang Terfasilitasi	0 %	0,00	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
1.01.17	Program Pendidikan Menengah Atas	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C/ sederajat	38 persen	162.269.000.000,00	
		Angka Putus Sekolah (APTS) SMA/SMK/MA/Paket C/ sederajat	1 persen		
		Cakupan ruang kelas sekolah pendidikan SMA/SMK/MA dengan kondisi bangunan baik	38 persen		
		Rasio guru/murid sekolah pendidikan menengah atas/kejuruan	20 murid per guru		
		Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan menengah atas/kejuruan	219 murid per sekolah		

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
		Persentase siswa SMA/SMK OAP yang lulus dengan nilai UAN di atas rata-rata	46 persen		
		Cakupan siswa lulusan OAP yang diterima di PTN	200 per 1000 siswa OAP		
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C/ sederajat	0 %		
1.01.17.01	Pembangunan Sekolah Unggulan Berasrama	Jumlah wilayah adat	5 Kabupaten	10.000.000.000,00	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
1.01.17.06	Lomba Debat Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia dan Bahasa Jerman	Jumlah Siswa SMA yang mengikuti Lomba Debat Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia	100 Orang	900.000.000,00	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
1.01.17.11	Honor Guru Kontrak SMA/SMK/SLB/PKLLK	Jumlah Guru SMA yang mendapatkan insentive	692 Orang	34.000.000.000,00	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
1.01.17.14	Pelatihan Guru Bidang Studi SMA	Jumlah Guru yang terfasilitasi Pelatihan	300 Orang	7.830.000.000,00	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
1.01.17.81	Pelatihan Kepala Tata Usaha Sekolah SMA	Jumlah Kepala Tata Usaha SMA yang Mengikuti LKT	269 Orang	3.850.000.000,00	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
1.01.17.88	DAK REGULER SMA	Terbangunnya ruang kelas baru, laboratorium IPA, tersediannya peralatan IPA	29 Lokasi	78.500.000.000,00	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
1.01.17.105	pelatihan penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) SMA	Jumlah guru SMA yang mengikuti pelatihan penyusunan RPP	269 Orang	2.959.000.000,00	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
1.01.17.106	pelatihan penyusunan rencana kerja anggaran sekolah (RKAS) SMA	Jumlah guru dan tenaga kependidikan SMA yang mengikuti pelatihan penyusunan RKAS	269 Orang	3.000.000.000,00	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
1.01.17.108	pelaksanaan evaluasi diri sekolah (EDS) SMA	Jumlah sekolah SMA yang di evaluasi	269 Sekolah	1.500.000.000,00	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
1.01.17.110	Lomba Kompetensi Siswa SMA	Jumlah siswa SMA yang mengikuti lomba O2SN tingkat Provinsi dan Nasional	269 Orang	2.700.000.000,00	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
1.01.17.112	Lomba FLS2N SMA	Jumlah siswa SMA yang mengikuti lomba FLS2N tingkat Provinsi dan Nasional	100 Orang	1.000.000.000,00	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
1.01.17.113	Lomba LCC 4 pilar SMA	Jumlah siswa SMA yang mengikuti Lomba LCC 4 pilar SMA tingkat Provinsi dan Nasional	100 Orang	500.000.000,00	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
1.01.17.114	Lomba debat Bahasa Indonesia, Inggris dan Jerman SMA	Jumlah siswa SMA yang mengikuti Lomba debat Bahasa Indonesia, Inggris dan Jerman SMA tingkat Provinsi dan Nasional	100 Orang	650.000.000,00	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
1.01.17.115	Lomba Adiwiyata SMA	Jumlah Sekolah SMA yang terjaring mewakili lomba adiwiyata tingkat nasional	29 Sekolah	1.500.000.000,00	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
1.01.17.116	Lomba Karya Ilmiah siswa SMA	Jumlah siswa SMA yang mengikuti Lomba Karya Ilmiah siswa SMA tingkat Provinsi dan Nasional	269 Orang	580.000.000,00	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
1.01.17.117	Penyediaan Bantuan Biaya Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA di lima wilayah adat	Jumlah Kepala Sekolah SMA di lima wilayah adat yang mengikuti musyawarah kerja kepala sekolah	29 Orang	500.000.000,00	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
1.01.17.123	DAK FISIK AFIRMASI	Jumlah Operator yang terfasilitasi	29 Orang	10.200.000.000,00	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
1.01.17.127	Pengembangan Kelas Khusus (Kurikulum, Kualitas Guru, Seleksi Siswa Baru)	Jumlah Guru dan Kelas Khusus yang terfasilitasi	100 %	1.500.000.000,00	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
1.01.17.128	Penyusunan Kurikulum Latihan Guru, Kepala Sekolah	Jumlah Guru dan Kepala Sekolah yang Terfasilitasi	269 %	600.000.000,00	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
1.01.18	Program Pendidikan Non Formal	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun	78 persen	20.650.000.000,00	
		Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15- 59 tahun	93 persen		
		Angka Melek Huruf penduduk OAP	52 persen		
		Jumlah PKBM aktif	434 unit		
1.01.18.22	Rapat Koordinasi Tim Pengendali Percepatan Tuntas Buta Aksara Provinsi	Jumlah warga belajar mendapatkan pendidikan keaksaraan tuntas buta aksara	100 Orang	650.000.000,00	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
1.01.18.75	Penguatan KKN Tematik untuk Pemberantasan Buta Aksara	Jumlah KKN Tematik Buta Aksara yang dibina	20 Kelompok	20.000.000.000,00	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
1.01.20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	74 persen	57.271.210.500,00	
		Persentase guru TK yang bersertifikat pendidik	73 persen		
		Persentase guru SD yang bersertifikat pendidik	83 persen		
		Persentase guru SMP yang bersertifikat pendidik	80 persen		
		Persentase guru SMA/SMK yang bersertifikat pendidik	81 persen		
		Persentase guru SMLB yang bersertifikat pendidik	66 persen		
		Cakupan Guru SMK pemegang sertifikat keahlian khusus	52 persen		
1.01.20.01	Pelaksanaan sertifikasi pendidik	Jumlah Pendidik yang bersertifikasi	220 Orang	2.600.000.000,00	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
1.01.20.02	Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Jumlah pendidik yang diuji kompetensi	200 Orang	938.500.000,00	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
1.01.20.04	Penyediaan Bantuan Biaya MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran)	Jumlah Kelompok Yang Menerima Bantuan	12 Kelompok	1.380.750.000,00	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
1.01.20.17	Pembekalan dan Pengiriman Guru, Kepala Sekolah, Pengawas dan Tenaga Kependidikan Lainnya Yang Berprestasi dan Berdedikasi	Jumlah Guru dan Kepsek SMA/SMK dan PKLK Berprestasi dan Berdedikasi yang terfasilitasi	145 Orang	704.850.000,00	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
1.01.20.18	SERTIFIKASI GURU DAN PROGRAM KEAHLIAN SMK	Jumlah Guru SMK yang mengikuti sertifikasi keahlian	600 Orang	2.900.350.000,00	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
1.01.20.22	Magang Guru Produktif SMK	Magang Guru Produktif SMK	0 Orang Kegiatan	3.883.690.000,00	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
		Jumlah Guru yang mengikuti Magang	80 Orang		
1.01.20.28	Penguatan dan Sertifikasi Guru SMA/SMK/PKPK	Jumlah Kualitas dan Mutu Guru yang terfasilitasi	384 Orang	5.498.021.000,00	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
1.01.20.30	Workshop Musyawarah Kompetensi Kepala Sekolah SMA/SMK	Jumlah Guru yang diadakan	40 Orang	1.504.800.000,00	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
1.01.20.31	Pengembangan Sistem Pengendalian Disiplin dan Kinerja Guru TPP	Jumlah Sekolah yang terfasilitasi Jaringan Internet	385 Sekolah	1.000.000.000,00	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
1.01.20.38	Insentif Guru Honor	Jumlah Guru Honor yang mendapatkan Insentif	700 Orang	35.000.000.000,00	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
1.01.20.39	Pemetaan Guru dan Tenaga Kependidikan SMA/SMK/PKPK	Jumlah anggota Penilai angka Kredit	87 Orang	1.860.249.500,00	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
1.01.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Cakupan Kurikulum Muatan Lokal Papua yang dikembangkan dalam proses pembelajaran	10 persen	95.104.650.000,00	
		Cakupan model Pendidikan Sekolah Kontekstual Papua yang dikembangkan	4 unit per tahun		
		Jumlah kemitraan pendidikan yang dikembangkan dengan lembaga sosial dan agama	36 unit		
		Cakupan PBM Sekolah yang di Supervisi dan di Monitoring	63 persen		
1.01.22.01	Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan	Meningkatnya Akuntabilitas Layanan Pembangunan Pendidikan	5 %	1.254.150.000,00	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
1.01.22.02	Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan	Meningkatnya Mutu Layanan Kelembagaan Bidang Pendidikan	100 %	3.000.000.000,00	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
1.01.22.04	Sosialisasi dan advokasi berbagai peraturan pemerintah di bidang pendidikan	Meningkatnya Peraturan Pemerintah dibidang pendidikan yang terfasilitasi	100 %	300.000.000,00	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
1.01.22.07	Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan	Meningkatnya mutu informasi manajemen Pendidikan	100 %	1.245.800.000,00	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
1.01.22.57	Pelaksanaan Ujian Nasional dan Ujian Sekolah	Meningkatnya Mutu Lulusan Siswa Pendidikan Dasar dan Menengah	100 %	3.000.000.000,00	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
1.01.22.60	Lomba KHAJAR Tk. Provinsi dan Nasional	Meningkatnya Mutu Pembelajaran Siswa (KHAJAR)	100 %	500.000.000,00	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
1.01.22.64	Peningkatan tenaga perencanaan dan ICT	Meningkatnya mutu pembelajaran studio edukasi	12 %	500.000.000,00	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
1.01.22.66	Pengelolaan PAK (pengelolaan angka kredit) guru, pengawas sekolah, dan pamong belajar	Meningkatnya Kinerja Guru Pengawas dan Pamong Belajar yang terfasilitasi	100 %	1.004.700.000,00	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
1.01.22.76	Pengembangan Website Pendidikan	Terfasilitasinya Pengembangan Web Pendidikan	100 %	500.000.000,00	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
1.01.22.80	Supervisi dan Monitoring PBM di Sekolah	Terselenggaranya Supervisi dan Monitoring Sekolah	100 %	2.000.000.000,00	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
1.01.22.98	Pengelolaan Personil, Pendanaan Prasarana dan Dokumen SMA SMK	Jumlah Dokumen Pengalihan Personil, Pendanaan dan sarana Prasarana Pendidikan Menengah yang Terfasilitasi	269 Dokumen	1.000.000.000,00	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
1.01.22.102	Biaya Operasi Sekolah	Jumlah sekolah terfasilitasi biaya operasional	360 Sekolah	80.000.000.000,00	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
1.01.22.107	Penyediaan Biaya Penyelesaian Aset Sekolah (P3D)	Jumlah aset yang sudah diverifikasi administrasi dan yang belum di verifikasi secara faktual	0 Berkas	0,00	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
1.01.22.115	Pelayanan Terpadu Pendidikan	Jumlah Pelayanan Publik Terfasilitasi Pendidikan	12 %	800.000.000,00	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
1.01.26	Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus	Capaian peserta program afirmasi pendidikan yang difasilitasi	250 orang per tahun	26.685.917.070,00	
		Capaian Siswa peserta ADEM/ADIK yang difasilitasi	1.164 orang		
		Capaian Sekolah Program Khusus yang terbina	10 unit		
		Cakupan siswa lulus Sekolah Luar Biasa	7 persen		
		Rasio kecukupan rombel terhadap siswa SLB	16 rasio siswa SLB per rombel		
		APM pendidikan khusus	11 persen		
1.01.26.02	Pembinaan dan Pengembangan PK/PLK	Jumlah siswa ADEM dan ADIK yang terfasilitasi bantuan study	500 Orang	3.647.900.000,00	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
1.01.26.25	Makan dan Minum Siswa SMA N 3 dan SMANKOR	Jumlah Siswa SMA Khusus yang terfasilitasi makan dan minum siswa	455 Orang	10.997.400.000,00	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
1.01.26.26	Biaya Operasional KPG, SMA N 3 Buper dan SMA N Keberbakatan Olahraga	Jumlah KPG, SMA N 3 Buper dan SMAN Keberbakatan Olahraga Mendapatkan Biaya Operasional	5 Sekolah	2.000.000.000,00	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
1.01.26.50	Pembinaan Siswa SMANKOR Jayapura Mengikuti Kejuaraan	Jumlah siswa / atlet per cabor di SMANKOR mengikuti kejuaraan dan Turnamen pelajar tingkat nasional	20 Orang	1.000.000.000,00	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
1.01.26.52	Pelaksanaan Lomba FLSN, O2SN Gebyard dan Pramuka SLB	Jumlah siswa SMA yang mengikuti lomba FLS2N, O2SN Gebyard dan Pramuka SLB tingkat Provinsi dan Nasional	100 Orang Kegiatan	1.100.000.000,00	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
1.01.26.71	penyediaan biaya operasional PAUD bahasa ibu Paud Model di 10 lembaga	Jumlah paud model yang terfasilitasi biaya operasional sekolah	10 Sekolah	638.050.000,00	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
1.01.26.73	Fasilitasi lomba O2SN SD tk Provinsi	Jumlah siswa SD yang terfasilitasi lomba O2SN tingkat Provinsi	100 Orang	1.802.567.070,00	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
1.01.26.74	Fasilitasi Lomba OSN SD tk Provinsi	Jumlah siswa SD yang terfasilitasi lomba OS tingkat Provinsi	N100 Orang	1.500.000.000,00	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
1.01.26.76	Fasilitasi Lomba OSN SMP tk Provinsi	Jumlah siswa SMP yang terfasilitasi lomba OSN tingkat Provinsi	100 Orang	1.000.000.000,00	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
1.01.26.78	pengadaan peralatan latihan dan bertanding 8 CABOR untuk siswa SMANKOR	Jumlah peralatan dan latihan SMANKOR terfasilitasi	50 Alat	1.000.000.000,00	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
1.01.26.79	Pengembangan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus	Jumlah KPG yang di Revitalisasi	1 Unit	2.000.000.000,00	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
1.01.46	Program Pendidikan Menengah Kejuruan	Persentase Anak Asli Papua penerima Beasiswa Pendidikan Jenjang SMK	42 persen	628.648.417.500,00	
		Capaian SMK yang dikembangkan sesuai dengan potensi 5 Wilayah Adat	2 sekolah per tahun		
1.01.46.01	Lomba Ketrampilan Siswa (LKS-SMK)	Meningkatnya Siswa SMK yang mengikuti Lomba LKS SMK	0 %	2.718.217.500,00	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
		Jumlah siswa yang mengikuti lomba LKS SMK	100 Orang		
1.01.46.02	Magang Guru Produktif dan Siswa	Meningkatnya Magang Guru Produktif yang terfasilitasi	100 %	2.000.000.000,00	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
1.01.46.18	Lomba Debat Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia	Meningkat Sasiswa SMK yang mengikuti Lomba Debat Bahasa	100 %	500.000.000,00	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
1.01.46.21	Penerapan dan Pelatihan MBS SMK	Meningkatnya Penerapan MBS SMK yang terfasilitasi	100 %	665.800.000,00	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
1.01.46.30	TOT Penyusunan Kurikulum SMK	Jumlah Pelatihan Penyusunan KTSP SMK	138 Orang	1.000.000.000,00	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
1.01.46.31	Pembinaan Musyawarah Kelompok Kerja Kepala Sekolah SMK	Jumlah Guru SMK yang mengikuti latihan MKKS	100 Orang	500.000.000,00	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
1.01.46.47	Revitalisasi Kajian Kurikulum SMK di lima Wilayah Adat	Tersusnya Dokumen Kajian Kurikulum 5 SMK berbasis Potensi Lokal	1 Dokumen	500.000.000,00	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
1.01.46.54	Lomba O2SN SMK	Jumlah siswa SMK yang mengikuti lomba O2SN tingkat Provinsi dan Nasional	100 Orang	800.000.000,00	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
1.01.46.56	Lomba FLS2N SMK	Jumlah siswa SMK yang mengikuti lomba FLS2N tingkat Provinsi dan Nasional	100 Orang	800.000.000,00	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
1.01.46.57	Lomba debat bahasa inggris dan indonesia	Jumlah siswa SMK yang mengikuti lomba Debat bahasa inggris dan bahasa indonesia tingkat Provinsi dan Nasional	100 Orang	500.000.000,00	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
1.01.46.58	Lomba Adiwiyata Mandala SMK	Jumlah Sekolah SMK yang terjaring mewakili lomba adiwiyata tingkat nasional	116 Sekolah	500.000.000,00	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
1.01.46.59	Lomba Karya Ilmiah siswa SMK	Jumlah siswa SMA yang mengikuti lomba Karya Ilmiah tingkat Provinsi dan Nasional	138 Orang	600.000.000,00	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
1.01.46.60	Lomba Keterampilan Siswa (LKS)	jumlah siswa per program keahlian SMK yang mengikuti lomba keterampilan siswa tingkat provinsi dan nasional	100 Orang	2.800.000.000,00	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
1.01.46.61	Magang siswa produktif SMK	jumlah siswa per program keahlian SMK yang mengikuti magang di pusat industri luar papua	60 Orang	600.000.000,00	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
1.01.46.62	Magang guru produktif SMK	Jumlah guru produktif per program keahlian mengikuti magang di pusat industri di luar papua dan diluar negeri	100 Orang	700.000.000,00	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
1.01.46.63	Praktek kerja industri siswa	Jumlah siswa kelas akhir per program keahlian mengikuti praktek kerja industri dalam daerah	100 Orang	1.165.500.000,00	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
1.01.46.65	Penyediaan Biaya Aplikasi Travel SMK Pariwisata di 6 Sekolah	Jumlah sekolah yang mendapatkan bantuan biaya aplikasi travel pada SMK Pariwisata	4 Sekolah	1.000.000.000,00	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
1.01.46.67	DAK Penugasan SMK	Jumlah siswa kelas akhir SMK yang mendapatkan sertifikat keahlian	9.600 Orang	606.500.000.000,00	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
1.01.46.68	pelatihan penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) SMK	Jumlah guru smk yang mengikuti pelatihan penyusunan RPP	100 Orang	713.146.000,00	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
1.01.46.69	pelatihan penyusunan rencana kerja anggaran sekolah (RKAS) SMK	Jumlah guru dan tenaga kependidikan SMK yang mengikuti pelatihan penyusunan RKAS	100 Orang	985.754.000,00	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
1.01.46.70	pelatihan manajemen berbasis sekolah (MBS) SMK	jumlah kepala sekolah/wakil kepala sekolah HUMAS SMK yang mengikuti pelatihan MBS	100 Orang	700.000.000,00	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
1.01.46.78	Pengembangan Unit Produksi (Kantin Sekolah Berbasis Makanan Lokal dan toko Souvenir dan Portal Informasi Berbasis Online) SMK di 6 Kota	Jumlah unit Produksi yang terfasilitasi untuk mendukung peningkatan produksi berbasis kemandirian	20 Unit	1.000.000.000,00	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
1.01.46.81	Revitalisasi SMK	Jumlah SMK Yang terfasilitasi	10 %	600.000.000,00	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
1.01.46.82	Penyusunan Kurikulum Praktek Kerja Siswa SMA/SMK	Jumlah Siswa Praktek kerja SMK yang Terfasilitasi	200 %	800.000.000,00	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
1.02	Kesehatan			1.194.181.675.390,00	
1.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	200 persen	72.109.780.000,00	
		Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	10.000.000 persen		
1.02.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang disediakan	2.002.000 Surat	150.000.000,00	Dinas Kesehatan
1.02.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang disediakan	2.780 Surat	559.136.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura
1.02.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang disediakan	5 Surat	440.000.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah Abepura
1.02.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang disediakan	1.000 Surat	15.000.000,00	Rumah Sakit Jiwa
1.02.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Jasa Layanan berlangganan Listrik,Air,Telepon, Transponder	12 Layanan	1.843.200.000,00	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
1.02.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Jasa Layanan berlangganan Listrik,Air,Telepon, Transponder	12 Layanan	7.855.000.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura
1.02.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Jasa Layanan berlangganan Listrik,Air,Telepon, Transponder	60 Layanan	3.750.000.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah Abepura
1.02.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Jasa Layanan berlangganan Listrik,Air,Telepon, Transponder	12 Layanan	2.000.000.000,00	Rumah Sakit Jiwa
1.02.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	70 Unit	800.000.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah Abepura
1.02.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Unit Mobil DInas/Operasional yang terpelihara dan Terfasilitasi Perijinannya	100 Unit	250.000.000,00	Dinas Kesehatan
1.02.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Unit Mobil DInas/Operasional yang terpelihara dan Terfasilitasi Perijinannya	147 Unit	102.000.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura
1.02.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Unit Mobil DInas/Operasional yang terpelihara dan Terfasilitasi Perijinannya	20 Unit	550.000.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah Abepura
1.02.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Unit Mobil DInas/Operasional yang terpelihara dan Terfasilitasi Perijinannya	20 Unit	100.000.000,00	Rumah Sakit Jiwa
1.02.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Honor yang terbayarkan	24 Orang	60.000.000,00	Dinas Kesehatan
1.02.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Luas Gedung dan Halaman yang disediakan jasa kebersihan	20.000 M2	2.538.994.000,00	Dinas Kesehatan
		Jumlah tenaga kebersihan dan Fasilitas Pendukung kebersihan kantor	67 Orang		
		Jumlah Jenis Bahan dan Alat Kebersihan	30 Jenis		
1.02.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Luas Gedung dan Halaman yang disediakan jasa kebersihan	0 M2	9.000.000.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura
		Jumlah tenaga kebersihan dan Fasilitas Pendukung kebersihan kantor	130 Orang		
		Jumlah Jenis Bahan dan Alat Kebersihan	0 Jenis		
1.02.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Luas Gedung dan Halaman yang disediakan jasa kebersihan	7.675 M2	9.500.000.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah Abepura
		Jumlah tenaga kebersihan dan Fasilitas Pendukung kebersihan kantor	95 Orang		
		Jumlah Jenis Bahan dan Alat Kebersihan	10 Jenis		
1.02.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Luas Gedung dan Halaman yang disediakan jasa kebersihan	0 M2	2.110.020.000,00	Rumah Sakit Jiwa
		Jumlah tenaga kebersihan dan Fasilitas Pendukung kebersihan kantor	30 Orang		
		Jumlah Jenis Bahan dan Alat Kebersihan	0 Jenis		
1.02.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	20 Unit	275.000.000,00	Dinas Kesehatan
1.02.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	90 Unit	250.000.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah Abepura
1.02.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	40 Jenis	700.000.000,00	Dinas Kesehatan
1.02.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	13 Jenis	600.000.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
1.02.01 .10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	50 Jenis	1.050.000.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah Abepura
1.02.01 .10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	100 Jenis	1.000.000.000,00	Rumah Sakit Jiwa
1.02.01 .11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan	12 Jenis	1.266.620.000,00	Dinas Kesehatan
		Jumlah penggandaan	20 Lembar		
		Jumlah Jenis Barang Cetakkan yang Disediakan	25 Jenis		
		Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	20 Bulan		
1.02.01 .11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan	20 Jenis	1.050.000.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah Abepura
		Jumlah penggandaan	100 Lembar		
		Jumlah Jenis Barang Cetakkan yang Disediakan	200 Jenis		
		Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	12 Bulan		
1.02.01 .11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan	95 Jenis	1.000.000.000,00	Rumah Sakit Jiwa
		Jumlah penggandaan	2.000 Lembar		
		Jumlah Jenis Barang Cetakkan yang Disediakan	200 Jenis		
		Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	0 Bulan		
1.02.01 .12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen Listrik yang disediakan	60 Buah	400.000.000,00	Dinas Kesehatan
1.02.01 .12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen Listrik yang disediakan	30 Buah	250.000.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura
1.02.01 .12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen Listrik yang disediakan	100 Buah	350.000.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah Abepura
1.02.01 .12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen Listrik yang disediakan	30 Buah	1.000.000.000,00	Rumah Sakit Jiwa
1.02.01 .13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan Perlengkapan	20 Unit	1.272.600.000,00	Dinas Kesehatan
1.02.01 .14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	1 Unit	20.000.000,00	Dinas Kesehatan
1.02.01 .15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	20 Jenis	256.520.000,00	Dinas Kesehatan
1.02.01 .15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	3 Jenis	30.000.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura
1.02.01 .15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12 Jenis	200.000.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah Abepura
1.02.01 .15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	10 Jenis	700.000.000,00	Rumah Sakit Jiwa
1.02.01 .17	Penyediaan makanan dan minuman	Pelaksanaan penyediaan makan dan minum	26 Kegiatan	510.000.000,00	Dinas Kesehatan
		Pelaksanaan makan minum tamu dan rapat	40 Kali Tahun		
		Pelaksanaan makan minum saat olah raga (hari Jumat)	48 Kali		
		Tersediannya Makanan dan Minuman	0 Bulan		
		Jumlah orang yang disediakan makan dan minuman	0 Orang		

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
1.02.01 .17	Penyediaan makanan dan minuman	Pelaksanaan penyediaan makan dan minum	0 Kegiatan	1.209.840.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura
		Pelaksanaan makan minum tamu dan rapat	11.832 Kali Tahun		
		Pelaksanaan makan minum saat olah raga (hari Jumat)	0 Kali		
		Tersediannya Makanan dan Minuman	0 Bulan		
		Jumlah orang yang disediakan makan dan minuman	1 Orang		
1.02.01 .17	Penyediaan makanan dan minuman	Pelaksanaan penyediaan makan dan minum	0 Kegiatan	350.000.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah Abepura
		Pelaksanaan makan minum tamu dan rapat	0 Kali Tahun		
		Pelaksanaan makan minum saat olah raga (hari Jumat)	0 Kali		
		Tersediannya Makanan dan Minuman	0 Bulan		
		Jumlah orang yang disediakan makan dan minuman	0 Orang		
1.02.01 .17	Penyediaan makanan dan minuman	Pelaksanaan penyediaan makan dan minum	200 Kegiatan	2.000.000.000,00	Rumah Sakit Jiwa
		Pelaksanaan makan minum tamu dan rapat	200 Kali Tahun		
		Pelaksanaan makan minum saat olah raga (hari Jumat)	0 Kali		
		Tersediannya Makanan dan Minuman	200 Bulan		
		Jumlah orang yang disediakan makan dan minuman	200 Orang		
1.02.01 .18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	12 Orang	1.054.000.000,00	Dinas Kesehatan
1.02.01 .18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	96 Orang	1.975.000.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura
1.02.01 .18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	0 Orang	2.500.000.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah Abepura
1.02.01 .18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	250 Orang	3.000.000.000,00	Rumah Sakit Jiwa
1.02.01 .19	Penyediaan Jasa Pengamanan	Pelaksanaan pembayaran insentif bagi tenag operator dan penjaga X-Ray VIP Room Bandara Sentani	a0 Orang Bulan	861.840.000,00	Dinas Kesehatan
		Pelaksanaan pembayaran honor bagi satpam	28 Orang Bulan		
		Pelaksanaan uang makan satpam	0 Orang Bulan		
		Jumlah tenaga pengamanan	0 Orang		
1.02.01 .19	Penyediaan Jasa Pengamanan	Pelaksanaan pembayaran insentif bagi tenag operator dan penjaga X-Ray VIP Room Bandara Sentani	a0 Orang Bulan	2.600.000.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura
		Pelaksanaan pembayaran honor bagi satpam	50 Orang Bulan		
		Pelaksanaan uang makan satpam	0 Orang Bulan		
		Jumlah tenaga pengamanan	50 Orang		
1.02.01 .19	Penyediaan Jasa Pengamanan	Pelaksanaan pembayaran insentif bagi tenag operator dan penjaga X-Ray VIP Room Bandara Sentani	a0 Orang Bulan	1.700.000.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah Abepura
		Pelaksanaan pembayaran honor bagi satpam	18 Orang Bulan		

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
		Pelaksanaan uang makan satpam	0 Orang Bulan		
		Jumlah tenaga pengamanan	18 Orang		
1.02.01.19	Penyediaan Jasa Pengamanan	Pelaksanaan pembayaran insentif bagi tenag operator dan penjaga X-Ray VIP Room Bandara Sentani	a0 Orang Bulan	1.055.010.000,00	Rumah Sakit Jiwa
		Pelaksanaan pembayaran honor bagi satpam	25 Orang Bulan		
		Pelaksanaan uang makan satpam	0 Orang Bulan		
		Jumlah tenaga pengamanan	0 Orang		
1.02.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	20 persen	23.500.864.000,00	
1.02.02.03	Pembangunan gedung kantor	Luas bangunan yang dibangun	5.200 M2	0,00	Dinas Kesehatan
		Tersedianya desain perencanaan bangunan	0 Dokumen		
1.02.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan yang diadakan	1 Unit	495.700.000,00	Dinas Kesehatan
		Jumlah kendaraan roda 2	0 Unit		
1.02.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan yang diadakan	10 Unit	2.500.000.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah Abepura
		Jumlah kendaraan roda 2	0 Unit		
1.02.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan	10 Unit	650.000.000,00	Dinas Kesehatan
1.02.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan	40 Unit	2.000.000.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah Abepura
1.02.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan	30 Unit	5.000.000.000,00	Rumah Sakit Jiwa
1.02.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan perlengkapan	20 Unit	648.164.000,00	Dinas Kesehatan
1.02.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan perlengkapan	35 Unit	1.000.000.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura
1.02.02.10	Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur yang diadakan	50 Unit	1.000.000.000,00	Dinas Kesehatan
1.02.02.10	Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur yang diadakan	40 Unit	1.000.000.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura
1.02.02.10	Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur yang diadakan	100 Unit	1.000.000.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah Abepura
1.02.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 Unit	800.000.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura
		belanja sewa	0 Tahun		
1.02.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	0 Unit	60.300.000,00	Dinas Kesehatan
		Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	56 Unit		
		sewa kendaraan	12 Bulan		
1.02.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	0 Unit	2.631.200.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura
		Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	147 Unit		
		sewa kendaraan	0 Bulan		
1.02.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	50 Unit	500.000.000,00	Rumah Sakit Jiwa
		Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	20 Unit		

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
		sewa kendaraan	25 Bulan		
1.02.02 .26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Pelaksanaan pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	2 Kegiatan	2.515.500.000,00	Dinas Kesehatan
		Jumlah Perlengkapan Gedung kantor yang terpelihara	0 Unit		
		Tersediannya biaya pemeliharaan gedung kantor	0 Bulan		
1.02.02 .26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Pelaksanaan pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	0 Kegiatan	500.000.000,00	Rumah Sakit Jiwa
		Jumlah Perlengkapan Gedung kantor yang terpelihara	80 Unit		
		Tersediannya biaya pemeliharaan gedung kantor	0 Bulan		
1.02.02 .28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	160 Unit	200.000.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura
1.02.02 .30	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Luas bangunan yang direhab	2.162 M2	1.000.000.000,00	Dinas Kesehatan
1.02.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	0 persen	5.257.000.000,00	
1.02.03 .02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	364 Stell	707.000.000,00	Dinas Kesehatan
1.02.03 .02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	923 Stell	1.000.000.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura
1.02.03 .02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	577 Stell	750.000.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah Abepura
1.02.03 .02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	150 Stell	1.000.000.000,00	Rumah Sakit Jiwa
1.02.03 .03	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan	200 Stell	200.000.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah Abepura
1.02.03 .04	Pengadaan pakaian KORPRI	jumlah pakaian KORPRI yang diadakan	600 Stell	600.000.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah Abepura
1.02.03 .05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus yang diadakan	135 Stell	1.000.000.000,00	Rumah Sakit Jiwa
1.02.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	0 persen	15.620.500.000,00	
1.02.05 .01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	20 Orang	866.000.000,00	Dinas Kesehatan
1.02.05 .01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	5 Orang	200.000.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura
1.02.05 .01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	650 Orang	3.500.000.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah Abepura
1.02.05 .02	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	150 Orang	100.000.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura
1.02.05 .03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta bimbingan teknis tentang implementasi peraturan perundang-undangan	250 Orang	10.000.000.000,00	Rumah Sakit Jiwa
1.02.05 .04	Pendidikan dan Pelatihan Non Formal	Jumlah aparatur yang terlatih	20 Orang	954.500.000,00	Dinas Kesehatan
1.02.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya kualitas akuntabilitas OPD	0 persen	1.459.500.000,00	

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
1.02.06 .01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	5 Laporan	90.000.000,00	Dinas Kesehatan
		Laporan LAKIP SKPD	0 Dokumen		
1.02.06 .01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	3 Laporan	100.000.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura
		Laporan LAKIP SKPD	0 Dokumen		
1.02.06 .01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	12 Laporan	120.000.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah Abepura
		Laporan LAKIP SKPD	0 Dokumen		
1.02.06 .01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	2 Laporan	30.000.000,00	Rumah Sakit Jiwa
		Laporan LAKIP SKPD	0 Dokumen		
1.02.06 .02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah pelaporan keuangan semesteran yang diselesaikan tepat waktu	2 Laporan	30.000.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura
1.02.06 .02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah pelaporan keuangan semesteran yang diselesaikan tepat waktu	2 Laporan	50.000.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah Abepura
1.02.06 .02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah pelaporan keuangan semesteran yang diselesaikan tepat waktu	1 Laporan	15.000.000,00	Rumah Sakit Jiwa
1.02.06 .03	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jumlah pelaporan prognosis realisasi anggaran yang diselesaikan tepat waktu	2 Laporan	50.000.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah Abepura
1.02.06 .03	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jumlah pelaporan prognosis realisasi anggaran yang diselesaikan tepat waktu	1 Laporan	15.000.000,00	Rumah Sakit Jiwa
1.02.06 .04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	12 Laporan	51.500.000,00	Dinas Kesehatan
1.02.06 .04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	1 Laporan	30.000.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura
1.02.06 .04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	4 Laporan	50.000.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah Abepura
1.02.06 .04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	1 Laporan	30.000.000,00	Rumah Sakit Jiwa
1.02.06 .05	Penyusunan Renja, RKA dan Perubahan APBD	Jumlah dokumen	3 Dokumen	103.000.000,00	Dinas Kesehatan
1.02.06 .05	Penyusunan Renja, RKA dan Perubahan APBD	Jumlah dokumen	3 Dokumen	120.000.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura
1.02.06 .05	Penyusunan Renja, RKA dan Perubahan APBD	Jumlah dokumen	10 Dokumen	200.000.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah Abepura
1.02.06 .05	Penyusunan Renja, RKA dan Perubahan APBD	Jumlah dokumen	3 Dokumen	75.000.000,00	Rumah Sakit Jiwa
1.02.06 .13	Penyusunan SOP	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Kesehatan
1.02.06 .13	Penyusunan SOP	Jumlah Dokumen	0 Dokumen	200.000.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah Abepura
1.02.1 5	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase obat yang memenuhi syarat	0 %	18.514.610.030,00	
		Persentase makanan yang memenuhi syarat	0 %		
		Persentase Puskesmas yang mempunyai ketersediaan obat dan vaksin	80 %		
		Persentase Penyaluran Alat Kesehatan (PAK) yang diawasi	78 %		

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
1.02.15.04	Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit	Jumlah peningkatan mutu pelayanan komunitas dan RS	29 Kabupaten	2.500.000.000,00	Dinas Kesehatan
1.02.15.07	Pengiriman dan Relokasi Obat buffer stok dan program provinsi ke Kab dan 14 titik terisolir	Terdistribusinya obat buffer stock dan obat program ke kabupaten	29 Kabupaten	2.200.000.000,00	Dinas Kesehatan
		Jumlah distribusinya obat buffer stock dan obat program ke kabupaten	29 Kabupaten		
1.02.15.09	Monitoring pemanfaatan buffer stock di GFK/RS/PKM dan pos obat kampung serta evaluasi hasil magang tenaga GF kab/kota	Jumlah Kabupaten yang di Monev obat buffer stok	29 Kabupaten	641.814.000,00	Dinas Kesehatan
1.02.15.10	Pengadaan obat buffer stock provinsi	Tersedianya Obat Buffer Stock Provinsi	87 Produk	2.500.000.000,00	Dinas Kesehatan
1.02.15.14	Pengadaan obat-obatan untuk program HIV/AIDS	Tersedianya Obat Obatan HIV/AIDS	21 Produk	1.118.044.493,00	Dinas Kesehatan
1.02.15.36	Pengadaan Obat-obatan Program P2M	Terlaksananya Pengadaan Obat Obatan P2M	11 Produk	639.446.500,00	Dinas Kesehatan
1.02.15.50	Pengadaan logistik Non Oat Provinsi Papua	Jumlah Logistik Non OAT yang Tersedia	4 Produk	1.619.825.100,00	Dinas Kesehatan
1.02.15.53	Pengadaan reagen IMS Provinsi Papua	Jumlah Reagen IMS yang Diadakan	2 Produk	538.754.000,00	Dinas Kesehatan
1.02.15.55	Pengelolaan Perbekalan Farmasi/Gudang Obat Buffer Stock Provinsi	Jumlah Pengelolaan Sarana IFK	1 Tahun	100.000.000,00	Dinas Kesehatan
1.02.15.56	Bimbingan Teknis Kepada Sarana Penyalur Alat Kesehatan	Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan	60 Orang	74.725.937,00	Dinas Kesehatan
1.02.15.61	Peningkatan Kapasitas SDM Kefarmasian di Apotek	Jumlah Apoteker yang di Latih	35 Orang	300.000.000,00	Dinas Kesehatan
1.02.15.64	Pembekalan Penanggung Jawab Sarana Distribusi Obat (PBF) Tingkat Provinsi	Jumlah Apoteker Penanggung Jawab Yang D Latih	44 Orang	310.000.000,00	Dinas Kesehatan
1.02.15.67	Pengadaan Reagen Viral Load	Jumlah Jenis Reagen Viral Load yang diadakan	1 Jenis	700.000.000,00	Dinas Kesehatan
1.02.15.68	Pengadaan Logistik / RDT Malaria	Jumlah Jenis Logistik RDT Malaria yang diadakan	1 Jenis	1.972.000.000,00	Dinas Kesehatan
1.02.15.69	Penyediaan Dana Distribusi Obat, Vaksin dan Reagen dari Instalasi Farmasi Provinsi Ke IFK dan RS	Jumlah Kab/Kota yang menerima Distribusi Obat dan Vaksin	29 Kabupaten	2.400.000.000,00	Dinas Kesehatan
1.02.15.71	Pelatihan Pengelolaan obat sesuai standar bagi Pengelola Obat Instalasi Farmasi Kab/kota	Jumlah Tenaga Pengelola Obat yang dilatih	50 Orang	550.000.000,00	Dinas Kesehatan
1.02.15.72	Pelatihan Pengelolaan Obat sesuai standar bagi Pengelola Obat / Instalasi Farmasi Rumah Sakit Baru	Jumlah Tenaga Farmasi Rumah Sakit yang dilatih	29 Orang	350.000.000,00	Dinas Kesehatan
1.02.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Angka Kesehatan Masyarakat	0 %	133.107.230.000,00	
		Cakupan puskesmas pembantu	129 per 100.000 penduduk		
		Cakupan puskesmas pembantu	129 per 100.000 penduduk		
		Cakupan UKBM kabupaten/kota yang terpetakan	60 persen		
		Cakupan UKBM kabupaten/kota yang terpetakan	60 persen		
		Cakupan puskesmas terakreditasi	9 persen		

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
		Cakupan puskesmas terakreditasi	9 persen		
		Cakupan distrik yang sudah memiliki puskesmas	19 persen		
		Cakupan distrik yang sudah memiliki puskesmas	19 persen		
		Persentasi Pengguna Jaminan BPJS di Rumah Sakit	0 Orang		
		Persentasi Pengguna Kartu Papua Sehat (KPS) di RS	0 Orang Tahun		
		Persentase indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) rumah sakit yang mencapai target	70 %		
		Persentase indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) rumah sakit yang mencapai target	75 %		
1.02.16 .37	Peningkatan Pelayanan Medis Umum dan Masyarakat	Jumlah tenaga kesehatan yang dibayarkan	483 Orang Bulan	31.678.940.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura
1.02.16 .37	Peningkatan Pelayanan Medis Umum dan Masyarakat	Jumlah tenaga kesehatan yang dibayarkan	500 Orang Bulan	15.000.000.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah Abepura
1.02.16 .38	Penelitian Bidang Kesehatan	Kegiatan penelitian di bidang kesehatan	2 Dokumen	100.000.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura
1.02.16 .60	pelaksanaan Kartu Papua Sehat (KPS) Provinsi Papua	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Masyarakat Papua	200.000 Orang	78.600.000.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah Abepura
		JasaTenaga Kontrak Rumah Sakit	210 Orang		
		1. Tenaga Medis**	30 Orang Tahun		
1.02.16 .75	Pelatihan Pendampingan Akreditasi Puskesmas	Jumlah tenaga pendamping akreditasi puskesmas	30 Orang	450.000.000,00	Dinas Kesehatan
1.02.16 .82	Pembinaan Akreditasi Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang dibina Akreditasi	0 Unit	300.000.000,00	Dinas Kesehatan
		Jumlah Puskesmas yang diakreditasi	10 Unit		
		Jumlah kabupaten/kota yang mendapatkan pembinaan teknis akreditasi puskesmas	10 Kabupaten		
1.02.16 .85	Pertemuan Koordinasi Akreditasi FKTP	Jumlah orang mengikuti pertemuan Akreditasi FKTP	40 Orang	338.800.000,00	Dinas Kesehatan
1.02.16 .86	Pelatihan Manajemen Puskesmas	Jumlah Kepala Puskesmas yang mendapat pelatihan Manajemen Puskesmas	30 Orang	250.000.000,00	Dinas Kesehatan
1.02.16 .90	Monitoring pelayanan kesehatan primer	Jumlah puskesmas yang melakukan pelayanan sesuai standar	70 %	263.000.000,00	Dinas Kesehatan
		Jumlah Laporan Monitoring	29 Laporan		
1.02.16 .96	Pengembangan Telemedicine daerah terisolir dan perbatasan	Jumlah Telemedicine yang dikembangkan	0 Jenis	1.200.000.000,00	Dinas Kesehatan
		Jumlah SDM yang ditingkatkan kapasitasnya dalam menggunakan Telemedicine	20 Orang Tahun		
1.02.16 .97	Pengadaan radio medicine	Jumlah Radio Telemedicine yang diadakan	150 Unit	780.000.000,00	Dinas Kesehatan
1.02.16 .98	Pembinaan Teknis Program Pelayanan Primer	Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan Pembinaan Pelayanan Primer	18 Kabupaten	300.000.000,00	Dinas Kesehatan
1.02.16 .100	Pertemuan Pemutakhiran Data Puskesmas yang memberikan Pelayanan sesuai Standar	Jumlah Puskesmas yang memberikan pelayanan sesuai standar	72 Puskesmas	314.500.000,00	Dinas Kesehatan
1.02.16 .101	Verifikasi Pemilihan Puskesmas berprestasi	Jumlah Puskesmas berprestasi yang terverifikasi	3 Unit	145.650.000,00	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
1.02.16 .102	Pertemuan Pemutakhiran Data Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang mengupdate data SPA	72 Puskesmas	614.500.000,00	Dinas Kesehatan
1.02.16 .103	Workshop Audit Internal dan Rapat Tinjauan Manajemen	Jumlah Peserta	40 Orang	394.000.000,00	Dinas Kesehatan
1.02.16 .104	Workshop Keselamatan Pasien dan Manajemen Resiko	Jumlah Peserta	40 Orang	394.000.000,00	Dinas Kesehatan
1.02.16 .105	Bimbingan Teknis Pelayanan Puskesmas sesuai Standar Perbatasan	Jumlah Puskesmas Perbatasan yang mengikuti Bimtek sesuai standar	7 Unit	224.840.000,00	Dinas Kesehatan
1.02.16 .107	Verifikasi dan Registrasi Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang terverifikasi	72 Unit	300.000.000,00	Dinas Kesehatan
1.02.16 .108	Pertemuan Evaluasi Program Pelayanan Primer	Jumlah Peserta	72 Orang	614.500.000,00	Dinas Kesehatan
1.02.16 .109	Pertemuan Evaluasi Pelaksanaan PIS-PK	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Program PIS-PK	72 Puskesmas	614.500.000,00	Dinas Kesehatan
1.02.16 .110	Pertemuan Sosialisasi Puskesmas BLU	Jumlah Peserta	2 Orang	230.000.000,00	Dinas Kesehatan
1.02.1 7	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase obat yang memenuhi syarat	0 %	300.000.000,00	
		Persentase makanan yang memenuhi syarat	0 %		
1.02.17 .02	Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya	Jumlah Sekolah dasar tersosialisasi MJAS yang aman dari bahan berbahaya	50 Sekolah	300.000.000,00	Dinas Kesehatan
		Jumlah Pengawasan Pangan Berbahaya yang dilakukan	5 Kali		
1.02.1 8	Program Pengembangan Obat Asli Indonesia	Tanaman obat tradisional yang berkembang di masyarakat	15 jumlah	2.942.000.000,00	
1.02.18 .02	Pengembangan standarisasi tanaman obat bahan alam indonesia	Jumlah Tanaman Obat yg dikembangkan	12 Buah	600.000.000,00	Dinas Kesehatan
1.02.18 .11	Pengembangan Obat Asli Daerah	Jumlah Penggunaan obat tradisional yang dikembangkan di masyarakat	60 %	560.000.000,00	Dinas Kesehatan
		Jumlah tanaman obat tradisional yang dikembangkan di masyarakat	12 Jenis		
		Jumlah Obat Tradisional yang dikembangkan dan digunakan	12 Jenis		
1.02.18 .16	Workshop Obat Tradisional Berbasis Wilayah Adat	Jumlah Peserta yang mengikuti Workshop	50 Orang	350.000.000,00	Dinas Kesehatan
1.02.18 .19	Penilaian Pemanfaatan TOGA	Jumlah Orang Yang Mengikuti Pertemuan	29 Orang	571.000.000,00	Dinas Kesehatan
		Jumlah dokumen penilaian TOGA	3 Dokumen		
		Jumlah PKM dan Kampung yang melaksanakan dan menggunakan TOGA sesuai SOP	20 Kampung		
1.02.18 .25	KEGIATAN SENTRA P3T	Jumlah laporan Kegiatan Sentra P3T	2 Laporan	269.000.000,00	Dinas Kesehatan
1.02.18 .28	PELATIHAN AKUPRESSUR BAGI DOKTER	Jumlah Dokter yang mengikuti pelatihan akupresur	25 Orang	170.000.000,00	Dinas Kesehatan
1.02.18 .29	PELATIHAN AKUPRESSUR BAGI TENAGA MEDIS PUSKESMAS	Jumlah Tenaga Medis Puskesmas yang terlatih akupresur	26 Orang	320.000.000,00	Dinas Kesehatan
1.02.18 .44	Sosialisasi Asman TOGA, Akupresur bagi Dosen dan Mahasiswa di P.T Kesehatan	Jumlah peserta yang tersosialisasi Asman TOGA, Akupresur .	36 Orang	102.000.000,00	Dinas Kesehatan
1.02.1 9	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Rasio kelompok Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)	80 persen	5.480.000.000,00	

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
		Rasio kelompok Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)	30 persen		
		Cakupan advokasi pelayanan kesehatan pada masyarakat	80 %		
		Cakupan advokasi pelayanan kesehatan pada masyarakat	50 %		
1.02.19.01	Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	Jumlah Media Promosi Kesehatan	6 Kegiatan	1.500.000.000,00	Dinas Kesehatan
1.02.19.02	Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	Jumlah pesan yang disampaikan	15 Jenis	420.000.000,00	Dinas Kesehatan
1.02.19.02	Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	Jumlah pesan yang disampaikan	3 Jenis	1.000.000.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura
1.02.19.06	Penyebarluasan informasi melalui media masa	Jumlah Media KIE yang digunakan	15 Jenis	700.000.000,00	Dinas Kesehatan
1.02.19.07	Pengembangan Saka Bhakti Husada (SBH)	Jumlah Siswa SBH yang diorientasi	60 Orang	630.000.000,00	Dinas Kesehatan
1.02.19.08	Pendataan Pengembangan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)	Tersedianya data UKBM Tingkat Propinsi	29 Dokumen	310.000.000,00	Dinas Kesehatan
1.02.19.24	Pelatihan Promosi Kesehatan bagi petugas Kesehatan	Jumlah Tenaga Promkes yang dilatih	29 Orang	300.000.000,00	Dinas Kesehatan
1.02.19.25	Monitoring dan evaluasi program promosi dan pemberdayaan masyarakat di 5 Regional	Jumlah laporan.	29 Laporan	300.000.000,00	Dinas Kesehatan
1.02.19.42	Advokasi dan sosialisasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	Jumlah Kab/kota yang melaksanakan Germa	s29 Kabupaten	320.000.000,00	Dinas Kesehatan
1.02.20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum (standar yang digunakan Indonesia 2.100 Kkal/kapita/hari)	2.237 persen	7.690.000.000,00	
		Cakupan masyarakat teridentifikasi kurang gizi	37 persen		
		Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	60 persen		
		Rata-rata konsumsi kalori per kapita per hari	2.237 Kkal		
1.02.20.02	Pemberian tambahan makanan dan vitamin	Jumlah Balita yang mendapatkan PMT	1.000 Orang	6.000.000.000,00	Dinas Kesehatan
1.02.20.19	Pelatihan Surveillance Kewaspadaan Pangan,Gizi, Pemantauan Status Gizi di Daerah Bermasalah Kesehatan	Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan Surveillance Kewaspadaan Pangan Gizi	87 Orang	550.000.000,00	Dinas Kesehatan
1.02.20.26	Pertemuan pencatatan dan pelaporan program gizi	Jumlah Kabupaten Yang Ikut Pertemuan Pencatatan dan Pelaporan Program Gizi	29 Kabupaten	400.000.000,00	Dinas Kesehatan
1.02.20.29	Sosialisasi 1000 hari pertama Kehidupan	Balita Stanting	27 %	500.000.000,00	Dinas Kesehatan
		Terlaksananya Sosialisasi Program 1000 Hari Pertama Kehidupan	15 Kabupaten		
1.02.20.37	Monitoring, evaluasi dan pelaporan Perbaikan gizi masyarakat	Jumlah laporan	29 Laporan	240.000.000,00	Dinas Kesehatan
1.02.21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Cakupan masyarakat yang terakses pelayanan sanitasi baik	38 persen	2.890.000.000,00	
		Cakupan keluarga terakses air bersih	43 persen		

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
1.02.21.20	Peningkatan kemampuan petugas kesehatan dalam pelaksanaan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM)	Jumlah petugas kabupaten/kota dibina	50 Orang	350.000.000,00	Dinas Kesehatan
1.02.21.24	Pembinaan dan Pelaksanaan STBM	Jumlah Kampung STBM dan SBS	300 Kampung	420.000.000,00	Dinas Kesehatan
1.02.21.27	Pengawasan Kualitas Air	Jumlah Laporan Pengawasan Kualitas Air yang dilakukan	1 Laporan	600.000.000,00	Dinas Kesehatan
		Persentase Kualitas Air yang memenuhi syarat Kesehatan	80 %		
1.02.21.32	Pembinaan Kebugaran Jasmani	Jumlah kabupaten/ kota yang dibina	18 Kabupaten	350.000.000,00	Dinas Kesehatan
1.02.21.34	Orientasi Pengelolaan Limbah Rumah Sakit	Jumlah Pengelola Limbah Rumah Sakit	30 Orang	400.000.000,00	Dinas Kesehatan
1.02.21.36	Orientasi Upaya Kesehatan Kerja	Jumlah Petugas yang dilatih	100 Orang	420.000.000,00	Dinas Kesehatan
1.02.21.37	Pembinaan Pos Upaya Kesehatan Kerja (UKK) di Kabupaten/Kota	Jumlah Kab/Kota yang dibina	22 Kabupaten	350.000.000,00	Dinas Kesehatan
1.02.22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	API Malaria	34 persen	33.302.748.000,00	
		Tingkat prevalensi Tuberkulosis	41 per 100.000 penduduk		
		Tingkat prevalensi DBD	70 persen		
		Angka penemuan kasus baru kusta (NCDR)	34 per 100.000 penduduk		
		Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	10 per 1.000 penduduk		
		Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	38 per 1.000 penduduk		
		Persentase perempuan umur 30-50 tahun yang dideteksi dini kanker serviks dan payudara	20 persen		
		Persentase penanganan kesehatan pada kejadian luar biasa	85 persen		
1.02.22.05	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	jumlah kab yg memberikan pelayanan P2P	29 Kabupaten	1.000.000.000,00	Dinas Kesehatan
1.02.22.12	Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit IMS-HIV/AIDS	Jumlah kasus yang ditemukan dan ditangani	450 Kasus	1.000.000.000,00	Dinas Kesehatan
		Jumlah peserta yang mengikuti bintek	50 Orang		
1.02.22.14	Pemberantasan penyakit DBD	persentase lokasi yang dilakukan pemberantasan penyakit DBD pada daerah yang potensi KLB	85 %	900.000.000,00	Dinas Kesehatan
		Jumlah peserta yang mengikuti bintek	50 Orang		
1.02.22.15	Pemberantasan penyakit Malaria	Persentase kasus malaria yang diobati ACT	95 %	1.000.000.000,00	Dinas Kesehatan
		Jumlah kasus malaria yang diobati	220.000 Kasus		
1.02.22.16	Pemberantasan penyakit Filaria	Persentase cakupan pencegahan dan pemberantasan penyakit filariasis	90 %	530.000.000,00	Dinas Kesehatan
		Jumlah penduduk yang minum obat pencegahan kaki gajah	2.000.000.000 Orang		
1.02.22.17	Pemberantasan Penyakit Diare	terlaksananya pemberantasan penyakit diare	100 %	500.000.000,00	Dinas Kesehatan
		Jumlah penderita yang ditemukan dan diobati	45.000.000 Orang		

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
1.02.22 .18	Pemberantasan Penyakit Kusta	jumlah kab yang melaksanakan pemberantasan penyakit kusta	29 Kabupaten	710.000.000,00	Dinas Kesehatan
		Jumlah penderita yang ditemukan dan diobati	550.000 Orang		
1.02.22 .19	Pemberantasan Penyakit Frambusia	jumlah kab yg melaksanakan pemberantasan penyakit frambusia	20 Kabupaten	400.000.000,00	Dinas Kesehatan
		Jumlah penduduk yang minum obat pencegahan frambusia	40.000 Orang		
1.02.22 .21	Eradikasi Polio, reduksi Campak dan eliminasi Tetanus	jumlah kab yg melaksanakan Eradikasi polio, reduksi Campak dan Eliminasi Tetanus	29 Kabupaten	850.000.000,00	Dinas Kesehatan
		Jumlah kasus yang ditangani	20 Kasus		
1.02.22 .23	Pengiriman Vaksin, logistik dan tempat penyimpanan Vaksin	Jumlah kabupaten yang dikirim vaksin dan logistik imunisasi	29 Kabupaten	1.000.000.000,00	Dinas Kesehatan
1.02.22 .24	Kolaborasi Penanganan Penderita TB-HIV/AIDS	Persentase pasien koinfeksi TB-HIV mendapatkan pengobatan ARV	100 %	700.000.000,00	Dinas Kesehatan
		Jumlah pasien koinfeksi TB-HIV yang mendapat obat ARV	100 Orang		
1.02.22 .25	Penanggulangan penyakit Taeniasis	jumlah kab yg melakukan penanggulangan Taeniasis	15 Kabupaten	480.780.000,00	Dinas Kesehatan
		Jumlah penderita taeniasis yang ditemukan dan diobati	15 Orang		
1.02.22 .26	Peningkatan pelayanan Imunisasi di Provinsi dan Kabupaten.	Jumlah kabupaten yang dikirim vaksin dan logistik imunisasi	29 Kabupaten	1.203.000.000,00	Dinas Kesehatan
		Jumlah peralatan imunisasi yang diadakan	10 Unit		
1.02.22 .35	Pertemuan asistensi kejadian ikutan pasca Imunisasi (KIPI)	terlaksananya pertemuan asistensi KIPI	29 Kabupaten	670.000.000,00	Dinas Kesehatan
		Jumlah peserta yang mengikuti pertemuan KIPI	35 Orang		
1.02.22 .44	Peningkatan Manajemen program terpadu IMS,HIV/AIDS,TB & Malaria	Jumlah yang melaksanakan Manajemen Program terpadu IMS-HIV AIDS, TB & Malaria	29 Kabupaten	820.000.000,00	Dinas Kesehatan
		Jumlah peserta yyang mengikuti bimtek manajemen pelayanan terpadu IMS HIV/AIDS, TB dan Malaria	50 Orang		
1.02.22 .52	Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah	terlaksananya program surveilans epidemiologi dan penanggulangan wabah	29 Kabupaten	800.000.000,00	Dinas Kesehatan
		Jumlah KLB yang ditangani	29 Kasus		
1.02.22 .57	Penanggulangan penyakit TBC	jumlah penemuan dan pengobatan kasus TB (SR)	80 %	1.000.000.000,00	Dinas Kesehatan
1.02.22 .60	Penanggulangan Krisis Masalah Kesehatan	jumlah kabupaten yang melaksanakan krisis masalah kesehatan	11 Kabupaten	1.500.000.000,00	Dinas Kesehatan
1.02.22 .63	Penanggulangan Penyakit Tidak Menular	Terlaksananya Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular di Kab/Kota	29 Kabupaten	700.000.000,00	Dinas Kesehatan
		Jumlah peserta yang mengikuti bintek pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular	35 Orang		
1.02.22 .67	Peningkatan Pengendalian dan Pencegahan ISPA di Wilayah Regional	terlaksananya pengendalian dan pencegahan penyakit ISPA	29 %	655.000.000,00	Dinas Kesehatan
		Jumlah peserta yang mengikuti bimtek pengendalian dan pencegahan ISPA di wilayah regional	80 Orang		
1.02.22 .72	Monev Terpadu (AIDS,TB,Malaria)	terlaksananya pertemuan monev terpadu (HIV-AID, TB & Malaria	1 Kali	273.000.000,00	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
		Jumlah peserta yang mengikuti pertemuan	50 Orang		
1.02.22.75	Peningkatan Pelayanan Pengamatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Pemutahiran data dan Evaluasi Program	29 Kabupaten	250.000.000,00	Dinas Kesehatan
1.02.22.80	Penanggulangan Penyakit Hepatitis	terlaksananya deteksi dini hepatitis B dan C pada kelompok beresiko	0 Kabupaten	300.000.000,00	Dinas Kesehatan
		Jumlah peserta yang mengikuti bimtek penanggulangan penyakit hepatitis	29 Orang		
1.02.22.90	Penguatan Kepemimpinan Program Tuberkulosis di Kab/Kota	Jumlah Kab/Kota dengan pembiayaan program TBC meningkat	22 Kabupaten	310.500.000,00	Dinas Kesehatan
1.02.22.91	Peningkatan Akses layanan TBC yang bermutu dengan TOSS TBC	Cakupan pengobatan semua kasus TBC (case detection rate/CDR) yang diobati	80 Persentase	990.100.000,00	Dinas Kesehatan
1.02.22.92	Pengendalian Faktor Resiko Penularan TBC	Jumlah Kab/Kota yang sudah melaksanakan pengobatan pencegahan dengan INH (PP-INH) untuk anak < 5 tahun	21 Kabupaten	742.060.000,00	Dinas Kesehatan
1.02.22.93	Peningkatan Kemitraan TB melalui Forum Kordinas TBC	Jumlah Forum Koordinasi TBC di Kab/Kota	21 Kabupaten	374.777.000,00	Dinas Kesehatan
1.02.22.94	Peningkatan Kemandirian Masyarakat dalam Penanggulangan TBC	Persentase kasus TBC yang ditemukan dan dirujuk oleh masyarakat atau organisasi kemasyarakatan (active case finding)	25 Persentase	293.931.000,00	Dinas Kesehatan
1.02.22.95	Penguatan Sistem Manajemen Layanan TBC	Persentase Laboratorium Mikroskopis mengikuti uji silang dengan hasil baik	100 Persentase	982.932.000,00	Dinas Kesehatan
1.02.22.96	Pelatihan Konprehensif HIV	Jumlah peserta terlatih Komprehensif HIV	100 Orang	2.867.400.000,00	Dinas Kesehatan
1.02.22.97	Pelatihan Layanan Tes HIV	Jumlah peserta terlatih TB DOTS dan KTHIV	100 Orang	1.000.000.000,00	Dinas Kesehatan
1.02.22.98	Workshop Early Infant Diagnose	Jumlah Bidan yang mengikuti Workshop Task Shifting dan Pengambilan Sampek EID	100 Orang	900.000.000,00	Dinas Kesehatan
1.02.22.99	Pembinaan Teknis Program HIV ke Kab/Kota	Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan Pembinaan Teknis Program HIV-AIDS	29 Kabupaten	456.850.000,00	Dinas Kesehatan
1.02.22.100	Dukungan Tatalaksana HIV/AIDS	Jumlah layanan yang mengirim Spesimen Viral Load dan EID	240 Layanan	980.000.000,00	Dinas Kesehatan
1.02.22.102	Pelatihan Mikroskopis Malaria	Jumlah peserta terlatih Mikroskopis Malaria	25 Orang	320.700.000,00	Dinas Kesehatan
1.02.22.103	Pelayanan PME Malaria	Jumlah layanan yang melaksanakan PME Malaria	5 Layanan	976.600.000,00	Dinas Kesehatan
1.02.22.104	Pelayanan Kesehatan Penanggulangan Bencana	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan sebelum dan saat bencana	1.400 Orang	1.700.000.000,00	Dinas Kesehatan
1.02.22.106	Scalling Up Pencegahan, Diagnosis dan Tata Laksana Pengobatan Tepat Malaria	Jumlah Orang Yang ditemukan dan diobati malaria	29 Orang	549.898.000,00	Dinas Kesehatan
1.02.22.107	Penyusunan RAD Malaria	Jumlah RAD Malaria	29 Dokumen	810.870.000,00	Dinas Kesehatan
1.02.22.108	Assesment Pengendalian Vektor Malaria Terpadu	Pemetaan Endemisitas malaria	29 Dokumen	652.340.000,00	Dinas Kesehatan
1.02.22.109	Peningkatan Kapasitas Tenaga Indor Residual Spraying (IRS)	Jumlah Peserta Yang terlatih	17 Orang	320.000.000,00	Dinas Kesehatan
1.02.22.110	Workshop Tata Laksana Pengobatan Malaria	Jumlah Dokter yang mengikuti workshop pengobatan malaria	5 Orang	417.500.000,00	Dinas Kesehatan
1.02.22.111	Workshop Elektronik Sistem Surveilans Malaria	Jumlah Orang Workshop Elektronik Sistem Surveilans Malaria	4 Orang	414.510.000,00	Dinas Kesehatan
1.02.23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan RSUD yang telah sesuai standar nasional	75 persen	6.830.000.000,00	
		Cakupan rumah sakit kelas C	52 persen		

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
		Persentase indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit yang mencapai target	70 persen		
		Persentase indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit yang mencapai target	80 persen		
1.02.23.01	Penyusunan standar pelayanan kesehatan	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	330.000.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura
1.02.23.09	Perijinan Operasional Sanitasi Incenerator dan IPAL	Jumlah kegiatan	2 Kegiatan	1.000.000.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura
1.02.23.12	Pelatihan dan Kursus Singkat Tenaga RS	Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti pendidikan dan kursus singkat	130 Orang	5.500.000.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura
1.02.2.4	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Cakupan pelayanan masyarakat miskin pada RSUD dan RSJ	25 persen	1.000.000.000,00	
1.02.24.11	Pemulangan dan Pemakaman Pasien Miskin	Pemulangan dan pemakaman pasien tidak ada keluarga	100 Bulan	1.000.000.000,00	Rumah Sakit Jiwa
1.02.2.6	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Tingkat kecukupan sarana dan prasarana sesuai dengan standar pelayanan minimal	95 %	617.306.093.360,00	
		Tingkat kecukupan sarana dan prasarana sesuai dengan standar pelayanan minimal	85 %		
1.02.26.01	Pembangunan rumah sakit	Penambahan Bangsal/Ruang Perawatan	4 Ruang	175.000.000.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura
		Terbangunnya Rumah Sakit di Lokasi Baru	0 Unit		
1.02.26.01	Pembangunan rumah sakit	Penambahan Bangsal/Ruang Perawatan	10 Ruang	156.000.000.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah Abepura
		Terbangunnya Rumah Sakit di Lokasi Baru	2 Unit		
1.02.26.01	Pembangunan rumah sakit	Penambahan Bangsal/Ruang Perawatan	0 Ruang	20.000.000.000,00	Rumah Sakit Jiwa
		Terbangunnya Rumah Sakit di Lokasi Baru	1 Unit		
1.02.26.17	Rehabilitasi bangunan rumah sakit	Bangunan RS yang direhab	15 Unit	10.000.000.000,00	Rumah Sakit Jiwa
		Jumlah Ruang/bangsal RS yang direhab	2 Unit		
1.02.26.18	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit	Alat kesehatan dan alat kedokteran	30 Jenis	25.800.000.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura
		Jumlah alat kesehatan dan alat kedokteran yang diadakan	0 Unit		
1.02.26.18	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit	Alat kesehatan dan alat kedokteran	200 Jenis	50.000.000.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah Abepura
		Jumlah alat kesehatan dan alat kedokteran yang diadakan	0 Unit		
1.02.26.18	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit	Alat kesehatan dan alat kedokteran	50 Jenis	10.000.000.000,00	Rumah Sakit Jiwa
		Jumlah alat kesehatan dan alat kedokteran yang diadakan	100 Unit		
1.02.26.19	Pengadaan obat-obatan rumah sakit	Obat-obatan	900 Jenis	25.000.000.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura
		Jumlah Jenis Obat-obatan yang tersedia	0 Jenis		
1.02.26.19	Pengadaan obat-obatan rumah sakit	Obat-obatan	1.500 Jenis	20.000.000.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah Abepura
		Jumlah Jenis Obat-obatan yang tersedia	0 Jenis		
1.02.26.21	Pengadaan mebeleur rumah sakit	Jumlah jenis mebeleur yang disediakan	15 Jenis	2.000.000.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura
1.02.26.22	Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang	Perlengkapan dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain	6 Jenis	3.000.000.000,00	

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
	pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain)	Jumlah Perlengkapan dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dll yang disiapkan	0 Unit		Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura
1.02.26.22	Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain)	Perlengkapan dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain	100 Jenis	6.500.000.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah Abepura
		Jumlah Perlengkapan dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dll yang disiapkan	60 Unit		
1.02.26.22	Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain)	Perlengkapan dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain	60 Jenis	4.000.000.000,00	Rumah Sakit Jiwa
		Jumlah Perlengkapan dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dll yang disiapkan	60 Unit		
1.02.26.23	Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit	Bahan bakar minyak / gas elpiji	0 Jenis	4.458.800.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura
		Jumlah jenis bahan logistik yang disediakan	16 Jenis		
		Jumlah Bahan bakar minyak / gas elpiji	0 Liter		
1.02.26.23	Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit	Bahan bakar minyak / gas elpiji	3 Jenis	1.000.000.000,00	Rumah Sakit Jiwa
		Jumlah jenis bahan logistik yang disediakan	2 Jenis		
		Jumlah Bahan bakar minyak / gas elpiji	0 Liter		
1.02.26.24	Pengadaan pencetakan administrasi dan surat menyurat rumah sakit	ATK dan Barang Cetak RS	6 Jenis	2.250.000.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura
1.02.26.24	Pengadaan pencetakan administrasi dan surat menyurat rumah sakit	ATK dan Barang Cetak RS	100 Jenis	1.000.000.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah Abepura
1.02.26.25	Pengembangan tipe rumah sakit	Jumlah Kegiatan	1 Kegiatan	1.000.000.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura
		Jumlah fasilitas rumah sakit yang dikembangkan	0 Unit		
1.02.26.35	Pengadaan Bahan Makanan untuk Penderita	Bahan makanan dan minuman untuk kebutuhan pasien RS	13.800 Orang	5.877.293.360,00	Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura
		Jumlah pasien yang diberi makan	0 Orang		
1.02.26.35	Pengadaan Bahan Makanan untuk Penderita	Bahan makanan dan minuman untuk kebutuhan pasien RS	15.000.000 Orang	13.000.000.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah Abepura
		Jumlah pasien yang diberi makan	0 Orang		
1.02.26.35	Pengadaan Bahan Makanan untuk Penderita	Bahan makanan dan minuman untuk kebutuhan pasien RS	200 Orang	5.000.000.000,00	Rumah Sakit Jiwa
		Jumlah pasien yang diberi makan	200 Orang		
1.02.26.96	Pengadaan Bahan Habis Pakai Rumah Sakit	Jumlah Jenis Bahan Habis Pakai yang di sediakan	21 Jenis	30.420.000.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura
1.02.26.97	Pengadaan Peralatan Gedung/Kantor Rumah Sakit	Jumlah jenis peralatan gedung/kantor yang disediakan	4 Jenis	6.000.000.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura
1.02.26.101	Pengadaan Alat Kesehatan (DAK)	Alat kesehatan dan alat kedokteran	34 Jenis	30.000.000.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah Abepura
		Jumlah alat kesehatan dan alat kedokteran yang diadakan	34 Jenis		
1.02.26.101	Pengadaan Alat Kesehatan (DAK)	Alat kesehatan dan alat kedokteran	10 Jenis	10.000.000.000,00	Rumah Sakit Jiwa
		Jumlah alat kesehatan dan alat kedokteran yang diadakan	0 Jenis		
1.02.27	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Tingkat kecukupan sarana dan prasarana RSUD Jayapura sesuai dengan standar pelayanan minimal	75 persen	15.800.000.000,00	
		Tingkat kecukupan sarana dan prasarana RSUD Abepura sesuai dengan standar pelayanan minimal	65 persen		

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
		Tingkat kecukupan sarana dan prasarana RSJ Abepura sesuai dengan standar pelayanan minimal	45 persen		
		Cakupan pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit di RSUD Jayapura	70 persen		
		Cakupan pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit di RSUD Abepura	75 persen		
		Cakupan pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit di RSUD Abepura	30 persen		
		Cakupan pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit di RSJ Abepura	60 persen		
1.02.27.01	Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit	Jumlah bangunan yang di pelihara	5 Ruang	6.000.000.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura
1.02.27.17	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit	Peralatan kesehatan dan kedokteran diperbaiki/dikalibrasi	50 Jenis	2.000.000.000,00	Rumah Sakit Jiwa
		Jumlah alat -alat kesehatan rumah sakit yang dipelihara	0 Unit		
1.02.27.20	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah sakit	Jumlah jenis perlengkapan yang disediakan	0 Jenis	7.800.000.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura
		Jumlah Perlengkapan RS yang terpelihara	20 Jenis		
1.02.28	Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Cakupan pelayanan keehatan lembaga mitra di 5 wilayah adat	12 kabupaten /kot a	800.000.000,00	
		Prevalensi penyalahgunaan narkoba	15 persen		
		Unmet need pelayanan kesehatan	4 persen		
1.02.28.12	Pengelolaan mitra pembangunan kesehatan	Jumlah Mitra atau lembaga kemitraan	18 Lembaga	800.000.000,00	Dinas Kesehatan
1.02.29	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Cakupan Kelurahan/Kampung Universal Child Immunization (UCI)	64 persen	7.130.000.000,00	
		Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita	7 persen		
		Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita	27 persen		
		Prevalensi Malnutrisi (wasting/obesitas) pada anak balita	1 persen		
		Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif	25 persen		
		Angka Kematian Balita (AKBa)	5 per 1.000 kh		
		Rasio posyandu yang aktif	68 persen		
		Cakupan kunjungan bayi (KN1)	51 persen		
		Cakupan imunisasi dasar lengkap pada bayi	50 Å		
		Cakupan balita OAP yang bergizi baik	53 %		
1.02.29.02	Imunisasi bagi anak balita	Jumlah anak Balita yang diimunisasi	90.000 Orang	520.000.000,00	Dinas Kesehatan
1.02.29.09	Peningkatan Kemampuan Bidan di Desa untuk pencegahan penularan HIV/AIDS dari ibu ke Janin	Jumlah Peserta yang mengikuti Bimtek Pencegahan dan Penularan HIV/AIDS dari ibu ke anak	96 Orang	1.200.000.000,00	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
1.02.29.18	Peningkatan Kapasitas Tenaga dalam pencatatan dan pelaporan bagi pengelola data KIA	Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan Pencatatan dan Pelaporan Pengelola KIA	60 Orang	410.000.000,00	Dinas Kesehatan
1.02.29.22	PMT 1000 hari Pertama Kelahiran	Jumlah Ibu yang mendapat PMT	710.000 Orang	3.000.000.000,00	Dinas Kesehatan
1.02.29.23	Pelayanan bagi balita orang asli Papua	Jumlah Balita OAP yang diberi Pelayanan	100 Orang	2.000.000.000,00	Dinas Kesehatan
1.02.30	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	Persentase lansia yang memiliki dan memanfaatkan Jaminan Kesehatan	45 %	350.000.000,00	
1.02.30.17	Pengadaan Lansia KIT	Jumlah Lansia KIT yang diadakan	56 Unit	350.000.000,00	Dinas Kesehatan
1.02.32	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Angka Kematian Bayi (AKB)	5 per 1.000 kih	2.980.000.000,00	
		Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	187 kasus		
		Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	53 persen		
		Cakupan pelayanan nifas	42 persen		
		Persentase ibu hamil (OAP) yang rutin melakukan pemeriksaan K3	32 %		
		Persentase bayi OAP baru lahir yang memperoleh pelayanan kesehatan	67 %		
1.02.32.03	Pertolongan persalinan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu	Jumlah pertolongan persalinan	50 Orang Kali	300.000.000,00	Dinas Kesehatan
1.02.32.10	Pelatihan stimulasi intervensi , deteksi dini tumbuh kembang bayi Balita dan anak Prasekolah bagi pengelola Kabupaten/kota dan Puskesmas dan pengadaan alat permainan (APE)	Petugas terlatih SDIDTK dan jumlah APE	20 Orang Paket	190.000.000,00	Dinas Kesehatan
		Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan SDITTK	0 Orang		
1.02.32.38	Peningkatan Kapasitas Tenaga dalam pencatatan dan pelaporan bagi pengelola data KIA	Jumlah petugas dilatih	29 Orang	410.000.000,00	Dinas Kesehatan
1.02.32.41	Penerapan MTBS /M	Jumlah tenaga terlatih	20 Orang	160.000.000,00	Dinas Kesehatan
1.02.32.46	Perawatan secara berkala bagi ibu hamil bagi keluarga kurang mampu	Jumlah Ibu Hamil keluarga kurang mampu yang dirawat	29 Orang Kali	410.000.000,00	Dinas Kesehatan
1.02.32.47	Pelatihan Kegawat daruratan maternal-neonatal	Jumlah Tenaga yang dilatih	20 Orang	410.000.000,00	Dinas Kesehatan
1.02.32.48	Supervisi Fasilitatif KIA	Jumlah Kab/Kota yang disupervisi	10 Kabupaten	300.000.000,00	Dinas Kesehatan
1.02.32.49	Pengadaan Kartu Ibu, Buku KIA, Buku Kohort/Register pelayanan kesehatan keluarga	Jumlah Kartu Ibu, Buku KIA, Buku Kohort/Register yang diadakan	300 Buku	300.000.000,00	Dinas Kesehatan
1.02.32.50	Pengadaan Alat, Bahan dan Obat dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak	Jumlah Alat, Bahan dan Obat obatan KIA yang diadakan	10 Alat	500.000.000,00	Dinas Kesehatan
1.02.33	Program kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan	Cakupan kabupaten/kota yang memiliki data profil kesehatan secara lengkap	56 persen	2.834.000.000,00	
		Cakupan Dinas Kesehatan dan RSUD kabupaten/kota yang memiliki RENSTRA yang berkualitas	65 persen		
1.02.33.09	Lokakarya Penyusunan Program	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Lokakarya	2 Orang	554.000.000,00	Dinas Kesehatan
		Jumlah Peserta yang mengikuti Lokakarya	50 Orang Kegiatan		
1.02.33.10	Evaluasi Program Akhir Tahun	Jumlah Laporan hasil evaluasi yang dihasilkan	1 Dokumen	190.000.000,00	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
		Jumlah Dokumen Evaluasi	1 Dokumen		
1.02.33 .29	Monitoring dan Supervisi perencanaan serta sinkronisasi Program	Jumlah Laporan Monitoring Evaluasi yang dihasilkan	60 Kabupaten	570.000.000,00	Dinas Kesehatan
1.02.33 .31	Pendampingan perencanaan pada daerah Bermasalah Kesehatan	Jumlah Kabupaten bermasalah Kesehatan yang didampingi perencanaan kesehatannya	18 Kabupaten	1.400.000.000,00	Dinas Kesehatan
1.02.33 .36	Penyusunan Naskah Akademik Kebijakan Tahunan Pembangunan Kesehatan	Jumlah Dokument yang disusun	1 Dokumen	120.000.000,00	Dinas Kesehatan
1.02.3 5	Program upaya kesehatan perorangan	Cakupan OAP yang sudah memiliki dan memanfaatkan Kartu Papua Sehat	80 %	117.400.000.000,00	
		Cakupan OAP yang sudah memiliki dan memanfaatkan Kartu Papua Sehat	80 %		
		Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	41 %		
		Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	41 %		
		Cakupan Kabupaten/Kota yang memiliki kebijakan PHBS	28 %		
		Persentase Puskesmas yang mempunyai ketersediaan obat dan vaksin	87 %		
		Persentase PAK yang diawasi	78 %		
		Persentase ODGJ (orang dengan gangguan jiwa) peserta konseling yang terpulihkan	70 %		
1.02.35 .06	Peningkatan Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Papua	Jumlah pasien dilayani	0 Tahun	61.000.000.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura
		Jumlah Pasien yang dilayani	80.000 Orang Tahun		
1.02.35 .10	Peningkatan Pelayanan JKN/BPJS	Peserta JKN/BPJS terlayani	3.000 Orang	1.500.000.000,00	Rumah Sakit Jiwa
1.02.35 .11	Pelaksanaan Kartu Papua Sehat	Peserta KPS terlayani	1.400.000.350 Orang	3.620.000.000,00	Dinas Kesehatan
		Jumlah OAP yang terlayani KPS	150.000 Orang		
1.02.35 .11	Pelaksanaan Kartu Papua Sehat	Peserta KPS terlayani	5.000 Orang	30.000.000.000,00	Rumah Sakit Jiwa
		Jumlah OAP yang terlayani KPS	1.500 Orang		
1.02.35 .16	Pengembangan fasyankes di 5 (lima) regional dukungan pelaksanaan KPS	Jumlah Pengembangan Rumah Sakit Regional	5 Unit	15.000.000.000,00	Dinas Kesehatan
1.02.35 .22	Workshop Standar Akreditasi RS KARS edisi I	Jumlah Peserta	65 Orang	450.000.000,00	Dinas Kesehatan
1.02.35 .23	Workshop Implementasi Data Sarana, Prasarana (ASPAK) di Fasyankes Tingkat Lanjut	Jumlah Peserta	45 Orang	400.000.000,00	Dinas Kesehatan
1.02.35 .24	Workshop Standar Rumah Sakit Pendidikan	Jumlah Peserta	50 Orang	400.000.000,00	Dinas Kesehatan
1.02.35 .25	Workshop Penyusunan Perijinan dan Tata Kelola Lingkungan RS	Jumlah Peserta	35 Orang	350.000.000,00	Dinas Kesehatan
1.02.35 .26	Pelatihan BTCLS di Rumah Sakit	Jumlah Peserta	35 Orang	420.000.000,00	Dinas Kesehatan
1.02.35 .27	Pelatihan ATCLS di Rumah Sakit	Jumlah Peserta	35 Orang	420.000.000,00	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
1.02.35 .28	Bimbingan Teknis Cerebrovaskuler bagi tenaga Kesehatan di tingkat lanjut	Jumlah Peserta	35 Orang	300.000.000,00	Dinas Kesehatan
1.02.35 .29	Bimbingan teknis penanganan cancer bagi tenaga kesehatan di Fasyankes	Jumlah Peserta	35 Orang	250.000.000,00	Dinas Kesehatan
1.02.35 .30	Peningkatan kemampuan Teknis Audit Internal Radio Diagnostik	Jumlah Peserta	30 Orang	280.000.000,00	Dinas Kesehatan
1.02.35 .31	Peningkatan Kemampuan Teknis PME dan PPRA	Jumlah Peserta	35 Orang	400.000.000,00	Dinas Kesehatan
1.02.35 .32	Workshop pembentukan RS BLUD	Jumlah Peserta	35 Orang	400.000.000,00	Dinas Kesehatan
1.02.35 .33	Workshop Penyusunan Pedoman Sistem Rujukan Regional	Jumlah Pedoman Sistem Rujukan	7 Dokumen	600.000.000,00	Dinas Kesehatan
1.02.35 .34	Bimbingan teknis pelayanan Telemedicine di fasyankes	Jumlah petugas yang mendapatkan bimbingan teknis pelayanan Telemedicine di fasyankes	26 Orang	410.000.000,00	Dinas Kesehatan
1.02.35 .35	Pelatihan SPGDT dan pembentukan PSC di Kabupaten	Jumlah Dinas Kesehatan yang mendapat pelatihan SPGDT	40 Orang	400.000.000,00	Dinas Kesehatan
1.02.35 .36	Workshop Rekam Medik Integrasi di Fasyankes	Jumlah peserta workshop Rekam Medik Integrasi di fasyankes	40 Orang	400.000.000,00	Dinas Kesehatan
1.02.35 .37	Workshop Sistem Informasi Manajemen RS (SIM RS)	Jumlah peserta Workshop SIM RS	50 Orang	400.000.000,00	Dinas Kesehatan
1.02.36	Program Sumber Daya Kesehatan	Cakupan jumlah kabupaten/kota yang memiliki Rumah Sakit	24 jumlah per tahun	44.006.200.000,00	
		Cakupan pembangunan dan pengembangan Rumah Sakit rujukan di 5 wilayah adat	6 unit		
		Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	27 per 30.000 penduduk		
		Rasio rumah sakit per satuan penduduk	3 per 100.000 penduduk		
		Rasio Dokter per satuan penduduk	28 per 100.000 penduduk		
		Rasio Tenaga medis per satuan penduduk	1 per 1.000 penduduk		
		Jumlah tenaga kesehatan yang terlatih untuk PON	0 orang		
		Jumlah tenaga kesehatan yang terlatih untuk PON	0 orang		
1.02.36 .02	Pelaksanaan Tubel D3, D4, S1, S2 Kesehatan	jumlah siswa yang terbayar	100 Orang	500.000.000,00	Dinas Kesehatan
1.02.36 .08	Koordinasi Teknis Program SDK dengan Kab/Kota	Jumlah Kegiatan	120 Kegiatan	1.228.000.000,00	Dinas Kesehatan
		Jumlah laporan	29 Dokumen		
1.02.36 .09	Pembinaan dan Pengawasan Mutu Tenaga Kesehatan	Jumlah laporan	29 Laporan	10.500.000.000,00	Dinas Kesehatan
		Jumlah orang yang dibina	19 Orang		
1.02.36 .47	Pelaksanaan sertifikasi oleh MTKP di Regional Wilayah	Jumlah SDM Kesehatan yang Terakreditasi	380 Orang	3.434.000.000,00	Dinas Kesehatan
		Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti pelatihan sertifikasi	1.000 Orang		
1.02.36 .68	Pembinaan Organisasi Profesi Bidang Kesehatan	Jumlah Organisasi Profesi Bidang Kesehatan yang dibina	16 Kelompok	600.000.000,00	Dinas Kesehatan
		Jumlah organisasi kesehatan yang dibina	16 Organisasi		

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
1.02.36.69	Monitoring dan Evaluasi tenaga Kesehatan	Jumlah Pertemuan Koordinasi SDK	29 Kegiatan	850.000.000,00	Dinas Kesehatan
		Jumlah laporan monev yang dihasilkan	29 Laporan		
1.02.36.71	Pelatihan analisis kebutuhan diklat di regional papua	presentase akreditasi balatkes papua	30 Kegiatan	3.300.000.000,00	Dinas Kesehatan
		Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan analisis	30 Orang		
1.02.36.74	Peningkatan Kapasitas penyuluh tenaga kesehatan di lima regional	Jumlah analisis kebutuhan diklat di 5 regional	29 Orang	1.150.000.000,00	Dinas Kesehatan
		Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas penyuluh tenaga kesehatan	30 Orang		
1.02.36.77	Peningkatan kapasitas widyaiswara	Jumlah WI yang mengikuti diklat	60 Orang	800.000.000,00	Dinas Kesehatan
1.02.36.79	Pelatihan jabatan fungsional administratur Kesehatan	Jumlah tenaga adminkes	29 Orang	1.200.000.000,00	Dinas Kesehatan
1.02.36.84	Training Need Assessment (TNA)	Jumlah TNA setahun	12 Orang	280.000.000,00	Dinas Kesehatan
		Jumlah peserta yang mengikuti training assessment	12 Orang		
1.02.36.87	Pelaksanaan Akreditasi Balai pelatihan tenaga kesehatan sebagai pusat pelatihan lokal terbaik di Papua	Jumlah Pelaksana Akreditasi Balatkes	35 Orang Bulan	200.000.000,00	Dinas Kesehatan
		Jumlah dokumen mutu akreditasi balai latihan tenaga kesehatan yang dihasilkan	0 Dokumen		
1.02.36.88	Pembinaan perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan	Jumlah dokument perencanaan kebutuhan SDMK Kab/Kota	29 Dokumen	600.000.000,00	Dinas Kesehatan
1.02.36.90	Satuan tugas pelayanan kesehatan kaki telanjang/jalan kaki, pelayanan terapung dan terbang (Satgas kijang)	Jumlah Tenaga Kesehatan yang diberdayakan	144 Orang	1.000.000.000,00	Dinas Kesehatan
1.02.36.92	Pembangunan gedung dan peralatan serta pemeliharaan bapelkes	Jumlah Gedung kantor yang dibangun	1 M2	8.250.000.000,00	Dinas Kesehatan
1.02.36.95	Sekolah Menengah Kejuruan Analisis Kesehatan	Jumlah Rekrutmen Siswa Sekolah Menengah Kejuruan Analisis Kesehatan	130 Orang	9.700.000.000,00	Dinas Kesehatan
		Jumlah Bahan Habis Pakai Sekolah SMAKES	180 Rupiah		
		Jumlah Guru Honorar yang dibayarkan Honorinya	40 Orang Bulan		
		Jumlah Alat Praktek Siswa yang diadakan	20 Unit Tahun		
		Jumlah Siswa yang ditanggung Biaya Prakteknya	200 Orang Tahun		
		Jumlah Siswa yang dikukuhkan	240 Orang Tahun		
		Jumlah Guru yang mengikuti Pelatihan	17 Orang		
		Jumlah Guru yang mengikuti Pelatihan Penyusunan Perangkat Pelajaran	45 Orang		
		Jumlah RAKORNIS yang diikuti	9 Kegiatan		
1.02.36.117	Pengawasan Alkes di sarana fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes).	Jumlah Alkes pada Fasyankes yang diawasi	15 Lokasi	164.200.000,00	Dinas Kesehatan
1.02.36.118	Pemantauan peredaran Alkes di Apotik dan Toko Alkes.	Jumlah Alkes yang memenuhi standar dipantau	80 Laporan	250.000.000,00	Dinas Kesehatan
1.02.37	Program Peningkatan Pelayanan Laboratorium	Cakupan kecukupan laboratorium dalam mendukung pelayanan kesehatan	85 persen	35.586.150.000,00	
1.02.37.01	Pengadaan Peralatan Laboratorium	Jumlah Peralatan Lab. Kimia yg diadakan	2 Alat	9.350.000.000,00	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
		Jumlah Peralatan Lab. Mikrobiologi yg diadakan	2 Alat		
		Jumlah Peralatan Lab. Immunologi yg diadakan	1 Alat		
		Jumlah Peralatan Lab. Kimia Lingkungan yg diadakan	3 Alat		
1.02.37.02	Pengadaan bahan pemeriksaan Laboratorium	Jumlah Bhn Pemeriksaan Kimia Klinik yg diadakan	1 Set	17.200.000.000,00	Dinas Kesehatan
		Jumlah Bhn Pemeriksaan Immunologi yg diadakan	1 Set		
		Jumlah Bhn Pemeriksaan Mikrobiologi yg diadakan	1 Set		
		Jumlah Bhn Pemeriksaan Viral Load yg diadakan	1 Set		
		Jumlah Bhn Pemeriksaan Hematologi yg diadakan	1 Set		
		Jumlah Bhn Pemeriksaan Urinalisa	1 Set		
		Jumlah Bhn Pemeriksaan TBC yg diadakan	1 Set		
		Jumlah Bhn Kimia Media Reagensia yg diadakan	1 Set		
		Jumlah Bhn Pemantapan Mutu yg diadakan	1 Set		
		Jumlah Bhn Laboratorium Habis Pakai yg diadakan	1 Set		
1.02.37.06	Bimbingan Tehnik ke Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Fasyankes yg dibimtek/bina	29 Kabupaten	1.450.150.000,00	Dinas Kesehatan
		Jumlah Layanan Fasyankes yg di Assesment	15 Kabupaten		
		Jumlah Laporan Bintek dan Assesment	60 Laporan		
		Jumlah laporan pelayanan bimtek dan assesment	40 Laporan		
1.02.37.23	Penjaminan mutu laboratorium	Jumlah Bhn Consumble PME	1 Kegiatan	2.686.000.000,00	Dinas Kesehatan
		Jumlah Tenaga Honorarium Pelaksanaan Mutu	14 Orang		
		Jumlah Peralatan yg di Kalibrasi	200 Alat		
		Jumlah Tenaga Lab. yg mengikuti Magang	25 Orang		
		Jumlah Tenaga Lab. yg mengikuti Sertifikasi	20 Orang		
		Jumlah Fasyankes di Kab/Kota yg mengikuti PME	50 Unit		
		Jumlah Bhn Pengujian HIV-AIDS, TBC, Malaria	3 Set		
		Jumlah Assesor yg melakukan Assesment Akreditasi	8 Orang		
		Jumlah Pengiriman Bahan PME ke Fasyankes	70 Unit		
		Jumlah Laporan Pemantapan Mutu Eksternal	70 Berkas		
1.02.37.27	Peningkatan kapasitas tenaga Laboratorium	Jumlah tenaga yang di latih	100 Orang	900.000.000,00	Dinas Kesehatan
1.02.37.29	Pemantapan Mutu Eksternal dan Internal	Jumlah Fasyankes yang mengikuti Pemantapan Mutu Eksternal	250 Unit	500.000.000,00	Dinas Kesehatan
1.02.37.30	Pelatihan, Pemagangan dan Sertifikasi Tenaga Laboratorium	Jumlah Tenaga Laboratorium yang mengikuti Pelatihan, Magang dan Sertifikasi	15 Orang	600.000.000,00	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
1.02.37.31	Pengambilan Sampel Kesehatan Masyarakat, KLB dan Sampel Lingkungan	Jumlah Sampel Kesehatan Masyarakat, KLB dan Lingkungan yang dipantau	500 Sampel	400.000.000,00	Dinas Kesehatan
1.02.37.32	Akreditasi dan Re Akreditasi Laboratorium	Jumlah Dokumen Akreditasi ISO 17025:2017, ISO 17043:2008 dan ISO 15189:2007 yang terakreditasi	7 Dokumen	1.000.000.000,00	Dinas Kesehatan
1.02.37.34	Pemeliharaan Alat laboratorium, Kalibrasi, Pengolahan Limbah, Jaringan Limbah	Jumlah Alat dan Jaringan Limbah yang diperbaiki dan Terkalibrasi	103 Alat	1.500.000.000,00	Dinas Kesehatan
1.02.45	Program Pengembangan Data/Informasi	Cakupan ketersediaan data bidang kesehatan di tingkat provinsi yang valid dan reliabel	90 persen	2.485.000.000,00	
1.02.45.01	Pengelolaan data/informasi kesehatan	Data informasi kesehatan kabupaten kota di provinsi Papua	25 Kabupaten	1.840.000.000,00	Dinas Kesehatan
		Monitoring SIK di kabupaten kota	15 Kabupaten		
		Pertemuan pemutakhiran data kesehatan provinsi Papua	18 Kegiatan		
		Koordinasi dengan Pusdatin Kemkes RI	3 Kali		
1.02.45.04	Pembentukan Forum/Kelompok kerja SIK	Jumlah Kabupaten yang difasilitasi pembentukan Forum SIK	1 Kabupaten	300.000.000,00	Dinas Kesehatan
1.02.45.08	Penyusunan Profil Kesehatan Provinsi	Penyusunan Profil Kesehatan Provinsi Papua	1 Lokasi	110.000.000,00	Dinas Kesehatan
		Pembentukan tim penyusun profil kesehatan provinsi Papua	0 Tim		
		Jumlah Dokumen Profil Kesehatan yang dihasilkan	0 Buku		
1.02.45.11	Pengelolaan Website Dinas Kesehatan Provinsi Papua	Rapat Koordinasi Pembentukan Tim Pengelola Website Dinas	1 Kegiatan	235.000.000,00	Dinas Kesehatan
		Maintenance website dinas kesehatan provinsi papua	12 Bulan		
		Pembuatan website dinas kesehatan provinsi Papua	0 Buah		
1.02.46	Program Peningkatan Kesehatan Jiwa Masyarakat	Cakupan pasien penyakit jiwa yang tertangani	50 persen	17.500.000.000,00	
		Cakupan Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa	1 kabupaten per tahun		
		Cakupan jumlah Rumah sakit yang sudah terakreditasi	59 persen		
		Persentase ODGJ (orang dengan gangguan jiwa) peserta konseling yang terpulihkan	70 persen		
1.02.46.01	Pelayanan Kesehatan Jiwa di Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat yang mendapat pengobatan jiwa di kabupateniwa	400 Orang	3.000.000.000,00	Rumah Sakit Jiwa
		paseien gangguan jiwa (ODGJ) yang di obati per Kabupaten sejumlah 10 orang. masyatrakat yang mendapatkan Penyuluhan kesehatan jiwa 50 orang per Kabupaten.	400 Orang Kegiatan		
		Jumlah peserta penyuluhan di kabupaten	100 Orang		
		Jumlah peserta bimtek	200 Orang		
1.02.46.02	Pelayanan Rujukan, Home Visite dan Antar Jemput Pasien	Pelayanan rujukan, home visite/antar jemput pasien gangguan jiwa	50 Kabupaten	2.000.000.000,00	Rumah Sakit Jiwa

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
		Jumlah Pasien rujukan, home visite/antar jemput pasien gangguan jiwa terlayani	50 Orang		
1.02.46 .03	Pelayanan Pemeriksaan/Deteksi Dini Gangguan Jiwa	Jumlah orang yang dideteksi dini gangguan jiwa	100 Orang	1.000.000.000,00	Rumah Sakit Jiwa
		menemukan kasus baru Orang Dengan Masalah Kejiwaan (OMDK) 10 Orang Per Kabupaten/Kota. Menemukan Kasus Baru Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) 5 Orang Per Kabupaten/ Kota	100 Orang Kegiatan		
1.02.46 .04	Pelatihan Kesehatan Jiwa Bagi Petugas Kesehatan	Jumlah peserta Pelatihan tenaga kesehatan	150 Orang	1.500.000.000,00	Rumah Sakit Jiwa
		Menghadirkan tenaga kesehatan untuk di latih cara penanganan gangguan jiwa di puskesmas/Rumah Sakit Umum, 2 orang Per kabupaten Untuk 10 Kabupaten (1 Dokter dan 1 Perawat).	150 Orang Kegiatan		
1.02.46 .07	Pengadaan Obat dan Perbekalan Pelayanan Kesehatan Jiwa	Jumlah dan jenis obat	0 Jenis	10.000.000.000,00	Rumah Sakit Jiwa
		Jumlah Obat dan bahan kesehatan habis pakai	125 Jenis		
1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			11.459.944.002.606,00	
1.03.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	0 persen	19.859.200.000,00	
1.03.01 .01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang disediakan	1.500 Surat	100.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.01 .02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Jasa Layanan berlangganan Listrik,Air,Telepon, Transponder	12 Layanan	2.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.01 .03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	50 Unit	100.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.01 .06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Unit Mobil Dinas/Operasional yang terpelihara dan Terfasilitasi Perijinannya	17 Unit	500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.01 .08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Luas Gedung dan Halaman yang disediakan jasa kebersihan	300 M2	1.140.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Jumlah tenaga kebersihan dan Fasilitas Pendukung kebersihan kantor	15 Orang		
		Jumlah Jenis Bahan dan Alat Kebersihan	30 Jenis		
1.03.01 .09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	25 Unit	150.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
1.03.01 .10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	75 Jenis	1.500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.01 .11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan	12 Jenis	1.100.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Jumlah penggandaan	500.000 Lembar		
		Jumlah Jenis Barang Cetakkan yang Disediakan	30 Jenis		
		Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	30 Bulan		
1.03.01 .12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen Listrik yang disediakan	15 Buah	1.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.01 .13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan Perlengkapan	50 Unit	300.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.01 .15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	500 Jenis	200.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.01 .16	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah liter bahan bakar untuk kendaraan operasional	15.000 Liter	430.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
		jumlah mobilitas termasuk tenaga angkat dan turun beras ke kantor	300 Kali		
1.03.01 .17	Penyediaan makanan dan minuman	Pelaksanaan penyediaan makan dan minum	0 Kegiatan	1.100.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Pelaksanaan makan minum tamu dan rapat	120 Kali Tahun		
		Pelaksanaan makan minum saat olah raga (hari Jumat)	48 Kali		
		Tersediannya Makanan dan Minuman	12 Bulan		
		Jumlah orang yang disediakan makan dan minuman	1.500 Orang		
1.03.01 .18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	400 Orang	5.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.01 .19	Penyediaan Jasa Pengamanan	Pelaksanaan pembayaran insentif bagi tenag operator dan penjaga X-Ray VIP Room Bandara Sentani	a51 Orang Bulan	5.239.200.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Pelaksanaan pembayaran honor bagi satpam	4 Orang Bulan		
		Pelaksanaan uang makan satpam	67 Orang Bulan		
		Jumlah tenaga pengamanan	20 Orang		
1.03.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	0 persen	41.350.000.000,00	

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
1.03.02 .04	Pengadaan mobil jabatan	Jumlah mobil yang diadakan	10 Unit	5.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.02 .05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan yang diadakan	4 Unit	2.150.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Jumlah kendaraan roda 2	5 Unit		
1.03.02 .07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan	50 Unit	500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.02 .09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan perlengkapan	40 Unit	500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.02 .10	Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur yang diadakan	10 Unit	200.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.02 .22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 Unit	1.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
		belanja sewa	0 Tahun		
1.03.02 .23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	17 Unit	450.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.02 .24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	25 Unit	700.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	25 Unit		
		sewa kendaraan	25 Bulan		
1.03.02 .26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Pelaksanaan pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	0 Kegiatan	150.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Jumlah Perlengkapan Gedung kantor yang terpelihara	20 Unit		
		Tersediannya biaya pemeliharaan gedung kantor	12 Bulan		
1.03.02 .28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	4 Unit	500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.02 .46	Sewa gedung	Jumlah gedung kantor yang disewa	0 Unit Tahun	200.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Sewa rumah jabatan	12 Unit Tahun		

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
1.03.02.51	Pembebasan Lahan Gedung Kantor	Luas lahan yang dibebaskan	20.000 Ha	30.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	0 persen	1.310.000.000,00	
1.03.03.01	Pengadaan mesin/kartu absensi	Jumlah Mesin /Kartu Absensi yang tersedia	10 Bh	10.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	500 Stell	500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.03.04	Pengadaan pakaian KORPRI	jumlah pakaian KORPRI yang diadakan	467 Stell	300.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus yang diadakan	465 Stell	500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	0 persen	1.750.000.000,00	
1.03.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	25 Orang	150.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.05.02	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	600 Orang	1.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta bimbingan teknis tentang implementasi peraturan perundang-undangan	150 Orang	300.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.05.04	Pendidikan dan Pelatihan Non Formal	Jumlah aparatur yang terlatih	6 Orang	300.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya kualitas akuntabilitas OPD	0 persen	3.100.000.000,00	
1.03.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	5 Laporan	500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Laporan LAKIP SKPD	0 Dokumen		

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
1.03.06.02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah pelaporan keuangan semesteran yang diselesaikan tepat waktu	1 Laporan	200.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	1 Laporan	200.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.06.05	Penyusunan Renja, RKA dan Perubahan APBD	Jumlah dokumen	4 Dokumen	700.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.06.10	Forum SKPD Provinsi Papua	Jumlah Peserta Forum	200 Orang	800.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.06.12	Penyusunan RENSTRA	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.06.14	Peningkatan Kapasitas PPID	Jumlah orang	10 Orang	500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Panjang jalan provinsi yang fungsional	20 km	4.954.045.800.000,00	
		Panjang jembatan yang fungsional	500 m'		
		panjang jalan yang terbangun	0 Km		
		Terbangunnya Jalan dan Jembatan	0 Km		
1.03.15.06	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah dokumen	12 Laporan	1.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.15.360	Pembangunan Jalan Usku - Kesnar (115), 75 km	panjang jalan yang terbangun	6 Km	20.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.15.479	Pembangunan Jalan Duntek (Dogiyai)-Munayepa/Iyei (Paniai)	panjang jalan yang terbangun	5 Km	10.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.15.480	Pembangunan Jalan Maatadi (Deiyai)-Digikebo (Dogiyai)	panjang jalan yang terbangun	8 Km	40.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
1.03.15 .489	Pembangunan Jalan Serui - Ansus, (123), 71,15 Km	panjang jalan yang terbangun	5 Km	10.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.15 .494	Pembangunan Jalan Enarotali (Paniai) - Sugapa, (139) (50 Km)	panjang jalan yang terbangun	50 Km	10.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.15 .496	Pembangunan Jalan Kanggime - Mamit - Fawi	panjang jalan yang terbangun	5 Km	10.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Panjang Jalan yang terbangun	0 Km		
1.03.15 .498	Pembangunan Jalan Burmeso - Gesa - Barapasi (118), 194,60 Km	Panjang jalan yang dibangun	30 Km	81.500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.15 .504	Pembangunan Jalan Botawa - Koweda - Barapasi (128), 30 Km	panjang jalan yang terbangun	33 Km	80.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.15 .506	Pembangunan Jalan Waren - Botawa - Sumianga, (126) 31 Km	panjang jalan yang terbangun	10 Km	50.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.15 .526	Pembangunan Jembatan Wosi (100 M") (Wosi - Wogi - Kimbim)	panjang jembatan yang terbangun	23 Meq	15.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.15 .530	Pembangunan Jalan Burmeso - Sikari (119)	Panjang jalan yang dibangun	0 KM2	50.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.15 .541	Pembangunan Jalan Keppi - Bade (181)	panjang jalan yang terbangun	10 Km	52.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.15 .551	Pembangunan Jalan Karubaga - Wunim - Bokondini (154)	panjang jalan yang terbangun	4 Km	18.500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.15 .590	Pembangunan Jembatan Kali Bian	panjang jembatan yang terbangun	200 Meq	125.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.15 .605	Pembangunan Jalan Kobakma - Megambilis (120), 112 Km	Panjang jalan yang dibangun	75 KM2	40.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
		panjang jalan yang terbangun	0 Km		

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
1.03.15 .639	Pembangunan Jembatan Kali Kapare	panjang jembatan yang terbangun	50 Meq	25.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.15 .640	Pembangunan Jembatan Kali Aparuka	panjang jembatan yang terbangun	50 Meter	25.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.15 .650	Pembangunan Jembatan Dekai - Logpond (Dekai - Logpon - Pattipi (160))	Panjang Jembatan yang dibangun	40 Meq	50.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.15 .657	Pembangunan Jalan Elelim - Kobakma	panjang jalan yang terbangun	9 Km	52.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.15 .662	Pembangunan Jalan Tiom - Kuyawage	Panjang jalan yang dibangun	14 KM2	81.500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.15 .700	Pembangunan Jalan Nume - Tiom	Panjang jalan yang dibangun	4 KM2	25.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.15 .712	Pembangunan Jalan Kanggime - Bogonuk	panjang jalan yang terbangun	10 Km	50.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.15 .726	Pembangunan Jembatan Kanggime (Kali Toli) (80 M") (Kanggime - Mamit)	Panjang jembatan yang dibangun	78 Meq	38.500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.15 .730	Pembangunan Jalan Panaga - Taive	Panjang jalan yang dibangun	14 KM2	80.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
		terbangunnya jalan yang dibangun	5 Km		
1.03.15 .736	Pembangunan Jalan Eragayam - Kobakma	Panjang jalan yang dibangun	16 KM2	81.500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
		panjang jalan yang dibangun	5 Km		
1.03.15 .739	Pembebasan Lahan Jalan Bonggrang - Depapre	Jumlah lahan jalan yang dibebaskan	250.000 M2	0,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.15 .740	Pembangunan Jembatan Demba I (60 M") (Botawa - Koweda - Barapasi (128))	Panjang jembatan yang dibangun	58 Meq	33.500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
1.03.15 .745	Pembangunan Jembatan Linggua (Ruas Keppi - Bade)	Panjang Jembatan yang terbangun	45 M`	25.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.15 .748	'Pembangunan Jalan Jagebob XIII - Bupul (STR.P)	Panjang jalan yang dibangun panjang jalan yang dibangun	5 KM2 5 Km	30.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.15 .818	Pembangunan Jembatan Aga I (Enarotali - Sugapa)	Jembatan yang terbangun	33 Meq	15.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.15 .819	Pembangunan Jembatan Aga II (Enarotali - Sugapa)	panjang jembatan yang terbangun	33 Meq	15.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.15 .840	Pembangunan Jembatan Sentosa I (25 M") (Berap - Nimbotong - Lereh - Tengon (110))	Panjang jembatan yang dibangun	4 Meq	20.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.15 .842	Pembangunan Jembatan Bides I (30 M") (Berap - Nimbotong - Lereh - Tengon (110))	Panjang jembatan yang dibangun	30 Meq	11.500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.15 .843	Pembangunan Jembatan Tabean (20 M")	Panjang Jembatan yang terbangun	32 Meq	11.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.15 .845	Pembangunan Jembatan Kimi bawah (di ruas jalan Samabusa - Nabarua Bawah)	panjang jembatan yang terbangun	30 Meq	15.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.15 .846	Pembangunan Jembatan Sanoba (di ruas jalan Samabusa - Nabarua Bawah)	panjang jembatan yang terbangun	18 Meq	15.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.15 .850	Pembangunan Jalan Muliama-Wame-Makki	Panjang jalan yang dibangun panjang jalan yang dibangun	11 KM2 1 Km	50.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.15 .854	Pembangunan Jalan Oksibil - Borme	Panjang jalan yang dibangun	16 KM2	81.500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.15 .855	Pembangunan Jalan Wamena-Sekan- Apalapsilii - Elelim	Panjang jalan yang dibangun panjang jalan yang dibangun	16 KM2 1 Km	81.500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
1.03.15 .858	Pembangunan Jembatan Aikima Atas (40 M") (Aikima - Siepkosi)	Panjang jembatan yang dibangun	2.308 Meq	15.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.15 .859	Pembangunan Jembatan Aikima Bawah (40 M") (Aikima - Siepkosi)	Panjang jembatan yang dibangun	40 Meq	15.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.15 .867	Pembangunan Jembatan Kertosari 4 (Kemiri - Depapre (111))	Panjang jembatan yang dibangun	15 Meq	5.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.15 .868	Pembangunan Jembatan Waibron (Kemiri - Depapre (111))	Panjang jembatan yang dibangun	15 Meq	5.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.15 .869	Pembangunan Jembatan Maribu (a) (Kemiri - Depapre (111))	Panjang jembatan yang dibangun	5 Meq	5.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.15 .876	Pembangunan Jalan Wamena - Pugima - Mugi	panjang jalan yang terbangun	2 Km	10.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.15 .881	Pembangunan Jalan Ansus - Wooi/Natabui	Panjang jalan yang dibangun	3 Km	10.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.15 .896	Pembangunan Jalan Kurima-Tangma-Uka	Panjang jalan yang dibangun	4 Km	25.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.15 .902	Pembangunan Jalan Lingkar Danau Tigi	Panjang jalan yang dibangun	16 Km	81.500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.15 .905	Pembangunan Jalan Elelim (Yalimo) - Apalapsili - Anggruk (Yahukimo)	Panjang jalan yang dibangun	13 Km	30.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.15 .919	Pembangunan Jembatan Kali Kabu	Panjang jembatan yang terbangun	1.818 Meq	15.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.15 .920	Pembangunan Jembatan Bogonuk (40 M) (Ruas Kanggime - Bogonuk)	Panjang jembatan yang terbangun	153 Meq	15.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
1.03.15.921	Pembangunan Jembatan Kali Kulugi (Ruas Wamena - Kurima - Tangma)	Panjang jembatan yang terbangun	40 Meq	10.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.15.922	Pembangunan Jembatan Kali Melage (Ruas Wamena - Kurima - Tangma)	Panjang jembatan yang terbangun	40 Meq	10.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.15.923	Pembangunan Jembatan Kali Kut (Ruas Wamena - Kurima - Tangma)	Panjang jembatan yang terbangun	40 Meq	10.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.15.924	Pembangunan Jembatan Kali Jetmi (Ruas Wamena - Kurima - Tangma)	Panjang jembatan yang terbangun	40 Meq	15.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.15.925	Pembangunan Jembatan Toli 2	Panjang jembatan yang terbangun	153 Meq	10.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.15.929	Pembangunan Jembatan Sepa (80 M) (Ruas Jalan Elelim - Kobakma)	Panjang Jembatan Yang dibangun	78 Meq	38.500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.15.936	Pembangunan Jembatan Asset di Ruas Jalan Kepi-Bade	Panjang Jembatan yang terbangun	36 M`	20.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.15.944	Pembangunan Jembatan Sumbui (Serui - Ansus)	Panjang Jembatan yang dibangun	1.818 Meq	10.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.15.945	Pembangunan Jalan Kimbim - Wogi - Wosi	Panjang Jalan yang dibangun	3 Km	12.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.15.947	Pembangunan Jalan Legare - Samabusa	Panjang Jalan yang dibangun	6 Km	30.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.15.949	Pembangunan Jembatan Kawa (Berap - Nimbotong - Lereh - Tengon (110)	Panjang Jembatan yang dibangun	40 Meq	20.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.15.955	Pembangunan Jembatan Gremi	Panjang Jembatan yang dibangun	3 Meq	1.200.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
1.03.15.956	Pembangunan Jembatan Yamuneri (Illu - Tiom)	Panjang Jembatan yang dibangun	58 Meq	33.500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.15.962	Pembangunan Jembatan Yali (Ruas Jalan Elelim (Hulikma)-Witlango-Kobakma (149)	Panjang Jembatan yang dibangun	2.307 Meq	15.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.15.964	Pembangunan Jembatan Ogotho (Ruas Jalan Kepi-Bade)	Panjang Jembatan yang dibangun	30 Meq	15.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.15.968	Pembangunan Jembatan Konja (Ruas Jalan Elelim (Hulikma)-Witlanggo-Kobakma (149)	Panjang Jembatan yang dibangun	2.307 Meq	15.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.15.969	Pembangunan Jembatan Yomo 1 (Ruas Jalan Besum-Yanbra-Puay)	Panjang Jembatan yang dibangun	40 Meq	24.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.15.970	Pembangunan Jembatan Yomo 2 (Ruas Jalan Besum-Yanbra-Puay)	Panjang Jembatan yang dibangun	36 Meq	20.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.15.972	Pembangunan Jembatan Tagaemon (Ruas Jalan Kepi-Bade)	Panjang Jembatan yang terbangun	100 Meq	50.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.15.976	Pembangunan Jalan Ninati - Yetetkun	Panjang Jalan yang Terbangun	2 Km	20.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.15.977	Pembangunan Jalan Oksibil - Tarup - Denomngatupbin	Panjang Jalan yang Terbangun	16 Km	81.500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.15.978	Pembangunan Eligobel - Tanas	Panjang Jalan yang Terbangun	3 Km	20.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.15.979	Pembangunan Jalan Tomer - Kondo	Panjang Jalan yang Terbangun	3 Km	15.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.15.980	Pembangunan Jembatan Nasem (Distrik Naukenjerai)	Panjang Jembatan yang Terbangun	15 Meq	10.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
1.03.15 .982	Pembangunan Jalan Pattipi - Suator	Panjang Jalan Yang Terbangun	2 Km	30.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.15 .983	Pembangunan Jalan dan Jembatan Prov Papua	Panjang Jalan dan Jembatan yang terbangun	30 Km	100.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.15 .997	Pembangunan Jalan Irimuli - Wanduri - Pilia - Witle	Panjang Jalan yang dibangun	4 Km	25.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.15 .1005	Pembangunan Jembatan Kali Yungme	Panjang jembatan yang terbangun	15 Meq	10.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.15 .1006	Pembangunan Jembatan Kali Wollo	Panjang jembatan yang terbangun	25 Meq	15.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.15 .1007	Pembangunan Jembatan Gantung Kali Yugu Nemba	Panjang jembatan yang terbangun	20 Meq	5.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.15 .1008	Pembangunan Jembatan Kali Baliem Distrik Beam	Panjang jembatan yang terbangun	25 Meq	15.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.15 .1009	Pembangunan Jembatan Kali Mugi	Panjang jembatan yang terbangun	40 Meq	25.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.15 .1010	Pembangunan Jembatan Kali Hunen	Panjang jembatan yang terbangun	30 Meq	20.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.15 .1011	Pembangunan Jembatan Kali Libuk	Panjang jembatan yang terbangun	30 Meq	20.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.15 .1012	Pembangunan Jembatan Kali Wasile	Panjang jembatan yang terbangun	30 Meq	20.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.15 .1013	Pembangunan Jembatan Kali Weth	Panjang jembatan yang terbangun	30 Meq	20.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
1.03.15 .1014	Pembangunan Jembatan Kali Kayo	Panjang jembatan yang terbangun	30 Meq	20.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.15 .1015	Pembangunan Jembatan Kali Yesuke	Panjang jembatan yang terbangun	30 Meq	20.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.15 .1016	Pembangunan Jembatan Gantung Kali Baliem Distrik Negeyagin	Panjang jembatan yang terbangun	200 Meq	10.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.15 .1018	Pembangunan Jalan Fly Over Waena - Abepura (Segmen 1)	panjang jalan yang terbangun	2 Km	150.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.15 .1019	Pembangunan Jalan Fly Over Abepura - Kotaraja - Sky Line (Segmen 2)	panjang jalan yang terbangun	2 Km	200.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.15 .1020	Pembangunan Jalan Fly Over Abepura - T. Hitam (Segmen 3)	panjang jalan yang terbangun	0 Km	150.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.15 .1023	Pembangunan Jalan Wamena - Yomote - Anggruk- Dekai	panjang jalan yang terbangun	16 Km	81.500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.15 .1024	Pembangunan Jalan Gunung Susu - Sawarek- Wetalak - Wemanesili	panjang jalan yang terbangun	6 Km	25.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.15 .1025	Pembangunan Jalan Yamoneri - Jigemili	panjang jalan yang terbangun	7 Km	30.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.15 .1026	Pembangunan Jalan Beton Lingkar Asmat	panjang jalan yang terbangun	2 Km	81.500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.15 .1027	Pembangunan Jalan Wangbe - Ogamaning	panjang jalan yang terbangun	16 Km	81.500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.15 .1028	Pembangunan Jalan Gupura - Guna	panjang jalan yang terbangun	3 Km	15.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
1.03.15 .1029	Pembangunan Jembatan Kali Bumi Bawah	Panjang jembatan yang terbangun	40 Meq	20.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.15 .1030	Pembangunan Jalan Tiom - Jugungwi	panjang jalan yang terbangun	3 Km	15.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.15 .1031	Pembangunan Jembatan Kali Ilu (Distrik Ilugga)	Panjang jembatan yang terbangun	40 Meq	20.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.15 .1032	Pembangunan Jalan Mugi - Werima - Soba	panjang jalan yang terbangun	4 Km	20.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.15 .1035	Pembangunan Jalan Kanggime - Kembu (Mamit) - Umagi - Dou	panjang jalan yang terbangun	10 Km	40.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Panjang Jalan yang terbangun	2 Km		
1.03.15 .1036	Pembangunan Jalan Obano - Uwebutu (Duntek - Munayepa/Iyei)	panjang jalan yang terbangun	5 Km	25.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Panjang Jalan yang terbangun	2 Km		
1.03.15 .1040	Pembangunan Jembatan Kertosari IV B	Jumlah lampu yang dipasang	2 Unit	5.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Panjang jembatan yang terbangun	909 Meq		
1.03.15 .1044	Pembangunan Jembatan Sirum (Raus Jalan Nimbotong - Lereh - Tenganon)	Panjang jembatan yang terbangun	1.818 Meq	10.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.15 .1045	Pembangunan Jembatan Nganhose (Raus Jalan Nimbotong - Lereh - Tenganon)	Panjang jembatan yang terbangun	1.818 Meq	10.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.15 .1047	Pembangunan Jembatan Hewa II (Raus Jalan Nimbotong - Lereh - Tenganon)	Panjang jembatan yang terbangun	1.818 Meq	10.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.15 .1048	Pembangunan Jembatan Kali Mugun	Panjang jembatan yang terbangun	153 Meq	10.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.15 .1049	Pembangunan Jembatan Nanifokei (Ruas Jalan Botawa - Koweda - Barapasi)	Panjang jembatan yang terbangun	2.727 Meq	15.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
1.03.15 .1050	Pembangunan Jembatan Minaworuf (Ruas Jalan Serui - Menawi - Sumberbaba)	Panjang jembatan yang terbangun	1.818 Meq	10.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.15 .1057	Pembangunan Jalan Wanui - Mabuk Barat - Dolinggame - Illu	panjang jalan yang terbangun	9 Km	52.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.15 .1058	Pembangunan Jalan Jigemili - Wabiragi	panjang jalan yang terbangun	9 Km	52.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.15 .1059	Pembangunan Jembatan Jila	panjang jalan yang terbangun	35 Km	25.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.15 .1060	Pembangunan Jalan Poik - Dekai	panjang jalan yang terbangun	14 Km	81.500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.15 .1061	Pembangunan Jalan Dabra - Mamit	panjang jalan yang terbangun	1.358 Km	81.500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.15 .1062	Pembangunan Jalan Nume - Mamit	panjang jalan yang terbangun	1 Km	8.500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.15 .1063	Pembangunan Jalan Melendik - Tugunagwi - Tiom	panjang jalan yang terbangun	142 Km	8.500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.15 .1064	Pembangunan Jalan Ring Road (Lukmen) Kab. Jayawijaya	panjang jalan yang terbangun	17 Km	100.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.15 .1065	Pembangunan Jalan Walesi - Walaek	panjang jalan yang terbangun	2 Km	10.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.15 .1066	Pembangunan Jalan Ilaga - Sinak	panjang jalan yang terbangun	2 Km	10.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.15 .1067	Pembangunan Jalan Koya Barat - Koya Tengah	panjang jalan yang terbangun	1 Km	18.500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
1.03.15 .1068	Pembangunan Jalan Holtecamp (PLTD) - Pantai Pasir III Tahap II	panjang jalan yang terbangun	5 Km	23.500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.15 .1069	Pembangunan Jalan Masuk Gunung Teletubies (Venue Paralayang)	panjang jalan yang terbangun	4 Km	18.500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.15 .1070	Pembangunan Jalan Wendame - Paba	panjang jalan yang terbangun	5 Km	35.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.15 .1071	Pembangunan Jalan Bewam - Nogombu	panjang jalan yang terbangun	8 Km	50.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.15 .1072	Pembangunan Jalan Wunin - Timori	panjang jalan yang terbangun	7 Km	50.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.15 .1073	Pembangunan Jalan Panaga - Gelok - Gika - Dundu	panjang jalan yang terbangun	6 Km	70.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.15 .1074	Pembangunan Jalan Iballo - Wakenok	panjang jalan yang terbangun	2 Km	14.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.15 .1075	Pembangunan Jalan Mamit - Jowo	panjang jalan yang terbangun	4 Km	28.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.15 .1076	Pembangunan Jalan Mamit - Luwirak	panjang jalan yang terbangun	3 Km	21.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.15 .1077	Pembangunan Jembatan Kurip Distrik Bokondini	panjang jembatan yang terbangun	50 Meq	30.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.15 .1078	Pembangunan Jembatan Jembatan Ginidunak Distrik Karubaga	panjang jembatan yang terbangun	20 Meq	5.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.15 .1079	Pembangunan Jembatan Gantung Distrik Itadipa	panjang jembatan yang terbangun	20 Meq	5.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
1.03.15 .1080	Pembangunan Jalan Sugapa - Homeo	panjang jalan yang terbangun	3 Km	20.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.15 .1081	Pembangunan Jalan Dogiai - Kaimana	panjang jalan yang terbangun	3 Km	20.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.15 .1082	Pembangunan Jalan Paniai Timur - Dogiai	panjang jalan yang terbangun	3 Km	20.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.15 .1083	Pembangunan Jalan Enarotali - Pasir Putih	panjang jalan yang terbangun	3 Km	20.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.15 .1084	Pembangunan Jalan Pasir Putih - Dogobaida	panjang jalan yang terbangun	333 Km	20.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.15 .1085	Pembangunan Jalan Oksibil - Serambakon	panjang jalan yang terbangun	3 Km	20.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.15 .1086	Pembangunan Jalan Oksibil - Okaum	panjang jembatan yang terbangun	333 Km	20.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.15 .1087	Pembangunan Jembatan Turun Atlit PB Selam	panjang jalan yang terbangun	30 M	1.129.400.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.15 .1088	Pembangunan Pengaman Jalan dan Box Culvert Buper 1000 M3 (SMA 3) - BTS Kab./Kota Jayapura	panjang jalan pengaman yang terbangun	2.481 M3	1.216.400.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.15 .1089	Pembangunan Jalan Ipoguk-Bukit Doa - Umagi	panjang jalan yang terbangun	6 Km	28.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.15 .1090	Pembangunan Jalan Pasir 6 Belakang AURI	panjang jalan yang terbangun	1 Km	3.500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.15 .1091	Pembangunan Talud Pengaman Jalan di Tolikara	panjang talud pengaman yang terbangun	167 M3	25.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
1.03.15 .1092	Pembangunan Talud Pengaman Jalan di Lanny Jaya	panjang talud pengaman yang terbangun	1.667 M3	25.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.15 .1093	Pembangunan Talud Pengaman Jalan Kali Wunin	panjang talud pengaman yang terbangun	1.000 M3	1.500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.15 .1094	Pembangunan Jalan Abimbak - Wanggulan - Bokondini	panjang jalan yang terbangun	45 Km	30.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.15 .1095	Pembangunan Jalan Nonggawi - Kanginesi	panjang jalan yang terbangun	4 Km	30.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.15 .1096	Pembangunan Jalan Ebumi Itelo	panjang jalan yang terbangun	3 Km	20.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.15 .1097	Pembangunan Jalan Gantini - Tugibur - Wanggingga- Tolikara	panjang jalan yang terbangun	35 Km	20.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.15 .1098	Pembangunan Jalan Goa Maria Buper - Kampwolker Waena	panjang jalan yang terbangun	2 Km	9.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.15 .1099	Pembangunan Jalan Yogobak - Alkunik	panjang jalan yang terbangun	15 Km	90.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.15 .1100	Pembangunan Jalan Umagi - Douw (Air Terjun)	panjang jalan yang terbangun	15 Km	90.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.1 6	Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Persentase genangan air permukaan yang dapat turunkan	90 persen	9.983.900.000,00	
1.03.16 .01	Perencanaan Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Penurunan genangan air permukaan	0 %	1.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Peningkatan kinerja saluran drainase/gorong-gorong	0 %		
		Prosentase penanganan banjir	0 %		
		Jumlah Dokumen	15 Dokumen		
1.03.16 .03	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Peningkatan kinerja saluran drainase/gorong-gorong	0 %	2.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Penurunan genangan air permukaan	0 %		
		Prosentase penanganan banjir	0 %		

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
		Panjang saluran yang terbangun	5 Km		
1.03.16.08	Pembangunan Drainase di Provinsi Papua	Panjang Drainase yang dikerjakan	0 Meter	0,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.16.16	Pembangunan Drainase di Kabupaten Merauke	Panjang Drainase yang dikerjakan	200 Meter	1.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.16.17	Pembangunan Drainase di Kabupaten Mimika	Panjang Drainase yang dikerjakan	200 Meter	1.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.16.21	Jaringan Drainase di Argapura Kota Jayapura	Panjang Drainase yang dikerjakan	200 Meter	1.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.16.25	Pembangunan Drainase di Kabupaten Jayapura	Panjang Drainase yang dikerjakan	200 Meter	1.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.16.27	Pembangunan Drainase Kp Randawaya	Panjang Drainase yang dikerjakan	850 M1	2.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.16.28	Pembangunan Lintasan Atletik dan Drainase Stadion Katapal Merauke	Panjang lintas atletik dan drainase yang dikerjakan	350 M	983.900.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.17	Program Pembangunan turap/talud/brojong	Persentase turap/talud/bronjong yang berfungsi baik dalam mencegah longsor di tebing jaln/sungai	100 persen	47.000.000.000,00	
		Terbangunnya turap/talud/brojong	0 Unit		
		Prosentase Tebing Sungai yang diamankan	0 %		
1.03.17.09	Pembangunan Talud Permukiman di Provinsi Papua	Panjang Talud Pengaman yang dibangun	1.000 Meter	5.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.17.10	Perencanaan Talud Permukiman di Provinsi Papua	Jumlah dokumen perencanaan talud	29 Dokumen	600.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Panjang Talud Pengaman yang dibangun	29 Meter		
1.03.17.13	Pembangunan Talud Pengaman Tebing Jalan Pasifik Indah Pasir II	Panjang Talud yang terbangun	200 M ²	2.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
1.03.17 .14	Pembangunan Talud Pengaman Tebing SMP Kristus Raja	Panjang Talud yang terbangun	200 M ³	1.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.17 .15	Pembangunan Talud Gereja Baptis Skyline	Panjang Talud yang terbangun	200 M ³	1.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.17 .21	Pembangunan Talud Pengaman Tebing Permukiman Tanjung Ria	Panjang Talud yang terbangun	200 M ³	2.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.17 .29	Pembangunan Talud Permukiman/Pengaman Tebing di Kabupaten Tolikara	Panjang Talud yang terbangun	200 M ³	2.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.17 .31	Pembangunan Talud Permukiman/Pengaman Tebing di Kabupaten Lanni Jaya	Panjang Talud yang terbangun	200 M ³	2.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.17 .33	Pembangunan Talud Permukiman/Pengaman Tebing di Kabupaten Puncak	Panjang Talud yang terbangun	200 M ³	2.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.17 .38	Pembangunan Talud Pengaman Tebing Pasir II	Panjang Talud yang terbangun	200 M ³	1.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.17 .41	Pembangunan Talud Pos 7 Sentani Desa Sereh	Panjang Talud yang terbangun	300 M ³	6.200.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.17 .42	Pembangunan Talud Pengamanan Pemukiman Warga Distrik Sugapa	Panjang Talud yang terbangun	200 M ³	2.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.17 .43	Pembangunan Talud Pengamanan Perumahan Warga Desa Titigi	Panjang Talud yang terbangun	200 M ³	2.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.17 .44	Pembangunan Talud Pengamanan Bandara Sugapa	Panjang Talud yang terbangun	200 M ³	2.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.17 .45	Pembangunan Talud dan Tembok Akapela Angkasa Indah.	Panjang Talud yang terbangun	200 M ³	2.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
1.03.17.46	Pembangunan Talud Pemukiman Warga Dok V	Panjang Talud yang terbangun	200 M3	2.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.17.47	Pembangunan Talud Kampung Koya Koso	Panjang Talud yang terbangun	200 M3	2.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.17.48	Pembangunan Talud Permukiman di Kabupaten Jayapura	Panjang Talud yang terbangun	400 M3	4.700.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.17.49	Pembangunan Talud Dok IX Gereja Kasih Abua	Panjang Talud yang terbangun	133 M3	1.500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.17.50	Pembangunan Talud Pengaman Tebing Pemukiman Entrop Kota Jayapura	Panjang Talud yang terbangun	200 M3	2.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.17.51	Pembangunan Talud Pengaman Tebing Pemukiman Namburu RSUD Dok II	Panjang Talud yang terbangun	200 M3	2.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.18	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase panjang jalan provinsi dalam kondisi mantap	40 persen	620.000.000.000,00	
		Persentase panjang jembatan provinsi dalam kondisi matap	50 persen		
1.03.18.05	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah dokumen	12 Laporan	2.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.18.110	Pemeliharaan Berkala Jalan Kuansun - Besum - Genyem (107)	Jumlah panjang jalan yang dipelihara	5 Km	5.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.18.111	Pemeliharaan Jalan Berap - Nimbontong - Lereh - Tengon (110) Paket I	Panjang jalan yang dipelihara	5 Km	5.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.18.112	Pemeliharaan Jalan Bolakme - Kelila - Bokondini (167)	Jumlah panjang jalan yang dipelihara	5 Km	5.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.18.124	Pemeliharaan Jalan Waena - Arso V (100 K) 53 Km Paket I	Panjang jalan yang dipelihara	5 Km	5.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
1.03.18 .129	Pemeliharaan Jalan Biak - Junction - Korem	Panjang Jalan yang dipelihara	5 Km	5.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.18 .132	Pemeliharaan Jalan Korem - Doubo	Jumlah panjang jalan yang dipelihara	5 Km	5.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.18 .133	Pemeliharaan Jalan Wardo - Duber (134) 37,96 Km	Jumlah panjang jalan yang dipelihara	5 Km	5.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.18 .135	Pemeliharaan Jalan Duber - Sorendiweri - Korido (136)	Panjang jalan yang dipelihara	5 Km	5.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.18 .144	Pemeliharaan Jalan Kuprik - Jagebob - Erambu (183), 134 Km	Panjang jalan yang dipelihara	5 Km	5.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.18 .152	Pemeliharaan Jalan Warumbaim - Berap - Demta (109)	Jumlah panjang jalan provinsi yang dipelihara	3.434 Km	20.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.18 .153	Pemeliharaan Jalan Besum - Yanbra - Puai (118)	Panjang jalan yang dipelihara	5 Km	5.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.18 .156	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Provinsi Papua	Panjang jalan provinsi dan kabupaten/kota yang dipelihara	100 Km	70.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.18 .161	Pemeliharaan Jalan Kanggime - Mamit Paket I	Panjang Jalan yang dipelihara	5 Km	5.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.18 .163	Pemeliharaan Jalan Enarotali (Paniai) - Sugapa, (139) (50 Km) Paket I	Panjang jalan yang dipelihara	5 Km	5.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.18 .164	Pemeliharaan Jalan Enarotali (Paniai) - Sugapa, (139) (50 Km) Paket II	Panjang jalan yang dipelihara	5 Km	5.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.18 .165	Pemeliharaan Jalan Serui - Ansus (123), 71,15 Km Paket I	Panjang jalan provinsi yang dipelihara	10 Km	5.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
1.03.18 .167	Pemeliharaan Jalan Menawi - Sumberbaba (122), 40 Km Paket I	Panjang jalan provinsi yang dipelihara	5 Km	5.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.18 .169	Pemeliharaan Berkala Jalan Junction - Wardo (130)	Jumlah panjang jalan provinsi yang dipelihara	5 Km	5.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.18 .170	Pemeliharaan Berkala Jalan Bts Kota Merauke - Kumba - Bian - Okaba (185)	Jumlah panjang jalan provinsi yang dipelihara	5 Km	5.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.18 .171	Pemeliharaan Jalan Jayapura - Dok V - Angkasa	Jumlah panjang jalan provinsi yang dipelihara	10 Km	15.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.18 .172	Pemeliharaan Jalan Perumnas II Waena	Jumlah panjang jalan yang dipelihara	5 Km	5.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.18 .173	Pemeliharaan Berkala Jalan Bolakme - Piramid (168) 61,50 Km	Panjang Jalan yang dipelihara	5 Km	5.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.18 .176	Pemeliharaan Jalan Vihara - Tanah Hitam di Kota Jayapura	Panjang jalan provinsi yang dipelihara	5 Km	5.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.18 .183	Pemeliharaan Jalan SP II - Napan (136)	Panjang Jalan yang dipelihara	5 Km	5.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.18 .185	Pemeliharaan Jalan Hamadi - Entrop (102 K)	Panjang Jalan yang dipelihara	20 Km	5.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.18 .188	Pemeliharaan Jalan Kemiri - Depapre (111)	Panjang Jalan yang dipelihara	24 Km	5.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.18 .189	Pemeliharaan Jalan Arso XIV - Sawia - Kwarja (112)	Panjang Jalan yang dipelihara	383 Km	5.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.18 .190	Pemeliharaan Jalan Usku - Kesnar (113)	Panjang Jalan yang dipelihara	353 Km	5.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
1.03.18 .192	Pemeliharaan Jalan Munukania - Aurimi (116)	Panjang Jalan yang dipelihara	10 Km	5.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.18 .193	Pemeliharaan Jalan Burmeso - Gesa - Barapasi (117)	Panjang Jalan yang dipelihara	5 Km	5.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.18 .194	Pemeliharaan Jalan Serui - Kamanap - Ansus (122)	Panjang Jalan yang dipelihara	7 Km	5.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.18 .195	Pemeliharaan Jalan Sumberbaba - Dawai (124)	Panjang Jalan yang dipelihara	5 Km	5.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.18 .196	Pemeliharaan Jalan Waren - Botawa - Sumiangga (126)	Panjang Jalan yang dipelihara	30 Km	5.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.18 .197	Pemeliharaan Jalan Botawa - Koweda - Barapasi (127)	Panjang Jalan yang dipelihara	5 Km	5.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.18 .198	Pemeliharaan Jalan Junction - Wardo (128)	Panjang Jalan yang direhab/dipelihara	17 Km	5.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.18 .199	Pemeliharaan Jalan Biak - Bosnik (129)	Panjang Jalan yang dipelihara	172 Km	5.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.18 .204	Pemeliharaan Jalan Biak - Adibai - Marau/Bosnik (130)	Panjang Jalan yang dipelihara	5 Km	5.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.18 .205	Pemeliharaan Jalan Doubo - Sorendiwari - Amyas (133)	Panjang Jalan yang dipelihara	10 Km	5.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.18 .206	Pemeliharaan Jalan Legare - Samabusa (137)	Panjang Jalan yang dipelihara	10 Km	5.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.18 .207	Pemeliharaan Jalan Samabusa - Nabarua Bawah (138)	Panjang Jalan yang dipelihara	20 Km	4.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
1.03.18.208	Pemeliharaan Jalan Logistik Centre - Power Station (143)	Panjang Jalan yang dipelihara	20 Km	5.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.18.210	Pemeliharaan Jalan Kaugapu (Sp VIII) - Sp V (145)	Panjang Jalan yang dipelihara	10 Km	5.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.18.211	Pemeliharaan Jalan Mapurujaya - Tipuka - Ayuka (146)	Panjang Jalan yang dipelihara	10 Km	5.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.18.213	Pemeliharaan Jalan Dekai - Logpond - Pattipi (156)	Panjang Jalan yang dipelihara	50 Km	4.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.18.214	Pemeliharaan Jalan Piramid - Bolakme (158)	Panjang Jalan yang dipelihara	0 Km	4.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.18.215	Pemeliharaan Jalan Manda - Wolo (159)	Panjang Jalan yang dipelihara	20 Km	4.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.18.216	Pemeliharaan Jalan Wamena - Pugima - Mugi (160)	Panjang Jalan yang dipelihara	10 Km	5.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.18.217	Pemeliharaan Jalan Kimbim - Wogi - Wosi (161)	Panjang Jalan yang dipelihara	10 Km	5.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.18.218	Pemeliharaan Jalan Wamena - Temia - Wogi (162)	Panjang Jalan yang dipelihara	6 Km	10.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.18.220	Pemeliharaan Jalan Keppi - Bade (165)	Panjang Jalan yang dipelihara	10 Km	5.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.18.221	Pemeliharaan Jagebob - Bupul (167)	Panjang Jalan yang dipelihara	10 Km	5.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.18.222	Pemeliharaan Jalan Okaba - Bade (168)	Panjang Jalan yang dipelihara	5 Km	5.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
1.03.18.224	Pemeliharaan Jalan Taja - SP V - Kwarja (106)	Panjang Jalan yang dipelihara	10 Km	5.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.18.225	Pemeliharaan Jalan Berap - Nimbotong - Lereh - Tengon	Panjang Jalan yang dipelihara	10 Km	5.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.18.226	Pemeliharaan Jalan Menawi - Sumberbaba (122)	Panjang Jalan yang dipelihara	70 Km	5.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.18.230	Pemeliharaan Jalan Wamena - Karubaga - Mulia	Jumlah panjang jalan yang dipelihara	10 Km	50.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.18.231	Pemeliharaan Jalan Manda - Wolo - Kobakma	Panjang Jalan yang direhab/dipelihara	5 Km	25.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.18.232	Pemeliharaan Jalan Beam - Makki - Pirime - Tiom	Jumlah panjang jalan yang dipelihara	10 Km	52.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.18.233	Pemeliharaan Jalan Wamena - Elelim	Jumlah panjang jalan yang dipelihara	5 Km	25.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.18.234	Pemeliharaan Jalan Wamena - Suru Suru - Dekai	Jumlah panjang jalan yang dipelihara	5 Km	25.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.18.235	Pemeliharaan Jalan Nabire - Enarotali	Jumlah panjang jalan yang dipelihara	6 Km	25.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.18.236	Pemeliharaan Jalan Mulia - Yambi - Sinak	Jumlah panjang jalan yang dipelihara	6 Km	25.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.18.237	Pemeliharaan Jalan Dalam Kota Kenyam	Jumlah panjang jalan yang dipelihara	5 Km	25.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.24	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Peningkatan kinerja Daerah Irigasi (DI)	0 %	244.961.112.206,00	
		Daerah irigasi provinsi yang berfungsi	3.000 Hektar		

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
		Persentase luas lahan yang terlayani irigasi	85 %		
		Tingkat produktifitas lahan sawah yang terpenuhi irigasi	54 Ton		
		Cakupan layanan air bersih/air minum	54 %		
		Terpeliharanya sempadan sumber air	20 Lokasi		
		Persentase jaringan irigasi provinsi dengan kualitas baik	60 M		
1.03.24 .10	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	Panjang Saluran Irigasi yang direhab/dipelihara	10.000 M	10.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Peningkatan saluran irigasi yang fungsional	0 %		
		Peningkatan kinerja sistem jaringan irigasi	0 %		
1.03.24 .282	Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Lereh SP 5	Panjang saluran, jaringan, jalan dan bangunan pelengkap irigasi yang ditingkatkan	1.000 M	5.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Laporan hasil pengawasan saluran irigasi yang ditingkatkan	5 Laporan		
1.03.24 .283	Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Lereh Paket III	Panjang saluran irigasi yang terbangun	100 M	3.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Peningkatan saluran yang fungsional	0 %		
		Peningkatan kinerja lahan produksi	0 %		
1.03.24 .336	Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Maidey Paket II	Panjang saluran irigasi yang terbangun	100 M	2.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Peningkatan saluran yang fungsional	0 %		
		Peningkatan kinerja lahan produksi	0 %		
1.03.24 .337	Peningkatan Jaringan Rawa DIR Serapu	Panjang saluran irigasi yang terbangun	1.000 M	2.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Peningkatan saluran irigasi yang fungsional	0 %		
		Peningkatan kinerja sistem irigasi DIR Serapu	0 %		
1.03.24 .338	Peningkatan Jaringan Irigasi DIR Okaba	Panjang saluran irigasi yang ditingkatkan	1.000 M	2.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Laporan hasil pengawasan saluran irigasi yang ditingkatkan	100 Dokumen		
1.03.24 .339	Pembangunan long Storage Kabupaten Merauke	Volume bangunan Long Storage yang dibangun	10.000 M3	10.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Prosentase fungsi bangunan yang dapat beroperasi	0 %		
		Cakupan wilayah dilayani Long Storage Kab Merauke	0 Ha		
1.03.24 .340	Peningkatan Jaringan Rawa DIR Salor	Panjang saluran irigasi yang ditingkatkan	1.000 M	2.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Laporan hasil pengawasan saluran irigasi yang ditingkatkan	0 Laporan		
1.03.24 .341	Peningkatan Jaringan Rawa DIR Wasur	Panjang Jaringan Irigasi yang ditingkatkan	1.000 M	2.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Laporan hasil pengawasan saluran irigasi yang ditingkatkan	0 Laporan		
1.03.24 .349	Peningkatan Jaringan Irigasi	Panjang Jaringan Irigasi yang ditingkatkan	100 M	5.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
		Cakupan wilayah DI yang ditingkatkan	0 Ha		Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Peningkatan Produktifitas Pertanian	0 %		
1.03.24.351	Operasi dan Pemeliharaan Irigasi tersebar (Swakelola)	Luas Jaringan Irigasi untuk petani	10.000 Ha	5.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.24.352	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Panjang jaringan irigasi yang dikelola dan dipelihara	10.000 Meter	10.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.24.381	Rehabilitasi Jaringan Rawa DR. Salor	Panjang jaringan rawa yang direhab	23.158 M	29.520.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.24.382	Rehabilitasi Jaringan Rawa DR. Wasum-Nasem	Panjang jaringan rawa yang direhab	18.000 M	18.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.24.399	Pembangunan Long Storage DR Salor	Volume Bangunan Long Storage yang terbangun	100 M3	5.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.24.404	Peningkatan Jaringan Irigasi DI Lereh	Panjang Saluran Irigasi	0 Meter	5.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.24.405	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Lereh	Panjang Saluran Irigasi	3.000 Meter	13.755.697.253,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.24.406	Peningkatan Jaringan Irigasi DI Legare	Panjang Saluran Irigasi	0 Meter	5.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.24.407	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Legare	Panjang Saluran Irigasi	3.000 Meter	24.085.414.953,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.24.409	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Maidey	Panjang Saluran Irigasi	4.975 Meter	12.900.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.24.413	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DIR Kuprik - Sidomulyo	Panjang Saluran Irigasi	13.500 Meter	19.200.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
1.03.24.414	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DIR Gudang Arang - Serapu	Panjang Saluran Irigasi	14.000 Meter	16.800.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.24.415	Peningkatan Jaringan Rawa DIR Okaba	Panjang Saluran Irigasi	0 Meter	3.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.24.416	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DIR Okaba	Panjang Saluran Irigasi	17.800 Meter	18.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.24.420	Penyelenggaraan kelembagaan Komisi Irigasi di Provinsi Papua	Jumlah aktivitas yang dilaksanakan dalam kelembagaan Komisi Irigasi	3 Kegiatan	200.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.24.422	Survey Angka Kebutuhan Nyata Operasi dan Pemeliharaan (Aknop) Daerah Irigasi (DI)	Jumlah lokasi survey	7 Lokasi	2.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.24.423	Operasional Unit Pengelola Irigasi	Cakupan wilayah yg dilayani jaringan irigasi	500 M3	1.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.24.424	OP Irigasi WS Kewenangan Provinsi Papua	Cakupan wilayah yg dilayani jaringan irigasi	100 M3	2.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.24.425	Pembangunan Long Storage Hutan Sagu (3 Lokasi Jayapura-Mimika-Merauke)	Volume bangunan Long Storage yang dibangun	1.000 M3	10.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.24.426	Survey Aknop/E-Paksi DI/DIR Kewenangan Provinsi	Jumlah lokasi survey	5 Dokumen	1.500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.25	Program penyediaan dan pengolahan air baku	Cakupan keterlayanan air baku	40 persen	92.600.000.000,00	
1.03.25.04	Pembangunan sumur-sumur air tanah	Jumlah sumur yang terbangun	2 Titik	1.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.25.21	Pembangunan Jaringan Air Baku di Kabupaten Keerom	Luas area jaringan air baku yang dibangun	0 KM2	2.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Jumlah debit air	5 liter/detik		
		Jumlah KK yang dapat mengakses air bersih	0 KK		
		Peningkatan aksesibilitas masy. thd air bersih	0 %		

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
1.03.25 .22	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Baku di Kabupaten Gerbang Mas	Kapasitas Bangunan Intake yang terbangun	5 liter/detik	5.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Volume bangunan penampung yang terbangun	0 M3		
		Jumlah KK yang dapat mengakses air bersih	0 KK		
		Peningkatan aksesibilitas masy. thd air bersih	0 %		
1.03.25 .23	Operasi dan Pemeliharaan. Jaringan Air Baku Kab. Biak Numfor	Panjang jaringan perpipaan yang dipelihara	50 M	1.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Laporan hasil pengawasan jaringan yang beroperasi dan dipelihara	0 Dokumen		
1.03.25 .24	Operasi dan Pemeliharaan. Jaringan Air Baku Kab. Waropen	Panjang jaringan perpipaan yang dipelihara	50 M	1.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Laporan hasil pengawasan jaringan yang beroperasi dan dipelihara	0 Dokumen		
1.03.25 .26	Pembangunan infrastruktur air baku di Kabupaten Kabupaten Supiori	Panjang sarana infratraktur air baku yang terbangun	50 M	2.200.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Laporan hasil sarana infratraktur air baku yang terbangun	1 Dokumen		
1.03.25 .27	Pembangunan infrastruktur air baku di Kabupaten Kabupaten Sarmi	Panjang sarana infratraktur air baku yang terbangun	50 M	2.200.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Laporan hasil sarana infratraktur air baku yang terbangun	1 Dokumen		
1.03.25 .28	Pembangunan infrastruktur air baku di Kabupaten Jayapura	Panjang sarana infratraktur air baku yang terbangun	50 M	2.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Jumlah debit air	5 liter/detik		
1.03.25 .30	Pembangunan Long Storage Kampung Tambat	Panjang long storege yang terbangun	1.000 M	2.200.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Laporan hasil long storege yang terbangun	1 Dokumen		
1.03.25 .36	Pembangunan Infrastruktur Air Bersih/Baku Kabupaten Tolikara	Jumlah Debit air Perdetik	5 Lt/dtk	2.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.25 .37	Pembangunan Infrastruktur Air Bersih/Baku Kabupaten Yahukimo	Jumlah Debit air Perdetik	5 Lt/dtk	2.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.25 .38	Pembangunan Infrastruktur Air Bersih/Baku Kabupaten Yalimo	Jumlah Debit air Perdetik	5 Lt/dtk	2.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.25 .39	Pembangunan Infrastruktur Air Bersih/Baku Kabupaten Nduga	Jumlah Debit air Perdetik	5 Lt/dtk	3.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
1.03.25 .40	Pembangunan Infrastruktur Air Bersih/Baku Kabupaten Puncak	Jumlah Debit air Perdetik	5 Lt/dtk	2.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.25 .41	Pembangunan Infrastruktur Air Bersih/Baku Kabupaten Lanny Jaya	Jumlah Debit air Perdetik	5 Lt/dtk	2.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.25 .42	Pembangunan Infrastruktur Air Bersih/Baku Kabupaten Pegunungan Bintang	Jumlah Debit air Perdetik	5 Lt/dtk	2.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.25 .43	Pembangunan Infrastruktur Air Bersih/Baku Kabupaten Mamberamo Tengah	Jumlah Debit air Perdetik	5 Lt/dtk	2.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.25 .44	Pembangunan Infrastruktur Air Baku di Kabupaten Mamberamo Raya	Jumlah Debit air baku	5 liter/detik	3.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.25 .45	Pembangunan Infrastruktur Air Baku di Kabupaten Biak Numfor	Jumlah Debit air baku	5 liter/detik	3.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.25 .46	Pembangunan Jaringan Air Bersih di Kabupaten Waropen	Jumlah Debit air baku	5 liter/detik	3.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.25 .47	Pembangunan Infrastruktur Air Baku di Kabupaten Kep. Yapen	Jumlah Debit air baku	5 liter/detik	3.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.25 .48	Pembangunan Infrastruktur Air Baku di Kabupaten Nabire	Jumlah Debit air baku	5 liter/detik	3.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.25 .49	Pembangunan Infrastruktur Air Baku di Kabupaten Paniai	Jumlah Debit air baku	5 liter/detik	3.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.25 .50	Pembangunan Infrastruktur Air Baku di Kabupaten Deiyai	Jumlah Debit air baku	5 liter/detik	3.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.25 .51	Pembangunan Infrastruktur Air Baku di Kabupaten Dogiyai	Jumlah Debit air baku	5 liter/detik	3.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
1.03.25 .52	Pembangunan Infrastruktur Air Baku di Kabupaten Intan Jaya	Jumlah Debit air baku	5 liter/detik	3.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.25 .53	Pembangunan Infrastruktur Air Baku di Kabupaten Jayawijaya	Jumlah Debit air baku	5 liter/detik	2.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.25 .54	Pembangunan Infrastruktur Air Baku di Kabupaten Puncak Jaya	Jumlah Debit air baku	5 liter/detik	2.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.25 .55	Pembangunan Infrastruktur Air Baku di Kabupaten Mimika	Jumlah Debit air baku	5 liter/detik	3.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.25 .56	Pembangunan Infrastruktur Air Baku di Kabupaten Asmat	Jumlah Debit air baku	5 liter/detik	3.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.25 .57	Pembangunan Infrastruktur Air Baku di Kabupaten Boven Digoel	Jumlah Debit air baku	5 liter/detik	2.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.25 .58	Pembangunan Infrastruktur Air Baku di Kabupaten Mappi	Jumlah Debit air baku	5 liter/detik	2.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.25 .59	Pembangunan Infrastruktur Air Baku di Kabupaten Peg. Bintang	Jumlah Debit air baku	5 liter/detik	2.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.25 .60	Pembangunan Infrastruktur Air Baku di Kabupaten Merauke	Jumlah Debit air baku	5 liter/detik	2.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.25 .61	Perencanaan Infrastruktur Air Baku di Provinsi Papua	Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis	15 Dokumen	10.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.25 .62	Pembangunan infrastruktur Air baku di Kota Jayapura	Jumlah debit air	5 liter/detik	2.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.2 6	Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya			1.000.000.000,00	

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
1.03.26 .12	Pembiayaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	Jumlah laporan pembiayaan	2 Laporan	1.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.27	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Cakupan keterlayanan air bersih	46 persen	118.800.000.000,00	
		Persentase Rumah Tangga dengan Fasilitas Tempat Buang Air Besar	76 persen		
		Persentase penduduk yang memperoleh kebutuhan air minum	90 %		
		Persentase penduduk yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	75 %		
1.03.27 .32	Pengembangan SPAM Distrik Nabire	Jumlah unit SPAM yang dikembangkan	5 Lt/dtk	5.500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.27 .67	Pembangunan jaringan air bersih di kab Intan Jaya	Jumlah debit air bersih yang tersedia	5 Lt/dtk	2.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.27 .71	Pembangunan jaringan air bersih di kab Biak	Jumlah debit air bersih yang tersedia	5 Lt/dtk	2.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.27 .78	Pembangunan jaringan air bersih di kab Lani Jaya	Jumlah debit air bersih yang tersedia	5 Lt/dtk	2.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.27 .79	Pembangunan jaringan air bersih di kab Pegunungan Bintang	Jumlah debit air bersih yang tersedia	5 Lt/dtk	2.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.27 .95	Masterplan Drainase Perkotaan di Provinsi Papua	Jumlah dokumen Masterplan	29 Dokumen	2.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.27 .97	Pembangunan Jaringan Air Bersih di Kabupaten Jayapura	Jumlah debit air bersih	5 Lt/dtk	5.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.27 .98	Pembangunan Jaringan Air Bersih di Kota Jayapura	Jumlah debit air bersih	5 Lt/dtk	2.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.27 .108	Pembangunan Jaringan Air Bersih di Kabupaten Deiyai	Jumlah debit air bersih	5 Lt/dtk	2.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
1.03.27 .109	Pembangunan Jaringan Air Bersih di Kabupaten Dogiyai	Jumlah debit air bersih	2 Lt/dtk	2.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.27 .110	Pembangunan Jaringan Air Bersih di Kabupaten Intan Jaya	Jumlah debit air bersih	5 Lt/dtk	2.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.27 .111	Pembangunan Jaringan Air Bersih di Kabupaten Jayawijaya	Jumlah debit air bersih	5 Lt/dtk	2.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.27 .112	Pembangunan Jaringan Air Bersih di Kabupaten Tolikara	Jumlah debit air bersih	5 Lt/dtk	2.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.27 .115	Pembangunan Jaringan Air Bersih di Kabupaten Mamberamo Tengah	Jumlah debit air bersih	5 Lt/dtk	2.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.27 .116	Pembangunan Jaringan Air Bersih di Kabupaten Nduga	Jumlah debit air bersih	5 Lt/dtk	2.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.27 .117	Pembangunan Jaringan Air Bersih di Kabupaten Puncak	Jumlah debit air bersih	5 Lt/dtk	2.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.27 .118	Pembangunan Jaringan Air Bersih di Kabupaten Puncak Jaya	Jumlah debit air bersih	5 Lt/dtk	2.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.27 .119	Pembangunan Jaringan Air Bersih di Kabupaten Yahukimo	Jumlah debit air bersih	5 Lt/dtk	2.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.27 .120	Pembangunan Jaringan Air Bersih di Kabupaten Mimika	Jumlah debit air bersih	5 Lt/dtk	2.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.27 .121	Pembangunan Jaringan Air Bersih di Kabupaten Asmat	Jumlah debit air bersih	5 Lt/dtk	2.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.27 .122	Pembangunan Jaringan Air Bersih di Kabupaten Boven Digoel	Jumlah debit air bersih	5 Lt/dtk	2.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
1.03.27 .124	Pembangunan Jaringan Air Bersih di Kabupaten Peg. Bintang	Jumlah debit air bersih	5 Lt/dtk	2.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.27 .125	Pembangunan Jaringan Air Bersih di Kabupaten Merauke	Jumlah debit air bersih	5 Lt/dtk	2.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.27 .126	Pembangunan Jaringan Air Bersih di Lokasi Vanue PON	Jumlah debit air bersih	5 Lt/dtk	2.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.27 .170	Penyusunan Dokumen Perencanaan TEKNIS Pembangunan Jaringan Air Bersih (SPAM) di Provinsi Papua	Jumlah dokumen	29 Dokumen	3.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.27 .171	Perencanaan Teknis Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi di Provinsi Papua	Jumlah dokumen	29 Dokumen	2.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.27 .172	Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi di Provinsi Papua	Jumlah rumah yang memiliki sanitasi	150 KK	5.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.27 .176	Penanganan Persampahan di Provinsi Papua (Kabupaten Lokasi PON)	Jumlah sampah yang tertangani	30 Unit	2.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.27 .178	Pembangunan Jaringan Air Bersih Hamadi Gunung - Tasangka	Volume debit air yang dihasilkan	2 Lt/dtk	3.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.27 .179	Pembangunan Jaringan Air Bersih Gereja GIDI Milinikime Pasir II	Volume debit air yang dihasilkan	6 Lt/dtk	3.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.27 .180	Pembangunan Jaringan Air Bersih Buper Dalam Kota Jayapura	Volume debit air yang dihasilkan	3 Lt/dtk	3.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.27 .181	Pembangunan Jaringan Air Bersih Distrik Bewani	Volume debit air yang dihasilkan	5 Lt/dtk	4.500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.27 .182	Pembangunan Jaringan Air Bersih Bokondini	Volume debit air yang dihasilkan	5 Lt/dtk	4.500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
1.03.27 .183	Pembangunan Jaringan Air Bersih Gilibin Mamit	Volume debit air yang dihasilkan	5 Lt/dtk	4.700.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.27 .184	Pembangunan Jaringan Air Bersih Kp Ampimoi	Volume debit air yang dihasilkan	5 Lt/dtk	3.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.27 .185	Pembangunan Jaringan Air Bersih Kp Randawaya	Volume debit air yang dihasilkan	5 Lt/dtk	3.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.27 .186	Pembangunan Jaringan Air Bersih Kp Waita	Volume debit air yang dihasilkan	5 Lt/dtk	3.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.27 .187	Pembangunan Jaringan Air Bersih Buper Waena Kota Jayapura	Volume debit air yang dihasilkan	5 Lt/dtk	3.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.27 .188	Pembangunan Jaringan Air Bersih Angkasa Kota Jayapura	Volume debit air yang dihasilkan	5 Lt/dtk	3.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.27 .189	Pembangunan Jaringan Air Bersih Goa Maria Buper Waena	Volume debit air yang dihasilkan	5 Lt/dtk	1.200.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.27 .190	Pembangunan Jaringan Air Bersih Hamadi Gunung	Volume debit air yang dihasilkan	5 Lt/dtk	3.200.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.27 .191	Pembangunan Jaringan Air Bersih di Dok IX Gereja Kasih Abua	Volume debit air yang dihasilkan	5 Lt/dtk	2.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.27 .192	Pembangunan Jaringan Air Bersih Koya Koso	Volume debit air yang dihasilkan	5 Lt/dtk	2.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.27 .193	Pembangunan Jaringan Air Bersih Pasir II	Volume debit air yang dihasilkan	5 Lt/dtk	2.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.27 .194	Pembangunan Jaringan Air Bersih Gereja GIDI EDEN Entrop	Terbangunnya jaringan air	5 Ltr	2.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
1.03.27.195	Penyediaan Air Bersih Rumah Susun di Belakang STT I.S Kinjte	tersedianya air bersih rumah susun	5 Ltr	2.200.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.28	Program pengendalian banjir	Cakupan kawasan rawan abrasi yang tertangani	40 persen	522.100.000.000,00	
		Cakupan kawasan rawan banjir yang tertangani	60 persen		
1.03.28.13	Pembangunan Pengamanan Pantai Kurudu Kep. Yapen	Panjang talud pengaman pantai yang terbangun	2.000 M	5.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Laporan hasil talud pengaman pantai yang terbangun	2.000 Laporan		
1.03.28.14	Pembangunan Pengaman Pantai MAF Kabupaten Nabire	Panjang talud pengaman pantai yang terbangun	800 M	10.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Laporan hasil talud pengaman pantai yang terbangun	1 Laporan		
1.03.28.17	Pengendalian Banjir Arso IV	Volume Pasangan Batu yang Terpasang	800 M3	2.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Laporan hasil Sungai Yang di Normalisasi	800 Laporan		
1.03.28.19	Perencanaan Pengendalian banjir	Jumlah Dokumen	13 Dokumen	10.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.28.21	Pembangunan Pengendali Banjir Sungai Uwe	Panjang Talud yang dibangun	1.500 Meter	30.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.28.22	Pembangunan Pengendali Banjir Sungai Bello	Panjang Talud yang dibangun	1.500 Meter	20.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.28.23	Pembangunan Pengendali Banjir Kali Entrop	Panjang Talud yang dibangun	500 Meter	2.500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.28.28	Normalisasi Banjir Arso X	Panjang Sungai Yang di Normalisasi	1.000 Meter	5.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.28.30	Pengendalian Banjir Arso 5 Kab. Keerom	Panjang Sungai Yang di Talud	800 Meter	5.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.28.31	Pengendalian Banjir Arso 7 Kab. Keerom	Panjang Sungai Yang di Talud	1.000 Meter	5.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
1.03.28 .32	Pengendalian Banjir Kalibobo Kab. Nabire	Panjang Sungai Yang di Talud	500 Meter	15.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.28 .33	Pengendalian Banjir dan Normalisasi Sungai di Provinsi Papua (Gel)	Panjang Sungai Yang di Talud dan Drainase	50.000 Meter	10.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.28 .34	Pembangunan Pengaman Pantai Paradoi	Panjang Pengaman Pantai	800 Meter	10.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.28 .35	Pembangunan Pegaman Pantai Mambui	Panjang Pengaman Pantai	700 Meter	10.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.28 .36	Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai Kab. Biak Numfor	Panjang Pengaman Pantai	1.000 Meter	20.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.28 .37	Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai Kab. Yapen	Panjang Pengaman Pantai	500 Meter	10.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.28 .39	Pembangunan Prasarana Pengendali Banjir Makanuay (Mendukung PON)	Volume Pasangan Batu yang Terpasang	600 M3	10.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.28 .40	Pembangunan Prasarana Pengendali Banjir Otonom Kota Jayapura (Mendukung PON)	Volume Pasangan Batu yang Terpasang	200 M3	3.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.28 .64	Normalisasi Kali Holima	Panjang Sungai Yang di Normalisasi	200 Meter	10.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.28 .65	Normalisasi Kali Kulagaima	Panjang Sungai Yang di Normalisasi	200 Meter	10.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.28 .66	Pembangunan Pengaman Pantai Waren 1	Panjang talud pengaman pantai yang terbangun	200 M	10.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.28 .67	Pembangunan Pengaman Pantai Mambui	Panjang talud pengaman pantai yang terbangun	200 M	10.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
1.03.28 .68	Pembangunan Pengaman Pantai Paradoi	Panjang talud pengaman pantai yang terbangun	200 M	10.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.28 .69	Pembangunan Pengaman Pantai Nubuai	Panjang talud pengaman pantai yang terbangun	200 M	10.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.28 .70	Pembangunan Pengaman Pantai Pulau Nau	Panjang talud pengaman pantai yang terbangun	200 M	10.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.28 .74	Normalisasi Banjir Kali Tami	Volume bangunan air yang dibangun	10.400 M3	52.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.28 .77	Normalisasi Banjir Arso IV	Panjang Sungai Yang di Normalisasi	5.000 M3	25.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.28 .78	Normalisasi Sungai Kp Karoai	Panjang Sungai Yang di Normalisasi	300 M	5.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.28 .79	Normalisasi Sungai Kp Waita	Panjang Sungai Yang di Normalisasi	500 M1	7.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.28 .80	Normalisasi Sungai Kp Randawaya	Panjang Sungai Yang di Normalisasi	500 M1	7.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.28 .81	Normalisasi Kali Doyo Transat	Panjang Sungai Yang di Normalisasi	13.333 M3	2.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.28 .82	Pembangunan Pondasi Titik Depan Kantor Gubernur Papua	Panjang Pondasi titik yang terbangun	123.333 M3	18.500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.28 .83	Pembangunan Pengendali Banjir SP 3 Mimika	Panjang pengendali banjir yang terbangun	850 M3	8.500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.28 .84	Pembangunan Prasarana Pengendali Banjir di Kabupaten Mimika	Panjang prasarana pengendali banjir yang terbangun	850 M3	8.500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
1.03.28 .85	Pembangunan Talud Pengaman Kampwolker	Panjang talud yang terbangun	1.850 M3	18.500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.28 .86	Pembangunan Pengendali Banjir Kali Ular Doyo Baru	Panjang pengendali kali yang terbangun	850 M3	8.500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.28 .87	Pembangunan Talud Kali Biru Kotaraja dalam Belakang Kampus STIE OTTO GEISLER	Panjang talud kali yang terbangun	850 M3	8.500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.28 .88	Pembangunan Bronjong Pengaman Kali Weluk (Mamit - Dou)	Panjang bronjong kali yang terbangun	200 M3	5.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.28 .89	Pembangunan Bronjong Pengaman Kali Meaga (Mamit - Dou)	Panjang bronjong kali yang terbangun	200 M3	5.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.28 .90	Pembangunan Bronjong Pengaman Kali Wora (Mamit - Dou)	Panjang bronjong kali yang terbangun	200 M3	5.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.28 .91	Pembangunan Bronjong Pengaman Kali Jelogolo (Mamit - Dou)	Panjang bronjong kali yang terbangun	200 M3	5.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.28 .92	Pembangunan Bronjong Pengaman Kali Pagongga (Mamit - Dou)	Panjang bronjong kali yang terbangun	200 M3	5.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.28 .93	Pembangunan Bronjong Pengaman Kali Kalarin (Mamit - Dou)	Panjang bronjong kali yang terbangun	200 M3	5.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.28 .94	Pembangunan Bronjong Pengaman Kali Umagi (Mamit - Dou)	Panjang bronjong kali yang terbangun	200 M3	5.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.28 .95	Pembangunan Bronjong Pengaman Kali Koge (Mamit - Dou)	Panjang bronjong kali yang terbangun	200 M3	5.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.28 .96	Pembangunan Bronjong Pengaman Kali Ame (Mamit - Dou)	Panjang bronjong kali yang terbangun	200 M3	5.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
1.03.28.97	Pembangunan Talud Penahan Ombak Pantai Wisata Holtekam	Panjang talud Pantai yang terbangun	400 M3	10.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.28.98	Pembangunan Pengaman Pantai Kp Ampimoi	Panjang Pengaman Pantai yang terbangun	200 M3	5.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.28.99	Pembangunan Pengaman Pantai Kp Karoai	Panjang Pengaman Pantai yang terbangun	200 M3	5.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.28.100	Pembangunan Pengaman Pantai di Kabupaten Supiori	Panjang Pengaman Pantai yang terbangun	200 M3	5.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.28.101	Pembangunan Pengendali Banjir WS Wapoga-Mimika	Terbangunnya Pengendali banjir	200 M3	5.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.28.102	Pembangunan Pengaman Pantai Kp Waita	Terbangunnya Pengaman pantai	300 M1	6.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.28.103	Pemasangan Bronjong Kali Pagage Desa Ginidonak	Terpasangnya bronjong kali	300 M3	3.600.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.28.104	Pembangunan Pengendalian Banjir Kali Kabur Koya	Terbangunnya Pengendali banjir	200 M3	5.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.28.105	Pembangunan Pengendalian Banjir Kali Kabur Skamto	Terbangunnya Pengendalian Banjir	200 M3	5.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.28.106	Pembangunan Prasarana Banjir Kampung Asei Kecil	Terbangunnya Prasaranan banjir	200 M3	5.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.28.107	OP Sungai WS Kewenangan Provinsi Papua	Panjang talud pengaman sungai yang terbangun	200 M2	1.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.29	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Cakupan wilayah strategis dan cepat tumbuh yang dikembangkan	40 %	1.353.433.961.000,00	

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
1.03.29.04	Pengelolaan Situs Web dan Penyebarluasan informasi Publik	Jumlah laporan Sistem Informasi Berbasis Web Base Yang Saling Terintegrasi	1 Laporan	1.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.29.25	Penataan Kawasan Wisata Pantai Base-G Kota Jayapura.	Luas Kawasan Permukiman yang Terbangun	5.000 M2	5.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.29.26	Pemeliharaan Sarana Prasarana Lapangan Olahraga Mandala	Pemeliharaan Stadion Mandala Jayapura	2.500 M2	1.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.29.27	Penataan Kawasan Patung Tuhan Yesus	Luas area Penataan Kawasan Patung Yesus	1.010.000 M2	5.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.29.29	Pembangunan Patung Tuhan Yesus	Jumlah Patung yang terbangun	1 Unit	100.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.29.30	Pembangunan Kawasan Sekolah Alkitab Mamit	Kawasan Sekolah Alkitab yang terbangun	5.000 M2	10.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.29.35	Penataan Kampung Nelayan Mandala	Luas Kawasan Kampung Nelayan yang Terbangun	200 M2	3.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.29.36	Informasi Pembangunan Bidang ke-PU-an Melalui Media Cetak dan Elektronik	Tersieranya Informasi Pembangunan Infrastruktur ke-PU-an	2 Media	1.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.29.37	Penataan Kawasan Wisata di Kabupaten Jayapura	Luas Kawasan yang di tata	5 Ha	10.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.29.40	Penataan Kawasan Wisata di Kabupaten Jayawijaya	Luasan Kawasan Wisata yang di tata	10 Ha	10.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.29.41	Penataan Kawasan Wisata di Kabupaten Biak Numfor	Luas Kawasan yang ditata	10 Ha	10.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.29.56	Perencanaan Teknis Bidang KePUan	Jumlah Dokumen Perencanaan yang diselesaikan	0 Dokumen	0,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
1.03.29 .62	Penataan Kawasan Pantai Segara Indah di Biak	Luas Kawasan yang tertata	1.000 M2	15.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.29 .63	Penataan Kawasan Pantai Samares di Biak	Luas Kawasan yang tertata	1.000 M2	15.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.29 .64	Penataan Kawasan Pantai Anggopi di Biak	Luas Kawasan yang tertata	1.000 M2	18.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.29 .65	Penataan Kawasan/Sekitar Venue PON di Kota Jayapura	Luas Kawasan yang tertata	1.000 M2	14.100.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.29 .66	Penataan Kawasan/Sekitar Venue PON di Kabupaten Jayapura	Luas Kawasan yang tertata	1.000 M2	5.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.29 .77	Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Penataan Kawasan Lingkungan Fasilitas Umum di Provinsi Papua	Jumlah Dokumen	3 Dokumen	3.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.29 .78	Penataan Kawasan Fasilitas Umum di Provinsi Papua	Luas Kawasan yang tertata	40.000 M2	50.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.29 .83	Penataan Kawasan Gereja GIDI Walikota Jayapura	Luas Kawasan yang tertata	1.000 M2	17.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.29 .84	Penataan Kawasan Gereja Baptis Kehiran Sentani	Luas Kawasan yang tertata	100 M2	3.500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.29 .85	Penataan Kawasan Gereja Baptis Skyline	Luas Kawasan yang tertata	100 M2	3.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.29 .97	Penataan Kawasan Wisata di Kabupaten Jayawijaya	Kawasan yang tertata	100 M2	5.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.29 .103	Penataan Jalan Lingkungan Kampung Asei Kecil	jalan yang tertata	350 M2	2.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
1.03.29 .104	Penataan Kawasan Lingkungan Sekolah Aliktab Mamit	tertatanya kawasan lingkungan	1.000 M2	4.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.29 .105	Penataan Jalan Lingkungan Konunu Kuragapura	jalan yang tertata	1.500 M2	4.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.29 .106	Penataan Jalan Lingkungan kp Megapura	jalan yang tertata	1.500 M2	4.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.29 .107	Penataan Jalan Lingkungan Permukiman Hamadi Gunung - Tasangka	tertatanya kawasan permukiman	1.500 M2	4.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.29 .108	Penataan Jalan Lingkungan kali Ular Doyo	Jalan yang tertata	2.500 M2	8.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.29 .109	Penataan Kawasan Lingkungan GEREJA GIDI EO-Adiokia	tertatanya kawasan lingkungan	2.500 M2	8.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.29 .110	Penataan Kawasan Lingkungan Permukiman Distrik Umagi	tertatanya kawasan permukiman	1.500 M2	8.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.29 .111	Penataan Kawasan Lingkungan PAUD Yobawi	tertatanya kawasan lingkungan	1.500 M2	4.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.29 .112	Penataan Kawasan Lingkungan Permukiman Belakang Asrama Haji - Enggilek	tertatanya kawasan permukiman	2.500 M2	8.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.29 .113	Penataan Kawasan Lingkungan Permukiman Dok VIII RT 07	tertatanya kawasan permukiman	1.500 M2	4.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.29 .114	Penataan Kawasan Lingkungan Wisata Kp Karoai	tertatanya lingkungan wisata	1.500 M2	4.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.29 .115	Penataan Peningkatan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kota Jayapura	tertatanya kawasan permukiman	500 M2	1.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
1.03.29 .116	Penataan Peningkatan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kabupaten Nabire	tertatanya kawasan permukiman	500 M2	1.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.29 .117	Penataan Peningkatan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kabupten Jayapura	tertatanya kawasan permukiman	500 M2	4.400.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.29 .118	Penataan Peningkatan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kabupaten Biak	tertatanya kawasan sarana prasarana	500 M2	1.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.29 .119	Penataan Kawasan Sarana Prasarana di Kabupaten Mimika	tertatanya kawasan sarana prasarana	1.000 M2	14.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.29 .120	Penataan Lahan Parkir Rumah Susun di Belakang STT I.S Kinjte	tertatanya Lahan Parkir rumah susun	500 M2	2.900.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.29 .121	Penataan Lapangan Parkir Mimika Sport Centre dan Rumah Susun Mimika	tertatanya lapangan parkir dan rumah susun	1.000 M2	3.850.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.29 .122	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Stadion Katalpal Merauke	Jumlah pemasangan lampu stadion	1 Unit	11.700.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.29 .123	Penataan Kawasan Sarana Prasarana di Kabupaten Jayawijaya	tertatanya kawasan permukiman	1.000 M2	13.600.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.29 .124	Penataan Sarana dan Prasarana Kawasan Permukiman di Kabupaten Jayapura	luas kawasan permukiman yang tertata	500 M2	4.900.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.29 .125	Penyediaan Wastafel Portabel Tanggap Darurat Covid 19 di Kota/Kab. Jayapura	Jumlah Wastafel Portabel yang disiapkan	200 Unit	5.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.29 .126	Penyediaan Wastafel Portabel Tanggap Darurat Covid 19 di Kab. Jayawijaya	Jumlah Wastafel Portabel yang disiapkan	200 Unit	10.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.29 .127	Pembangunan Pagar SD Inpres Pasir II	Panjang Pagar yang terbangun	300 M	1.500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
1.03.29 .128	Pembangunan Tugu Salib Gereja GIDI EDEN Entrop	Jumlah Tugu Salib yang dibangun	1 Unit	1.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.29 .129	Penataan Kawasan Bukit Teletabis Venue PON XX	Penataan Kawasan bukit teletabis yang terbangun	500 M2	4.700.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.29 .130	Penataan Kawasan Permukiman di Koya Tengah	Penataan Kawasan permukiman yang terbangun	1 Kawasan	5.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.29 .131	Pembangunan Sarana Venue Terbang Layang Lanud Timika di Kaupaten Mimika	Terbangunnya sarana terbang layang	1.000 M3	28.783.961.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.29 .132	Pembangunan Gedung Kantor Gubernur Papua	Luas bangunan gedung yang terbangun	11.157.700 M2	400.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.29 .133	Pembangunan Gedung Kantor Satpol PP Provinsi Papua	Luas bangunan gedung yang terbangun	1.875 M2	15.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.29 .134	Pembangunan Gedung Kantor Dinas PUPR Provinsi Papua	Luas bangunan gedung yang terbangun	30.000 M2	100.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.29 .135	Pembangunan Gedung KNPI Provinsi Papua	Luas bangunan gedung yang terbangun	1.875 M2	60.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.29 .136	Pembangunan Gedung MRP Provinsi Papua	Luas bangunan gedung yang terbangun	1.000 M2	80.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.29 .137	Pembangunan Gedung BAWASLU Provinsi Papua	Luas bangunan gedung yang terbangun	500 M2	60.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.29 .138	Pembangunan Gedung KPU Provinsi Papua	Luas bangunan gedung yang terbangun	200 M2	60.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.29 .139	Pembangunan Gedung Biro Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	Luas bangunan gedung yang terbangun	1.000 M2	30.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
1.03.29 .140	Pembangunan Rumah Jabatan Eselon II	Luas bangunan gedung yang terbangun	20.000 M2	60.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.29 .141	Pembangunan Pos BMKG	Luas bangunan gedung yang terbangun	150 M3	4.500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.29 .142	Penanaman Rumput Stadion Lapangan Stadion Katalpal Merauke	Jumlah Luasan rumput stadion katapal yang terpasang	500 M2	3.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.30	Program pembangunan infrastruktur pedesaan	Cakupan pengembangan infrastruktur pedesaan	0 %	20.000.000.000,00	
1.03.30 .566	Penataan Sarana dan Prasarana Kawasan Permukiman di Kota Jayapura	Luas Kawasan Permukiman yang Terbangun	1.000 M2	1.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.30 .567	Penataan Sarana dan Prasarana Kawasan Permukiman di Kabupaten Jayapura	Luas Kawasan Permukiman yang Terbangun	1.000 M2	1.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.30 .569	Penataan Sarana dan Prasarana Kawasan Permukiman di Kabupaten Keerom	Luas Kawasan Permukiman yang Terbangun	1.000 M2	1.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.30 .570	Penataan Sarana dan Prasarana Kawasan Permukiman di Kabupaten Mamberamo Raya	Luas Kawasan Permukiman yang Terbangun	1.000 M2	1.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.30 .580	Penataan Sarana dan Prasarana Kawasan Permukiman di Kabupaten Jayawijaya	Luas Kawasan Permukiman yang Terbangun	1.000 M2	1.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.30 .581	Penataan Sarana dan Prasarana Kawasan Permukiman di Kabupaten Tolikara	Luas Kawasan Permukiman yang Terbangun	1.000 M2	1.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.30 .582	Penataan Sarana dan Prasarana Kawasan Permukiman di Kabupaten Lanny Jaya	Luas Kawasan Permukiman yang Terbangun	1.000 M2	1.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.30 .583	Penataan Sarana dan Prasarana Kawasan Permukiman di Kabupaten Yalimo	Luas Kawasan Permukiman yang Terbangun	1.000 M2	1.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
1.03.30.584	Penataan Sarana dan Prasarana Kawasan Permukiman di Kabupaten Mamberamo Tengah	Luas Kawasan Permukiman yang Terbangun	1.000 M2	1.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.30.585	Penataan Sarana dan Prasarana Kawasan Permukiman di Kabupaten Nduga	Luas Kawasan Permukiman yang Terbangun	1.000 M2	1.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.30.586	Penataan Sarana dan Prasarana Kawasan Permukiman di Kabupaten Puncak	Luas Kawasan Permukiman yang Terbangun	1.000 M2	1.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.30.587	Penataan Sarana dan Prasarana Kawasan Permukiman di Kabupaten Puncak Jaya	Luas Kawasan Permukiman yang Terbangun	1.000 M2	1.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.30.588	Penataan Sarana dan Prasarana Kawasan Permukiman di Kabupaten Yahukimo	Luas Kawasan Permukiman yang Terbangun	1.000 M2	1.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.30.589	Penataan Sarana dan Prasarana Kawasan Permukiman di Kabupaten Mimika	Luas Kawasan Permukiman yang Terbangun	1.000 M2	1.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.30.590	Penataan Sarana dan Prasarana Kawasan Permukiman di Kabupaten Asmat	Luas Kawasan Permukiman yang Terbangun	1.000 M2	1.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.30.591	Penataan Sarana dan Prasarana Kawasan Permukiman di Kabupaten Boven Digoel	Luas Kawasan Permukiman yang Terbangun	1.000 M2	1.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.30.592	Penataan Sarana dan Prasarana Kawasan Permukiman di Kabupaten Mappi	Luas Kawasan Permukiman yang Terbangun	1.000 M2	1.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.30.593	Penataan Sarana dan Prasarana Kawasan Permukiman di Kabupaten Peg. Bintang	Luas Kawasan Permukiman yang Terbangun	1.000 M2	1.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.30.594	Penataan Sarana dan Prasarana Kawasan Permukiman di Kabupaten Merauke	Luas Kawasan Permukiman yang Terbangun	1.000 M2	1.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.30.595	Perencanaan Teknis Penataan Sarana dan Prasarana Kawasan di Provinsi Papua	Jumlah Dokumen Yang dibuat	29 Dokumen	1.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
1.03.30.607	Pematangan Tanah Pembangunan Graha Politik Provinsi Papua	Terbayarnya sisa pengadaan tanah	0 Ha	0,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.31	Peningkatan Jalan dan Jembatan	Panjang jalan dalam kondisi mantap	20 km	3.318.600.029.400,00	
		Panjang jembatan dalam kondisi mantap	30 meq		
1.03.31.218	Peningkatan Jalan Kemiri - Depapre (111)	Jumlah Panjang Jalan yang ditingkatkan	5 KM2	50.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.31.219	Peningkatan Jalan Waren - Botawa - Sumiangga (126)	Panjang jalan yang ditingkatkan	0 KM2	30.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.31.220	Peningkatan Jalan Kuprik - Jagebob - Erambu (183)	Panjang jalan yang ditingkatkan	13 KM2	50.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.31.226	Peningkatan Jalan Bolakme - Kelila - Bokondini (167) (DAK)	Panjang jalan yang ditingkatkan	3 Km	10.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.31.234	Peningkatan Jalan Berap - Nimbotong - Lereh - Tengon (110)	Panjang jalan yang ditingkatkan	5 KM2	50.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.31.237	Peningkatan Jalan Arso XIV - Sawia - kwarja (114)	Panjang jalan yang ditingkatkan	13 KM2	52.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.31.238	Peningkatan Jalan Jayapura - Angkasa - Base"G - Dok II (101)	Jumlah Panjang Jalan yang ditingkatkan	5 Km	15.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.31.242	Peningkatan Jalan Junction - Wardo (130)	Jumlah Panjang Jalan yang ditingkatkan	5 KM2	30.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.31.244	Peningkatan Jalan Korem - Doubo (133)	Jumlah Panjang Jalan yang ditingkatkan	3 KM2	15.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.31.246	Peningkatan Jalan Kontinuai - Ambaidiru	Jumlah Panjang Jalan yang ditingkatkan	5 KM2	5.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
1.03.31 .248	Peningkatan Jalan Wardo - Duber (134) 37,96 Km	Jumlah Panjang Jalan yang ditingkatkan	4 KM2	15.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.31 .254	Peningkatan Jalan BTS Kota Merauke - Kumbe - Bian - Okaba (185), 88,05 Km	Jumlah Panjang Jalan yang ditingkatkan	9 KM2	35.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.31 .260	Peningkatan Jalan Dalam Kota Dekai	Jumlah Panjang Jalan yang ditingkatkan	5 KM2	25.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.31 .262	Peningkatan Jalan Mapurujaya - Tipuka - Ayuka	Jumlah Panjang Jalan yang ditingkatkan	5 KM2	5.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.31 .271	Peningkatan Jalan Illu (Puncak Jaya) - Tiom, (Lanny Jaya), (163)	Jumlah Panjang Jalan yang ditingkatkan	10 KM2	50.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.31 .283	Peningkatan Jalan Tiom, (Lanny Jaya) - Illu (Puncak Jaya), (163)	Jumlah Panjang Jalan yang ditingkatkan	16 KM2	81.500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.31 .288	Peningkatan Jalan Karadiri (Bandara Baru Nabire) - Topo (35 Km)	Jumlah Panjang Jalan yang ditingkatkan	5 KM2	5.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.31 .291	Peningkatan Jalan Dalam Kota Oksibil	Jumlah Panjang Jalan yang ditingkatkan	5 KM2	25.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.31 .292	Peningkatan Jalan Koya Tengah	Jumlah Panjang Jalan yang ditingkatkan	1 KM2	5.500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.31 .297	Peningkatan Jalan Legare - Samabusa	Jumlah Panjang Jalan yang ditingkatkan	13 KM2	52.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.31 .323	Peningkatan Jalan Entrop - Kantor Walikota - Skyline -Perumnas III	Jumlah Panjang Jalan yang ditingkatkan	5 KM2	5.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.31 .331	Peningkatan Jalan Sisingamangaraja 2 Jalur	Jumlah Panjang Jalan yang ditingkatkan	0 Km	10.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
1.03.31 .332	Peningkatan Jalan Wardo - Sorendiwari	Panjang jalan yang ditingkatkan	5 Km	25.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.31 .334	Peningkatan Jalan Sewan - Petam	Jumlah Panjang Jalan yang ditingkatkan	5 KM2	5.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.31 .335	Peningkatan Jalan Munukania - Aurimi	Jumlah Panjang Jalan yang ditingkatkan	6 KM2	15.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.31 .339	Peningkatan Jalan Karubaga - Panaga	Jumlah Panjang Jalan yang ditingkatkan	714 KM2	50.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.31 .340	Peningkatan Jalan Dalam Kota Tanah Merah	Jumlah Panjang Jalan yang ditingkatkan	5 KM2	5.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.31 .341	Peningkatan Jalan Muliana - Wame - Makki	Jumlah Panjang Jalan yang ditingkatkan	6 KM2	28.500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.31 .342	Peningkatan Jalan Karubaga - Wunim - Bokondini (154)	Jumlah Panjang Jalan yang ditingkatkan	16 KM2	81.500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.31 .343	Peningkatan Jalan Kimbin - Wogi - Wosi	Jumlah Panjang Jalan yang ditingkatkan	5 KM2	5.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.31 .344	Peningkatan Jalan Gamelia - Bolakme	Panjang jalan yang ditingkatkan	3 Km	15.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.31 .347	Peningkatan Jalan Kuansu (Namlong)- Besum-Genyem. (107) 11,76 Km	Panjang jalan yang ditingkatkan	4 KM2	20.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.31 .349	Peningkatan Jalan Besum - Yanbra - Pua (108)	Jumlah Panjang Jalan yang ditingkatkan	6 KM2	30.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.31 .350	Peningkatan Jalan Lereh - Tendon	Jumlah Panjang Jalan yang ditingkatkan	13 Km	30.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
1.03.31 .352	Peningkatan Jalan Karubaga - Mamit	Jumlah Panjang Jalan yang ditingkatkan	2 KM2	15.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.31 .353	Peningkatan Jalan Manda - Wolo - Kobakma (169) (30 Km)	Jumlah Panjang Jalan yang ditingkatkan	5 KM2	25.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.31 .354	Peningkatan Jalan Duntek (Dogiyai)-Munayepa/ Iyei (Paniai) (141)	Jumlah Panjang Jalan yang ditingkatkan	5 KM2	25.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.31 .355	Peningkatan Jalan Duber - Sorendiwari - Korido (136)	Jumlah Panjang Jalan yang ditingkatkan	5 KM2	25.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.31 .356	Pelebaran Jalan Masuk Kuburan Angkasapura	Jumlah Panjang Jalan yang ditingkatkan	5 KM2	10.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.31 .357	Peningkatan Jalan Lepro - Onggaya (10) KM	Jumlah Panjang Jalan yang ditingkatkan	5 KM2	5.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.31 .358	Peningkatan Jalan Pasir Enam Tanjung Ria	Jumlah Panjang Jalan yang ditingkatkan	5 KM2	5.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.31 .363	Peningkatan Jalan Gamelia - Bolakme	Panjang Jalan yang ditingkatkan	5 Km	5.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.31 .366	Peningkatan Jalan Puay-Skori-Sabeab	Panjang jalan yang ditingkatkan	5 Km	5.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.31 .367	Peningkatan Jalan Kanggime - Bogunuk	Panjang jalan yang ditingkatkan	5 Km	30.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.31 .371	Peningkatan Jalan Bolakme - Kelila - Bokondini (167) (61,5 Km)	Panjang jalan yang ditingkatkan	83 Km	20.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.31 .372	Peningkatan Jalan Sumberbaba - Dawai (060) 24,00 Km	Panjang jalan yang ditingkatkan	8 Km	25.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
1.03.31 .373	Peningkatan Jalan SP II - Napan	Panjang jalan yang ditingkatkan	5 Km	25.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.31 .376	Peningkatan Jalan Lingkar Pugima	Panjang jalan yang ditingkatkan	3 Km	15.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.31 .377	Peningkatan Jalan Wamena - Sekan - Apalapsili	Panjang jalan yang ditingkatkan	5 Km	25.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.31 .379	Peningkatan Jalan Mator - Vuria - Skayleni Kotaraja	Panjang jalan yang ditingkatkan	5 Km	5.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.31 .380	Peningkatan Jalan Walelagama - Siepkosi	Panjang jalan yang ditingkatkan	5 Km	25.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.31 .384	Peningkatan Jalan Waena - Arso V (100.K) 53 Km	Panjang jalan yang ditingkatkan	13 Km	52.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.31 .385	Peningkatan Jalan Taja - SP V - Kwarja	Panjang jalan yang ditingkatkan	14 Km	50.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.31 .396	Peningkatan Jalan Arimbet - Bukit - Ujung - Manggelum (164) 43.00Km	Panjang Jalan yang ditingkatkan	18 Km	90.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.31 .397	Peningkatan Alternatif Entrop - Waena (Perumnas 3)	Panjang Jalan yang ditingkatkan	5 Km	5.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.31 .399	Peningkatan Jalan Doubo - Sorendiwari - Amyas (133) 45.27 Km	Jumlah Panjang Jalan yang ditingkatkan	6 Km	25.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.31 .400	Peningkatan Jalan Aikima - Siepkosi	Jumlah Panjang Jalan yang ditingkatkan	3 Km	15.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.31 .405	Peningkatan Jalan Samabusa - Nabarua Bawah	Jumlah Panjang Jalan yang ditingkatkan	5 Km	5.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
1.03.31 .410	Peningkatan Jalan Kanggime - Mamit	Jumlah Panjang Jalan yang ditingkatkan	5 Km	30.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.31 .413	Peningkatan Jalan Koya - Venue PON XX	Jumlah Panjang Jalan yang ditingkatkan	5 Km	5.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.31 .414	Peningkatan Jalan Moso - Skofro	Panjang Jalan yang telah ditingkatkan	5 Km	5.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.31 .416	Peningkatan Jalan Pembangunan (PON XX)	Panjang Jalan yang ditingkatkan	5 Km	5.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.31 .427	Peningkatan Jalan Wamena - Temia - Wogi	Jumlah Panjang Jalan yang ditingkatkan	3 Km	15.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.31 .429	Peningkatan Jalan dan Jembatan di Prov. Papua	Panjang Jalan yang ditingkatkan	15 Km	50.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.31 .447	Peningkatan Jalan Kenyam - Bandara Baru	Panjang Jalan yang dibangun	4 Km	20.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.31 .465	Peningkatan Jalan Tiom-Iringambut - Indawa	Jumlah Panjang Jalan yang ditingkatkan	10 Km	52.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.31 .466	Peningkatan Jalan Nabire - Waroki - Karadiri (Bandara Baru)	Jumlah Panjang Jalan yang ditingkatkan	3 Km	15.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.31 .467	Peningkatan Jalan Elelim - Kobakma	Jumlah Panjang Jalan yang ditingkatkan	10 Km	52.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.31 .468	Peningkatan Jalan Mur - Keppi	Jumlah Panjang Jalan yang ditingkatkan	8 Km	30.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.31 .469	Peningkatan Jalan Jalan Arso PIR II	Jumlah Panjang Jalan yang ditingkatkan	15 Km	3.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
1.03.31 .470	Peningkatan Jalan Muai - Musatfak - Silo - Soekarno Doga	Jumlah Panjang Jalan yang ditingkatkan	4 Km	20.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.31 .472	Peningkatan Jalan Melagaineri - Kuyawage	Jumlah Panjang Jalan yang ditingkatkan	4 Km	20.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.31 .473	Peningkatan Jalan Melagaineri - Wabiragi	Jumlah Panjang Jalan yang ditingkatkan	3 Km	15.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.31 .474	Peningkatan Jalan Illu - Yamoneri - Melagaineri	Jumlah Panjang Jalan yang ditingkatkan	5 Km	5.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.31 .476	Peningkatan Jalan Kaugapu - SP V	Jumlah Panjang Jalan yang ditingkatkan	5 Km	25.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.31 .477	Peningkatan Jalan Kurima - Tangma - Uka	Jumlah Panjang Jalan yang ditingkatkan	3 Km	15.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.31 .478	Peningkatan Jalan Tiom - Gimbuk	Jumlah Panjang Jalan yang ditingkatkan	3 Km	18.500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.31 .486	Peningkatan Jalan Kawasan Softball/Base Ball Uncen/Rektorat	Panjang jalan yang ditingkatkan	0 Km	1.629.400.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.31 .488	Peningkatan Jalan Tiom - Balingga	Panjang jalan yang ditingkatkan	625 Km	25.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.31 .489	Peningkatan Jalan Kuburan Buper	Panjang jalan yang ditingkatkan	3 Km	10.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.31 .490	Peningkatan Jalan Gereja GKI Getsemani Bhayangkara III	Panjang jalan yang ditingkatkan	1 Km	3.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.31 .491	Peningkatan Jalan Tiom - Malagaineri - Wabiragi	Panjang jalan yang ditingkatkan	9 Km	52.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
1.03.31 .492	Peningkatan Jalan Goa Maria Buper - Kamwolker Waena	Panjang jalan yang ditingkatkan	0 Km	0,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.31 .493	Peningkatan Jalan Dalam Kota Karubaga	Panjang jalan yang ditingkatkan	5 Km	25.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.31 .494	Peningkatan Jalan Kota Illu	Panjang jalan yang ditingkatkan	5 Km	25.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.31 .495	Peningkatan Jalan Mulia - Yamo	Panjang jalan yang ditingkatkan	5 Km	25.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.31 .496	Peningkatan Jalan Kota Wamena	Panjang jalan yang ditingkatkan	5 Km	25.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.31 .497	Peningkatan Jalan Gunung Susu Sawarek - Okili	Panjang jalan yang ditingkatkan	5 Km	25.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.31 .498	Peningkatan Jalan SP V - SP II	Panjang jalan yang ditingkatkan	13 Km	52.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.31 .499	Peningkatan Jalan Dalam Kota Ilaga	Panjang jalan yang ditingkatkan	5 Km	25.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.31 .500	Peningkatan dan Pelebaran Jalan Yagara - Walesi	Panjang jalan yang ditingkatkan dan pelebaran	37 Km	18.500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.31 .501	Peningkatan dan Pelebaran Jalan Wamena - Siepkosi - Sekan	Panjang jalan yang ditingkatkan dan pelebaran	37 Km	18.500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.31 .502	Peningkatan dan Pelebaran Jalan Ibele - Taelarek	Panjang jalan yang ditingkatkan dan dilebarkan	20 Km	120.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.31 .503	Peningkatan dan Pelebaran Jalan Pelebaga - Landia	Panjang jalan yang ditingkatkan dan dilebarkan	7 Km	42.600.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
1.03.31 .504	Peningkatan Jalan Hom-Hom - Muai - Anagera	Panjang jalan yang ditingkatkan	15 Km	89.400.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.31 .505	Peningkatan Jalan Masuk Gereja Bapris Independen Homo-Hom Wamena	Panjang jalan yang ditingkatkan	2 Km	9.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.31 .506	Peningkatan dan Pelebaran Jalan Bolakme - Melagalome - Gamelia	Panjang jalan yang ditingkatkan dan dilebarkan	10 Km	60.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.31 .507	Peningkatan Jalan Biuk - Yogobak	Panjang jalan yang ditingkatkan	4 Km	20.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.31 .508	Pembangunan Jalan Yogobak - Alkunik	Panjang jalan yang ditingkatkan	15 Km	90.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.31 .509	Peningkatan Jalan Alkunik - Mamit - Umagi	Panjang jalan yang ditingkatkan	18 Km	90.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.31 .510	Pembangunan Jalan Umagi - Douw (Air Terjun)	Panjang jalan yang ditingkatkan	15 Km	90.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.31 .511	Peningkatan Jalan Kanggime - Bogonuk	Panjang jalan yang ditingkatkan	14 Km	70.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.31 .512	Peningkatan Jalan Dalam Kota Mamit	Panjang jalan yang ditingkatkan	37 Km	18.500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.31 .513	Peningkatan Jalan Berap - Demta	Panjang jalan yang ditingkatkan	625 Km	25.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.31 .514	Peningkatan Jalan Buper - Telaga Ria	Panjang jalan yang ditingkatkan	713 Km	28.500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.31 .515	Peningkatan Jalan Nendali - Bandara - Komba	Panjang jalan yang ditingkatkan	1.213 Km	48.500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
1.03.31.516	Peningkatan Jalan Masuk LANUD Timika	Panjang jalan yang ditingkatkan	263 Km	10.500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.31.517	Peningkatan Jalan Makodam XVII / Cenderawasih	Panjang jalan yang ditingkatkan	588 Km	23.500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.31.518	Peningkatan Jalan Masuk Venue Menembak AURI Kabupaten Jayapura	Panjang jalan yang ditingkatkan	288 Km	11.500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.31.519	Peningkatan Jalan Lingkungan SP3 Mimika	Panjang jalan yang ditingkatkan	463 Km	18.500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.31.520	Peningkatan Jalan Yokiwa	Panjang jalan yang ditingkatkan	5 Km	21.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.31.521	Peningkatan Jalan Mamit - Umagi	Panjang jalan yang ditingkatkan	4 Km	25.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.31.522	Peningkatan Jalan Doyo Lama Belakang AURI	Panjang jalan yang ditingkatkan	3 Km	11.500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.31.523	Peningkatan Jalan Weri Bukit Karma Distrik Maribu	Panjang jalan yang ditingkatkan	2 Km	8.500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.31.524	Peningkatan Jalan Terey - Karoaiipi	Panjang jalan yang ditingkatkan	2 Km	12.500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.31.525	Peningkatan Jalan Yabaso II - Stadion Basyouwe	Panjang jalan yang ditingkatkan	75 Km	4.700.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.31.526	Peningkatan Jalan Masuk Rumah Susun di Belakang Polres Jayapura	Panjang jalan yang ditingkatkan	175 Km	7.014.300.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.31.527	Peningkatan Jalan Masuk Venue Volley Koya Koso Kota Jayapura	Panjang jalan yang ditingkatkan	1 Km	4.970.500.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
1.03.31.528	Peningkatan Jalan Arena Motor Cross Kab. Merauke	Panjang jalan yang ditingkatkan	1 Km	2.662.300.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.31.529	Peningkatan Jalan Lingkar Luar Stadion Katapal Merauke	Panjang jalan yang ditingkatkan	65 Km	2.925.825.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.31.530	Peningkatan Jalan Masuk Venue Cricket Doyo Baru	Panjang jalan yang ditingkatkan	55 Km	5.200.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.31.531	Peningkatan Jalan Masuk Rumah Susun STT OG (0,56 Km) di Kota Jayapura	Panjang jalan yang ditingkatkan	1 Km	2.297.704.400,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.31.532	Peningkatan Jalan BTS Kota/SMA 3 Buper Kota Jayapura	Panjang jalan yang ditingkatkan	1 Km	2.700.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.31.533	Peningkatan Jalan Lingkar Dalam Stadion Katapal Merauke	Panjang jalan yang ditingkatkan	7 Km	26.500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.31.534	Peningkatan Jalan Lingkar Sugapa	Panjang jalan yang ditingkatkan	6 Km	35.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.31.535	Peningkatan Jalan Yomdori - Wardo	Panjang jalan yang ditingkatkan	11 Km	45.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.31.536	Peningkatan Jalan Trans Yapen - Mananayam	Panjang jalan yang ditingkatkan	2 Km	9.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.31.537	Peningkatan Jalan Doyo Lama Sentani	Panjang jalan yang ditingkatkan	3 Km	15.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.31.538	Pengecoran Jalan Warga Kampung Koya Koso	Panjang jalan yang ditingkatkan	2 Km	10.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.31.539	Peningkatan Jalan Kp. Singgir - Kp. Jengku	Panjang jalan yang ditingkatkan	9 Km	7.500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
1.03.3 2	Program Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan	Cakupan perencanaan teknis jalan dan jembatan	70 persen	62.000.000.000,00	
1.03.32 .61	Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan di Provinsi Papua	Dokumen hasil perencanaan jalan dan jembatan	130 Dokumen	50.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.32 .120	Penyusunan IRMS dan BMS Kebinamargaan	Jumlah dokumen IRMS dan BMS yang tersedia	10 Dokumen	0,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.32 .121	Koordinasi dan Perencanaan master.program Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen yang diselesaikan	1 Dokumen	10.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.32 .124	Pengembangan Sistem Informasi Multimedia	Tersedianya Sistem Informasi Publik Ke-PU-an	1 Sistem	1.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.32 .125	Pengelolaan Data Dasar Bidang Ke-PU-an	Tersedianya data dasar bidang ke-PU-an	1 Data	1.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.3 5	Program Pembinaan dan Pengembangan Konstruksi	Cakupan pembinaan dan pengembangan konstruksi	0 %	26.150.000.000,00	
1.03.35 .01	Monitoring dan Pengendalian Teknis bidang ke-PU-an	Jumlah Dokumen Monitoring dan Pengendalian Teknis Bidang Ke-PU-an	12 Dokumen	2.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.35 .02	Pembinaan usaha jasa konstruksi pengusaha asli Papua	Jumlah peserta pengusaha asli Papua	120 Orang Kegiatan	750.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.35 .06	Pelatihan dan Sosialisasi Penyusunan Analisa Harga Satuan (PAHS)	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pelatihan PAHS	80 Orang Kegiatan	500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.35 .07	Core Team Pengawasan Teknis Bidang Ke-PU-An	Jumlah dokumen Core Team Pengawasan Teknis Bidang Ke-Pu-An	12 Dokumen	1.700.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.35 .08	Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Jumlah Peserta Sertifikasi Barang dan Jasa	500 Orang Kegiatan	1.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.35 .09	Pengembangan dan pemanfaatan data KMN dan KMD	inventarisir data KMN/KMD	1 Laporan	150.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
1.03.35 .10	Pelatihan Ketrampilan Tenaga Kerja Konstruksi dengan Mobile Training Unit (MTU)	Jumlah Peserta yang Terlatih konstruksi	100 Orang Kegiatan	800.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.35 .11	Sertifikasi Ketrampilan Tenaga Kerja Konstruksi dengan Mobile Training Unit (MTU)	Jumlah Peserta Sertifikasi Barang dan Jasa	100 Orang Kegiatan	800.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Jumlah peserta sertifikasi tenaga kerja konstruksi	100 Orang Kegiatan		
1.03.35 .12	Penyusunan Basic dan Unit Price Bidang Ke-PU-an	Jumlah Dokumen Basic dan Unit Price Bidang Ke-PU-an Yang di selesaikan	1 Dokumen	1.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.35 .13	Kalibrasi Peralatan UPTD Balai Pengujian PU	Jumlah alat yang dikalibrasi	70 Unit	700.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.35 .14	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Jumlah dokumen penyelesaian tindak lanjut hasil temuan	1 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.35 .17	Bimtek Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)	Jumlah peserta bimbingan teknis SMK3	100 Orang Kegiatan	500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.35 .18	Pengelolaan dan Penatausahaan Akuntansi ke-PU-an	Jumlah dokumen penatausahaan akuntansi ke-PU-an	1 Dokumen	500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.35 .19	Pengembangan dan Pengelolaan Kegiatan Penunjang Kegiatan UPTD Pengujian dan Laboratorium	Jumlah Dokumen Kegiatan	1 Dokumen	500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.35 .20	Penelitian Material Infrastruktur Bidang Ke-PU-an	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian	1 Dokumen	700.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Jumlah Objek Material yang di teliti	1 Obyek		
1.03.35 .21	Pemeliharaan Peralatan Kegiatan UPTD Pengujian Dinas PU Provinsi Papua	Jumlah Unit Alat Yang dipelihara	20 Unit	500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.35 .22	Pengadaan Peralatan Penunjang Jalan dan Jembatan	Jumlah Unit Pelatalan yang diadakan	4 Unit	10.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.35 .23	Sosialisasi Pemanfaatan Laboratorium UPTD Bidang Ke-PU-an	Jumlah Orang	50 Orang	600.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
1.03.35 .24	Pengujian Kualitas Pekerjaan Konstruksi Bidang Ke-PU-an	Jumlah sampel objek yang diuji	1 Sampel	500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.35 .25	Survey dan Pemetaan Quarry di Provinsi Papua	Jumlah lokasi survey	15 Lokasi	1.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.35 .26	Pelatihan Teknisi UPTD Pengujian dan Laboratorium PU	Jumlah peserta yang dilatih	25 Orang	750.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.35 .27	Sosialisai Perundang-undangan Jasa Konstruksi	Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi	150 Orang	700.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.35 .28	Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi bagi OAP	Jumlah Tenaga Ahli OAP yang Mengikuti Sertifikasi	100 Orang	400.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.3 6	Program Pemanfaatan Ruang	Cakupan pelaksanaan pemanfaatan ruang	0 %	900.000.000,00	
1.03.36 .01	Sosialisasi Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur dan Manual Penataan Ruang	Jumlah Peserta Sosialisasi	80 Orang	400.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Jumlah materi sosialisasi	3 Materi		
1.03.36 .02	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemanfaatan Tata Ruang	Jumlah dokumen laporan monitoring dan evaluasi	1 Dokumen	500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.3 7	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Cakupan ijin pemanfaatan ruang yang sesuai dengan pola ruang	90 persen	1.000.000.000,00	
1.03.37 .01	Penyusunan Norma , Standart dan Kriteria Pemanfaatan Ruang	Jumlah Norma, Standart dan Kriteria Penataan Ruang	1 Dokumen	1.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman			845.347.256.470,00	
1.04.1 5	Program Pengembangan Perumahan	Rumah Layak huni yang terbangun	0 Unit	380.659.691.770,00	
		Cakupan penataan lingkungan permukiman kumuh	70 persen		
		Cakupan rumah layak huni yang terbangun	3.000 unit		
		Cakupan penduduk OAP yang memiliki rumah layak huni	35 %		
		Persentase penduduk relokasi akibat program pemerintah yang memperoleh rumah layak huni	100 %		

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
1.04.15.03	Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan	Jumlah personel yang melakukan koordinasi	6 Orang	150.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.04.15.04	Sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang perumahan	Jumlah kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan	2 Kegiatan	620.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Jumlah Kab/Kota yang disosialisasikan	29 Kabupaten		
1.04.15.07	Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat	Jumlah sarana dan prasarana rumah sederhana sehat yang dibangun	15 Unit	30.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.04.15.09	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Keerom	Jumlah rumah layak huni yang dibangun	5 Unit	0,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.04.15.10	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Mappi	Jumlah rumah layak huni yang dibangun	10 Unit	5.509.624.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.04.15.11	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Boven Digoel	Jumlah rumah layak huni yang dibangun	7 Unit	3.785.687.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.04.15.12	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Biak Numfor	Jumlah rumah layak huni yang dibangun	7 Unit	3.173.582.400,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.04.15.13	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Supiori	Jumlah rumah layak huni yang dibangun	5 Unit	2.231.972.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.04.15.14	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Kepulauan Yapen	Jumlah rumah layak huni yang dibangun	10 Unit	4.455.744.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.04.15.15	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Waropen	Jumlah rumah layak huni yang dibangun	5 Unit	2.252.712.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.04.15.16	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Nabire	Jumlah rumah layak huni yang dibangun	10 Unit	510.857.600,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.04.15.17	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Paniai	Jumlah rumah layak huni yang dibangun	10 Unit	6.150.384.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
1.04.15 .18	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Dogiai	Jumlah rumah layak huni yang dibangun	7 Unit	3.553.952.640,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.04.15 .19	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Intan Jaya	Jumlah rumah layak huni yang dibangun	9 Unit	6.712.761.600,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.04.15 .20	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Deiyai	Jumlah rumah layak huni yang dibangun	10 Unit	6.186.816.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.04.15 .21	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Jayawijaya	Jumlah rumah layak huni yang dibangun	20 Unit	15.110.611.200,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.04.15 .22	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Puncak Jaya	Jumlah rumah layak huni yang dibangun	15 Unit	11.201.636.852,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.04.15 .23	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Lanny Jaya	Jumlah rumah layak huni yang dibangun	7 Unit	5.216.487.404,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.04.15 .24	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Puncak	Jumlah rumah layak huni yang dibangun	17 Unit	17.099.524.800,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.04.15 .25	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Nduga	Jumlah rumah layak huni yang dibangun	10 Unit	6.680.304.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.04.15 .26	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Mamberamo Tengah	Jumlah rumah layak huni yang dibangun	30 Unit	18.567.765.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.04.15 .27	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Yalimo	Jumlah rumah layak huni yang dibangun	6 Unit	5.141.548.800,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.04.15 .28	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Yahukimo	Jumlah rumah layak huni yang dibangun	5 Unit	2.246.272.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.04.15 .29	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Mimika	Jumlah rumah layak huni yang dibangun	10 Unit	3.881.664.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
1.04.15 .30	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Asmat	Jumlah rumah layak huni yang dibangun	7 Unit	3.181.875.200,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.04.15 .31	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Mamberamo Raya	Jumlah rumah layak huni yang dibangun	19 Unit	12.009.815.700,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.04.15 .32	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Sarmi	Jumlah rumah layak huni yang dibangun	10 Unit	5.265.048.880,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.04.15 .33	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Merauke	Jumlah rumah layak huni yang dibangun	10 Unit	6.228.308.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.04.15 .34	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Pegunungan Bintang	Jumlah rumah layak huni yang dibangun	7 Unit	4.316.522.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.04.15 .35	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Jayapura	Jumlah rumah layak huni yang dibangun	12 Unit	5.052.934.400,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.04.15 .36	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Tolikara	Jumlah rumah layak huni yang dibangun	15 Unit	10.794.956.924,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.04.15 .37	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kota Jayapura	Jumlah rumah layak huni yang dibangun	15 Unit	7.995.323.370,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.04.15 .48	Pembangunan rumah ramah lingkungan dengan konstruksi baja ringan di 3 Kab/Kota (pilot project)	Jumlah rumah konstruksi baja ringan yang terbangun	2 Unit	1.100.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.04.15 .54	Pengadaan lahan kawasan perumahan ASN Provinsi Papua	Jumlah lahan yang diadakan	1 Lokasi	75.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Jumlah luasan yang disediakan	0 Hektar		
1.04.15 .59	Penataan Peningkatan Infrastruktur Kawasan Pemukiman di Kota Jayapura	Jumlah lokasi yang ditata	2 Lokasi	2.150.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.04.15 .60	Penataan Peningkatan Infrastruktur Kawasan Pemukiman di Kabupaten Nabire	Jumlah lokasi yang ditata	2 Lokasi	2.150.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
1.04.15 .61	Penataan Peningkatan Infrastruktur Kawasan Pemukiman di Kabupaten Jayapura	Jumlah lokasi yang ditata	2 Lokasi	2.050.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.04.15 .62	Penataan Peningkatan Infrastruktur Kawasan Pemukiman di Kabupaten Biak	Jumlah lokasi yang ditata	1 Lokasi	550.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.04.15 .63	Penataan Peningkatan Infrastruktur Kawasan Pemukiman di Kabupaten Keerom	Jumlah lokasi yang ditata	1 Lokasi	625.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.04.15 .68	Peningkatan Sarana Prasarana Permukiman Kampung Nelayan	Jumlah sarana prasarana yang ditingkatkan Luas area permukiman yang ditingkatkan sarana prasarananya	0 Jenis 6 Ha	6.500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.04.15 .69	Perencanaan Teknis Bidang KePUan			3.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.04.15 .70	Pematangan Tanah Pembangunan Graha Politik Provinsi Papua	Bertambahnya aset tanah pemerintah provinsi papua	20.000 M2	11.500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.04.15 .71	Pembangunan Rumah Relokasi Warga Kawasan Kampung Harapan	Jumlah rumah relokasi warga yang terbangun	23 Unit	8.250.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.04.15 .72	Pembangunan Rumah Masyarakat di Koya Tengah	Jumlah rumah layak huni yang dibangun	12 Unit	10.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.04.15 .73	Pembangunan Rumah Masyarakat di Kali Biru Kotaraja Dalam	Jumlah rumah layak huni yang dibangun	4 Unit	2.600.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.04.15 .74	Pembangunan Rumah Guru SMAN Olah Raga Buper	Jumlah rumah layak huni yang dibangun	4 Unit	5.200.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.04.15 .75	Pembangunan Rumah Pastori Gereja GIDI EDEN Entrop	Jumlah rumah layak huni yang dibangun	1 Unit	700.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.04.15 .76	Pembangunan Rumah Kampung Asei Kecil	Jumlah rumah layak huni yang dibangun	4 Unit	5.200.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
1.04.15.77	Pembangunan Rumah Masyarakat Numpang Geser	Jumlah rumah layak yang dibangun	3 Unit	2.100.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.04.15.78	Pembangunan Rumah Masyarakat Kilo 9	Jumlah rumah layak huni yang dibangun	3 Unit	2.100.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.04.15.79	Pembangunan Rumah Layak Huni	Jumlah rumah layak huni yang dibangun	10 Unit	10.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.04.15.80	Pembangunan Rumah Masyarakat	Jumlah rumah layak huni yang dibangun	5 Unit	2.600.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.04.15.81	Pembangunan Rumah Layak Huni Paba-Umagi-Karubaga dan Bewani	Jumlah rumah layak huni yang dibangun	12 Unit	12.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.04.1.6	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Prosentase penduduk yang terakses lingkungan sehat	0 %	15.186.589.700,00	
		Persentase lingkungan permukiman yang sehat	40 persen		
1.04.16.02	Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin	Jumlah lokasi yang terlayani	29 Lokasi	5.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.04.16.10	Penataan Kawasan Permukiman Kawasan Danau Sentani	Jumlah permukiman yang ditata	3 Unit	10.186.589.700,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.04.1.8	Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial	Penyelesaian perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial	0 %	41.200.000.000,00	
		Persentase penduduk korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	80 %		
1.04.18.04	Fasilitasi dan Stimulasi Rehabilitasi Rumah Akibat Bencana Alam/Sosial	Jumlah rumah yang difasilitasi dan mendapatkan stimulasi rehabilitasi	2 Unit	1.200.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.04.18.05	Pembebasan Lahan Relokasi Warga Dampak Bencana Alam Sentani di Koya	lahan yang dibebaskan	47 Ha	40.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.04.2.1	Program Pembangunan Bangunan Gedung Negara	Tersedianya fasilitas pendukung penyelenggaraan pemerintahan	0 %	408.300.975.000,00	

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
1.04.21 .11	Pembangunan Gedung Kantor Gubernur Papua			400.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.04.21 .12	Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor Gubernur Papua	tersedianya dokumen konstruksi	0 Dokumen	0,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.04.21 .14	Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor Satpol PP Provinsi Papua	tersedianya dokumen konstruksi	0 Dokumen	0,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.04.21 .16	Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor Dinas PUPR Provinsi Papua	tersedianya dokumen konstruksi	0 Dokumen	0,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.04.21 .23	Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Jabatan Eselon II	tersedianya dokumen konstruksi	0 Dokumen	0,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.04.21 .24	Pembangunan Pos BMKG			0,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.04.21 .25	Pembayaran Sisa Pengadaan Tanah Graha Politik (Gedung KPU dan Gedung Bawaslu)			8.300.975.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.05	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat			104.639.145.000,00	
1.05.0 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	0 persen	39.147.645.000,00	
1.05.01 .01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang disediakan	1.000 Surat	15.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1.05.01 .01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang disediakan	2.500 Surat	10.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.01 .02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Jasa Layanan berlangganan Listrik,Air,Telepon, Transponder	12 Layanan	12.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1.05.01 .02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Jasa Layanan berlangganan Listrik,Air,Telepon, Transponder	12 Layanan	421.100.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.01 .03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	30 Unit	120.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1.05.01 .06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Unit Mobil DInas/Operasional yang terpelihara dan Terfasilitasi Perijinannya	20 Unit	15.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
1.05.01 .06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Unit Mobil Dinas/Operasional yang terpelihara dan Terfasilitasi Perijinannya	40 Unit	107.900.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.01 .07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Honor yang terbayarkan	45 Orang	1.836.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.01 .08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Luas Gedung dan Halaman yang disediakan jasa kebersihan	0 M2	25.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Jumlah tenaga kebersihan dan Fasilitas Pendukung kebersihan kantor	0 Orang		
		Jumlah Jenis Bahan dan Alat Kebersihan	20 Jenis		
1.05.01 .08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Luas Gedung dan Halaman yang disediakan jasa kebersihan	0 M2	768.244.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah
		Jumlah tenaga kebersihan dan Fasilitas Pendukung kebersihan kantor	1 Orang		
		Jumlah Jenis Bahan dan Alat Kebersihan	12 Jenis		
1.05.01 .09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	35 Unit	80.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.01 .10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	800 Jenis	200.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1.05.01 .10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	45 Jenis	250.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.01 .11	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Jumlah barang cetakan	0 Jenis	330.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Jumlah pengadaan	30.000 Lembar		
		Jumlah Jenis Barang Cetakkan yang Disediakan	10 Jenis		
		Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	0 Bulan		
1.05.01 .11	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Jumlah barang cetakan	0 Jenis	193.800.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah
		Jumlah pengadaan	0 Lembar		
		Jumlah Jenis Barang Cetakkan yang Disediakan	8 Jenis		
		Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	12 Bulan		
1.05.01 .12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen Listrik yang disediakan	40 Buah	10.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.01 .13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan Perlengkapan	40 Unit	200.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1.05.01 .13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan Perlengkapan	40 Unit	86.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.01 .15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	5 Jenis	35.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
1.05.01 .15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	200 Jenis	20.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.01 .16	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah liter bahan bakar untuk kendaraan operasional	0 Liter	12.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah
		jumlah mobilitas termasuk tenaga angkat dan turun beras ke kantor	12 Kali		
1.05.01 .17	Penyediaan makanan dan minuman	Pelaksanaan penyediaan makan dan minum	15 Kegiatan	250.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Pelaksanaan makan minum tamu dan rapat	24 Kali Tahun		
		Pelaksanaan makan minum saat olah raga (hari Jumat)	0 Kali		
		Tersediannya Makanan dan Minuman	0 Bulan		
		Jumlah orang yang disediakan makan dan minuman	0 Orang		
1.05.01 .17	Penyediaan makanan dan minuman	Pelaksanaan penyediaan makan dan minum	0 Kegiatan	10.724.650.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah
		Pelaksanaan makan minum tamu dan rapat	0 Kali Tahun		
		Pelaksanaan makan minum saat olah raga (hari Jumat)	0 Kali		
		Tersediannya Makanan dan Minuman	12 Bulan		
		Jumlah orang yang disediakan makan dan minuman	600 Orang		
1.05.01 .18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	100 Orang	2.000.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1.05.01 .18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	46 Orang	3.147.275.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.01 .19	Penyediaan Jasa Pengamanan	Pelaksanaan pembayaran insentif bagi tenag operator dan penjaga X-Ray VIP Room Bandara Sentani	a0 Orang Bulan	18.278.676.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah
		Pelaksanaan pembayaran honor bagi satpam	0 Orang Bulan		
		Pelaksanaan uang makan satpam	0 Orang Bulan		
		Jumlah tenaga pengamanan	500 Orang		
1.05.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	0 persen	20.985.000.000,00	
1.05.02 .03	Pembangunan gedung kantor	Luas bangunan yang dibangun	3 M2	18.250.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah
		Tersediannya desain perencanaan bangunan	1 Dokumen		
1.05.02 .07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan	15 Unit	150.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.02 .09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan perlengkapan	20 Unit	110.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.02 .10	Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur yang diadakan	15 Unit	150.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
1.05.02 .10	Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur yang diadakan	30 Unit	100.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.02 .22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	2 Unit	150.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah
		belanja sewa	0 Tahun		
1.05.02 .24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	0 Unit	600.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	22 Unit		
		sewa kendaraan	0 Bulan		
1.05.02 .24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	0 Unit	1.235.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah
		Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	40 Unit		
		sewa kendaraan	0 Bulan		
1.05.02 .28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	20 Unit	65.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.02 .46	Sewa gedung	Jumlah gedung kantor yang disewa	0 Unit Tahun	175.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah
		Sewa rumah jabatan	1 Unit Tahun		
1.05.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	0 persen	1.263.000.000,00	
1.05.03 .01	Pengadaan mesin/kartu absensi	Jumlah Mesin /Kartu Apsensi yang tersedia	3 Bh	18.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.03 .02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	60 Stell	500.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1.05.03 .02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	150 Stell	250.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.03 .03	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan	600 Stell	495.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	0 persen	1.883.000.000,00	
1.05.05 .01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	10 Orang	180.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1.05.05 .01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	3 Orang	150.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.05 .02	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	60 Orang	800.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1.05.05 .04	Pendidikan dan Pelatihan Non Formal	Jumlah aparatur yang terlatih	20 Orang	500.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
1.05.05.04	Pendidikan dan Pelatihan Non Formal	Jumlah aparatur yang terlatih	5 Orang	253.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya kualitas akuntabilitas OPD	0 persen	352.000.000,00	
1.05.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	4 Laporan	30.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Laporan LAKIP SKPD	0 Dokumen		
1.05.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	4 Laporan	47.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah
		Laporan LAKIP SKPD	0 Dokumen		
1.05.06.02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah pelaporan keuangan semesteran yang diselesaikan tepat waktu	1 Laporan	10.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1.05.06.02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah pelaporan keuangan semesteran yang diselesaikan tepat waktu	1 Laporan	11.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	1 Laporan	10.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1.05.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	1 Laporan	17.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.06.05	Penyusunan Renja, RKA dan Perubahan APBD	Jumlah dokumen	3 Dokumen	30.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1.05.06.05	Penyusunan Renja, RKA dan Perubahan APBD	Jumlah dokumen	3 Dokumen	49.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.06.13	Penyusunan SOP	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	49.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.06.14	Peningkatan Kapasitas PPID	Jumlah orang	3 Orang	43.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.06.15	Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Jumlah Dokumen yang disusun	1 Dokumen	56.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.16	Porgram Pemeliharaan Kantratribmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Jumlah konflik horisontal	6 Kasus	6.321.000.000,00	
		Jumlah konflik horisontal	6 Kasus		
		Cakupan penegakan Perda	100 %		
		Cakupan penegakan Perda	100 %		
		Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk	15 rasio		
		Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk	15 rasio		

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
		Angka korban kejahatan pembunuhan per 100.000 penduduk	2 Kasus		
		Angka korban kejahatan pembunuhan per 100.000 penduduk	2 Kasus		
		Persentase penduduk yang memperoleh layanan akibat dari penegakan perda	100 %		
		Persentase penduduk yang memperoleh layanan akibat dari penegakan perda	100 %		
1.05.16 .07	Sosialisasi Upaya pencegahan konflik sosial	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi	150 Orang	750.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1.05.16 .07	Sosialisasi Upaya pencegahan konflik sosial	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi	100 Orang	336.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.16 .08	Pemantauan dan Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing di Daerah	Jumlah Dokumen / Laporan yang di laporkan	5 Dokumen	750.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1.05.16 .09	Monitoring dan Evaluasi pelanggaran-pelanggaran Perda	Tingkat Pelanggaran Perdasi di Kab/Kota	6 Kabupaten	368.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah
		Jumlah laporan pelanggaran perda yang ditegakan	0 Laporan		
1.05.16 .10	Peningkatan ketrampilan dan ketangkasan lapangan	Jumlah yang mengikuti latihan	500 Orang Kali	425.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah
		Jumlah anggota Satpol PP yang terampil dan terlatih	0 Orang		
1.05.16 .11	Bimtek PERMENDAGRI Nomor 27 Tahun 2010	Jumlah Orang yang mengikuti Bimtek	75 Orang	298.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah
		Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek	0 Orang		
1.05.16 .12	Pelatihan dan Pembinaan PPNS	jumlah peserta yang mengikuti pelatihan dan pembinaan	50 Orang	375.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah
		Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan dan pembinaan bagi PPNS	0 Orang		
1.05.16 .13	Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja Bagi Anggota (PTI)	Jumlah Anggota PTI yang mengikuti Pelatihan Dasar	n30 Orang	275.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.16 .14	Pendidikan dan Latihan PPNS	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat PPNS	5 Orang	374.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.16 .15	Penegakan Pelanggaran Perda dan Perkada Provinsi Papua	Jumlah penegakan kasus pelanggaran Perda dan Perkada Provinsi Papua	10 Kali	368.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.16 .16	Penyusunan Regulasi dan Kebijakan Daerah	Jumlah peraturan / kebijakan daerah yang disusun	1 Dokumen	300.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.16 .17	Sosialisasi Perda / Perkada Provinsi Papua	Jumlah Peserta yang mengikuti sosialisasi	100 Orang	295.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
1.05.16 .18	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan Satpol PP dan Satlinmas Se-Provinsi Papua	Jumlah data monitoring, evaluasi dan pelaporan Satpol PP dan Satlinmas Se-Provinsi Papua	1 Dokumen	327.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah
		Jumlah pelaporan hasil monitoring dan evaluasi Satpol PP dan Satlinmas	0 Laporan		
1.05.16 .19	Pengendalian Unjuk Rasa dan kerusuhan massa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua	Jumlah penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	20 Kali	295.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.16 .20	Pelatihan Dasar Satuan Polisi Pamong Praja Bagi anggota Pengamanan	Jumlah yang mengikuti latihan dasar Satpol PP	0 Orang Hari	785.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah
		Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan dasar Satpol PP	250 Orang		
1.05.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Peningkatan wawasan kebangsaan	0 %	3.900.000.000,00	
		Jumlah Pertemuan FKUB per tahun	2 Kali		
		Cakupan peserta yang mengikuti kegiatan bela negara, pembauran kebangsaan, dan wawasan kebangsaan	250 Orang		
		Cakupan fasilitasi Forkompimda	5 Kali		
		Persentase peningkatan pemahaman masyarakat terhadap HAM	2 %		
		Persentase penanganan kasus pelanggaran HAM	30 %		
1.05.17 .01	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi peningkatan toleransi dan kerukunan dan kehidupan beragama	100 Orang	1.700.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Jumlah pengurus FKUB yang dibayarkan honorinya selama satu tahun	43 Orang		
		Jumlah pengurus FKUB dan Sekretariat FKUB yang akan melaksanakan studi banding ke Provinsi Kalimantan Barat	0 Orang		
1.05.17 .04	Fasilitasi pembauran kebangsaan	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi pembauran kebangsaan	60 Orang	1.000.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Jumlah pengurus FPK Provinsi Papua yang dibayarkan honorinya selama satu tahun	33 Orang		
1.05.17 .05	Sosialisasi Ketahanan Bela Negara	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi	100 Orang	600.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Jumlah peserta dari unsur pemuda, pelajar dan mahasiswa yang bertambah pemahamannya tentang pentingnya bela negara	100 Orang		
1.05.17 .12	Sosialisasi Peningkatan Wawasan kebangsaan	Jumlah peserta yang terdiri dari pemuda dan pelajar yang mengikuti sosialisasi Peningkatan Wawasan Kebangsaan	100 Orang	600.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Jumlah peserta pemuda dan pelajar yang meningkat pemahamannya terhadap pendidikan wawasan kebangsaan	100 Orang		
1.05.19	Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Tingkat partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan	55 persen	3.031.000.000,00	
		Rasio jumlah linmas per 10.000 penduduk	73 rasio		

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
1.05.19.01	Pengembangan Sistem Informasi Satpol PP	Jumlah Aplikasi Sistem Informasi Satpol PP	1 Aplikasi	279.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.19.03	Fasilitasi pemberdayaan FKDM	Jumlah yang di fasilitasi dalam forum	150 Orang	387.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.19.05	Pelatihan Dasar Bagi Satuan Perlindungan Masyarakat (LINMAS)	Jumlah yang mengikuti pelatihan dasar Satlinmas	200 Orang Hari	630.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.19.06	Rakernis Satpol PP Se-Provinsi Papua	Jumlah peserta yang mengikuti Rakernis	100 Orang	399.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.19.11	Seleksi Kompetensi Impasing Fungsional	jumlah anggota yang mengikuti Seleksi	25 Orang	220.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.19.12	Bimtek Pemahaman Intelijen dalam menghadapi menghadapi gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Jumlah peserta yang mengikuti bimtek	50 Orang	183.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.19.13	Magang Penyelenggaraan Trantibumlinmas, Penegakan Perda dan Damkar	Jumlah peserta yang mengikuti magang	20 Orang	200.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.19.14	Bimtek Peningkatan Kapasitas Tugas dan Fungsi Linmas Kampung	Jumlah peserta yang mengikuti bimtek	100 Orang	358.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.19.15	Pemberdayaan Satlinmas dan masyarakat dalam pengamanan Swakarsa Se-Papua	Jumlah Satlinmas dan masyarakat yang diberdayakan dalam pengamanan lingkungan	100 Orang	375.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.20	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	Cakupan penertiban dan penanggulangan penyakit masyarakat	80 %	2.507.000.000,00	
1.05.20.09	Sosialisasi Bahaya Miras dan Narkoba Bagi Generasi Muda di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi Jumlah peserta yang meningkat pemahamannya akan bahaya miras dan narkoba	0 Orang 100 Orang	289.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.20.10	Operasi / Penertiban PKL, PSK dan Anak Sekolah	Jumlah operasi dan penertiban PKL,PSK dan anak sekolah	35 Orang Kali	260.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.20.12	Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba	Jumlah Penyuluhan Miras yang dilakukan	5 Kali	374.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.20.13	Bimtek Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Trantibum Satpol PP	Jumlah peserta yang mengikuti bimtek	100 Orang	265.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
1.05.20.14	Rakorda Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Se-Provinsi Papua	Jumlah Peserta yang mengikuti Rakorda	100 Orang	350.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.20.15	Bimtek Pemahaman Tuposisi Satpol PP dalam Pengendalian Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan	Jumlah peserta yang mengikuti bimtek	250 Orang	415.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.20.16	Rakorda PPNS Se-Papua	Jumlah peserta yang mengikuti Rakorda	100 Orang	297.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.20.17	Forum Sinkronisasi Program dan Kegiatan Satpol PP	Jumlah peserta yang mengikuti pertemuan	50 Orang	257.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah
		Jumlah peserta yang mengikuti forum	0 Orang		
1.05.21	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Cakupan muatan pendidikan politik dan demokrasi dalam pendidikan menengah	5 %	2.500.000.000,00	
		Persentase lembaga dan partai politik yang dibina	80 %		
		Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu	0 %		
1.05.21.06	Fasilitasi pendidikan politik masyarakat	Frekuensi pelaksanaan fasilitasi pendidikan politik bagi masyarakat	150 Kali	930.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1.05.21.08	FGD Indeks Demokrasi Indonesia	Jumlah peserta yang mengikuti FGD Indeks Demokrasi Indonesia yang terdiri dari unsur Akademisi, Ketua dan Pengurus Parpol, Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP), Unsur Pemerintah dan Perempuan	30 Orang	350.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1.05.21.10	Desk Pilkada	Terpantaunya Pelaksanaan PILKADA di Provinsi Papua (PILGUB dan PILBUB)	11 Kabupaten	800.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1.05.21.12	Fasilitasi Kemitraan Eksekutif, Legislatif dan Parpol	Jumlah peserta sosialisasi Fasilitasi Kemitraan Eksekutif, Legislatif dan Parpol yang terdiri dari unsur pemerintah, pengurus parpol, ormas dan LSM	50 Orang	420.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Jumlah tenaga verifikasi bantuan keuangan parpol	30 Orang		
1.05.22	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Terwujudnya Pencegahan Dini dan Penganggulangan Korban Bencana Alam	18 Kegiatan	17.870.000.000,00	
		Prosentase Peningkatan Pelayanan Pemulihan Terkena Dampak Bencana	0 %		
		Cakupan Kampung dengan status Tanggu Bencana	70 persen		
		Cakupan lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah	2 lokasi		
		Persentase kesiapsiagaan penanganan bencana	90 persen		
		Tingkat fasilitasi penanganan pasca bencana	90 persen		
		Cakupan pengembangan EWS (early warning systems) kebencanaan	30 persen		
		Persentase Daerah Rawan Bencana yang dibina	0 %		

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
		Rata-rata Waktu Respon Terhadap Kejadian Bencana	0 Hari		
		Persentase Daerah Terkena Bencana yang telah Tertangani	0 %		
		Meningkatnya kesiapsiagaan	0 %		
		meningkatnya keandalan dan kecepatan dalam penanganan darurat bencana	0 %		
		meningkatnya daerah terkena bencana yang tertangani	0 %		
1.05.22 .05	Survey dan pemetaan Daerah Rawan Bencana dan Pengadaan Pemasangan Rambu - Rambu	Jumlah dokumen yang dihasilkan	6 Dokumen	300.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.22 .08	Penyediaan dan Penyiapan Stok Logistik (Buffer Stok) Penanggulangan Bencana di Provinsi Papua	Jumlah Jenis Logistik yang di sediakan	15 Jenis	1.000.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.22 .09	Rapat Inventarisasi Kesiadaan Kebutuhan Logistik PB	Jumlah Pertemuan yang dilakukan	2 Kali	400.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.22 .10	Pelatihan Manajemen Logistik dan Peralatan PB	Jumlah Peserta Pelatihan Manajemen Logistik dan Peralatan PN	29 Orang	450.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah
		jumlah kab/kota yang hadir	0 Kabupaten		
1.05.22 .13	Kegiatan Bulan Bhakti PRB (Setiap Bulan Oktober)	Jumlah Peserta Sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana	100 Orang	400.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah
		Jumlah Kegiatan PRB yang akan dilaksanakan	1 Kegiatan		
1.05.22 .14	RAKERNIS dan Evaluasi BPBD Se-Papua	Jumlah Kabupaten/Kota yang mengikuti Rakernis dan Evaluasi BPBD se - Provinsi Papua	29 Kabupaten	800.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.22 .15	Fasilitasi dan Penguatan Forum PRB	Jumlah Kabupaten yang dapat di fasilitasi Forum PRB nya	1 Kabupaten	250.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.22 .16	Simulasi Peralatan Teknis Penanggulangan Bencana	Jumlah yang mengikuti simulasi	50 Orang Hari	259.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.22 .18	Sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana	Jumlah Peserta Sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana	100 Orang	139.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.22 .36	Bintek Jitu-PB/PDANA	Jumlah Peserta Pelatihan Bintek Jitu-PB/PDANA	60 Orang	400.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah
		Jumlah pendamping yang mengikuti Pelatihan JITU PB/PDANA	n60 Orang		
1.05.22 .44	Pelatihan Petugas Psikologi Pasca Bencana	Jumlah Peserta Petugas Psikologi Pasca Bencana	60 Orang	400.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
1.05.22.58	Penyusunan Rencana Kontijensi PB Kesiapsiagaan	Jumlah Dokumen yang dihasilkan	2 Dokumen	400.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.22.59	Pembentukan Desa/Kampung Tangguh	Jumlah Desa/Kampung Tangguh yang terbentuk	2 Kampung	450.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.22.60	Gladi Lapangan Penanggulangan Bencana	jumlah kegiatan gladi lapangan yang dilakukan	1 Kegiatan	400.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.22.61	Bimtek dan Pembentukan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana	Jumlah orang yang mengikuti Bimtek	75 Orang Hari	274.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.22.63	Fasilitasi dan Legislasi RPB	Jumlah Raperda yang dilegislasikan	1 Dokumen	200.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.22.70	Bimtek Tenaga Pendampingan Rehabilitasi dan Rekonstruksi PB	Jumlah Orang yang latih	60 Orang	550.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.22.76	Rapid Assesment Pasca Bencana	Jumlah kabupaten/kota yang akan dilaksanakan Rapid Assessment	2 Kabupaten	350.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.22.77	Monitoring dan Evaluasi Penanganan Pasca Bencana	Jumlah Kabupaten/Kota yang dipantau dan dievaluasi	3 Kabupaten	450.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.22.80	Pengembangan Sistem Informasi BPBD (Operasional Pusdalops)	jumlah bulan operasional pusdalops	12 Bulan	570.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.22.86	Operasional Pengendalian Pemadam Kebakaran	Jumlah operasi pemadam kebakaran	22 Orang Kali	258.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.22.88	Bimtek TOT Penanggulangan Bencana	Jumlah Peserta yang mengikuti Bimtek TOT Penanggulangan Bencana	30 Orang	500.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.22.89	Assesment Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana	jumlah laporan	2 Dokumen	350.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.22.91	Pendidikan dan Latihan Pemadam Kebakaran	Jumlah anggota yang mengikuti Diklat Pemadam Kebakaran	5 Orang	275.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.22.92	Bimtek Pemahaman tehnik penanganan Kebakaran bagi masyarakat	Jumlah peserta yang mengikuti bimtek	100 Orang	295.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
1.05.22.93	Pelatihan tehnik penanganan kebakaran bagi anggota Damkar	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan	50 Orang	300.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.22.94	Pelatihan Tenaga Pendamping Pembentukan Desa Tangguh Bencana	Jumlah Tenaga Pendamping Pembentukan Desa Tangguh Bencana yang terlatih	30 Orang	250.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.22.95	Pembentukan Sekolah Aman Bencana	jumlah sekolah aman bencana yang terbentuk	5 Unit	350.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.22.96	Penyusunan Regulasi Bidang Kebencanaan	jumlah regulasi bidang kebencanaan yang tersusun	2 Dokumen	300.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.22.98	Penyusunan Indeks Ketahanan Daerah	jumlah kabupaten/kota yang ditentukan indeks ketahanan daerahnya	1 Kabupaten	400.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.22.102	Pembuatan dan Pemasangan Rambu, papan informasi dan jalur evakuasi	jumlah rambu, papan informasi dan jalur evakuasi yang dibuat dan terpasang	1 Buah	450.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.22.103	Melaksanakan Uji Lapang Rekon	jumlah uji lapangan rekon yang dilakukan	2 Kali	400.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.22.104	Mobilisasi TRC	jumlah mobilisasi	5 Kali	500.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.22.105	Rakor Kedaruratan	jumlah kab/kota yang hadir	29 Kabupaten	750.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.22.106	Monev ketersediaan Kebutuhan Logpal	jumlah kab/kota yang dimonev	5 Kabupaten	175.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.22.107	Rapat Penguatan Logistik dan Peralatan PB	jumlah kabupaten/kota yang hadir	29 Kabupaten	450.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.22.108	Pengadaan dan Pendorongan Peralatan PB	jumlah lokasi yang menerima layanan distribusi peralatan kebencanaan	2 Kabupaten	1.000.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.22.115	Peningkatan kapasitas Operator Pusdalops	jumlah operator yang dilatih	6 Orang	175.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.22.119	Pendampingan Trauma Healing Pasca Bencana	jumlah lokasi pendampingan	1 Lokasi	150.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
1.05.22 .120	Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Jumlah peserta bimtek	60 Orang	450.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.22 .132	Pendampingan Kab/Kota dalam Penguatan Kapasitas Kelembagaan BPBD di Kab/Kota	jumlah pendampingan yang dilakukan	5 Kabupaten	600.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.22 .134	Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan BPBD Kab/Kota	jumlah kabupaten/kota yang di monev	5 Kabupaten	500.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.22 .135	Pelatihan Manajemen PB Dasar	jumlah peserta pelatihan	30 Orang	550.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.2 3	Program Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan	Persentase pembinaan terhadap LSM dan Ormas	85 %	600.000.000,00	
1.05.23 .03	Fasilitasi Pembinaan Ormas/LSM di Daerah	Jumlah pengurus ormas/LSM yang mengikuti kegiatan sosialisasi	100 Orang	600.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Meningkatnya jumlah pengurus ormas/LSM tentang UU Keormasan	100 Orang		
1.05.3 2	Program Peningkatan Keamanan dan kenyamanan Lingkungan	Persentase Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	10 %	4.279.500.000,00	
		Rata-rata Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) kabupaten/kota dalam daerah layanan	40 %		
		Cakupan tenaga pengendali dan kenyamanan lingkungan yang terampil	55 %		
1.05.32 .01	Sosialisasi Pencegahan, Penanggulangan dan Penanganan Potensi Konflik, Gangguan Keamanan dan Ketertarikan Masyarakat	Jumlah yang mengikuti sosialisasi gangguan keamanan dan ketertarikan masyarakat	100 Orang	312.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah
		Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	0 Orang		
1.05.32 .02	Publikasi dan Informasi Ketertiban Umum Bagi Masyarakat	Jumlah yang menerima informasi dan publikasi ketertiban umum	2.900 Orang	355.500.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah
		Jumlah bulletin yang dipublikasikan dan diinformasikan	0 Eksemplar		
		Jumlah Baliho/spanduk yang dipublikasikan dan diinformasikan di Kota Jayapura, Kab Jayapura, Kab. Keerom, Kab. Sarmi, Kab. Timika, dan Kab. Biak	0 Buah		
		Jumlah publikasi dan informasi Trantibum yang di bagikan	0 Lembar		
1.05.32 .06	Penegakan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Jumlah penegakan Trantibum	0 Orang Kali	425.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah
		Jumlah penegakan Trantibum (Miras, Tempat Hiburan Malam, Kependudukan),	50 Orang Kali		
1.05.32 .07	Patroli Wilayah	Jumlah yang melaksanakan patroli wilayah	0 Orang Hari	276.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah
		jumlah yang melaksanakan patroli wilayah	0 Orang Bulan		
		Jumlah yang mengikuti patroli wilayah	50 Orang Kali		
		Jumlah Patroli pelanggaran K3	0 Kali		

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
1.05.32 .08	Pengamanan dan Pengawasan Protokoler KDH/ Pejabat Penting	Jumlah pengamanan dan pengawasan pejabat KDH/pejabat penting	50 Orang Kali	285.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah
		Jumlah pengamanan dan pengawasan pejabat penting/KDH, tempat penting, acara penting, dan hari besar keagamaan	0 Kali		
1.05.32 .09	Penyelidikan Kasus PPNS	Jumlah kasus yang ditangani PPNS	5 Orang Bulan	295.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.32 .10	Penegakan dan Penertiban Disiplin Aparatur	Jumlah Penegakan dan Penertiban Aparatur dan Aset	12 Bulan	272.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah
		Jumlah penertiban dan penegakan ASN dan Aset Pemda	0 Kali		
1.05.32 .11	Gelar Pasukan Satpol PP dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Jumlah peserta gelar pasukan	2.000 Orang	500.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.32 .12	Pendidikan dan Latihan Satpol PP	Jumlah aparaturnya yang mengikuti Diklat Satpol PP	6 Orang	267.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.32 .13	Forum Komunikasi dan Temu Konsultasi Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam pencegahan tindak kriminal di daerah	Jumlah peserta yang mengikuti forum dan temu konsultasi	125 Orang	295.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.32 .14	Penyediaan peralatan dan perlengkapan operasional Satpol PP, Linmas dan Damkar	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang tersedia	40 Unit	275.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.32 .15	Peningkatan Kerjasama dengan TNI/POLRI dalam pembinaan fisik, mental dan disiplin Satpol PP	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan dalam pembinaan fisik, mental dan disiplin	500 Orang	345.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.32 .16	Peningkatan Kerjasama Pembinaan dan Pelatihan dengan TNI/POLRI dalam teknik pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan dan pelatihan pengendalian keamanan serta kenyamanan lingkungan	150 Orang	377.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah
1.06	Sosial			30.577.500.000,00	
1.06.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	0 persen	2.872.500.000,00	
1.06.01 .08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Luas Gedung dan Halaman yang disediakan jasa kebersihan	0 M2	510.000.000,00	Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Jumlah tenaga kebersihan dan Fasilitas Pendukung kebersihan kantor	15 Orang		
		Jumlah Jenis Bahan dan Alat Kebersihan	5 Jenis		
1.06.01 .11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan	15 Jenis	418.500.000,00	Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Jumlah penggandaan	150.000 Lembar		
		Jumlah Jenis Barang Cetak yang Disediakan	3 Jenis		
		Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	0 Bulan		
1.06.01 .16	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah liter bahan bakar untuk kendaraan operasional	0 Liter	24.000.000,00	Dinas Sosial, Kependudukan,

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
		jumlah mobilitas termasuk tenaga angkat dan turun beras ke kantor	12 Kali		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.06.01 .17	Penyediaan makanan dan minuman	Pelaksanaan penyediaan makan dan minum	0 Kegiatan	210.000.000,00	Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Pelaksanaan makan minum tamu dan rapat	12 Kali Tahun		
		Pelaksanaan makan minum saat olah raga (hari Jumat)	48 Kali		
		Tersediannya Makanan dan Minuman	12 Bulan		
		Jumlah orang yang disediakan makan dan minuman	0 Orang		
1.06.01 .18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	79 Orang	1.000.000.000,00	Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.06.01 .19	Penyediaan Jasa Pengamanan	Pelaksanaan pembayaran insentif bagi tenaga operator dan penjaga X-Ray VIP Room Bandara Sentani	a0 Orang Bulan	710.000.000,00	Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Pelaksanaan pembayaran honor bagi satpam	0 Orang Bulan		
		Pelaksanaan uang makan satpam	180 Orang Bulan		
		Jumlah tenaga pengamanan	15 Orang		
1.06.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	0 persen	1.350.000.000,00	
1.06.02 .10	Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur yang diadakan	8 Unit	120.000.000,00	Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.06.02 .20	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Jumlah rumah jabatan yg terpelihara	1 Unit Tahun	180.000.000,00	Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.06.02 .22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	7 Unit	350.000.000,00	Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		belanja sewa	0 Tahun		
1.06.02 .24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	0 Unit	150.000.000,00	Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	25 Unit		
		sewa kendaraan	12 Bulan		
1.06.02 .28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	15 Unit	50.000.000,00	Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.06.02 .30	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Luas bangunan yang direhab	1 M2	500.000.000,00	Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
1.06.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	0 persen	1.360.000.000,00	
1.06.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	50 Orang	1.200.000.000,00	Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.06.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta bimbingan teknis tentang implementasi peraturan perundang-undangan	8 Orang	160.000.000,00	Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.06.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya kualitas akuntabilitas OPD	0 persen	745.000.000,00	
1.06.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	5 Laporan	50.000.000,00	Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Laporan LAKIP SKPD	0 Dokumen		
1.06.06.02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah pelaporan keuangan semesteran yang diselesaikan tepat waktu	5 Laporan	30.000.000,00	Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.06.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	5 Laporan	50.000.000,00	Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.06.06.05	Penyusunan Renja, RKA dan Perubahan APBD	Jumlah dokumen	15 Dokumen	150.000.000,00	Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.06.06.10	Forum SKPD Provinsi Papua	Jumlah Peserta Forum	80 Orang	450.000.000,00	Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.06.06.13	Penyusunan SOP	Jumlah Dokumen	5 Dokumen	15.000.000,00	Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.06.15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Prosentase KAT yang mandiri	0 %	11.650.000.000,00	
		Persentase KAT yang memperoleh bantuan sosial	0 persen		
		Persentase PMKS yang tertangani	40 persen		
		Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	4.229 persen		
		Jumlah keluarga miskin yang mendapatkan bantuan pelatihan keterampilan usaha	200 KK		

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
		Persentase panti sosial yang menerima pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama	80 persen		
		Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	75 persen		
		Cakupan ketersediaan basis data terpadu PMKS dan kemiskinan	90 persen		
1.06.15.05	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin	Jumlah keluarga miskin yang mendapatkan bantuan usaha	225 KK	2.500.000.000,00	Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Jumlah keluarga miskin yang mendapatkan bimbingan sosial motivasi	0 KK		
1.06.15.22	Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah fakir miskin yang mendapatkan bantuan sosial	130 KK	1.500.000.000,00	Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Jumlah fakir miskin yang mendapatkan bimbingan sosial motivasi	0 Orang		
		Menurunnya angka kemiskinan	0 %		
1.06.15.24	Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil	Jumlah KK Komunitas Adat Terpencil yang mendapat bantuan Rumah Layak Huni	100 KK	7.650.000.000,00	Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Jumlah KK yang mendapatkan jaminan hidup	100 KK		
		Jumlah KK yang mendapatkan peralatan pertanian, bibit tanaman dan peralatan rumah tangga	100 KK		
		Jumlah KAT yang mendapatkan bantuan sarana air bersih, MCK dan Balai Sosial	100 Unit		
		Jumlah komunitas Adat terpencil yang diperdayakan	0 Kelompok		
1.06.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Cakupan Pengembangan jaminan sosial bagi lanjut usia dan orang dengan kecacatan	40 persen	350.000.000,00	
		Persentase penyandang disabilitas miskin dan rentan yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar	25 persen		
1.06.16.12	Pelayanan dan rehabilitasi sosial Lanjut Usia	Jumlah lanjut usia yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial	0 Orang	0,00	Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Jumlah lanjut usia yang mendapatkan bimbingan sosial	0 Orang		
		Jumlah lanjut usia yang mendapatkan bantuan Usaha Ekonomi Produktif	0 Orang		
		Jumlah Pendamping Lanjut Usia yang mendapatkan penguatan kapasitas	0 Orang		
		Jumlah lanjut usia penerima layanan	0 Orang		
1.06.16.13	Pelayanan dan rehabilitasi sosial anak	Jumlah anak yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	0 Orang	0,00	Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Jumlah anak yang mendapatkan bantuan Usaha Ekonomi Produktif	0 Orang		
		Jumlah rehabilitasi sosial anak	0 Unit		
1.06.16.14	Pelayanan dan Rehabilitasi sosial Penyandang Cacat	Jumlah penyandang cacat yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial	0 Orang	0,00	Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
		Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan alat bantu	0 Orang		Perempuan dan Perlindungan Anak
		Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan pelayanan sosial keliling	0 Orang		
		Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan Praktek belajar Kerja	0 Orang		
		Jumlah penyandang disabilitas yang mengikuti kampanye hari disabilitas internasional	0 Orang		
		Jumlah sarana rehabilitas sosial bagi penyandang	0 Orang		
1.06.16 .15	Sosialisasi Penyalahgunaan Napza	Jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi	60 Orang	350.000.000,00	Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.06.2 3	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Jumlah kelembagaan sosial masy yang aktif	0 Kelompok	5.700.000.000,00	
		Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Keluarga miskin	0 %		
		Cakupan Kabupaten/Kota yang terakses perlindungan dan jaminan sosial	18 kab/kota		
		Cakupan keluarga OAP yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	250 Per 1000 keluarga		
1.06.23 .04	Pelatihan dan Pengarahan Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	Jumlah TAGANA yang dilatih	300 Orang	950.000.000,00	Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Jumlah TAGANA yang terlatih	0 Orang		
1.06.23 .12	Bantuan Kedaruratan Logistik Bencana alam dan sosial	Jumlah bantuan logistik bencana yang disediakan	7 Jenis	2.250.000.000,00	Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.06.23 .14	Penguatan Program Keluarga Harapan di 29 Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/kota ywng mendapatkan penguatan Program Keluarga Harapan	3 Kabupaten	500.000.000,00	Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.06.23 .16	Bangun Generasi dan Keluarga Papua Sejahtera (BANGGA PAPUA)	Jumlah Penerima Manfaat anak 4 tahun ke bawah	44.580 Orang	2.000.000.000,00	Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.06.2 4	Pelayanan Kesejahteraan Sosial Berbasis Pantii	Cakupan wanita rawan sosial ekonomi (WRSE) yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial	50 orang	5.550.000.000,00	
		Jumlah anak dan remaja terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial	250 orang		
		Cakupan penyandang cacat netra yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial	40 persen		
		Cakupan Jumlah lanjut usia terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial	70 persen		

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
1.06.24 .01	Pelayanan dan Rehabilitasi sosial bagi anak dan remaja	Jumlah anak dan remaja yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial	80 Orang	1.500.000.000,00	Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.06.24 .02	Pelayanan dan Rehabilitasi sosial bagi Lanjut Usia terlanjar	Jumlah lanjut usia terlanjar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial	70 Orang	1.700.000.000,00	Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.06.24 .03	Pelayanan dan Rehabilitasi sosial bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)	Jumlah WRSE yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial	60 Orang	1.300.000.000,00	Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.06.24 .04	Pelayanan dan Rehabilitasi sosial bagi Cacat Netra	Jumlah cacat netra yang mendapatkan pelayanandan rehabilitasi sosial	18 Orang	1.050.000.000,00	Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.06.2 5	Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya kualitas perencanaan kesejahteraan sosial	0 %	1.000.000.000,00	
		Cakupan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berkualitas dalam bidang kesejahteraan sosial	2 dokumen		
1.06.25 .02	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang disusun	15 Dokumen	750.000.000,00	Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.06.25 .03	Penyusunan Data dan Informasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan	Jumlah dokumen data dan informasi pelaksanaan program dan kegiatan yang disusun	2 Dokumen	250.000.000,00	Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar			726.442.746.151,00	
2.01	Tenaga Kerja			6.962.800.000,00	
2.01.1 5	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Meningkatnya Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	0 %	3.100.000.000,00	
		Meningkatnya kualitas Pencari Kerja	0 %		
		Persentase lulusan balai diklat tenaga kerja yang terserap	90 %		
		Frekuensi promosi bursa tenaga kerja	2 Kali		
		Persentase peserta pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi yang terserap dalam lapangan kerja	85 %		
		Persentase Balai Latihan Kerja (BLK) kabupaten/kota yang terakreditasi	30 %		
		Persentase kenaikan UMP	2 %		
		Persentase pekerja/buruh yang menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan	40 %		

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
2.01.15.06	Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja	Jumlah Pencari Kerja yang ditingkatkan kualitasnya.	500 Orang	2.500.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
2.01.15.54	Sosialisasi Standarisasi dan Setifikasi Kompetensi Kerja	Jumlah sektor lapangan kerja yang memiliki standar dan kompetensi kerja	40 Kelompok	600.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
		Jumlah peserta sosialisasi dan standarisasi Kompetensi Kerja	40 Orang		
2.01.15.62	Quality Managenent System (QMS) BLTKI	Jumlah aparatur yang dilatih manajemen pengelolaan balai pelatihan	30 Orang	0,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
2.01.16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Tingkat partisipasi angkatan kerja	79 persen	2.286.800.000,00	
		Tingkat pengangguran terbuka	2 persen		
2.01.16.10	Pamerran Bursa Tenaga Kerja (JOB FAIR) Provinsi Papua	Jumlah perusahaan yang mengikuti Job Fair	40 Perusahaan	567.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
2.01.16.30	Perluasan Kerja melalui sistem Padat Karya Produktif	Jumlah perluasan kerja melalui sistem padat karya produktif	3 Orang	400.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
2.01.16.32	Pendataan dan Cheking TKA di Perusahaan Pengguna TKA	Jumlah pendataan dan cheking TKA di Perusahaan Pengguna TKA	50 Perusahaan	596.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
2.01.16.39	Penyebarnya Informasi Pasar Kerja (IPK) di 20 Kab/Kota	Tersebarnya informasi Pasar Saham di beberapa Kabupaten/Kota	15 Kabupaten	723.800.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
2.01.25	Program Pengawasan Ketenagakerjaan	Cakupan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	0 %	1.576.000.000,00	
		Cakupan Perusahaan yang Menerapkan Norma K3	0 %		
2.01.25.12	Bimtek Kesehatan Kerja	jumlah peserta yang mengikuti bimtek kesehatan kerja	50 Orang	476.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
2.01.25.14	Pembinaan Penyelesaian Perselisihan di perselisihan	Jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi Penyelesaian Perselisihan	40 Perusahaan	500.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
					dan Tenaga Kerja
2.01.25.19	Penetapan Upah Minimum Provinsi papua	Jumlah dokumen UMP	1 Dokumen	400.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
2.01.25.20	Sosialisasi Program jaminan Sosial di Perusahaan dan Kepesertaan Jaminan Sosial	jumlah peserta sosialisasi	30 Orang	200.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
2.02	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			6.900.000.000,00	
2.02.15	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Prosentase pengarusutamaan gender dalam pembangunan	70 %	350.000.000,00	
		Prosentase pengarusutamaan perlindungan anak dalam pembangunan	70 %		
2.02.15.19	Pelatihan hukum positif bagi guru dan orang tua	Terlatihnya guru dan orang tua tentang hukum positif hak anak	30 Kegiatan	350.000.000,00	Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Jumlah peserta yang di latih	40 Orang		
2.02.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Proporsi perempuan di Legislatif	20 persen	1.500.000.000,00	
		Cakupan perempuan yang berada di posisi pimpinan	20 per 100 laki-laki		
		Cakupan Kasus kekerasan terhadap perempuan yang tertangani	44 kasus		
		Persentase kasus Trafficking dan Eksploitasi anak	1 persen		
2.02.16.66	Fasilitasi FORDA Provinsi Papua	Jumlah Peserta yang mengikuti FORDA	150 Orang	350.000.000,00	Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.02.16.78	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan PUG di OPD di Provinsi/Kab/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang dimonitor	7 Kabupaten	0,00	Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.02.16.82	Sosialisasi dan advokasi pembentukan PAUD Holistik Integratif	Meningkatnya pemahaman peserta tentang PAUD Holistik Integratif	40 Kegiatan	300.000.000,00	Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi dan advokasi	40 Orang		
2.02.16.88	Fasilitasi Klinik PPRG Provinsi/Kabupaten/Kota	Jumlah SKPD/Kabupaten/Kota yang mendapat Fasilitasi Klinik ARG	35 SKPD	300.000.000,00	Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
2.02.16 .90	Penguatan SDM Tim Driver Program Perencanaan Responsif Gender (PPRG) Provinsi Papua	Jumlah Tim Driver yang terlatih	30 Orang	300.000.000,00	Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.02.16 .91	Penguatan kapasitas Vocal Point gender	Jumlah Vocal Point gender yang terlatih	40 Orang	250.000.000,00	Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.02.17	Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Perlindungan Perempuan dan Anak	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR)	358 per 1000 perempuan	2.400.000.000,00	
		Implementasi kebijakan yang responsif gender	80 persen		
		Persentase Posyandu Aktif	918 persen		
		Cakupan penguatan kader Posyandu di kampung	90 persen		
2.02.17 .08	Fasilitasi upaya perlindungan perempuan dan Anak terhadap tindak kekerasan	Terlaksananya pendampingan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	91 %	450.000.000,00	Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Jumlah korban kekerasan yang ditangani P2TP2A	91 Orang		
		Jumlah kasus yang dapat diselesaikan sesuai standart	91 Orang		
			0		
2.02.17 .38	Pendidikan politik bagi Perempuan.	Jumlah Peserta Perempuan yang mengikuti pendidikan Politik	30 Orang	250.000.000,00	Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.02.17 .53	Fasilitasi Penguatan Kapasitas Kader Posyandu dan PKK	Meningkatnya kapasitas, pemahaman kader posyandu dan PKK	20 Acara	500.000.000,00	Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Jumlah Posyandu yang mendapat Penguatan Kapasitas	20 Peserta		
2.02.17 .65	TOT bagi Operator Simponi PPA	Jumlah Orang yang terlatih	20 Orang	250.000.000,00	Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.02.17 .66	Pelatihan (PATBM) Kampung	Jumlah Peserta PATBM Kampung yang dilatih	40 Orang	300.000.000,00	Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.02.17 .67	Pelatihan Psikososial bagi tenaga kepolisian dan P2TP2A Provinsi Papua	Jumlah tenaga kepolisian dan P2TP2A yang terlatih	40 Orang	300.000.000,00	Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.02.17 .68	Penguatan kapasitas SDM pendamping korban kekerasan	Jumlah Pendamping Korban kekerasan yang terlatih	60 Orang	350.000.000,00	Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.02.18		Cakupan wirausaha perempuan binaan yang berkembang	150 orang	1.650.000.000,00	

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Cakupan kelompok Keluarga Pra Sejahtera I binaan yang naik menjadi Keluarga Sejahtera I	80 persen		
		Persentase PKK aktif	90 persen		
		Cakupan wirausaha perempuan binaan yang berkembang	150 orang		
		Cakupan kelompok Keluarga Pra Sejahtera I binaan yang naik menjadi Keluarga Sejahtera I	80 persen		
		Persentase PKK aktif	90 persen		
2.02.18.06	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah kab/kota yang dimonitoring	5 Kabupaten	0,00	Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.02.18.43	Pemberdayaan ekonomi keluarga sejahtera	Jumlah Keluarga prasejahtera yang diberdayakan	12 Kelompok	600.000.000,00	Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.02.18.44	Penguatan kapasitas SDM Wirausaha perempuan papua	Jumlah kelompok wirausaha perempuan yang dilatih	30 Kelompok	600.000.000,00	Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.02.18.45	Pendidikan politik dan hukum bagi anggota legislatif, organisasi perempuan papua	Jumlah anggota legislatif dan organisasi perempuan yang terlatih	50 Orang	450.000.000,00	Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.02.18.46	Fasilitasi dan pemberdayaan bagi penyandang cacat dan difabel	Jumlah Penyandang cacat yang diberdayakan	70 Orang	0,00	Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.02.28	Program peningkatan penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS	Menurunnya jumlah penduduk yang terdampak Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS	0 %	500.000.000,00	
2.02.28.01	Penyuluhan penanggulangan narkoba dan PMS di sekolah	Jumlah Peserta yang mengikuti penyuluhan	300 Orang	500.000.000,00	Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.02.30	Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	Cakupan kampung KB	0 %	500.000.000,00	
2.02.30.01	Pelatihan Tenaga Pendamping	Jumlah Peserta yang dilatih	250 Orang	500.000.000,00	Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.03	Pangan			31.600.000.000,00	
2.03.16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	Prevalensi penduduk OAP dengan kerawanan pangan sedang	10 persen	28.200.000.000,00	
		Cakupan penanganan daerah rawan pangan	20 persen		

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
		Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan	46 persen		
		Skor PPH	91 skor		
2.03.16 .01	Penanganan daerah rawan pangan		0	1.750.000.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
			0		
		daerah rawan pangan yg tertangani	28 Lokasi		
			0		
		daerah rawan pangan yg tertangani	0 Wilayah		
		Tersusunnya Peta Kerawanan dan Kerentanan Pangan	0 Dokumen		
		Jumlah pengambilan data dan pembuatan peta	1 Dokumen		
2.03.16 .13	Pengembangan cadangan pangan daerah	daerah yang memiliki ketahanan pangan	0 Wilayah	3.000.000.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
		Tersedianya Cadangan Pangan Daerah	500 Ton		
		tersedianya cadangan pangan	0 Ton		
2.03.16 .14	Pengembangan desa mandiri pangan		0	1.500.000.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
		jml desa yang memiliki ketahanan pangan daerah	0 Lokasi		
		jumlah desa yang sudah mandiri pangan	0 Kecamatan		
		Pelaksanaan Sosialisasi Kawasan Mandiri Pangan	0 Kabupaten		
		Pelaksanaan Sosialisasi dan Bantuan Paket Desa Mandiri Pangan	0 Kabupaten		
		Terselenggaranya Evaluasi dan Kajian Dampak Kampung/Kawasan Mandiri Pangan	0 Kabupaten		
		Jumlah kampung yang tertangani menjadi kampung mandiri pangan lestari	0 Kampung		
		Jumlah Kampung mandiri pangan yang mendukung PON XX	8 Kampung		
2.03.16 .49	Validasi/Update Data Ketahanan Pangan	dok data ketahanan pangan	2 Dokumen	900.000.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
		Jumlah validasi data ketahanan pangan	2 Dokumen		
		Tersusunnya buku analisis konsumsi pangan	0 Buku		
		Tersusunnya buku analisis ketersediaan pangan dan NBM	0 Buku		
2.03.16 .137	Pengembangan Diversifikasi Pangan	Terselenggaranya Lomba Cipta Menu Tingkat Provinsi Papua	0 Kali	2.000.000.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
		Meningkatnya Produksi Pangan Lokal dan Jumlah Usaha Kelompok UMKM Tingkat Kabupaten	0 Kabupaten		
		Meningkatnya Jumlah Hasil Olahan Pangan Lokal	17 Kali		
		Jumlah Usaha Kelompok UMKM Tingkat Kabupaten	0 Kelompok		
2.03.16 .138	Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan	Tersusunnya Buku Analisis Konsumsi Pangan	0 Buku	2.600.000.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
		Meningkatnya Ketersediaan Pangan Tingkat Rumah Tangga Melalui Pemanfaatan Pekarangan Oleh Kelompok Wanita Tani	250 Kelompok		

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
2.03.16 .140	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Segar	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Keamanan Pangan	29 Kabupaten	1.800.000.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
		Terselenggaranya Sosialisasi Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Segar	0 Kali		
		Terlaksananya Uji Test Pestisida dan Formalin	0 Jenis		
		Berkembangnya Desa Pertanian Organik	0 Kampung		
		Berkembangnya Kampung Pertanian Organik	3 Kabupaten		
2.03.16 .143	Pengembangan Kelembagaan Keamanan dan Mutu Pangan Segar	Terlaksananya pengumpulan sampel pada pelaku usaha/petani dan uji sampel pangan segar asal tumbuhan (PSAT)	10 Sampel	1.350.000.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
		Jumlah sampel pangan segar asal tumbuhan	0 Sampel		
		Jumlah sampel pangan segar asal Tumbuhan yang tidak terkotamniasi di lokasi PON XX	15 Sampel		
		Jumlah petugas pengawas keamanan pangan yang berkompeten	5 Orang		
		Meningkatnya jumlah petugas pengawas keamanan pangan yang berkompeten di 29 kabupaten/kota	0 Orang		
2.03.16 .153	Pembangunan Gedung dan Laboratorium OKKPD (DAK)	Jumlah Gedung dan Laboratorium yang dibangun	1 Unit	4.750.000.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
2.03.16 .154	Pengembangan Distribusi dan Cadangan Pangan melalui Pola PUPM/TTI dan CPP	Jumlah Kios Tani dan Gedung Cadangan Pangan yang dibangun	7 Unit	4.450.000.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
2.03.16 .155	Peningkatan Pola Konsumsi Pangan B2SA	Jumlah Siswa yang diberikan PMTAS	1.500 Orang	4.100.000.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
2.03.3 6	Program Peningkatan Diversifikasi Panganekaragaman dan Keamanan Pangan	Cakupan penanganan daerah rawan pangan	20 %	3.400.000.000,00	
		Skor PPH	91 Skor		
2.03.36 .07	Penerapan Sertifikasi, Pelabelan serta Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	Jumlah sertifikasi prima PSAT yang diterbitkan	70 Produk	3.400.000.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
		Registrasi dan Sertifikasi Prima 3 dan Prima 2 bagi Pelaku Usaha	50 UMKM		
2.04	Pertanahan			1.570.670.000,00	
2.04.1 5	Program pembangunan sistem pendaftaran tanah	Terbangunnya sistem penataan pertanaha	30 %	500.000.000,00	
2.04.15 .03	Penyusunan data tanah	Jumlah data tanah yang divalidasi	4 Dokumen	500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
2.04.1 6	Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Tingkat ketertiban penataan pertanahan	50 %	345.670.000,00	
		Cakupan tanah adat yang terpetakan	40 %		
2.04.16 .03	Rapat Koordinasi Penataan Pertanahan	Jumlah rapat kerja yang dilakukan	4 Kegiatan	345.670.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Jumlah peserta rapat koordinasi	100 Orang		
2.04.1 7	Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Prosentase Penyelesaian konflik pertanahan	70 %	725.000.000,00	

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
2.04.17.01	Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Jumlah konflik pertanahan yang terfasilitasi	35 Kasus	725.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
2.05	Lingkungan Hidup			10.700.000.000,00	
2.05.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Tersedianya kebijakan penanganan persampahan	0 Dokumen	300.000.000,00	
		Persentase sampah yang terangkut ke TP	A20 %		
		Penyediaan prasarana dan sarana TPA/TPST/SPA lintas kabupaten/kota	1 Lokasi		
		Cakupan pengelolaan sampah di kawasan strategis dan perkotaan	40 %		
2.05.15.13	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Jumlah dokumen yang disusun	1 Dokumen	300.000.000,00	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
2.05.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Cakupan pemantauan dan pengendalian kualitas air	20 Titik Sungai	5.500.000.000,00	
		Cakupan lokasi pemantauan dan pengendalian kualitas udara	0 Kabupaten		
		Proporsi degradasi lahan yang tercemar	3 %		
		Tingkat ketaatan pemegang ijin lingkungan	n70 %		
2.05.16.01	Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura	Jumlah kab/kota yang mengikuti penilaian adipura	4 Kabupaten	600.000.000,00	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
		Jumlah Kabupaten/Kota Yang Mengikuti Program Adipura	0 Kabupaten		
		Jumlah Kabupaten Yang mengikuti Penilaian Kota Sehat/Adipura	0 Kabupaten		
2.05.16.19	Pembinaan dan Pengawasan Limbah B3	Jumlah Kegiatan/Usaha yang dibina dan diawasirawasinya limbah B3 di Provinsi Papua	13 Unit	300.000.000,00	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
2.05.16.23	Pengembangan Sekolah Berbudaya Lingkungan (Adiwiyata)	Jumlah sekolah yang mengikuti program adiwiyata	40 Sekolah	300.000.000,00	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
2.05.16.28	Peningkatan Kapasitas Komisi AMDAL Provinsi Papua	jumlah orang yang meningkat kapasitasnya	20 Orang	0,00	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
2.05.16.43	Pengawasan Lingkungan Hidup	Jumlah usaha/kegiatan yang diawasi	15 Perusahaan	2.000.000.000,00	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
2.05.16.58	Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Air Sungai di Provinsi Papua	Jumlah Sungai yang dipantau dan dikendalikan	7 Kabupaten	350.000.000,00	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
2.05.16.59	Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Udara Ambien	Jumlah daerah yang dipantau dan dikendalikan kualitas udara	6 Kabupaten	550.000.000,00	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
2.05.16.60	Pemantauan RKL/RPL	Jumlah Perusahaan yang dipantau	15 Perusahaan	400.000.000,00	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
2.05.16.62	Penyusunan RPPLH Tahap 2	Tersusunnya RPPLH Provinsi Papua	1 Dokumen	1.000.000.000,00	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
2.05.16.64	Validasi KLHS	Jumlah Dokumen	7 Dokumen	0,00	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
2.05.17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Cakupan lokasi perlindungan dan konservasi sumber daya alam	1 Kabupaten	300.000.000,00	
2.05.17.01	Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air	Jumlah sumber-sumber air yang dilindungi	5	300.000.000,00	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
2.05.19	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Cakupan akses informasi LH yang berkualitas	0 Kali	500.000.000,00	
2.05.19.03	Penyusunan neraca sumberdaya alam (NSDA)	Jumlah Dokumen Yang Disusun	1 Dokumen	500.000.000,00	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
2.05.21	Program pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan dikawasan-kawasan konservasi laut dan hutan	Cakupan kawasan ekowisata dan jasa lingkungan yang dikembangkan	1 Lokasi	700.000.000,00	
2.05.21.04	Pemberdayaan Masyarakat Asli Papua dalam ekowisata di Provinsi Papua	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Asli Papua dalam Ekowisata	2 Kampung	400.000.000,00	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
2.05.21.06	Penyelamatan Danau di Papua	Data kualitas air danau di paniai dan sentani	2 Kabupaten	300.000.000,00	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
2.05.26	Program Mitigasi dan Adaptasi Dampak Perubahan Iklim	Peningkatan implementasi RAD-GRK Provinsi Papua	0 %	2.250.000.000,00	
		Persentase kontribusi sektor lahan terhadap penurunan emisi	70 %		
		Persentase kontribusi sektor energi terhadap penurunan emisi	30 %		
		Persentase kontribusi sektor limbah terhadap penurunan emisi	40 %		
2.05.26.06	Identifikasi Gas Rumah Kaca	Data penduduk, Data TPA/TPST, jumlah sampah terangkut dan terolah di 1 kota dan 6 kab	5 Kabupaten	300.000.000,00	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
		Jumlah laporan	0 Laporan		
2.05.26.09	Pengolahan Sampah di Kab/kota (Pilot Project)	Jumlah Tempat Sampah organik-anorganik	40 Unit	750.000.000,00	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
		Sosialisasi bank sampah di 7 kab/kota	0 Orang		
		Perengkapan lapangan pengelola sampah	0 Unit		
		Jumlah alat/mesin pengolahan sampah	2 Unit		
2.05.26.10	Kampung Iklim Kabupaten/Kota di Provinsi Papua	Jumlah Kampung Iklim	10 Kampung	400.000.000,00	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
2.05.26.17	Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	Jumlah penyebab gas rumah kaca yang teridentifikasi	1 Dokumen	800.000.000,00	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
2.05.27	Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan SDA dan LH	Jumlah SDM bidang LH yang tersertifikasi	12 Orang	650.000.000,00	
		Jumlah PPLHD yang dilatih dan bina	1 Orang		
2.05.27.06	Pembentukan Pos Pengaduan Lingkungan Hidup	Jumlah pos pengaduan LH	1 Unit	150.000.000,00	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
2.05.27.37	Penilaian Dokumen Lingkungan Hidup Kegiatan Wajib Amdal	Jumlah dokumen amdal yang dinilai	50 Dokumen	500.000.000,00	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
2.05.28	Program Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Terfasilitasi kegiatan peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	100 %	500.000.000,00	

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
2.05.28.02	Pembinaan dan Penilaian Kalpataru	Jumlah orang yang mendapat penghargaan	3 Orang	500.000.000,00	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
2.06	Administrasi Kependudukan dan Cakil			3.146.700.000,00	
2.06.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	0 ada/tidak	2.696.700.000,00	
		Cakupan penduduk ber KTP elektronik	78 %		
		Persentase kepemilikan KK elektronik	40 %		
		Persentase kepemilikan akta kelahiran	51 %		
		Persentase pasangan berakte nikah	55 %		
2.06.15.36	Penambahan dan Pengembangan Program Pendataan Penduduk Orang Asli Papua	Jumlah dokumen pelaporan yang dihasilkan	5 Dokumen	496.700.000,00	Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.06.15.37	Pelaksanaan Pembinaan, sosialisasi dan pengawasan penyelenggaraan Pencatatan sipil di wilayah Provinsi	Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan, sosialisasi dan pengawasan	65 Orang	250.000.000,00	Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.06.15.39	Monitoring dan Evaluasi Penyerasian Kebijakan Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pelaporan yang dihasilkan	10 Dokumen	750.000.000,00	Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.06.15.40	Pengembangan sistem informasi Administrasi kependudukan (SIK)	Jumlah perangkat/alat yang dikembangkan	2 Unit	250.000.000,00	Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.06.15.43	Sosialisasi Penerapan Kebijakan Kependudukan	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi penerapan kebijakan kependudukan	65 Orang	250.000.000,00	Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.06.15.51	Pengelolaan Dokumen Register Akta Catatan Sipil di Wilayah Provinsi Papua	Jumlah dokumen register akta catatan sipil yang di kelola	150 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.06.15.54	Temu Teknis Kebijakan Kependudukan	Jumlah aparatur yang mengikuti pertemuan	65 Orang	300.000.000,00	Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Jumlah dokumen pelaporan yang dihasilkan	0 Dokumen		
2.06.15.55	Bimbingan Teknis Administrasi Data Base (ADB) se Provinsi Papua	Jumlah peserta yang mengikuti bimbingan teknis	29 Kabupaten	300.000.000,00	Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.06.16	Program Pembinaan Kependudukan	Meningkatnya Pelayanan bagi masyarakat dalam pengurusan kependudukan	0 %	450.000.000,00	

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
2.06.16.34	Sosialisasi Adminduk bagi masyarakat perbatasan/daerah tertentu	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	65 Orang	300.000.000,00	Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.06.16.37	Pelatihan Administrasi Data Base (ADB) Kependudukan bagi Aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan	15 Orang	150.000.000,00	Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.07	Pemberdayaan Masyarakat Desa			9.623.400.000,00	
2.07.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	100 persen	3.800.000.000,00	
2.07.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang disediakan	1.500 Surat	500.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua
2.07.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	59 Unit	100.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua
2.07.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	40 Jenis	400.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua
2.07.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan	0 Jenis	250.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua
		Jumlah penggandaan	0 Lembar		
		Jumlah Jenis Barang Cetakkan yang Disediakan	0 Jenis		
		Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	12 Bulan		
2.07.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	130 Jenis	200.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua
2.07.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Pelaksanaan penyediaan makan dan minum	0 Kegiatan	350.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua
		Pelaksanaan makan minum tamu dan rapat	0 Kali Tahun		
		Pelaksanaan makan minum saat olah raga (hari Jumat)	0 Kali		
		Tersediannya Makanan dan Minuman	12 Bulan		
		Jumlah orang yang disediakan makan dan minuman	0 Orang		
2.07.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	60 Orang	2.000.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua
2.07.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100 persen	720.000.000,00	
2.07.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan perlengkapan	12 Unit	100.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua
2.07.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	6 Unit	150.000.000,00	Dinas Pemberdayaan

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
		belanja sewa	0 Tahun		Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua
2.07.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	0 Unit	300.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua
		Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	23 Unit		
		sewa kendaraan	0 Bulan		
2.07.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	76 Unit	170.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua
2.07.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	100 persen	150.000.000,00	
2.07.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	180 Stel	150.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua
2.07.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	100 persen	400.000.000,00	
2.07.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	20 Orang	400.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua
2.07.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya kualitas akuntabilitas OPD	100 persen	425.000.000,00	
2.07.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	1 Laporan	100.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua
		Laporan LAKIP SKPD	0 Dokumen		
2.07.06.02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah pelaporan keuangan semesteran yang diselesaikan tepat waktu	1 Laporan	50.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua
2.07.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	1 Laporan	75.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua
2.07.06.05	Penyusunan Renja, RKA dan Perubahan APBD	Jumlah dokumen	3 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua
2.07.06.12	Penyusunan RENSTRA	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua
2.07.15	Program Pengembangan data/informasi	Prosentase data/informasi yang diperoleh dari keseluruhan data/informasi yang dibutuhkan	0 %	1.450.000.000,00	
		Ketersediaan Data dan Informasi	100 %		
2.07.15.72	Sosialisasi Mekanisme dan Tahapan Pembentukan Kampung Adat di 5 Wilayah Adat	Tersosialisasinya pembentukan kampung adat terhadap masyarakat adat	100 Orang	850.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
2.07.15 .77	Pengolahan, Penginputan dan Publikasi Data DPMK	Tersedianya data DPMK,terlaksananya publikasi data	1 Dokumen	600.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua
2.07.2 1	Program Pemberdayaan Masyarakat Kampung	Cakupan pemberdayaan masyarakat kampung	6 Kegiatan	1.500.000.000,00	
		Cakupan kampung yang diberdayakan dalam bidang TTG	35 persen		
		Jumlah BUMKAM yang kelola Komoditas Unggulan	10 kampung		
		Persentase kampung tertinggal	7.963 persen		
		Persentase kampung mandiri	4 persen		
2.07.21 .02	Alih Teknologi melalui gelar TTG Nasional	Meningkatnya Kemampuan alih TTG melalui Gelar TTG Nasional	100 Orang	1.000.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua
2.07.21 .29	Fasilitasi Pengembangan Teknologi Tepat Guna	Terfasilitasinya pengembangan TTG	5 Unit	500.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua
2.07.2 4	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Prosentasi peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan	0 %	0,00	
		Cakupan penguatan kader Posyandu di kampung	0 %		
2.07.24 .02	Penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) tingkat Provinsi dan Nasional	Meningkatnya partisipasi masyarakat	1.000 Orang	0,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua
2.07.2 5	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Prosentase peningkatan peran Perempuan dalam pembangunan	0 %	1.178.400.000,00	
		Prosentase pengarusutamaan gender dalam pembangunan	100 %		
		Cakupan kelompok Keluarga Pra Sejahtera I binaan yang naik menjadi Keluarga Sejahtera I	80 %		
2.07.25 .03	Rapat Konsultasi Tim Penggerak PKK Tingkat Provinsi dan Nasional	Terlaksananya Rapat Konsultasi	500 Orang	589.200.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua
2.07.25 .04	Kunjungan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Papua	Terlaksananya Kunjungan Kerja	29 Kabupaten	589.200.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua
2.09	Perhubungan			388.044.275.000,00	
2.09.0 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	100 persen	6.927.875.000,00	
2.09.01 .01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang disediakan	120 Surat	100.000.000,00	Dinas Perhubungan
2.09.01 .02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Jasa Layanan berlangganan Listrik,Air,Telepon, Transponder	66 Layanan	900.000.000,00	Dinas Perhubungan
2.09.01 .03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	60 Unit	300.000.000,00	Dinas Perhubungan
2.09.01 .06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Unit Mobil Dinas/Operasional yang terpelihara dan Terfasilitasi Perijinannya	60 Unit	500.000.000,00	Dinas Perhubungan

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
2.09.01 .08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Luas Gedung dan Halaman yang disediakan jasa kebersihan	1.500 M2	450.000.000,00	Dinas Perhubungan
		Jumlah tenaga kebersihan dan Fasilitas Pendukung kebersihan kantor	10 Orang		
		Jumlah Jenis Bahan dan Alat Kebersihan	300 Jenis		
2.09.01 .10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	45 Jenis	300.000.000,00	Dinas Perhubungan
2.09.01 .11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan	200 Jenis	200.000.000,00	Dinas Perhubungan
		Jumlah penggandaan	15.000 Lembar		
		Jumlah Jenis Barang Cetakkan yang Disediakan	200 Jenis		
		Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	100 Bulan		
2.09.01 .12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen Listrik yang disediakan	150 Buah	150.000.000,00	Dinas Perhubungan
2.09.01 .14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	10 Unit	75.000.000,00	Dinas Perhubungan
2.09.01 .15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	6.120 Jenis	30.000.000,00	Dinas Perhubungan
2.09.01 .16	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah liter bahan bakar untuk kendaraan operasional	46.000 Liter	300.000.000,00	Dinas Perhubungan
		jumlah mobilitas termasuk tenaga angkat dan turun beras ke kantor	12 Kali		
2.09.01 .17	Penyediaan makanan dan minuman	Pelaksanaan penyediaan makan dan minum	200 Kegiatan	380.000.000,00	Dinas Perhubungan
		Pelaksanaan makan minum tamu dan rapat	500 Kali Tahun		
		Pelaksanaan makan minum saat olah raga (hari Jumat)	84 Kali		
		Tersediannya Makanan dan Minuman	12 Bulan		
		Jumlah orang yang disediakan makan dan minuman	500 Orang		
2.09.01 .18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	79 Orang	2.462.875.000,00	Dinas Perhubungan
2.09.01 .19	Penyediaan Jasa Pengamanan	Pelaksanaan pembayaran insentif bagi tenag operator dan penjaga X-Ray VIP Room Bandara Sentani	a48 Orang Bulan	780.000.000,00	Dinas Perhubungan
		Pelaksanaan pembayaran honor bagi satpam	288 Orang Bulan		
		Pelaksanaan uang makan satpam	288 Orang Bulan		
		Jumlah tenaga pengamanan	24 Orang		
2.09.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	0 persen	21.932.000.000,00	
2.09.02 .03	Pembangunan gedung kantor	Luas bangunan yang dibangun	0 M2	17.500.000.000,00	Dinas Perhubungan
		Tersediannya desain perencanaan bangunan	0 Dokumen		
2.09.02 .07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan	32 Unit	500.000.000,00	Dinas Perhubungan
2.09.02 .09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan perlengkapan	53 Unit	482.000.000,00	Dinas Perhubungan
2.09.02 .10	Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur yang diadakan	40 Unit	500.000.000,00	Dinas Perhubungan
2.09.02 .22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	4 Unit	300.000.000,00	Dinas Perhubungan

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
		belanja sewa	25 Tahun		
2.09.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	6 Unit	450.000.000,00	Dinas Perhubungan
		Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	80 Unit		
		sewa kendaraan	1 Bulan		
2.09.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Pelaksanaan pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	6 Kegiatan	200.000.000,00	Dinas Perhubungan
		Jumlah Perlengkapan Gedung kantor yang terpelihara	45 Unit		
		Tersediannya biaya pemeliharaan gedung kantor	40 Bulan		
2.09.02.46	Sewa gedung	Jumlah gedung kantor yang disewa	2 Unit Tahun	2.000.000.000,00	Dinas Perhubungan
		Sewa rumah jabatan	1 Unit Tahun		
2.09.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	0 persen	1.220.000.000,00	
2.09.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	185 Stell	650.000.000,00	Dinas Perhubungan
2.09.03.03	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan	70 Stell	400.000.000,00	Dinas Perhubungan
2.09.03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus yang diadakan	25 Stell	170.000.000,00	Dinas Perhubungan
2.09.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	0 persen	1.125.000.000,00	
2.09.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	5 Orang	250.000.000,00	Dinas Perhubungan
2.09.05.02	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	200 Orang	250.000.000,00	Dinas Perhubungan
2.09.05.04	Pendidikan dan Pelatihan Non Formal	Jumlah aparatur yang terlatih	25 Orang	625.000.000,00	Dinas Perhubungan
2.09.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya kualitas akuntabilitas OPD	0 persen	3.330.000.000,00	
2.09.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	4 Laporan	200.000.000,00	Dinas Perhubungan
		Laporan LAKIP SKPD	0 Dokumen		
2.09.06.05	Penyusunan Renja, RKA dan Perubahan APBD	Jumlah dokumen	3 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Perhubungan
2.09.06.10	Forum SKPD Provinsi Papua	Jumlah Peserta Forum	200 Orang	3.000.000.000,00	Dinas Perhubungan
2.09.06.12	Penyusunan RENSTRA	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	Dinas Perhubungan
2.09.15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Cakupan terintegrasinya antarmoda angkutan antarwilayah adat	2 wilayah adat	70.900.000.000,00	
2.09.15.01	Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	Tersediannya Document Peren. Sarana dan Prasarana	22 Dokumen	24.500.000.000,00	Dinas Perhubungan
2.09.15.45	Penyusunan UKL/UPL Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B di Kabupaten Keerom	Jumlah dokumen UKL/UPL yang disusun	1 Dokumen	750.000.000,00	Dinas Perhubungan

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
2.09.15 .57	Penyusunan UKL/UPL Pembangunan Pelabuhan Perintis Tagemon di Kabupaten Mappi	Jumlah dokumen UKL/UPL yang disusun	1 Dokumen	750.000.000,00	Dinas Perhubungan
2.09.15 .143	Penyusunan Sistem Informasi Infrastruktur Perhubungan	Jumlah sistem informasi yang disusun	1 Aplikasi	1.000.000.000,00	Dinas Perhubungan
2.09.15 .146	Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan di Kabupaten Kepulauan Yapen	Jumlah dokumen yang disusun	2 Dokumen	2.000.000.000,00	Dinas Perhubungan
2.09.15 .148	Studi Pemilihan Lokasi dan DED Dermaga Danau di Kabupaten Paniai	Jumlah dokumen yang disusun	2 Dokumen	2.000.000.000,00	Dinas Perhubungan
2.09.15 .150	Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan di Kabupaten Waropen	Jumlah dokumen yang disusun	1 Dokumen	2.000.000.000,00	Dinas Perhubungan
2.09.15 .153	Master Plan Pengembangan Transportasi Sungai Nawa Kabupaten Mamberamo Raya	Jumlah dokumen yang disusun	2 Dokumen	3.000.000.000,00	Dinas Perhubungan
2.09.15 .156	Penyusunan Amdal Pelabuhan Teba dan Trimoris di Kabupaten Mamberamo Raya	Jumlah dokumen amdal yang disusun	2 Dokumen	3.000.000.000,00	Dinas Perhubungan
2.09.15 .158	Penyusunan UKL/UPL	Jumlah Dokumen	3 Dokumen	2.100.000.000,00	Dinas Perhubungan
2.09.15 .160	Penyusunan RTT Sisi Udara dan Sisi Darat Pembangunan Bandar Udara	Jumlah Dokumen	4 Dokumen	7.000.000.000,00	Dinas Perhubungan
2.09.15 .163	Review Tataran Transportasi Wilayah (Tatrawil) Provinsi Papua	Jumlah dokumen yang tersusun	1 Dokumen	1.200.000.000,00	Dinas Perhubungan
2.09.15 .164	Penyusunan Peta Sebaran Fasilitas Perhubungan di Provinsi Papua	Jumlah dokumen yang dihasilkan	3 Dokumen	1.500.000.000,00	Dinas Perhubungan
2.09.15 .168	Penyusunan RTT Lapter Amuma di Kabupaten Yahukimo	Jumlah dokumen yang disusun	1 Dokumen	1.500.000.000,00	Dinas Perhubungan
2.09.15 .169	Penyusunan RTT Lapter Sella di Kabupaten Yahukimo	Jumlah dokumen yang disusun	1 Dokumen	1.500.000.000,00	Dinas Perhubungan
2.09.15 .171	Penyusunan UKL/UPL Pembangunan Pelabuhan Rakyat Samber di Kabupaten Biak Numfor	Jumlah dokumen UKL/UPL yang disusun	1 Dokumen	750.000.000,00	Dinas Perhubungan
2.09.15 .172	Penyusunan UKL/UPL Pembangunan Pelabuhan Rakyat Sanggei di Kabupaten Waropen	Jumlah dokumen UKL/UPL yang disusun	1 Dokumen	750.000.000,00	Dinas Perhubungan
2.09.15 .173	Penyusunan UKL/UPL Pembangunan Pelabuhan Rakyat Windesi di Kabupaten Kepulauan Yapen	Jumlah dokumen UKL/UPL yang disusun	1 Dokumen	750.000.000,00	Dinas Perhubungan
2.09.15 .176	Penyusunan Amdal Pelabuhan Pepera di Kabupaten Asmat	Jumlah dokumen amdal yang disusun	1 Dokumen	800.000.000,00	Dinas Perhubungan
2.09.15 .177	Penyusunan Amdal Pelabuhan Prabu Alaska di Kabupaten Boven Digoel	Jumlah dokumen amdal yang disusun	1 Dokumen	800.000.000,00	Dinas Perhubungan
2.09.15 .179	Penyusunan UKL/UPL Pembangunan Bandara Botawa di Kabupaten Waropen	Jumlah dokumen UKL/UPL yang disusun	1 Dokumen	750.000.000,00	Dinas Perhubungan
2.09.15 .180	Penyusunan RTT Sisi Udara dan Sisi Darat Pembangunan Lapangan Terbang Kampung Bella di Kabupaten Mimika	Jumlah dokumen RTT sisi udara dan sisi darat yang disusun	2 Dokumen	2.500.000.000,00	Dinas Perhubungan
2.09.15 .181	Penyusunan RTT Sisi Udara dan Sisi Darat Pembangunan Lapangan Terbang Kampung Hoya di Kabupaten Mimika	Jumlah dokumen RTT sisi udara dan sisi darat yang disusun	2 Dokumen	2.500.000.000,00	Dinas Perhubungan

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
2.09.15.182	Penyusunan Master Plan dan RTT Sisi Udara dan Sisi Darat Pembangunan Bandar Udara Dagai di Kabupaten Puncak Jaya	Jumlah dokumen RTT sisi udara dan sisi darat yang disusun	2 Dokumen	2.500.000.000,00	Dinas Perhubungan
2.09.15.183	Penyusunan Master Plan dan RTT Sisi Udara dan Sisi Darat Pembangunan Bandar Udara Torere di Kabupaten Puncak Jaya	Jumlah dokumen RTT sisi udara dan sisi darat yang disusun	2 Dokumen	2.500.000.000,00	Dinas Perhubungan
2.09.15.184	Penyusunan UKL/UPL Pembangunan Bandara Saminage di Kabupaten Yahukimo	Jumlah dokumen UKL/UPL yang disusun	2 Dokumen	2.500.000.000,00	Dinas Perhubungan
2.09.16	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Cakupan pelayanan moda angkutan	30 persen	3.800.000.000,00	
		Tingkat kecelakaan kendaraan bermotor	140 jiwa		
2.09.16.05	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan LLAJ	Banyaknya alat pengujian kendaraan bermotor statis dan mobile	80 Bh	1.500.000.000,00	Dinas Perhubungan
		Banyaknya traflight light dan warning light	80 Unit Tahun		
2.09.16.08	Rehabilitasi/Pemeliharaan Lampu APILL	Jumlah lampu APILL yang direhabilitasi/dipelihara	2 Unit	2.300.000.000,00	Dinas Perhubungan
2.09.18	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Tersedianya sarana dan prasarana perhubungan	0 Unit	258.450.000.000,00	
		Jumlah bandara pengumpul dengan skala pelayanan primer	1 unit		
		Jumlah dermaga penyeberangan Kelas II	1 unit		
		Jumlah pelabuhan strategis provinsi	1 unit		
		Jumlah terminal Tipe B yang fungsional	2 unit		
		Pertumbuhan arus penumpang angkutan udara	6 persen		
		Pertumbuhan arus penumpang angkutan laut	4 persen		
2.09.18.05	Pembangunan Pelabuhan Laut Waren di Kabupaten Waropen	Jumlah Tiang Pancang	160 Unit	27.000.000.000,00	Dinas Perhubungan
		Jumlah Titik Pemancangan	72 Titik		
		Panjang Trestle	0 M1		
		Panjang Dermaga	160 M1		
		Panjang Dermaga Plengsengan	0 M1		
		Panjang Causeway	0 M1		
		Jumlah Breasting Dolphin	0 Unit		
		Jumlah Mooring Dolphin	0 Unit		
		Panjang Catwalk	0 M1		
2.09.18.12	Pembangunan Pelabuhan Perintis Pulau Mambor di Kabupaten Nabire	Luas Lantai Dermaga yang terbangun	360 M2	10.500.000.000,00	Dinas Perhubungan
		Panjang Trestle	0 M1		
		Jumlah tiang pancang yang terpasang	18 Titik		
2.09.18.13	Pembangunan Pelabuhan Perintis Bomakia di Kabupaten Boven	Jumlah tiang pancang yang terpasang	38 Titik	17.500.000.000,00	Dinas Perhubungan
2.09.18.16	Pembangunan Pelabuhan Perintis Ampimoi di Kabupaten Kepulauan Yapen	Jumlah tiang pancang	60 Unit	15.000.000.000,00	Dinas Perhubungan
		Jumlah Titik Pemancangan	60 Titik		
		Panjang Trestle	200 M1		
2.09.18.31	Pembangunan Bandar Udara Mamit di Kabupaten Tolikara	Panjang Runway	600 M1	10.000.000.000,00	Dinas Perhubungan

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
2.09.18.32	Pembangunan Bandar Udara Fawi di Kabupaten Puncak Jaya	Jumlah bandar udara yang dibangun	1 Unit	10.250.000.000,00	Dinas Perhubungan
		Panjang Runway	600 M1		
2.09.18.41	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B di Kabupaten Nabire	Luas Bangunan Utama Terminal	360 M2	20.000.000.000,00	Dinas Perhubungan
2.09.18.42	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B di Kabupaten Keerom	Panjang Pondasi	400 M1	5.500.000.000,00	Dinas Perhubungan
2.09.18.59	Pembangunan Dermaga Sungai Sipu-Sipu Distrik Jita di Kabupaten Mimika	Luas Gedung Terminal	100 M2	15.000.000.000,00	Dinas Perhubungan
		Luas Lapangan Penumpukan	50 M2		
2.09.18.65	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B di Kabupaten Jayapura	Panjang Pondasi	200 M1	10.000.000.000,00	Dinas Perhubungan
2.09.18.96	Pembangunan Bandar Udara Saminage di Kabupaten Yahukimo	Panjang Runway	600 M1	10.000.000.000,00	Dinas Perhubungan
		Volume Timbunan Tanah	300 M3		
2.09.18.122	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B di Kabupaten Jayawijaya	Panjang Pondasi	400 M1	10.000.000.000,00	Dinas Perhubungan
		Panjang Pagar	400 M1		
		Luas Gedung Terminal	875 M2		
2.09.18.124	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B di Kabupaten Merauke	Panjang Pagar	500 M1	10.000.000.000,00	Dinas Perhubungan
2.09.18.127	Pembangunan Dermaga Danau 4 (empat) Lokasi di Danau Sentani Kabupaten Jayapura	Jumlah dermaga danau yang dibangun	2 Unit	7.000.000.000,00	Dinas Perhubungan
		Jumlah Tiang Pancang	60 Unit		
		Jumlah Titik Pemancangan	60 Titik		
		Panjang Trestle	600 M1		
		Panjang Dermaga	532 M1		
2.09.18.152	Pembangunan Bandar Udara Kobakma di Kabupaten Mamberamo Tengah	Panjang Runway	600 M1	10.000.000.000,00	Dinas Perhubungan
2.09.18.160	Pengadaan Alat Pemeliharaan dan Keselamatan Lapter-Lapter di Provinsi Papua	Jumlah alat pemeliharaan dan keselamatan lapter yang diadakan	2 Unit	700.000.000,00	Dinas Perhubungan
2.09.18.166	Pembangunan bandar Udara Kuyawage di Kabupaten Lanny Jaya	Panjang Runway	600 M1	10.000.000.000,00	Dinas Perhubungan
2.09.18.179	Pembangunan Pelabuhan Laut Depapre	Panjang sheet pile	200 M1	25.000.000.000,00	Dinas Perhubungan
2.09.18.184	Pembangunan Bandar Udara Kasonaweja Baru (Weri Bilasi) di Kabupaten Mamberamo Raya	Panjang Runway	600 M1	25.000.000.000,00	Dinas Perhubungan
		Luas Apron	200 M2		
		Luas land clearing	1.200 M2		
		Volume Timbunan Tanah	400 M3		
2.09.18.209	Pembangunan Dermaga Danau Bunauwo di Kabupaten Dogiyai	Luas dermaga yang dibangun	250 M2	10.000.000.000,00	Dinas Perhubungan
2.09.19	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Cakupan ketersediaan fasilitas Keselamatan Jalan	70 persen	19.825.000.000,00	
2.09.19.01	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	Jumlah rambu lalu lintas yang diadakan/dipasang	1.500 Unit	3.000.000.000,00	Dinas Perhubungan
2.09.19.02	Pengadaan marka jalan	Jumlah volume pengecatan marka	500 M`	4.000.000.000,00	Dinas Perhubungan
2.09.19.05	Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Jalan	Jumlah pengadaan dan pemasangan fasilitas keselamatan jalan	20 M`	500.000.000,00	Dinas Perhubungan

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
2.09.19.07	Pengadaan dan Pemasangan Repiter Alat Komunikasi HT	Jumlah alat komunikasi yang diadakan	5 Unit	400.000.000,00	Dinas Perhubungan
2.09.19.10	Pengadaan Kendaraan Roda 4 (empat) untuk Pengawasan LLAJ	Jumlah kendaraan roda 4 untuk pengawasan LLAJ	7 Unit	2.915.000.000,00	Dinas Perhubungan
2.09.19.16	Pemasangan Guardrail	Panjang Guardrail yang dipasang	1.000 Meter	7.000.000.000,00	Dinas Perhubungan
2.09.19.17	Survey Data Kendaraan dan Fasilitas Keselamatan Jalan di Provinsi Papua	Jumlah dokumen yang disusun	1 Dokumen	700.000.000,00	Dinas Perhubungan
2.09.19.18	Pengadaan Kendaraan Roda 2 Patroli	Jumlah Kendaraan Roda 2 yang diadakan	15 Unit	1.310.000.000,00	Dinas Perhubungan
2.09.20	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Jumlah balai/alat pengujian kendaraan bermotor yang beroperasi	1 Unit	234.400.000,00	
		Jumlah kendaraan bermotor yang dilakukan uji petik	130 Unit		
2.09.20.04	Penyusunan PEP RAD-GRK dan Inventarisasi Emisi GRK sektor Transportasi	Jumlah Dokumen PEP	1 Dokumen	234.400.000,00	Dinas Perhubungan
2.09.22	Program Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur Perhubungan	Terlaksananya pengendalian pelaksanaan kegiatan infrastruktur perhubungan	100 %	300.000.000,00	
2.09.22.01	Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur Perhubungan	Jumlah laporan pengendalian yang disusun	1 Laporan	300.000.000,00	Dinas Perhubungan
2.10	Komunikasi dan Informatika			46.343.100.000,00	
2.10.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	85 persen	4.767.410.000,00	
2.10.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang disediakan	1.320 Surat	129.043.200,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.10.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Jasa Layanan berlangganan Listrik,Air,Telepon, Transponder	12 Layanan	3.148.666.445,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.10.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Unit Mobil Dinas/Operasional yang terpelihara dan Terfasilitasi Perijinannya	21 Unit	16.500.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.10.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Luas Gedung dan Halaman yang disediakan jasa kebersihan	0 M2	250.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Jumlah tenaga kebersihan dan Fasilitas Pendukung kebersihan kantor	4 Orang		
		Jumlah Jenis Bahan dan Alat Kebersihan	50 Jenis		
2.10.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	100 Jenis	103.200.355,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.10.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan	5 Jenis	22.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Jumlah penggandaan	1.000 Lembar		
		Jumlah Jenis Barang Cetak yang Disediakan	0 Jenis		
		Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	0 Bulan		
2.10.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Pelaksanaan penyediaan makan dan minum	0 Kegiatan	150.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Pelaksanaan makan minum tamu dan rapat	0 Kali Tahun		
		Pelaksanaan makan minum saat olah raga (hari Jumat)	0 Kali		
		Tersediannya Makanan dan Minuman	12 Bulan		
		Jumlah orang yang disediakan makan dan minuman	0 Orang		

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
2.10.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	15 Orang	750.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.10.01.19	Penyediaan Jasa Pengamanan	Pelaksanaan pembayaran insentif bagi tenag operator dan penjaga X-Ray VIP Room Bandara Sentani	a0 Orang Bulan	198.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Pelaksanaan pembayaran honor bagi satpam	6 Orang Bulan		
		Pelaksanaan uang makan satpam	0 Orang Bulan		
		Jumlah tenaga pengamanan	6 Orang		
2.10.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	80 persen	3.825.000.000,00	
2.10.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan yang diadakan	1 Unit	600.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Jumlah kendaraan roda 2	1 Unit		
2.10.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan perlengkapan	10 Unit	250.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.10.02.10	Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur yang diadakan	5 Unit	250.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.10.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 Unit	750.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
		belanja sewa	0 Tahun		
2.10.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	15 Unit	75.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	0 Unit		
		sewa kendaraan	0 Bulan		
2.10.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	20 Unit	400.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.10.02.30	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Luas bangunan yang direhab	500 M2	1.500.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.10.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	80 persen	500.000.000,00	
2.10.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	100 Stell	500.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.10.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	0 persen	800.000.000,00	
2.10.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	3 Orang	400.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.10.05.04	Pendidikan dan Pelatihan Non Formal	Jumlah aparatur yang terlatih	3 Orang	400.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.10.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya kualitas akuntabilitas OPD	100 persen	200.000.000,00	
2.10.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	8 Laporan	50.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Laporan LAKIP SKPD	0 Dokumen		
2.10.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	5 Laporan	50.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.10.06.05	Penyusunan Renja, RKA dan Perubahan APBD	Jumlah dokumen	8 Dokumen	50.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.10.06.13	Penyusunan SOP	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.10.15		Persentase penduduk yang mengakses internet	1.876 %	7.300.000.000,00	

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
	Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	Cakupan pemenuhan kebutuhan akses internet dalam pelaksanaan PON	3.200 mbps		
		Peningkatan kerjasama media dan publikasi pembangunan daerah	65 %		
		Jumlah media cetak nasional yang mempublikasi hasil pembangunan Papua	8 Tahun		
2.10.15.08	Pengembangan fasilitas multi media/display	Jumlah videotrone yang diadakan	1 Unit	2.000.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Jumlah peralatan multi media yang diadakan	1 Set		
2.10.15.86	Pengamanan, Pengendalian dan Pembuatan Sistem Pelaporan Operasionalisasi JARKOMDA	Jumlah Pengamanan, Pengendalian Operasional dan Layanan Pelaporan Penggunaan Trafic JARKOMDA	1 Kegiatan	550.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Jumlah unit PC	550 Unit		
2.10.15.89	Pengembangan Aplikasi e-Government	Jumlah Sistem Aplikasi dan pengembangan Sistem Aplikasi E-Government	8 Aplikasi	550.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.10.15.90	Pengembangan Sistem Website Pemerintah Provinsi Papua	Jumlah Modul/Fitur dan Lisensi Website Pemprov Papua (www.papua.go.id)	0 Layanan	550.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Jumlah website/content	5 Website		
2.10.15.102	Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi Melalui E Government Terintegrasi	Pembangunan / Pengembangan / Tersosialisasinya / Launcing / Bimtek / Workshop Sistem Aplikasi Elektronik Pemerintah Provinsi Papua	0 Kegiatan	3.000.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Jumlah kegiatan pencegahan dan Pemberantasan Kourups Terintegrasi (PPKT) diPemprov Papua	5 Kegiatan		
2.10.15.103	Pengelolaan Informasi Pemerintah melalui Media Online	Jumlah jenis informasi yang dikelola/dimuktahirkan	5 Jenis	650.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.10.17	Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	Persentase SDM Aparatur yang memahami IT	60 %	350.000.000,00	
		Jumlah Kelompok Masyarakat yang memahami IT	5 Kelompok		
		Cakupan SDM Kominfo yang kompeten di bidang teknologi informasi	70 persen		
2.10.17.06	Pelatihan bagi kelompok informasi masyarakat	Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang produktif	5 Kelompok	350.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.10.18	Program kerjasama informasi dengan mas media	Tingkat pemanfaatan informasi & komunikasi	0 %	5.900.000.000,00	
		Jumlah kerjasama media dalam mempublikasikan hasil hasil pembangunan	50 Kegiatan n		
		Cakupan Layanan PPID	5 %		
2.10.18.09	Pelayanan informasi dan komunikasi melalui media tradisional	Jumlah pembinaan media tradisional pertunjukkan rakyat	0 Kegiatan	2.000.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Jumlah media tradisional yang digunakan	5 Media		
2.10.18.38	Layanan Informasi PPID	Tingkat layanan informasi PPID	70 %	750.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Jumlah layanan informasi yang dilakukan	0 Layanan		
2.10.18.46	Forum Media Publik	Jumlah Forum Media Publik yang dilaksanakan	1 Kegiatan	950.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Jumlah peserta	100 Orang		
2.10.18.48	Layanan Opini Publik Pemerintah	Jumlah Opini Publik yang terpantau/terlayani	5 Layanan	350.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Kerjasama Media Penyiaran Publik	Jumlah media penyiaran publik	2 Media	850.000.000,00	

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
2.10.18.50		Jumlah peserta	2 Orang		Dinas Komunikasi dan Informatika
2.10.18.55	Fasilitasi Komisi Informasi Provinsi Papua (KIP)	Jumlah anggota KIP	5 Orang	1.000.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.10.20	Penyiapan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Persentase jaringan teknologi informasi antar OPD yang terintegrasi	20 persen	22.700.690.000,00	
		Cakupan wilayah yang terlayani jaringan telekomunikasi	30 persen		
2.10.20.02	Jasa Berlangganan Fasilitas Komunikasi Data Antar SKPD Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Dan Masyarakat	Jumlah SKPD yang terlayani (intranet & internet) secara online	33 SKPD	7.040.690.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Jumlah masyarakat yang terlayani (internet) secara online	250 Orang		
		Jumlah Layanan dan Lokasi Jasa Berlangganna Internet untuk Pemerintah dan Masyarakat	132 Lokasi		
2.10.20.05	Pengembangan/pembangunan JARKOMDA di lingkungan pemerintah	Tingkat konektivitas jaringan komunikasi data di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua	0 %	660.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Jumlah Server yang dikelola dan SKPD/Fasilitas Lainnya pengguna JARKOMDA Pemprov Papua	110 Unit		
2.10.20.10	Pembangunan Command Center PON XX	Jumlah Command Center di Pemprov Papua untuk mendukung PON XX	1 Unit	1.000.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.10.20.12	Pembangunan sistem aplikasi penyelenggaraan PON XX	Jumlah aplikasi PON yang dibangun	5 Aplikasi	12.500.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.10.20.17	Pengadaan Media Center Utama PON XX	Jumlah Pengadaan Media Center untuk mendukung penyelenggaraan PON XX	1 Lokasi	1.500.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			34.431.400.000,00	
2.11.16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Persentase Pertumbuhan Jumlah Wirausaha Baru	5 %	8.884.800.000,00	
		Jumlah UMKM yang mandiri dalam kompetisi usaha	30 Unit		
		Cakupan UMKM lokal yang bermitra dalam pelaksanaan PON	0 Unit		
		Persentase peningkatan pengembangan UMKM keolahragaan	2 %		
		Cakupan usaha mikro dan kecil yang mandiri dikelola pengusaha muda	9 Unit		
2.11.16.03	Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Terlaksananya Fasilitasi peningkatan kemitraan usa	0 Kegiatan	500.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
		Terfasilitasinya Peningkatan Kemitraan bagi Usaha kecil	60 Unit		
2.11.16.13	Pengembangan UMKM Pengelola sumber daya Lokal	Jumlah UKM pengelola sumber daya lokal yang akan dikembangkan	100 UMKM	434.800.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
2.11.16.30	Pelatihan Kewirausahaan bagi Usaha Kecil (DAK Non Fisik)	Jumlah unit usaha kecil peserta pelatihan kewirausahaan	0 Unit	1.550.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
		Jumlah pengusaha kecil peserta pelatihan kewirausahaan	250 Orang		

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
2.11.16.31	Pelatihan Kewirausahaan Berbasis Potensi Lokal Bagi UMKM	Jumlah Peserta Pelatihan	180 Orang	2.400.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
2.11.16.37	Penguatan Usaha Ekonomi Produktif UKM Melalui Sarana Produksi Berbasis Komoditi Unggulan Daerah	Jumlah kelompok UMKM yang diberi Penguatan	30 Kelompok	3.000.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
2.11.16.38	Pelatihan Manajemen bagi Usaha Kecil	Jumlah peserta pelatihan	200 Orang	1.000.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
2.11.17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Persentase Peningkatan Jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)	0 %	14.525.800.000,00	
		Tingkat Partisipasi dalam pameran gelar produk KUMKM dalam negeri	8 Kali		
		Cakupan fasilitasi pemasaran produk UMKM unggulan daerah	10 Kelompok		
		Penyaluran kredit UMKM dari sektor perbankan	13 Rupiah		
2.11.17.06	Pengembangan sarana pemasaran produk Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah sarana pemasaran	1 Unit	4.500.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
2.11.17.09	Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah peserta pameran	30 Orang	1.000.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
2.11.17.10	Pengembangan Kebijakan dan program peningkatan ekonomi lokal	Jumlah Peserta Pengembangan Kebijakan dan Program Peningkatan Ekonomi	3 Orang	6.000.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
2.11.17.23	Seleksi Tenaga Pendamping Bagi Koperasi dan UMKM (DAK Non Fisik)	Jumlah tenaga pendamping bagi koperasi dan UKM yang diseleksi	50 Orang	500.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
2.11.17.25	Pendataan UKM	Jumlah UKM yang didata	1.000 Unit	525.800.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
2.11.17.28	Partisipasi Pameran Gelar Produk KUKM di SMESCO	Jumlah peserta Pameran Gelar Produk KUKM di SMESCO	10 Orang	2.000.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
2.11.18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase Koperasi Sehat (Koperasi Sehat Yang Melaksanakan RAT)	0 %	11.020.800.000,00	
		jumlah kelompok pra koperasi yang akan di fasilitasi menjadi koperasi	0 Unit		
		Persentase koperasi aktif dan berkembang	65 %		
2.11.18.06	Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi	Jumlah Usaha Koperasi yang ditingkatkan	30 Unit	958.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
2.11.18.09	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah laporan monev	29 Dokumen	740.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
2.11.18.20	Identifikasi Keragaman Koperasi	Jumlah Koperasi yang diidentifikasi	75 Unit	500.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
2.11.18.43	Identifikasi kebutuhan pelatihan dan monev pasca pelatihan	Jumlah laporan data identifikasi kebutuhan pelatihan bagi koperasi dan monev pasca pelatihan	10 Unit	788.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
2.11.18.48	Pelatihan Perkoperasian bagi Pengurus / Pengelola Koperasi (DAK Non Fisik)	Jumlah pengurus/pengelola koperasi peserta pelatihan perkoperasian	50 Orang	500.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
2.11.18.49	Pelatihan Perkoperasian dan Kewirausahaan bagi Pendamping (DAK Non Fisik)	Jumlah pendamping peserta pelatihan perkoperasian dan kewirausahaan	50 Orang	1.800.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
2.11.18.60	Pengawasan dan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Jumlah KSP/USP koperasi yang diawasi dan dinilai kesehatan	75 Orang	734.800.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
2.11.18.65	Monitoring dan Pengawasan Koperasi Aktif	Jumlah Koperasi aktif yang diawasi	145 Unit	750.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
2.11.18.67	Bimtek tata cara pendirian koperasi	Jumlah akta pendirian koperasi	120 Unit	1.500.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
2.11.18.69	Pengawasan dan Pemingkatan koperasi berprestasi	Tersedianya data peringkat koperasi di papua	30 Unit	600.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
2.11.18.76	Pendataan Koperasi	Tersedianya data koperasi	500 Dokumen	650.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
2.11.18.78	Dukungan Fasilitasi Permodalan Usaha bagi Koperasi dan UKM	Jumlah Koperasi dan UKM yang mendapatkan Dukungan Modal	100 Lembaga	1.500.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
2.12	Penanaman Modal			10.000.000.000,00	
2.12.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	0 persen	3.583.800.000,00	
2.12.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Jasa Layanan berlangganan Listrik,Air,Telepon, Transponder	12 Layanan	330.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.12.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Unit Mobil DI dinas/Operasional yang terpelihara dan Terfasilitasi Perijinannya	21 Unit	28.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.12.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Luas Gedung dan Halaman yang disediakan jasa kebersihan	21.792 M2	462.400.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Jumlah tenaga kebersihan dan Fasilitas Pendukung kebersihan kantor	7 Orang		
		Jumlah Jenis Bahan dan Alat Kebersihan	0 Jenis		
2.12.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	50 Jenis	350.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.12.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan	0 Jenis	150.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Jumlah penggandaan	0 Lembar		
		Jumlah Jenis Barang Cetakkan yang Disediakan	25 Jenis		
		Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	0 Bulan		
2.12.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen Listrik yang disediakan	20 Buah	20.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
2.12.01 .15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12 Jenis	21.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.12.01 .16	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah liter bahan bakar untuk kendaraan operasional	0 Liter	10.200.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		jumlah mobilitas termasuk tenaga angkat dan turun beras ke kantor	1 Kali		
2.12.01 .17	Penyediaan makanan dan minuman	Pelaksanaan penyediaan makan dan minum	0 Kegiatan	70.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Pelaksanaan makan minum tamu dan rapat	50 Kali Tahun		
		Pelaksanaan makan minum saat olah raga (hari Jumat)	0 Kali		
		Tersediannya Makanan dan Minuman	0 Bulan		
		Jumlah orang yang disediakan makan dan minuman	0 Orang		
2.12.01 .18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	60 Orang	1.531.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.12.01 .19	Penyediaan Jasa Pengamanan	Pelaksanaan pembayaran insentif bagi tenag operator dan penjaga X-Ray VIP Room Bandara Sentani	a0 Orang Bulan	611.200.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Pelaksanaan pembayaran honor bagi satpam	10 Orang Bulan		
		Pelaksanaan uang makan satpam	48 Orang Bulan		
		Jumlah tenaga pengamanan	4 Orang		
2.12.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	0 persen	915.000.000,00	
2.12.02 .07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan	25 Unit	100.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.12.02 .09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan perlengkapan	25 Unit	100.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.12.02 .10	Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur yang diadakan	40 Unit	100.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.12.02 .22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 Unit	65.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		belanja sewa	0 Tahun		
2.12.02 .24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	0 Unit	350.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
		Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	27 Unit		

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
		sewa kendaraan	0 Bulan		Terpadu Satu Pintu
2.12.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Pelaksanaan pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	0 Kegiatan	25.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Jumlah Perlengkapan Gedung kantor yang terpelihara	10 Unit		
		Tersediannya biaya pemeliharaan gedung kantor	0 Bulan		
2.12.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	60 Unit	25.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.12.02.46	Sewa gedung	Jumlah gedung kantor yang disewa	0 Unit Tahun	150.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Sewa rumah jabatan	2 Unit Tahun		
2.12.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	0 persen	81.200.000,00	
2.12.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	55 Stell	73.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.12.03.03	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan	4 Stell	8.200.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.12.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	0 persen	350.000.000,00	
2.12.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	20 Orang	350.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.12.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya kualitas akuntabilitas OPD	0 persen	70.000.000,00	
2.12.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	5 Laporan	35.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.12.06.05	Penyusunan Renja, RKA dan Perubahan APBD	Jumlah dokumen	5 Dokumen	35.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.12.15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Meningkatnya jumlah perusahaan PMA/PMDN yang menanamkan modalnya di Papua	0 Perusahaan	1.800.000.000,00	
		Tingkat pertumbuhan nilai investasi sektor unggulan	7 persen		
		Persentase UMKM lokal yang bermitra dengan PMA/ PMDN	25 persen		

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
		Frekwensi promosi potensi investasi Papua dalam ajang pameran tingkat nasional/internasional	5 kali		
		Persentase investasi yang direalisasikan dari ajang promosi nasional/internasional	60 persen		
2.12.15.01	Peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antar usaha besar dan Usaha Kecil Menengah	terlaksananya kerjasama strategis antar usaha besa	2	0,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.12.15.02	Pengembangan potensi unggulan daerah	terlaksananya pengembangan potensi unggulan daerah	2	500.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Jumlah wilayah adat yang telah memiliki informasi potensi unggulan daerah	1 Wilayah		
2.12.15.03	Fasilitasi dan koordinasi percepatan pembangunan kawasan produksi daerah tertinggal (P2KPDT)	terlaksananya koordinasi antar lembaga dalam pengen	1	0,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.12.15.05	Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal	Terselenggaranya forum OPD bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu se Papua	1 Kali	300.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.12.15.08	Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Terlaksananya peningkatan pemantauan, pembinan dan	275 Kegiatan	0,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.12.15.09	Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan investasi	terlaksananya peningkatan Kualitas SDM guna pening	10	0,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.12.15.10	Penyelenggaraan pameran investasi	Terlaksananya pameran investasi	10 Kegiatan	1.000.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.12.16	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Proporsi biaya transaksi dalam total investasi	2 persen	250.000.000,00	
2.12.16.03	Penyusunan Cetak Biru (Master Plan) pengembangan penanaman modal	tersedianya Dukumen master plan pengembangan penan	1 Dokumen	0,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.12.16.06	Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal	Tersedianya Dokumen prosedur perijinan dan pening	1 Dokumen	0,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.12.16.07	Kajian Kebijakan penanaman modal	tersedianya data kajian kebijakan penanaman modal	1 Dokumen	250.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.12.18		Lama waktu penerbitan izin investasi	20 hari	1.350.000.000,00	

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
	Program Peningkatan Pelayanan Perizinan Penanaman Modal	Skor indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perijinan	70 Skor		
2.12.18.01	Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Penanaman Modal Melalui PTSP	Jumlah jenis ijin yang diterbitkan PTSP	1.200 Jenis	500.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.12.18.04	Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Perijinan dan Non Perijinan di Bidang Penanaman Modal	Jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	20 Buah	400.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.12.18.05	survey indeks kepuasan masyarakat terhadap perijinan	Jumlah perijinan dan non perijinan yang diterbitkan PTSP sesuai ketentuan/SOP	1.200 Buah	0,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.12.18.06	Penyediaan Informasi Perijinan	Jumlah jenis informasi perijinan di bidang penanaman modal yang tersedia	5 Jenis	200.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.12.18.08	Pendataan Perijinan dan Non Perijinan di Kabupaten/Kota se Papua	Tersedianya data calon pemohon dari perorangan, perusahaan dan koperasi yang belum melakukan proses pendaftaran ijin dan non ijin IUPHHK	1 Dokumen	250.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.12.19	Program Peningkatan Daya Saing Investasi	Pertumbuhan nilai investasi	21 %	200.000.000,00	
2.12.19.04	Penyusunan Regulasi dan Insentif Investasi	Jumlah draf Perda/Pergub tentang penanaman modal	1 Buah	200.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.12.20	Program Peningkatan, Pengawasan, Pengendalian Penanaman Modal	Persentase hasil pemantauan perusahaan investasi yang ditindaklanjuti	75 persen	1.400.000.000,00	
2.12.20.01	Koordinasi Fasilitasi Penyelesaian Hambatan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah permasalahan investasi yang ditindaklanjuti	20 Buah	0,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.12.20.02	Pemantauan Perkembangan Realisasi Perusahaan Penanaman Modal	Jumlah PMA/PMDN yang beroperasi sesuai ketentuan	260 Perusahaan	700.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.12.20.03	Bimbingan Pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal Kepada Masyarakat Dunia Usaha	Jumlah PMA/PMDN yang mengikuti bimbingan	100 Perusahaan	300.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.12.20.04	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman modal	Jumlah sistem informasi yang terbangun	1 Sistem	0,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
2.12.20.05	Temu Usaha dan Dialog Investasi	Terselenggaranya dialog investasi	1 Kali	400.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.13	Kepemudaan dan Olah Raga			237.788.175.151,00	
2.13.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	0 persen	8.202.000.000,00	
2.13.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang disediakan	1.500 Surat	150.000.000,00	Dinas Olah Raga dan Pemuda
2.13.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Jasa Layanan berlangganan Listrik,Air,Telepon, Transponder	3 Layanan	200.000.000,00	Dinas Olah Raga dan Pemuda
2.13.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	25 Unit	250.000.000,00	Dinas Olah Raga dan Pemuda
2.13.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Unit Mobil DIInas/Operasional yang terpelihara dan Terfasilitasi Perijinannya	10 Unit	100.000.000,00	Dinas Olah Raga dan Pemuda
2.13.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Luas Gedung dan Halaman yang disediakan jasa kebersihan	1.000 M2	252.000.000,00	Dinas Olah Raga dan Pemuda
		Jumlah tenaga kebersihan dan Fasilitas Pendukung kebersihan kantor	6 Orang		
		Jumlah Jenis Bahan dan Alat Kebersihan	0 Jenis		
2.13.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	25 Jenis	450.000.000,00	Dinas Olah Raga dan Pemuda
2.13.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan	15 Jenis	250.000.000,00	Dinas Olah Raga dan Pemuda
		Jumlah penggandaan	8.000 Lembar		
		Jumlah Jenis Barang Cetakkan yang Disediakan	0 Jenis		
		Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	0 Bulan		
2.13.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen Listrik yang disediakan	200 Buah	150.000.000,00	Dinas Olah Raga dan Pemuda
2.13.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan Perlengkapan	25 Unit	350.000.000,00	Dinas Olah Raga dan Pemuda
2.13.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	400 Jenis	150.000.000,00	Dinas Olah Raga dan Pemuda
2.13.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Pelaksanaan penyediaan makan dan minum	12 Kegiatan	650.000.000,00	Dinas Olah Raga dan Pemuda
		Pelaksanaan makan minum tamu dan rapat	60 Kali Tahun		
		Pelaksanaan makan minum saat olah raga (hari Jumat)	56 Kali		
		Tersediannya Makanan dan Minuman	0 Bulan		
		Jumlah orang yang disediakan makan dan minuman	48 Orang		
2.13.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	150 Orang	5.000.000.000,00	Dinas Olah Raga dan Pemuda
2.13.01.19	Penyediaan Jasa Pengamanan	Pelaksanaan pembayaran insentif bagi tenag operator dan penjaga X-Ray VIP Room Bandara Sentani	a0 Orang Bulan	250.000.000,00	Dinas Olah Raga dan Pemuda
		Pelaksanaan pembayaran honor bagi satpam	72 Orang Bulan		
		Pelaksanaan uang makan satpam	0 Orang Bulan		

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
		Jumlah tenaga pengamanan	0 Orang		
2.13.0 2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	0 persen	950.000.000,00	
2.13.02 .10	Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur yang diadakan	3 Unit	750.000.000,00	Dinas Olah Raga dan Pemuda
2.13.02 .24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	0 Unit	200.000.000,00	Dinas Olah Raga dan Pemuda
		Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	6 Unit		
		sewa kendaraan	0 Bulan		
2.13.0 3	Program peningkatan disiplin aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	0 persen	232.750.000,00	
2.13.03 .04	Pengadaan pakaian KORPRI	jumlah pakaian KORPRI yang diadakan	133 Stell	133.000.000,00	Dinas Olah Raga dan Pemuda
2.13.03 .05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus yang diadakan	133 Stell	99.750.000,00	Dinas Olah Raga dan Pemuda
2.13.0 5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	0 persen	700.000.000,00	
2.13.05 .01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	8 Orang	300.000.000,00	Dinas Olah Raga dan Pemuda
2.13.05 .03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta bimbingan teknis tentang implementasi peraturan perundang-undangan	133 Orang	200.000.000,00	Dinas Olah Raga dan Pemuda
2.13.05 .04	Pendidikan dan Pelatihan Non Formal	Jumlah aparatur yang terlatih	10 Orang	200.000.000,00	Dinas Olah Raga dan Pemuda
2.13.0 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya kualitas akuntabilitas OPD	0 persen	400.000.000,00	
2.13.06 .01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	1 Laporan	25.000.000,00	Dinas Olah Raga dan Pemuda
		Laporan LAKIP SKPD	0 Dokumen		
2.13.06 .02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah pelaporan keuangan semesteran yang diselesaikan tepat waktu	1 Laporan	25.000.000,00	Dinas Olah Raga dan Pemuda
2.13.06 .03	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jumlah pelaporan prognosis realisasi anggaran yang diselesaikan tepat waktu	2 Laporan	50.000.000,00	Dinas Olah Raga dan Pemuda
2.13.06 .04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	1 Laporan	50.000.000,00	Dinas Olah Raga dan Pemuda
2.13.06 .05	Penyusunan Renja, RKA dan Perubahan APBD	Jumlah dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	Dinas Olah Raga dan Pemuda
2.13.06 .12	Penyusunan RENSTRA	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	Dinas Olah Raga dan Pemuda
2.13.06 .13	Penyusunan SOP	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	Dinas Olah Raga dan Pemuda
2.13.1 6	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Jumlah pemuda yang dilatih dalam kepemimpinan, kepeloporan dan kewirausahaan	250 orang	3.500.000.000,00	
		Jumlah organisasi kepemudaan	55 organisasi		
		Cakupan pengusaha muda asli Papua yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa pemerintah daerah	30 persen		
2.13.16 .01	Pembinaan organisasi kepemudaan	Terbinanya organisasi kepemudaan yang mandiri	50 Organisasi	500.000.000,00	Dinas Olah Raga dan Pemuda

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
2.13.16.02	Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan bagi pemuda	125 Orang	500.000.000,00	Dinas Olah Raga dan Pemuda
2.13.16.03	Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan	Jumlah peserta fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan	100 Orang	0,00	Dinas Olah Raga dan Pemuda
2.13.16.10	Pertukaran Pemuda antar Negara dan Provinsi	Jumlah peserta pertukaran pemuda antar negara dan provinsi	35 Orang	1.750.000.000,00	Dinas Olah Raga dan Pemuda
2.13.16.11	Pembinaan PASKIBRAKA Provinsi dan Nasional	Jumlah peserta pembinaan PASKIBRAKA Provinsi dan Nasional	35 Orang	750.000.000,00	Dinas Olah Raga dan Pemuda
2.13.16.14	Jambore Pemuda Daerah	Jumlah peserta jambore pemuda daerah	2.500 Orang	0,00	Dinas Olah Raga dan Pemuda
2.13.17	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Cakupan pengusaha muda asli Papua yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa pemerintah daerah	30 %	500.000.000,00	
2.13.17.01	Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda Menuju PON XX Tahun 2020 di Papua	Jumlah peserta pelatihan kewirausahaan pemuda Jumlah peserta pelatihan kewirausahaan bagi pemuda	25 Orang Kegiatan 0 Orang Kegiatan	500.000.000,00	Dinas Olah Raga dan Pemuda
2.13.19	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga	Jumlah organisasi olahraga yang dibina Cakupan monitoring atlet berprestasi	50 organisasi 90 persen	1.600.000.000,00	
2.13.19.01	Peningkatan mutu organisasi dan tenaga keolahragaan	Jumlah pengurus organisasi dan tenaga keolahragaan yang mengikuti kegiatan peningkatan mutu	100 Orang Kegiatan	600.000.000,00	Dinas Olah Raga dan Pemuda
2.13.19.05	Pembinaan manajemen organisasi olahraga	Terlaksananya pembinaan manajemen organisasi olahraga	1 Organisasi	500.000.000,00	Dinas Olah Raga dan Pemuda
2.13.19.21	Atlet Monitoring Sistem (AMS)	Jumlah Atlet Monitoring Sistem Jumlah Atlet yang termonitor melalui Aplikasi Atlet Monitoring Sistyem	7.500 Orang 0 Kegiatan	500.000.000,00	Dinas Olah Raga dan Pemuda
2.13.20	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Cakupan atlet yang diseleksi untuk mengikuti berbagai event olahraga nasional maupun internasional	30 orang	18.000.000.000,00	
2.13.20.02	Pelaksanaan identifikasi dan pengembangan olahraga unggulan daerah	Jumlah atlet berbakat dan potensial usia dini yang teridentifikasi dan dikembangkan prestasinya	750 Orang Lokasi	1.500.000.000,00	Dinas Olah Raga dan Pemuda
2.13.20.03	Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat	Jumlah atlet usia dini yang berbakat dan potensial yang mendapatkan pembinaan dan pelatihan di PPLP Papua	150 Orang Hari	10.000.000.000,00	Dinas Olah Raga dan Pemuda
2.13.20.06	Penyelenggaraan kompetisi olahraga	Jumlah peserta dan event kompetisi yang dilaksanakan	2.000 Orang Kegiatan	5.000.000.000,00	Dinas Olah Raga dan Pemuda
2.13.20.09	Pengembangan dan Pemanfaatan IPTEK olahraga sebagai pendorong peningkatan prestasi olahraga	Jumlah peserta pengembangan dan pemanfaatan IPTEK olahraga sebagai Jumlah peserta pengembangan dan pemanfaatan IPTEK Olahraga sebagai pendorong peningkatan prestasi olahraga	250 Orang Kegiatan 0 Orang Kegiatan	500.000.000,00	Dinas Olah Raga dan Pemuda
2.13.20.10	Pengembangan olahraga lanjut usia termasuk penyandang cacat	Jumlah peserta pengembangan olahraga lanjut usia jumlah peserta pengembangan olahraga bagi penyandang cacat	100 Orang Kegiatan 0 Orang Kegiatan	1.000.000.000,00	Dinas Olah Raga dan Pemuda
2.13.21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah gedung olahraga standar internasional yang terbangun Jumlah lapangan olahraga standar internasional yang terbangun Cakupan penyelesaian sarana dan prasarana PON Papua	0 unit 0 unit 0 persen	85.000.000.000,00	

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
		Cakupan venue berstandar internasional	0 persen		
2.13.21.04	Pembangunan sarana dan prasarana olahraga penunjang PON XX Tahun 2020	Jumlah sarana dan prasarana olahraga penunjang PON XX 2020 yang terbangun	4 Lokasi	30.000.000.000,00	Dinas Olah Raga dan Pemuda
2.13.21.07	Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga	Jumlah Venue - Venue PON yang terpelihara	17 Unit	20.000.000.000,00	Dinas Olah Raga dan Pemuda
2.13.21.08	Rehabilitasi dan Renovasi Sarana dan Prasarana olahraga	Terlaksananya rehabilitasi dan renovasi sarana dan prasarana olahraga	10 Unit	30.000.000.000,00	Dinas Olah Raga dan Pemuda
2.13.21.12	Pengadaan Peralatan atlit PPLP, PPLM	Jumah pegadaan peralatan atlet PPLP, PPLM	100 Orang Paket	1.000.000.000,00	Dinas Olah Raga dan Pemuda
2.13.21.13	Pengadaan kelengkapan dan perlengkapan atlit	Jenis kelengkapan dan perlengkapan atlet yang diadakan	100 Orang Paket	1.000.000.000,00	Dinas Olah Raga dan Pemuda
2.13.21.42	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Latihan dan Pertandingan bagi Pelatih dan Atlet Penyandang Cacat	Jumlah peralatan dan perlengkapan latihan dan pertandingan bagi atlet penyandang cacat	20 Orang Paket	3.000.000.000,00	Dinas Olah Raga dan Pemuda
2.13.25	Program Penyelenggaraan Kompetisi/Pekan Olahraga/Kejuaraan OLahraga	Frekwensi penyelenggaraan even olahraga persiapan PON XX yang berjalan sukses	0 kali	10.000.000.000,00	
2.13.25.02	Penyelenggaraan Kompetisi/Pekan Olahraga/Kejuaraan di Wilayah Adat	Jumlah peserta kompetisi/pekan olahraga/kejuaraan di 5 wilayah adat	10.000 Orang Kegiatan	10.000.000.000,00	Dinas Olah Raga dan Pemuda
2.13.27	Program Pembangunan dan Pengembangan sarana dan prasarana olahraga yang berstandar nasional dan Internasional	Jumlah venue PON XX yang berstandar internasional	0 gedung	103.203.425.151,00	
2.13.27.03	Pembangunan Arena Menembak	Terlaksananya pembangunan arena Menembak	1 Lokasi	18.770.647.459,00	Dinas Olah Raga dan Pemuda
2.13.27.09	Pembangunan Lapangan Softball dan Baseball	Terbangunnya Softball dan Baseball sebagai Penunjang Penyelenggaraan PON XX 2020	1 Lokasi	21.932.777.692,00	Dinas Olah Raga dan Pemuda
2.13.27.17	Pembangunan Arena Cabang Olahraga Paralayang	Jumlah Arena Paralayang yang dibangun	1 Unit	15.000.000.000,00	Dinas Olah Raga dan Pemuda
2.13.27.18	Pembangunan Arena Cabang Olahraga Gantole	Jumlah Arena Gantole yang dibangun	1 Unit	7.500.000.000,00	Dinas Olah Raga dan Pemuda
2.13.27.19	Pembangunan Lapangan Rugby	Jumlah Lapangan Rugby yang dibangun	1 Unit	20.000.000.000,00	Dinas Olah Raga dan Pemuda
2.13.27.20	Pembangunan Arena Cabang Olahraga Layar	Jumlah Arena Layar yang dibangun	1 Unit	15.000.000.000,00	Dinas Olah Raga dan Pemuda
2.13.27.21	Pembangunan Arena Selam Laut	Jumlah Arena Selam yang dibangun	1 Unit	5.000.000.000,00	Dinas Olah Raga dan Pemuda
2.13.28	Program mendorong partisipasi dan peran aktif pemuda dalam berbagai bidang pembangunan	Persentase pengarusutamaan pemuda dalam perencanaan pembangunan	35 %	500.000.000,00	
2.13.28.02	Upacara Peringatan Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) dan Hari Sumpah Pemuda Tingkat Provinsi Papua	Jumlah peserta upacara peringatan HAORNAS dan Hari Sumpah Pemuda	10.000 Orang	500.000.000,00	Dinas Olah Raga dan Pemuda
2.13.29	Program Pembinaan Atlit Muda dan OLahraga Prestasi	Persentase atlit muda Pelatda (Pusat Pelatihan Daerah) yang berprestasi nasional	100 persen	5.000.000.000,00	
2.13.29.02	Penyelenggaraan Pekan Olahraga Junior Tingkat Provinsi Papua	Jumkkah peserta Pekan Olahraga Junior Tingkat Provinsi Papua	750 Orang Hari	5.000.000.000,00	Dinas Olah Raga dan Pemuda
2.14	Statistik			550.000.000,00	
		Cakupan ketersediaan data SIPD	0 %	550.000.000,00	

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
2.14.15	Program Pengembangan data/informasi/statistik daerah	Jumlah dokumen analisis kinerja pembangunan daerah yang berkualitas	0 Dokumen		
2.14.15.07	Pembinaan Pengelolaan Statistik	Jumlah jenis data yang dikelola	1 Jenis	550.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.15	Persandian			550.000.000,00	
2.15.15	Program Pengelolaan dan Pengembangan Persandian Daerah	Cakupan penyelenggaraan pelayanan persandian daerah	100 %	550.000.000,00	
2.15.15.03	Fasilitasi Kontra Penginderaan	Jumlah peralatan kontra penginderaan tersertifikasi yang diadakan	1 Unit	550.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Jumlah ruangan yang difasilitasi	0 Unit		
2.16	Kebudayaan			19.643.796.000,00	
2.16.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	12 persen	1.361.296.000,00	
2.16.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang disediakan	1.000 Surat	150.000.000,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2.16.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Jasa Layanan berlangganan Listrik,Air,Telepon, Transponder	12 Layanan	40.000.000,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2.16.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Honor yang terbayarkan	4 Orang	144.000.000,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2.16.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Luas Gedung dan Halaman yang disediakan jasa kebersihan	12 M2	150.766.000,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Jumlah tenaga kebersihan dan Fasilitas Pendukung kebersihan kantor	0 Orang		
		Jumlah Jenis Bahan dan Alat Kebersihan	0 Jenis		
2.16.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	12 Jenis	200.000.000,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2.16.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan	0 Jenis	50.000.000,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Jumlah penggandaan	0 Lembar		
		Jumlah Jenis Barang Cetakkan yang Disediakan	0 Jenis		
		Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	12 Bulan		
2.16.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	100 Jenis	200.000.000,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2.16.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Pelaksanaan penyediaan makan dan minum	0 Kegiatan	218.680.000,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Pelaksanaan makan minum tamu dan rapat	0 Kali Tahun		
		Pelaksanaan makan minum saat olah raga (hari Jumat)	0 Kali		
		Tersediannya Makanan dan Minuman	12 Bulan		
		Jumlah orang yang disediakan makan dan minuman	0 Orang		
2.16.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	12 Orang	207.850.000,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2.16.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	0 persen	1.620.000.000,00	
2.16.02.04	Pengadaan mobil jabatan	Jumlah mobil yang diadakan	1 Unit	650.000.000,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
2.16.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan	72 Unit	100.000.000,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2.16.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan perlengkapan	316 Unit	150.000.000,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2.16.02.10	Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur yang diadakan	256 Unit	150.000.000,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2.16.02.20	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Jumlah rumah jabatan yg terpelihara	1 Unit Tahun	160.000.000,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2.16.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	3 Unit	200.000.000,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		belanja sewa	3 Tahun		
2.16.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	0 Unit	160.000.000,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	11 Unit		
		sewa kendaraan	0 Bulan		
2.16.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Pelaksanaan pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	0 Kegiatan	50.000.000,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Jumlah Perlengkapan Gedung kantor yang terpelihara	40 Unit		
		Tersediannya biaya pemeliharaan gedung kantor	0 Bulan		
2.16.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	0 persen	300.000.000,00	
2.16.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	119 Stell	100.000.000,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2.16.03.04	Pengadaan pakaian KORPRI	jumlah pakaian KORPRI yang diadakan	119 Stell	100.000.000,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2.16.03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus yang diadakan	82 Stell	100.000.000,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2.16.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	0 persen	300.000.000,00	
2.16.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	5 Orang	50.000.000,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2.16.05.02	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	10 Orang	100.000.000,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2.16.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta bimbingan teknis tentang implementasi peraturan perundang-undangan	119 Orang	150.000.000,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2.16.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya kualitas akuntabilitas OPD	0 persen	1.312.500.000,00	
2.16.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	4 Laporan	100.000.000,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Laporan LAKIP SKPD	0 Dokumen		
2.16.06.02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah pelaporan keuangan semesteran yang diselesaikan tepat waktu	6 Laporan	95.000.000,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2.16.06.03	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jumlah pelaporan prognosis realisasi anggaran yang diselesaikan tepat waktu	12 Laporan	101.500.000,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
2.16.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	10 Laporan	100.000.000,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2.16.06.05	Penyusunan Renja, RKA dan Perubahan APBD	Jumlah dokumen	3 Dokumen	105.000.000,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2.16.06.10	Forum SKPD Provinsi Papua	Jumlah Peserta Forum	100 Orang	736.000.000,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2.16.06.13	Penyusunan SOP	Jumlah Dokumen	6 Dokumen	75.000.000,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2.16.16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Frekwensi Festival Kebudayaan Malanesia yang berstandar internasional	1 Kali	200.000.000,00	
		Cakupan budaya tak benda yang ditetapkan	1 Kali Tahun		
		Frekwensi pertunjukan, festival, lomba karya seni budaya, pameran dan perfilman yang berstandar nasional	7 Kali		
		Cakupan Cagar budaya yang ditetapkan	1 Kali Tahun		
		Cakupan kelompok seni dan budaya asli Papua yang dibina	45 %		
		Lembaga Pengelola kekayaan budaya	5 Lembaga		
2.16.16.01	Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Partisipasi Masyarakat dalam Pengolahan Kekayaan Budaya	100 Kegiatan	200.000.000,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Jumlah Kelompok Masyarakat yang difasilitasi dalam Pengolahan Kekayaan Budaya	0 Kelompok		
2.16.17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya			1.700.000.000,00	
2.16.17.01	Festival Seni Kreasi Papua	Jumlah Peserta yang mengikuti Festival Seni Kreasi Papua	800 Orang	700.000.000,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Jumlah Keikutsertaan Kabupaten/Kota pada Kegiatan Festival Seni Kreasi Papua	29 Kabupaten		
2.16.17.03	Lomba Seni Anak, Remaja dan Lomba Cerita Rakyat Tingkat Anak dan Remaja di 5 Wilayah Adat	Jumlah Peserta yang mengikuti Lomba Seni Anak, Remaja dan Lomba Cerita Rakyat Tingkat Anak dan Remaja di 5 Wilayah Adat	29 Kabupaten	600.000.000,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2.16.17.07	Peningkatan Kompetensi Pengelola Cagar Budaya Papua	Jumlah Pengolah Cagar Budaya yang ditingkatkan kompetensinya	28 Orang	400.000.000,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2.16.41	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah Pengelolaan Keragaman Budaya	3 Kegiatan	12.850.000.000,00	
		Cakupan partisipasi Papua dalam festival seni dan budaya tingkat nasional maupun internasional	1 kali		
		Lembaga Pengelola kekayaan budaya	0 Lembaga		
2.16.41.01	Festival Seni Kreasi Papua	Jumlah kreasi baru kesenian papua yang dihasilkan	800 Jenis	700.000.000,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2.16.41.02	Pesta Budaya Papua	Jumlah Pegiat budaya yang mengikuti Pesta budaya	29 Kelompok	11.850.000.000,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Lembaga Pengelola kekayaan budaya	5 Lembaga		
2.16.41.13	Pelatihan Kesenian di Kampung	Jumlah Seniman yang terlibat dalam kegiatan Pelatihan Kesenian di Kampung	50 Orang	300.000.000,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2.18	Kearsipan			3.578.200.000,00	

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
2.18.1.5	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Pemenuhan penyelenggaraan kearsipan di Papua pada 7 aspek kearsipan	2 Dokumen	480.000.000,00	
2.18.15.05	Pengadaan sarana penyimpanan	jumlah sarana penyimpanan arsip yang disediakan	1 Unit	300.000.000,00	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
2.18.15.06	Kajian sistem administrasi kearsipan	Jumlah kajian Penyelenggaraan kearsipan di Papua	1 Dokumen	180.000.000,00	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
2.18.1.6	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Persentase peningkatan arsip daerah yang telah dilakukan penyelamatan	80 %	550.000.000,00	
2.18.16.01	Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	jumlah sarana pengolahan dan penyimpanan yang diadakan	5 Jenis	150.000.000,00	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
2.18.16.05	Peningkatan Pengelolaan dan Penataan Arsip	Jumlah arsip dinamis inaktif yang ditata dan dikelola dan siap dilakukan penilaian	1.500 Boks	150.000.000,00	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
2.18.16.06	Pelestarian Arsip-arsip yang Bernilai Guna Statis	jumlah arsip statis yang dilakukan perawatan	100 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
2.18.16.07	Penilaian dan Penyusutan Arsip	jumlah arsip yang dinilai menjadi statis jumlah arsip yang disusutkan	250 Berkas 4.750 Berkas	150.000.000,00	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
2.18.1.8	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Persentase peningkatan arsip daerah yang telah dilakukan penyelamatan	90 persen	250.000.000,00	
2.18.18.05	Peningkatan Pembinaan Kearsipan	jumlah SKPD yang dilakukan pembinaan kearsipan intensitas kegiatan lomba kearsipan terbaik tingkat provinsi	52 SKPD 34 Kali	150.000.000,00	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
2.18.18.07	Layanan Informasi Kearsipan	jumlah arsip statis yang dapat dilayanan secara konvensional maupun elektronik	100 Berkas	100.000.000,00	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
2.18.2.1	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan			2.298.200.000,00	
2.18.21.01	Pengembangan Minat dan Budaya Baca	Jumlah event dlm rangka pengembangan minat baca yang dilakukan	1 Orang Kali	70.000.000,00	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
2.18.21.07	Penyediaan Bantuan Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca di Daerah	Jumlah perpustakaan yang di kembangkan	8 Unit	600.000.000,00	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
2.18.21.08	Penyediaan Bahan Pustaka Peprustakaan Umum dan Daerah	Jumlah Buku yang diadakan	200 Buku	222.400.000,00	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
2.18.21.10	Penyelenggaraan Peprustakaan Keliling	jumlah layanan keliling dalam satu tahun Jumlah taman bacaan yang dilayani dalam satu tahun	240 Kali 96 Kali	450.000.000,00	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
2.18.21.11	Pengembangan Deposit	Jumlah Buku yang diadakan	50 Eksemplar	200.000.000,00	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
2.18.21.14	Pemeliharaan Bahan Pustaka	Jumlah Buku rusak yang diperbaiki	5.000 Eksemplar	50.000.000,00	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
2.18.21.22	Pendidikan dan Pelatihan Teknis/Manajemen Pengelola Perpustakaan	jumlah peserta	30 Orang	280.000.000,00	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
2.18.21.23	Pemberdayaan dan Pengembangan Tenaga Fungsional Pustakawan	Jumlah Tenaga Fungsional yang diberdayakan dan dikembangkan	2 Orang	80.000.000,00	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
2.18.21.24	Otomasi Perpustakaan	jumlah koleksi yang dapat dilayankan secara elektronik	500 Buku	130.800.000,00	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
2.18.21.31	Reprografi bahan Pustaka	jumlah karya cetak berseri yang dialih mediakan secara elektronik	312 Eksemplar	45.000.000,00	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
2.18.21.32	Identifikasi dan inventarisasi naskah kuno	jumlah naskah kuno yang teridentifikasi dan diinventarisir	3 Eksemplar	70.000.000,00	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
2.18.21.33	Monitoring, evaluasi dan pelaporan Perkembangan perpustakaan didaerah	Jumlah Laporan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Perkembangan Perpustakaan	25 Laporan	100.000.000,00	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
3	Urusan Pilihan			650.086.250.000,00	
3.01	Kelautan dan Perikanan			59.151.330.000,00	
3.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	0 persen	3.795.000.000,00	
3.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang disediakan	650 Surat	50.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Jasa Layanan berlangganan Listrik,Air,Telepon, Transponder	12 Layanan	400.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.01.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	10 Unit	210.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Unit Mobil Dinas/Operasional yang terpelihara dan Terfasilitasi Perijinannya	56 Unit	575.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Luas Gedung dan Halaman yang disediakan jasa kebersihan	3.000 M2	225.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Jumlah tenaga kebersihan dan Fasilitas Pendukung kebersihan kantor	0 Orang		
		Jumlah Jenis Bahan dan Alat Kebersihan	0 Jenis		
3.01.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	20 Unit	75.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	80 Jenis	175.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan	25 Jenis	50.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Jumlah penggandaan	0 Lembar		
		Jumlah Jenis Barang Cetakkan yang Disediakan	0 Jenis		
		Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	0 Bulan		
3.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen Listrik yang disediakan	30 Buah	65.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.01.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan Perlengkapan	12 Unit	200.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	50 Jenis	65.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
3.01.01 .17	Penyediaan makanan dan minuman	Pelaksanaan penyediaan makan dan minum	12 Kegiatan	191.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Pelaksanaan makan minum tamu dan rapat	20 Kali Tahun		
		Pelaksanaan makan minum saat olah raga (hari Jumat)	48 Kali		
		Tersediannya Makanan dan Minuman	12 Bulan		
		Jumlah orang yang disediakan makan dan minuman	0 Orang		
3.01.01 .18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	60 Orang	1.100.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.01.01 .19	Penyediaan Jasa Pengamanan	Pelaksanaan pembayaran insentif bagi tenag operator dan penjaga X-Ray VIP Room Bandara Sentani	a0 Orang Bulan	414.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Pelaksanaan pembayaran honor bagi satpam	6 Orang Bulan		
		Pelaksanaan uang makan satpam	6 Orang Bulan		
		Jumlah tenaga pengamanan	0 Orang		
3.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	0 persen	6.330.000.000,00	
3.01.02 .05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan yang diadakan	1 Unit	550.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Jumlah kendaraan roda 2	5 Unit		
3.01.02 .09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan perlengkapan	2 Unit	40.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.01.02 .10	Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur yang diadakan	2 Unit	1.985.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.01.02 .20	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Jumlah rumah jabatan yg terpelihara	1 Unit Tahun	75.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.01.02 .24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	0 Unit	680.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	64 Unit		
		sewa kendaraan	0 Bulan		
3.01.02 .30	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Luas bangunan yang direhab	1.500 M2	3.000.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	0 persen	410.000.000,00	
3.01.03 .02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	164 Stell	246.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.01.03 .03	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan	164 Stell	164.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.01.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	0 persen	1.100.000.000,00	
3.01.05 .01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	70 Orang	500.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.01.05 .02	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	150 Orang	100.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.01.05 .03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta bimbingan teknis tentang implementasi peraturan perundang-undangan	10 Orang	150.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.01.05 .04	Pendidikan dan Pelatihan Non Formal	Jumlah aparatur yang terlatih	100 Orang	350.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem	Meningkatnya kualitas akuntabilitas OPD	0 persen	655.000.000,00	

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
	pelaporan capaian kinerja dan keuangan				
3.01.06 .01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	1 Laporan	15.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Laporan LAKIP SKPD	0 Dokumen		
3.01.06 .02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah pelaporan keuangan semesteran yang diselesaikan tepat waktu	1 Laporan	15.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.01.06 .04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	1 Laporan	15.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.01.06 .05	Penyusunan Renja, RKA dan Perubahan APBD	Jumlah dokumen	3 Dokumen	20.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.01.06 .10	Forum SKPD Provinsi Papua	Jumlah Peserta Forum	150 Orang	500.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.01.06 .13	Penyusunan SOP	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.01.06 .14	Peningkatan Kapasitas PPID	Jumlah orang	3 Orang	75.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.01.1 6	Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan	Meningkatnya Pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan	0 Kelompok	3.663.000.000,00	
		Persentase meningkatnya kemampuan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan	2 persen		
		Cakupan kabupaten/kota yang memiliki POKMASWAS berfungsi	13 kab/kota		
3.01.16 .03	Pengawasan dan Pemantauan Kawasan Konservasi	Jumlah Dokumen hasil pengawasan dan Pemantauan	1 Dokumen	110.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.01.16 .04	Pembinaan Kelompok Sistem Pengawas Masyarakat	Jumlah kelompok Pengawas Masyarakat Yang Terbina	60 Kelompok	300.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.01.16 .05	Patroli Rutin Perairan	Jumlah Petroli Rutin Perairan	100 Kali	1.000.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.01.16 .06	Pengadaan Speed Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (DAK)	Jumlah speed yang diadakan	1 Unit	3.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.01.16 .07	Pembangunan Garasi (Stayger) speed boad Pengawasan SDKP (DAK)	Volume garasi yang terbangun	500 M3	1.575.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.01.16 .08	Pembangunan Gedung Pengawasan SDKP (DAK)	Volume Gedung yang terbangun	100 M3	325.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.01.16 .09	Pengadaan Peralatan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) (DAK)	Jumlah peralatan yang diadakan	60 Unit	350.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.01.2 0	Program pengembangan budidaya perikanan	terwujudnya pengembangan budidaya perikanan	0 Kelompok	12.225.000.000,00	
		Produksi perikanan budidaya	136 ton		
3.01.20 .02	Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan	TerlaksananyaPendampingan pada kelompok tani dan p	100 Kelompok	350.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.01.20 .03	Pembinaan dan pengembangan perikanan	Jumlah pembudidaya yang terbina	100 Orang	300.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.01.20 .11	Bantuan sarana produksi kolam/karamba masyarakat	Jumlah Kelompok penerima bantuan	100 Kelompok	2.100.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.01.20 .29	Bantuan Saprodil Kepada Pembudidaya Bandeng	Jumlah kelompok pembudidaya yang menerima bantuan	10 Kelompok	600.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.01.20 .42	Pencetakan Kolam Dengan Alat Berat Becho	Pembuatan Kolam Baru	30 Kolom	100.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
3.01.20.43	Optimalisasi Lahan Usaha Pembudidaya Pemula	kelompok yang disasar	100 Kelompok	1.000.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.01.20.44	Bantuan Bibit Ikan dan Pakan kepada Pembudidaya Air Tawar	10 kelompok pembudidaya	100 Kelompok	2.100.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.01.20.46	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudidaya Ikan	Jumlah kelompok pembudidaya yang dikembangkan	25 Kelompok	500.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.01.20.51	Rapat Evaluasi Pengembangan Budidaya Rumput Laut	Evaluasi Pengembangan Budidaya Rumput Laut	1 Kegiatan	75.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.01.20.53	Pengadaan Sarana Produksi Keramba Jaring Apung untuk Pembudidaya Ikan	Jumlah kelompok pembudidaya ikan penerima keramba jaring apung	5 Kelompok	2.500.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.01.20.54	Pengembangan Calon Induk Ikan Unggul	Jumlah Calon Induk Ikan unggul	10.000 Ekor	600.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.01.20.55	Pengembangan Budidaya Rumput Laut	Jumlah Pembudidaya Yang dikembangkan	30 Kelompok	2.000.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.01.21	Program Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	Produksi perikanan tangkap	7.796 ton	7.100.000.000,00	
3.01.21.01	Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap	Jumlah kelompok yang mendapat pendampingan	50 Kelompok	250.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.01.21.05	Pengembangan lembaga usaha perdagangan perikanan tangkap	Jumlah lembaga usaha pedagang perikanan tangkap yang dikembangkan	20 Kelompok	100.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.01.21.16	Pelatihan Penangkapan Ikan	Jumlah kelompok nelayan yang terlatih dalam menangkap ikan dengan menggunakan teknologi penangkapan yang modern	50 Kelompok	200.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.01.21.17	Pelatihan Mesin Motor Perikanan	terlaksananya pelatihan mesin motor	0 Kali	100.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Jumlah nelayan yang terlatih	25 Orang		
3.01.21.18	Pelatihan Pembuatan Rumpon	Jumlah SDM Yang Terlatih	20 Kelompok	75.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.01.21.19	Pelatihan Cek Fisik Kapal dan Mesin Kapal	terlaksananya pelatihan cek fisik	0 Orang	200.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Jumlah Aparatur Petugas Cek Fisik dan Mesin Kapal yang terlatih	5 Orang		
3.01.21.26	Monitoring PPI Se- Papua	Terlaksananya Monitoring PPI di Kab/Kota Se-Papua	8 Kabupaten	250.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.01.21.32	Motorisasi perahu nelayan /armada kapal kecil	Jumlah Kelompok penerima bantuan	30 Kelompok	3.800.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.01.21.35	Bantuan Sarana Penangkapan Ikan (Rumpun)	Jumlah Kelompok penerima bantuan	6 Kelompok	800.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.01.21.38	Fasilitasi Pelayanan Perizinan dan Pengendalian Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Perizinan Perikanan Tangkap yang dikeluarkan	150 Dokumen	125.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.01.21.40	Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Perairan Pedalaman	Jumlah Lokasi sumber daya ikan PUD di Pedalaman yang teridentifikasi	2 Wilayah	700.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.01.21.42	Restocking Ikan di Perairan Umum dan Danau	Jumlah Benih ikan yang ditebarkan	150.000 Ekor	500.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.01.22	Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan	Cakupan penyuluh fungsional yang mempunyai kompetensi memadai	75 %	470.000.000,00	
		Persentase meningkatnya penyuluhan perikanan lapangan	25 %		
3.01.22.05	Pelatihan Penyuluh Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua	terlaksananya pelatihan bagi penyuluh	25 Orang	350.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.01.22.08	Penataan Kelembagaan Penyuluh dan Distribusi Tenaga Penyuluh	terdistribusinya penyuluh perikanan	0 Orang	120.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Jumlah Penyuluh Yang terlatih dan terdistribusi	20 Orang		

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
3.01.2 3	Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	Persentase kenaikan pemasaran hasil produksi perikanan	3 persen	850.000,00	
3.01.23 .04	Rehabilitasi unit Pengolahan Ikan (UPI) Skala Kecil - DAK	Tersedianya sarana dan Prasarana	2 Unit	850.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.01.2 4	Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar	Produksi perikanan budidaya	136 Ton	4.895.000.000,00	
3.01.24 .02	Pengadaan Sarana Produksi Keramba Jaring Apung untuk Pembudidaya Ikan	Tersedianya Sarana dan Prasarana	1 Unit	4.895.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.01.2 5	Program Pengembangan Data dan Informasi	Cakupan ketersediaan data perikanan dan kelautan	n20 persen per tahun	400.000.000,00	
3.01.25 .01	Visualisasi Informasi Berbasis Website dan Internet Dinas	Jumlah pelaksanaan kegiatan Visualisasi Informasi Berbasis Website dan Internet Dinas	1 Kegiatan	100.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Pemasangan jaringan internet internal Dinas	0 Spot		
		Langganan internet 12 Bulan	0 Bulan		
		Pemasangan CCTV	0 Buah		
		Pengadaan Televisi	0 Unit		
		Cetak Majalah Perikanan	0 Buah		
3.01.25 .04	Penghimpunan data statistik perikanan dan kelautan	Jumlah Buku Data Statistik Perikanan dan Kelautan Yang terhimpun	50 Buku	300.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Perjalanan Pengumpulan Data	0 Orang Tahun		
		Pengadaan Sarana Statistik	0 Unit		
		Perjalanan Koordinasi Satu Data ke Pusat	0 Orang Tahun		
		Jumlah Buku Data Statistik Perikanan dan Kelautan Yang terhimpun	0 Buku		
3.01.2 6	Program Peningkatan Mutu Produksi Nelayan, Pengelolaan dan Pemasaran	Nilai ekspor produk perikanan	45.553 Rp. juta	7.040.000.000,00	
		Nilai investasi sektor perikanan yang direalisasikan	7.574 Rp. juta		
3.01.26 .02	Pembangunan Cold Storage di Sentra-Sentra Nelayan	Jumlah Cold Storage Yang terbangun	1 Unit	4.500.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.01.26 .04	Pembinaan Mutu Produksi Perikanan	Jumlah kelompok yang terlatih dalam menciptakan Hasil Olahan Perikanan yang Bermutu Tinggi	10 Kelompok	220.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.01.26 .05	Ekspose dan Promosi Investasi Kelautan dan Perikanan	Jumlah pelaksanaan kegiatan Promosi Hasil Perikanan Papua	2 Kegiatan	450.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Pameran Produk Kelautan dan Perikanan Tingkat Nasional	0 Kali		
		Study Banding / Pameran Promosi Produk Kelautan dan Perikanan di Luar Negeri	0 Kegiatan		
3.01.26 .07	Kemitraan Usaha Pengolahan Ikan	Jumlah Kegiatan Bimbingan Teknis Kepada Kelompok Usaha Pengolah Hasil Perikanan	2 Kegiatan	220.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.01.26 .08	Lomba Masak Serba Ikan Tk. Provinsi dan Nasional	Jumlah Kegiatan Lomba Masak Serba Ikan	2 Kegiatan	500.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Lomba Inovasi Bahan Baku Ikan	0 Orang		
3.01.26 .09	Pelatihan Pengolahan hasil perikanan	Pembinaan Manajemen Mutu Terpadu (PMMT)	0 Kegiatan	250.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Jumlah Kelompok usaha hasil olahan yang terlatih	25 Kelompok		

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
3.01.26.11	Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Pemasaran bagi Nelayan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Pemasaran untuk Nelayan	75 Unit	750.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.01.26.21	Pelaksanaan Peringatan Hari Nusantara dan HARKANAS,	Peringatan Hari Nusantara	0 Kegiatan	150.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Peringatan HARKANAS (Hari Ikan Nasional)	0 Kegiatan		
		Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Hari Nusantara dan HARKANAS	2 Kegiatan		
3.01.27	Program Optimalisasi dan Pembangunan Prasarana Perikanan Tangkap	Cakupan unit pengembangan pelabuhan perikanan yang berfungsi	4 persen	5.206.030.000,00	
3.01.27.05	Penunjang Kegiatan PPI di Kab/Kota	Jumlah Kegiatan penunjang Optimalisasi PPI di Kab/Kota	8 Kegiatan	3.200.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.01.27.07	Pembangunan Cold Storage (DAK)	Volume cold storage yang terbangun	1 M3	1.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Kapasitas Cold Storage yang terbangun	0 Ton		
3.01.27.08	PPI OMOR (DAK)	Tersedianya Sarana dan Prasarana	1 Unit	1.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.01.27.09	PPI Nabire (DAK)	Tersedianya Sarana dan Prasarana	1 Unit	30.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.01.27.10	PPI Hamadi (DAK)	Tersedianya Sarana dan Prasarana	1 Unit	1.000.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.01.27.11	PPI Fandoi (DAK)	Tersedianya Sarana dan Prasarana	1 Unit	1.000.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.01.27.12	PPI POMAKO (DAK)	Tersedianya Sarana dan Prasarana	1 Unit	1.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.01.27.13	PPI Kab Jayapura (DAK)	Tersedianya Sarana dan Prasarana	1 Unit	3.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.01.28	Program Optimalisasi Fungsi dan Pelayanan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD)	Cakupan peningkatan kinerja UPTD Perikanan	2 persen	4.757.000.000,00	
3.01.28.01	Penunjang Kegiatan Balai Benih Ikan Sentra Berap- Kab. Jayapura	Jumlah pelaksanaan Kegiatan optimalisasi Pelayanan Pada BBIS Berap	5 Kegiatan	1.000.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.01.28.06	Optimalisasi Fungsi Balai Benih Ikan Partai (BBIP) Bosnik Biak	Terlaksana Kegiatan serta Optimalnya Pelayanan Pada BBIP Biak	5 Tahun	1.000.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.01.28.07	Optimalisasi Fungsi dan Pelayanan BPPMHP Merauke	Jumlah pelaksanaan Kegiatan optimalisasi Pelayanan Pada BPPMHP Merauke	4 Kegiatan	1.000.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.01.28.08	Optimalisasi Fungsi dan Pelayanan BPPMHP Biak	Terlaksana Kegiatan serta Optimalnya Pelayanan Pada BPPMHP Biak	5 Tahun	1.000.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Jumlah pelaksanaan Kegiatan optimalisasi Pelayanan Pada BPPMHP Biak	0 Kegiatan		
3.01.28.09	Optimalisasi Fungsi dan Pelayanan BPPMHP Jayapura	Terlaksana Kegiatan serta Optimalnya Pelayanan Pada BPPMHP Jayapura	5 Tahun	750.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Jumlah pelaksanaan Kegiatan optimalisasi Pelayanan Pada BPPMHP Jayapura	0 Kegiatan		
3.01.28.13	Pembangunan dan Pengembangan BBIS (DAK)	Jumlah Produksi Calon Induk	10.000 Ekor	1.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Peningkatan Kapasitas Produksi Calon Induk	0 %		
3.01.28.14	Pembangunan dan Pengembangan BBIP (DAK)	Jumlah Produksi Calon Induk	15.000 Ekor	3.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Peningkatan Kapasitas Produksi Calon Induk	0 %		
3.01.28.16	Paket Pengukuran dan Pemeriksaan Kesehatan ikan BBIP	tersedianya kualitas air	2 Kegiatan	3.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
3.01.2 9	Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	Cakupan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil	70 persen	1.104.450.000,00	
		Cakupan nelayan OAP yang memiliki Kartu Nelayan	434 Per 1000 nelayan		
3.01.29 .01	Pemberdayaan Masyarakat Pulau-Pulau Terluar	Pemberdayaan Masyarakat di Pulau Terluar	0 Kegiatan	400.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Jumlah kelompok masyarakat pesisir penerima Bantuan	3 Kelompok		
3.01.29 .03	Peningkatan Perananan Konsorsium Mitra Bahari dalam Penanganan Masalah Pesisir	Meningkatnya peran Konsorsium Mitra Bahari dalam Penanganan Masalah Pesisir	0 Tahun	150.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Jumlah PertemuanKonsorsium Mitra Bahari dalam Penanganan Masalah Pesisir	3 Kegiatan		
3.01.29 .04	Dukungan Terhadap Coremap	Penunjang Kegiatan COREMAP	2 Tahun	150.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.01.29 .07	Pengembangan sistem Budidaya Wanamina sebagai mata pencaharian alternatif	Jumlah Kelompok penerima bantuan Budidaya Wanamina	4 Kelompok	300.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.01.29 .16	Pembangunan Tambatan Perahu di Pulau-pulau Kecil (DAK)	Volume Tambatan Perahu yang terbangun	400 M3	100.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.01.29 .17	Transplantasi Terumbu Karang	Jumlah Transplantasi Karang yang terpasang	1 Unit	100.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.01.29 .18	Pondok Jaga Kawasan Konservasi (DAK)	Tersedianya sarana dan Prasarana	500 Unit	350.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.01.29 .19	Alat Komunikasi Lapangan Pengelolaan Kawasan Konservasi (DAK)	Tersedianya sarana dan Prasarana	50 Unit	3.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.01.29 .20	Pengadaan Alat Selam (DAK)	Tersedianya sarana dan Prasarana	2 Unit	1.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.02	Pariwisata			13.900.000.000,00	
3.02.1 5	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan PON yang terlayani	0 ribu orang	1.500.000.000,00	
3.02.15 .10	Dukungan dan Penguatan Pada Festival Wisata Daerah	Jumlah kabupater/ kota yang memperoleh dukungan dan penguatan	5 Kabupaten	500.000.000,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3.02.15 .59	Renovasi Hotel Numbay dan Mapia	Luas Bangunan yang direnovasi	4.800 M2	1.000.000.000,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3.02.1 6	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Destinasi wisata unggulan yang berkembang	12 Destinasi	9.650.000.000,00	
		Kawasan wisata yang berstandar internasional	1 Kawasan		
3.02.16 .06	Pelatihan pramuwisata selam			0,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3.02.16 .07	Penyuluhan dan penguatan kelompok sadar wisata	Jumlah peserta penyuluhan dan penguatan kelompok sadar wisata	50 Orang	600.000.000,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3.02.16 .74	pengembangan objek pariwisata unggulan	Jumlah Sarana Obyek Wisata yang dikembangkan	2 Unit	1.000.000.000,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3.02.16 .75	peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	Meningkatnya pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	2 Lokasi	1.000.000.000,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3.02.16 .79	Pengembangan daerah tujuan wisata	Jumlah Daerah tujuan wisata yang dikembangkan	1 Lokasi	550.000.000,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3.02.16 .81	Penataan Daya Tarik Wisata dan Amenitas Pariwisata (DAK)	Jumlah lokasi tempat wisata yang tertata	5 Lokasi	5.000.000.000,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
3.02.16.82	Pelatihan Pengelola Daya Tarik Wisata (DTW)	Jumlah peserta pelatihan	40 Orang	500.000.000,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3.02.16.83	Pengembangan dan Penataan Kampung Wisata	Jumlah Kampung yang dikembangkan	1 Kampung	1.000.000.000,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3.02.17	Program Pengembangan Kemitraan	Cakupan mitra pelaku usaha wisata dan ekonomi kreatif	10 Perusahaan	2.350.000.000,00	
3.02.17.03	Pelatihan ekonomi kreatif	Jumlah peserta pelatihan ekonomi kreatif	30 Orang	300.000.000,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3.02.17.04	Pelatihan desain batik	Jumlah peserta pelatihan desain batik	30 Orang	300.000.000,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3.02.17.27	Pelatihan Seni Kerajinan Tangan (anyam noken, gerabah, ukir)	Jumlah peserta pelatihan seni kerajinan tangan	30 Orang	300.000.000,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3.02.17.31	Pengadaan Ruang Kreatif	Jumlah ruang kreatif yang diadakan	1 Unit	500.000.000,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3.02.17.40	Pelatihan media kreatif (fotografi dan animasi)	Jumlah orang yang mengikuti pelatihan media kreatif	30 Orang	350.000.000,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3.02.17.41	Pameran pekan budaya dan seni kreatif	jumlah peserta yang mengikuti pekan budaya dan seni kreatif	10 Peserta	500.000.000,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3.02.17.42	Pengadaan Peralatan Ruang Kreatif	Jumlah alat ruang kreatif yang diadakan	50 Buah	100.000.000,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3.02.19	program pengembangan kapasitas	Tingkat partisipasi Papua dalam promosi pariwisata di tingkat regional dan internasional	50 Orang	400.000.000,00	
		Cakupan pelaku usaha wisata yang dibina	10 Orang		
3.02.19.04	Pelatihan SDM bagi pemandu pariwisata	jumlah pemandu wisata yang mengikuti pelatihan	30 Orang	400.000.000,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3.03	Pertanian			182.612.500.000,00	
3.03.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	1 persen	4.647.500.000,00	
3.03.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang disediakan	200 Surat	50.000.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
3.03.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Jasa Layanan berlangganan Listrik, Air, Telepon, Transponder	12 Layanan	1.500.000.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
3.03.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Unit Mobil Dinas/Operasional yang terpelihara dan Terfasilitasi Perijinannya	85 Unit	75.000.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
3.03.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Honor yang terbayarkan	82 Orang	50.000.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
3.03.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	50 Jenis	200.000.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
3.03.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan	75 Jenis	205.000.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
		Jumlah penggandaan	10.000 Lembar		
		Jumlah Jenis Barang Cetak yang Disediakan	20 Jenis		
		Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	12 Bulan		
3.03.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan Perlengkapan	25 Unit	500.000.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
3.03.01.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah liter bahan bakar untuk kendaraan operasional	2.500 Liter	212.500.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
		jumlah mobilitas termasuk tenaga angkat dan turun beras ke kantor	1 Kali		
3.03.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Pelaksanaan penyediaan makan dan minum	12 Kegiatan	340.000.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
		Pelaksanaan makan minum tamu dan rapat	12 Kali Tahun		
		Pelaksanaan makan minum saat olah raga (hari Jumat)	70 Kali		
		Tersediannya Makanan dan Minuman	12 Bulan		
		Jumlah orang yang disediakan makan dan minuman	150 Orang		
3.03.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	30 Orang	1.500.000.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
3.03.01.19	Penyediaan Jasa Pengamanan	Pelaksanaan pembayaran insentif bagi tenag operator dan penjaga X-Ray VIP Room Bandara Sentani	a0 Orang Bulan	15.000.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
		Pelaksanaan pembayaran honor bagi satpam	0 Orang Bulan		
		Pelaksanaan uang makan satpam	0 Orang Bulan		
		Jumlah tenaga pengamanan	12 Orang		
3.03.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100 persen	3.675.000.000,00	
3.03.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan yang diadakan	1 Unit	750.000.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
		Jumlah kendaraan roda 2	10 Unit		
3.03.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan	15 Unit	200.000.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
3.03.02.10	Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur yang diadakan	20 Unit	500.000.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
3.03.02.11	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Jumlah peralatan dan perlengkapan rumah tangga yang diadakan	2 Unit	200.000.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
		Jumlah peralatan dan perlengkapan rumah tangga yang diadakan	0 Set		
3.03.02.20	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Jumlah rumah jabatan yg terpelihara	1 Unit Tahun	75.000.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
3.03.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	20 Unit	250.000.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
		belanja sewa	0 Tahun		
3.03.02.23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	1 Unit	100.000.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
3.03.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	0 Unit	1.500.000.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
		Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	200 Unit		
		sewa kendaraan	0 Bulan		
3.03.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	50 Unit	100.000.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
3.03.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	0 persen	1.550.000.000,00	
3.03.03.01	Pengadaan mesin/kartu absensi	Jumlah Mesin /Kartu Apsensi yang tersedia	5 Bh	50.000.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
3.03.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	530 Stell	800.000.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
3.03.03.03	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan	530 Stell	350.000.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
3.03.03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus yang diadakan	530 Stel	350.000.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
3.03.04	Program fasilitas pindah/purna tugas PNS	Meningkatnya kualitas penangan pindah/purna tugas PNDS	0 persen	45.000.000,00	
3.03.04.01	Pemulangan pegawai yang pensiun	Jumlah pegawai pensiun yang difasilitasi	3 Orang	45.000.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
3.03.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	0 persen	870.000.000,00	
3.03.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	50 Orang	500.000.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
3.03.05.02	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	50 Orang	75.000.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
3.03.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta bimbingan teknis tentang implementasi peraturan perundang-undangan	20 Orang	45.000.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
3.03.05.04	Pendidikan dan Pelatihan Non Formal	Jumlah aparatur yang terlatih	25 Orang	250.000.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
3.03.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya kualitas akuntabilitas OPD	0 persen	4.750.000.000,00	
3.03.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	1 Laporan	500.000.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
		Laporan LAKIP SKPD	0 Dokumen		
3.03.06.02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah pelaporan keuangan semesteran yang diselesaikan tepat waktu	1 Laporan	100.000.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
3.03.06.03	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jumlah pelaporan prognosis realisasi anggaran yang diselesaikan tepat waktu	1 Laporan	500.000.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
3.03.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	1 Laporan	100.000.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
3.03.06.05	Penyusunan Renja, RKA dan Perubahan APBD	Jumlah dokumen	3 Dokumen	2.000.000.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
3.03.06.10	Forum SKPD Provinsi Papua	Jumlah Peserta Forum	150 Orang	1.000.000.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
3.03.06.11	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah laporan yang disusun	1 Laporan	50.000.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
3.03.06.13	Penyusunan SOP	Jumlah Dokumen	10 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
3.03.06.14	Peningkatan Kapasitas PPID	Jumlah orang	5 Orang	200.000.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
3.03.06.15	Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Jumlah Dokumen yang disusun	5 Dokumen	150.000.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
3.03.06.16	Penyusunan Dokumen Rencana Umum Pengadaan (RUP)	Jumlah Dokumen Rencana Umum Pengadaan (RUP)	1 Dokumen	50.000.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
3.03.15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Cakupan bina kelompok tani	20 persen	8.000.000.000,00	
		NTP peternakan	9.996 persen		
		NTP tanaman pangan	9.521 persen		
3.03.15.01	Pelatihan Petani dan Pelaku Agrobisnis	Jumlah kelompok tani ternak yang dilatih	0 Kelompok	1.000.000.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
		jumlah petani yang dilatih	60 Orang		
		Jumlah Pelaku Agrobisnis yang dilatih	0 Orang		
		tersedia lembaga petani mandiri	2 Lembaga	2.000.000.000,00	

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
3.03.15.03	Peningkatan kemampuan lembaga petani	Jumlah kelembagaan petani peternak	20 Kelompok		Dinas Pertanian dan Pangan
3.03.15.15	Pekan Daerah (PEDA)/Nasional (PENAS) Pertemuan Kontak Tani Nelayan Andalan Nasional	Jumlah Peserta Pelaksanaan PEDANA	1.250 Orang	5.000.000.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
3.03.16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	Produktifitas komoditas tanaman pangan dan hortikultura utama	9 ton per hektar	27.950.000.000,00	
		Cakupan komoditi pangan lokal berkualitas	50 persen		
		Luas kawasan pertanian pangan berkelanjutan	4 juta hektar		
		Cakupan pengembangan agroindustri terpadu hortikultura	25 persen		
		Tingkat swasembada pangan	35 persen		
3.03.16.17	Pengembangan pertanian pada lahan kering	Jumlah kawasan terpadu tanaman pangan dan hortikultura petani asli Papua yang dikembangkan	0 Wilayah	7.500.000.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
		Jumlah kawasan terpadu tanaman pangan dan hortikultura petani asli Papua yang dikembangkan	0 Lokasi		
		Perluasan /Pengembangan Lahan kering Hortikultura mendukung PON XX	750 Ha		
3.03.16.33	Pengembangan Kawasan Lahan Pertanian Pangan Pokok Berkelanjutan dan GRK	Jumlah lokasi pemantauan implementasi Perdasi LP3B	5 Lokasi	750.000.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
		Jumlah laporan implementasi RAD-GRK sektor Pertanian	5 Laporan		
3.03.16.34	Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman Pangan dan Hortikultura	Luas pengamatan OPT TPH	0 Kabupaten	1.000.000.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
		Luas areal pengendalian OPT tanaman pangan dan hortikultura	500 Ha		
3.03.16.35	Pengembangan Laboratorium Pegamat hama dan penyakit	Sosialisasi Pergub LP3B	0 Kegiatan	1.000.000.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
		Bimbingan Penyusunan LP3B	0 Kegiatan		
		Inventarisasi GRK	0 Kegiatan		
		Jumlah sarana dan prasarana laboratorium yang tersedia	1 Unit		
3.03.16.36	Pengembangan Pupuk dan Alsint Pertanian	Pengawasan pupuk subsidi	12 Kegiatan	2.500.000.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
3.03.16.39	Pengembangan Balai Benih Palawija	Perbanyak benih sumber palawija	1.500 Ha	3.000.000.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
		Operasional BBI Palawija	0 Kegiatan		
		Rehab gudang saprodi	0 Unit		
		Pembangunan lantai jemur	0 M		
		Pengadaan mesin pengering	0 Unit		
		Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia	2 Unit		
3.03.16.40	Pengembangan Balai Benih Hortikultura	Perbanyak benih sumber hortikultura	5.000 Kegiatan	1.500.000.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
		Operasional BBI Hortikultura	0 Kegiatan		
		Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia	1 Unit		
3.03.16.41	Pengembangan Kebun Bibit Hortikultura	Perbanyak benih hortikultura	3.000 Kegiatan	700.000.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
		Operasional Kebun bibit hortikultura	1 Kegiatan		
		Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia	1 Unit		

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
3.03.16 .42	Pengembangan Produksi Benih Tanaman Pangan	Penangkaran benih padi	50 Ha	2.000.000.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
		Penangkaran Benih kedelai	50 Ha		
		Temu lapang penangkar benih	50 Kali		
3.03.16 .43	Pengembangan Produksi Benih Hortikultura	Penangkaran benih buah-buahan	5.000 Ha	1.500.000.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
		Penangkaran benih sayuran	5 Ha		
3.03.16 .44	Pengembangan Laboratorium Benih	Sertifikasi benih Tanaman pangan dan hortikultura	6 Kabupaten	2.000.000.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
		Jumlah sarana dan prasarana laboratorium yang tersedia	1 Unit		
3.03.16 .45	Pengembangan Balai Benih Padi	Perbanyak benih sumber padi	25 Ha	1.000.000.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
		Operasional BBI Padi	0 Kegiatan		
		Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia	2 Unit		
3.03.16 .46	Peningkatan Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura	Pengawasan benih tanaman pangan dan hortikultura	12 Kabupaten	1.000.000.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
3.03.16 .47	DAK Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura	Jumlah kegiatan yang dibiayai DAK	5 Kegiatan	2.500.000.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
3.03.1 7	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Meningkatnya pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	200 Ton	6.600.000.000,00	
		Tingkat kemampuan petani lokal dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat	35 %		
		Frekwensi promosi produk perkebunan	2 Kali		
		Persentase hasil produk tanaman pangan lokal berkualitas yang terserap	72 %		
		Cakupan kelompok binaan tani lokal pemasok kebutuhan makanan sektor pertambangan yang berkembang	20 Kelompok		
		Frekwensi promosi produk pertanian	2 Kali		
3.03.17 .16	Pembangunan Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan	Terbangunnya Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan	15 Unit	5.000.000.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
3.03.17 .17	Investasi dan Perijinan Usaha Perkebunan	Terselenggaranya proses investasi dan rekomendasi perijinan usaha perkebunan	7 Kegiatan	500.000.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
3.03.17 .18	Bimbingan Usaha Perkebunan	Jumlah kelompok yang diberikan pembinaan usaha perkebunan	13 Kelompok	1.100.000.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
3.03.1 8	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Cakupan teknologi pertanian/perkebunan rakyat tepat guna yang diterapkan	12 jenis	4.250.000.000,00	
3.03.18 .01	Penelitian dan pengembangan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	Jumlah objek penelitian dan pengembangan perbenihan	1 Unit	750.000.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
3.03.18 .02	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	Jumlah Sarpras teknologi pertanian untuk 5 komoditas	2 Unit	2.200.000.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
		Jumlah alat dan mesin pertanian yang diadakan	50 Unit		
3.03.18 .05	Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	Jumlah petani yang terlatih melakukan inovas penerapan teknologi perkebunan tepat guna	300 Orang	1.300.000.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
3.03.1 9	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Meningkatnya produksi komoditas perkebunan	2.200 Ha	16.825.000.000,00	
		Tingkat produktifitas tanaman perkebunan	502 Kg per Hektar		

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
		Tingkat produktifitas tanaman pertanian	502 Kg per Hektar		
3.03.19.02	Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan	Jumlah bantuan sarana produksi (Alat Pertanian Kecil) ke masyarakat	200 Unit	2.275.000.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
		Terbangunnya jalan produksi Pada areal perkebunan unggulan	2 KM2		
		Jumlah pupuk organik bagi petani yang disalurkan	200 Liter		
		Jumlah bantuan Alat Pertanian Kecil (APK)	100 Unit		
3.03.19.08	Intensifikasi Tanaman Perkebunan	Luas Areal kebun masyarakat yang terintensifikasi	500 Hektar	5.000.000.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
3.03.19.36	Pemeliharaan Kebun Benih Tanaman Perkebunan	Terpeliharanya kebunbenih tanaman perkebunan	25 Hektar	1.800.000.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
		Tersedianya Benih dan Bibit Unggul	10.000 Bibit		
		Terlaksananya peningkatan produktivitas hasil perkebunan	10 Hektar		
3.03.19.40	Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman Perkebunan	Luas areal kebun yang dikendalikan	1.500 Hektar	3.500.000.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
3.03.19.47	Perbaikan UPTD/Balai Perbenihan Perkebunan	Luas perbaikan UPTD/Balai	25 M2	1.000.000.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
3.03.19.48	Penyediaan Perlengkapan dan Sarana Perkantoran UPTD/Balai Perbenihan/Produksi	Jumlah perlengkapan dan sarana yang disediakan	10 Alat	1.750.000.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
3.03.19.49	Peningkatan Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan	Jumlah Benih/Bibit yang tersertifikasi	300.000 Bibit	1.500.000.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
3.03.20	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	Cakupan penyuluh fungsional yang mempunyai kompetensi memadai	75 %	21.500.000.000,00	
3.03.20.01	Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan	Jumlah tenaga penyuluh yang ditingkatkan kapasitasnya	100 Orang	6.900.000.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
3.03.20.03	Penyuluhan dan pendampingan bag pertanian/perkebunan	Jumlah sarana penyuluhan BPP Model yang diadakan	500 Unit	2.500.000.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
3.03.20.04	Pengembangan sistem data dan informasi penyuluhan pertanian	Sosialisasi SIMLUHTAN	0 Kali	1.500.000.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
		Fasilitasi perangkat sistem informasi data dan inormasi pertanian	7 Unit		
3.03.20.05	Peningkatan kapasitas kelembagaan pertanian	Peningkatan kapasitas kelembagaan petani	4 Unit	10.600.000.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
		Peingkatan kapasitas kelembagaan penyuluh	10 Unit		
3.03.21	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Terlaksananya upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak.	0 Kegiatan	5.950.000.000,00	
		Cakupan pencegahan dan penanggulanga penyakit ternak	60 %		
3.03.21.02	Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	terlaksananya pencegahan penyakit menular hewan	0 Kali Tahun	700.000.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
		Terlaksananya Pemelihara Kesehatan dan Penyakit Menular Ternak	10 Lokasi		
3.03.21.03	Pemusnahan ternak yang terjangkit penyakit endemik	Jumlah Pemusnahan Ternak yang Terjangkit Penyakit Zoonosis	500 Dosis	700.000.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
3.03.21.07	Penelitiadan Identifikasi penyakit Hewann	Terlaksananya pelayanan pasif, semi aktif dan aktif penyakit hewan di masyarakat	2.700 Kegiatan	1.050.000.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
		Jumlah sampel bahan pangan asal hewan yang diperiksa	450 Sampel		

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
3.03.21.08	Peningkatan Sumberdaya Kelembagaan Kesehatan Hewan	Jumlah puskesmas	11 Unit	1.500.000.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
3.03.21.13	Pencegahan, pengendalian, Pemberantasan penyakit hewan menular dan gangguan penyakit reproduksi ternak	Jumlah pencegahan dan Pengendalian penyakit ternak	10.000 Dosis	2.000.000.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
3.03.22	Program peningkatan produksi hasil peternakan	Meningkatnya produksi hasil peternakan	0 %	42.500.000.000,00	
		Produksi hasil ternak besar/kecil/unggas	34.930.354 Ton		
3.03.22.01	Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak	Tersedianya sarana pembibitan ternak	3 Unit	7.000.000.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
		Jumlah sarana pembibitan ternak UPTD	6 Unit		
3.03.22.02	Pembibitan dan perawatan ternak	Terlaksananya Pelayanan Pembibitan Ternak UPTD	400 Kegiatan	6.000.000.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
		Jumlah Pakan Ternak	45.000 Kg		
3.03.22.08	Pengembangan agribisnis perternakan	tersedianya lokasi agribisnis ternak	2.500 Lokasi	9.000.000.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
		Jumlah Ternak yang diadakan	300 Ekor		
3.03.22.11	Penguatan Kelembagaan Inseminasi Buatan	Terlaksananya pelayanan IB ternak sapi	3.000 Dosis	3.000.000.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
		Jumlah ternak sapi yang di IB	0 Dosis		
3.03.22.12	Pengembangan sarana dan prasarana produksi ternak	Tersedianya sarana prsarana produksi ternak di masyarakat	15 Unit	5.000.000.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
		Jumlah sarana prasarana produksi ternak di masyarakat	1 Unit		
3.03.22.17	Pengembangan ternak besar	Terlaksananya pengembangan ternak sapi di masyarakat	500 Kelompok	12.500.000.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
		Jumlah kelompok peternak sapi yang dibantu	0 Kelompok		
3.03.26	Program Perencanaan Pembangunan	Terlaksananya rapat evaluasi OPD se-Provinsi Papua, konsultasi, dan monitoring kegiatan	1 Kegiatan	1.000.000.000,00	
		Tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi pelaporan	12 Dokumen		
3.03.26.23	Penyusunan PEP RAD-GRK dan Inventarisasi Emisi GRK sektor Pertanian	Jumlah Dokumen PEP	1 Dokumen	1.000.000.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
		Inventarisasi GRK	0 Kegiatan		
3.03.40	Program Peningkatan Sumberdaya Pertanian	Persentase peningkatan kemampuan penyuluh pertanian melalui Diklat	3 %	22.000.000.000,00	
3.03.40.08	Peningkatan Sarana Prasarana Diklat Pertanian	Luas Sarana Balai Diklat yang disediakan	400 M2		
3.03.40.09	Peningkatan SDM Aparatur dan Non Aparatur Sekolah Pertanian	Jumlah SDM Aparatur dan Non Aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya	450 Orang	6.000.000.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
3.03.40.10	Peningkatan Sarana Prasarana Sekolah Pertanian	Luas Bangunan Sekolah yang dibangun/ditingkatkan	250 M2	7.000.000.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
3.03.40.17	Peningkatan SDM Aparatur dan Non Aparatur Balai Diklat Pertanian	Jumlah Aparatur dan Non Aparatur Balai Diklat yang mengikuti pelatihan	250 Orang	5.000.000.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
3.03.44	Program Peningkatan kemandirian pangan dan ketahanan pangan asal hewan	Cakupan penerapan standar keamanan pangan asal hewan	15 %	500.000.000,00	
3.03.44.01	Peningkatan mutu kemandirian pangan asal hewan	tersedianya pangan asal hewan yang bermutu	0 Produk		
		Terlaksananya pengawasan bahan pangan asal hewan di masyarakat	0 Kegiatan	500.000.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
		Jumlah Pengawasan bahan pangan asal hewan di masyarakat	10 Kali		
3.03.4 6	Pengembangan Tanaman Spesifik Lokal	Cakupan pengembangan kawasan tanaman pangan dan hortikultura	2 Wilayah	10.000.000.000,00	
3.03.46 .11	Pengembangan Kawasan Konservasi Lahan	Jumlah Kawasan Konservasi yang dikembangkan	5 Lokasi	10.000.000.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
		Perluasan/Pengembangan Kawasan konservasi lahan	0 Ha		
3.04	Kehutanan			78.307.613.000,00	
3.04.0 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	0 persen	5.023.000.000,00	
3.04.01 .06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Unit Mobil Dinas/Operasional yang terpelihara dan Terfasilitasi Perijinannya	44 Unit	50.000.000,00	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3.04.01 .07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Honor yang terbayarkan	38 Orang	750.000.000,00	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3.04.01 .08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Luas Gedung dan Halaman yang disediakan jasa kebersihan	0 M2	1.200.000.000,00	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
		Jumlah tenaga kebersihan dan Fasilitas Pendukung kebersihan kantor	49 Orang		
		Jumlah Jenis Bahan dan Alat Kebersihan	0 Jenis		
3.04.01 .09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	40 Unit	150.000.000,00	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3.04.01 .13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan Perlengkapan	50 Unit	250.000.000,00	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3.04.01 .14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	5 Unit	100.000.000,00	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3.04.01 .17	Penyediaan makanan dan minuman	Pelaksanaan penyediaan makan dan minum	350 Kegiatan	340.000.000,00	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
		Pelaksanaan makan minum tamu dan rapat	201 Kali Tahun		
		Pelaksanaan makan minum saat olah raga (hari Jumat)	0 Kali		
		Tersediannya Makanan dan Minuman	0 Bulan		
		Jumlah orang yang disediakan makan dan minuman	0 Orang		
3.04.01 .18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	49 Orang	1.200.000.000,00	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3.04.01 .19	Penyediaan Jasa Pengamanan	Pelaksanaan pembayaran insentif bagi tenag operator dan penjaga X-Ray VIP Room Bandara Sentani	a0 Orang Bulan	983.000.000,00	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
		Pelaksanaan pembayaran honor bagi satpam	2 Orang Bulan		
		Pelaksanaan uang makan satpam	2 Orang Bulan		
		Jumlah tenaga pengamanan	33 Orang		
3.04.0 2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	0 persen	6.950.000.000,00	
3.04.02 .05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan yang diadakan	15 Unit	2.000.000.000,00	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
		Jumlah kendaraan roda 2	0 Unit		
3.04.02 .07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan	20 Unit	300.000.000,00	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
3.04.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan perlengkapan	2 Unit	500.000.000,00	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3.04.02.10	Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur yang diadakan	100 Unit	500.000.000,00	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3.04.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	6 Unit	1.000.000.000,00	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
		belanja sewa	0 Tahun		
3.04.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	0 Unit	500.000.000,00	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
		Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	40 Unit		
		sewa kendaraan	0 Bulan		
3.04.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Pelaksanaan pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	6 Kegiatan	750.000.000,00	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
		Jumlah Perlengkapan Gedung kantor yang terpelihara	0 Unit		
		Tersediannya biaya pemeliharaan gedung kantor	0 Bulan		
3.04.02.29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Jumlah mebeleur yang dipelihara	50 Unit	200.000.000,00	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3.04.02.46	Sewa gedung	Jumlah gedung kantor yang disewa	32 Unit Tahun	1.200.000.000,00	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
		Sewa rumah jabatan	0 Unit Tahun		
3.04.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	0 persen	787.000.000,00	
3.04.03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus yang diadakan	787 Stell	787.000.000,00	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3.04.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	0 persen	1.000.000.000,00	
3.04.05.02	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	30 Orang	300.000.000,00	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3.04.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta bimbingan teknis tentang implementasi peraturan perundang-undangan	35 Orang	400.000.000,00	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3.04.05.04	Pendidikan dan Pelatihan Non Formal	Jumlah aparatur yang terlatih	10 Orang	300.000.000,00	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3.04.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya kualitas akuntabilitas OPD	0 persen	1.530.000.000,00	
3.04.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	30 Laporan	120.000.000,00	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
		Laporan LAKIP SKPD	0 Dokumen		
3.04.06.03	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jumlah pelaporan prognosis realisasi anggaran yang diselesaikan tepat waktu	10 Laporan	5.000.000,00	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3.04.06.05	Penyusunan Renja, RKA dan Perubahan APBD	Jumlah dokumen	30 Dokumen	200.000.000,00	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3.04.06.13	Penyusunan SOP	Jumlah Dokumen	5 Dokumen	1.000.000.000,00	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3.04.06.14	Peningkatan Kapasitas PPID	Jumlah orang	10 Orang	200.000.000,00	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
3.04.06.16	Penyusunan Dokumen Rencana Umum Pengadaan (RUP)	Jumlah Dokumen Rencana Umum Pengadaan (RUP)	10 Dokumen	5.000.000,00	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3.04.15	Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan	Nilai produksi sumber daya kehutanan	2.341 Rupiah	8.300.000.000,00	
		Cakupan pengembangan industri kayu masyarakat adat	10 Unit Tahun		
3.04.15.12	Peningkatan kinerja pemanfaatan hasil hutan Kayu	Optimalisasi Produksi Hasil Hutan	0 Perusahaan	600.000.000,00	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
		Meningkatnya kinerja pengolahan kayu bagi pemegang izin	20 Perusahaan		
3.04.15.16	Pameran pembangunan kehutanan Papua	Jumlah Event Yang diikuti	10 Komoditi	1.500.000.000,00	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
		Jumlah Pameran/Promosi kehutanan yang diikuti	0 Kegiatan		
3.04.15.19	Pembinaan dan Pengendalian Industri Primer Hasil Hutan	Jumlah Unit Industri Pengelola Hasil Hutan yang dibina	25 Unit	500.000.000,00	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3.04.15.20	Peningkatan Tertib Produksi dan Peredaran Hasil Hutan	Jumlah Ijin yang diterbitkan	20 Perusahaan	1.200.000.000,00	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3.04.15.23	Peningkatan Penatausahaan Iuran Kehutanan	Tertib Penatausahaan Iuran Kehutanan	0 Perusahaan	1.000.000.000,00	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
		Jumlah iuran kehutanan yang masuk ke kas negara	180.000.000.00 Rupiah		
		Jumlah pemegang izin yang membayar iuran	20 Perusahaan		
3.04.15.24	Pemetaan Partisipatif Masyarakat Adat Pemilik Hak Ulayat	Jumlah Wilayah Hutan Adat yang dilakukan pemetaan partisipatif	2 Lokasi	1.000.000.000,00	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
		Jumlah Lokasi Hutan Masyarakat Adat yang dipetakan	0 Lokasi		
3.04.15.25	Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Silvikultur pada IUPHHK-HA	Jumlah IUPHHK-HA yang dibina pelaksanaan silvikultur	15 Perusahaan	400.000.000,00	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3.04.15.28	Pengembangan Usaha Pemanfaatan Kayu Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Usaha pemanfaatan kayu masyarakat hukum adat	10 Unit	1.000.000.000,00	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
		Jumlah Kelompok masyarakat yang berkembang usaha pemanfaatan kayu	10 Kelompok		
3.04.15.29	Pengembangan Industri Kayu Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Industri Kayu Rakyat yang dibangun	5 Unit	600.000.000,00	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3.04.15.31	Pengembangan Sarana dan Prasarana Usaha Ekonomi Produktif melalui Kelompok Tani Hutan (KTH) (DAK)	Jumlah Kelompok Tani Hutan	10 Kelompok	500.000.000,00	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
		Jumlah sarana pengembangan hasil hutan	0 Unit		
3.04.15	Program rehabilitasi hutan dan lahan	Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan	29 %	11.350.000.000,00	
		Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	5.011 Ha		
		Rasio pencapaian restorasi lahan gambut	20 %		
3.04.16.01	Koordinasi penyelenggaraan reboisasi dan penghijauan hutan	Rehabilitas Hutan dan Tanaman Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	100 Ha	3.500.000.000,00	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3.04.16.06	Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan	Tesedianya Peningkatan peran	4 Kegiatan	1.000.000.000,00	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
		Jumlah kelompok masyarakat yang ditingkatkan perannya dalam RHL	6 Kelompok		
3.04.16.09	Pengembangan perbenihan tanaman hutan	Jumlah sumber benih dan kebun benih yang bersertifikat	0 Bibit	700.000.000,00	

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
		Luas kebun benih yang dibangun dan dikelola	2 Ha		Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
		Jumlah sumber benih yang di sertifikat	2 Lokasi		
		Luas areal sumberdaya genetik (ASDG) yang dikonservasi	2 Ha		
3.04.16.15	Pengembangan kawasan hutan mangrove	Luas wilayah Hutan Mangrove yang dikelola	60 Hektar	1.200.000.000,00	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3.04.16.17	Pengembangan Aneka Usaha Kehutanan	Peningkatan Kapasitas Kelompok Usaha Masyarakat	10 Kelompok	2.500.000.000,00	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
		Jumlah komoditi hasil hutan yang dikembangkan	0 Komoditi		
3.04.16.18	Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Terpeliharanya Tanaman Masy dgn Jenis Tanaman Unggulan	5 Ha	500.000.000,00	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3.04.16.22	Pengembangan Persemaian Tanaman hutan	Jumlah bibit tanaman hutan yang diproduksi	100.000 Bibit	1.000.000.000,00	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3.04.16.38	Peningkatan Kapasitas Penyuluh Kehutanan/PKSM	Jumlah penyuluh kehutanan yang ditingkatkan kapasitasnya	15 Orang	250.000.000,00	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3.04.16.39	Pembinaan dan Pengembangan Penyuluhan dan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Penyuluh dan Kelompok Tani Hutan yang dibina dan dikembangkan	15 Kelompok	200.000.000,00	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3.04.16.40	Sertifikasi areal sumber benih	Jumlah areal sumber benih yang tersertifikasi	2 Lokasi	250.000.000,00	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3.04.16.41	Pengembangan area sumber daya genetik	Jumlah lokasi area sumber daya genetik yang di kembangkan	2 Lokasi	250.000.000,00	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3.04.17	Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan	Luasan tutupan kawasan konservasi	7.755.284 Ha	18.380.113.000,00	
3.04.17.03	Bimbingan teknis pengendalian kebakaran hutan dan lahan	Terlaksananya bimbingan teknis dan simulasi penanganan kebakaran hutan oleh SATGASDAKARLUT	0 Orang	544.500.000,00	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
		Jumlah peserta BIMTEK dan simulasi penanganan kebakaran	200 Orang		
3.04.17.04	Penanggulangan kebakaran baton dan lahan	Terbentuknya daerah operasi pengendalian kebakaran hutan	1 Lokasi	2.750.000.000,00	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
		Terbentuknya daops dalkarhut	0 Unit		
3.04.17.05	Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak kerusakan hutan	Jumlah anggota Pramuka (Saka Wanabhakti dalam keterlibatan Peduli Hutan)	0 Kelompok	500.000.000,00	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
		Terlibatnya kelembagaan masyarakat adat dalam penanganan dampak Kerusakan hutan	0 Kegiatan		
		Jumlah kelompok masyarakat yang tersuluh	5 Kelompok		
3.04.17.07	Pengelolaan wisata alam di kawasan konservasi	Usaha wisata alam	5 Unit	450.000.000,00	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
		Usaha wisata alam	0 Lokasi		
3.04.17.08	Operasi pengamanan hutan terpadu	Menurunnya Kasus Ilegal Logging yang di tangani	0 Kasus	2.500.000.000,00	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
		Terselenggaranya operasi pengamanan hutan	6 Lokasi		
		Jumlah operasi pengamanan hutan yang dilaksanakan	0 Kali		
3.04.17.10	Penyidikan kasus bidang kehutanan	Jumlah kasus Kehutanan yang di proses penyidikan	2 Kasus	334.125.000,00	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
3.04.17 .12	Pengelolaan Taman Burung dan Taman Anggrek (TBTA) Biak	Meningkatnya kinerja penangkaran satwa burung dan flora anggrek sebagai media pengembangan konservasi , iptek	1 Persentase	700.000.000,00	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
		Peningkatan pengelolaan 1 unit taman burung dan taman angrek	0 Unit		
3.04.17 .21	Pembinaan Masyarakat Adat di dalam Kawasan Konservasi	meningkatnya peran serta masyarakat dalam Konservasi Kawasan	0 Kegiatan	550.000.000,00	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
		Terselenggaranya pembinaan masyarakat adat di dalam kawasan konservasi	3 Lokasi		
3.04.17 .27	Pembentukan PAmhut Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Kelompok pengeamanan hutan masyarakat adat yngg dibentuk	0 Kelompok	618.094.000,00	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
		Jumlah kelompok pamhut masyarakat ada yang di bentuk	4 Kelompok		
3.04.17 .29	Perlindungan Hutan dan Pengelolaan Kawasan Konservasi	Meningkatnya pengembangan kawasan Wisata alam di Kawasan Konservasi	3 Kabupaten	700.000.000,00	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
		meningkatnya pengelolaan kawasan wisata alam	0 Lokasi		
3.04.17 .37	Pengembangan Wisata di TBTA Biak	meningkatnya PAD	1 Kegiatan	300.000.000,00	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3.04.17 .39	Pengelolaan Kawasan Gambut dan Rawa	Jumlah Lokasi Pengelolaan Gambut dan Rawa	2 Lokasi	350.000.000,00	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3.04.17 .41	Peningkatan Kapasitas Polisi Kehutanan dan PPNS Kehutanan	Jumlah Polisi dan PPNS Kehutanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	20 Orang	2.583.394.000,00	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3.04.17 .42	Pengembangan Data dan Informasi Cagar Alam Cycloop dan Danau Sentani	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Cagar Alam Cycloop dan Danau Sentani	1 Dokumen	500.000.000,00	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3.04.17 .43	Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial	Jumlah Lokasi Kawasan Esensial yang dikelola	1 Lokasi	500.000.000,00	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3.04.17 .44	Perlindungan Hutan dan Pengelolaan Kawasan Penyangga Konservasi	Jumlah Hutan dan Kawasan Penyangga Konservasi yang dilindungi	3 Lokasi	550.000.000,00	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3.04.17 .45	Penyediaan Sarana dan Prasarana Ekowisata	Jumlah Sarana dan Prasarana Ekowisata	1 Unit	1.500.000.000,00	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3.04.17 .46	Pelatihan Pengelola Ekowisata	Jumlah Pelatihan	5 Kegiatan	450.000.000,00	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3.04.17 .47	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelengkap Kebun Raya Koya Koso	Jumlah Sarana dan Prasarana yang tersedia	2 Unit	1.000.000.000,00	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3.04.17 .48	Pembebasan Lahan/Tanah Kebun Raya Koya Koso	Luas Tanah yang dibebaskan	100 Hektar	1.000.000.000,00	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3.04.20	Program perencanaan dan pengembangan hutan	Persentase luas usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem	40 %	3.287.500.000,00	
3.04.20 .15	Pengembangan Sistem Informasi Geografis	Peralatan dan Peta potensi hutan	1 Unit	500.000.000,00	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3.04.20 .17	Inventarisasi, Identifikasi dan Pemetaan Potensi	Peta Citra Landsat cakupan Papua	2 Lembar	300.000.000,00	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3.04.20 .18	Pengawasan dan Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan	Laporan pengawasan dan pengendalian penggunaan kawasan hutan	5 Lokasi	500.000.000,00	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3.04.20 .19	Pengembangan Data dan Informasi Kehutanan	Data dan Informasi pelaksanaan pembangunan Kehutanan	275 Laporan	700.000.000,00	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
		Jumlah data dan informasi yang disediakan	275 Laporan		

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
3.04.20.21	Pengembangan dan Pembangunan KPH	Monitornig dan evaluasi rancang bangun KPH	14 Unit	487.500.000,00	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
		Terbangunnya kantor KPH	0 Unit		
3.04.20.60	Inventarisasi dan Identifikasi Potensi Hasil Hutan Bukan Kayu	Jumlah Data Potensi Hasil Hutan Bukan Kayu	2 Dokumen	300.000.000,00	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3.04.20.61	Peningkatan Kinerja Pemanfaatan Hasil Hutan	Jumlah Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan	4 Dokumen	200.000.000,00	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3.04.20.62	Inventarisasi dan Identifikasi Potensi Jasa Lingkungan	Jumlah Data Potensi Jasa Lingkungan	1 Dokumen	300.000.000,00	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3.04.2.6	Program Penguatan Kelembagaan Pengelolaan Hutan	Jumlah Cabang Dinas Kehutanan (CDK) dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)	36 Unit	21.700.000.000,00	
		Luasan hutan yang dikelola melalui Cabang Dinas Kehutanan (CDK) dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)	660 Ha		
3.04.26.02	Pengurusan pemanfaatan hutan pada CDK Jayapura	Luas kelola pemanfaatan hutan pada CDK Jayapura	1 Hektar	750.000.000,00	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3.04.26.03	Pengurusan pemanfaatan hutan pada CDK Sarmi	Luas Kelola pemanfaatan hutan pada CDK Sarmi	1 Hektar	750.000.000,00	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3.04.26.04	Pengurusan pemanfaatan hutan pada CDK Keerom	Luas kelola pemanfaatan hutan pada CDK Keerom	1 Hektar	750.000.000,00	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3.04.26.05	Pengurusan pemanfaatan hutan pada CDK Mamberamo Raya	Luas kelola pemanfaatan hutan pada CDK Mamberamo Raya	1 Hektar	750.000.000,00	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3.04.26.06	Pengurusan pemanfaatan hutan pada CDK Nabire	Luas kelola pemanfaatan hutan pada CDK Nabire	1 Hektar	750.000.000,00	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3.04.26.07	Pengurusan pemanfaatan hutan pada CDK Mimika	Luas kelola pemanfaatan hutan pada CDK Mimika	1 Hektar	750.000.000,00	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3.04.26.08	Pengurusan pemanfaatan hutan pada CDK Asmat	Luas kelola pemanfaatan hutan pada CDK Asmat	1 Hektar	750.000.000,00	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3.04.26.09	Pengurusan pemanfaatan hutan pada CDK Mappi	Luas kelola pemanfaatan hutan pada CDK Mappi	1 Hektar	750.000.000,00	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3.04.26.10	Pengurusan pemanfaatan hutan pada CDK Merauke	Luas kelola pemanfaatan hutan pada CDK Merauke	1 Hektar	750.000.000,00	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3.04.26.11	Pengurusan pemanfaatan hutan pada CDK Boven Digoel	Luas kelola pemafaatan hutan pada CDK Boven Digoel	1 Hektar	750.000.000,00	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3.04.26.12	Pengurusan pemanfaatan hutan pada CDK Yalimo	Luas kelola pemafaatan hutan	1 Ha	500.000.000,00	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
		Luas kelola pemanfaatan hutan pada CDK Yalimo	1 Hektar		
3.04.26.13	Pengurusan pemanfaatan hutan pada CDK Yahukimo	Luas kelola pemafaatan hutan	1 Ha	750.000.000,00	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
		Luas kelola pemanfaatan hutan pada CDK Yahukimo	1 Hektar		
3.04.26.14	Pengurusan pemanfaatan hutan pada CDK Dogiyai - Deyai	Luas kelola pemafaatan hutan	1 Ha	750.000.000,00	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
		Luas kelola pemanfaatan hutan pada CDK Dogiyai - Deyai	1 Hektar		
3.04.26.15	Pengurusan pemanfaatan hutan pada CDK Intan Jaya	Luas kelola pemanfaatan hutan pada CDK Intan Jaya	1 Hektar	750.000.000,00	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3.04.26.16	Pengurusan pemanfaatan hutan pada CDK Mamberamo Tengah	Luas kelola pemanfaatan hutan pada CDK Mamberamo Tengah	1 Hektar	750.000.000,00	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
3.04.26.17	Pengurusan pemanfaatan hutan pada CDK Paniai	Luas kelola pemanfaatan hutan pada CDK Paniai	1 Hektar	750.000.000,00	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3.04.26.18	Pengurusan pemanfaatan hutan pada CDK Tolikara	Luas kelola pemanfaatan hutan pada CDK Tolikara	1 Hektar	750.000.000,00	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3.04.26.19	Pengurusan pemanfaatan hutan pada CDK Puncak Jaya	Luas kelola pemanfaatan hutan pada CDK Puncak Jaya	1 Hektar	750.000.000,00	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3.04.26.20	Pengurusan pemanfaatan hutan pada CDK Puncak	Luas kelola pemanfaatan hutan pada CDK Puncak	1 Hektar	500.000.000,00	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3.04.26.21	Pengelolaan kawasan hutan pada UPTD KPHL Unit II Nabire	Luas kelola kawasan hutan pada UPTD KPHL Unit II Nabire	1 Hektar	500.000.000,00	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3.04.26.22	Pengelolaan kawasan hutan pada UPTD KPHL Unit VI Mimika	Luas kelola kawasan hutan pada UPTD KPHL Unit VI Mimika	1 Hektar	500.000.000,00	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3.04.26.23	Pengelolaan kawasan hutan pada UPTD KPHP Unit XVII Waropen	Luas kelola kawasan hutan pada UPTD KPHP Unit XVII Waropen	1 Hektar	500.000.000,00	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3.04.26.24	Pengelolaan kawasan hutan pada UPTD KPHP Unit XXI Lintas Sarmi - Mamberamo Raya	Luas kelola kawasan hutan pada UPTD KPHP Unit XXI Lintas Sarmi - Mamberamo Raya	1 Hektar	500.000.000,00	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3.04.26.25	Pengelolaan kawasan hutan pada UPTD KPHP Unit XXIII Sarmi	Luas kelola kawasan hutan pada UPTD KPHP Unit XXIII Sarmi	1 Hektar	500.000.000,00	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3.04.26.26	Pengelolaan kawasan hutan pada UPTD KPHP Unit XIX Kep. Yapen	Luas kelola kawasan hutan pada UPTD KPHP Unit XIX Kep. Yapen	1 Hektar	500.000.000,00	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3.04.26.27	Pengelolaan kawasan hutan pada UPTD KPHL Unit XX Biak	Luas kelola kawasan hutan pada UPTD KPHL Unit XX Biak	1 Hektar	500.000.000,00	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3.04.26.28	Pengelolaan kawasan hutan pada UPTD KPHP Unit XXVIII Kota Jayapura	Luas kelola kawasan hutan pada UPTD KPHP Unit XXVIII Kota Jayapura	1 Hektar	500.000.000,00	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3.04.26.29	Pengelolaan kawasan hutan pada UPTD KPHP Unit XXIX Keerom	Luas kelola kawasan hutan pada UPTD KPHP Unit XXIX Keerom	1 Hektar	500.000.000,00	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3.04.26.30	Pengelolaan kawasan hutan pada UPTD KPHL Unit XXXV Pegunungan Bintang	Luas kelola kawasan hutan pada UPTD KPHL Unit XXXV Pegunungan Bintang	1 Hektar	500.000.000,00	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3.04.26.31	Pengelolaan kawasan hutan pada UPTD KPHL Unit XLII A Jayawijaya	Luas kelola kawasan hutan pada UPTD KPHL Unit XLII A Jayawijaya	1 Hektar	500.000.000,00	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3.04.26.32	Pengelolaan kawasan hutan pada UPTD KPHL Unit XLII B Lanny Jaya	Luas kelola kawasan hutan pada UPTD KPHL Unit XLII B Lanny Jaya	1 Hektar	500.000.000,00	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3.04.26.33	Pengelolaan kawasan hutan pada UPTD KPHL Unit XLIII Nduga	Luas kelola kawasan hutan pada UPTD KPHL Unit XLIII Nduga	1 Hektar	500.000.000,00	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3.04.26.34	Pengelolaan kawasan hutan pada UPTD KPHP Unit LIII Boven Digoel	Luas kelola kawasan hutan pada UPTD KPHP Unit LIII Boven Digoel	1 Hektar	500.000.000,00	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3.04.26.35	Pengembangan perbenihan tanaman hutan	Jumlah pengembangan sarana dan prasarana perbenihan tanaman hutan	5 Unit	950.000.000,00	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3.05	Energi dan Sumberdaya Mineral			163.827.525.000,00	
3.05.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	0 persen	3.594.574.000,00	
3.05.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang disediakan	2.000 Surat	10.000.000,00	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
3.05.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Jasa Layanan berlangganan Listrik,Air,Telepon, Transponder	48 Layanan	60.000.000,00	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
3.05.01 .08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Luas Gedung dan Halaman yang disediakan jasa kebersihan	200 M2	10.000.000,00	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
		Jumlah tenaga kebersihan dan Fasilitas Pendukung kebersihan kantor	7 Orang		
		Jumlah Jenis Bahan dan Alat Kebersihan	10 Jenis		
3.05.01 .10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	70 Jenis	181.500.000,00	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
3.05.01 .11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan	3 Jenis	60.000.000,00	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
		Jumlah penggandaan	1 Lembar		
		Jumlah Jenis Barang Cetakkan yang Disediakan	1 Jenis		
		Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	12 Bulan		
3.05.01 .15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	2.100 Jenis	21.000.000,00	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
3.05.01 .16	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah liter bahan bakar untuk kendaraan operasional	700 Liter	115.600.000,00	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
		jumlah mobilitas termasuk tenaga angkat dan turun beras ke kantor	12 Kali		
3.05.01 .17	Penyediaan makanan dan minuman	Pelaksanaan penyediaan makan dan minum	0 Kegiatan	168.000.000,00	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
		Pelaksanaan makan minum tamu dan rapat	50 Kali Tahun		
		Pelaksanaan makan minum saat olah raga (hari Jumat)	48 Kali		
		Tersediannya Makanan dan Minuman	12 Bulan		
		Jumlah orang yang disediakan makan dan minuman	0 Orang		
3.05.01 .18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	98 Orang	2.546.474.000,00	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
3.05.01 .19	Penyediaan Jasa Pengamanan	Pelaksanaan pembayaran insentif bagi tenag operator dan penjaga X-Ray VIP Room Bandara Sentani	a84 Orang Bulan	422.000.000,00	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
		Pelaksanaan pembayaran honor bagi satpam	24 Orang Bulan		
		Pelaksanaan uang makan satpam	1 Orang Bulan		
		Jumlah tenaga pengamanan	2 Orang		
3.05.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	0 persen	800.000.000,00	
3.05.02 .07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan	12 Unit	250.000.000,00	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
3.05.02 .10	Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur yang diadakan	105 Unit	300.000.000,00	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
3.05.02 .22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 Unit	100.000.000,00	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
		belanja sewa	1 Tahun		
3.05.02 .24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	0 Unit	150.000.000,00	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
		Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	30 Unit		
		sewa kendaraan	0 Bulan		

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
3.05.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	0 persen	490.000.000,00	
3.05.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	140 Stell	210.000.000,00	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
3.05.03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus yang diadakan	140 Stell	280.000.000,00	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
3.05.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	0 persen	1.060.000.000,00	
3.05.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	40 Orang	1.060.000.000,00	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
3.05.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya kualitas akuntabilitas OPD	0 persen	180.000.000,00	
3.05.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	6 Laporan	50.000.000,00	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
		Laporan LAKIP SKPD	0 Dokumen		
3.05.06.02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah pelaporan keuangan semesteran yang diselesaikan tepat waktu	2 Laporan	50.000.000,00	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
3.05.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	1 Laporan	30.000.000,00	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
3.05.06.05	Penyusunan Renja, RKA dan Perubahan APBD	Jumlah dokumen	3 Dokumen	50.000.000,00	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
3.05.15	Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan	Persentase hasil pengendalian dan pengawasan yang ditindaklanjuti oleh pengusaha pertambangan	90 %	133.375.000,00	
		Cakupan kelompok penambang mineral non logam dan batuan yang dibina	50 %		
		Persentase penambangan illegal yang ditertibkan	90 %		
		Persentase pengembangan Sistem informasi sumber daya mineral	75 %		
		Cakupan pemetaan kawasan potensi bencana berbasis geologi	50 %		
3.05.15.09	Pembinaan dan Pengawasan ijin usaha jasa pertambangan (IUJP)	Jumlah laporan IUJP	1 Buku	133.375.000,00	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
3.05.22	Program Pelayanan Air Bersih	Cakupan keterlayanan air bersih pedesaan (50 %)	0 %	13.220.575.000,00	
		Cakupan keterlayanan air minum dan sanitasi	230 %		
3.05.22.02	Pemanfaatan dan pengelolaan mata air untuk mendukung program pemberdayaan masyarakat kampung sulit air bersih (PROSPEK)	Cakupan keterlayanan air bersih pedesaan (50 %)u	0 %	1.384.050.000,00	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
		Jumlah Intake	3 Titik		
		Jumlah lokasi	3 Lokasi		
3.05.22.07	Pemboran air bawah tanah untuk masyarakat kampung sulit air bersih	Tersedianya air bawah tanah untuk masyarakat	20 Lokasi	9.998.000.000,00	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
		Jumlah sumur bor	20 Titik		
3.05.22.15	Survey detail pemanfaatan dan pengelolaan mataair	jumlah bangunan penurapan air	2 Unit	1.194.250.000,00	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
3.05.22.16	Kegiatan Pemantauan Pemanfaatan Air Pada PT Freeport Indonesia	jumlah Dokumen Pemantauan Pemanfaatan Air Tanah	1 Dokumen	398.275.000,00	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
3.05.22.17	Kegiatan Pengawasan dan Penertiban Air Tanah	Jumlah Laporan Pengawasan	2 Laporan	246.000.000,00	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
3.05.26	Program Pembinaan, Pengawasan, Pengusahaan Mineral dan Batubara	Meningkatkan pendapatan masyarakat ada pemilik hak ulayat	0 %	3.477.450.000,00	
		Cakupan Pengawasan dan Penertiban Penambang Emas Tanpa Ijin (PETI)	90 %		
3.05.26.06	Pengawasan dan pembinaan pertambangan rakyat	Jumlah kelompok binaan	3 Kelompok	399.375.000,00	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
3.05.26.09	Pengawasan dan Pembinaan Usaha Pertambangan para Pemegang IUP Mineral dan Batubara	Jumlah pemegang IUP Minerba	3 Perusahaan	398.675.000,00	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
3.05.26.13	Pembinaan dan Pengawasan Produksi Pertambangan Mineral Non Logam dan Batuan	Jumlah kelompok binaan	4 Kelompok	415.700.000,00	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
3.05.26.14	Pengawasan dan Penertiban Penambang Emas Tanpa Ijin (PETI)	Jumlah lokasi penambangan	5 Lokasi	2.263.700.000,00	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
3.05.28	Program Pengelolaan Listrik dan Pemanfaatan Energi	Tingkat elektrifikasi	58 persen	2.803.000.000,00	
		Persentase kampung terakses listrik	54 persen		
		Cakupan pemenuhan listrik dalam pelaksanaan PON	0 persen		
		Cakupan ketersediaan energi murah dan ramah lingkungan	20 %		
3.05.28.54	Penyusunan Rencana Umum Energi Daerah Papua (RUED-P)	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	1.000.000.000,00	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
3.05.28.56	Kegiatan Pelatihan Tenaga Teknik Operator Ketenagalistrikan Dan Energi Baru Terbarukan	Jumlah peserta pelatihan operator PLTD, PLTMH, PLTS	60 Orang	801.700.000,00	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
3.05.28.57	Kegiatan Pembinaan Dan Pengawasan Penyedia Dan Usaha Jasa Penunjang Ketenagalistrikan	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasa	n3 Laporan	500.300.000,00	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
3.05.28.58	Kegiatan Sosialisasi Pengaturan Keselamatan Operasi Dan Kelayakan Teknik	Jumlah Peserta Sosialisasi Pengaturan Keselamatan Operasi Dan Kelayakan Teknik	60 Orang	501.000.000,00	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
3.05.33	Pengembangan & Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan	Jumlah/cakupan pengembangan dan pemanfaatan energy baru terbarukan	0 %	86.627.481.146,00	
		Jumlah RT yang terlayani PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya)	250 rumahtangga		
		Jumlah RT yang terlayani PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro)	500 rumahtangga		
		Jumlah kampung yang memanfaatkan sumber daya energi terbarukan	100 kampung		
3.05.33.03	Pembangunan PLTMH	Jumlah RT yang terlayani Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH)	750 RT	31.889.282.254,00	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
3.05.33.23	Kegiatan Pembangunan PLTS Terpusat	Jumlah RT yang terlayani Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	750 RT	48.513.348.892,00	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
3.05.33.24	Kegiatan Survey dan Perencanaan Teknis Potensi Tenaga Air	Jumlah Dokumen Survey dan Perencanaan Teknis Potensi Tenaga Air	5 Dokumen	1.881.600.000,00	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
3.05.33.25	Kegiatan Survey dan Perencanaan Teknis Potensi Tenaga Surya	Jumlah Dokumen Survey dan Perencanaan Teknis Potensi Tenaga Surya	5 Dokumen	1.843.250.000,00	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
3.05.33.26	Kegiatan Revitalisasi PLTMH / PLTS	Jumlah unit PLTMH/PLTS	3 Unit	1.000.000.000,00	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
3.05.33.27	Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS)	Jumlah titik PJUTS	50 Unit	1.500.000.000,00	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
3.05.34	Program Pengembangan ESDM	Tersedianya dokumen sebagai sumber Data	10 Dokumen	51.441.069.854,00	
3.05.34.02	Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Mineral dan Geologi	Jumlah Rumah Tangga Terlayani Air Bersih	500 RT	10.500.000.000,00	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
		Jumlah Laporan Pengembangan Sumber Daya Mineral	10 Laporan		
3.05.34.03	Kegiatan Pengembangan Energi Listrik	Jumlah Laporan Pengembangan Energi Listrik	10 Laporan	40.941.069.854,00	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
		Jumlah Unit Terbangun	10 Unit		
3.06	Perdagangan			72.493.082.000,00	
3.06.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	0 persen	5.956.082.000,00	
3.06.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang disediakan	1.500 Surat	347.900.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
3.06.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Jasa Layanan berlangganan Listrik,Air,Telepon, Transponder	12 Layanan	821.700.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
3.06.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	60 Jenis	489.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
3.06.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan	20 Jenis	301.282.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
		Jumlah penggandaan	3.200 Lembar		
		Jumlah Jenis Barang Cetak yang Disediakan	20 Jenis		
		Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	12 Bulan		
3.06.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Pelaksanaan penyediaan makan dan minum	12 Kegiatan	548.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
		Pelaksanaan makan minum tamu dan rapat	12 Kali Tahun		
		Pelaksanaan makan minum saat olah raga (hari Jumat)	12 Kali		
		Tersediannya Makanan dan Minuman	12 Bulan		
		Jumlah orang yang disediakan makan dan minuman	70 Orang		
3.06.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	30 Orang	2.661.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
					dan Tenaga Kerja
3.06.01 .19	Penyediaan Jasa Pengamanan	Pelaksanaan pembayaran insentif bagi tenag operator dan penjaga X-Ray VIP Room Bandara Sentani	a0 Orang Bulan	787.200.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
		Pelaksanaan pembayaran honor bagi satpam	0 Orang Bulan		
		Pelaksanaan uang makan satpam	0 Orang Bulan		
		Jumlah tenaga pengamanan	16 Orang		
3.06.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	0 persen	34.144.000.000,00	
3.06.02 .03	Pembangunan gedung kantor	Luas bangunan yang dibangun	1 M2	10.000.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
		Tersedianya desain perencanaan bangunan	0 Dokumen		
3.06.02 .05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan yang diadakan	3 Unit	1.000.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
		Jumlah kendaraan roda 2	0 Unit		
3.06.02 .07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan	10 Unit	900.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
3.06.02 .09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan perlengkapan	10 Unit	900.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
3.06.02 .22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	10 Unit	570.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
		belanja sewa	0 Tahun		
3.06.02 .24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	4 Unit	424.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
		Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	4 Unit		
		sewa kendaraan	0 Bulan		
3.06.02 .26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Pelaksanaan pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	25 Kegiatan	250.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
		Jumlah Perlengkapan Gedung kantor yang terpelihara	13 Unit		
		Tersediannya biaya pemeliharaan gedung kantor	12 Bulan		

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
3.06.02.30	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Luas bangunan yang direhab	10.000 M2	20.100.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
3.06.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	0 persen	7.038.000.000,00	
3.06.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	306 Stell	2.448.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
3.06.03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus yang diadakan	306 Stell	4.590.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
3.06.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	0 persen	1.000.000.000,00	
3.06.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	3 Orang	1.000.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
3.06.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya kualitas akuntabilitas OPD	0 persen	1.525.000.000,00	
3.06.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	20 Laporan	150.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
		Laporan LAKIP SKPD	0 Dokumen		
3.06.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	20 Laporan	238.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
3.06.06.05	Penyusunan Renja, RKA dan Perubahan APBD	Jumlah dokumen	20 Dokumen	258.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
3.06.06.10	Forum SKPD Provinsi Papua	Jumlah Peserta Forum	200 Orang	879.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
3.06.15	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan	Terlaksananya Perlindungan Konsumen dan pengamanan	0 Kegiatan	3.030.000.000,00	
		Cakupan penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen	85 %		

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
		Cakupan pengawasan peredaran barang dan jasa	100 %		
		Rata-rata margin perdagangan barang-barang kebutuhan pokok	200 %		
		Persentase kenaikan pengeluaran per kapita perbulan rumah tangga	14 %		
3.06.15.01	Koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen	Terlaksananya Koordinasi Peningkatan hubungan kerja	1 Kegiatan	130.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
3.06.15.03	Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa	Terlaksananya Pengawasan peredaran barang dan jasa	5 Kegiatan	500.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
3.06.15.04	operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrolagian daerah	Tersediannya operasional dan pengembangan UPT Keme	0 Unit	600.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
		Tersediannya operasional dan pengembangan UPT Keme	1 Unit		
3.06.15.06	Pengawasn terhadap barang dan jasa bagi masyarakat	meningkatnya jaminan keamanan pengguna barang dan jasa	5 Komoditi	800.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
3.06.15.07	Kegiatan sosialisasi undang-undang perlindungan konsumen dan perdasi no. 15 tahun 2013	peningkatan pemahaman tentang hak-hak dari konsumen untuk mendapatkan perlindungan	5 Kabupaten	500.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
3.06.15.10	Sosialisasi pemberdayaan konsumen cerdas didaerah dalam rangka hari konsumen nasional	Tercapainya pemahaman dan peran konsumen dalam memilih produk yang di beli	50 Kegiatan	500.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
3.06.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Terlaksananya Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	0 Kegiatan	5.050.000.000,00	
		prosentase Peningkatan Pengembangan Ekspor	0 %		
		Prosentase Meningkatnya Wirausaha baru dan UMKM yang kompetitif	0 %		
		Nilai ekspor Non Migas Papua	2.624 Rupiah		
3.06.17.02	Pengembangan informasi peluang pasar perdagangan luar negeri	tersediannya informasi mengenai peluang pasar perdagangan luar negeri	5 Dokumen	500.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
3.06.17.14	Dukungan marketing poin didaerah perbatasan RI/PNG	adanya kontak dagang di perbatasan	2 Dokumen	850.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
3.06.17.15	Melakukan join even pameran bersama di daerah perbatasan RI/PNG	Terlaksana Promosi Produk Indonesia di Daerah Perbatasan	5 Laporan	1.000.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
3.06.17.18	Pameran dalam dan luar negeri dalam rangka promosi komoditi ekspor daerah	Promosi dan Perluasan pasar produk ekspor Papua	3 Dokumen	2.000.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
3.06.17.20	Monitoring, Pendataan dan Penyusunan Program Perdagangan luar Negeri di Daerah	updating data realisasi program dan laporan kebutuhan penyusunan program	2 Dokumen	700.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
3.06.18	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Terlaksananya Peningkatan Efisiensi Pedagangan Dalam Negeri	0 Kegiatan	6.000.000.000,00	
		Rata-rata margin harga bahan-bahan makanan kabupaten/kota terhadap ibu kota provinsi	205 %		
		Persentase peningkatan pemasaran komoditas unggulan Provinsi Papua	3 %		
3.06.18.03	Pengembangan pasar dan distribusi barang / produk	Terbangunnya 3 pasar	2 Unit	5.000.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
		Jumlah Pasar yang dibangun	0 Unit		
3.06.18.04	Pengembangan kelembagaan kerjasama kemitraan	terbentuknya MOU dengan mitra dagang	2 Kelompok	500.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
3.06.18.07	Sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Terlaksananya Sosialisasi peningkatan penggunaan p	1 Kegiatan	500.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
3.06.20	Pengembangan industri kecil dan menengah			8.750.000.000,00	
3.06.20.02	fasilitasi bagi industri keckl dan menengah terhadap pemanfaatan sumberdaya alam	terlaksananya fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumberdaya alam	4 Kelompok	3.000.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
3.06.20.09	Peningkatan produk buah merah	2	1 Kelompok	2.300.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
3.06.20.11	Sertifikasi HaKI	terbitnya sertifikat haki bagi pelaku IKM	15 Dokumen	450.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
3.06.20.14	Pengembangan kopi di wilayah pegunungan	6	15 Kelompok	1.000.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
3.06.20.16	Pengembangan fungsi laboratorium dan pengawasan penerapan standarisasi	Meningkatnya pelayanan pengujian mutu produk	6 Layanan	1.500.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
3.06.20.20	Desiminasi dan uji coba pembuatan/pengolahan sabun dan shampo dari buah merah skala laboratorium	deversifikasi pengolahan buah merah	5 Produk	500.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
3.06.20.24	Pengembangan teknologi Pengolahan buah merah	2	10 Kelompok	0,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
3.07	Perindustrian			9.700.000.000,00	
3.07.16	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Jumlah IKM yang menerapkan teknologi tepat guna	30 IKM per tahun	6.700.000.000,00	
		Cakupan Industri kecil dan Menengah yang dibina	50 Unit		
		Kawasan sentra industri rakyat yang berfungsi	1 Kawasan		
		Cakupan Industri kecil dan Menengah OAP yang dibina	70 IKM per tahun		
		Jumlah Jenis Komoditas Industri lokal yang dilabeli HAKI	3 Jenis		
		Persentase IKM yang memiliki sertifikasi mutu barang	5 %		
		Jumlah sentra industri rakyat	0 Unit		
3.07.16.02	Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan kluster industri	Terlaksananya Pembinaan Indutri Kcil dan Menegah d	10	3.500.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
		Terlaksananya Pembinan IKM dalam Memperkuat Jaringan Kluster Industri	1 Kelompok		
		Terlaksananya Pembinaan IKM terkait Kluster Industri	1 Kelompok		
		Jumlah IKM yang memiliki Nilai Tambah Industri	0 IKM		

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
3.07.16.03	Penyusunan kebijakan industri terkait dan industri penunjang industri kecil dan menengah	Terlaksananya Kebijakan Industri terkait dan Indus	1 Kegiatan	500.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
3.07.16.06	Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta	Terlaksananya Fasilitasi Kerjasama Kemitraan indus	3 Kegiatan	2.700.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
		Terlaksananya pameran Dekranasda bagi perajin OAP	25 Kelompok		
		Jumlah IKM yang dapat mempromosikan Produk dalam Pameran Dekranasda	0 IKM		
3.07.18	Program Penataan Struktur Industri	Cakupan penataan struktur industri	0 %	3.000.000.000,00	
3.07.18.02	Penyediaan sarana maupun prasarana klaster industri	Terlaksananya Saran maupun prasarana klaster indus	10	2.000.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
3.07.18.03	Pembinaan keterkaitan produksi industri hulu hingga ke hilir	Terlaksananya Pembinaan keterkaitan produksi indus	20 Orang	1.000.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
3.08	Transmigrasi			300.000.000,00	
3.08.16	Program Transmigrasi Lokal	Jumlah Transmigran Lokal yang Ditempatkan	0 Orang	300.000.000,00	
3.08.16.02	Pelatihan transmigrasi lokal	Jumlah Transmigran Lokal yang mengikuti Pelatihan	150 Orang	300.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang			1.986.490.996.070,00	
4.01	Administrasi Pemerintahan			1.726.714.601.200,00	
4.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	4.000 persen	144.542.376.880,00	
		Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	100 persen		
		Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	20 persen		
4.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang disediakan	5.500 Surat	1.000.000.000,00	Sekretariat Daerah
4.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang disediakan	1.000 Surat	300.000.000,00	Biro Hukum
4.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang disediakan	1.350 Surat	1.404.784.000,00	Biro Umum dan Protokol
4.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang disediakan	1.000 Surat	636.000.000,00	Biro Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa
4.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang disediakan	150 Surat	300.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
4.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang disediakan	500 Surat	970.000.000,00	Badan Penghubung Daerah
4.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang disediakan	1.500 Surat	200.000.000,00	Sekretariat Majelis Rakyat Papua
4.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang disediakan	1.000 Surat	10.000.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang disediakan	500 Surat	50.000.000,00	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerja Sama
4.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Jasa Layanan berlangganan Listrik,Air,Telepon, Transponder	180 Layanan	1.200.000.000,00	Sekretariat Daerah
4.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Jasa Layanan berlangganan Listrik,Air,Telepon, Transponder	7 Layanan	7.056.000.000,00	Biro Umum dan Protokol
4.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Jasa Layanan berlangganan Listrik,Air,Telepon, Transponder	12 Layanan	2.737.460.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua
4.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Jasa Layanan berlangganan Listrik,Air,Telepon, Transponder	12 Layanan	1.500.000.000,00	Badan Penghubung Daerah
4.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Jasa Layanan berlangganan Listrik,Air,Telepon, Transponder	12 Layanan	200.000.000,00	Sekretariat Majelis Rakyat Papua
4.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Jasa Layanan berlangganan Listrik,Air,Telepon, Transponder	24 Layanan	200.000.000,00	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerja Sama
4.01.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	0 Unit	0,00	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerja Sama
4.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Unit Mobil Dinas/Operasional yang terpelihara dan Terfasilitasi Perijinannya	30 Unit	1.712.000.000,00	Sekretariat Daerah
4.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Unit Mobil Dinas/Operasional yang terpelihara dan Terfasilitasi Perijinannya	13 Unit	8.000.000,00	Biro Organisasi
4.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Unit Mobil Dinas/Operasional yang terpelihara dan Terfasilitasi Perijinannya	121 Unit	586.500.000,00	Biro Umum dan Protokol
4.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Unit Mobil Dinas/Operasional yang terpelihara dan Terfasilitasi Perijinannya	85 Unit	171.325.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua
4.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Unit Mobil Dinas/Operasional yang terpelihara dan Terfasilitasi Perijinannya	30 Unit	100.000.000,00	Sekretariat Majelis Rakyat Papua
4.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Unit Mobil Dinas/Operasional yang terpelihara dan Terfasilitasi Perijinannya	42 Unit	52.000.000,00	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerja Sama
4.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Honor yang terbayarkan	45 Orang	1.750.086.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua
4.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Honor yang terbayarkan	8 Orang	330.000.000,00	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerja Sama
4.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Luas Gedung dan Halaman yang disediakan jasa kebersihan	0 M2	1.200.000.000,00	Sekretariat Daerah
		Jumlah tenaga kebersihan dan Fasilitas Pendukung kebersihan kantor	0 Orang		

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
		Jumlah Jenis Bahan dan Alat Kebersihan	500 Jenis		
4.01.01 .08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Luas Gedung dan Halaman yang disediakan jasa kebersihan	0 M2	18.650.000.000,00	Biro Umum dan Protokol
		Jumlah tenaga kebersihan dan Fasilitas Pendukung kebersihan kantor	186 Orang		
		Jumlah Jenis Bahan dan Alat Kebersihan	45 Jenis		
4.01.01 .08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Luas Gedung dan Halaman yang disediakan jasa kebersihan	0 M2	300.000.000,00	Biro Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa
		Jumlah tenaga kebersihan dan Fasilitas Pendukung kebersihan kantor	3 Orang		
		Jumlah Jenis Bahan dan Alat Kebersihan	10 Jenis		
4.01.01 .08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Luas Gedung dan Halaman yang disediakan jasa kebersihan	45.969 M2	4.100.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua
		Jumlah tenaga kebersihan dan Fasilitas Pendukung kebersihan kantor	47 Orang		
		Jumlah Jenis Bahan dan Alat Kebersihan	45 Jenis		
4.01.01 .08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Luas Gedung dan Halaman yang disediakan jasa kebersihan	0 M2	585.000.000,00	Badan Penghubung Daerah
		Jumlah tenaga kebersihan dan Fasilitas Pendukung kebersihan kantor	15 Orang		
		Jumlah Jenis Bahan dan Alat Kebersihan	0 Jenis		
4.01.01 .08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Luas Gedung dan Halaman yang disediakan jasa kebersihan	1.500 M2	200.000.000,00	Sekretariat Majelis Rakyat Papua
		Jumlah tenaga kebersihan dan Fasilitas Pendukung kebersihan kantor	0 Orang		
		Jumlah Jenis Bahan dan Alat Kebersihan	0 Jenis		
4.01.01 .08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Luas Gedung dan Halaman yang disediakan jasa kebersihan	0 M2	200.000.000,00	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerja Sama
		Jumlah tenaga kebersihan dan Fasilitas Pendukung kebersihan kantor	3 Orang		
		Jumlah Jenis Bahan dan Alat Kebersihan	20 Jenis		
4.01.01 .09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	25 Unit	189.000.000,00	Biro Hukum
4.01.01 .09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	49 Unit	50.000.000,00	Biro Organisasi
4.01.01 .09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	90 Unit	159.000.000,00	Badan Penghubung Daerah
4.01.01 .09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	0 Unit	0,00	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerja Sama
4.01.01 .10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	100 Jenis	1.200.000.000,00	Sekretariat Daerah
4.01.01 .10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	40 Jenis	120.000.000,00	Biro Tata Pemerintahan dan Otonomi Khusus
4.01.01 .10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	50 Jenis	600.000.000,00	Biro Hukum
4.01.01 .10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	57 Jenis	143.200.000,00	Biro Organisasi

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
4.01.01 .10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	59 Jenis	744.200.000,00	Biro Umum dan Protokol
4.01.01 .10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	24 Jenis	1.000.000.000,00	Biro Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa
4.01.01 .10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	45 Jenis	2.625.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua
4.01.01 .10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	90 Jenis	250.000.000,00	Badan Penghubung Daerah
4.01.01 .10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	65 Jenis	200.000.000,00	Sekretariat Majelis Rakyat Papua
4.01.01 .10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	35 Jenis	300.000.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4.01.01 .10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	30 Jenis	250.000.000,00	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerja Sama
4.01.01 .11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan	30 Jenis	2.450.000.000,00	Sekretariat Daerah
		Jumlah penggandaan	35.000 Lembar		
		Jumlah Jenis Barang Cetakkan yang Disediakan	0 Jenis		
		Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	0 Bulan		
4.01.01 .11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan	4 Jenis	140.000.000,00	Biro Tata Pemerintahan dan Otonomi Khusus
		Jumlah penggandaan	45.000 Lembar		
		Jumlah Jenis Barang Cetakkan yang Disediakan	0 Jenis		
		Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	12 Bulan		
4.01.01 .11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan	0 Jenis	450.600.000,00	Biro Hukum
		Jumlah penggandaan	0 Lembar		
		Jumlah Jenis Barang Cetakkan yang Disediakan	0 Jenis		
		Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	12 Bulan		
4.01.01 .11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan	21 Jenis	315.800.000,00	Biro Organisasi
		Jumlah penggandaan	145.000 Lembar		
		Jumlah Jenis Barang Cetakkan yang Disediakan	20 Jenis		
		Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	20 Bulan		
4.01.01 .11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan	22 Jenis	526.665.800,00	Biro Umum dan Protokol
		Jumlah penggandaan	2.500.000 Lembar		
		Jumlah Jenis Barang Cetakkan yang Disediakan	0 Jenis		
		Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	12 Bulan		
4.01.01 .11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan	0 Jenis	750.000.000,00	Biro Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa
		Jumlah penggandaan	15.000 Lembar		

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
		Jumlah Jenis Barang Cetakkan yang Disediakan	5 Jenis		
		Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	0 Bulan		
4.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan	1.300 Jenis	1.953.477.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua
		Jumlah penggandaan	18.000 Lembar		
		Jumlah Jenis Barang Cetakkan yang Disediakan	0 Jenis		
		Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	0 Bulan		
4.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan	0 Jenis	250.000.000,00	Badan Penghubung Daerah
		Jumlah penggandaan	0 Lembar		
		Jumlah Jenis Barang Cetakkan yang Disediakan	0 Jenis		
		Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	12 Bulan		
4.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan	0 Jenis	200.000.000,00	Sekretariat Majelis Rakyat Papua
		Jumlah penggandaan	0 Lembar		
		Jumlah Jenis Barang Cetakkan yang Disediakan	0 Jenis		
		Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	12 Bulan		
4.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan	0 Jenis	250.000.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Jumlah penggandaan	0 Lembar		
		Jumlah Jenis Barang Cetakkan yang Disediakan	6 Jenis		
		Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	0 Bulan		
4.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan	15 Jenis	150.000.000,00	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerja Sama
		Jumlah penggandaan	120.000 Lembar		
		Jumlah Jenis Barang Cetakkan yang Disediakan	0 Jenis		
		Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	0 Bulan		
4.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen Listrik yang disediakan	1.000 Buah	1.200.000.000,00	Sekretariat Daerah
4.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen Listrik yang disediakan	30 Buah	0,00	Biro Tata Pemerintahan dan Otonomi Khusus
4.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen Listrik yang disediakan	22.675 Buah	719.773.000,00	Biro Umum dan Protokol
4.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen Listrik yang disediakan	35 Buah	340.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua
4.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen Listrik yang disediakan	90 Buah	50.000.000,00	Badan Penghubung Daerah
4.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen Listrik yang disediakan	150 Buah	50.000.000,00	Sekretariat Majelis Rakyat Papua
4.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen Listrik yang disediakan	10 Buah	50.000.000,00	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerja Sama

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
4.01.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan Perlengkapan	15 Unit	350.000.000,00	Biro Hukum
4.01.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan Perlengkapan	24 Unit	100.000.000,00	Biro Umum dan Protokol
4.01.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan Perlengkapan	30 Unit	50.000.000,00	Badan Penghubung Daerah
4.01.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan Perlengkapan	30 Unit	0,00	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerja Sama
4.01.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	100 Unit	540.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua
4.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	24 Jenis	240.000.000,00	Sekretariat Daerah
4.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	3 Jenis	23.000.000,00	Biro Organisasi
4.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	10 Jenis	66.240.000,00	Biro Umum dan Protokol
4.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	5 Jenis	150.000.000,00	Biro Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa
4.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1.020 Jenis	505.296.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua
4.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	250 Jenis	200.000.000,00	Sekretariat Majelis Rakyat Papua
4.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	2.000 Jenis	50.000.000,00	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerja Sama
4.01.01.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah liter bahan bakar untuk kendaraan operasional	337.984 Liter	2.967.391.200,00	Biro Umum dan Protokol
		jumlah mobilitas termasuk tenaga angkat dan turun beras ke kantor	12 Kali		
4.01.01.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah liter bahan bakar untuk kendaraan operasional	16.000 Liter	1.930.500.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua
		jumlah mobilitas termasuk tenaga angkat dan turun beras ke kantor	12 Kali		
4.01.01.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah liter bahan bakar untuk kendaraan operasional	0 Liter	70.000.000,00	Sekretariat Majelis Rakyat Papua
		jumlah mobilitas termasuk tenaga angkat dan turun beras ke kantor	12 Kali		
4.01.01.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah liter bahan bakar untuk kendaraan operasional	0 Liter	25.000.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		jumlah mobilitas termasuk tenaga angkat dan turun beras ke kantor	12 Kali		
4.01.01.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah liter bahan bakar untuk kendaraan operasional	0 Liter	10.000.000,00	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerja Sama
		jumlah mobilitas termasuk tenaga angkat dan turun beras ke kantor	12 Kali		
4.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Pelaksanaan penyediaan makan dan minum	450 Kegiatan	17.262.031.680,00	Sekretariat Daerah
		Pelaksanaan makan minum tamu dan rapat	0 Kali Tahun		
		Pelaksanaan makan minum saat olah raga (hari Jumat)	0 Kali		

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
		Tersediannya Makanan dan Minuman	0 Bulan		
		Jumlah orang yang disediakan makan dan minuman	0 Orang		
4.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Pelaksanaan penyediaan makan dan minum	12 Kegiatan	1.650.000.000,00	Biro Tata Pemerintahan dan Otonomi Khusus
		Pelaksanaan makan minum tamu dan rapat	60 Kali Tahun		
		Pelaksanaan makan minum saat olah raga (hari Jumat)	0 Kali		
		Tersediannya Makanan dan Minuman	0 Bulan		
		Jumlah orang yang disediakan makan dan minuman	0 Orang		
4.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Pelaksanaan penyediaan makan dan minum	0 Kegiatan	450.000.000,00	Biro Hukum
		Pelaksanaan makan minum tamu dan rapat	0 Kali Tahun		
		Pelaksanaan makan minum saat olah raga (hari Jumat)	0 Kali		
		Tersediannya Makanan dan Minuman	0 Bulan		
		Jumlah orang yang disediakan makan dan minuman	2.000 Orang		
4.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Pelaksanaan penyediaan makan dan minum	389 Kegiatan	191.900.000,00	Biro Organisasi
		Pelaksanaan makan minum tamu dan rapat	1.500 Kali Tahun		
		Pelaksanaan makan minum saat olah raga (hari Jumat)	0 Kali		
		Tersediannya Makanan dan Minuman	0 Bulan		
		Jumlah orang yang disediakan makan dan minuman	0 Orang		
4.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Pelaksanaan penyediaan makan dan minum	2 Kegiatan	600.000.000,00	Biro Umum dan Protokol
		Pelaksanaan makan minum tamu dan rapat	0 Kali Tahun		
		Pelaksanaan makan minum saat olah raga (hari Jumat)	0 Kali		
		Tersediannya Makanan dan Minuman	0 Bulan		
		Jumlah orang yang disediakan makan dan minuman	0 Orang		
4.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Pelaksanaan penyediaan makan dan minum	0 Kegiatan	1.700.000.000,00	Biro Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa
		Pelaksanaan makan minum tamu dan rapat	11.000 Kali Tahun		
		Pelaksanaan makan minum saat olah raga (hari Jumat)	0 Kali		
		Tersediannya Makanan dan Minuman	0 Bulan		
		Jumlah orang yang disediakan makan dan minuman	1.000 Orang		
4.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Pelaksanaan penyediaan makan dan minum	2.801 Kegiatan	9.534.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua
		Pelaksanaan makan minum tamu dan rapat	85 Kali Tahun		
		Pelaksanaan makan minum saat olah raga (hari Jumat)	52 Kali		
		Tersediannya Makanan dan Minuman	12 Bulan		
		Jumlah orang yang disediakan makan dan minuman	500 Orang		

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
4.01.01 .17	Penyediaan makanan dan minuman	Pelaksanaan penyediaan makan dan minum	2 Kegiatan	400.000.000,00	Badan Penghubung Daerah
		Pelaksanaan makan minum tamu dan rapat	48 Kali Tahun		
		Pelaksanaan makan minum saat olah raga (hari Jumat)	48 Kali		
		Tersediannya Makanan dan Minuman	12 Bulan		
		Jumlah orang yang disediakan makan dan minuman	60 Orang		
4.01.01 .17	Penyediaan makanan dan minuman	Pelaksanaan penyediaan makan dan minum	0 Kegiatan	450.000.000,00	Sekretariat Majelis Rakyat Papua
		Pelaksanaan makan minum tamu dan rapat	0 Kali Tahun		
		Pelaksanaan makan minum saat olah raga (hari Jumat)	0 Kali		
		Tersediannya Makanan dan Minuman	0 Bulan		
		Jumlah orang yang disediakan makan dan minuman	1.500 Orang		
4.01.01 .17	Penyediaan makanan dan minuman	Pelaksanaan penyediaan makan dan minum	0 Kegiatan	350.000.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Pelaksanaan makan minum tamu dan rapat	50 Kali Tahun		
		Pelaksanaan makan minum saat olah raga (hari Jumat)	0 Kali		
		Tersediannya Makanan dan Minuman	0 Bulan		
		Jumlah orang yang disediakan makan dan minuman	0 Orang		
4.01.01 .17	Penyediaan makanan dan minuman	Pelaksanaan penyediaan makan dan minum	0 Kegiatan	600.000.000,00	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerja Sama
		Pelaksanaan makan minum tamu dan rapat	240 Kali Tahun		
		Pelaksanaan makan minum saat olah raga (hari Jumat)	54 Kali		
		Tersediannya Makanan dan Minuman	0 Bulan		
		Jumlah orang yang disediakan makan dan minuman	0 Orang		
4.01.01 .18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	250 Orang	11.724.000.000,00	Sekretariat Daerah
4.01.01 .18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	250 Orang	2.000.000.000,00	Biro Tata Pemerintahan dan Otonomi Khusus
4.01.01 .18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	150 Orang	3.500.000.000,00	Biro Hukum
4.01.01 .18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	26 Orang	755.000.000,00	Biro Organisasi
4.01.01 .18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	75 Orang	1.595.750.000,00	Biro Umum dan Protokol
4.01.01 .18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	100 Orang	2.600.000.000,00	Biro Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa
4.01.01 .18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	112 Orang	6.517.362.500,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua
4.01.01 .18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	325 Orang	2.274.000.000,00	Badan Penghubung Daerah

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
4.01.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	60 Orang	700.000.000,00	Sekretariat Majelis Rakyat Papua
4.01.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	60 Orang	1.500.000.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4.01.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	70 Orang	1.500.000.000,00	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerja Sama
4.01.01.19	Penyediaan Jasa Pengamanan	Pelaksanaan pembayaran insentif bagi tenag operator dan penjaga X-Ray VIP Room Bandara Sentani	a0 Orang Bulan	288.000.000,00	Biro Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa
		Pelaksanaan pembayaran honor bagi satpam	48 Orang Bulan		
		Pelaksanaan uang makan satpam	0 Orang Bulan		
		Jumlah tenaga pengamanan	0 Orang		
4.01.01.19	Penyediaan Jasa Pengamanan	Pelaksanaan pembayaran insentif bagi tenag operator dan penjaga X-Ray VIP Room Bandara Sentani	a0 Orang Bulan	3.131.034.700,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua
		Pelaksanaan pembayaran honor bagi satpam	45 Orang Bulan		
		Pelaksanaan uang makan satpam	45 Orang Bulan		
		Jumlah tenaga pengamanan	45 Orang		
4.01.01.19	Penyediaan Jasa Pengamanan	Pelaksanaan pembayaran insentif bagi tenag operator dan penjaga X-Ray VIP Room Bandara Sentani	a0 Orang Bulan	156.000.000,00	Badan Penghubung Daerah
		Pelaksanaan pembayaran honor bagi satpam	0 Orang Bulan		
		Pelaksanaan uang makan satpam	0 Orang Bulan		
		Jumlah tenaga pengamanan	4 Orang		
4.01.01.19	Penyediaan Jasa Pengamanan	Pelaksanaan pembayaran insentif bagi tenag operator dan penjaga X-Ray VIP Room Bandara Sentani	a0 Orang Bulan	450.000.000,00	Sekretariat Majelis Rakyat Papua
		Pelaksanaan pembayaran honor bagi satpam	16 Orang Bulan		
		Pelaksanaan uang makan satpam	16 Orang Bulan		
		Jumlah tenaga pengamanan	0 Orang		
4.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	20 persen	174.125.721.000,00	
4.01.02.02	Pembangunan rumah dinas	Terbangunnya rumah dinas	3 Unit	11.004.400.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua
4.01.02.03	Pembangunan gedung kantor	Luas bangunan yang dibangun	1.506 M2	32.840.009.880,00	Biro Umum dan Protokol
		Tersedianya desain perencanaan bangunan	0 Dokumen		
4.01.02.03	Pembangunan gedung kantor	Luas bangunan yang dibangun	2.801 M2	5.000.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua
		Tersedianya desain perencanaan bangunan	0 Dokumen		
4.01.02.03	Pembangunan gedung kantor	Luas bangunan yang dibangun	0 M2	36.502.908.000,00	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerja Sama
		Tersedianya desain perencanaan bangunan	0 Dokumen		

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
4.01.02.04	Pengadaan mobil jabatan	Jumlah mobil yang diadakan	5 Unit	900.000.000,00	Sekretariat Majelis Rakyat Papua
4.01.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan yang diadakan	4 Unit	2.000.000.000,00	Sekretariat Daerah
		Jumlah kendaraan roda 2	0 Unit		
4.01.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan yang diadakan	1 Unit	700.000.000,00	Biro Tata Pemerintahan dan Otonomi Khusus
		Jumlah kendaraan roda 2	0 Unit		
4.01.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan yang diadakan	10 Unit	8.500.000.000,00	Biro Umum dan Protokol
		Jumlah kendaraan roda 2	0 Unit		
4.01.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan yang diadakan	4 Unit	1.500.000.000,00	Biro Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa
		Jumlah kendaraan roda 2	0 Unit		
4.01.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan yang diadakan	1 Unit	850.000.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Jumlah kendaraan roda 2	0 Unit		
4.01.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan yang diadakan	1 Unit	600.000.000,00	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerja Sama
		Jumlah kendaraan roda 2	0 Unit		
4.01.02.06	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah perlengkapan rumah jabatan	119 Unit	3.944.888.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua
4.01.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan	10 Unit	371.750.000,00	Sekretariat Daerah
4.01.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan	20 Unit	200.000.000,00	Biro Tata Pemerintahan dan Otonomi Khusus
4.01.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan	20 Unit	5.500.000.000,00	Biro Umum dan Protokol
4.01.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan	10 Unit	300.000.000,00	Biro Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa
4.01.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan	30 Unit	4.500.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua
4.01.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan	10 Unit	50.000.000,00	Badan Penghubung Daerah
4.01.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan	6 Unit	250.000.000,00	Sekretariat Majelis Rakyat Papua
4.01.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan	100 Unit	2.500.000.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4.01.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan	15 Unit	100.000.000,00	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerja Sama
4.01.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan perlengkapan	200 Unit	1.000.000.000,00	Sekretariat Daerah
4.01.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan perlengkapan	10 Unit	120.000.000,00	Biro Tata Pemerintahan dan Otonomi Khusus
4.01.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan perlengkapan	8 Unit	300.000.000,00	Biro Umum dan Protokol

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
4.01.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan perlengkapan	10 Unit	400.000.000,00	Biro Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa
4.01.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan perlengkapan	50 Unit	2.251.400.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua
4.01.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan perlengkapan	10 Unit	270.000.000,00	Badan Penghubung Daerah
4.01.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan perlengkapan	10 Unit	150.000.000,00	Sekretariat Majelis Rakyat Papua
4.01.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan perlengkapan	50 Unit	3.000.000.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4.01.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan perlengkapan	20 Unit	300.000.000,00	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerja Sama
4.01.02.10	Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur yang diadakan	10 Unit	350.000.000,00	Biro Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa
4.01.02.10	Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur yang diadakan	152 Unit	3.251.400.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua
4.01.02.10	Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur yang diadakan	5 Unit	150.000.000,00	Badan Penghubung Daerah
4.01.02.10	Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur yang diadakan	25 Unit	150.000.000,00	Sekretariat Majelis Rakyat Papua
4.01.02.20	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Jumlah rumah jabatan yg terpelihara	4 Unit Tahun	3.050.000.000,00	Sekretariat Daerah
4.01.02.20	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Jumlah rumah jabatan yg terpelihara	6 Unit Tahun	3.582.775.000,00	Biro Umum dan Protokol
4.01.02.20	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Jumlah rumah jabatan yg terpelihara	5 Unit Tahun	5.000.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua
4.01.02.21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Jumlah rumah dinas yang dipelihara	3 Unit	175.800.000,00	Sekretariat Majelis Rakyat Papua
4.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	4 Unit	10.284.910.120,00	Biro Umum dan Protokol
		belanja sewa	0 Tahun		
4.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	0 Unit	250.000.000,00	Biro Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa
		belanja sewa	2 Tahun		
4.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	2 Unit	2.588.400.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua
		belanja sewa	0 Tahun		
4.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	4 Unit	200.000.000,00	Badan Penghubung Daerah
		belanja sewa	0 Tahun		
4.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	4 Unit	350.000.000,00	Sekretariat Majelis Rakyat Papua
		belanja sewa	0 Tahun		
4.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	10 Unit	1.000.000.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		belanja sewa	0 Tahun		

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
4.01.02 .22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	3 Unit	200.000.000,00	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerja Sama
		belanja sewa	0 Tahun		
4.01.02 .23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	2 Unit	100.000.000,00	Badan Penghubung Daerah
4.01.02 .24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	0 Unit	3.150.000.000,00	Sekretariat Daerah
		Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	100 Unit		
		sewa kendaraan	0 Bulan		
4.01.02 .24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	0 Unit	125.000.000,00	Biro Tata Pemerintahan dan Otonomi Khusus
		Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	15 Unit		
		sewa kendaraan	0 Bulan		
4.01.02 .24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	0 Unit	450.400.000,00	Biro Hukum
		Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	20 Unit		
		sewa kendaraan	0 Bulan		
4.01.02 .24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	0 Unit	145.000.000,00	Biro Organisasi
		Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	13 Unit		
		sewa kendaraan	0 Bulan		
4.01.02 .24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	0 Unit	1.547.000.000,00	Biro Umum dan Protokol
		Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	121 Unit		
		sewa kendaraan	0 Bulan		
4.01.02 .24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	0 Unit	650.000.000,00	Biro Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa
		Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	8 Unit		
		sewa kendaraan	12 Bulan		
4.01.02 .24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	60 Unit	1.336.600.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua
		Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	55 Unit		
		sewa kendaraan	12 Bulan		
4.01.02 .24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	0 Unit	250.000.000,00	Badan Penghubung Daerah
		Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	19 Unit		
		sewa kendaraan	0 Bulan		
4.01.02 .24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	1 Unit	300.000.000,00	Sekretariat Majelis Rakyat Papua
		Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	30 Unit		
		sewa kendaraan	0 Bulan		
4.01.02 .24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	0 Unit	800.000.000,00	Badan Pengembangan

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
		Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	20 Unit		Sumber Daya Manusia
		sewa kendaraan	0 Bulan		
4.01.02 .24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	0 Unit	500.000.000,00	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerja Sama
		Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	50 Unit		
		sewa kendaraan	0 Bulan		
4.01.02 .26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Pelaksanaan pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	0 Kegiatan	50.000.000,00	Biro Tata Pemerintahan dan Otonomi Khusus
		Jumlah Perlengkapan Gedung kantor yang terpelihara	20 Unit		
		Tersediannya biaya pemeliharaan gedung kantor	0 Bulan		
4.01.02 .26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Pelaksanaan pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	5 Kegiatan	30.000.000,00	Biro Organisasi
		Jumlah Perlengkapan Gedung kantor yang terpelihara	6 Unit		
		Tersediannya biaya pemeliharaan gedung kantor	1 Bulan		
4.01.02 .26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Pelaksanaan pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	0 Kegiatan	982.080.000,00	Biro Umum dan Protokol
		Jumlah Perlengkapan Gedung kantor yang terpelihara	792 Unit		
		Tersediannya biaya pemeliharaan gedung kantor	0 Bulan		
4.01.02 .26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Pelaksanaan pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	1 Kegiatan	350.000.000,00	Biro Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa
		Jumlah Perlengkapan Gedung kantor yang terpelihara	0 Unit		
		Tersediannya biaya pemeliharaan gedung kantor	0 Bulan		
4.01.02 .26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Pelaksanaan pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	12 Kegiatan	1.600.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua
		Jumlah Perlengkapan Gedung kantor yang terpelihara	9 Unit		
		Tersediannya biaya pemeliharaan gedung kantor	12 Bulan		
4.01.02 .26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Pelaksanaan pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	0 Kegiatan	350.000.000,00	Sekretariat Majelis Rakyat Papua
		Jumlah Perlengkapan Gedung kantor yang terpelihara	30 Unit		
		Tersediannya biaya pemeliharaan gedung kantor	0 Bulan		
4.01.02 .26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Pelaksanaan pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	0 Kegiatan	150.000.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Jumlah Perlengkapan Gedung kantor yang terpelihara	200 Unit		
		Tersediannya biaya pemeliharaan gedung kantor	0 Bulan		
4.01.02 .26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Pelaksanaan pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	1 Kegiatan	50.000.000,00	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerja Sama
		Jumlah Perlengkapan Gedung kantor yang terpelihara	0 Unit		

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
		Tersediannya biaya pemeliharaan gedung kantor	0 Bulan		
4.01.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	30 Unit	200.000.000,00	Biro Tata Pemerintahan dan Otonomi Khusus
4.01.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	38 Unit	856.000.000,00	Biro Umum dan Protokol
4.01.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	4 Unit	540.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua
4.01.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	15 Unit	125.000.000,00	Badan Penghubung Daerah
4.01.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	50 Unit	150.000.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4.01.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	20 Unit	100.000.000,00	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerja Sama
4.01.02.29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Jumlah mebeleur yang dipelihara	20 Unit	50.000.000,00	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerja Sama
4.01.02.30	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Luas bangunan yang direhab	0 M2	100.000.000,00	Biro Tata Pemerintahan dan Otonomi Khusus
4.01.02.30	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Luas bangunan yang direhab	1.000 M2	1.000.000.000,00	Badan Penghubung Daerah
4.01.02.42	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Terlaksananya rehabilitasi gedung	200 M2	600.000.000,00	Biro Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa
4.01.02.46	Sewa gedung	Jumlah gedung kantor yang disewa	1 Unit Tahun	1.000.000.000,00	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerja Sama
	Sewa rumah jabatan		0 Unit Tahun		
4.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	44 persen	8.336.100.000,00	
4.01.03.01	Pengadaan mesin/kartu absensi	Jumlah Mesin /Kartu Apsensi yang tersedia	1 Bh	5.000.000,00	Biro Organisasi
4.01.03.01	Pengadaan mesin/kartu absensi	Jumlah Mesin /Kartu Apsensi yang tersedia	2 Bh	15.000.000,00	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerja Sama
4.01.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	150 Stell	1.284.000.000,00	Sekretariat Daerah
4.01.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	60 Stell	50.000.000,00	Biro Tata Pemerintahan dan Otonomi Khusus
4.01.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	100 Stell	100.000.000,00	Biro Hukum
4.01.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	44 Stell	68.000.000,00	Biro Organisasi
4.01.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	300 Stell	390.000.000,00	Biro Umum dan Protokol
4.01.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	200 Stell	300.000.000,00	Biro Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
4.01.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	250 Stell	1.678.500.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua
4.01.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	60 Stell	51.000.000,00	Badan Penghubung Daerah
4.01.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	120 Stell	150.000.000,00	Sekretariat Majelis Rakyat Papua
4.01.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	150 Stell	661.000.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4.01.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	100 Stell	200.000.000,00	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerja Sama
4.01.03.03	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan	100 Stell	200.000.000,00	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerja Sama
4.01.03.04	Pengadaan pakaian KORPRI	jumlah pakaian KORPRI yang diadakan	60 Stell	50.000.000,00	Biro Tata Pemerintahan dan Otonomi Khusus
4.01.03.04	Pengadaan pakaian KORPRI	jumlah pakaian KORPRI yang diadakan	300 Stell	360.000.000,00	Biro Umum dan Protokol
4.01.03.04	Pengadaan pakaian KORPRI	jumlah pakaian KORPRI yang diadakan	100 Stell	150.000.000,00	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerja Sama
4.01.03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus yang diadakan	100 Stell	366.000.000,00	Sekretariat Daerah
4.01.03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus yang diadakan	2 Stell	130.000.000,00	Biro Tata Pemerintahan dan Otonomi Khusus
4.01.03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus yang diadakan	13 Stell	35.100.000,00	Biro Organisasi
4.01.03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus yang diadakan	300 Stell	360.000.000,00	Biro Umum dan Protokol
4.01.03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus yang diadakan	250 Stell	1.422.500.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua
4.01.03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus yang diadakan	100 Stell	60.000.000,00	Badan Penghubung Daerah
4.01.03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus yang diadakan	120 Stell	150.000.000,00	Sekretariat Majelis Rakyat Papua
4.01.03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus yang diadakan	100 Stell	100.000.000,00	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerja Sama
4.01.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	31 persen	15.408.275.000,00	
4.01.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	10 Orang	1.000.000.000,00	Biro Hukum
4.01.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	3 Orang	130.000.000,00	Biro Organisasi
4.01.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	6 Orang	155.000.000,00	Biro Umum dan Protokol
4.01.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	2 Orang	80.000.000,00	Biro Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
4.01.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	5 Orang	130.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua
4.01.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	10 Orang	100.000.000,00	Badan Penghubung Daerah
4.01.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	15 Orang	150.000.000,00	Sekretariat Majelis Rakyat Papua
4.01.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	10 Orang	500.000.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4.01.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	5 Orang	500.000.000,00	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerja Sama
4.01.05.02	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	400 Orang	450.000.000,00	Biro Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa
4.01.05.02	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	25 Orang	593.500.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua
4.01.05.02	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	150 Orang	175.000.000,00	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerja Sama
4.01.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta bimbingan teknis tentang implementasi peraturan perundang-undangan	400 Orang	450.000.000,00	Biro Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa
4.01.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta bimbingan teknis tentang implementasi peraturan perundang-undangan	35 Orang	650.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua
4.01.05.04	Pendidikan dan Pelatihan Non Formal	Jumlah aparatur yang terlatih	15 Orang	150.000.000,00	Biro Tata Pemerintahan dan Otonomi Khusus
4.01.05.04	Pendidikan dan Pelatihan Non Formal	Jumlah aparatur yang terlatih	10 Orang	299.800.000,00	Biro Organisasi
4.01.05.04	Pendidikan dan Pelatihan Non Formal	Jumlah aparatur yang terlatih	30 Orang	485.225.000,00	Biro Umum dan Protokol
4.01.05.04	Pendidikan dan Pelatihan Non Formal	Jumlah aparatur yang terlatih	120 Orang	3.200.000.000,00	Biro Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa
4.01.05.04	Pendidikan dan Pelatihan Non Formal	Jumlah aparatur yang terlatih	125 Orang	2.559.750.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua
4.01.05.04	Pendidikan dan Pelatihan Non Formal	Jumlah aparatur yang terlatih	38 Orang	200.000.000,00	Badan Penghubung Daerah
4.01.05.04	Pendidikan dan Pelatihan Non Formal	Jumlah aparatur yang terlatih	81 Orang	150.000.000,00	Sekretariat Majelis Rakyat Papua
4.01.05.04	Pendidikan dan Pelatihan Non Formal	Jumlah aparatur yang terlatih	20 Orang	500.000.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4.01.05.04	Pendidikan dan Pelatihan Non Formal	Jumlah aparatur yang terlatih	20 Orang	300.000.000,00	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerja Sama
4.01.05.11	Pendampingan Pengusaha OAP	Jumlah Orang	400 Orang Bulan	2.500.000.000,00	

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
		Jumlah Peserta Forum	0 Orang		Biro Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa
4.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya kualitas akuntabilitas OPD	100 persen	11.972.600.000,00	
4.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	3 Laporan	30.000.000,00	Sekretariat Daerah
		Laporan LAKIP SKPD	0 Dokumen		
4.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	1 Laporan	30.000.000,00	Biro Tata Pemerintahan dan Otonomi Khusus
		Laporan LAKIP SKPD	0 Dokumen		
4.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	3 Laporan	15.000.000,00	Biro Organisasi
		Laporan LAKIP SKPD	0 Dokumen		
4.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	3 Laporan	200.000.000,00	Biro Umum dan Protokol
		Laporan LAKIP SKPD	0 Dokumen		
4.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	12 Laporan	30.000.000,00	Biro Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa
		Laporan LAKIP SKPD	0 Dokumen		
4.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	12 Laporan	5.211.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua
		Laporan LAKIP SKPD	0 Dokumen		
4.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	2 Laporan	15.000.000,00	Badan Penghubung Daerah
		Laporan LAKIP SKPD	0 Dokumen		
4.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	3 Laporan	150.000.000,00	Sekretariat Majelis Rakyat Papua
		Laporan LAKIP SKPD	0 Dokumen		
4.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	3 Laporan	30.000.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Laporan LAKIP SKPD	0 Dokumen		
4.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	3 Laporan	25.000.000,00	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerja Sama
		Laporan LAKIP SKPD	0 Dokumen		
4.01.06.02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah pelaporan keuangan semesteran yang diselesaikan tepat waktu	1 Laporan	22.000.000,00	Sekretariat Daerah
4.01.06.02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah pelaporan keuangan semesteran yang diselesaikan tepat waktu	1 Laporan	15.000.000,00	Biro Tata Pemerintahan dan Otonomi Khusus
4.01.06.02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah pelaporan keuangan semesteran yang diselesaikan tepat waktu	1 Laporan	15.000.000,00	Biro Organisasi
4.01.06.02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah pelaporan keuangan semesteran yang diselesaikan tepat waktu	1 Laporan	32.500.000,00	Biro Umum dan Protokol
4.01.06.02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah pelaporan keuangan semesteran yang diselesaikan tepat waktu	1 Laporan	15.000.000,00	Biro Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
4.01.06.02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah pelaporan keuangan semesteran yang diselesaikan tepat waktu	1 Laporan	406.800.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua
4.01.06.02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah pelaporan keuangan semesteran yang diselesaikan tepat waktu	1 Laporan	15.000.000,00	Badan Penghubung Daerah
4.01.06.02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah pelaporan keuangan semesteran yang diselesaikan tepat waktu	1 Laporan	100.000.000,00	Sekretariat Majelis Rakyat Papua
4.01.06.02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah pelaporan keuangan semesteran yang diselesaikan tepat waktu	1 Laporan	17.500.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4.01.06.02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah pelaporan keuangan semesteran yang diselesaikan tepat waktu	2 Laporan	15.000.000,00	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerja Sama
4.01.06.03	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jumlah pelaporan prognosis realisasi anggaran yang diselesaikan tepat waktu	2 Laporan	15.000.000,00	Biro Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa
4.01.06.03	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jumlah pelaporan prognosis realisasi anggaran yang diselesaikan tepat waktu	12 Laporan	150.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua
4.01.06.03	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jumlah pelaporan prognosis realisasi anggaran yang diselesaikan tepat waktu	1 Laporan	30.000.000,00	Badan Penghubung Daerah
4.01.06.03	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jumlah pelaporan prognosis realisasi anggaran yang diselesaikan tepat waktu	6 Laporan	100.000.000,00	Sekretariat Majelis Rakyat Papua
4.01.06.03	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jumlah pelaporan prognosis realisasi anggaran yang diselesaikan tepat waktu	12 Laporan	100.000.000,00	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerja Sama
4.01.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	3 Laporan	30.000.000,00	Sekretariat Daerah
4.01.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	1 Laporan	30.000.000,00	Biro Tata Pemerintahan dan Otonomi Khusus
4.01.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	1 Laporan	15.000.000,00	Biro Organisasi
4.01.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	1 Laporan	127.500.000,00	Biro Umum dan Protokol
4.01.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	1 Laporan	30.000.000,00	Biro Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa
4.01.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	12 Laporan	316.700.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua
4.01.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	2 Laporan	15.000.000,00	Badan Penghubung Daerah

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
4.01.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	5 Laporan	100.000.000,00	Sekretariat Majelis Rakyat Papua
4.01.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	1 Laporan	17.500.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4.01.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	1 Laporan	7.500.000,00	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerja Sama
4.01.06.05	Penyusunan Renja, RKA dan Perubahan APBD	Jumlah dokumen	3 Dokumen	60.000.000,00	Sekretariat Daerah
4.01.06.05	Penyusunan Renja, RKA dan Perubahan APBD	Jumlah dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00	Biro Tata Pemerintahan dan Otonomi Khusus
4.01.06.05	Penyusunan Renja, RKA dan Perubahan APBD	Jumlah dokumen	12 Dokumen	50.000.000,00	Biro Hukum
4.01.06.05	Penyusunan Renja, RKA dan Perubahan APBD	Jumlah dokumen	3 Dokumen	15.000.000,00	Biro Organisasi
4.01.06.05	Penyusunan Renja, RKA dan Perubahan APBD	Jumlah dokumen	3 Dokumen	105.000.000,00	Biro Umum dan Protokol
4.01.06.05	Penyusunan Renja, RKA dan Perubahan APBD	Jumlah dokumen	3 Dokumen	30.000.000,00	Biro Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa
4.01.06.05	Penyusunan Renja, RKA dan Perubahan APBD	Jumlah dokumen	6 Dokumen	2.216.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua
4.01.06.05	Penyusunan Renja, RKA dan Perubahan APBD	Jumlah dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	Badan Penghubung Daerah
4.01.06.05	Penyusunan Renja, RKA dan Perubahan APBD	Jumlah dokumen	3 Dokumen	200.000.000,00	Sekretariat Majelis Rakyat Papua
4.01.06.05	Penyusunan Renja, RKA dan Perubahan APBD	Jumlah dokumen	3 Dokumen	30.000.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4.01.06.05	Penyusunan Renja, RKA dan Perubahan APBD	Jumlah dokumen	3 Dokumen	45.000.000,00	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerja Sama
4.01.06.10	Forum SKPD Provinsi Papua	Jumlah Peserta Forum	50 Orang	500.000.000,00	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerja Sama
4.01.06.12	Penyusunan RENSTRA	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	Biro Tata Pemerintahan dan Otonomi Khusus
4.01.06.12	Penyusunan RENSTRA	Jumlah Dokumen	5 Dokumen	115.600.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua
4.01.06.13	Penyusunan SOP	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	Biro Tata Pemerintahan dan Otonomi Khusus
4.01.06.13	Penyusunan SOP	Jumlah Dokumen	10 Dokumen	350.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua
4.01.06.14	Peningkatan Kapasitas PPID	Jumlah orang	10 Orang	20.000.000,00	Biro Tata Pemerintahan

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
					dan Otonomi Khusus
4.01.06.14	Peningkatan Kapasitas PPID	Jumlah orang	35 Orang	440.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua
4.01.06.14	Peningkatan Kapasitas PPID	Jumlah orang	10 Orang	50.000.000,00	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerja Sama
4.01.06.15	Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Jumlah Dokumen yang disusun	16 Dokumen	152.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua
4.01.15	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase Raperda yang ditindaklanjuti dalam rapat paripurna	0 %	372.910.300.000,00	
		Tingkat kehadiran Anggota dewan	0 %		
		Jumlah Perdasi dan Perdasus yang ditetapkan	0 Produk		
		Pembahasan APBD Tepat Waktu sesuai dengan jadwal yang ditetapkan	0 tepat/tidak		
		Persentase penetapan perdasi dan perdasus berdasarkan prolegda	5 %		
4.01.15.01	Pembahasan rancangan peraturan daerah	Jumlah Perda yang dihasilkan	15 Produk	6.408.713.200,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua
4.01.15.02	Hearing/dialog dan koordinasi Pimpinan DPRP dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama	Terlaksananya hearing/dialog dan koordinasi Pimpinan dengan masyarakat/ tokoh agama	175 Kegiatan	18.596.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua
4.01.15.03	Rapat-rapat alat kelengkapan dewan	Terlaksananya fasilitasi rapat-rapat alat kelengkapan dewan	500 Kali	17.200.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua
4.01.15.04	Rapat-rapat paripurna	Terlaksananya rapat paripurna penetapan DPRP	8 Kali	8.443.280.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua
4.01.15.05	Kegiatan reses	Terlaksananya kegiatan Reses Anggota DPRP	3 Kali	33.129.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua
4.01.15.06	Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah	Terlaksananya kunjungan kerja dalam daerah	69 Orang	30.250.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua
4.01.15.07	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	Terlaksananya keikutsertaan Pimpinan dan Anggota DPRP dalam Seminar, Sosialisasi, studi banding	11 Kali Tahun	13.340.400.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua
4.01.15.09	Peningkatan Peran dan Fungsi Pengawasan PERDASI/ PERDASUS Provinsi Papua	Terlaksananya fungsi pengawasan PERDASI/PERDASUS	12 Kali	49.980.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua
4.01.15.10	Hearing/ dialog dan Koordinasi Anggota DPRP dengan Pejabat Pemerintah daerah dan Tokoh masyarakat/ Tokoh Agama	Terlaksananya hearing/dialog dan koordinasi Anggota DPRP dengan Tokoh Masyarakat/Tokoh Adat	100 Kali Tahun	39.600.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua
4.01.15.11	Pelayanan Formal Pimpinan dan Anggota DPR Papua	Tersedianya pelayanan formal Pimpinan dan Anggota DPRP	4 Kali Tahun	41.250.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
4.01.15.14	Publikasi Kinerja Pimpinan dan Anggota DPR Papua	Tersedianya publikasi kinerja Pimpinan dan Anggota DPR Papua	12 Bulan	3.083.750.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua
4.01.15.15	Rapat - Rapat Koordinasi Pimpinan dan Anggota DPR Papua	Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	12 Kali	30.772.700.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua
4.01.15.16	Peningkatan Peran dan Fungsi Serta Kinerja Kinerja Alat - Alat Kelengkapan Dewan	Meningkatnya peran dan fungsi serta kinerja Alat - alat Kelengkapan Dewan	69 Orang	26.464.579.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua
4.01.15.21	Pelayanan Medical Check Up Pimpinan dan Anggota DPRP	Tersedianya Pelayanan Medical Check Up bagi Pimpinan dan Anggota DPR Papua	69 Orang	690.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua
4.01.15.23	Publik Hearing Rancangan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya kegiatan Publik Hearing Rancangan Peraturan Perundang - undangan kepada masyarakat	1.500 Kegiatan	24.074.400.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua
4.01.15.86	Pembahasan LKPJ dan Rencana Kerja Tahunan	Terlaksananya Pembahasan LKPJ dan Tersusunnya Rencana Kerja Tahunan	2 Kegiatan	2.404.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua
4.01.15.88	Pengawasan Persiapan PON XX Tahun 2020	Terlaksananya Pengawasan Persiapan PON XX Tahun 2020	12 Kegiatan	2.484.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua
4.01.15.89	Pembahasan Rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja(APBD), perubahan APBD dan pertanggung jawaban APBD	Jumlah Rapat yang diadakan	40 Kegiatan	12.375.652.800,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua
4.01.15.91	Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan Peraturan serta Kebijakan Lainnya	Terlaksananya kegiatan Monitoring, Evaluasi, Pengawasan dan Peraturan serta kegiatan lainnya	12 Kegiatan	9.290.400.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua
4.01.15.94	Rapat Forum Komunikasi Sekretaris DPRD se Indonesia	Jumlah Peserta yang mengikuti Forkom	150 Orang	3.073.425.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua
4.01.1.6	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	Cakupan pelayanan Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan	100 %	541.799.968.320,00	
4.01.16.01	Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan	Terlaksananya kegiatan dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan, anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan	20 Kali Tahun	108.411.200.000,00	Sekretariat Daerah
4.01.16.02	Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri	Terlaksananya pelayanan bagi pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri	12 Kali Tahun	66.600.000.000,00	Sekretariat Daerah
4.01.16.03	Rapat koordinasi unsur MUSPIDA	Terlaksananya koordinasi unsur muspida dalam menyamakan pola pandang dan pola tindak demi meningkatkan terhadap masyarakat	12 Kali	3.757.400.000,00	Sekretariat Daerah
4.01.16.04	Rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat	12 Kali Tahun	9.204.000.000,00	Sekretariat Daerah
4.01.16.05	Kunjungan kerja / inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah	Terlaksananya kunjungan kerja/inspeksi KDH dan WKDH	12 Kali Tahun	109.827.368.320,00	Sekretariat Daerah
4.01.16.06	Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah	Jumlah Kunjungan Kedinasan Kepala Daerah ke Jakarta	12 Bulan	60.560.000.000,00	Sekretariat Daerah

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
4.01.16.06	Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah	Jumlah Kunjungan Kedinasan Kepala Daerah ke Jakarta	12 Bulan	500.000.000,00	Badan Penghubung Daerah
4.01.16.07	Penyediaan jasa pemeliharaan kesehatan KDH / WKDH / SEKDA	Terlaksananya jasa pemeliharaan kesehatan KDH/WKDH	12 Bulan	4.000.000.000,00	Sekretariat Daerah
4.01.16.08	Penyediaan jasa rumah tangga KDH / Wakil KDH / SEKDA	Terlaksananya jasa kegiatan jasa rumah tangga/KDH/WKDH/SEKDA	12 Bulan	118.420.000.000,00	Sekretariat Daerah
4.01.16.09	Peningkatan Tugas-tugas Pemerintahan Umum dan Stabilitas Daerah	Terlaksananya peningkatan tugas-tugas pemerintahan umum dan stabilitas daerah	12 Kali Tahun	60.000.000.000,00	Sekretariat Daerah
4.01.16.10	Monitoring dan evaluasi keprotokolan bagi 5 wilayah adat	Jumlah lokasi monitoring dan evaluasi keprotokolan	29 Kabupaten	120.000.000,00	Biro Umum dan Protokol
4.01.16.11	Pelayanan Keprotokolan Pemerintah Provinsi Papua	Frekuensi pelayanan keprotokolan	581 Kali	250.000.000,00	Biro Umum dan Protokol
4.01.16.12	Sosialisasi Penyesuaian Nomor Urut Kendaraan Dinas Forkompinda Provinsi Papua	Jumlah peserta sosialisasi	50 Orang	150.000.000,00	Biro Umum dan Protokol
4.01.2.6	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Perdasi/Perdusus yang ditetapkan	5 Dokumen	3.234.600.000,00	
4.01.26.22	Pembentukan Produk Hukum Daerah	Tersedianya Produk Hukum Daerah	500 Dokumen	2.500.000.000,00	Biro Hukum
		Jumlah Perdasi/Perdusus yang dibentuk	0 Berkas		
4.01.26.32	Pengkajian Produk Hukum Daerah Provinsi	Jumlah Produk Hukum yang di evaluasi	25 Dokumen	734.600.000,00	Biro Hukum
4.01.4.1	Program Peningkatan Pemberian Bantuan Hukum dan Penegakan Perda	Cakupan kasus hukum warga miskin yang memperoleh pendampingan	10 Kasus	1.824.000.000,00	
		Pemberian bantuan hukum dan penegakan perda	100 %		
4.01.41.11	Penanganan Perkara di Lembaga Peradilan	Meningkatnya Pemahaman Aparatur dan Masyarakat	15 Perkara	1.824.000.000,00	Biro Hukum
4.01.4.3	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga MRP	Tingkat kehadiran Anggota MRP	95 %	246.000.000.000,00	
		Persentase Rancangan Perdasi dan Perdusus yang ditindaklanjuti	100 %		
		Jumlah perdasi dan perdusus yang mendapatkan rekomendasi oleh MRP	10 Produk		
4.01.43.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Sosialisasi Raperdusus Bagi Pimpinan dan anggota MRP	1 Tahun	8.500.000.000,00	Sekretariat Majelis Rakyat Papua
4.01.43.03	Rapat-Rapat Alat Kelengkapan MRP	Kegiatan Rapat-rapat Kelompok Kerja MRP	1 Tahun	32.000.000.000,00	Sekretariat Majelis Rakyat Papua
4.01.43.04	Rapat-Rapat Pleno	Rapat-rapat Pleno MRP	1 Tahun	35.000.000.000,00	Sekretariat Majelis Rakyat Papua
4.01.43.05	Kegiatan Reses	Jumlah kegiatan reses	4 Kali	50.000.000.000,00	Sekretariat Majelis Rakyat Papua
4.01.43.07	Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama	Heraring /dialog dan koordinasi dengan pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama	1 Tahun	35.500.000.000,00	Sekretariat Majelis Rakyat Papua
4.01.43.08	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota MRP	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota MRP	1 Tahun	35.000.000.000,00	Sekretariat Majelis Rakyat Papua
4.01.43.12	Pelayanan Informal Pimpinan MRP	Pelayanan Informasi Pimpinan MRP	1 Tahun	15.000.000.000,00	Sekretariat Majelis Rakyat Papua
4.01.43.14	Panitia Khusus (PANSUS) Masalah-Masalah di Tanah Papua	Panitia Khusus (PANSUS) Masalah-masalah di Tanah Papua	1 Tahun	20.000.000.000,00	Sekretariat Majelis Rakyat Papua

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
4.01.43 .15	Peningkatan Kinerja Alat Kelengkapan MRP	Peningkatan Kinerja Alat Kelengkapan MRP	1 Tahun	15.000.000.000,00	Sekretariat Majelis Rakyat Papua
4.01.5 5	Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan	Persentase OPD yang memiliki data uraian jabatan	100 %	8.100.000.000,00	
		Persentase OPD yang memiliki SOP yang berkaitan dengan kinerja utama	90 %		
		Cakupan OPD Provinsi Papua yang sudah dilakukan analisis dan/atau evaluasi jabatan	90 %		
		Persentase Rekomendasi dari Analisa Beban Kerja yang ditindaklanjuti	80 %		
4.01.55 .08	Penataan Kelembagaan Provinsi Papua	Jumlah OPD Pemerintah Provinsi yang tepat fungsi dan Tepat Ukuran	35 SKPD	800.000.000,00	Biro Organisasi
		Jumlah Rekomendasi yang disepakati dan ditindaklanjuti	1 rekomendasi		
		Jumlah PERDA dan PERGUB di Bidang Kelembagaan	55 Peraturan		
4.01.55 .09	Rapat Koordinasi Teknis Bidang Organisasi se Provinsi Papua	Jumlah Rekomendasi yang disepakati dan ditindaklanjuti	1 Dokumen	550.000.000,00	Biro Organisasi
4.01.55 .11	Rapat Kerja Pembinaan Kelembagaan Kabupaten/Kota se Papua	Jumlah Rekomendasi yang disepakati dan ditindaklanjuti	1 Dokumen	600.000.000,00	Biro Organisasi
4.01.55 .13	Penyusunan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua	Persentase SKPD yang memiliki ABK di Provinsi Papua	80 %	400.000.000,00	Biro Organisasi
		Persentase Rekomendasi ABK yang ditindaklanjuti	100 %		
4.01.55 .38	Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua	jumlah SPP yang telah disusun dan diterapkan pada SKPD Provinsi dan SKPD Kab/Kota se Papua	75 Dokumen	1.100.000.000,00	Biro Organisasi
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	70 %		
		Persentase SKPD yang telah melaksanakan SPP	50 %		
		Persentase Provinsi dan Kab/Kota yang taat melaksanakan Tata Naskah	75 %		
		Evaluasi intern dan ekstern SPP	70 Dokumen		
		Persentase SKPD yang mendapat penilaian indeks pelayanan baik	6 %		
4.01.55 .39	Penyusunan Standart Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua	SK. Gubernur tentang nama, kode dan judul SOP	20 Dokumen	200.000.000,00	Biro Organisasi
		SK. Gubernur dalam bentuk Flowchat	20 Dokumen		
		Persentase OPD yang memiliki SOP yang berkaitan dengan kinerja utama	20 SKPD		
		Jumlah Analisis Standard Kompetensi SKPD	20 Orang		
		Persentase skpd yang memiliki SOP dan telah ditetapkan dengan SK gubernur	35 SKPD		
		Jumlah skpd yang dievaluasi penerapan SOP-nya	20 SKPD		
4.01.55 .40	Penyesuaian Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua	Jumlah Dokumen IKU KPD	35 Dokumen	200.000.000,00	Biro Organisasi
		Persentase IKU dan PK SKPD yang terakuntabilitas dan terintegrasi dalam IKU Pemerintah Provinsi Papua	100 %		

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
4.01.55 .70	Monitoring dan Evaluasi Data kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah hasil evaluasi data kelembagaan pada 29 Ka	12 Dokumen	400.000.000,00	Biro Organisasi
		jumlah data evaluasi kelembagaan pada 29 Kab/Kota di se-Papua	12 Kabupaten		
		Cakupan Monitoring dan Evaluasi Data Kelembagaan Perangkat Daerah Kab/Kota	12 Kabupaten		
4.01.55 .74	Penyusunan LAKIP di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua	Jumlah SKPD yang mengumpulkan LAKIP di Provinsi dan Kab/kota	35 Dokumen	300.000.000,00	Biro Organisasi
		Nilai Evaluasi AKIP Provinsi Papua oleh Kementerian PAN dan RB	80 Persentase		
		Presentase SKPD Provinsi Papua serta Kab/kota yang menerapkan SAKIP	75 %		
		Nilai LAKIP Biro Organisasi oleh Inspektorat	90 %		
4.01.55 .75	Evaluasi jabatan dilingkungan pemerintah Provinsi Papua	jumlah aparatur perngevaluasi Jabatan di lingkungan pemerintah Provinsi	35 SKPD	500.000.000,00	Biro Organisasi
4.01.55 .76	Bimtek analisis jabatan dilingkungan pemerintah Provinsi Papua	jumlah penganalisis jabatan di lingkungan Kab/Kota	35 SKPD	1.150.000.000,00	Biro Organisasi
		Cakupan OPD yang sudah dilakukan analisis dan/atau evaluasi jabatan	35 %		
		Presentase OPD yang memiliki data uraian jabatan	35 %		
4.01.55 .78	Penataan standarisasi sarana dan prasarana kerja	jumlah papan nama pejabat struktural yang telah dipasang	332 Orang	300.000.000,00	Biro Organisasi
		Presentase pemasangan papan nama pejabab struktural yang terpasang	5 %		
4.01.55 .81	Pengelolaan Data Kinerja Organisasi pada Web Side Biro Organisasi	jumlah jenis data dalam website	6 Dokumen	100.000.000,00	Biro Organisasi
4.01.55 .85	Penyusunan Data Formasi Jabatan dilingkungan Pemerintah Provinsi Papua	Persentase SKPD yang memiliki data formasi jabatan	100 Persentase	600.000.000,00	Biro Organisasi
4.01.55 .89	Evaluasi jabatan dilingkungan Pe,rintah Provinsi Papua	jumlah peserta yang mengikuti bimtek	70 Orang	500.000.000,00	Biro Organisasi
		Jumlah penganalisis jabatan SKPD	70 Orang		
		Jumlah SKPD yang sudah di evaluasi jabatan	35 SKPD		
4.01.55 .97	Sosialisai reformasi birokrasi dilingkungan pemerintah Provinsi Papua	Persentase SKPD Provinsi dan 29 Kabupaten/Kota yang menerapkan Reformasi Birokrasi	60 %	400.000.000,00	Biro Organisasi
4.01.5 7	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase ASN peserta diklat teknis fungsional yang lulus dengan Predikat Memuaskan	20 %	14.900.000.000,00	
		Persentase ASN peserta diklat teknis fungsional yang lulus dengan Predikat Memuaskan	20 %		
		Persentase ASN peserta diklat teknis fungsional yang lulus dengan Predikat Memuaskan	100 %		
		Persentase ASN peserta diklat teknis fungsional yang lulus dengan Predikat Memuaskan	30 %		
		Persentase ASN peserta diklat teknis fungsional yang lulus dengan Predikat Memuaskan	20 %		

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
		Terlaksananya peningkatan kompetensi teknis/fungsional aparatur melalui pembinaan dan pengembangan	0 %		
4.01.57.13	Pengembangan kualitas SDM Aparatur	Jumlah peserta mengikuti diklat	5 Orang	300.000.000,00	Biro Tata Pemerintahan dan Otonomi Khusus
4.01.57.13	Pengembangan kualitas SDM Aparatur	Jumlah peserta mengikuti diklat	38 Orang	250.000.000,00	Badan Penghubung Daerah
4.01.57.18	Evaluasi Pasca Diklat Pim	Jumlah alumni diklat pim yang menindaklanjuti proyek perubahan	40 Orang	500.000.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4.01.57.23	Rakornis Bidang Kediklatan	Jumlah peserta mengikuti Rakornis	150 Orang	650.000.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4.01.57.34	Diklat Bahasa Inggris bagi Aparatur	Jumlah peserta mengikuti diklat	80 Orang	500.000.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Jumlah peserta mengikuti diklat BAHASA asing	0 Orang		
4.01.57.56	Pengembangan Kapasitas SDM Aparatur	Jumlah peserta mengikuti diklat	15 Orang	1.500.000.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4.01.57.57	Pengembangan Kerjasama Penyelenggaraan Diklat	Jumlah kerjasama penyelenggaraan diklat	1 Dokumen	2.500.000.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4.01.57.58	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	Jumlah penilaian angka kredit jabatan fungsional WI	35 Orang	500.000.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Jumlah laporan hasil penilaian angka kredit jabatan fungsional WI	0 Orang		
4.01.57.87	Pengembangan Data dan Informasi Diklat	Jumlah dokumen data dan informasi yang siap di akses	1 Dokumen	600.000.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4.01.57.89	Diklat Pengelolaan Aset Daerah	Jumlah peserta mengikuti diklat	30 Orang	500.000.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4.01.57.94	Diklat TOT Subtansi WI	Jumlah peserta mengikuti diklat	30 Orang	500.000.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4.01.57.95	Analisis Kebutuhan Diklat	Jumlah dokumen hasil analisis kebutuhan diklat	1 Dokumen	400.000.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4.01.57.96	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Diklat	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan diklat di kab/kota	1 Laporan	400.000.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4.01.57.98	Diklat Penyusunan Standard Operating Procedure (SOP)	Jumlah peserta mengikuti diklat	30 Orang	500.000.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4.01.57.99	Diklat Perencanaan dan Penganggaran	Jumlah peserta mengikuti diklat	30 Orang	500.000.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
4.01.57 .103	Diklat MOT bagi Pengelola Diklat	Jumlah peserta mengikuti diklat	30 Orang	500.000.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4.01.57 .113	Monitoring Persiapan Sarana dan Prasarana Penyelenggaraan Diklat di Kabupaten/Kota	Jumlah Kab/Kota yang menyelenggarakan diklat	10 Kabupaten	300.000.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4.01.57 .116	Diklat TOC bagi Penyelenggara Diklat	Jumlah Peserta mengikuti Diklat	60 Orang	1.000.000.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4.01.57 .119	Perencanaan dan Pembinaan Diklat Aparatur	Laporan hasil perencanaan dan Pembinaan diklat aparatur	1 Laporan	500.000.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4.01.57 .120	Pengembangan Standarisasi dan Sertifikasi Kompetensi ASN	Laporan hasil pengembangan kompetensi standarisasi dan sertifikasi ASN	1 Laporan	500.000.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4.01.57 .126	Diklat Kepamongprajaan	Jumlah peserta mengikuti diklat	60 Orang	1.000.000.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4.01.57 .127	Diklat Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah peserta mengikuti diklat	60 Orang	1.000.000.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4.01.6 1	Program Pengembangan Penataan dan Pentas Anjungan	Persentase peningkatan jumlah pengunjung Pentas Anjungan Papua	3 %	600.000.000,00	
4.01.61 .01	Promosi Budaya 5 Wilayah Adat Papua ditingkat Nasional/Internasional	Jumlah media promosi yang disediakan Frekuensi penyelenggaraan event promosi budaya	0 Media 6 Kali	250.000.000,00	Badan Penghubung Daerah
4.01.61 .03	Optimalisasi Pengelolaan Anjungan Daerah Papua di TMII sebagai Pusat Promosi Papua	Jumlah media promosi pada Anjungan yang dikelola	12 Media	250.000.000,00	Badan Penghubung Daerah
4.01.61 .04	Rapat Koordinasi dan Komunikasi dengan Kementerian/Lembaga atau Pemerintah Daerah dalam Rangka Kerjasama Daerah	Frekuensi pertemuan Jumlah peserta rapat	24 Kali 0 Orang	50.000.000,00	Badan Penghubung Daerah
4.01.61 .05	Pembuatan Media Promosi tentang Potensi Sumber Daya Alam, Objek Pariwisata dan Budaya Papua	Jumlah media promosi yang disediakan	12 Media	50.000.000,00	Badan Penghubung Daerah
4.01.6 2	Program Pendidikan Kedinasan			15.030.660.000,00	
4.01.62 .01	Diklat Pim Tingkat III	Jumlah peserta mengikuti diklat	40 Orang	1.750.000.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4.01.62 .05	Diklat Pim Tingkat IV	Jumlah peserta mengikuti diklat	40 Orang	1.550.000.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4.01.62 .07	Diklat Pim Tingkat IV bagi Kabupaten/Kota	Jumlah peserta mengikuti diklat	120 Orang	4.200.000.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4.01.62 .08	Diklat Pim Tingkat II	Jumlah peserta mengikuti diklat	60 Orang	1.770.660.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
4.01.62.09	Diklat Pim Tingkat III bagi Kabupaten/Kota	Jumlah peserta mengikuti diklat	120 Orang	4.560.000.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4.01.62.13	Pelatihan Dasar CPNS	Jumlah Peserta mengikuti pelatihan	80 Orang	1.200.000.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4.01.67	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Jumlah Perdasi tentang pemerintahan yang ditetapkan	5 Dokumen	1.500.000.000,00	
4.01.67.03	RAKERDA Bupati dan Walikota se Provinsi Papua	Jumlah peserta	800 Orang	1.500.000.000,00	Biro Tata Pemerintahan dan Otonomi Khusus
		Jumlah Peserta	0 Orang		
4.01.68	Program Pembinaan dan Penataan Administrasi Pemerintahan	Cakupan pembinaan dan Penataan Administrasi Pemerintahan	100 %	10.600.000.000,00	
4.01.68.02	Sosialisasi Prosedur dan Mekanisme Proses Pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB)	Terlaksananya Sosialisasi Prosedur dan Mekanisme Proses Pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB)	6 Kabupaten	1.500.000.000,00	Biro Tata Pemerintahan dan Otonomi Khusus
4.01.68.03	Fasilitasi Pensiun Pejabat Negara dan PAW DPRP/DPRD	Jumlah Pejabat Negara yang Pensiun	10 Orang	1.000.000.000,00	Biro Tata Pemerintahan dan Otonomi Khusus
4.01.68.05	Percepatan Penyerahan Aset dari Kabupaten Induk ke Kabupaten Pemekaran	Jumlah Aset yang diserahkan	29 Dokumen	1.000.000.000,00	Biro Tata Pemerintahan dan Otonomi Khusus
4.01.68.06	Rapat Koordinasi Teknis Bidang Pemerintahan	Jumlah koordinasi dan konsultasi dalam daerah yang dilakukan	100 Kegiatan	1.000.000.000,00	Biro Tata Pemerintahan dan Otonomi Khusus
4.01.68.08	Fasilitasi Persiapan Pelantikan Kepala Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua	Jumlah Kepala Daerah yang dilantik	10 Orang	1.000.000.000,00	Biro Tata Pemerintahan dan Otonomi Khusus
4.01.68.10	Monitoring dan Rapat Koordinasi Penegasan Batas Wilayah	Jumlah berkas	10 Dokumen	1.500.000.000,00	Biro Tata Pemerintahan dan Otonomi Khusus
4.01.68.12	Fasilitasi Pelatihan Bupati/Walikota se Provinsi Papua	Kepala daerah	10 Dokumen	1.000.000.000,00	Biro Tata Pemerintahan dan Otonomi Khusus
4.01.68.15	Pembuatan Peta Provinsi Papua	Jumlah peta	10 Dokumen	100.000.000,00	Biro Tata Pemerintahan dan Otonomi Khusus
		1	0 Dokumen		
		Dokumen	0 Dokumen		
4.01.68.17	Penyelesaian Perselisihan Batas Daerah Provinsi Papua	Jumlah permasalahan	10 Lokasi	1.500.000.000,00	Biro Tata Pemerintahan dan Otonomi Khusus
4.01.68.18	Monitoring dan Koordinasi Penegasan Batas Wilayah	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	1.000.000.000,00	Biro Tata Pemerintahan dan Otonomi Khusus
4.01.77	Program Pembinaan Masyarakat dan Kemahasiswaan	Jumlah konsultasi dan konsolidasi pembinaan OAP dan Masyarakat di Jakarta	5 Kali Tahun	250.000.000,00	
4.01.77.01	Konsultasi dan Konsolidasi	Jumlah konsultasi dan konsolidasi pembinaan OAP dan Masyarakat	12 Kegiatan	250.000.000,00	Badan Penghubung Daerah
4.01.78	Program Pelayanan Informasi	Tingkat pelayanan informasi publik pemerintah Provinsi Papua	90 %	1.400.000.000,00	

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
4.01.78.05	Penyebarluasan Informasi Pelaksanaan PON XX Tahun 2020 di Papua	Jumlah penyebarluasan informasi Pelaksanaan PON XX tahun 2020	12 Kegiatan	250.000.000,00	Badan Penghubung Daerah
		Jumlah penyebarluasan informasi/Media Promosi	12 Kegiatan		
4.01.78.07	Pengembangan Sistem Informasi Publik melalui media	Jumlah media informasi publik yang disiapkan	5 Media	250.000.000,00	Biro Umum dan Protokol
4.01.78.08	Peningkatan Kapasitas Pelayanan Pengaduan Publik e-Lapor	Jumlah peserta bimtek/pelatihan	15 Orang	150.000.000,00	Biro Umum dan Protokol
4.01.78.11	Peningkatan Kapasitas dan Monitoring PPID Utama Provinsi Papua	Jumlah PPID yang dipantau dan dibina	6 Unit	250.000.000,00	Biro Umum dan Protokol
4.01.78.13	Penyediaan Data dan Informasi Potensi Sumber Daya Alam, Pariwisata dan Budaya di Wilayah Adat Papua	Jumlah Data Informasi Potensi Sumber Daya Alam, Pariwisata dan Budaya	5 Dokumen	250.000.000,00	Badan Penghubung Daerah
4.01.78.16	Strategi Komunikasi Terpadu dalam Rangka Penyebarluasan Informasi tentang Papua	Terlaksananya Komunikasi dan Penyebarluasan Informasi	12 Dokumen	250.000.000,00	Badan Penghubung Daerah
4.01.100	Program Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan	Cakupan Pos Lintas Batas yang berstanda internasional	1 lokasi	27.850.000.000,00	
		Cakupan koordinasi pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan	55 persen		
		Cakupan Ketersediaan sekolah di perbatasan	200 murid per sekolah		
		Cakupan Ketersediaan guru di perbatasan	20 murid per guru		
		Cakupan Ketersediaan kelas di perbatasan	30 murid per kelas		
		Cakupan Ketersediaan Sarana Prasarana Kesehatan di perbatasan	1 puskesmas per 1000 penduduk		
		Cakupan Ketersediaan Sarana Prasarana Infrastruktur dasar di perbatasan	42 persen		
		Cakupan Ketersediaan Sarana Prasarana ekonomi di perbatasan	45 persen		
4.01.10.01	Pembangunan Pos Pengamanan Batas RI-PNG	Tersedianya Pos Pengamanan Batas RI-PNG	1 Unit	500.000.000,00	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerja Sama
4.01.10.02	Penataan dan Pemeliharaan Lingkungan PPLBN	Tertata dan terpeliharanya lingkungan Pemeriksaan Pos Lintas Batas Negara (PPLBN)	2 Lokasi	300.000.000,00	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerja Sama
4.01.10.08	Pembangunan Balai Kampung di Kawasan Perbatasan	Tersedianya Balai Kampung di Kawasan Perbatasan	2 Unit	1.500.000.000,00	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerja Sama
		Tersedianya 1 (satu) unit balai kampung di kawasan perbatasan	0 Unit		
		Tersedianya balai pertemuan di kawasan perbatasan	0 Unit		
4.01.10.09	Pemetaan Tata Ruang dan Hak Ulayat di Kawasan Perbatasan	Terlaksananya Pemetaan Tata Ruang dan Hak Ulayat di Kawasan Perbatasan	3 Dokumen	750.000.000,00	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerja Sama
		Tersedianya dokumen pemetaan tata ruang dan hak ulayat di kawasan perbatasan	0 Dokumen		
4.01.10.11		Terlatihnya keterampilan home industri bagi masyarakat perbatasan	20 Orang	0,00	

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
	Peningkatan Keterampilan Home Industry bagi Masyarakat Kawasan Perbatasan	Terlatihnya 20 orang yang mengikuti keterampilan home industri	0 Orang		Badan Pengelola Perbatasan dan Kerja Sama
4.01.10 0.12	Pembangunan balai pertemuan di kawasan perbatasan	Jumlah gedung/unit yang terbangun	2 Unit	0,00	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerja Sama
4.01.10 0.13	Koordinasi Pengembangan Infrastruktur kawasan perbatasan	Tersedianya laporan hasil kordinasi pengembangan infrastruktur kawasan perbatasan	1 Kegiatan	150.000.000,00	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerja Sama
		Jumlah kawasan perbatasan yang dikoordinasikan	0 Dokumen		
4.01.10 0.15	Pengadaan dan pemasangan PLTS bagi Masyarakat Perbatasan	Jumlah solar cell yang diadakan	1 Lokasi	1.000.000.000,00	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerja Sama
4.01.10 0.18	Pembangunan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat di Kawasan Perbatasan	Jumlah Rumah yang Terbangun	20 Unit	10.000.000.000,00	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerja Sama
4.01.10 0.20	Penataan dan Pemeliharaan Lingkungan Pos Lintas Batas (PPLB)	Jumlah pos lintas batas yang dilakukan penataan	2 Unit	300.000.000,00	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerja Sama
4.01.10 0.21	Pembangunan Rumah Adat di Kawasan Perbatasan	Jumlah rumah adat yang terbangun	1 Unit	250.000.000,00	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerja Sama
4.01.10 0.24	Pembangunan Rumah Penampungan (singgah) sementara bagi Repatrian dan Warga yang Bermasalah	Jumlah rumah yang terbangun	1 Unit	2.000.000.000,00	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerja Sama
4.01.10 0.25	Pembangunan Pos Terpadu Perbatasan (Pos PLB) Laut dan Darat di Merauke, Bouven Digoel dan Kota Jayapura	Jumlah Pos Perbatasan yang terbangun	1 Unit	1.500.000.000,00	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerja Sama
4.01.10 0.26	Monitoring dan Evaluasi Pembangunan di Kawasan Perbatasan RI-PNG	Jumlah Dokumen	5 Dokumen	500.000.000,00	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerja Sama
4.01.10 0.29	Peningkatan Keterampilan Masyarakat di Bidang Ekonomi di Kawasan Perbatasan	Jumlah yang terlatih	20 Orang	500.000.000,00	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerja Sama
4.01.10 0.30	Pembinaan Sanggar Budaya di Kawasan Perbatasan	Jumlah Sanggar Budaya yang terbina	1 Kelompok	250.000.000,00	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerja Sama
4.01.10 0.31	Pameran Pembangunan dan Budaya Perbatasan	Jumlah Pameran	1 Kegiatan	300.000.000,00	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerja Sama
4.01.10 0.33	Inventarisasi dan Pemutakhiran Data Potensi Kawasan Perbatasan dan PPKT	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	400.000.000,00	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerja Sama
4.01.10 0.34	Penyusunan Naskah Akademik dan Raperdasi Tata Ruang dan Hak Ulayat di Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerja Sama
4.01.10 0.35	Rapat Koordinasi Pembangunan dan Peningkatan Jalan Koridor Perbatasan yang Menghubungkan setiap Kab/Kota pada Wilayah Konsentrasi Pengembangan (WKP)	Jumlah Rapat Koordinasi	2 Kegiatan	300.000.000,00	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerja Sama
4.01.10 0.36	Penyusunan RDTR Seluruh LOKPRI di Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	1.000.000.000,00	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerja Sama
4.01.10 0.40	Pembangunan Pasar Tradisional Pada masing-masing distrik LOKPRI	Jumlah pasar yang terbangun	1 Unit	800.000.000,00	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerja Sama

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
4.01.10 0.41	Pembangunan Fasilitas Pendukung Pasar (Terminal dan Pergudangan)	Jumlah pasar yang tersedia fasilitasnya	1 Unit	750.000.000,00	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerja Sama
4.01.10 0.42	Pembangunan Lokasi Pariwisata Sesuai dengan ODTW di Kawasan Perbatasan dan PPKT	Jumlah lokasi yang dikembangkan	1 Lokasi	500.000.000,00	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerja Sama
4.01.10 0.43	Pembangunan Pasar-pasar induk dan Tradisional di Kawasan Perbatasan	Jumlah pasar yang terbangun	1 Unit	1.000.000.000,00	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerja Sama
4.01.10 0.46	Rapat Koordinasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan kawasan Perbatasan dan Pulau-pulau terluar antar negara di Provinsi Papua	Jumlah peserta rapat koordinasi	50 Orang	500.000.000,00	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerja Sama
4.01.10 0.47	Pembangunan Tambatan Perahu/Dermaga di kabupaten/Kota perbatasan PPKT	Tersedianya Dermaga di kabupaten/kota perbatasan PPKT	1 Unit	2.500.000.000,00	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerja Sama
		Jumlah tambatan perahu/dermaga kabupaten/kota perbatasan dan PPPKT	0 Lokasi		
4.01.1 01	Program Pengelolaan Batas Wilayah dan Lintas Batas	Cakupan koordinasi pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan	55 %	7.850.000.000,00	
		Cakupan Ketersediaan Sarana Prasarana Infrastruktur dasar di perbatasan	42 %		
		Cakupan Ketersediaan Sarana Prasarana ekonomi di perbatasan	45 %		
4.01.10 1.03	Sosialisasi Basic Agreement Bagi Masyarakat Perbatasan	Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang peraturan lintas batas	100 Orang Lokasi	500.000.000,00	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerja Sama
4.01.10 1.05	Joint Verifikasi Pelintas Batas Wilayah RI-PNG	Jumlah pelintas batas yang diverifikasi	200 Orang	500.000.000,00	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerja Sama
		Jumlah pelintas batas yang di verifikasi	0 Orang		
4.01.10 1.13	Penataran Pengelola Perbatasan Satu Atap	Meningkatnya pola pikir dan pola tindak pejabat pengelola perbatasan dalam implementasi kebijakan perbatasan	50 Orang	500.000.000,00	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerja Sama
4.01.10 1.17	Border Trade RI-PNG dan Negara Pasifik Selatan	Meningkatnya Border Trade Fair RI-PNG dan Negara Pasifik Selatan	1 Kegiatan	750.000.000,00	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerja Sama
4.01.10 1.20	Joint Verifikasi permasalahan perbatasan RI-PNG	Diketahuinya upaya penyelesaian permasalahan perbatasan RI-PNG	1 Dokumen	500.000.000,00	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerja Sama
4.01.10 1.21	Penataran manajemen tingkat dasar, lanjut dan mahir pembina garda batas	Meningkatnya SDM Pembina Garda Batas Tk Dasar, Lanjut dan Mahir	50 Orang	300.000.000,00	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerja Sama
4.01.10 1.22	Pendataan dan Verifikasi WNI asal Papua di PNG	Terdatanya WNI asal Papua di PNG	1 Dokumen	500.000.000,00	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerja Sama
4.01.10 1.23	Pemeliharaan Pilar batas RI-PNG	Tertata dan Terpeliharanya Pilar Batas Negara RI-PNG	1 Lokasi	300.000.000,00	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerja Sama
4.01.10 1.24	Pembinaan pelintas batas tradisional yang kembali ke RI	Terbinanya pelintas batas tradisional yang kembali ke RI	50 Orang	500.000.000,00	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerja Sama
4.01.10 1.25	Penanganan pemulangan repatrian asal Indonesia	Tertanganinya repatrian asal Indonesia	50 Orang	500.000.000,00	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerja Sama
		Jumlah repatrian asal Indonesia yang tertangani	0 Orang		

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
4.01.10 1.26	Pelatihan penanganan bencana alam dan kecelakaan RI-PNG	Meningkatnya aparatur SDM paratur dalam penanganan bencana alam dan kecelakaan RI-PNG	50 Orang	300.000.000,00	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerja Sama
		Meningkatnya hubungan kerjasama penanganan bencana alam RI-PNG	0 Ton		
4.01.10 1.27	Rakornis Pengelola Perbatasan RI-PNG	Rekomendasi hasil Rakornis Pengelolaan Perbatasan	1 Dos	500.000.000,00	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerja Sama
4.01.10 1.28	Pameran Pembangunan dan Budaya Kawasan Perbatasan	Terinformasinya hasil pembangunan dan budaya kawasan perbatasan	1 Kegiatan	500.000.000,00	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerja Sama
4.01.10 1.29	Penyusunan pelaporan TP2K OPD	Tersedianya laporan TP2K OPD	12 Dokumen	100.000.000,00	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerja Sama
4.01.10 1.30	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan OPD	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kegiatan OPD	1 Dokumen	500.000.000,00	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerja Sama
4.01.10 1.33	Sosialisasi Pengelolaan Perbatasan Satu Atap	Jumlah Peserta	1 Orang	300.000.000,00	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerja Sama
4.01.10 1.34	Pelatihan Manajemen Tingkat Dasar, Lanjut dan Mahir Pembina Garda Batas	Jumlah Peserta	50 Orang	300.000.000,00	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerja Sama
4.01.10 1.37	Evaluasi dan Pendampingan ke Daerah Perbatasan	Jumlah Orang Yang Melakuakan Pendampingan	1 Orang	500.000.000,00	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerja Sama
4.01.1 02	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Kampung di Provinsi Papua	Jumlah aparatur kampung dan distrik yang mendapatkan pelatihan pemerintahan kampung	250 Orang	6.700.000.000,00	
		Cakupan kampung mandiri dalam penyelenggaraan pemerintahannya	55 %		
4.01.10 2.01	Rakornis Pemerintahan Kampung	Jumlah peserta	200 Orang	1.500.000.000,00	Biro Tata Pemerintahan dan Otonomi Khusus
4.01.10 2.02	Pembinaan Manajemen Pemerintahan Kampung	Jumlah peserta	500 Orang	1.500.000.000,00	Biro Tata Pemerintahan dan Otonomi Khusus
4.01.10 2.04	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kepala Kampung dan Bamuskam di Provinsi Papua	Jumlah peserta	500 Orang	2.000.000.000,00	Biro Tata Pemerintahan dan Otonomi Khusus
4.01.10 2.17	Monitoring dan Pendampingan Administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung	Jumlah dokumen	1 Dokumen	1.000.000.000,00	Biro Tata Pemerintahan dan Otonomi Khusus
		Jumlah Peserta	1 Orang		
4.01.10 2.19	Bimtek Sekretaris Kampung se Provinsi Papua	Jumlah Peserta	500 Orang	700.000.000,00	Biro Tata Pemerintahan dan Otonomi Khusus
4.01.1 03	Program Peningkatan Penyelenggaraan Otonomi	Cakupan LPPD kabupaten/kota yang berpredikat Sangat Tinggi	16 Kabupaten	4.870.000.000,00	
4.01.10 3.12	Monitoring Penyelenggaraan Otonomi Khusus di Provinsi Papua dan 29 Kab/Kota	Terdianya Laporan Penyelenggaraan Otonom Khusus	6 Buku	300.000.000,00	Biro Tata Pemerintahan dan Otonomi Khusus
4.01.10 3.14	Rapat Koordinasi Tentang Efektifitas Perdasi/Perdasus	Terlaksananya Rapat Koordinasi Perdasi/Perdasus	3 Kali	300.000.000,00	Biro Tata Pemerintahan dan Otonomi Khusus

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
4.01.10 3.17	Bimbingan Teknis dan Pendampingan Penyusunan LPPD Provinsi Papua dan 29 Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta	60 Orang	300.000.000,00	Biro Tata Pemerintahan dan Otonomi Khusus
4.01.10 3.19	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) bagi Tim Daerah	Dokumen	29 Dokumen	1.500.000.000,00	Biro Tata Pemerintahan dan Otonomi Khusus
4.01.10 3.21	Pemetaan Lima Wilayah Adat di Provinsi Papua	Tersedianya Dokumen Penetaan Wilayah Adat di Provinsi Papua	6 Dokumen	500.000.000,00	Biro Tata Pemerintahan dan Otonomi Khusus
4.01.10 3.22	Rapat Koordinasi Forum Desentralisasi Asimetris Lima Provinsi Papua	Jumlah orang/peserta Rapat Koordinasi Forum Desentralisasi Asimetris Lima Provinsi Papua	200 Kegiatan	500.000.000,00	Biro Tata Pemerintahan dan Otonomi Khusus
4.01.10 3.23	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Penyelenggaraan Otonomi Khusus	Meningkatnya Administrasi Penyelenggaraan Otonomi Khusus	3 Dokumen	500.000.000,00	Biro Tata Pemerintahan dan Otonomi Khusus
4.01.10 3.25	Inventarisasi Sarana dan Prasarana Otonomi Khusus	Meningkatnya Jumlah data Sarana dan Prasarana Otonomi Khusus	6 Kabupaten	470.000.000,00	Biro Tata Pemerintahan dan Otonomi Khusus
4.01.10 3.30	Koordinasi Kerja sama Pengembangan Sumber Daya Manusia Papua	Tersedianya Perjanjian Kerjasama Pengembangan SDM Papua	50 Dokumen	500.000.000,00	Biro Tata Pemerintahan dan Otonomi Khusus
4.01.1 11	Program Pengembangan Komunikasi, Informatika dan Media Massa	Jumlah media cetak nasional yang mempublikasi hasil pembangunan Papua	8 per tahun	4.960.000.000,00	
4.01.11 1.01	Penguatan Peran Bakohumas Provinsi Papua dan Kab/Kota	Jumlah peserta	100 Orang	200.000.000,00	Biro Umum dan Protokol
4.01.11 1.02	Publikasi Kebijakan Pemda Provinsi Papua	Frekuensi Dialog Interaktif	18 Kali	300.000.000,00	Biro Umum dan Protokol
4.01.11 1.04	Pembuatan film Dokumenter	Jumlah film dokumenter Jejak rekam Pembangunan	1 Film/Video	250.000.000,00	Biro Umum dan Protokol
4.01.11 1.06	Penyelenggaraan Rakor Kehumasan, Pelayanan Informasi Publik serta Keprotokolan se Papua	Jumlah Peserta Rakor	150 Orang	300.000.000,00	Biro Umum dan Protokol
4.01.11 1.07	Pendokumentasian Sambutan/Pidato Gubernur	Jumlah Sambutan/Pidato Gubernur	240 Dokumen	180.000.000,00	Biro Umum dan Protokol
4.01.11 1.08	Pengembangan Hubungan Kerjasama dengan Unsur Pers dan Lembaga Lainnya	Jumlah kerjasama dengan pers/lembaga	18 Lembaga	100.000.000,00	Biro Umum dan Protokol
4.01.11 1.09	Peliputan dan Pendokumentasian Kegiatan Pemerintah Provinsi Papua	Frekuensi peliputan kegiatan	250 Kali	200.000.000,00	Biro Umum dan Protokol
4.01.11 1.10	Publikasi Media Luar Ruang	Jumlah media publikasi luar ruang	0 Unit	350.000.000,00	Biro Umum dan Protokol
		Frekuensi publikasi luar ruang	500 Kali		
4.01.11 1.11	Pameran Pembangunan/Bakohumas	Jumlah peserta pameran	8 Orang	150.000.000,00	Biro Umum dan Protokol
4.01.11 1.12	Publikasi Visi Misi Pemerintah dan Hasil2 Pembangunan	Jumlah media cetak atau media promosi lainnya	3.500 Eksemplar	200.000.000,00	Biro Umum dan Protokol
4.01.11 1.13	Penerbitan Buletin Kabar Papua	Jumlah cetakan buletin	1.800 Eksemplar	200.000.000,00	Biro Umum dan Protokol
4.01.11 1.14	Kerjasama Media Cetak	Jumlah kerjasama	15 Media	1.000.000.000,00	Biro Umum dan Protokol
4.01.11 1.15	Penayangan Iklan dan Advertorial Provinsi Papua di Media Cetak	Frekuensi Iklan dan Advertorial di Media	8 Kali	200.000.000,00	Biro Umum dan Protokol

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
4.01.11 1.16	Penayangan Siaran Langsung di Media Elektronik	Frekuensi Siaran Langsung	5 Kali	150.000.000,00	Biro Umum dan Protokol
4.01.11 1.17	Kerjasama Media Elektronik	Jumlah kerjasama media elektronik	4 Media	500.000.000,00	Biro Umum dan Protokol
4.01.11 1.18	Produksi Iklan layanan Masyarakat	Jumlah iklan layanan masyarakat yang diproduksi	3 Iklan	130.000.000,00	Biro Umum dan Protokol
4.01.11 1.19	Penayangan Iklan Layanan masyarakat di media elektronik	Frekuensi tayang iklan layanan masyarakat di media elektronik	184 Kali	150.000.000,00	Biro Umum dan Protokol
4.01.11 1.20	Pengelolaan Analisis Informasi melalui Media Cetak dan Online	Jumlah kliping berita	200 Kliping	200.000.000,00	Biro Umum dan Protokol
4.01.11 1.21	Temu Wicara Pimpinan Daerah dengan Publik Melalui Para-para Publik	Jumlah peserta audiens	150 Orang	200.000.000,00	Biro Umum dan Protokol
4.01.1 12	Program Peningkatan Hubungan Kerjasama Luar Negeri	Cakupan kerjasama antara negara di kawasan perbatasan yang diimplementasikan	90 persen	6.950.000.000,00	
4.01.11 2.01	Border Liaison Meeting (BLM)	Jumlah Liaison Meeting	1 Kali Tahun	1.000.000.000,00	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerja Sama
		Jumlah kesepakatan	0 Dokumen		
4.01.11 2.02	Border Liaison Officer Meeting (BLOM)	Jumlah Liaison Officer Meeting	0 Kali Tahun	800.000.000,00	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerja Sama
		Jumlah kesepakatan	0 Dokumen		
4.01.11 2.03	Penjajakan Kerjasama Luar Negeri	Jumlah Kerjasama	1 Kali Tahun	500.000.000,00	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerja Sama
4.01.11 2.04	Border Trade RI - PNG dan Negara Passfik Selatan	Jumlah Peserta Pameran	100 Orang Kegiatan	750.000.000,00	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerja Sama
4.01.11 2.05	Pelayanan Kunjungan Tamu Negera	Jumlah kunjungan	24 Kali Tahun	300.000.000,00	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerja Sama
4.01.11 2.08	Peningkatan Kerjasama Ekonomi dan Sosial Budaya Masyarakat Perbatasan	Jumlah Kerjasama	1 Kegiatan	300.000.000,00	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerja Sama
4.01.11 2.09	Peningkatan Kerjasama Luar Negeri	Jumlah Kerjasama Luar Negeri	1 Kegiatan	300.000.000,00	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerja Sama
4.01.11 2.10	Riset dan Pengembangan Konektivitas antar Wilayah dan Kawasan	Jumlah Dokumen Yang di Hasilkan	1 Dokumen	500.000.000,00	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerja Sama
4.01.11 2.14	Peningkatan Kerjasama Sister Province Papua - Yamagata Prefecture	Jumlah kerjasama	1 Dokumen	600.000.000,00	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerja Sama
4.01.11 2.17	Penyusunan MoU Kerjasama Sister Province dengan West Sepik, Madang, Morobe	Jumlah MoU	1 Dokumen	400.000.000,00	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerja Sama
4.01.11 2.20	Penyusunan Naskah Akademik dan Raperdas Grand Design Pemulangan Pelintas Batas dari Luar Negeri	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	500.000.000,00	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerja Sama
4.01.11 2.21	Rakornis Pengelola Perbatasan	Jumlah Rapat Koordinasi	1 Kegiatan	0,00	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerja Sama
4.01.11 2.23	Sosialisasi Basic Agreement Bagi Masyarakat Perbatasan	Jumlah Dokumen Kerjasama	100 Dokumen	0,00	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerja Sama
		Jumlah peserta kegiatan	0 Orang		
4.01.11 2.25	Joint Verifikasi Pelintas Batas dan Permasalahan Wilayah Perbatasan RI-PNG	Jumlah Dokumen Pelintas batas	1 Dokumen	0,00	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerja Sama

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
4.01.11 2.27	Penanganan Masyarakat Pelintas Batas RI-PNG yang Terkena Musibah	Jumlah Masyarakat yang tertangani	1 Orang	0,00	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerja Sama
4.01.11 2.29	Pembinaan Pelintas Batas Tradisional yang Kembali ke RI	Jumlah Pelintas batas yang dibina	50 Orang	0,00	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerja Sama
4.01.11 2.30	Pelatihan Penanganan Bencana Alam dan Kecelakaan di RI-PNG	Jumlah Peserta	20 Orang	0,00	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerja Sama
4.01.11 2.31	Penyusunan Grand Design Penanganan Pelintas Batas yang kembali dari negara lain	Jumlah Dokumen Grand Design	1 Dokumen	0,00	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerja Sama
4.01.11 2.32	Pengadaan Sarana Prasarana Pengamanan Perbatasan RI-PNG	Jumlah Prasarana pengamanan Perbatasan	2 Unit	1.000.000.000,00	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerja Sama
4.01.1 13	Program Peningkatan Kapasitas SDM Papua			52.200.000.000,00	
4.01.11 3.01	Penyediaan Beasiswa bagi Mahasiswa Asli Papua (Pendidikan Dalam Negeri)	Jumlah Mahasiswa Penerima Beasiswa	500 Orang	52.200.000.000,00	Biro Tata Pemerintahan dan Otonomi Khusus
4.01.1 15	Program peningkatan kapasitas kelembagaan barang dan jasa	Koordinasi	0 Kegiatan	42.800.000.000,00	
		Cakupan pengadaan barang dan jasa melalui ULP	100 %		
4.01.11 5.01	Peningkatan pelayanan Pengadaan barang dan jasa	jumlah user barang dan jasa yang terlayani	35 Unit	5.000.000.000,00	Biro Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa
4.01.11 5.02	peningkatan pelayanan pengadaan jasa konstruksi dan konsultasi	jumlah user jasa konstruksi dan konsultasi yang terlayani	35 Unit	26.500.000.000,00	Biro Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa
4.01.11 5.03	Pendampingan hukum dan sanggah	jumlah masalah hukum yang didampingi	12 Laporan	1.500.000.000,00	Biro Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa
4.01.11 5.04	Penyusunan peraturan tentang kode etik dan majelis etik dalam penyelenggaraan pengadaan	Jumlah Peraturan	1 Peraturan	500.000.000,00	Biro Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa
4.01.11 5.05	Monitoring dan evaluasi (MONEV) Pengadaan barang/Jasa	Jumlah Monitoring yang dilaksanakan	29 Lokasi	1.500.000.000,00	Biro Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa
4.01.11 5.06	Pendampingan perencanaan pengadaan	Jumlah dokumen perencanaan yang dihasilkan	35 Dokumen	1.500.000.000,00	Biro Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa
4.01.11 5.07	Klinik pengadaan barang/jasa	jumlah konsultasi	60 Kali	500.000.000,00	Biro Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa
4.01.11 5.08	Pembinaan UKPBJ	Jumlah UKPBJ yang dibina	29 Unit	1.500.000.000,00	Biro Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa
4.01.11 5.10	Peningkatan Kapasitas LPSE	Jumlah Aparatur LPSE yang ditingkatkan	25 Orang	3.000.000.000,00	Biro Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa
4.01.11 5.11	Pengembangan Registrasi dan Verifikasi Pengguna SPSE	Jumlah Perusahaan Pengguna SPSE yang Teregistrasi dan Terverifikasi	3.500 Perusahaan	500.000.000,00	Biro Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa
4.01.11 5.12	Pelaksanaan Administrasi Sistem Elektronik	Jumlah SKPD Pengguna SPSE yang terlayani	35 SKPD	500.000.000,00	Biro Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa
4.01.11 5.13	Pelatihan Pengisian Sistem Rencana Umum Pengadaan (SiRUP)	Jumlah Orang yang dilatih	35 Orang	300.000.000,00	Biro Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
4.02	Pengawasan			45.170.801.870,00	
4.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	100 persen	3.289.235.720,00	
4.02.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang disediakan	800 Surat	15.000.000,00	Inspekt orat
4.02.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Jasa Layanan berlangganan Listrik,Air,Telepon, Transponder	3 Layanan	50.995.720,00	Inspekt orat
4.02.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Unit Mobil DInas/Operasional yang terpelihara dan Terfasilitasi Perijinannya	30 Unit	22.500.000,00	Inspekt orat
4.02.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Honor yang terbayarkan	5 Orang	170.400.000,00	Inspekt orat
4.02.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Luas Gedung dan Halaman yang disediakan jasa kebersihan	145 M2	14.000.000,00	Inspektorat
		Jumlah tenaga kebersihan dan Fasilitas Pendukung kebersihan kantor	2 Orang		
		Jumlah Jenis Bahan dan Alat Kebersihan	15 Jenis		
4.02.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	80 Jenis	310.000.000,00	Inspekt orat
4.02.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan	6 Jenis	100.000.000,00	Inspektorat
		Jumlah penggandaan	1.000 Lembar		
		Jumlah Jenis Barang Cetakkan yang Disediakan	6 Jenis		
		Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	12 Bulan		
4.02.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	7.800 Jenis	39.340.000,00	Inspekt orat
4.02.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Pelaksanaan penyediaan makan dan minum	50 Kegiatan	450.000.000,00	Inspektorat
		Pelaksanaan makan minum tamu dan rapat	2.500 Kali Tahun		
		Pelaksanaan makan minum saat olah raga (hari Jumat)	40 Kali		
		Tersediannya Makanan dan Minuman	12 Bulan		
		Jumlah orang yang disediakan makan dan minuman	700 Orang		
4.02.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	35 Orang	2.063.000.000,00	Inspekt orat
4.02.01.19	Penyediaan Jasa Pengamanan	Pelaksanaan pembayaran insentif bagi tenag operator dan penjaga X-Ray VIP Room Bandara Sentani	a0 Orang Bulan	54.000.000,00	Inspektorat
		Pelaksanaan pembayaran honor bagi satpam	2 Orang Bulan		
		Pelaksanaan uang makan satpam	0 Orang Bulan		
		Jumlah tenaga pengamanan	2 Orang		
4.02.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	50 persen	2.915.430.120,00	
4.02.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan yang diadakan	4 Unit	1.415.000.000,00	Inspektorat
		Jumlah kendaraan roda 2	3 Unit		
4.02.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan	50 Unit	187.290.120,00	Inspekt orat
4.02.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan perlengkapan	44 Unit	416.280.000,00	Inspekt orat

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
4.02.02.10	Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur yang diadakan	50 Unit	112.860.000,00	Inspekt orat
4.02.02.21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Jumlah rumah dinas yang dipelihara	1 Unit	100.000.000,00	Inspekt orat
4.02.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	0 Unit	500.000.000,00	Inspektorat
		Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	23 Unit		
		sewa kendaraan	3 Bulan		
4.02.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Pelaksanaan pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	1 Kegiatan	134.000.000,00	Inspektorat
		Jumlah Perlengkapan Gedung kantor yang terpelihara	20 Unit		
		Tersediannya biaya pemeliharaan gedung kantor	0 Bulan		
4.02.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	35 Unit	50.000.000,00	Inspekt orat
4.02.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	100 persen	370.000.000,00	
4.02.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	110 Stell	250.000.000,00	Inspekt orat
4.02.03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus yang diadakan	1.110 Stell	120.000.000,00	Inspekt orat
4.02.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	80 persen	540.000.000,00	
4.02.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	3 Orang	420.000.000,00	Inspekt orat
4.02.05.04	Pendidikan dan Pelatihan Non Formal	Jumlah aparatur yang terlatih	40 Orang	120.000.000,00	Inspekt orat
4.02.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya kualitas akuntabilitas OPD	100 persen	81.500.000,00	
4.02.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	12 Laporan	47.000.000,00	Inspektorat
		Laporan LAKIP SKPD	0 Dokumen		
4.02.06.02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah pelaporan keuangan semesteran yang diselesaikan tepat waktu	2 Laporan	5.000.000,00	Inspekt orat
4.02.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	1 Laporan	7.500.000,00	Inspekt orat
4.02.06.05	Penyusunan Renja, RKA dan Perubahan APBD	Jumlah dokumen	3 Dokumen	22.000.000,00	Inspekt orat
4.02.21	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Cakupan tenaga pemeriksa yang telah memiliki sertifikat kompetensi	45 Orang Tahun	5.043.700.000,00	
4.02.21.03	Diklat sertifikasi jabatan fungsional bagi aparatur	Pejabat yang tersertifikasi	45 Orang	1.137.200.000,00	Inspekt orat
4.02.21.04	Diklat Pengembangan Profesi Pengawasan	Jumlah Jabatan Fungsional yang mengikuti Pelatihan Peningkatan Pengetahuan Subtanti Aparat Pengawasan	40 Orang	3.716.500.000,00	Inspekt orat
4.02.21.07	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Inspektorat	Jumlah Pelatihan Peningkatan Kapasitas Inspektorat	85 Orang	190.000.000,00	Inspekt orat

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
4.02.24	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Cakupan pengaduan dan gugatan masyarakat yang ditindaklanjuti	85 persen	2.244.200.000,00	
4.02.24.02	Penanganan kasus pengaduan masyarakat/ Non PKPT di Lingkungan Pemerintah Daerah	Tertanganinya Kasus Pengaduan Masyarakat/Aparatur di Lingkungan Pemerintah Daerah	10 Laporan	2.244.200.000,00	Inspekt orat
4.02.29	Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur	Cakupan jumlah temuan hasil pemeriksaaan yang ditindaklanjuti	75 %	20.743.750.000,00	
		Persentase Rekomendasi Auditor Eksternal Terhadap Pengelolaan APBD Provinsi yang Berindikasi Kerugian Daerah	85 %		
4.02.29.01	Pemeriksaan Reguler sesuai PKPT	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan SKPD Provinsi Papua	35 SKPD	15.125.350.000,00	Inspektorat
		Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Kabupaten dalam PKPT	22 Laporan		
4.02.29.06	Pemeriksaan Dana Otonomi Khusus (OTSUS)	Jumlah SKPD dan Kab/Kota Pengelola Dana OTSUS	16 Laporan	5.618.400.000,00	Inspekt orat
4.02.58	Program Peningkatan Kinerja Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan	Cakupan tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaaan	45 %	9.942.986.030,00	
		Persentase OPD dengan nilai SAKIP B	30 %		
		Cakupan Implementasi SPIP pada perangkat Daerah di Lingkungan Pemprov Papua	35 %		
4.02.58.01	Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Papua, Inspektorat Jenderal Departemen dan BPK RI	Jumlah Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi, Irjen, Kementerian dan BPK RI pada 52 SKPD dan 29 Kabupaten/Kota	70 Laporan	2.172.450.000,00	Inspekt orat
4.02.58.07	Tuntutan perbendaharaan ganti rugi keuangan dan barang daerah	Jumlah Sidang Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Oleh Majelis Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah Melalui Sidang MP TP-TGR	6 Dokumen	300.580.000,00	Inspekt orat
4.02.58.09	Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Ke Dalam Aplikasi SIM HP	Jumlah Dokumen/TLHP yang diinput ke dalam Aplikasi SIM HP	1 Dokumen	247.200.000,00	Inspekt orat
4.02.58.10	Monitoring Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Jumlah Pemantauan SPIP di SKPD Provinsi Papua	35 SKPD	579.000.000,00	Inspekt orat
4.02.58.14	Rapat Koordinasi Pengawasan Nasional	Jumlah Rapat Koordinasi Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) antara Inspektorat Provinsi Papua dengan Irjen Kementerian	1 Kegiatan	488.250.000,00	Inspekt orat
4.02.58.15	Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaaan Tingkat Regional dan Provinsi	Terlaksananya Rapat Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Inspektorat Provinsi Papua, Kabupaten/Kota se Provinsi Papua dan Rapat Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) antara Inspektorat Provinsi Papua dan Irjend. Kementerian	2 Dokumen	1.617.183.750,00	Inspekt orat
4.02.58.16	Forum SKPD Tingkat Provinsi	Jumlah Kab/Kota yang mengikuti Forum Pembahasan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) antara Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota se Provinsi Papua	29 Kabupaten	892.757.400,00	Inspekt orat
4.02.58.17	Operasionalisasi Unit Sapu Bersih Pungutan Liar (SABER PUNGLI)	Jumlah Kab/Kota Operasi SABER PUNGLI	29 Kabupaten	2.000.000.000,00	Inspekt orat

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
4.02.58.18	Pengelolaan LHKPN	Jumlah Pelaporan LHKPN	1 Laporan	170.000.000,00	Inspekt orat
4.02.58.19	Monitoring dan Evaluasi Laporan Gratifikasi	Jumlah SKPD yang di Monev	15 SKPD	150.000.000,00	Inspekt orat
4.02.58.20	Pembinaan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)	Jumlah SKPD yang masuk Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)	8 SKPD	385.564.880,00	Inspekt orat
4.02.58.21	Evaluasi Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi	Jumlah Persentase Evaluasi Penilaian Mandir Reformasi Birokrasi yang dinilai	50 %	300.000.000,00	Inspekt orat
4.02.58.23	Peningkatan Level Kapabilitas APIP	Jumlah APIP yang ditingkatkan Kapabilitasnya	3 Orang	140.000.000,00	Inspekt orat
4.02.58.24	Pemantauan Penerapan Disiplin Pegawai di SKPD	Jumlah Persentase Penerapan Disiplin Pegawai	40 %	500.000.000,00	Inspekt orat
4.03	Perencanaan			70.637.800.000,00	
4.03.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	100 persen	7.397.400.000,00	
4.03.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang disediakan	2.000 Surat	250.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4.03.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Jasa Layanan berlangganan Listrik,Air,Telepon, Transponder	3 Layanan	200.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4.03.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Unit Mobil Dinas/Operasional yang terpelihara dan Terfasilitasi Perijinannya	9 Unit	100.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4.03.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Honor yang terbayarkan	2 Orang	60.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4.03.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Luas Gedung dan Halaman yang disediakan jasa kebersihan	600 M2	164.400.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Jumlah tenaga kebersihan dan Fasilitas Pendukung kebersihan kantor	2 Orang		
		Jumlah Jenis Bahan dan Alat Kebersihan	12 Jenis		
4.03.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	50 Jenis	1.000.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4.03.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan	0 Jenis	300.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Jumlah penggandaan	0 Lembar		
		Jumlah Jenis Barang Cetakkan yang Disediakan	0 Jenis		
		Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	12 Bulan		
4.03.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen Listrik yang disediakan	220 Buah	30.400.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4.03.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan Perlengkapan	10 Unit	365.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4.03.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	5 Jenis	50.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4.03.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Pelaksanaan penyediaan makan dan minum	0 Kegiatan	2.200.000.000,00	Badan Perencanaan

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
		Pelaksanaan makan minum tamu dan rapat	0 Kali Tahun		Pembangunan Daerah
		Pelaksanaan makan minum saat olah raga (hari Jumat)	0 Kali		
		Tersediannya Makanan dan Minuman	12 Bulan		
		Jumlah orang yang disediakan makan dan minuman	55 Orang		
4.03.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	12 Orang	2.500.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4.03.01.19	Penyediaan Jasa Pengamanan	Pelaksanaan pembayaran insentif bagi tenag operator dan penjaga X-Ray VIP Room Bandara Sentani	a0 Orang Bulan	177.600.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Pelaksanaan pembayaran honor bagi satpam	0 Orang Bulan		
		Pelaksanaan uang makan satpam	0 Orang Bulan		
		Jumlah tenaga pengamanan	4 Orang		
4.03.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	0 persen	5.235.400.000,00	
4.03.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan yang diadakan	6 Unit	3.000.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Jumlah kendaraan roda 2	0 Unit		
4.03.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan	5 Unit	350.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4.03.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan perlengkapan	7 Unit	250.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4.03.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	4 Unit	112.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		belanja sewa	0 Tahun		
4.03.02.23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	14 Unit	173.400.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4.03.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	0 Unit	1.000.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	25 Unit		
		sewa kendaraan	0 Bulan		
4.03.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	7 Unit	100.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4.03.02.46	Sewa gedung	Jumlah gedung kantor yang disewa	1 Unit Tahun	250.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Sewa rumah jabatan	0 Unit Tahun		
4.03.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	0 persen	200.000.000,00	
4.03.03.04	Pengadaan pakaian KORPRI	jumlah pakaian KORPRI yang diadakan	36 Stell	200.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4.03.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	0 persen	100.000.000,00	

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
4.03.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta bimbingan teknis tentang implementasi peraturan perundang-undangan	10 Orang	100.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4.03.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya kualitas akuntabilitas OPD	0 persen	5.220.000.000,00	
4.03.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	1 Laporan	200.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Laporan LAKIP SKPD	0 Dokumen		
4.03.06.02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah pelaporan keuangan semesteran yang diselesaikan tepat waktu	1 Laporan	250.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4.03.06.03	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jumlah pelaporan prognosis realisasi anggaran yang diselesaikan tepat waktu	2 Laporan	20.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4.03.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	1 Laporan	250.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4.03.06.05	Penyusunan Renja, RKA dan Perubahan APBD	Jumlah dokumen	3 Dokumen	750.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4.03.06.10	Forum SKPD Provinsi Papua	Jumlah Peserta Forum	200 Orang	2.000.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4.03.06.12	Penyusunan RENSTRA	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	750.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4.03.06.14	Peningkatan Kapasitas PPID	Jumlah orang	10 Orang	1.000.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4.03.15	Program Pengembangan data/informasi	Cakupan ketersediaan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan	90 %	6.700.000.000,00	
		Cakupan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	90 %		
4.03.15.04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pusat Data dan Analisa Pembangunan	Jumlah unit yang ditingkatkan	80 Unit	500.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Jumlah Yang Terlatih Pengolahan Data dan Analisa Pembangunan	0 Orang		
4.03.15.05	Sistem Manajemen Pengelolaan Data dan Analisa Pembangunan	Jumlah Elemen Data yang tersedia	230 Buah	1.500.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4.03.15.06	Peningkatan pelayanan informasi dan komunikasi pembangunan	jumlah data/informasi yang dipublikasikan	3 Dokumen	700.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4.03.15.07	Data dan fakta pembangunan papua	jumlah kegiatan	2 Kegiatan	1.000.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		jumlah data/fakta yang didokumentasikan	0 Kegiatan		
4.03.15.16	Penggunaan dan Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua	Jumlah SKPD dan Kabupaten dalam pengelolaan SIPPD	45 Unit	2.000.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4.03.15.17	Penyediaan Data SDGs sbagai alat ukur capaian pembangunan daerah	Tingkat Ketersediaan Data	80 %	1.000.000.000,00	Badan Perencanaan

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
					Pembangunan Daerah
4.03.18	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh	Cakupan implementasi perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepa tumbuh	0 Wilayah	2.850.000.000,00	
4.03.18.71	Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis	Jumlah Koordinasi ke Kab/Kota dan Luar Provinsi	10 Kali	350.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4.03.18.73	Pemetaan Kawasan Wilayah Adat	Jumlah Pemetaan Wilayah Adat yang dilaksanakan	2 Dokumen	1.500.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Jumlah Wilayah Adat yang dipetakan	0 Dokumen		
4.03.18.75	Penyusunan perencanaan kawasan cepat tumbuh wilayah adat	Jumlah Dokumen perencana kawasan cepat tumbuh yang disusun	1 Dokumen	1.000.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4.03.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPd	90 %	27.800.000.000,00	
		Penjabaran konsistensi Program RKPd kedalam APBD	90 %		
		Cakupan fasilitasi asistensi Musrenbang Kabupaten	100 %		
		Tingkat keterwakilan stakeholder dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua (MUSRENBANGDA)	100 %		
		Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPd) Provinsi Papua tepat waktu	0 tepat/tidak tepat		
		Penyusunan LKPJ tepat Waktu	0 tepat/tidak tepat		
		Cakupan Evaluasi RPJMD Kabupaten/Kota se Papua	100 %		
		Cakupan Evaluasi RKPd Kabupaten/Kota se Papua	100 %		
		Tingkat capaian realisasi program-progra Otsus yang direncanakan	m0 %		
4.03.21.37	Asistensi Musrenbang Kabupaten/Kota Dalam Rangka Penjaringan Asmara	Jumlah Kabupaten/Kota yang di Assistensi	29 Kabupaten	1.100.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4.03.21.38	Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua (MUSRENBANGDA)	Jumlah Usulan Kegiatan yang disepakati	160 Kegiatan	1.500.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Jumlah Dokumen Usulan Kegiatan yang disepakati	0 Dokumen		
4.03.21.39	Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (MUSRENBANGNAS)	Jumlah Dokumen Usulan Kegiatan yang diusulkan	1 Dokumen	1.200.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4.03.21.40	Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPd) Provinsi Papua	Jumlah Dokumen RKPd	1.000 Dokumen	1.500.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4.03.21.58	Penyusunan Laporan Kegiatan APBN dan DAK di Provinsi Papua	Jumlah dokumen	1 Dokumen	1.500.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4.03.21.60	Asistensi Monitoring dan Pelaporan Pembangunan Daerah	Jumlah Kab/Kota yang di Asistensi Monev	29 Kabupaten	2.000.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
4.03.21.161	Pelaksanaan Monitoring Kolaborasi Kegiatan Pembangunan OTSUS dan APBD Provinsi Papua	Jumlah Dokumen hasil Monitoring	1 Dokumen	5.000.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4.03.21.159	pelaksanaan monitoring/pemantau pelaksanaan kegiatan pembangunan APBD Provinsi Papua	jumlah monitoring yang dilaksanakan	29 Laporan	5.000.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4.03.21.160	pelaksanaan pengendalian program dan kegiatan APBD Provinsi Papua	Jumlah dokumen	1 Dokumen	1.500.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4.03.21.171	Fasilitasi Penyusunan Dana Alokasi Khusus Provinsi Papua	Jumlah Dokumen DAK	1 Dokumen	1.500.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4.03.21.174	Penyusunan laporan kinerja program/kegiatan APBD Provinsi Papua	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	500.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4.03.21.175	Evaluasi Dokumen Perencanaan (RPJPD, RPJMD, RKPD Kab/Kota)	Jumlah Dokumen	29 Dokumen	1.000.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4.03.21.176	Evaluasi RKPD Provinsi Papua	Jumlah Dokumen Evaluasi RKPD	1 Dokumen	1.000.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4.03.21.179	Pembinaan Pengendalian dan Evaluasi RKPD Provinsi, Kab/Kota se- Provinsi Papua	Terkendalnya pelaksanaan RKPD Kab/Kota se- Provinsi Papua	100 Laporan	500.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4.03.21.182	Musrenbang Otsus di 5 Wilayah Adat Provinsi Papua	Jumlah Pelaksanaan Musrenbang Otsus dan Kendali Usulan	500 Wilayah	3.000.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4.03.22	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Cakupan hasil kajian yang dijadikan sebagai pengambilan keputusan kebijakan ekonomi	90 %	4.350.000.000,00	
		Persentase ketercapaian sasaran pembangunan bidang ekonomi	50 %		
4.03.22.65	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	jumlah laporan koordinasi yang dilakukan	1 Laporan	500.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4.03.22.67	Koordinasi Urusan Wajib Sub Bidang Dunia Usaha, Investasi dan Keuangan	jumlah laporan koordinasi yang dilakukan	1 Laporan	300.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Jumlah SKPD yang diasistensi	1 SKPD		
		Jumlah SKPD yang di monev	1 SKPD		
4.03.22.70	Penyusunan Buku Indikator Data Pembangunan dan Analisis Makro Ekonomi Provinsi Papua	jumlah dokumen perencanaan yang dihasilkan	2 Dokumen	500.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4.03.22.73	Koordinasi Urusan Wajib Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan, Pariwisata	jumlah laporan koordinasi yang dilakukan	1 Laporan	300.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Jumlah SKPD yang diasistensi	2 SKPD		
		Jumlah SKPD yang di Monev	2 SKPD		
4.03.22.113	Koordinasi Perencanaan Sektor Pertanian	jumlah kordinasi	0 Kegiatan	250.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		jumlah kegiatan	3 Kegiatan		
4.03.22.114	Penyusunan Profil Pembangunan Ekonomi Rumpun Pertanian	jumlah dokumen	5 Dokumen	500.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		jumlah dokumen	1 Dokumen	500.000.000,00	

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
4.03.22.119	penyusunan regulasi pengembangan komoditi kakao di provinsi papua	jumlah regulasi	1 Dokumen		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4.03.22.120	kajian komoditi kopi untuk penyusunan regulasi di kabupaten dogiyai dan kabupaten jayawijaya	jumlah dokumen kajian	1 Dokumen	500.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4.03.22.125	Penyusunan Profile Capaian Pembangunan Sub Sector Perikanan Provinsi Papua	Tersedianya Dokumen Profile Capaian Pelaksanaan pembangunan sub sektor perikanan provinsi Papua	1 Dokumen	500.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4.03.22.127	Penyusunan Perencanaan Pengembangan Kemitraan Dunia Usaha dalam Mendukung Perekonomian Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang dihasilkan	1 Dokumen	500.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4.03.23	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Persentase ketercapaian sasaran pembangunan bidang sosbud	50 %	4.350.000.000,00	
4.03.23.79	fasilitasi perencanaan Bidang Sosial Budaya	Jumlah Kab/Kota koordinasi Bidang Sosial Budaya	29 Kabupaten	500.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4.03.23.80	Rapat Forum OPD Bidang Sosial Budaya Se-Provinsi Papua	jumlah kesepakatan yang di hasilkan Rapat Forum Pembangunan Bidang Sosial Budaya	0 Kabupaten	500.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4.03.23.84	Koordinasi perencanaan pembangunan Pendidikan, Kebudayaan, dan Pemuda	Terjadinya Koordinasi dan Sinkronisasi program pembangunan Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga dan Pemuda ke SKP Provinsi dan Kab/Kota	29 Kabupaten D	500.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4.03.23.88	Fasilitasi dan koordinasi pembinaan program Subbid kesehatan, Kependudukan dan Kesejahteraan Sosial	jumlah aparatur yang memahami perencanaan kesehatan	29 Orang	500.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4.03.23.93	Musrenbang Otsus di 5 Wilayah Adat Provinsi Papua	jumlah pelaksanaan Musrenbang Otsus dan kendali usulan	5 Wilayah	2.000.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4.03.23.101	Fasilitasi dan Koordinasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGS)	meningkatnya koordinasi	1 Kegiatan	350.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4.03.26	Program Perencanaan Pembangunan Fisik Prasarana dan Lingkungan Hidup	Persentase ketercapaian sasaran pembangunan bidang fispra	50 %	2.935.000.000,00	
4.03.26.19	Rapat Koordinasi Pembangunan Infrastruktur	Jumlah orang yang mengikuti Rakor Pembangunan Infrastruktur	110 Orang	350.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4.03.26.32	Perencanaan dan Pengembangan Program Fisik Prasarana	Jumlah Dokumen yang disusun	1 Dokumen	350.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4.03.26.33	Perencanaan dan Pengembangan Program Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (SDA dan LH)	Peningkatan Kinerja Perencanaan dan Pengembangan sektor SDA, LH dan Pengairan	100 %	350.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4.03.26.34	Perencanaan dan Pengembangan Program Infrastruktur Transportasi, Cipta Karya	Jumlah Dokumen yang disusun	1 Dokumen	350.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4.03.26.36	Perencanaan dan Pengembangan Program Telekomunikasi dan Kelistrikan	Jumlah Dokumen yang disusun	1 Dokumen	35.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4.03.26.55	Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur	Tersedianya dokumen pembangunan infrastruktur	1 Dokumen	1.500.000.000,00	Badan Perencanaan

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
					Pembangunan Daerah
4.03.28	Program Perencanaan Tata Ruang	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan tata ruang mandatoris yang telah ditetapkan	80 persen	2.000.000.000,00	
4.03.28.37	Penetapan kebijakan tentang RTRK	Jumlah Peraturan Tata Ruang	1 Dokumen	1.500.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4.03.28.39	Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang	Jumlah Peserta Rapat Koordinasi	100 Orang	500.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4.03.31	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang			1.500.000.000,00	
4.03.31.03	Pengawasan pemanfaatan ruang	Jumlah Kabupaten yang terlaksana Pengawasan Pemanfaatan Ruang	2 Kabupaten	750.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4.03.31.04	Koordinasi dan fasilitasi pengendalian pemanfaatan ruang lintas kabupaten/kota	Jumlah lintas kabupaten yang difasilitasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang	3 Kabupaten	750.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4.04	Keuangan			109.014.735.000,00	
4.04.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	100 persen	33.075.000.000,00	
4.04.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang disediakan	1.000 Surat	967.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
4.04.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang disediakan	4.000 Surat	380.000.000,00	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
4.04.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Jasa Layanan berlangganan Listrik,Air,Telepon, Transponder	12 Layanan	1.576.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
4.04.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Jasa Layanan berlangganan Listrik,Air,Telepon, Transponder	12 Layanan	1.700.000.000,00	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
4.04.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Unit Mobil DInas/Operasional yang terpelihara dan Terfasilitasi Perijinannya	60 Unit	78.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
4.04.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Unit Mobil DInas/Operasional yang terpelihara dan Terfasilitasi Perijinannya	112 Unit	2.100.000.000,00	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
4.04.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Honor yang terbayarkan	38 Orang	1.368.000.000,00	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
4.04.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Luas Gedung dan Halaman yang disediakan jasa kebersihan	0 M2	1.061.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
		Jumlah tenaga kebersihan dan Fasilitas Pendukung kebersihan kantor	16 Orang		
		Jumlah Jenis Bahan dan Alat Kebersihan	0 Jenis		
4.04.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Luas Gedung dan Halaman yang disediakan jasa kebersihan	0 M2	1.272.000.000,00	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
		Jumlah tenaga kebersihan dan Fasilitas Pendukung kebersihan kantor	27 Orang		

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
		Jumlah Jenis Bahan dan Alat Kebersihan	18 Jenis		
4.04.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	150 Jenis	1.349.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
4.04.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	31 Jenis	1.380.000.000,00	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
4.04.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan	80.025 Jenis	864.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
		Jumlah penggandaan	0 Lembar		
		Jumlah Jenis Barang Cetakkan yang Disediakan	0 Jenis		
		Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	0 Bulan		
4.04.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan	0 Jenis	1.400.000.000,00	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
		Jumlah penggandaan	0 Lembar		
		Jumlah Jenis Barang Cetakkan yang Disediakan	0 Jenis		
		Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	12 Bulan		
4.04.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen Listrik yang disediakan	8 Buah	150.000.000,00	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
4.04.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	100 Jenis	208.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
4.04.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	2 Jenis	83.000.000,00	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
4.04.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Pelaksanaan penyediaan makan dan minum	0 Kegiatan	1.234.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
		Pelaksanaan makan minum tamu dan rapat	0 Kali Tahun		
		Pelaksanaan makan minum saat olah raga (hari Jumat)	0 Kali		
		Tersediannya Makanan dan Minuman	12 Bulan		
		Jumlah orang yang disediakan makan dan minuman	0 Orang		
4.04.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Pelaksanaan penyediaan makan dan minum	0 Kegiatan	3.000.000.000,00	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
		Pelaksanaan makan minum tamu dan rapat	0 Kali Tahun		
		Pelaksanaan makan minum saat olah raga (hari Jumat)	0 Kali		
		Tersediannya Makanan dan Minuman	12 Bulan		
		Jumlah orang yang disediakan makan dan minuman	0 Orang		
4.04.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	36 Orang	3.550.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
4.04.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	300 Orang	8.000.000.000,00	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
4.04.01.19	Penyediaan Jasa Pengamanan	Pelaksanaan pembayaran insentif bagi tenag operator dan penjaga X-Ray VIP Room Bandara Sentani	a0 Orang Bulan	599.000.000,00	Badan Pengelolaan

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
		Pelaksanaan pembayaran honor bagi satpam	0 Orang Bulan		Keuangan dan Asset Daerah
		Pelaksanaan uang makan satpam	0 Orang Bulan		
		Jumlah tenaga pengamanan	12 Orang		
4.04.01.19	Penyediaan Jasa Pengamanan	Pelaksanaan pembayaran insentif bagi tenag operator dan penjaga X-Ray VIP Room Bandara Sentani	a0 Orang Bulan	756.000.000,00	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
		Pelaksanaan pembayaran honor bagi satpam	0 Orang Bulan		
		Pelaksanaan uang makan satpam	0 Orang Bulan		
		Jumlah tenaga pengamanan	21 Orang		
4.04.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	0 persen	24.422.500.000,00	
4.04.02.02	Pembangunan rumah dinas	Terbangunnya rumah dinas	2 Unit	800.000.000,00	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
4.04.02.03	Pembangunan gedung kantor	Luas bangunan yang dibangun	20.800 M2	10.000.000.000,00	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
		Tersedianya desain perencanaan bangunan	0 Dokumen		
4.04.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan yang diadakan	1 Unit	800.000.000,00	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
		Jumlah kendaraan roda 2	10 Unit		
4.04.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan	10 Unit	187.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
4.04.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan	80 Unit	400.000.000,00	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
4.04.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan perlengkapan	328 Unit	5.950.000.000,00	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
4.04.02.10	Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur yang diadakan	272 Unit	700.000.000,00	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
4.04.02.20	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Jumlah rumah jabatan yg terpelihara	1 Unit Tahun	78.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
4.04.02.21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Jumlah rumah dinas yang dipelihara	19 Unit	190.000.000,00	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
4.04.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	2 Unit	388.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
		belanja sewa	0 Tahun		
4.04.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	18 Unit	852.500.000,00	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
		belanja sewa	1 Tahun		
4.04.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	0 Unit	2.318.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
		Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	88 Unit		
		sewa kendaraan	0 Bulan		
4.04.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Pelaksanaan pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	150 Kegiatan	145.000.000,00	Badan Pengelolaan

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
		Jumlah Perlengkapan Gedung kantor yang terpelihara	150 Unit		Pendapatan Daerah
		Tersediannya biaya pemeliharaan gedung kantor	150 Bulan		
4.04.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	350 Unit	208.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
4.04.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	60 Unit	435.000.000,00	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
4.04.02.30	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Luas bangunan yang direhab	1.000 M2	500.000.000,00	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
4.04.02.41	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	Luas bangunan yang direhab	9 M2	321.000.000,00	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
4.04.02.46	Sewa gedung	Jumlah gedung kantor yang disewa	1 Unit Tahun	150.000.000,00	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
		Sewa rumah jabatan	0 Unit Tahun		
4.04.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	0 persen	1.347.450.000,00	
4.04.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	170 Stell	338.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
4.04.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	255 Stell	357.000.000,00	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
4.04.03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus yang diadakan	170 Stell	400.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
4.04.03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus yang diadakan	255 Stell	252.450.000,00	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
4.04.04	Program fasilitas pindah/purna tugas PNS	Meningkatnya kualitas penangan pindah/purna tugas PNDS	0 persen	586.500.000,00	
4.04.04.03	Jumlah pegawai di fasilitasi Pemandangan tugas	Jumlah pegawai yang difasilitasi	75 Orang	586.500.000,00	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
4.04.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	0 persen	2.351.000.000,00	
4.04.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	30 Orang	421.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
4.04.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	5 Orang	289.000.000,00	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
4.04.05.04	Pendidikan dan Pelatihan Non Formal	Jumlah aparatur yang terlatih	30 Orang	541.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
4.04.05.04	Pendidikan dan Pelatihan Non Formal	Jumlah aparatur yang terlatih	125 Orang	1.100.000.000,00	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
4.04.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya kualitas akuntabilitas OPD	0 persen	526.900.000,00	
4.04.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	60 Laporan	44.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
		Laporan LAKIP SKPD	0 Dokumen		
4.04.06.02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah pelaporan keuangan semesteran yang diselesaikan tepat waktu	220 Laporan	139.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
4.04.06.02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah pelaporan keuangan semesteran yang diselesaikan tepat waktu	5 Laporan	25.900.000,00	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
4.04.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	2 Laporan	78.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
4.04.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	1 Laporan	30.000.000,00	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
4.04.06.05	Penyusunan Renja, RKA dan Perubahan APBD	Jumlah dokumen	5 Dokumen	68.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
4.04.06.05	Penyusunan Renja, RKA dan Perubahan APBD	Jumlah dokumen	3 Dokumen	80.000.000,00	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
4.04.06.12	Penyusunan RENSTRA	Jumlah Dokumen	5 Dokumen	62.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
4.04.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Tersusunnya APBD dan Perubahan APBD secara tepat waktu dan berkualitas	0 ya/tidak	24.938.000.000,00	
		Cakupan Implementasi Analisis Standar Belanja Daerah	100 persen		
		Persentase aset daerah yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan retribusi	40 persen		
		Opini Pemeriksaan BPK	0 Opini		
		Penyampaian LKPD Tepat Waktu	0 ya/tidak		
		Tertib Administrasi BMD	0 ya/tidak		
		Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah	3 persen		
		Kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah	12 persen		
4.04.17.06	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	50 Dokumen	2.514.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
4.04.17.07	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	Tersusunnya Dokumen rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD Provinsi Papua	50 Dokumen	473.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
4.04.17.08	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD	Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	50 Dokumen	2.277.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
4.04.17.09	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	Tersusunnya Dokumen rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD Provinsi Papua	50 Dokumen	473.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
4.04.17.10	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan	Tersusunnya Rancangan PERDA tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	50 Dokumen	1.040.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
4.04.17.20	Pemeliharaan sistem informasi pengelolaan aset daerah	Terpeliharanya Sistem Informasi Pengelolaan Aset	510 Unit	598.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
4.04.17.23	Pemeliharaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah	Terlaksananya upaya-upaya Pengembangan Aplikasi dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	5 Aplikasi	474.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
4.04.17.27	Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi Data Kas Daerah	Tersusunnya Laporan dan Rekondiliasi Data Kas Daerah	110 Laporan	364.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
4.04.17.37	Pengamanan, Penertiban Asset Pemerintah Daerah di Dalam dan Luar Provinsi Papua	Tersedianya Data dan Aset Daerah yang terdapat di luar Daerah	1 Dokumen	319.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
4.04.17.71	Penyusunan/Pembahasan Peraturan Pengelolaan keuangan Daerah	Tersusunnya Juklak/Juknis Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	2 Dokumen	500.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
4.04.17.77	Pembahasan RKA SKPD	Terbahasnya Program Kegiatan SKPD oleh TAPD	36 SKPD	977.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
4.04.17.86	Penyusunan KUA / PPAS	Tersusunnya KUA/PPAS	1 Dokumen	1.040.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
4.04.17.89	Pelatihan bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua	Terlaksananya Pelatihan bagi pejabat Penatausahaan Keuangan dan Bendahara Pengeluaran di lingkungan PEMPROV Papua guna meningkatkan kemampuan dalam Penatausahaan Keuangan Daerah	200 Orang	415.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
4.04.17.90	Pelatihan Pengelolaan Administrasi Penggajian PNS	Terlatihnya Aparatur Pengelola Administrasi Penggajian PNS	72 Orang	264.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
4.04.17.91	Monitoring dan Evaluasi Realisasi SP2D di setiap SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua	Terlaksanya Monitoring dan Evaluasi Realisasi SP2D disetiap SKPD di lingkungan PEMPROV Papua	36 SKPD	572.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
4.04.17.93	Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi Data Bidang Akuntansi	Tersusunnya Laporan dan Rekonsiliasi Data Bidang Akuntansi	50 Dokumen	520.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
4.04.17.102	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Pemerintah Provinsi Papua	Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran PEMPROV Papua	50 Dokumen	519.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
4.04.17.103	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Pemerintah Provinsi Papua	Tersusunnya Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	200 Dokumen	2.341.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
4.04.17.201	Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran - DPA	Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran	60 Dokumen	961.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
4.04.17.202	Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran - DPPA	Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran	60 Dokumen	481.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
4.04.17.203	Monitoring dan Evaluasi Hibah,Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Papua	Tersedianya Data tentang Dana Hibah dan BANSOS	1 Laporan	676.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
4.04.17.208	Pembahasan RKA Perubahan SKPD	Tersedianya Dokumen Rencana Kebutuhan Anggaran Perubahan	60 Dokumen	494.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
4.04.17.209	Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan	36 Dokumen	3.371.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
4.04.17.216	Penyusunan Laporan Pemeliharaan dan Penghapusan Aset Daerah	Tersusunnya Laporan Usulan Pemeliharaan dan Penghapusan SKPD	2 Dokumen	371.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
4.04.17.217	Penyusunan Laporan Mutasi Barang	Tersusunnya Laporan Mutasi Barang	1 Dokumen	156.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
4.04.17.219	Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi Data Asset BPKAD	Tersusunnya Laporan dan Rekonsiliasi Data Aset	2 Dokumen	177.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
4.04.17.221	Penyusunan Laporan Realisasi SP2D dan Penataan Arsip SP2D	Tersusunnya Laporan Realisasi SP2D dan Terlaksananya Penataan Arsip SP2D	36 Dokumen	395.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
4.04.17.222	Penyusunan RKBMD dan RKPBM SKPD	Tersusunnya Himpunan RKBMD dan RKPBM SKPD	51 Dokumen	83.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
4.04.17.223	Penyusunan Laporan Bendahara Penerimaan BPKAD Prov. Papua	Tersusunnya Laporan Angsuran Penerimaan Pembayaran Rumah Dinas, Kendaraan Dinas	10 Dokumen	88.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
4.04.17.228	Penyusunan KUPA dan PPAS	Tersusunnya KUPA dan PPAS	100 Buku	884.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
4.04.17.229	Koordinasi, Konsultasi dan Pelaporan Dana Alokasi Khusus (DAK)	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi, Konsultasi dan Pelaporan Dana Alokasi Khusus	1 Laporan	830.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
4.04.17.234	Pengembangan Layanan E-Payment Pemerintah Provinsi Papua	Terlaksananya Pelayanan E-Payment Pemerintah Provinsi Papua	36 SKPD	104.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
4.04.17.235	Pengembangan Layanan Pendapatan Online Pemerintah Provinsi Papua	Terlaksananya Pelayanan Pendapatan Online Pemerintah Provinsi Papua	36 SKPD	104.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
4.04.17.238	Pengembangan Sistem Informasi Hibah dan Bantuan Sosial	Terbangunnya Sistem Informasi Hibah dan bantuan Sosial	1 Laporan	83.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
4.04.18	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota	Persentase penerapan Sistem Informasi Data Pengelolaan Keuangan Otsus	100 %	4.577.000.000,00	
		Jumlah Kabupaten/kota yang melakukan pengelolaan keuangan secara baik	0 Dokumen		
		Cakupan implementasi regulasi pengelolaan dana Otsus	95 %		
		Cakupan jumlah kabupaten/kota yang menyusun APBD secara tepat waktu dan berkualitas	95 %		
		Cakupan evaluasi laporan pertanggungjawaban APBD kabupaten/kota Kabupaten/Kota Se Papua	100 %		
4.04.18.01	Evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD kabupaten/kota	Terselenggaranya Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang	29 Dokumen	1.833.000.000,00	Badan Pengelolaan

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
		Pertanggungjawaban APBD 29 Kab/Kota			Keuangan dan Asset Daerah
4.04.18.07	Evaluasi rancangan peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban APBD kabupaten/kota	Terselenggaranya Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban APBD di 29 Kab/Kota	29 Dokumen	1.116.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
4.04.18.08	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan APBD Kabupaten/ Kota se Provinsi Papua	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan APBD Kab/Kota se Provinsi Papua	29 Dokumen	303.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
4.04.18.70	Koordinasi dan Sinkronisasi Sumber Dana OTSUS	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Dana DAK dan OTSUS	29 Laporan	1.065.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
4.04.18.71	Sosialisasi Pedoman Penyusunan APBD	Meningkatnya Kualitas Penyusunan APBD di Kabupaten/kota	200 Orang	260.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
4.04.20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Peningkatan Efektifitas pendapatan asli daerah	3 %	4.035.385.000,00	
4.04.20.01	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Terlaksananya Pengawasan Evaluasi Laporan dan Rapat Evaluasi Kinerja	0 Dokumen	2.885.385.000,00	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
		Jumlah Dokumen Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelayanan dan Kinerja SAMSAT	18 Laporan		
		Dokumen Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelayanan dan Kinerja Samsat	0 Dokumen		
4.04.20.02	Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat	Jumlah Samsat yang melaksanakan pengukuran IKM	10 Unit	550.000.000,00	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
		Jumlah Samsat yang menjalankan SOP	10 Unit		
4.04.20.03	Kegiatan Penyusunan Peraturan Perundang Undangan	Jumlah rancangan peraturan yang disusun	2 Dokumen	600.000.000,00	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
4.04.104	Program Peningkatan Pendapatan Daerah	Prosentase Peningkatan Kontribusi UPTB dalam pungutan Pendapatan Asli Daerah	2 Jenis	13.155.000.000,00	
		Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah	22 %		
4.04.10.4.01	Kajian Identifikasi Potensi Pendapatan Daerah	terlaksananya Kajian Terhadap Potensi Pendapatan Asli Daerah	0 Dokumen	500.000.000,00	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
		Jumlah Dokumen Kajian Potensi Sumber - Sumber Pendapatan	1 Dokumen		
		Jumlah Dokumen Kajian Potensi Sumber-Sumber Pendapatan	0 Dokumen		
4.04.10.4.03	Pengembangan Data dan Informasi Pendapatan Daerah	Tersedianya Data dan Sistem Informasi Pendapatan Daerah	0 Sistem	5.850.000.000,00	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
		Jumlah Sistem yang tersedia untuk Pengelolaan dan Penatausahaan Pendapatan Daerah	11 Sistem		
		Jumlah Sistem Yang Tersedia Untuk Pengelolaan dan Penatausahaan Pendapatan Daerah	0 Sistem		
4.04.10.4.04	Sosialisasi dan Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Tempat Baru dalam Pembayaran Pajak	6 Tempat	2.755.000.000,00	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
		Jumlah Masyarakat Pemanfaat Penghapusan Denda	0 Orang		

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
		Jumlah Reward yang diberikan kepada Masyarakat	0 Unit		
		Jumlah Perusahaan yang disosialisasi Pajak Daerah	10 Perusahaan		
		Jumlah Wilayah Baru yang disosialisasi	1 Wilayah		
		Jumlah Sosialisasi dan Pemberitahuan Pajak Melalui Media Massa	7 Media		
		Jumlah Penagihan Pajak	68 Titik		
4.04.10 4.05	Koordinasi Pemungutan Pajak Daerah	Jumlah kesepakatan koordinasi kesamsatan	4 Laporan	2.600.000.000,00	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
		Jumlah dokumen rekonsiliasi Samsat	2 Laporan		
		Jumlah dokumen rekonsiliasi wajib pungut PBB KB	2 Laporan		
4.04.10 4.06	Intensifikasi penerimaan retribusi daerah	Jumlah dokumen hasil rekonsiliasi/evaluasi OPD pemungut	4 Laporan	850.000.000,00	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
		Jumlah OPD/UPT yang didampingi dalam pemungutan retribusi	15 SKPD		
		Jumlah OPD yang menerima reward sesuai target	14 SKPD		
4.04.10 4.07	Pendataan Potensi Retribusi di Provinsi Papua	Jumlah potensi retribusi yang terdata	4 Dokumen	600.000.000,00	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
		Jumlah angkutan yang terdata	250 Unit		
4.05	Kepegawaian			28.433.058.000,00	
4.05.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	0 persen	4.951.500.000,00	
4.05.01 .01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang disediakan	7.000 Surat	675.570.000,00	Badan Kepegawaian Daerah
4.05.01 .02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Jasa Layanan berlangganan Listrik,Air,Telepon, Transponder	12 Layanan	887.430.000,00	Badan Kepegawaian Daerah
4.05.01 .08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Luas Gedung dan Halaman yang disediakan jasa kebersihan	1.000 M2	468.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah
		Jumlah tenaga kebersihan dan Fasilitas Pendukung kebersihan kantor	13 Orang		
		Jumlah Jenis Bahan dan Alat Kebersihan	20 Jenis		
4.05.01 .10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	12 Jenis	350.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah
4.05.01 .11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan	20 Jenis	410.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah
		Jumlah penggandaan	7.000 Lembar		
		Jumlah Jenis Barang Cetak dan Disediakan	20 Jenis		
		Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	12 Bulan		
4.05.01 .12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen Listrik yang disediakan	75 Buah	110.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah
4.05.01 .17	Penyediaan makanan dan minuman	Pelaksanaan penyediaan makan dan minum	12 Kegiatan	650.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah
		Pelaksanaan makan minum tamu dan rapat	12 Kali Tahun		
		Pelaksanaan makan minum saat olah raga (hari Jumat)	12 Kali		
		Tersediannya Makanan dan Minuman	12 Bulan		

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
		Jumlah orang yang disediakan makan dan minuman	99 Orang		
4.05.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	60 Orang	1.400.500.000,00	Badan Kepegawaian Daerah
4.05.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	0 persen	1.550.000.000,00	
4.05.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan	25 Unit	350.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah
4.05.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan perlengkapan	36 Unit	500.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah
4.05.02.10	Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur yang diadakan	10 Unit	200.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah
4.05.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	20 Unit	300.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah
		Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	20 Unit		
		sewa kendaraan	12 Bulan		
4.05.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Pelaksanaan pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	0 Kegiatan	150.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah
		Jumlah Perlengkapan Gedung kantor yang terpelihara	20 Unit		
		Tersediannya biaya pemeliharaan gedung kantor	0 Bulan		
4.05.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	12 Unit	50.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah
4.05.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	0 persen	200.000.000,00	
4.05.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	300 Stell	200.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah
4.05.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	0 persen	700.000.000,00	
4.05.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	110 Orang	400.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah
4.05.05.02	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	150 Orang	150.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah
4.05.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta bimbingan teknis tentang implementasi peraturan perundang-undangan	150 Orang	150.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah
4.05.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya kualitas akuntabilitas OPD	0 persen	225.000.000,00	
4.05.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	5 Laporan	50.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah
		Laporan LAKIP SKPD	0 Dokumen		
4.05.06.02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah pelaporan keuangan semesteran yang diselesaikan tepat waktu	5 Laporan	50.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah
4.05.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	5 Laporan	50.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah
4.05.06.05	Penyusunan Renja, RKA dan Perubahan APBD	Jumlah dokumen	5 Dokumen	75.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
4.05.38	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Cakupan penyelesaian administrasi kepegawaian yang tepat waktu	70 %	3.564.365.000,00	
4.05.38.02	Pelaksanaan Mutasi, Kenaikan Pangkat dan Pindah	Jumlah PNS	4.000 Orang	1.237.377.000,00	Badan Kepegawaian Daerah
4.05.38.04	Peningkatan Pelayanan Administrasi PNS	Jumlah Pelayanan Administrasi PNS	3.500 Orang	526.988.000,00	Badan Kepegawaian Daerah
4.05.38.06	Peningkatan Pelayanan Administrasi Pensiun	Jumlah PNS yang pensiun	190 Orang	300.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah
4.05.38.07	Pemberian penghargaan bagi pegawai purna tugas	Jumlah peserta purna tugas yang diberikan penghargaan	150 Orang	1.500.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah
4.05.41	Program Peningkatan Pemberian Bantuan Hukum dan Penegakan Perda	Persentase kasus pendampingan hukum yang didampingi	75 %	1.046.700.000,00	
4.05.41.01	Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Peraturan Perundang-Undangan Bidang Kepegawaian	Jumlah pengawasan dan pengendalian peraturan	25 Kali	296.700.000,00	Badan Kepegawaian Daerah
4.05.41.02	Sosialisasi Raperdas Tentang Kebijakan Kepegawaian di Provinsi Papua	Jumlah sosialisasi Raperdas	150 Kali	150.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah
4.05.41.03	Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil	Jumlah sosialisasi	150 Kali	150.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah
4.05.41.04	Sosialisasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara	Jumlah Sosialisasi Undang-Undang	1 Kali	150.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah
4.05.41.10	Fasilitasi perlindungan PNS	Jumlah PNS yang difasilitasi	150 Orang	150.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah
4.05.41.11	Pengambilan Sumpah/Janji PNS	Frekuensi pengambilan sumpah/janji	1 Kali	150.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah
		Jumlah unit kerja	35 SKPD		
4.05.57	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek sesuai tupoksinya	100 Orang	13.930.123.000,00	
4.05.57.01	Pengembangan Kualitas SDM	Jumlah SDM	150 Orang	10.080.123.000,00	Badan Kepegawaian Daerah
4.05.57.02	Penyelenggaraan Seleksi Pendidikan dan Latihan Aparatur	Jumlah Aparatur	400 Orang	700.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah
4.05.57.05	Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas	Jumlah eselon yang diuji	5 Eselon	150.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah
4.05.57.07	Seleksi Penerimaan Calon PNS	Jumlah pelamar CPNS	3.000 Orang	200.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah
4.05.57.08	Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN	Jumlah bantuan bagi penerimaan Praja IPDN	4 Lembaga	1.600.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah
4.05.57.09	Penilaian potensi dan kompetensi jabatan pimpinan tinggi, administrasi dan pegawai	Jumlah kompetensi jabatan pimpinan tinggi	4.000 Orang	300.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah
4.05.57.11	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan TPP PNS	Jumlah PNS	7.000 Orang	50.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah
4.05.57.12	Pelaksanaan penerimaan calon praja IPDN	Jumlah pelamar calon Praja IPDN	1.000 Orang	700.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah
4.05.57.15	Pengendalian Jabatan	Terlaksananya Pengendalian jabatan di lingkungan Pemerintah Papua	51 SKPD	150.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
4.05.58	Program Pengembangan Data dan Informasi			660.370.000,00	
4.05.58.01	Pengembangan Database dan Pengupdate Data CPNS, PNS, Jabatan Struktur dan Fungsional	Prosentase Database	80 %	150.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah
4.05.58.02	Pemutahiran Data Kepegawaian dan Pengembangan Sistem Informasi Berbasis Web	Prosesntase Pemutahiran Data Kepegawaian	90 %	360.370.000,00	Badan Kepegawaian Daerah
4.05.58.04	Pengadaan Aplikasi E-Surat	tersedianya aplikasi E-Surat	1 Unit	150.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah
4.05.59	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			1.350.000.000,00	
4.05.59.09	Pemberian Satya Lancana Karya Satya bagi PNS	Jumlah pegawai yang mendapatkan Satya Lancana Karya Satya	700 Orang	300.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah
4.05.59.10	Rapat Koordinasi Teknis	Jumlah peserta rapat	250 Orang	1.000.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah
4.05.59.12	Sosialisasi Perdasi Pns	Jumlah PNS yang mendapat fasilitas perlindungan	150 Orang	50.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah
4.05.60	Program Pendidikan Kedinasan	Jenis Diklat yang terakreditasi A	5 Kegiatan	255.000.000,00	
		Persentase ASN peserta Diklat Kepemimpinan II yang Lulus dengan Kualifikasi Sangat Memuaskan	0 %		
		Persentase ASN peserta Diklat Kepemimpinan III yang Lulus dengan Kualifikasi Sangat Memuaskan	0 %		
		Persentase ASN peserta Diklat Kepemimpinan IV yang Lulus dengan Kualifikasi Sangat Memuaskan	0 %		
4.05.60.01	Pendidikan dan Latihan Kepemimpinan Tingkat II	Jumlah Aparatur Pim Tk. II	1 Orang	75.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah
4.05.60.02	Pendidikan dan Latihan Kepemimpinan Tingkat III	Jumlah Aparatur Pim Tk. III	2 Orang	110.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah
4.05.60.03	Pendidikan dan Latihan Kepemimpinan Tingkat IV	Jumlah Aparatur Pim Tk. IV	2 Orang	70.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah
4.07	Penelitian dan Pengembangan			6.520.000.000,00	
4.07.15	Program Pengembangan Mutu Penelitian dan Pengembangan	Jumlah hasil kelitbangan yang terpilih untuk mendukung kebijakan pembanguna daerah	8 Jenis n	3.910.000.000,00	
4.07.15.08	Analisis Sinergitas Percepatan pembangunan Provinsi Papua	Sinergitas Percepatan	1 Dokumen	505.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Jumlah Hasil Kajian	0 Dokumen		
4.07.15.22	Penguatan Jaringan penelitian daerah di Provinsi Papua	Jumlah Pertemuan	90 Kegiatan	400.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4.07.15.25	Penelitian Mandiri Fungsional	Terlaksananya Penelitian Mandiri Fungsional	1 Dokumen	500.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4.07.15.29	Kajian Terhadap Rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Papua berdasarkan wilayah adat	Tersedianya rekomendasi pengembangan IPM Papua	1 Dokumen	500.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6
4.07.15.31	kajian akademis tentang regulasi pengembangan komoditas unggulan	Jumlah Hasil Kajian	10 Dokumen	500.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4.07.15.34	kajian identifikasi tingkat produktifitas dan nilai tambah komoditas unggulan di provinsi papua	Jumlah Hasil Kajian	1 Dokumen	800.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4.07.15.35	Pengembangan Kampung Inovasi Berbasis Komoditas Lokal	Jumlah Kampung	1 Kampung	705.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4.07.16	Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK	Jumlah Teknologi Tepat Guna dalam Mendukung Penguatan Sistem Inovasi Daerah	0 Jenis	1.505.000.000,00	
4.07.16.06	Fasilitasi Pameran Pengembangan IPTEK di Provinsi Papua	Jumlah Kegiatan	1 Kegiatan	600.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4.07.16.07	Pengembangan Teknologi tepat guna untuk mendukung penguatan sistem inovasi daerah	Jumlah Model	1 Unit	905.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4.07.17	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Tingkat pemanfaatan teknologi Informasi dalam Mendukung Penguatan Sistem Inovasi Daerah	50 %	400.000.000,00	
4.07.17.01	FGD Isu-isu Aktual di Provinsi Papua	Jumlah Kegiatan	4 Kegiatan	400.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4.07.18	Program Kerjasama Antar Pemerintah Daerah			705.000.000,00	
4.07.18.02	Rapat Koordinasi Bidang Penelitian dan Pengembangan se Provinsi Papua	Jumlah Kegiatan	20 Kegiatan	705.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
JUMLAH				18.047.700.639.757,00	

Sumber : www.ppr.papua.go.id

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pembangunan yang dilaksanakan melalui pelaksanaan program dan kegiatan diharapkan semaksimal mungkin dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut lembaga pemerintah harus mampu menerakan sistem yang kondusif bagi berlangsungnya pembangunan sejak dari perencanaan hingga proses evaluasi. Prinsip Good Governance atau pemerintahan yang baik merupakan sebuah komitmen yang mutlak dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan bercirikan profesionalisme, transparan, efektif, efisien akuntabel, demokratis dengan tetap menjunjung supremasi hukum. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja pemerintah, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan telah berhasil dicapai, yang kemudian dituangkan dalam Indikator Kinerja. Agar sasaran kegiatan dan program berjalan efektif, efisien dan optimal maka ditetapkan suatu pengukuran Indikator Kinerja strategis yang menjadi prioritas di setiap Instansi pemerintah sebagai suatu bentuk penajaman sasaran prioritas pembangunan.

7.1. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran pembangunan.

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan yang mengacu kepada RPJMD Provinsi Papua Tahun 2018-2023. Berikut ini masing-masing indikator kinerja tersebut dapat dijabarkan dalam Tabel 7.1 sebagai berikut :

Tabel. 7.1
Indikator Kinerja Utama Tahun 2021

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2021
1. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	7.5
2. Harapan Lama Sekolah	Tahun	11.5
3. Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf	Persen	77.9
4. Angka Harapan Hidup	Tahun	68.1
5. Jumlah atlet yang berprestasi pada event olah raga nasional	Atlet	85
6. Persentase organisasi pemuda yang aktif	Persen	72.6
7. Cakupan daerah rawan pangan	Jumlah Kab./Kota	9.0
8. Pengeluaran Per Kapita yang Disesuaikan	Rp Ribu Per Kapita	7393.1
9. Indeks Kerukunan Umat Beragama	Indeks	77.8
10. Nilai skor aspek kebebasan sipil	Skor	94.0
11. Nilai skor aspek hak-hak politik	Skor	46.8
12. Nilai skor aspek lembaga demokrasi	Skor	57.7
13. Tingkat capaian realisasi program-program Otsus yang direncanakan	Persen	95.0
14. Capaian Nilai SAKIP	Predikat	BB
15. Capaian implementasi e-government terintegrasi (masukan e-planning dll ke program)	Persen	90
16. Tingkat konsistensi RKPD terhadap RPJMD	Persen	90.0
17. Opini BPK Atas Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Provinsi Papua	Opini	WTP
18. Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Daerah	Persen	11.52
19. Kontribusi Sektor tanaman pangan Terhadap PDRB	Persen	3.8
20. Kontribusi Sektor Perkebunan Terhadap PDRB	Persen	2.7
21. Kontribusi Sektor Peternakan Terhadap PDRB	Persen	2.7
22. Indeks Kualitas Udara	Indeks	93.6
23. Indeks Kualitas Air	Indeks	79.1
24. Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	82.7
25. Intensitas penurunan emisi	Ton CO2/Rupiah	47370.4

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2021
26. Kontribusi sub Sektor perikanan Terhadap PDRB	Persen	8.67
27. Tingkat Kesempatan Kerja	Persen	97.84
28. Jumlah nilai investasi PMDN yang direalisasikan	Rp. Triliun	60.49
29. Jumlah nilai investasi PMA yang direalisasikan	Rp. Triliun	86.08
30. Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	Persen	45.00
31. Persentase kesesuaian Pemanfaatan ruang	Persen	40.00
32. Persentase pemanfaatan sumberdaya air	Persen	70.00
33. Cakupan rumah tangga dengan sanitasi baik	Persen	37.54
34. Cakupan rumah tangga dengan air bersih layak	Persen	42.87
35. Indeks Desa Membangun	Indeks	48.38
36. Persentase pemenuhan kebutuhan dasar OAP	Persen	67.49
37. Rata-rata Lama Sekolah wilayah perbatasan	Tahun	10.25
38. Angka Harapan Hidup wilayah perbatasan	Tahun	67.01
39. Pengeluaran Per Kapita wilayah perbatasan	Rp Juta Per Kapita	12.30
40. Cakupan PMKS yang memperoleh bantuan sosial	Ribu Orang Per Tahun	30
41. Indeks Resiko Bencana (IRBI)	Kategori	Sedang
42. Indeks Pembangunan Gender	Indeks	79.79
43. Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	63.95

7.2. Indikator Kinerja Kunci

Sedangkan untuk Indikator Kinerja Kunci (IKK), ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai pedoman Outcome Level OPD di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Papua. IKK merupakan salah satu bagian yang menjadi rujukan penilaian kinerja OPD dalam merealisasikan setiap target indikator pada masing-masing urusan yang ditargetkan pada tahun 2020 mendatang adalah sebagai berikut.

Tabel. 7.2
Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Tahun 2021

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan Indikator	Target 2021
1. Layanan Urusan Wajib Dasar		

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan Indikator	Target 2021
1.1.	Pendidikan		
1.1.1	Angka Putus Sekolah (APTS) SD/MI/Paket A/ sederajat	Persen	0.33
1.1.2	Angka Putus Sekolah (APTS) SMP/MTs/ sederajat	Persen	1.07
1.1.3	Cakupan ruang kelas sekolah pendidikan SD/MI dengan kondisi bangunan baik	Persen	27.25
1.1.4	Cakupan ruang kelas sekolah pendidikan SMP/MTs dengan kondisi bangunan baik	Persen	27.21
1.1.5	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	Murid Per Guru	24.73
1.1.6	Rasio guru/murid sekolah pendidikan menengah pertama	Murid Per Guru	21.88
1.1.7	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	Murid Per Sekolah	193.45
1.1.8	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan menengah pertama	Murid Per Sekolah	198.69
1.1.9	Persentase siswa kelas 1, 2 dan 3 yang naik kelas	Persen	100.00
1.1.10	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C/ sederajat (SPM Provinsi)	Persen	75.33
1.1.11	Angka Putus Sekolah (APTS SMA/SMK/MA/Paket C/ sederajat)	Persen	0.61
1.1.12	Cakupan ruang kelas sekolah pendidikan SMA/SMK/MA dengan kondisi bangunan baik	Persen	37.84
1.1.13	Rasio guru/murid sekolah pendidikan menengah atas/kejuruan	Murid Per Guru	20.17
1.1.14	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan menengah atas/kejuruan	Murid Per Sekolah	218.84
1.1.15	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun	Persen	77.94
1.1.16	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15- 59 tahun	Persen	93.07
1.1.17	Jumlah PKBM aktif	Unit	434.00
1.1.18	Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	Persen	73.55
1.1.19	Persentase guru TK yang bersertifikat pendidik	Persen	72.68
1.1.20	Persentase guru SD yang bersertifikat pendidik	Persen	83.30
1.1.21	Persentase guru SMP yang bersertifikat pendidik	Persen	80.24
1.1.22	Persentase guru SMA/SMK yang bersertifikat pendidik	Persen	80.89
1.1.23	Persentase guru SMLB yang bersertifikat pendidik	Persen	66.49

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan Indikator	Target 2021
1.1.24	Cakupan Guru SMK pemegang sertifikat keahlian khusus	Persen	52.06
1.1.25	Cakupan Kurikulum Muatan Lokal Papua yang dikembangkan dalam proses pembelajaran	Persen	10.00
1.1.26	Cakupan model Pendidikan Sekolah Kontekstual Papua yang dikembangkan	Unit Per Tahun	4.00
1.1.27	Jumlah kemitraan pendidikan yang dikembangkan dengan lembaga sosial dan agama	Unit	36.10
1.1.28	Cakupan PBM Sekolah yang di Supervisi dan di Monitoring	Persen	63.07
1.1.29	Cakupan Mahasiswa Penerima Beasiswa Pendidikan S1 yang lulus tepat waktu	Persen	91.54
1.1.30	Cakupan Mahasiswa Penerima Beasiswa Pendidikan S2 yang lulus tepat waktu	Persen	66.49
1.1.31	Cakupan Mahasiswa Penerima Beasiswa Pendidikan S3 yang lulus tepat waktu	Persen	59.56
1.1.32	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT)	Persen	23.38
1.1.33	Capaian peserta program afirmasi pendidikan yang difasilitasi	Orang Per Tahun	250.00
1.1.34	Capaian Siswa peserta ADEM/ADIK yang difasilitasi	Orang	1164.00
1.1.35	Capaian Sekolah Program Khusus yang terbina	Unit	10.00
1.1.36	Cakupan siswa lulus Sekolah Luar Biasa	Persen	6.64
1.1.37	Rasio kecukupan rombel terhadap siswa SLB	RASIO SISWA Slb PER ROMBEL	16.18
1.1.38	APM pendidikan khusus (SPM Provinsi)	Persen	80
1.2.	Kesehatan		
1.2.1	Cakupan distrik yang sudah memiliki puskesmas	Persen	19.01
1.2.2	Cakupan puskesmas terakreditasi	Persen	8.70
1.2.3	Cakupan puskesmas pembantu	Per 100.000 Penduduk	128.58
1.2.4	Cakupan UKBM kabupaten/kota yang terpetakan	Persen	60.00
1.2.5	Rasio kelompok Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)	Persen	30.00
1.2.6	Cakupan kabupaten/kota yang memiliki data profil kesehatan secara lengkap	Persen	55.95
1.2.7	Cakupan Dinas Kesehatan dan RSUD kabupaten/kota yang memiliki RENSTRA yang berkualitas	Persen	65.00

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan Indikator	Target 2021
1.2.9	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Persen	41.47
1.2.10	Cakupan Kabupaten/Kota yang memiliki kebijakan PHBS	Persen	27.59
1.2.11	Persentase Puskesmas yang mempunyai ketersediaan obat dan vaksin	Persen	87
1.2.12	Persentase PAK yang diawasi	Persen	78
1.2.13	Tanaman obat tradisional yang berkembang di masyarakat	Jumlah	15.00
1.2.14	API Malaria	Persen	33.85
1.2.15	Tingkat prevalensi Tuberkulosis	Per 100.000 Penduduk	40.59
1.2.16	Tingkat prevalensi DBD	Persen	69.93
1.2.17	Angka penemuan kasus baru kusta (NCDR)	Per 100.000 Penduduk	33.98
1.2.18	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	Per 1.000 Penduduk	10.00
1.2.19	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	Per 1.000 Penduduk	38.28
1.2.20	Persentase perempuan umur 30-50 tahun yang dideteksi dini kanker serviks dan payudara	Persen	20.00
1.2.21	Persentase penanganan kesehatan pada kejadian luar biasa	Persen	85.00
1.2.22	Cakupan pelayanan keehatan lembaga mitra di 5 wilayah adat	Kabupaten/Kota	12.00
1.2.23	Prevalensi penyalahgunaan narkoba	Persen	15.00
1.2.24	Unmet need pelayanan kesehatan	Persen	4.04
1.2.26	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	Kasus	186.65
1.2.27	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	Persen	52.81
1.2.28	Cakupan pelayanan nifas	Persen	41.70
1.2.29	Cakupan Kelurahan/Kampung Universal Child Immunization (UCI)	Persen	63.84
1.2.31	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita	Persen	27.37
1.2.32	Prevalensi Malnutrisi (wasting/obesitas) pada anak balita	Persen	0.88
1.2.33	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif	Persen	25.00
1.2.34	Angka Kematian Balita (AKBa)	Per 1.000 Klh	5.04

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan Indikator	Target 2021
1.2.35	Rasio posyandu yang aktif	Persen	67.79
1.2.36	Cakupan kunjungan bayi (KN1)	Persen	50.94
1.2.37	Cakupan imunisasi dasar lengkap pada bayi		49.92
1.2.38	Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum (standar yang digunakan Indonesia 2.100 Kkal/kapita/hari)	Persen	2236.63
1.2.39	Cakupan masyarakat teridentifikasi kurang gizi	Persen	36.84
1.2.40	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	Persen	60.41
1.2.41	Cakupan jumlah kabupaten/kota yang memiliki Rumah Sakit	Jumlah Per Tahun	24.00
1.2.42	Cakupan pembangunan dan pengembangan Rumah Sakit rujukan di 5 wilayah adat	Unit	6.00
1.2.43	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	Per 30.000 Penduduk	27.39
1.2.44	Rasio rumah sakit per satuan penduduk	Per 100.000 Penduduk	2.83
1.2.45	Rasio Dokter per satuan penduduk	Per 100.000 Penduduk	28.05
1.2.46	Rasio Tenaga medis per satuan penduduk	Per 1.000 Penduduk	1.14
1.2.47	Cakupan kecukupan laboratorium dalam mendukung pelayanan kesehatan	Persen	85.00
1.2.48	Cakupan ketersediaan data bidang kesehatan di tingkat provinsi yang valid dan reliabel	Persen	90.00
1.2.49	Cakupan pasien penyakit jiwa yang tertangani	Persen	50.00
1.2.50	Cakupan Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa	Kabupaten Per Tahun	1.00
1.2.51	Cakupan jumlah Rumah sakit yang sudah terakreditasi	Persen	58.72
1.2.52	Cakupan pelayanan masyarakat miskin pada RSUD dan RSJ	Persen	25.20
1.2.53	Persentase indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit yang mencapai target	Persen	70,00
1.2.54	Bed Occupancy Ratio (BOR)	Rasio	-
1.2.55	Cakupan rumah sakit kelas C	Persen	51,72
1.2.56	Cakupan pelayanan kesehatan RSUD yang telah sesuai standar nasional	Persen	75.00

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan Indikator	Target 2021
1.2.57	Bed Occupancy Ratio (BOR)	Rasio	43.92
1.2.58	Cakupan rumah sakit kelas C	Persen	51.72
1.2.59	Persentase indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit yang mencapai target	Persen	70.00
1.2.60	Tingkat kecukupan tenaga medis sesuai dengan standar rumah sakit	Persen	70.00
1.2.61	Tingkat kecukupan sarana dan prasarana rumah sakit sesuai dengan standar	Persen	75
1.2.62	Cakupan pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit	Persen	84
1.2.63	Cakupan masyarakat yang terakses pelayanan sanitasi baik	Persen	37.54
1.2.64	Cakupan keluarga terakses air bersih	Persen	42.87
1.2.65	Jumlah tenaga kesehatan yang terlatih untuk PON	Orang	-
1.2.66	Jumlah Pos dan Peralatan kesehatan yang memenuhi standar nasional untuk pelaksanaan PON	Unit	-
1.2.67	Persentase pelayanan kesehatan terhadap penduduk yang terdampak bencana (SPM Provinsi)		80
1.2.68	Persentase pelayanan kesehatan terhadap penduduk yang terdampak KLB (SPM Provinsi)		100
1.3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
1.3.1.	Pekerjaan Umum		
1.3.1.1	Daerah irigasi provinsi yang berfungsi	Hektar	3000
1.3.1.2	Persentas luas lahan yang terlayani irigasi	Persen	85
1.3.1.3	Tingkat produktifitas lahan sawah yang terpenuhi irigasi	Ton Per Hektar	54.33
1.3.1.4	Cakupan layanan air minum (SPM Provinsi)	Persen	100
1.3.1.5	Terpeliharanya sempadan sumber air	Sungai/Lokasi	20
1.3.1.6	Persentase jaringan irigasi provinsi dengan kualitas baik	M	60
1.3.1.7	Panjang jalan provinsi yang fungsional	Km	20
1.3.1.8	Panjang jembatan yang fungsional	M'	500
1.3.1.9	Persentase panjang jalan provinsi dalam kondisi mantap	Persen	40
1.3.1.10	Persentase panjang jembatan provinsi dalam kondisi mantap	Persen	50
1.3.1.11	Panjang jalan dalam kondisi mantap	Km	20

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan Indikator	Target 2021
1.3.1.12	Panjang jembatan dalam kondisi mantap	Meq	30
1.3.1.13	Cakupan perencanaan teknis jalan dan jembatan	Persen	70
1.3.1.14	Cakupan keterlayanan air baku	Persen	40
1.3.1.15	Cakupan keterlayanan air bersih	Persen	45.82
1.3.1.16	Persentase Rumah Tangga dengan Fasilitas Tempat Buang Air Besar	Persen	76.21
1.3.1.17	Cakupan kawasan rawan abrasi yang tertangani	Persen	40
1.3.1.18	Cakupan kawasan rawan banjir yang tertangani	Persen	60
1.3.1.19	Persentase penduduk yang memperoleh layanan pengolahan air limbah (SPM Provinsi)	Persen	75
1.3.2.	Penataan Ruang		
1.3.2.1	Cakupan ijin pemanfaatan ruang yang sesuai dengan pola ruang	Persen	90
1.3.2.2	Persentase implementasi perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Persen	70
1.4.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman		
1.4.1	Cakupan penataan lingkungan permukiman kumuh	Persen	70
1.4.2	Cakupan rumah layak huni yang terbangun	Unit	3000
1.4.3	Persentase lingkungan permukiman yang sehat	Persen	40
1.4.4	Cakupan rumahtangga yang menggunakan air ledeng	Per 1000 Kk	230
1.4.5	Persentase penduduk korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM Provinsi)	Persen	100
1.4.6	Persentase penduduk realokasi akibat program pemerintah yang memperoleh rumah layak huni (SPM Provinsi)	Persen	100
1.5.	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat		
1.5.1	Jumlah konflik horisontal	Kasus	6.00
1.5.2	Cakupan penegakan Perda	Persen	100.00
1.5.3	Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk	Rasio	15.15
1.5.4	Angka korban kejahatan pembunuhan per 100.000 penduduk	Kasus	1.63
1.5.5	Jumlah konflik horisontal	Kasus	6.00
1.5.6	Cakupan penegakan Perda	Persen	100.00
1.5.7	Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk	Rasio	15.15

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan Indikator	Target 2021
1.5.8	Angka korban kejahatan pembunuhan per 100.000 penduduk	Kasus	1.63
1.5.9	Tingkat partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan	Persen	55.00
1.5.10	Rasio jumlah linmas per 10.000 penduduk	Rasio	72.81
1.5.11	Cakupan penertiban dan penanggulangan penyakit masyarakat	Persen	80.00
1.5.12	Rata-rata Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) kabupaten/kota dalam daerah layanan	Persen	40.00
1.5.13	Cakupan tenaga pengendali dan kenyamanan lingkungan yang terampil	Persen	55.00
1.5.14	Jumlah Pertemuan FKUB per tahun	Kali	2.00
1.5.15	Cakupan peserta yang mengikuti kegiatan bela negara, pembauran kebangsaan, dan wawasan kebangsaan	Orang	250.00
1.5.16	Cakupan fasilitasi Forkompimda	Kali	5.00
1.5.17	Persentase peningkatan pemahaman masyarakat terhadap HAM	Persen	2.25
1.5.18	Persentase penanganan kasus pelanggaran HAM	Persen	30.00
1.5.19	Cakupan muatan pendidikan politik dan demokrasi dalam pendidikan menengah	Persen	5.00
1.5.20	Persentase lembaga dan partai politik yang dibina	Persen	80.00
1.5.21	Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu	Persen	-
1.5.22	Persentase pembinaan terhadap LSM dan Ormas	Persen	85.00
1.5.23	Cakupan pertemuan dengan lembaga adat untuk harmonisasi regulasi dan mitra strategis pembangunan	Kali	2.00
1.5.24	Cakupan Kampung dengan status Tangguh Bencana	Persen	70
1.5.25	Cakupan lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah	Lokasi	2
1.5.26	Persentase kesiapsiagaan penanganan bencana	Persen	90
1.5.27	Tingkat fasilitasi penanganan pasca bencana	Persen	90
1.5.28	Cakupan pengembangan EWS (early warning systems) kebencanaan	Persen	30
1.5.29	Persentase penanganan krisis kesehatan akibat dan atau potensi bencana	Persen	90
1.5.30	Persentase penduduk yang memperoleh layanan akibat dari penegakan perda (SPM Provinsi)	Persen	100
1.6.	Sosial		

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan Indikator	Target 2021
1.6.1	Persentase KAT yang memperoleh bantuan sosial	Persen	50
1.6.2	Persentase PMKS yang tertangani	Persen	40
1.6.3	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	Persen	42.29
1.6.4	Jumlah keluarga miskin yang mendapatkan bantuan pelatihan keterampilan usaha	Kk	200
1.6.5	Persentase panti sosial yang menerima pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama	Persen	80
1.6.6	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	Persen	75
1.6.7	Cakupan ketersediaan basis data terpadu PMKS dan kemiskinan	Persen	90
1.6.8	Cakupan Pengembangan jaminan sosial bagi lanjut usia dan orang dengan kecacatan	Persen	40
1.6.9	Persentase penyandang disabilitas miskin dan rentan yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar	Persen	25
1.6.10	Cakupan Kabupaten/Kota yang terakses perlindungan dan jaminan sosial	Kab/Kota	18
1.6.11	Cakupan wanita rawan sosial ekonomi (WRSE) yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial	Orang	50
1.6.12	Persentase anak dan remaja terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial (SPM Provinsi)	Persen	80
1.6.13	Cakupan penyandang cacat netra yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial (SPM Provinsi)	Persen	80
1.6.14	Cakupan Jumlah lanjut usia terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial	Persen	70
1.6.15	Cakupan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berkualitas dalam bidang kesejahteraan sosial	Dokumen	2
2.	Layanan Urusan Wajib Non Dasar		
2.1.	Tenaga Kerja		
2.1.1	Persentase lulusan balai diklat tenaga kerja yang terserap	Persen	90
2.1.2	Frekuensi promosi bursa tenaga kerja	Kali	2
2.1.3	Persentase peserta pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi yang terserap dalam lapangan kerja	Persen	85
2.1.4	Persentase Balai Latihan Kerja (BLK) kabupaten/kota yang terakreditasi	Persen	30

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan Indikator	Target 2021
2.1.5	Persentase kenaikan UMP	Persen	2.3
2.1.6	Persentase pekerja/buruh yang menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan	Persen	40
2.1.7	Tingkat partisipasi angkatan kerja	Persen	78.97
2.1.8	Tingkat pengangguran terbuka	Persen	2.32
2.1.9	Cakupan Penyelesaian Perselisihan Hubungan industrial	Persen	50
2.1.10	Cakupan perusahaan yang menerapkan norma K3	Persen	70
2.2.	Pangan		
2.2.1	Cakupan penanganan daerah rawan pangan	Persen	20.00
2.2.2	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan	Persen	45.79
2.2.3	Skor PPH	Skor	90.95
2.3.	Pertanahan		
2.3.1	Persentase penyelesaian konflik pertanahan	Persen	70
2.3.2	Cakupan tanah adat yang terpetakan	Persen	40
2.4.	Lingkungan Hidup		
2.4.1	Cakupan pemantauan dan pengendalian kualitas air	Titik Sungai	20
2.4.2	Cakupan lokasi pemantauan dan pengendalian kualitas udara	Lokasi Per Kab/Kota	50/10
2.4.3	Proporsi degradasi lahan yang tercemar	Persen	3.01
2.4.4	Tingkat ketaatan pemegang ijin lingkungan	Persen	70.00
2.4.5	Cakupan akses informasi LH yang berkualitas	Kali	12
2.4.6	Cakupan kawasan ekowisata dan jasa lingkungan yang dikembangkan	Lokasi	1
2.4.7	Persentase kontribusi sektor lahan terhadap penurunan emisi	Persen	70
2.4.8	Persentase kontribusi sektor energi terhadap penurunan emisi	Persen	30
2.4.9	Persentase kontribusi sektor limbah terhadap penurunan emisi	Persen	40
2.4.10	Jumlah SDM bidang LH yang tersertifikasi	Orang	12
2.4.11	Jumlah PPLHD yang dilatih dan bina	orang	1
2.5.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil		

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan Indikator	Target 2021
2.5.1	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	ada/tidak	Ada
2.5.2	Cakupan penduduk ber KTP elektronik	persen	77.90
2.5.3	Persentase kepemilikan KK elektronik	persen	39.57
2.5.4	Persentase kepemilikan akta kelahiran	persen	51.29
2.5.5	Persentase pasangan berakte nikah	persen	55
2.6.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
2.6.1	Cakupan kampung yang diberdayakan dalam bidang TTG	persen	35
2.6.2	Jumlah BUMKAM yang kelola Komoditas Unggulan	unit	10
2.6.3	Persentase kampung tertinggal	persen	79.63
2.6.4	Cakupan kampung mandiri	kampung	4
2.6.5	Cakupan jumlah kampung yang mendapatkan bantuan penguatan Lembaga Masyarakat Adat	kampung	10
2.6.6	Persentase lembaga pemberdayaan masyarakat yang berprestasi	persen	20
2.7.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
2.7.1	Cakupan sasaran Kelompok Masyarakat Peduli KB yang dibina	kelompok per tahun	100
2.7.2	Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmet need)	persen	2.8
2.7.3	Persentase pemenuhan kebutuhan alat dan obat kontrasepsi	persen	70
2.7.4	Cakupan kampung KB	persen	30
2.7.5	Cakupan tenaga penyuluh KB yang terlatih	orang per tahun	30
2.8.	Perhubungan		
2.8.1	Cakupan terintegrasinya antarmoda angkutan antarwilayah adat	wilayah adat	2
2.8.2	Cakupan pelayanan moda angkutan	persen	30
2.8.3	Tingkat kecelakaan kendaraan bermotor	jiwa	140
2.8.4	Jumlah bandara pengumpul dengan skala pelayanan primer	unit	1
2.8.5	Jumlah dermaga penyeberangan Kelas II	unit	1
2.8.6	Jumlah pelabuhan strategis provinsi	unit	1
2.8.7	Jumlah terminal Tipe B yang fungsional	unit	2

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan Indikator	Target 2021
2.8.8	Pertumbuhan arus penumpang angkutan udara	persen	6.0
2.8.9	Pertumbuhan arus penumpang angkutan laut	persen	3.5
2.8.10	Cakupan ketersediaan fasilitas Keselamatan Jalan	persen	70
2.9.	Komunikasi dan Informatika		
2.9.1	Cakupan pemenuhan kebutuhan akses internet dalam pelaksanaan PON	mbps	
2.9.2	Jumlah kerjasama media dalam mempublikasikan hasil pembangunan	kerjasama	2
2.9.3	Persentase jaringan teknologi informasi antar OPD yang terintegrasi	persen	20
2.9.4	Cakupan wilayah yang terlayani jaringan telekomunikasi	persen	30
2.9.5	Persentase penduduk yang mengakses internet	persen	18.76
2.9.6	Cakupan SDM Kominfo yang kompeten di bidang teknologi informasi	persen	70
2.10.	Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah		
2.10.1	Cakupan UMKM lokal yang bermitra dalam pelaksanaan PON	unit	
2.10.2	Persentase peningkatan pengembangan UMKM keolahragaan	persen	1.75
2.10.3	Cakupan usaha mikro dan kecil yang mandiri dikelola pengusaha muda	unit	9039.00
2.10.4	Jumlah UMKM yang mandiri dalam kompetisi usaha	unit	30
2.10.5	Tingkat Partisipasi dalam pameran gelar produk KUMKM dalam negeri	kali	8
2.10.6	Cakupan fasilitasi pemasaran produk UMKM unggulan daerah	kelompok	10
2.10.7	Penyaluran kredit UMKM dari sektor perbankan	Rp milyar	13,171
2.10.8	Persentase koperasi aktif dan berkembang	persen	65
2.11.	Penanaman Modal		
2.11.1	Persentase realisasi investasi	persen	90
2.11.2	Tingkat pertumbuhan nilai investasi sektor unggulan	persen	7.0
2.11.3	Persentase UMKM lokal yang bermitra dengan PMA/ PMDN	persen	25
2.11.4	Frekwensi promosi potensi investasi Papua dalam ajang pameran tingkat nasional/internasional	kali	5

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan Indikator	Target 2021
2.11.5	Persentase investasi yang direalisasikan dari ajang promosi nasional/internasional	persen	60
2.11.6	Lama waktu penerbitan izin investasi	hari	20
2.11.7	Skor indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perijinan	Skor	70.17
2.11.8	Persentase hasil pemantauan perusahaan investasi yang ditindaklanjuti	persen	75
2.12.	Kepemudaan dan Olah Raga		
2.12.1	Jumlah organisasi olahraga yang dibina	organisasi	50.00
2.12.2	Cakupan monitoring atlet berprestasi	persen	90.00
2.12.3	Cakupan atlet yang diseleksi untuk mengikuti berbagai event olahraga nasional maupun internasional	orang	30.00
2.12.4	Jumlah gedung olahraga standar internasional yang terbangun	unit	-
2.12.5	Jumlah lapangan olahraga standar internasional yang terbangun	unit	-
2.12.6	Cakupan penyelesaian sarana dan prasarana PON Papua	persen	-
2.12.7	Cakupan venue berstandar internasional	persen	-
2.12.8	Cakupan penyelesaian Stadion utama untuk mendukung penyelenggaraan PON XX	persen	
2.12.9	Jumlah pemuda yang dilatih dalam kepemimpinan, kepeloporan dan kewirausahaan	orang	250.00
2.12.10	Jumlah organisasi kepemudaan	organisasi	55.00
2.13.	Statistik		
2.13.1	Cakupan ketersediaan data SIPD	persen	85.00
2.13.2	Jumlah dokumen analisis kinerja pembangunan daerah yang berkualitas	dokumen	5
2.14.	Persandian		
2.14.1	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	persen	90
2.15.	Kebudayaan		
2.15.1	Jumlah Pengembangan Kurikulum Bahasa Ibu di 5 Wilayah Adat	kurikulum	1.00
2.15.2	Frekwensi Festival Kebudayaan Malanesia yang berstandar internasional	kali	1.00
2.15.3	Cakupan budaya tak benda yang ditetapkan	jumlah	1.00

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan Indikator	Target 2021
2.15.4	Frekwensi pertunjukan, festival, lomba karya seni budaya, pameran dan perfilman yang berstandar nasional	kali	7.00
2.15.5	Cakupan Cagar budaya yang ditetapkan	jumlah	1.00
2.15.6	Cakupan kelompok seni dan budaya asli Papua yang dibina	persen	45.00
2.15.7	Jumlah kerjasama dengan pihak potensial dalam pengembangan seni dan budaya Papua	jumlah	5.00
2.16.	Perpustakaan		
2.16.1	Cakupan pelayanan perpustakaan keliling	persen	40.00
2.16.2	Persentase pemustaka yang puas terhadap layanan perpustakaan	persen	80.00
2.17.	Kearsipan		
2.17.1	Persentase peningkatan arsip daerah yang telah dilakukan penyelamatan	persen	90.00
2.17.2	Persentase peningkatan SDM pengelola kearsipan dan kepastakaan	persen	2.25
3.	Layanan Urusan Pilihan		
3.1.	Pariwisata		
3.1.1	Jumlah kunjungan wisatawan PON yang terlayani	ribu orang	-
3.1.2	Destinasi wisata unggulan yang berkembang	destinasi	12
3.1.3	Kawasan wisata yang berstandar internasional	kawasan	1
3.1.4	Cakupan mitra pelaku usaha wisata dan ekonomi kreatif	perusahaan	10
3.1.5	Tingkat partisipasi Papua dalam promosi pariwisata di tingkat regional dan internasional	orang	50
3.1.6	Cakupan pelaku usaha wisata yang dibina	pengusaha	10
3.2.	Pertanian		
3.2.1	Cakupan bina kelompok tani	persen	20
3.2.2	NTP peternakan	persen	99.96
3.2.3	NTP tanaman pangan	persen	95.21
3.2.4	Cakupan bina kelompok tani	persen	20
3.2.5	NTP perkebunan	persen	99.96
3.2.6	NTP tanaman pangan	persen	95.21
3.2.7	Produktifitas komoditas tanaman pangan dan hortikultura utama	ton per hektar	9.03

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan Indikator	Target 2021
3.2.8	Cakupan komoditi pangan lokal berkualitas	persen	-
3.2.9	Luas kawasan pertanian pangan berkelanjutan	juta hektar	3.50
3.2.10	Tingkat swasembada pangan	persen	35
3.2.11	Cakupan penyuluh fungsional yang mempunyai kompetensi memadai	persen	75
3.2.12	Persentase lahan yang dikembangkan sebagai kawasan agribisnis	persen	40
3.2.13	Persentase peningkatan kemampuan penyuluh pertanian melalui Diklat	persen	2.5
3.2.14	Cakupan pengembangan kawasan tanaman pangan dan hortikultura	kawasan	2
3.2.15	Cakupan teknologi pertanian/perkebunan rakyat tepat guna yang diterapkan	jenis	12
3.2.16	Tingkat produktifitas tanaman perkebunan	kg per hektar	501.60
3.2.17	Tingkat kemampuan petani lokal dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat	persen	35
3.2.18	Frekwensi promosi produk perkebunan	kali	2
3.2.19	Cakupan pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	persen	60
3.2.20	Produksi hasil ternak besar/kecil/unggas	Ton	34,930,354
3.2.21	Tingkat kemampuan peternakan lokal dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat	persen	36
3.2.22	Cakupan penerapan standar keamanan pangan asal hewan	persen	15
3.3.	Kehutanan		
3.3.1	Nilai produksi sumber daya kehutanan	Rp triliun	2,34
3.3.2	Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan	persen	28.51
3.3.3	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	Ribu Ha	5,01
3.3.4	Rasio pencapaian restorasi lahan gambut	persen	20
3.3.5	Luasan tutupan kawasan konservasi	Ha	7,755,284
3.3.6	Persentase luas usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem	persen	40
3.4.	Energi dan Sumber Daya Mineral		
3.4.1	Cakupan pemenuhan air bersih dalam pelaksanaan PON	m3/jam	

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan Indikator	Target 2021
3.4.2	Cakupan pemenuhan listrik dalam pelaksanaan PON	persen	
3.4.3	Persentase hasil pengendalian dan pengawasan yang ditindaklanjuti oleh pengusaha pertambangan	persen	90
3.4.4	Cakupan kelompok penambang mineral non logam dan batuan yang dibina	persen	50
3.4.5	Persentase penambangan ilegal yang ditertibkan	persen	90
3.4.6	Persentase pengembangan Sistem informasi sumber daya mineral	persen	75
3.4.7	Cakupan pemetaan kawasan potensi bencana berbasis geologi	persen	50
3.4.8	Cakupan Pengawasan dan Penertiban Penambang Emas Tanpa Ijin (PETI)	persen	90
3.4.9	Cakupan penelitian dan survey pelayanan geologi	persen	60
3.4.10	Harga BBM premium dan pertalite yang terkendali	rp per liter	9,800
3.4.11	Tingkat elektrifikasi	persen	57.64
3.4.12	Persentase kampung terakses listrik	persen	53.69
3.4.13	Jumlah RT yang terlayani PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya)	rumah tangga	250.00
3.4.14	Jumlah RT yang terlayani PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro)	rumah tangga	500
3.4.15	Jumlah kampung yang memanfaatkan sumber daya energi terbarukan	kampung	100
3.5.	Perdagangan		
3.5.1	Rata-rata margin harga bahan-bahan makanan kabupaten/kota terhadap ibu kota provinsi	persen rata-rata kab/kota	204.68
3.5.2	Cakupan penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen	persen	85
3.5.3	Cakupan pengawasan peredaran barang dan jasa	persen	100
3.5.4	Nilai ekspor Non Migas Papua	Rp milyar	2,624.27
3.5.5	Cakupan pasar rakyat yang fungsional	unit	20
3.5.6	Persentase peningkatan pemasaran komoditas unggulan Provinsi Papua	persen	3.25
3.5.7	Rata-rata margin perdagangan barang-barang kebutuhan pokok	persen	200
3.5.8	Persentase kenaikan pengeluaran per kapita perbulan rumah tangga	persen	14.28
3.6.	Perindustrian		

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan Indikator	Target 2021
3.6.1	Cakupan pengembangan industri kayu masyarakat adat	unit per tahun	10
3.6.2	Cakupan Industri kecil dan Menengah yang dibina	unit usaha	50
3.6.3	Kawasan sentra industri rakyat yang berfungsi	kawasan	1
3.7.	Kelautan dan Perikanan		
3.7.1	Persentase meningkatnya kemampuan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan	persen	1.75
3.7.2	Cakupan kabupaten/kota yang memiliki POKMASWAS berfungsi	kab/kota	13
3.7.3	Produksi perikanan budidaya	ton	136.49
3.7.4	Produksi perikanan tangkap	ton	7,795.83
3.7.5	Nilai ekspor produk perikanan	Rp. juta	45,553.46
3.7.6	Nilai investasi sektor perikanan yang direalisasikan	Rp. juta	7573.57
3.7.7	Cakupan unit pengembangan pelabuhan perikanan yang berfungsi	persen	4
3.7.8	Cakupan peningkatan kinerja UPTD Perikanan	persen	2.00
3.7.9	Cakupan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil	persen	70
4.	Layanan Penunjang Urusan		
4.1.	Perencanaan Pembangunan		
4.1.1	Tingkat capaian realisasi program-program Otsus yang direncanakan	persen	
4.1.2	Cakupan LPPD kabupaten/kota yang berpredikat Sangat Tinggi	jumlah kab/kota	16
4.1.3	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPDP	persen	90.00
4.1.4	Penjabaran konsistensi Program RKPDP kedalam APBD	persen	90
4.1.5	Cakupan fasilitasi asistensi Musrenbang Kabupaten	persen	100
4.1.6	Tingkat keterwakilan stakeholder dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua (MUSRENBANGDA)	persen	100.00
4.1.7	Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP) Provinsi Papua tepat waktu	tepat/tidak tepat	Ya
4.1.8	Penyusunan LKPJ tepat Waktu	tepat/tidak tepat	Ya
4.1.9	Cakupan Evaluasi RPJMD Kabupaten/Kota se Papua	persen	100
4.1.10	Cakupan Evaluasi RKPDP Kabupaten/Kota se Papua	persen	100

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan Indikator	Target 2021
4.1.11	Cakupan ketersediaan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan	persen	90
4.1.12	Cakupan hasil kajian yang dijadikan sebagai pengambilan keputusan kebijakan ekonomi	persen	90
4.1.13	Persentase ketercapaian sasaran pembangunan bidang ekonomi	persen	50.00
4.1.14	Persentase ketercapaian sasaran pembangunan bidang sosbud	persen	50.00
4.1.15	Persentase ketercapaian sasaran pembangunan bidang fispra	persen	50.00
4.1.16	Jumlah kemitraan yang dilaksanakan untuk peningkatan perencanaan pembangunan daerah	jumlah	4
4.1.17	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan tata ruang mandatoris yang telah ditetapkan	persen	80
4.1.18	Persentase implementasi perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	persen	70
4.2.	Keuangan		
4.2.1	Persentase penerapan Sistem Informasi Data Pengelolaan Keuangan Otsus	persen	100
4.2.2	Jumlah Kabupaten/kota yang melakukan pengelolaan keuangan secara baik	dokumen	-
4.2.3	Cakupan implementasi regulasi pengelolaan dana Otsus	persen	95
4.2.4	Tersusunnya APBD dan Perubahan APBD secara tepat waktu dan berkualitas	ya/tidak	Ya
4.2.5	Cakupan Implementasi Analisis Standar Belanja Daerah	persen	100
4.2.6	Persentase aset daerah yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan retribusi	persen	40
4.2.7	Penyampaian LKPD Tepat Waktu	tepat/tidak tepat	Ya
4.2.8	Tertib Administrasi BMD	ya/tidak	Ya
4.2.9	Cakupan jumlah kabupaten/kota yang menyusun APBD secara tepat waktu dan berkualitas	persen	95
4.2.10	Cakupan evaluasi laporan pertanggungjawaban APBD kabupaten/kota Kabupaten/Kota Se Papua	persen	100
4.2.11	Tersusunnya APBD dan Perubahan APBD secara tepat waktu dan berkualitas	ya/tidak	Ya
4.2.12	Cakupan Implementasi Analisis Standar Belanja Daerah	persen	100

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan Indikator	Target 2021
4.2.13	Persentase aset daerah yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan retribusi	persen	40
4.2.14	Opini Pemeriksaan BPK	Opini	WTP
4.2.15	Penyampaian LKPD Tepat Waktu	ya/tidak	Ya
4.2.16	Tertib Administrasi BMD	ya/tidak	Ya
4.2.17	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah	persen	2.99
4.2.18	Kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah	persen	11.52
4.2.19	Efektifitas pendapatan asli daerah	persen	2.60
4.2.20	Prosentase Peningkatan Kontribusi UPTB dalam pungutan Pendapatan Asli Daerah	jenis	2
4.2.21	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah	Persen	22
4.3.	Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan		
4.3.1	Jumlah SDM Papua yang mengikuti pelatihan dan magang	orang	100.00
4.3.2	Jenis Diklat yang terakreditasi A	jumlah	5
4.3.3	Persentase ASN peserta Diklat Kepemimpinan II yang Lulus dengan Kualifikasi Sangat Memuaskan	persen	85
4.3.4	Persentase ASN peserta Diklat Kepemimpinan III yang Lulus dengan Kualifikasi Sangat Memuaskan	persen	80
4.3.5	Persentase ASN peserta Diklat Kepemimpinan IV yang Lulus dengan Kualifikasi Sangat Memuaskan	persen	75
4.3.6	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek sesuai tupoksinya	orang	100
4.4.	Penelitian dan pengembangan		
4.4.1	Jumlah hasil kelitbangan yang terpilih untuk mendukung kebijakan pembangunan daerah	jenis per tahun	8
4.4.2	Tingkat pemanfaatan teknologi Informasi dalam Mendukung Penguatan Sistem Inovasi Daerah	persen	50
4.5	Penerapan SIDA		
4.5.1	Jumlah Teknologi Tepat Guna dalam Mendukung Penguatan Sistem Inovasi Daerah	jenis	1
4.6.	Pengawasan		
4.6.1	Persentase kasus pelanggaran administrasi yang tertangani	persen	85.00
4.6.2	Cakupan pengaduan dan gugatan masyarakat yang ditindaklanjuti	persen	25
4.6.3	Cakupan tenaga pemeriksa yang telah memiliki sertifikat kompetensi	orang per tahun	2

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan Indikator	Target 2021
4.6.4	Cakupan jumlah temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	persen	95
4.6.5	Cakupan tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan	persen	45
4.6.6	Persentase OPD dengan nilai SAKIP B	persen	30
4.6.7	Cakupan Implementasi SPIP pada perangkat Daerah di Lingkungan Pemprov Papua	persen	40
4.7.	Sekretariat Dewan		
4.7.1	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	ada/tidak	Ada
4.7.2	Terintegrasi program - program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran kedalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	ada/tidak	Ada

BAB VIII

PENUTUP

Berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan tujuan dan fungsinya, RKPD tahun 2021 sebagai dokumen rencana operasional pembangunan tahun 2021, memusatkan pada pencapaian arah, tujuan, sasaran dan target prioritas rencana pembangunan jangka pendek tahun 2021. Penetapan prioritas rencana pembangunan tahun 2021, mengacu pada isu-isu strategis serta melalui pendekatan kewilayahan, yang kemudian difokuskan pada program dan kegiatan pembangunan daerah. Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah- kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Seluruh Perangkat Daerah Provinsi Papua dan seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota serta seluruh pelaku pembangunan di Provinsi Papua berkewajiban untuk melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam RKPD Tahun 2021, secara sinergitas dan terintegrasi. Berkaitan dengan pendanaan pembangunan, peran serta kontribusi masyarakat dan dunia usaha perlu terus digali dan didorong untuk dapat berperan serta secara maksimal dan sekaligus berperan sebagai pengawas pelaksanaan pembangunan;
2. Sebagai langkah awal dalam menyusun RAPBD Tahun 2021, RKPD Tahun 2021 dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUAPBD) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2021, hasil kesepakatan bersama dengan DPRD Provinsi Papua ;
3. Dalam rangka sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi dan integrasi pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan pembangunan, yang pendanaannya bersumber dari APBD, APBN/BLN/PHLN dan sumber-sumber lainnya yang sah, maka setiap Perangkat Daerah harus menyusun dan membuat RENJA- Perangkat

Daerah masing-masing, sebagai dasar pelaksanaan rencana kegiatan Tahun 2021;

4. Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rencana pembangunan, agar difasilitasi melalui Forum Perangkat Daerah serta Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG), sehingga aspirasi dan kepentingan masyarakat yang lebih luas, dapat terakomodasi secara baik;
5. Secara proaktif BAPPEDA Provinsi Papua, wajib melakukan monitoring, pengkajian pelaksanaan RKPD Tahun 2021 serta menghimpun dan menganalisis laporan 3 (tiga) bulan pelaksanaan dari masing-masing PD dan hasilnya disampaikan kepada Gubernur;
6. Pada akhir tahun anggaran 2021, setiap kepala Perangkat Daerah wajib melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan RKPD Tahun 2021, sesuai dengan TUPOKSI masing-masing. Hasil evaluasi dilaporkan lebih lanjut kepada Gubernur melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan BAPPEDA Provinsi Papua;
7. RKPD Tahun 2021 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2021. Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya, perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi dan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Keberhasilan implementasi pelaksanaan RKPD Provinsi Papua Tahun 2021 sangat tergantung kepada peran dari seluruh pemangku kepentingan. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Papua mengajak kepada seluruh pemangku kepentingan agar mensukseskan, mengawal, dan melaksanakan RKPD Provinsi Papua Tahun 2021 ini dengan sebaik-baiknya.

**GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
LUKAS ENEMBE, SIP, MH**

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



**Y. DEREK HEGEMUR, SH., MH
NIP. 19661202 198603 1 002**

**REKAPITULASI PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021
SERTA KETERKAITAN DENGAN HASIL PEMETAAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019**

PROVINSI : Papua

PERANGKAT DAERAH : Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Pendidikan	1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	À Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	1 Penyediaan jasa surat menyurat									
					Jumlah surat yang disediakan	500.000.000,00		1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.01.01.1.03 - Administrasi Umum	1.01.01.1.03.01 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang terkirim	1000 Surat	
2.				2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik									
					Jumlah Jasa Layanan berlangganan Listrik, Air, Telepon, Transponder	720.000.000,00		1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.01.01.1.03 - Administrasi Umum	1.01.01.1.03.02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Layanan	12 Layanan	
3.				3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor									
					Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	250.000.000,00		1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.01.01.1.03 - Administrasi Umum	1.01.01.1.03.03 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	30 Unit	
4.				6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional									
					Jumlah Unit Mobil Dinas/Operasional yang terpelihara dan Terfasilitasi Perijinannya	100.000.000,00		1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.01.01.1.03 - Administrasi Umum	1.01.01.1.03.06 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Unit Mobil Dinas/Operasional yang diservis dan dipelihara	9 Unit	
5.				8 Penyediaan jasa kebersihan kantor									
					Luas Gedung dan Halaman yang disediakan jasa kebersihan	0,00		1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.01.01.1.03 - Administrasi Umum	1.01.01.1.03.08 - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	jumlah Gedung dan Halaman yang dibersihkan	0 M2	
					Jumlah tenaga kebersihan dan Fasilitas Pendukung kebersihan kantor	865.453.000,00		1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.01.01.1.03 - Administrasi Umum	1.01.01.1.03.08 - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah tenaga kebersihan	12 Orang	
					Jumlah Jenis Bahan dan Alat Kebersihan	100.000.000,00		1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.01.01.1.03 - Administrasi Umum	1.01.01.1.03.14 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Bahan dan Alat Kebersihan	44 Jenis	
6.				9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja									
					Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	0,00		1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.01.01.1.03 - Administrasi Umum	1.01.01.1.03.09 - Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	0 Unit	
7.				10 Penyediaan alat tulis kantor									
					Jumlah jenis ATK yang disediakan	900.000.000,00		1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.01.01.1.03 - Administrasi Umum	1.01.01.1.03.10 - Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	16 Jenis	
8.				11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan									
					Jumlah barang cetakan	1.000.000.000,00		1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.01.01.1.03 - Administrasi Umum	1.01.01.1.03.11 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan	20 Jenis	
					Jumlah penggandaan	0,00		1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.01.01.1.03 - Administrasi Umum	1.01.01.1.03.11 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah penggandaan	0 Lembar	
					Jumlah Jenis Barang Cetak dan yang Disediakan	0,00		1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.01.01.1.03 - Administrasi Umum	1.01.01.1.03.11 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	29 Jenis	
					Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	1.000.000.000,00		1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.01.01.1.03 - Administrasi Umum	1.01.01.1.03.11 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	280000 Bulan	
9.				12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Jumlah Komponen Listrik yang disediakan	250.000.000,00		1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.01.01.1.03 - Administrasi Umum	1.01.01.1.03.12 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen alat pemeliharaan listrik dan genset yang disediakan	15 Buah	
10.				14 Penyediaan peralatan rumah tangga									
					Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	15.000.000,00		1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.01.01.1.03 - Administrasi Umum	1.01.01.1.03.14 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	10 Unit	
11.				15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan									
					Jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	22.000.000,00		1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.01.01.1.03 - Administrasi Umum	1.01.01.1.03.15 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	30 Jenis	
12.				16 Penyediaan bahan logistik kantor									
					Jumlah liter bahan bakar untuk kendaraan operasional	0,00		1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.01.01.1.03 - Administrasi Umum	1.01.01.1.03.16 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah liter bahan bakar untuk kendaraan operasional	0 Liter	
					jumlah mobilitas termasuk tenaga angkat dan turun beras ke kantor	31.650.000,00		1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.01.01.1.03 - Administrasi Umum	1.01.01.1.03.16 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah Pembelian Air Galon	12 Kali	
13.				17 Penyediaan makanan dan minuman									
					Pelaksanaan penyediaan makan dan minum	500.000.000,00		1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.01.01.1.03 - Administrasi Umum	1.01.01.1.03.17 - Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Porsi makan dan minum kegiatan yang tersedia	10 Kegiatan	
					Pelaksanaan makan minum tamu dan rapat	300.000.000,00		1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.01.01.1.03 - Administrasi Umum	1.01.01.1.03.17 - Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Porsi makan dan minum yang tersedia	0 Kali Tahun	
					Pelaksanaan makan minum saat olah raga (hari Jumat)	100.000.000,00		1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.01.01.1.03 - Administrasi Umum	1.01.01.1.03.17 - Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Porsi makan dan minum yang tersedia	48 Kali	
					Tersediannya Makanan dan Minuman	0,00		1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.01.01.1.03 - Administrasi Umum	1.01.01.1.03.17 - Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Porsi makan dan minum yang tersedia	0 Bulan	
					Jumlah orang yang disediakan makan dan minuman	0,00		1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.01.01.1.03 - Administrasi Umum	1.01.01.1.03.17 - Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Porsi makan dan minum yang tersedia	0 Orang	
14.				18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah									
					Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	4.000.000.000,00		1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.01.01.1.03 - Administrasi Umum	1.01.01.1.03.18 - Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	100 Orang	
15.				19 Penyediaan Jasa Pengamanan									
					Pelaksanaan pembayaran insentif bagi tenaga operator dan penjaga X-Ray VIP Room Bandara Sentani	0,00		1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.01.01.1.03 - Administrasi Umum	1.01.01.1.03.01 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa keamanan/security yang dibayarkan	0 Orang Bulan	
					Pelaksanaan pembayaran honor bagi satpam	0,00		1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.01.01.1.03 - Administrasi Umum	1.01.01.1.03.01 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa keamanan/security yang dibayarkan	0 Orang Bulan	
					Pelaksanaan uang makan satpam	40.000.000,00		1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.01.01.1.03 - Administrasi Umum	1.01.01.1.03.01 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa keamanan/security yang dibayarkan	4 Orang Bulan	
					Jumlah tenaga pengamanan	300.000.000,00		1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.01.01.1.03 - Administrasi Umum	1.01.01.1.03.01 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa keamanan/security yang dibayarkan	6 Orang	
16.		2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	À Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	1 Pembangunan rumah jabatan									
					Luas bangunan yang dibangun	0,00						0 M2	
17.				3 Pembangunan gedung kantor									
					Luas bangunan yang dibangun	1.350.000.000,00		1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.01.01.1.03 - Administrasi Umum	1.01.01.1.03.39 - Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Luas bangunan yang dibangun	450 M2	
					Tersedianya desain perencanaan bangunan	0,00		1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.01.01.1.03 - Administrasi Umum	1.01.01.1.03.39 - Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Tersedianya desain perencanaan bangunan	0 Dokumen	
18.				5 Pengadaan kendaraan dinas/operasional									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Jumlah kendaraan yang diadakan	500.000.000,00		1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.01.01.1.03 - Administras Umum	1.01.01.1.03.21 - Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda 4	2 Unit	
					Jumlah kendaraan roda 2	0,00		1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.01.01.1.03 - Administras Umum	1.01.01.1.03.21 - Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda 2	0 Unit	
19.				6 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas									
					Jumlah perlengkapan rumah jabatan	0,00		1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.01.01.1.03 - Administras Umum	1.01.01.1.03.24 - Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah Pengadaan Peralatan	0 Unit	
20.				7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor									
					Jumlah pengadaan perlengkapan	100.000.000,00		1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.01.01.1.03 - Administras Umum	1.01.01.1.03.23 - Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan	70 Unit	
21.				9 Pengadaan peralatan gedung kantor									
					Jumlah peralatan perlengkapan	300.000.000,00		1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.01.01.1.03 - Administras Umum	1.01.01.1.03.25 - Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan/perlengkapan yang diadakan	50 Unit	
22.				10 Pengadaan mebeleur									
					Jumlah mebeleur yang diadakan	1.000.000.000,00		1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.01.01.1.03 - Administras Umum	1.01.01.1.03.26 - Pengadaan Mebeleur	Jumlah mebeleur yang diadakan untuk 3 UPT	50 Unit	
23.				11 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga									
					Jumlah peralatan dan perlengkapan rumah tangga yang diadakan	0,00		1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.01.01.1.03 - Administras Umum	1.01.01.1.03.14 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan dan perlengkapan rumah tangga yang diadakan	0 Unit	
					Jumlah peralatan dan perlengkapan rumah tangga yang diadakan	0,00		1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.01.01.1.03 - Administras Umum	1.01.01.1.03.14 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan dan perlengkapan rumah tangga yang diadakan	0 Set	
24.				22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor									
					Jumlah gedung kantor yang dipelihara	150.000.000,00		1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.01.01.1.03 - Administras Umum	1.01.01.1.03.29 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor	2 Unit	
					belanja sewa	0,00		1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.01.01.1.03 - Administras Umum	1.01.01.1.03.29 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung yang disewa	0 Tahun	
25.				24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional									
					Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	0,00		1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.01.01.1.03 - Administras Umum	1.01.01.1.03.31 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah dan Jenis perlengkapan/peralatan gedung kantor yang dipelihara	0 Unit	
					Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	100.000.000,00		1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.01.01.1.03 - Administras Umum	1.01.01.1.03.31 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang	9 Unit	
					sewa kendaraan	0,00		1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.01.01.1.03 - Administras Umum	1.01.01.1.03.31 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan yang diperbaiki/Service	0 Bulan	
26.				42 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor									
					Terlaksananya rehabilitasi gedung	32.186.200.000,00		1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.01.01.1.03 - Administras Umum	1.01.01.1.03.39 - Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Terlaksananya rehabilitasi gedung	10 M2	
27.				46 Sewa gedung									
					Jumlah gedung kantor yang disewa	300.000.000,00		1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.01.01.1.03 - Administras Umum	1.01.01.1.03.27 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Jumlah rumah jabatan yang terpelihara	1 Unit Tahun	
					Sewa rumah jabatan	0,00		1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.01.01.1.03 - Administras Umum	1.01.01.1.03.27 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Jumlah Rumah Jabatan Yang disewa	0 Unit Tahun	
28.		3 Program peningkatan disiplin aparatur	À Meningkatnya disiplin aparatur	1 Pengadaan mesin/kartu absensi									
					Jumlah Mesin /Kartu Apsensi yang tersedia	0,00		1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.01.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1.01.01.1.04.01 - Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Jumlah Mesin /Kartu Absensi yang tersedia	0 Bh	
29.				2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Jumlah pakaian dinas yang diadakan	920.000.000,00		1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.01.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1.01.01.1.04.02 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas sipil harian	340 Stell	
30.				3 Pengadaan pakaian kerja lapangan									
					Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan	0,00		1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.01.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1.01.01.1.04.03 - Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan	0 Stell	
31.				4 Pengadaan pakaian KORPRI									
					jumlah pakaian KORPRI yang diadakan	300.000.000,00		1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.01.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1.01.01.1.04.04 - Pengadaan Pakaian Korpri	Jumlah pakaian KORPRI yang diadakan	240 Stell	
32.				5 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu									
					Jumlah pakaian khusus yang diadakan	0,00		1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.01.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1.01.01.1.04.05 - Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah pakaian Batik yang diadakan	0 Stell	
33.		4 Program fasilitas pindah/purna tugas PNS	À Meningkatnya kualitas penanganan pindah/purna tugas PND	3 Jumlah pegawai di fasilitasi Pemindahan tugas									
					Jumlah pegawai yang difasilitasi	0,00		1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.01.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1.01.01.1.04.08 - Pemindahan Tugas PNS	Jumlah pegawai yang difasilitasi	0 Orang	
34.		5 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	À Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	1 Pendidikan dan pelatihan formal									
					Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	500.000.000,00		1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.01.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1.01.01.1.04.09 - Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparatur mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	20 Orang	
35.				2 Sosialisasi peraturan perundang-undangan									
					Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	280.000.000,00		1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.01.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1.01.01.1.04.10 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	50 Orang	
36.				3 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan									
					Jumlah peserta bimbingan teknis tentang implementasi peraturan perundang-undangan	475.000.000,00		1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.01.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1.01.01.1.04.11 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta bimbingan teknis tentang implementasi peraturan perundang-undangan	25 Orang	
37.				4 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal									
					Jumlah aparatur yang terlatih	0,00		1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.01.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1.01.01.1.04.11 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	
38.		6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	À Meningkatnya kualitas akuntabilitas OPD	1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD									
					Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	300.000.000,00		1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.01.01.1.02 - Administrasi Keuangan	1.01.01.1.02.06 - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan	3 Laporan	
					Laporan LAKIP SKPD	0,00		1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.01.01.1.01 - Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.01.01.1.01.05 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan LAKIP SKPD	0 Dokumen	
39.				2 Penyusunan laporan keuangan semesteran									
					Jumlah pelaporan keuangan semesteran yang diselesaikan tepat waktu	50.000.000,00		1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.01.01.1.02 - Administrasi Keuangan	1.01.01.1.02.07 - Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Jumlah dokumen laporan	2 Laporan	
40.				4 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun									
					Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	50.000.000,00		1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.01.01.1.02 - Administrasi Keuangan	1.01.01.1.02.09 - Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	1 Laporan	

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41.	Pendidikan	6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	À Meningkatnya kualitas akuntabilitas OPD	5 Penyusunan Renja, RKA dan Perubahan APBD									
					Jumlah dokumen	300.000.000,00		1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.01.01.1.01 - Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.01.01.1.01.01 - Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	5 Dokumen	
42.				10 Forum SKPD Provinsi Papua									
					Jumlah Peserta Forum	0,00		1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.01.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1.01.01.1.04.10 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Forum	0 Orang	
43.				12 Penyusunan RENSTRA									
					Jumlah Dokumen	0,00		1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.01.01.1.01 - Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.01.01.1.01.01 - Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	0 Dokumen	
44.				13 Penyusunan SOP									
					Jumlah Dokumen	0,00		1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.01.01.1.01 - Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.01.01.1.01.04 - Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	0 Dokumen	
45.				14 Peningkatan Kapasitas PPID									
					Jumlah orang	0,00		1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.01.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1.01.01.1.04.09 - Pendidikan dan Pelatihan Formal	Pembinaan Administrasi Kepegawaian	0 Orang	
46.		15 Program Pendidikan Anak Usia Dini	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD; Persentase OAP usia dini yang mengikuti PAUD	58 Pengembangan pendidikan anak usia dini									
					Jumlah PAUD berbasis Bahasa Ibu	0,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	1.01.05.1.02 - Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1.01.05.1.02.03 - Pembinaan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah PAUD yang mendapat pendampingan	0 Unit	
47.				59 Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini									
48.				74 BOP PAUD-SD, PKBM, Pos Yandu Model, TK TUT Wuri Handayani, PAUD Kasih Mama									
					Terfasilitasinya BOP PAUD Binaan	0,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.03 - Pengelolaan Pendidikan Khusus	1.01.02.1.03.44 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Terfasilitasinya BOP PAUD Binaan Provinsi Papua	0 %	
49.				95 Pelatihan dan Pendampingan Bahasa Ibu									
					Terselenggaranya Program Bahasa Ibu di Kabupaten Sasran	0,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.06 - PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	1.01.06.1.01 - Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1.01.06.1.01.07 - Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Provinsi	jumlah tutor mendapatkan pelatihan Bahasa Ibu di Kabupaten Sasran	0 %	
50.				100 Pengadaan alat permainan edukatif (APE) dalam									
51.				122 Apresiasi GTK PAUD Tingkat Provinsi Dan Tingkat Nasional									
					Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD yang Terfasilitasi	0,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.03 - Pengelolaan Pendidikan Khusus	1.01.02.1.03.44 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD yang Terfasilitasi di tingkat Provinsi dan Nasional	0 %	

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
52.	Pendidikan	16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A/ sederajat; Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B/ sederajat ; Angka Putus Sekolah (APTS) SD/MI/Paket A/ sederajat; Angka Putus Sekolah (APTS) SMP/MTs/ sederajat ; Angka Putus Sekolah siswa OAP pada jenjang SD; Angka Putus Sekolah siswa OAP pada jenjang SMP; Cakupan ruang kelas sekolah pendidikan SD/MI dengan kondisi bangunan baik; Cakupan ruang kelas sekolah pendidikan SMP/MTs dengan kondisi bangunan baik; Persentase siswa kelas 1, 2 dan 3 yang naik kelas ; Rasio OAP yang mengikuti kelas kecil; Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar; Rasio guru/murid sekolah pendidikan menengah pertama; Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar; Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan menengah pertama	11 Penambahan Ruang Kelas SD dan Perpustakaan Model Gerbangmas									
53.				123 Pelatihan Guru SMP Gerbangmas Hasrat Papua									
					Jumlah Guru SMP Gerbangmas yang terfasilitasi	2.600.000.000,00						125 Orang	
54.				124 Pelatihan Guru SD Gerbangmas Hasrat Papua									
					Jumlah Guru SD Gerbangmas yang terfasilitasi	0,00						0 Orang Kegiatan	
55.		17 Program Pendidikan Menengah Atas	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C/ sederajat; Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C/ sederajat ; Angka Putus Sekolah (APTS) SMA/SMK/MA/Paket C/ sederajat ; Cakupan ruang kelas sekolah pendidikan SMA/SMK/MA dengan kondisi bangunan baik; Cakupan siswa lulusan OAP yang diterima di PTN; Persentase siswa SMA/SMK OAP yang lulus dengan nilai UAN di atas rata-rata; Rasio guru/murid sekolah pendidikan menengah atas/kejuruan; Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan menengah atas/kejuruan	1 Pembangunan Sekolah Unggulan Berasrama									
					Jumlah wilayah adat	0,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1.01.02.1.01.13 - Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah sekolah berasrama yang di bangun	0 Kabupaten	
56.				2 Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah									
57.				3 Penambahan ruang kelas sekolah									
					Jumlah Unit Sekolah Yang Terfasilitasi Ruang Kelas	0,00						0 Unit	
58.				4 Penerapan dan Pelatihan MBS SMA									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Jumlah SMA yang terfasilitasi MBS	0,00						0 Sekolah	
59.				6 Lomba Debat Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia dan Bahasa Jerman									
					Jumlah Siswa SMA yang mengikuti Lomba Debat Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia	0,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1.01.02.1.01.49 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa SMA yang mengikuti Lomba Debat Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia	0 Orang	
60.				9 Pengembangan Materi Belajar Mengajar Menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi									
					Jumlah Materi yang menggunakan Teknologi Informasi	0,00						0 Kegiatan	
61.				10 Pembayaran Honor Guru Kontrak SMA									
					Jumlah Tenaga Kontrak SMA yang terfasilitasi	0,00						0 Orang	
62.				11 Honor Guru Kontrak SMA/SMK/SLB/PKLLK									
					Jumlah Guru SMA yang mendapatkan insentive	0,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	1.01.04.1.01 - Pemindehan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi	1.01.04.1.01.02 - Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah Guru SMA, SMK dan SLB yang mendapatkan insentif	0 Orang	
63.				12 Lomba Kompetensi Siswa SMA Tingkat Prov dan Tk.Nasional									
					Jumlah siswa SMA yang mengikuti Lomba Kompetensi Tk.Provinsi dan Tk.Nasional	0,00						0 Orang	
64.				13 Sleksi dan Pembekalan Guru Berprestasi SMA									
					Jumlah Guru Berprestasi yang terfasilitasi	0,00						0 Orang	
65.				14 Pelatihan Guru Bidang Studi SMA									
					Jumlah Guru yang terfasilitasi Pelatihan	0,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1.01.02.1.01.51 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Guru Bidang Studi yang terfasilitasi Pelatihan	0 Orang	
66.				15 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa									
					Jumlah siswa SMA yang mendapatkan alat tulis siswa	0,00						0 Orang	
67.				19 Pengadaan mebeluer sekolah									
					Jumlah SMA yang terfasilitasi pengadaan meubilair sekolah	0,00						0 Lembaga	
68.				22 Pengadaaan sarana mobilitas sekolah									
					Jumlah sekolah yang terfasilitasi sarana prosarana SMK	0,00						0 Lembaga	
69.				28 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga									
					Jumlah SMA yang terfasilitasi pemeliharaan	0,00						0 Lembaga	
70.				42 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah									
					Jumlah ruma guru SMA yang terfasilitasi	0,00						0 Unit	
71.				46 Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan praktikum sekolah									
					Jumlah sekolah yang terfasilitasi rehab	0,00						0 Lembaga	
72.				62 Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu									
					Jumlah siswa SMA tidak mapu terfasilitasi	0,00						0 Orang	
73.				65 Pengembangan materi belajar mengajar dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Jumlah ruma guru SMA yang terfasilitasi	0,00						0 Orang	
74.				68 Penyelenggaraan akreditasi sekolah menengah									
					Jumlah SMA yang terakreditasi Sekolah Menengah	0,00						0 Lembaga	
75.				69 Monitoring, evaluasi dan pelaporan									
					Jumlah Sekolah yang terfasilitasi MONEV SMA	0,00						0 Lembaga	
76.				81 Pelatihan Kepala Tata Usaha Sekolah SMA									
					Jumlah Kepala Tata Usaha SMA yang Mengikuti LKT	0,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1.01.02.1.01.51 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Kepala Tata Usaha SMA yang mendapat pelatihan	0 Orang	
77.				84 Distribusi dan Mutasi GTK Jenjang Pendidikan Menengah									
					Jumlah Sekolah yang terfasilitasi Distribusi dan Mutasi GTK SMA	0,00						0 Lembaga	
78.				86 Pembangunan Ruang Kelas Baru (SMA)									
					Jumlah SMA yang terfasilitasi RKB (SMA)	0,00						0 Lembaga	
79.				88 DAK REGULER SMA									
					Terbangunnya ruang kelas baru, laboratorium IPA, tersediannya peralatan IPA	0,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1.01.02.1.01.02 - Penambahan Ruang Kelas Baru	jumlah ruang kelas baru, laboratorium IPA, tersediannya peralatan IPA yang terbangun	0 Lokasi	
80.				89 Kajian dan Pengembangan kurikulum muatan lokal									
81.				105 pelatihan penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) SMA									
					Jumlah guru SMA yang mengikuti pelatihan penyusunan RPP	0,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1.01.02.1.01.51 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah guru SMA yang mengikuti pelatihan penyusunan RPP	0 Orang	
82.				106 pelatihan penyusunan rencana kerja anggaran sekolah (RKAS) SMA									
					Jumlah guru dan tenaga kependidikan SMA yang mengikuti pelatihan penyusunan RKAS	0,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1.01.02.1.01.52 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah guru dan tenaga kependidikan SMA yang mengikuti pelatihan penyusunan RKAS	0 Orang	
83.				107 pelatihan manajemen berbasis sekolah (MBS) SMA									
					jumlah kepala sekolah/wakil kepala sekolah HUMAS SMA yang mengikuti pelatihan MBS	0,00						0 Orang	
84.				108 pelaksanaan evaluasi diri sekolah (EDS) SMA									
					Jumlah sekolah SMA yang di evaluasi	0,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1.01.02.1.01.52 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah SMA melaksanakan evaluasi diri sekolah	0 Sekolah	
85.				109 DAK Reguler SMA (Utang TA 2017)									
					Jumlah guru pada satuan pendidikan SMA mengikuti pelatihan kurikulum nasional	0,00						0 Orang	
86.				110 Lomba Kompetensi Siswa SMA									
					Jumlah siswa SMA yang mengikuti lomba O2SN tingkat Provinsi dan Nasional	0,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1.01.02.1.01.49 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah siswa SMA yang mengikuti lomba O2SN tingkat Provinsi dan Nasional	0 Orang	
87.				111 lomba OSN SMA									
					Jumlah siswa SMA yang mengikuti lomba OSN tingkat Provinsi dan Nasional	0,00						0 Orang	
88.				112 Lomba FLS2N SMA									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Jumlah siswa SMA yang mengikuti lomba FLS2N tingkat Provinsi dan Nasional	0,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1.01.02.1.01.49 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah siswa SMA yang mengikuti lomba FLS2N tingkat Provinsi dan Nasional	0 Orang	
89.				113 Lomba LCC 4 pilar SMA									
					Jumlah siswa SMA yang mengikuti Lomba LCC 4 pilar SMA tingkat Provinsi dan Nasional	0,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1.01.02.1.01.49 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah siswa SMA yang mengikuti Lomba LCC 4 pilar SMA tingkat Provinsi dan Nasional	0 Orang	
90.				114 Lomba debat Bahasa Indonesia, Inggris dan Jerman SMA									
					Jumlah siswa SMA yang mengikuti Lomba debat Bahasa Indonesia, Inggris dan Jerman SMA tingkat Provinsi dan Nasional	0,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1.01.02.1.01.49 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah siswa SMA yang mengikuti Lomba debat Bahasa Indonesia, Inggris dan Jerman SMA tingkat Provinsi dan Nasional	0 Orang	
91.				115 Lomba Adiwiyata SMA									
					Jumlah Sekolah SMA yang terjaring mewakili lomba adiwiyata tingkat nasional	0,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1.01.02.1.01.52 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah SMA yang terjaring mewakili lomba adiwiyata tingkat nasional	0 Sekolah	
92.				116 Lomba Karya Ilmiah siswa SMA									
					Jumlah siswa SMA yang mengikuti Lomba Karya Ilmiah siswa SMA tingkat Provinsi dan Nasional	0,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1.01.02.1.01.49 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah siswa SMA yang mengikuti Lomba Karya Ilmiah siswa SMA tingkat Provinsi dan Nasional	0 Orang	
93.				117 Penyediaan Bantuan Biaya Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA di lima wilayah adat									
					Jumlah Kepala Sekolah SMA di lima wilayah adat yang mengikuti musyawarah kerja kepala sekolah	0,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1.01.02.1.01.51 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Kepala Sekolah SMA di lima wilayah adat yang mengikuti musyawarah kerja kepala sekolah	0 Orang	
94.				118 Pembangunan Sekolah berpola asrama di lima wilayah adat pembangunan									
					Jumlah SMA berpola asrama yang terbangun	0,00						0 Sekolah	
95.				119 Pengadaan alat laboratorium IPA dan bahan Lab Kimia									
					Jumlah peralatan Lab IPA dan Kimia di lima sekolah terfasilitasi	0,00						0 Unit	
96.				120 Pembangunan Ruang Guru / Kantor SMA									
					Jumlah ruang guru / kantor yang terbangun	0,00						0 Ruang	
97.				121 Pembayaran Pekerjaan DAK SMA Tahun 2017									
					Jumlah Sekolah yang menerima DAK SMA Tahun 2017	0,00						0 Sekolah	
98.				122 Pembangunan Pagar Alam SMA Lapago									
					Jumlah Pagar SMA Lapago yang terbangun	0,00						0 Unit	
99.				123 DAK FISIK AFIRMASI									
					Jumlah Operator yang terfasilitasi	0,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1.01.02.1.01.03 - Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru yang terbangun	0 Orang	
100.				127 Pengembangan Kelas Khusus (Kurikulum, Kualitas Guru, Seleksi Siswa Baru)									
					Jumlah Guru dan Kelas Khusus yang terfasilitasi	0,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	1.01.03.1.01 - Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	1.01.03.1.01.04 - Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah kelas khusus yang dikembangkan	0 %	
101.				128 Penyusunan Kurikulum Latihan Guru, Kepala Sekolah									
					Jumlah Guru dan Kepala Sekolah yang Terfasilitasi	0,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	1.01.03.1.01 - Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	1.01.03.1.01.01 - Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Guru dan Kepala Sekolah yang Terfasilitasi	0 %	

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
102.	Pendidikan	18 Program Pendidikan Non Formal	Angka Melek Huruf penduduk OAP; Jumlah PKBM aktif; Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15- 59 tahun; Persentase angka melek aksara penduduk umur >=15 tahun	4 Pengembangan pendidikan keaksaraan									
					Meningkatnya Pengemangan Pendidikan Keaksaraan	0,00						0 %	
103.				22 Rapat Koordinasi Tim Pengendali Percepatan Tuntas Buta Aksara Provinsi									
					Jumlah warga belajar mendapatkan pendidikan keaksaraan tuntas buta aksara	0,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	1.01.05.1.01 - Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1.01.05.1.01.02 - Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah warga belajar mendapatkan pendidikan keaksaraan tuntas buta aksara	0 Orang	
104.				74 Penguatan PKBM dan Peningkatan Keaksaraan									
					Jumlah PKBM yang diintervensi dan Jumlah Peserta Didik yang menjadi Melek Aksara	0,00						0 Orang	
105.				75 Penguatan KKN Tematik untuk Pemberantasan Buta Aksara									
					Jumlah KKN Tematik Buta Aksara yang dibina	0,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	1.01.05.1.02 - Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1.01.05.1.02.03 - Pembinaan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah kelompok belajar yang mendapatkan pembinaan melalui KKN Tematik Buta Aksara	0 Kelompok	
106.		19 Program Pendidikan Luar Biasa	APK peserta didik SLB tingkat SD (orang); APK peserta didik SLB tingkat SMA (orang); APK peserta didik SLB tingkat SMP (orang); Cakupan Kabupaten/Kota yang memiliki SLB yang terakreditasi; Cakupan jenis pelayanan SLB terhadap penduduk penyandang disabilitas; Persentase lulusan SLB yang terserap dalam lapangan pekerjaan	1 Pembangunan gedung sekolah									
					Jumlah Gedung yang dibangun	0,00						0 Unit	
107.				56 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik									
					Jumlah Tenaga Pendidik	0,00						0 Orang	
108.				57 Pelatihan penyusunan kurikulum									
					Jumlah Yang Mengikuti Pelatihan	0,00						0 Orang	
109.				61 Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa									
					Jumlah Siswa Yang Dilibatkan	0,00						0 Orang	
110.				68 Pengembangan sekolah berpola asrama 9 tahun									
					Jumlah Sekolah yang dikembangkan	0,00						0 Unit	
111.				69 Pengembangan pendidikan SMA dan SMK berpola asrama									
					Jumlah Asrama yang dikembangkan	0,00						0 Unit	

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
112.	Pendidikan	20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Cakupan Guru SMK pemegang sertifikat keahlian khusus ; Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV; Persentase guru SD yang bersertifikat pendidik ; Persentase guru SMA/SMK yang bersertifikat pendidik ; Persentase guru SMLB yang bersertifikat pendidik ; Persentase guru SMP yang bersertifikat pendidik ; Persentase guru TK yang bersertifikat pendidik	1 Pelaksanaan sertifikasi pendidik									
					Jumlah Pendidik yang bersertifikasi	2.600.000.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	1.01.04.1.01 - Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi	1.01.04.1.01.01 - Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik yang bersertifikasi	220 Orang	
113.				2 Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan									
					Jumlah pendidik yang diuji kompetensi	938.500.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	1.01.04.1.01 - Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi	1.01.04.1.01.01 - Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah pendidik yang diuji kompetensi	200 Orang	
114.				4 Penyediaan Bantuan Biaya MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran)									
					Jumlah Kelompok Yang Menerima Bantuan	1.380.750.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	1.01.04.1.01 - Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi	1.01.04.1.01.01 - Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah MGMP Menerima Bantuan	12 Kelompok	
115.				17 Pembekalan dan Pengiriman Guru, Kepala Sekolah, Pengawas dan Tenaga Kependidikan Lainnya Yang Berprestasi dan Berdedikasi									
					Jumlah Guru dan Kepsek SMA/SMK dan PKLK Berprestasi dan Berdedikasi yang terfasilitasi	704.850.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	1.01.04.1.01 - Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi	1.01.04.1.01.02 - Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah Guru dan Kepsek SMA/SMK dan PKLK Berprestasi dan Berdedikasi yang terfasilitasi	145 Orang	
116.				18 SERTIFIKASI GURU DAN PROGRAM KEAHLIAN SMK									
					Jumlah Guru SMK yang mengikuti sertifikasi keahlian	2.900.350.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1.01.02.1.02.43 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Guru SMK yang mengikuti sertifikasi keahlian	600 Orang	
117.				22 Magang Guru Produktif SMK									
					Magang Guru Produktif SMK	0,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1.01.02.1.02.43 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Magang Guru Produktif SMK	0 Orang Kegiatan	
					Jumlah Guru yang mengikuti Magang	3.883.690.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1.01.02.1.02.43 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Guru Produktif SMK yang mengikuti Magang	80 Orang	
118.				28 Penguatan dan Sertifikasi Guru SMA/SMK/PKLK									
					Jumlah Kualitas dan Mutu Guru yang terfasilitasi	5.498.021.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	1.01.04.1.01 - Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi	1.01.04.1.01.01 - Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah Kualitas dan Mutu Guru yang terfasilitasi	384 Orang	
119.				30 Workshop Musyawarah Kompetensi Kepala Sekolah SMA/SMK									
					Jumlah Guru yang diadakan	1.504.800.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	1.01.04.1.01 - Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi	1.01.04.1.01.01 - Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah kepala sekolah mengikuti workshop	40 Orang	

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
120.	Pendidikan	20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Cakupan Guru SMK pemegang sertifikat keahlian khusus ; Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV; Persentase guru SD yang bersertifikat pendidik ; Persentase guru SMA/SMK yang bersertifikat pendidik ; Persentase guru SMLB yang bersertifikat pendidik ; Persentase guru SMP yang bersertifikat pendidik ; Persentase guru TK yang bersertifikat pendidik	31 Pengembangan Sistem Pengendalian Disiplin dan Kinerja Guru TPP									
					Jumlah Sekolah yang terfasilitasi Jaringan Internet	1.000.000.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	1.01.04.1.01 - Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi	1.01.04.1.01.01 - Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah aplikasi pengendalian disiplin dan kinerja guru yang terbangun	385 Sekolah	
121.				32 Bimbingan Tehnis Operator Dapodik/UNPTK/SIMTUNJANGAN									
					Jumlah pembelajaran jarak jauh	0,00						0 Orang Paket	
122.				38 Insentif Guru Honor									
					Jumlah Guru Honor yang mendapatkan Insentif	35.000.000.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1.01.02.1.01.50 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Guru Honor SMA, SMK dan SLB yang mendapatkan Insentif	700 Orang	
123.				39 Pemetaan Guru dan Tenaga Kependidikan SMA/SMK/PKPK									
					Jumlah anggota Penilai angka Kredit	1.860.249.500,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	1.01.04.1.01 - Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi	1.01.04.1.01.01 - Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah guru dan tenaga kependidikan SMA, SMK dan SLB yang dipetakan	87 Orang	
124.		22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Cakupan Kurikulum Muatan Lokal Papua yang dikembangkan dalam proses pembelajaran; Cakupan PBM Sekolah yang di Supervisi dan di Monitoring; Cakupan model Pendidikan Sekolah Kontekstual Papua yang dikembangkan; Jumlah kemitraan pendidikan yang dikembangkan dengan lembaga sosial dan agama	1 Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan									
					Meningkatnya Akuntabilitas Layanan Pembangunan Pendidikan	0,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	1.01.05.1.01 - Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1.01.05.1.01.02 - Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah dokumen Bidang Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip yang mendapatkan evaluasi	0 %	
125.				2 Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan									
					Meningkatnya Mutu Layanan Kelembagaan Bidang Pendidikan	0,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	1.01.05.1.01 - Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1.01.05.1.01.02 - Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah lembaga yang bekerjasama pada Bidang Pendidikan	0 %	
126.				4 Sosialisasi dan advokasi berbagai peraturan pemerintah di bidang pendidikan									
					Meningkatnya Peraturan Pemerintah dibidang pendidikan yang terfasilitasi	0,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	1.01.05.1.01 - Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1.01.05.1.01.02 - Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah peraturan pemerintah yang disosialisasikan	0 %	
127.				7 Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan									
					Meningkatnya mutu informasi manajemen Pendidikan	0,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	1.01.05.1.01 - Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1.01.05.1.01.02 - Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah aplikasi yang dikembangkan melalui Data Dapodik	0 %	
128.				24 Pengembangan Pusat Sumber Belajar / ICT Centre									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Meningkatnya Mutu Pembelajaran Siswa Menggunakan ICT	0,00						0 %	
129.				57 Pelaksanaan Ujian Nasional dan Ujian Sekolah									
					Meningkatnya Mutu Lulusan Siswa Pendidikan Dasar dan Menengah	0,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1.01.02.1.01.47 - Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	Jumlah sekolah yang menerapkan ujian sekolah online	0 %	
130.				58 Pelatihan dan Pendampingan Sekolah Model ICT									
					Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Pada Latihan ICT	0,00						0 %	
131.				59 Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)									
					Meningkatnya Mutu Pembelajaran Masyarakat	0,00						0 %	
132.				60 Lomba KIHAJAR Tk. Provinsi dan Nasional									
					Meningkatnya Mutu Pembelajaran Siswa (KHAJAR)	0,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1.01.02.1.01.47 - Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	Jumlah siswa yang mengikuti lomba KIHAJAR	0 %	
133.				64 Peningkatan tenaga perencanaan dan ICT									
					Meningkatnya mutu pembelajaran studio edukasi	0,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	1.01.05.1.02 - Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1.01.05.1.02.03 - Pembinaan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah tenaga perencana dan ICT mendapatkan pelatihan	0 %	
134.				66 Pengelolaan PAK (pengelolaan angka kredit) guru, pengawas sekolah, dan pamong belajar									
					Meningkatnya Kinerja Guru Pengawas dan Pamong Belajar yang terfasilitasi	0,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	1.01.04.1.01 - Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi	1.01.04.1.01.01 - Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah Angka Kredit yang dihasilkan	0 %	
135.				76 Pengembangan Website Pendidikan									
					Terfasilitasinya Pengembangan Web Pendidikan	0,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	1.01.05.1.01 - Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1.01.05.1.01.02 - Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah modul yang dikembangkan di website	0 %	
136.				80 Supervisi dan Monitoring PBM di Sekolah									
					Terselenggaranya Supervisi dan Monitoring Sekolah	0,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	1.01.05.1.01 - Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1.01.05.1.01.02 - Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah sekolah yang mendapatkan Supervisi dan Monitoring	0 %	
137.				98 Pengelolaan Personil, Pendanaan Prasarana dan Dokumen SMA SMK									
					Jumlah Dokumen Pengalihan Personil, Pendanaan dan sarana Prasarana Pendidikan Menengah yang Terfasilitasi	1.000.000.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1.01.02.1.01.52 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Dokumen Pengalihan Personil, Pendanaan dan sarana Prasarana Pendidikan Menengah yang Terfasilitasi	269 Dokumen	
138.				99 Rapat kerja kepala sekolah SMA, SMK dan PLB di 5 Wilayah Adat									
					Jumlah Kepala Sekolah yang mengikuti rapat kerja kepala sekolah	0,00						0 Orang	
139.				101 Pelatihan pengelolaan administrasi kepegawaian, Keuangan dan aset bagi kepala tata usaha/Bendahara gaji SMA, SMK dan SLB									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Jumlah Ka.TU/Bendahara Gaji SMA, SMK dan SLB yang mengikuti pelatihan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan dan aset	0,00						0 Orang	
140.				102 Biaya Operasi Sekolah									
					Jumlah sekolah terfasilitasi biaya operasional	0,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1.01.02.1.01.45 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah siswa SMA, SMK dan PLB yang terfasilitasi biaya operasional	0 Sekolah	
141.				103 Beasiswa untu anak asli Papua pada SMA dan SMK									
					Jumlah siswa OAP SMA dan SMK yang mendapat bantuan beasiswa	0,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1.01.02.1.01.45 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah siswa Orang Asli Papua (JAP) SMA dan SMK , SLB yang mendapat bantuan beasiswa	0 Orang	
142.				104 Pengadaan perangkat komputer penunjang UNBK									
					Jumlah perangkat komputer penunjang UNBK	0,00						0 Unit	
143.				105 Penyediaan Layanan ICT mendukung PPDB Online									
					Jumlah layanan ICT yang terfasilitasi	0,00						0 Unit	
144.				106 Penyediaan Biaya Penyusunan Peraturan Gubernur Tentang Tata Kelola Pendidikan SMA, SMK dan SLB									
					Jumlah dokumen pergub yang terfasilitasi	0,00						0 Dokumen	
145.				107 Penyediaan Biaya Penyelesaian Aset Sekolah (P3D)									
					Jumlah asset yang sudah diverifikasi administrasi dan yang belum di verifikasi secara faktual	0,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	1.01.05.1.01 - Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1.01.05.1.01.01 - Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah asset yang sudah diverifikasi administrasi dan yang belum di verifikasi secara faktual	0 Berkas	
146.				108 Fasilitasi pembiayaan akreditasi sekolah SMA dan SMK									
					Jumlah SMA dan SMK yang memenuhi standar prasarana	0,00						0 Sekolah	
147.				110 Pengelolaan barang dan jasa dinas									
					Jumlah dokumen kontrak PJB yang terfasilitasi	0,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	1.01.05.1.01 - Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1.01.05.1.01.02 - Pengendaliar Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah dokumen kontrak Pengadaan Langsung yang terfasilitasi	0 Dokumen	
148.				111 Pelaksanaan RAKOR dan Sosialisasi USBN dan UNBK									
					Jumlah Peserta yang mengikut Ujian Nasional dan Ujian Sekolah yang terfasilitasi	0,00						0 Orang	
149.				112 Pelatihan Teknis Siswa/ Petugas Volunteer PON XX di Kota Penyelenggara									
					Jumlah Tenaga Volunteer yang terlatih	0,00						0 Orang	
150.				113 Biaya Operasional Pendidikan dan Biaya Personalia Peseta Didik Orang Asli Papua SMA/SMK/PLB									
					Jumlah Peserta Didik OAP yang terfasilitasi	0,00						0 Orang	
151.				114 Pengelolaan Buletin/Majalah Pendidikan Papua									
					Jumlah Informasi Pendidikan yang Terfasilitasi	300.000.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	1.01.05.1.02 - Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1.01.05.1.02.01 - Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Informasi Pendidikan yang Terfasilitasi	50 Buah	
152.				115 Pelayanan Terpadu Pendidikan									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Jumlah Pelayanan Publik Terfasilitasi Pendidikan	800.000.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	1.01.05.1.01 - Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1.01.05.1.01.02 - Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Pelayanan Pendidikan kepada Publik yang Terfasilitasi	12 %	
153.				116 Pelayanan Kenaikan Pangkat									
					Jumlah ASN yang Terfasilitasi Pelayanan Kenaikan Pangkat	0,00						0 %	
154.				117 Pengelolaan Sistem Informasi Bidang Kepegawaian									
					Jumlah ASN Yang Terfasilitasi Informasi Kepegawaian	0,00						0 %	
155.				118 Pendampingan Pengelolaan Keuangan									
					Jumlah Pengelolaan Keuangan Yang Terfasilitasi	0,00						0 %	
156.				119 Pengelolaan Pelayanan Gaji Guru SMA/SMK									
					Jumlah Guru SMA/SMK yang terfasilitasi pembayaran Gaji	0,00						0 %	
157.		26 Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus	APM pendidikan khusus; Cakupan siswa lulus Sekolah Luar Biasa; Capaian Sekolah Program Khusus yang terbina; Capaian Siswa peserta ADEM/ADIK yang difasilitasi; Capaian peserta program afirmasi pendidikan yang difasilitasi; Rasio kecukupan rombel terhadap siswa SLB	2 Pembinaan dan Pengembangan PK/PLK									
					Jumlah siswa ADEM dan ADIK yang terfasilitasi bantuan study	3.647.900.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.03 - Pengelolaan Pendidikan Khusus	1.01.02.1.03.46 - Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah siswa ADEM dan ADIK yang terfasilitasi bantuan study	500 Orang	
158.				25 Makan dan Minum Siswa SMA N 3 dan SMANKOR									
					Jumlah Siswa SMA Khusus yang terfasilitasi makan dan minum siswa	10.997.400.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.03 - Pengelolaan Pendidikan Khusus	1.01.02.1.03.51 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Siswa SMA N 3 dan SMANKOR yang terfasilitasi makanan dan minuman	455 Orang	
159.				26 Biaya Operasional KPG, SMA N 3 Buper dan SMA N Keberbakatan Olahraga									
					Jumlah KPG, SMA N 3 Buper dan SMAN Keberbakatan Olahraga Mendapatkan Biaya Operasional	2.000.000.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.03 - Pengelolaan Pendidikan Khusus	1.01.02.1.03.44 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah KPG, SMA N 3 Buper dan SMAN Keberbakatan Olahraga Mendapatkan Biaya Operasional	5 Sekolah	
160.				28 Biaya Pelatihan Bahasa Inggris									
					Jumlah Guru yang terlatih bahasa inggris	0,00						0 Orang	
161.				50 Pembinaan Siswa SMANKOR Jayapura Mengikuti Kejuaraan									
					Jumlah siswa / atlet per cabor di SMANKOR mengikuti kejuaraan dan Turnamen pelajar tingkat nasional	1.000.000.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.03 - Pengelolaan Pendidikan Khusus	1.01.02.1.03.48 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah siswa / atlet per cabor di SMANKOR mengikuti kejuaraan dan Turnamen pelajar tingkat nasional	20 Orang	
162.				52 Pelaksanaan Lomba FLSN, O2SN Gebyard dan Pramuka SLB									
					Jumlah siswa SMA yang mengikuti lomba FLS2N, O2SN Gebyard dan Pramuka SLB tingkat Provinsi dan Nasional	1.100.000.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.03 - Pengelolaan Pendidikan Khusus	1.01.02.1.03.48 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah siswa SMA yang mengikuti lomba FLS2N, O2SN Gebyard dan Pramuka SLB tingkat Provinsi dan Nasional	100 Orang Kegiatan	
163.				69 pembinaan (7) atlet olahraga berkuda									
					Jumlah Siswa SMA olahraga Berkuda terfasilitasi bantuan	0,00						0 Orang	
164.				70 pelatihan dan pendampingan tutor kurikulum bahasa Ibu PAUD model di 10 lembaga									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Jumlah Tutor PAUD model yang mengikuti pelatihan dan pendampingan Tutor Kurikulum bahasa Ibu	0,00						0 Orang	
165.				71 penyediaan biaya operasional PAUD bahasa Ibu Paud Model di 10 lembaga									
					Jumlah paud model yang terfasilitasi biaya operasional sekolah	638.050.000,00						10 Sekolah	
166.				72 Fasilitasi biaya lomba apresiasi GTK PAUD tingkat nasional									
					Jumlah Tutor PAUD yang mengikuti lomba apresiasi tingkat nasional	0,00						0 Orang	
167.				73 Fasilitasi lomba O2SN SD tk Provinsi									
					Jumlah siswa SD yang terfasilitasi lomba O2SN tingkat Provinsi	1.802.567.070,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.03 - Pengelolaan Pendidikan Khusus	1.01.02.1.03.48 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah siswa SD yang terfasilitasi lomba O2SN tingkat Provinsi	100 Orang	
168.				74 Fasilitasi Lomba OSN SD tk Provinsi									
					Jumlah siswa SD yang terfasilitasi lomba OSN tingkat Provinsi	1.500.000.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.03 - Pengelolaan Pendidikan Khusus	1.01.02.1.03.48 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah siswa SD dan SMP yang terfasilitasi lomba OSN tingkat Nasional	100 Orang	
169.				75 Pengadaan dan Pembelian Buku Panduan Kurikulum Muatan Lokal									
					Jumlah siswa SMP yang terfasilitasi lomba O2SN tingkat Provinsi	0,00						0 Orang	
170.				76 Fasilitasi Lomba OSN SMP tk Provinsi									
					Jumlah siswa SMP yang terfasilitasi lomba OSN tingkat Provinsi	1.000.000.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.03 - Pengelolaan Pendidikan Khusus	1.01.02.1.03.48 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah siswa SMP yang terfasilitasi lomba OSN tingkat Provinsi	100 Orang	
171.				77 Pelaksanaan Evaluasi diri sekolah (EDS) SLB									
					Jumlah sekolah SLB yang di evaluasi	0,00						0 Sekolah	
172.				78 pengadaan peralatan latihan dan bertanding 8 CABOR untuk siswa SMANKOR									
					Jumlah peralatan dan latihan SMANKOR terfasilitasi	1.000.000.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.03 - Pengelolaan Pendidikan Khusus	1.01.02.1.03.40 - Pengadaan Alat Praktis dan Peraga peserta didik	Jumlah peralatan latihan SMANKOR yang diadakan	50 Alat	
173.				79 Pengembangan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus									
					Jumlah KPG yang di Revitalisasi	2.000.000.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.03 - Pengelolaan Pendidikan Khusus	1.01.02.1.03.08 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah KPG yang di Revitalisasi	1 Unit	
174.		46 Program Pendidikan Menengah Kejuruan	Capaian SMK yang dikembangkan sesuai dengan potensi 5 Wilayah Adat ; Persentase Anak Asli Papua penerima Beasiswa Pendidikan Jenjang SMK	1 Lomba Ketrampilan Siswa (LKS-SMK)									
					Meningkatnya Siswa SMK yang mengikuti Lomba LKS SMK	0,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1.01.02.1.01.49 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Meningkatnya Siswa SMK yang mengikuti Lomba LKS SMK	0 %	
					Jumlah siswa yang mengikuti lomba LKS SMK	2.718.217.500,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1.01.02.1.01.49 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah siswa yang mengikuti lomba LKS SMK	100 Orang	
175.				2 Magang Guru Produktif dan Siswa									
					Meningkatnya Magang Guru Produktif yang terfasilitasi	0,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1.01.02.1.02.43 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Meningkatnya Magang Guru Produktif yang terfasilitasi	0 %	
176.				4 TOT Master Trainer Guru SMK									
					Meningkatnya Pelatihan Guru SMK yang terfasilitasi	0,00						0 %	

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
177.	Pendidikan	46 Program Pendidikan Menengah Kejuruan	Capaian SMK yang dikembangkan sesuai dengan potensi 5 Wilayah Adat ; Persentase Anak Asli Papua penerima Beasiswa Pendidikan Jenjang SMK	17 Penyediaan Beasiswa bagi Anak Asli Papua SMK									
					Ketersediaan Beasiswa Anak SMK Bagi Keluarga Tidak Mampu	0,00						0 %	
178.				18 Lomba Debat Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia									
					Meningkat Sasiswa SMK yang mengikuti Lomba Debat Bahasa	500.000.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1.01.02.1.02.41 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Meningkat Sasiswa SMK yang mengikuti Lomba Debat Bahasa	100 %	
179.				20 Sertifikasi Siswa SMK									
					Siswa SMK yang terfasilitasi sertifikasi	0,00						0 %	
180.				21 Penerapan dan Pelatihan MBS SMK									
					Meningkatnya Penerapan MBS SMK yang terfasilitasi	665.800.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1.01.02.1.02.45 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Meningkatnya Penerapan MBS SMK yang terfasilitasi	100 %	
181.				30 TOT Penyusunan Kurikulum SMK									
					Jumlah Pelatihan Penyusunan KTSP SMK	1.000.000.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1.01.02.1.02.43 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah guru SMK yang terlatih menjadi tutor	138 Orang	
182.				31 Pembinaan Musyawarah Kelompok Kerja Kepala Sekolah SMK									
					Jumlah Guru SMK yang mengikuti latihan MKKS	0,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1.01.02.1.02.43 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Guru SMK yang mengikuti latihan MKKS	0 Orang	
183.				33 Pengadaan Meubilair Sekolah									
					Jumlah Sekolah Yang Terfasilitasi Meubilair SNK	0,00						0 Unit Kerja	
184.				39 Penyediaan BOMSDA untuk siswa SMK									
					Jumlah SMK yang terfasilitasi BOMSDA	0,00						0 Peserta	
185.				41 Penyediaan Waktu Materikulasi Siswa OAP di Kelas Awal SMK									
					Terlayannya Siswa OAP masuk 7 SMK Melalui Pola Matrikulasi	0,00						0 %	
					Terselenggaranya siswa OAP yang terfasilitasi	0,00						0 Orang	
186.				47 Revitalisasi Kajian Kurikulum SMK di lima Wilayah Adat									
					Tersusnya Dokumen Kajian Kurikulum 5 SMK berbasis Potensi Lokal	0,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	1.01.03.1.01 - Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	1.01.03.1.01.04 - Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Tersusnya Dokumen Kajian Kurikulum 5 SMK berbasis Potensi Lokal	0 Dokumen	
187.				49 Penyelenggaraan Akreditasi Lembaga Kursus Keterampilan									
					Jumlah kecukupan akreditasi lembaga kursus yang terakreditasi	0,00						0 Unit	
188.				54 Lomba O2SN SMK									
					Jumlah siswa SMK yang mengikuti lomba O2SN tingkat Provinsi dan Nasional	800.000.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1.01.02.1.02.41 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah siswa SMK yang mengikuti lomba O2SN tingkat Provinsi dan Nasional	100 Orang	
189.				55 Lomba OSN SMK									
					Jumlah siswa SMK yang mengikuti lomba OSN tingkat Provinsi dan Nasional	0,00						0 Orang	
190.				56 Lomba FLS2N SMK									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Jumlah siswa SMK yang mengikuti lomba FLS2N tingkat Provinsi dan Nasional	800.000.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1.01.02.1.02.41 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah siswa SMK yang mengikuti lomba FLS2N tingkat Provinsi dan Nasional	100 Orang	
191.				57 Lomba debat bahasa inggris dan indonesia									
					Jumlah siswa SMK yang mengikuti lomba Debat bahasa inggris dan bahasa indonesia tingkat Provinsi dan Nasional	500.000.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1.01.02.1.01.49 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah siswa SMK yang mengikuti lomba Debat bahasa inggris dan bahasa indonesia tingkat Provinsi dan Nasional	100 Orang	
192.				58 Lomba Adiwiyata Mandala SMK									
					Jumlah Sekolah SMK yang terjaring mewakili lomba adiwiyata tingkat nasional	500.000.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1.01.02.1.02.45 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah SMK yang terjaring mewakili lomba adiwiyata tingkat nasional	116 Sekolah	
193.				59 Lomba Karya Ilmiah siswa SMK									
					Jumlah siswa SMA yang mengikuti lomba Karya Ilmiah tingkat Provinsi dan Nasional	600.000.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1.01.02.1.02.41 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah siswa SMK yang mengikuti lomba Karya Ilmiah tingkat Provinsi dan Nasional	138 Orang	
194.				60 Lomba Keterampilan Siswa (LKS)									
					jumlah siswa per program keahlian SMK yang mengikuti lomba keterampilan siswa tingkat provinsi dan nasional	2.800.000.000,00						100 Orang	
195.				61 Magang siswa produktif SMK									
					jumlah siswa per program keahlian SMK yang mengikuti magang di pusat industri luar papua	600.000.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1.01.02.1.02.41 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	jumlah siswa per program keahlian SMK yang mengikuti magang di pusat industri luar papua	60 Orang	
196.				62 Magang guru produktif SMK									
					Jumlah guru produktif per program keahlian mengikuti magang di pusat industri di luar papua dan diluar negeri	700.000.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1.01.02.1.02.43 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah guru produktif per program keahlian mengikuti magang di pusat industri di luar papua dan diluar negeri	100 Orang	
197.				63 Praktek kerja industri siswa									
					Jumlah siswa kelas akhir per program keahlian mengikuti praktek kerja industri dalam daerah	1.165.500.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1.01.02.1.02.39 - Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	Jumlah siswa kelas akhir per program keahlian mengikuti praktek kerja industri dalam daerah	100 Orang	
198.				64 Pengadaan peralatan Praktek SMK									
					Jumlah peralatan praktek SMK yang terfasilitasi	0,00						0 Unit	
199.				65 Penyediaan Biaya Aplikasi Travel SMK Pariwisata di 6 Sekolah									
					Jumlah sekolah yang mendapatkan bantuan biaya aplikasi travel pada SMK Pariwisata	1.000.000.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1.01.02.1.02.37 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah sekolah yang mendapatkan bantuan biaya aplikasi travel pada SMK Pariwisata	4 Sekolah	
200.				66 Pengembangan unit Produksi untuk SMK									
					Jumlah unit produksi yang terfasilitasi untuk mendukung peningkatan produksi berbasis kemandirian	0,00						0 Unit	
201.				67 DAK Penugasan SMK									
					Jumlah siswa kelas akhir SMK yang mendapatkan sertifikat keahlian	606.500.000.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1.01.02.1.02.04 - Pembangunan Ruang Praktik Siswa	Jumlah ruang praktek siswa, alat siswa dan jamban yang terbangun	9600 Orang	
202.				68 pelatihan penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) SMK									
					Jumlah guru smk yang mengikuti pelatihan penyusunan RPP	713.146.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1.01.02.1.02.43 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah guru smk yang mengikuti pelatihan penyusunan RPP	100 Orang	

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
203.	Pendidikan	46 Program Pendidikan Menengah Kejuruan	Capaian SMK yang dikembangkan sesuai dengan potensi 5 Wilayah Adat ; Persentase Anak Asli Papua penerima Beasiswa Pendidikan Jenjang SMK	69 pelatihan penyusunan rencana kerja anggaran sekolah (RKAS) SMK									
					Jumlah guru dan tenaga kependidikan SMK yang mengikuti pelatihan penyusunan RKAS	985.754.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1.01.02.1.02.45 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah guru dan tenaga kependidikan SMK yang mengikuti pelatihan penyusunan RKAS	100 Orang	
204.				70 pelatihan manajemen berbasis sekolah (MBS) SMK									
					jumlah kepala sekolah/wakil kepala sekolah HUMAS SMK yang mengikuti pelatihan MBS	700.000.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1.01.02.1.02.45 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	jumlah kepala sekolah/wakil kepala sekolah HUMAS SMK yang mengikuti pelatihan MBS	100 Orang	
205.				71 pelaksanaan evaluasi diri sekolah (EDS) SMK									
					Jumlah sekolah SMK yang di evaluasi	400.000.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1.01.02.1.02.45 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah sekolah SMK yang di evaluasi	138 Sekolah	
206.				72 pelatihan kurikulum nasional SMK									
					Jumlah guru pada satuan pendidikan SMK mengikuti pelatihan kurikulum nasional	0,00						0 Orang	
207.				73 pengembang kurikulum muatan lokal SMK									
					Jumlah kurikulum muatan lokal yang ditetapkan untuk digunakan dalam PBM di satuan pendidikan SMK	0,00						0 Buku	
208.				74 Penyediaan Biaya Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMK di lima wilayah adat									
					Jumlah Kepala Sekolah SMK di lima wilayah adat yang mengikuti musyawarah kerja kepala sekolah	0,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1.01.02.1.02.43 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Kepala Sekolah SMK di lima wilayah adat yang mengikuti musyawarah kerja kepala sekolah	0 Orang	
209.				77 Uji Kompetensi Guru SMK									
					Jumlah Guru SMK yang berkompentensi	0,00						0 Orang	
210.				78 Pengembangan Unit Produksi (Kantin Sekolah Berbasis Makanan Lokal dan toko Souvenir dan Portal Informasi Berbasis Online) SMK di 6 Kota									
					Jumlah unit Produksi yang terfasilitasi untuk mendukung peningkatan produksi berbasis kemandirian	0,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1.01.02.1.02.08 - Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah unit Produksi yang terfasilitasi untuk mendukung peningkatan produksi berbasis kemandirian	0 Unit	
211.				81 Revitalisasi SMK									
					Jumlah SMK Yang terfasilitasi	600.000.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1.01.02.1.02.17 - Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa	Jumlah SMK Yang terfasilitasi	10 %	
212.				82 Penyusunan Kurikulum Praktek Kerja Siswa SMA/SMK									
					Jumlah Siswa Praktek kerja SMK yang Terfasilitasi	800.000.000,00	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	1.01.03.1.01 - Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	1.01.03.1.01.04 - Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Siswa Praktek kerja SMK yang Terfasilitasi	200 %	
213.	Perpustakaan	22 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERPUSTAKAAN	Jumlah Perpustakaan Standar Nasional Yang Dibangun	1 Pembangunan perpustakaan Kampung									
					jumlah perpustakaan yang dibangun	0,00						0 Unit	
214.	Kearsipan	15 Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Pemenuhan penyelenggaraan kearsipan di Papua pada 7 aspek kearsipan	1 Pembangunan database informasi kearsipan									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					jumlah database informasi kearsipan yang dibangun	0,00						0 Sistem	
215.				5 Pengadaan sarana penyimpanan									
					jumlah sarana penyimpanan arsip yang disediakan	300.000.000,00	2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	2.24.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	2.24.03.1.02 - Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Provinsi	2.24.03.1.02.01 - Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	jumlah sarana penyimpanan arsip yang disediakan	1 Unit	
216.				6 Kajian sistem administrasi kearsipan									
					Jumlah kajian Penyelenggaraan kearsipan di Papua	180.000.000,00	2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	2.24.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	2.24.03.1.04 - Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang dikelola Oleh Lembaga Kearsipan Provinsi	2.24.03.1.04.01 - Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah kajian Penyelenggaraan kearsipan di Papua	1 Dokumen	
217.				7 Pemeliharaan peralatan jaringan informasi kearsipan									
218.		16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Persentase peningkatan arsip daerah yang telah dilakukan penyelamatan	1 Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip									
					jumlah sarana pengolahan dan penyimpanan yang diadakan	150.000.000,00	2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	2.24.02.1.01 - Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	2.24.02.1.01.01 - Penciptaan dan Penggunaan Arsip dinamis	jumlah sarana pengolahan dan penyimpanan yang diadakan	5 Jenis	
219.				5 Peningkatan Pengelolaan dan Penataan Arsip									
					Jumlah arsip dinamis inaktif yang ditata dan dikelola dan siap dilakukan penilaian	150.000.000,00	2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	2.24.02.1.01 - Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	2.24.02.1.01.02 - Pemeliharaan dan Penyusunan Arsip dinamis	Jumlah arsip dinamis inaktif yang ditata dan dikelola dan siap dilakukan penilaian	1500 Boks	
220.				6 Pestaarian Arsip-arsip yang Bernilai Guna Statis									
					jumlah arsip statis yang dilakukan perawatan	100.000.000,00	2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	2.24.02.1.02 - Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	2.24.02.1.02.02 - Akusisi, pengolahan, preservasi dan akses arsip statis	jumlah arsip statis yang dilakukan perawatan	100 Dokumen	
221.				7 Penilaian dan Penyusunan Arsip									
					jumlah arsip yang dinilai menjadi statis	75.000.000,00	2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	2.24.02.1.02 - Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	2.24.02.1.02.02 - Akusisi, pengolahan, preservasi dan akses arsip statis	jumlah arsip yang dinilai menjadi statis	250 Berkas	
					jumlah arsip yang disusutkan	75.000.000,00	2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	2.24.02.1.01 - Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	2.24.02.1.01.02 - Pemeliharaan dan Penyusunan Arsip dinamis	jumlah arsip yang disusutkan	4750 Berkas	
222.		18 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi		1 Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip									
223.				2 Penyediaan sarana layanan informasi arsip									
224.				3 Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/swasta									
					jumlah sosialisasi	0,00						0 Kali	
225.				4 Peningkatan Kualitas SDM Aparatur Kearsipan									
					jumlah peserta diklat kearsipan	0,00						0 Orang	
226.				5 Peningkatan Pembinaan Kearsipan									
					jumlah SKPD yang dilakukan pembinaan kearsipan	75.000.000,00	2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	2.24.02.1.03 - Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	2.24.02.1.03.02 - Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	jumlah SKPD yang dilakukan pembinaan kearsipan	52 SKPD	
					intensitas kegiatan lomba kearsipan terbaik tingkat provinsi	75.000.000,00	2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	2.24.02.1.03 - Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	2.24.02.1.03.02 - Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	intensitas kegiatan lomba kearsipan terbaik tingkat provinsi	34 Kali	
227.				7 Layanan Informasi Kearsipan									
					jumlah arsip statis yang dapat dilayankan secara konvensional maupun elektronik	100.000.000,00	2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	2.24.02.1.03 - Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	2.24.02.1.03.01 - Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	jumlah arsip statis yang dapat dilayankan secara konvensional maupun elektronik	100 Berkas	

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
228.	Kearsipan	21 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan		1 Pengembangan Minat dan Budaya Baca									
					Jumlah event dlm rangka pengembangan minat baca yang dilakukan	70.000.000,00	2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	2.24.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	2.24.03.1.04 - Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang dikelola Oleh Lembaga Kearsipan Provinsi	2.24.03.1.04.01 - Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah event dlm rangka pengembangan minat baca yang dilakukan	1 Orang Kali	
229.				7 Penyediaan Bantuan Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca di Daerah									
					Jumlah perpustakaan yang di kembangkan	600.000.000,00	2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	2.24.02.1.01 - Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	2.24.02.1.01.01 - Penciptaan dan Penggunaan Arsip dinamis	Jumlah perpustakaan yang di kembangkan	8 Unit	
230.				8 Penyediaan Bahan Pustaka Peprustakaan Umum dan Daerah									
					Jumlah Buku yang diadakan	222.400.000,00	2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	2.24.02.1.01 - Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	2.24.02.1.01.01 - Penciptaan dan Penggunaan Arsip dinamis	Jumlah Buku yang diadakan	200 Buku	
231.				10 Penyelenggaraan Peprustakaan Keliling									
					jumlah layanan keliling dalam satu tahun	300.000.000,00	2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	2.24.02.1.01 - Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	2.24.02.1.01.01 - Penciptaan dan Penggunaan Arsip dinamis	jumlah layanan keliling dalam satu tahun	240 Kali	
					Jumlah taman bacaan yang dilayani dalam satu tahun	150.000.000,00	2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	2.24.02.1.01 - Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	2.24.02.1.01.01 - Penciptaan dan Penggunaan Arsip dinamis	Jumlah taman bacaan yang dilayani dalam satu tahun	96 Kali	
232.				11 Pengembangan Deposit									
					Jumlah Buku yang diadakan	200.000.000,00	2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	2.24.02.1.01 - Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	2.24.02.1.01.01 - Penciptaan dan Penggunaan Arsip dinamis	Jumlah Buku yang diadakan	50 Eksemplar	
233.				14 Pemeliharaan Bahan Pustaka									
					Jumlah Buku rusak yang diperbaiki	50.000.000,00	2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	2.24.02.1.01 - Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	2.24.02.1.01.01 - Penciptaan dan Penggunaan Arsip dinamis	Jumlah Buku rusak yang diperbaiki	5000 Eksemplar	
234.				22 Pendidikan dan Pelatihan Teknis/Manajemen Pengelola Perpustakaan									
					jumlah peserta	280.000.000,00	2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	2.24.02.1.01 - Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	2.24.02.1.01.01 - Penciptaan dan Penggunaan Arsip dinamis	jumlah peserta	30 Orang	
235.				23 Pemberdayaan dan Pengembangan Tenaga Fungsional Pustakawan									
					Jumlah Tenaga Fungsional yang diberdayakan dan dikembangkan	80.000.000,00	2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	2.24.02.1.01 - Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	2.24.02.1.01.01 - Penciptaan dan Penggunaan Arsip dinamis	Jumlah Tenaga Fungsional yang diberdayakan dan dikembangkan	2 Orang	
236.				24 Otomasi Perpustakaan									
					jumlah koleksi yang dapat dilayankan secara elektronik	130.800.000,00	2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	2.24.02.1.01 - Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	2.24.02.1.01.01 - Penciptaan dan Penggunaan Arsip dinamis	jumlah koleksi yang dapat dilayankan secara elektronik	500 Buku	
237.				31 Reprografi bahan Pustaka									
					jumlah karya cetak berseri yang dialih mediakan secara elektronik	45.000.000,00	2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	2.24.02.1.01 - Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	2.24.02.1.01.01 - Penciptaan dan Penggunaan Arsip dinamis	jumlah karya cetak berseri yang dialih mediakan secara elektronik	312 Eksemplar	
238.				32 Identifikasi dan inventarisasi naskah kuno									
					jumlah naskah kuno yang teridentifikasi dan dinventarisir	70.000.000,00	2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	2.24.02.1.01 - Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	2.24.02.1.01.01 - Penciptaan dan Penggunaan Arsip dinamis	jumlah naskah kuno yang teridentifikasi dan dinventarisir	3 Eksemplar	
239.				33 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Perkembangan perpustakaan didaerah									
					Jumlah Laporan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Perkembangan Perpustakaan	100.000.000,00	2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	2.24.02.1.01 - Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	2.24.02.1.01.01 - Penciptaan dan Penggunaan Arsip dinamis	Jumlah Laporan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Perkembangan Perpustakaan	25 Laporan	
240.				34 Layanan Pemustaka berkebutuhan khusus									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					jumlah sarana dan prasarana layanan pemustaka yang di sediakan	0,00						0 Jenis	
JUMLAH						767.439.048.070,00							

Mengetahui,
Kepala Bappeda Provinsi Papua

YOHANES WALILO, S.Sos, M.Si
NIP. 197007281997121001

JAYAPURA, 20 July 2020
KEPALA DINAS

LUKAS CHRISTIAN SOHILAIT, ST.,M.SI
NIP. 19690414 199003 1 007

**REKAPITULASI PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021
SERTA KETERKAITAN DENGAN HASIL PEMETAAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019**

PROVINSI : Papua
PERANGKAT DAERAH : Dinas Kesehatan

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Kesehatan	1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	À Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	1 Penyediaan jasa surat menyurat									
					Jumlah surat yang disediakan	150.000.000,00		1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.02.01.1.03 - Administrasi Umum	1.02.01.1.03.01 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang terkirim	2002000 Surat	
2.				2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik									
					Jumlah Jasa Layanan berlangganan Listrik, Air, Telepon, Transponder	1.843.200.000,00		1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.02.01.1.03 - Administrasi Umum	1.02.01.1.03.02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Layanan	12 Layanan	
3.				6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional									
					Jumlah Unit Mobil Dinas/Operasional yang terpelihara dan Terfasilitasi Perijinannya	250.000.000,00		1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.02.01.1.03 - Administrasi Umum	1.02.01.1.03.06 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Unit Mobil Dinas/Operasional yang diservis dan dipelihara	100 Unit	
4.				7 Penyediaan jasa administrasi keuangan									
					Jumlah Honor yang terbayarkan	60.000.000,00		1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.02.01.1.03 - Administrasi Umum	1.02.01.1.03.07 - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pegawai yang membuat laporan	24 Orang	
5.				8 Penyediaan jasa kebersihan kantor									
					Luas Gedung dan Halaman yang disediakan jasa kebersihan	0,00		1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.02.01.1.03 - Administrasi Umum	1.02.01.1.03.08 - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	jumlah Gedung dan Halaman yang dibersihkan	20000 M2	
					Jumlah tenaga kebersihan dan Fasilitas Pendukung kebersihan kantor	2.138.994.000,00		1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.02.01.1.03 - Administrasi Umum	1.02.01.1.03.08 - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah tenaga kebersihan	67 Orang	
					Jumlah Jenis Bahan dan Alat Kebersihan	400.000.000,00		1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.02.01.1.03 - Administrasi Umum	1.02.01.1.03.14 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Bahan dan Alat Kebersihan	30 Jenis	
6.				9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja									
					Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	275.000.000,00		1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.02.01.1.03 - Administrasi Umum	1.02.01.1.03.09 - Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	20 Unit	
7.				10 Penyediaan alat tulis kantor									
					Jumlah jenis ATK yang disediakan	700.000.000,00		1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.02.01.1.03 - Administrasi Umum	1.02.01.1.03.10 - Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	40 Jenis	
8.				11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan									
					Jumlah barang cetakan	1.046.620.000,00		1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.02.01.1.03 - Administrasi Umum	1.02.01.1.03.11 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan	12 Jenis	
					Jumlah penggandaan	120.000.000,00		1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.02.01.1.03 - Administrasi Umum	1.02.01.1.03.11 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penggandaan	20 Lembar	
					Jumlah Jenis Barang Cetak dan yang Disediakan	100.000.000,00		1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.02.01.1.03 - Administrasi Umum	1.02.01.1.03.11 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	25 Jenis	
					Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	0,00		1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.02.01.1.03 - Administrasi Umum	1.02.01.1.03.11 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	20 Bulan	
9.				12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Jumlah Komponen Listrik yang disediakan	400.000.000,00		1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.02.01.1.03 - Administrasi Umum	1.02.01.1.03.12 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen alat pemeliharaan listrik dan genset yang disediakan	60 Buah	
10.				13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor									
					Jumlah peralatan dan Perlengkapan	1.272.600.000,00		1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.02.01.1.03 - Administrasi Umum	1.02.01.1.03.25 - Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan peralatan kantor yang disediakan	20 Unit	
11.				14 Penyediaan peralatan rumah tangga									
					Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	20.000.000,00		1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.02.01.1.03 - Administrasi Umum	1.02.01.1.03.14 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	1 Unit	
12.				15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan									
					Jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	256.520.000,00		1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.02.01.1.03 - Administrasi Umum	1.02.01.1.03.15 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	20 Jenis	
13.				17 Penyediaan makanan dan minuman									
					Pelaksanaan penyediaan makan dan minum	320.000.000,00		1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.02.01.1.03 - Administrasi Umum	1.02.01.1.03.17 - Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Porsi makan dan minum kegiatan yang tersedia	26 Kegiatan	
					Pelaksanaan makan minum tamu dan rapat	160.000.000,00		1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.02.01.1.03 - Administrasi Umum	1.02.01.1.03.17 - Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Porsi makan dan minum yang tersedia	40 Kali Tahun	
					Pelaksanaan makan minum saat olah raga (hari Jumat)	30.000.000,00		1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.02.01.1.03 - Administrasi Umum	1.02.01.1.03.17 - Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Porsi makan dan minum yang tersedia	48 Kali	
					Tersediannya Makanan dan Minuman	0,00		1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.02.01.1.03 - Administrasi Umum	1.02.01.1.03.17 - Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Porsi makan dan minum yang tersedia	0 Bulan	
					Jumlah orang yang disediakan makan dan minuman	0,00		1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.02.01.1.03 - Administrasi Umum	1.02.01.1.03.17 - Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Porsi makan dan minum yang tersedia	0 Orang	
14.				18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah									
					Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	1.054.000.000,00		1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.02.01.1.03 - Administrasi Umum	1.02.01.1.03.18 - Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	12 Orang	
15.				19 Penyediaan Jasa Pengamanan									
					Pelaksanaan pembayaran insentif bagi tenaga operator dan penjaga X-Ray VIP Room Bandara Sentani	0,00		1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.02.01.1.03 - Administrasi Umum	1.02.01.1.03.01 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa keamanan/security yang dibayarkan	0 Orang Bulan	
					Pelaksanaan pembayaran honor bagi satpam	861.840.000,00		1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.02.01.1.03 - Administrasi Umum	1.02.01.1.03.01 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa keamanan/security yang dibayarkan	28 Orang Bulan	
					Pelaksanaan uang makan satpam	0,00		1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.02.01.1.03 - Administrasi Umum	1.02.01.1.03.01 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa keamanan/security yang dibayarkan	0 Orang Bulan	
					Jumlah tenaga pengamanan	0,00		1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.02.01.1.03 - Administrasi Umum	1.02.01.1.03.01 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa keamanan/security yang dibayarkan	0 Orang	
16.		2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	À Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	3 Pembangunan gedung kantor									
					Luas bangunan yang dibangun	21.200.000.000,00		1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.02.01.1.03 - Administrasi Umum	1.02.01.1.03.39 - Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Luas bangunan yang dibangun	5200 M2	
					Tersedianya desain perencanaan bangunan	0,00		1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.02.01.1.03 - Administrasi Umum	1.02.01.1.03.39 - Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Tersedianya desain perencanaan bangunan	0 Dokumen	
17.				5 Pengadaan kendaraan dinas/operasional									
					Jumlah kendaraan yang diadakan	495.700.000,00		1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.02.01.1.03 - Administrasi Umum	1.02.01.1.03.21 - Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda 4	1 Unit	
					Jumlah kendaraan roda 2	0,00		1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.02.01.1.03 - Administrasi Umum	1.02.01.1.03.21 - Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda 2	0 Unit	
18.				7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Jumlah pengadaan perlengkapan	1.000,00		1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.02.01.1.03 - Administrasi Umum	1.02.01.1.03.23 - Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan	10 Unit	
19.				8 Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas									
20.				9 Pengadaan peralatan gedung kantor									
					Jumlah peralatan perlengkapan	648.164.000,00		1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.02.01.1.03 - Administrasi Umum	1.02.01.1.03.25 - Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan/perlengkapan yang diadakan	20 Unit	
21.				10 Pengadaan mebeleur									
					Jumlah mebeleur yang diadakan	3.500.000.000,00		1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.02.01.1.03 - Administrasi Umum	1.02.01.1.03.26 - Pengadaan Mebeleur	Jumlah mebeleur yang diadakan untuk 3 UPT	50 Unit	
22.				22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor									
					Jumlah gedung kantor yang dipelihara	0,00		1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.02.01.1.03 - Administrasi Umum	1.02.01.1.03.29 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor	0 Unit	
					belanja sewa	0,00		1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.02.01.1.03 - Administrasi Umum	1.02.01.1.03.29 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung yang disewa	0 Tahun	
23.				24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional									
					Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	0,00		1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.02.01.1.03 - Administrasi Umum	1.02.01.1.03.31 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah dan Jenis perlengkapan/peralatan gedung kantor yang dipelihara	0 Unit	
					Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	200.000,00		1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.02.01.1.03 - Administrasi Umum	1.02.01.1.03.31 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang	56 Unit	
					sewa kendaraan	300.000,00		1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.02.01.1.03 - Administrasi Umum	1.02.01.1.03.31 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan yang diperbaiki/Service	12 Bulan	
24.				26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor									
					Pelaksanaan pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	2.515.500.000,00		1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.02.01.1.03 - Administrasi Umum	1.02.01.1.03.27 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Jumlah Rumah Jabatan	2 Kegiatan	
					Jumlah Perlengkapan Gedung kantor yang terpelihara	0,00		1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.02.01.1.03 - Administrasi Umum	1.02.01.1.03.33 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung kantor yang dipelihara	0 Unit	
					Tersediannya biaya pemeliharaan gedung kantor	0,00		1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.02.01.1.03 - Administrasi Umum	1.02.01.1.03.39 - Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor	0 Bulan	
25.				30 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor									
					Luas bangunan yang direhab	2.600.025.000,00		1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.02.01.1.03 - Administrasi Umum	1.02.01.1.03.39 - Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Jumlah bangunan yang direhab	2162 M2	
26.		3 Program peningkatan disiplin aparatur	À Meningkatnya disiplin aparatur	2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya									
					Jumlah pakaian dinas yang diadakan	707.000.000,00		1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.02.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1.02.01.1.04.02 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas sipil harian	364 Stell	
27.		5 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	À Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	1 Pendidikan dan pelatihan formal									
					Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	866.000.000,00		1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.02.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1.02.01.1.04.09 - Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparatur mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	20 Orang	
28.				4 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal									
					Jumlah aparatur yang terlatih	954.500.000,00		1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.02.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1.02.01.1.04.11 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	
29.		6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	À Meningkatnya kualitas akuntabilitas OPD	1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	90.000.000,00		1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.02.01.1.02 - Administrasi Keuangan	1.02.01.1.02.06 - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan	5 Laporan	
					Laporan LAKIP SKPD	0,00		1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.02.01.1.01 - Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.02.01.1.01.05 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan LAKIP SKPD	0 Dokumen	
30.				4 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun									
					Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	51.500.000,00		1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.02.01.1.02 - Administrasi Keuangan	1.02.01.1.02.09 - Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	12 Laporan	
31.				5 Penyusunan Renja, RKA dan Perubahan APBD									
					Jumlah dokumen	103.000.000,00		1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.02.01.1.01 - Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.02.01.1.01.01 - Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	3 Dokumen	
32.				12 Penyusunan RENSTRA									
					Jumlah Dokumen	70.000.000,00		1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.02.01.1.01 - Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.02.01.1.01.01 - Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	
33.				13 Penyusunan SOP									
					Jumlah Dokumen	100.000.000,00		1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.02.01.1.01 - Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.02.01.1.01.04 - Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	
34.		15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase Penyaluran Alat Kesehatan (PAK) yang diawasi; Persentase Puskesmas yang mempunyai ketersediaan obat dan vaksin ; Persentase makanan yang memenuhi syarat; Persentase obat yang memenuhi syarat	4 Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit									
					Jumlah peningkatan mutu pelayanan komunitas dan RS	2.500.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.01.21 - Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman Serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Obat dan Vaksin yang di distribusi ke sarana serta fasilitas kesehatan lainnya	29 Kabupaten	
35.				5 Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan									
36.				7 Pengiriman dan Relokasi Obat buffer stok dan program provinsi ke Kab dan 14 titik terisolir									
					Jumlah distribusinya obat buffer stock dan obat program ke kabupaten	1.200.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.01.21 - Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman Serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah distribusinya obat buffer stock dan obat program ke kabupaten	29 Kabupaten	
					Terdistribusinya obat buffer stock dan obat program ke kabupaten	1.000.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.01.21 - Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman Serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Terdistribusinya obat buffer stock dan obat program ke kabupaten	29 Kabupaten	
37.				9 Monitoring pemanfaatan buffer stock di GFK/RS/PKM dan pos obat kampung serta evaluasi hasil magang tenaga GF kab/kota									
					Jumlah Kabupaten yang di Monev obat buffer stok	641.814.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.26 - Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	Jumlah Kabupaten yang di Monev obat buffer stok	29 Kabupaten	

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
38.	Kesehatan	15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase Penyaluran Alat Kesehatan (PAK) yang diawasi; Persentase Puskesmas yang mempunyai ketersediaan obat dan vaksin ; Persentase makanan yang memenuhi syarat; Persentase obat yang memenuhi syarat	10 Pengadaan obat buffer stock provinsi									
					Tersedianya Obat Buffer Stock Provinsi	2.500.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.26 - Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	Tersedianya Obat Buffer Stock Provinsi	87 Produk	
39.				14 Pengadaan obat-obatan untuk program HIV/AIDS									
					Tersedianya Obat Obatan HIV/AIDS	1.118.044.493,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.11 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Tersedianya Obat Obatan HIV/AIDS (Gudang Obat Farmasi)	21 Produk	
40.				36 Pengadaan Obat-obatan Program P2M									
					Terlaksananya Pengadaan Obat Obatan P2M	639.446.500,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.11 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Terlaksananya Pengadaan Obat Obatan P2M (Gudang Farmasi DOK II)	11 Produk	
41.				42 Sosialisasi dan pemantauan pelayanan kefarmasian sesuai standar di Rumah Sakit dan Puskesmas bagi 29 Kab/Kota									
42.				50 Pengadaan logistik Non Oat Provinsi Papua									
					Jumlah Logistik Non OAT yang Tersedia	1.619.825.100,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.01.15 - Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan	Jumlah Logistik Non OAT yang Tersedia (Gudang IFK DOK II)	4 Produk	
43.				53 Pengadaan reagen IMS Provinsi Papua									
					Jumlah Reagen IMS yang Diadakan	538.754.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.01.15 - Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan	Jumlah Reagen IMS yang Diadakan	2 Produk	
44.				55 Pengelolaan Perbekalan Farmasi/Gudang Obat Buffer Stock Provinsi									
					Jumlah Pengelolaan Sarana IFK	100.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.26 - Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	Jumlah Pengelolaan Sarana IFK	1 Tahun	
45.				56 Bimbingan Teknis Kepada Sarana Penyalur Alat Kesehatan									
					Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan	74.725.937,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.02.03.1.01 - Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	1.02.03.1.01.01 - Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan (Gudang Farmasi)	60 Orang	
46.				61 Peningkatan Kapasitas SDM Kefarmasian di Apotek									
					Jumlah Apoteker yang di Latih	300.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.02.03.1.01 - Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	1.02.03.1.01.01 - Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Apoteker yang di Latih (Gudang Farmasi)	35 Orang	

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
47.	Kesehatan	15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase Penyaluran Alat Kesehatan (PAK) yang diawasi; Persentase Puskesmas yang mempunyai ketersediaan obat dan vaksin ; Persentase makanan yang memenuhi syarat; Persentase obat yang memenuhi syarat	64 Pembekalan Penanggung Jawab Sarana Distribusi Obat (PBF) Tingkat Provinsi									
					Jumlah Apoteker Penanggung Jawab Yang Di Latih	310.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.02.03.1.01 - Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	1.02.03.1.01.01 - Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Apoteker Penanggung Jawab Yang Di Latih (Milik Gudang farmasi DOK II)	44 Orang	
48.				67 Pengadaan Reagen Viral Load									
					Jumlah Jenis Reagen Viral Load yang diadakan	700.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.01.15 - Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan	Jumlah Jenis Reagen Viral Load yang diadakan	1 Jenis	
49.				68 Pengadaan Logistik / RDT Malaria									
					Jumlah Jenis Logistik RDT Malaria yang diadakan	1.972.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.01.15 - Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan	Jumlah Jenis Logistik RDT Malaria yang diadakan (Gudang Farmasi DOK II)	1 Jenis	
50.				69 Penyediaan Dana Distribusi Obat, Vaksin dan Reagen dari Instalasi Farmasi Provinsi Ke IFK dan RS									
					Jumlah Kab/Kota yang menerima Distribusi Obat dan Vaksin	2.400.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.26 - Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	Jumlah Kab/Kota yang menerima Distribusi Obat dan Vaksin	29 Kabupaten	
51.				70 Peningkatan sarana dan Prasarana Instalasi Farmasi Provinsi									
52.				71 Pelatihan Pengelolaan obat sesuai standar bagi Pengelola Obat Instalasi Farmasi Kab/kota									
					Jumlah Tenaga Pengelola Obat yang dilatih	550.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.02.03.1.01 - Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	1.02.03.1.01.01 - Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Tenaga Pengelola Obat yang dilatih (Gudang Farmasi DOK II)	50 Orang	
53.				72 Pelatihan Pengelolaan Obat sesuai standar bagi Pengelola Obat / Instalasi Farmasi Rumah Sakit Baru									
					Jumlah Tenaga Farmasi Rumah Sakit yang dilatih	350.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.02.03.1.01 - Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	1.02.03.1.01.01 - Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Tenaga Farmasi Rumah Sakit yang dilatih	29 Orang	

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54.	Kesehatan	16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan UKBM kabupaten/kota yang terpetakan; Cakupan distrik yang sudah memiliki puskesmas ; Cakupan puskesmas pembantu; Cakupan puskesmas terakreditasi; Meningkatnya Angka Kesehatan Masyarakat; Persentase indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) rumah sakit yang mencapai target; Persentasi Pengguna Jaminan BPJS di Rumah Sakit; Persentasi Pengguna Kartu Papua Sehat (KPS) di RS	9 Peningkatan kesehatan masyarakat									
					Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Masyarakat	0,00						0 Orang	
55.				12 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan									
					Jumlah penanggulangan Masalah Kesehatan yang dilakukan	0,00						0 Jenis	
56.				13 penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan									
					Jumlah Biaya Operasional dan Pemeliharaan	0,00						0 Rupiah	
57.				75 Pelatihan Pendamping Akreditasi Puskesmas									
					Jumlah tenaga pendamping akreditasi puskesmas	250.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.27 - Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah tenaga pendamping akreditasi puskesmas	30 Orang	
58.				82 Pembinaan Akreditasi Puskesmas									
					Jumlah Puskesmas yang dibina Akreditasi	0,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.27 - Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang dibina Akreditasi	0 Unit	
					Jumlah Puskesmas yang diakreditasi	150.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.27 - Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang diakreditasi	10 Unit	
					Jumlah kabupaten/kota yang mendapatkan pembinaan teknis akreditasi puskesmas	150.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.04 - Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.04.03 - Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah kabupaten/kota yang mendapatkan pembinaan teknis akreditasi puskesmas	10 Kabupaten	
59.				85 Pertemuan Koordinasi Akreditasi FKTP									
					Jumlah orang mengikuti pertemuan Akreditasi FKTP	338.800.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.19 - Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Jumlah orang mengikuti pertemuan Akreditasi FKTP	40 Orang	
60.				86 Pelatihan Manajemen Puskesmas									
					Jumlah Kepala Puskesmas yang mendapat pelatihan Manajemen Puskesmas	250.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.19 - Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Jumlah Kepala Puskesmas yang mendapat pelatihan Manajemen Puskesmas (Sie Kesehatan Dasar)	30 Orang	
61.				90 Monitoring pelayanan kesehatan primer									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Jumlah puskesmas yang melakukan pelayanan sesuai standar	0,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.19 - Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Jumlah puskesmas yang melakukan pelayanan sesuai standar	0 %	
					Jumlah Laporan Monitoring	0,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.19 - Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Jumlah Laporan Monitoring	29 Laporan	
62.				93 Penyediaan layanan kesehatan kaki telanjang									
					Jumlah Tim Kaki Telanjang yang dikontrak	0,00						0 Tim	
63.				94 Penyediaan layanan dokter terbang									
					Jumlah layanan dokter terbang yang diadakan	0,00						0 Layanan	
64.				95 Penguatan Sistem Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan									
					Jumlah Layanan kesehatan Dasar Rujukan yang diperkuat	0,00						0 Jenis	
65.				96 Pengembangan Telemedicine daerah terisolir dan perbatasan									
					Jumlah Telemedicine yang dikembangkan	0,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.01.20 - Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Telemedicine yang dikembangkan	0 Jenis	
					Jumlah SDM yang ditingkatkan kapasitasnya dalam menggunakan Telemedicine	1.200.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.01.06 - Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)	Jumlah SDM yang ditingkatkan kapasitasnya dalam menggunakan Telemedicine Sie Kesehatan Dasar	20 Orang Tahun	
66.				97 Pengadaan radio medicine									
					Jumlah Radio Telemedicine yang diadakan	780.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.01.20 - Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Radio Telemedicine yang diadakan	150 Unit	
67.				98 Pembinaan Teknis Program Pelayanan Primer									
					Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan Pembinaan Pelayanan Primer	300.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.19 - Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan Pembinaan Pelayanan Primer	18 Kabupaten	
68.				99 Pembinaan Teknis PIS-PK ke Kabupaten/Kota									
					Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan Pembinaan PIS-PK	300.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.19 - Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan Pembinaan PIS-PK	10 Kabupaten	
69.				100 Pertemuan Pemutakhiran Data Puskesmas yang memberikan Pelayanan sesuai Standar									
					Jumlah Puskesmas yang memberikan pelayanan sesuai standar	314.500.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.19 - Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang memberikan pelayanan sesuai standar	72 Puskesmas	
70.				101 Verifikasi Pemilihan Puskesmas berprestasi									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Jumlah Puskesmas berprestasi yang terverifikasi	145.650.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.20 - Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	Jumlah Puskesmas berprestasi yang terverifikasi	3 Unit	
71.				102 Pertemuan Pemutakhiran Data Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan									
					Jumlah Puskesmas yang mengupdate data SPA	614.500.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.19 - Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang mengupdate data SPA (Seksi Kesehatan Dasar)	72 Puskesmas	
72.				103 Workshop Audit Internal dan Rapat Tinjauan Manajemen									
					Jumlah Peserta	394.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.04 - Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.04.03 - Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Peserta yang mengikuti pertemuan (Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar)	40 Orang	
73.				104 Workshop Keselamatan Pasien dan Manajemen Resiko									
					Jumlah Peserta	394.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.04 - Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.04.03 - Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Peserta yang mengikuti pelatihan	40 Orang	
74.				105 Bimbingan Teknis Pelayanan Puskesmas sesuai Standar Perbatasan									
					Jumlah Puskesmas Perbatasan yang mengikuti Bimtek sesuai standar	224.840.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.04 - Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.04.03 - Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Puskesmas Perbatasan yang mengikuti Bimtek sesuai standar (Seksi Kesehatan Dasar)	7 Unit	
75.				106 Pertemuan Sosialisasi Pembuatan Profil Puskesmas									
					Jumlah Peserta	294.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.19 - Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Jumlah Peserta	40 Orang	
76.				107 Verifikasi dan Registrasi Puskesmas									
					Jumlah Puskesmas yang terverifikasi	300.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.20 - Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang terverifikasi	72 Unit	
77.				108 Pertemuan Evaluasi Program Pelayanan Primer									
					Jumlah Peserta	614.500.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.19 - Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Jumlah Peserta	72 Orang	
78.				109 Pertemuan Evaluasi Pelaksanaan PIS-PK									
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Program PIS-PK	614.500.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.19 - Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Program PIS-PK (Seksi Kesehatan Dasar)	72 Puskesmas	
79.				110 Pertemuan Sosialisasi Puskesmas BLU									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Jumlah Peserta	230.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.19 - Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Jumlah Peserta yang mengikuti pertemuan (Seksi Kesehatan dasar)	2 Orang	
80.		17 Program Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase makanan yang memenuhi syarat; Persentase obat yang memenuhi syarat	2 Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya									
					Jumlah Sekolah dasar tersosialisasi MJAS yang aman dari bahan berbahaya	150.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.26 - Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	Jumlah Sekolah dasar tersosialisasi MJAS yang aman dari bahan berbahaya	50 Sekolah	
					Jumlah Pengawasan Pangan Berbahaya yang dilakukan	150.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.26 - Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	Jumlah Pengawasan Pangan Berbahaya yang dilakukan (Seksi Kesehatan Lingkungan)	5 Kali	
81.		18 Program Pengembangan Obat Asli Indonesia	Tanaman obat tradisional yang berkembang di masyarakat	2 Pengembangan standarisasi tanaman obat bahan alam Indonesia									
					Jumlah Tanaman Obat yg dikembangkan	600.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.28 - Pengelolaan Penelitian Kesehatan	Jumlah Tanaman Obat yg dikembangkan (TSie anaman Obat Tradisional)	12 Buah	
82.				6 Monitoring, evaluasi dan pelaporan									
					Jumlah Laporan SP3T	0,00						0 Laporan	
83.				11 Pengembangan Obat Asli Daerah									
					Jumlah Penggunaan obat tradisional yang dikembangkan di masyarakat	210.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.10 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Penggunaan obat tradisional yang dikembangkan di masyarakat	60 %	
					Jumlah tanaman obat tradisional yang dikembangkan di masyarakat	150.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.10 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah tanaman obat tradisional yang dikembangkan di masyarakat	12 Jenis	
					Jumlah Obat Tradisional yang dikembangkan dan digunakan	200.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.10 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Obat Tradisional yang dikembangkan dan digunakan	12 Jenis	
84.				16 Workshop Obat Tradisional Berbasis Wilayah Adat									
					Jumlah Peserta yang mengikuti Workshop	350.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.10 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Peserta yang mengikuti Workshop	50 Orang	
85.				19 Penilaian Pemanfaatan TOGA									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Jumlah Orang Yang Mengikuti Pertemuan	320.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.10 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Orang Yang Mengikuti Pertemuan	29 Orang	
					Jumlah dokumen penilaian TOGA	210.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.10 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah dokumen penilaian TOGA	3 Dokumen	
					Jumlah PKM dan Kampung yang melaksanakan dan menggunakan TOGA sesuai SOP	41.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.10 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah PKM dan Kampung yang melaksanakan dan menggunakan TOGA sesuai SOP	20 Kampung	
86.				23 Pertemuan data jaringan informasi dan dokumentasi SP3T									
					Jumlah Peserta yang mengikuti pertemuan Data Jaringan informasi dan Dokumentasi SP3T	0,00						0 Orang	
					Jumlah Peserta yang mengikuti Pertemuan	0,00						0 Orang	
87.				24 RAPAT RUTIN SP3T									
					Terlaksananya rapat SP3T	0,00						0 Kali	
88.				25 KEGIATAN SENTRA P3T									
					Jumlah laporan Kegiatan Sentra P3T	269.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.10 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah laporan Kegiatan Sentra P3T	2 Laporan	
89.				28 PELATIHAN AKUPRESSUR BAGI DOKTER									
					Jumlah Dokter yang mengikuti pelatihan akupresur	170.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.10 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokter yang mengikuti pelatihan akupresur	25 Orang	
90.				29 PELATIHAN AKUPRESSUR BAGI TENAGA MEDIS PUSKESMAS									
					Jumlah Tenaga Medis Puskesmas yang terlatih akupresur	320.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.10 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Tenaga Medis Puskesmas yang terlatih akupresur	26 Orang	
91.				38 Rapat Penilaian Dokumen Penilaian Pemanfaatan TOGA									
					Jumlah Orang Yang Mengikuti Pertemuan	0,00						0 Orang	
92.				44 Sosialisasi Asman TOGA, Akupresur bagi Dosen dan Mahasiswa di P.T Kesehatan									
					Jumlah peserta yang tersosialisasi Asman TOGA, Akupresur .	102.000.000,00						36 Orang	
93.				45 Pengembangan Pusat Layanan Kesehatan Tradisional dan Akupresur Melalui Griya Sehat									
					Tersedianya Klinik Griya Sehat Pengobatan dan Terapi Tradisional	0,00						0 Unit	
94.		19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Cakupan advokasi pelayanan kesehatan pada masyarakat; Rasio kelompok Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)	1 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Jumlah Media Promosi Kesehatan	1.500.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.02.05.1.02 - Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	1.02.05.1.02.01 - Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Media Promosi Kesehatan	6 Kegiatan	
95.				2 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat									
					Jumlah pesan yang disampaikan	420.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.02.05.1.02 - Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	1.02.05.1.02.01 - Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah pesan yang disampaikan	15 Jenis	
96.				6 Penyebarluasan informasi melalui media masa									
					Jumlah Media KIE yang digunakan	700.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.02.05.1.02 - Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	1.02.05.1.02.01 - Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Media KIE yang digunakan	15 Jenis	
97.				7 Pengembangan Saka Bhakti Husada (SBH)									
					Jumlah Siswa SBH yang diorientasi	630.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.02.05.1.01 - Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	1.02.05.1.01.01 - Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Siswa SBH yang diorientasi	60 Orang	
98.				8 Pendataan Pengembangan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)									
					Tersedianya data UKBM Tingkat Propinsi	0,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.02.05.1.03 - Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	1.02.05.1.03.01 - Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	Tersedianya data UKBM Tingkat Propinsi	29 Dokumen	
99.				24 Pelatihan Promosi Kesehatan bagi petugas Kesehatan									
					Jumlah Tenaga Promkes yang dilatih	300.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.02.05.1.02 - Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	1.02.05.1.02.01 - Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Tenaga Promkes yang dilatih	29 Orang	
100.				25 Monitoring dan evaluasi program promosi dan pemberdayaan masyarakat di 5 Regional									
					Jumlah laporan.	300.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.02.05.1.03 - Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	1.02.05.1.03.01 - Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	Jumlah laporan.	29 Laporan	
101.				42 Advokasi dan sosialisasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat									
					Jumlah Kab/kota yang melaksanakan Germas	320.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.02.05.1.01 - Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	1.02.05.1.01.01 - Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Kab/kota yang melaksanakan Germas	29 Kabupaten	

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
102.	Kesehatan	20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Cakupan masyarakat teridentifikasi kurang gizi; Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin; Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum (standar yang digunakan Indonesia 2.100 Kkal/kapita/hari); Rata-rata konsumsi kalori per kapita per hari	2 Pemberian tambahan makanan dan vitamin									
					Jumlah Balita yang mendapatkan PMT	6.000.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.06 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Balita yang mendapatkan PMT (Seksi Gizi)	1000 Orang	
103.				19 Pelatihan Surveillance Kewaspadaan Pangan, Gizi, Pemantauan Status Gizi di Daerah Bermasalah Kesehatan									
					Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan Surveillance Kewaspadaan Pangan Gizi	350.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.02.03.1.02 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.03.1.02.01 - Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan Surveillance Kewaspadaan Pangan Gizi	87 Orang	
104.				26 Pertemuan pencatatan dan pelaporan program gizi									
					Jumlah Kabupaten Yang Ikut Pertemuan Pencatatan dan Pelaporan Program Gizi	400.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.06 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Kabupaten Yang Ikut Pertemuan Pencatatan dan Pelaporan Program Gizi	29 Kabupaten	
105.				29 Sosialisasi 1000 hari pertama Kehidupan									
					Balita Stanting	0,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.06 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Balita Stanting	27 %	
					Terlaksananya Sosialisasi Program 1000 Hari Pertama Kehidupan	500.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.06 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Terlaksananya Sosialisasi Program 1000 Hari Pertama Kehidupan	15 Kabupaten	
106.				37 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Perbaikan gizi masyarakat									
					Jumlah laporan	240.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.06 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah laporan	29 Laporan	
107.		21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Cakupan keluarga terakses air bersih ; Cakupan masyarakat yang terakses pelayanan sanitasi baik	20 Peningkatan kemampuan petugas kesehatan dalam pelaksanaan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM)									
					Jumlah petugas kabupaten/kota dibina	350.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.02.03.1.02 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.03.1.02.01 - Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah petugas kabupaten/kota dibina	50 Orang	
108.				24 Pembinaan dan Pelaksanaan STBM									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Jumlah Kampung STBM dan SBS	420.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.08 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Kampung STBM dan SBS	300 Kampung	
109.				27 Pengawasan Kualitas Air									
					Jumlah Laporan Pengawasan Kualitas Air yang dilakukan	300.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.08 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Laporan Pengawasan Kualitas Air yang dilakukan	1 Laporan	
					Persentase Kualitas Air yang memenuhi syarat Kesehatan	300.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.08 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase Kualitas Air yang memenuhi syarat Kesehatan	80 %	
110.				32 Pembinaan Kebugaran Jasmani									
					Jumlah kabupaten/ kota yang dibina	350.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.07 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah kabupaten/ kota yang dibina	18 Kabupaten	
111.				33 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat									
					Jumlah Penyuluhan yang dilakukan	450.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.08 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Penyuluhan yang dilakukan	20 Kali	
112.				34 Orientasi Pengelolaan Limbah Rumah Sakit									
					Jumlah Pengelola Limbah Rumah Sakit	400.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.02.03.1.02 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.03.1.02.01 - Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Pengelola Limbah Rumah Sakit	30 Orang	
113.				35 Monitoring dan evaluasi ke Rumah Sakit									
					Jumlah Rumah Sakit mengolah Limbah	300.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.08 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Rumah Sakit mengolah Limbah	18 Unit	
114.				36 Orientasi Upaya Kesehatan Kerja									
					Jumlah Petugas yang dilatih	420.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.07 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Petugas yang dilatih	100 Orang	
115.				37 Pembinaan Pos Upaya Kesehatan Kerja (UKK) di Kabupaten/Kota									
					Jumlah Kab/Kota yang dibina	350.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.07 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Kab/Kota yang dibina	22 Kabupaten	

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
116.	Kesehatan	22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	API Malaria; Angka penemuan kasus baru kusta (NCDR); Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk; Persentase penanganan kesehatan pada kejadian luar biasa; Persentase perempuan umur 30-50 tahun yang dideteksi dini kanker serviks dan payudara; Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi; Tingkat prevalensi DBD; Tingkat prevalensi Tuberkulosis	5 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular									
					jumlah kab yg memberikan pelayanan P2P	1.000.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.11 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	jumlah kab yg memberikan pelayanan TBC, imunisasi dan Beberapa Penyakit Endemik	29 Kabupaten	
117.				6 Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik									
118.				12 Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit IMS-HIV/AIDS									
					Jumlah kasus yang ditemukan dan ditangani	500.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.11 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah kasus yang ditemukan dan ditangani	450 Kasus	
					Jumlah peserta yang mengikuti bintek	500.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.11 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah peserta yang mengikuti bintek	50 Orang	
119.				14 Pemberantasan penyakit DBD									
					persentase lokasi yang dilakukan pemberantasan penyakit DBD pada daerah yang potensi KLB	500.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.11 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	persentase lokasi yang dilakukan pemberantasan penyakit DBD pada daerah yang potensi KLB	85 %	
					Jumlah peserta yang mengikuti bintek	400.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.11 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah peserta yang mengikuti bintek	50 Orang	
120.				15 Pemberantasan penyakit Malaria									
					Persentase kasus malaria yang diobati ACT	400.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.11 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase kasus malaria yang diobati ACT	95 %	
					Jumlah kasus malaria yang diobati	600.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.11 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah kasus malaria yang diobati	220000 Kasus	
121.				16 Pemberantasan penyakit Filaria									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Persentase cakupan pencegahan dan pemberantasan penyakit filariasis	320.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.11 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase cakupan pencegahan dan pemberantasan penyakit filariasis	90 %	
					Jumlah penduduk yang minum obat pencegahan kaki gajah	210.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.11 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah penduduk yang minum obat pencegahan kaki gajah	2000000000 Orang	
122.				17 Pemberantasan Penyakit Diare									
					terlaksananya pemberantasan penyakit diare	300.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.11 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	terlaksananya pemberantasan penyakit diare	100 %	
					Jumlah penderita yang ditemukan dan diobati	200.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.11 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah penderita yang ditemukan dan diobati	45000000 Orang	
123.				18 Pemberantasan Penyakit Kusta									
					jumlah kab yang melaksanakan pemberantasan penyakit kusta	600.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.11 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	jumlah kab yang melaksanakan pemberantasan penyakit kusta	29 Kabupaten	
					Jumlah penderita yang ditemukan dan diobati	110.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.11 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah penderita yang ditemukan dan diobati	550000 Orang	
124.				19 Pemberantasan Penyakit Frambusia									
					jumlah kab yg melaksanakan pemberantasan penyakit frambusia	300.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.11 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	jumlah kab yg melaksanakan pemberantasan penyakit frambusia	20 Kabupaten	
					Jumlah penduduk yang minum obat pencegahan frambusia	100.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.11 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah penduduk yang minum obat pencegahan frambusia	40000 Orang	
125.				21 Eradikasi Polio, reduksi Campak dan eliminasi Tetanus									
					jumlah kab yg melaksanakan Eradikasi polio, reduksi Campak dan Eliminasi Tetanus	600.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.11 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	jumlah kab yg melaksanakan Eradikasi polio, reduksi Campak dan Eliminasi Tetanus	29 Kabupaten	
					Jumlah kasus yang ditangani	250.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.11 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah kasus yang ditangani	20 Kasus	
126.				23 Pengiriman Vaksin, logistik dan tempat penyimpanan Vaksin									
					Jumlah kabupaten yang dikirim vaksin dan logistik imunisasi	1.000.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.01.21 - Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman Serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah kabupaten yang dikirim vaksin dan logistik imunisasi	29 Kabupaten	

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
127.	Kesehatan	22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	API Malaria; Angka penemuan kasus baru kusta (NCDR); Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk; Persentase penanganan kesehatan pada kejadian luar biasa; Persentase perempuan umur 30-50 tahun yang dideteksi dini kanker serviks dan payudara; Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi; Tingkat prevalensi DBD; Tingkat prevalensi Tuberkulosis	24 Kolaborasi Penanganan Penderita TB-HIV/AIDS									
					Persentase pasien koinfeksi TB-HIV mendapatkan pengobatan ARV	300.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.11 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase pasien koinfeksi TB-HIV mendapatkan pengobatan ARV	100 %	
					Jumlah pasien koinfeksi TB-HIV yang mendapat obat ARV	400.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.11 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah pasien koinfeksi TB-HIV yang mendapat obat ARV	100 Orang	
128.				25 Penanggulangan penyakit Taeniasis									
					jumlah kab yg melakukan penanggulangan Taeniasis	380.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.11 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	jumlah kab yg melakukan penanggulangan Taeniasis	15 Kabupaten	
					Jumlah penderita taeniasis yang ditemukan dan diobati	100.780.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.11 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah penderita taeniasis yang ditemukan dan diobati	15 Orang	
129.				26 Peningkatan pelayanan Imunisasi di Provinsi dan Kabupaten.									
					Jumlah kabupaten yang dikirim vaksin dan logistik imunisasi	400.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.11 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah kabupaten yang dikirim vaksin dan logistik imunisasi	29 Kabupaten	
					Jumlah peralatan imunisasi yang diadakan	803.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.11 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah peralatan imunisasi yang diadakan	10 Unit	
130.				35 Pertemuan asistensi kejadian ikutan pasca Imunisasi (KIPI)									
					terlaksananya pertemuan asistensi KIPI	400.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.11 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	terlaksananya pertemuan asistensi KIPI	29 Kabupaten	
					Jumlah peserta yang mengikuti pertemuan KIPI	270.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.11 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah peserta yang mengikuti pertemuan KIPI	35 Orang	
131.				40 Monev AIDS, TB & Malaria									
132.				44 Peningkatan Manajemen program terpadu IMS, HIV/AIDS, TB & Malaria									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Jumlah yang melaksanakan Manajemen Program terpadu IMS-HIV AIDS, TB & Malaria	320.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.02.03.1.02 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.03.1.02.01 - Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah yang melaksanakan Manajemen Program terpadu IMS-HIV AIDS, TB & Malaria (ATM)	29 Kabupaten	
					Jumlah peserta yang mengikuti bimtek manajemen pelayanan terpadu IMS HIV/AIDS, TB dan Malaria	500.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.02.03.1.02 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.03.1.02.01 - Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah peserta yang mengikuti bimtek manajemen pelayanan terpadu IMS HIV/AIDS, TB dan Malaria (ATM)	50 Orang	
133.				52 Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah									
					terlaksananya program surveilans epidemiologi dan penanggulangan wabah	300.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.17 - Pengelolaan Surveilans Kesehatan	terlaksananya program surveilans epidemiologi dan penanggulangan wabah	29 Kabupaten	
					Jumlah KLB yang ditangani	500.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.17 - Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah KLB yang ditangani	29 Kasus	
134.				57 Penanggulangan penyakit TBC									
					jumlah penemuan dan pengobatan kasus TB (SR)	1.000.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.11 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	jumlah penemuan dan pengobatan kasus TB (SR)	80 %	
135.				60 Penanggulangan Krisis Masalah Kesehatan									
					jumlah kabupaten yang melaksanakan krisis masalah kesehatan	1.500.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.02 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	jumlah kabupaten yang melaksanakan krisis masalah kesehatan	11 Kabupaten	
136.				63 Penanggulangan Penyakit Tidak Menular									
					Terlaksananya Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular di Kab/Kota	300.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.11 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Terlaksananya Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular di Kab/Kota	29 Kabupaten	
					Jumlah peserta yang mengikuti bimtek pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular	400.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.11 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah peserta yang mengikuti bimtek pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular	35 Orang	
137.				66 Peningkatan Manajemen Program Terpadu IMS,HIV AIDS, TB & Malaria									
138.				67 Peningkatan Pengendalian dan Pencegahan ISPA di Wilayah Regional									
					terlaksananya pengendalian dan pencegahan penyakit ISPA	320.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.11 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	terlaksananya pengendalian dan pencegahan penyakit ISPA	29 %	
					Jumlah peserta yang mengikuti bimtek pengendalian dan pencegahan ISPA di wilayah regional	335.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.11 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah peserta yang mengikuti bimtek pengendalian dan pencegahan ISPA di wilayah regional	80 Orang	
139.				72 Monev Terpadu (AIDS,TB,Malaria)									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					terlaksananya pertemuan monev terpadu (HIV-AID, TB & Malaria)	23.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.11 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	terlaksananya pertemuan monev terpadu (HIV-AID, TB & Malaria)	1 Kali	
					Jumlah peserta yang mengikuti pertemuan	250.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.11 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah peserta yang mengikuti pertemuan	50 Orang	
140.				74 Pertemuan Monev Terpadu (AIDS, TB, & Malaria)									
141.				75 Peningkatan Pelayanan Pengamatan Penyakit Menular dan Tidak Menular									
					Pemutahiran data dan Evaluasi Program	250.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.11 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Pemutahiran data dan Evaluasi Program	29 Kabupaten	
142.				80 Penanggulangan Penyakit Hepatitis									
					terlaksananya deteksi dini hepatitis B dan C pada kelompok beresiko	0,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.11 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	terlaksananya deteksi dini hepatitis B dan C pada kelompok beresiko	0 Kabupaten	
					Jumlah peserta yang mengikuti bimtek penanggulangan penyakit hepatitis	300.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.11 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah peserta yang mengikuti bimtek penanggulangan penyakit hepatitis	29 Orang	
143.				90 Penguatan Kepemimpinan Program Tuberkulosis di Kab/Kota									
					Jumlah Kab/Kota dengan pembiayaan program TBC meningkat	310.500.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.11 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Kab/Kota dengan pembiayaan program TBC meningkat	22 Kabupaten	
144.				91 Peningkatan Akses layanan TBC yang bermutu dengan TOSS TBC									
					Cakupan pengobatan semua kasus TBC (case detection rate/CDR) yang diobati	990.100.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.11 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Cakupan pengobatan semua kasus TBC (case detection rate/CDR) yang diobati	80 Persentase	
145.				92 Pengendalian Faktor Resiko Penularan TBC									
					Jumlah Kab/Kota yang sudah melaksanakan pengobatan pencegahan dengan INH (PP-INH) untuk anak < 5 tahun	742.060.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.11 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Kab/Kota yang sudah melaksanakan pengobatan pencegahan dengan INH (PP-INH) untuk anak < 5 tahun	21 Kabupaten	
146.				93 Peningkatan Kemintraan TB melalui Forum Kordinas TBC									
					Jumlah Forum Koordinasi TBC di Kab/Kota	374.777.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.11 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Forum Koordinasi TBC di Kab/Kota	21 Kabupaten	
147.				94 Peningkatan Kemandirian Masyarakat dalam Penanggulangan TBC									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Persentase kasus TBC yang ditemukan dan dirujuk oleh masyarakat atau organisasi kemasyarakatan (active case finding)	293.931.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.11 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase kasus TBC yang ditemukan dan dirujuk oleh masyarakat atau organisasi kemasyarakatan (active case finding)	25 Persentase	
148.				95 Penguatan Sistem Manajemen Layanan TBC									
					Persentase Laboratorium Mikroskopis mengikuti uji silang dengan hasil baik	982.932.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.11 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase Laboratorium Mikroskopis mengikuti uji silang dengan hasil baik	100 Persentase	
149.				96 Pelatihan Konprehensif HIV									
					Jumlah peserta terlatih Komprehensif HIV	2.867.400.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.11 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Peserta Terlatih Komprehensif IMS - HIV AIDS	100 Orang	
150.				97 Pelatihan Layanan Tes HIV									
					Jumlah peserta terlatih TB DOTS dan KTHIV	1.000.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.11 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Peserta Terlatih TIPK Pada Layanan TB DOTS dan Konselor KTHIV	100 Orang	
151.				98 Workshop Early Infant Diagnose									
					Jumlah Bidan yang mengikuti Workshop Task Shifting dan Pengambilan Sampek EID	900.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.11 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Bidan yang mengikuti Workshop Task Shifting dan Pengambilan Sampek EID	100 Orang	
152.				99 Pembinaan Teknis Program HIV ke Kab/Kota									
					Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan Pembinaan Teknis Program HIV-AIDS	456.850.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.11 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan Pembinaan Teknis Program HIV-AIDS	29 Kabupaten	
153.				100 Dukungan Tatalaksana HIV/AIDS									
					Jumlah layanan yang mengirim Spesimen Viral Load dan EID	980.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.11 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah layanan yang mengirim Spesimen Viral Load dan EID	240 Layanan	
154.				102 Pelatihan Mikroskopis Malaria									
					Jumlah peserta terlatih Mikroskopis Malaria	320.700.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.11 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah peserta terlatih Mikroskopis Malaria	25 Orang	
155.				103 Pelayanan PME Malaria									
					Jumlah layanan yang melaksanakan PME Malaria	976.600.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.11 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah layanan yang melaksanakan PME Malaria	5 Layanan	
156.				104 Pelayanan Kesehatan Penanggulangan Bencana									
					Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan sebelum dan saat bencana	1.700.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.02 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan sebelum dan saat bencana	1400 Orang	

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
157.	Kesehatan	22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	API Malaria; Angka penemuan kasus baru kusta (NCDR); Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk; Persentase penanganan kesehatan pada kejadian luar biasa; Persentase perempuan umur 30-50 tahun yang dideteksi dini kanker serviks dan payudara; Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi; Tingkat prevalensi DBD; Tingkat prevalensi Tuberkulosis	105 Pelayanan Kesehatan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) Penyakit									
					Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan sebelum dan saat KLB	500.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.11 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan sebelum dan saat KLB	1400 Orang	
158.				106 Scalling Up Pencegahan, Diagnosis dan Tata Laksana Pengobatan Tepat Malaria									
					Jumlah Orang Yang ditemukan dan diobati malaria	549.898.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.11 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Orang Yang ditemukan dan diobati malaria	29 Orang	
159.				107 Penyusunan RAD Malaria									
					Jumlah RAD Malaria	810.870.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.11 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah RAD Malaria	29 Dokumen	
160.				108 Assesment Pengendalian Vektor Malaria Terpadu									
					Pemetaan Endemisitas malaria	652.340.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.11 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Pemetaan Endemisitas malaria	29 Dokumen	
161.				109 Peningkatan Kapasitas Tenaga Indor Resedual Spraying (IRS)									
					Jumlah Peserta Yang terlatih	320.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.11 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Peserta Yang terlatih	17 Orang	
162.				110 Workshop Tata Laksana Pengobatan Malaria									
					Jumlah Dokter yang mengikuti workshop pengobatan malaria	417.500.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.11 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokter yang mengikuti workshop pengobatan malaria	5 Orang	
163.				111 Workshop Elektronik Sistem Surveilans Malaria									
					Jumlah Orang Workshop Elektronik Sistem Surveilans Malaria	414.510.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.11 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Orang Workshop Elektronik Sistem Surveilans Malaria	4 Orang	
164.		28 Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Cakupan pelayanan keehatan lembaga mitra di 5 wilayah adat; Prevalensi penyalahgunaan narkoba; Unmet need pelayanan kesehatan	12 Pengelolaan mitra pembangunan kesehatan									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET	
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
					Jumlah Mitra atau lembaga kemitraan	800.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.02.05.1.01 - Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	1.02.05.1.01.01 - Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Mitra atau lembaga kemitraan	18 Lembaga		
165.		29 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Angka Kematian Balita (AKBa); Cakupan Kelurahan/Kampung Universal Child Immunization (UCI); Cakupan balita OAP yang bergizi baik; Cakupan imunisasi dasar lengkap pada bayi; Cakupan kunjungan bayi (KN1); Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif; Prevalensi Malnutrisi (wasting/obesitas) pada anak balita; Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita; Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita; Rasio posyandu yang aktif	2 Imunisasi bagi anak balita										
					Jumlah anak Balita yang diimunisasi	120.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.03 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah anak Balita yang diimunisasi	90000 Orang		
166.					7 Monitoring, evaluasi dan pelaporan									
167.					9 Peningkatan Kemampuan Bidan di Desa untuk pencegahan penularan HIV/AIDS dari ibu ke Janin									
					Jumlah Peserta yang mengikuti Bimtek Pencegahan dan Penularan HIV/AIDS dari ibu ke anak	1.200.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.04 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Jumlah Peserta yang mengikuti Bimtek Pencegahan dan Penularan HIV/AIDS dari ibu ke anak	96 Orang		
168.					10 Evaluasi penggunaan Buku Kesehatan ibu dan Anak (KIA) dan pencatatan pelaporan di Puskesmas dan Kampung									
169.					17 Pelatihan Asksia BBLR									
170.					18 Peningkatan Kapasitas Tenaga dalam pencatatan dan pelaporan bagi pengelola data KIA									
					Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan Pencatatan dan Pelaporan Pengelola KIA	410.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.03 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan Pencatatan dan Pelaporan Pengelola KIA	60 Orang		
171.					19 Pembuatan Media Promosi KIA									
172.					21 Peningkatan Kunjungan Neonatus (KN1)									
173.					22 PMT 1000 hari Pertama Kelahiran									
					Jumlah Ibu yang mendapat PMT	3.000.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.06 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Ibu yang mendapat PMT	710000 Orang		
174.					23 Pelayanan bagi balita orang asli Papua									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Jumlah Balita OAP yang diberi Pelayanan	2.000.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.03 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Balita OAP yang diberi Pelayanan	100 Orang	
175.				24 Pelatihan Pelayanan Kesehatan Anak Balita dan Pra sekolah								60 Orang	
					Jumlah Petugas yang dilatih	410.000.000,00							
176.				25 Pengadaan alat permainan edukatif									
					Jumlah Alat Permainan Edukatif yang diadakan	200.000.000,00						10 Alat	
177.		30 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	Persentase lansia yang memiliki dan memanfaatkan Jaminan Kesehatan	7 Monitoring, evaluasi dan pelaporan									
					Jumlah Laporan Monev	390.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.05 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Jumlah Laporan Monev	29 Laporan	
178.				17 Pengadaan Lansia KIT									
					Jumlah Lansia KIT yang diadakan	350.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.05 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Jumlah Lansia KIT yang diadakan	56 Unit	
179.		32 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Angka Kematian Bayi (AKB) ; Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup; Cakupan kunjungan Ibu hamil K4; Cakupan pelayanan nifas; Persentase bayi OAP baru lahir yang memperoleh pelayanan kesehatan; Persentase ibu hamil (OAP) yang rutin melakukan pemeriksaan K3	3 Pertolongan persalinan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu									
					Jumlah pertolongan persalinan	300.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.03 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah pertolongan persalinan	50 Orang Kali	
180.				5 Monitoring evaluasi bimbingan teknis dan validasi data dari pengelola program Provinsi ke Kabupaten/Kota									
					Cakupan persalinan di fasilitas kesehatan	45.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.03 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Cakupan persalinan di fasilitas kesehatan	65 %	
					Jumlah kabupaten/kota yang dilakukan monev program ibu	260.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.03 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah kabupaten/kota yang dilakukan monev program ibu	5 Kabupaten	
					Monitoring evaluasi bimbingan teknis dan validasi data dari pengelola program Provinsi ke Kabupaten/Kota	450.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.03 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Monitoring evaluasi bimbingan teknis dan validasi data dari pengelola program Provinsi ke Kabupaten/Kota	5 Laporan	
181.				10 Pelatihan stimulasi intervensi , deteksi dini tumbuh kembang bayi Balita dan anak Prasekolah bagi pengelola Kabupaten/kota dan Puskesmas dan pengadaan alat permainan (APE)									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Petugas terlatih SDIDTK dan jumlah APE	190.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.03 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Petugas terlatih SDIDTK dan jumlah APE	20 Orang Paket	
					Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan SDITTK	0,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.03 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan SDITTK	0 Orang	
182.				38 Peningkatan Kapasitas Tenaga dalam pencatatan dan pelaporan bagi pengelola data KIA									
					Jumlah petugas dilatih	410.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.04 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Jumlah petugas dilatih	29 Orang	
183.				41 Penerapan MTBS /M									
					Jumlah tenaga terlatih	160.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.03 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah tenaga terlatih	20 Orang	
184.				46 Perawatan secara berkala bagi ibu hamil bagi keluarga kurang mampu									
					Jumlah Ibu Hamil keluarga kurang mampu yang dirawat	410.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.03 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Ibu Hamil keluarga kurang mampu yang dirawat	29 Orang Kali	
185.				47 Pelatihan Kegawat daruratan maternal-neonatal									
					Jumlah Tenaga yang dilatih	410.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.03 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Tenaga yang dilatih	20 Orang	
186.				48 Supervisi Fasilitatif KIA									
					Jumlah Kab/Kota yang disupervisi	300.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.03 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Kab/Kota yang disupervisi	10 Kabupaten	
187.				49 Pengadaan Kartu Ibu, Buku KIA, Buku Kohort/Register pelayanan kesehatan keluarga									
					Jumlah Kartu Ibu, Buku KIA, Buku Kohort/Register yang diadakan	300.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.03 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Kartu Ibu, Buku KIA, Buku Kohort/Register yang diadakan	300 Buku	
188.				50 Pengadaan Alat, Bahan dan Obat dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak									
					Jumlah Alat, Bahan dan Obat obatan KIA yang diadakan	500.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.03 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Alat, Bahan dan Obat obatan KIA yang diadakan	10 Alat	
189.				51 Penggunaan buku KIA di masyarakat melalui pelatihan petugas dan pengadaan buku									
					Jumlah Buku KIA yang diadakan	980.000.000,00						29 Buku	
					Jumlah Petugas yang dilatih	0,00						0 Orang	

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
190.	Kesehatan	32 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Angka Kematian Bayi (AKB) ; Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup; Cakupan kunjungan Ibu hamil K4; Cakupan pelayanan nifas; Persentase bayi OAP baru lahir yang memperoleh pelayanan kesehatan; Persentase ibu hamil (OAP) yang rutin melakukan pemeriksaan K3	52 Peningkatan kunjungan bayi Neonatus (KN1)									
					Jumlah Persentase Neonatus yang diskriming	460.000.000,00						50 %	
191.		33 Program kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan	Cakupan Dinas Kesehatan dan RSUD kabupaten/kota yang memiliki RENSTRA yang berkualitas; Cakupan kabupaten/kota yang memiliki data profil kesehatan secara lengkap	9 Lokakarya Penyusunan Program									
					Jumlah Peserta Yang Mengikuti Lokakarya	350.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.04 - Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.04.03 - Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Lokakarya (Sub Bagian Program)	2 Orang	
					Jumlah Peserta yang mengikuti Lokakarya	204.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.04 - Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.04.03 - Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Peserta yang mengikuti Lokakarya (Sub Bagian Program)	50 Orang Kegiatan	
192.				10 Evaluasi Program Akhir Tahun									
					Jumlah Laporan hasil evaluasi yang dihasilkan	120.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.04 - Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.04.03 - Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Laporan hasil evaluasi yang dihasilkan dalam pertemuan Rapat kerja Kesehatan (Subang Program)	1 Dokumen	
					Jumlah Dokumen Evaluasi	70.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.04 - Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.04.03 - Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Dokumen Evaluasi Subang Program (sub program)	1 Dokumen	
193.				23 Pertemuan Rapat kerja Kesehatan Provinsi papua									
					Jumlah Peserta yang mengikuti raker Kesehatan	1.200.000.000,00						200 Orang	
194.				29 Monitoring dan Supervisi perencanaan serta sinkronisasi Program									
					Jumlah Laporan Monitoring Evaluasi yang dihasilkan	570.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.18 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Monitoring Evaluasi yang dihasilkan	60 Kabupaten	
195.				31 Pendampingan perencanaan pada daerah Bermasalah Kesehatan									
					Jumlah Kabupaten bermasalah Kesehatan yang didampingi perencanaannya	1.400.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.18 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten bermasalah Kesehatan yang didampingi perencanaannya kesehatan (Sub Bagian Program)	18 Kabupaten	
196.				36 Penyusunan Naskah Akademik Kebijakan Tahunan Pembangunan Kesehatan									
					Jumlah Dokument yang disusun	1.000.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.28 - Pengelolaan Penelitian Kesehatan	Jumlah Dokument yang disusun (Sub Bagian Program)	1 Dokumen	

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
197.	Kesehatan	33 Program kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan	Cakupan Dinas Kesehatan dan RSUD kabupaten/kota yang memiliki RENSTRA yang berkualitas; Cakupan kabupaten/kota yang memiliki data profil kesehatan secara lengkap	37 Pengelolaan Perencanaan Tahunan Provinsi Papua									
					Jumlah Laporan yang disusun	90.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.18 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan yang disusun (Subbag Program)	1 Laporan	
198.				40 Penyusunan renstra Dinas Kesehatan Provinsi Papua & Kabupaten/Kota									
					Jumlah Dokumen yang dihasilkan	390.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.18 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen yang dihasilkan (Sub Bagian Program)	50 Dokumen	
199.				46 Bimbingan Teknis (Bimtek) Perencanaan dan Sinkronisasi Program									
					Jumlah kabupaten yang dibimtek	600.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.02.03.1.02 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.03.1.02.01 - Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Kabupaten/Kota yang di Bimtek (Sub Bagian Program)	20 Kabupaten	
200.				47 Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparat Perencana									
					Jumlah Aparatur yang dibina	350.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.02.03.1.02 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.03.1.02.01 - Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Aparatur yang dibina mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas perencanaan pembangunan daerah, pengelolaan keuangan daerah serta sertifikasi pengadaan barang dan jasa (Sub Program)	18 Orang	
201.				48 pertemuan rutin harmonisasi perencanaan berbasis wilayah adat									
					jumlah kabupaten/kota yang mengikuti pertemuan	420.000.000,00						29 Kabupaten	
202.				49 Penyusunan dan review (evaluasi Renstra Dinas Kesehatan Papua)									
					Jumlah Laporan yang dihasilkan	330.000.000,00						1 Dokumen	
203.		35 Program upaya kesehatan perorangan	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ; Cakupan Kabupaten/Kota yang memiliki kebijakan PHBS; Cakupan OAP yang sudah memiliki dan memanfaatkan Kartu Papua Sehat; Persentase ODGJ (orang dengan gangguan jiwa) peserta konseling yang terpulihkan; Persentase PAK yang diawasi; Persentase Puskesmas yang mempunyai ketersediaan obat dan vaksin	11 Pelaksanaan Kartu Papua Sehat									
					Peserta KPS terlayani	3.500.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.16 - Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah OAP terlayani di KPS	1400000350 Orang	
					Jumlah OAP yang terlayani KPS	120.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.19 - Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Jumlah OAP yang terlayani KPS	150000 Orang	

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
204.	Kesehatan	35 Program upaya kesehatan perorangan	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ; Cakupan Kabupaten/Kota yang memiliki kebijakan PHBS; Cakupan OAP yang sudah memiliki dan memanfaatkan Kartu Papua Sehat; Persentase ODGJ (orang dengan gangguan jiwa) peserta konseling yang terpulihkan; Persentase PAK yang diawasi; Persentase Puskesmas yang mempunyai ketersediaan obat dan vaksin	15 Pelayanan kesehatan daerah terpencil									
205.				16 Pengembangan fasyankes di 5 (lima) regional dukungan pelaksanaan KPS									
					Jumlah Pengembangan Rumah Sakit Regional	63.000.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.01.01 - Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Regional dan Rumah Sakit Khusus Preventif Penyakit, Serta Rumah Sakit Tipe A terbaik Di Kawasan Timur Indonesia, serta Tersedianya Rumah Sakit Khusus pencegahan penyakit di Papua	5 Unit	
206.				19 Bimbingan teknis kepada sarana penyalur alat kesehatan									
207.				22 Workshop Standar Akreditasi RS KARS edisi I									
					Jumlah Peserta	450.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.04 - Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.04.02 - Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	Jumlah Peserta	65 Orang	
208.				23 Workshop Implementasi Data Sarana, Prasarana (ASPAK) di Fasyankes Tingkat Lanjut									
					Jumlah Peserta	400.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.04 - Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.04.02 - Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	Jumlah Peserta yang mengikuti pertemuan	45 Orang	
209.				24 Workshop Standar Rumah Sakit Pendidikan									
					Jumlah Peserta	400.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.04 - Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.04.02 - Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	Jumlah Peserta yang mengikuti pertemuan	50 Orang	
210.				25 Workshop Penyusunan Perijinan dan Tata Kelola Lingkungan RS									
					Jumlah Peserta	350.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.04 - Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.04.02 - Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	Jumlah Peserta	35 Orang	
211.				26 Pelatihan BTCLS di Rumah Sakit									
					Jumlah Peserta	420.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.02.03.1.02 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.03.1.02.01 - Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Peserta yang mengikuti pelatihan (Seks Rujukan)	35 Orang	
212.				27 Pelatihan ATCLS di Rumah Sakit									
					Jumlah Peserta	420.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.02.03.1.02 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.03.1.02.01 - Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Peserta yang mengikuti pelatihan ATCLS	35 Orang	

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
213.	Kesehatan	35 Program upaya kesehatan perorangan	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ; Cakupan Kabupaten/Kota yang memiliki kebijakan PHBS; Cakupan OAP yang sudah memiliki dan memanfaatkan Kartu Papua Sehat; Persentase ODGJ (orang dengan gangguan jiwa) peserta konseling yang terpulihkan; Persentase PAK yang diawasi; Persentase Puskesmas yang mempunyai ketersediaan obat dan vaksin	28 Bimbingan Teknis Cerebrovaskuler bagi tenaga Kesehatan di tingkat lanjut									
					Jumlah Peserta	300.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.02.03.1.01 - Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	1.02.03.1.01.01 - Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Peserta Yankes Yang mengikuti pertemuan	35 Orang	
214.				29 Bimbingan teknis penanganan cancer bagi tenaga kesehatan di Fasyankes									
					Jumlah Peserta	250.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.02.03.1.02 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.03.1.02.01 - Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Peserta yang mengikuti pertemuan	35 Orang	
215.				30 Peningkatan kemampuan Teknis Audit Internal Radio Diagnostik									
					Jumlah Peserta	280.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.02.03.1.02 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.03.1.02.01 - Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Peserta yang mengikuti pertemuan (Yankes)	30 Orang	
216.				31 Peningkatan Kemampuan Teknis PME dan PPRA									
					Jumlah Peserta	400.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.02.03.1.02 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.03.1.02.01 - Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Peserta yang mengikuti pertemuan	35 Orang	
217.				32 Workshop pembentukan RS BLUD									
					Jumlah Peserta	400.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.01.03 - Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Peserta Yang mengikuti pertemuan (Yankes)	35 Orang	
218.				33 Workshop Penyusunan Pedoman Sistem Rujukan Regional									
					Jumlah Pedoman Sistem Rujukan	600.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.24 - Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik	Jumlah Pedoman Sistem Rujukan	7 Dokumen	
219.				34 Bimbingan teknis pelayanan Telemedicine di fasyankes									
					Jumlah petugas yang mendapatkan bimbingan teknis pelayanan Telemedicine di fasyankes	410.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.01.20 - Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah petugas yang mendapatkan bimbingan teknis pelayanan Telemedicine di fasyankes	26 Orang	
220.				35 Pelatihan SPGDT dan pembentukan PSC di Kabupaten									
					Jumlah Dinas Kesehatan yang mendapat pelatihan SPGDT	400.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.02.03.1.01 - Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	1.02.03.1.01.01 - Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dinas Kesehatan yang mendapat pelatihan SPGDT	40 Orang	

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
221.	Kesehatan	35 Program upaya kesehatan perorangan	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ; Cakupan Kabupaten/Kota yang memiliki kebijakan PHBS; Cakupan OAP yang sudah memiliki dan memanfaatkan Kartu Papua Sehat; Persentase ODGJ (orang dengan gangguan jiwa) peserta konseling yang terpulihkan; Persentase PAK yang diawasi; Persentase Puskesmas yang mempunyai ketersediaan obat dan vaksin	36 Workshop Rekam Medik Integrasi di Fasyankes									
					Jumlah peserta workshop Rekam Medik Integrasi di fasyankes	400.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.01.03 - Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah peserta workshop Rekam Medik Integrasi di fasyankes	40 Orang	
222.				37 Workshop Sistem Informasi Manajemen RS (SIM RS)									
					Jumlah peserta Workshop SIM RS	400.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.01.03 - Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah peserta Workshop SIM RS	50 Orang	
223.		36 Program Sumber Daya Kesehatan	Cakupan jumlah kabupaten/kota yang memiliki Rumah Sakit ; Cakupan pembangunan dan pengembangan Rumah Sakit rujukan di 5 wilayah adat; Jumlah tenaga kesehatan yang terlatih untuk PON; Rasio Dokter per satuan penduduk ; Rasio Tenaga medis per satuan penduduk ; Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk; Rasio rumah sakit per satuan penduduk	2 Pelaksanaan Tubel D3, D4, S1, S2 Kesehatan									
					jumlah siswa yang terbayar	500.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.02.03.1.01 - Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	1.02.03.1.01.01 - Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	jumlah siswa yang terbayar	100 Orang	
224.				8 Koordinasi Teknis Program SDK dengan Kab/Kota									
					Jumlah Kegiatan	800.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.02.03.1.01 - Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	1.02.03.1.01.01 - Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Kegiatan	120 Kegiatan	
					Jumlah laporan	428.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.02.03.1.01 - Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	1.02.03.1.01.01 - Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah laporan	29 Dokumen	
225.				9 Pembinaan dan Pengawasan Mutu Tenaga Kesehatan									
					Jumlah laporan	9.000.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.02.03.1.01 - Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	1.02.03.1.01.01 - Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah laporan	29 Laporan	
					Jumlah orang yang dibina	1.500.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.02.03.1.01 - Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	1.02.03.1.01.01 - Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah orang yang dibina serta Jumlah SDM Tenaga Dokter Asli Papua yang di rekrut dan d3 analis kesehatan	19 Orang	
226.				47 Pelaksanan sertifikasi oleh MTKP di Regional Wilayah									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Jumlah SDM Kesehatan yang Terakreditasi	1.717.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.02.03.1.02 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.03.1.02.01 - Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah SDM Kesehatan yang Terakreditasi	380 Orang	
					Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti pelatihan sertifikasi	1.717.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.02.03.1.02 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.03.1.02.01 - Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti pelatihan sertifikasi	1000 Orang	
227.				68 Pembinaan Organisasi Profesi Bidang Kesehatan									
					Jumlah Organisasi Profesi Bidang Kesehatan yang dibina	300.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.02.03.1.01 - Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	1.02.03.1.01.01 - Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Organisasi Profesi Bidang Kesehatan yang dibina	16 Kelompok	
					Jumlah organisasi kesehatan yang dibina	300.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.02.03.1.01 - Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	1.02.03.1.01.01 - Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah organisasi kesehatan yang dibina	16 Organisasi	
228.				69 Monitoring dan Evaluasi tenaga Kesehatan									
					Jumlah Pertemuan Koordinasi SDK	450.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.02.03.1.01 - Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	1.02.03.1.01.01 - Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Pertemuan Koordinasi SDK	29 Kegiatan	
					Jumlah laporan monev yang dihasilkan	400.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.02.03.1.01 - Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	1.02.03.1.01.01 - Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah laporan monev yang dihasilkan	29 Laporan	
229.				71 Pelatihan analisis kebutuhan diklat di regional papua									
					presentase akreditasi balatkes papua	2.000.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.02.03.1.02 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.03.1.02.01 - Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	presentase akreditasi balatkes papua	30 Kegiatan	
					Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan analisis	1.300.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.02.03.1.02 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.03.1.02.01 - Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan analisis	30 Orang	
230.				74 Peningkatan Kapasitas penyuluh tenaga kesehatan di lima regional									
					Jumlah analisis kebutuhan diklat di 5 regional	575.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.02.03.1.02 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.03.1.02.01 - Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah analisis kebutuhan diklat di 5 regional	29 Orang	
					Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas penyuluh tenaga kesehatan	575.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.02.03.1.02 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.03.1.02.01 - Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas penyuluh tenaga kesehatan	30 Orang	
231.				77 Peningkatan kapasitas widyawara									
					Jumlah WI yang mengikuti diklat	800.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.02.03.1.02 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.03.1.02.01 - Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah WI yang mengikuti diklat dan revolusi mental kepemimpinan	60 Orang	
232.				79 Pelatihan jabatan fungsional administratur Kesehatan									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Jumlah tenaga adminkes	1.200.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.02.03.1.02 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.03.1.02.01 - Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah tenaga adminkes	29 Orang	
233.				84 Training Need Assesment (TNA)									
					Jumlah TNA setahun	150.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.02.03.1.01 - Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	1.02.03.1.01.01 - Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah TNA setahun	12 Orang	
					Jumlah peserta yang mengikuti training asessment	130.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.02.03.1.01 - Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	1.02.03.1.01.01 - Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah peserta yang mengikuti training asessment	12 Orang	
234.				85 Dukungan pengembangan Fakultas Kedokteran Uncen, Ners dan FKM Uncen									
					Jumlah fasilitas sarana dan prasarana yang mendapatkan dukungan	9.000.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.02.03.1.01 - Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	1.02.03.1.01.01 - Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah fasilitas sarana dan prasarana yang mendapatkan dukungan	3 Kegiatan	
235.				87 Pelaksanaan Akreditasi Balai pelatihan tenaga kesehatan sebagai pusat pelatihan lokal terbaik di Papua									
					Jumlah Pelaksana Akreditasi Balatkes	200.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.04 - Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.04.03 - Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Pelaksana Akreditasi Balatkes	35 Orang Bulan	
					Jumlah dokumen mutu akreditasi balai latihan tenaga kesehatan yang dihasilkan	0,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.04 - Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.04.03 - Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah dokumen mutu akreditasi balai latihan tenaga kesehatan yang dihasilkan	0 Dokumen	
236.				88 Pembinaan perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan									
					Jumlah dokument perencanaan kebutuhan SDM Kab/Kota	600.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.02.03.1.01 - Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	1.02.03.1.01.01 - Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah dokument perencanaan kebutuhan SDM Kab/Kota	29 Dokumen	
237.				90 Satuan tugas pelayanan kesehatan kaki telanjang/jalan kaki, pelayanan terapung dan terbang (Satgas kijang)									
					Jumlah Tenaga Kesehatan yang diberdayakan	8.000.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.02.03.1.01 - Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	1.02.03.1.01.01 - Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Tenaga Kesehatan yang diberdayakan	144 Orang	
238.				92 Pembangunan gedung dan peralatan serta pemeliharaan bapelkes									
					Jumlah Gedung kantor yang dibangun	8.250.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.01.04 - Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Gedung kantor yang dibangun	1 M2	
239.				93 Pelatihan Master OF Training									
					Jumlah peserta MOT	416.882.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.02.03.1.01 - Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	1.02.03.1.01.01 - Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah peserta MOT	30 Orang	
240.				95 Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Analis Kesehatan									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Jumlah Rekrutmen Siswa Sekolah Menengah Kejuruan Analis Kesehatan	300.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.02.03.1.01 - Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	1.02.03.1.01.01 - Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Rekrutmen Siswa Sekolah Menengah Kejuruan Analis Kesehatan	130 Orang	
					Jumlah Bahan Habis Pakai Sekolah SMAKES	1.800.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.01.14 - Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)	Jumlah Bahan Habis Pakai Sekolah SMAKES	180 Rupiah	
					Jumlah Guru Honorar yang dibayarkan Honorinya	2.700.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.02.03.1.01 - Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	1.02.03.1.01.01 - Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Guru Honorar yang dibayarkan Honorinya	40 Orang Bulan	
					Jumlah Alat Praktek Siswa yang diadakan	1.800.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.01.10 - Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Praktek Siswa yang diadakan	20 Unit Tahun	
					Jumlah Siswa yang ditanggung Biaya Prakteknya	850.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.02.03.1.02 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.03.1.02.01 - Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Siswa yang ditanggung Biaya Prakteknya	200 Orang Tahun	
					Jumlah Siswa yang dikukuhkan	250.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.02.03.1.01 - Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	1.02.03.1.01.01 - Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Siswa yang dikukuhkan	240 Orang Tahun	
					Jumlah Guru yang mengikuti Pelatihan	1.000.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.02.03.1.02 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.03.1.02.01 - Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Guru yang mengikuti Pelatihan	17 Orang	
					Jumlah Guru yang mengikuti Pelatihan Penyusunan Perangkat Pelajaran	300.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.02.03.1.02 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.03.1.02.01 - Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Guru yang mengikuti Pelatihan Penyusunan Perangkat Pelajaran	45 Orang	
					Jumlah RAKORNIS yang diikuti	700.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.02.03.1.02 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.03.1.02.01 - Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah RAKORNIS yang diikuti	9 Kegiatan	
241.				103 Pertemuan Kepala Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan									
242.				105 Pelatihan BTLs									
					Jumlah Peserta Diklat BTLs	516.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.02.03.1.01 - Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	1.02.03.1.01.01 - Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Peserta Diklat BTLs	30 Orang	
243.				106 Pelatihan ATLS									
					Jumlah Peserta Diklat ATLS	516.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.02.03.1.01 - Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	1.02.03.1.01.01 - Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Peserta Diklat ATLS	30 Orang	
244.				108 Monitoring dan evaluasi dokter dan bidan PTT Pusat									
					Jumlah kabupaten yang dilakukan monev dokter dan bidan PTT pusat	350.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.02.03.1.01 - Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	1.02.03.1.01.01 - Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah kabupaten yang dilakukan monev dokter dan bidan PTT pusat	25 Kabupaten	
245.				109 Sosialisasi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Jumlah ASN yang tersosialisasi SKP	400.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.02.03.1.02 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.03.1.02.01 - Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah ASN yang tersosialisasi SKP	100 Orang	
246.				110 PELATIHAN AKREDITASI PELATIHAN BAGI PENYELENGGARA PELATIHAN									
					Jumlah Peserta Yang Mengikuti Pelatihan	350.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.02.03.1.02 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.03.1.02.01 - Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Pelatihan	30 Orang	
247.				112 Diklat jabatan fungsional bagi tenaga kesehatan									
					Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan	250.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.02.03.1.02 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.03.1.02.01 - Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan	15 Orang	
248.				113 diklat perhitungan angka kredit									
					Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan angka kredit	350.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.02.03.1.02 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.03.1.02.01 - Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan angka kredit	30 Orang	
249.				114 penarikan dokter PTT - gigi									
					Jumlah dokter dan dokter gigi PTT	0,00						0 Orang	
250.				116 Pembinaan dan pengawasan sarana distribusi Alkes di kabupaten / kota.									
					Jumlah Distributor Alkes di Kabupaten/Kota yang diawasi	250.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	1.02.04.1.01 - Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	1.02.04.1.01.01 - Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang Pak	Jumlah Distributor Alkes di Kabupaten/Kota yang diawasi	12 Perusahaan	
251.				117 Pengawasan Alkes di sarana fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes).									
					Jumlah Alkes pada Fasyankes yang diawasi	164.200.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	1.02.04.1.01 - Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	1.02.04.1.01.02 - Penyediaan dan pengelolaan Data Perizinan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK Berbasis Elektronik	Jumlah izi yang dikeluarkan	15 Lokasi	
252.				118 Pemantauan peredaran Alkes di Apotik dan Toko Alkes.									
					Jumlah Alkes yang memenuhi standar dipantau	250.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.01.21 - Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman Serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Alkes yang memenuhi standar dipantau	80 Laporan	
253.				119 Pembangunan Talud bertulang pengamanan Asrama									
					Panjang Talud Pengaman yang dibangun	0,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.01.11 - Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan	Panjang Talud Pengaman yang dibangun	0 Meter	
254.		37 Program Peningkatan Pelayanan Laboratorium	Cakupan kecukupan laboratorium dalam mendukung pelayanan kesehatan	1 Pengadaan Peralatan Laboratorium									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Jumlah Peralatan Lab. Kimia yg diadakan	3.350.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.01.15 - Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan	Jumlah Peralatan Lab. Kimia yg diadakan	2 Alat	
					Jumlah Peralatan Lab. Mikrobiologi yg diadakan	1.500.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.01.15 - Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan	Jumlah Peralatan Lab. Mikrobiologi yg diadakan	2 Alat	
					Jumlah Peralatan Lab. Immunologi yg diadakan	2.500.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.01.15 - Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan	Jumlah Peralatan Lab. Immunologi yg diadakan	1 Alat	
					Jumlah Peralatan Lab. Kimia Lingkungan yg diadakan	2.000.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.01.15 - Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan	Jumlah Peralatan Lab. Kimia Lingkungan yg diadakan	3 Alat	
255.				2 Pengadaan bahan pemeriksaan Laboratorium									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Jumlah Bhn Pemeriksaan Kimia Klinik yg diadakan	2.000.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.01.15 - Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan	Jumlah Bhn Pemeriksaan Kimia Klinik yg diadakan (Labkes)	1 Set	
					Jumlah Bhn Pemeriksaan Immunologi yg diadakan	3.000.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.01.15 - Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan	Jumlah Bhn Pemeriksaan Immunologi yg diadakan (labkes)	1 Set	
					Jumlah Bhn Pemeriksaan Mikrobiologi yg diadakan	1.500.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.01.15 - Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan	Jumlah Bhn Pemeriksaan Mikrobiologi yg diadakan (Labkes)	1 Set	
					Jumlah Bhn Pemeriksaan Viral Load yg diadakan	1.500.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.01.15 - Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan	Jumlah Bhn Pemeriksaan Viral Load yg diadakan (Labkes)	1 Set	
					Jumlah Bhn Pemeriksaan Hematologi yg diadakan	1.200.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.01.15 - Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan	Jumlah Bhn Pemeriksaan Hematologi yg diadakan (Labkes)	1 Set	
					Jumlah Bhn Pemeriksaan Urinalisa	1.500.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.04 - Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.04.03 - Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Bhn Pemeriksaan Urinalisa (Labkes)	1 Set	
					Jumlah Bhn Pemeriksaan TBC yg diadakan	1.500.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.01.15 - Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan	Jumlah Bhn Pemeriksaan TBC yg diadakan	1 Set	
					Jumlah Bhn Kimia Media Reagensia yg diadakan	1.500.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.01.15 - Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan	Jumlah Bhn Kimia Media Reagensia yg diadakan (Labkes)	1 Set	
					Jumlah Bhn Pemantapan Mutu yg diadakan	1.000.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.01.15 - Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan	Jumlah Bhn Pemantapan Mutu yg diadakan (Labkes)	1 Set	
					Jumlah Bhn Laboratorium Habis Pakai yg diadakan	2.500.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.01.15 - Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan	Jumlah Bhn Laboratorium Habis Pakai yg diadakan (Labkes)	1 Set	
256.				6 Bimbingan Teknik ke Kabupaten/Kota									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Jumlah Layanan Fasyankes yg dibimtek/bina	850.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.02.03.1.02 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.03.1.02.01 - Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Layanan Fasyankes yg dibimtek/bina (Labkes)	29 Kabupaten	
					Jumlah Layanan Fasyankes yg di Assesment	500.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.02.03.1.02 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.03.1.02.01 - Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Layanan Fasyankes yg di Assesment (Labkes)	15 Kabupaten	
					Jumlah Laporan Bintek dan Assesment	150.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.02.03.1.02 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.03.1.02.01 - Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Laporan Bintek dan Assesment (Labkes)	60 Laporan	
					Jumlah laporan pelayanan bimtek dan assessment	100.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.02.03.1.02 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.03.1.02.01 - Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah laporan pelayanan bimtek dan assessment (Labkes)	40 Laporan	
257.				23 Penjaminan mutu laboratorium									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Jumlah Bhn Consumble PME	350.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.04 - Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.04.03 - Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Bhn Consumble PME Labkesda	1 Kegiatan	
					Jumlah Tenaga Honorarium Pelaksanaan Mutu	86.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.04 - Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.04.03 - Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Tenaga Honorarium Pelaksanaan Mutu Labkesda	14 Orang	
					Jumlah Peralatan yg di Kalibrasi	400.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.04 - Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.04.03 - Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Peralatan yg di Kalibrasi Labkesda	200 Alat	
					Jumlah Tenaga Lab. yg mengikuti Magang	500.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.04 - Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.04.03 - Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Tenaga Lab. yg mengikuti Magang Labkesda	25 Orang	
					Jumlah Tenaga Lab. yg mengikuti Sertifikasi	400.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.04 - Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.04.03 - Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Tenaga Lab. yg mengikuti Sertifikasi Labkesda	20 Orang	
					Jumlah Fasyankes di Kab/Kota yg mengikuti PME	250.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.04 - Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.04.03 - Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasyankes di Kab/Kota yg mengikuti PME Labkesda	50 Unit	
					Jumlah Bhn Pengujian HIV-AIDS, TBC, Malaria	300.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.04 - Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.04.03 - Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Bhn Pengujian HIV-AIDS, TBC, Malaria Labkesda	3 Set	
					Jumlah Assesor yg melakukan Assesment Akreditasi	160.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.04 - Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.04.03 - Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Assesor yg melakukan Assesment Akreditasi Labkesda	8 Orang	
					Jumlah Pengiriman Bahan PME ke Fasyankes	150.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.04 - Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.04.03 - Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Pengiriman Bahan PME ke Fasyankes Labkesda	70 Unit	
					Jumlah Laporan Pemantapan Mutu Eksternal	90.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.04 - Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.04.03 - Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Laporan Pemantapan Mutu Eksternal Labkesda	70 Berkas	
258.				27 Peningkatan kapasitas tenaga Laboratorium									
					Jumlah tenaga yang di latih	900.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.02.03.1.02 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.03.1.02.01 - Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah tenaga yang di latih	100 Orang	
259.				29 Pemantapan Mutu Eksternal dan Internal									
					Jumlah Fasyankes yang mengikuti Pemantapan Mutu Eksternal	500.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.04 - Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.04.03 - Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasyankes yang mengikuti Pemantapan Mutu Eksternal	250 Unit	
260.				30 Pelatihan, Pemagangan dan Sertifikasi Tenaga Laboratorium									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Jumlah Tenaga Laboratorium yang mengikuti Pelatihan, Magang dan Sertifikasi	600.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.04 - Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.04.03 - Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Tenaga Laboratorium yang mengikuti Pelatihan, Magang dan Sertifikasi	15 Orang	
261.				31 Pengambilan Sampel Kesehatan Masyarakat, KLB dan Sampel Lingkungan									
					Jumlah Sampel Kesehatan Masyarakat, KLB dan Lingkungan yang dipantau	400.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.02 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Sampel Kesehatan Masyarakat, KLB dan Lingkungan yang dipantau	500 Sampel	
262.				32 Akreditasi dan Re Akreditasi Laboratorium									
					Jumlah Dokumen Akreditasi ISO 17025:2017, ISO 17043:2008 dan ISO 15189:2007 yang terakreditasi	1.000.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.04 - Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.04.03 - Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Dokumen Akreditasi ISO 17025:2017, ISO 17043:2008 dan ISO 15189:2007 yang terakreditasi	7 Dokumen	
263.				33 Pembangunan Gedung Laboratorium Tahap II									
					Jumlah Gedung yang dibangun	4.000.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.01.11 - Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Gedung yang dibangun	1 Unit	
264.				34 Pemeliharaan Alat laboratorium, Kalibrasi, Pengolahan Limbah, Jaringan Limbah									
					Jumlah Alat dan Jaringan Limbah yang diperbaiki dan Terkalibrasi	1.500.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.01.17 - Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat dan Jaringan Limbah yang diperbaiki dan Terkalibrasi	103 Alat	
265.				35 Penyusunan Dokumen AMDAL Laboratorium									
					Jumlah Dokumen AMDAL yang tersusun	1.000.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.04 - Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.04.03 - Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Dokumen AMDAL yang tersusun	1 Dokumen	
266.		45 Program Pengembangan Data/Informasi	Cakupan ketersediaan data bidang kesehatan di tingkat provinsi yang valid dan reliabel	1 Pengelolaan data/informasi kesehatan									
					Data informasi kesehatan kabupaten kota di provinsi Papua	710.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.03 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	1.02.02.1.03.01 - Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Data informasi kesehatan kabupaten kota di provinsi Papua	25 Kabupaten	
					Monitoring SIK di kabupaten kota	310.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.03 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	1.02.02.1.03.02 - Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Monitoring SIK di kabupaten kota	15 Kabupaten	
					Pertemuan pemutakhiran data kesehatan provinsi Papua	410.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.03 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	1.02.02.1.03.02 - Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Pertemuan pemutakhiran data kesehatan provinsi Papua	18 Kegiatan	
					Koordinasi dengan Pusdatin Kemkes RI	100.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.03 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	1.02.02.1.03.02 - Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Koordinasi dengan Pusdatin Kemkes RI	3 Kali	

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
267.	Kesehatan	45 Program Pengembangan Data/Informasi	Cakupan ketersediaan data bidang kesehatan di tingkat provinsi yang valid dan reliabel	4 Pembentukan Forum/Kelompok kerja SIK									
					Jumlah Kabupaten yang difasilitasi pembentukan Forum SIK	300.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.03 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	1.02.02.1.03.02 - Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Kabupaten yang difasilitasi pembentukan Forum SIK	1 Kabupaten	
268.				8 Penyusunan Profil Kesehatan Provinsi									
					Penyusunan Profil Kesehatan Provinsi Papua	110.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.03 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	1.02.02.1.03.02 - Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Penyusunan Profil Kesehatan Provinsi Papua	1 Lokasi	
					Pembentukan tim penyusun profil kesehatan provinsi Papua	0,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.03 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	1.02.02.1.03.02 - Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Pembentukan tim penyusun profil kesehatan provinsi Papua	0 Tim	
					Jumlah Dokumen Profil Kesehatan yang dihasilkan	0,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.03 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	1.02.02.1.03.02 - Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Profil Kesehatan yang dihasilkan	0 Buku	
269.				10 Pembinaan penyusunan profil Kesehatan Kab/Kota									
					Jumlah Kabupaten yang dibina menyusun Profil Kesehatan	250.000.000,00						5 Kabupaten	
270.				11 Pengelolaan Website Dinas Kesehatan Provinsi Papua									
					Rapat Koordinasi Pembentukan Tim Pengelola Website Dinas	35.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.03 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	1.02.02.1.03.01 - Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Rapat Koordinasi Pembentukan Tim Pengelola Website Dinas	1 Kegiatan	
					Maintenance website dinas kesehatan provinsi papua	200.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.03 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	1.02.02.1.03.01 - Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Maintenance website dinas kesehatan provinsi papua	12 Bulan	
					Pembuatan website dinas kesehatan provinsi Papua	0,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.03 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	1.02.02.1.03.01 - Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Pembuatan website dinas kesehatan provinsi Papua	0 Buah	
271.				12 Bimbingan Teknis Pengelolaan data dan Informasi Kesehatan									
					Jumlah peserta yang mengikuti bimtek	320.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.03 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	1.02.02.1.03.01 - Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah peserta yang mengikuti bimtek	29 Orang	
272.				20 Penyediaan Prasarana Monitoring Sistem informasi Puskesmas dan Sistem informasi Rumah Sakit									
					Termonitornya pelayanan pasien pada Sistem informasi Puskesmas dan Sistem informasi Rumah sakit	650.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.03 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	1.02.02.1.03.01 - Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Termonitornya pelayanan pasien pada Sistem informasi Puskesmas dan Sistem informasi Rumah sakit	10 Unit	
273.				21 Pengadaan saran dan prasarana sistem informasi kesehatan (Hardware dan Software)									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Jumlah sarana sistem infromasi kesehatan (SIK)	2.200.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.03 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	1.02.02.1.03.03 - Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah sarana sistem infromasi kesehatan (SIK)	1 Aplikasi	
274.		46 Program Peningkatan Kesehatan Jiwa Masyarakat	Cakupan Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa ; Cakupan jumlah Rumah sakit yang sudah terakreditasi ; Cakupan pasien penyakit jiwa yang tertangani; Persentase ODGJ (orang dengan gangguan jiwa) peserta konseling yang terpulihkan	1 Pelayanan Kesehatan Jiwa di Kabupaten/Kota									
					Jumlah masyarakat yang mendapat pengobatan jiwa di kabupateniwa	12.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.13 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah masyarakat yang mendapat pengobatan jiwa di kabupateniwa	120 Orang	
					paseien gangguan jiwa (ODGJ) yang di obati per Kabupaten sejumlah 10 orang. masyarakat yang mendapatkan Penyuluhan kesehatan jiwa 50 orang per Kabupaten.	110.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.13 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	paseien gangguan jiwa (ODGJ) yang di obati per Kabupaten sejumlah 10 orang. masyarakat yang mendapatkan Penyuluhan kesehatan jiwa 50 orang per Kabupaten.	120 Orang Kegiatan	
					Jumlah peserta penyuluhan di kabupaten	0,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.02.03.1.02 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.03.1.02.02 - Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah peserta penyuluhan di kabupaten	0 Orang	
					Jumlah peserta bimtek	170.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.02.05.1.03 - Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	1.02.05.1.03.01 - Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	Jumlah peserta bimtek	20 Orang	
275.					8 pelatihan deteksi dini dan penatalaksanaan gangguan jiwa bagi tenaga kesehatan di Kabupaten dan PKM								
					terlaksananya penanggulangan Keswa dan Napza di Kab/kota	0,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.13 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	terlaksananya penanggulangan Keswa dan Napza di Kab/kota	0 Kabupaten	
					Jumlah peserta yang mengikuti bimtek	300.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.13 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah peserta yang mengikuti bimtek	29 Orang	
276.					10 Pelatihan Penanganan Dampak Psikologis pada anak korban kekerasan bagi tenaga kesehatan di Kab dan PKM								
					terlaksananya penanganan dampak Psikologis pada anak	0,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.13 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	terlaksananya penanganan dampak Psikologis pada anak	0 Kabupaten	
					Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan	350.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.13 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan	29 Orang	
277.		47 Upaya Kesehatan Perorangan	Cakupan Jaminan Kesehatan	56 Bimbingan Teknis Akreditasi Rumah Sakit									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Jumlah Peserta Bimtek ageritasi	0,00						0 Orang	
					Jumlah Peserta BIMTEK Akreditasi	0,00						52 Orang	
278.				58 Pelayanan kesehatan daerah terpencil									
					Jumlah Rujukan Pasien Daerah terpencil	2.500.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.01.06 - Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)	Jumlah Rujukan Pasien Daerah terpencil	310 Orang	
279.				61 Pelatihan Fasilitator Akreditasi Rumah Sakit									
					Jumlah Peserta Pelatihan dari Dinkes dan RS	0,00						0 Orang	
280.				63 Pembinaan Persiapan Akreditasi Rumah Sakit									
					Jumlah Rs Yang Di Bina	0,00						15 Unit	
281.				64 Pertemuan Evaluasi dan Sinkronisasi Pelayanan Kesehatan Rujukan									
					Jumlah Peserta Pertemuan Evaluasi dan Sinkronisasi Pelayanan Kesehatan Rujukan	0,00						62 Orang	
282.				66 Pelatihan Sistem Pencatatan dan Pelaporan Online atau SIRS online									
					Jumlah Peserta Pelatihan SIRS Online	0,00						62 Orang	
283.				67 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan ASPAK dan SIRS Online di Kab/Kota									
					Jumlah Laporan Monitoring Evaluasi	0,00						1 Laporan	
284.				68 Pelaksanaan Pertemuan Teknis Penyusunan SPM Rumah Sakit									
					Jumlah Peserta Pertemuan Penyusunan SPM RS	0,00						62 Orang	
285.				70 Pelatihan Perhitungan Indikator Rawat Inap di Rumah Sakit Regional									
					Jumlah Peserta Pelatihan Perhitungan Indikator Rawat Inap	0,00						52 Orang	
286.				77 Dukungan tenaga Kesehatan dan Fasilitas Kesehatan dalam pelaksanaan PON di Papua tahun 2020									
					Jumlah Nakes yang direkrut dan dilatih	0,00						200 Orang	
					Jumlah Alat Kesehatan yang diadakan	0,00						5 Unit	
JUMLAH						330.657.044.030,00							

Mengetahui,
Kepala Bappeda Provinsi Papua

YOHANES WALILO, S.Sos, M.Si
NIP. 197007281997121001

JAYAPURA, 20 July 2020
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua

Dr. ROBBY KAYAME, SKM, M.Kes
NIP. 19660923 198903 1 009

**REKAPITULASI PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021
SERTA KETERKAITAN DENGAN HASIL PEMETAAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019**

PROVINSI : Papua

PERANGKAT DAERAH : Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Kesehatan	1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	À Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	1 Penyediaan jasa surat menyurat									
					Jumlah surat yang disediakan	559.136.000,00		1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.02.01.1.03 - Administras Umum	1.02.01.1.03.01 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang terkirim	2780 Surat	
2.				2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik									
					Jumlah Jasa Layanan berlangganan Listrik, Air, Telepon, Transponder	7.855.000.000,00		1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.02.01.1.03 - Administras Umum	1.02.01.1.03.02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Layanan	12 Layanan	
3.				6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional									
					Jumlah Unit Mobil Dinas/Operasional yang terpelihara dan Terfasilitasi Perijinannya	102.000.000,00		1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.02.01.1.03 - Administras Umum	1.02.01.1.03.06 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Unit Mobil Dinas/Operasional yang diservis dan dipelihara	147 Unit	
4.				8 Penyediaan jasa kebersihan kantor									
					Luas Gedung dan Halaman yang disediakan jasa kebersihan	0,00		1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.02.01.1.03 - Administras Umum	1.02.01.1.03.08 - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	jumlah Gedung dan Halaman yang dibersihkan	0 M2	
					Jumlah tenaga kebersihan dan Fasilitas Pendukung kebersihan kantor	9.000.000.000,00		1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.02.01.1.03 - Administras Umum	1.02.01.1.03.08 - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah tenaga kebersihan	130 Orang	
					Jumlah Jenis Bahan dan Alat Kebersihan	0,00		1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.02.01.1.03 - Administras Umum	1.02.01.1.03.14 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Bahan dan Alat Kebersihan	0 Jenis	
5.				10 Penyediaan alat tulis kantor									
					Jumlah jenis ATK yang disediakan	600.000.000,00		1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.02.01.1.03 - Administras Umum	1.02.01.1.03.10 - Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	13 Jenis	
6.				12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor									
					Jumlah Komponen Listrik yang disediakan	250.000.000,00		1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.02.01.1.03 - Administras Umum	1.02.01.1.03.12 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen alat pemeliharaan listrik dan genset yang disediakan	30 Buah	
7.				15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan									
					Jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	30.000.000,00		1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.02.01.1.03 - Administras Umum	1.02.01.1.03.15 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	3 Jenis	
8.				17 Penyediaan makanan dan minuman									
					Pelaksanaan penyediaan makan dan minum	0,00		1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.02.01.1.03 - Administras Umum	1.02.01.1.03.17 - Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Porsi makan dan minum kegiatan yang tersedia	0 Kegiatan	
					Pelaksanaan makan minum tamu dan rapat	1.209.840.000,00		1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.02.01.1.03 - Administras Umum	1.02.01.1.03.17 - Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Porsi makan dan minum yang tersedia	11832 Kali Tahun	
					Pelaksanaan makan minum saat olah raga (hari Jumat)	0,00		1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.02.01.1.03 - Administras Umum	1.02.01.1.03.17 - Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Porsi makan dan minum yang tersedia	0 Kali	
					Tersediannya Makanan dan Minuman	0,00		1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.02.01.1.03 - Administras Umum	1.02.01.1.03.17 - Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Porsi makan dan minum yang tersedia	0 Bulan	
					Jumlah orang yang disediakan makan dan minuman	0,00		1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.02.01.1.03 - Administras Umum	1.02.01.1.03.17 - Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Porsi makan dan minum yang tersedia	1 Orang	

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9.	Kesehatan	1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	À Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah									
					Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	1.975.000.000,00		1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.02.01.1.03 - Administrasi Umum	1.02.01.1.03.18 - Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	96 Orang	
10.				19 Penyediaan Jasa Pengamanan									
					Pelaksanaan pembayaran insentif bagi tenaga operator dan penjaga X-Ray VIP Room Bandara Sentani	0,00		1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.02.01.1.03 - Administrasi Umum	1.02.01.1.03.01 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa keamanan/security yang dibayarkan	0 Orang Bulan	
					Pelaksanaan pembayaran honor bagi satpam	2.600.000.000,00		1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.02.01.1.03 - Administrasi Umum	1.02.01.1.03.01 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa keamanan/security yang dibayarkan	50 Orang Bulan	
					Pelaksanaan uang makan satpam	0,00		1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.02.01.1.03 - Administrasi Umum	1.02.01.1.03.01 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa keamanan/security yang dibayarkan	0 Orang Bulan	
					Jumlah tenaga pengamanan	0,00		1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.02.01.1.03 - Administrasi Umum	1.02.01.1.03.01 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa keamanan/security yang dibayarkan	50 Orang	
11.		2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	À Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	5 Pengadaan kendaraan dinas/operasional									
					Jumlah kendaraan yang diadakan	0,00		1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.02.01.1.03 - Administrasi Umum	1.02.01.1.03.21 - Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda 4	0 Unit	
					Jumlah kendaraan roda 2	0,00		1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.02.01.1.03 - Administrasi Umum	1.02.01.1.03.21 - Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda 2	0 Unit	
12.				9 Pengadaan peralatan gedung kantor									
					Jumlah peralatan perlengkapan	1.000.000.000,00		1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.02.01.1.03 - Administrasi Umum	1.02.01.1.03.25 - Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan/perlengkapan yang diadakan	35 Unit	
13.				10 Pengadaan mebeleur									
					Jumlah mebeleur yang diadakan	1.000.000.000,00		1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.02.01.1.03 - Administrasi Umum	1.02.01.1.03.26 - Pengadaan Mebeleur	Jumlah mebeleur yang diadakan untuk 3 UPT	40 Unit	
14.				22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor									
					Jumlah gedung kantor yang dipelihara	800.000.000,00		1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.02.01.1.03 - Administrasi Umum	1.02.01.1.03.29 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor	1 Unit	
					belanja sewa	0,00		1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.02.01.1.03 - Administrasi Umum	1.02.01.1.03.29 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung yang disewa	0 Tahun	
15.				24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional									
					Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	0,00		1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.02.01.1.03 - Administrasi Umum	1.02.01.1.03.31 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah dan Jenis perlengkapan/peralatan gedung kantor yang dipelihara	0 Unit	
					Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	2.631.200.000,00		1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.02.01.1.03 - Administrasi Umum	1.02.01.1.03.31 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang	147 Unit	
					sewa kendaraan	0,00		1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.02.01.1.03 - Administrasi Umum	1.02.01.1.03.31 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan yang diperbaiki/Service	0 Bulan	
16.				26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor									
					Pelaksanaan pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	0,00		1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.02.01.1.03 - Administrasi Umum	1.02.01.1.03.27 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Jumlah Rumah Jabatan	0 Kegiatan	
					Jumlah Perlengkapan Gedung kantor yang terpelihara	0,00		1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.02.01.1.03 - Administrasi Umum	1.02.01.1.03.33 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung kantor yang dipelihara	0 Unit	
					Tersediannya biaya pemeliharaan gedung kantor	0,00		1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.02.01.1.03 - Administrasi Umum	1.02.01.1.03.39 - Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor	0 Bulan	
17.				28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor									
					Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	200.000.000,00		1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.02.01.1.03 - Administrasi Umum	1.02.01.1.03.35 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	160 Unit	

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18.	Kesehatan	3 Program peningkatan disiplin aparatur	À Meningkatnya disiplin aparatur	2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya									
					Jumlah pakaian dinas yang diadakan	1.000.000.000,00		1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.02.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1.02.01.1.04.02 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas sipil harian	923 Stell	
19.				5 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu									
					Jumlah pakaian khusus yang diadakan	0,00		1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.02.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1.02.01.1.04.05 - Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah pakaian Batik yang diadakan	0 Stell	
20.		5 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	À Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	1 Pendidikan dan pelatihan formal									
					Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	200.000.000,00		1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.02.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1.02.01.1.04.09 - Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparatur mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	5 Orang	
21.				2 Sosialisasi peraturan perundang-undangan									
					Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	100.000.000,00		1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.02.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1.02.01.1.04.10 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	150 Orang	
22.				3 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan									
					Jumlah peserta bimbingan teknis tentang implementasi peraturan perundang-undangan	0,00		1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.02.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1.02.01.1.04.11 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta bimbingan teknis tentang implementasi peraturan perundang-undangan	0 Orang	
23.		6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	À Meningkatnya kualitas akuntabilitas OPD	1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD									
					Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	100.000.000,00		1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.02.01.1.02 - Administrasi Keuangan	1.02.01.1.02.06 - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan	3 Laporan	
					Laporan LAKIP SKPD	0,00		1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.02.01.1.01 - Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.02.01.1.01.05 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan LAKIP SKPD	0 Dokumen	
24.				2 Penyusunan laporan keuangan semesteran									
					Jumlah pelaporan keuangan semesteran yang diselesaikan tepat waktu	30.000.000,00		1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.02.01.1.02 - Administrasi Keuangan	1.02.01.1.02.07 - Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Jumlah dokumen laporan	2 Laporan	
25.				4 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun									
					Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	30.000.000,00		1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.02.01.1.02 - Administrasi Keuangan	1.02.01.1.02.09 - Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	1 Laporan	
26.				5 Penyusunan Renja, RKA dan Perubahan APBD									
					Jumlah dokumen	120.000.000,00		1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.02.01.1.01 - Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.02.01.1.01.01 - Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	3 Dokumen	
27.				12 Penyusunan RENSTRA									
					Jumlah Dokumen	75.000.000,00		1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.02.01.1.01 - Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.02.01.1.01.01 - Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28.	Kesehatan	16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan UKBM kabupaten/kota yang terpetakan; Cakupan distrik yang sudah memiliki puskesmas ; Cakupan puskesmas pembantu; Cakupan puskesmas terakreditasi; Meningkatnya Angka Kesehatan Masyarakat; Persentase indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) rumah sakit yang mencapai target; Persentasi Pengguna Jaminan BPJS di Rumah Sakit; Persentasi Pengguna Kartu Papua Sehat (KPS) di RS	37 Peningkatan Pelayanan Medis Umum dan Masyarakat									
					Jumlah tenaga kesehatan yang dibayarkan	31.678.940.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.02.03.1.01 - Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	1.02.03.1.01.01 - Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan yang dibayarkan	483 Orang Bulan	
29.				38 Penelitian Bidang Kesehatan									
					Kegiatan penelitian di bidang kesehatan	100.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.28 - Pengelolaan Penelitian Kesehatan	Kegiatan penelitian di bidang kesehatan	2 Dokumen	
30.		19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Cakupan advokasi pelayanan kesehatan pada masyarakat; Rasio kelompok Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)	2 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat									
					Jumlah pesan yang disampaikan	1.000.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.02.05.1.02 - Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	1.02.05.1.02.01 - Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah pesan yang disampaikan	3 Jenis	
31.		23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan RSUD yang telah sesuai standar nasional; Cakupan rumah sakit kelas C; Persentase indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit yang mencapai target	1 Penyusunan standar pelayanan kesehatan									
					Jumlah Dokumen	330.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.04 - Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.04.03 - Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	
32.				9 Perijinan Operasional Sanitasi Incenerator dan IPAL									
					Jumlah kegiatan	1.000.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.04 - Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.04.01 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah kegiatan	2 Kegiatan	
33.				12 Pelatihan dan Kursus Singkat Tenaga RS									
					Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti pendidikan dan kursus singkat	5.500.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.02.03.1.02 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.03.1.02.01 - Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti pendidikan dan kursus singkat	130 Orang	

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34.	Kesehatan	26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Tingkat kecukupan sarana dan prasarana sesuai dengan standar pelayanan minimal	1 Pembangunan rumah sakit									
					Penambahan Bangsal/Ruang Perawatan	175.000.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.01.02 - Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Penambahan Bangsal/Ruang Perawatan	4 Ruang	
					Terbangunnya Rumah Sakit di Lokasi Baru	0,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.01.02 - Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Terbangunnya Gedung Baru Rumah Sakit	0 Unit	
35.				18 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit									
					Alat kesehatan dan alat kedokteran	25.800.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.01.10 - Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat kesehatan dan alat kedokteran	30 Jenis	
					Jumlah alat kesehatan dan alat kedokteran yang diadakan	0,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.01.10 - Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan dan alat kedokteran yang diadakan	0 Unit	
36.				19 Pengadaan obat-obatan rumah sakit									
					Obat-obatan	25.000.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.01.21 - Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman Serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Obat-obatan	900 Jenis	
					Jumlah Jenis Obat-obatan yang tersedia	0,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.01.21 - Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman Serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Jenis Obat-obatan yang tersedia	0 Jenis	
37.				21 Pengadaan mebeleur rumah sakit									
					Jumlah jenis mebeleur yang disediakan	2.000.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.01.12 - Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah jenis mebeleur yang disediakan	15 Jenis	
38.				22 Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain)									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Perlengkapan dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain	3.000.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.01.12 - Pengadaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Perlengkapan ruang rawat inap dan ruang tunggu Pasien dll yang disiapkan	6 Jenis	
					Jumlah Perlengkapan dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dll yang disiapkan	0,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.01.16 - Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	Jumlah Perlengkapan dapur dan laundry, yang disiapkan	0 Unit	
39.				23 Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit									
					Bahan bakar minyak / gas elpiji	0,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.01.14 - Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)	Jumlah Bahan bakar minyak / gas elpiji	0 Jenis	
					Jumlah jenis bahan logistik yang disediakan	4.458.800.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.01.14 - Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)	Jumlah jenis bahan logistik yang disediakan	16 Jenis	
					Jumlah Bahan bakar minyak / gas elpiji	0,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.01.14 - Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)	Jumlah Bahan bakar minyak / gas elpiji	0 Liter	
40.				24 Pengadaan pencetakan administrasi dan surat menyurat rumah sakit									
					ATK dan Barang Cetak RS	2.250.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.01.16 - Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	ATK dan Barang Cetak RS	6 Jenis	
41.				25 Pengembangan tipe rumah sakit									
					Jumlah Kegiatan	1.000.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.04 - Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.04.03 - Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Kegiatan	1 Kegiatan	
					Jumlah fasilitas rumah sakit yang dikembangkan	0,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.04 - Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.04.03 - Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah fasilitas rumah sakit yang dikembangkan	0 Unit	
42.				35 Pengadaan Bahan Makanan untuk Penderita									
					Bahan makanan dan minuman untuk kebutuhan pasien RS	5.877.293.360,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.01.21 - Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman Serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Porsi makan dan minuman untuk kebutuhan pasien RS	13800 Orang	
					Jumlah pasien yang diberi makan	0,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.01.21 - Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman Serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Porsi makan dan minuman untuk kebutuhan pasien RS	0 Orang	
43.				50 Pembangunan Pagar Keliling Rumah Sakit									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Jumlah luas bangunan yang dipagari	0,00						0 M2	
44.				96 Pengadaan Bahan Habis Pakai Rumah Sakit									
					Jumlah Jenis Bahan Habis Pakai yang di sediakan	30.420.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.01.14 - Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)	Jumlah Jenis Bahan Habis Pakai yang di sediakan	21 Jenis	
45.				97 Pengadaan Peralatan Gedung/Kantor Rumah Sakit									
					Jumlah jenis peralatan gedung/kantor yang disediakan	6.000.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.01.12 - Pengadaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah jenis peralatan gedung/kantor yang disediakan	4 Jenis	
46.				101 Pengadaan Alat Kesehatan (DAK)									
					Alat kesehatan dan alat kedokteran	0,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.01.02 - Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Alat kesehatan dan alat kedokteran	0 Jenis	
					Jumlah alat kesehatan dan alat kedokteran yang diadakan	0,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.01 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah alat kesehatan dan alat kedokteran yang diadakan	0 Jenis	
47.				104 Pengadaan Ambulance/ Mobil Jenazah									
					Jumlah Ambulance/ Mobil Jenazah yang diadakan	0,00						0 Unit	
					Jumlah Ambulance yang diadakan	0,00						0 Unit	
					Jumlah Mobil Jenazah yang diadakan	0,00						0 Unit	
48.		27 Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Cakupan pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit di RSJ Abepura; Cakupan pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit di RSUD Abepura; Cakupan pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit di RSUD Jayapura; Tingkat kecukupan sarana dan prasarana RSJ Abepura sesuai dengan standar pelayanan minimal ; Tingkat kecukupan sarana dan prasarana RSUD Abepura sesuai dengan standar pelayanan minimal ; Tingkat kecukupan sarana dan prasarana RSUD Jayapura sesuai dengan standar pelayanan minimal	1 Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit									
					Jumlah bangunan yang di pelihara	6.000.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.01.09 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah bangunan yang di pelihara	5 Ruang	
49.				20 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah sakit									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Jumlah jenis perlengkapan yang disediakan	0,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.01.17 - Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah jenis perlengkapan yang disediakan	0 Jenis	
					Jumlah Perlengkapan RS yang terpelihara	7.800.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.01.17 - Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Perlengkapan RS yang terpelihara	20 Jenis	
50.		33 Program kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan	Cakupan Dinas Kesehatan dan RSUD kabupaten/kota yang memiliki RENSTRA yang berkualitas; Cakupan kabupaten/kota yang memiliki data profil kesehatan secara lengkap	9 Lokakarya Penyusunan Program									
					Jumlah Peserta Yang Mengikuti Lokakarya	125.418.320,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.04 - Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.04.03 - Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Lokakarya (Sub Bagian Program)	150 Orang	
					Jumlah Peserta yang mengikuti Lokakarya	0,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.04 - Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.04.03 - Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Peserta yang mengikuti Lokakarya (Sub Bagian Program)	0 Orang Kegiatan	
51.				10 Evaluasi Program Akhir Tahun									
					Jumlah Laporan hasil evaluasi yang dihasilkan	125.418.320,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.04 - Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.04.03 - Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Laporan hasil evaluasi yang dihasilkan dalam pertemuan Rapat kerja Kesehatan (Subang Program)	150 Dokumen	
					Jumlah Dokumen Evaluasi	0,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.04 - Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.04.03 - Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Dokumen Evaluasi Subang Program (sub program)	0 Dokumen	
52.		35 Program upaya kesehatan perorangan	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ; Cakupan Kabupaten/Kota yang memiliki kebijakan PHBS; Cakupan OAP yang sudah memiliki dan memanfaatkan Kartu Papua Sehat; Persentase ODGJ (orang dengan gangguan jiwa) peserta konseling yang terpulihkan; Persentase PAK yang diawasi; Persentase Puskesmas yang mempunyai ketersediaan obat dan vaksin	6 Peningkatan Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Papua									
					Jumlah pasien dilayani	0,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.16 - Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah pasien dilayani	0 Tahun	
					Jumlah Pasien yang dilayani	61.000.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.16 - Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Pasien yang dilayani	80000 Orang Tahun	
53.				10 Peningkatan Pelayanan JKN/BPJS									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Peserta JKN/BPJS terlayani	0,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.16 - Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Peserta JKN/BPJS terlayani	45000 Orang	
54.		36 Program Sumber Daya Kesehatan	Cakupan jumlah kabupaten/kota yang memiliki Rumah Sakit ; Cakupan pembangunan dan pengembangan Rumah Sakit rujukan di 5 wilayah adat; Jumlah tenaga kesehatan yang terlatih untuk PON; Rasio Dokter per satuan penduduk ; Rasio Tenaga medis per satuan penduduk ; Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk; Rasio rumah sakit per satuan penduduk	39 Peningkatan Jenjang Pendidikan Tenaga RSU Jayapura									
					Jumlah orang yang mengikuti pendidikan	0,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.02.03.1.02 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.03.1.02.01 - Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah orang yang mengikuti pendidikan	50 Orang	
JUMLAH						426.933.046.000,00							

Mengetahui,
Kepala Bappeda Provinsi Papua

YOHANES WALILO, S.Sos, M.Si
NIP. 197007281997121001

JAYAPURA, 20 July 2020
Pit. Direktur RSUD Jayapura

drg. Aloysius Giyai, M.Kes
NIP. 197209082002121011

**REKAPITULASI PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021
SERTA KETERKAITAN DENGAN HASIL PEMETAAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019**

PROVINSI : Papua

PERANGKAT DAERAH : Rumah Sakit Umum Daerah Abepura

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Kesehatan	1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	À Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	1 Penyediaan jasa surat menyurat									
					Jumlah surat yang disediakan	440.000.000,00		1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.02.01.1.03 - Administrasi Umum	1.02.01.1.03.01 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang terkirim	5 Surat	
2.				2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik									
					Jumlah Jasa Layanan berlangganan Listrik, Air, Telepon, Transponder	3.750.000.000,00		1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.02.01.1.03 - Administrasi Umum	1.02.01.1.03.02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Layanan	60 Layanan	
3.				3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor									
					Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	800.000.000,00		1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.02.01.1.03 - Administrasi Umum	1.02.01.1.03.03 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	70 Unit	
4.				4 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS									
5.				6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional									
					Jumlah Unit Mobil Dinas/Operasional yang terpelihara dan Terfasilitasi Perijinannya	550.000.000,00		1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.02.01.1.03 - Administrasi Umum	1.02.01.1.03.06 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Unit Mobil Dinas/Operasional yang diservis dan dipelihara	20 Unit	
6.				8 Penyediaan jasa kebersihan kantor									
					Luas Gedung dan Halaman yang disediakan jasa kebersihan	4.500.000.000,00		1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.02.01.1.03 - Administrasi Umum	1.02.01.1.03.08 - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	jumlah Gedung dan Halaman yang dibersihkan	7675 M2	
					Jumlah tenaga kebersihan dan Fasilitas Pendukung kebersihan kantor	4.500.000.000,00		1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.02.01.1.03 - Administrasi Umum	1.02.01.1.03.08 - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah tenaga kebersihan	95 Orang	
					Jumlah Jenis Bahan dan Alat Kebersihan	500.000.000,00		1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.02.01.1.03 - Administrasi Umum	1.02.01.1.03.14 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Bahan dan Alat Kebersihan	10 Jenis	
7.				9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja									
					Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	250.000.000,00		1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.02.01.1.03 - Administrasi Umum	1.02.01.1.03.09 - Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	90 Unit	
8.				10 Penyediaan alat tulis kantor									
					Jumlah jenis ATK yang disediakan	1.050.000.000,00		1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.02.01.1.03 - Administrasi Umum	1.02.01.1.03.10 - Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	50 Jenis	
9.				11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan									
					Jumlah barang cetakan	200.000.000,00		1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.02.01.1.03 - Administrasi Umum	1.02.01.1.03.11 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan	20 Jenis	
					Jumlah penggandaan	200.000.000,00		1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.02.01.1.03 - Administrasi Umum	1.02.01.1.03.11 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penggandaan	100 Lembar	
					Jumlah Jenis Barang Cetak dan yang Disediakan	250.000.000,00		1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.02.01.1.03 - Administrasi Umum	1.02.01.1.03.11 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	200 Jenis	
					Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	400.000.000,00		1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.02.01.1.03 - Administrasi Umum	1.02.01.1.03.11 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	12 Bulan	
10.				12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Jumlah Komponen Listrik yang disediakan	350.000.000,00		1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.02.01.1.03 - Administrasi Umum	1.02.01.1.03.12 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen alat pemeliharaan listrik dan genset yang disediakan	100 Buah	
11.				13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor									
					Jumlah peralatan dan Perlengkapan	1.000.000.000,00		1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.02.01.1.03 - Administrasi Umum	1.02.01.1.03.25 - Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan peralatan kantor yang disediakan	100 Unit	
12.				14 Penyediaan peralatan rumah tangga									
					Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	1.000.000.000,00		1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.02.01.1.03 - Administrasi Umum	1.02.01.1.03.14 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	50 Unit	
13.				15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan									
					Jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	200.000.000,00		1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.02.01.1.03 - Administrasi Umum	1.02.01.1.03.15 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12 Jenis	
14.				17 Penyediaan makanan dan minuman									
					Pelaksanaan penyediaan makan dan minum	350.000.000,00		1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.02.01.1.03 - Administrasi Umum	1.02.01.1.03.17 - Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Porsi makan dan minum kegiatan yang tersedia	0 Kegiatan	
					Pelaksanaan makan minum tamu dan rapat	0,00		1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.02.01.1.03 - Administrasi Umum	1.02.01.1.03.17 - Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Porsi makan dan minum yang tersedia	0 Kali Tahun	
					Pelaksanaan makan minum saat olah raga (hari Jumat)	0,00		1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.02.01.1.03 - Administrasi Umum	1.02.01.1.03.17 - Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Porsi makan dan minum yang tersedia	0 Kali	
					Tersediannya Makanan dan Minuman	0,00		1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.02.01.1.03 - Administrasi Umum	1.02.01.1.03.17 - Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Porsi makan dan minum yang tersedia	0 Bulan	
					Jumlah orang yang disediakan makan dan minuman	0,00		1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.02.01.1.03 - Administrasi Umum	1.02.01.1.03.17 - Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Porsi makan dan minum yang tersedia	0 Orang	
15.				18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah									
					Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	2.500.000.000,00		1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.02.01.1.03 - Administrasi Umum	1.02.01.1.03.18 - Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	0 Orang	
16.				19 Penyediaan Jasa Pengamanan									
					Pelaksanaan pembayaran insentif bagi tenaga operator dan penjaga X-Ray VIP Room Bandara Sentani	0,00		1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.02.01.1.03 - Administrasi Umum	1.02.01.1.03.01 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa keamanan/security yang dibayarkan	0 Orang Bulan	
					Pelaksanaan pembayaran honor bagi satpam	800.000.000,00		1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.02.01.1.03 - Administrasi Umum	1.02.01.1.03.01 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa keamanan/security yang dibayarkan	18 Orang Bulan	
					Pelaksanaan uang makan satpam	0,00		1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.02.01.1.03 - Administrasi Umum	1.02.01.1.03.01 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa keamanan/security yang dibayarkan	0 Orang Bulan	
					Jumlah tenaga pengamanan	900.000.000,00		1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.02.01.1.03 - Administrasi Umum	1.02.01.1.03.01 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa keamanan/security yang dibayarkan	18 Orang	
17.		2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	À Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	5 Pengadaan kendaraan dinas/operasional									
					Jumlah kendaraan yang diadakan	2.500.000.000,00		1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.02.01.1.03 - Administrasi Umum	1.02.01.1.03.21 - Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda 4	10 Unit	
					Jumlah kendaraan roda 2	0,00		1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.02.01.1.03 - Administrasi Umum	1.02.01.1.03.21 - Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda 2	0 Unit	
18.				7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor									
					Jumlah pengadaan perlengkapan	2.000.000.000,00		1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.02.01.1.03 - Administrasi Umum	1.02.01.1.03.23 - Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan	40 Unit	
19.				9 Pengadaan peralatan gedung kantor									
					Jumlah peralatan perlengkapan	1.000.000.000,00		1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.02.01.1.03 - Administrasi Umum	1.02.01.1.03.25 - Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan/perlengkapan yang diadakan	50 Unit	

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20.	Kesehatan	2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	À Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	10 Pengadaan mebeleur									
					Jumlah mebeleur yang diadakan	1.000.000.000,00		1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.02.01.1.03 - Administras Umum	1.02.01.1.03.26 - Pengadaan Mebeleur	Jumlah mebeleur yang diadakan untuk 3 UPT	100 Unit	
21.		3 Program peningkatan disiplin aparatur	À Meningkatnya disiplin aparatur	1 Pengadaan mesin/kartu absensi									
					Jumlah Mesin /Kartu Apsensi yang tersedia	100.000.000,00		1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.02.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1.02.01.1.04.01 - Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Jumlah Mesin /Kartu Absensi yang tersedia	24 Bh	
22.				2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya									
					Jumlah pakaian dinas yang diadakan	750.000.000,00		1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.02.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1.02.01.1.04.02 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas sipil harian	577 Stell	
23.				3 Pengadaan pakaian kerja lapangan									
					Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan	200.000.000,00		1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.02.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1.02.01.1.04.03 - Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan	200 Stell	
24.				4 Pengadaan pakaian KORPRI									
					jumlah pakaian KORPRI yang diadakan	600.000.000,00		1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.02.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1.02.01.1.04.04 - Pengadaan Pakaian Korpri	Jumlah pakaian KORPRI yang diadakan	600 Stell	
25.		5 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	À Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	1 Pendidikan dan pelatihan formal									
					Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	3.500.000.000,00		1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.02.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1.02.01.1.04.09 - Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparatur mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	650 Orang	
26.		6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	À Meningkatnya kualitas akuntabilitas OPD	1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD									
					Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	120.000.000,00		1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.02.01.1.02 - Administras Keuangan	1.02.01.1.02.06 - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan	12 Laporan	
					Laporan LAKIP SKPD	0,00		1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.02.01.1.01 - Perencanaan dan Evaluas Kinerja Perangkat Daerah	1.02.01.1.01.05 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan LAKIP SKPD	0 Dokumen	
27.				2 Penyusunan laporan keuangan semesteran									
					Jumlah pelaporan keuangan semesteran yang diselesaikan tepat waktu	50.000.000,00		1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.02.01.1.02 - Administras Keuangan	1.02.01.1.02.07 - Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Jumlah dokumen laporan	2 Laporan	
28.				3 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran									
					Jumlah pelaporan prognosis realisasi anggaran yang diselesaikan tepat waktu	50.000.000,00		1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.02.01.1.02 - Administras Keuangan	1.02.01.1.02.08 - Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah pelaporan prognosis realisasi anggaran yang diselesaikan tepat waktu	2 Laporan	
29.				4 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun									
					Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	50.000.000,00		1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.02.01.1.02 - Administras Keuangan	1.02.01.1.02.09 - Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	4 Laporan	
30.				5 Penyusunan Renja, RKA dan Perubahan APBD									
					Jumlah dokumen	200.000.000,00		1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.02.01.1.01 - Perencanaan dan Evaluas Kinerja Perangkat Daerah	1.02.01.1.01.01 - Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	10 Dokumen	
31.				12 Penyusunan RENSTRA									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Jumlah Dokumen	200.000.000,00		1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.02.01.1.01 - Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.02.01.1.01.01 - Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	10 Dokumen	
32.				13 Penyusunan SOP									
					Jumlah Dokumen	200.000.000,00		1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.02.01.1.01 - Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.02.01.1.01.04 - Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	0 Dokumen	
33.		16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan UKBM kabupaten/kota yang terpetakan; Cakupan distrik yang sudah memiliki puskesmas ; Cakupan puskesmas pembantu; Cakupan puskesmas terakreditasi; Meningkatnya Angka Kesehatan Masyarakat; Persentase indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) rumah sakit yang mencapai target; Persentasi Pengguna Jaminan BPJS di Rumah Sakit; Persentasi Pengguna Kartu Papua Sehat (KPS) di RS	9 Peningkatan kesehatan masyarakat									
					Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Masyarakat	59.000.000.000,00						5000 Orang	
34.				37 Peningkatan Pelayanan Medis Umum dan Masyarakat									
					Jumlah tenaga kesehatan yang dibayarkan	15.000.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.02.03.1.01 - Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	1.02.03.1.01.01 - Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan yang dibayarkan	500 Orang Bulan	
35.				60 pelaksanaan Kartu Papua Sehat (KPS) Provinsi Papua									
					Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Masyarakat Papua	65.000.000.000,00					Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Masyarakat Papua	200000 Orang	
					JasaTenaga Kontrak Rumah Sakit	9.700.000.000,00					JasaTenaga Kontrak Pelayanan Rumah Sakit	210 Orang	
					1. Tenaga Medis**	3.900.000.000,00					Belanja Tenaga Kontrak Dokter Umum, Dokter Spesialis dan Dokter Internship	30 Orang Tahun	
36.		23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan RSUD yang telah sesuai standar nasional; Cakupan rumah sakit kelas C; Persentase indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit yang mencapai target	2 Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan									
					Evaluasi dan pelaporan	12.000.000.000,00					Evaluasi dan pelaporan	4 Tahun	
37.		26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Tingkat kecukupan sarana dan prasarana sesuai dengan standar pelayanan minimal	1 Pembangunan rumah sakit									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Penambahan Bangsal/Ruang Perawatan	150.000.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.01.02 - Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Penambahan Bangsal/Ruang Perawatan	10 Ruang	
					Terbangunnya Rumah Sakit di Lokasi Baru	6.000.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.01.02 - Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Terbangunnya Gedung Baru Rumah Sakit	2 Unit	
38.				18 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit									
					Alat kesehatan dan alat kedokteran	50.000.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.01.10 - Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat kesehatan dan alat kedokteran	200 Jenis	
					Jumlah alat kesehatan dan alat kedokteran yang diadakan	0,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.01.10 - Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan dan alat kedokteran yang diadakan	0 Unit	
39.				19 Pengadaan obat-obatan rumah sakit									
					Obat-obatan	20.000.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.01.21 - Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman Serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Obat-obatan	1500 Jenis	
					Jumlah Jenis Obat-obatan yang tersedia	0,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.01.21 - Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman Serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Jenis Obat-obatan yang tersedia	0 Jenis	
40.				22 Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain)									
					Perlengkapan dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain	3.500.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.01.12 - Pengadaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Perlengkapan ruang rawat inap dan ruang tunggu Pasien dll yang disiapkan	100 Jenis	
					Jumlah Perlengkapan dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dll yang disiapkan	3.000.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.01.16 - Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	Jumlah Perlengkapan dapur dan laundry, yang disiapkan	60 Unit	
41.				24 Pengadaan pencetakan administrasi dan surat menyurat rumah sakit									
					ATK dan Barang Cetak RS	1.000.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.01.16 - Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	ATK dan Barang Cetak RS	100 Jenis	
42.				30 Pembangunan Rumah Singgah dan Rumah Dinas Rumah Sakit									
43.				35 Pengadaan Bahan Makanan untuk Penderita									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Bahan makanan dan minuman untuk kebutuhan pasien RS	13.000.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.01.21 - Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman Serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Porsi makan dan minuman untuk kebutuhan pasien RS	15000000 Orang	
					Jumlah pasien yang diberi makan	0,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.01.21 - Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman Serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Porsi makan dan minuman untuk kebutuhan pasien RS	0 Orang	
44.				50 Pembangunan Pagar Keliling Rumah Sakit									
					Jumlah luas bangunan yang dipagari	500.000.000,00						0 M2	
45.				101 Pengadaan Alat Kesehatan (DAK)									
					Alat kesehatan dan alat kedokteran	30.000.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.01.02 - Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Alat kesehatan dan alat kedokteran	34 Jenis	
					Jumlah alat kesehatan dan alat kedokteran yang diadakan	0,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.01 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana	Jumlah alat kesehatan dan alat kedokteran yang diadakan	34 Jenis	
46.				102 Pengadaan Peralatan Gedung/Kantor Rumah Sakit									
47.		27 Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Cakupan pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit di RSJ Abepura; Cakupan pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit di RSUD Abepura; Cakupan pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit di RSUD Jayapura; Tingkat kecukupan sarana dan prasarana RSJ Abepura sesuai dengan standar pelayanan minimal ; Tingkat kecukupan sarana dan prasarana RSUD Abepura sesuai dengan standar pelayanan minimal ; Tingkat kecukupan sarana dan prasarana RSUD Jayapura sesuai dengan standar pelayanan minimal	4 Pemeliharaan rutin/berkala ruang rawat inap rumah sakit (VVIP, VIP, Kelas I,II,III)									
					Gedung Kantor	3.500.000.000,00						5 Tahun	
48.				16 Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit									
					IPAL	1.500.000.000,00						1 Tahun	
JUMLAH						483.610.000.000,00							

Mengetahui,
Kepala Bappeda Provinsi Papua

YOHANES WALILO, S.Sos, M.Si
NIP. 197007281997121001

JAYAPURA, 20 July 2020
DIREKTUR

dr. DAYSY CHOSTANCE URBINAS
NIP. 19671231 200502 2 028

**REKAPITULASI PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021
SERTA KETERKAITAN DENGAN HASIL PEMETAAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019**

PROVINSI : Papua

PERANGKAT DAERAH : Rumah Sakit Jiwa

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Kesehatan	1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	À Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	1 Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang disediakan	15.000.000,00		1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.02.01.1.03 - Administrasi Umum	1.02.01.1.03.01 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang terkirim	1000 Surat	
2.				2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Jasa Layanan berlangganan Listrik, Air, Telepon, Transponder	2.000.000.000,00		1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.02.01.1.03 - Administrasi Umum	1.02.01.1.03.02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Layanan	12 Layanan	
3.				6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Unit Mobil Dinas/Operasional yang terpelihara dan Terfasilitasi Perijinannya	100.000.000,00		1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.02.01.1.03 - Administrasi Umum	1.02.01.1.03.06 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Unit Mobil Dinas/Operasional yang diservis dan dipelihara	20 Unit	
4.				8 Penyediaan jasa kebersihan kantor	Luas Gedung dan Halaman yang disediakan jasa kebersihan	0,00		1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.02.01.1.03 - Administrasi Umum	1.02.01.1.03.08 - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	jumlah Gedung dan Halaman yang dibersihkan	0 M2	
					Jumlah tenaga kebersihan dan Fasilitas Pendukung kebersihan kantor	2.110.020.000,00		1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.02.01.1.03 - Administrasi Umum	1.02.01.1.03.08 - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah tenaga kebersihan	30 Orang	
					Jumlah Jenis Bahan dan Alat Kebersihan	0,00		1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.02.01.1.03 - Administrasi Umum	1.02.01.1.03.14 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Bahan dan Alat Kebersihan	0 Jenis	
5.				10 Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	1.000.000.000,00		1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.02.01.1.03 - Administrasi Umum	1.02.01.1.03.10 - Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	100 Jenis	
6.				11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan	1.000.000.000,00		1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.02.01.1.03 - Administrasi Umum	1.02.01.1.03.11 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan	95 Jenis	
					Jumlah penggandaan	0,00		1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.02.01.1.03 - Administrasi Umum	1.02.01.1.03.11 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penggandaan	2000 Lembar	
					Jumlah Jenis Barang Cetak dan yang Disediakan	0,00		1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.02.01.1.03 - Administrasi Umum	1.02.01.1.03.11 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	200 Jenis	
					Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	0,00		1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.02.01.1.03 - Administrasi Umum	1.02.01.1.03.11 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	0 Bulan	
7.				12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen Listrik yang disediakan	1.000.000.000,00		1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.02.01.1.03 - Administrasi Umum	1.02.01.1.03.12 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen alat pemeliharaan listrik dan genset yang disediakan	30 Buah	
8.				15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	700.000.000,00		1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.02.01.1.03 - Administrasi Umum	1.02.01.1.03.15 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	10 Jenis	
9.				17 Penyediaan makanan dan minuman									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Pelaksanaan penyediaan makan dan minum	700.000.000,00		1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.02.01.1.03 - Administrasi Umum	1.02.01.1.03.17 - Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Porsi makan dan minum kegiatan yang tersedia	200 Kegiatan	
					Pelaksanaan makan minum tamu dan rapat	200.000.000,00		1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.02.01.1.03 - Administrasi Umum	1.02.01.1.03.17 - Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Porsi makan dan minum yang tersedia	200 Kali Tahun	
					Pelaksanaan makan minum saat olah raga (hari Jumat)	0,00		1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.02.01.1.03 - Administrasi Umum	1.02.01.1.03.17 - Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Porsi makan dan minum yang tersedia	0 Kali	
					Tersediannya Makanan dan Minuman	100.000.000,00		1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.02.01.1.03 - Administrasi Umum	1.02.01.1.03.17 - Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Porsi makan dan minum yang tersedia	200 Bulan	
					Jumlah orang yang disediakan makan dan minuman	1.000.000.000,00		1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.02.01.1.03 - Administrasi Umum	1.02.01.1.03.17 - Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Porsi makan dan minum yang tersedia	200 Orang	
10.				18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah									
					Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	3.000.000.000,00		1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.02.01.1.03 - Administrasi Umum	1.02.01.1.03.18 - Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	250 Orang	
11.				19 Penyediaan Jasa Pengamanan									
					Pelaksanaan pembayaran insentif bagi tenaga operator dan penjaga X-Ray VIP Room Bandara Sentani	0,00		1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.02.01.1.03 - Administrasi Umum	1.02.01.1.03.01 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa keamanan/security yang dibayarkan	0 Orang Bulan	
					Pelaksanaan pembayaran honor bagi satpam	1.055.010.000,00		1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.02.01.1.03 - Administrasi Umum	1.02.01.1.03.01 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa keamanan/security yang dibayarkan	25 Orang Bulan	
					Pelaksanaan uang makan satpam	0,00		1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.02.01.1.03 - Administrasi Umum	1.02.01.1.03.01 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa keamanan/security yang dibayarkan	0 Orang Bulan	
					Jumlah tenaga pengamanan	0,00		1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.02.01.1.03 - Administrasi Umum	1.02.01.1.03.01 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa keamanan/security yang dibayarkan	0 Orang	
12.		2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	À Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor									
					Jumlah pengadaan perlengkapan	5.000.000.000,00		1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.02.01.1.03 - Administrasi Umum	1.02.01.1.03.23 - Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan	30 Unit	
13.				24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional									
					Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	500.000.000,00		1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.02.01.1.03 - Administrasi Umum	1.02.01.1.03.31 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah dan Jenis perlengkapan/peralatan gedung kantor yang dipelihara	50 Unit	
					Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	0,00		1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.02.01.1.03 - Administrasi Umum	1.02.01.1.03.31 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang	20 Unit	
					sewa kendaraan	0,00		1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.02.01.1.03 - Administrasi Umum	1.02.01.1.03.31 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan yang diperbaiki/Service	25 Bulan	
14.				26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor									
					Pelaksanaan pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	0,00		1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.02.01.1.03 - Administrasi Umum	1.02.01.1.03.27 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Jumlah Rumah Jabatan	0 Kegiatan	
					Jumlah Perlengkapan Gedung kantor yang terpelihara	500.000.000,00		1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.02.01.1.03 - Administrasi Umum	1.02.01.1.03.33 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung kantor yang dipelihara	80 Unit	
					Tersediannya biaya pemeliharaan gedung kantor	0,00		1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.02.01.1.03 - Administrasi Umum	1.02.01.1.03.39 - Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor	0 Bulan	
15.		3 Program peningkatan disiplin aparatur	À Meningkatnya disiplin aparatur	2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya									
					Jumlah pakaian dinas yang diadakan	1.000.000.000,00		1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.02.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1.02.01.1.04.02 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas sipil harian	150 Stell	
16.				5 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu									
					Jumlah pakaian khusus yang diadakan	1.000.000.000,00		1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.02.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1.02.01.1.04.05 - Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah pakaian Batik yang diadakan	135 Stell	

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17.	Kesehatan	5 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	À Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	3 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan									
					Jumlah peserta bimbingan teknis tentang implementasi peraturan perundang-undangan	10.000.000.000,00		1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.02.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1.02.01.1.04.11 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta bimbingan teknis tentang implementasi peraturan perundang-undangan	250 Orang	
18.		6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	À Meningkatnya kualitas akuntabilitas OPD	1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD									
					Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	30.000.000,00		1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.02.01.1.02 - Administrasi Keuangan	1.02.01.1.02.06 - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan	2 Laporan	
					Laporan LAKIP SKPD	0,00		1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.02.01.1.01 - Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.02.01.1.01.05 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan LAKIP SKPD	0 Dokumen	
19.				2 Penyusunan laporan keuangan semesteran									
					Jumlah pelaporan keuangan semesteran yang diselesaikan tepat waktu	15.000.000,00		1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.02.01.1.02 - Administrasi Keuangan	1.02.01.1.02.07 - Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Jumlah dokumen laporan	1 Laporan	
20.				3 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran									
					Jumlah pelaporan prognosis realisasi anggaran yang diselesaikan tepat waktu	15.000.000,00		1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.02.01.1.02 - Administrasi Keuangan	1.02.01.1.02.08 - Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah pelaporan prognosis realisasi anggaran yang diselesaikan tepat waktu	1 Laporan	
21.				4 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun									
					Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	30.000.000,00		1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.02.01.1.02 - Administrasi Keuangan	1.02.01.1.02.09 - Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	1 Laporan	
22.				5 Penyusunan Renja, RKA dan Perubahan APBD									
					Jumlah dokumen	75.000.000,00		1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.02.01.1.01 - Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.02.01.1.01.01 - Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	3 Dokumen	
23.		24 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Cakupan pelayanan masyarakat miskin pada RSUD dan RSJ	11 Pemulangan dan Pemakaman Pasien Miskin									
					Pemulangan dan pemakaman pasien tidak ada keluarga	1.000.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.13 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Pemulangan Pasien Ke Kabupaten/Kota dan Pemakaman Pasien yang tidak mempunyai keluarga	100 Bulan	
24.		26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Tingkat kecukupan sarana dan prasarana sesuai dengan standar pelayanan minimal	1 Pembangunan rumah sakit									
					Penambahan Bangsal/Ruang Perawatan	0,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.01.02 - Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Penambahan Bangsal/Ruang Perawatan	0 Ruang	
					Terbangunnya Rumah Sakit di Lokasi Baru	20.000.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.01.02 - Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Terbangunnya Gedung Baru Rumah Sakit	1 Unit	
25.				17 Rehabilitasi bangunan rumah sakit									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Bangunan RS yang direhab	10.000.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.01.07 - Pengembangan Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center	Jumlah Bangunan RS yang direhab	15 Unit	
					Jumlah Ruang/bangsas RS yang direhab	0,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.01.01 - Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Ruang/bangsas RS yang direhab	2 Unit	
26.				18 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit									
					Alat kesehatan dan alat kedokteran	0,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.01.10 - Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat kesehatan dan alat kedokteran	50 Jenis	
					Jumlah alat kesehatan dan alat kedokteran yang diadakan	10.000.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.01.10 - Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan dan alat kedokteran yang diadakan	100 Unit	
27.				22 Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain)									
					Perlengkapan dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain	2.000.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.01.12 - Pengadaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Perlengkapan ruang rawat inap dan ruang tunggu Pasien dll yang disiapkan	60 Jenis	
					Jumlah Perlengkapan dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dll yang disiapkan	2.000.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.01.16 - Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	Jumlah Perlengkapan dapur dan laundry, yang disiapkan	60 Unit	
28.				23 Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit									
					Bahan bakar minyak / gas elpiji	1.000.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.01.14 - Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)	Jumlah Bahan bakar minyak / gas elpiji	3 Jenis	
					Jumlah jenis bahan logistik yang disediakan	0,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.01.14 - Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)	Jumlah jenis bahan logistik yang disediakan	2 Jenis	
					Jumlah Bahan bakar minyak / gas elpiji	0,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.01.14 - Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)	Jumlah Bahan bakar minyak / gas elpiji	0 Liter	
29.				35 Pengadaan Bahan Makanan untuk Penderita									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Bahan makanan dan minuman untuk kebutuhan pasien RS	5.000.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.01.21 - Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman Serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Porsi makan dan minuman untuk kebutuhan pasien RS	200 Orang	
					Jumlah pasien yang diberi makan	0,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.01.21 - Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman Serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Porsi makan dan minuman untuk kebutuhan pasien RS	200 Orang	
30.				101 Pengadaan Alat Kesehatan (DAK)									
					Alat kesehatan dan alat kedokteran	10.000.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.01.02 - Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Alat kesehatan dan alat kedokteran	10 Jenis	
					Jumlah alat kesehatan dan alat kedokteran yang diadakan	0,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.01 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana	Jumlah alat kesehatan dan alat kedokteran yang diadakan	0 Jenis	
31.		27 Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Cakupan pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit di RSJ Abepura; Cakupan pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit di RSUD Abepura; Cakupan pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit di RSUD Jayapura; Tingkat kecukupan sarana dan prasarana RSJ Abepura sesuai dengan standar pelayanan minimal; Tingkat kecukupan sarana dan prasarana RSUD Abepura sesuai dengan standar pelayanan minimal; Tingkat kecukupan sarana dan prasarana RSUD Jayapura sesuai dengan standar pelayanan minimal	17 Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit									
					Peralatan kesehatan dan kedokteran diperbaiki/dikalibrasi	2.000.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.01.15 - Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan	Jumlah Peralatan kesehatan dan kedokteran diperbaiki	50 Jenis	
					Jumlah alat -alat kesehatan rumah sakit yang dipelihara	0,00					Jumlah alat -alat kesehatan rumah sakit yang dipelihara	0 Unit	
32.		35 Program upaya kesehatan perorangan	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN); Cakupan Kabupaten/Kota yang memiliki kebijakan PHBS; Cakupan OAP yang sudah memiliki dan memanfaatkan Kartu Papua Sehat; Persentase ODGJ (orang dengan gangguan jiwa) peserta konseling yang terpulihkan; Persentase PAK yang diawasi; Persentase Puskesmas yang mempunyai ketersediaan obat dan vaksin	10 Peningkatan Pelayanan JKN/BPJS									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Peserta JKN/BPJS terlayani	1.500.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.16 - Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Peserta JKN/BPJS terlayani	3000 Orang	
33.				11 Pelaksanaan Kartu Papua Sehat									
					Peserta KPS terlayani	15.000.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.16 - Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah OAP terlayani di KPS	5000 Orang	
					Jumlah OAP yang terlayani KPS	15.000.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.19 - Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Jumlah OAP yang terlayani KPS	1500 Orang	
34.		46 Program Peningkatan Kesehatan Jiwa Masyarakat	Cakupan Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa ; Cakupan jumlah Rumah sakit yang sudah terakreditasi ; Cakupan pasien penyakit jiwa yang tertangani; Persentase ODGJ (orang dengan gangguan jiwa) peserta konseling yang terpulihkan	1 Pelayanan Kesehatan Jiwa di Kabupaten/Kota									
					Jumlah masyarakat yang mendapat pengobatan jiwa di kabupaten/niwa	500.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.13 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah masyarakat yang mendapat pengobatan jiwa di kabupaten/niwa	400 Orang	
					paseien gangguan jiwa (ODGJ) yang di obati per Kabupaten sejumlah 10 orang. masyarakat yang mendapatkan Penyuluhan kesehatan jiwa 50 orang per Kabupaten.	1.000.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.13 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	paseien gangguan jiwa (ODGJ) yang di obati per Kabupaten sejumlah 10 orang. masyarakat yang mendapatkan Penyuluhan kesehatan jiwa 50 orang per Kabupaten.	400 Orang Kegiatan	
					Jumlah peserta penyuluhan di kabupaten	500.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.02.03.1.02 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.03.1.02.02 - Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah peserta penyuluhan di kabupaten	100 Orang	
					Jumlah peserta bimtek	1.000.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.02.05.1.03 - Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	1.02.05.1.03.01 - Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	Jumlah peserta bimtek	200 Orang	
35.				2 Pelayanan Rujukan, Home Visite dan Antar Jemput Pasien									
					Pelayanan rujukan, home visite/antar jemput pasien gangguan jiwa	2.000.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.24 - Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik	Pelayanan rujukan, home visite/antar jemput pasien gangguan jiwa	50 Kabupaten	
					Jumlah Pasien rujukan, home visite/antar jemput pasien gangguan jiwa terlayani	0,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.24 - Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik	Jumlah Pasien rujukan, home visite/antar jemput pasien gangguan jiwa terlayani	50 Orang	
36.				3 Pelayanan Pemeriksaan/Deteksi Dini Gangguan Jiwa									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Jumlah orang yang dideteksi dini gangguan jiwa	1.000.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.13 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah orang yang dideteksi dini gangguan jiwa	100 Orang	
					menemukan kasus baru Orang Dengan Masalah Kejiwaan (OMDK) 10 Orang Per Kabupaten/Kota. Menemukan Kasus Baru Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) 5 Orang Per Kabupaten/ Kota	0,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.13 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	menemukan kasus baru Orang Dengan Masalah Kejiwaan (OMDK) 10 Orang Per Kabupaten/Kota. Menemukan Kasus Baru Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) 5 Orang Per Kabupaten/ Kota	100 Orang Kegiatan	
37.				4 Pelatihan Kesehatan Jiwa Bagi Petugas Kesehatan									
					Jumlah peserta Pelatihan tenaga kesehatan	1.500.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.02.03.1.02 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.03.1.02.01 - Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah peserta Pelatihan tenaga kesehatan	150 Orang	
					Menghadirkan tenaga kesehatan untuk di latih cara penanganan gangguan jiwa di puskesmas/Rumah Sakit Umum, 2 orang Per kabupaten Untuk 10 Kabupaten (1 Dokter dan 1 Perawat).	0,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.02.03.1.02 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.03.1.02.01 - Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah peserta Pelatihan tenaga kesehatan	150 Orang Kegiatan	
38.				7 Pengadaan Obat dan Perbekalan Pelayanan Kesehatan Jiwa									
					Jumlah dan jenis obat	0,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.01.21 - Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman Serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah dan jenis obat	0 Jenis	
					Jumlah Obat dan bahan kesehatan habis pakai	10.000.000.000,00	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.01.21 - Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman Serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Obat dan dan fasilitas kesehatan tersedia	125 Jenis	
JUMLAH						144.145.030.000,00							

Mengetahui,
Kepala Bappeda Provinsi Papua

YOHANES WALILO, S.Sos, M.Si
NIP. 197007281997121001

JAYAPURA, 20 July 2020
Plt. Direktur RS Jiwa Daerah Abepura

dr. Anton Tony MOte
NIP. 197908042009091001

**REKAPITULASI PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021
SERTA KETERKAITAN DENGAN HASIL PEMETAAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019**

PROVINSI : Papua

PERANGKAT DAERAH : Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	À Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	1 Penyediaan jasa surat menyurat									
					Jumlah surat yang disediakan	100.000.000,00		1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.03.01.1.03 - Administrasi Umum	1.03.01.1.03.01 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang terkirim	1500 Surat	
2.				2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik									
					Jumlah Jasa Layanan berlangganan Listrik, Air, Telepon, Transponder	2.000.000.000,00		1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.03.01.1.03 - Administrasi Umum	1.03.01.1.03.02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Layanan	12 Layanan	
3.				3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor									
					Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	100.000.000,00		1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.03.01.1.03 - Administrasi Umum	1.03.01.1.03.03 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	50 Unit	
4.				6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional									
					Jumlah Unit Mobil Dinas/Operasional yang terpelihara dan Terfasilitasi Perijinannya	500.000.000,00		1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.03.01.1.03 - Administrasi Umum	1.03.01.1.03.06 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Unit Mobil Dinas/Operasional yang diservis dan dipelihara	17 Unit	
5.				7 Penyediaan jasa administrasi keuangan									
					Jumlah Honor yang terbayarkan	0,00		1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.03.01.1.03 - Administrasi Umum	1.03.01.1.03.07 - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pegawai yang membuat laporan	100 Orang	
6.				8 Penyediaan jasa kebersihan kantor									
					Luas Gedung dan Halaman yang disediakan jasa kebersihan	400.000.000,00		1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.03.01.1.03 - Administrasi Umum	1.03.01.1.03.08 - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	jumlah Gedung dan Halaman yang dibersihkan	300 M2	
					Jumlah tenaga kebersihan dan Fasilitas Pendukung kebersihan kantor	540.000.000,00		1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.03.01.1.03 - Administrasi Umum	1.03.01.1.03.08 - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah tenaga kebersihan	15 Orang	
					Jumlah Jenis Bahan dan Alat Kebersihan	200.000.000,00		1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.03.01.1.03 - Administrasi Umum	1.03.01.1.03.14 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Bahan dan Alat Kebersihan	30 Jenis	
7.				9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja									
					Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	150.000.000,00		1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.03.01.1.03 - Administrasi Umum	1.03.01.1.03.09 - Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	25 Unit	
8.				10 Penyediaan alat tulis kantor									
					Jumlah jenis ATK yang disediakan	1.500.000.000,00		1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.03.01.1.03 - Administrasi Umum	1.03.01.1.03.10 - Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	75 Jenis	
9.				11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Jumlah barang cetakan	500.000.000,00		1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.03.01.1.03 - Administrasi Umum	1.03.01.1.03.11 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan	12 Jenis	
					Jumlah penggandaan	300.000.000,00		1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.03.01.1.03 - Administrasi Umum	1.03.01.1.03.11 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penggandaan	500000 Lembar	
					Jumlah Jenis Barang Cetak dan yang Disediakan	100.000.000,00		1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.03.01.1.03 - Administrasi Umum	1.03.01.1.03.11 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	30 Jenis	
					Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	200.000.000,00		1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.03.01.1.03 - Administrasi Umum	1.03.01.1.03.11 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	30 Bulan	
10.				12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor									
					Jumlah Komponen Listrik yang disediakan	1.000.000.000,00		1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.03.01.1.03 - Administrasi Umum	1.03.01.1.03.12 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen alat pemeliharaan listrik dan genset yang disediakan	15 Buah	
11.				13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor									
					Jumlah peralatan dan Perlengkapan	300.000.000,00		1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.03.01.1.03 - Administrasi Umum	1.03.01.1.03.25 - Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah penggandaan peralatan kantor yang disediakan	50 Unit	
12.				14 Penyediaan peralatan rumah tangga									
					Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	150.000.000,00		1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.03.01.1.03 - Administrasi Umum	1.03.01.1.03.14 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	1000 Unit	
13.				15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan									
					Jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	200.000.000,00		1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.03.01.1.03 - Administrasi Umum	1.03.01.1.03.15 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	500 Jenis	
14.				16 Penyediaan bahan logistik kantor									
					Jumlah liter bahan bakar untuk kendaraan operasional	400.000.000,00		1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.03.01.1.03 - Administrasi Umum	1.03.01.1.03.16 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah liter bahan bakar untuk kendaraan operasional	15000 Liter	
					jumlah mobilitas termasuk tenaga angkat dan turun beras ke kantor	30.000.000,00		1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.03.01.1.03 - Administrasi Umum	1.03.01.1.03.16 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah Pembelian Air Galon	300 Kali	
15.				17 Penyediaan makanan dan minuman									
					Pelaksanaan penyediaan makan dan minum	0,00		1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.03.01.1.03 - Administrasi Umum	1.03.01.1.03.17 - Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Porsi makan dan minum kegiatan yang tersedia	0 Kegiatan	
					Pelaksanaan makan minum tamu dan rapat	200.000.000,00		1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.03.01.1.03 - Administrasi Umum	1.03.01.1.03.17 - Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Porsi makan dan minum yang tersedia	120 Kali Tahun	
					Pelaksanaan makan minum saat olah raga (hari Jumat)	300.000.000,00		1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.03.01.1.03 - Administrasi Umum	1.03.01.1.03.17 - Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Porsi makan dan minum yang tersedia	48 Kali	
					Tersediannya Makanan dan Minuman	400.000.000,00		1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.03.01.1.03 - Administrasi Umum	1.03.01.1.03.17 - Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Porsi makan dan minum yang tersedia	12 Bulan	
					Jumlah orang yang disediakan makan dan minuman	200.000.000,00		1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.03.01.1.03 - Administrasi Umum	1.03.01.1.03.17 - Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Porsi makan dan minum yang tersedia	1500 Orang	
16.				18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah									
					Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	5.000.000.000,00		1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.03.01.1.03 - Administrasi Umum	1.03.01.1.03.18 - Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	400 Orang	
17.				19 Penyediaan Jasa Pengamanan									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Pelaksanaan pembayaran insentif bagi tenaga operator dan penjaga X-Ray VIP Room Bandara Sentani	1.958.400.000,00		1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.03.01.1.03 - Administrasi Umum	1.03.01.1.03.01 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa keamanan/security yang dibayarkan	51 Orang Bulan	
					Pelaksanaan pembayaran honor bagi satpam	148.800.000,00		1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.03.01.1.03 - Administrasi Umum	1.03.01.1.03.01 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa keamanan/security yang dibayarkan	4 Orang Bulan	
					Pelaksanaan uang makan satpam	2.412.000.000,00		1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.03.01.1.03 - Administrasi Umum	1.03.01.1.03.01 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa keamanan/security yang dibayarkan	67 Orang Bulan	
					Jumlah tenaga pengamanan	720.000.000,00		1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.03.01.1.03 - Administrasi Umum	1.03.01.1.03.01 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa keamanan/security yang dibayarkan	20 Orang	
18.		2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	À Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	3 Pembangunan gedung kantor									
					Luas bangunan yang dibangun	90.000.000.000,00		1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.03.01.1.03 - Administrasi Umum	1.03.01.1.03.39 - Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Luas bangunan yang dibangun	1125 M2	
					Tersedianya desain perencanaan bangunan	0,00		1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.03.01.1.03 - Administrasi Umum	1.03.01.1.03.39 - Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Tersedianya desain perencanaan bangunan	0 Dokumen	
19.				4 Pengadaan mobil jabatan									
					Jumlah mobil yang diadakan	5.000.000.000,00		1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.03.01.1.03 - Administrasi Umum	1.03.01.1.03.20 - Pengadaan Mobil Jabatan	Jumlah mobil yang diadakan	10 Unit	
20.				5 Pengadaan kendaraan dinas/operasional									
					Jumlah kendaraan yang diadakan	2.000.000.000,00		1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.03.01.1.03 - Administrasi Umum	1.03.01.1.03.21 - Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda 4	4 Unit	
					Jumlah kendaraan roda 2	150.000.000,00		1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.03.01.1.03 - Administrasi Umum	1.03.01.1.03.21 - Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda 2	5 Unit	
21.				7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor									
					Jumlah pengadaan perlengkapan	500.000.000,00		1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.03.01.1.03 - Administrasi Umum	1.03.01.1.03.23 - Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan	50 Unit	
22.				9 Pengadaan peralatan gedung kantor									
					Jumlah peralatan perlengkapan	500.000.000,00		1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.03.01.1.03 - Administrasi Umum	1.03.01.1.03.25 - Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan/perlengkapan yang diadakan	40 Unit	
23.				10 Pengadaan mebeleur									
					Jumlah mebeleur yang diadakan	200.000.000,00		1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.03.01.1.03 - Administrasi Umum	1.03.01.1.03.26 - Pengadaan Mebeleur	Jumlah mebeleur yang diadakan untuk 3 UPT	10 Unit	
24.				11 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga									
					Jumlah peralatan dan perlengkapan rumah tangga yang diadakan	0,00		1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.03.01.1.03 - Administrasi Umum	1.03.01.1.03.14 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan dan perlengkapan rumah tangga yang diadakan	1 Unit	
					Jumlah peralatan dan perlengkapan rumah tangga yang diadakan	0,00		1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.03.01.1.03 - Administrasi Umum	1.03.01.1.03.14 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan dan perlengkapan rumah tangga yang diadakan	1 Set	
25.				22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor									
					Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1.000.000.000,00		1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.03.01.1.03 - Administrasi Umum	1.03.01.1.03.29 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor	1 Unit	
					belanja sewa	0,00		1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.03.01.1.03 - Administrasi Umum	1.03.01.1.03.29 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung yang disewa	0 Tahun	
26.				23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan									
					jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	450.000.000,00		1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.03.01.1.03 - Administrasi Umum	1.03.01.1.03.30 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	17 Unit	
27.				24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	0,00		1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.03.01.1.03 - Administrasi Umum	1.03.01.1.03.31 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah dan Jenis perlengkapan/peralatan gedung kantor yang dipelihara	25 Unit	
					Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	700.000.000,00		1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.03.01.1.03 - Administrasi Umum	1.03.01.1.03.31 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang	25 Unit	
					sewa kendaraan	0,00		1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.03.01.1.03 - Administrasi Umum	1.03.01.1.03.31 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan yang diperbaiki/Service	25 Bulan	
28.				26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor									
					Pelaksanaan pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	0,00		1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.03.01.1.03 - Administrasi Umum	1.03.01.1.03.27 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Jumlah Rumah Jabatan	0 Kegiatan	
					Jumlah Perlengkapan Gedung kantor yang terpelihara	100.000.000,00		1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.03.01.1.03 - Administrasi Umum	1.03.01.1.03.33 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung kantor yang dipelihara	20 Unit	
					Tersediannya biaya pemeliharaan gedung kantor	50.000.000,00		1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.03.01.1.03 - Administrasi Umum	1.03.01.1.03.39 - Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor	12 Bulan	
29.				28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor									
					Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	500.000.000,00		1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.03.01.1.03 - Administrasi Umum	1.03.01.1.03.35 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	4 Unit	
30.				30 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor									
					Luas bangunan yang direhab	1.000.000.000,00		1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.03.01.1.03 - Administrasi Umum	1.03.01.1.03.39 - Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Jumlah bangunan yang direhab	500 M2	
31.				46 Sewa gedung									
					Jumlah gedung kantor yang disewa	0,00		1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.03.01.1.03 - Administrasi Umum	1.03.01.1.03.27 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Jumlah rumah jabatan yang terpelihara	0 Unit Tahun	
					Sewa rumah jabatan	200.000.000,00		1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.03.01.1.03 - Administrasi Umum	1.03.01.1.03.27 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Jumlah Rumah Jabatan Yang disewa	12 Unit Tahun	
32.				51 Pembebasan Lahan Gedung Kantor									
					Luas lahan yang dibebaskan	30.000.000.000,00		1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.03.01.1.03 - Administrasi Umum	1.03.01.1.03.39 - Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Luas lahan yang dibebaskan	20000 Ha	
33.		3 Program peningkatan disiplin aparatur	À Meningkatnya disiplin aparatur	1 Pengadaan mesin/kartu absensi									
					Jumlah Mesin /Kartu Absensi yang tersedia	10.000.000,00		1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.03.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1.03.01.1.04.01 - Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Jumlah Mesin /Kartu Absensi yang tersedia	10 Bh	
34.				2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya									
					Jumlah pakaian dinas yang diadakan	500.000.000,00		1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.03.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1.03.01.1.04.02 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas sipil harian	500 Stell	
35.				4 Pengadaan pakaian KORPRI									
					jumlah pakaian KORPRI yang diadakan	300.000.000,00		1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.03.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1.03.01.1.04.04 - Pengadaan Pakaian Korpri	Jumlah pakaian KORPRI yang diadakan	467 Stell	
36.				5 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu									
					Jumlah pakaian khusus yang diadakan	500.000.000,00		1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.03.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1.03.01.1.04.05 - Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah pakaian Batik yang diadakan	465 Stell	
37.		4 Program fasilitas pindah/purna tugas PNS	À Meningkatnya kualitas penanganan pindah/purna tugas PNS	1 Pemulangan pegawai yang pensiun									
					Jumlah pegawai pensiun yang difasilitasi	0,00		1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.03.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1.03.01.1.04.06 - Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah pegawai pensiun yang difasilitasi	0 Orang	

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
38.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4 Program fasilitas pindah/purna tugas PNS PND	À Meningkatnya kualitas penanganan pindah/purna tugas PND	2 Pemulangan pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas	Jumlah pegawai yang dipulangkan	0,00						0 Orang	
39.		5 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	À Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	1 Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	150.000.000,00		1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.03.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1.03.01.1.04.09 - Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparatur mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	25 Orang	
40.				2 Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	1.000.000.000,00		1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.03.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1.03.01.1.04.10 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	600 Orang	
41.				3 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta bimbingan teknis tentang implementasi peraturan perundang-undangan	300.000.000,00		1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.03.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1.03.01.1.04.11 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta bimbingan teknis tentang implementasi peraturan perundang-undangan	150 Orang	
42.				4 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal	Jumlah aparatur yang terlatih	300.000.000,00		1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.03.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1.03.01.1.04.11 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	
43.		6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	À Meningkatnya kualitas akuntabilitas OPD	1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	500.000.000,00		1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.03.01.1.02 - Administrasi Keuangan	1.03.01.1.02.06 - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan	5 Laporan	
					Laporan LAKIP SKPD	0,00		1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.03.01.1.01 - Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.03.01.1.01.05 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan LAKIP SKPD	0 Dokumen	
44.				2 Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah pelaporan keuangan semesteran yang diselesaikan tepat waktu	200.000.000,00		1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.03.01.1.02 - Administrasi Keuangan	1.03.01.1.02.07 - Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Jumlah dokumen laporan	1 Laporan	
45.				4 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	200.000.000,00		1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.03.01.1.02 - Administrasi Keuangan	1.03.01.1.02.09 - Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	1 Laporan	
46.				5 Penyusunan Renja, RKA dan Perubahan APBD	Jumlah dokumen	700.000.000,00		1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.03.01.1.01 - Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.03.01.1.01.01 - Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	4 Dokumen	
47.				10 Forum SKPD Provinsi Papua	Jumlah Peserta Forum	800.000.000,00		1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.03.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1.03.01.1.04.10 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Forum	200 Orang	
48.				11 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah laporan yang disusun	0,00		1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.03.01.1.02 - Administrasi Keuangan	1.03.01.1.02.07 - Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Jumlah laporan yang disusun	0 Laporan	
49.				12 Penyusunan RENSTRA	Jumlah Dokumen	200.000.000,00		1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.03.01.1.01 - Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.03.01.1.01.01 - Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	
50.				13 Penyusunan SOP									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Jumlah Dokumen	0,00		1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.03.01.1.01 - Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.03.01.1.01.04 - Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	0 Dokumen	
51.				14 Peningkatan Kapasitas PPID									
					Jumlah orang	500.000.000,00		1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.03.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1.03.01.1.04.09 - Pendidikan dan Pelatihan Formal	Pembinaan Administrasi Kepegawaian	10 Orang	
52.				15 Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM)									
					Jumlah Dokumen yang disusun	0,00		1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.03.01.1.01 - Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.03.01.1.01.05 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen yang disusun	0 Dokumen	
53.				16 Penyusunan Dokumen Rencana Umum Pengadaan (RUP)									
					Jumlah Dokumen Rencana Umum Pengadaan (RUP)	0,00		1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.03.01.1.01 - Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.03.01.1.01.04 - Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Umum Pengadaan (RUP)	1 Dokumen	
54.		15 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Panjang jalan provinsi yang fungsional; Panjang jembatan yang fungsional; Terbangunnya Jalan dan Jembatan; panjang jalan yang terbangun	6 Monitoring, evaluasi dan pelaporan									
					Jumlah dokumen	1.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	1.03.11.1.02 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	1.03.11.1.02.05 - Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah dokumen	12 Laporan	
55.				360 Pembangunan Jalan Usku - Kesnar (115), 75 km									
					panjang jalan yang terbangun	20.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.05 - Pembangunan Jalan	panjang jalan Usku - Kesnar yang terbangun (115)	6 Km	
56.				362 Pembangunan Ring Road Jayapura - Sentani (Lingkar Dalam), Jbt									
					Jembatan yang terbangun	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.07 - Pelebaran Jalan Menambah Lajur	Jembatan yang terbangun	50 Meq	
					Jembatan yang terbangun	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.07 - Pelebaran Jalan Menambah Lajur	Jembatan yang terbangun	50 Meq	
57.				469 Pembangunan Jalan Illu (Puncak Jaya) - Tiom, (Lanny Jaya), (163), 53 Km									
					panjang jalan yang terbangun	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.05 - Pembangunan Jalan	panjang jalan yang terbangun	53 Km	
58.				479 Pembangunan Jalan Duntek (Dogiyai)-Munayepa/Iyei (Paniai)									
					panjang jalan yang terbangun	10.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.05 - Pembangunan Jalan	Panjang Jalan Duntek (Dogiyai) - Munayepa/Iyei yang terbangun (Paniai)	5 Km	
59.				480 Pembangunan Jalan Maatadi (Deiyai)-Digikebo (Dogiyai)									
					panjang jalan yang terbangun	40.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.05 - Pembangunan Jalan	Panjang Jalan Maatadi (Deiyai) - Digikebo (Dogiyai) yang terbangun	8 Km	

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
60.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	15 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Panjang jalan provinsi yang fungsional; Panjang jembatan yang fungsional; Terbangunnya Jalan dan Jembatan; panjang jalan yang terbangun	489 Pembangunan Jalan Serui - Ansus, (123), 71,15 Km									
					panjang jalan yang terbangun	10.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.05 - Pembangunan Jalan	panjang jalan Serui - Ansus yang terbangun (123)	5 Km	
61.				494 Pembangunan Jalan Enarotali (Paniai) - Sugapa, (139) (50 Km)									
					panjang jalan yang terbangun	10.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.05 - Pembangunan Jalan	panjang jalan Enarotali (Paniai) - Sugapa yang terbangun (139)	50 Km	
62.				496 Pembangunan Jalan Kanggime - Mamit - Fawi									
					panjang jalan yang terbangun	10.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.05 - Pembangunan Jalan	panjang jalan Kanggime - Mamit - Fawi yang terbangun	5 Km	
					Panjang Jalan yang terbangun	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.05 - Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang terbangun	0 Km	
63.				498 Pembangunan Jalan Burmeso Gesa - Barapasi (118), 194,60 Km									
					Panjang jalan yang dibangun	81.500.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.05 - Pembangunan Jalan	Panjang jalan Burmeso - Gesa - Barapasi yang dibangun (118)	30 Km	
64.				499 Pembangunan Jalan Taja - SP V - Kwarja (106)									
					panjang jalan yang terbangun	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.05 - Pembangunan Jalan	panjang jalan yang terbangun	5 Km	
65.				500 Pembangunan Jalan Taja - Lereh (110) 82,55 Km									
					panjang jalan yang terbangun	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.05 - Pembangunan Jalan	panjang jalan yang terbangun	5 Km	
66.				503 Pembangunan Jalan Menawi - Sumberbaba, (122), 40 Km									
					panjang jalan yang terbangun	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.05 - Pembangunan Jalan	panjang jalan yang terbangun	5 Km	
67.				504 Pembangunan Jalan Botawa - Koweda - Barapasi (128), 30 Km									
					panjang jalan yang terbangun	80.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.05 - Pembangunan Jalan	Panjang Jalan Botawa-Koweda-Barapasi (128), 30 Km yang terbangun	33 Km	
68.				506 Pembangunan Jalan Waren - Botawa - Sumianga, (126) 31 Km									
					panjang jalan yang terbangun	50.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.05 - Pembangunan Jalan	Panjang Jalan Waren-Botawa-Sumianga, (126) 31 Km yang terbangun	10 Km	
69.				509 Pembangunan Jalan Arimbet - Maju - Ujung - Manggelum (164)									
					Panjang jalan yang dibangun	50.000.000.000,00						0 KM2	

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
70.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	15 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Panjang jalan provinsi yang fungsional; Panjang jembatan yang fungsional; Terbangunnya Jalan dan Jembatan; panjang jalan yang terbangun	514 Pembangunan Jalan Manda - Wolo - Kobakma (169) (30 Km)									
					panjang jalan yang terbangun	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.05 - Pembangunan Jalan	panjang jalan yang terbangun	5 Km	
71.				519 Pembangunan Jembatan Holtekamp Jayapura (Landmark Papua)									
					panjang jembatan yang terbangun	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.05 - Pembangunan Jalan	panjang jembatan yang terbangun	40 Meq	
72.				526 Pembangunan Jembatan Wosi (100 M") (Wosi - Wogi - Kimbim)									
					panjang jembatan yang terbangun	15.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.05 - Pembangunan Jalan	panjang jembatan Wosi (100 M") (Wosi-Wogi-Kimbim)	23 Meq	
73.				530 Burmeso - D. Bira - Sikari									
					Panjang jalan yang dibangun	50.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.05 - Pembangunan Jalan	Panjang jalan Burmeso - D.Bira - Sikari yang dibangun	0 KM2	
74.				541 Pembangunan Jalan Keppi - Bade (181)									
					panjang jalan yang terbangun	52.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.05 - Pembangunan Jalan	panjang jalan Keppi - Bade yang terbangun (181)	10 Km	
75.				551 Pembangunan Jalan Karubaga - Wunim - Bokondini (154)									
					panjang jalan yang terbangun	18.500.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.05 - Pembangunan Jalan	panjang jalan Karubaga - Wunim - Bokondini yang terbangun (154)	4 Km	
76.				552 Pembangunan Jalan Dekai - Logpon - Pattipi (160)									
					Panjang jalan yang terbangun	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.05 - Pembangunan Jalan	Panjang jalan Dekai - Logpon - Pattipi yang terbangun (160)	5 Km	
77.				563 Pembangunan Jalan Sugapa - Enarotali (Paniai), (139) 50 Km									
					Panjang jalan yang dibangun	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.05 - Pembangunan Jalan	Panjang jalan Sugapa - Enarotali (Paniai) yang dibangun (139)	50 KM2	
78.				583 Pembangunan Jembatan S. Urpiah, 60 M" (Ruas Jalan Taja - SP V - Kwarja (106))									
					Jembatan yang terbangun	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.12 - Pembangunan Jembatan	Jembatan S.Urpiah yang terbangun (Ruas Jalan Taja - SP V - Kwarja (106))	60 Meq	
79.				590 Pembangunan Jembatan Kali Bian									
					panjang jembatan yang terbangun	125.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.12 - Pembangunan Jembatan	panjang jembatan yang terbangun (Kali Bian)	200 Meq	

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
80.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	15 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Panjang jalan provinsi yang fungsional; Panjang jembatan yang fungsional; Terbangunnya Jalan dan Jembatan; panjang jalan yang terbangun	601 Pembangunan Jembatan Yosem (10 M ²) (Doubo - Sorendiweri - Amyas (135))									
					Panjang jembatan yang terbangun	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.12 - Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan Yosem (10 M) yang terbangun (Doubo - Sorendiweri - Amyas (135))	30 Meq	
81.				602 Pembangunan Jembatan Yardori (10 M ²) (Doubo - Sorendiweri - Amyas (135))									
					Panjang jembatan yang terbangun	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.12 - Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan Yardori (10 M ²) yang terbangun (Doubo - Sorendiweri - Amyas (135))	272 Meq	
					panjang jembatan yang terbangun	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.12 - Pembangunan Jembatan	panjang jembatan yang terbangun	6 Meq	
82.				604 Pembangunan Jalan Taria - Megambilis, (120), 48 Km									
					Panjang jalan yang dibangun	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.05 - Pembangunan Jalan	Panjang jalan Taria - Megambilis yang dibangun (120)	48 KM2	
83.				605 Pembangunan Jalan Kobakma - Megambilis (120), 112 Km									
					Panjang jalan yang dibangun	40.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.05 - Pembangunan Jalan	Panjang jalan Kobakma - Megambilis yang dibangun (120)	75 KM2	
					panjang jalan yang terbangun	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.05 - Pembangunan Jalan	panjang jalan yang terbangun	0 Km	
84.				639 Pembangunan Jembatan Kali Kapare									
					panjang jembatan yang terbangun	25.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.12 - Pembangunan Jembatan	panjang jembatan Kali Kapare yang dibangun	50 Meq	
85.				640 Pembangunan Jembatan Kali Aparuka									
					panjang jembatan yang terbangun	25.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.12 - Pembangunan Jembatan	panjang jembatan Kali Aparuka yang terbangun	50 Meter	
86.				642 Pembangunan Jembatan Kali Urumuka									
					Panjang Jembatan yang terbangun	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.12 - Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan Kali Urumuka yang terbangun	60 Meq	
87.				650 Pembangunan Jembatan Deka - Logpond (Dekai - Logpon - Pattipi (160))									
					Panjang Jembatan yang dibangun	50.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.12 - Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan Logpond yang dibangun (Dekai - Logpon - Pattipi (160))	40 Meq	
88.				656 Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Kurudu									
89.				657 Pembangunan Jalan Elelim - Kobakma									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					panjang jalan yang terbangun	52.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.05 - Pembangunan Jalan	panjang jalan yang terbangun	9 Km	
90.				658 Pembangunan Jalan Karubaga - Mamit									
					panjang jalan yang terbangun	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.05 - Pembangunan Jalan	panjang jalan Karubaga - Mamit yang terbangun	5 Km	
91.				662 Pembangunan Jalan Tiom - Kuyawage									
					Panjang jalan yang dibangun	81.500.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.05 - Pembangunan Jalan	Panjang jalan yang dibangun	14 KM2	
92.				700 Pembangunan Jalan Nume - Tiom									
					Panjang jalan yang dibangun	25.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.05 - Pembangunan Jalan	Panjang jalan Nume - Tiom yang dibangun	4 KM2	
93.				701 Pembangunan Jembatan Amjaran III (40 M") (Berap - Nimbotong - Lereh - Tengon (110))									
					panjang jembatan yang terbangun	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.12 - Pembangunan Jembatan	panjang jembatan Amjaran III yang terbangun (Berap - Nimbotong - Lereh - Tengon (110))	40 Meter	
					Jembatan yang terbangun	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.12 - Pembangunan Jembatan	Jembatan yang terbangun	5 Meq	
94.				702 Pembangunan Jembatan Plaineung (40 M") (Berap - Nimbotong - Lereh - Tengon (110))									
					panjang jembatan yang terbangun	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.12 - Pembangunan Jembatan	panjang jembatan Plaineung yang terbangun (Berap - Nimbotong - Lereh - Tengon (110))	0 Km	
					panjang jembatan yang terbangun	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.12 - Pembangunan Jembatan	panjang jembatan Plaineung yang terbangun (Berap - Nimbotong - Lereh - Tengon (110))	40 Meter	
95.				704 Pembangunan Jembatan Sanggai (50 M") (Berap - Nimbotong - Lereh - Tengon (110))									
					panjang jembatan yang terbangun	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.12 - Pembangunan Jembatan	panjang jembatan Sanggai yang terbangun (Berap - Nimbotong - Lereh - Tengon (110))	50 Meter	
96.				712 Pembangunan Jalan Kanggime - Bogonuk									
					panjang jalan yang terbangun	50.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.05 - Pembangunan Jalan	panjang jalan Kanggime - Bogonuk yang terbangun	10 Km	
97.				720 Pembangunan Jembatan Kawa (40 M")									
98.				726 Pembangunan Jembatan Kanggime (Kali Toli) (80 M") (Kanggime - Mamit)									
					Panjang jembatan yang dibangun	38.500.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.12 - Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan yang dibangun	78 Meq	

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
99.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	15 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Panjang jalan provinsi yang fungsional; Panjang jembatan yang fungsional; Terbangunnya Jalan dan Jembatan; panjang jalan yang terbangun	730 Pembangunan Jalan Panaga - Taive									
					Panjang jalan yang dibangun	80.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.05 - Pembangunan Jalan	Panjang jalan Panaga - Taive yang dibangun	13.5 KM2	
					terbangunnya jalan yang dibangun	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.05 - Pembangunan Jalan	terbangunnya jalan yang dibangun	5 Km	
100.				735 Pembangunan Jalan Wamena - Temia - Wogi									
					Panjang jalan yang dibangun	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.05 - Pembangunan Jalan	Panjang jalan wamena - Temia - Wogi yang dibangun	5 KM2	
101.				736 Pembangunan Jalan Eragayan - Kobakma									
					Panjang jalan yang dibangun	81.500.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.05 - Pembangunan Jalan	Panjang jalan Eragayan - Kobakma yang dibangun	16 KM2	
					panjang jalan yang dibangun	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.05 - Pembangunan Jalan	panjang jalan yang dibangun	5 Km	
102.				739 Pembebasan Lahan Jalan Bonggrang - Depapre									
					Jumlah lahan jalan yang dibebaskan	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.02 - Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Jumlah lahan jalan yang dibebaskan	250000 M2	
103.				740 Pembangunan Jembatan Demba I (60 M") (Botawa - Koweda - Barapasi (128))									
					Panjang jembatan yang dibangun	33.500.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.12 - Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan Demba I yang dibangun (Botawa - Koweda - Barapasi (128))	58 Meq	
104.				741 Pembangunan Jembatan Kauga (60 M") (Kaugapu - SP V)									
					Jembatan yang terbangun	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.12 - Pembangunan Jembatan	Jembatan Kauga yang terbangun (Kaugapu - SP V)	60 Meq	
105.				745 Pembangunan Jembatan Linggau (Ruas Keppi - Bade)									
					Panjang Jembatan yang terbangun	25.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.12 - Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan Linggau yang terbangun (Ruas Keppi - Bade)	45 M'	
106.				748 'Pembangunan Jalan Jagebob XIII - Bupul (STR.P)									
					Panjang jalan yang dibangun	30.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.05 - Pembangunan Jalan	Panjang jalan Jagebob XIII - Bupul (STR.P) yang dibangun	5 KM2	
					panjang jalan yang dibangun	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.05 - Pembangunan Jalan	panjang jalan yang dibangun	5 Km	

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
107.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	15 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Panjang jalan provinsi yang fungsional; Panjang jembatan yang fungsional; Terbangunnya Jalan dan Jembatan; panjang jalan yang terbangun	750 Pembangunan ruas jalan Duntek - Munayepa/leye (Obano - Kebo)									
					Panjang jalan yang dibangun	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.05 - Pembangunan Jalan	Panjang jalan yang dibangun	3 KM2	
					Panjang Jalan yang terbangun	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.05 - Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang terbangun	0 Km	
108.				799 Pembangunan Jalan Waena - Buper - Jembatan II									
					panjang jalan yang terbangun	0,00						0 Km	
109.				808 Pembangunan Jalan Wapoga - Demisa									
					Panjang jalan yang dibangun	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.05 - Pembangunan Jalan	Panjang jalan Wapoga - Demisa yang dibangun	3 KM2	
110.				818 Pembangunan Jembatan Aga (Enarotali - Sugapa)									
					Jembatan yang terbangun	15.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.12 - Pembangunan Jembatan	Jembatan yang terbangun	33 Meq	
111.				819 Pembangunan Jembatan Aga II (Enarotali - Sugapa)									
					panjang jembatan yang terbangun	15.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.12 - Pembangunan Jembatan	panjang jembatan yang terbangun	33 Meq	
112.				835 Pembangunan Jembatan Kali Pomdori									
					Panjang Jembatan yang terbangun	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.12 - Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan Kali Pomdori yang terbangun	40 Meq	
113.				840 Pembangunan Jembatan Sentosa I (25 M") (Berap - Nimbotong - Lereh - Tengon (110))									
					Panjang jembatan yang dibangun	20.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.05 - Pembangunan Jalan	Panjang jembatan Sentosa I yang dibangun (Berap - Nimbotong - Lereh - Tengon (110))	4 Meq	
114.				841 Pembangunan Jembatan Sentosa II (30 M") (Berap - Nimbotong - Lereh - Tengon (110))									
					Panjang jembatan yang dibangun	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.12 - Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan Sentosa II yang dibangun (Berap - Nimbotong - Lereh - Tengon (110))	30 Meq	
115.				842 Pembangunan Jembatan Bides I (30 M") (Berap - Nimbotong - Lereh - Tengon (110))									
					Panjang jembatan yang dibangun	11.500.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.12 - Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan Bides yang dibangun (Berap - Nimbotong - Lereh - Tengon (110))	30 Meq	
116.				843 Pembangunan Jembatan Tabean (20 M")									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Panjang Jembatan yang terbangun	11.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.12 - Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan Tabear yang terbangun	32 Meq	
117.				844 Pembangunan Jembatan Orei									
					Panjang Jembatan yang terbangun	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.12 - Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan Orei yang terbangun	30 Meq	
118.				845 Pembangunan Jembatan Kimi bawah (di ruas jalan Samabusa - Nabarua Bawah)									
					panjang jembatan yang terbangun	15.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.12 - Pembangunan Jembatan	panjang jembatan Kimi Bawah yang terbangun (Ruas Jalan Samabusa - Nabarua Bawah)	30 Meq	
119.				846 Pembangunan Jembatan Sanoba (di ruas jalan Samabusa - Nabarua Bawah)									
					panjang jembatan yang terbangun	15.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.12 - Pembangunan Jembatan	panjang jembatan Sanoba yang terbangun (Ruas Jalan Samabusa - Nabarua Bawah)	17.78 Meq	
120.				847 Pembangunan Jembatan Gantung Kali Bomambur (80 M)									
121.				848 Pembangunan Jembatan Gantung Kali Uragi Dundu (75 M)									
122.				849 Pembangunan Jembatan Gantung Kali Yoka Eqiam (70 M)									
123.				850 Pembangunan Jalan Muliama-Wame-Makki									
					Panjang jalan yang dibangun	50.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.05 - Pembangunan Jalan	Panjang jalan Muliama - Wame - Maki yang dibangun	11 KM2	
					panjang jalan yang dibangun	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.05 - Pembangunan Jalan	panjang jalan yang dibangun	1 Km	
124.				851 Pembangunan Jalan Gome - Oksibil									
					Panjang Jalan yang terbangun	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.05 - Pembangunan Jalan	Panjang Jalan Gome - Oksibil yang terbangun	5 Km	
125.				852 Pembangunan Jalan Arso XIV Yanmas									
					Panjang jalan yang dibangun	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.05 - Pembangunan Jalan	Panjang jalan Arso XIV - Yanmas yang dibangun	5 KM2	
126.				853 Pembangunan Jalan Aikima - Siepkosi									
					Panjang jalan yang dibangun	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.05 - Pembangunan Jalan	Panjang jalan Aikima - Siepkosi yang dibangun	5 KM2	
127.				854 Pembangunan Jalan Oksibil - Borme									
					Panjang jalan yang dibangun	81.500.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.05 - Pembangunan Jalan	Panjang jalan Oksibil - Borme yang dibangun	16 KM2	
128.				855 Pembangunan Jalan Wamena-Sekan- Apalapsilii - Elelim									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Panjang jalan yang dibangun	81.500.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.05 - Pembangunan Jalan	Panjang jalan Wamena - Sekan - Apalapsili - Eelimin yang dibangun	16 KM2	
					panjang jalan yang dibangun	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.05 - Pembangunan Jalan	panjang jalan yang dibangun	1 Km	
129.				856 Pembangunan Jembatan Kali Ubiyong (25 M") (Arso XIV - Sawia - Kwarja (114))									
					Panjang jembatan yang dibangun	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.12 - Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan Kali Ubiyong yang dibangun (Arso XIV - Sawia - Kwarja (114))	30 Meq	
130.				857 Pembangunan Jembatan Kali Merah (25 M") (Arso XIV - Sawia - Kwarja (114))									
					Panjang jembatan yang dibangun	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.12 - Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan Kali Merah yang dibangun (Arso XIV - Sawia - Kwarja (114))	30 KM2	
131.				858 Pembangunan Jembatan Aikima Atas (40 M") (Aikima - Siepkosi)									
					Panjang jembatan yang dibangun	15.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.12 - Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan Aikima Atas yang dibangun (Aikima - Siepkosi)	2308 Meq	
132.				859 Pembangunan Jembatan Aikima Bawah (40 M") (Aikima - Siepkosi)									
					Panjang jembatan yang dibangun	15.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.12 - Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan Aikima Bawah yang dibangun (Aikima - Siepkosi)	40 Meq	
133.				860 Pembangunan Jembatan Jumugi (40 M")									
					Panjang jembatan yang dibangun	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.12 - Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan Jumugi yang dibangun	40 Meq	
134.				861 Pembangunan Jalan Ilaga-Tambua-Sugapa									
					Panjang Jalan yang terbangun	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.05 - Pembangunan Jalan	Panjang Jalan Ilaga - Tambua - Sugapa yang terbangun	2 Km	
135.				862 Pembangunan Jembatan Sungai Bantagima									
					Panjang Jembatan yang terbangun	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.12 - Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan Sungai Bantagima yang terbangun	40 Meq	
136.				863 Pembangunan Jembatan Kimbim II									
					Panjang Jembatan yang terbangun	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.12 - Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan Kimbim yang terbangun	30 Meq	
137.				864 Pembangunan Jembatan Anggiap (30 M") (Berap - Nimbotong - Lereh - Tengon (110))									
138.				865 Pembangunan Jembatan Ewa (40 M") (Taja - Sp V - Kwarja (106))									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
139.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	15 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Panjang jalan provinsi yang fungsional; Panjang jembatan yang fungsional; Terbangunnya Jalan dan Jembatan; panjang jalan yang terbangun	866 Pembangunan Jalan Berap - Nimbotong - Lereh - Tengon (110)									
					Panjang jalan yang dibangun	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.05 - Pembangunan Jalan	Panjang jalan Berap - Nimbotong - Lereh - Tengon yang dibangun (110)	2 KM2	
140.				867 Pembangunan Jembatan Kertosari 4 (Kemiri - Depapre (111))									
					Panjang jembatan yang dibangun	5.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.12 - Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan Kertosari 4 yang dibangun (Kemiri - Depapre (111))	15 Meq	
141.				868 Pembangunan Jembatan Waibron (Kemiri - Depapre (111))									
					Panjang jembatan yang dibangun	5.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.12 - Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan Wibrion yang dibangun (Kemiri - Depapre (111))	15 Meq	
142.				869 Pembangunan Jembatan Maribu (a) (Kemiri - Depapre (111))									
					Panjang jembatan yang dibangun	5.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.12 - Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan Maribu (a) yang dibangun (Kemiri - Depapre (111))	5 Meq	
143.				870 Pembangunan Jalan Kamp. Wolker - Buper									
					Panjang jalan yang dibangun	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.05 - Pembangunan Jalan	Panjang jalan Kamp. Wolker - Buper yang dibangun	2 KM2	
144.				872 Pembebasan Lahan Jalan Hamadi - Holtekamp									
					Panjang jalan yang dibangun	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.02 - Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Luas Lahan yang dibebaskan	5 KM2	
					Jumlah lahan jalan yang dibebaskan	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.02 - Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Luas Lahan yang dibebaskan	18182 M2	
145.				873 Pembebasan Lahan Jembatan Algonik									
146.				874 Pengadaan Rangka (Lanjutan)/Pembayaran Sisa 2015 (DPAL)									
147.				875 Pembangunan Jembatan Pun (Bolakme - Kelila - Bokondini (167))									
					Pajang jembatan yang dibangun	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.12 - Pembangunan Jembatan	Pajang jembatan Pun (Bolakme - Kelila - Bokondini) yang dibangun	40 KM2	
148.				876 Pembangunan Jalan Wamena - Pugima - Mugi									
					panjang jalan yang terbangun	10.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.05 - Pembangunan Jalan	panjang jalan Wamena - Pugima - Mugi yang terbangun	2 Km	
149.				877 Pembangunan Jalan Mamit -Umagi									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Jumlah Panjang Jalan yang dibangun	10.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.05 - Pembangunan Jalan	Panjang Jalan Mamit - Umagi yang dibangun	2 KM2	
150.				878 Pembangunan jalan dan jembatan pedesaan									
					Jumlah Kampung yang Terakses Jalan	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.05 - Pembangunan Jalan	Jumlah Kampung yang Terakses Jalan	30	
151.				879 Pembangunan Jalan Kenyam - Batas Tugu									
					Panjang jalan yang dibangun	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.05 - Pembangunan Jalan	Panjang jalan Kenyam - Batas Tugu yang dibangun	2 Km	
152.				880 Pembangunan Jalan Arso XIV (Keerom) - Sawia - Kwarja (114) 60 Km									
					Panjang jalan yang dibangun	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.05 - Pembangunan Jalan	Panjang jalan Arso XIV (Keerom) - Sawia - Kwarja (114) 60 Km yang dibangun	10 Km	
153.				881 Pembangunan Jalan Ansus - Wooi/Natabui									
					Panjang jalan yang dibangun	10.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.05 - Pembangunan Jalan	Panjang jalan Ansus - Wooi yang dibangun	3 Km	
154.				882 Pembangunan Jalan Kapiroya - Timika									
					Panjang jalan yang dibangun	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.05 - Pembangunan Jalan	Panjang jalan Kapiroya - Timika yang dibangun	2 Km	
155.				883 Pembangunan Jalan Elelim - Witlanggo - Mamberamo Tengah									
					Panjang jalan yang dibangun	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.05 - Pembangunan Jalan	Panjang jalan Elelim - Witlanggo - Mamberamo Tengah yang dibangun	2 Km	
156.				885 Pembangunan Jalan Karubaga - Taive (Hulu Sungai Mamberamo)									
					Panjang jalan yang dibangun	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.05 - Pembangunan Jalan	Panjang jalan Karubaga - Taive (Hulu Sungai Mamberamo) yang dibangun	2 Km	
157.				886 Pembangunan Jalan Sumo - Dekai									
					Panjang jalan yang dibangun	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.05 - Pembangunan Jalan	Panjang jalan Sumo - Dekai yang dibangun	2 Km	
158.				887 Pembangunan Jalan Sumo - Holuwon									
					Panjang jalan yang dibangun	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.05 - Pembangunan Jalan	Panjang jalan Sumo - Holuwon yang dibangun	2 Km	
159.				888 Pembangunan Jalan Holuwon - Werima									
					Panjang jalan yang dibangun	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.05 - Pembangunan Jalan	Panjang jalan Holuwon - Werima yang dibangun	2 Km	

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
160.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	15 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Panjang jalan provinsi yang fungsional; Panjang jembatan yang fungsional; Terbangunnya Jalan dan Jembatan; panjang jalan yang terbangun	889 Pembangunan Jalan Werima - Mugi									
					Panjang jalan yang dibangun	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.05 - Pembangunan Jalan	Panjang jalan Werima - Mugi yang dibangun	2 Km	
161.				890 Pembangunan Jalan Oksibil - Iwur									
					Panjang jalan yang dibangun	20.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.05 - Pembangunan Jalan	Panjang jalan Oksibil - Iwur yang dibangun	333 Km	
162.				891 Pembangunan Jalan Iwur - Kawor									
					Panjang jalan yang dibangun	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.05 - Pembangunan Jalan	Panjang jalan Iwur - Kawor yang dibangun	2 Km	
163.				892 Pembangunan Jalan Waropko - Kawor									
					Panjang jalan yang dibangun	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.05 - Pembangunan Jalan	Panjang jalan Waropko - Kawor yang dibangun	2 Km	
164.				893 Pembangunan Jalan Okaba - Bade									
					Panjang jalan yang dibangun	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.05 - Pembangunan Jalan	Panjang jalan Okaba - Bade yang dibangun	2 Km	
165.				894 Pembangunan Jalan Ubrub - Kiwirok									
166.				895 Pembangunan Jalan Kota Baru - Eci - Senggo									
					Panjang jalan yang dibangun	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.05 - Pembangunan Jalan	Panjang jalan Kota Baru - Eci - Senggo yang dibangun	2 Km	
167.				896 Pembangunan Jalan Kurima-Tangma-Uka									
					Panjang jalan yang dibangun	25.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.05 - Pembangunan Jalan	Panjang jalan Kurima - Tangma - Uka yang dibangun	4 Km	
168.				897 Pembangunan Jalan Mamit - Taive									
					Panjang jalan yang dibangun	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.05 - Pembangunan Jalan	Panjang jalan Mamit - Taive yang dibangun	2 Km	
169.				898 Pembangunan Jalan Ibukota Genyem - Bandara Genyem baru									
					Panjang jalan yang dibangun	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.05 - Pembangunan Jalan	Panjang jalan Ibukota Genyem - Bandara Genyem baru yang dibangun	2 Km	
170.				899 Pembangunan Jalan Ilugwa - Wambo									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Panjang jalan yang dibangun	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.05 - Pembangunan Jalan	Panjang jalan Ilugwa - Wambo yang dibangun	2 Km	
171.				900 Pembangunan Jalan Samabusa - Nabarua - Bawah									
					Panjang jalan yang dibangun	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.05 - Pembangunan Jalan	Panjang jalan Samabusa - Nabarua - Bawah yang dibangun	2 Km	
172.				901 Pembangunan Jalan Waghete - Kogemani - Komauto - Kapiroaya									
					Panjang jalan yang dibangun	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.05 - Pembangunan Jalan	Panjang jalan Waghete - Kogemani - Komauto - Kapiroaya yang dibangun	2 Km	
173.				902 Pembangunan Jalan Lingkar Danau Tigi									
					Panjang jalan yang dibangun	81.500.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.05 - Pembangunan Jalan	Panjang jalan Lingkar Danau Tigi yang dibangun	16 Km	
174.				903 Pembangunan Jalan Tiom - Kuyawage - Agandugome									
					Panjang jalan yang dibangun	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.05 - Pembangunan Jalan	Panjang jalan Tiom - Kuyawage - Agandugome yang dibangun	2 Km	
175.				904 Pembangunan Jalan Gamelia - Bolakme									
					Panjang jalan yang dibangun	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.05 - Pembangunan Jalan	Panjang jalan Gamelia - Bolakme yang dibangun	2 Km	
176.				905 Pembangunan Jalan Elelim (Yalimo) - Apalapsili - Anggruk (Yahukimo)									
					Panjang jalan yang dibangun	30.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.05 - Pembangunan Jalan	Panjang jalan Elelim (Yalimo) - Apalapsili - Anggruk (Yahukimo) yang dibangun	13 Km	
177.				906 Pembangunan Jalan Mamit - Panaga									
					Panjang jalan yang dibangun	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.05 - Pembangunan Jalan	Panjang jalan Mamit - Panaga yang dibangun	2 Km	
178.				907 Pembangunan Jalan Burmeso - Trimuris - Kapeso									
					Panjang jalan yang dibangun	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.05 - Pembangunan Jalan	Panjang jalan Burmeso - Trimuris - Kapeso yang dibangun	2 Km	
179.				908 Pembangunan Jalan Ujung - Manggelum									
					Panjang jalan yang dibangun	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.05 - Pembangunan Jalan	Panjang jalan Ujung - Manggelum yang dibangun	2 Km	
180.				909 Pembangunan Jalan Poros Agats									
					Panjang jalan yang dibangun	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.05 - Pembangunan Jalan	Panjang jalan Poros Agats yang dibangun	2 Km	

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
181.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	15 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Panjang jalan provinsi yang fungsional; Panjang jembatan yang fungsional; Terbangunnya Jalan dan Jembatan; panjang jalan yang terbangun	910 Pembangunan Jalan Bayun - Primapun - Kamur									
					Panjang jalan yang dibangun	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.05 - Pembangunan Jalan	Panjang jalan yBayun - Primapun - Kamur Yang dibangun	2 Km	
182.				911 Pembangunan Jalan Tikome - Balingga									
					Panjang jalan yang dibangun	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.05 - Pembangunan Jalan	Panjang jalanTikome - Balingga yang dibangun	2 Km	
183.				912 Pembangunan Jalan Taja - Lereh - Tengon									
					Panjang jalan yang dibangun	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.05 - Pembangunan Jalan	Panjang jalan Taja - Lereh - Tengon yang dibangun	2 Km	
184.				913 Pembangunan Jalan Maju - Bukit - Kawor									
					Panjang jalan yang dibangun	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.05 - Pembangunan Jalan	Panjang jalan Maju - Bukit - Kawor yang dibangun	2 Km	
185.				914 Pembangunan Jalan Sugapa - Enarotali (Paniai), (139)									
					Panjang jalan yang dibangun	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.05 - Pembangunan Jalan	Panjang jalan Sugapa - Enarotali (Paniai) yang dibangun(139)	2 Km	
186.				915 Pembebasan Lahan Jembatan Wosi									
					Panjang tanah yang di bebaskan	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.02 - Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Luas tanah yang di bebaskan	50 Meq	
187.				919 Pembangunan Jembatan Kali Kabur									
					Panjang jembatan yang terbangun	15.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.12 - Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan Kali Kabur yang terbangun	1818 Meq	
188.				920 Pembangunan Jembatan Bogonuk (40 M) (Ruas Kanggime - Bogonuk)									
					Panjang jembatan yang terbangun	15.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.12 - Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan Bogonuk (40) yang terbangun (Ruas Kanggime - Bogonuk)	153 Meq	
189.				921 Pembangunan Jembatan Kali Kulugi (Ruas Wamena - Kurima - Tangma)									
					Panjang jembatan yang terbangun	10.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.12 - Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan Kali Kulugi yang terbangun (Ruas Wamena - Kurima - Tangma)	40 Meq	
190.				922 Pembangunan Jembatan Kali Melage (Ruas Wamena - Kurima - Tangma)									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Panjang jembatan yang terbangun	10.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.12 - Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan Kali Melage yang terbangun (Ruas Wamena - Kurima - Tangma)	40 Meq	
191.				923 Pembangunan Jembatan Kali Kut (Ruas Wamena - Kurima - Tangma)									
					Panjang jembatan yang terbangun	10.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.12 - Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan Kali Kut yang terbangun (Ruas Wamena - Kurima - Tangma)	40 Meq	
192.				924 Pembangunan Jembatan Kali Jetmi (Ruas Wamena - Kurima - Tangma)									
					Panjang jembatan yang terbangun	15.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.12 - Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan Kali Jetmi yang terbangun (Ruas Wamena - Kurima - Tangma)	40 Meq	
193.				925 Pembangunan Jembatan Toli 2									
					Panjang jembatan yang terbangun	10.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.12 - Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan Toli 2 yang terbangun	153 Meq	
194.				927 Pembangunan Jembatan S. Gau (Ruas Taja - SP V - Kwarja)									
					Panjang jembatan yang terbangun	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.12 - Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan S.Gau yang terbangun (Ruas Taja - SP V - Kwarja)	30 Meq	
195.				928 Pembangunan Jembatan Nawa (Ruas Taja - Lereh - Tengon)									
					Panjang jembatan yang terbangun	1.500.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.12 - Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan Nawa yang terbangun (Ruas Taja - Lereh - Tengon)	30 Meq	
196.				929 Pembangunan Jembatan Sepa (80 M) (Ruas Jalan Elelim - Kobakma)									
					Panjang Jembatan Yang dibangun	38.500.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.12 - Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan Sepa (80) Yang dibangun (Ruas Elelim - Kobakma)	78 Meq	
197.				930 Pembangunan Jembatan di Ruas Besum - Yanbra - Puai (108)									
					Panjang Jembatan yang di bangun	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.12 - Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang dibangun (Ruas Besum - Yanbra - Puai) (108)	60 Meq	
198.				931 Pembangunan Jalan Beoga-Oganim									
					Panjang Jalan Terbangun	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.05 - Pembangunan Jalan	Panjang Jalan Beoga - Oganim Terbangun	2 Km	
199.				934 Pembangunan Jembatan Sungai Smuta (Ruas Burmeso-Gesa-Barapasi)									
					Panjang Jembatan yang terbangun	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.12 - Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan Sungai Smuta yang terbangun (Ruas Burmeso - Gesa - Barapasi)	60 M'	
200.				935 Pembangunan Jembatan Kali Merah Smuta (Ruas Burmeso-Gesa-Barapasi)									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Panjang Jembatan yang terbangun	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.12 - Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan Kali Merah Smuta yang terbangun (Ruas Burmeso - Gesa - Barapasi)	30 M'	
201.				936 Pembangunan Jembatan Asset di Ruas Jalan Kepi-Bade									
					Panjang Jembatan yang terbangun	20.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.12 - Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan Asset yang terbangun (Ruas Kepi - Bade)	36 M'	
202.				937 Pembangunan Jalan Ilaga-Gasberg									
					Panjang Jalan Terbangun	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.05 - Pembangunan Jalan	Panjang Jalan Ilaga - Gasberg yang Terbangun	2 Km	
203.				943 Pembangunan Jalan Kanggime - Mamit - Umage									
					Panjang Jalan yang dibangun	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.05 - Pembangunan Jalan	Panjang Jalan Kanggime - Mamit - Umage yang dibangun	2 Km	
204.				944 Pembangunan Jembatan Sumbui (Serui - Ansus)									
					Panjang Jembatan yang dibangun	10.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.12 - Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan Sumbui yang dibangun (Ruas Serui - Ansus)	1818 Meq	
205.				945 Pembangunan Jalan Kimbim - Wogi - Wosi									
					Panjang Jalan yang dibangun	12.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.05 - Pembangunan Jalan	Panjang Jalan Wogi - Wosi Yang dibangun	3 Km	
206.				946 Pembangunan Jalan Burmeso - D. Bira - Sikari (119)									
					Panjang Jalan yang dibangun	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.05 - Pembangunan Jalan	Panjang Jalan Burmeso - D.Bira - Sikari yang dibangun	2 Km	
207.				947 Pembangunan Jalan Legare - Samabusa									
					Panjang Jalan yang dibangun	30.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.05 - Pembangunan Jalan	Panjang Jalan Legare - Samabusa yang dibangun	6 Km	
208.				948 Pembangunan Jalan Kobakma - Ilugwa - Wolo									
					Panjang Jalan yang dibangun	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.05 - Pembangunan Jalan	Panjang Jalan Kobakma - Ilugwa - Wolo yang dibangun	2 Km	
209.				949 Pembangunan Jembatan Kawa (Berap - Nimbotong - Lereh - Tengan (110))									
					Panjang Jembatan yang dibangun	20.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.12 - Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan Kawa yang dibangun (Berap - Nimbotong - Lereh - Tengan (110))	40 Meq	
210.				950 Pembangunan Jalan Kenyam - Bandara Baru									
					Panjang Jalan yang dibangun	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.05 - Pembangunan Jalan	Panjang Jalan Kenyam - Bandara Baru yang dibangun	2 Km	

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
211.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	15 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Panjang jalan provinsi yang fungsional; Panjang jembatan yang fungsional; Terbangunnya Jalan dan Jembatan; panjang jalan yang terbangun	951 Pembebasan Lahan Jalan Bonggrang - Depapre									
					Luas Lahan yang dibebaskan	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.02 - Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Luas Lahan yang dibebaskan	10000 KM2	
212.				952 Pembangunan Jalan Illu - Jigonikme									
					Panjang Jalan yang dibangun	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.05 - Pembangunan Jalan	Panjang Jalan Illu - Jigonikme yang dibangun	2 Km	
213.				953 Pembangunan Jalan Sugapa-Hitadipa-Beoga									
					Panjang Jalan yang dibangun	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.05 - Pembangunan Jalan	Panjang Jalan Sugapa - Hitadipa - Beoga yang dibangun	2 Km	
214.				954 Pembangunan Jembatan Jumugi (Aikima-Siepkosi)									
					Panjang Jembatan yang dibangun	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.12 - Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan Jumugi yang dibangun (Ruas Aikima - Siepkosi)	40 Meq	
215.				955 Pembangunan Jembatan Gremi									
					Panjang Jembatan yang dibangun	1.200.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.12 - Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan Gremi yang dibangun	3 Meq	
216.				956 Pembangunan Jembatan Yamuneri (Illu - Tiom)									
					Panjang Jembatan yang dibangun	33.500.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.12 - Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan Yamuneri yang dibangun (Ruas Jalan Illu - Tiom)	58 Meq	
217.				957 Pembangunan Jalan Kenyam - Gearek									
					Panjang Jalan yang dibangun	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.05 - Pembangunan Jalan	Panjang Jalan Kenyam - Gearek yang dibangun	2 Km	
218.				958 Pembangunan Jalan Kenyam - Batas Batu									
					Panjang Jalan yang dibangun	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.05 - Pembangunan Jalan	Panjang Jalan Kenyam - Batas Waktu yang dibangun	2 Km	
219.				960 Pembangunan Jembatan Kali Aja (RUas Burmeso-Gesa-Barapasi)									
					Panjang Jembatan yang dibangun	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.12 - Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan Kali Aja yang dibangun (Ruas Burmeso - Gesa - Barapasi)	30 Meq	
220.				961 Pembangunan Jalan Markas Komando Polda Papua Asei Kecil Distrik Sentani Timur (PON XX)									
					Panjang Jalan yang dibangun	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.05 - Pembangunan Jalan	Panjang Jalan Markas Komando Polda Asei Kecil distrik Sentani Timur yang dibangun	2 Km	

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
221.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	15 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Panjang jalan provinsi yang fungsional; Panjang jembatan yang fungsional; Terbangunnya Jalan dan Jembatan; panjang jalan yang terbangun	962 Pembangunan Jembatan Yali (Ruas Jalan Elelim (Hulikma)-Witlango-Kobakma (149)									
					Panjang Jembatan yang dibangun	15.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.12 - Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan Yali yang dibangun (Ruas Elelim (Hulikma) - Witlango - Kobakma) (149)	2307 Meq	
222.				963 Pembangunan Jembatan Asset (Ruas Jalan Kepi-Bade)									
223.				964 Pembangunan Jembatan Ogotho (Ruas Jalan Kepi-Bade)									
					Panjang Jembatan yang dibangun	15.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.12 - Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan Ogotho yang dibangun (Ruas Kepi - Bade)	30 Meq	
224.				965 Pembangunan Jalan Kepi-Bade									
					Panjang Jalan yang dibangun	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.05 - Pembangunan Jalan	Panjang Jalan Kepi - Bade yang dibangun	2 Km	
225.				966 Pembangunan Jalan Alternatif Kampung Harapan Dalam (PON XX)									
					Panjang Jalan yang dibangun	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.05 - Pembangunan Jalan	Panjang Jalan Alternatif Kampung Harapan Dalam (PON XX) yang dibangun	2 Km	
226.				967 Pembangunan Jembatan Liba Kampung Harapan Dalam (PON XX)									
					Panjang Jembatan yang dibangun	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.12 - Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan Liba Kampung Harapan Dalam (PON XX) yang dibangun	30 Meq	
227.				968 Pembangunan Jembatan Konja (Ruas Jalan Elelim (Hulikma)-Witlango-Kobakma (149)									
					Panjang Jembatan yang dibangun	15.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.12 - Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan Konja yang dibangun (Ruas Elelim (Hulikma) - Witlango - Kobakma) (149)	2307 Meq	
228.				969 Pembangunan Jembatan Yomo 1 (Ruas Jalan Besum-Yanbra-Puay)									
					Panjang Jembatan yang dibangun	24.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.12 - Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan Yomo 1 yang dibangun (Ruas Besum - Yanbra - Puay)	40 Meq	
229.				970 Pembangunan Jembatan Yomo 2 (Ruas Jalan Besum-Yanbra-Puay)									
					Panjang Jembatan yang dibangun	20.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.12 - Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan Yomo 2 yang dibangun (Ruas Besum - Yanbra - Puay)	36 Meq	
230.				971 Pembangunan Jalan Arso VI									
					Panjang Jalan yang dibangun	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.05 - Pembangunan Jalan	Panjang Jalan Arso VI yang dibangun	2 Km	
231.				972 Pembangunan Jembatan Tagaemon (Ruas Jalan Kepi-Bade)									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Panjang Jembatan yang terbangun	50.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.12 - Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan Tagaemon yang terbangun (Ruas Kepi - Bade)	100 Meq	
232.				973 Pembangunan Jalan Alternatif Buper-Kp. Harapan (PON XX)									
					Panjang Jalan yang Terbangun	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.05 - Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Terbangun (Ruas Alternatif Buper - Kampung Harapan (PON XX))	2 Km	
233.				974 Pembangunan Jalan Elelim (Yalimo) - Apalapsili									
					Panjang Jalan yang dibangun	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.05 - Pembangunan Jalan	Panjang Jalan Elelim - Apalapsili yang dibangun	2 Km	
234.				975 Peningkatan Jalan Moso - Skofro									
					Panjang jalan yang dibangun	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.05 - Pembangunan Jalan	Panjang jalan Moso - Skofro yang dibangun	2 Km	
235.				976 Pembangunan Jalan Ninati - Yetetkun									
					Panjang Jalan yang Terbangun	20.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.05 - Pembangunan Jalan	Panjang Jalan Ninati - Yetetkun yang Terbangun	2 Km	
236.				977 Pembangunan Jalan Oksibil - Tarup - Denomngatupbin									
					Panjang Jalan yang Terbangun	81.500.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.05 - Pembangunan Jalan	Panjang Jalan Oksibil - Tarup - Denomngatupbin yang Terbangun	16 Km	
237.				978 Pembangunan Eligobel - Tanas									
					Panjang Jalan yang Terbangun	20.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.05 - Pembangunan Jalan	Panjang Jalan Eligobel - Tanas yang Terbangun	3 Km	
238.				979 Pembangunan Jalan Tomer - Kondo									
					Panjang Jalan yang Terbangun	15.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.05 - Pembangunan Jalan	Panjang Jalan Tomer - Kondo yang Terbangun	3 Km	
239.				980 Pembangunan Jembatan Nasem (Distrik Naukenjerai)									
					Panjang Jembatan yang Terbangun	10.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.12 - Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan Nasem (Distrik Naukenjerai) yang Terbangun	15 Meq	
240.				981 Pembangunan Jalan Masuk Stadion Softball/Base Ball Kemiri (PONXX)									
					Panjang Jalan Baru	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.05 - Pembangunan Jalan	Panjang JalanMasuk Stadion Softball/Base ball Kemiri yang dibangun	2 Km	
241.				982 Pembangunan Jalan Pattipi - Suator									
					Panjang Jalan Yang Terbangun	30.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.05 - Pembangunan Jalan	Panjang Jalan Pattipi - Suator Yang Terbangun	2 Km	

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
242.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	15 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Panjang jalan provinsi yang fungsional; Panjang jembatan yang fungsional; Terbangunnya Jalan dan Jembatan; panjang jalan yang terbangun	983 Pembangunan Jalan dan Jembatan Prov Papua									
					Panjang Jalan dan Jembatan yang terbangun	100.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.05 - Pembangunan Jalan	Panjang Jalan dan Jembatan yang terbangun	30 Km	
243.				997 Pembangunan Jalan Irimuli - Wanduri - Pilia - Witle									
					Panjang Jalan yang dibangun	25.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.05 - Pembangunan Jalan	Panjang Jalan Irimuli - Wanduri - Pilia yang dibangun	4.17 Km	
244.				1000 Pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO)									
					Panjang jembatan yang terbangun	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.12 - Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan Penyeberangan Orang yang terbangun	50 Unit	
245.				1001 Rehabilitasi Jembatan Kali APO (Ruas Jalan Jayapura - Angkasa - Base G)									
					Panjang jembatan yang terbangun	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.12 - Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan Kali APO yang direhabilitas (Ruas Jalan Raya - Angkasa - Base G)	30 Meq	
246.				1002 Pembangunan Jembatan Yabaso II (Ruas Jalan Nendali - Bandara)									
					Panjang jembatan yang terbangun	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.12 - Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan Yabaso II yang dibangun (Ruas Nendali - Bandara)	30 Meq	
247.				1003 Pembangunan Jembatan Yabaso III (Ruas Jalan Nendali - Bandara)									
					Panjang jembatan yang terbangun	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.12 - Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan Yabaso III yang dibangun (Ruas Nendali - Bandara)	30 Meq	
248.				1004 Pembangunan Jembatan Kali Koly (Prioritas PON, Bukit Kolengger)									
					Panjang jembatan yang terbangun	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.12 - Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan Kali Koly yang dibangun (Prioritas PON, Bukit Kolengger)	30 Meq	
249.				1005 Pembangunan Jembatan Kali Yungme									
					Panjang jembatan yang terbangun	10.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.12 - Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan Kali Yungme yang dibangun	15 Meq	
250.				1006 Pembangunan Jembatan Kali Wollo									
					Panjang jembatan yang terbangun	15.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.12 - Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan Kali Wollo yang dibangun	25 Meq	
251.				1007 Pembangunan Jembatan Gantung Kali Yugu Nemba									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Panjang jembatan yang terbangun	5.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.12 - Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan Gantung Kali Yugu Nembra yang terbangun	20 Meq	
252.				1008 Pembangunan Jembatan Kali Baliem Distrik Beam									
					Panjang jembatan yang terbangun	15.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.12 - Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan Kali Baliem (Distrik Beam) yang terbangun	25 Meq	
253.				1009 Pembangunan Jembatan Kali Mugi									
					Panjang jembatan yang terbangun	25.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.12 - Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan Kali Mugi yang terbangun	40 Meq	
254.				1010 Pembangunan Jembatan Kali Hunen									
					Panjang jembatan yang terbangun	20.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.12 - Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan yKali Hunen Yang dibangun	30 Meq	
255.				1011 Pembangunan Jembatan Kali Libuk									
					Panjang jembatan yang terbangun	20.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.12 - Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan Kali Libuk yang terbangun	30 Meq	
256.				1012 Pembangunan Jembatan Kali Wasile									
					Panjang jembatan yang terbangun	20.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.12 - Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan Kali Wasile yang dibangun	30 Meq	
257.				1013 Pembangunan Jembatan Kali Weth									
					Panjang jembatan yang terbangun	20.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.12 - Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan Kali Weth yang dibangun	30 Meq	
258.				1014 Pembangunan Jembatan Kali Kayo									
					Panjang jembatan yang terbangun	20.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.12 - Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan Kali Kayo yang dibangun	30 Meq	
259.				1015 Pembangunan Jembatan Kali Yesuke									
					Panjang jembatan yang terbangun	20.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.12 - Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan Kali Yesuke yang dibangun	30 Meq	
260.				1016 Pembangunan Jembatan Gantung Kali Baliem Distrik Negeyagin									
					Panjang jembatan yang terbangun	10.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.12 - Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan Gantung Kali Baliem Distrik Negeyagin yang dibangun	200 Meq	
261.				1018 Pambangunan Jalan Fly Over Waena - Abepura (Segmen 1)									
					panjang jalan yang terbangun	150.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.05 - Pembangunan Jalan	panjang jalan Fly Over Waena - Abepura (Segmen 1) yang dibangun	2 Km	

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
262.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	15 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Panjang jalan provinsi yang fungsional; Panjang jembatan yang fungsional; Terbangunnya Jalan dan Jembatan; panjang jalan yang terbangun	1019 Pembangunan Jalan Fly Over Abepura - Kotaraja (Segmen 2)									
					panjang jalan yang terbangun	200.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.05 - Pembangunan Jalan	panjang jalan Fly Over Abepura - Kotaraja (Segmen II) yang dibangun	2 Km	
263.				1020 Pembangunan Jalan Fly Over Kotaraja - Sky Line (Segmen 3)									
					panjang jalan yang terbangun	150.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.05 - Pembangunan Jalan	panjang jalan Fly Over Kotaraja - Sky Line (Segmen III) yang dibangun	0 Km	
264.				1021 Pembangunan Jalan Fly Over Abepura - Tanah Hitam (Segmen 4)									
					panjang jalan yang terbangun	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.05 - Pembangunan Jalan	panjang jalan Fly Over Abepura - Tanah Hitam (Segmen IV) yang dibangun	2 Km	
265.				1022 Pembangunan Jalan Fly Over Tanah Hitam - Sky Line (Segmen 5)									
					panjang jalan yang terbangun	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.05 - Pembangunan Jalan	panjang jalan Fly Over Tanah Hitam - Sky Line (SegmenV) yang dibangun	2 Km	
266.				1023 Pembangunan Jalan Wamena - Yomote - Anggruk- Dekai									
					panjang jalan yang terbangun	81.500.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.05 - Pembangunan Jalan	panjang jalan Wamena - Yomote - Anggruk - Dekai yang dibangun	16 Km	
267.				1024 Pembangunan Jalan Gunung Susu - Sawarek- Wetalak - Wemanesili									
					panjang jalan yang terbangun	25.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.05 - Pembangunan Jalan	panjang jalan Gunung Susu - Sawarek - Wetalak - Wemanesili yang dibangun	6 Km	
268.				1025 Pembangunan Jalan Yamoneri - Jigemili									
					panjang jalan yang terbangun	30.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.05 - Pembangunan Jalan	panjang jalan Jigemili - Yamoneri yang dibangun	7 Km	
269.				1026 Pembangunan Jalan Beton Lingkar Asmat									
					panjang jalan yang terbangun	81.500.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.05 - Pembangunan Jalan	panjang jalan Beton Lingkar Asmat yang dibangun	2 Km	
270.				1027 Pembangunan Jalan Wangbe - Ogamaning									
					panjang jalan yang terbangun	81.500.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.05 - Pembangunan Jalan	panjang jalan Wangbe - Ogamaning yang dibangun	16 Km	
271.				1028 Pembangunan Jalan Gupura - Guna									
					panjang jalan yang terbangun	15.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.05 - Pembangunan Jalan	panjang jalan Gupura - Guna yang dibangun	3 Km	

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
272.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	15 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Panjang jalan provinsi yang fungsional; Panjang jembatan yang fungsional; Terbangunnya Jalan dan Jembatan; panjang jalan yang terbangun	1029 Pembangunan Jembatan Kali Bumi Bawah									
					Panjang jembatan yang terbangun	20.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.12 - Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan Kali Bumi Bawah yang dibangun	40 Meq	
273.				1030 Pembangunan Jalan Tiom - Jugunggi									
					panjang jalan yang terbangun	15.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.05 - Pembangunan Jalan	panjang jalan Tiom - Jugunggi yang dibangun	3 Km	
274.				1031 Pembangunan Jembatan Kali Ilu (Distrik Ilugga)									
					Panjang jembatan yang terbangun	20.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.12 - Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan Kali Ilu (Distrik Ilugga) yang dibangun	40 Meq	
275.				1032 Pembangunan Jalan Mugi - Werima - Soba									
					panjang jalan yang terbangun	20.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.05 - Pembangunan Jalan	panjang jalan Mugi - Werima - Soba yang dibangun	4 Km	
276.				1035 Pembangunan Jalan Kanggime - Kembu (Mamit) - Umagi - Dou									
					panjang jalan yang terbangun	40.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.05 - Pembangunan Jalan	panjang jalan Kanggime - Kembu (Mamit) yang dibangun	10 Km	
					Panjang Jalan yang terbangun	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.05 - Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang terbangun	2 Km	
277.				1036 Pembangunan Jalan Obano - Uwebutu (Duntek - Munayepa/lyei)									
					panjang jalan yang terbangun	25.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.05 - Pembangunan Jalan	panjang jalan Obano - Uwebutu (Duntek -Munayepa/lyei) yang dibangun	5 Km	
					Panjang Jalan yang terbangun	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.05 - Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang terbangun	2 Km	
278.				1037 Pembangunan Jembatan Doyo I									
					Panjang jembatan yang dibangun	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.12 - Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan yang dibangun	40 Meq	
					Panjang jembatan yang terbangun	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.12 - Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan Doyo I yang dibangun	30 Meq	
279.				1038 Pembangunan Jembatan Kertosari II									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Panjang jalan yang dibangun	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.05 - Pembangunan Jalan	Panjang jalan yang dibangun	2 Km	
					Panjang jembatan yang terbangun	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.12 - Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan yang dibangun	40 Meq	
280.				1039 Pembangunan Jembatan Kertosari III									
					Panjang jembatan yang dibangun	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.12 - Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan yang dibangun	30 Meq	
					Panjang jembatan yang terbangun	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.12 - Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan Kertosari III yang dibangun	40 Meq	
281.				1040 Pembangunan Jembatan Kertosari IV B									
					Jumlah lampu yang dipasang	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.05 - Pembangunan Jalan	Jumlah Jalan yang dibangun	2 Unit	
					Panjang jembatan yang terbangun	5.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.12 - Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan Kertosari IV B yang dibangun	909 Meq	
282.				1041 Pembangunan Jembatan Dosay I									
					Panjang jembatan yang terbangun	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.12 - Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan Dosay I yang dibangun	30 Meq	
283.				1042 Pembangunan Jembatan S. Pintu Laut									
					Panjang jembatan yang terbangun	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.12 - Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan S. Pintu Laut yang dibangun	40 Meq	
284.				1043 Pembangunan Jembatan Osolho (Ruas Jalan Nimbotong - Lereh - Tengon)									
					Panjang jembatan yang terbangun	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.12 - Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan Osolho yang dibangun (Ruas Nimbotong - Lereh - Tengon)	30 Meq	
285.				1044 Pembangunan Jembatan Sirum (Raus Jalan Nimbotong - Lereh - Tengon)									
					Panjang jembatan yang terbangun	10.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.12 - Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan Sirum yang dibangun (Ruas Nimbotong - Lereh - Tengon)	1818 Meq	
286.				1045 Pembangunan Jembatan Nganhose (Raus Jalan Nimbotong - Lereh - Tengon)									
					Panjang jembatan yang terbangun	10.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.12 - Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan Nganhose yang dibangun (Ruas Nimbotong - Lereh - Tengon)	1818 Meq	
287.				1046 Pembangunan Jembatan Hewa I (Raus Jalan Nimbotong - Lereh - Tengon)									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Panjang jembatan yang terbangun	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.12 - Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan Hewa I yang dibangun (Ruas Nimbotong - Lereh - Tengon)	30 Meq	
288.				1047 Pembangunan Jembatan Hewa II (Ruas Jalan Nimbotong - Lereh - Tengon)									
					Panjang jembatan yang terbangun	10.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.12 - Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan Hewa II yang dibangun (Ruas Nimbotong - Lereh - Tengon)	1818 Meq	
289.				1048 Pembangunan Jembatan Kali Mugun									
					Panjang jembatan yang terbangun	10.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.12 - Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan Kali Mugun yang dibangun	153 Meq	
290.				1049 Pembangunan Jembatan Nanifokei (Ruas Jalan Botawa - Koweda - Barapasi)									
					Panjang jembatan yang terbangun	15.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.12 - Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan Ninifokei yang dibangun (Ruas Jalan Botawa - Koweda - Barapasi)	2727 Meq	
291.				1050 Pembangunan Jembatan Minaworuf (Ruas Jalan Serui - Menawi - Sumberbaba)									
					Panjang jembatan yang terbangun	10.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.12 - Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan Minaworuf yang dibangun (Ruas Jalan Serui - Menawi - Sumberbaba)	1818 Meq	
292.				1057 Pembangunan Jalan Wanui - Mabuk Barat - Dolinggame - Illu									
					panjang jalan yang terbangun	52.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.05 - Pembangunan Jalan	panjang jalan Wanui - Mabuk Barat - Dolinggame - Illu yang dibangun	8.67 Km	
293.				1058 Pembangunan Jalan Jigemili - Wabiragi									
					panjang jalan yang terbangun	52.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.05 - Pembangunan Jalan	panjang jalan Jigemili - Wabiragi yang dibangun	8.67 Km	
294.				1059 Pembangunan Jembatan Jila									
					panjang jalan yang terbangun	25.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.12 - Pembangunan Jembatan	panjang jembatan Jila yang terbangun	35 Km	
295.				1060 Pembangunan Jalan Poik - Dekai									
					panjang jalan yang terbangun	81.500.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.05 - Pembangunan Jalan	panjang jalan Poik - Dekai yang dibangun	13.58 Km	
296.				1061 Pembangunan Jalan Dabra - Mamit									
					panjang jalan yang terbangun	81.500.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.05 - Pembangunan Jalan	panjang jalan Dabra - Mamit yang dibangun	1358 Km	
297.				1062 Pembangunan Jalan Nume - Mamit									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					panjang jalan yang terbangun	8.500.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.05 - Pembangunan Jalan	panjang jalan Nume - Mamit yang dibangun	1.42 Km	
298.				1063 Pembangunan Jalan Melendik - Tugunagwi - Tiom									
					panjang jalan yang terbangun	8.500.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.05 - Pembangunan Jalan	panjang jalan Melendik - Tugunagwi - Tiom yang dibangun	142 Km	
299.				1064 Pembangunan Jalan Ring Road (Lukmen) Kab. Jayawijaya									
					panjang jalan yang terbangun	100.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.05 - Pembangunan Jalan	panjang jalan Ring Road (Lukmen) Kab. Jayawijaya yang terbangun	16.67 Km	
300.				1065 Pembangunan Jalan Walesi - Walaek									
					panjang jalan yang terbangun	10.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.05 - Pembangunan Jalan	panjang jalan Walesi - Walaek yang dibangun	1.67 Km	
301.				1066 Pembangunan Jalan Ilaga - Sinak									
					panjang jalan yang terbangun	10.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.05 - Pembangunan Jalan	panjang jalan Ilaga - Sinak yang dibangun	1.67 Km	
302.				1067 Pembangunan Jalan Koya Barat - Koya Tengah									
					panjang jalan yang terbangun	18.500.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.05 - Pembangunan Jalan	panjang jalan Koya Barat - Koya Tengah yang dibangun	1.23 Km	
303.				1068 Pembangunan Jalan Holtecamp (PLTD) - Pantai Pasir III Tahap II									
					panjang jalan yang terbangun	23.500.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.05 - Pembangunan Jalan	panjang jalan Holtecamp (PLTD) - Pantai Pasir III yang terbangun	4.7 Km	
304.				1069 Pembangunan Jalan Masuk Gunung Teletubies (Venue Paralayang)									
					panjang jalan yang terbangun	18.500.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.05 - Pembangunan Jalan	panjang jalan Masuk Gunung Teletubies (Venue Paralayang) yang dibangun	3.7 Km	
305.				1070 Pembangunan Jalan Wendame - Paba									
					panjang jalan yang terbangun	35.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.05 - Pembangunan Jalan	panjang jalan Wendame - Paba yang terbangun	5 Km	
306.				1071 Pembangunan Jalan Bewam - Nogombu									
					panjang jalan yang terbangun	50.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.05 - Pembangunan Jalan	panjang jalan Bewam - Nogombu yang dibangun	8 Km	
307.				1072 Pembangunan Jalan Wunin - Timori									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					panjang jalan yang terbangun	50.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.05 - Pembangunan Jalan	panjang jalan Wunin - Timori yang dibangun	7 Km	
308.				1073 Pembangunan Jalan Panaga - Gelok - Gika - Dundu									
					panjang jalan yang terbangun	70.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.05 - Pembangunan Jalan	panjang jalan Panaga - Gelok - Gika - Dundu yang dibangun	6 Km	
309.				1074 Pembangunan Jalan Iballo - Wakenok									
					panjang jalan yang terbangun	14.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.05 - Pembangunan Jalan	panjang jalan Iballo - Wakenok yang dibangun	2 Km	
310.				1075 Pembangunan Jalan Mamit - Jowo									
					panjang jalan yang terbangun	28.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.05 - Pembangunan Jalan	panjang jalan Mamit - Jowo yang dibangun	4 Km	
311.				1076 Pembangunan Jalan Mamit - Luwirak									
					panjang jalan yang terbangun	21.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.05 - Pembangunan Jalan	panjang jalan Mamit - Luwirak yang dibangun	3 Km	
312.				1077 Pembangunan Jembatan Kurip Distrik Bokondini									
					panjang jembatan yang terbangun	30.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.12 - Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan Kurip Distrik Bokondini yang terbangun	50 Meq	
313.				1078 Pembangunan Jembatan Jembatan Ginidunak Distrik Karubaga									
					panjang jembatan yang terbangun	5.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.12 - Pembangunan Jembatan	panjang Jembatan Ginidunak yang terbangun	20 Meq	
314.				1079 Pembangunan Jembatan Gantung Distrik Itadipa									
					panjang jembatan yang terbangun	5.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.12 - Pembangunan Jembatan	panjang jembatan Jembatan Gantung Distrik Itadipa yang terbangun	20 Meq	
315.				1080 Pembangunan Jalan Sugapa - Homeo									
					panjang jalan yang terbangun	20.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.05 - Pembangunan Jalan	panjang jalan Sugapa ? Homeo yang terbangun	3.33 Km	
316.				1081 Pembangunan Jalan Dogiai - Kaimana									
					panjang jalan yang terbangun	20.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.05 - Pembangunan Jalan	panjang jalan Dogiai - Kaimana yang terbangun	3.33 Km	
317.				1082 Pembangunan Jalan Paniai Timur - Dogiai									
					panjang jalan yang terbangun	20.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.05 - Pembangunan Jalan	panjang jalan Paniai Timur - Dogiai yang terbangun	3.33 Km	

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
318.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	15 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Panjang jalan provinsi yang fungsional; Panjang jembatan yang fungsional; Terbangunnya Jalan dan Jembatan; panjang jalan yang terbangun	1083 Pembangunan Jalan Enarotali - Pasir Putih									
					panjang jalan yang terbangun	20.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.05 - Pembangunan Jalan	panjang jalan Enarotali - Pasir Putih yang terbangun	3.33 Km	
319.				1084 Pembangunan Jalan Pasir Putih - Dogobaida									
					panjang jalan yang terbangun	20.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.05 - Pembangunan Jalan	panjang jalan Pasir Putih Dogobaida yang terbangun	333 Km	
320.				1085 Pembangunan Jalan Oksibil - Serambakon									
					panjang jalan yang terbangun	20.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.05 - Pembangunan Jalan	panjang jalan Oksibil - Serambakon yang terbangun	3.33 Km	
321.				1086 Pembangunan Jalan Oksibil - Okaum									
					panjang jembatan yang terbangun	20.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.05 - Pembangunan Jalan	panjang jalan Oksibil - Okaum yang terbangun	333 Km	
322.				1087 Pembangunan Jembatan Turun Atlit PB Selam									
					panjang jalan yang terbangun	1.129.400.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.12 - Pembangunan Jembatan	panjang Jembatan Turun Atlit PB Selam yang terbangun	30 M	
323.				1088 Pembangunan Pengaman Jalan dan Box Culvert Buper 1000 M3 (SMA 3) - BTS Kab./Kota Jayapura									
					panjang jalan pengaman yang terbangun	1.216.400.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.05 - Pembangunan Jalan	panjang pengaman jalan dan box culvert yang terbangun	2481 M3	
324.				1089 Pembangunan Jalan Ipoguk-Bukit Doa - Umagi									
					panjang jalan yang terbangun	28.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.05 - Pembangunan Jalan	panjang jalan Ipoguk - Bukit Doa - Umagi yang terbangun	5.6 Km	
325.				1090 Pembangunan Jalan Pasir 6 Belakang AURI									
					panjang jalan yang terbangun	3.500.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.05 - Pembangunan Jalan	panjang jalan Pasir 6 Belakang AURI yang terbangun	1 Km	
326.				1091 Pembangunan Talud Pengaman Jalan di Tolikara									
					panjang talud pengaman yang terbangun	25.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.05 - Pembangunan Jalan	panjang talud pengaman jalan yang terbangun	167 M3	
327.				1092 Pembangunan Talud Pengaman Jalan di Lanny Jaya									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					panjang talud pengaman yang terbangun	25.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.05 - Pembangunan Jalan	panjang talud pengaman jalan yang terbangun	1667 M3	
328.				1093 Pembangunan Talud Pengaman Jalan Kali Wunin									
					panjang talud pengaman yang terbangun	1.500.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.05 - Pembangunan Jalan	panjang talud pengaman jalan yang terbangun	1000 M3	
329.				1094 Pembangunan Jalan Abimbak - Wanggulan - Bokondini									
					panjang jalan yang terbangun	30.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.05 - Pembangunan Jalan	panjang jalan Abimbak - Wanggulan - Bokondini yang terbangun	45 Km	
330.				1095 Pembangunan Jalan Nonggawi - Kanginesi									
					panjang jalan yang terbangun	30.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.05 - Pembangunan Jalan	panjang jalan Nonggawi - Kanginesi yang terbangun	4.3 Km	
331.				1096 Pembangunan Jalan Ebumi Itelo									
					panjang jalan yang terbangun	20.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.05 - Pembangunan Jalan	panjang jalan Ebumi - Itelo yang terbangun	3.2 Km	
332.				1097 Pembangunan Jalan Gantini - Tugibur - Wanggingga- Tolikara									
					panjang jalan yang terbangun	20.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.05 - Pembangunan Jalan	panjang jalan Gantini - Tugibur - Wanggingga- Tolikara yang terbangun	35 Km	
333.				1098 Pembangunan Jalan Goa Maria Buper - Kampwolker Waena									
					panjang jalan yang terbangun	9.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.05 - Pembangunan Jalan	panjang jalan Goa Maria Buper - Kamwolker Waena yang terbangun	1.5 Km	
334.				1099 Pembangunan Jalan Yogobak - Alkunik									
					panjang jalan yang terbangun	90.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.05 - Pembangunan Jalan	panjang jalan yang terbangun	15 Km	
335.				1100 Pembangunan Jalan Umagi - Douw (Air Terjun)									
					panjang jalan yang terbangun	90.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.05 - Pembangunan Jalan	panjang jalan yang terbangun	15 Km	
336.		16 Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Persentase genangan air permukaan yang dapat turunkan	1 Perencanaan Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong									
					Jumlah Dokumen	1.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.03 - Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	15 Dokumen	
337.				2 Survei kontur saluran drainase/gorong-gorong									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Jumlah dokumen saluran drainase/gorong-gorong tersedia	300.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	1.03.06.1.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	1.03.06.1.01.05 - Penyediaan Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukungnya	Jumlah dokumen saluran drainase/gorong-gorong tersedia	2 Dokumen	
338.				3 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong									
					Panjang saluran yang terbangun	2.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	1.03.06.1.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	1.03.06.1.01.05 - Penyediaan Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukungnya	Panjang saluran drains/gorong-gorong yang terbangun	5 Km	
339.				4 Monitoring, evaluasi dan pelaporan									
					Jumlah Dokumen	400.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	1.03.06.1.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	1.03.06.1.01.02 - Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen yang tersusun	2 Dokumen	
340.				8 Pembangunan Drainase di Provinsi Papua									
					Panjang Drainase yang dikerjakan	30.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	1.03.06.1.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	1.03.06.1.01.05 - Penyediaan Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukungnya	Panjang Drainase yang dikerjakan	10000 Meter	
341.				12 Pembangunan Drainase di Kabupaten Jayawijaya									
					Panjang Drainase yang dikerjakan	1.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	1.03.06.1.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	1.03.06.1.01.05 - Penyediaan Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukungnya	Panjang Drainase di kabupaten Jayawijaya yang dikerjakan	200 Meter	
342.				13 Pembangunan Drainase di Kabupaten Biak Numfor									
					Panjang Drainase yang dikerjakan	1.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	1.03.06.1.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	1.03.06.1.01.05 - Penyediaan Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukungnya	Panjang Drainase di Kabupaten Biak Numfor yang dikerjakan	200 Meter	
343.				14 Pembangunan Drainase di Kabupaten Yapen Serui									
					Panjang Drainase yang dikerjakan	1.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	1.03.06.1.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	1.03.06.1.01.05 - Penyediaan Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukungnya	Panjang Drainase di Kabupaten Yapen Serui yang dikerjakan	200 Meter	
344.				15 Pembangunan Drainase di Kabupaten Supiori									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Panjang Drainase yang dikerjakan	1.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	1.03.06.1.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	1.03.06.1.01.05 - Penyediaan Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukungnya	Panjang Drainase di Kabupaten Supiori yang dikerjakan	200 Meter	
345.				16 Pembangunan Drainase di Kabupaten Merauke									
					Panjang Drainase yang dikerjakan	1.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	1.03.06.1.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	1.03.06.1.01.05 - Penyediaan Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukungnya	Panjang Drainase di Kabupaten Merauke yang dikerjakan	200 Meter	
346.				17 Pembangunan Drainase di Kabupaten Mimika									
					Panjang Drainase yang dikerjakan	1.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	1.03.06.1.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	1.03.06.1.01.05 - Penyediaan Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukungnya	Panjang Drainase di Kabupaten Mimika yang dikerjakan	200 Meter	
347.				18 Pembangunan Drainase di Kabupaten Tolikara									
					Panjang Drainase yang dikerjakan	1.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	1.03.06.1.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	1.03.06.1.01.05 - Penyediaan Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukungnya	Panjang Drainase di Kabupaten Tolikara yang dikerjakan	200 Meter	
348.				19 Pembangunan Drainase Keliling Kawasan Olahraga Kampung Harapan									
					Panjang Drainase yang dikerjakan	1.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	1.03.06.1.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	1.03.06.1.01.04 - Penyediaan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Drainase Keliling Kawasan Olahraga Kampung Harapan yang dikerjakan	200 Meter	
349.				20 Pembangunan Drainase Jalan Masuk Kalkhote Kab Jayapura									
					Panjang Drainase yang dikerjakan	1.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	1.03.06.1.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	1.03.06.1.01.05 - Penyediaan Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukungnya	Panjang Drainase Kalkhote Kabupaten Jayapura yang dikerjakan	200 Meter	
350.				21 Jaringan Drainase di Argapura Kota Jayapura									
					Panjang Drainase yang dikerjakan	1.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	1.03.06.1.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	1.03.06.1.01.05 - Penyediaan Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukungnya	Panjang Drainase di Argapura Kota Jayapura yang dikerjakan	200 Meter	
351.				22 Pembangunan Drainase di GOR Futsal Mimika									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Panjang Drainase yang dikerjakan	1.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	1.03.06.1.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	1.03.06.1.01.05 - Penyediaan Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukungnya	Panjang Drainase di GOR Futsal Mimika yang dikerjakan	200 Meter	
352.				23 Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis Pembangunan Drainase di Provinsi Papua									
					Panjang Drainase yang dikerjakan	1.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	1.03.06.1.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	1.03.06.1.01.01 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Tersusnya Dokumen Teknis Drainase di Provinsi Papua	200 Meter	
353.				24 Pembangunan Drainase di Kota Jayapura									
					Panjang Drainase yang dikerjakan	1.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	1.03.06.1.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	1.03.06.1.01.05 - Penyediaan Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukungnya	Panjang Drainase di Kota Jayapura yang dikerjakan	200 Meter	
354.				25 Pembangunan Drainase di Kabupaten Jayapura									
					Panjang Drainase yang dikerjakan	1.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	1.03.06.1.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	1.03.06.1.01.05 - Penyediaan Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukungnya	Panjang Drainase di Kabupaten Jayapura yang dikerjakan	200 Meter	
355.				26 Pembangunan Drainase di Kabupaten Keerom									
					Panjang Drainase yang dikerjakan	1.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	1.03.06.1.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	1.03.06.1.01.05 - Penyediaan Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukungnya	Panjang Drainase di Kabupaten Keerom yang dikerjakan	200 Meter	
356.				27 Pembangunan Drainase Kp Randawaya									
					Panjang Drainase yang dikerjakan	2.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	1.03.06.1.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	1.03.06.1.01.05 - Penyediaan Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukungnya	Panjang Drainase yang dikerjakan	850 M1	
357.				28 Pembangunan Lintasan Atletik dan Drainase Stadion Katapal Merauke									
					Panjang lintas atletik dan drainase yang dikerjakan	983.900.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	1.03.06.1.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	1.03.06.1.01.05 - Penyediaan Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukungnya	Panjang lintas atletik dan drainase yang dikerjakan	350 M	

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
358.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	17 Program Pembangunan turap/talud/bronjong	Persentase turap/talud/bronjong yang berfungsi baik dalam mencegah longsor di tebing jalan/sungai; Prosentase Tebing Sungai yang diamankan; Terbangunnya turap/talud/bronjong	2 Survei kemiringan lereng turap/talud/bronjong									
					Jumlah dokumen	500.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.03.07.1.01 - Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	1.03.07.1.01.03 - Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah dokumen	2 Laporan	
359.				4 Monitoring, evaluasi dan pelaporan									
					Jumlah Dokumen	200.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	1.03.11.1.02 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	1.03.11.1.02.05 - Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	
360.				6 Pembangunan Talud Permukiman di Kota Jayapura									
					Panjang Talud Pengaman yang dibangun	1.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.03.07.1.01 - Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	1.03.07.1.01.01 - Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Panjang Talud Pengaman yang dibangun	200 Meter	
361.				7 Pembangunan Talud Permukiman di Kabupaten Jayapura									
					Panjang Talud Pengaman yang dibangun	1.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.03.07.1.01 - Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	1.03.07.1.01.01 - Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Panjang Talud Pengaman yang dibangun	200 Meter	
362.				8 Pembangunan Talud Permukiman di Kabupaten Keerom									
					Panjang Talud Pengaman yang dibangun	1.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.03.07.1.01 - Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	1.03.07.1.01.01 - Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Panjang Talud Pengaman yang dibangun	200 Meter	
363.				9 Pembangunan Talud Permukiman di Provinsi Papua									
					Panjang Talud Pengaman yang dibangun	5.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.03.07.1.01 - Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	1.03.07.1.01.01 - Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Panjang Talud Pengaman yang dibangun	1000 Meter	
364.				10 Perencanaan Talud Permukiman di Provinsi Papua									
					Panjang Talud Pengaman yang dibangun	300.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.03.07.1.01 - Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	1.03.07.1.01.03 - Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Panjang Talud Pengaman yang dibangun	29 Meter	
					Jumlah dokumen perencanaan talud	300.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.03.07.1.01 - Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	1.03.07.1.01.03 - Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah dokumen perencanaan talud	29 Dokumen	
365.				13 Pembangunan Talud Pengaman Tebing Jalan Pasifik Indah Pasir II									
					Panjang Talud yang terbangun	2.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.03.07.1.01 - Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	1.03.07.1.01.01 - Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Panjang Talud yang terbangun	200 M	
366.				14 Pembangunan Talud Pengaman Tebing SMP Kristus Raja									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Panjang Talud yang terbangun	1.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.03.07.1.01 - Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	1.03.07.1.01.01 - Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Panjang Talud yang terbangun	200 M'	
367.				15 Pembangunan Talud Gereja Baptis Skyline									
					Panjang Talud yang terbangun	1.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.03.07.1.01 - Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	1.03.07.1.01.01 - Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Panjang Talud yang terbangun	200 M'	
368.				16 Pembangunan Talud Gereja Baptis Walibhu Kehiran Sentani									
					Panjang Talud yang terbangun	1.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.03.07.1.01 - Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	1.03.07.1.01.01 - Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Panjang Talud yang terbangun	200 M'	
369.				17 Pembangunan Talud Gereja GKIP-Yapis Dok V									
					Panjang Talud yang terbangun	1.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.03.07.1.01 - Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	1.03.07.1.01.01 - Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Panjang Talud yang terbangun	200 M'	
370.				18 Pembangunan Talud Tanjung Ria									
					Panjang Talud yang terbangun	1.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.03.07.1.01 - Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	1.03.07.1.01.01 - Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Panjang Talud yang terbangun	2000 M'	
371.				19 Pembangunan Talud Pengaman Tebing Permukiman Angkasapura									
					Panjang Talud yang terbangun	2.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.03.07.1.01 - Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	1.03.07.1.01.03 - Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Panjang Talud yang terbangun	400 M'	
372.				20 Pembangunan Talud Pengaman Tebing Permukiman Lembah Sunyi Angkasapura									
					Panjang Talud yang terbangun	2.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.03.07.1.01 - Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	1.03.07.1.01.03 - Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Panjang Talud yang terbangun	400 M'	
373.				21 Pembangunan Talud Pengaman Tebing Permukiman Tanjung Ria									
					Panjang Talud yang terbangun	2.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.03.07.1.01 - Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	1.03.07.1.01.03 - Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Panjang Talud yang terbangun	200 M'	
374.				22 Pembangunan Talud Pengaman Tebing pada Jalan Pendekat Patung Yesus									
					Panjang Talud yang terbangun	2.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.03.07.1.01 - Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	1.03.07.1.01.03 - Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Panjang Talud yang terbangun	200 M'	
375.				23 Pembangunan Talud Permukiman/Pengaman Tebing di Kabupaten Jayawijaya									
					Panjang Talud yang terbangun	2.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.03.07.1.01 - Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	1.03.07.1.01.03 - Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Panjang Talud yang terbangun	400 M'	

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
376.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	17 Program Pembangunan turap/talud/bronjong	Persentase turap/talud/bronjong yang berfungsi baik dalam mencegah longsor di tebing jalan/sungai; Prosentase Tebing Sungai yang diamankan; Terbangunnya turap/talud/bronjong	24 Pembangunan Talud Permukiman/Pengaman Tebing di Kabupaten Biak Numfor									
					Panjang Talud yang terbangun	2.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.03.07.1.01 - Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	1.03.07.1.01.03 - Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Panjang Talud yang terbangun	400 M'	
377.				25 Pembangunan Talud Permukiman/Pengaman Tebing di Kabupaten Yapen Serui									
					Panjang Talud yang terbangun	2.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.03.07.1.01 - Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	1.03.07.1.01.03 - Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Panjang Talud yang terbangun	200 M'	
378.				26 Pembangunan Talud Permukiman/Pengaman Tebing di Kabupaten Supiori									
					Panjang Talud yang terbangun	2.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.03.07.1.01 - Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	1.03.07.1.01.03 - Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Panjang Talud yang terbangun	200 M'	
379.				29 Pembangunan Talud Permukiman/Pengaman Tebing di Kabupaten Tolikara									
					Panjang Talud yang terbangun	2.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.03.07.1.01 - Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	1.03.07.1.01.03 - Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Panjang Talud yang terbangun	200 M'	
380.				30 Pembangunan Talud Permukiman/Pengaman Tebing di Kabupaten Pegunungan Bintang									
					Panjang Talud yang terbangun	2.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.03.07.1.01 - Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	1.03.07.1.01.03 - Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Panjang Talud yang terbangun	200 M'	
381.				31 Pembangunan Talud Permukiman/Pengaman Tebing di Kabupaten Lanni Jaya									
					Panjang Talud yang terbangun	2.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.03.07.1.01 - Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	1.03.07.1.01.03 - Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Panjang Talud yang terbangun	200 M'	
382.				32 Pembangunan Talud Permukiman/Pengaman Tebing di Kabupaten Puncak Jaya									
					Panjang Talud yang terbangun	2.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.03.07.1.01 - Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	1.03.07.1.01.03 - Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Panjang Talud yang terbangun	200 M'	
383.				33 Pembangunan Talud Permukiman/Pengaman Tebing di Kabupaten Puncak									
					Panjang Talud yang terbangun	2.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.03.07.1.01 - Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	1.03.07.1.01.03 - Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Panjang Talud yang terbangun	200 M'	
384.				34 Pembangunan Talud Permukiman/Pengaman Tebing di Kabupaten Nabire									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Panjang Talud yang terbangun	2.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.03.07.1.01 - Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	1.03.07.1.01.03 - Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Panjang Talud yang terbangun	400 M'	
385.				35 Pembangunan Talud Permukiman/Pengaman Tebing di Kabupaten Deiyai									
					Panjang Drainase yang dikerjakan	1.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.03.07.1.01 - Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	1.03.07.1.01.03 - Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Panjang Drainase yang dikerjakan	200 M'	
386.				36 Pembangunan Talud Permukiman/Pengaman Tebing di Kabupaten Paniai									
					Panjang Talud yang terbangun	2.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.03.07.1.01 - Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	1.03.07.1.01.03 - Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Panjang Talud yang terbangun	200 M'	
387.				37 Pembangunan Talud Pengaman Tebing Gereja Gidi Walikota									
					Panjang Talud yang terbangun	1.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.03.07.1.01 - Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	1.03.07.1.01.01 - Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Panjang Talud yang terbangun	200 M'	
388.				38 Pembangunan Talud Pengaman Tebing Pasir II									
					Panjang Talud yang terbangun	1.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.03.07.1.01 - Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	1.03.07.1.01.01 - Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Panjang Talud yang terbangun	200 M'	
389.				41 Pembangunan Talud Pos 7 Sentani Desa Sereh									
					Panjang Talud yang terbangun	6.200.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.03.07.1.01 - Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	1.03.07.1.01.01 - Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Panjang Talud Pos 7 Sentani Desa Sereh yang terbangun	300 M3	
390.				42 Pembangunan Talud Pengamanan Pemukiman Warga Distrik Sugapa									
					Panjang Talud yang terbangun	2.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.03.07.1.01 - Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	1.03.07.1.01.01 - Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Panjang Talud yang terbangun	200 M3	
391.				43 Pembangunan Talud Pengamanan Perumahan Warga Desa Titigi									
					Panjang Talud yang terbangun	2.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.03.07.1.01 - Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	1.03.07.1.01.01 - Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Panjang Talud yang terbangun	200 M3	
392.				44 Pembangunan Talud Pengamanan Bandara Sugapa									
					Panjang Talud yang terbangun	2.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.03.07.1.01 - Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	1.03.07.1.01.01 - Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Panjang Talud yang terbangun	200 M3	
393.				45 Pembangunan Talud dan Tembok Akapela Angkasa Indah.									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Panjang Talud yang terbangun	2.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.03.07.1.01 - Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	1.03.07.1.01.01 - Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Panjang Talud yang terbangun	200 M3	
394.				46 Pembangunan Talud Pemukiman Warga Dok V									
					Panjang Talud yang terbangun	2.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.03.07.1.01 - Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	1.03.07.1.01.01 - Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Panjang Talud yang terbangun	200 M3	
395.				47 Pembangunan Talud Kampung Koya Koso									
					Panjang Talud yang terbangun	2.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.10 - Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Talud yang terbangun	200 M3	
396.				48 Pembangunan Talud Pemukiman di Kabupaten Jayapura									
					Panjang Talud yang terbangun	4.700.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.10 - Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Talud yang terbangun	400 M3	
397.				49 Pembangunan Talud Dok IX Gereja Kasih Abua									
					Panjang Talud yang terbangun	1.500.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.10 - Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Talud yang terbangun	133.33 M3	
398.				50 Pembangunan Talud Pengaman Tebing Pemukiman Entrop Kota Jayapura									
					Panjang Talud yang terbangun	2.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.10 - Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Talud yang terbangun	200 M3	
399.				51 Pembangunan Talud Pengaman Tebing Pemukiman Namburu RSUD Dok II									
					Panjang Talud yang terbangun	2.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.10 - Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Talud yang terbangun	200 M3	
400.		18 Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase panjang jalan provinsi dalam kondisi mantap; Persentase panjang jembatan provinsi dalam kondisi matap	5 Monitoring, evaluasi dan pelaporan									
					Jumlah dokumen	2.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.09 - Rehabilitasi Jalan	Jumlah Dokumen yang tersusun	12 Laporan	
401.				110 Pemeliharaan Berkala Jalan Kuansun - Besum - Genyem (107)									
					Jumlah panjang jalan yang dipelihara	5.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.09 - Rehabilitasi Jalan	Jumlah panjang jalan Kuansun- Besum- Genyem (107) yang dipelihara	5 Km	
402.				111 Pemeliharaan Jalan Berap - Nimbontong - Lereh - Tengon (110) Paket I									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Panjang jalan yang dipelihara	5.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.09 - Rehabilitasi Jalan	Panjang jalan Berap-Nimbotong- Lereh - Tegon (110) yang dipelihara	5 Km	
403.				112 Pemeliharaan Jalan Bolakme - Kelila - Bokondini (167)									
					Jumlah panjang jalan yang dipelihara	5.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.09 - Rehabilitasi Jalan	Jumlah panjang jalan Bolakme - Kelila - Bokondini (167) yang dipelihara	5 Km	
404.				124 Pemeliharaan Jalan Waena - Arso V (100 K) 53 Km Paket I									
					Panjang jalan yang dipelihara	5.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.09 - Rehabilitasi Jalan	Panjang jalan Waena - Arso V 9100) 53 Km Paket I yang dipelihara	5 Km	
405.				129 Pemeliharaan Jalan Biak - Junction - Korem									
					Panjang Jalan yang dipelihara	5.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.09 - Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan Biak - Junction - Korem yang dipelihara	5 Km	
406.				132 Pemeliharaan Jalan Korem - Doubo									
					Jumlah panjang jalan yang dipelihara	5.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.09 - Rehabilitasi Jalan	Jumlah panjang jalan Korem - Doubo yang dipelihara	5 Km	
407.				133 Pemeliharaan Jalan Wardo - Duber (134) 37,96 Km									
					Jumlah panjang jalan yang dipelihara	5.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.09 - Rehabilitasi Jalan	Jumlah panjang jalan Wardo - Duber (134) 37,96 Km yang dipelihara	5 Km	
408.				135 Pemeliharaan Jalan Duber - Sorendiwari - Korido (136)									
					Panjang jalan yang dipelihara	5.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.09 - Rehabilitasi Jalan	Panjang jalan Duber - Sorendiwari - Korido (136) yang dipelihara	5 Km	
409.				144 Pemeliharaan Jalan Kuprik - Jagebob - Erambu (183), 134 Km									
					Panjang jalan yang dipelihara	5.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.09 - Rehabilitasi Jalan	Panjang jalan Kuprik - Jagebob- Erambu (183) 134 Km yang dipelihara	5 Km	
410.				145 Pemeliharaan Jalan Kimibay - Napan (137), 40 Km									
					Panjang jalan yang dipelihara	5.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.09 - Rehabilitasi Jalan	Panjang jalan Kimibay - Napan (137), 40 Km yang dipelihara	5 Km	
411.				152 Pemeliharaan Jalan Warumbaim - Berap - Demta (109)									
					Jumlah panjang jalan provinsi yang dipelihara	20.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.09 - Rehabilitasi Jalan	Jumlah panjang jalan Warumbaim - Berap - Demta (109) yang dipelihara	3434 Km	
412.				153 Pemeliharaan Jalan Besum - Yanbra - Puai (118)									
					Panjang jalan yang dipelihara	5.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.08 - Rekonstruksi Jalan	Panjang jalan Besum - Yanbra - Puai (118) yang dipelihara	5 Km	

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
413.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	18 Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase panjang jalan provinsi dalam kondisi mantap; Persentase panjang jembatan provinsi dalam kondisi matap	156 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Provinsi Papua									
					Panjang jalan provinsi dan kabupaten/kota yang dipelihara	70.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.09 - Rehabilitasi Jalan	Panjang jalan dan provinsi papua yang dipelihara	100 Km	
414.				157 Pemeliharaan Jalan Berap - Nimbotong - Lereh - Tengan (110) Paket II									
					Panjang jalan yang dipelihara	5.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.09 - Rehabilitasi Jalan	Panjang jalan Berap - Nimbotong - Lereh - Tengan (110) Paket II yang dipelihara	5 Km	
415.				158 Pemeliharaan Jalan Waena - Arso V (100 K) 53 Km Paket II									
					Panjang jalan provinsi yang dipelihara	5.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.09 - Rehabilitasi Jalan	Panjang jalan Waena - Arso V (100) 53 Km Paket yang dipelihara	53 Km	
416.				159 Pemeliharaan Jalan Taja - SP V - Kwarja (106) Paket I									
					Panjang jalan provinsi yang dipelihara	5.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.09 - Rehabilitasi Jalan	Panjang jalan Taja - SP V - Kwarja (106) Paket I yang dipelihara	5 Km	
417.				160 Pemeliharaan Jalan Taja - SP V - Kwarja (106) Paket II									
					Panjang jalan provinsi yang dipelihara	5.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.09 - Rehabilitasi Jalan	Panjang jalan Taja - SP V - Kwarja (106) yang dipelihara	5 Km	
418.				161 Pemeliharaan Jalan Kanggime - Mamit Paket I									
					Panjang Jalan yang dipelihara	5.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.09 - Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan Kanggime - Mamit Paket I dipelihara	5 Km	
419.				162 Pemeliharaan Jalan Karubaga - Mamit Paket I									
					Panjang Jalan yang dipelihara	5.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.09 - Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan Karubaga - Mamit paket I yang dipelihara	5 Km	
420.				163 Pemeliharaan Jalan Enarotali (Paniai) - Sugapa, (139) (50 Km) Paket I									
					Panjang jalan yang dipelihara	5.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.09 - Rehabilitasi Jalan	Panjang jalan Enarotali - (Paniai) - Sugapa, (139) (50 Km) yang dipelihara	5 Km	
421.				164 Pemeliharaan Jalan Enarotali (Paniai) - Sugapa, (139) (50 Km) Paket II									
					Panjang jalan yang dipelihara	5.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.09 - Rehabilitasi Jalan	Panjang jalan Enarotali (Paniai) - Sugapa, (139) (50 Km) yang dipelihara	5 Km	
422.				165 Pemeliharaan Jalan Serui - Ansus (123), 71,15 Km Paket I									
					Panjang jalan provinsi yang dipelihara	5.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.09 - Rehabilitasi Jalan	Panjang jalan Serui - Ansus (123), 71,15 Km Paket I yang dipelihara	10 Km	

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
423.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	18 Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase panjang jalan provinsi dalam kondisi mantap; Persentase panjang jembatan provinsi dalam kondisi matap	166 Pemeliharaan Jalan Serui - Ansus (123), 71,15 Km Paket II									
					Panjang jalan provinsi yang dipelihara	5.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.09 - Rehabilitasi Jalan	Panjang jalan Serui - Ansus (123), 71,15 Km Paket II yang dipelihara	5 Km	
424.				167 Pemeliharaan Jalan Menawi - Sumberbaba (122), 40 Km Paket I									
					Panjang jalan provinsi yang dipelihara	5.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.09 - Rehabilitasi Jalan	Panjang jalan Menawi - Sumberbaba (122), 40 Km Paket yang dipelihara	5 Km	
425.				168 Pemeliharaan Jalan Menawi - Sumberbaba (122), 40 Km Paket II									
					Panjang jalan provinsi yang dipelihara	5.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.09 - Rehabilitasi Jalan	Panjang jalan Menawi - sumberbaba (122), 40 Km Paket II yang dipelihara	5 Km	
426.				169 Pemeliharaan Berkala Jalan Junction - Wardo (130)									
					Jumlah panjang jalan provinsi yang dipelihara	5.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.09 - Rehabilitasi Jalan	Jumlah panjang jalan Junction - Wardo (130) yang dipelihara	5 Km	
427.				170 Pemeliharaan Berkala Jalan Bts Kota Merauke - Kumbe - Bian - Okaba (185)									
					Jumlah panjang jalan provinsi yang dipelihara	5.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.09 - Rehabilitasi Jalan	Jumlah panjang jalan Bts Kota Merauke - Kumbe - Bian - Okaba (185) yang dipelihara	5 Km	
428.				171 Pemeliharaan Jalan Jayapura - Dok V - Angkasa									
					Jumlah panjang jalan provinsi yang dipelihara	15.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.09 - Rehabilitasi Jalan	Jumlah panjang jalan Jayapura - Dok V - Angkasa yang dipelihara	10 Km	
429.				172 Pemeliharaan Jalan Perumnas II Waena									
					Jumlah panjang jalan yang dipelihara	5.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.09 - Rehabilitasi Jalan	Jumlah panjang jalan Perumnas II Waena yang dipelihara	5 Km	
430.				173 Pemeliharaan Berkala Jalan Bolakme - Piramid (168) 61,50 Km									
					Panjang Jalan yang dipelihara	5.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.09 - Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan Bolakme - Piramid (168) 61,50 Km yang dipelihara	5 Km	
431.				174 Pemeliharaan Jalan Kimbim - Piramid - Makki									
					Panjang Jalan yang dipelihara	5.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.09 - Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan Kimbim - Piramid - Makki yang dipelihara	5 Km	
432.				176 Pemeliharaan Jalan Vihara - Tanah Hitam di Kota Jayapura									
					Panjang jalan provinsi yang dipelihara	5.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.09 - Rehabilitasi Jalan	Panjang jalan Vihara - Tanah Hitam di Kota Jayapura yang dipelihara	5 Km	
433.				177 Pemeliharaan Jalan Kimbim - Piramid - Makki Paket I									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Panjang jalan yang dipelihara	5.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.09 - Rehabilitasi Jalan	Panjang jalan Kimbim - Piramid - Makki Paket I yang dipelihara	5 Km	
434.				178 Pemeliharaan Jalan Kimbim - Piramid - Makki Paket II									
					Panjang jalan yang dipelihara	5.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.09 - Rehabilitasi Jalan	Panjang jalan Kimbim - Piramid - Makki Paket II yang dipelihara	5 Km	
435.				179 Pengawasan Teknis Pemeliharaan Jalan									
					Jumlah dokumen supervisi	200.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.09 - Rehabilitasi Jalan	Jumlah dokumen supervisi yang disusun	2 Laporan	
436.				180 Pemeliharaan Jalan Lokal di Provinsi Papua (GEL)									
					Panjang jalan yang dipelihara	5.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.09 - Rehabilitasi Jalan	Panjang jalan Lokal di Provinsi Papua (GEL) yang dipelihara	5 Km	
437.				181 Pemeliharaan Jalan Serui - Ansus (123), 71,15 Km Paket III									
					Panjang Jalan yang dipelihara	5.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.09 - Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan Serui - Ansus (123), 71,15 Km Paket III yang dipelihara	5 Km	
438.				182 Pemeliharaan Berkala/Rehabilitasi (DAK)									
					Panjang Jalan yang dipelihara/direhab	5.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.09 - Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang dipelihara/direhab	5 Km	
439.				183 Pemeliharaan Jalan SP II - Napan (136)									
					Panjang Jalan yang dipelihara	5.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.09 - Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan SP II - Napan (136) yang dipelihara	5 Km	
440.				184 Pemeliharaan Berkala Jalan Jayapura - Angkasa - BaseG - Dok II (101)									
					Panjang Jalan yang dipelihara	5.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.09 - Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan Jayapura - Angkasa - BaseG - Dok II (101) yang dipelihara	5 Km	
441.				185 Pemeliharaan Jalan Hamadi - Entrop (102 K)									
					Panjang Jalan yang dipelihara	5.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.09 - Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan Hamadi - Entrop (102K) yang dipelihara	20 Km	
442.				186 Pemeliharaan Jalan Jl. Ardipura (103 K)									
					Panjang Jalan yang dipelihara	5.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.09 - Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan Ardipura (103) yang dipelihara	25 Km	
443.				188 Pemeliharaan Jalan Kemiri - Depapre (111)									
					Panjang Jalan yang dipelihara	5.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.09 - Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan Kemiri - Depapre (111) yang dipelihara	24 Km	

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
444.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	18 Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase panjang jalan provinsi dalam kondisi mantap; Persentase panjang jembatan provinsi dalam kondisi matap	189 Pemeliharaan Jalan Arso XIV - Sawia - Kwarja (112)									
					Panjang Jalan yang dipelihara	5.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.09 - Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan Arso XVI - Sawia - Kwarja (112) yang dipelihara	383 Km	
445.				190 Pemeliharaan Jalan Usku - Kesnar (113)									
					Panjang Jalan yang dipelihara	5.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.09 - Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan Uskur - Kenar (113) yang dipelihara	353 Km	
446.				191 Pemeliharaan Jalan Sewan - Petam (115)									
					Panjang Jalan yang dipelihara	5.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.09 - Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan Sewan - Petam (115) yang dipelihara	100 Km	
447.				192 Pemeliharaan Jalan Munukania - Aurimi (116)									
					Panjang Jalan yang dipelihara	5.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.09 - Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan Manukania - Aurimi (116) yang dipelihara	10 Km	
448.				193 Pemeliharaan Jalan Burmeso - Gesa - Barapasi (117)									
					Panjang Jalan yang dipelihara	5.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.09 - Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan Burmeso - Gesa - Barapasi (117) yang dipelihara	5 Km	
449.				194 Pemeliharaan Jalan Serui - Kamanap - Ansus (122)									
					Panjang Jalan yang dipelihara	5.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.09 - Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan Serui - Kamanap - Ansus (122) yang dipelihara	7 Km	
450.				195 Pemeliharaan Jalan Sumberbaba - Dawai (124)									
					Panjang Jalan yang dipelihara	5.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.09 - Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan Sumberbaba - Dawai (124) yang dipelihara	5 Km	
451.				196 Pemeliharaan Jalan Waren - Botawa - Sumiangga (126)									
					Panjang Jalan yang dipelihara	5.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.09 - Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan Waren - Botawa - Sumiangga (126) yang dipelihara	30 Km	
452.				197 Pemeliharaan Jalan Botawa - Kowenda - Barapasi (127)									
					Panjang Jalan yang dipelihara	5.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.09 - Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan Botawa - Kowenda - Barapasi (127) yang dipelihara	5 Km	
453.				198 Pemeliharaan Jalan Junction - Wardo (128)									
					Panjang Jalan yang direhab/dipelihara	5.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.09 - Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Junction - Wardo (128) direhab/dipelihara	17 Km	
454.				199 Pemeliharaan Jalan Biak - Bosnik (129)									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Panjang Jalan yang dipelihara	5.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.09 - Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan Biak - Bosnik (129) yang dipelihara	172 Km	
455.				201 Pemeliharaan Berkala Jalan Jayapura - Angkasa - BaseG - Dok II (101)									
					Panjang Jalan yang dipelihara	5.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.09 - Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan Jayapura - Angkasa - Base G - Dok II (101) yang dipelihara	10 Km	
456.				202 Pemeliharaan Jalan Junction - Wardo (128)									
					Panjang Jalan yang direhab/dipelihara	5.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.09 - Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan Ruction - Wardo (128) yang direhab/dipelihara	5 Km	
457.				203 Pemeliharaan Jalan Biak ? Bosnik (129)									
					Panjang Jalan yang dipelihara	5.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.09 - Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan Biak - Bosnik yang dipelihara	5 Km	
458.				204 Pemeliharaan Jalan Biak - Adibai - Marau/Bosnik (130)									
					Panjang Jalan yang dipelihara	5.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.09 - Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan Biak - Adibai - Marau/Bosnik (130) yang dipelihara	5 Km	
459.				205 Pemeliharaan Jalan Doubo - Sorendiwari - Amyas (133)									
					Panjang Jalan yang dipelihara	5.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.09 - Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan Doubo - Sorendiwari - Amyas (133) yang dipelihara	10 Km	
460.				206 Pemeliharaan Jalan Legare - Samabusa (137)									
					Panjang Jalan yang dipelihara	5.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.09 - Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan Legare - Samabusa yang dipelihara	10 Km	
461.				207 Pemeliharaan Jalan Samabusa - Nabarua Bawah (138)									
					Panjang Jalan yang dipelihara	4.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.09 - Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan Samabusa Nabarua Bawah (138) yang dipelihara	20 Km	
462.				208 Pemeliharaan Jalan Logistik Centre - Power Station (143)									
					Panjang Jalan yang dipelihara	5.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.09 - Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan Logistik Centre - Power Station (143) yang dipelihara	20 Km	
463.				209 Pemeliharaan Jalan Timika (Camp Ular) - Kapiroya (144)									
					Panjang Jalan yang dipelihara	5.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.09 - Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan Timika (Camp Ular) - Kapiroya (144) yang dipelihara	90 Km	
464.				210 Pemeliharaan Jalan Kaugapu (Sp VIII) - Sp V (145)									
					Panjang Jalan yang dipelihara	5.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.09 - Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan Kaugapu (Sp VIII) - Sp V (145) yang dipelihara	10 Km	

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
465.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	18 Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase panjang jalan provinsi dalam kondisi mantap; Persentase panjang jembatan provinsi dalam kondisi matap	211 Pemeliharaan Jalan Mapurujaya - Tipuka - Ayuka (146)									
					Panjang Jalan yang dipelihara	5.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.09 - Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan Mapurujaya - Tipuka - Ayuka (146) yang dipelihara	10 Km	
466.				212 Pemeliharaan Jalan Timika - Batas Tugu (Jln. Cenderawasih) (147)									
					Panjang Jalan yang dipelihara	5.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.09 - Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan Timika - Batas Tugu (Jln. Cenderawasih) (147) yang dipelihara	10 Km	
467.				213 Pemeliharaan Jalan Dekai - Logpond - Pattipi (156)									
					Panjang Jalan yang dipelihara	4.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.09 - Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan Dekai - Logpond - Pattipi (156) yang dipelihara	50 Km	
468.				214 Pemeliharaan Jalan Piramid - Bolakme (158)									
					Panjang Jalan yang dipelihara	4.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.09 - Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan Piramid - Bolakme (158) yang dipelihara	0 Km	
469.				215 Pemeliharaan Jalan Manda - Wolo (159)									
					Panjang Jalan yang dipelihara	4.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.09 - Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan Manda - Wolo (159) yang dipelihara	20 Km	
470.				216 Pemeliharaan Jalan Wamena - Pugima - Mugi (160)									
					Panjang Jalan yang dipelihara	5.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.09 - Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan Wamena - Pugima - Mugi (160) yang dipelihara	10 Km	
471.				217 Pemeliharaan Jalan Kimbim - Wogi - Wosi (161)									
					Panjang Jalan yang dipelihara	5.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.09 - Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan Kimbim - Wogi (161) yang dipelihara	10 Km	
472.				218 Pemeliharaan Jalan Wamena - Temia - Wogi (162)									
					Panjang Jalan yang dipelihara	10.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.09 - Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan Wamena - Temia - Wogi (162) yang dipelihara	6 Km	
473.				219 Pemeliharaan Jalan Arimbet - Bukit - Ujung - Manggelum (164)									
					Panjang Jalan yang dipelihara	5.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.09 - Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan Arimbet - Bukit - Ujung - Manggelum (164) yang dipelihara	5 Km	
474.				220 Pemeliharaan Jalan Keppi - Bade (165)									
					Panjang Jalan yang dipelihara	5.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.09 - Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan Keppi - Bade (165) yang dipelihara	10 Km	
475.				221 Pemeliharaan Jagebob - Bupul (167)									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Panjang Jalan yang dipelihara	5.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.09 - Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan Jagebob - Bupul (167) yang dipelihara	10 Km	
476.				222 Pemeliharaan Jalan Okaba - Bade (168)									
					Panjang Jalan yang dipelihara	5.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.09 - Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan Okaba - Bade (168) yang dipelihara	5 Km	
477.				223 Pemeliharaan Jalan Waena - Arso V (100 K)									
					Panjang Jalan yang dipelihara	5.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.09 - Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan Waena - Arso V (100 K) yang dipelihara	5 Km	
478.				224 Pemeliharaan Jalan Taja - SP V - Kwarja (106)									
					Panjang Jalan yang dipelihara	5.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.09 - Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan Taja - SP V - Kwarja (106) yang dipelihara	10 Km	
479.				225 Pemeliharaan Jalan Berap - Nimbotong - Lereh - Tengon									
					Panjang Jalan yang dipelihara	5.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.09 - Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan Berap - Nimbotong - Lereh - Tengon yang dipelihara	10 Km	
480.				226 Pemeliharaan Jalan Menawi - Sumberbaba (122)									
					Panjang Jalan yang dipelihara	5.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.09 - Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan Menawi - Sumberbaba (122) yang dipelihara	70 Km	
481.				230 Pemeliharaan Jalan Wamena - Karubaga - Mulia									
					Jumlah panjang jalan yang dipelihara	50.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.09 - Rehabilitasi Jalan	Jumlah panjang jalan Wamena - Karubaga - Mulia yang dipelihara	10 Km	
482.				231 Pemeliharaan Jalan Manda - Wolo - Kobakma									
					Panjang Jalan yang direhab/dipelihara	25.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.09 - Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang direhab/dipelihara	5 Km	
483.				232 Pemeliharaan Jalan Beam - Makki - Pirime - Tiom									
					Jumlah panjang jalan yang dipelihara	52.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.09 - Rehabilitasi Jalan	Jumlah panjang jalan yang dipelihara	10.4 Km	
484.				233 Pemeliharaan Jalan Wamena - Elelim									
					Jumlah panjang jalan yang dipelihara	25.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.09 - Rehabilitasi Jalan	Jumlah panjang jalan yang dipelihara	5 Km	
485.				234 Pemeliharaan Jalan Wamena - Suru Suru - Dekai									
					Jumlah panjang jalan yang dipelihara	25.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.09 - Rehabilitasi Jalan	Jumlah panjang jalan yang dipelihara	5 Km	

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
486.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	18 Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase panjang jalan provinsi dalam kondisi mantap; Persentase panjang jembatan provinsi dalam kondisi matap	235 Pemeliharaan Jalan Nabire - Enarotali									
					Jumlah panjang jalan yang dipelihara	25.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.09 - Rehabilitasi Jalan	Jumlah panjang jalan yang dipelihara	6.25 Km	
487.				236 Pemeliharaan Jalan Mulia - Yambi - Sinak									
					Jumlah panjang jalan yang dipelihara	25.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.09 - Rehabilitasi Jalan	Jumlah panjang jalan yang dipelihara	6.25 Km	
488.				237 Pemeliharaan Jalan Dalam Kota Kenyam									
					Jumlah panjang jalan yang dipelihara	25.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.09 - Rehabilitasi Jalan	Jumlah panjang jalan yang dipelihara	5 Km	
489.		24 Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Cakupan layanan air bersih/air minum; Daerah irigasi provinsi yang berfungsi; Peningkatan kinerja Daerah Irigasi (DI); Persentase jaringan irigasi provinsi dengan kualitas baik; Persentase luas lahan yang terlayani irigasi; Terpeliharanya sempadan sumber air; Tingkat produktifitas lahan sawah yang terpenuhi irigasi	1 Perencanaan pembangunan jaringan irigasi									
					Jumlah Dokumen Jaringan Irigasi yang direncanakan	10.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.02.01 - Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen Jaringan Irigasi yang direncanakan	15 Dokumen	
490.				2 Perencanaan pembangunan jaringan air bersih/air minum									
491.				3 Perencanaan pembangunan reservoir									
492.				4 Perencanaan pembangunan pintu air									
493.				5 Perencanaan normalisasi saluran sungai									
494.				6 Pembangunan jaringan air bersih/air minum									
495.				7 Pembangunan reservoir									
496.				8 Pembangunan pintu air									
497.				9 Pelaksanaan normalisasi saluran sungai									
					Panjang Saluran	10.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.02.04 - Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Saluran jaringan irigasi yang terbangun	1000 M	
498.				10 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Panjang Saluran Irigasi yang direhab/dipelihara	10.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.02.21 - Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Saluran Irigasi yang direhab/dipelihara	10000 M	
499.				11 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan air bersih/air minum									
500.				12 Rehabilitasi/pemeliharaan reservoir									
501.				13 Rehabilitasi/pemeliharaan pintu air									
502.				14 Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai									
					Panjang saluran sungai yang direhab/dipelihara	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.02.14 - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang saluran sungai yang direhabilitasi/dipelihara	10 M	
503.				15 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi yang telah dibangun									
504.				16 Rehabilitasi/pemeliharaan petani pemakai air									
505.				17 Monitoring, evaluasi dan pelaporan									
					Jumlah Dokumen	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	1.03.11.1.02 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	1.03.11.1.02.05 - Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluatif dan Pelaporan yang disusun	2 Dokumen	
506.				282 Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Lereh SP 5									
					Panjang saluran, jaringan, jalan dan bangunan pelengkap irigasi yang ditingkatkan	5.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.02.08 - Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan, Irigasi D.I Lereh SP 5 yang ditingkatkan	1000 M	
					Laporan hasil pengawasan saluran irigasi yang ditingkatkan	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	1.03.11.1.02 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	1.03.11.1.02.05 - Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi	Laporan hasil pengawasan saluran irigasi yang ditingkatkan	5 Laporan	
507.				283 Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Lereh Paket III									
					Panjang saluran irigasi yang terbangun	3.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.02.08 - Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang saluran irigasi D.I Lereh Paket III yang terbangun	100 M	
508.				336 Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Maidey Paket II									
					Panjang saluran irigasi yang terbangun	2.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.02.09 - Peningkatan Bendung Irigasi	Panjang saluran irigasi D.I Maidey Paket II yang terbangun	100 M	
509.				337 Peningkatan Jaringan Rawa DIR Serapu									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Panjang saluran irigasi yang terbangun	2.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.02.10 - Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa	Panjang jaringan irigasi Rawa DIR Serapu yang terbangun	1000 M	
510.				338 Peningkatan Jaringan Irigasi DIR Okaba									
					Panjang saluran irigasi yang ditingkatkan	2.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.02.04 - Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa	Panjang saluran irigasi DIR Okaba yang ditingkatkan	1000 M	
					Laporan hasil pengawasan saluran irigasi yang ditingkatkan	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	1.03.11.1.02 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	1.03.11.1.02.05 - Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi	Laporan hasil pengawasan saluran irigasi yang ditingkatkan	100 Dokumen	
511.				339 Pembangunan long Storage Kabupaten Merauke									
					Volume bangunan Long Storage yang dibangun	10.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.46 - Normalisasi/Restorasi/Pemeliharaan Sungai	Volume bangunan Long Storage Kabupaten Merauke yang dibangun	10000 M3	
512.				340 Peningkatan Jaringan Rawa DIR Salor									
					Panjang saluran irigasi yang ditingkatkan	2.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.02.10 - Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa	Panjang saluran irigasi Rawa DIR Salor yang ditingkatkan	1000 M	
					Laporan hasil pengawasan saluran irigasi yang ditingkatkan	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	1.03.11.1.02 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	1.03.11.1.02.05 - Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi	Laporan hasil pengawasan saluran irigasi Rawa DIR Salor yang ditingkatkan	0 Laporan	
513.				341 Peningkatan Jaringan Rawa DIR Wasur									
					Panjang Jaringan Irigasi yang ditingkatkan	2.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.02.10 - Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa DIR Wasur yang ditingkatkan	1000 M	
					Laporan hasil pengawasan saluran irigasi yang ditingkatkan	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	1.03.11.1.02 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	1.03.11.1.02.05 - Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi	Laporan hasil pengawasan saluran irigasi Rawa DIR Wasur yang ditingkatkan	0 Laporan	
514.				342 Pengawasan Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Legare									
					Laporan pengawasan peningkatan kinerja sistem irigasi	5.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	1.03.11.1.02 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	1.03.11.1.02.05 - Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi	Laporan pengawasan peningkatan kinerja sistem irigasi D.I Legare	100 Laporan	
515.				343 Pengawasan Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Maidey									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Laporan pengawasan peningkatan kinerja sistem irigasi	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	1.03.11.1.02 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	1.03.11.1.02.05 - Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi	Laporan pengawasan peningkatan kinerja sistem jaringan irigasi D.I Madye	5 Laporan	
516.				344 Pengawasan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Lereh									
					Laporan pengawasan rehabilitasi jaringan irigasi	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	1.03.11.1.02 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	1.03.11.1.02.05 - Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi	Laporan pengawasan rehabilitasi jaringan irigasi D.I Lereh	50 Laporan	
517.				345 Peningkatan Jaringan Rawa DIR Wasur Selatan									
					Panjang saluran yang terbangun	2.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.02.10 - Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa	Panjang saluran irigasi Rawa DIR Wasur Selatan yang terbangun	1000 M	
518.				346 Peningkatan Jaringan Rawa DIR Wasur Utara									
					Panjang saluran irigasi yang terbangun	2.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.02.10 - Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa	Panjang saluran irigasi Rawa DIR Wasur Utara yang terbangun	100 M	
519.				347 Pembangunan Jaringan Irigasi DI Produktif									
					Panjang saluran irigasi yang terbangun	2.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.02.02 - Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang saluran irigasi D.I Produktif yang terbangun	100 M	
520.				348 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Rawa									
					Panjang Jaringan Rawa yang direhab/dipelihara	2.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.02.16 - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Rawa yang direhab/dipelihara	1000 M	
521.				349 Peningkatan Jaringan Irigasi									
					Panjang Jaringan Irigasi yang ditingkatkan	5.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.02.08 - Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi yang ditingkatkan	100 M	
522.				350 Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa di DIR Prioritas									
523.				351 Operasi dan Pemeliharaan Irigasi tersebar (Swakelola)									
					Luas Jaringan Irigasi untuk petani	5.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.46 - Normalisasi/Restorasi/Pemeliharaan Sungai	Luas Jaringan Irigasi yang dipelihara	10000 Ha	

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
524.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	24 Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Cakupan layanan air bersih/air minum; Daerah irigasi provinsi yang berfungsi; Peningkatan kinerja Daerah Irigasi (DI); Persentase jaringan irigasi provinsi dengan kualitas baik; Persentase luas lahan yang terlayani irigasi; Terpeliharanya sempadan sumber air; Tingkat produktifitas lahan sawah yang terpenuhi irigasi	352 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi									
					Panjang jaringan irigasi yang dikelola dan dipelihara	10.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.02.21 - Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan irigasi yang dikelola dan dipelihara	10000 Meter	
525.				353 Rehabilitasi Jaringan Irigasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi									
526.				354 Supervisi / Pengawasan Pengembangan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya									
527.				355 Supervisi / Pengawasan Pengembangan Jaringan Irigasi, Rawa									
528.				356 Perencanaan Teknis dan Detail Desain Rawa									
529.				357 Studi/Perencanaan Teknis Daerah Irigasi									
530.				366 Peningkatan jaringan irigasi DI.Legare SP 2									
					Panjang Jaringan Irigasi yang ditingkatkan	5.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.02.10 - Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi D.I Legare SP2 yang ditingkatkan	100 M	
					Laporan hasil pengawasan saluran irigasi yang ditingkatkan	5.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	1.03.11.1.02 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	1.03.11.1.02.05 - Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi	Laporan hasil pengawasan saluran irigasi yang ditingkatkan	100 Laporan	
531.				370 Study Evaluasi Kinerja DI.Legare									
					Laporan hasil study kinerja evaluasi DI	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	1.03.11.1.02 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	1.03.11.1.02.05 - Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi	Laporan hasil study kinerja evaluasi DI Legare	0 Dokumen	
532.				371 Study Evaluasi Kinerja DI.Maidey									
					Laporan hasil study kinerja evaluasi DI	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	1.03.11.1.02 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	1.03.11.1.02.05 - Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi	Laporan hasil study kinerja evaluasi DI Maidey	0 Dokumen	
533.				372 Studi dan DED DI. Sungai Agasiga									
					Laporan hasil study dan DED DI	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	1.03.11.1.02 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	1.03.11.1.02.05 - Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi	Laporan hasil study dan DED DI Sungai Agasiga	2 Dokumen	
534.				373 Studi dan DED DI. Sungai Kemabu									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Laporan hasil study dan DED DI	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	1.03.11.1.02 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	1.03.11.1.02.05 - Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi	Laporan hasil study dan DED DI Sungai Kemabu	2 Dokumen	
535.				374 Studi dan DED DI. Sungai Wabu									
					Laporan hasil study dan DED DI	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	1.03.11.1.02 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	1.03.11.1.02.05 - Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi	Laporan hasil study dan DED DI Sungai Wabu	2 Dokumen	
536.				375 Studi dan DED DI. Sungai Hiyabu									
					Laporan hasil study dan DED DI	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	1.03.11.1.02 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	1.03.11.1.02.05 - Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi	Laporan hasil study dan DED DI Sungai Hiyabu	2 Dokumen	
537.				376 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Lereh Paket I (DAK)									
					Panjang jaringan irigasi yang direhab	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.02.14 - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan irigasi DI Lereh Paket I (DAK) yang direhab	200 M	
538.				377 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Legare Paket I (DAK)									
					Panjang jaringan irigasi yang direhab	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.02.16 - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	Panjang jaringan irigasi DI Legare Paket I (DAK) yang direhab	10 M	
539.				378 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Maidey Paket I (DAK)									
					Panjang jaringan irigasi yang direhab	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.02.16 - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	Panjang jaringan irigasi DI Maidey Paket I (DAK) yang direhab	100 M	
540.				379 Rehabilitasi Jaringan Rawa DR. Gudang Arang-Serapu Paket I (DAK)									
					Panjang jaringan rawa yang direhab	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.02.16 - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	Panjang jaringan rawa DR Gudang Arang-Serapu Paket I (DAK) yang direhab	100 M	
541.				380 Rehabilitasi Jaringan Rawa DR. Okaba									
					Panjang jaringan rawa yang direhab	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.02.16 - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	Panjang jaringan rawa DR Okaba yang direhab	100 M	
542.				381 Rehabilitasi Jaringan Rawa DR. Salor									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Panjang jaringan rawa yang direhab	29.520.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.02.16 - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	Panjang jaringan rawa DR Sawor yang direhab	23158 M	
543.				382 Rehabilitasi Jaringan Rawa DR. Wasum-Nasem									
					Panjang jaringan rawa yang direhab	18.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.02.16 - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	Panjang jaringan rawa DR Wasum - Nasem yang direhab	18000 M	
544.				383 Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Lereh Paket I (DAK)									
					Panjang jaringan irigasi yang ditingkatkan	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.02.16 - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	Panjang jaringan irigasi DI Lereh Paket I (DAK) yang ditingkatkan	100 M	
545.				384 Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Legare Paket I (DAK)									
					Panjang jaringan irigasi yang ditingkatkan	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.02.16 - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	Panjang jaringan irigasi DI> Legare Paket I (DAK) yang ditingkatkan	10 M	
546.				385 Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Maidey Paket I (DAK)									
					Panjang jaringan irigasi yang ditingkatkan	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.02.16 - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	Panjang jaringan irigasi DI Maidey Paket I (DAK) yang ditingkatkan	100 M	
547.				386 Peningkatan Jaringan Rawa DR. Gudang Arang-Serapu Paket I (DAK)									
					Panjang jaringan rawa yang direhab	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.02.15 - Rehabilitasi Bendung Irigasi	Panjang jaringan rawa DR Gudang Arang-Serapu-Paket I (DAK) yang direhab	100 M	
548.				387 Peningkatan Jaringan Irigasi DIR Okaba (DAK)									
					Panjang jaringan irigasi yang ditingkatkan	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.02.16 - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	Panjang jaringan irigasi DIR Okaba (DAK) yang ditingkatkan	100 M	
549.				388 Peningkatan Jaringan Rawa DIR Wasur-Nasem									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Luas Daerah Jaringan DI yang ditingkatkan	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.02.16 - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	Luas Daerah Jaringan Rawa DIR Wasur-Nasem yang ditingkatkan	100 Ha	
					Panjang jaringan yang ditingkatkan	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.02.16 - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	Panjang jaringan Rawa DIR Wasur-Nasem yang ditingkatkan	0 M	
550.				389 Peningkatan Jaringan Rawa DIR Wasur - Nasem (DAK)									
					Panjang jaringan rawa yang ditingkatkan	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.02.10 - Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa	Panjang jaringan rawa DIR Wasur - Nasem (DAK) yang ditingkatkan	1100 M	
					Luas Daerah Jaringan DI yang ditingkatkan	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.02.10 - Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa	Luas Daerah Jaringan DIR Wasur - Nasem (DAK) yang ditingkatkan	100 Ha	
551.				391 Pembangunan Infrastruktur Air Bersih/Baku Kabupaten Yahukimo									
552.				392 Pembangunan Infrastruktur Air Bersih/Baku Kabupaten Mamberamo Tengah									
553.				393 Pembangunan Infrastruktur Air Bersih/Baku Kabupaten Yalimo									
554.				394 Pembangunan Infrastruktur Air Bersih/Baku Kabupaten Nduga									
555.				395 Pembangunan Infrastruktur Air Bersih/Baku Kabupaten Puncak									
556.				396 Pembangunan Infrastruktur Air Bersih/Baku Kabupaten Lanny Jaya									
557.				397 Pembangunan Infrastruktur Air Bersih/Baku Kabupaten Pegunungan Bintang									
					Volume bangunan intake yang terbangun	0,00						0 M3	
					Volume bangunan penampung air yang terbangun	0,00						0 M3	
558.				398 Pembangunan Jaringan Irigasi Baru (DAK)									
					Panjang Saluran Jaringan Irigasi yang terbangun	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.02.04 - Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Saluran Jaringan Irigasi Baru (DAK) yang terbangun	100 M'	
559.				399 Pembangunan Long Storage DR Salor									
					Volume Bangunan Long Storage yang terbangun	5.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.46 - Normalisasi/Restorasi/Pemeliharaan Sungai	Volume Bangunan Long Storage Dr Salor yang terbangun	100 M3	

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
560.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	24 Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Cakupan layanan air bersih/air minum; Daerah irigasi provinsi yang berfungsi; Peningkatan kinerja Daerah Irigasi (DI); Persentase jaringan irigasi provinsi dengan kualitas baik; Persentase luas lahan yang terlayani irigasi; Terpeliharanya sempadan sumber air; Tingkat produktifitas lahan sawah yang terpenuhi irigasi	400 Rehabilitasi Sipon Irigasi DI. Legare (DAK)									
					Panjang Saluran Jaringan yang direhab	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.02.16 - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Saluran Simon Irigasi DI. Legare (DAK) Jaringan yang direhab	100 M'	
561.				401 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa DR Gudang Arang - Serapu (DAK)									
					Panjang Saluran Jaringan yang direhab	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.02.16 - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Saluran Jaringan Irigasi Rawa DR Gudang Arang - Serapu (DAK) yang direhab	1 M'	
562.				402 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa DR Kuprik - Sidomulyo (DAK)									
					Panjang Saluran Jaringan yang direhab	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.02.16 - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Saluran Jaringan Irigasi Rawa DR Kuprik - Sidomulyo (DAK) yang direhab	100 M'	
563.				403 Pembangunan Jaringan Irigasi DI Lereh									
					Panjang Saluran Irigasi	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.02.04 - Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Saluran Irigasi DI Lereh	100 Meter	
564.				404 Peningkatan Jaringan Irigasi DI Lereh									
					Panjang Saluran Irigasi	5.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.02.10 - Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Saluran Irigasi DI Lereh yang ditigkatkan	0 Meter	
565.				405 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Lereh									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Panjang Saluran Irigasi	13.755.697.253,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.02.16 - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Saluran Irigasi Di Lereh yang direhab	3000 Meter	
566.				406 Peningkatan Jaringan Irigasi Di Legare									
					Panjang Saluran Irigasi	5.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.02.10 - Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Saluran Irigasi Di Legare yang ditingkatkan	0 Meter	
567.				407 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Legare									
					Panjang Saluran Irigasi	24.085.414.953,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.02.16 - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Saluran Irigasi Di Legare yang direhab	3000 Meter	
568.				408 Peningkatan Jaringan Irigasi Di Maidey									
					Panjang Saluran Irigasi	2.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.02.14 - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Saluran Irigasi	1000 Meter	
569.				409 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Maidey									
					Panjang Saluran Irigasi	12.900.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.02.16 - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Rehap Jaringan Irigasi Rawa Di Maidey	4975 Meter	
570.				410 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DIR Salor									
					Panjang Saluran Irigasi	10.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.02.02 - Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Saluran Irigasi	1000 Meter	
571.				411 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DIR Wasur									
					Panjang Saluran Irigasi	10.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.02.02 - Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Saluran Irigasi	1000 Meter	
572.				412 Peningkatan Jaringan Irigasi DIR Kuprik - Sidomulyo									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Panjang Saluran Irigasi	2.000.000.000,00						0 Meter	
573.				413 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DIR Kuprik - Sidomulyo									
					Panjang Saluran Irigasi	19.200.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.02.16 - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Saluran Irigasi	13500 Meter	
574.				414 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DIR Gudang Arang - Serapu									
					Panjang Saluran Irigasi	16.800.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.02.16 - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Saluran Irigasi	14000 Meter	
575.				415 Peningkatan Jaringan Rawa DIR Okaba									
					Panjang Saluran Irigasi	3.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.02.10 - Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Saluran Irigasi Rawa DIR Okaba yang ditingkatkan	0 Meter	
576.				416 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DIR Okaba									
					Panjang Saluran Irigasi	18.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.02.16 - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Saluran Irigasi	17800 Meter	
577.				417 Pembangunan Jaringan Irigasi Di Sp. VI di Kabupaten Waropen									
					Panjang Saluran Irigasi	5.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.02.04 - Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Saluran Irigasi Di Sp. IV di Kabupaten Waropen	30030 Meter	
578.				419 Penyusunan Perda tentang Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Provinsi Papua									
					Jumlah dokumen Perda yang disusun	1.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	1.03.11.1.02 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	1.03.11.1.02.05 - Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah dokumen Perda yang disusun	1 Dokumen	
579.				420 Penyelenggaraan kelembagaan Komisi Irigasi di Provinsi Papua									
					Jumlah aktivitas yang dilaksanakan dalam kelembagaan Komisi Irigasi	200.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.63 - Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	Jumlah aktivitas yang dilaksanakan dalam kelembagaan Komisi Irigasi	3 Kegiatan	
580.				421 Review DED Daerah Irigasi									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Jumlah dokumen perencanaan teknis yang disusun	800.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.02.01 - Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah dokumen perencanaan teknis yang disusun	10 Dokumen	
581.				422 Survey Angka Kebutuhan Nyata Operasi dan Pemeliharaan (Aknop) Daerah Irigasi (DI)									
					Jumlah lokasi survey	2.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.02.01 - Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah lokasi survey (Aknop) daerah irigasi (DI)	7 Lokasi	
582.				423 Operasional Unit Pengelola Irigasi									
					Cakupan wilayah yg dilayani jaringan irigasi	1.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.02.21 - Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Cakupan wilayah yg dilayani jaringan irigasi	500 M3	
583.				424 OP Irigasi WS Kewenangan Provinsi Papua									
					Cakupan wilayah yg dilayani jaringan irigasi	2.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.02.21 - Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Cakupan wilayah yg dilayani jaringan irigasi	100 M3	
584.				425 Pembangunan Long Storage Hutan Sagu (3 Lokasi Jayapura-Mimika-Merauke)									
					Volume bangunan Long Storage yang dibangun	10.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.46 - Normalisasi/Restorasi/Pemeliharaan Sungai	Volume bangunan Long Storage yang dibangun	1000 M3	
585.				426 Survey Aknop/E-Paksi DI/DIR Kewenangan Provinsi									
					Jumlah lokasi survey	1.500.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.02.01 - Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah lokasi survey	5 Dokumen	
586.		25 Program penyediaan dan pengolahan air baku	Cakupan keterlayanan air baku	1 Pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa									
					Jumlah kampung yang terlayani	0,00					Jumlah kampung yang terlayani	2 Kampung	
					Volume bangunan intake yang terbangun	0,00					Volume bangunan intake yang terbangun	50 M3	
					Panjang Saluran distribusi air yang terbangun	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.22 - Rehabilitasi Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Panjang Saluran distribusi air yang terbangun	100 Meter	
587.				2 Rehabilitasi prasarana pengambilan dan saluran pembawa									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
588.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	25 Program penyediaan dan pengolahan air baku	Cakupan keterlayanan air baku	3 Pemeliharaan prasarana pengambilan dan saluran pembawa									
589.				4 Pembangunan sumur-sumur air tanah									
					Jumlah sumur yang terbangun	1.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.07 - Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Jumlah sumur yang terbangun	2 Titik	
590.				5 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air									
					Jumlah partisipasi masyarakat	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.02 - Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Jumlah partisipasi masyarakat	10 Kelompok	
591.				6 Peningkatan distribusi penyediaan air baku									
592.				7 Monitoring, evaluasi dan pelaporan									
					Jumlah Dokumen	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	1.03.11.1.02 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	1.03.11.1.02.05 - Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	
593.				21 Pembangunan Jaringan Air Baku di Kabupaten Keerom									
					Luas area jaringan air baku yang dibangun	0,00					Luas area jaringan air baku yang dibangun	0 KM2	
					Jumlah debit air	2.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.08 - Pembangunan Unit Air Baku	Jumlah debit air	5 liter/detik	
594.				22 Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Baku di Kabupaten Gerbang Mas									
					Kapasitas Bangunan Intake yang terbangun	5.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.08 - Pembangunan Unit Air Baku	Kapasitas Bangunan Intake yang terbangun	5 liter/detik	
					Volume bangunan penampung yang terbangun	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.08 - Pembangunan Unit Air Baku	Volume bangunan penampung yang terbangun	0 M3	
595.				23 Operasi dan Pemeliharaan. Jaringan Air Baku Kab. Biak Numfor									
					Panjang jaringan perpipaan yang dipelihara	1.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.52 - Operasi dan Pemeliharaan Unit Air Baku	Panjang jaringan perpipaan yang dipelihara	50 M	
					Laporan hasil pengawasan jaringan yang beroperasi dan dipelihara	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.52 - Operasi dan Pemeliharaan Unit Air Baku	Laporan hasil pengawasan jaringan yang beroperasi dan dipelihara	0 Dokumen	
596.				24 Operasi dan Pemeliharaan. Jaringan Air Baku Kab. Waropen									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Panjang jaringan perpipaan yang dipelihara	1.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.52 - Operasi dan Pemeliharaan Unit Air Baku	Panjang jaringan perpipaan yang dipelihara	50 M	
					Laporan hasil pengawasan jaringan yang beroperasi dan dipelihara	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.52 - Operasi dan Pemeliharaan Unit Air Baku	Laporan hasil pengawasan jaringan yang beroperasi dan dipelihara	0 Dokumen	
597.				25 Pembangunan Long Storage Jagebob Kab. Merauke									
					Panjang long storage yang terbangun	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.46 - Normalisasi/Restorasi/Pemeliharaan Sungai	Panjang long storage yang terbangun	1000 M	
					Laporan hasil long storage yang terbangun	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.46 - Normalisasi/Restorasi/Pemeliharaan Sungai	Laporan hasil long storage yang terbangun	2 Dokumen	
598.				26 Pembangunan infrastruktur air baku di Kabupaten Kabupaten Supiori									
					Panjang sarana infratraktur air baku yang terbangun	2.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.08 - Pembangunan Unit Air Baku	Panjang sarana infratraktur air baku yang terbangun	50 M	
					Laporan hasil sarana infratraktur air baku yang terbangun	200.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.02 - Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Laporan hasil sarana infratraktur air baku yang terbangun	1 Dokumen	
599.				27 Pembangunan infrastruktur air baku di Kabupaten Kabupaten Sarmi									
					Panjang sarana infratraktur air baku yang terbangun	2.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.08 - Pembangunan Unit Air Baku	Panjang sarana infratraktur air baku yang terbangun	50 M	
					Laporan hasil sarana infratraktur air baku yang terbangun	200.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.02 - Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Laporan hasil sarana infratraktur air baku yang terbangun	1 Dokumen	
600.				28 Pembangunan infrastruktur air baku di Kabupaten Jayapura									
					Panjang sarana infratraktur air baku yang terbangun	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.08 - Pembangunan Unit Air Baku	Panjang sarana infratraktur air baku yang terbangun	50 M	
					Jumlah debit air	2.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.08 - Pembangunan Unit Air Baku	Jumlah debit air	5 liter/detik	
601.				29 Pembangunan Long Storage Kurik									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Panjang long storage yang terbangun	2.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.46 - Normalisasi/Restorasi/Pemeliharaan Sungai	Panjang long storage yang terbangun	1000 M'	
					Laporan hasil long storage yang terbangun	200.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.02.01 - Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Laporan hasil long storage yang terbangun	2 Dokumen	
602.				30 Pembangunan Long Storage Kampung Tambat									
					Panjang long storage yang terbangun	2.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.46 - Normalisasi/Restorasi/Pemeliharaan Sungai	Panjang long storage yang terbangun	1000 M	
					Laporan hasil long storage yang terbangun	200.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.03 - Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Laporan hasil long storage yang terbangun	1 Dokumen	
603.				32 Study Air Baku Kampung Yigi									
					Laporan hasil study air baku	0,00						0 Dokumen	
604.				33 Perencanaan teknis Air Baku Kiwirok									
					Laporan hasil DED Air Baku	0,00						0 Dokumen	
605.				34 DED Air Baku Okbibab									
					Laporan hasil DED Air Baku	0,00						0 Dokumen	
606.				35 Perencanaan teknis Air Baku kampung Mbuah									
					Laporan hasil study air baku	0,00						0 Dokumen	
607.				36 Pembangunan Infrastruktur Air Bersih/Baku Kabupaten Tolikara									
					Jumlah Debit air Perdetik	2.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.08 - Pembangunan Unit Air Baku	Jumlah Debit air Perdetik	5 Lt/dtk	
608.				37 Pembangunan Infrastruktur Air Bersih/Baku Kabupaten Yahukimo									
					Jumlah Debit air Perdetik	2.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.08 - Pembangunan Unit Air Baku	Jumlah Debit air Perdetik	5 Lt/dtk	
609.				38 Pembangunan Infrastruktur Air Bersih/Baku Kabupaten Yalimo									
					Jumlah Debit air Perdetik	2.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.08 - Pembangunan Unit Air Baku	Jumlah Debit air Perdetik	5 Lt/dtk	
610.				39 Pembangunan Infrastruktur Air Bersih/Baku Kabupaten Nduga									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Jumlah Debit air Perdetik	3.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.08 - Pembangunan Unit Air Baku	Jumlah Debit air Perdetik	5 Lt/dtk	
611.				40 Pembangunan Infrastruktur Air Bersih/Baku Kabupaten Puncak									
					Jumlah Debit air Perdetik	2.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.08 - Pembangunan Unit Air Baku	Jumlah Debit air Perdetik	5 Lt/dtk	
612.				41 Pembangunan Infrastruktur Air Bersih/Baku Kabupaten Lanny Jaya									
					Jumlah Debit air Perdetik	2.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.08 - Pembangunan Unit Air Baku	Jumlah Debit air Perdetik	5 Lt/dtk	
613.				42 Pembangunan Infrastruktur Air Bersih/Baku Kabupaten Pegunungan Bintang									
					Jumlah Debit air Perdetik	2.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.08 - Pembangunan Unit Air Baku	Jumlah Debit air Perdetik	5 Lt/dtk	
614.				43 Pembangunan Infrastruktur Air Bersih/Baku Kabupaten Mamberamo Tengah									
					Jumlah Debit air Perdetik	2.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.08 - Pembangunan Unit Air Baku	Jumlah Debit air Perdetik	5 Lt/dtk	
615.				44 Pembangunan Infrastruktur Air Baku di Kabupaten Mamberamo Raya									
					Jumlah Debit air baku	3.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.08 - Pembangunan Unit Air Baku	Jumlah Debit air baku	5 liter/detik	
616.				45 Pembangunan Infrastruktur Air Baku di Kabupaten Biak Numfor									
					Jumlah Debit air baku	3.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.08 - Pembangunan Unit Air Baku	Jumlah Debit air baku	5 liter/detik	
617.				46 Pembangunan Jaringan Air Bersih di Kabupaten Waropen									
					Jumlah Debit air baku	3.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.08 - Pembangunan Unit Air Baku	Jumlah Debit air baku	5 liter/detik	
618.				47 Pembangunan Infrastruktur Air Baku di Kabupaten Kep. Yapen									
					Jumlah Debit air baku	3.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.08 - Pembangunan Unit Air Baku	Jumlah Debit air baku	5 liter/detik	
619.				48 Pembangunan Infrastruktur Air Baku di Kabupaten Nabire									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Jumlah Debit air baku	3.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.08 - Pembangunan Unit Air Baku	Jumlah Debit air baku	5 liter/detik	
620.				49 Pembangunan Infrastruktur Air Baku di Kabupaten Paniai									
					Jumlah Debit air baku	3.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.08 - Pembangunan Unit Air Baku	Jumlah Debit air baku	5 liter/detik	
621.				50 Pembangunan Infrastruktur Air Baku di Kabupaten Deiyai									
					Jumlah Debit air baku	3.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.08 - Pembangunan Unit Air Baku	Jumlah Debit air baku	5 liter/detik	
622.				51 Pembangunan Infrastruktur Air Baku di Kabupaten Dogiyai									
					Jumlah Debit air baku	3.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.08 - Pembangunan Unit Air Baku	Jumlah Debit air baku	5 liter/detik	
623.				52 Pembangunan Infrastruktur Air Baku di Kabupaten Intan Jaya									
					Jumlah Debit air baku	3.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.08 - Pembangunan Unit Air Baku	Jumlah Debit air baku	5 liter/detik	
624.				53 Pembangunan Infrastruktur Air Baku di Kabupaten Jayawijaya									
					Jumlah Debit air baku	2.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.08 - Pembangunan Unit Air Baku	Jumlah Debit air baku	5 liter/detik	
625.				54 Pembangunan Infrastruktur Air Baku di Kabupaten Puncak Jaya									
					Jumlah Debit air baku	2.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.08 - Pembangunan Unit Air Baku	Jumlah Debit air baku	5 liter/detik	
626.				55 Pembangunan Infrastruktur Air Baku di Kabupaten Mimika									
					Jumlah Debit air baku	3.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.08 - Pembangunan Unit Air Baku	Jumlah Debit air baku	5 liter/detik	
627.				56 Pembangunan Infrastruktur Air Baku di Kabupaten Asmat									
					Jumlah Debit air baku	3.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.08 - Pembangunan Unit Air Baku	Jumlah Debit air baku	5 liter/detik	
628.				57 Pembangunan Infrastruktur Air Baku di Kabupaten Boven Digoel									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Jumlah Debit air baku	2.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.08 - Pembangunan Unit Air Baku	Jumlah Debit air baku	5 liter/detik	
629.				58 Pembangunan Infrastruktur Air Baku di Kabupaten Mappi									
					Jumlah Debit air baku	2.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.08 - Pembangunan Unit Air Baku	Jumlah Debit air baku	5 liter/detik	
630.				59 Pembangunan Infrastruktur Air Baku di Kabupaten Peg. Bintang									
					Jumlah Debit air baku	2.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.08 - Pembangunan Unit Air Baku	Jumlah Debit air baku	5 liter/detik	
631.				60 Pembangunan Infrastruktur Air Baku di Kabupaten Merauke									
					Jumlah Debit air baku	2.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.08 - Pembangunan Unit Air Baku	Jumlah Debit air baku	5 liter/detik	
632.				61 Perencanaan Infrastruktur Air Baku di Provinsi Papua									
					Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis	10.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.02 - Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis	15 Dokumen	
633.				62 Pembangunan infrastruktur Air baku di Kota Jayapura									
					Jumlah debit air	2.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.08 - Pembangunan Unit Air Baku	Jumlah debit air	5 liter/detik	
634.				66 Pembangunan Infrastruktur Air Baku Kampung Mambai									
					Jumlah Debit air Perdetik	0,00						0 Lt/dtk	
635.				67 Pembangunan Infrastruktur Air Baku Kampung Fatado									
					Jumlah Debit air Perdetik	0,00						0 Lt/dtk	
636.				68 Pembangunan Infrastruktur Air Baku Kampung Bokadaro									
					Jumlah Debit air Perdetik	0,00						0 Lt/dtk	
637.		26 Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya		12 Pembiayaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi									
					Jumlah laporan pembiayaan	1.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.04 - Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi	Jumlah laporan pembiayaan	2 Laporan	

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
638.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	27 Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Cakupan keterlayanan air bersih; Persentase Rumah Tangga dengan Fasilitas Tempat Buang Air Besa; Persentase penduduk yang memperoleh kebutuhan air minum; Persentase penduduk yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	7 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air minum									
639.				9 Monitoring, evaluasi dan pelaporan									
640.				14 DED Jaringan Air Bersih distrik Demba									
					Dokumen hasil DED jaringan air bersih	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	1.03.08.1.01 - Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	1.03.08.1.01.01 - Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Dokumen hasil DED jaringan air bersih	5 Dokumen	
641.				15 DED Jaringan Air Bersih distrik Wonti									
					Dokumen hasil DED jaringan air bersih	0,00						0 Dokumen	
642.				16 DED Jaringan Air Bersih distrik Masirei									
					Dokumen hasil DED jaringan air bersih	0,00						0 Dokumen	
643.				17 DED jaringan air bersih Distrik Tiom									
					Dokumen hasil DED jaringan air bersih	0,00						0 Dokumen	
644.				18 DED jaringan air bersih Kelurahan Angkasa Distrik Jayapura utara									
					Dokumen hasil DED jaringan air bersih	0,00						0 Dokumen	
645.				19 DED jaringan air bersih kelurahan Imbi Dok VIII Distrik Jayapura Utara									
					Dokumen hasil DED jaringan air bersih	0,00						0 Dokumen	
646.				20 DED Jaringan Air Bersih Distrik Kabupaten Biak Numfor									
					Dokumen hasil DED jaringan air bersih	0,00						0 Dokumen	
647.				21 DED Jaringan Air Bersih Distrik Kabupaten Sarmi									
					Dokumen hasil DED jaringan air bersih	0,00						0 Dokumen	
648.				22 DED Jaringan Air Bersih Distrik Kabupaten Tolikara									
					Dokumen hasil DED jaringan air bersih	0,00						0 Dokumen	
649.				23 DED Jaringan Air Bersih Distrik Kabupaten Jayapura									
					Dokumen hasil DED jaringan air bersih	0,00						0 Dokumen	
650.				24 DED Jaringan Air Bersih Kampung Giari Distrik Tiom Olo Kabupaten Lanny Jaya									
					Dokumen hasil DED jaringan air bersih	0,00						0 Dokumen	
651.				25 DED Jaringan Air Bersih Kampung Nambume Distrik Pirime Kabupaten Lanny Jaya									
					Dokumen hasil DED jaringan air bersih	0,00						0 Dokumen	
652.				26 DED Jaringan Air Bersih Kampung Beyongi Distrik Wereka Kabupaten Lanny Jaya									
					Dokumen hasil DED jaringan air bersih	0,00						0 Dokumen	

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
653.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	27 Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Cakupan keterlayanan air bersih; Persentase Rumah Tangga dengan Fasilitas Tempat Buang Air Besa; Persentase penduduk yang memperoleh kebutuhan air minum; Persentase penduduk yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	27 Pengembangan SPAM Distrik Arso									
					Jumlah unit SPAM yang dikembangkan	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.1.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	1.03.03.1.01.03 - Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	Jumlah unit SPAM Distrik Arson yang dikembangkan	0 Lt/dtk	
654.				28 Pengembangan SPAM Distrik Yapen Selatan									
					Jumlah unit SPAM yang dikembangkan	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.1.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	1.03.03.1.01.04 - Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah unit SPAM Distrik Yapen Selatan yang dikembangkan	0 Lt/dtk	
655.				29 Pembangunan SPAM Kabupaten Jayawijaya									
					Jumlah SPAM yang terbangun	1.100.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.1.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	1.03.03.1.01.04 - Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah SPAM yang terbangun	5 Lt/dtk	
656.				30 Pengembangan SPAM Distrik Urifasei									
					Jumlah unit SPAM yang dikembangkan	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.1.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	1.03.03.1.01.11 - Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah unit SPAM Distrik Urifasei yang dikembangkan	0 Lt/dtk	
657.				31 Pengembangan SPAM Distrik Waren									
					Jumlah SPAM yang dikembangkan	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.1.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	1.03.03.1.01.11 - Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah SPAM Distrik Waren yang dikembangkan	0 Lt/dtk	
658.				32 Pengembangan SPAM Distrik Nabire									
					Jumlah unit SPAM yang dikembangkan	5.500.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.1.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	1.03.03.1.01.04 - Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah unit SPAM yang dikembangkan	5 Lt/dtk	
659.				33 Masterplan Drainase Kabupaten Biak Numfor									
					Dokumen hasil masterplan drainase	0,00						0 Dokumen	
660.				34 Masterplan Drainase Kabupaten Kepulauan Yapen									
					Dokumen hasil masterplan drainase	0,00						0 Dokumen	
661.				35 Masterplan Drainase Kabupaten Keerom									
					Dokumen hasil masterplan drainase	0,00						0 Dokumen	
662.				36 Masterplan Persampahan Kepulauan Yapen									
					Dokumen hasil masterplan persampahan	0,00						0 Dokumen	
663.				49 Perencanaan TPST Kota Jayapura									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Dokumen hasil perencanaan TPST	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1.03.05.1.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	1.03.05.1.01.01 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Dokumen hasil perencanaan TPST	5 Dokumen	
664.				50 Perencanaan TPS 3 R Kota Jayapura									
					Dokumen hasil perencanaan TPS 3 R	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1.03.05.1.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	1.03.05.1.01.01 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Dokumen hasil perencanaan TPS 3 R	5 Dokumen	
665.				51 Perencanaan TPS 3 R Kabupaten Jayapura									
					Dokumen hasil perencanaan TPS 3 R	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1.03.05.1.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	1.03.05.1.01.01 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Dokumen hasil perencanaan TPS 3 R	5 Dokumen	
666.				62 Pembangunan TPST Kabupaten Merauke									
					Terbangunnya TPST	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1.03.05.1.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	1.03.05.1.01.01 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Terbangunnya TPST	5 Unit	
667.				63 Pembangunan TPST Kota Jayapura									
					Terbangunnya TPST	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	1.03.04.1.01 - Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	1.03.04.1.01.03 - Pembangunan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	Terbangunnya TPST Kota Jayapura	0 Unit	
668.				64 Pembangunan TPS 3 R Kota Jayapura									
					Terbangunnya TPS 3 R	0,00						0 Unit	
669.				65 Pembangunan TPS 3 R Kabupaten Jayapura									
					Terbangunnya TPS 3 R	0,00						0 Unit	
670.				67 Pembangunan jaringan air bersih di kab Intan Jaya									
					Jumlah debit air bersih yang tersedia	2.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.1.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	1.03.03.1.01.04 - Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah debit air bersih yang tersedia	5 Lt/dtk	
671.				70 Pembangunan jaringan air bersih di kab Sarmi									
					Jumlah debit air bersih yang tersedia	2.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.1.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	1.03.03.1.01.04 - Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah debit air bersih yang tersedia	5 Lt/dtk	
672.				71 Pembangunan jaringan air bersih di kab Biak									
					Jumlah debit air bersih yang tersedia	2.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.1.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	1.03.03.1.01.04 - Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah debit air bersih yang tersedia	5 Lt/dtk	
673.				72 Pembangunan jaringan air bersih di kab Boven Digoel									
					Jumlah debit air bersih yang tersedia	2.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.1.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	1.03.03.1.01.04 - Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah debit air bersih yang tersedia	5 Lt/dtk	
674.				73 Pembangunan jaringan air bersih di Kampung Harapan									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Jumlah debit air bersih yang tersedia	2.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.1.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	1.03.03.1.01.04 - Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah debit air bersih yang tersedia	5 Lt/dtk	
675.				74 Pembangunan jaringan air bersih di kab Deiyai									
					Jumlah debit air bersih yang tersedia	2.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.1.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	1.03.03.1.01.04 - Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah debit air bersih yang tersedia	5 Lt/dtk	
676.				75 Pembangunan jaringan air bersih di kab Yalimo									
					Jumlah debit air bersih yang tersedia	2.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.1.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	1.03.03.1.01.04 - Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah debit air bersih yang tersedia	5 Lt/dtk	
677.				76 Pembangunan jaringan air bersih di kab Dogiyai									
					Jumlah debit air bersih yang tersedia	2.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.1.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	1.03.03.1.01.04 - Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah debit air bersih yang tersedia	5 Lt/dtk	
678.				77 Pembangunan jaringan air bersih di kab Asmat									
					Jumlah debit air bersih yang tersedia	2.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.1.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	1.03.03.1.01.04 - Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah debit air bersih yang tersedia	5 Lt/dtk	
679.				78 Pembangunan jaringan air bersih di kab Lani Jaya									
					Jumlah debit air bersih yang tersedia	2.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.1.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	1.03.03.1.01.04 - Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah debit air bersih yang tersedia	5 Lt/dtk	
680.				79 Pembangunan jaringan air bersih di kab Pegunungan Bintang									
					Jumlah debit air bersih yang tersedia	2.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.1.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	1.03.03.1.01.04 - Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah debit air bersih yang tersedia	5 Lt/dtk	
681.				94 Penyusunan DED Air Bersih di Provinsi Papua									
					Jumlah dokumen perencanaan	3.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.1.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	1.03.03.1.01.01 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah dokumen perencanaan	29 Dokumen	
682.				95 Masterplan Drainase Perkotaan di Provinsi Papua									
					Jumlah dokumen Masterplan	2.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.1.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	1.03.03.1.01.01 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah dokumen Masterplan	29 Dokumen	
683.				97 Pembangunan Jaringan Air Bersih di Kabupaten Jayapura									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Jumlah debit air bersih	5.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.1.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	1.03.03.1.01.04 - Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah debit air bersih	5 Lt/dtk	
684.				98 Pembangunan Jaringan Air Bersih di Kota Jayapura									
					Jumlah debit air bersih	2.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.1.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	1.03.03.1.01.04 - Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah debit air bersih	5 Lt/dtk	
685.				99 Pembangunan Jaringan Air Bersih di Kabupaten Sarmi									
					Jumlah debit air bersih	2.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.1.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	1.03.03.1.01.04 - Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah debit air bersih	5 Lt/dtk	
686.				100 Pembangunan Jaringan Air Bersih di Kabupaten Keerom									
					Jumlah debit air bersih	2.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.1.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	1.03.03.1.01.04 - Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah debit air bersih	5 Lt/dtk	
687.				101 Pembangunan Jaringan Air Bersih di Kabupaten Mamberamo Raya									
					Jumlah debit air bersih	2.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.1.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	1.03.03.1.01.04 - Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah debit air bersih	2 Lt/dtk	
688.				102 Pembangunan Jaringan Air Bersih di Kabupaten Biak Numfor									
					Jumlah debit air bersih	2.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.1.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	1.03.03.1.01.04 - Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah debit air bersih	2 Lt/dtk	
689.				103 Pembangunan Jaringan Air Bersih di Kabupaten Supiori									
					Jumlah debit air bersih	2.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.1.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	1.03.03.1.01.04 - Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah debit air bersih	5 Lt/dtk	
690.				104 Pembangunan Jaringan Air Bersih di Kabupaten Waropen									
					Jumlah debit air bersih	2.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.1.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	1.03.03.1.01.04 - Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah debit air bersih	5 Lt/dtk	
691.				105 Pembangunan Jaringan Air Bersih di Kabupaten Kep. Yapen									
					Jumlah debit air bersih	2.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.1.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	1.03.03.1.01.04 - Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah debit air bersih	5 Lt/dtk	
692.				106 Pembangunan Jaringan Air Bersih di Kabupaten Nabire									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Jumlah debit air bersih	2.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.1.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	1.03.03.1.01.04 - Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah debit air bersih	5 Lt/dtk	
693.				107 Pembangunan Jaringan Air Bersih di Kabupaten Paniai									
					Jumlah debit air bersih	2.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.1.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	1.03.03.1.01.04 - Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah debit air bersih	5 Lt/dtk	
694.				108 Pembangunan Jaringan Air Bersih di Kabupaten Deiyai									
					Jumlah debit air bersih	2.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.1.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	1.03.03.1.01.04 - Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah debit air bersih	5 Lt/dtk	
695.				109 Pembangunan Jaringan Air Bersih di Kabupaten Dogiyai									
					Jumlah debit air bersih	2.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.1.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	1.03.03.1.01.04 - Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah debit air bersih	2 Lt/dtk	
696.				110 Pembangunan Jaringan Air Bersih di Kabupaten Intan Jaya									
					Jumlah debit air bersih	2.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.1.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	1.03.03.1.01.04 - Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah debit air bersih	5 Lt/dtk	
697.				111 Pembangunan Jaringan Air Bersih di Kabupaten Jayawijaya									
					Jumlah debit air bersih	2.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.1.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	1.03.03.1.01.04 - Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah debit air bersih	5 Lt/dtk	
698.				112 Pembangunan Jaringan Air Bersih di Kabupaten Tolikara									
					Jumlah debit air bersih	2.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.1.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	1.03.03.1.01.04 - Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah debit air bersih	5 Lt/dtk	
699.				113 Pembangunan Jaringan Air Bersih di Kabupaten Lanny Jaya									
					Jumlah debit air bersih	2.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.1.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	1.03.03.1.01.04 - Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah debit air bersih	5 Lt/dtk	
700.				114 Pembangunan Jaringan Air Bersih di Kabupaten Yalimo									
					Jumlah debit air bersih	2.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.1.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	1.03.03.1.01.04 - Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah debit air bersih	5 Lt/dtk	
701.				115 Pembangunan Jaringan Air Bersih di Kabupaten Mamberamo Tengah									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Jumlah debit air bersih	2.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.1.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	1.03.03.1.01.04 - Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah debit air bersih	5 Lt/dtk	
702.				116 Pembangunan Jaringan Air Bersih di Kabupaten Nduga									
					Jumlah debit air bersih	2.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.1.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	1.03.03.1.01.04 - Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah debit air bersih	5 Lt/dtk	
703.				117 Pembangunan Jaringan Air Bersih di Kabupaten Puncak									
					Jumlah debit air bersih	2.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.1.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	1.03.03.1.01.04 - Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah debit air bersih	5 Lt/dtk	
704.				118 Pembangunan Jaringan Air Bersih di Kabupaten Puncak Jaya									
					Jumlah debit air bersih	2.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.1.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	1.03.03.1.01.04 - Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah debit air bersih	5 Lt/dtk	
705.				119 Pembangunan Jaringan Air Bersih di Kabupaten Yahukimo									
					Jumlah debit air bersih	2.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.1.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	1.03.03.1.01.04 - Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah debit air bersih	5 Lt/dtk	
706.				120 Pembangunan Jaringan Air Bersih di Kabupaten Mimika									
					Jumlah debit air bersih	2.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.1.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	1.03.03.1.01.04 - Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah debit air bersih	5 Lt/dtk	
707.				121 Pembangunan Jaringan Air Bersih di Kabupaten Asmat									
					Jumlah debit air bersih	2.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.1.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	1.03.03.1.01.04 - Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah debit air bersih	5 Lt/dtk	
708.				122 Pembangunan Jaringan Air Bersih di Kabupaten Boven Digoel									
					Jumlah debit air bersih	2.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.1.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	1.03.03.1.01.04 - Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah debit air bersih	5 Lt/dtk	
709.				123 Pembangunan Jaringan Air Bersih di Kabupaten Mappi									
					Jumlah debit air bersih	2.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.1.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	1.03.03.1.01.04 - Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah debit air bersih	5 Lt/dtk	
710.				124 Pembangunan Jaringan Air Bersih di Kabupaten Peg. Bintang									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Jumlah debit air bersih	2.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.1.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	1.03.03.1.01.04 - Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah debit air bersih	5 Lt/dtk	
711.				125 Pembangunan Jaringan Air Bersih di Kabupaten Merauke									
					Jumlah debit air bersih	2.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.1.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	1.03.03.1.01.04 - Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah debit air bersih	5 Lt/dtk	
712.				126 Pembangunan Jaringan Air Bersih di Lokasi Vanue PON									
					Jumlah debit air bersih	2.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.1.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	1.03.03.1.01.04 - Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah debit air bersih	5 Lt/dtk	
713.				127 Pembangunan Jaringan Air Bersih Jayatani									
					Jumlah debit air bersih	0,00						0 Lt/dtk	
714.				128 Review RI-SPAM Kabupaten Biak Numfor									
					Tersusunnya Dokumen RI-SPAM	0,00						0 Dokumen	
715.				129 Review RI-SPAM Kabupaten Dogiyai									
					Tersusunnya Dokumen RI-SPAM	0,00						0 Dokumen	
716.				130 Review RI-SPAM Kabupaten Lanny Jaya									
					Tersusunnya Dokumen RI-SPAM	0,00						0 Dokumen	
717.				131 Review RI-SPAM Kabupaten Mamberamo Raya									
					Tersusunnya Dokumen RI-SPAM	0,00						0 Dokumen	
718.				132 Review RI-SPAM Kabupaten Mimika									
					Tersusunnya Dokumen RI-SPAM	0,00						0 Dokumen	
719.				133 Review RI-SPAM Kabupaten Paniai									
					Tersusunnya Dokumen RI-SPAM	0,00						0 Dokumen	
720.				135 Review RI-SPAM Kabupaten Pegunungan Bintang									
					Tersusunnya Dokumen RI-SPAM	0,00						0 Dokumen	
721.				136 Review RI-SPAM Kabupaten Puncak									
					Tersusunnya Dokumen RI-SPAM	0,00						0 Dokumen	
722.				137 Review RI-SPAM Kabupaten Yalimo									
					Tersusunnya Dokumen RI-SPAM	0,00						0 Dokumen	
723.				138 Pembangunan Jaringan Air Bersih di Prov. Papua									
					--	0,00						0 liter/detik	
724.				170 Penyusunan Dokumen Perencanaan TEKNIS Pembangunan Jaringan Air Bersih (SPAM) di Provinsi Papua									
					Jumlah dokumen	3.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.1.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	1.03.03.1.01.01 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah dokumen	29 Dokumen	

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
725.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	27 Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Cakupan keterlayanan air bersih; Persentase Rumah Tangga dengan Fasilitas Tempat Buang Air Besa; Persentase penduduk yang memperoleh kebutuhan air minum; Persentase penduduk yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	171 Perencanaan Teknis Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi di Provinsi Papua									
					Jumlah dokumen	2.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1.03.05.1.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	1.03.05.1.01.01 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah dokumen	29 Dokumen	
726.				172 Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi di Provinsi Papua									
					Jumlah rumah yang memiliki sanitasi	5.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1.03.05.1.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	1.03.05.1.01.10 - Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah rumah yang memiliki sanitasi	150 KK	
727.				173 Pembangunan dan Peningkatan TPA di Kabupaten Mimika									
					Terbangunnya TPA	0,00						0 Unit	
728.				174 Penyusunan dokumen perencanaan teknis pembangunan MCK di Provinsi Papua									
					Jumlah dokumen	0,00						0 Dokumen	
729.				175 Pembangunan MCK di Provinsi Papua (Kabupaten Lokasi PON)									
					MCK yang terbangun	0,00						0 Unit	
730.				176 Penanganan Persampahan di Provinsi Papua (Kabupaten Lokasi PON)									
					Jumlah sampah yang tertangani	2.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	1.03.04.1.01 - Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	1.03.04.1.01.06 - Penyediaan Sarana Dan Prasarana Persampahan	Jumlah sampah yang tertangani	30 Unit	
731.				177 Penyusunan dokumen Data Base Layanan Air Bersih di Provinsi Papua									
					Jumlah dokumen	7.000.000.000,00						Jumlah dokumen	1 Laporan
732.				178 Pembangunan Jaringan Air Bersih Hamadi Gunung - Tasangka									
					Volume debit air yang dihasilkan	3.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.1.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	1.03.03.1.01.03 - Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	Volume debit air yang dihasilkan	2 Lt/dtk	
733.				179 Pembangunan Jaringan Air Bersih Gereja GIDI Milinikime Pasir II									
					Volume debit air yang dihasilkan	3.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.1.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	1.03.03.1.01.03 - Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	Volume debit air yang dihasilkan	6 Lt/dtk	
734.				180 Pembangunan Jaringan Air Bersih Buper Dalam Kota Jayapura									
					Volume debit air yang dihasilkan	3.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.1.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	1.03.03.1.01.03 - Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	Volume debit air yang dihasilkan	3 Lt/dtk	

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
735.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	27 Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Cakupan keterlayanan air bersih; Persentase Rumah Tangga dengan Fasilitas Tempat Buang Air Besa; Persentase penduduk yang memperoleh kebutuhan air minum; Persentase penduduk yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	181 Pembangunan Jaringan Air Bersih Distrik Bewani									
					Volume debit air yang dihasilkan	4.500.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.1.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	1.03.03.1.01.03 - Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	Volume debit air yang dihasilkan	5 Lt/dtk	
736.				182 Pembangunan Jaringan Air Bersih Bokondini									
					Volume debit air yang dihasilkan	4.500.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.1.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	1.03.03.1.01.03 - Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	Volume debit air yang dihasilkan	5 Lt/dtk	
737.				183 Pembangunan Jaringan Air Bersih Gilibin Mamit									
					Volume debit air yang dihasilkan	4.700.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.1.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	1.03.03.1.01.03 - Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	Volume debit air yang dihasilkan	5 Lt/dtk	
738.				184 Pembangunan Jaringan Air Bersih Kp Ampimoi									
					Volume debit air yang dihasilkan	3.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.1.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	1.03.03.1.01.03 - Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	Volume debit air yang dihasilkan	5 Lt/dtk	
739.				185 Pembangunan Jaringan Air Bersih Kp Randawaya									
					Volume debit air yang dihasilkan	3.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.1.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	1.03.03.1.01.03 - Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	Volume debit air yang dihasilkan	5 Lt/dtk	
740.				186 Pembangunan Jaringan Air Bersih Kp Waita									
					Volume debit air yang dihasilkan	3.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.1.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	1.03.03.1.01.03 - Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	Volume debit air yang dihasilkan	5 Lt/dtk	
741.				187 Pembangunan Jaringan Air Bersih Buper Waena Kota Jayapura									
					Volume debit air yang dihasilkan	3.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.1.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	1.03.03.1.01.03 - Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	Volume debit air yang dihasilkan	5 Lt/dtk	
742.				188 Pembangunan Jaringan Air Bersih Angkasa Kota Jayapura									
					Volume debit air yang dihasilkan	3.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.1.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	1.03.03.1.01.03 - Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	Volume debit air yang dihasilkan	5 Lt/dtk	
743.				189 Pembangunan Jaringan Air Bersih Goa Maria Buper Waena									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Volume debit air yang dihasilkan	1.200.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.1.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	1.03.03.1.01.03 - Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	Volume debit air yang dihasilkan	5 Lt/dtk	
744.				190 Pembangunan Jaringan Air Bersih Hamadi Gunung									
					Volume debit air yang dihasilkan	3.200.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.1.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	1.03.03.1.01.03 - Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	Volume debit air yang dihasilkan	5 Lt/dtk	
745.				191 Pembangunan Jaringan Air Bersih di Dok IX Gereja Kasih Abua									
					Volume debit air yang dihasilkan	2.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.1.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	1.03.03.1.01.03 - Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	Volume debit air yang dihasilkan	5 Lt/dtk	
746.				192 Pembangunan Jaringan Air Bersih Koya Koso									
					Volume debit air yang dihasilkan	2.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.1.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	1.03.03.1.01.03 - Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	Volume debit air yang dihasilkan	5 Lt/dtk	
747.				193 Pembangunan Jaringan Air Bersih Pasir II									
					Volume debit air yang dihasilkan	2.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.1.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	1.03.03.1.01.03 - Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	Volume debit air yang dihasilkan	5 Lt/dtk	
748.				194 Pembangunan Jaringan Air Bersih Gereja GIDI EDEN Entrop									
					Terbangunnya jaringan air	2.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.1.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	1.03.03.1.01.03 - Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	Terbangunnya jaringan air	5 Ltr	
749.				195 Penyediaan Air Bersih Rumah Susun di Belakang STT I.S Kinjite									
					tersedianya air bersih rumah susun	2.200.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.1.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	1.03.03.1.01.03 - Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	tersedianya air bersih rumah susun	5 Ltr	
750.		28 Program pengendalian banjir	Cakupan kawasan rawan abrasi yang tertangani; Cakupan kawasan rawan banjir yang tertangani	1 Pembangunan reservoir pengendali banjir									
					Jumlah reservoir yang terbangun	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.12 - Pembangunan Kanal Banjir	Jumlah reservoir yang terbangun	1 Unit	
751.				2 Rehabilitasi/pemeliharaan reservoir pengendali banjir									
752.				3 Rehabilitasi/pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai									
753.				4 Pengembangan pengelolaan daerah rawa dalam rangka pengendali banjir									
754.				5 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan banjir									
755.				6 Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
756.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	28 Program pengendalian banjir	Cakupan kawasan rawan abrasi yang tertangani; Cakupan kawasan rawan banjir yang tertangani	7 Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali									
757.				8 Peningkatan pembangunan pusat-pusat pengendali banjir									
758.				9 Pembangunan prasarana pengaman pantai									
					Panjang pengaman pantai yang terbangun	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.18 - Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang pengaman pantai yang terbangun	100 M'	
759.				10 Pembangunan tanggul pemecah ombak									
760.				11 Monitoring, evaluasi dan pelaporan									
761.				12 Pengendalian Banjir Sungai Tami Kab. Keerom									
					Panjang sungai yang ditangani	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.12 - Pembangunan Kanal Banjir	Panjang sungai yang ditangani	100 M	
					Laporan	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.12 - Pembangunan Kanal Banjir	Laporan	100 Laporan	
762.				13 Pembangunan Pengamanan Pantai Kurudu Kep. Yapen									
					Panjang talud pengaman pantai yang terbangun	5.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.18 - Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang talud pengaman pantai yang terbangun	2000 M	
					Laporan hasil talud pengaman pantai yang terbangun	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.18 - Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Laporan hasil talud pengaman pantai yang terbangun	2000 Laporan	
763.				14 Pembangunan Pengaman Pantai MAF Kabupaten Nabire									
					Panjang talud pengaman pantai yang terbangun	10.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.18 - Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang talud pengaman pantai yang terbangun	800 M	
					Laporan hasil talud pengaman pantai yang terbangun	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.18 - Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Laporan hasil talud pengaman pantai yang terbangun	1 Laporan	
764.				15 Study dan DED Pengaman Pantai Distrik Waropen bawah									
					Dokumen hasil study dan DED pengaman pantai	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.03 - Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Dokumen hasil study dan DED pengaman pantai	1 Dokumen	
765.				16 Study dan DED Normalisasi Sungai Ruambak									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Dokumen hasil study dan DED pengaman pantai	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.03 - Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Dokumen hasil study dan DED pengaman pantai	1 Dokumen	
766.				17 Pengendalian Banjir Arso IV									
					Volume Pasangan Batu yang Terpasang	2.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.37 - Peningkatan Kanal Banjir	Volume Pasangan Batu yang Terpasang	800 M3	
					Laporan hasil Sungai Yang di Normalisasi	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.37 - Peningkatan Kanal Banjir	Laporan hasil Sungai Yang di Normalisasi	800 Laporan	
767.				18 Pembangunan Pengaman Pantai Pasir Hitam Kabupaten Kepulauan Yapen									
					Panjang talud pengaman pantai yang terbangun	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.18 - Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang talud pengaman pantai yang terbangun	0 M	
					Laporan hasil talud pengaman pantai yang terbangun	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.18 - Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Laporan hasil talud pengaman pantai yang terbangun	0 Laporan	
768.				19 Perencanaan Pengendalian banjir									
					Jumlah Dokumen	10.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.03 - Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Jumlah Dokumen	13 Dokumen	
769.				20 Pembangunan prasarana pengendali banjir									
					Volume Bangunan Pengendali Sedimen	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.37 - Peningkatan Kanal Banjir	Volume Bangunan Pengendali Sedimen	800 M3	
770.				21 Pembangunan Pengendali Banjir Sungai Uwe									
					Panjang Talud yang dibangun	30.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.12 - Pembangunan Kanal Banjir	Panjang Talud yang dibangun	1500 Meter	
771.				22 Pembangunan Pengendali Banjir Sungai Bello									
					Panjang Talud yang dibangun	20.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.12 - Pembangunan Kanal Banjir	Panjang Talud yang dibangun	1500 Meter	
772.				23 Pembangunan Pengendali Banjir Kali Entrop									
					Panjang Talud yang dibangun	2.500.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.12 - Pembangunan Kanal Banjir	Panjang Talud yang dibangun	500 Meter	

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
773.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	28 Program pengendalian banjir	Cakupan kawasan rawan abrasi yang tertangani; Cakupan kawasan rawan banjir yang tertangani	24 Normalisasi Sungai Pasar Sentral SP.1									
					Panjang Sungai Yang di Normalisasi	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.46 - Normalisasi/Restorasi/Pemeliharaan Sungai	Panjang Sungai Yang di Normalisasi	1000 Meter	
774.				25 Normalisasi Sungai Lanal SP.4									
					Panjang Sungai Yang di Normalisasi	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.46 - Normalisasi/Restorasi/Pemeliharaan Sungai	Panjang Sungai Yang di Normalisasi	55923 Meter	
775.				26 Normalisasi Sungai Pasar Lama - Kampung Nawaripi									
					Panjang Sungai Yang di Normalisasi	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.46 - Normalisasi/Restorasi/Pemeliharaan Sungai	Panjang Sungai Yang di Normalisasi	1249 Meter	
776.				27 Normalisasi Sungai Galang Sp.1									
					Panjang Sungai Yang di Normalisasi	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.46 - Normalisasi/Restorasi/Pemeliharaan Sungai	Panjang Sungai Yang di Normalisasi	1720 Meter	
777.				28 Normalisasi Banjir Arso X									
					Panjang Sungai Yang di Normalisasi	5.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.46 - Normalisasi/Restorasi/Pemeliharaan Sungai	Panjang Sungai Yang di Normalisasi	1000 Meter	
778.				29 Normalisasi Sungai Depan DPR - Jl. Hasanudin									
					Panjang Sungai Yang di Normalisasi	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.46 - Normalisasi/Restorasi/Pemeliharaan Sungai	Panjang Sungai Yang di Normalisasi	1500 Meter	
779.				30 Pengendalian Banjir Arso 5 Kab. Keerom									
					Panjang Sungai Yang di Talud	5.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.12 - Pembangunan Kanal Banjir	Panjang Sungai Yang di Talud	800 Meter	
780.				31 Pengendalian Banjir Arso 7 Kab. Keerom									
					Panjang Sungai Yang di Talud	5.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.12 - Pembangunan Kanal Banjir	Panjang Sungai Yang di Talud	1000 Meter	
781.				32 Pengendalian Banjir Kalibobo Kab. Nabire									
					Panjang Sungai Yang di Talud	15.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.12 - Pembangunan Kanal Banjir	Panjang Sungai Yang di Talud	500 Meter	
782.				33 Pengendalian Banjir dan Normalisasi Sungai di Provinsi Papua (Gel)									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Panjang Sungai Yang di Talud dan Drainase	10.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.46 - Normalisasi/Restorasi/Pemeliharaan Sungai	Panjang Sungai Yang di Talud dan Drainase	50000 Meter	
783.				34 Pembangunan Pengaman Pantai Paradoi									
					Panjang Pengaman Pantai	10.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.18 - Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Pengaman Pantai	800 Meter	
784.				35 Pembangunan Pengaman Pantai Mambui									
					Panjang Pengaman Pantai	10.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.18 - Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Pengaman Pantai	700 Meter	
785.				36 Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai Kab. Biak Numfor									
					Panjang Pengaman Pantai	20.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.18 - Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Pengaman Pantai	1000 Meter	
786.				37 Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai Kab. Yapen									
					Panjang Pengaman Pantai	10.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.18 - Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Pengaman Pantai	500 Meter	
787.				38 Perencanaan Pembangunan Pengaman Pantai									
					Jumlah Dokumen Perencanaan	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.03 - Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Jumlah Dokumen Perencanaan	13 Dokumen	
788.				39 Pembangunan Prasarana Pengendali Banjir Makuay (Mendukung PON)									
					Volume Pasangan Batu yang Terpasang	10.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.27 - Rehabilitasi Kanal Banjir	Volume Pasangan Batu yang Terpasang	600 M3	
789.				40 Pembangunan Prasarana Pengendali Banjir Otonom Kota Jayapura (Mendukung PON)									
					Volume Pasangan Batu yang Terpasang	3.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.18 - Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Volume Pasangan Batu yang Terpasang	200 M3	
790.				64 Normalisasi Kali Holima									
					Panjang Sungai Yang di Normalisasi	10.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.46 - Normalisasi/Restorasi/Pemeliharaan Sungai	Panjang Sungai Yang di Normalisasi	200 Meter	
791.				65 Normalisasi Kali Kulagaima									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Panjang Sungai Yang di Normalisasi	10.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.46 - Normalisasi/Restorasi/Pemeliharaan Sungai	Panjang Sungai Yang di Normalisasi	200 Meter	
792.				66 Pembangunan Pengaman Pantai Waren 1									
					Panjang talud pengaman pantai yang terbangun	10.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.18 - Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang talud pengaman pantai yang terbangun	200 M	
793.				67 Pembangunan Pengaman Pantai Mambui									
					Panjang talud pengaman pantai yang terbangun	10.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.18 - Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang talud pengaman pantai yang terbangun	200 M	
794.				68 Pembangunan Pengaman Pantai Paradoi									
					Panjang talud pengaman pantai yang terbangun	10.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.18 - Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang talud pengaman pantai yang terbangun	200 M	
795.				69 Pembangunan Pengaman Pantai Nubuai									
					Panjang talud pengaman pantai yang terbangun	10.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.18 - Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang talud pengaman pantai yang terbangun	200 M	
796.				70 Pembangunan Pengaman Pantai Pulau Nau									
					Panjang talud pengaman pantai yang terbangun	10.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.18 - Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang talud pengaman pantai yang terbangun	200 M	
797.				74 Normalisasi Banjir Kali Tami									
					Volume bangunan air yang dibangun	52.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.46 - Normalisasi/Restorasi/Pemeliharaan Sungai	Panjang Sungai Kali Tami Yang di Normalisasi	10400 M3	
798.				77 Normalisasi Banjir Arso IV									
					Panjang Sungai Yang di Normalisasi	25.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.46 - Normalisasi/Restorasi/Pemeliharaan Sungai	Panjang Sungai Arso IV Yang di Normalisasi	5000 M3	
799.				78 Normalisasi Sungai Kp Karoai									
					Panjang Sungai Yang di Normalisasi	5.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.46 - Normalisasi/Restorasi/Pemeliharaan Sungai	Panjang Sungai Kp Karoai Yang di Normalisasi	300 M	
800.				79 Normalisasi Sungai Kp Waita									
					Panjang Sungai Yang di Normalisasi	7.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.46 - Normalisasi/Restorasi/Pemeliharaan Sungai	Panjang Sungai Kp Waita Yang di Normalisasi	500 M1	

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	28 Program pengendalian banjir	Cakupan kawasan rawan abrasi yang tertangani; Cakupan kawasan rawan banjir yang tertangani	80 Normalisasi Sungai Kp Randawaya									
					Panjang Sungai Yang di Normalisasi	7.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.46 - Normalisasi/Restorasi/Pemeliharaan Sungai	Panjang Sungai Kp Randawaya yang di Normalisasi	500 M1	
802.				81 Normalisasi Kali Doyo Transat									
					Panjang Sungai Yang di Normalisasi	2.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.46 - Normalisasi/Restorasi/Pemeliharaan Sungai	Panjang Sungai Kali Doyo Transat Yang di Normalisasi	13333 M3	
803.				82 Pembangunan Pondasi Titik Depan Kantor Gubernur Papua									
					Panjang Pondasi titik yang terbangun	18.500.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.18 - Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Pondasi titik depan kantor Gubernur Papua yang terbangun	123333 M3	
804.				83 Pembangunan Pengendali Banjir SP 3 Mimika									
					Panjang pengendali banjir yang terbangun	8.500.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.12 - Pembangunan Kanal Banjir	Panjang pengendali banjir SP 3 Mimika yang terbangun	850 M3	
805.				84 Pembangunan Prasarana Pengendali Banjir di Kabupaten Mimika									
					Panjang prasarana pengendali banjir yang terbangun	8.500.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.12 - Pembangunan Kanal Banjir	Panjang prasarana pengendali banjir di Kabupaten Mimika yang terbangun	850 M3	
806.				85 Pembangunan Talud Pengaman Kampwolker									
					Panjang talud yang terbangun	18.500.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.12 - Pembangunan Kanal Banjir	Panjang talud pengaman Kampwolker yang terbangun	1850 M3	
807.				86 Pembangunan Pengendali Banjir Kali Ular Doyo Baru									
					Panjang pengendali kali yang terbangun	8.500.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.12 - Pembangunan Kanal Banjir	Panjang pengendali kali Ular Doyo Baru yang terbangun	850 M3	
808.				87 Pembangunan Talud Kali Biru Kotaraja dalam Belakang Kampus STIE OTTO GEISLER									
					Panjang talud kali yang terbangun	8.500.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.11 - Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Panjang talud kali Biru Kotaraja dalam Belakang STIE OTTO Geisler yang terbangun	850 M3	
809.				88 Pembangunan Bronjong Pengaman Kali Weluk (Mamit - Dou)									
					Panjang bronjong kali yang terbangun	5.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.11 - Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Panjang bronjong kali Weluk (Mamit - Dou) yang terbangun	200 M3	

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
810.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	28 Program pengendalian banjir	Cakupan kawasan rawan abrasi yang tertangani; Cakupan kawasan rawan banjir yang tertangani	89 Pembangunan Bronjong Pengaman Kali Meaga (Mamit - Dou)									
					Panjang bronjong kali yang terbangun	5.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.12 - Pembangunan Kanal Banjir	Panjang bronjong kali yang terbangun	200 M3	
811.				90 Pembangunan Bronjong Pengaman Kali Wora (Mamit - Dou)									
					Panjang bronjong kali yang terbangun	5.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.12 - Pembangunan Kanal Banjir	Panjang bronjong kali Wora (Mamit - Dou) yang terbangun	200 M3	
812.				91 Pembangunan Bronjong Pengaman Kali Jelogolo (Mamit - Dou)									
					Panjang bronjong kali yang terbangun	5.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.12 - Pembangunan Kanal Banjir	Panjang bronjong kali Jelogolo (Mamit - Dou) yang terbangun	200 M3	
813.				92 Pembangunan Bronjong Pengaman Kali Pagongga (Mamit - Dou)									
					Panjang bronjong kali yang terbangun	5.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.12 - Pembangunan Kanal Banjir	Panjang bronjong kali Pagongga (Mamit - Dou) yang terbangun	200 M3	
814.				93 Pembangunan Bronjong Pengaman Kali Kalarin (Mamit - Dou)									
					Panjang bronjong kali yang terbangun	5.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.12 - Pembangunan Kanal Banjir	Panjang bronjong kali Kalarin (Mamit - Dou) yang terbangun	200 M3	
815.				94 Pembangunan Bronjong Pengaman Kali Umagi (Mamit - Dou)									
					Panjang bronjong kali yang terbangun	5.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.12 - Pembangunan Kanal Banjir	Panjang bronjong Pengaman kali Umagi (Mamit - Dou) yang terbangun	200 M3	
816.				95 Pembangunan Bronjong Pengaman Kali Koge (Mamit - Dou)									
					Panjang bronjong kali yang terbangun	5.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.12 - Pembangunan Kanal Banjir	Panjang bronjong kali Koge (Mamit - Dou) yang terbangun	200 M3	
817.				96 Pembangunan Bronjong Pengaman Kali Ame (Mamit - Dou)									
					Panjang bronjong kali yang terbangun	5.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.12 - Pembangunan Kanal Banjir	Panjang bronjong kali Ame (Mamit - Dou) yang terbangun	200 M3	
818.				97 Pembangunan Talud Penahan Ombak Pantai Wisata Holtekam									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Panjang talud Pantai yang terbangun	10.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.18 - Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang talud Pantai Penahan Ombak Pantai Wisata Holtekam yang terbangun	400 M3	
819.				98 Pembangunan Pengaman Pantai Kp Ampimoi									
					Panjang Pengaman Pantai yang terbangun	5.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.18 - Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Pengaman Pantai Kp Ampimoi yang terbangun	200 M3	
820.				99 Pembangunan Pengaman Pantai Kp Karoai									
					Panjang Pengaman Pantai yang terbangun	5.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.18 - Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Pengaman Pantai Kp Karoai yang terbangun	200 M3	
821.				100 Pembangunan Pengaman Pantai di Kabupaten Supiori									
					Panjang Pengaman Pantai yang terbangun	5.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.18 - Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Pengaman Pantai di Kabupaten Supiori yang terbangun	200 M3	
822.				101 Pembangunan Pengendali Banjir WS Wapoga-Mimika									
					Terbangunnya Pengendali banjir	5.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.12 - Pembangunan Kanal Banjir	Terbangunnya Pengendali banjir WS Wapoga - Mimika	200 M3	
823.				102 Pembangunan Pengaman Pantai Kp Waita									
					Terbangunnya Pengaman pantai	6.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.18 - Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Terbangunnya Pengaman pantai Kp Waita yang terbangun	300 M1	
824.				103 Pemasangan Bronjong Kali Pagage Desa Ginidonak									
					Terpasangnya bronjong kali	3.600.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.12 - Pembangunan Kanal Banjir	Terpasangnya bronjong kali Pagage Desa Ginidonak	300 M3	
825.				104 Pembangunan Pengendalian Banjir Kali Kabur Koya									
					Terbangunnya Pengendali banjir	5.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.12 - Pembangunan Kanal Banjir	Terbangunnya Pengendali banjir Kali Kabur Koya	200 M3	
826.				105 Pembangunan Pengendalian Banjir Kali Kabur Skamto									
					Terbangunnya Pengendalian Banjir	5.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.12 - Pembangunan Kanal Banjir	Terbangunnya Pengendalian Banjir Kali Kabur Skamto	200 M3	
827.				106 Pembangunan Prasarana Banjir Kampung Asei Kecil									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Terbangunnya Prasaranan banjir	5.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.12 - Pembangunan Kanal Banjir	Terbangunnya Prasaranan banjir Kampung Asei Kecil	200 M3	
828.				107 OP Sungai WS Kewenangan Provinsi Papua									
					Panjang talud pengaman sungai yang terbangun	1.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.54 - Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir	Panjang talud pengaman sungai WS Kewenangan Provinsi Papua yang terbangun	200 M2	
829.		29 Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Cakupan wilayah strategis dan cepat tumbuh yang dikembangkan	1 Perencanaan pengembangan infrastruktur									
830.				2 Pembangunan/peningkatan infrastruktur									
831.				3 Monitoring, evaluasi dan pelaporan									
832.				4 Pengelolaan Situs Web dan Penyebarluasan informasi Publik									
					Jumlah laporan Sistem Informasi Berbasis Web Base Yang Saling Terintegrasi	1.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	1.03.11.1.02 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	1.03.11.1.02.01 - Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah laporan Sistem Informasi Berbasis Web Base Yang Saling Terintegrasi	1 Laporan	
833.				5 Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Permukiman Kumuh Perkotaan (RPPKPKP) Kabupaten Sarmi									
					Dokumen hasil perencanaan RPPKPKP	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.03.07.1.01 - Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	1.03.07.1.01.01 - Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Dokumen hasil perencanaan RPPKPKP	1 Dokumen	
834.				6 Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Permukiman Kumuh Perkotaan (RPPKPKP) Kabupaten Waropen									
					Dokumen hasil perencanaan RPPKPKP	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.03.07.1.01 - Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	1.03.07.1.01.01 - Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Dokumen hasil perencanaan RPPKPKP	1 Dokumen	
835.				7 Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Permukiman Kumuh Perkotaan (RPPKPKP) Kabupaten Supiori									
					Dokumen hasil perencanaan RPPKPKP	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.03.07.1.01 - Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	1.03.07.1.01.01 - Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Dokumen hasil perencanaan RPPKPKP	1 Dokumen	
836.				8 Perencanaan Jalan Lingkungan Perumahan Graha Yotefa kelurahan Waena Distrik Heram									
					Dokumen hasil perencanaan jalan lingkungan	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.03.07.1.01 - Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	1.03.07.1.01.01 - Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Dokumen hasil perencanaan jalan lingkungan	1 Dokumen	
837.				9 Perencanaan Jalan Lingkungan Perumahan Graha Yotefa kelurahan Waena Distrik Heram									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
838.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	29 Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Cakupan wilayah strategis dan cepat tumbuh yang dikembangkan	10 Perencanaan Jalan Lingkungan Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara									
					Dokumen hasil perencanaan jalan lingkungan	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.03.07.1.01 - Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	1.03.07.1.01.01 - Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Dokumen hasil perencanaan jalan lingkungan	1 Dokumen	
839.				11 Perencanaan Jalan Lingkungan Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan									
					Dokumen hasil perencanaan jalan lingkungan	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.03.07.1.01 - Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	1.03.07.1.01.01 - Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Dokumen hasil perencanaan jalan lingkungan	1 Dokumen	
840.				12 Perencanaan Teknis Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Provinsi Papua									
					Dokumen hasil perencanaan RTH	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.03.07.1.01 - Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	1.03.07.1.01.01 - Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Dokumen hasil perencanaan RTH	1 Dokumen	
841.				13 Perencanaan Peningkatan Jalan lingkungan Jl Belut Expo Waena Kota Jayapura									
					Dokumen hasil perencanaan jalan lingkungan	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.03.07.1.01 - Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	1.03.07.1.01.01 - Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Dokumen hasil perencanaan jalan lingkungan	1 Dokumen	
842.				14 Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase Jl. Belut Expo Waena Kota Jayapura									
843.				15 Pembangunan Jalan Lingkungan Jalan Basarnas Asmat									
					Dokumen hasil perencanaan jalan lingkungan	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.03.07.1.01 - Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	1.03.07.1.01.01 - Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Dokumen hasil perencanaan jalan lingkungan	1 Dokumen	
					Panjang jalan lingkungan yang terbangun	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.03.07.1.01 - Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	1.03.07.1.01.01 - Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Panjang jalan lingkungan yang terbangun	100 M	
844.				16 Pembangunan Jalan Lingkungan Jalan YKPA 2 Asmat									
					Panjang jalan lingkungan yang terbangun	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.03.07.1.01 - Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	1.03.07.1.01.01 - Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Panjang jalan lingkungan yang terbangun	100 M	

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
845.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	29 Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Cakupan wilayah strategis dan cepat tumbuh yang dikembangkan	17 Pembangunan Jalan Lingkungan Perumahan Graha Yotefa Kelurahan Waena Distrik Heram									
					Panjang jalan lingkungan yang terbangun	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.03.07.1.01 - Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	1.03.07.1.01.01 - Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Panjang jalan lingkungan yang terbangun	100 M	
846.				18 Pembangunan Jalan Lingkungan Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara									
					Panjang jalan lingkungan yang terbangun	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.03.07.1.01 - Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	1.03.07.1.01.01 - Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Panjang jalan lingkungan yang terbangun	100 M	
847.				19 Pembangunan Jalan Lingkungan Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan									
					Panjang jalan lingkungan yang terbangun	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.03.07.1.01 - Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	1.03.07.1.01.01 - Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Panjang jalan lingkungan yang terbangun	100 M	
848.				20 Peningkatan Jalan lingkungan Jl Belut Expo Waena Kota Jayapura									
					Panjang jalan lingkungan yang terbangun	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.03.07.1.01 - Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	1.03.07.1.01.01 - Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Panjang jalan lingkungan yang terbangun	100 M	
849.				21 Perencanaan Gedung Gereja Kristen Nazarene Jemaat Nehemia di Kota Jayapura									
					Dokumen hasil perencanaan gedung	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.03.07.1.01 - Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	1.03.07.1.01.01 - Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Dokumen hasil perencanaan gedung	1 Dokumen	
850.				22 Pembangunan Fasilitas Lapangan Olahraga Mandala									
					Terbangunnya Fasilitas Olah Raga	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	1.03.08.1.01 - Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	1.03.08.1.01.01 - Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Terbangunnya Fasilitas Olah Raga	200 M2	
851.				23 Penataan Kawasan Wisata Pantai Dok II Kota Jayapura									
					Luas Kawasan Permukiman yang Terbangun	0,00						0 M2	
852.				24 Penataan Kawasan Wisata Pantai Hamadi & Jemb. Holtekamp									
					Luas Kawasan Permukiman yang Terbangun	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.03.07.1.01 - Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	1.03.07.1.01.01 - Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Luas Kawasan Permukiman yang Terbangun	0 M2	
853.				25 Penataan Kawasan Wisata Pantai Base-G Kota Jayapura.									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Luas Kawasan Permukiman yang Terbangun	5.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.03.07.1.01 - Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	1.03.07.1.01.01 - Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Luas Kawasan Permukiman yang Terbangun	5000 M2	
854.				26 Pemeliharaan Sarana Prasarana Lapangan Olahraga Mandala									
					Pemeliharaan Stadion Mandala Jayapura	1.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.03.07.1.01 - Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	1.03.07.1.01.01 - Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Pemeliharaan Stadion Mandala Jayapura	2500 M2	
855.				27 Penataan Kawasan Patung Tuhan Yesus									
					Luas area Penataan Kawasan Patung Yesus	5.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.03.07.1.01 - Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	1.03.07.1.01.01 - Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Luas area Penataan Kawasan Patung Yesus	1010000 M2	
856.				28 Penataan Kawasan Kampung Harapan									
					Luas Kawasan Permukiman yang Terbangun	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.03.07.1.01 - Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	1.03.07.1.01.01 - Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Luas Kawasan Permukiman yang Terbangun	1000 M2	
857.				29 Pembangunan Patung Tuhan Yesus									
					Jumlah Patung yang terbangun	100.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	1.03.09.1.01 - Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.09.1.01.03 - Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Patung yang terbangun	1 Unit	
858.				30 Pembangunan Kawasan Sekolah Alkitab Mamit									
					Kawasan Sekolah Alkitab yang terbangun	10.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	1.03.09.1.01 - Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.09.1.01.03 - Penataan Bangunan dan Lingkungan	Kawasan Sekolah Alkitab yang terbangun	5000 M2	
859.				31 Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh (KOTAKU) di 11 Kelurahan									
					Luas Kawasan Permukiman yang ditingkatkan	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.03.07.1.01 - Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	1.03.07.1.01.01 - Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Luas Kawasan Permukiman yang ditingkatkan	1000 M2	
860.				32 Penataan Tugu Kristus di Kab Mimika									
					Luas Kawasan Tugu Kristus yang Terbangun	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.03.07.1.01 - Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	1.03.07.1.01.01 - Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Luas Kawasan Tugu Kristus yang Terbangun	0 M2	
861.				33 Pembangunan Tugu Kiwi di Kab Pegunungan Bintang									
					Luas Kawasan Tugu Kiwi yang Terbangun	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.03.07.1.01 - Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	1.03.07.1.01.01 - Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Luas Kawasan Tugu Kiwi yang Terbangun	0 M2	
862.				34 Pematangan Lahan Kawasan Rumah Sakit Dogiyai									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Luas Lahan yang Terbuka	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.03.07.1.01 - Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	1.03.07.1.01.01 - Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Luas Lahan yang Terbuka	85 Ha	
863.				35 Penataan Kampung Nelayan Mandala									
					Luas Kawasan Kampung Nelayan yang Terbangun	3.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.03.07.1.01 - Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	1.03.07.1.01.01 - Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Luas Kawasan Kampung Nelayan yang Terbangun	200 M2	
864.				36 Informasi Pembangunan Bidang ke-PU-an Melalui Media Cetak dan Elektronik									
					Tersiarinya Informasi Pembangunan Infrastruktur ke-PU-an	1.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	1.03.11.1.02 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	1.03.11.1.02.05 - Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi	Tersiarinya Informasi Pembangunan Infrastruktur ke-PU-an	2 Media	
865.				37 Penataan Kawasan Wisata di Kabupaten Jayapura									
					Luas Kawasan yang di tata	10.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.03.07.1.01 - Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	1.03.07.1.01.01 - Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Luas Kawasan yang di tata	5 Ha	
866.				38 Penataan Kawasan Wisata di Kabupaten Mimika (menunjang PON)									
					Luas Kawasan Wisata yang di tata	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.03.07.1.01 - Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	1.03.07.1.01.01 - Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Luas Kawasan Wisata yang di tata	10 Ha	
867.				39 Penataan Kawasan Wisata di Kabupaten Merauke									
					Luas Kawasan yang di tata	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.03.07.1.01 - Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	1.03.07.1.01.01 - Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Luas Kawasan yang di tata	10 Ha	
868.				40 Penataan Kawasan Wisata di Kabupaten Jayawijaya									
					Luasan Kawasan Wisata yang di tata	10.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.03.07.1.01 - Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	1.03.07.1.01.01 - Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Luasan Kawasan Wisata yang di tata	10 Ha	
869.				41 Penataan Kawasan Wisata di Kabupaten Biak Numfor									
					Luas Kawasan yang ditata	10.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.03.07.1.01 - Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	1.03.07.1.01.01 - Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Luas Kawasan yang ditata	10 Ha	
870.				43 Rehabilitasi stadion katalpal									
					Luas Kawasan yang ditata	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.03.07.1.01 - Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	1.03.07.1.01.01 - Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Luas Kawasan yang ditata	2 Ha	
871.				45 Penataan Kawasan Stadion Pendidikan Wamena									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Luas kawasan yang tertata	16.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.03.07.1.01 - Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	1.03.07.1.01.01 - Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Luas kawasan yang tertata	100 M2	
872.				56 Perencanaan Teknis Bidang KePUan									
					Jumlah Dokumen Perencanaan yang	0,00						0 Dokumen	
873.				61 Penataan Kawasan Wisata Mac Arthur									
					Luas Kawasan yang tertata	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.03.07.1.01 - Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	1.03.07.1.01.01 - Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Luas Kawasan yang tertata	1000 M2	
874.				62 Penataan Kawasan Pantai Segara Indah di Biak									
					Luas Kawasan yang tertata	15.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.03.07.1.01 - Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	1.03.07.1.01.01 - Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Luas Kawasan yang tertata	1000 M2	
875.				63 Penataan Kawasan Pantai Samares di Biak									
					Luas Kawasan yang tertata	15.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.03.07.1.01 - Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	1.03.07.1.01.01 - Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Luas Kawasan yang tertata	1000 M2	
876.				64 Penataan Kawasan Pantai Anggopi di Biak									
					Luas Kawasan yang tertata	18.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.03.07.1.01 - Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	1.03.07.1.01.01 - Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Luas Kawasan yang tertata	1000 M2	
877.				65 Penataan Kawasan/Sekitar Venue PON di Kota Jayapura									
					Luas Kawasan yang tertata	14.100.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.03.07.1.01 - Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	1.03.07.1.01.01 - Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Luas Kawasan yang tertata	1000 M2	
878.				66 Penataan Kawasan/Sekitar Venue PON di Kabupaten Jayapura									
					Luas Kawasan yang tertata	5.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.03.07.1.01 - Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	1.03.07.1.01.01 - Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Luas Kawasan yang tertata	1000 M2	
879.				67 Penataan Kawasan/Sekitar Venue PON di Kabupaten Keerom									
					Luas Kawasan yang tertata	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.03.07.1.01 - Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	1.03.07.1.01.01 - Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Luas Kawasan yang tertata	0 M2	
880.				68 Penataan Kawasan/Sekitar Venue PON di Kabupaten Jayawijaya									
881.				69 Penataan Kawasan/Sekitar Venue PON di Kabupaten Biak Numfor									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Luas Kawasan yang tertata	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.03.07.1.01 - Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	1.03.07.1.01.01 - Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Luas Kawasan yang tertata	1000 M2	
882.				70 Penataan Kawasan/Sekitar Venue PON di Kabupaten Yapen Serui									
					Luas Kawasan yang tertata	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.03.07.1.01 - Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	1.03.07.1.01.01 - Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Luas Kawasan yang tertata	1000 M2	
883.				71 Penataan Kawasan/Sekitar Venue PON di Kabupaten Supiori									
					Luas Kawasan yang tertata	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.03.07.1.01 - Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	1.03.07.1.01.01 - Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Luas Kawasan yang tertata	1000 M2	
884.				72 Penataan Kawasan/Sekitar Venue PON di Kabupaten Merauke									
					Luas Kawasan yang tertata	13.800.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.03.07.1.01 - Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	1.03.07.1.01.01 - Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Luas Kawasan yang tertata	1000 M2	
885.				73 Penataan Kawasan/Sekitar Venue PON di Kabupaten Tolikara									
					Luas Kawasan yang tertata	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.03.07.1.01 - Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	1.03.07.1.01.01 - Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Luas Kawasan yang tertata	1000 M2	
886.				74 Penataan Kawasan Stadion Wainia SP 1 Kab Mimika									
					Luas Kawasan yang tertata	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.03.07.1.01 - Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	1.03.07.1.01.01 - Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Luas Kawasan yang tertata	1000 M2	
887.				75 Penataan Kawasan Parkir untuk Mimika Sport Centre dan Rumah Susun di Mimika									
					Luas Kawasan yang tertata	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.03.07.1.01 - Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	1.03.07.1.01.01 - Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Luas Kawasan yang tertata	1000 M2	
888.				76 Perencanaan Teknis Penataan Kawasan Lingkungan Fasilitas Umum Penduduk Perdesaan di Provinsi Papua									
					Jumlah Dokumen	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	1.03.08.1.01 - Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	1.03.08.1.01.01 - Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen	10 Dokumen	
889.				77 Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Penataan Kawasan Lingkungan Fasilitas Umum di Provinsi Papua									
					Jumlah Dokumen	3.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	1.03.08.1.01 - Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	1.03.08.1.01.01 - Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen	3 Dokumen	

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
890.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	29 Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Cakupan wilayah strategis dan cepat tumbuh yang dikembangkan	78 Penataan Kawasan Fasilitas Umum di Provinsi Papua									
					Luas Kawasan yang tertata	50.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	1.03.09.1.01 - Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.09.1.01.03 - Penataan Bangunan dan Lingkungan	Luas Kawasan yang tertata	40000 M2	
891.				79 Penataan Kawasan RSUD Dogiyai									
					Luas Kawasan yang tertata	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.03.07.1.01 - Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	1.03.07.1.01.01 - Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Luas Kawasan yang tertata	100 M2	
892.				80 Penataan Kawasan Sekolah Alkitab Ninia									
					Luas Kawasan yang tertata	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.03.07.1.01 - Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	1.03.07.1.01.01 - Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Luas Kawasan yang tertata	100 M2	
893.				81 Penataan Kawasan Sekolah Alkitab Mulia									
					Luas Kawasan yang tertata	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.03.07.1.01 - Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	1.03.07.1.01.01 - Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Luas Kawasan yang tertata	100 M2	
894.				82 Penataan Kawasan Gereja Gidi Betlehem Pasir II									
					Luas Kawasan yang tertata	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.03.07.1.01 - Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	1.03.07.1.01.01 - Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Luas Kawasan yang tertata	100 M2	
895.				83 Penataan Kawasan Gereja GIDI Walikota Jayapura									
					Luas Kawasan yang tertata	17.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.03.07.1.01 - Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	1.03.07.1.01.01 - Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Luas Kawasan yang tertata	1000 M2	
896.				84 Penataan Kawasan Gereja Baptis Kehiran Sentani									
					Luas Kawasan yang tertata	3.500.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.03.07.1.01 - Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	1.03.07.1.01.01 - Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Luas Kawasan yang tertata	100 M2	
897.				85 Penataan Kawasan Gereja Baptis Skyline									
					Luas Kawasan yang tertata	3.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.03.07.1.01 - Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	1.03.07.1.01.01 - Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Luas Kawasan yang tertata	100 M2	
898.				86 Pembangunan Gedung Pasca Sarjana UNCEN									
					terbangunnya Gedung	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.03.07.1.01 - Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	1.03.07.1.01.01 - Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	terbangunnya Gedung	100 Unit	

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
899.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	29 Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Cakupan wilayah strategis dan cepat tumbuh yang dikembangkan	87 Survey Kondisi Kawasan Permukiman, Kawasan Wisata, Kawasan sekitar dan Kawasan Fasilitas Umum di Provinsi Papua									
					Tersusunnya laporan/dokumen Analisis kondisi kawasan permukiman dan kawasan wisata	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	1.03.11.1.02 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	1.03.11.1.02.04 - Penyusunan data dan informasi Proyek Bidang PUPR yang dapat Dilaksanakan dengan Skema KPBU	Tersusunnya laporan/dokumen Analisis kondisi kawasan permukiman dan kawasan wisata	10 Dokumen	
900.				90 Pemeliharaan Stadion Mandala dan Wisma Atlet									
					Luas lapangan parkir yang terbangun	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.03.07.1.01 - Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	1.03.07.1.01.02 - Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Luas lapangan parkir yang terbangun	100 M2	
901.				91 Penataan Kawasan Sekitar Stadion Katalpa Merauke									
					Kawasan yang tertata	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.03.07.1.01 - Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	1.03.07.1.01.01 - Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Kawasan yang tertata	100 M2	
902.				92 Penataan Kawasan Sekitar Venue Bermotor Merauke									
					Kawasan yang tertata	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.03.07.1.01 - Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	1.03.07.1.01.01 - Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Kawasan yang tertata	100 M2	
903.				93 Penataan Kawasan GOR Tinju Wamena									
					Kawasan yang tertata	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.03.07.1.01 - Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	1.03.07.1.01.01 - Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Kawasan yang tertata	100 M2	
904.				94 Penyusunan Dokumen Perencanaan Penataan Kawasan Wisata di Provinsi Papua									
					Jumlah Dokumen	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	1.03.08.1.01 - Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	1.03.08.1.01.01 - Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen	10 Dokumen	
905.				95 Penataan Kawasan Wisata di Kota Jayapura									
					Kawasan yang tertata	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.03.07.1.01 - Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	1.03.07.1.01.01 - Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Kawasan yang tertata	100 M2	
906.				96 Penataan Kawasan Wisata di Kabupaten Jayapura									
					Kawasan yang tertata	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.03.07.1.01 - Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	1.03.07.1.01.01 - Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Kawasan yang tertata	100 M2	
907.				97 Penataan Kawasan Wisata di Kabupaten Jayawijaya									
					Kawasan yang tertata	5.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.03.07.1.01 - Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	1.03.07.1.01.01 - Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Kawasan yang tertata	100 M2	
908.				98 Penataan Kawasan Wisata di Kabupaten Biak Numfor									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Kawasan yang tertata	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.03.07.1.01 - Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	1.03.07.1.01.01 - Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Kawasan yang tertata	100 M2	
909.				99 Penataan Kawasan Wisata di Kabupaten Yapen Serui									
					Luas Kawasan yang tertata	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.03.07.1.01 - Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	1.03.07.1.01.01 - Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Luas Kawasan yang tertata	100 M2	
910.				100 Penataan Kawasan Wisata di Kabupaten Supiori									
					Luas Kawasan yang tertata	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.03.07.1.01 - Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	1.03.07.1.01.01 - Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Luas Kawasan yang tertata	100 M2	
911.				101 Penataan Kawasan Wisata di Kabupaten Merauke									
					Luas Kawasan yang tertata	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.03.07.1.01 - Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	1.03.07.1.01.01 - Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Luas Kawasan yang tertata	1000 M2	
912.				102 Penataan Kawasan Wisata di Kabupaten Tolikara									
					Luas Kawasan yang tertata	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.03.07.1.01 - Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	1.03.07.1.01.01 - Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Luas Kawasan yang tertata	1500 M2	
913.				103 Penataan Jalan Lingkungan Kampung Asei Kecil									
					jalan yang tertata	2.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.10 - Pemeliharaan Berkala Jalan	jalan yang tertata	350 M2	
914.				104 Penataan Kawasan Lingkungan Sekolah Aliktab Mamit									
					tertatanya kawasan lingkungan	4.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.03.07.1.01 - Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	1.03.07.1.01.01 - Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	tertatanya kawasan lingkungan	1000 M2	
915.				105 Penataan Jalan Lingkungan Konunu Kuragapura									
					jalan yang tertata	4.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.10 - Pemeliharaan Berkala Jalan	jalan yang tertata	1500 M2	
916.				106 Penataan Jalan Lingkungan kp Megapura									
					jalan yang tertata	4.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.10 - Pemeliharaan Berkala Jalan	jalan yang tertata	1500 M2	
917.				107 Penataan Jalan Lingkungan Permukiman Hamadi Gunung - Tasangka									
					tertatanya kawasan permukiman	4.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.10 - Pemeliharaan Berkala Jalan	tertatanya kawasan permukiman	1500 M2	
918.				108 Penataan Jalan Lingkungan kali Ular Doyo									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Jalan yang tertata	8.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.10 - Pemeliharaan Berkala Jalan	Jalan yang tertata	2500 M2	
919.				109 Penataan Kawasan Lingkungan GEREJA GIDI EO-Adiokia									
					tertatanya kawasan lingkungan	8.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.03.07.1.01 - Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	1.03.07.1.01.01 - Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	tertatanya kawasan lingkungan	2500 M2	
920.				110 Penataan Kawasan Lingkungan Permukiman Distrik Umagi									
					tertatanya kawasan permukiman	8.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.03.07.1.01 - Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	1.03.07.1.01.01 - Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	tertatanya kawasan permukiman	1500 M2	
921.				111 Penataan Kawasan Lingkungan PAUD Yobawi									
					tertatanya kawasan lingkungan	4.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.03.07.1.01 - Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	1.03.07.1.01.01 - Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	tertatanya kawasan lingkungan	1500 M2	
922.				112 Penataan Kawasan Lingkungan Permukiman Belakang Asrama Haji - Enggilek									
					tertatanya kawasan permukiman	8.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.03.07.1.01 - Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	1.03.07.1.01.01 - Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	tertatanya kawasan permukiman	2500 M2	
923.				113 Penataan Kawasan Lingkungan Permukiman Dok VIII RT 07									
					tertatanya kawasan permukiman	4.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.03.07.1.01 - Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	1.03.07.1.01.01 - Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	tertatanya kawasan permukiman	1500 M2	
924.				114 Penataan Kawasan Lingkungan Wisata Kp Karoaiipi									
					tertatanya lingkungan wisata	4.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.03.07.1.01 - Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	1.03.07.1.01.01 - Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	tertatanya lingkungan wisata	1500 M2	
925.				115 Penataan Peningkatan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kota Jayapura									
					tertatanya kawasan permukiman	1.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.03.07.1.01 - Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	1.03.07.1.01.01 - Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	tertatanya kawasan permukiman	500 M2	
926.				116 Penataan Peningkatan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kabupaten Nabire									
					tertatanya kawasan permukiman	1.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.03.07.1.01 - Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	1.03.07.1.01.01 - Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	tertatanya kawasan permukiman	500 M2	

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
927.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	29 Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Cakupan wilayah strategis dan cepat tumbuh yang dikembangkan	117 Penataan Peningkatan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kabupten Jayapura									
					tertatanya kawasan permukiman	4.400.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.03.07.1.01 - Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	1.03.07.1.01.01 - Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	tertatanya kawasan permukiman	500 M2	
928.				118 Penataan Peningkatan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kabupaten Biak									
					tertatanya kawasan sarana prasarana	1.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.03.07.1.01 - Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	1.03.07.1.01.01 - Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	tertatanya kawasan sarana prasarana	500 M2	
929.				119 Penataan Kawasan Sarana Prasarana di Kabupaten Mimika									
					tertatanya kawasan sarana prasarana	14.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.03.07.1.01 - Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	1.03.07.1.01.01 - Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	tertatanya kawasan sarana prasarana	1000 M2	
930.				120 Penataan Lahan Parkir Rumah Susun di Belakang STT I.S Kinjete									
					tertatanya Lahan Parkir rumah susun	2.900.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.03.07.1.01 - Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	1.03.07.1.01.01 - Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	tertatanya Lahan Parkir rumah susun	500 M2	
931.				121 Penataan Lapangan Parkir Mimika Sport Centre dan Rumah Susun Mimika									
					tertatanya lapangan parkir dan rumah susun	3.850.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.03.07.1.01 - Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	1.03.07.1.01.01 - Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	tertatanya lapangan parkir dan rumah susun	1000 M2	
932.				122 Pengadaan dan Pemasangan Lampu Stadion Katalpal Merauke									
					Jumlah pemasangan lampu stadion	11.700.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.03.07.1.01 - Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	1.03.07.1.01.01 - Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah pemasangan lampu stadion	1 Unit	
933.				123 Penataan Kawasan Sarana Prasarana di Kabupaten Jayawijaya									
					tertatanya kawasan permukiman	13.600.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.03.07.1.01 - Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	1.03.07.1.01.01 - Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	tertatanya kawasan permukiman	1000 M2	
934.				124 Penataan Sarana dan Prasarana Kawasan Permukiman di Kabupaten Jayapura									
					luas kawasan permukiman yang tertata	4.900.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.03.07.1.01 - Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	1.03.07.1.01.01 - Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	luas kawasan permukiman yang tertata	500 M2	
935.				125 Penyediaan Wastafel Portabel Tanggap Darurat Covid 19 di Kota/Kab. Jayapura									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Jumlah Wastafel Portabel yang disiapkan	5.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.06 - Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Wastafel Portabel yang disiapkan	200 Unit	
936.				126 Penyediaan Wastafel Portabel Tanggap Darurat Covid 19 di Kab. Jayawijaya									
					Jumlah Wastafel Portabel yang disiapkan	10.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.06 - Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Wastafel Portabel yang disiapkan	200 Unit	
937.				127 Pembangunan Pagar SD Inpres Pasir II									
					Panjang Pagar yang terbangun	1.500.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.03.07.1.01 - Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	1.03.07.1.01.01 - Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Panjang Pagar yang terbangun	300 M	
938.				128 Pembangunan Tugu Salib Gereja GIDI EDEN Entrop									
					Jumlah Tugu Salib yang dibangun	1.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.03.07.1.01 - Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	1.03.07.1.01.01 - Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Tugu Salib yang dibangun	1 Unit	
939.				129 Penataan Kawasan Bukit Teletabis Venue PON XX									
					Penataan Kawasan bukit teletabis yang terbangun	4.700.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.03.07.1.01 - Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	1.03.07.1.01.01 - Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Penataan Kawasan bukit teletabis yang terbangun	500 M2	
940.				130 Penataan Kawasan Permukiman di Koya Tengah									
					Penataan Kawasan permukiman yang terbangun	5.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.03.07.1.01 - Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	1.03.07.1.01.01 - Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Penataan Kawasan permukiman yang terbangun	1 Kawasan	
941.				131 Pembangunan Sarana Venue Terbang Layang Lanud Timika di Kaupaten Mimika									
					Terbangunnya sarana terbang layang	28.783.961.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.03.07.1.01 - Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	1.03.07.1.01.01 - Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Terbangunnya sarana terbang layang	1000 M3	
942.				132 Pembangunan Gedung Kantor Gubernur Papua									
					Luas bangunan gedung yang terbangun	400.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	1.03.08.1.01 - Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	1.03.08.1.01.01 - Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Luas bangunan gedung Kantor Gubernur Papua yang terbangun	11157700 M2	
943.				133 Pembangunan Gedung Kantor Satpol PP Provinsi Papua									
					Luas bangunan gedung yang terbangun	15.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	1.03.08.1.01 - Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	1.03.08.1.01.01 - Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Luas bangunan gedung Kantor Satpol PP Provinsi Papua yang terbangun	1875 M2	
944.				134 Pembangunan Gedung Kantor Dinas PUPR Provinsi Papua									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Luas bangunan gedung yang terbangun	100.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	1.03.08.1.01 - Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	1.03.08.1.01.01 - Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Luas bangunan Gedung Kantor Dinas PUPR-PKP Provinsi Papua yang terbangun	30000 M2	
945.				135 Pembangunan Gedung KNPI Provinsi Papua									
					Luas bangunan gedung yang terbangun	60.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	1.03.08.1.01 - Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	1.03.08.1.01.01 - Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Luas bangunan gedung KNPI Provinsi Papua yang terbangun	1875 M2	
946.				136 Pembangunan Gedung MRP Provinsi Papua									
					Luas bangunan gedung yang terbangun	80.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	1.03.08.1.01 - Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	1.03.08.1.01.01 - Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Luas bangunan gedung MRP Provinsi Papua yang terbangun	1000 M2	
947.				137 Pembangunan Gedung BAWASLU Provinsi Papua									
					Luas bangunan gedung yang terbangun	60.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	1.03.08.1.01 - Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	1.03.08.1.01.01 - Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Luas bangunan gedung BAWASLU Provinsi Papua yang terbangun	500 M2	
948.				138 Pembangunan Gedung KPU Provinsi Papua									
					Luas bangunan gedung yang terbangun	60.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	1.03.08.1.01 - Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	1.03.08.1.01.01 - Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Luas bangunan gedung yang terbangun	200 M2	
949.				139 Pembangunan Gedung Biro Layanan Pengadaan Barang dan Jasa									
					Luas bangunan gedung yang terbangun	30.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	1.03.08.1.01 - Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	1.03.08.1.01.01 - Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Luas bangunan gedung Biro Layanan Pengadaan Barang dan Jasa yang terbangun	1000 M2	
950.				140 Pembangunan Rumah Jabatan Eselon II									
					Luas bangunan gedung yang terbangun	60.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	1.03.08.1.01 - Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	1.03.08.1.01.01 - Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Luas bangunan gedung Rumah Jabatan Eselon II yang terbangun	20000 M2	
951.				141 Pembangunan Pos BMKG									
					Luas bangunan gedung yang terbangun	4.500.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	1.03.08.1.01 - Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	1.03.08.1.01.01 - Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Luas bangunan gedung yang terbangun	150 M3	
952.				142 Penanaman Rumput Stadion Lapangan Stadion Katalpal Merauke									
					Jumlah Luasan rumput stadion katapal yang terpasang	3.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	1.03.09.1.01 - Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.09.1.01.03 - Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Luasan rumput stadion katapal yang terpasang	500 M2	
953.		30 Program pembangunan infrastruktur pedesaan	Cakupan pengembangan infrastruktur pedesaan	545 Pembangunan Jalan Pendekat Kawasan Patung Tuhan Yesus									
					Terbangnya Kawasan Spiritual	0,00						0 M2	

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
954.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	30 Program pembangunan infrastruktur pedesaan	Cakupan pengembangan infrastruktur pedesaan	552 Pembangunan Jalan Poros Kampung di Distrik Wolo									
955.				556 Pembangunan Jaringan Air Bersih di Kab. Intan Jaya									
					Panjang saluran air bersih yang terbangun	0,00						0 Meter	
956.				557 Pembangunan Jaringan Air Bersih di Kab. Jayawijaya									
					Panjang saluran air bersih yang terbangun	0,00						0 Meter	
957.				559 Pembangunan Jaringan Air Bersih di Pasir II									
					Panjang saluran air bersih yang terbangun	0,00						0 Meter	
958.				560 Pembangunan Jaringan Air Bersih Agats									
					Panjang saluran air bersih yang terbangun	0,00						0 Meter	
959.				561 Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih di Kabupaten Keerom									
					Panjang saluran air bersih yang terbangun	0,00						0 Meter	
					Jumlah Tempat Penampungan Air Bersih Komunal yang terbangun	0,00						0 Unit	
960.				562 Pembangunan Jalan Non Status Bagi Masyarakat Perbatasan di Kabupaten Keerom									
					Panjang Jalan yang dibangun	0,00						0 Km	
961.				563 Pembangunan Jembatan Penghubung Jalan di Kabupaten Keerom									
					Panjang Jembatan yang dibangun	0,00						0 Meq	
962.				565 Penataan Kawasan Tugu Patung Yesus									
					Penataan Kawasan Patung Yesus	0,00						0 M2	
963.				566 Penataan Sarana dan Prasarana Kawasan Permukiman di Kota Jayapura									
					Luas Kawasan Permukiman yang Terbangun	1.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.03.07.1.01 - Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	1.03.07.1.01.01 - Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Luas Kawasan Permukiman yang Terbangun	1000 M2	
964.				567 Penataan Sarana dan Prasarana Kawasan Permukiman di Kabupaten Jayapura									
					Luas Kawasan Permukiman yang Terbangun	1.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.03.07.1.01 - Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	1.03.07.1.01.01 - Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Luas Kawasan Permukiman yang Terbangun	1000 M2	
965.				568 Penataan Sarana dan Prasarana Kawasan Permukiman di Kabupaten Sarmi									
					Luas Kawasan Permukiman yang Terbangun	1.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.03.07.1.01 - Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	1.03.07.1.01.01 - Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Luas Kawasan Permukiman yang Terbangun	1000 M2	
966.				569 Penataan Sarana dan Prasarana Kawasan Permukiman di Kabupaten Keerom									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Luas Kawasan Permukiman yang Terbangun	1.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.03.07.1.01 - Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	1.03.07.1.01.01 - Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Luas Kawasan Permukiman yang Terbangun	1000 M2	
967.				570 Penataan Sarana dan Prasarana Kawasan Permukiman d Kabupaten Mamberamo Raya									
					Luas Kawasan Permukiman yang Terbangun	1.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.03.07.1.01 - Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	1.03.07.1.01.01 - Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Luas Kawasan Permukiman yang Terbangun	1000 M2	
968.				571 Penataan Sarana dan Prasarana Kawasan Permukiman d Kabupaten Biak Numfor									
					Luas Kawasan Permukiman yang Terbangun	1.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.03.07.1.01 - Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	1.03.07.1.01.01 - Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Luas Kawasan Permukiman yang Terbangun	1000 M2	
969.				572 Penataan Sarana dan Prasarana Kawasan Permukiman d Kabupaten Supiori									
					Luas Kawasan Permukiman yang Terbangun	1.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.03.07.1.01 - Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	1.03.07.1.01.01 - Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Luas Kawasan Permukiman yang Terbangun	1000 M2	
970.				573 Penataan Sarana dan Prasarana Kawasan Permukiman d Kabupaten Waropen									
					Luas Kawasan Permukiman yang Terbangun	1.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.03.07.1.01 - Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	1.03.07.1.01.01 - Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Luas Kawasan Permukiman yang Terbangun	1000 M2	
971.				574 Penataan Sarana dan Prasarana Kawasan Permukiman d Kabupaten Kep. Yapen									
					Luas Kawasan Permukiman yang Terbangun	1.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.03.07.1.01 - Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	1.03.07.1.01.01 - Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Luas Kawasan Permukiman yang Terbangun	1000 M2	
972.				575 Penataan Sarana dan Prasarana Kawasan Permukiman d Kabupaten Nabire									
					Luas Kawasan Permukiman yang Terbangun	1.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.03.07.1.01 - Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	1.03.07.1.01.01 - Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Luas Kawasan Permukiman yang Terbangun	1000 M2	
973.				576 Penataan Sarana dan Prasarana Kawasan Permukiman d Kabupaten Paniai									
					Luas Kawasan Permukiman yang Terbangun	1.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.03.07.1.01 - Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	1.03.07.1.01.01 - Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Luas Kawasan Permukiman yang Terbangun	1000 M2	
974.				577 Penataan Sarana dan Prasarana Kawasan Permukiman d Kabupaten Deiyai									
					Luas Kawasan Permukiman yang Terbangun	1.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.03.07.1.01 - Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	1.03.07.1.01.01 - Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Luas Kawasan Permukiman yang Terbangun	1000 M2	

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
975.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	30 Program pembangunan infrastruktur pedesaan	Cakupan pengembangan infrastruktur pedesaan	578 Penataan Sarana dan Prasarana Kawasan Permukiman di Kabupaten Dogiyai	Luas Kawasan Permukiman yang Terbangun	1.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.03.07.1.01 - Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	1.03.07.1.01.01 - Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Luas Kawasan Permukiman yang Terbangun	1000 M2	
976.				579 Penataan Sarana dan Prasarana Kawasan Permukiman di Kabupaten Intan Jaya	Luas Kawasan Permukiman yang Terbangun	1.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.03.07.1.01 - Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	1.03.07.1.01.01 - Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Luas Kawasan Permukiman yang Terbangun	100 M2	
977.				580 Penataan Sarana dan Prasarana Kawasan Permukiman di Kabupaten Jayawijaya	Luas Kawasan Permukiman yang Terbangun	1.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.03.07.1.01 - Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	1.03.07.1.01.01 - Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Luas Kawasan Permukiman yang Terbangun	1000 M2	
978.				581 Penataan Sarana dan Prasarana Kawasan Permukiman di Kabupaten Tolikara	Luas Kawasan Permukiman yang Terbangun	1.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.03.07.1.01 - Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	1.03.07.1.01.01 - Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Luas Kawasan Permukiman yang Terbangun	1000 M2	
979.				582 Penataan Sarana dan Prasarana Kawasan Permukiman di Kabupaten Lanny Jaya	Luas Kawasan Permukiman yang Terbangun	1.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.03.07.1.01 - Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	1.03.07.1.01.01 - Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Luas Kawasan Permukiman yang Terbangun	1000 M2	
980.				583 Penataan Sarana dan Prasarana Kawasan Permukiman di Kabupaten Yalimo	Luas Kawasan Permukiman yang Terbangun	1.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.03.07.1.01 - Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	1.03.07.1.01.01 - Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Luas Kawasan Permukiman yang Terbangun	1000 M2	
981.				584 Penataan Sarana dan Prasarana Kawasan Permukiman di Kabupaten Mamberamo Tengah	Luas Kawasan Permukiman yang Terbangun	1.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.03.07.1.01 - Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	1.03.07.1.01.01 - Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Luas Kawasan Permukiman yang Terbangun	1000 M2	
982.				585 Penataan Sarana dan Prasarana Kawasan Permukiman di Kabupaten Nduga	Luas Kawasan Permukiman yang Terbangun	1.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.03.07.1.01 - Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	1.03.07.1.01.01 - Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Luas Kawasan Permukiman yang Terbangun	1000 M2	
983.				586 Penataan Sarana dan Prasarana Kawasan Permukiman di Kabupaten Puncak	Luas Kawasan Permukiman yang Terbangun	1.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.03.07.1.01 - Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	1.03.07.1.01.01 - Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Luas Kawasan Permukiman yang Terbangun	1000 M2	

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Luas Kawasan Permukiman yang Terbangun	1.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.03.07.1.01 - Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	1.03.07.1.01.01 - Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Luas Kawasan Permukiman yang Terbangun	1000 M2	
984.				587 Penataan Sarana dan Prasarana Kawasan Permukiman d Kabupaten Puncak Jaya									
					Luas Kawasan Permukiman yang Terbangun	1.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.03.07.1.01 - Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	1.03.07.1.01.01 - Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Luas Kawasan Permukiman yang Terbangun	1000 M2	
985.				588 Penataan Sarana dan Prasarana Kawasan Permukiman d Kabupaten Yahukimo									
					Luas Kawasan Permukiman yang Terbangun	1.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.03.07.1.01 - Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	1.03.07.1.01.01 - Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Luas Kawasan Permukiman yang Terbangun	1000 M2	
986.				589 Penataan Sarana dan Prasarana Kawasan Permukiman d Kabupaten Mimika									
					Luas Kawasan Permukiman yang Terbangun	1.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.03.07.1.01 - Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	1.03.07.1.01.01 - Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Luas Kawasan Permukiman yang Terbangun	1000 M2	
987.				590 Penataan Sarana dan Prasarana Kawasan Permukiman d Kabupaten Asmat									
					Luas Kawasan Permukiman yang Terbangun	1.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.03.07.1.01 - Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	1.03.07.1.01.01 - Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Luas Kawasan Permukiman yang Terbangun	1000 M2	
988.				591 Penataan Sarana dan Prasarana Kawasan Permukiman d Kabupaten Boven Digoel									
					Luas Kawasan Permukiman yang Terbangun	1.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.03.07.1.01 - Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	1.03.07.1.01.01 - Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Luas Kawasan Permukiman yang Terbangun	1000 M2	
989.				592 Penataan Sarana dan Prasarana Kawasan Permukiman d Kabupaten Mappi									
					Luas Kawasan Permukiman yang Terbangun	1.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.03.07.1.01 - Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	1.03.07.1.01.01 - Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Luas Kawasan Permukiman yang Terbangun	1000 M2	
990.				593 Penataan Sarana dan Prasarana Kawasan Permukiman d Kabupaten Peg. Bintang									
					Luas Kawasan Permukiman yang Terbangun	1.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.03.07.1.01 - Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	1.03.07.1.01.01 - Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Luas Kawasan Permukiman yang Terbangun	1000 M2	
991.				594 Penataan Sarana dan Prasarana Kawasan Permukiman d Kabupaten Merauke									
					Luas Kawasan Permukiman yang Terbangun	1.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.03.07.1.01 - Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	1.03.07.1.01.01 - Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Luas Kawasan Permukiman yang Terbangun	1000 M2	

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
992.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	30 Program pembangunan infrastruktur pedesaan	Cakupan pengembangan infrastruktur pedesaan	595 Perencanaan Teknis Penataan Sarana dan Prasarana Kawasan di Provinsi Papua	Jumlah Dokumen Yang dibuat	1.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.03.07.1.01 - Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	1.03.07.1.01.01 - Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Yang dibuat	29 Dokumen	
993.				607 Pematangan Tanah Pembangunan Graha Politik Provinsi Papua	Terbayarnya sisa pengadaan tanah	0,00						0 Ha	
994.		31 Peningkatan Jalan dan Jembatan	Panjang jalan dalam kondisi mantap; Panjang jembatan dalam kondisi mantap	218 Peningkatan Jalan Kemiri - Depapre (111)	Jumlah Panjang Jalan yang ditingkatkan	50.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.08 - Rekonstruksi Jalan	Jumlah Panjang Jalan Kemiri- Depapre (111) yang ditingkatkan	5 KM2	
995.				219 Peningkatan Jalan Waren - Botawa - Sumiangga (126)	Panjang jalan yang ditingkatkan	30.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.08 - Rekonstruksi Jalan	Panjang jalan Waren - Botawa- Sumiangga (126) yang ditingkatkan	0 KM2	
996.				220 Peningkatan Jalan Kuprik - Jagebob - Erambu (183)	Panjang jalan yang ditingkatkan	50.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.08 - Rekonstruksi Jalan	Panjang jalan Kuprik - Jagebob - Erambu (183) yang ditingkatkan	13 KM2	
997.				226 Peningkatan Jalan Bolakme - Kelila - Bokondini (167) (DAK)	Panjang jalan yang ditingkatkan	10.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.08 - Rekonstruksi Jalan	Panjang jalan Bolakme - Kelila- Bokondini (167) (DAK) yang ditingkatkan	3 Km	
998.				227 Peningkatan Kimibay - Napan (137)	Panjang jalan yang ditingkatkan	10.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.08 - Rekonstruksi Jalan	Panjang jalan Kimibay - Napan (137) yang ditingkatkan	5 KM2	
999.				234 Peningkatan Jalan Berap - Nimbotong - Lereh - Tengon (110)	Panjang jalan yang ditingkatkan	50.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.08 - Rekonstruksi Jalan	Panjang jalan Berap - Nimbotong -Lereh - Tengon (110) yang ditingkatkan	5 KM2	
1000.				237 Peningkatan Jalan Arso XIV - Sawia - kwarja (114)	Panjang jalan yang ditingkatkan	52.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.08 - Rekonstruksi Jalan	Panjang jalan Arso - Sawia - Kwarja (114) yang ditingkatkan	13 KM2	
1001.				238 Peningkatan Jalan Jayapura - Angkasa - Base"G - Dok II (101)	Jumlah Panjang Jalan yang ditingkatkan	15.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.08 - Rekonstruksi Jalan	Jumlah Panjang Jalan Jayapura- Angkasa - Base G - Dok II (101) yang ditingkatkan	5 Km	
1002.				239 Peningkatan Jalan Hamadi - Entrop (102)									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Jumlah Panjang Jalan yang ditingkatkan	10.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.08 - Rekonstruksi Jalan	Jumlah Panjang Jalan Hamadi- Entrop (102) yang ditingkatkan	4 KM2	
1003.				241 Peningkatan Jalan Biak - Junction - Korem (129)									
					Panjang Jalan yang ditingkatkan	10.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.08 - Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan Biak-Juction- Korem (129) yang ditingkatkan	5 Km	
1004.				242 Peningkatan Jalan Junction - Wardo (130)									
					Jumlah Panjang Jalan yang ditingkatkan	30.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.08 - Rekonstruksi Jalan	Jumlah Panjang Jalan Punction- Wardo (130) yang ditingkatkan	5 KM2	
1005.				243 Peningkatan Jalan Biak - Adibai - Marau/Bosnik (132)									
					Jumlah Panjang Jalan yang ditingkatkan	5.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.09 - Rehabilitasi Jalan	Jumlah Panjang Jalan Biak - Adibai - Marau/Bosnik (132) yang ditingkatkan	5 KM2	
1006.				244 Peningkatan Jalan Korem - Doubo (133)									
					Jumlah Panjang Jalan yang ditingkatkan	15.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.09 - Rehabilitasi Jalan	Jumlah Panjang Jalan Korem - Doubo (133) yang ditingkatkan	3 KM2	
1007.				246 Peningkatan Jalan Kontinuui - Ambaidiru									
					Jumlah Panjang Jalan yang ditingkatkan	5.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.08 - Rekonstruksi Jalan	Jumlah Panjang Jalan Kontinuui - Ambaidiru yang ditingkatkan	5 KM2	
1008.				248 Peningkatan Jalan Wardo - Duber (134) 37,96 Km									
					Jumlah Panjang Jalan yang ditingkatkan	15.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.08 - Rekonstruksi Jalan	Jumlah Panjang Jalan Wardo - Duber (134) 37,96 Km yang ditingkatkan	4 KM2	
1009.				249 Peningkatan Jalan Menawi - Sumberbaba (122), 40 Km									
					Jumlah Panjang Jalan yang ditingkatkan	5.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.08 - Rekonstruksi Jalan	Jumlah Panjang Jalan Menawi - Sumberbaba (122), 40 Km yang ditingkatkan	5 KM2	
1010.				250 Peningkatan Jalan Serui - Ansus (123), 71,15 Km									
					Jumlah Panjang Jalan yang ditingkatkan	5.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.08 - Rekonstruksi Jalan	Jumlah Panjang Jalan Serui - Ansus (1230, 71,15 Km yang ditingkatkan	5 KM2	
1011.				254 Peningkatan Jalan BTS Kota Merauke - Kumbe - Bian - Okaba (185), 88,05 Km									
					Jumlah Panjang Jalan yang ditingkatkan	35.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.08 - Rekonstruksi Jalan	Jumlah Panjang Jalan BTS Kota Merauke - Kumbe - Bian - Okaba yang ditingkatkan	9 KM2	
1012.				255 Peningkatan Jalan Arimbet - Maju - Bukit - Ujung - Kawor, (175), 60 Km									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Jumlah Panjang Jalan yang ditingkatkan	5.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.08 - Rekonstruksi Jalan	Jumlah Panjang Jalan Arimbet - Maju - Ujung - Kawor , (175) 60 Km yang ditingkatkan	5 KM2	
1013.				260 Peningkatan Jalan Dalam Kota Dekai									
					Jumlah Panjang Jalan yang ditingkatkan	25.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.08 - Rekonstruksi Jalan	Jumlah Panjang Jalan Dalam Kota Dekai yang ditingkatkan	5 KM2	
1014.				262 Peningkatan Jalan Mapurujaya - Tipuka - Ayuka									
					Jumlah Panjang Jalan yang ditingkatkan	5.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.08 - Rekonstruksi Jalan	Jumlah Panjang Jalan Mapurujaya - Tipuka - Ayuka yang ditingkatkan	5 KM2	
1015.				263 Peningkatan Jalan Timika - Batas - Tugu									
					Jumlah Panjang Jalan yang ditingkatkan	5.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.08 - Rekonstruksi Jalan	Jumlah Panjang Jalan yang ditingkatkan	5 KM2	
1016.				269 Peningkatan Jalan Taja - Lereh									
					Jumlah Panjang Jalan yang ditingkatkan	5.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.08 - Rekonstruksi Jalan	Jumlah Panjang Jalan yang ditingkatkan	5 KM2	
1017.				271 Peningkatan Jalan Illu (Puncak Jaya) - Tiom, (Lanny Jaya), (163)									
					Jumlah Panjang Jalan yang ditingkatkan	50.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.08 - Rekonstruksi Jalan	Jumlah Panjang Jalan Ilu (Puncak Jaya) - Tiom, (Lanny Jaya), 163 yang ditingkatkan	10 KM2	
1018.				283 Peningkatan Jalan Tiom, (Lanny Jaya) - Illu (Puncak Jaya), (163)									
					Jumlah Panjang Jalan yang ditingkatkan	81.500.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.08 - Rekonstruksi Jalan	Jumlah Panjang Jalan Tiom, (Lanny Jaya) - Ilu (Puncak Jaya), (163) yang ditingkatkan	16 KM2	
1019.				288 Peningkatan Jalan Karadiri (Bandara Baru Nabire) - Topo (35 Km)									
					Jumlah Panjang Jalan yang ditingkatkan	5.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.08 - Rekonstruksi Jalan	Jumlah Panjang Jalan Karadiri (Bandara Baru Nabire) - Topo (35 Km) yang ditingkatkan	5 KM2	
1020.				291 Peningkatan Jalan Dalam Kota Oksibil									
					Jumlah Panjang Jalan yang ditingkatkan	25.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.08 - Rekonstruksi Jalan	Jumlah Panjang Jalan Dalam Kota Oksibil yang ditingkatkan	5 KM2	
1021.				292 Peningkatan Jalan Koya Tengah									
					Jumlah Panjang Jalan yang ditingkatkan	5.500.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.08 - Rekonstruksi Jalan	Jumlah Panjang Jalan Koya Tengah yang ditingkatkan	1 KM2	
1022.				295 Peningkatan Jalan Waena - Arso V (100 k) 53 Km (DAK)									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Panjang jalan yang ditingkatkan	5.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.08 - Rekonstruksi Jalan	Panjang jalan Waena - Arso V (100 Km (DAK) yang ditingkatkan	5 Km	
1023.				296 Peningkatan Jalan Distrik Namlong (Kabupaten Jayapura)									
					Panjang Jalan yang ditingkatkan	5.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.08 - Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan Distrik Namblong (Kabupaten Jayapura) yang ditingkatkan	5 Km	
1024.				297 Peningkatan Jalan Legare - Samabusa									
					Jumlah Panjang Jalan yang ditingkatkan	52.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.08 - Rekonstruksi Jalan	Jumlah Panjang Jalan Legare - Samabusa yang ditingkatkan	13 KM2	
1025.				300 Peningkatan Jalan Trikora (2 Jalur) (Mendukung PON)									
					panjang jalan yang di tingkatkan	5.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.08 - Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan Trikora (2 jalur) (Mendukung PON) yang di tingkatkan	5 Km	
1026.				301 Peningkatan Jalan Garuda Spadem (2 Jalur) (Mendukung PON)									
					Jumlah Panjang Jalan yang ditingkatkan	5.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.08 - Rekonstruksi Jalan	Jumlah Panjang Jalan Garuda Spadem (2 Jalur) (Mendukung PON) yang ditingkatkan	5 KM2	
1027.				302 Peningkatan Jalan Kamizaun (Mendukung PON)									
					Jumlah Panjang Jalan yang ditingkatkan	5.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.08 - Rekonstruksi Jalan	Jumlah Panjang Jalan Kamizaun (Mendukung PON) yang ditingkatkan	5 KM2	
1028.				303 Peningkatan Jalan Arafuru (Mendukung PON)									
					Jumlah Panjang Jalan yang ditingkatkan	5.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.08 - Rekonstruksi Jalan	Jumlah Panjang Jalan Arafuru (Mendukung PON) yang ditingkatkan	5 KM2	
1029.				304 Peningkatan Jalan Payum (Mendukung PON)									
					Jumlah Panjang Jalan yang ditingkatkan	5.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.08 - Rekonstruksi Jalan	Jumlah Panjang Jalan Payum (Mendukung PON) yang ditingkatkan	5 KM2	
1030.				319 Peningkatan Jalan Legari-Topo									
					Jumlah Panjang Jalan yang ditingkatkan	5.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.08 - Rekonstruksi Jalan	Jumlah Panjang Jalan Legari-Topo yang ditingkatkan	5 KM2	
1031.				322 Peningkatan Jalan Vihara - Tanah Hitam (105 K)									
					Panjang jalan yang ditingkatkan	5.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.08 - Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan Vihara - Tanah Hitam (105 K) yang ditingkatkan	5 KM2	
1032.				323 Peningkatan Jalan Entrop - Kantor Walikota - Skyline -Perumnas III									
					Jumlah Panjang Jalan yang ditingkatkan	5.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.08 - Rekonstruksi Jalan	Jumlah Panjang Jalan Entrop - Kantor Walikota - Skyline - Perumnas III yang ditingkatkan	5 KM2	

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1033.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	31 Peningkatan Jalan dan Jembatan	Panjang jalan dalam kondisi mantap; Panjang jembatan dalam kondisi mantap	324 Peningkatan Jalan Poros Koya									
					Jumlah Panjang Jalan yang ditingkatkan	5.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.08 - Rekonstruksi Jalan	Jumlah Panjang Jalan Poros Koya yang ditingkatkan	5 KM2	
1034.				331 Peningkatan Jalan Sisingamangaraja 2 Jalur									
					Jumlah Panjang Jalan yang ditingkatkan	10.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.08 - Rekonstruksi Jalan	Jumlah Panjang Jalan Sisingamangaraja 2 Jalur yang ditingkatkan	0 Km	
1035.				332 Peningkatan Jalan Wardo - Sorindiweri									
					Panjang jalan yang ditingkatkan	25.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.08 - Rekonstruksi Jalan	Panjang jalan Wardo - Sorindiweri yang ditingkatkan	5 Km	
1036.				333 Peningkatan Jalan Condronegoro (2 Jalur)									
					Panjang Jalan yang ditingkatkan	5.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.08 - Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan Condronegoro (2 Jalur) yang ditingkatkan	5 Km	
1037.				334 Peningkatan Jalan Sewan - Petam									
					Jumlah Panjang Jalan yang ditingkatkan	5.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.08 - Rekonstruksi Jalan	Jumlah Panjang Jalan Sewan - Petam yang ditingkatkan	5 KM2	
1038.				335 Peningkatan Jalan Munukania - Aurimi									
					Jumlah Panjang Jalan yang ditingkatkan	15.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.08 - Rekonstruksi Jalan	Jumlah Panjang Jalan Munukania - Aurimi yang ditingkatkan	6 KM2	
1039.				336 Peningkatan Jalan Cenderawasih									
					Panjang Jalan yang ditingkatkan	5.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.08 - Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan Cenderawasih yang ditingkatkan	5 Km	
1040.				337 Peningkatan Jalan Biak - Marau - 2 Jalur									
					2,86	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.08 - Rekonstruksi Jalan	2,86	5 Km	
					Jumlah Panjang Jalan yang ditingkatkan	5.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.08 - Rekonstruksi Jalan	Jumlah Panjang Jalan Biak - Marau 2 Jalur yang ditingkatkan	5 Km	
1041.				338 Peningkatan Jalan Poros Yamta									
					Jumlah Panjang Jalan yang ditingkatkan	5.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.08 - Rekonstruksi Jalan	Jumlah Panjang Jalan Poros Yamta yang ditingkatkan	5 KM2	
1042.				339 Peningkatan Jalan Karubaga - Panaga									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Jumlah Panjang Jalan yang ditingkatkan	50.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.08 - Rekonstruksi Jalan	Jumlah Panjang Jalan Karubaga - Panaga yang ditingkatkan	714 KM2	
1043.				340 Peningkatan Jalan Dalam Kota Tanah Merah									
					Jumlah Panjang Jalan yang ditingkatkan	5.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.08 - Rekonstruksi Jalan	Jumlah Panjang Jalan Dalam Kota Tanah Merah yang ditingkatkan	5 KM2	
1044.				341 Peningkatan Jalan Muliama - Wame - Makki									
					Jumlah Panjang Jalan yang ditingkatkan	28.500.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.08 - Rekonstruksi Jalan	Jumlah Panjang Jalan Muliama - Wame - Makki yang ditingkatkan	6 KM2	
1045.				342 Peningkatan Jalan Karubaga - Wunim - Bokondini (154)									
					Jumlah Panjang Jalan yang ditingkatkan	81.500.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.08 - Rekonstruksi Jalan	Jumlah Panjang Jalan Karubaga - Wunim - Bokondini (154) yang ditingkatkan	16 KM2	
1046.				343 Peningkatan Jalan Kimbin - Wogi - Wosi									
					Jumlah Panjang Jalan yang ditingkatkan	5.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.08 - Rekonstruksi Jalan	Jumlah Panjang Jalan Kimbin - Wogi - Wosi yang ditingkatkan	5 KM2	
1047.				344 Peningkatan Jalan Gamelia - Bolakme									
					Panjang jalan yang ditingkatkan	15.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.08 - Rekonstruksi Jalan	Panjang jalan Gamelia - Bolakme yang ditingkatkan	3 Km	
1048.				345 Peningkatan Jalan Taja - SP V - Kwarja (DAK)									
					Panjang jalan yang ditingkatkan	5.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.08 - Rekonstruksi Jalan	Panjang jalan yang Taja - SP V - Kwarja (DAK) ditingkatkan	5 Km	
1049.				346 Peningkatan Jalan Kampung Buton - GOR Volley (2Jalur) (Mendukung PON XX)									
					panjang jalan yang ditingkatkan	5.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.08 - Rekonstruksi Jalan	panjang jalan Buton - GOR Volley (2 Jalur) (Mendukung PON) yang ditingkatkan	5 Km	
1050.				347 Peningkatan Jalan Kuansu (Namlong)- Besum-Genyem. (107) 11,76 Km									
					Panjang jalan yang ditingkatkan	20.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.08 - Rekonstruksi Jalan	Panjang jalan Kuansu (Namlong) - Besum - Genyem (107) 11,76 Km yang ditingkatkan	4 KM2	
1051.				348 Peningkatan Jalan Berap - Nimbotong (110)									
					Panjang Jalan yang telah ditingkatkan	5.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.08 - Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan Berap - Nimbotong yang telah ditingkatkan	5 Km	
1052.				349 Peningkatan Jalan Besum - Yanbra - Puai (108)									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Jumlah Panjang Jalan yang ditingkatkan	30.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.08 - Rekonstruksi Jalan	Jumlah Panjang Jalan Besum - Yanbra - Puai (108) yang ditingkatkan	6 KM2	
1053.				350 Peningkatan Jalan Lereh - Tengon									
					Jumlah Panjang Jalan yang ditingkatkan	30.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.08 - Rekonstruksi Jalan	Jumlah Panjang Jalan Lereh - Tengon yang ditingkatkan	13 Km	
1054.				351 Peningkatan Jalan Burmeso - Gesa (118)									
					Jumlah Panjang Jalan yang ditingkatkan	5.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.08 - Rekonstruksi Jalan	Jumlah Panjang Jalan Burmeso - Gesa (118) yang ditingkatkan	5 KM2	
1055.				352 Peningkatan Jalan Karubaga - Mamit									
					Jumlah Panjang Jalan yang ditingkatkan	15.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.08 - Rekonstruksi Jalan	Jumlah Panjang Jalan Karubaga - Mamit yang ditingkatkan	2 KM2	
1056.				353 Peningkatan Jalan Manda - Wolo - Kobakma (169) (30 Km)									
					Jumlah Panjang Jalan yang ditingkatkan	25.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.08 - Rekonstruksi Jalan	Jumlah Panjang Jalan Manda - Wolo - Kobakma (169) (30 Km) yang ditingkatkan	5 KM2	
1057.				354 Peningkatan Jalan Duntek (Dogiyai)-Munayepa/ Iyei (Paniai) (141)									
					Jumlah Panjang Jalan yang ditingkatkan	25.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.08 - Rekonstruksi Jalan	Jumlah Panjang Jalan Duntek (Dogiyai) - Munayepa/Iyei (Paniai) (141) yang ditingkatkan	5 KM2	
1058.				355 Peningkatan Jalan Duber - Sorendiweri - Korido (136)									
					Jumlah Panjang Jalan yang ditingkatkan	25.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.08 - Rekonstruksi Jalan	Jumlah Panjang Jalan Duber - Sorendiweri - Korido (136) yang ditingkatkan	5 KM2	
1059.				356 Pelebaran Jalan Masuk Kuburan Angkasapura									
					Jumlah Panjang Jalan yang ditingkatkan	10.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.08 - Rekonstruksi Jalan	Jumlah Panjang Jalan Masuk Kuburan Angkasapura yang ditingkatkan	5 KM2	
1060.				357 Peningkatan Jalan Lepro - Onggaya (10) KM									
					Jumlah Panjang Jalan yang ditingkatkan	5.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.08 - Rekonstruksi Jalan	Jumlah Panjang Jalan Lepro - Onggaya (10 Km) yang ditingkatkan	5 KM2	
1061.				358 Peningkatan Jalan Pasir Enam Tanjung Ria									
					Jumlah Panjang Jalan yang ditingkatkan	5.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.08 - Rekonstruksi Jalan	Jumlah Panjang Jalan Pasir Enam Tanjung Ria yang ditingkatkan	5 KM2	
1062.				359 Peningkatan Jalan Pertambangan Kotaraja RT 06 / RW 04									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Panjang Jalan yang ditingkatkan	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.08 - Rekonstruksi Jalan	Jumlah Panjang Jalan Pertambangan Kotaraja RT 06/RW 04 yang ditingkatkan	5 Km	
1063.				360 Peningkatan Jalan Sultan Syahrir (Mendukung PON XX)									
					Panjang jalan yang ditingkatkan	5.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.08 - Rekonstruksi Jalan	Jumlah Panjang jalan Sultan Syahrir (Mendukung PON) yang ditingkatkan	5 Km	
1064.				361 Peningkatan Jalan Sultan Peternakan (Mendukung PON XX)									
					Panjang jalan yang ditingkatkan	5.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.08 - Rekonstruksi Jalan	Jumlah Panjang Jalan Sultan Peternakan (Mendukung PON) yang ditingkatkan	5 Km	
1065.				362 Peningkatan Jalan Habema - Kuyawage - Agandugume - Puncak									
					Panjang jalan yang ditingkatkan	5.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.08 - Rekonstruksi Jalan	Jumlah Panjang Jalan Habema - Kuyawage - Agandugume - Puncak yang ditingkatkan	5 Km	
1066.				363 Peningkatan Jalan Gamelia - Bolakme									
					Panjang Jalan yang ditingkatkan	5.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.08 - Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan Gamelia - Bolakme yang ditingkatkan	5 Km	
1067.				364 Peningkatan Jalan Dalam Kota Jayapura (Kawasan RSUD)									
					Panjang jalan yang ditingkatkan	5.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.08 - Rekonstruksi Jalan	Panjang jalan Dalam Kota Jayapura (Kawasan RSUD) yang ditingkatkan	5 Km	
1068.				365 Peningkatan Jalan Penghubung Jembatan Wesaput									
					Panjang jalan yang ditingkatkan	5.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.08 - Rekonstruksi Jalan	Jumlah Panjang Jalan Penghubung Jembatan Wesaput yang ditingkatkan	5 Km	
1069.				366 Peningkatan Jalan Puay-Skori-Sabeab									
					Panjang jalan yang ditingkatkan	5.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.08 - Rekonstruksi Jalan	Panjang jalan Puay - Skori - Sabeab yang ditingkatkan	5 Km	
1070.				367 Peningkatan Jalan Kanggime - Bogunuk									
					Panjang jalan yang ditingkatkan	30.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.08 - Rekonstruksi Jalan	Jumlah Panjang Jalan Kanggime - Bogunuk yang ditingkatkan	5 Km	
1071.				368 Peningkatan Jalan Aru (Mendukung PON XX)									
					Panjang jalan yang ditingkatkan	5.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.08 - Rekonstruksi Jalan	Jumlah Panjang Jalan Aru (Mendukung PON) yang ditingkatkan	5 Km	
1072.				369 Peningkatan Jalan Cemara (Mendukung PON XX)									
					Panjang jalan yang ditingkatkan	5.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.08 - Rekonstruksi Jalan	Jumlah Panjang jalan Cemara (Mendukung PON) yang ditingkatkan	5 Km	

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1073.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	31 Peningkatan Jalan dan Jembatan	Panjang jalan dalam kondisi mantap; Panjang jembatan dalam kondisi mantap	370 Peningkatan Jalan Pemuda (Mendukung PON XX)									
					Panjang jalan yang ditingkatkan	5.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.08 - Rekonstruksi Jalan	Jumlah Panjang Jalan Pemuda (Mendukung PON) yang ditingkatkan	5 Km	
1074.				371 Peningkatan Jalan Bolakme - Kelila - Bokondini (167) (61,5 Km)									
					Panjang jalan yang ditingkatkan	20.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.08 - Rekonstruksi Jalan	Panjang jalan Bolakme - Kelila - Bokondini (167) (61,5 Km) yang ditingkatkan	83 Km	
1075.				372 Peningkatan Jalan Sumberbaba - Dawai (060) 24,00 Km									
					Panjang jalan yang ditingkatkan	25.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.08 - Rekonstruksi Jalan	Jumlah Panjang Jalan Sumberbaba - Dawai (060) 24,00 Km yang ditingkatkan	8 Km	
1076.				373 Peningkatan Jalan SP II - Napan									
					Panjang jalan yang ditingkatkan	25.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.08 - Rekonstruksi Jalan	Jumlah Panjang Jalan SP II - Napan yang ditingkatkan	5 Km	
1077.				374 Peningkatan Jalan Dekai - Logpond - Pattipi									
					Panjang jalan yang ditingkatkan	5.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.08 - Rekonstruksi Jalan	Jumlah Panjang Jalan Dekai - Logpond - Pattipi yang ditingkatkan	5 Km	
1078.				376 Peningkatan Jalan Lingkar Pugima									
					Panjang jalan yang ditingkatkan	15.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.08 - Rekonstruksi Jalan	Jumlah Panjang Jalan Lingkar Pugima yang ditingkatkan	3 Km	
1079.				377 Peningkatan Jalan Wamena - Sekan - Apalapsili									
					Panjang jalan yang ditingkatkan	25.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.08 - Rekonstruksi Jalan	Jumlah Panjang Jalan Wamena - Sekan - Apalapsili yang ditingkatkan	5 Km	
1080.				378 Peningkatan Jalan Ifafa - Arso X Dusun Brik									
					Panjang jalan yang ditingkatkan	5.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.08 - Rekonstruksi Jalan	Panjang jalan Ifafa - Arso XI Dusun Brik yang ditingkatkan	5 Km	
1081.				379 Peningkatan Jalan Mator - Vuria - Skayleni Kotaraja									
					Panjang jalan yang ditingkatkan	5.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.08 - Rekonstruksi Jalan	Panjang jalan Mator - Vuria - Skyline Kotaraja yang ditingkatkan	5 Km	
1082.				380 Peningkatan Jalan Walelagama - Siepkosi									
					Panjang jalan yang ditingkatkan	25.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.08 - Rekonstruksi Jalan	Jumlah Panjang jalan Walelagama - Siepkosi yang ditingkatkan	5 Km	

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1083.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	31 Peningkatan Jalan dan Jembatan	Panjang jalan dalam kondisi mantap; Panjang jembatan dalam kondisi mantap	381 Peningkatan Jalan Prajurit (Mendukung PON XX)									
					Panjang jalan yang ditingkatkan	5.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.08 - Rekonstruksi Jalan	Jumlah Panjang Jalan Prajurit (Mendukung PON) yang ditingkatkan	5 Km	
1084.				382 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan									
					Jumlah dokumen	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	1.03.11.1.02 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	1.03.11.1.02.05 - Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah dokumen	1 Dokumen	
1085.				383 Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan									
					Jumlah dokumen supervisi	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	1.03.11.1.02 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	1.03.11.1.02.05 - Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah dokumen supervisi	1 Laporan	
1086.				384 Peningkatan Jalan Waena - Arso V (100.K) 53 Km									
					Panjang jalan yang ditingkatkan	52.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.08 - Rekonstruksi Jalan	Jumlah Panjang Jalan Waena - Arso V (100.K) 53 Km yang ditingkatkan	13 Km	
1087.				385 Peningkatan Jalan Taja - SP V - Kwarja									
					Panjang jalan yang ditingkatkan	50.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.08 - Rekonstruksi Jalan	Jumlah Panjang Jalan Taja - SP V - Kwarja yang ditingkatkan	14 Km	
1088.				386 Peningkatan Jalan Arso XIV - Yanmas									
					Panjang jalan yang ditingkatkan	5.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.08 - Rekonstruksi Jalan	Jumlah Panjang Jalan Arso XIV - Yanmas yang ditingkatkan	5 Km	
1089.				387 Peningkatan Jalan Bolakme - Kelila - Bokondini, (167), 61,5 Km (DAK)									
					Panjang jalan yang ditingkatkan	5.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.08 - Rekonstruksi Jalan	Panjang jalan Bolakme - Kelila - Bokondini (167) 61,5 Km (DAK) yang ditingkatkan	5 Km	
1090.				388 Peningkatan Jalan Karubaga - Wunin - Bokondini, (154), 32 Km (DAK)									
					Panjang jalan yang ditingkatkan	5.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.08 - Rekonstruksi Jalan	Panjang jalan Karubaga - Wunin - Bokondini (154), 32 Km (DAK) yang ditingkatkan	5 Km	
1091.				389 Peningkatan Jalan Kimibay - Napan (137), 40 Km (DAK)									
					Panjang jalan yang ditingkatkan	5.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.08 - Rekonstruksi Jalan	Jumlah Panjang Jalan Kimibay - Napan (137), 40 Km (DAK) yang ditingkatkan	5 Km	
1092.				390 Peningkatan Jalan Berap - Nimbotong - Lereh - Tengan, (110), 82,55 Km (DAK)									
					Panjang jalan yang ditingkatkan	5.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.08 - Rekonstruksi Jalan	Jumlah Panjang Jalan Berap - Nimbotong - Lereh - Tengan (110), 82,55 Km (DAK) yang ditingkatkan	5 Km	

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1093.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	31 Peningkatan Jalan dan Jembatan	Panjang jalan dalam kondisi mantap; Panjang jembatan dalam kondisi mantap	391 Peningkatan Jalan Kuprik - Jagebob - Erambu (183) 134 Km (DAK)									
					Panjang jalan yang ditingkatkan	5.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.08 - Rekonstruksi Jalan	Jumlah Panjang Jalan Kuprik - Jagebob - Erambu (183), 134 Km (DAK) yang ditingkatkan	5 Km	
1094.				392 Peningkatan (struktur dan kapasitas) Jalan yang menunjang Daerah Perbatasan (DAK)									
					Panjang Jalan yang ditingkatkan	5.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.08 - Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang ditingkatkan di Daerah Perbatasan (DAK)	5 Km	
1095.				394 Peningkatan Jalan Legare - Samabusa (KEWAJIBAN)									
					Panjang jalan yang ditingkatkan	5.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.08 - Rekonstruksi Jalan	Jumlah Panjang Jalan Legare - Samabusa (Kewajiban) yang ditingkatkan	5 Km	
1096.				395 Peningkatan Jalan Kuansu - Besum - Genyem (KEWAJIBAN)									
					Panjang jalan yang ditingkatkan	5.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.08 - Rekonstruksi Jalan	Jumlah Panjang Jalan Kuansu - Besum - Genyem (Kewajiban) yang ditingkatkan	5 Km	
1097.				396 Peningkatan Jalan Arimbet - Bukit - Ujung - Manggelum (164) 43.00Km									
					Panjang Jalan yang ditingkatkan	90.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.08 - Rekonstruksi Jalan	Jumlah Panjang Jalan Arimbet - Maju - Ujung - Manggelum (164), 43.00 Km yang ditingkatkan	18 Km	
1098.				397 Peningkatan Alternatif Entrop - Waena (Perumnas 3)									
					Panjang Jalan yang ditingkatkan	5.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.08 - Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan Alternatif Entrop - Waena (Perumnas III) yang ditingkatkan	5 Km	
1099.				398 Peningkatan Jalan Burmeso - Gesa - Barapasi (117) 15.60Km									
					Panjang Jalan yang ditingkatkan	5.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.08 - Rekonstruksi Jalan	Jumlah Panjang Jalan Burmeso - Gesa - Barapasi (117) 15.60 Km yang ditingkatkan	5 Km	
1100.				399 Peningkatan Jalan Doubo - Sorendiwari - Amyas (133) 45.27 Km									
					Jumlah Panjang Jalan yang ditingkatkan	25.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.08 - Rekonstruksi Jalan	Jumlah Panjang Jalan Doubo - Sorendiwari - Amyas (133) 45.27 Km yang ditingkatkan	6 Km	
1101.				400 Peningkatan Jalan Aikima - Siepkosi									
					Jumlah Panjang Jalan yang ditingkatkan	15.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.08 - Rekonstruksi Jalan	Jumlah Panjang Jalan Aikima - Siepkosi yang ditingkatkan	3 Km	
1102.				401 Peningkatan Jalan Arso XI									
					Jumlah Panjang Jalan yang ditingkatkan	5.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.08 - Rekonstruksi Jalan	Jumlah Panjang Jalan Arso XI yang ditingkatkan	5 Km	
1103.				402 Peningkatan Jalan Venue PON XX (Doyo Baru - Doyo Lama)									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Jumlah Panjang Jalan yang ditingkatkan	5.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.08 - Rekonstruksi Jalan	Jumlah Panjang Jalan Venue PON (Doyo Baru - Doyo Lama) yang ditingkatkan	5 Km	
1104.				403 Peningkatan Jalan Wamena - Walelagama - Hotel Jerman Bersatu (PON XX)									
					Jumlah Panjang Jalan yang ditingkatkan	5.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.08 - Rekonstruksi Jalan	Jumlah Panjang Jalan Wamena - Walelagama - Hotel Jerman Bersatu (PON) yang ditingkatkan	5 Km	
1105.				404 Peningkatan Jalan Wamena - Siepkosi - Hotel Jerman Bersatu (PON XX)									
					Jumlah Panjang Jalan yang ditingkatkan	5.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.08 - Rekonstruksi Jalan	Jumlah Panjang Jalan Wamena - Siepkosi - Hotel Jerman Bersatu (PON) yang ditingkatkan	5 Km	
1106.				405 Peningkatan Jalan Samabusa - Nabarua Bawah									
					Jumlah Panjang Jalan yang ditingkatkan	5.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.08 - Rekonstruksi Jalan	Jumlah Panjang Jalan Samabusa - Nabarua Bawah yang ditingkatkan	5 Km	
1107.				406 Peningkatan Jalan Nimbotong - Taja (110)									
					Jumlah Panjang Jalan yang ditingkatkan	5.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.08 - Rekonstruksi Jalan	Jumlah Panjang Jalan Nimbotong - Taja (110) yang ditingkatkan	5 Km	
1108.				407 Peningkatan Jalan Kampung Wolo (Gerbangmas)									
					Jumlah Panjang Jalan yang ditingkatkan	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.08 - Rekonstruksi Jalan	Jumlah Panjang Jalan Kampung Wolo yang ditingkatkan	5 Km	
1109.				409 Peningkatan Jalan Burmeso - Gesa - Barapasi (118)									
					Jumlah Panjang Jalan yang ditingkatkan	5.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.08 - Rekonstruksi Jalan	Jumlah Panjang Jalan Burmeso - Gesa - Barapasi (118) yang ditingkatkan	5 Km	
1110.				410 Peningkatan Jalan Kanggime - Mamit									
					Jumlah Panjang Jalan yang ditingkatkan	30.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.08 - Rekonstruksi Jalan	Jumlah Panjang Jalan Kanggime - Mamit yang ditingkatkan	5 Km	
1111.				412 Peningkatan Jalan Alternatif Kampung Harapan Dalam (PON XX)									
					Jumlah Panjang Jalan yang ditingkatkan	5.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.08 - Rekonstruksi Jalan	Jumlah Panjang Jalan Alternatif Kampung Harapan Dalam (PON) yang ditingkatkan	5 Km	
1112.				413 Peningkatan Jalan Koya - Venue PON XX									
					Jumlah Panjang Jalan yang ditingkatkan	5.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.08 - Rekonstruksi Jalan	Jumlah Panjang Jalan Koya - Venue PON yang ditingkatkan	5 Km	
1113.				414 Peningkatan Jalan Moso - Skofro									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Panjang Jalan yang telah ditingkatkan	5.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.08 - Rekonstruksi Jalan	Jumlah Panjang Jalan Moso - Skofro yang ditingkatkan	5 Km	
1114.				415 Peningkatan Jalan Bukit Kolengger (PON XX)									
					Panjang Jalan yang ditingkatkan	5.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.08 - Rekonstruksi Jalan	Jumlah Panjang Jalan Bukit Kolengger (PON) yang ditingkatkan	5 Km	
1115.				416 Peningkatan Jalan Pembangunan (PON XX)									
					Panjang Jalan yang ditingkatkan	5.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.08 - Rekonstruksi Jalan	Jumlah Panjang Jalan Pembangunan (PON) yang ditingkatkan	5 Km	
1116.				417 Peningkatan Jalan Masuk Stadion Katapal (PON XX)									
					Panjang Jalan yang ditingkatkan	5.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.08 - Rekonstruksi Jalan	Jumlah Panjang Jalan Masuk Stadion Katapal (PON) yang ditingkatkan	5 Km	
1117.				418 Peningkatan Jalan Masuk Otonom Kotaraja (PON XX)									
					Panjang Jalan yang ditingkatkan	5.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.08 - Rekonstruksi Jalan	Jumlah Panjang Jalan Masuk Otonom Kotaraja (PON) yang ditingkatkan	5 Km	
1118.				419 Peningkatan Jalan Poros SP V - SP II (PON XX)									
					Panjang Jalan yang ditingkatkan	5.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.08 - Rekonstruksi Jalan	Jumlah Panjang Jalan Poros SP V - SP II (PON) yang ditingkatkan	5 Km	
1119.				420 Peningkatan Jalan Masuk Mimika Sport Complex (PON XX)									
					Panjang Jalan yang ditingkatkan	5.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.08 - Rekonstruksi Jalan	Jumlah Panjang Jalan Masuk Mimika Sport Complex (PON) yang ditingkatkan	5 Km	
1120.				421 Peningkatan Jalan Diponegoro (PON XX)									
					Panjang Jalan yang ditingkatkan	5.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.08 - Rekonstruksi Jalan	Jumlah Panjang Jalan Diponegoro (PON) yang ditingkatkan	5 Km	
1121.				422 Peningkatan Jalan DI Panjaitan (PON XX)									
					Panjang Jalan yang ditingkatkan	5.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.08 - Rekonstruksi Jalan	Jumlah Panjang Jalan DI Panjaitan (PON) yang ditingkatkan	5 Km	
1122.				423 Peningkatan Jalan Stevanus Rumbewas (PON XX)									
					Panjang Jalan yang ditingkatkan	5.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.08 - Rekonstruksi Jalan	Jumlah Panjang Jalan Stevanus Rumbewas (PON) yang ditingkatkan	5 Km	
1123.				424 Peningkatan Jalan Maluku Serui (PON XX)									
					Panjang Jalan yang ditingkatkan	5.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.08 - Rekonstruksi Jalan	Jumlah Panjang Jalan Maluku Serui (PON) yang ditingkatkan	5 Km	

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1124.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	31 Peningkatan Jalan dan Jembatan	Panjang jalan dalam kondisi mantap; Panjang jembatan dalam kondisi mantap	425 Peningkatan Jalan Sudirman (PON XX)									
					Panjang Jalan yang ditingkatkan	5.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.08 - Rekonstruksi Jalan	Jumlah Panjang Jalan Sudirman (PON) yang ditingkatkan	5 Km	
1125.				426 Peningkatan Jalan A. Dahlan - Pattimura (PON XX)									
					Panjang Jalan yang ditingkatkan	5.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.08 - Rekonstruksi Jalan	Jumlah Panjang Jalan A. Dahlan - Pattimura (PON) yang ditingkatkan	5 Km	
1126.				427 Peningkatan Jalan Wamena - Temia - Wogi									
					Jumlah Panjang Jalan yang ditingkatkan	15.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.08 - Rekonstruksi Jalan	Jumlah Panjang Jalan Wamena - Temia - Wogi yang ditingkatkan	3 Km	
1127.				429 Peningkatan Jalan dan Jembatan di Prov. Papua									
					Panjang Jalan yang ditingkatkan	50.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.08 - Rekonstruksi Jalan	Jumlah Panjang Jalan dan Jembatan di Provinsi Papua yang ditingkatkan	15 Km	
1128.				447 Peningkatan Jalan Kenyam - Bandara Baru									
					Panjang Jalan yang dibangun	20.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.08 - Rekonstruksi Jalan	Jumlah Panjang Jalan Kenyam - Bandara Baru yang ditingkatkan	4 Km	
1129.				465 Peningkatan Jalan Tiom-Iringgambut - Indawa									
					Jumlah Panjang Jalan yang ditingkatkan	52.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.08 - Rekonstruksi Jalan	Jumlah Panjang Jalan Tiom - Iringgambut - Indawa yang ditingkatkan	10 Km	
1130.				466 Peningkatan Jalan Nabire - Waroki - Karadiri (Bandara Baru)									
					Jumlah Panjang Jalan yang ditingkatkan	15.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.08 - Rekonstruksi Jalan	Jumlah Panjang Jalan Nabire - Waroki - Karadiri (Bandara Baru) yang ditingkatkan	3 Km	
1131.				467 Peningkatan Jalan Elelim - Kobakma									
					Jumlah Panjang Jalan yang ditingkatkan	52.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.08 - Rekonstruksi Jalan	Jumlah Panjang Jalan Elelim - Kobakma yang ditingkatkan	10 Km	
1132.				468 Peningkatan Jalan Mur - Keppi									
					Jumlah Panjang Jalan yang ditingkatkan	30.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.08 - Rekonstruksi Jalan	Jumlah Panjang Jalan Mur - Keppi yang ditingkatkan	8 Km	
1133.				469 Peningkatan Jalan Arso PIR II									
					Jumlah Panjang Jalan yang ditingkatkan	3.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.08 - Rekonstruksi Jalan	Jumlah Panjang Jalan Arso PIR II yang ditingkatkan	15 Km	
1134.				470 Peningkatan Jalan Muai - Musatfak - Silo - Soekarno Doga									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Jumlah Panjang Jalan yang ditingkatkan	20.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.08 - Rekonstruksi Jalan	Jumlah Panjang Jalan Muai - Musatfak - Silo - Soekarno Doga yang ditingkatkan	4 Km	
1135.				472 Peningkatan Jalan Melagaineri - Kuyawage									
					Jumlah Panjang Jalan yang ditingkatkan	20.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.08 - Rekonstruksi Jalan	Jumlah Panjang Jalan Melagaineri - Kuyawage yang ditingkatkan	4 Km	
1136.				473 Peningkatan Jalan Melagaineri - Wabiragi									
					Jumlah Panjang Jalan yang ditingkatkan	15.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.08 - Rekonstruksi Jalan	Jumlah Panjang Jalan Melagaineri - Wabiragi yang ditingkatkan	3 Km	
1137.				474 Peningkatan Jalan Illu - Yamoneri - Melagaineri									
					Jumlah Panjang Jalan yang ditingkatkan	5.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.08 - Rekonstruksi Jalan	Jumlah Panjang Jalan Illu Yamoneri - Melagaineri yang ditingkatkan	5 Km	
1138.				476 Peningkatan Jalan Kaugapu - SP V									
					Jumlah Panjang Jalan yang ditingkatkan	25.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.08 - Rekonstruksi Jalan	Jumlah Panjang Jalan Kaugapu - SP V yang ditingkatkan	5 Km	
1139.				477 Peningkatan Jalan Kurima - Tangma - Uka									
					Jumlah Panjang Jalan yang ditingkatkan	15.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.08 - Rekonstruksi Jalan	Jumlah Panjang Jalan Kurima - Tangma - Uka yang ditingkatkan	3 Km	
1140.				478 Peningkatan Jalan Tiom - Gimbuk									
					Jumlah Panjang Jalan yang ditingkatkan	18.500.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.08 - Rekonstruksi Jalan	Jumlah Panjang Jalan Tiom - Gimbuk yang ditingkatkan	3 Km	
1141.				486 Peningkatan Jalan Kawasan Softball/Base Ball Uncen/Rektorat									
					Panjang jalan yang ditingkatkan	1.629.400.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.08 - Rekonstruksi Jalan	Panjang jalan yang ditingkatkan	0.4 Km	
1142.				488 Peningkatan Jalan Tiom - Balingga									
					Panjang jalan yang ditingkatkan	25.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.08 - Rekonstruksi Jalan	Panjang jalan Tiom - Balingga yang ditingkatkan	625 Km	
1143.				489 Peningkatan Jalan Kuburan Buper									
					Panjang jalan yang ditingkatkan	10.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.08 - Rekonstruksi Jalan	Panjang jalan yang ditingkatkan	3 Km	
1144.				490 Peningkatan Jalan Gereja GKI Getsemani Bhayangkara III									
					Panjang jalan yang ditingkatkan	3.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.08 - Rekonstruksi Jalan	Panjang jalan yang ditingkatkan	0.6 Km	

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1145.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	31 Peningkatan Jalan dan Jembatan	Panjang jalan dalam kondisi mantap; Panjang jembatan dalam kondisi mantap	491 Peningkatan Jalan Tiom - Malagaineri - Wabiragi									
					Panjang jalan yang ditingkatkan	52.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.08 - Rekonstruksi Jalan	Panjang jalan yang ditingkatkan	8.67 Km	
1146.				492 Peningkatan Jalan Goa Maria Buper - Kamwolker Waena									
					Panjang jalan yang ditingkatkan	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.08 - Rekonstruksi Jalan	Panjang jalan yang ditingkatkan	0 Km	
1147.				493 Peningkatan Jalan Dalam Kota Karubaga									
					Panjang jalan yang ditingkatkan	25.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.08 - Rekonstruksi Jalan	Panjang jalan yang ditingkatkan	5 Km	
1148.				494 Peningkatan Jalan Kota Illu									
					Panjang jalan yang ditingkatkan	25.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.08 - Rekonstruksi Jalan	Panjang jalan Kota Illu yang ditingkatkan	5 Km	
1149.				495 Peningkatan Jalan Mulia - Yamo									
					Panjang jalan yang ditingkatkan	25.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.08 - Rekonstruksi Jalan	Panjang jalan Mulia - Yamo yang ditingkatkan	5 Km	
1150.				496 Peningkatan Jalan Kota Wamena									
					Panjang jalan yang ditingkatkan	25.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.08 - Rekonstruksi Jalan	Panjang jalan Kota Wamena yang ditingkatkan	5 Km	
1151.				497 Peningkatan Jalan Gunung Susu Sawarek - Okili									
					Panjang jalan yang ditingkatkan	25.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.08 - Rekonstruksi Jalan	Panjang jalan Gunung Susu Sawarek - Okili yang ditingkatkan	5 Km	
1152.				498 Peningkatan Jalan SP V - SP III									
					Panjang jalan yang ditingkatkan	52.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.08 - Rekonstruksi Jalan	Panjang jalan yang ditingkatkan	13 Km	
1153.				499 Peningkatan Jalan Dalam Kota Ilaga									
					Panjang jalan yang ditingkatkan	25.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.08 - Rekonstruksi Jalan	Panjang jalan Dalam Kota Ilaga yang ditingkatkan	5 Km	
1154.				500 Peningkatan dan Pelebaran Jalan Yagara - Walesi									
					Panjang jalan yang ditingkatkan dan pelebaran	18.500.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.08 - Rekonstruksi Jalan	Panjang jalan Yagra - Welesi yang ditingkatkan dan pelebaran	37 Km	
1155.				501 Peningkatan dan Pelebaran Jalan Wamena - Siepkosi - Sekan									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Panjang jalan yang ditingkatkan dan pelebaran	18.500.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.08 - Rekonstruksi Jalan	Panjang jalan Wamena - Sijkosi - Sekan yang ditingkatkan dan pelebaran	37 Km	
1156.				502 Peningkatan dan Pelebaran Jalan Ibele - Taelarek									
					Panjang jalan yang ditingkatkan dan dilebarkan	120.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.08 - Rekonstruksi Jalan	Panjang jalan yang ditingkatkan dan dilebarkan	20 Km	
1157.				503 Peningkatan dan Pelebaran Jalan Pelebaga - Landia									
					Panjang jalan yang ditingkatkan dan dilebarkan	42.600.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.08 - Rekonstruksi Jalan	Panjang jalan yang ditingkatkan dan dilebarkan	7.1 Km	
1158.				504 Peningkatan Jalan Hom-Hom - Muai - Anagera									
					Panjang jalan yang ditingkatkan	89.400.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.08 - Rekonstruksi Jalan	Panjang jalan yang ditingkatkan	14.9 Km	
1159.				505 Peningkatan Jalan Masuk Gereja Baktis Independen Homo-Hom Wamena									
					Panjang jalan yang ditingkatkan	9.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.08 - Rekonstruksi Jalan	Panjang jalan yang ditingkatkan	1.5 Km	
1160.				506 Peningkatan dan Pelebaran Jalan Bolakme - Melagalome - Gamelia									
					Panjang jalan yang ditingkatkan dan dilebarkan	60.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.08 - Rekonstruksi Jalan	Panjang jalan yang ditingkatkan dan dilebarkan	10 Km	
1161.				507 Peningkatan Jalan Biuk - Yogobak									
					Panjang jalan yang ditingkatkan	20.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.08 - Rekonstruksi Jalan	Panjang jalan Biuk - Yogobak yang ditingkatkan	4 Km	
1162.				508 Pembangunan Jalan Yogobak - Alkunik									
					Panjang jalan yang ditingkatkan	90.000.000.000,00					Panjang jalan yang ditingkatkan	15 Km	
1163.				509 Peningkatan Jalan Alkunik - Mamit - Umagi									
					Panjang jalan yang ditingkatkan	90.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.08 - Rekonstruksi Jalan	Panjang jalan Alkunik - Mamit - Umagi yang ditingkatkan	18 Km	
1164.				510 Pembangunan Jalan Umagi - Douw (Air Terjun)									
					Panjang jalan yang ditingkatkan	90.000.000.000,00					Panjang jalan yang ditingkatkan	15 Km	
1165.				511 Peningkatan Jalan Kanggime - Bogonuk									
					Panjang jalan yang ditingkatkan	70.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.08 - Rekonstruksi Jalan	Panjang jalan Kanggime - Bogonuk yang ditingkatkan	14 Km	
1166.				512 Peningkatan Jalan Dalam Kota Mamit									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Panjang jalan yang ditingkatkan	18.500.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.08 - Rekonstruksi Jalan	Panjang jalan Dalam Kota Mamit yang ditingkatkan	37 Km	
1167.				513 Peningkatan Jalan Berap - Demta									
					Panjang jalan yang ditingkatkan	25.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.08 - Rekonstruksi Jalan	Panjang jalan Berap - Demta yang ditingkatkan	625 Km	
1168.				514 Peningkatan Jalan Buper - Telaga Ria									
					Panjang jalan yang ditingkatkan	28.500.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.08 - Rekonstruksi Jalan	Panjang jalan Buper - Telaga Ria yang ditingkatkan	713 Km	
1169.				515 Peningkatan Jalan Nendali - Bandara - Komba									
					Panjang jalan yang ditingkatkan	48.500.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.08 - Rekonstruksi Jalan	Panjang jalan Nendali - Bandara - Komba yang ditingkatkan	1213 Km	
1170.				516 Peningkatan Jalan Masuk LANUD Timika									
					Panjang jalan yang ditingkatkan	10.500.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.08 - Rekonstruksi Jalan	Panjang jalan Masuk LANUD Timika yang ditingkatkan	263 Km	
1171.				517 Peningkatan Jalan Makodam XVII / Cenderawasih									
					Panjang jalan yang ditingkatkan	23.500.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.08 - Rekonstruksi Jalan	Panjang jalan Makodam XVII / Cenderawasih yang ditingkatkan	588 Km	
1172.				518 Peningkatan Jalan Masuk Venue Menembak AURI Kabupaten Jayapura									
					Panjang jalan yang ditingkatkan	11.500.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.08 - Rekonstruksi Jalan	Panjang jalan Masuk Venue Menembak AURI Kabupaten Jayapura yang ditingkatkan	288 Km	
1173.				519 Peningkatan Jalan Lingkungan SP3 Mimika									
					Panjang jalan yang ditingkatkan	18.500.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.08 - Rekonstruksi Jalan	Panjang jalan Lingkungan SP3 Mimika yang ditingkatkan	463 Km	
1174.				520 Peningkatan Jalan Yokiwa									
					Panjang jalan yang ditingkatkan	21.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.08 - Rekonstruksi Jalan	Panjang jalan yang ditingkatkan	5 Km	
1175.				521 Peningkatan Jalan Mamit - Umagi									
					Panjang jalan yang ditingkatkan	25.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.08 - Rekonstruksi Jalan	Panjang jalan yang ditingkatkan	4 Km	
1176.				522 Peningkatan Jalan Doyo Lama Belakang AURI									
					Panjang jalan yang ditingkatkan	11.500.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.08 - Rekonstruksi Jalan	Panjang jalan yang ditingkatkan	2.7 Km	

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1177.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	31 Peningkatan Jalan dan Jembatan	Panjang jalan dalam kondisi mantap; Panjang jembatan dalam kondisi mantap	523 Peningkatan Jalan Weri Bukit Karma Distrik Maribu									
					Panjang jalan yang ditingkatkan	8.500.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.08 - Rekonstruksi Jalan	Panjang jalan yang ditingkatkan	2 Km	
1178.				524 Peningkatan Jalan Terey - Karaopi									
					Panjang jalan yang ditingkatkan	12.500.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.08 - Rekonstruksi Jalan	Panjang jalan yang ditingkatkan	2 Km	
1179.				525 Peningkatan Jalan Yabaso II - Stadion Basyouwe									
					Panjang jalan yang ditingkatkan	4.700.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.08 - Rekonstruksi Jalan	Panjang jalan yang ditingkatkan	75 Km	
1180.				526 Peningkatan Jalan Masuk Rumah Susun di Belakang Polres Jayapura									
					Panjang jalan yang ditingkatkan	7.014.300.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.08 - Rekonstruksi Jalan	Panjang jalan yang ditingkatkan	175 Km	
1181.				527 Peningkatan Jalan Masuk Venue Volley Koya Koso Kota Jayapura									
					Panjang jalan yang ditingkatkan	4.970.500.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.08 - Rekonstruksi Jalan	Panjang jalan yang ditingkatkan	1 Km	
1182.				528 Peningkatan Jalan Arena Motor Cross Kab. Merauke									
					Panjang jalan yang ditingkatkan	2.662.300.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.08 - Rekonstruksi Jalan	Panjang jalan yang ditingkatkan	0.6 Km	
1183.				529 Peningkatan Jalan Lingkar Luar Stadion Katapal Merauke									
					Panjang jalan yang ditingkatkan	2.925.825.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.08 - Rekonstruksi Jalan	Panjang jalan yang ditingkatkan	65 Km	
1184.				530 Peningkatan Jalan Masuk Venue Criket Doyo Baru									
					Panjang jalan yang ditingkatkan	5.200.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.08 - Rekonstruksi Jalan	Panjang jalan yang ditingkatkan	55 Km	
1185.				531 Peningkatan Jalan Masuk Rumah Susun STT OG (0,56 Km) di Kota Jayapura									
					Panjang jalan yang ditingkatkan	2.297.704.400,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.08 - Rekonstruksi Jalan	Panjang jalan yang ditingkatkan	1 Km	
1186.				532 Peningkatan Jalan BTS Kota/SMA 3 Buper Kota Jayapura									
					Panjang jalan yang ditingkatkan	2.700.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.08 - Rekonstruksi Jalan	Panjang jalan yang ditingkatkan	1 Km	

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1187.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	31 Peningkatan Jalan dan Jembatan	Panjang jalan dalam kondisi mantap; Panjang jembatan dalam kondisi mantap	533 Peningkatan Jalan Lingkar Dalam Stadion Katapal Merauke									
					Panjang jalan yang ditingkatkan	26.500.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.08 - Rekonstruksi Jalan	Panjang jalan yang ditingkatkan	7 Km	
1188.				534 Peningkatan Jalan Lingkar Sugapa									
					Panjang jalan yang ditingkatkan	35.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.08 - Rekonstruksi Jalan	Panjang jalan yang ditingkatkan	6 Km	
1189.				535 Peningkatan Jalan Yomdori - Wardo									
					Panjang jalan yang ditingkatkan	45.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.08 - Rekonstruksi Jalan	Panjang jalan yang ditingkatkan	11 Km	
1190.				536 Peningkatan Jalan Trans Yapen - Mananayam									
					Panjang jalan yang ditingkatkan	9.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.08 - Rekonstruksi Jalan	Panjang jalan yang ditingkatkan	2 Km	
1191.				537 Peningkatan Jalan Doyo Lama Sentani									
					Panjang jalan yang ditingkatkan	15.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.08 - Rekonstruksi Jalan	Panjang jalan yang ditingkatkan	2.7 Km	
1192.				538 Pengecoran Jalan Warga Kampung Koya Koso									
					Panjang jalan yang ditingkatkan	10.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.08 - Rekonstruksi Jalan	Panjang jalan yang ditingkatkan	2 Km	
1193.				539 Peningkatan Jalan Kp. Singgir - Kp. Jengku									
					Panjang jalan yang ditingkatkan	7.500.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.08 - Rekonstruksi Jalan	Panjang jalan yang ditingkatkan	8.5 Km	
1194.		32 Program Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan	Cakupan perencanaan teknis jalan dan jembatan	61 Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan di Provinsi Papua									
					Dokumen hasil perencanaan jalan dan jembatan	50.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.01 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengembangan Jaringan Jalan	Dokumen hasil perencanaan jalan dan jembatan	130 Dokumen	
1195.				120 Penyusunan IRMS dan BMS Kebinamargaan									
					Jumlah dokumen IRMS dan BMS yang tersedia	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.03 - Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah dokumen IRMS dan BMS yang tersedia	10 Dokumen	
1196.				121 Koordinasi dan Perencanaan master program Infrastruktur Jalan dan Jembatan									
					Jumlah Dokumen yang diselesaikan	10.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.01 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengembangan Jaringan Jalan	Jumlah Dokumen yang diselesaikan	1 Dokumen	
1197.				123 Survey Identifikasi Jalan dan Jembatan Provinsi Papua									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Jumlah Dokumen Informasi Jalan dan Jembatan Provinsi Papua	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.01 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengembangan Jaringan Jalan	Jumlah Dokumen Informasi Jalan dan Jembatan Provinsi Papua	1 Dokumen	
1198.				124 Pengembangan Sistem Informasi Multimedia									
					Tersedianya Sistem Informasi Publik Ke-PU-an	1.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	1.03.11.1.02 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	1.03.11.1.02.05 - Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi	Tersedianya Sistem Informasi Publik Ke-PU-an	1 Sistem	
1199.				125 Pengelolaan Data Dasar Bidang Ke-PU-an									
					Tersedianya data dasar bidang ke-PU-an	1.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	1.03.11.1.02 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	1.03.11.1.02.05 - Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi	Tersedianya data dasar bidang ke-PU-an	1 Data	
1200.		34 Program Perencanaan Tata Ruang	Jumlah dokumen rencana tata ruang yang tersusun	1 Penyusunan UPL/UKL Kawasan Patung Tuhan Yesus									
					Tersusunnya Dokumen UPL/UKL	200.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.03.12.1.01 - Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang provinsi	1.03.12.1.01.03 - Penetapan Kebijakan Dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Tersusunnya Dokumen UPL/UKL	1 Dokumen	
1201.				2 Penyusunan RTBL Destinasi Wisata Kawasan Pantai Holtekamp									
					Tersusunnya Dokumen RTBL	0,00						0 Dokumen	
1202.				3 Penyusunan RTBL Kawasan Oksibil Kabupaten Pegunungan Bintang									
					Tersusunnya Dokumen RTBL	0,00						0 Dokumen	
1203.				4 Penyusunan RTBL Kawasan Dekai Kabupaten Yahukimo									
					Tersusunnya Dokumen RTBL	0,00						0 Dokumen	
1204.				5 Penyusunan RTBL Kawasan Yalimo Kabupaten Yalimo									
					Tersusunnya Dokumen RTBL	0,00						0 Dokumen	
1205.				6 Rancangan Peraturan Daerah Kumuh Kabupaten Keerom									
					Tersusunnya Dokumen Ranperda	0,00						0 Dokumen	
1206.				7 Rancangan Peraturan Daerah Kumuh Kabupaten Jayawijaya									
					Tersusunnya Dokumen Ranperda	0,00						0 Dokumen	
1207.				8 Review RTRW Kabupaten Waropen									
					Tersusunnya Dokumen RTRW	0,00						0 Dokumen	
1208.				9 Review RTRW Kabupaten Deiyai									
					Tersusunnya Dokumen RTRW	0,00						0 Dokumen	
1209.				10 Review RTRW Kabupaten Intan Jaya									
					Tersusunnya Dokumen RTRW	0,00						0 Dokumen	
1210.				11 Rancangan Peraturan Daerah Persampahan Kabupaten Mimika									
					Tersusunnya Dokumen Ranperda	0,00						0 Dokumen	
1211.				12 Rancangan Peraturan Daerah Persampahan Kabupaten Jayawijaya									
					Tersusunnya Dokumen Ranperda	0,00						0 Dokumen	
1212.				13 Rancangan Peraturan Daerah Persampahan Kabupaten Jayapura									
					Tersusunnya Dokumen Ranperda	0,00						0 Dokumen	
1213.				14 Pengembangan Kapasitas Aparatur dalam Penataan Ruang									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Jumlah aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya	3.000.000.000,00					Jumlah aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya	1 Orang	
1214.		35 Program Pembinaan dan Pengembangan Konstruksi	Cakupan pembinaan dan pengembangan konstruksi	1 Monitoring dan Pengendalian Teknis bidang ke-PU-an									
					Jumlah Dokumen Monitoring dan Pengendalian Teknis Bidang Ke-PU-an	2.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	1.03.11.1.02 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	1.03.11.1.02.05 - Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Dokumen Monitoring dan Pengendalian Teknis Bidang Ke-PU-an	12 Dokumen	
1215.				2 Pembinaan usaha jasa konstruksi pengusaha asli Papua									
					Jumlah peserta pengusaha asli Papua	750.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	1.03.11.1.01 - Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	1.03.11.1.01.05 - Identifikasi Potensi Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Jumlah peserta pengusaha asli Papua	120 Orang Kegiatan	
1216.				6 Pelatihan dan Sosialisasi Penyusunan Analisa Harga Satuan (PAHS)									
					Jumlah Peserta yang Mengikuti Pelatihan PAHS	500.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	1.03.11.1.01 - Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	1.03.11.1.01.05 - Identifikasi Potensi Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pelatihan PAHS	80 Orang Kegiatan	
1217.				7 Core Team Pengawasan Teknis Bidang Ke-PU-An									
					Jumlah dokumen Core Team Pengawasan Teknis Bidang Ke-Pu-An	1.700.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	1.03.11.1.02 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	1.03.11.1.02.05 - Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah dokumen Core Team Pengawasan Teknis Bidang Ke-Pu-An	12 Dokumen	
1218.				8 Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah									
					Jumlah Peserta Sertifikasi Barang dan Jasa	1.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	1.03.11.1.01 - Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	1.03.11.1.01.06 - Fasilitas Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah Peserta Sertifikasi Barang dan Jasa	500 Orang Kegiatan	
1219.				9 Pengembangan dan pemanfaatan data KMN dan KMD									
					inventarisir data KMN/KMD	150.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	1.03.11.1.02 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	1.03.11.1.02.05 - Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi	inventarisir data KMN/KMD	1 Laporan	
1220.				10 Pelatihan Ketrampilan Tenaga Kerja Konstruksi dengan Mobile Training Unit (MTU)									
					Jumlah Peserta yang Terlatih konstruksi	800.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	1.03.11.1.01 - Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	1.03.11.1.01.04 - Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah Peserta yang Terlatih konstruksi	100 Orang Kegiatan	
1221.				11 Sertifikasi Ketrampilan Tenaga Kerja Konstruksi dengan Mobile Training Unit (MTU)									
					Jumlah Peserta Sertifikasi Barang dan Jasa	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	1.03.11.1.01 - Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	1.03.11.1.01.04 - Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah Peserta Sertifikasi Barang dan Jasa	100 Orang Kegiatan	
					Jumlah peserta sertifikasi tenaga kerja konstruksi	800.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	1.03.11.1.01 - Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	1.03.11.1.01.04 - Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah peserta sertifikasi tenaga kerja konstruksi	100 Orang Kegiatan	
1222.				12 Penyusunan Basic dan Unit Price Bidang Ke PU-an									
					Jumlah Dokumen Basic dan Unit Price Bidang Ke-PU-an Yang di selesaikan	1.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	1.03.11.1.02 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	1.03.11.1.02.05 - Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Dokumen Basic dan Unit Price Bidang Ke-PU-an Yang di selesaikan	1 Dokumen	
1223.				13 Kalibrasi Peralatan UPTD Balai Pengujian PU									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Jumlah alat yang dikalibrasi	700.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	1.03.11.1.01 - Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	1.03.11.1.01.07 - Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah alat yang dikalibrasi	70 Unit	
1224.				14 Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan									
					Jumlah dokumen penyelesaian tindak lanjut hasil temuan	100.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	1.03.11.1.01 - Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	1.03.11.1.01.07 - Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah dokumen penyelesaian tindak lanjut hasil temuan	1 Dokumen	
1225.				17 Bimtek Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)									
					Jumlah peserta bimbingan teknis SMK3	500.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	1.03.11.1.01 - Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	1.03.11.1.01.07 - Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah peserta bimbingan teknis SMK3	100 Orang Kegiatan	
1226.				18 Pengelolaan dan Penatausahaan Akuntansi ke-PU-an									
					Jumlah dokumen penatausahaan akuntansi ke-PU-an	500.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	1.03.11.1.01 - Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	1.03.11.1.01.03 - Penyiapan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah dokumen penatausahaan akuntansi ke-PU-an	1 Dokumen	
1227.				19 Pengembangan dan Pengelolaan Kegiatan Penunjang Kegiatan UPTD Pengujian dan Laboratorium									
					Jumlah Dokumen Kegiatan	500.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	1.03.11.1.01 - Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	1.03.11.1.01.07 - Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah Dokumen Kegiatan	1 Dokumen	
1228.				20 Penelitian Material Infrastruktur Bidang Ke-PU-an									
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian	700.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	1.03.11.1.01 - Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	1.03.11.1.01.07 - Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian	1 Dokumen	
					Jumlah Objek Material yang diteliti	0,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	1.03.11.1.01 - Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	1.03.11.1.01.07 - Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah Objek Material yang diteliti	1 Obyek	
1229.				21 Pemeliharaan Peralatan Kegiatan UPTD Pengujian Dinas PU Provinsi Papua									
					Jumlah Unit Alat Yang dipelihara	500.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	1.03.11.1.01 - Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	1.03.11.1.01.07 - Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah Unit Alat Yang dipelihara	20 Unit	
1230.				22 Pengadaan Peralatan Penunjang Jalan dan Jembatan									
					Jumlah Unit Pelatalan yang diadakan	10.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	1.03.11.1.01 - Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	1.03.11.1.01.07 - Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah Unit Pelatalan yang diadakan	4 Unit	
1231.				23 Sosialisasi Pemanfaatan Laboratorium UPTD Bidang Ke-PU-an									
					Jumlah Orang	600.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	1.03.11.1.01 - Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	1.03.11.1.01.05 - Identifikasi Potensi Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Jumlah Orang	50 Orang	
1232.				24 Pengujian Kualitas Pekerjaan Konstruksi Bidang Ke-PU-an									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Jumlah sampel objek yang diuji	500.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	1.03.11.1.01 - Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	1.03.11.1.01.07 - Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah sampel objek yang diuji	1 Sampel	
1233.				25 Survey dan Pemetaan Quarry di Provinsi Papua									
					Jumlah lokasi survey	1.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	1.03.11.1.01 - Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	1.03.11.1.01.07 - Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah lokasi survey	15 Lokasi	
1234.				26 Pelatihan Teknisi UPTD Pengujian dan Laboratorium PU									
					Jumlah peserta yang dilatih	750.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	1.03.11.1.01 - Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	1.03.11.1.01.05 - Identifikasi Potensi Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Jumlah peserta yang dilatih	25 Orang	
1235.				27 Sosialisasi Perundang-undangan Jasa Konstruksi									
					Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi	700.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	1.03.11.1.01 - Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	1.03.11.1.01.05 - Identifikasi Potensi Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi	150 Orang	
1236.				28 Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi bagi OAP									
					Jumlah Tenaga Ahli OAP yang Mengikuti Sertifikasi	400.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	1.03.11.1.01 - Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	1.03.11.1.01.05 - Identifikasi Potensi Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Jumlah Tenaga Ahli OAP yang Mengikuti Sertifikasi	100 Orang	
1237.		36 Program Pemanfaatan Ruang	Cakupan pelaksanaan pemanfaatan ruang	1 Sosialisasi Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur dan Manual Penataan Ruang									
					Jumlah Peserta Sosialisasi	200.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.03.12.1.01 - Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang provinsi	1.03.12.1.01.03 - Penetapan Kebijakan Dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Peserta Sosialisasi	80 Orang	
					Jumlah materi sosialisasi	200.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.03.12.1.01 - Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang provinsi	1.03.12.1.01.04 - Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang	Jumlah materi sosialisasi	3 Materi	
1238.				2 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemanfaatan Tata Ruang									
					Jumlah dokumen laporan monitoring dan evaluasi	500.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.03.12.1.03 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	1.03.12.1.03.02 - Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah dokumen laporan monitoring dan evaluasi	1 Dokumen	
1239.				3 Bimbingan Teknis Pemanfaatan Ruang									
					Jumlah peserta	0,00						0 Orang	
1240.		37 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Cakupan ijin pemanfaatan ruang yang sesuai dengan pola ruang	1 Penyusunan Norma, Standart dan Kriteria Pemanfaatan Ruang									
					Jumlah Norma, Standart dan Kriteria Penataan Ruang	1.000.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.03.12.1.03 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	1.03.12.1.03.01 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Norma, Standart dan Kriteria Penataan Ruang	1 Dokumen	
1241.				2 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Tentang Rencana Tata Ruang									
					Jumlah Peraturan Perundang-Undangan yang di sosialisasi	0,00						0 Peraturan	

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1242.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	15 Program Pengembangan Perumahan	Cakupan penataan lingkungan permukiman kumuh; Cakupan penduduk OAP yang memiliki rumah layak huni; Cakupan rumah layak huni yang terbangun; Persentase penduduk relokasi akibat program pemerintah yang memperoleh rumah layak huni; Rumah Layak huni yang terbangun	1 Penetapan kebijakan, strategi dan program perumahan									
					Jumlah dokumen yang tersusun	0,00	1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.05.1.01 - Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perencanaan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah	1.04.05.1.01.01 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah	Jumlah dokumen yang tersusun	1 Dokumen	
1243.				2 Penyusunan norma, standar, pedoman, dan manual (NSPM)									
					Jumlah Dokumen yang disusun	0,00	1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.04.02.1.02 - Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	1.04.02.1.02.01 - Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah Dokumen yang disusun	1 Dokumen	
1244.				3 Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan									
					Jumlah personel yang melakukan koordinasi	150.000.000,00	1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.04 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1.04.04.1.01 - Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	1.04.04.1.01.03 - Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Jumlah personel yang melakukan koordinasi	6 Orang	
1245.				4 Sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang perumahan									
					Jumlah kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan	620.000.000,00	1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.04.02.1.02 - Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	1.04.02.1.02.02 - Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak Atas Tanah dan Bangunan	Jumlah kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan	2 Kegiatan	
					Jumlah Kab/Kota yang disosialisasikan	0,00	1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.04.02.1.02 - Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	1.04.02.1.02.02 - Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak Atas Tanah dan Bangunan	Jumlah Kab/Kota yang disosialisasikan	29 Kabupaten	
1246.				5 Koordinasi pembangunan perumahan dengan lembaga/badan usaha									
					Jumlah personel yang melakukan koordinasi	0,00	1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.04.02.1.02 - Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	1.04.02.1.02.06 - Koordinasi untuk Menyepakati Penerimaan dan Jenis Pelayanan	Jumlah personel yang melakukan koordinasi	0 Orang	
1247.				6 Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu									
					Jumlah kepala keluarga yang dibantu dalam pembangunan perumahan	0,00	1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.04 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1.04.04.1.01 - Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	1.04.04.1.01.02 - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Jumlah kepala keluarga yang dibantu dalam pembangunan perumahan	0 KK	
1248.				7 Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat									
					Jumlah sarana dan prasarana rumah sederhana sehat yang dibangun	30.000.000.000,00	1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.04 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1.04.04.1.01 - Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	1.04.04.1.01.02 - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Jumlah sarana dan prasarana rumah sederhana sehat yang dibangun	15 Unit	

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1249.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	15 Program Pengembangan Perumahan	Cakupan penataan lingkungan permukiman kumuh; Cakupan penduduk OAP yang memiliki rumah layak huni; Cakupan rumah layak huni yang terbangun; Persentase penduduk relokasi akibat program pemerintah yang memperoleh rumah layak huni; Rumah Layak huni yang terbangun	8 Monitoring, evaluasi dan pelaporan									
					Jumlah kegiatan yang dimonitoring dan evaluasi	2.000.000.000,00						29 Kali	
					Jumlah Kab/Kota yang dimonitoring	0,00						0 Kabupaten	
1250.				9 Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Keerom									
					Jumlah rumah layak huni yang dibangun	0,00	1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.04.02.1.03 - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	1.04.02.1.03.05 - Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah rumah layak huni yang dibangun	5 Unit	
1251.				10 Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Mappi									
					Jumlah rumah layak huni yang dibangun	5.509.624.000,00	1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.04.02.1.03 - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	1.04.02.1.03.05 - Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah rumah layak huni yang dibangun	10 Unit	
1252.				11 Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Boven Digoel									
					Jumlah rumah layak huni yang dibangun	3.785.687.000,00	1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.04.02.1.03 - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	1.04.02.1.03.05 - Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah rumah layak huni yang dibangun	7 Unit	
1253.				12 Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Biak Numfor									
					Jumlah rumah layak huni yang dibangun	3.173.582.400,00	1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.04.02.1.03 - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	1.04.02.1.03.05 - Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah rumah layak huni yang dibangun	7 Unit	
1254.				13 Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Supiori									
					Jumlah rumah layak huni yang dibangun	2.231.972.000,00	1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.04.02.1.03 - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	1.04.02.1.03.05 - Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah rumah layak huni yang dibangun	5 Unit	
1255.				14 Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Kepulauan Yapen									
					Jumlah rumah layak huni yang dibangun	4.455.744.000,00	1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.04.02.1.03 - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	1.04.02.1.03.05 - Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah rumah layak huni yang dibangun	10 Unit	
1256.				15 Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Waropen									
					Jumlah rumah layak huni yang dibangun	2.252.712.000,00	1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.04.02.1.03 - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	1.04.02.1.03.05 - Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah rumah layak huni yang dibangun	5 Unit	
1257.				16 Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Nabire									
					Jumlah rumah layak huni yang dibangun	510.857.600,00	1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.04.02.1.03 - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	1.04.02.1.03.05 - Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah rumah layak huni yang dibangun	10 Unit	
1258.				17 Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Paniai									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Jumlah rumah layak huni yang dibangun	6.150.384.000,00	1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.04.02.1.03 - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	1.04.02.1.03.05 - Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah rumah layak huni yang dibangun	10 Unit	
1259.				18 Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Dogjai									
					Jumlah rumah layak huni yang dibangun	3.553.952.640,00	1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.04.02.1.03 - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	1.04.02.1.03.05 - Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah rumah layak huni yang dibangun	7 Unit	
1260.				19 Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Intan Jaya									
					Jumlah rumah layak huni yang dibangun	6.712.761.600,00	1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.04.02.1.03 - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	1.04.02.1.03.05 - Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah rumah layak huni yang dibangun	9 Unit	
1261.				20 Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Deiyai									
					Jumlah rumah layak huni yang dibangun	6.186.816.000,00	1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.04.02.1.03 - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	1.04.02.1.03.05 - Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah rumah layak huni yang dibangun	10 Unit	
1262.				21 Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Jayawijaya									
					Jumlah rumah layak huni yang dibangun	15.110.611.200,00	1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.04.02.1.03 - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	1.04.02.1.03.05 - Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah rumah layak huni yang dibangun	20 Unit	
1263.				22 Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Puncak Jaya									
					Jumlah rumah layak huni yang dibangun	11.201.636.852,00	1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.04.02.1.03 - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	1.04.02.1.03.05 - Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah rumah layak huni yang dibangun	15 Unit	
1264.				23 Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Lanny Jaya									
					Jumlah rumah layak huni yang dibangun	5.216.487.404,00	1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.04.02.1.03 - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	1.04.02.1.03.05 - Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah rumah layak huni yang dibangun	7 Unit	
1265.				24 Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Puncak									
					Jumlah rumah layak huni yang dibangun	17.099.524.800,00	1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.04.02.1.03 - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	1.04.02.1.03.05 - Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah rumah layak huni yang dibangun	17 Unit	
1266.				25 Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Nduga									
					Jumlah rumah layak huni yang dibangun	6.680.304.000,00	1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.04.02.1.03 - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	1.04.02.1.03.05 - Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah rumah layak huni yang dibangun	10 Unit	
1267.				26 Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Mamberamo Tengah									
					Jumlah rumah layak huni yang dibangun	18.567.765.000,00	1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.04.02.1.03 - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	1.04.02.1.03.05 - Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah rumah layak huni yang dibangun	30 Unit	
1268.				27 Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Yalimo									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Jumlah rumah layak huni yang dibangun	5.141.548.800,00	1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.04.02.1.03 - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	1.04.02.1.03.05 - Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah rumah layak huni yang dibangun	6 Unit	
1269.				28 Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Yahukimo									
					Jumlah rumah layak huni yang dibangun	2.246.272.000,00	1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.04.02.1.03 - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	1.04.02.1.03.05 - Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah rumah layak huni yang dibangun	5 Unit	
1270.				29 Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Mimika									
					Jumlah rumah layak huni yang dibangun	3.881.664.000,00	1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.04.02.1.03 - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	1.04.02.1.03.05 - Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah rumah layak huni yang dibangun	10 Unit	
1271.				30 Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Asmat									
					Jumlah rumah layak huni yang dibangun	3.181.875.200,00	1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.04.02.1.03 - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	1.04.02.1.03.05 - Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah rumah layak huni yang dibangun	7 Unit	
1272.				31 Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Mamberamo Raya									
					Jumlah rumah layak huni yang dibangun	12.009.815.700,00	1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.04.02.1.03 - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	1.04.02.1.03.05 - Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah rumah layak huni yang dibangun	19 Unit	
1273.				32 Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Sarmi									
					Jumlah rumah layak huni yang dibangun	5.265.048.880,00	1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.04.02.1.03 - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	1.04.02.1.03.05 - Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah rumah layak huni yang dibangun	10 Unit	
1274.				33 Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Merauke									
					Jumlah rumah layak huni yang dibangun	6.228.308.000,00	1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.04.02.1.03 - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	1.04.02.1.03.05 - Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah rumah layak huni yang dibangun	10 Unit	
1275.				34 Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Pegunungan Bintang									
					Jumlah rumah layak huni yang dibangun	4.316.522.000,00	1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.04.02.1.03 - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	1.04.02.1.03.05 - Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah rumah layak huni yang dibangun	7 Unit	
1276.				35 Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Jayapura									
					Jumlah rumah layak huni yang dibangun	5.052.934.400,00	1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.04.02.1.03 - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	1.04.02.1.03.05 - Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah rumah layak huni yang dibangun	12 Unit	
1277.				36 Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Tolikara									
					Jumlah rumah layak huni yang dibangun	10.794.956.924,00	1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.04.02.1.03 - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	1.04.02.1.03.05 - Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah rumah layak huni yang dibangun	15 Unit	
1278.				37 Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kota Jayapura									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Jumlah rumah layak huni yang dibangun	7.995.323.370,00	1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.04.02.1.03 - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	1.04.02.1.03.05 - Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah rumah layak huni yang dibangun	15 Unit	
1279.				42 Pembangunan Rumah Susun di Kota Jayapura									
					Jumlah rumah susun yang terbangun	0,00	1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.04.02.1.03 - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	1.04.02.1.03.04 - Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah rumah susun yang terbangun	1 Unit	
1280.				45 Pembangunan Rumah Susun di Kabupaten Merauke									
					Jumlah rumah susun yang terbangun	0,00	1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.04.02.1.03 - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	1.04.02.1.03.04 - Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah rumah susun yang terbangun	0 Unit	
1281.				48 Pembangunan rumah ramah lingkungan dengan konstruksi baja ringan di 3 Kab/Kota (pilot project)									
					Jumlah rumah konstruksi baja ringan yang terbangun	1.100.000.000,00	1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.04.02.1.03 - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	1.04.02.1.03.05 - Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah rumah konstruksi baja ringan yang terbangun	2 Unit	
1282.				49 Pembangunan Gedung Pasca sarjana Universitas Cenderawasih									
					Jumlah gedung yang dibangun	0,00						0 Lokasi	
1283.				53 Pembangunan kawasan pemukiman di Mamta									
					Jumlah kawasan yang dibangun	0,00						0 Lokasi	
1284.				54 Pengadaan lahan kawasan perumahan ASN Provinsi Papua									
					Jumlah lahan yang diadakan	75.000.000.000,00	1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.04.02.1.03 - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	1.04.02.1.03.03 - Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah lahan yang diadakan	1 Lokasi	
					Jumlah luasan yang disediakan	0,00	1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.04.02.1.03 - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	1.04.02.1.03.03 - Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah luasan yang disediakan	0 Hektar	
1285.				55 Perencanaan pembangunan kawasan perumahan ASN Provinsi Papua									
					Jumlah dokumen rencana yang dihasilkan	0,00						0 Dokumen	
1286.				56 Penyusunan Roadmap Pengembangan Perumahan dan Pemukiman									
					Jumlah dokumen yang disusun	0,00	1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.04.02.1.01 - Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	1.04.02.1.01.06 - Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah dokumen yang disusun	0 Dokumen	
1287.				59 Penataan Peningkatan Infrastruktur Kawasan Pemukiman di Kota Jayapura									
					Jumlah lokasi yang ditata	2.150.000.000,00	1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.04 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1.04.04.1.01 - Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	1.04.04.1.01.02 - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Jumlah lokasi yang ditata	2 Lokasi	
1288.				60 Penataan Peningkatan Infrastruktur Kawasan Pemukiman di Kabupaten Nabire									
					Jumlah lokasi yang ditata	2.150.000.000,00	1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.04 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1.04.04.1.01 - Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	1.04.04.1.01.02 - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Jumlah lokasi yang ditata	2 Lokasi	

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1289.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	15 Program Pengembangan Perumahan	Cakupan penataan lingkungan permukiman kumuh; Cakupan penduduk OAP yang memiliki rumah layak huni; Cakupan rumah layak huni yang terbangun; Persentase penduduk relokasi akibat program pemerintah yang memperoleh rumah layak huni; Rumah Layak huni yang terbangun	61 Penataan Peningkatan Infrastruktur Kawasan Pemukiman di Kabupaten Jayapura									
					Jumlah lokasi yang ditata	2.050.000.000,00	1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.04 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1.04.04.1.01 - Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	1.04.04.1.01.02 - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Jumlah lokasi yang ditata	2 Lokasi	
1290.				62 Penataan Peningkatan Infrastruktur Kawasan Pemukiman di Kabupaten Biak									
					Jumlah lokasi yang ditata	550.000.000,00	1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.04 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1.04.04.1.01 - Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	1.04.04.1.01.02 - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Jumlah lokasi yang ditata	1 Lokasi	
1291.				63 Penataan Peningkatan Infrastruktur Kawasan Pemukiman di Kabupaten Keerom									
					Jumlah lokasi yang ditata	625.000.000,00	1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.04 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1.04.04.1.01 - Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	1.04.04.1.01.02 - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Jumlah lokasi yang ditata	1 Lokasi	
1292.				64 Pembangunan Wisma Atlit									
					Luas Bangunan	0,00						0 M2	
1293.				65 Review Desain Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni									
					Jumlah dokumen yang tersusun	0,00						0 Dokumen	
1294.				66 Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Gedung Perkantoran Pemerintah Provinsi Papua									
					Jumlah dokumen yang disusun	0,00						0 Dokumen	
1295.				67 Inventarisasi Sarana Prasarana dan Fasilitas Umum Perekonomian									
					Jumlah lokus inventarisasi	0,00						0 Lokasi	
1296.				68 Peningkatan Sarana Prasarana Permukiman Kampung Nelayan									
					Jumlah sarana prasarana yang ditingkatkan	0,00	1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.04 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1.04.04.1.01 - Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	1.04.04.1.01.02 - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Jumlah sarana prasarana yang ditingkatkan	0 Jenis	
					Luas area permukiman yang ditingkatkan sarana prasarananya	6.500.000.000,00	1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.04 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1.04.04.1.01 - Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	1.04.04.1.01.02 - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Luas area permukiman yang ditingkatkan sarana prasarananya	6 Ha	
1297.				69 Perencanaan Teknis Bidang KePUan									
1298.				70 Pematangan Tanah Pembangunan Graha Politik Provinsi Papua									
					Bertambahnya aset tanah pemerintah provinsi papua	11.500.000.000,00	1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.04.02.1.03 - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	1.04.02.1.03.05 - Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Bertambahnya aset tanah pemerintah provinsi papua	20000 M2	
1299.				71 Pembangunan Rumah Relokasi Warga Kawasan Kampung Harapan									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Jumlah rumah relokasi warga yang terbangun	8.250.000.000,00	1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.04.02.1.03 - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	1.04.02.1.03.05 - Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah rumah relokasi warga yang terbangun	23 Unit	
1300.				72 Pembangunan Rumah Masyarakat di Koya Tengah									
					Jumlah rumah layak huni yang dibangun	10.000.000.000,00	1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.04.02.1.03 - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	1.04.02.1.03.05 - Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah rumah layak huni yang dibangun	12 Unit	
1301.				73 Pembangunan Rumah Masyarakat di Kali Biru Kotaraja Dalam									
					Jumlah rumah layak huni yang dibangun	2.600.000.000,00	1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.04.02.1.03 - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	1.04.02.1.03.05 - Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah rumah layak huni yang dibangun	4 Unit	
1302.				74 Pembangunan Rumah Guru SMAN Olah Raga Buper									
					Jumlah rumah layak huni yang dibangun	5.200.000.000,00	1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.04.02.1.03 - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	1.04.02.1.03.05 - Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah rumah layak huni yang dibangun	4 Unit	
1303.				75 Pembangunan Rumah Pastori Gereja GIDI EDEN Entrop									
					Jumlah rumah layak huni yang dibangun	700.000.000,00	1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.04.02.1.03 - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	1.04.02.1.03.05 - Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah rumah layak huni yang dibangun	1 Unit	
1304.				76 Pembangunan Rumah Kampung Asei Kecil									
					Jumlah rumah layak huni yang dibangun	5.200.000.000,00	1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.04.02.1.03 - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	1.04.02.1.03.05 - Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah rumah layak huni yang dibangun	4 Unit	
1305.				77 Pembangunan Rumah Masyarakat Numpang Geser									
					Jumlah rumah layak yang dibangun	2.100.000.000,00	1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.04.02.1.03 - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	1.04.02.1.03.05 - Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah rumah layak yang dibangun	3 Unit	
1306.				78 Pembangunan Rumah Masyarakat Kilo 9									
					Jumlah rumah layak huni yang dibangun	2.100.000.000,00	1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.04.02.1.03 - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	1.04.02.1.03.05 - Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah rumah layak huni yang dibangun	3 Unit	
1307.				79 Pembangunan Rumah Layak Huni									
					Jumlah rumah layak huni yang dibangun	10.000.000.000,00	1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.04.02.1.03 - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	1.04.02.1.03.05 - Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah rumah layak huni yang dibangun	10 Unit	
1308.				80 Pembangunan Rumah Masyarakat									
					Jumlah rumah layak huni yang dibangun	2.600.000.000,00	1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.04.02.1.03 - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	1.04.02.1.03.05 - Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah rumah layak huni yang dibangun	5 Unit	
1309.				81 Pembangunan Rumah Layak Huni Paba-Umagi-Karubaga dan Bewani									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Jumlah rumah layak huni yang dibangun	12.000.000.000,00	1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.04.02.1.03 - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	1.04.02.1.03.05 - Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah rumah layak huni yang dibangun	12 Unit	
1310.		16 Program Lingkungan Sehat Perumahan	Persentase lingkungan permukiman yang sehat; Prosentase penduduk yang terakses lingkungan sehat	1 Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan perumahan									
					Jumlah dokumen pengawasan dan pengendalian yang	0,00						0 Dokumen	
1311.				2 Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin									
					Jumlah lokasi yang terlayani	5.000.000.000,00	1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.04 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1.04.04.1.01 - Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	1.04.04.1.01.02 - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Jumlah lokasi yang terlayani	29 Lokasi	
1312.				3 Penyuluhan dan pengawasan kualitas lingkungan sehat perumahan									
					Jumlah kegiatan penyuluhan yang dilakukan	0,00						0 Kegiatan	
					Jumlah Kabupaten Yang dilakukan Penyuluhan	0,00						0 Kabupaten	
1313.				9 Perencanaan Penataan Kawasan Permukiman Danau Sentani									
					Jumlah dokumen yang tersedia	0,00	1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.04 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1.04.04.1.01 - Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	1.04.04.1.01.01 - Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Jumlah dokumen yang tersedia	0 Dokumen	
1314.				10 Penataan Kawasan Permukiman Danau Sentani									
					Jumlah permukiman yang ditata	10.186.589.700,00	1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.04 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1.04.04.1.01 - Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	1.04.04.1.01.02 - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Jumlah permukiman yang ditata	3 Unit	
1315.		17 Program Pemberdayaan komunitas Perumahan	Komunitas perumahan yang diberdayakan	1 Fasilitasi pemberian kredit mikro untuk pembangunan dan perbaikan perumahan									
					Jumlah orang yang mendapat fasilitas kredit mikro	0,00						0 Orang	
1316.				2 Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman berbasis masyarakat									
1317.		18 Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial	Penyelesaian perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial; Persentase penduduk korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	1 Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana alam									
					Jumlah rumah yang diberikan stimulasi rehabilitasi	0,00	1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.04.02.1.03 - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	1.04.02.1.03.01 - Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah rumah yang diberikan stimulasi rehabilitasi	20 Unit	
1318.				2 Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana sosial									
					Jumlah rumah yang difasilitasi dan mendapatkan stimulasi rehabilitasi	0,00	1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.04.02.1.03 - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	1.04.02.1.03.01 - Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah rumah yang difasilitasi dan mendapatkan stimulasi rehabilitasi	20 Unit	
1319.				4 Fasilitasi dan Stimulasi Rehabilitasi Rumah Akibat Bencana Alam/Sosial									
					Jumlah rumah yang difasilitasi dan mendapatkan stimulasi rehabilitasi	1.200.000.000,00	1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.04 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1.04.04.1.01 - Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	1.04.04.1.01.02 - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Jumlah rumah yang difasilitasi dan mendapatkan stimulasi rehabilitasi	2 Unit	

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1320.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	18 Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial	Penyelesaian perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial; Persentase penduduk korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	5 Pembebasan Lahan Relokasi Warga Dampak Bencana Alam Sentani di Koya									
					lahan yang dibebaskan	40.000.000.000,00	1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.04.02.1.03 - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	1.04.02.1.03.03 - Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	lahan yang dibebaskan	47 Ha	
1321.		21 Program Pembangunan Bangunan Gedung Negara	Tersedianya fasilitas pendukung penyelenggaraan pemerintahan	11 Pembangunan Gedung Kantor Gubernur Papua									
1322.				12 Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor Gubernur Papua									
					tersedianya dokumen konstruksi	0,00						0 Dokumen	
1323.				14 Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor Satpol PP Provinsi Papua									
					tersedianya dokumen konstruksi	0,00						0 Dokumen	
1324.				16 Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor Dinas PUPR Provinsi Papua									
					tersedianya dokumen konstruksi	0,00						0 Dokumen	
1325.				23 Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Jabatan Eselon II									
					tersedianya dokumen konstruksi	0,00						0 Dokumen	
1326.				24 Pembangunan Pos BMKG									
1327.				25 Pembayaran Sisa Pengadaan Tanah Graha Politik (Gedung KPU dan Gedung Bawaslu)									
1328.	Pertanahan	15 Program pembangunan sistem pendaftaran tanah	Terbangunnya sistem penataan pertanahan	3 Penyusunan data tanah									
					Jumlah data tanah yang divalidasi	500.000.000,00	2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	2.10.03 - PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	2.10.03.1.01 - Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	2.10.03.1.01.01 - Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Jumlah data tanah yang divalidasi	4 Dokumen	
1329.		16 Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Cakupan tanah adat yang terpetakan; Tingkat ketertiban penataan pertanahan	3 Rapat Koordinasi Penataan Pertanahan									
					Jumlah rapat kerja yang dilakukan	345.670.000,00	2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	2.10.10 - PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	2.10.10.1.01 - Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	2.10.10.1.01.01 - Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah rapat kerja yang dilakukan	4 Kegiatan	
					Jumlah peserta rapat koordinasi	0,00	2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	2.10.10 - PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	2.10.10.1.01 - Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	2.10.10.1.01.01 - Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah peserta rapat koordinasi	100 Orang	
1330.		17 Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Prosentase Penyelesaian konflik pertanahan	1 Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan									
					Jumlah konflik pertanahan yang terfasilitasi	725.000.000,00	2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	2.10.04 - PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	2.10.04.1.01 - Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	2.10.04.1.01.02 - Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah konflik pertanahan yang terfasilitasi	35 Kasus	
JUMLAH						13.190.711.929.076,00							

Mengetahui,
Kepala Bappeda Provinsi Papua

YOHANES WALILO, S.Sos, M.Si
NIP. 197007281997121001

JAYAPURA, 20 July 2020
KEPALA DINAS

GIRIUS ONE YOMAN, S.Pd, M.Si
NIP. 19760314 200112 1 007

**REKAPITULASI PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021
SERTA KETERKAITAN DENGAN HASIL PEMETAAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019**

PROVINSI : Papua

PERANGKAT DAERAH : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	À Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	1 Penyediaan jasa surat menyurat									
					Jumlah surat yang disediakan	15.000.000,00		1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.05.01.1.03 - Administrasi Umum	1.05.01.1.03.01 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang terkirim	1000 Surat	
2.				2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik									
					Jumlah Jasa Layanan berlangganan Listrik, Air, Telepon, Transponder	12.000.000,00		1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.05.01.1.03 - Administrasi Umum	1.05.01.1.03.02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Layanan	12 Layanan	
3.				3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor									
					Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	120.000.000,00		1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.05.01.1.03 - Administrasi Umum	1.05.01.1.03.03 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	30 Unit	
4.				6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional									
					Jumlah Unit Mobil Dinas/Operasional yang terpelihara dan Terfasilitasi Perijinannya	15.000.000,00		1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.05.01.1.03 - Administrasi Umum	1.05.01.1.03.06 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Unit Mobil Dinas/Operasional yang diservis dan dipelihara	20 Unit	
5.				8 Penyediaan jasa kebersihan kantor									
					Luas Gedung dan Halaman yang disediakan jasa kebersihan	0,00		1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.05.01.1.03 - Administrasi Umum	1.05.01.1.03.08 - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	jumlah Gedung dan Halaman yang dibersihkan	0 M2	
					Jumlah tenaga kebersihan dan Fasilitas Pendukung kebersihan kantor	0,00		1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.05.01.1.03 - Administrasi Umum	1.05.01.1.03.08 - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah tenaga kebersihan	0 Orang	
					Jumlah Jenis Bahan dan Alat Kebersihan	25.000.000,00		1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.05.01.1.03 - Administrasi Umum	1.05.01.1.03.14 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Bahan dan Alat Kebersihan	20 Jenis	
6.				10 Penyediaan alat tulis kantor									
					Jumlah jenis ATK yang disediakan	200.000.000,00		1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.05.01.1.03 - Administrasi Umum	1.05.01.1.03.10 - Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	800 Jenis	
7.				11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan									
					Jumlah barang cetakan	0,00		1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.05.01.1.03 - Administrasi Umum	1.05.01.1.03.11 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan	0 Jenis	
					Jumlah penggandaan	165.000.000,00		1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.05.01.1.03 - Administrasi Umum	1.05.01.1.03.11 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penggandaan	30000 Lembar	
					Jumlah Jenis Barang Cetak dan yang Disediakan	165.000.000,00		1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.05.01.1.03 - Administrasi Umum	1.05.01.1.03.11 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Jenis	
					Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	0,00		1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.05.01.1.03 - Administrasi Umum	1.05.01.1.03.11 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	0 Bulan	
8.				13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor									
					Jumlah peralatan dan Perlengkapan	200.000.000,00		1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.05.01.1.03 - Administrasi Umum	1.05.01.1.03.25 - Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah penggandaan peralatan kantor yang disediakan	40 Unit	
9.				15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	35.000.000,00		1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.05.01.1.03 - Administrasi Umum	1.05.01.1.03.15 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	5 Jenis	
10.				17 Penyediaan makanan dan minuman									
					Pelaksanaan penyediaan makan dan minum	125.000.000,00		1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.05.01.1.03 - Administrasi Umum	1.05.01.1.03.17 - Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Porsi makan dan minum kegiatan yang tersedia	15 Kegiatan	
					Pelaksanaan makan minum tamu dan rapat	125.000.000,00		1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.05.01.1.03 - Administrasi Umum	1.05.01.1.03.17 - Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Porsi makan dan minum yang tersedia	24 Kali Tahun	
					Pelaksanaan makan minum saat olah raga (hari Jumat)	0,00		1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.05.01.1.03 - Administrasi Umum	1.05.01.1.03.17 - Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Porsi makan dan minum yang tersedia	0 Kali	
					Tersediannya Makanan dan Minuman	0,00		1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.05.01.1.03 - Administrasi Umum	1.05.01.1.03.17 - Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Porsi makan dan minum yang tersedia	0 Bulan	
					Jumlah orang yang disediakan makan dan minuman	0,00		1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.05.01.1.03 - Administrasi Umum	1.05.01.1.03.17 - Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Porsi makan dan minum yang tersedia	0 Orang	
11.				18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah									
					Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	2.000.000.000,00		1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.05.01.1.03 - Administrasi Umum	1.05.01.1.03.18 - Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	100 Orang	
12.		2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	À Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	10 Pengadaan mebeleur									
					Jumlah mebeleur yang diadakan	150.000.000,00		1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.05.01.1.03 - Administrasi Umum	1.05.01.1.03.26 - Pengadaan Mebeleur	Jumlah mebeleur yang diadakan untuk 3 UPT	15 Unit	
13.				24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional									
					Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	0,00		1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.05.01.1.03 - Administrasi Umum	1.05.01.1.03.31 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah dan Jenis perlengkapan/peralatan gedung kantor yang dipelihara	0 Unit	
					Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	600.000.000,00		1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.05.01.1.03 - Administrasi Umum	1.05.01.1.03.31 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang	22 Unit	
					sewa kendaraan	0,00		1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.05.01.1.03 - Administrasi Umum	1.05.01.1.03.31 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan yang diperbaiki/Service	0 Bulan	
14.		3 Program peningkatan disiplin aparatur	À Meningkatnya disiplin aparatur	2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya									
					Jumlah pakaian dinas yang diadakan	500.000.000,00		1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.05.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1.05.01.1.04.02 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas sipil harian	60 Stell	
15.		5 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	À Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	1 Pendidikan dan pelatihan formal									
					Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	180.000.000,00		1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.05.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1.05.01.1.04.09 - Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparatur mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	10 Orang	
16.				2 Sosialisasi peraturan perundang-undangan									
					Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	800.000.000,00		1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.05.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1.05.01.1.04.10 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	60 Orang	
17.				4 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal									
					Jumlah aparatur yang terlatih	500.000.000,00		1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.05.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1.05.01.1.04.11 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	
18.		6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	À Meningkatnya kualitas akuntabilitas OPD	1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	30.000.000,00		1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.05.01.1.02 - Administrasi Keuangan	1.05.01.1.02.06 - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan	4 Laporan	
					Laporan LAKIP SKPD	0,00		1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.05.01.1.01 - Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.05.01.1.01.05 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan LAKIP SKPD	0 Dokumen	
19.				2 Penyusunan laporan keuangan semesteran									
					Jumlah pelaporan keuangan semesteran yang diselesaikan tepat waktu	10.000.000,00		1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.05.01.1.02 - Administrasi Keuangan	1.05.01.1.02.07 - Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Jumlah dokumen laporan	1 Laporan	
20.				4 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun									
					Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	10.000.000,00		1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.05.01.1.02 - Administrasi Keuangan	1.05.01.1.02.09 - Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	1 Laporan	
21.				5 Penyusunan Renja, RKA dan Perubahan APBD									
					Jumlah dokumen	30.000.000,00		1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.05.01.1.01 - Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.05.01.1.01.01 - Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	3 Dokumen	
22.				12 Penyusunan RENSTRA									
					Jumlah Dokumen	0,00		1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.05.01.1.01 - Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.05.01.1.01.01 - Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	0 Dokumen	
23.				13 Penyusunan SOP									
					Jumlah Dokumen	0,00		1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.05.01.1.01 - Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.05.01.1.01.04 - Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	0 Dokumen	
24.		16 Porgram Pemeliharaan Kantrantribmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Angka korban kejahatan pembunuhan per 100.000 penduduk; Cakupan penegakan Perda; Jumlah konflik horisontal; Persentase penduduk yang memperoleh layanan akibat dari penegakan perda; Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk	7 Sosialisasi Upaya pencegahan konflik sosial									
					Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi	750.000.000,00	8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	8.01.06.1.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	8.01.06.1.01.04 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi	150 Orang	
25.				8 Pemantauan dan Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing di Daerah									
					Jumlah Dokumen / Laporan yang di laporkan	750.000.000,00	8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	8.01.06.1.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	8.01.06.1.01.05 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Dokumen / Laporan yang di laporkan	5 Dokumen	

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26.	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	17 Program pengembangan wawasan kebangsaan	Cakupan fasilitasi Forkompimda; Cakupan peserta yang mengikuti kegiatan bela negara, pembauran kebangsaan, dan wawasan kebangsaan; Jumlah Pertemuan FKUB per tahun; Peningkatan wawasan kebangsaan; Persentase penanganan kasus pelanggaran HAM; Persentase peningkatan pemahaman masyarakat terhadap HAM	1 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama									
					Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi peningkatan toleransi dan kerukunan dan kehidupan beragama	600.000.000,00	8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	8.01.05.1.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	8.01.05.1.01.04 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi peningkatan toleransi dan kerukunan dan kehidupan beragama	100 Orang	
					Jumlah pengurus FKUB yang dibayarkan honorinya selama satu tahun	1.100.000.000,00	8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	8.01.05.1.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	8.01.05.1.01.04 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah pengurus FKUB yang dibayarkan honorinya selama satu tahun	43 Orang	
					Jumlah pengurus FKUB dan Sekretariat FKUB yang akan melaksanakan studi banding ke Provinsi Kalimantan Barat	0,00	8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	8.01.05.1.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	8.01.05.1.01.04 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah pengurus FKUB dan Sekretariat FKUB yang akan melaksanakan studi banding ke Provinsi Kalimantan Barat	0 Orang	
27.				4 Fasilitasi pembauran kebangsaan									
					Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi pembauran kebangsaan	500.000.000,00	8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	8.01.02.1.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	8.01.02.1.01.01 - Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi pembauran kebangsaan	60 Orang	
					Jumlah pengurus FPK Provinsi Papua yang dibayarkan honorinya selama satu tahun	500.000.000,00	8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	8.01.02.1.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	8.01.02.1.01.03 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah pengurus FPK Provinsi Papua yang dibayarkan honorinya selama satu tahun	33 Orang	
28.				5 Sosialisasi Ketahanan Bela Negara									
					Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi	600.000.000,00	8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	8.01.02.1.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	8.01.02.1.01.03 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi	100 Orang	
					Jumlah peserta dari unsur pemuda, pelajar dan mahasiswa yang bertambah pemahamannya tentang pentingnya bela negara	0,00	8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	8.01.02.1.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	8.01.02.1.01.03 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah peserta dari unsur pemuda, pelajar dan mahasiswa yang bertambah pemahamannya tentang pentingnya bela negara	100 Orang	
29.				12 Sosialisasi Peningkatan Wawasan kebangsaan									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Jumlah peserta yang terdiri dari pemuda dan pelajar yang mengikuti sosialisasi Peningkatan Wawasan Kebangsaan	600.000.000,00	8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	8.01.02.1.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	8.01.02.1.01.03 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah peserta yang terdiri dari pemuda dan pelajar yang mengikuti sosialisasi Peningkatan Wawasan Kebangsaan	100 Orang	
					Jumlah peserta pemuda dan pelajar yang meningkat pemahamannya terhadap pendidikan wawasan kebangsaan	0,00	8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	8.01.02.1.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	8.01.02.1.01.03 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah peserta pemuda dan pelajar yang meningkat pemahamannya terhadap pendidikan wawasan kebangsaan	100 Orang	
30.				13 Forum SKPD Provinsi Papua									
					Jumlah Peserta Forum	0,00	8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	8.01.02.1.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	8.01.02.1.01.03 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Peserta Forum	0 Orang	
31.				14 Pembentukan Gugus Tugas Revolusi Mental									
32.		20 Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	Cakupan penertiban dan penanggulangan penyakit masyarakat	9 Sosialisasi Bahaya Miras dan Narkoba Bagi Generasi Muda di Daerah									
					Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi	325.000.000,00	8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	8.01.05.1.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	8.01.05.1.01.04 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi	30 Orang	
					Jumlah peserta yang meningkat pemahamannya akan bahaya miras dan narkoba	0,00	8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	8.01.05.1.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	8.01.05.1.01.04 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah peserta yang meningkat pemahamannya akan bahaya miras dan narkoba	0 Orang	
33.		21 Program Pendidikan Politik Masyarakat	Cakupan muatan pendidikan politik dan demokrasi dalam pendidikan menengah; Persentase lembaga dan partai politik yang dibina; Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu	6 Fasilitasi pendidikan politik masyarakat									
					Frekuensi pelaksanaan fasilitasi pendidikan politik bagi masyarakat	930.000.000,00	8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	8.01.03.1.01 - Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	8.01.03.1.01.03 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Frekuensi pelaksanaan fasilitasi pendidikan politik bagi masyarakat	150 Kali	
34.				8 FGD Indeks Demokrasi Indonesia									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Jumlah peserta yang mengikuti FGD Indeks Demokrasi Indonesia yang terdiri dari unsur Akademisi, Ketua dan Pengurus Parpol, Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP), Unsur Pemerintah dan Perempuan	350.000.000,00	8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	8.01.03.1.01 - Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	8.01.03.1.01.02 - Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah peserta yang mengikuti FGD Indeks Demokrasi Indonesia yang terdiri dari unsur Akademisi, Ketua dan Pengurus Parpol, Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP), Unsur Pemerintah dan Perempuan	30 Orang	
35.				10 Desk Pilkada									
					Terpantaunya Pelaksanaan PILKADA di Provinsi Papua (PILGUB dan PILBUB)	800.000.000,00	8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	8.01.03.1.01 - Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	8.01.03.1.01.03 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Terpantaunya Pelaksanaan PILKADA di Provinsi Papua (PILGUB dan PILBUB)	11 Kabupaten	
36.				11 Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP)									
37.				12 Fasilitasi Kemitraan Eksekutif, Legislatif dan Parpol									
					Jumlah peserta sosialisasi Fasilitasi Kemitraan Eksekutif, Legislatif dan Parpol yang terdiri dari unsur pemerintah, pengurus parpol, ormas dan LSM	300.000.000,00	8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	8.01.03.1.01 - Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	8.01.03.1.01.03 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah peserta sosialisasi Fasilitasi Kemitraan Eksekutif, Legislatif dan Parpol yang terdiri dari unsur pemerintah, pengurus parpol, ormas dan LSM	50 Orang	
					Jumlah tenaga verifikasi bantuan keuangan parpol	120.000.000,00	8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	8.01.03.1.01 - Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	8.01.03.1.01.03 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah tenaga verifikasi bantuan keuangan parpol	30 Orang	
38.				13 Desk Pileg dan Pilpres									
					Jumlah lokasi pemantauan pelaksanaan pilpres	0,00						0 Lokasi	
39.		23 Program Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan	Persentase pembinaan terhadap LSM dan Ormas	3 Fasilitasi Pembinaan Ormas/LSM di Daerah									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Jumlah pengurus ormas/LSM yang mengikuti kegiatan sosialisasi	600.000.000,00	8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	8.01.04.1.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	8.01.04.1.01.03 - Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah pengurus ormas/LSM yang mengikuti kegiatan sosialisasi	100 Orang	
					Meningkatnya jumlah pengurus ormas/LSM tentang UU Keormasan	0,00	8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	8.01.04.1.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	8.01.04.1.01.03 - Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Meningkatnya jumlah pengurus ormas/LSM tentang UU Keormasan	100 Orang	
JUMLAH						14.837.000.000,00							

Mengetahui,
Kepala Bappeda Provinsi Papua

YOHANES WALILO, S.Sos, M.Si
NIP. 197007281997121001

JAYAPURA, 20 July 2020
Kepala Badan Kesbangpol

Musa Isir, S.Sos., MPA
NIP. 19660616 199610 1 002

**REKAPITULASI PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021
SERTA KETERKAITAN DENGAN HASIL PEMETAAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019**

PROVINSI : Papua

PERANGKAT DAERAH : Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	À Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	1 Penyediaan jasa surat menyurat									
					Jumlah surat yang disediakan	10.000.000,00		1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.05.01.1.03 - Administrasi Umum	1.05.01.1.03.01 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang terkirim	2500 Surat	
2.				2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik									
					Jumlah Jasa Layanan berlangganan Listrik, Air, Telepon, Transponder	421.100.000,00		1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.05.01.1.03 - Administrasi Umum	1.05.01.1.03.02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Layanan	12 Layanan	
3.				6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional									
					Jumlah Unit Mobil Dinas/Operasional yang terpelihara dan Terfasilitasi Perijinannya	107.900.000,00		1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.05.01.1.03 - Administrasi Umum	1.05.01.1.03.06 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Unit Mobil Dinas/Operasional yang diservis dan dipelihara	40 Unit	
4.				7 Penyediaan jasa administrasi keuangan									
					Jumlah Honor yang dibayarkan	1.836.000.000,00		1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.05.01.1.03 - Administrasi Umum	1.05.01.1.03.07 - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pegawai yang membuat laporan	45 Orang	
5.				8 Penyediaan jasa kebersihan kantor									
					Luas Gedung dan Halaman yang disediakan jasa kebersihan	0,00		1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.05.01.1.03 - Administrasi Umum	1.05.01.1.03.08 - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	jumlah Gedung dan Halaman yang dibersihkan	0 M2	
					Jumlah tenaga kebersihan dan Fasilitas Pendukung kebersihan kantor	50.000.000,00		1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.05.01.1.03 - Administrasi Umum	1.05.01.1.03.08 - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah tenaga kebersihan	1 Orang	
					Jumlah Jenis Bahan dan Alat Kebersihan	718.244.000,00		1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.05.01.1.03 - Administrasi Umum	1.05.01.1.03.14 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Bahan dan Alat Kebersihan	12 Jenis	
6.				9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja									
					Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	80.000.000,00		1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.05.01.1.03 - Administrasi Umum	1.05.01.1.03.09 - Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	35 Unit	
7.				10 Penyediaan alat tulis kantor									
					Jumlah jenis ATK yang disediakan	250.000.000,00		1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.05.01.1.03 - Administrasi Umum	1.05.01.1.03.10 - Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	45 Jenis	
8.				11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan									
					Jumlah barang cetakan	0,00		1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.05.01.1.03 - Administrasi Umum	1.05.01.1.03.11 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan	0 Jenis	
					Jumlah penggandaan	0,00		1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.05.01.1.03 - Administrasi Umum	1.05.01.1.03.11 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penggandaan	0 Lembar	
					Jumlah Jenis Barang Cetak dan yang Disediakan	107.800.000,00		1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.05.01.1.03 - Administrasi Umum	1.05.01.1.03.11 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	8 Jenis	
					Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	86.000.000,00		1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.05.01.1.03 - Administrasi Umum	1.05.01.1.03.11 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	12 Bulan	
9.				12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Jumlah Komponen Listrik yang disediakan	10.000.000,00		1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.05.01.1.03 - Administrasi Umum	1.05.01.1.03.12 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen alat pemeliharaan listrik dan genset yang disediakan	40 Buah	
10.				13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor									
					Jumlah peralatan dan Perlengkapan	86.000.000,00		1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.05.01.1.03 - Administrasi Umum	1.05.01.1.03.25 - Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan peralatan kantor yang disediakan	40 Unit	
11.				14 Penyediaan peralatan rumah tangga									
					Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	0,00		1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.05.01.1.03 - Administrasi Umum	1.05.01.1.03.14 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	0 Unit	
12.				15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan									
					Jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	20.000.000,00		1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.05.01.1.03 - Administrasi Umum	1.05.01.1.03.15 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	200 Jenis	
13.				16 Penyediaan bahan logistik kantor									
					Jumlah liter bahan bakar untuk kendaraan operasional	0,00		1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.05.01.1.03 - Administrasi Umum	1.05.01.1.03.16 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah liter bahan bakar untuk kendaraan operasional	0 Liter	
					jumlah mobilitas termasuk tenaga angkat dan turun beras ke kantor	12.000.000,00		1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.05.01.1.03 - Administrasi Umum	1.05.01.1.03.16 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah Pembelian Air Galon	12 Kali	
14.				17 Penyediaan makanan dan minuman									
					Pelaksanaan penyediaan makan dan minum	0,00		1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.05.01.1.03 - Administrasi Umum	1.05.01.1.03.17 - Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Porsi makan dan minum kegiatan yang tersedia	0 Kegiatan	
					Pelaksanaan makan minum tamu dan rapat	0,00		1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.05.01.1.03 - Administrasi Umum	1.05.01.1.03.17 - Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Porsi makan dan minum yang tersedia	0 Kali Tahun	
					Pelaksanaan makan minum saat olah raga (hari Jumat)	0,00		1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.05.01.1.03 - Administrasi Umum	1.05.01.1.03.17 - Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Porsi makan dan minum yang tersedia	0 Kali	
					Tersediannya Makanan dan Minuman	150.000.000,00		1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.05.01.1.03 - Administrasi Umum	1.05.01.1.03.17 - Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Porsi makan dan minum yang tersedia	12 Bulan	
					Jumlah orang yang disediakan makan dan minuman	10.574.650.000,00		1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.05.01.1.03 - Administrasi Umum	1.05.01.1.03.17 - Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Porsi makan dan minum yang tersedia	600 Orang	
15.				18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah									
					Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	3.147.275.000,00		1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.05.01.1.03 - Administrasi Umum	1.05.01.1.03.18 - Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	46 Orang	
16.				19 Penyediaan Jasa Pengamanan									
					Pelaksanaan pembayaran insentif bagi tenaga operator dan penjaga X-Ray VIP Room Bandara Sentani	0,00		1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.05.01.1.03 - Administrasi Umum	1.05.01.1.03.01 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa keamanan/security yang dibayarkan	0 Orang Bulan	
					Pelaksanaan pembayaran honor bagi satpam	0,00		1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.05.01.1.03 - Administrasi Umum	1.05.01.1.03.01 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa keamanan/security yang dibayarkan	0 Orang Bulan	
					Pelaksanaan uang makan satpam	0,00		1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.05.01.1.03 - Administrasi Umum	1.05.01.1.03.01 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa keamanan/security yang dibayarkan	0 Orang Bulan	
					Jumlah tenaga pengamanan	18.278.676.000,00		1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.05.01.1.03 - Administrasi Umum	1.05.01.1.03.01 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa keamanan/security yang dibayarkan	500 Orang	
17.				20 Pembuatan Aplikasi e-Surat									
					Jumlah sistem informasi	0,00						0 Aplikasi	
18.				23 Pembuatan Aplikasi Pelaporan									
					Jumlah Sistem Informasi	0,00						0 Aplikasi	
19.		2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	À Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	3 Pembangunan gedung kantor									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Luas bangunan yang dibangun	17.500.000.000,00		1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.05.01.1.03 - Administrasi Umum	1.05.01.1.03.39 - Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Luas bangunan yang dibangun	3 M2	
					Tersedianya desain perencanaan bangunan	750.000.000,00		1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.05.01.1.03 - Administrasi Umum	1.05.01.1.03.39 - Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Tersedianya desain perencanaan bangunan	1 Dokumen	
20.				4 Pengadaan mobil jabatan									
					Jumlah mobil yang diadakan	0,00		1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.05.01.1.03 - Administrasi Umum	1.05.01.1.03.20 - Pengadaan Mobil Jabatan	Jumlah mobil yang diadakan	7 Unit	
21.				5 Pengadaan kendaraan dinas/operasional									
					Jumlah kendaraan yang diadakan	0,00		1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.05.01.1.03 - Administrasi Umum	1.05.01.1.03.21 - Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda 4	5 Unit	
					Jumlah kendaraan roda 2	0,00		1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.05.01.1.03 - Administrasi Umum	1.05.01.1.03.21 - Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda 2	0 Unit	
22.				7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor									
					Jumlah pengadaan perlengkapan	150.000.000,00		1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.05.01.1.03 - Administrasi Umum	1.05.01.1.03.23 - Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan	15 Unit	
23.				9 Pengadaan peralatan gedung kantor									
					Jumlah peralatan perlengkapan	110.000.000,00		1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.05.01.1.03 - Administrasi Umum	1.05.01.1.03.25 - Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan/perlengkapan yang diadakan	20 Unit	
24.				10 Pengadaan mebeleur									
					Jumlah mebeleur yang diadakan	100.000.000,00		1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.05.01.1.03 - Administrasi Umum	1.05.01.1.03.26 - Pengadaan Mebeleur	Jumlah mebeleur yang diadakan untuk 3 UPT	30 Unit	
25.				11 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga									
					Jumlah peralatan dan perlengkapan rumah tangga yang diadakan	0,00		1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.05.01.1.03 - Administrasi Umum	1.05.01.1.03.14 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan dan perlengkapan rumah tangga yang diadakan	12 Unit	
					Jumlah peralatan dan perlengkapan rumah tangga yang diadakan	0,00		1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.05.01.1.03 - Administrasi Umum	1.05.01.1.03.14 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan dan perlengkapan rumah tangga yang diadakan	0 Set	
26.				22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor									
					Jumlah gedung kantor yang dipelihara	150.000.000,00		1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.05.01.1.03 - Administrasi Umum	1.05.01.1.03.29 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor	2 Unit	
					belanja sewa	0,00		1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.05.01.1.03 - Administrasi Umum	1.05.01.1.03.29 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung yang disewa	0 Tahun	
27.				24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional									
					Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	0,00		1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.05.01.1.03 - Administrasi Umum	1.05.01.1.03.31 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah dan Jenis perlengkapan/peralatan gedung kantor yang dipelihara	0 Unit	
					Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	1.235.000.000,00		1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.05.01.1.03 - Administrasi Umum	1.05.01.1.03.31 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang	40 Unit	
					sewa kendaraan	0,00		1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.05.01.1.03 - Administrasi Umum	1.05.01.1.03.31 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan yang diperbaiki/Service	0 Bulan	
28.				28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor									
					Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	65.000.000,00		1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.05.01.1.03 - Administrasi Umum	1.05.01.1.03.35 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	20 Unit	
29.				30 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor									
					Luas bangunan yang direhab	0,00		1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.05.01.1.03 - Administrasi Umum	1.05.01.1.03.39 - Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Jumlah bangunan yang direhab	3 M2	
30.				44 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional									
31.				46 Sewa gedung									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Jumlah gedung kantor yang disewa	0,00		1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.05.01.1.03 - Administrasi Umum	1.05.01.1.03.27 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Jumlah rumah jabatan yang terpelihara	0 Unit Tahun	
					Sewa rumah jabatan	175.000.000,00		1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.05.01.1.03 - Administrasi Umum	1.05.01.1.03.27 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Jumlah Rumah Jabatan Yang disewa	1 Unit Tahun	
32.		3 Program peningkatan disiplin aparatur	À Meningkatnya disiplin aparatur	1 Pengadaan mesin/kartu absensi									
					Jumlah Mesin /Kartu Absensi yang tersedia	18.000.000,00		1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.05.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1.05.01.1.04.01 - Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Jumlah Mesin /Kartu Absensi yang tersedia	3 Bh	
33.				2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya									
					Jumlah pakaian dinas yang diadakan	250.000.000,00		1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.05.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1.05.01.1.04.02 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas sipil harian	150 Stel	
34.				3 Pengadaan pakaian kerja lapangan									
					Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan	495.000.000,00		1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.05.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1.05.01.1.04.03 - Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan	600 Stel	
35.				4 Pengadaan pakaian KORPRI									
					jumlah pakaian KORPRI yang diadakan	0,00		1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.05.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1.05.01.1.04.04 - Pengadaan Pakaian Korpri	Jumlah pakaian KORPRI yang diadakan	150 Stel	
36.				5 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu									
					Jumlah pakaian khusus yang diadakan	0,00		1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.05.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1.05.01.1.04.05 - Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah pakaian Batik yang diadakan	600 Stel	
37.		5 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	À Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	1 Pendidikan dan pelatihan formal									
					Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	150.000.000,00		1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.05.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1.05.01.1.04.09 - Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparatur mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	3 Orang	
38.				2 Sosialisasi peraturan perundang-undangan									
					Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	0,00		1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.05.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1.05.01.1.04.10 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	100 Orang	
39.				3 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan									
					Jumlah peserta bimbingan teknis tentang implementasi peraturan perundang-undangan	0,00		1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.05.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1.05.01.1.04.11 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta bimbingan teknis tentang implementasi peraturan perundang-undangan	100 Orang	
40.				4 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal									
					Jumlah aparatur yang terlatih	253.000.000,00		1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.05.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1.05.01.1.04.11 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	
41.		6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	À Meningkatnya kualitas akuntabilitas OPD	1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD									
					Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	47.000.000,00		1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.05.01.1.02 - Administrasi Keuangan	1.05.01.1.02.06 - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan	4 Laporan	
					Laporan LAKIP SKPD	0,00		1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.05.01.1.01 - Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.05.01.1.01.05 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan LAKIP SKPD	0 Dokumen	
42.				2 Penyusunan laporan keuangan semesteran									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Jumlah pelaporan keuangan semesteran yang diselesaikan tepat waktu	11.000.000,00		1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.05.01.1.02 - Administrasi Keuangan	1.05.01.1.02.07 - Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Jumlah dokumen laporan	1 Laporan	
43.				4 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun									
					Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	17.000.000,00		1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.05.01.1.02 - Administrasi Keuangan	1.05.01.1.02.09 - Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	1 Laporan	
44.				5 Penyusunan Renja, RKA dan Perubahan APBD									
					Jumlah dokumen	49.000.000,00		1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.05.01.1.01 - Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.05.01.1.01.01 - Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	3 Dokumen	
45.				10 Forum SKPD Provinsi Papua									
					Jumlah Peserta Forum	0,00		1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.05.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1.05.01.1.04.10 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Forum	75 Orang	
46.				12 Penyusunan RENSTRA									
					Jumlah Dokumen	0,00		1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.05.01.1.01 - Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.05.01.1.01.01 - Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	0 Dokumen	
47.				13 Penyusunan SOP									
					Jumlah Dokumen	49.000.000,00		1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.05.01.1.01 - Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.05.01.1.01.04 - Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	
48.				14 Peningkatan Kapasitas PPID									
					Jumlah orang	43.000.000,00		1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.05.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1.05.01.1.04.09 - Pendidikan dan Pelatihan Formal	Pembinaan Administrasi Kepegawaian	3 Orang	
49.				15 Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM)									
					Jumlah Dokumen yang disusun	56.000.000,00		1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.05.01.1.01 - Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.05.01.1.01.05 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen yang disusun	1 Dokumen	
50.		16 Program Pemeliharaan Kantrantribmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Angka korban kejahatan pembunuhan per 100.000 penduduk; Cakupan penegakan Perda; Jumlah konflik horisontal; Persentase penduduk yang memperoleh layanan akibat dari penegakan perda; Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk	7 Sosialisasi Upaya pencegahan konflik sosial									
					Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi	336.000.000,00	8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	8.01.06.1.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	8.01.06.1.01.04 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi	100 Orang	
51.				9 Monitoring dan Evaluasi pelanggaran-pelanggaran Perda									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Tingkat Pelanggaran Perdas di Kab/Kota	368.000.000,00	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.1.02 - Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	1.05.02.1.02.02 - Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Tingkat Pelanggaran Perdas di Kab/Kota	6 Kabupaten	
					Jumlah laporan pelanggaran perda yang ditegakan	0,00	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.1.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1.05.02.1.01.02 - Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada	Jumlah laporan pelanggaran perda yang ditegakan	0 Laporan	
52.				10 Peningkatan ketrampilan dan ketangkasan lapangan									
					Jumlah yang mengikuti latihan	425.000.000,00	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.1.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1.05.02.1.01.05 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpra dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah yang mengikuti latihan	500 Orang Kali	
					Jumlah anggota Satpol PP yang terampil dan terlatih	0,00	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.1.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1.05.02.1.01.05 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpra dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah anggota Satpol PP yang terampil dan terlatih	0 Orang	
53.				11 Bimtek PERMENDAGRI Nomor 27 Tahun 2010									
					Jumlah Orang yang mengikuti Bimtek	298.000.000,00	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.1.02 - Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	1.05.02.1.02.01 - Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Orang yang mengikuti Bimtek	75 Orang	
					Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek	0,00	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.1.02 - Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	1.05.02.1.02.01 - Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek	0 Orang	
54.				12 Pelatihan dan Pembinaan PPNS									
					jumlah peserta yang mengikuti pelatihan dan pembinaan	375.000.000,00	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.1.03 - Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	1.05.02.1.03.01 - Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	jumlah peserta yang mengikuti pelatihan dan pembinaan	50 Orang	
					Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan dan pembinaan bagi PPNS	0,00	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.1.03 - Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	1.05.02.1.03.01 - Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan dan pembinaan bagi PPNS	0 Orang	
55.				13 Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja Bagi Anggota (PTI)									
					Jumlah Anggota PTI yang mengikuti Pelatihan Dasar	275.000.000,00	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.1.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1.05.02.1.01.06 - Pembinaan Jabatan Fungsional Satuan Polisi Pamongpra	Jumlah Anggota PTI yang mengikuti Pelatihan Dasar	30 Orang	
56.				14 Pendidikan dan Latihan PPNS									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat PPNS	374.000.000,00	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.1.03 - Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	1.05.02.1.03.01 - Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat PPNS	5 Orang	
57.				15 Penegakan Pelanggaran Perda dan Perkada Provinsi Papua									
					Jumlah penegakan kasus pelanggaran Perda dan Perkada Provinsi Papua	368.000.000,00	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.1.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1.05.02.1.01.02 - Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada	Jumlah penegakan kasus pelanggaran Perda dan Perkada Provinsi Papua	10 Kali	
58.				16 Penyusunan Regulasi dan Kebijakan Daerah									
					Jumlah peraturan / kebijakan daerah yang disusun	300.000.000,00	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.1.02 - Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	1.05.02.1.02.01 - Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah peraturan / kebijakan daerah yang disusun	1 Dokumen	
59.				17 Sosialisasi Perda / Perkada Provinsi Papua									
					Jumlah Peserta yang mengikuti sosialisasi	295.000.000,00	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.1.02 - Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	1.05.02.1.02.01 - Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Peserta yang mengikuti sosialisasi	100 Orang	
60.				18 Monitoring, evaluasi, dan pelaporan Satpol PP dan Satlinmas Se-Propinsi Papua									
					Jumlah data monitoring, evaluasi dan pelaporan Satpol PP dan Satlinmas Se-Propinsi Papua	327.000.000,00	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.1.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1.05.02.1.01.03 - Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tingkat Provinsi	Jumlah data monitoring, evaluasi dan pelaporan Satpol PP dan Satlinmas Se-Propinsi Papua	1 Dokumen	
					Jumlah pelaporan hasil monitoring dan evaluasi Satpol PP dan Satlinmas	0,00	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.1.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1.05.02.1.01.03 - Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tingkat Provinsi	Jumlah pelaporan hasil monitoring dan evaluasi Satpol PP dan Satlinmas	0 Laporan	
61.				19 Pengendalian Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua									
					Jumlah penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	295.000.000,00	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.1.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1.05.02.1.01.01 - Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	20 Kali	
62.				20 Pelatihan Dasar Satuan Polisi Pamong Praja Bagi anggota Pengamanan									
					Jumlah yang mengikuti latihan dasar Satpol PP	0,00	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.1.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1.05.02.1.01.05 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpra dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah yang mengikuti latihan dasar Satpol PP	0 Orang Hari	
					Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan dasar Satpol PP	785.000.000,00	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.1.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1.05.02.1.01.05 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpra dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan dasar Satpol PP	250 Orang	

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
63.	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	19 Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Rasio jumlah linmas per 10.000 penduduk; Tingkat partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan	1 Pengembangan Sistem Informasi Satpol PP									
					Jumlah Aplikasi Sistem Informasi Satpol PP	279.000.000,00	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.04 - PROGRAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN	1.05.04.1.01 - Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	1.05.04.1.01.01 - Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	Jumlah Aplikasi Sistem Informasi Satpol PP	1 Aplikasi	
64.				3 Fasilitasi pemberdayaan FKDM									
					Jumlah yang di fasilitasi dalam forum	387.000.000,00	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.1.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1.05.02.1.01.04 - Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah yang di fasilitasi dalam forum	150 Orang	
65.				5 Pelatihan Dasar Bagi Satuan Perlindungan Masyarakat (LINMAS)									
					Jumlah yang mengikuti pelatihan dasar Satlinmas	630.000.000,00	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.1.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1.05.02.1.01.05 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah yang mengikuti pelatihan dasar Satlinmas	200 Orang Hari	
66.				6 Rakernis Satpol PP Se-Provinsi Papua									
					Jumlah peserta yang mengikuti Rakernis	399.000.000,00	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.1.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1.05.02.1.01.03 - Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tingkat Provinsi	Jumlah peserta yang mengikuti Rakernis	100 Orang	
67.				8 Pemantauan Anggota Linmas dalam menghadapi Pilpres Tahun 2019									
					Jumlah kesiapan Kab/Kota dalam menghadapi Pilpres 2019	0,00	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.1.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1.05.02.1.01.04 - Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kesiapan Kab/Kota dalam menghadapi Pilpres 2019	0 Kabupaten	
68.				11 Seleksi Kompetensi Impasing Fungsional									
					jumlah anggota yang mengikuti Seleksi	220.000.000,00	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.1.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1.05.02.1.01.06 - Pembinaan Jabatan Fungsional Satuan Polisi Pamongpraja	jumlah anggota yang mengikuti Seleksi	25 Orang	
69.				12 Bimtek Pemahaman Intelijen dalam menghadapi gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat									
					Jumlah peserta yang mengikuti bimtek	183.000.000,00	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.1.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1.05.02.1.01.07 - Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah peserta yang mengikuti bimtek	50 Orang	
70.				13 Magang Penyelenggaraan Trantibumlinmas, Penegakan Perda dan Damkar									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Jumlah peserta yang mengikuti magang	200.000.000,00	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.1.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1.05.02.1.01.05 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah peserta yang mengikuti magang	20 Orang	
71.				14 Bimtek Peningkatan Kapasitas Tugas dan Fungsi Linmas Kampung									
					Jumlah peserta yang mengikuti bimtek	358.000.000,00	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.1.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1.05.02.1.01.04 - Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah peserta yang mengikuti bimtek	100 Orang	
72.				15 Pemberdayaan Satlinmas dan masyarakat dalam pengamanan Swakarsa Se-Papua									
					Jumlah Satlinmas dan masyarakat yang diberdayakan dalam pengamanan lingkungan	375.000.000,00	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.1.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1.05.02.1.01.04 - Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Satlinmas dan masyarakat yang diberdayakan dalam pengamanan lingkungan	100 Orang	
73.		20 Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	Cakupan penertiban dan penanggulangan penyakit masyarakat	9 Sosialisasi Bahaya Miras dan Narkoba Bagi Generasi Muda di Daerah									
					Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi	0,00	8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	8.01.05.1.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	8.01.05.1.01.04 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi	0 Orang	
					Jumlah peserta yang meningkat pemahamannya akan bahaya miras dan narkoba	289.000.000,00	8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	8.01.05.1.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	8.01.05.1.01.04 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah peserta yang meningkat pemahamannya akan bahaya miras dan narkoba	100 Orang	
74.				10 Operasi / Penertiban PKL, PSK dan Anak Sekolah									
					Jumlah operasi dan penertiban PKL,PSK dan anak sekolah	260.000.000,00	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.1.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1.05.02.1.01.02 - Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada	Jumlah operasi dan penertiban PKL,PSK dan anak sekolah	35 Orang Kali	
75.				12 Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba									
					Jumlah Penyuluhan Miras yang dilakukan	374.000.000,00	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.1.02 - Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	1.05.02.1.02.01 - Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Penyuluhan Miras yang dilakukan	5 Kali	
76.				13 Bimtek Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Trantibum Satpol PP									
					Jumlah peserta yang mengikuti bimtek	265.000.000,00	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.1.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1.05.02.1.01.03 - Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tingkat Provinsi	Jumlah peserta yang mengikuti bimtek	100 Orang	

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
77.	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	20 Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	Cakupan penertiban dan penanggulangan penyakit masyarakat	14 Rakorda Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Se-Provinsi Papua									
					Jumlah Peserta yang mengikuti Rakorda	350.000.000,00	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.1.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1.05.02.1.01.03 - Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tingkat Provinsi	Jumlah Peserta yang mengikuti Rakorda	100 Orang	
78.				15 Bimtek Pemahaman Tuposi Satpol PP dalam Pengendalian Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat									
					Jumlah peserta yang mengikuti bimtek	415.000.000,00	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.1.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1.05.02.1.01.05 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpra dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah peserta yang mengikuti bimtek	250 Orang	
79.				16 Rakorda PPNS Se-Papua									
					Jumlah peserta yang mengikuti Rakorda	297.000.000,00	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.1.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1.05.02.1.01.03 - Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tingkat Provinsi	Jumlah peserta yang mengikuti Rakorda	100 Orang	
80.				17 Forum Sinkronisasi Program dan Kegiatan Satpol PP									
					Jumlah peserta yang mengikuti pertemuan	257.000.000,00	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.1.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1.05.02.1.01.03 - Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tingkat Provinsi	Jumlah peserta yang mengikuti pertemuan	50 Orang	
					Jumlah peserta yang mengikuti forum	0,00	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.1.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1.05.02.1.01.03 - Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tingkat Provinsi	Jumlah peserta yang mengikuti forum	0 Orang	

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
81.	Ketertarikan dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	22 Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Cakupan Kampung dengan status Tangguh Bencana ; Cakupan lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah ; Cakupan pengembangan EWS (early warning systems) kebencanaan ; Meningkatnya kesiapsiagaan; Persentase Daerah Rawan Bencana yang dibina; Persentase Daerah Terkena Bencana yang telah Tertangani; Persentase kesiapsiagaan penanganan bencana; Prosentase Peningkatan Pelayanan Pemulihan Terkena Dampak Bencana; Rata-rata Waktu Respon Terhadap Kejadian Bencana; Terwujudnya Pencegahan Dini dan Penganggulangan Korban Bencana Alam; Tingkat fasilitas penanganan pasca bencana; meningkatnya daerah terkena bencana yang tertangani; meningkatnya keandalan dan kecepatan dalam penanganan darurat bencana	5 Survey dan pemetaan Daerah Rawan Bencana dan Pengadaan Pemasangan Rambu - Rambu									
					Jumlah dokumen yang dihasilkan	300.000.000,00	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.1.01 - Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	1.05.03.1.01.01 - Penyusunan Kajian Resiko Bencana Provinsi	Jumlah dokumen yang dihasilkan	6 Dokumen	
82.				8 Penyediaan dan Penyiapan Stok Logistik (Buffer Stok) Penanggulangan Bencana di Provinsi Papua									
					Jumlah Jenis Logistik yang di sediakan	1.000.000.000,00	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.1.03 - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.05.03.1.03.04 - Penyediaan Logistik Penyelatam dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Jenis Logistik yang di sediakan	15 Jenis	
83.				9 Rapat Inventarisasi Kesiediaan Kebutuhan Logistik PB									
					Jumlah Pertemuan yang dilakukan	400.000.000,00	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.1.03 - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.05.03.1.03.04 - Penyediaan Logistik Penyelatam dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Pertemuan yang dilakukan	2 Kali	
84.				10 Pelatihan Manajemen Logistik dan Peralatan PB									
					Jumlah Peserta Pelatihan Manajemen Logistik dan Peralatan PN	450.000.000,00	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.1.03 - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.05.03.1.03.04 - Penyediaan Logistik Penyelatam dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Peserta Pelatihan Manajemen Logistik dan Peralatan PN	29 Orang	
					jumlah kab/kota yang hadir	0,00	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.1.03 - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.05.03.1.03.04 - Penyediaan Logistik Penyelatam dan Evakuasi Korban Bencana	jumlah kab/kota yang hadir	0 Kabupaten	
85.				13 Kegiatan Bulan Bhakti PRB (Setiap Bulan Oktober)									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Jumlah Peserta Sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana	0,00	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.1.01 - Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	1.05.03.1.01.02 - Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	Jumlah Peserta Sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana	100 Orang	
					Jumlah Kegiatan PRB yang akan dilaksanakan	400.000.000,00	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.1.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.1.02.05 - Pengelolaan Risiko Bencana	Jumlah Kegiatan PRB yang akan dilaksanakan	1 Kegiatan	
86.				14 RAKERNIS dan Evaluasi BPBD Se- Papua									
					Jumlah Kabupaten/Kota yang mengikuti Rakernis dan Evaluasi BPBD se - Provinsi Papua	800.000.000,00	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.1.04 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1.05.03.1.04.02 - Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	Jumlah Kabupaten/Kota yang mengikuti Rakernis dan Evaluasi BPBD se - Provinsi Papua	29 Kabupaten	
87.				15 Fasilitasi dan Penguatan Forum PRB									
					Jumlah Kabupaten yang dapat di fasilitasi Forum PRB nya	250.000.000,00	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.1.04 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1.05.03.1.04.03 - Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah Kabupaten yang dapat di fasilitasi Forum PRB nya	1 Kabupaten	
88.				16 Simulasi Peralatan Teknis Penanggulangan Bencana									
					Jumlah yang mengikuti simulasi	259.000.000,00	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.1.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.1.02.02 - Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Jumlah yang mengikuti simulasi	50 Orang Hari	
89.				18 Sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana									
					Jumlah Peserta Sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana	139.000.000,00	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.1.01 - Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	1.05.03.1.01.02 - Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	Jumlah Peserta Sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana	100 Orang	
90.				36 BinteK Jitu-PB/PDNa									
					Jumlah Peserta Pelatihan BinteK Jitu-PB/PDNa	400.000.000,00	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.1.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.1.02.07 - Penanganan Pascabencana	Jumlah Peserta Pelatihan BinteK Jitu-PB/PDNa	60 Orang	
					Jumlah pendamping yang mengikuti Pelatihan JITU PB/PDNa	0,00	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.1.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.1.02.07 - Penanganan Pascabencana	Jumlah pendamping yang mengikuti Pelatihan JITU PB/PDNa	60 Orang	
91.				44 Pelatihan Petugas Psikologi Pasca Bencana									
					Jumlah Peserta Petugas Psikologi Pasca Bencana	400.000.000,00	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.1.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.1.02.07 - Penanganan Pascabencana	Jumlah Peserta Petugas Psikologi Pasca Bencana	60 Orang	
92.				58 Penyusunan Rencana Kontijensi PB Kesiapsiagaan									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Jumlah Dokumen yang dihasilkan	400.000.000,00	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.1.01 - Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	1.05.03.1.01.01 - Penyusunan Kajian Resiko Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen yang dihasilkan	2 Dokumen	
93.				59 Pembentukan Desa/Kampung Tangguh									
					Jumlah Desa/Kampung Tangguh yang terbentuk	450.000.000,00	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.1.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.1.02.06 - Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah Desa/Kampung Tangguh yang terbentuk	2 Kampung	
94.				60 Gladi Lapangan Penanggulangan Bencana									
					jumlah kegiatan gladi lapangan yang dilakukan	400.000.000,00	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.1.01 - Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	1.05.03.1.01.02 - Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	jumlah kegiatan gladi lapangan yang dilakukan	1 Kegiatan	
95.				61 Bimtek dan Pembentukan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana									
					Jumlah orang yang mengikuti Bimtek	274.000.000,00	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.1.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.1.02.08 - Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Jumlah orang yang mengikuti Bimtek	75 Orang Hari	
96.				63 Fasilitasi dan Legislasi RPB									
					Jumlah Raperda yang dilegislasikan	200.000.000,00	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.1.04 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1.05.03.1.04.01 - Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah Raperda yang dilegislasikan	1 Dokumen	
97.				70 Bimtek Tenaga Pendampingan Rehabilitasi dan Rekonstruksi PB									
					Jumlah Orang yang latih	550.000.000,00	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.1.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.1.02.07 - Penanganan Pascabencana	Jumlah Orang yang latih	60 Orang	
98.				76 Rapid Assesment Pasca Bencana									
					Jumlah kabupaten/kota yang akan dilaksanakan Rapid Assessment	350.000.000,00	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.1.03 - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.05.03.1.03.02 - Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Jumlah kabupaten/kota yang akan dilaksanakan Rapid Assessment	2 Kabupaten	
99.				77 Monitoring dan Evaluasi Penanganan Pasca Bencana									
					Jumlah Kabupaten/Kota yang dipantau dan dievaluasi	450.000.000,00	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.1.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.1.02.07 - Penanganan Pascabencana	Jumlah Kabupaten/Kota yang dipantau dan dievaluasi	3 Kabupaten	
100.				80 Pengembangan Sistem Informasi BPBD (Operasional Pusdalops)									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					jumlah bulan operasional pusdalops	570.000.000,00	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.1.01 - Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	1.05.03.1.01.02 - Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	jumlah bulan operasional pusdalops	12 Bulan	
101.				81 Sewa Rumah Dinas Jabatan									
					Jumlah unit Rumah Dinas Jabatan	150.000.000,00						1 Unit	
102.				86 Operasional Pengendalian Pemadam Kebakaran									
					Jumlah operasi pemadam kebakaran	258.000.000,00	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.04 - PROGRAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN	1.05.04.1.01 - Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	1.05.04.1.01.05 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penanganan Kebakaran	Jumlah operasi pemadam kebakaran	22 Orang Kali	
103.				88 Bimtek TOT Penanggulangan Bencana									
					Jumlah Peserta yang mengikuti Bimtek TOT Penanggulangan Bencana	500.000.000,00	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.1.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.1.02.02 - Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Jumlah Peserta yang mengikuti Bimtek TOT Penanggulangan Bencana	30 Orang	
104.				89 Assesment Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana									
					jumlah laporan	350.000.000,00	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.1.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.1.02.08 - Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	jumlah laporan	2 Dokumen	
105.				90 Pembangunan Pagar Kantor BPBD Provinsi Papua									
					tersedianya pagar pengaman	3.000.000.000,00					tersedianya pagar pengaman	119 M2	
106.				91 Pendidikan dan Latihan Pemadam Kebakaran									
					Jumlah anggota yang mengikuti Diklat Pemadam Kebakaran	275.000.000,00	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.04 - PROGRAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN	1.05.04.1.01 - Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	1.05.04.1.01.03 - Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	Jumlah anggota yang mengikuti Diklat Pemadam Kebakaran	5 Orang	
107.				92 Bimtek Pemahaman teknik penanganan Kebakaran bagi masyarakat									
					Jumlah peserta yang mengikuti bimtek	295.000.000,00	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.04 - PROGRAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN	1.05.04.1.01 - Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	1.05.04.1.01.04 - Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan Dalam Teknik Penanganan Kebakaran	Jumlah peserta yang mengikuti bimtek	100 Orang	
108.				93 Pelatihan teknik penanganan kebakaran bagi anggota Damkar									
					Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan	300.000.000,00	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.04 - PROGRAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN	1.05.04.1.01 - Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	1.05.04.1.01.03 - Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan	50 Orang	
109.				94 Pelatihan Tenaga Pendamping Pembentukan Desa Tangguh Bencana									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Jumlah Tenaga Pendamping Pembentukan Desa Tangguh Bencana yang terlatih	250.000.000,00	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.1.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.1.02.02 - Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Jumlah Tenaga Pendamping Pembentukan Desa Tangguh Bencana yang terlatih	30 Orang	
110.				95 Pembentukan Sekolah Aman Bencana									
					jumlah sekolah aman bencana yang terbentuk	350.000.000,00	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.1.01 - Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	1.05.03.1.01.02 - Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	jumlah sekolah aman bencana yang terbentuk	5 Unit	
111.				96 Penyusunan Regulasi Bidang Kebencanaan									
					jumlah regulasi bidang kebencanaan yang tersusun	300.000.000,00	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.1.04 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1.05.03.1.04.01 - Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah	jumlah regulasi bidang kebencanaan yang tersusun	2 Dokumen	
112.				98 Penyusunan Indeks Ketahanan Daerah									
					jumlah kabupaten/kota yang ditentukan indeks ketahanan daerahnya	400.000.000,00	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.1.01 - Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	1.05.03.1.01.01 - Penyusunan Kajian Resiko Bencana Provinsi	jumlah kabupaten/kota yang ditentukan indeks ketahanan daerahnya	1 Kabupaten	
113.				99 Pembentukan Forum PRB									
					Jumlah Forum yang Terbentuk	300.000.000,00	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.1.04 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1.05.03.1.04.03 - Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah Forum yang Terbentuk	2 Kelompok	
114.				100 Kerjasama dengan Pihak Swasta									
					Jumlah kerjasama dengan pihak swasta	250.000.000,00	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.1.04 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1.05.03.1.04.03 - Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah kerjasama dengan pihak swasta	5 Lembaga	
115.				101 Pemasangan Sistem Peringatan Dini									
					jumlah alat sistem peringatan dini yang terpasang	0,00	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.1.01 - Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	1.05.03.1.01.03 - Pengembangan Sistem Peringatan Dini (Early Warning System) Bencana	jumlah alat sistem peringatan dini yang terpasang	0 Unit	
116.				102 Pembuatan dan Pemasangan Rambu, papan informasi dan jalur evakuasi									
					jumlah rambu, papan informasi dan jalur evakuasi yang dibuat dan terpasang	450.000.000,00	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.1.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.1.02.05 - Pengelolaan Risiko Bencana	jumlah rambu, papan informasi dan jalur evakuasi yang dibuat dan terpasang	1 Buah	
117.				103 Melaksanakan Uji Lapang Rekon									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					jumlah uji lapangan rekon yang dilakukan	400.000.000,00	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.1.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.1.02.05 - Pengelolaan Risiko Bencana	jumlah uji lapangan rekon yang dilakukan	2 Kali	
118.				104 Mobilisasi TRC									
					jumlah mobilisasi	500.000.000,00	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.1.03 - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.05.03.1.03.02 - Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	jumlah mobilisasi	5 Kali	
119.				105 Rakor Kedaruratan									
					jumlah kab/kota yang hadir	750.000.000,00	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.1.04 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1.05.03.1.04.02 - Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	jumlah kab/kota yang hadir	29 Kabupaten	
120.				106 Monev ketersediaan Kebutuhan Logpal									
					jumlah kab/kota yang dimonev	175.000.000,00	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.1.03 - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.05.03.1.03.04 - Penyediaan Logistik Penyelamat dan Evakuasi Korban Bencana	jumlah kab/kota yang dimonev	5 Kabupaten	
121.				107 Rapat Penguatan Logistik dan Peralatan PB									
					jumlah kabupaten/kota yang hadir	450.000.000,00	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.1.03 - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.05.03.1.03.04 - Penyediaan Logistik Penyelamat dan Evakuasi Korban Bencana	jumlah kabupaten/kota yang hadir	29 Kabupaten	
122.				108 Pengadaan dan Pendorongan Peralatan PB									
					jumlah lokasi yang menerima layanan distribusi peralatan kebencanaan	1.000.000.000,00	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.1.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.1.02.04 - Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	jumlah lokasi yang menerima layanan distribusi peralatan kebencanaan	2 Kabupaten	
123.				111 Peningkatan standarisasi pergudangan peralatan Penanggulangan Bencana									
124.				112 Pembuatan Aplikasi SINDIB (Sistem Manajemen Data dan Informasi Bencana)									
					jumlah aplikasi yang dihasilkan	0,00						0 Unit	
125.				113 Pembangunan Tower (2 RPU) Radio Komunikasi									
126.				114 Pengadaan Repiter Radio HF									
					jumlah repiter yang diadakan	0,00						0 Buah	
127.				115 Peningkatan kapasitas Operator Pusdalops									
					jumlah operator yang dilatih	175.000.000,00	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.1.01 - Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	1.05.03.1.01.02 - Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	jumlah operator yang dilatih	6 Orang	
128.				116 Pelatihan Pendampingan Ekonomi di Daerah Pasca Bencana									
129.				117 Pendampingan Ekonomi di Daerah Pasca Bencana									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
130.	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	22 Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Cakupan Kampung dengan status Tangguh Bencana ; Cakupan lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah ; Cakupan pengembangan EWS (early warning systems) kebencanaan ; Meningkatnya kesiapsiagaan; Persentase Daerah Rawan Bencana yang dibina; Persentase Daerah Terkena Bencana yang telah Tertangani; Persentase kesiapsiagaan penanganan bencana; Prosentase Peningkatan Pelayanan Pemulihan Terkena Dampak Bencana; Rata-rata Waktu Respon Terhadap Kejadian Bencana; Terwujudnya Pencegahan Dini dan Penganggulangan Korban Bencana Alam; Tingkat fasilitas penanganan pasca bencana; meningkatnya daerah terkena bencana yang tertangani; meningkatnya keandalan dan kecepatan dalam penanganan darurat bencana	118 Pemberian Bantuan Ekonomi di Daerah Pasca Bencana									
131.				119 Pendampingan Trauma Healing Pasca Bencana	jumlah lokasi pendampingan	150.000.000,00	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.1.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.1.02.07 - Penanganan Pascabencana	jumlah lokasi pendampingan	1 Lokasi	
132.				120 Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Jumlah peserta bimtek	450.000.000,00	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.1.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.1.02.02 - Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Jumlah peserta bimtek	60 Orang	
133.				121 Pembangunan Kanal Pencegah Banjir di Wilayah Rawan Bencana									
134.				122 Pembangunan Talud di Wilayah Rawan Abrasi Pantai									
135.				123 Pembangunan Dinding Penahan Longsor di Sepanjang Jalan Provinsi Papua yang Rawan Bencana									
136.				124 Pembangunan Dinding Penahan Longsor di Sepanjang Danau/Sungai yang menjadi Kewenangan Provinsi yang Rawan Bencana									
137.				125 Perbaikan Jalan dan jembatan Pasca Bencana									
138.				126 Perbaikan SDA Pasca Bencana									
139.				127 Perbaikan Saluran Irigasi Pasca Bencana									
140.				128 Perbaikan Air dan Sanitasi Pasca Bencana									
141.				130 Rapat Koordinasi Teknis BPBD Kab/Kota se Prov Papua									
142.				131 Revisi Perda Provinsi Papua tentang Tugas Pokok dan Fungsi BPBD Provinsi Papua									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
143.	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	22 Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Cakupan Kampung dengan status Tangguh Bencana ; Cakupan lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah ; Cakupan pengembangan EWS (early warning systems) kebencanaan ; Meningkatnya kesiapsiagaan; Persentase Daerah Rawan Bencana yang dibina; Persentase Daerah Terkena Bencana yang telah Tertangani; Persentase kesiapsiagaan penanganan bencana; Prosentase Peningkatan Pelayanan Pemulihan Terkena Dampak Bencana; Rata-rata Waktu Respon Terhadap Kejadian Bencana; Terwujudnya Pencegahan Dini dan Penganggulangan Korban Bencana Alam; Tingkat fasilitas penanganan pasca bencana; meningkatnya daerah terkena bencana yang tertangani; meningkatnya keandalan dan kecepatan dalam penanganan darurat bencana	132 Pendampingan Kab/Kota dalam Penguatan Kapasitas Kelembagaan BPBD di Kab/Kota									
					jumlah pendampingan yang dilakukan	600.000.000,00	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.1.04 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1.05.03.1.04.02 - Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	jumlah pendampingan yang dilakukan	5 Kabupaten	
144.				133 Penyusunan Peraturan terkait Kebencanaan									
					jumlah peraturan yang disusun	500.000.000,00	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.1.04 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1.05.03.1.04.01 - Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah	jumlah peraturan yang disusun	1 Peraturan	
145.				134 Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan BPBD Kab/Kota									
					jumlah kabupaten/kota yang di monev	500.000.000,00	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.1.04 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1.05.03.1.04.02 - Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	jumlah kabupaten/kota yang di monev	5 Kabupaten	
146.				135 Pelatihan Manajemen PB Dasar									
					jumlah peserta pelatihan	550.000.000,00	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.1.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.1.02.02 - Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	jumlah peserta pelatihan	30 Orang	
147.				136 Pelatihan Tenaga Pendamping Pembentukan Sekolah Aman Bencana									
148.				137 Menyusun Kajian Pengurangan Resiko Bencana									
149.				138 Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana									
					Jumlah dokumen rencana penanggulangan bencana yang dibuat	0,00						0 Dokumen	
150.				139 Monitoring Peralatan									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
151.	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	22 Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Cakupan Kampung dengan status Tangguh Bencana ; Cakupan lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah ; Cakupan pengembangan EWS (early warning systems) kebencanaan ; Meningkatnya kesiapsiagaan; Persentase Daerah Rawan Bencana yang dibina; Persentase Daerah Terkena Bencana yang telah Tertangani; Persentase kesiapsiagaan penanganan bencana; Prosentase Peningkatan Pelayanan Pemulihan Terkena Dampak Bencana; Rata-rata Waktu Respon Terhadap Kejadian Bencana; Terwujudnya Pencegahan Dini dan Penganggulangan Korban Bencana Alam; Tingkat fasilitas penanganan pasca bencana; meningkatnya daerah terkena bencana yang tertangani; meningkatnya keandalan dan kecepatan dalam penanganan darurat bencana	140 Peningkatan kapasitas personil pendampingan peralatan PB									
152.				141 Bimtek Pusdalops									
					Jumlah peserta yang hadir	0,00						0 Orang	
153.				142 Inventarisasi dan Verifikasi Kebutuhan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana									
154.		32 Program Peningkatan Keamanan dan kenyamanan Lingkungan	Cakupan tenaga pengendali dan kenyamanan lingkungan yang terampil; Persentase Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan; Rata-rata Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) kabupaten/kota dalam daerah layanan	1 Sosialisasi Pencegahan, Penanggulangan dan Penanganan Potensi Konflik, Gangguan Keamanan dan Ketentraman Masyarakat									
					Jumlah yang mengikuti sosialisasi gangguan keamanan dan ketentraman masyarakat	312.000.000,00	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.1.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1.05.02.1.01.01 - Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah yang mengikuti sosialisasi gangguan keamanan dan ketentraman masyarakat	100 Orang	
					Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	0,00	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.1.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1.05.02.1.01.03 - Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tingkat Provinsi	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	0 Orang	
155.				2 Publikasi dan Informasi Ketertiban Umum Bagi Masyarakat									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Jumlah yang menerima informasi dan publikasi ketertiban umum	355.500.000,00	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.1.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1.05.02.1.01.01 - Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah yang menerima informasi dan publikasi ketertiban umum	2900 Orang	
					Jumlah bulletin yang dipublikasikan dan diinformasikan	0,00	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.1.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1.05.02.1.01.01 - Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah bulletin yang dipublikasikan dan diinformasikan	0 Eksemplar	
					Jumlah Baliho/spanduk yang dipublikasikan dan diinformasikan di Kota Jayapura, Kab Jayapura, Kab. Keerom, Kab. Sarmi, Kab. Timika, dan Kab. Biak	0,00	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.1.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1.05.02.1.01.01 - Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Baliho/spanduk yang dipublikasikan dan diinformasikan di Kota Jayapura, Kab Jayapura, Kab. Keerom, Kab. Sarmi, Kab. Timika, dan Kab. Biak	0 Buah	
					Jumlah publikasi dan informasi Trantibum yang di bagikan	0,00	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.1.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1.05.02.1.01.01 - Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah publikasi dan informasi Trantibum yang di bagikan	0 Lembar	
156.				6 Penegakan Ketenteraman dan Ketertiban Umum									
					Jumlah penegakan Trantibum	0,00	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.1.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1.05.02.1.01.02 - Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada	Jumlah penegakan Trantibum	0 Orang Kali	
					Jumlah penegakan Trantibum (Miras, Tempat Hiburan Malam, Kependudukan),	425.000.000,00	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.1.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1.05.02.1.01.02 - Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada	Jumlah penegakan Trantibum (Miras, Kependudukan dan Tempat Hiburan Malam)	50 Orang Kali	
157.				7 Patroli Wilayah									
					Jumlah yang melaksanakan patroli wilayah	0,00	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.1.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1.05.02.1.01.01 - Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah yang melaksanakan patroli wilayah	0 Orang Hari	
					jumlah yang melaksanakan patroli wilayah	0,00	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.1.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1.05.02.1.01.01 - Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	jumlah yang melaksanakan patroli wilayah	0 Orang Bulan	
					Jumlah yang mengikuti patroli wilayah	276.000.000,00	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.1.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1.05.02.1.01.02 - Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada	Jumlah yang mengikuti patroli wilayah	50 Orang Kali	
					Jumlah Patroli pelanggaran K3	0,00	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.1.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1.05.02.1.01.02 - Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada	Jumlah Patroli pelanggaran K3	0 Kali	
158.				8 Pengamanan dan Pengawasan Protokol KDH/ Pejabat Penting									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Jumlah pengamanan dan pengawalan pejabat KDH/pejabat penting	285.000.000,00	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.1.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1.05.02.1.01.01 - Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah pengamanan dan pengawalan pejabat KDH/pejabat penting	50 Orang Kali	
					Jumlah pengamanan dan pengawalan pejabat penting/KDH, tempat penting, acara penting, dan hari besar keagamaan	0,00	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.1.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1.05.02.1.01.03 - Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tingkat Provinsi	Jumlah pengamanan dan pengawalan pejabat penting/KDH, tempat penting, acara penting, dan hari besar keagamaan	0 Kali	
159.				9 Penyelidikan Kasus PPNS									
					Jumlah kasus yang ditangani PPNS	295.000.000,00	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.1.02 - Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	1.05.02.1.02.03 - Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah kasus yang ditangani PPNS	5 Orang Bulan	
160.				10 Penegakan dan Penertiban Disiplin Aparatur									
					Jumlah Penegakan dan Penertiban Aparatur dan Aset	272.000.000,00	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.1.02 - Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	1.05.02.1.02.02 - Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Penegakan dan Penertiban Aparatur dan Aset	12 Bulan	
					Jumlah penertiban dan penegakan ASN dan Aset Pemda	0,00	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.1.02 - Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	1.05.02.1.02.03 - Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah penertiban dan penegakan ASN dan Aset Pemda	0 Kali	
161.				11 Gelar Pasukan Satpol PP dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat									
					Jumlah peserta gelar pasukan	500.000.000,00	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.1.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1.05.02.1.01.03 - Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tingkat Provinsi	Jumlah peserta gelar pasukan	2000 Orang	
162.				12 Pendidikan dan Latihan Satpol PP									
					Jumlah aparat yang mengikuti Diklat Satpol PP	267.000.000,00	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.1.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1.05.02.1.01.05 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah aparat yang mengikuti Diklat Satpol PP	6 Orang	
163.				13 Forum Komunikasi dan Temu Konsultasi Penanganan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam pencegahan tindak kriminal di daerah									
					Jumlah peserta yang mengikuti forum dan temu konsultasi	295.000.000,00	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.1.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1.05.02.1.01.03 - Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tingkat Provinsi	Jumlah peserta yang mengikuti forum dan temu konsultasi	125 Orang	
164.				14 Penyediaan peralatan dan perlengkapan operasional Satpol PP, Linmas dan Damkar									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Jumlah peralatan dan perlengkapan yang tersedia	275.000.000,00	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.1.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.1.02.04 - Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang tersedia	40 Unit	
165.				15 Peningkatan Kerjasama dengan TNI/POLRI dalam pembinaan fisik, mental dan disiplin Satpol PP									
					Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan dalam pembinaan fisik, mental dan disiplin	345.000.000,00	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.1.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1.05.02.1.01.07 - Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan dalam pembinaan fisik, mental dan disiplin	500 Orang	
166.				16 Peningkatan Kerjasama Pembinaan dan Pelatihan dengan TNI/POLRI dalam teknik pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan									
					Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan dan pelatihan pengendalian keamanan serta kenyamanan lingkungan	377.000.000,00	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.1.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1.05.02.1.01.07 - Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan dan pelatihan pengendalian keamanan serta kenyamanan lingkungan	150 Orang	
JUMLAH						94.967.145.000,00							

Mengetahui,
Kepala Bappeda Provinsi Papua

YOHANES WALILO, S.Sos, M.Si
NIP. 197007281997121001

JAYAPURA, 20 July 2020
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI PAPUA

WELLIAM R. MANDERI, SIP., M.Si
NIP. 19650529 199703 1 001

**REKAPITULASI PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021
SERTA KETERKAITAN DENGAN HASIL PEMETAAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019**

PROVINSI : Papua

PERANGKAT DAERAH : Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Sosial	1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	À Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	1 Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang disediakan	0,00		1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.06.01.1.03 - Administrasi Umum	1.06.01.1.03.01 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang terkirim	1000 Surat	
2.				2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Jasa Layanan berlangganan Listrik, Air, Telepon, Transponder	0,00		1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.06.01.1.03 - Administrasi Umum	1.06.01.1.03.02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Layanan	0 Layanan	
3.				3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	0,00		1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.06.01.1.03 - Administrasi Umum	1.06.01.1.03.03 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	0 Unit	
4.				6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Unit Mobil Dinas/Operasional yang terpelihara dan Terfasilitasi Perijinannya	0,00		1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.06.01.1.03 - Administrasi Umum	1.06.01.1.03.06 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Unit Mobil Dinas/Operasional yang diservis dan dipelihara	25 Unit	
5.				8 Penyediaan jasa kebersihan kantor	Luas Gedung dan Halaman yang disediakan jasa kebersihan	0,00		1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.06.01.1.03 - Administrasi Umum	1.06.01.1.03.08 - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	jumlah Gedung dan Halaman yang dibersihkan	0 M2	
					Jumlah tenaga kebersihan dan Fasilitas Pendukung kebersihan kantor	460.000.000,00		1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.06.01.1.03 - Administrasi Umum	1.06.01.1.03.08 - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah tenaga kebersihan	15 Orang	
					Jumlah Jenis Bahan dan Alat Kebersihan	50.000.000,00		1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.06.01.1.03 - Administrasi Umum	1.06.01.1.03.14 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Bahan dan Alat Kebersihan	5 Jenis	
6.				9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	0,00		1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.06.01.1.03 - Administrasi Umum	1.06.01.1.03.09 - Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	0 Unit	
7.				10 Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	0,00		1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.06.01.1.03 - Administrasi Umum	1.06.01.1.03.10 - Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	0 Jenis	
8.				11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan	160.000.000,00		1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.06.01.1.03 - Administrasi Umum	1.06.01.1.03.11 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan	15 Jenis	
					Jumlah penggandaan	250.000.000,00		1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.06.01.1.03 - Administrasi Umum	1.06.01.1.03.11 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penggandaan	150000 Lembar	
					Jumlah Jenis Barang Cetak dan yang Disediakan	8.500.000,00		1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.06.01.1.03 - Administrasi Umum	1.06.01.1.03.11 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Jenis	
					Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	0,00		1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.06.01.1.03 - Administrasi Umum	1.06.01.1.03.11 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	0 Bulan	
9.				12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Jumlah Komponen Listrik yang disediakan	0,00		1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.06.01.1.03 - Administrasi Umum	1.06.01.1.03.12 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen alat pemeliharaan listrik dan genset yang disediakan	0 Buah	
10.				15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan									
					Jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	0,00		1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.06.01.1.03 - Administrasi Umum	1.06.01.1.03.15 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	0 Jenis	
11.				16 Penyediaan bahan logistik kantor									
					Jumlah liter bahan bakar untuk kendaraan operasional	0,00		1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.06.01.1.03 - Administrasi Umum	1.06.01.1.03.16 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah liter bahan bakar untuk kendaraan operasional	0 Liter	
					jumlah mobilitas termasuk tenaga angkat dan turun beras ke kantor	24.000.000,00		1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.06.01.1.03 - Administrasi Umum	1.06.01.1.03.16 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah Pembelian Air Galon	12 Kali	
12.				17 Penyediaan makanan dan minuman									
					Pelaksanaan penyediaan makan dan minum	0,00		1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.06.01.1.03 - Administrasi Umum	1.06.01.1.03.17 - Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Porsi makan dan minum kegiatan yang tersedia	0 Kegiatan	
					Pelaksanaan makan minum tamu dan rapat	150.000.000,00		1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.06.01.1.03 - Administrasi Umum	1.06.01.1.03.17 - Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Porsi makan dan minum yang tersedia	12 Kali Tahun	
					Pelaksanaan makan minum saat olah raga (hari Jumat)	50.000.000,00		1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.06.01.1.03 - Administrasi Umum	1.06.01.1.03.17 - Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Porsi makan dan minum yang tersedia	48 Kali	
					Tersediannya Makanan dan Minuman	10.000.000,00		1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.06.01.1.03 - Administrasi Umum	1.06.01.1.03.17 - Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Porsi makan dan minum yang tersedia	12 Bulan	
					Jumlah orang yang disediakan makan dan minuman	0,00		1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.06.01.1.03 - Administrasi Umum	1.06.01.1.03.17 - Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Porsi makan dan minum yang tersedia	0 Orang	
13.				18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah									
					Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	1.000.000.000,00		1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.06.01.1.03 - Administrasi Umum	1.06.01.1.03.18 - Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	79 Orang	
14.				19 Penyediaan Jasa Pengamanan									
					Pelaksanaan pembayaran insentif bagi tenaga operator dan penjaga X-Ray VIP Room Bandara Sentani	0,00		1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.06.01.1.03 - Administrasi Umum	1.06.01.1.03.01 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa keamanan/security yang dibayarkan	0 Orang Bulan	
					Pelaksanaan pembayaran honor bagi satpam	0,00		1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.06.01.1.03 - Administrasi Umum	1.06.01.1.03.01 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa keamanan/security yang dibayarkan	0 Orang Bulan	
					Pelaksanaan uang makan satpam	250.000.000,00		1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.06.01.1.03 - Administrasi Umum	1.06.01.1.03.01 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa keamanan/security yang dibayarkan	180 Orang Bulan	
					Jumlah tenaga pengamanan	460.000.000,00		1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.06.01.1.03 - Administrasi Umum	1.06.01.1.03.01 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa keamanan/security yang dibayarkan	15 Orang	
15.		2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	À Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	4 Pengadaan mobil jabatan									
					Jumlah mobil yang diadakan	360.000.000,00		1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.06.01.1.03 - Administrasi Umum	1.06.01.1.03.20 - Pengadaan Mobil Jabatan	Jumlah mobil yang diadakan	1 Unit	
16.				5 Pengadaan kendaraan dinas/operasional									
					Jumlah kendaraan yang diadakan	1.000.000.000,00		1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.06.01.1.03 - Administrasi Umum	1.06.01.1.03.21 - Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda 4	5 Unit	
					Jumlah kendaraan roda 2	0,00		1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.06.01.1.03 - Administrasi Umum	1.06.01.1.03.21 - Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda 2	0 Unit	
17.				7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor									
					Jumlah pengadaan perlengkapan	0,00		1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.06.01.1.03 - Administrasi Umum	1.06.01.1.03.23 - Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan	0 Unit	
18.				9 Pengadaan peralatan gedung kantor									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Jumlah peralatan perlengkapan	0,00		1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.06.01.1.03 - Administras Umum	1.06.01.1.03.25 - Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan/perlengkapan yang diadakan	0 Unit	
19.				10 Pengadaan mebeleur									
					Jumlah mebeleur yang diadakan	120.000.000,00		1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.06.01.1.03 - Administras Umum	1.06.01.1.03.26 - Pengadaan Mebeleur	Jumlah mebeleur yang diadakan untuk 3 UPT	8 Unit	
20.				20 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan									
					Jumlah rumah jabatan yg terpelihara	180.000.000,00		1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.06.01.1.03 - Administras Umum	1.06.01.1.03.37 - Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan	Jumlah rumah jabatan yg terpelihara	1 Unit Tahun	
21.				22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor									
					Jumlah gedung kantor yang dipelihara	350.000.000,00		1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.06.01.1.03 - Administras Umum	1.06.01.1.03.29 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor	7 Unit	
					belanja sewa	0,00		1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.06.01.1.03 - Administras Umum	1.06.01.1.03.29 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung yang disewa	0 Tahun	
22.				23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan									
					jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	58.000.000,00		1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.06.01.1.03 - Administras Umum	1.06.01.1.03.30 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	5 Unit	
23.				24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional									
					Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	0,00		1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.06.01.1.03 - Administras Umum	1.06.01.1.03.31 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah dan Jenis perlengkapan/peralatan gedung kantor yang dipelihara	0 Unit	
					Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	150.000.000,00		1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.06.01.1.03 - Administras Umum	1.06.01.1.03.31 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang	25 Unit	
					sewa kendaraan	0,00		1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.06.01.1.03 - Administras Umum	1.06.01.1.03.31 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan yang d Perbaiki/Service	12 Bulan	
24.				26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor									
					Pelaksanaan pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	50.000.000,00		1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.06.01.1.03 - Administras Umum	1.06.01.1.03.27 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Jumlah Rumah Jabatan	2 Kegiatan	
					Jumlah Perlengkapan Gedung kantor yang terpelihara	0,00		1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.06.01.1.03 - Administras Umum	1.06.01.1.03.33 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung kantor yang dipelihara	0 Unit	
					Tersediannya biaya pemeliharaan gedung kantor	0,00		1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.06.01.1.03 - Administras Umum	1.06.01.1.03.39 - Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor	0 Bulan	
25.				28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor									
					Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	50.000.000,00		1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.06.01.1.03 - Administras Umum	1.06.01.1.03.35 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	15 Unit	
26.				30 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor									
					Luas bangunan yang direhab	500.000.000,00		1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.06.01.1.03 - Administras Umum	1.06.01.1.03.39 - Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Jumlah bangunan yang direhab	1 M2	
27.				42 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor									
					Terlaksananya rehabilitasi gedung	1.000.000.000,00		1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.06.01.1.03 - Administras Umum	1.06.01.1.03.39 - Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Terlaksananya rehabilitasi gedung	1200 M2	
28.				46 Sewa gedung									
					Jumlah gedung kantor yang disewa	0,00		1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.06.01.1.03 - Administras Umum	1.06.01.1.03.27 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Jumlah rumah jabatan yang terpelihara	0 Unit Tahun	
					Sewa rumah jabatan	60.000.000,00		1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.06.01.1.03 - Administras Umum	1.06.01.1.03.27 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Jumlah Rumah Jabatan Yang disewa	1 Unit Tahun	
29.		3 Program peningkatan disiplin aparatur	À Meningkatnya disiplin aparatur	2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Jumlah pakaian dinas yang diadakan	0,00		1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.06.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1.06.01.1.04.02 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas sipil harian	0 Stell	
30.				4 Pengadaan pakaian KORPRI									
					jumlah pakaian KORPRI yang diadakan	0,00		1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.06.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1.06.01.1.04.04 - Pengadaan Pakaian Korpri	Jumlah pakaian KORPRI yang diadakan	59 Stell	
31.				5 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu									
					Jumlah pakaian khusus yang diadakan	0,00		1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.06.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1.06.01.1.04.05 - Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah pakaian Batik yang diadakan	0 Stell	
32.		5 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	À Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	1 Pendidikan dan pelatihan formal									
					Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	1.200.000.000,00		1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.06.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1.06.01.1.04.09 - Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparatur mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	50 Orang	
33.				3 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan									
					Jumlah peserta bimbingan teknis tentang implementasi peraturan perundang-undangan	160.000.000,00		1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.06.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1.06.01.1.04.11 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta bimbingan teknis tentang implementasi peraturan perundang-undangan	8 Orang	
34.				4 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal									
					Jumlah aparatur yang terlatih	60.000.000,00		1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.06.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1.06.01.1.04.11 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	
35.		6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	À Meningkatnya kualitas akuntabilitas OPD	1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD									
					Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	50.000.000,00		1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.06.01.1.02 - Administrasi Keuangan	1.06.01.1.02.06 - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan	5 Laporan	
					Laporan LAKIP SKPD	0,00		1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.06.01.1.01 - Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.06.01.1.01.05 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan LAKIP SKPD	0 Dokumen	
36.				2 Penyusunan laporan keuangan semesteran									
					Jumlah pelaporan keuangan semesteran yang diselesaikan tepat waktu	30.000.000,00		1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.06.01.1.02 - Administrasi Keuangan	1.06.01.1.02.07 - Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Jumlah dokumen laporan	5 Laporan	
37.				4 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun									
					Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	50.000.000,00		1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.06.01.1.02 - Administrasi Keuangan	1.06.01.1.02.09 - Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	5 Laporan	
38.				5 Penyusunan Renja, RKA dan Perubahan APBD									
					Jumlah dokumen	150.000.000,00		1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.06.01.1.01 - Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.06.01.1.01.01 - Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	15 Dokumen	
39.				10 Forum SKPD Provinsi Papua									
					Jumlah Peserta Forum	450.000.000,00		1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.06.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1.06.01.1.04.10 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Forum	80 Orang	
40.				12 Penyusunan RENSTRA									
					Jumlah Dokumen	0,00		1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.06.01.1.01 - Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.06.01.1.01.01 - Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	0 Dokumen	
41.				13 Penyusunan SOP									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET	
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
					Jumlah Dokumen	15.000.000,00		1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.06.01.1.01 - Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.06.01.1.01.04 - Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	5 Dokumen		
42.				14 Peningkatan Kapasitas PPID										
					Jumlah orang	200.000.000,00		1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.06.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1.06.01.1.04.09 - Pendidikan dan Pelatihan Formal	Pembinaan Administrasi Kepegawaian	50 Orang		
43.				16 Penyusunan Dokumen Rencana Umum Pengadaan (RUP)										
					Jumlah Dokumen Rencana Umum Pengadaan (RUP)	8.000.000,00		1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.06.01.1.01 - Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.06.01.1.01.04 - Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Umum Pengadaan (RUP)	3 Dokumen		
44.		15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Cakupan ketersediaan basis data terpadu PMKS dan kemiskinan; Jumlah keluarga miskin yang mendapatkan bantuan pelatihan keterampilan usaha; Persentase KAT yang memperoleh bantuan sosial; Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar; Persentase PMKS yang tertangani; Persentase panti sosial yang menerima pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama; Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial; Prosentase KAT yang mandiri	2 Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya										
					Jumlah Petugas Pendamping KAT yang mendapatkan penguatan	0,00						0 Orang		
45.				3 Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin										
					Jumlah KK Miskin yang ikut Pelatihan	0,00						0 KK		
46.				4 Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin										
					Jumlah Keluarga yang difasilitasi Manajemen Usaha	0,00						0 KK		
47.				5 Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin										
					Jumlah keluarga miskin yang mendapatkan bantuan usaha	2.500.000.000,00	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.1.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	1.06.05.1.02.02 - Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga miskin yang mendapatkan bantuan usaha	225 KK		
					Jumlah keluarga miskin yang mendapatkan bimbingan sosial motivasi	0,00	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.1.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	1.06.05.1.02.02 - Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga miskin yang mendapatkan bimbingan sosial motivasi	0 KK		
48.				22 Penanggulangan Kemiskinan										
					Jumlah fakir miskin yang mendapatkan bantuan sosial	1.500.000.000,00	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.1.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	1.06.05.1.02.02 - Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fakir miskin yang mendapatkan bantuan sosial	130 KK		
					Jumlah fakir miskin yang mendapatkan bimbingan sosial motivasi	0,00	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.1.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	1.06.05.1.02.02 - Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fakir miskin yang mendapatkan bimbingan sosial motivasi	0 Orang		
49.				24 Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil										

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Jumlah KK Komunitas Adat Terpencil yang mendapat bantuan Rumah Layak Huni	7.200.000.000,00	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.06.02.1.02 - Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	1.06.02.1.02.03 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah KK Komunitas Adat Terpencil yang mendapat bantuan Rumah Layak Huni	100 KK	
					Jumlah KK yang mendapatkan jaminan hidup	150.000.000,00	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.06.02.1.02 - Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	1.06.02.1.02.03 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah KK yang mendapatkan jaminan hidup	100 KK	
					Jumlah KK yang mendapatkan peralatan pertanian, bibit tanaman dan peralatan rumah tangga	150.000.000,00	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.06.02.1.02 - Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	1.06.02.1.02.03 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah KK yang mendapatkan peralatan pertanian, bibit tanaman dan peralatan rumah tangga	100 KK	
					Jumlah KAT yang mendapatkan bantuan sarana air bersih, MCK dan Balai Sosial	150.000.000,00	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.06.02.1.02 - Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	1.06.02.1.02.03 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah KAT yang mendapatkan bantuan sarana air bersih, MCK dan Balai Sosial	100 Unit	
50.		16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Cakupan Pengembangan jaminan sosial bagi lanjut usia dan orang dengan kecacatan; Persentase penyandang disabilitas miskin dan rentan yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar	12 Pelayanan dan rehabilitasi sosial Lanjut Usia									
					Jumlah lanjut usia yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial	0,00	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	1.06.04.1.01.06 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah lanjut usia yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial	0 Orang	
					Jumlah lanjut usia yang mendapatkan bimbingan sosial	0,00	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	1.06.04.1.01.06 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah lanjut usia yang mendapatkan bimbingan sosial	0 Orang	
					Jumlah lanjut usia yang mendapatkan bantuan Usaha Ekonomi Produktif	0,00	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	1.06.04.1.01.06 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah lanjut usia yang mendapatkan bantuan Usaha Ekonomi Produktif	0 Orang	
					Jumlah Pendamping Lanjut Usia yang mendapatkan penguatan kapasitas	0,00	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	1.06.04.1.01.06 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Pendamping Lanjut Usia yang mendapatkan penguatan kapasitas	0 Orang	
51.				13 Pelayanan dan rehabilitasi sosial anak									
					Jumlah anak yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	0,00	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	1.06.04.1.01.06 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah anak yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	0 Orang	
					Jumlah anak yang mendapatkan bantuan Usaha Ekonomi Produktif	0,00	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	1.06.04.1.01.06 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah anak yang mendapatkan bantuan Usaha Ekonomi Produktif	0 Orang	
52.				14 Pelayanan dan Rehabilitasi sosial Penyandang Cacat									
					Jumlah penyandang cacat yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial	0,00	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	1.06.04.1.01.06 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah penyandang cacat yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial	0 Orang	
					Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan alat bantu	0,00	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	1.06.04.1.01.04 - Penyediaan Alat Bantu	Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan alat bantu	0 Orang	
					Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan pelayanan sosial keliling	0,00	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	1.06.04.1.01.07 - Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan pelayanan sosial keliling	0 Orang	
					Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan Praktek belajar Kerja	0,00	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	1.06.04.1.01.09 - Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan Praktek belajar Kerja	0 Orang	
					Jumlah penyandang disabilitas yang mengikuti kampanye hari disabilitas internasional	0,00	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	1.06.04.1.01.07 - Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah penyandang disabilitas yang mengikuti kampanye hari disabilitas internasional	0 Orang	
53.				15 Sosialisasi Penyalahgunaan Napza									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi	350.000.000,00	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.05 - Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Panti	1.06.04.1.05.05 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi	60 Orang	
54.		21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial		7 Pelatihan Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)									
					Jumlah TKSK yang mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas	0,00						0 Orang	
55.				8 Bimbingan pematapan Manajemen Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)/Orsos									
					Jumlah lembaga yang mendapatkan bimbingan	0,00						0 Lembaga	
56.				9 Sosialisasi Pengumpulan dan Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial									
					Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	0,00						0 Orang	
57.		23 Perlindungan dan Jaminan Sosial	Cakupan Kabupaten/Kota yang terakses perlindungan dan jaminan sosial; Cakupan keluarga OAP yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial; Jumlah kelembagaan sosial masy yang aktif ; Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Keluarga miskin	4 Pelatihan dan Pengarahan Taruna Siaga Bencana (TAGANA)									
					Jumlah TAGANA yang dilatih	950.000.000,00	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1.06.06.1.01 - Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	1.06.06.1.01.04 - Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah TAGANA yang dilatih	300 Orang	
58.				12 Bantuan Kedaruratan Logistik Bencana alam dan sosial									
					Jumlah bantuan logistik bencana yang disediakan	2.250.000.000,00	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1.06.06.1.01 - Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	1.06.06.1.01.01 - Penyediaan Permakananan	Jumlah bantuan logistik bencana yang disediakan	7 Jenis	
59.				14 Penguatan Program Keluarga Harapan di 29 Kabupaten/Kota									
					Jumlah Kabupaten/kota ywng mendapatkan penguatan Program Keluarga Harapan	500.000.000,00	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.1.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	1.06.05.1.02.02 - Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/kota ywng mendapatkan penguatan Program Keluarga Harapan	3 Kabupaten	
60.				16 Bangun Generasi dan Keluarga Papua Sejahtera (BANGGA PAPUA)									
					Jumlah Penerima Manfaat anak 4 tahun ke bawah	2.000.000.000,00	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.1.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	1.06.05.1.02.02 - Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penerima Manfaat anak 4 tahun ke bawah	44580 Orang	
61.		24 Pelayanan Kesejahteraan Sosial Berbasis Panti	Cakupan Jumlah lanjut usia terlanjar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial; Cakupan penyandang cacat netra yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial; Cakupan wanita rawan sosial ekonomi (WRSE) yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial; Jumlah anak dan remaja terlanjar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial	1 Pelayanan dan Rehabilitasi sosial bagi anak dan remaja									
					Jumlah anak dan remaja yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial	1.500.000.000,00	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.02 - Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlanjar di Dalam Panti	1.06.04.1.02.06 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah anak dan remaja yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial	80 Orang	

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
62.	Sosial	24 Pelayanan Kesejahteraan Sosial Berbasis Pantii	Cakupan Jumlah lanjut usia terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial; Cakupan penyandang cacat netra yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial; Cakupan wanita rawan sosial ekonomi (WRSE) yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial; Jumlah anak dan remaja terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial	2 Pelayanan dan Rehabilitasi sosial bagi Lanjut Usia terlantar									
					Jumlah lanjut usia terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial	1.700.000.000,00	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.03 - Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Pantii	1.06.04.1.03.06 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah lanjut usia terlanta yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial	70 Orang	
63.				3 Pelayanan dan Rehabilitasi sosial bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)									
					Jumlah WRSE yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial	1.300.000.000,00	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.04 - Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Dalam Pantii	1.06.04.1.04.05 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah WRSE yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial	60 Orang	
64.				4 Pelayanan dan Rehabilitasi sosial bagi Cacat Netra									
					Jumlah cacat netra yang mendapatkan pelayanandan rehabilitasi sosial	1.050.000.000,00	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Pantii	1.06.04.1.01.07 - Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah cacat netra yang mendapatkan pelayanandan rehabilitasi sosial	18 Orang	
65.		25 Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Kesejahteraan Sosial	Cakupan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berkualitas dalam bidang kesejahteraan sosial ; Meningkatnya kualitas perencanaan kesejahteraan sosial	2 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan									
					Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang disusun	750.000.000,00						15 Dokumen	
66.				3 Penyusunan Data dan Informasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan									
					Jumlah dokumen data dan informasi pelaksanaan program dan kegiatan yang	250.000.000,00						2 Dokumen	
67.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	15 Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Prosentase pengarusutamaan gender dalam pembangunan; Prosentase pengarusutamaan perlindungan anak dalam pembangunan	19 Pelatihan hukum positif bagi guru dan orang tua									
					Terlatihnya guru dan orang tua tentang hukum positif hak anak	0,00	2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	2.08.07.1.01 - Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.08.07.1.01.01 - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta yang dilatih	30 Kegiatan	
					Jumlah peserta yang di latih	350.000.000,00	2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	2.08.07.1.01 - Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.08.07.1.01.01 - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta yang dilatih	40 Orang	
68.				20 Fasilitasi dan penguatan kepada para penyandang cacat/difabel di bidang ekonomi									
					Tersosialisasinya Kebijakan Kesetaraan Gender Perempuan dan Anak Penyandang Cacat	0,00						0 Orang	

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
69.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Cakupan Kasus kekerasan terhadap perempuan yang tertangani; Cakupani perempuan yang berada di posisi pimpinan; Persentase kasus Trafficking dan Eksploitasi anak; Proporsi perempuan di Legislatif	5 Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak									
70.				32 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak									
71.				41 Pelatihan Paralegal Perlindungan Perempuan									
					Terlatihnya para pendamping perlindungan perempuan dan anak	0,00						0 Acara	
72.				45 Gerakan Sayang Ibu									
					Terlaksananya GSI pada kelembagaan kampung	0,00						0 Kegiatan	
					Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan gerakan sayang ibu sebanyak 75 orang per kabupaten	0,00						0 Kegiatan	
73.				46 Workshop PUG bagi SKPD, Legislatif dan Yudikatif									
					Terlaksananya workshop bagi SKPD, legislatif dan yudikatif	0,00						0 Kegiatan	
					Meningkatnya pemahaman dan komitmen OPD, legislatif, eksekutif, yudikatif terhadap pelaksanaan strategi PUG	0,00						0 Acara	
					Jumlah peserta yang mengikuti workshop PUG per kabupaten 30 orang	0,00						0 Kegiatan	
74.				51 Rapat Koordinasi Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Tk. Provinsi Papua									
75.				60 Rapat Pokja PUG Bidang Ekonomi									
76.				63 Penguatan Kapasitas SDM Progremer Anggaran Responsif Gender (ARG)									
					Meningkatnya pemahaman SDM progremer dalam menyusun anggaran responsif gender	0,00						0 Acara	
					Terlatihnya SDM Progremer 30 orang	0,00						0 Kegiatan	
77.				66 Fasilitasi FORDA Provinsi Papua									
					Jumlah Peserta yang mengikuti FORDA	350.000.000,00	2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	2.08.04.1.01 - Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	2.08.04.1.01.02 - Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta yang mengikuti Forum Anak Daerah.	150 Orang	
78.				71 Rapat Teknis Pokja PUG Palsosbudhum									
79.				72 Pembentukan Pokja PUG									
80.				73 Rapat Pokja PUG									
					Meningkatnya pemahaman pengarusutamaan gender bagi Tim Pokja dalam program dan kegiatan	0,00						0 Kegiatan	
					Jumlah peserta yang mengikuti Rpat Pokja PUG 50 orang	0,00						0 Kegiatan	
81.				77 Pelatihan PPRG bagi OPD									
					Jumlah Peserta yang ikuti pelatihan	0,00						0 Orang	

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
82.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Cakupan Kasus kekerasan terhadap perempuan yang tertangani; Cakupani perempuan yang berada di posisi pimpinan; Persentase kasus Trafficking dan Eksploitasi anak; Proporsi perempuan di Legislatif	78 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan PUG di OPD di Provinsi/Kab/Kota									
					Jumlah Kabupaten/Kota yang dimonitor	0,00	2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.08.02.1.01 - Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	2.08.02.1.01.03 - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota yang dimonitor	7 Kabupaten	
83.				79 Pelatihan PUG bagi lembaga driver (DPPPA-KB, BAPPEDA, IRWIL DAN KEUANGAN) PROVINSI, KAB/KOTA									
					Terlatihnya Lembaga Driver dalam menyusun perencanaan penganggaran responsif gender	0,00						0 Kegiatan	
					Jumlah peserta lembaga driver yang dilatih 35 orang	0,00						0 Kegiatan	
84.				80 Identifikasi dan analisis sistim perlindungan anak									
					Tersedianya data sistim perlindungan anak	0,00						0 Kegiatan	
85.				81 Sosialisasi dan advokasi pembentukan kab/kota layak anak (KLA)									
					Terbentuknya KLA di Kabupaten/Kota	0,00						0 Kegiatan	
86.				82 Sosialisasi dan advokasi pembentukan PAUD Holistik Integratif									
					Meningkatnya pemahaman peserta tentang PAUD Holistik Integratif	0,00	2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	2.08.06.1.02 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	2.08.06.1.02.02 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta yang terlatih	40 Kegiatan	
					Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi dan advokasi	300.000.000,00	2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	2.08.06.1.02 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	2.08.06.1.02.02 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta yang terlatih	40 Orang	
87.				83 Pembentukan Forum Anak Daerah Kab. Sarmi dan Kab. Jayawijaya									
					Terbentuknya Forum Anak Daerah di 2 Kabupaten	0,00						0 Kegiatan	
88.				84 Bimbingan teknis standart operasional prosedur DPPPA-KB									
					Jumlah peserta Bimtek SOP DPPPA-KB	0,00						0 Orang	
89.				88 Fasilitasi Klinik PPRG Provinsi/Kabupaten/Kota									
					Jumlah SKPD/Kabupaten/Kota yang mendapat Fasilitasi Klinik ARG	300.000.000,00	2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.08.02.1.01 - Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	2.08.02.1.01.01 - Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah SKPD/Kabupaten/Kota/provinsi yang mendapat pendampingan pengarusutamaan gender melalui perencanaan penganggaran responsif gender	35 SKPD	
90.				89 Pengelolaan dan Pengumpulan Data Anak									
					Jumlah Dokumen yang disusun	0,00						0 Dokumen	
91.				90 Penguatan SDM Tim Driver Program Perencanaan Responsif Gender (PPRG) Provinsi Papua									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Jumlah Tim Driver yang terlatih	300.000.000,00	2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.08.02.1.01 - Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	2.08.02.1.01.04 - Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	Jumlah SKPD driver/penggerak yang mendapat penguatan	30 Orang	
92.				91 Penguatan kapasitas Vocal Point gender									
					Jumlah Vocal Point gender yang terlatih	250.000.000,00	2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.08.02.1.01 - Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	2.08.02.1.01.04 - Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	Jumlah anggota vocal point gender yang mendapat penguatan	40 Orang	
93.		17 Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Perlindungan Perempuan dan Anak	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR) ; Cakupan penguatan kader Posyandu di kampung; Implementasi kebijakan yang responsif gender; Persentase Posyandu Aktif	1 Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah									
					Jumlah Kebijakan yang dilaksanakan	0,00						0 Orang	
94.				4 Sosialisasi dan advokasi kebijakan penghapusan buta aksara perempuan (PBAP)									
					Jumlah Sosialisasi dan Advokasi yang dilakukan	0,00						0 Kali	
95.				5 Sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan									
					Jumlah Sosialisasi dan Advokasi yang dilakukan	0,00						0 Kali	
96.				8 Fasilitasi upaya perlindungan perempuan dan Anak terhadap tindak kekerasan									
					Terlaksananya pendampingan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	0,00	2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	2.08.03.1.02 - Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.08.03.1.02.01 - Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah korban kekerasan yang tertangani	91 %	
					Jumlah korban kekerasan yang ditangani P2TP2A	450.000.000,00	2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	2.08.03.1.02 - Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.08.03.1.02.01 - Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah korban kekerasan yang tertangani	91 Orang	
					Jumlah kasus yang dapat diselesaikan sesuai standart	0,00	2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	2.08.03.1.02 - Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.08.03.1.02.01 - Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah korban kekerasan yang tertangani	91 Orang	
97.				25 Pelatihan Penguatan Kapasitas Perempuan Papua									
98.				36 Fasilitasi Form Anak Daerah Tingkat Provinsi Papua									
99.				37 Pelatihan Paralegal Anak									
100.				38 Pendidikan politik bagi Perempuan.									
					Jumlah Peserta Perempuan yang mengikuti pendidikan Politik	250.000.000,00	2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.08.02.1.02 - Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	2.08.02.1.02.02 - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Perempuan yang mengikuti pendidikan Politik	30 Orang	

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
101.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	17 Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Perlindungan Perempuan dan Anak	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR) ; Cakupan penguatan kader Posyandu di kampung; Implementasi kebijakan yang responsif gender; Persentase Posyandu Aktif	40 Pelatihan Psikososial Perempuan Korban Kekerasan									
					Meningkatnya pemahaman psikososial pendamping korban	0,00						0 Acara	
					Jumlah peserta pelatihan yang terlatih 60 orang pendamping	0,00						0 Kegiatan	
102.				41 Fasilitasi Forum kesetaraan gender dan demokrasi									
					Jumlah Organisasi yang mengikuti Forum Kesetaraan Gender	250.000.000,00	2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.08.02.1.02 - Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	2.08.02.1.02.01 - Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah orang (organisasi) yang mengikuti Forum Kesetaraan Gender	35 Organisasi	
103.				42 Penguatan Kapasitas SDM Wirausaha Perempuan Menuju Perempuan Papua Maju Mandiri (Prima)									
104.				53 Fasilitasi Penguatan Kapasitas Kader Posyandu dan PKK									
					Meningkatnya kapasitas, pemahaman kader posyandu dan PKK	0,00	2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	2.08.04.1.01 - Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	2.08.04.1.01.03 - Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah kader posyandu yang mendapat penguatan kapasitas	20 Acara	
					Jumlah Posyandu yang mendapat Penguatan Kapasitas	500.000.000,00	2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	2.08.04.1.01 - Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	2.08.04.1.01.03 - Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah kader Posyandu yang mendapat Penguatan Kapasitas	20 Peserta	
105.				65 TOT bagi Operator Simponi PPA									
					Jumlah Orang yang terlatih	250.000.000,00	2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	2.08.03.1.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	2.08.03.1.03.04 - Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang terlatih	20 Orang	
106.				66 Pelatihan (PATBM) Kampung									
					Jumlah Peserta PATBM Kampung yang dilatih	300.000.000,00	2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	2.08.07.1.02 - Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	2.08.07.1.02.03 - Pengembangan Komunikasi, Informasi, Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta PATBM Kampung terlatih dalam penanganan perlindungan anak tingkat kampung	40 Orang	
107.				67 Pelatihan Psikososial bagi tenaga kepolisian dan P2TP2A Provinsi Papua									
					Jumlah tenaga kepolisian dan P2TP2A yang terlatih	300.000.000,00	2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	2.08.03.1.02 - Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.08.03.1.02.01 - Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga kepolisian dan tenaga P2TP2A yang terlatih	40 Orang	
108.				68 Penguatan kapasitas SDM pendamping korban kekerasan									
					Jumlah Pendamping Korban kekerasan yang terlatih	350.000.000,00	2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.08.02.1.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	2.08.02.1.03.02 - Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM pendamping korban kekerasan terlatih	60 Orang	

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
109.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	18 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Cakupan kelompok Keluarga Pra Sejahtera I binaan yang naik menjadi Keluarga Sejahtera I; Cakupan wirausaha perempuan binaan yang berkembang; Persentase PKK aktif	6 Monitoring, evaluasi dan pelaporan									
					Jumlah kab/kota yang dimonitoring	0,00	2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.08.02.1.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	2.08.02.1.03.01 - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah data laporan	5 Kabupaten	
110.				43 Pemberdayaan ekonomi keluarga sejahtera									
					Jumlah Keluarga prasejahtera yang diberdayakan	600.000.000,00	2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	2.08.04.1.01 - Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	2.08.04.1.01.03 - Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah kelompok keluarga yang ditingkatkan kapasitas.	12 Kelompok	
111.				44 Penguatan kapasitas SDM Wirausaha perempuan papua									
					Jumlah kelompok wirausaha perempuan yang dilatih	600.000.000,00	2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.08.02.1.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	2.08.02.1.03.03 - Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah kelompok wirausaha perempuan yang dilatih	30 Kelompok	
112.				45 Pendidikan politik dan hukum bagi anggota legislatif, organisasi perempuan papua									
					Jumlah anggota legislatif dan organisasi perempuan yang terlatih	450.000.000,00	2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.08.02.1.02 - Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	2.08.02.1.02.02 - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan.	50 Orang	
113.				46 Fasilitasi dan pemberdayaan bagi penyandang cacat dan difabel									
					Jumlah Penyandang cacat yang diberdayakan	0,00	2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	2.08.07.1.02 - Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	2.08.07.1.02.04 - Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Penyandang cacat/paca yang diberdayakan	70 Orang	
114.		27 Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam pembangunan		30 Sosialisasi gender bagi aparat kampung, tomas, toga dan todat									
					Terlaksananya sosialisasi gender bagi aparat kampung, tomas, toga dan todat	0,00						0 Orang	
115.				31 Pemetaan masalah sosial perempuan									
					Tersedianya data pemetaan masalah sosial perempuan	0,00						0 Kegiatan	
116.				32 Pelatihan penguatan kapasitas perempuan papua									
					Jumlah Peserta yang mendapat penguatan kapasitas	0,00						0 Orang	
117.				33 Penguatan kapasitas SDM Wirausaha perempuan									
					Jumlah Peserta yang mendapat Penguatan Kapasitas	0,00						0 Orang	
118.				34 Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD)									
					Jumlah Rekomendasi yang dihasilkan	0,00						0 rekomendasi	
119.				35 Pemberdayaan Keluarga Sejahtera									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Jumlah Kelompok usaha Perempuan yang difasilitasi	0,00						0 Kelompok	
120.				36 Pameran kerajinan perempuan penyintas									
					Jumlah Kelompok Usaha Perempuan Kerajinan Penyintas yang difasilitasi	0,00						0 Kelompok	
121.				37 KIE advokasi dalam pemberdayaan Keluarga Berencana									
					Telaksananya KIE advokasi dalam pemberdayaan keluarga berencana	0,00						0 Orang	
122.				38 Peningkatan kemampuan kemandirian organisasi perempuan									
					Meningkatnya kapasitas organisasi perempuan	0,00						0 Kegiatan	
123.				39 Advokasi dan pendampingan model kampung prima									
					Terlaksananya pendampingan kampung prima maju mandiri	0,00						0 Kegiatan	
124.		28 Program peningkatan penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS	Menurunnya jumlah penduduk yang terdampak Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS	1 Penyuluhan penanggulangan narkoba dan PMS di sekolah									
					Jumlah Peserta yang mengikuti penyuluhan	500.000.000,00	2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	2.08.06.1.02 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	2.08.06.1.02.04 - Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta yang mengikuti penyuluhan	300 Orang	
125.		30 Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	Cakupan kampung KB	1 Pelatihan Tenaga Pendamping									
					Jumlah Peserta yang dilatih	500.000.000,00	2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	2.08.04.1.01 - Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	2.08.04.1.01.03 - Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah tenaga pendamping kelompok bina keluarga yang terlatih	250 Orang	
126.	Administrasi Kependudukan dan Capil	15 Program Penataan Administrasi Kependudukan	Cakupan penduduk ber KTP elektronik; Ketersediaan database kependudukan skala provinsi; Persentase kepemilikan KK elektronik; Persentase pasangan berakate nikah; Persentase kepemilikan akta kelahiran	36 Penambahan dan Pengembangan Program Pendataan Penduduk Orang Asli Papua									
					Jumlah dokumen pelaporan yang dihasilkan	496.700.000,00	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	2.12.04.1.01 - Penataan Administrasi Kependudukan	2.12.04.1.01.02 - Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan yang Bersifat Data Perseorangan, Data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pelaporan yang dihasilkan	5 Dokumen	
127.				37 Pelaksanaan Pembinaan, sosialisasi dan pengawasan penyelenggaraan Pencatatan sipil di wilayah Provinsi									
					Jumlah pserta yang mengikuti pembinaan, sosialisasi dan pengawasan	250.000.000,00	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL	2.12.03.1.01 - Pelayanan Pencatatan Sipil	2.12.03.1.01.01 - Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil	Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan, sosialisasi dan pengawasan	65 Orang	
128.				39 Monitoring dan Evaluasi Penyerasian Kebijakan Kependudukan Kabupaten/Kota									
					Jumlah dokumen pelaporan yang dihasilkan	750.000.000,00	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	2.12.04.1.03 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Provinsi	2.12.04.1.03.04 - Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	Jumlah dokumen pelaporan yang dihasilkan	10 Dokumen	
129.				40 Pengembangan sistem informasi Administrasi kependudukan (SI AK)									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Jumlah perangkat/alat yang dikembangkan	250.000.000,00	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	2.12.02.1.01 - Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	2.12.02.1.01.03 - Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi	Jumlah perangkat/alat yang dikembangkan	2 Unit	
130.				43 Sosialisasi Penerapan Kebijakan Kependudukan									
					Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi penerapan kebijakan kependudukan	250.000.000,00	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	2.12.04.1.02 - Penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan Provinsi	2.12.04.1.02.02 - Sosialisasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi penerapan kebijakan kependudukan	65 Orang	
131.				51 Pengelolaan Dokumen Register Akta Catatan Sipil di Wilayah Provinsi Papua									
					Jumlah dokumen register akta catatan sipil yang di kelola	100.000.000,00	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL	2.12.03.1.01 - Pelayanan Pencatatan Sipil	2.12.03.1.01.02 - Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi	Jumlah dokumen register akta catatan sipil yang di kelola	150 Dokumen	
132.				54 Temu Teknis Kebijakan Kependudukan									
					Jumlah aparatur yang mengikuti pertemuan	300.000.000,00	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	2.12.04.1.03 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Provinsi	2.12.04.1.03.02 - Bimbingan Teknis Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Kependudukan, dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah aparatur yang mengikuti pertemuan	65 Orang	
					Jumlah dokumen pelaporan yang dihasilkan	0,00	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	2.12.04.1.03 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Provinsi	2.12.04.1.03.02 - Bimbingan Teknis Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Kependudukan, dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah dokumen pelaporan yang dihasilkan	0 Dokumen	
133.				55 Bimbingan Teknis Administrasi Data Base (ADB) se Provinsi Papua									
					Jumlah peserta yang mengikuti bimbingan teknis	300.000.000,00	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	2.12.04.1.03 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Provinsi	2.12.04.1.03.02 - Bimbingan Teknis Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Kependudukan, dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah peserta yang mengikuti bimbingan teknis	29 Kabupaten	
134.		16 Program Pembinaan Kependudukan	Meningkatnya Pelayanan bagi masyarakat dalam pengurusan kependudukan	34 Sosialisasi Adminduk bagi masyarakat perbatasan/daerah tertentu									
					Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	300.000.000,00	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	2.12.04.1.02 - Penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan Provinsi	2.12.04.1.02.02 - Sosialisasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	65 Orang	
135.				37 Pelatihan Administrasi Data Base (ADB) Kependudukan bagi Aparatur									
					Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan	150.000.000,00	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	2.12.04.1.03 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Provinsi	2.12.04.1.03.02 - Bimbingan Teknis Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Kependudukan, dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan	15 Orang	
136.	Administrasi Pemerintahan	63 Program Pembinaan Mental Spritual	Frekuensi koordinasi lembaga keagamaan dengan pemerintah pertahun	1 Pembinaan dan Peningkatan Iman dan Taqwa bagi Aparatur									
					Jumlah aparatur yang mengikuti ibadah	150.000.000,00						3000 Orang	
137.				11 Rapat koordinasi lembaga-lembaga keagamaan dalam dan luar daerah									
					Meningkatnya koordinasi lembaga keagamaan dengan pemerintah	300.000.000,00						51 Lembaga	
138.				13 Penyediaan aparatur pendamping keagamaan									
					Jumlah calon jamaah haji papua	100.000.000,00						1500 Orang	
139.				27 Peningkatan penunjang sarana peribadatan di provinsi papua									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Jumlah Tempat Ibadah yang memperoleh penunjang sarana peribadatan	250.000.000,00						3 Unit	
140.				33 Pemantauan Dana pembinaan dan pengembangan Kepada Lembaga Keagamaan									
					jumlah laporan lembaga keagamaan	100.000.000,00						51 Dokumen	
141.		106 Program Peningkatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Fasilitasi di Bidang Bina Kesejahteraan Rakyat, Bina Mental Spiritual dan Bina Kemasyarakatan	Rasio Tempat Ibadah Per satuan Penduduk	2 Fasilitasi Rapat Koordinasi Pencegahan dan Menindakan Bahaya Penjualan dan Peredaran Miras/Narkoba Antara Stakholder Provinsi Papua									
					Adanya rekomendasi penancangan hari bebas miras/narkoba	100.000.000,00						8 SKPD	
142.				3 Koordinasi Bidang Bina Kemasyarakatan									
					Adanya koordinasi di bidang kemasyarakatan	250.000.000,00						3 SKPD	
143.				4 Rapat Koordinasi Bidang Kesejahteraan									
					Adanya koordinasi di bidang kesejahteraan	100.000.000,00						3 SKPD	
					Terlaksananya koordinasi di bidang kesejahteraan	0,00						0 Orang	
144.				7 Penguatan Kapasitas, Fasilitasi Keberpihakan Peluang Pasar bagi Pengrajin Perempuan Asli Papua									
					Peningkatan Kapasitas Pengerajin Perempuan Asli Papua	160.000.000,00						50 Orang	
145.				8 Rapat Koordinasi Pemuda Pelajar dan Mahasiswa yang berprestasi dibidang olahraga									
					Terciptanya Pemuda yang mandiri	150.000.000,00						20 Orang	
146.				9 Koordinasi dan Fasilitasi ASN Bebsa Narkoba Melalui Tes Urin Bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua									
					Jumlah ASN yang melakukan tes bebsa narkoba	200.000.000,00						500 Orang	
147.				10 Koordinasi Pembinaan Olahraga Masyarakat									
					Adanya Pembinaan Olahraga Masyarakat	250.000.000,00						30 Orang	
148.		107 Program Peningkatan dan Pembinaan di Bidang Bina Kesejahteraan Rakyat, Bina Mental Spiritual dan Bina Kemasyarakatan	Cakupan forum lintas agama tingkat provinsi yang berfungsi dan aktif	1 Peningkatan Pemberdayaan Penduduk Miskin dan Lingkungan									
					Terwujudnya pemberdayaan penduduk miskin	200.000.000,00						70 Orang	
149.				6 Revitalisasi Tim Pelaksanaan UKS Usaha Kesehatan Sekolah pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah									
					Terwujudnya Sekolah yang Bersih	150.000.000,00						4 Sekolah	
150.				7 Supervisi Kampung KB Lintas Sektor dalam Rangka Pembangunan Keluarga Sejahtera									
					Terlaksananya Supervisi Kampung KB berbasis Pembangunan Keluarga Berencana	100.000.000,00						2 Kampung	
151.				8 Peningkatan Kapasitas (SDM) Sumber Daya Manusia Bagi Tenaga Kerja Papua									
					Peningkatan Jumlah Tenaga Kerja Papua	120.000.000,00						50 Orang	

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
152.	Administrasi Pemerintahan	107 Program Peningkatan dan Pembinaan di Bidang Bina Kesejahteraan Rakyat, Bina Mental Spiritual dan Bina Kemasyarakatan	Cakupan forum lintas agama tingkat provinsi yang berfungsi dan aktif	9 Pendataan Bagi Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Lokal									
					Peningkatan data Tenaga Kerja Produktif bagi SDM Papua	150.000.000,00						100 Orang	
153.				10 Peningkatan kualitas Pelayanan di Bidang Kesejahteraan Rakyat Lintas Sektor									
					Meningkatnya Kualitas Pelayanan	150.000.000,00						100 Orang	
154.		108 Program Pengembangan Data dan Informasi	Cakupan ketersediaan data ormas dan keagamaan	1 Penyediaan dan Pengembangan Data Kesejahteraan Rakyat, Mental Spritual dan Bina Kemasyarakatan									
					Meningkatnya layanan informasi pemerintah kepada masyarakat	200.000.000,00						100 Orang	
155.		109 Program Pemberdayaan Keagamaan	Cakupan kelompok keagamaan yang berfungsi dan aktif; Rasio rumah ibadah yang mendapatkan bantuan dan pemberdayaan	1 Fasilitasi, Pembangunan dan Pembinaan Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi Umat Katolik Secara Terintegasi pada Keuskupan di Provinsi Papua									
					Meningkatnya pemberdayaan umat khatolik di provinsi papua	5.700.000.000,00						100 Lembaga	
156.				2 Fasilitasi, Pembangunan dan Pembinaan Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi Umat Bapris secara Terintegasi pada Gereja Bapris di Provinsi Papua									
					Meningkatnya umat Bapris di provinsi papua	5.400.000.000,00						100 Lembaga	
157.				3 Fasilitasi, Pembangunan dan Pembinaan Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi Umat GPII secara Terintegasi di Sinode GPII di Indonesia Provinsi Papua									
					Meningkatnya pemberdayaan umat GPII di provinsi papua	5.400.000.000,00						100 Lembaga	
158.				4 Fasilitasi Pembangunan dan Pembinaan Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi Umat Kingmi secara terintegasi di Sinode Kingmi di Provinsi Papua									
					Meningkatnya pemberdayaan umat KINGMI di provinsi papua	5.700.000.000,00						100 Lembaga	
159.				5 Fasilitasi, Pembangunan dan Pembinaan Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi Umat GIDI secara terintegasi di Sinode GIDI di Indonesia									
					Meningkatnya pemberdayaan umat GIDI i indonesia	5.700.000.000,00						100 Lembaga	
160.				6 Fasilitasi, Pembangunan dan Pembinaan Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi Umat GKI secara Terintegasi di Sinode GKI di Tanah Papua									
					Meningkatnya pemberdayaan umat GKI di provinsi papua	5.700.000.000,00						100 Lembaga	
161.				7 Fasilitasi, Pembangunan dan Pembinaan Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi Umat ADVENT Secara Terintegasi di Sinode Gereja ADVENT di Indonesia									
					Meningkatnya pemberdayaan umat ADVENT di provinnsi papua	5.400.000.000,00						100 Lembaga	
162.				8 Monitoring dan Evaluasi Program Pemberdayaan Keagamaan Papua									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Meningkatnya pemberdayaan bidang keagamaan bagi 7 Sinode besar di provinsi papua	3.204.354.000,00						100 Lembaga	
JUMLAH						90.709.554.000,00							

Mengetahui,
Kepala Bappeda Provinsi Papua

YOHANES WALILO, S.Sos, M.Si
NIP. 197007281997121001

JAYAPURA, 20 July 2020
KEPALA DINAS

DR. RIBKA HALUK, S.Sos, MM
NIP. 19710110 199610 2 001

**REKAPITULASI PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021
SERTA KETERKAITAN DENGAN HASIL PEMETAAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019**

PROVINSI : Papua

PERANGKAT DAERAH : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Pemberdayaan Masyarakat Desa	1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	À Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	1 Penyediaan jasa surat menyurat									
					Jumlah surat yang disediakan	500.000.000,00		2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.07.01.1.03 - Administrasi Umum	2.07.01.1.03.01 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang terkirim	1500 Surat	
2.				2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik									
					Jumlah Jasa Layanan berlangganan Listrik, Air, Telepon, Transponder	0,00		2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.07.01.1.03 - Administrasi Umum	2.07.01.1.03.02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Layanan	12 Layanan	
3.				8 Penyediaan jasa kebersihan kantor									
					Luas Gedung dan Halaman yang disediakan jasa kebersihan	0,00		2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.07.01.1.03 - Administrasi Umum	2.07.01.1.03.08 - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	jumlah Gedung dan Halaman yang dibersihkan	0 M2	
					Jumlah tenaga kebersihan dan Fasilitas Pendukung kebersihan kantor	0,00		2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.07.01.1.03 - Administrasi Umum	2.07.01.1.03.08 - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah tenaga kebersihan	4 Orang	
					Jumlah Jenis Bahan dan Alat Kebersihan	0,00		2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.07.01.1.03 - Administrasi Umum	2.07.01.1.03.14 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Bahan dan Alat Kebersihan	0 Jenis	
4.				9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja									
					Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	100.000.000,00		2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.07.01.1.03 - Administrasi Umum	2.07.01.1.03.09 - Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	59 Unit	
5.				10 Penyediaan alat tulis kantor									
					Jumlah jenis ATK yang disediakan	400.000.000,00		2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.07.01.1.03 - Administrasi Umum	2.07.01.1.03.10 - Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	40 Jenis	
6.				11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan									
					Jumlah barang cetakan	0,00		2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.07.01.1.03 - Administrasi Umum	2.07.01.1.03.11 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan	0 Jenis	
					Jumlah penggandaan	0,00		2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.07.01.1.03 - Administrasi Umum	2.07.01.1.03.11 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penggandaan	0 Lembar	
					Jumlah Jenis Barang Cetak dan yang Disediakan	0,00		2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.07.01.1.03 - Administrasi Umum	2.07.01.1.03.11 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0 Jenis	
					Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	250.000.000,00		2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.07.01.1.03 - Administrasi Umum	2.07.01.1.03.11 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	12 Bulan	
7.				15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan									
					Jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	200.000.000,00		2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.07.01.1.03 - Administrasi Umum	2.07.01.1.03.15 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	130 Jenis	
8.				17 Penyediaan makanan dan minuman									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Pelaksanaan penyediaan makan dan minum	0,00		2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.07.01.1.03 - Administras Umum	2.07.01.1.03.17 - Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Porsi makan dan minum kegiatan yang tersedia	0 Kegiatan	
					Pelaksanaan makan minum tamu dan rapat	0,00		2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.07.01.1.03 - Administras Umum	2.07.01.1.03.17 - Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Porsi makan dan minum yang tersedia	0 Kali Tahun	
					Pelaksanaan makan minum saat olah raga (hari Jumat)	0,00		2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.07.01.1.03 - Administras Umum	2.07.01.1.03.17 - Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Porsi makan dan minum yang tersedia	0 Kali	
					Tersediannya Makanan dan Minuman	350.000.000,00		2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.07.01.1.03 - Administras Umum	2.07.01.1.03.17 - Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Porsi makan dan minum yang tersedia	12 Bulan	
					Jumlah orang yang disediakan makan dan minuman	0,00		2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.07.01.1.03 - Administras Umum	2.07.01.1.03.17 - Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Porsi makan dan minum yang tersedia	0 Orang	
9.				18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah									
					Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	2.000.000.000,00		2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.07.01.1.03 - Administras Umum	2.07.01.1.03.18 - Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	60 Orang	
10.		2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	À Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	9 Pengadaan peralatan gedung kantor									
					Jumlah peralatan perlengkapan	100.000.000,00		2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.07.01.1.03 - Administras Umum	2.07.01.1.03.25 - Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan/perlengkapan yang diadakan	12 Unit	
11.				22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor									
					Jumlah gedung kantor yang dipelihara	150.000.000,00		2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.07.01.1.03 - Administras Umum	2.07.01.1.03.29 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor	6 Unit	
					belanja sewa	0,00		2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.07.01.1.03 - Administras Umum	2.07.01.1.03.29 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung yang disewa	0 Tahun	
12.				24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional									
					Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	0,00		2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.07.01.1.03 - Administras Umum	2.07.01.1.03.31 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah dan Jenis perlengkapan/peralatan gedung kantor yang dipelihara	0 Unit	
					Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	300.000.000,00		2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.07.01.1.03 - Administras Umum	2.07.01.1.03.31 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang	23 Unit	
					sewa kendaraan	0,00		2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.07.01.1.03 - Administras Umum	2.07.01.1.03.31 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan yang diperbaiki/Service	0 Bulan	
13.				28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor									
					Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	170.000.000,00		2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.07.01.1.03 - Administras Umum	2.07.01.1.03.35 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	76 Unit	
14.		3 Program peningkatan disiplin aparatur	À Meningkatnya disiplin aparatur	2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya									
					Jumlah pakaian dinas yang diadakan	150.000.000,00		2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.07.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	2.07.01.1.04.02 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas sipil harian	180 Stell	
15.		5 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	À Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	1 Pendidikan dan pelatihan formal									
					Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	400.000.000,00		2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.07.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	2.07.01.1.04.09 - Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparatur mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	20 Orang	
16.		6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	À Meningkatnya kualitas akuntabilitas OPD	1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD									
					Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	100.000.000,00		2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.07.01.1.02 - Administras Keuangan	2.07.01.1.02.06 - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan	1 Laporan	
					Laporan LAKIP SKPD	0,00		2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.07.01.1.01 - Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.07.01.1.01.05 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan LAKIP SKPD	0 Dokumen	

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17.	Pemberdayaan Masyarakat Desa	6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	A Meningkatnya kualitas akuntabilitas OPD	2 Penyusunan laporan keuangan semesteran									
					Jumlah pelaporan keuangan semesteran yang diselesaikan tepat waktu	50.000.000,00		2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.07.01.1.02 - Administrasi Keuangan	2.07.01.1.02.07 - Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Jumlah dokumen laporan	1 Laporan	
18.				4 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun									
					Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	75.000.000,00		2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.07.01.1.02 - Administrasi Keuangan	2.07.01.1.02.09 - Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	1 Laporan	
19.				5 Penyusunan Renja, RKA dan Perubahan APBD									
					Jumlah dokumen	100.000.000,00		2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.07.01.1.01 - Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.07.01.1.01.01 - Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	3 Dokumen	
20.				12 Penyusunan RENSTRA									
					Jumlah Dokumen	100.000.000,00		2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.07.01.1.01 - Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.07.01.1.01.01 - Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	
21.		15 Program Pengembangan data/informasi	Ketersediaan Data dan Informasi; Prosentase data/informasi yang diperoleh dari keseluruhan data/informasi yang dibutuhkan	72 Sosialisasi Mekanisme dan Tahapan Pembentukan Kampung Adat di 5 Wilayah Adat									
					Tersosialisasinya pembentukan kampung adat terhadap masyarakat adat	850.000.000,00	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG PAPUA **)	2.13.06.1.01 - Pengembangan data/Informasi **)	2.13.06.1.01.01 - Sosialisasi Mekanisme dan Tahapan Pembentukan Kampung Adat di 5 Wilayah Adat **)	Tersosialisasinya pembentukan kampung adat terhadap masyarakat adat	100 Orang	
22.				77 Pengolahan, Penginputan dan Publikasi Data DPMK									
					Tersedianya data DPMK,terlaksananya publikasi data	600.000.000,00	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG PAPUA **)	2.13.06.1.01 - Pengembangan data/Informasi **)	2.13.06.1.01.02 - Pengolahan, Penginputan dan Publikasi Data DPMK **)	Tersedianya data DPMK,terlaksananya publikasi data	1 Dokumen	
23.				78 Sosialisasi Metode dan Teknik Pemetaan Hak Ulayat di 5 Wilayah Adat Provinsi Papua									
					Tersosialisasinya metode dan teknik pemetaan hak ulayat di 5 wilayah adat	900.000.000,00					Tersosialisasinya metode dan teknik pemetaan hak ulayat di 5 wilayah adat	100 Orang	
24.				80 Ujicoba Hasil Pengkajian TTG sesuai Sumber Daya di Wilayah Adat									
					terkajinya TTG sesuai Sumber Daya yang terdapat di 5 wilayah adat	0,00					terkajinya TTG sesuai Sumber Daya yang terdapat di 5 wilayah adat	5 Wilayah	
25.		21 Program Pemberdayaan Masyarakat Kampung	Cakupan kampung yang diberdayakan dalam bidang TTG ; Cakupan pemberdayaan masyarakat kampung; Jumlah BUMKAM yang kelola Komoditas Unggulan; Persentase kampung mandiri; Persentase kampung tertinggal	2 Alih Teknologi melalui gelar TTG Nasional									
					Meningkatnya Kemampuan alih TTG melalui Gelar TTG Nasional	1.000.000.000,00	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG PAPUA **)	2.13.06.1.02 - Pemberdayaan Masyarakat Kampung **)	2.13.06.1.02.01 - Pelaksanaan Gelar Teknologi Tepat Guna Nasional **)	Meningkatnya Kemampuan alih TTG melalui Gelar TTG Nasional	100 Orang	
26.				29 Fasilitas Pengembangan Teknologi Tepat Guna									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Terfasilitasinya pengembangan TTTG	500.000.000,00	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG PAPUA **)	2.13.06.1.02 - Pemberdayaan Masyarakat Kampung **)	2.13.06.1.02.02 - Fasilitas Pengembangan Teknologi Tepat Guna **)	Terfasilitasinya pengembangan TTTG	5 Unit	
27.				47 Monitoring Program/Kegiatan Ke.PMD-an									
					Terlaksananya Monitoring Program Ke PMD-an	1.900.000.000,00					Terlaksananya Monitoring Program Ke PMD-an	1 Dokumen	
28.		22 Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan Distrik dan Kampung	Cakupan jumlah kampung yang mendapatkan bantuan penguatan Lembaga Masyarakat Adat; Cakupan lembaga yang diperkuat kapasitas kelembagaannya di Distrik dan kampung; Persentase lembaga pemberdayaan masyarakat yang berprestasi	2 Lomba kampung/kelurahan di 29 Kabupaten/Kota									
					Terlaksananya lomba kampung di 29 Kab/Kota	1.400.000.000,00						1 Kegiatan	
29.				12 Pembinaan dan Fasilitas Lembaga Masyarakat									
					Tersedianya Perda Lembaga Masyarakat dan Terlaksananya Pelatihan	550.000.000,00						1 Kegiatan	
30.				21 Monitoring dan Evaluasi Prospek									
					Tersedianya data dan terlaksananya monitoring	1.400.000.000,00						1 Kegiatan	
31.		24 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Cakupan penguatan kader Posyandu di kampung; Prosentasi peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan	2 Penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) tingkat Provinsi dan Nasional									
					Meningkatnya partisipasi masyarakat	0,00	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG PAPUA **)	2.13.06.1.04 - Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan **)	2.13.06.1.04.01 - Penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) tingkat Provinsi dan Nasional **)	Meningkatnya partisipasi masyarakat	1000 Orang	
32.		25 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Cakupan kelompok Keluarga Pra Sejahtera I binaan yang naik menjadi Keluarga Sejahtera I; Prosentase pengarusutamaan gender dalam pembangunan; Prosentase peningkatan peran Perempuan dalam pembangunan	3 Rapat Konsultasi Tim Penggerak PKK Tingkat Provinsi dan Nasional									
					Terlaksananya Rapat Konsultasi	589.200.000,00					Terlaksananya Rapat Konsultasi	500 Orang	
33.				4 Kunjungan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Papua									
					Terlaksananya Kunjungan Kerja	589.200.000,00	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG PAPUA **)	2.13.06.1.05 - Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan **)	2.13.06.1.05.01 - Kunjungan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Papua **)	Terlaksananya Kunjungan Kerja	29 Kabupaten	
JUMLAH						15.773.400.000,00							

Mengetahui,
Kepala Bappeda Provinsi Papua

YOHANES WALILO, S.Sos, M.Si
NIP. 197007281997121001

JAYAPURA, 20 July 2020
KEPALA DINAS

YOPI MURIB, SE, MM
NIP. 19730304 200112 1 003

**REKAPITULASI PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021
SERTA KETERKAITAN DENGAN HASIL PEMETAAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019**

PROVINSI : Papua

PERANGKAT DAERAH : Dinas Perhubungan

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Perhubungan	1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	À Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	1 Penyediaan jasa surat menyurat									
					Jumlah surat yang disediakan	100.000.000,00		2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.09.01.1.03 - Administrasi Umum	2.09.01.1.03.01 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang terkirim	120 Surat	
2.				2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik									
					Jumlah Jasa Layanan berlangganan Listrik, Air, Telepon, Transponder	900.000.000,00		2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.09.01.1.03 - Administrasi Umum	2.09.01.1.03.02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Layanan	66 Layanan	
3.				3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor									
					Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	300.000.000,00		2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.09.01.1.03 - Administrasi Umum	2.09.01.1.03.03 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	60 Unit	
4.				6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional									
					Jumlah Unit Mobil Dinas/Operasional yang terpelihara dan Terfasilitasi Perijinannya	500.000.000,00		2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.09.01.1.03 - Administrasi Umum	2.09.01.1.03.06 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Unit Mobil Dinas/Operasional yang diservis dan dipelihara	60 Unit	
5.				8 Penyediaan jasa kebersihan kantor									
					Luas Gedung dan Halaman yang disediakan jasa kebersihan	450.000.000,00		2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.09.01.1.03 - Administrasi Umum	2.09.01.1.03.08 - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	jumlah Gedung dan Halaman yang dibersihkan	1500 M2	
					Jumlah tenaga kebersihan dan Fasilitas Pendukung kebersihan kantor	0,00		2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.09.01.1.03 - Administrasi Umum	2.09.01.1.03.08 - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah tenaga kebersihan	10 Orang	
					Jumlah Jenis Bahan dan Alat Kebersihan	0,00		2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.09.01.1.03 - Administrasi Umum	2.09.01.1.03.14 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Bahan dan Alat Kebersihan	300 Jenis	
6.				10 Penyediaan alat tulis kantor									
					Jumlah jenis ATK yang disediakan	300.000.000,00		2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.09.01.1.03 - Administrasi Umum	2.09.01.1.03.10 - Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	45 Jenis	
7.				11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan									
					Jumlah barang cetakan	0,00		2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.09.01.1.03 - Administrasi Umum	2.09.01.1.03.11 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan	200 Jenis	
					Jumlah penggandaan	200.000.000,00		2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.09.01.1.03 - Administrasi Umum	2.09.01.1.03.11 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penggandaan	15000 Lembar	
					Jumlah Jenis Barang Cetak dan yang Disediakan	0,00		2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.09.01.1.03 - Administrasi Umum	2.09.01.1.03.11 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	200 Jenis	
					Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	0,00		2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.09.01.1.03 - Administrasi Umum	2.09.01.1.03.11 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	100 Bulan	
8.				12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor									
					Jumlah Komponen Listrik yang disediakan	150.000.000,00		2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.09.01.1.03 - Administrasi Umum	2.09.01.1.03.12 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen alat pemeliharaan listrik dan genset yang disediakan	150 Buah	
9.				14 Penyediaan peralatan rumah tangga									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	75.000.000,00		2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.09.01.1.03 - Administrasi Umum	2.09.01.1.03.14 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	10 Unit	
10.				15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan									
					Jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	30.000.000,00		2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.09.01.1.03 - Administrasi Umum	2.09.01.1.03.15 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	6120 Jenis	
11.				16 Penyediaan bahan logistik kantor									
					Jumlah liter bahan bakar untuk kendaraan operasional	300.000.000,00		2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.09.01.1.03 - Administrasi Umum	2.09.01.1.03.16 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah liter bahan bakar untuk kendaraan operasional	46000 Liter	
					jumlah mobilitas termasuk tenaga angkat dan turun beras ke kantor	0,00		2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.09.01.1.03 - Administrasi Umum	2.09.01.1.03.16 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah Pembelian Air Galon	12 Kali	
12.				17 Penyediaan makanan dan minuman									
					Pelaksanaan penyediaan makan dan minum	0,00		2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.09.01.1.03 - Administrasi Umum	2.09.01.1.03.17 - Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Porsi makan dan minum kegiatan yang tersedia	200 Kegiatan	
					Pelaksanaan makan minum tamu dan rapat	380.000.000,00		2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.09.01.1.03 - Administrasi Umum	2.09.01.1.03.17 - Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Porsi makan dan minum yang tersedia	500 Kali Tahun	
					Pelaksanaan makan minum saat olah raga (hari Jumat)	0,00		2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.09.01.1.03 - Administrasi Umum	2.09.01.1.03.17 - Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Porsi makan dan minum yang tersedia	84 Kali	
					Tersediannya Makanan dan Minuman	0,00		2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.09.01.1.03 - Administrasi Umum	2.09.01.1.03.17 - Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Porsi makan dan minum yang tersedia	12 Bulan	
					Jumlah orang yang disediakan makan dan minuman	0,00		2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.09.01.1.03 - Administrasi Umum	2.09.01.1.03.17 - Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Porsi makan dan minum yang tersedia	500 Orang	
13.				18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah									
					Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	2.462.875.000,00		2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.09.01.1.03 - Administrasi Umum	2.09.01.1.03.18 - Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	79 Orang	
14.				19 Penyediaan Jasa Pengamanan									
					Pelaksanaan pembayaran insentif bagi tenaga operator dan penjaga X-Ray VIP Room Bandara Sentani	0,00		2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.09.01.1.03 - Administrasi Umum	2.09.01.1.03.01 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa keamanan/security yang dibayarkan	48 Orang Bulan	
					Pelaksanaan pembayaran honor bagi satpam	780.000.000,00		2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.09.01.1.03 - Administrasi Umum	2.09.01.1.03.01 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa keamanan/security yang dibayarkan	288 Orang Bulan	
					Pelaksanaan uang makan satpam	0,00		2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.09.01.1.03 - Administrasi Umum	2.09.01.1.03.01 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa keamanan/security yang dibayarkan	288 Orang Bulan	
					Jumlah tenaga pengamanan	0,00		2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.09.01.1.03 - Administrasi Umum	2.09.01.1.03.01 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa keamanan/security yang dibayarkan	24 Orang	
15.		2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	À Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	1 Pembangunan rumah jabatan									
					Luas bangunan yang dibangun	0,00						0 M2	
16.				3 Pembangunan gedung kantor									
					Luas bangunan yang dibangun	17.500.000.000,00		2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.09.01.1.03 - Administrasi Umum	2.09.01.1.03.39 - Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Luas bangunan yang dibangun	0 M2	
					Tersedianya desain perencanaan bangunan	0,00		2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.09.01.1.03 - Administrasi Umum	2.09.01.1.03.39 - Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Tersedianya desain perencanaan bangunan	0 Dokumen	
17.				4 Pengadaan mobil jabatan									
					Jumlah mobil yang diadakan	700.000.000,00		2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.09.01.1.03 - Administrasi Umum	2.09.01.1.03.20 - Pengadaan Mobil Jabatan	Jumlah mobil yang diadakan	2 Unit	
18.				7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor									
					Jumlah pengadaan perlengkapan	500.000.000,00		2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.09.01.1.03 - Administrasi Umum	2.09.01.1.03.23 - Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan	32 Unit	

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19.	Perhubungan	2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	À Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	9 Pengadaan peralatan gedung kantor									
					Jumlah peralatan perlengkapan	482.000.000,00		2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.09.01.1.03 - Administras Umum	2.09.01.1.03.25 - Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan/perlengkapan yang diadakan	53 Unit	
20.				10 Pengadaan mebeleur									
					Jumlah mebeleur yang diadakan	500.000.000,00		2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.09.01.1.03 - Administras Umum	2.09.01.1.03.26 - Pengadaan Mebeleur	Jumlah mebeleur yang diadakan untuk 3 UPT	40 Unit	
21.				22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor									
					Jumlah gedung kantor yang dipelihara	300.000.000,00		2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.09.01.1.03 - Administras Umum	2.09.01.1.03.29 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor	4 Unit	
					belanja sewa	0,00		2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.09.01.1.03 - Administras Umum	2.09.01.1.03.29 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung yang disewa	25 Tahun	
22.				24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional									
					Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	0,00		2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.09.01.1.03 - Administras Umum	2.09.01.1.03.31 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah dan Jenis perlengkapan/peralatan gedung kantor yang dipelihara	6 Unit	
					Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	450.000.000,00		2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.09.01.1.03 - Administras Umum	2.09.01.1.03.31 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang	80 Unit	
					sewa kendaraan	0,00		2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.09.01.1.03 - Administras Umum	2.09.01.1.03.31 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan yang d Perbaiki/Service	1 Bulan	
23.				26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor									
					Pelaksanaan pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	0,00		2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.09.01.1.03 - Administras Umum	2.09.01.1.03.27 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Jumlah Rumah Jabatan	6 Kegiatan	
					Jumlah Perlengkapan Gedung kantor yang terpelihara	200.000.000,00		2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.09.01.1.03 - Administras Umum	2.09.01.1.03.33 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung kantor yang dipelihara	45 Unit	
					Tersediannya biaya pemeliharaan gedung kantor	0,00		2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.09.01.1.03 - Administras Umum	2.09.01.1.03.39 - Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor	40 Bulan	
24.				42 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor									
					Terlaksananya rehabilitasi gedung	500.000.000,00		2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.09.01.1.03 - Administras Umum	2.09.01.1.03.39 - Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Terlaksananya rehabilitasi gedung	100 M2	
25.				46 Sewa gedung									
					Jumlah gedung kantor yang disewa	2.000.000.000,00		2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.09.01.1.03 - Administras Umum	2.09.01.1.03.27 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Jumlah rumah jabatan yang terpelihara	2 Unit Tahun	
					Sewa rumah jabatan	0,00		2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.09.01.1.03 - Administras Umum	2.09.01.1.03.27 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Jumlah Rumah Jabatan Yang disewa	1 Unit Tahun	
26.		3 Program peningkatan disiplin aparatur	À Meningkatnya disiplin aparatur	1 Pengadaan mesin/kartu absensi									
					Jumlah Mesin /Kartu Apsensi yang tersedia	0,00		2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.09.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	2.09.01.1.04.01 - Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Jumlah Mesin /Kartu Absensi yang tersedia	0 Bh	
27.				2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya									
					Jumlah pakaian dinas yang diadakan	650.000.000,00		2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.09.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	2.09.01.1.04.02 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas sipil harian	185 Stell	
28.				3 Pengadaan pakaian kerja lapangan									
					Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan	400.000.000,00		2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.09.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	2.09.01.1.04.03 - Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan	70 Stell	
29.				5 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Jumlah pakaian khusus yang diadakan	170.000.000,00		2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.09.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	2.09.01.1.04.05 - Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah pakaian Batik yang diadakan	25 Stel	
30.		5 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	À Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	1 Pendidikan dan pelatihan formal									
					Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	250.000.000,00		2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.09.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	2.09.01.1.04.09 - Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparatur mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	5 Orang	
31.				2 Sosialisasi peraturan perundang-undangan									
					Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	250.000.000,00		2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.09.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	2.09.01.1.04.10 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	200 Orang	
32.				4 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal									
					Jumlah aparatur yang terlatih	625.000.000,00		2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.09.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	2.09.01.1.04.11 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25 Orang	
33.		6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	À Meningkatnya kualitas akuntabilitas OPD	1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD									
					Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	200.000.000,00		2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.09.01.1.02 - Administrasi Keuangan	2.09.01.1.02.06 - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan	4 Laporan	
					Laporan LAKIP SKPD	0,00		2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.09.01.1.01 - Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.09.01.1.01.05 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan LAKIP SKPD	0 Dokumen	
34.				5 Penyusunan Renja, RKA dan Perubahan APBD									
					Jumlah dokumen	100.000.000,00		2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.09.01.1.01 - Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.09.01.1.01.01 - Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	3 Dokumen	
35.				10 Forum SKPD Provinsi Papua									
					Jumlah Peserta Forum	3.000.000.000,00		2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.09.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	2.09.01.1.04.10 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Forum	200 Orang	
36.				12 Penyusunan RENSTRA									
					Jumlah Dokumen	30.000.000,00		2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.09.01.1.01 - Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.09.01.1.01.01 - Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	
37.		15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Cakupan terintegrasinya antar moda angkutan antarwilayah adat	1 Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan									
					Tersedianya Document Peren. Sarana dan Prasarana	24.500.000.000,00						22 Dokumen	
38.				45 Penyusunan UKL/UPL Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B di Kabupaten Keerom									
					Jumlah dokumen UKL/UPL yang disusun	750.000.000,00	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.1.03 - Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	2.15.02.1.03.01 - Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah dokumen UKL/UPL yang disusun	1 Dokumen	
39.				47 Penyusunan UKL/UPL Pembangunan Dermaga Sungai Sipu-Sipu Distrik Jita di Kabupaten Mimika									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Jumlah dokumen UKL/UPL yang disusun	0,00	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	2.15.03.1.08 - Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	2.15.03.1.08.01 - Pelaksanaan Penyusunan rencana induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah dokumen UKL/UPL yang disusun	1 Dokumen	
40.				57 Penyusunan UKL/UPL Pembangunan Pelabuhan Perintis Tagemon di Kabupaten Mappi									
					Jumlah dokumen UKL/UPL yang disusun	750.000.000,00	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	2.15.03.1.08 - Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	2.15.03.1.08.01 - Pelaksanaan Penyusunan rencana induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah dokumen UKL/UPL yang disusun pelabuhan Tagemon di Mappi	1 Dokumen	
41.				62 Penyusunan UKL/UPL Pembangunan Pelabuhan Perintis Kuatisore di Kabupaten Nabire									
					Jumlah dokumen UKL/UPL yang disusun	0,00						0 Dokumen	
42.				74 Penyusunan DELH/DPLH Bandara Botawa di Kabupaten Waropen									
					Jumlah dokumen DELH/DPLH yang disusun	0,00						0 Dokumen	
43.				87 Penyusunan DELH/DPLH Bandara Fawi di Kabupaten Puncak Jaya									
					Jumlah dokumen DELH/DPLH yang disusun	750.000.000,00						1 Dokumen	
44.				143 Penyusunan Sistem Informasi Infrastruktur Perhubungan									
					Jumlah sistem informasi yang disusun	1.000.000.000,00	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.1.05 - Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	2.15.02.1.05.04 - Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Jumlah sistem informasi yang disusun	1 Aplikasi	
45.				146 Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan di Kabupaten Kepulauan Yapen									
					Jumlah dokumen yang disusun	2.000.000.000,00	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	2.15.03.1.08 - Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	2.15.03.1.08.01 - Pelaksanaan Penyusunan rencana induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah dokumen SID dan DED yang disusun Pelabuhan di Kabupaten Kepulauan Yapen	2 Dokumen	
46.				148 Studi Pemilihan Lokasi dan DED Dermaga Danau di Kabupaten Paniai									
					Jumlah dokumen yang disusun	2.000.000.000,00	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	2.15.03.1.08 - Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	2.15.03.1.08.01 - Pelaksanaan Penyusunan rencana induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah dokumen yang disusun Dermaga Danau di kab. Paniai	2 Dokumen	
47.				149 Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan di Kabupaten Nabire									
					Jumlah dokumen yang disusun	0,00	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	2.15.03.1.08 - Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	2.15.03.1.08.01 - Pelaksanaan Penyusunan rencana induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah dokumen yang disusun	1 Dokumen	
48.				150 Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan di Kabupaten Waropen									
					Jumlah dokumen yang disusun	2.000.000.000,00	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	2.15.03.1.08 - Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	2.15.03.1.08.01 - Pelaksanaan Penyusunan rencana induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah dokumen yang disusun	1 Dokumen	

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
49.	Perhubungan	15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Cakupan terintegrasinya antar moda angkutan antar wilayah adat	152 Penyusunan Master Plan dan RTT Sisi Udara, sisi Darat Bandar Udara Werima di Kabupaten Yahukimo	Jumlah dokumen yang disusun	0,00						0 Dokumen	
50.				153 Master Plan Pengembangan Transportasi Sungai Nawa Kabupaten Mamberamo Raya	Jumlah dokumen yang disusun	3.000.000.000,00						2 Dokumen	
51.				154 Penyusunan Master Plan dan RTT Sisi Udara, sisi Darat Bandar Udara Bogabaida di Kabupaten Paniai	Jumlah dokumen yang disusun	2.500.000.000,00						1 Dokumen	
52.				155 Penyusunan Master Plan dan RTT Sisi Udara, sisi Darat Bandar Udara Pasema di Kabupaten Yahukimo	Jumlah dokumen yang disusun	0,00						0 Dokumen	
53.				156 Penyusunan Amdal Pelabuhan Teba dan Trimoris di Kabupaten Mamberamo Raya	Jumlah dokumen amdal yang disusun	3.000.000.000,00						2 Dokumen	
54.				158 Penyusunan UKL/UPL	Jumlah Dokumen	2.100.000.000,00						3 Dokumen	
55.				159 Penyusunan Master Plan, SID dan DED	Jumlah Dokumen	0,00	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	2.15.03.1.08 - Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	2.15.03.1.08.01 - Pelaksanaan Penyusunan rencana induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Dokumen	3 Dokumen	
56.				160 Penyusunan RTT Sisi Udara dan Sisi Darat Pembangunan Bandar Udara	Jumlah Dokumen	7.000.000.000,00						4 Dokumen	
57.				161 Penyusunan DELH/DPLH Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Jumlah Dokumen	0,00						0 Dokumen	
58.				162 Studi Pemilihan Lokasi dan Kelayakan Pembangunan	Jumlah Dokumen	750.000.000,00					tersedianya dokumen	1 Dokumen	
59.				163 Review Tataran Transportasi Wilayah (Tatrawil) Provinsi Papua	Jumlah dokumen yang tersusun	1.200.000.000,00	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.1.05 - Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	2.15.02.1.05.04 - Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Jumlah dokumen yang tersusun	1 Dokumen	
60.				164 Penyusunan Peta Sebaran Fasilitas Perhubungan di Provinsi Papua	Jumlah dokumen yang dihasilkan	1.500.000.000,00	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.1.01 - Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	2.15.02.1.01.01 - Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Jumlah dokumen yang dihasilkan	3 Dokumen	
61.				165 Studi Master Plan, SID dan DED Pelabuhan Perintis Poiway Kabupaten Mamberamo Raya	Jumlah dokumen yang disusun	0,00						0 Dokumen	
62.				166 Penyusunan Master Plan dan RTT Sisi Udara, sisi Darat Bandar Udara Agadugume di Kabupaten Puncak	Jumlah dokumen yang disusun	2.500.000.000,00						1 Dokumen	

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
63.	Perhubungan	15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Cakupan terintegrasinya antar moda angkutan antar wilayah adat	167 Penyusunan Master Plan dan RTT Sisi Udara, sisi Darat Bandar Udara Batani di Kabupaten Pegunungan Bintang	Jumlah dokumen yang disusun	0,00						0 Dokumen	
64.				168 Penyusunan RTT Lapter Amuma di Kabupaten Yahukimo	Jumlah dokumen yang disusun	1.500.000.000,00	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	2.15.04.1.01 - Penyelenggaraan Kebandarudaraan	2.15.04.1.01.04 - Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Penyediaan Aksesibilitas dan Utilitas Penunjang Kegiatan Bandar Udara	Jumlah dokumen yang disusun	1 Dokumen	
65.				169 Penyusunan RTT Lapter Sella di Kabupaten Yahukimo	Jumlah dokumen yang disusun	1.500.000.000,00	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	2.15.04.1.01 - Penyelenggaraan Kebandarudaraan	2.15.04.1.01.04 - Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Penyediaan Aksesibilitas dan Utilitas Penunjang Kegiatan Bandar Udara	Jumlah dokumen yang disusun Bandar Udara Sella Kabupaten Yahukimo	1 Dokumen	
66.				171 Penyusunan UKL/UPL Pembangunan Pelabuhan Rakyat Sumber di Kabupaten Biak Numfor	Jumlah dokumen UKL/UPL yang disusun	750.000.000,00	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	2.15.03.1.08 - Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	2.15.03.1.08.01 - Pelaksanaan Penyusunan rencana induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah dokumen UKL/UPL yang disusun Pelabuhan Rakyat sumber di Kabupaten Biak Numfor	1 Dokumen	
67.				172 Penyusunan UKL/UPL Pembangunan Pelabuhan Rakyat Sanggei di Kabupaten Waropen	Jumlah dokumen UKL/UPL yang disusun	750.000.000,00	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	2.15.03.1.08 - Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	2.15.03.1.08.01 - Pelaksanaan Penyusunan rencana induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah dokumen UKL/UPL yang disusun Pelabuhan Rakyat Sanggei di Kabupaten Waropen	1 Dokumen	
68.				173 Penyusunan UKL/UPL Pembangunan Pelabuhan Rakyat Windesi di Kabupaten Kepulauan Yapen	Jumlah dokumen UKL/UPL yang disusun	750.000.000,00	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	2.15.03.1.08 - Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	2.15.03.1.08.01 - Pelaksanaan Penyusunan rencana induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah dokumen UKL/UPL yang disusun Pelabuhan Rakyat Windesi di Kabupaten Kepulauan Yapen	1 Dokumen	
69.				174 Penyusunan Master Plan dan RTT Sisi Udara dan Sisi Darat Pembangunan Bandar Udara Fawi di Kabupaten Puncak Jaya	Jumlah dokumen RTT sisi udara dan sisi darat yang disusun	0,00						0 Dokumen	
70.				175 Penyusunan Master Plan dan RTT Sisi Udara dan Sisi Darat Pembangunan Bandar Udara Tayeve di Kabupaten Mamberamo Raya	Jumlah dokumen RTT sisi udara dan sisi darat yang disusun	0,00						0 Dokumen	
71.				176 Penyusunan Amdal Pelabuhan Pepera di Kabupaten Asmat	Jumlah dokumen amdal yang disusun	800.000.000,00	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	2.15.03.1.08 - Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	2.15.03.1.08.01 - Pelaksanaan Penyusunan rencana induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah dokumen amdal yang disusun Pelabuhan Pepera di Kabupaten Asmat	1 Dokumen	
72.				177 Penyusunan Amdal Pelabuhan Prabu Alaska di Kabupaten Boven Digoel									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Jumlah dokumen amdal yang disusun	800.000.000,00	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	2.15.03.1.08 - Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	2.15.03.1.08.01 - Pelaksanaan Penyusunan rencana induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah dokumen amdal yang disusun	1 Dokumen	
73.				178 Penyusunan UKL/UPL Pembangunan Bandara Fawi di Kabupaten Puncak Jaya									
					Jumlah dokumen UKL/UPL yang disusun	750.000.000,00						1 Dokumen	
74.				179 Penyusunan UKL/UPL Pembangunan Bandara Botawa di Kabupaten Waropen									
					Jumlah dokumen UKL/UPL yang disusun	750.000.000,00	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	2.15.04.1.01 - Penyelenggaraan Kebandarudaraan	2.15.04.1.01.03 - Penetapan Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan di Sekitar Bandar Udara	Jumlah dokumen UKL/UPL yang disusun Bandar Udara Botawa Di Kabupaten Waropen	1 Dokumen	
75.				180 Penyusunan RTT Sisi Udara dan Sisi Darat Pembangunan Lapangan Terbang Kampung Bella di Kabupaten Mimika									
					Jumlah dokumen RTT sisi udara dan sisi darat yang disusun	2.500.000.000,00	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	2.15.04.1.01 - Penyelenggaraan Kebandarudaraan	2.15.04.1.01.03 - Penetapan Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan di Sekitar Bandar Udara	Jumlah dokumen Master Plan dan RTT sisi udara dan sisi darat yang disusun Bandar Udara Bella di Kabupaten Mimika	2 Dokumen	
76.				181 Penyusunan RTT Sisi Udara dan Sisi Darat Pembangunan Lapangan Terbang Kampung Hoya di Kabupaten Mimika									
					Jumlah dokumen RTT sisi udara dan sisi darat yang disusun	2.500.000.000,00	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	2.15.04.1.01 - Penyelenggaraan Kebandarudaraan	2.15.04.1.01.03 - Penetapan Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan di Sekitar Bandar Udara	Jumlah dokumen Master Plan dan RTT sisi udara dan sisi darat yang disusun	2 Dokumen	
77.				182 Penyusunan Master Plan dan RTT Sisi Udara dan Sisi Darat Pembangunan Bandar Udara Dagai di Kabupaten Puncak Jaya									
					Jumlah dokumen RTT sisi udara dan sisi darat yang disusun	2.500.000.000,00	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	2.15.04.1.01 - Penyelenggaraan Kebandarudaraan	2.15.04.1.01.03 - Penetapan Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan di Sekitar Bandar Udara	Jumlah dokumen Master Plan dan RTT sisi udara dan sisi darat yang disusun Bandar udara Dagai di Kabupaten Puncak Jaya	2 Dokumen	
78.				183 Penyusunan Master Plan dan RTT Sisi Udara dan Sisi Darat Pembangunan Bandar Udara Torere di Kabupaten Puncak Jaya									
					Jumlah dokumen RTT sisi udara dan sisi darat yang disusun	2.500.000.000,00	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	2.15.04.1.01 - Penyelenggaraan Kebandarudaraan	2.15.04.1.01.03 - Penetapan Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan di Sekitar Bandar Udara	Jumlah dokumen Master Plan dan RTT sisi udara dan sisi darat yang disusun Bandar Udara Torere di Kabupaten Puncak Jaya	2 Dokumen	
79.				184 Penyusunan UKL/UPL Pembangunan Bandara Saminage di Kabupaten Yahukimo									
					Jumlah dokumen UKL/UPL yang disusun	2.500.000.000,00	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	2.15.04.1.01 - Penyelenggaraan Kebandarudaraan	2.15.04.1.01.03 - Penetapan Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan di Sekitar Bandar Udara	Jumlah dokumen Review Master Plan dan RTT yang disusun Bandar Udara Saminage di Kabupaten Yahukimo	2 Dokumen	
80.				185 Studi Pemilihan Lokasi dan Kelayakan Pelabuhan Perintis									
					Jumlah Dokumen	700.000.000,00						1 Dokumen	
81.				187 Penyusunan Masterplan Angkutan Penunjang PON									
					Jumlah Dokumen	0,00						0 Dokumen	
82.		16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Cakupan pelayanan moda angkutan; Tingkat kecelakaan kendaraan bermotor	5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan LLAJ									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Banyaknya alat pengujian kendaraan bermotor statis dan mobile	0,00	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.1.02 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	2.15.02.1.02.03 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Banyaknya alat pengujian kendaraan bermotor statis dan mobile	80 Bh	
					Banyaknya traflight light dan warning light	1.500.000.000,00	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.1.02 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	2.15.02.1.02.03 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Banyaknya traflight light dan warning light	80 Unit Tahun	
83.				8 Rehabilitasi/Pemeliharaan Lampu APILL									
					Jumlah lampu APILL yang direhabilitasi/dipelihara	2.300.000.000,00	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.1.02 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	2.15.02.1.02.03 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah lampu APILL yang direhabilitasi/dipelihara	2 Unit	
84.		17 Program peningkatan pelayanan angkutan	Tersedianya angkutan untuk pelayanan transportasi	22 Pengujian Kelayakan Landasan Bandara Perintis									
					Jumlah lapter yang dilakukan uji	0,00	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	2.15.04.1.01 - Penyelenggaraan Kebandarudaraan	2.15.04.1.01.04 - Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Penyediaan Aksesibilitas dan Utilitas Penunjang Kegiatan Bandar Udara	Jumlah lapter yang dilakukan uji di Papua	20 Unit	
85.				23 Pengadaan Angkutan Umum									
					Jumlah armada angkutan umum	0,00	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.1.08 - Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	2.15.02.1.08.01 - Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah armada angkutan umum tersedia	2 Unit	
86.				24 Pengadaan angkutan sungai, danau dan penyeberangan									
					Jumlah angkutan yang diadakan	0,00	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.1.08 - Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	2.15.02.1.08.01 - Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah angkutan yang diadakan di Papua	2 Unit	
87.		18 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Jumlah bandara pengumpul dengan skala pelayanan primer; Jumlah dermaga penyeberangan Kelas II; Jumlah pelabuhan strategis provinsi; Jumlah terminal Tipe B yang fungsional; Pertumbuhan arus penumpang angkutan laut; Pertumbuhan arus penumpang angkutan udara; Tersedianya sarana dan prasarana perhubungan	5 Pembangunan Pelabuhan Laut Waren di Kabupaten Waropen									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Jumlah Tiang Pancang	0,00	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	2.15.03.1.09 - Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	2.15.03.1.09.02 - Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Tiang Pancang	160 Unit	
					Jumlah Titik Pemancangan	21.500.000.000,00	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	2.15.03.1.09 - Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	2.15.03.1.09.02 - Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Titik Pemancangan	72 Titik	
					Panjang Trestle	0,00	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	2.15.03.1.09 - Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	2.15.03.1.09.02 - Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	Panjang Trestle	0 M1	
					Panjang Dermaga	5.500.000.000,00	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	2.15.03.1.09 - Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	2.15.03.1.09.02 - Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	Panjang Dermaga pelabuhan Waren di Waropen	160 M1	
					Panjang Dermaga Plengsengan	0,00	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	2.15.03.1.09 - Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	2.15.03.1.09.02 - Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	Panjang Dermaga Plengsengan	0 M1	
					Panjang Causeway	0,00	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	2.15.03.1.09 - Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	2.15.03.1.09.02 - Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	Panjang Causeway	0 M1	
					Jumlah Breasting Dolphin	0,00	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	2.15.03.1.09 - Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	2.15.03.1.09.02 - Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Breasting Dolphin	0 Unit	
					Jumlah Mooring Dolphin	0,00	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	2.15.03.1.09 - Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	2.15.03.1.09.02 - Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Mooring Dolphin	0 Unit	
					Panjang Catwalk	0,00	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	2.15.03.1.09 - Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	2.15.03.1.09.02 - Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	Panjang Catwalk	0 M1	
88.				6 Pembangunan Pelabuhan Laut Miosbipondi di Kabupaten Supiori									
89.				9 Pembangunan Pelabuhan Perintis Bariwaro di Kabupaten Mamberamo Raya									
					Jumlah tiang pancang	0,00	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	2.15.03.1.09 - Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	2.15.03.1.09.02 - Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah tiang pancang dan panjang pelabuhan Bariwaro di Kabupaten Mamberamo raya	1 Unit	
90.				12 Pembangunan Pelabuhan Perintis Pulau Mambor di Kabupaten Nabire									
					Luas Lantai Dermaga yang terbangun	10.500.000.000,00	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	2.15.03.1.09 - Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	2.15.03.1.09.02 - Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	Luas Lantai Dermaga yang terbangun	360 M2	
					Panjang Trestle	0,00	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	2.15.03.1.09 - Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	2.15.03.1.09.02 - Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	Panjang Trestle	0 M1	
					Jumlah tiang pancang yang terpasang	0,00	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	2.15.03.1.09 - Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	2.15.03.1.09.02 - Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah tiang pancang yang terpasang	18 Titik	
91.				13 Pembangunan Pelabuhan Perintis Bomakia di Kabupaten Boven Digoel									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Jumlah tiang pancang yang terpasang	0,00	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	2.15.03.1.09 - Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	2.15.03.1.09.02 - Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah tiang pancang yang terpasang pelabuhan perintis Bomakia di Boven Digoel	38 Titik	
92.				16 Pembangunan Pelabuhan Perintis Ampimoi di Kabupaten Kepulauan Yapen									
					Jumlah tiang pancang	15.000.000.000,00	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	2.15.03.1.09 - Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	2.15.03.1.09.02 - Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah tiang pancang pelabuhan Ampimoi di Kepulauan Yapen	60 Unit	
					Jumlah Titik Pemancangan	0,00	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	2.15.03.1.09 - Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	2.15.03.1.09.02 - Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Titik Pemancangan pelabuhan Ampimoi di Kepulauan Yapen	60 Titik	
					Panjang Trestle	0,00	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	2.15.03.1.09 - Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	2.15.03.1.09.02 - Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	Panjang Trestle Pelabuhan Ampimoi di Kepulauan Yapen	200 M1	
93.				21 Pembangunan Bandar Udara Wanggar di Kabupaten Nabire									
					Panjang Runway	0,00						0 M1	
94.				22 Pembangunan Bandar Udara Botawa di Kabupaten Waropen									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Panjang Runway	5.500.000.000,00	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	2.15.04.1.01 - Penyelenggaraan Kebandarudaraan	2.15.04.1.01.05 - Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan Kebandarudaraan yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Panjang Runway Bandar udara Botawa di Waropen	200 M1	
					Luas Apron	0,00	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	2.15.04.1.01 - Penyelenggaraan Kebandarudaraan	2.15.04.1.01.05 - Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan Kebandarudaraan yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Luas Apron Bandar udara Botawa di waropen	0 M2	
					Luas Gedung Terminal	0,00	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	2.15.04.1.01 - Penyelenggaraan Kebandarudaraan	2.15.04.1.01.05 - Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan Kebandarudaraan yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Luas Gedung Terminal Bandar Udara Botawa di Waropen	350 M2	
					Panjang Taxi Way	0,00	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	2.15.04.1.01 - Penyelenggaraan Kebandarudaraan	2.15.04.1.01.05 - Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan Kebandarudaraan yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Panjang Taxi Way Bandar Udara botawa di waropen	200 M1	
					Panjang Drainase	0,00	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	2.15.04.1.01 - Penyelenggaraan Kebandarudaraan	2.15.04.1.01.05 - Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan Kebandarudaraan yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Panjang Drainase Bandar udara Botawa di Waropen	600 M1	
					Panjang Pagar Pengaman Bandara	0,00	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	2.15.04.1.01 - Penyelenggaraan Kebandarudaraan	2.15.04.1.01.05 - Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan Kebandarudaraan yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Panjang Pagar Pengaman Bandar udara Botawa di Waropen	1200 M1	
					Panjang Talud	0,00	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	2.15.04.1.01 - Penyelenggaraan Kebandarudaraan	2.15.04.1.01.05 - Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan Kebandarudaraan yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Panjang Talud Bandar udara Botawa di Waropen	600 M1	
					Volume Bronjong	0,00	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	2.15.04.1.01 - Penyelenggaraan Kebandarudaraan	2.15.04.1.01.05 - Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan Kebandarudaraan yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Volume Bronjong Bandar udara Botawa di Waropen	1000 M3	
					Volume Timbunan Tanah	0,00	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	2.15.04.1.01 - Penyelenggaraan Kebandarudaraan	2.15.04.1.01.05 - Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan Kebandarudaraan yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Volume Timbunan Tanah Bandar udara Botawa di Waropen	2000 M3	
					Volume Galian Tanah	0,00	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	2.15.04.1.01 - Penyelenggaraan Kebandarudaraan	2.15.04.1.01.05 - Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan Kebandarudaraan yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Volume Galian Tanah Bandar udara Botawa di Waropen	200 M3	
					Volume pemotongan bukit/gunung	0,00	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	2.15.04.1.01 - Penyelenggaraan Kebandarudaraan	2.15.04.1.01.05 - Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan Kebandarudaraan yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Volume pemotongan bukit/gunung Bandar udara Botawa di Waropen	200 M3	
					Luas Land Clearing	0,00	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	2.15.04.1.01 - Penyelenggaraan Kebandarudaraan	2.15.04.1.01.05 - Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan Kebandarudaraan yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Luas Land CleaBandar udara Botawa di Waropenring	1200 M2	
95.				26 Pengembangan Bandar Udara Kepi di Kabupaten Mappi									
					Panjang Runway	0,00						0 M1	
96.				28 Pembangunan Bandar Udara Kamanap di Kabupaten Kepulauan Yapen									
					Panjang Runway	0,00						0 M1	
97.				31 Pembangunan Bandar Udara Mamit di Kabupaten Tolikara									
					Panjang Runway	10.000.000.000,00	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	2.15.04.1.01 - Penyelenggaraan Kebandarudaraan	2.15.04.1.01.05 - Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan Kebandarudaraan yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Panjang Runway, pagar, epron dan drainase bandara udara Mamit di Tolikara	600 M1	
98.				32 Pembangunan Bandar Udara Fawi di Kabupaten Puncak Jaya									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Jumlah bandar udara yang dibangun	10.250.000.000,00	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	2.15.04.1.01 - Penyelenggaraan Kebandarudaraan	2.15.04.1.01.05 - Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan Kebandarudaraan yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Jumlah bandar udara yang dibangun	1 Unit	
					Panjang Runway	0,00	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	2.15.04.1.01 - Penyelenggaraan Kebandarudaraan	2.15.04.1.01.05 - Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan Kebandarudaraan yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Panjang Runway Bandar Udara Fawi di Puncak Jaya	600 M1	
99.				35 Pembangunan Bandar Udara Benawa di Kabupaten Yalimo									
					Panjang Runway	0,00	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	2.15.04.1.01 - Penyelenggaraan Kebandarudaraan	2.15.04.1.01.05 - Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan Kebandarudaraan yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Panjang Runway	600 M1	
100.				40 Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B di Kota Jayapura									
					Luas Pelataran Kedatangan/Keberangkatan Terminal	0,00						0 M2	
					Luas Ruang Tunggu	0,00						0 M2	
					Panjang Jalan Area Terminal	0,00						0 M1	
					Luas Pos Retribusi/Pos Jaga	0,00						0 M2	
					Luas Toilet Umum	0,00						0 M2	
					Luas Bangunan Utama Terminal	0,00						0 M2	
					Luas Bengkel	0,00						0 M2	
					Luas Gedung Cek Fisik	0,00						0 M2	
					Luas Shelter Kedatangan/Keberangkatan	0,00						0 M2	
					Luas Area Parkir Kendaraan Pegawai dan Pengunjung	0,00						0 M2	
					Luas Taman (Landscape)	0,00						0 M2	
					Volume Timbunan Tanah	0,00						0 M3	
					Panjang Pagar	0,00						0 M1	
101.				41 Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B di Kabupaten Nabire									
					Luas Bangunan Utama Terminal	20.000.000.000,00	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.1.03 - Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	2.15.02.1.03.02 - Pembangunan Gedung Terminal	Luas Bangunan Utama Terminal Tipe B di Nabire	360 M2	
102.				42 Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B di Kabupaten Keerom									
					Panjang Pondasi	5.500.000.000,00	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.1.03 - Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	2.15.02.1.03.02 - Pembangunan Gedung Terminal	Panjang Pondasi Terminal penumpang Tipe B di Keerom	400 M1	
103.				59 Pembangunan Dermaga Sungai Sipu-Sipu Distrik Jita di Kabupaten Mimika									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Luas Gedung Terminal	0,00	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	2.15.03.1.10 - Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	2.15.03.1.10.02 - Pembangunan Pelabuhan Sungai dan danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Luas Gedung Terminal Dermaga Sungai Sipu Sipu Distrik Jita di Mimika	100 M2	
					Luas Lapangan Penumpukan	15.000.000.000,00	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	2.15.03.1.10 - Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	2.15.03.1.10.02 - Pembangunan Pelabuhan Sungai dan danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Luas Lapangan Dermaga Sungai Sipu Sipu Distrik Jita di Mimika	50 M2	
104.				65 Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B di Kabupaten Jayapura									
					Panjang Pondasi	10.000.000.000,00	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.1.03 - Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	2.15.02.1.03.02 - Pembangunan Gedung Terminal	Panjang Pondasi Penumpang Tipe B di Kabupaten Jayapura	200 M1	
105.				80 Peningkatan Bandar Udara Wamena di Kabupaten Jayawijaya									
					Panjang Runway	0,00	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	2.15.04.1.01 - Penyelenggaraan Kebandarudaraan	2.15.04.1.01.02 - Penetapan Kebijakan Besaran Tarif, Personil, Sarana, dan Prasarana Penyelenggaraan Kebandarudaraan	Panjang Runway Bandar Udara Wamena di Jayawijaya	0 M1	
					Panjang paralel taxi	0,00	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	2.15.04.1.01 - Penyelenggaraan Kebandarudaraan	2.15.04.1.01.02 - Penetapan Kebijakan Besaran Tarif, Personil, Sarana, dan Prasarana Penyelenggaraan Kebandarudaraan	Panjang paralel taxi Bandara Udara wamena di Jayawijaya	0 Meter	
106.				81 Pembangunan Bandar Udara Panggema di Kabupaten Yahukimo									
					Panjang Runway	0,00	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	2.15.04.1.01 - Penyelenggaraan Kebandarudaraan	2.15.04.1.01.05 - Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan Kebandarudaraan yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Panjang Runway Bandar Udara Panggema di Yahukimo	600 M1	
					Volume Timbunan Tanah	0,00	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	2.15.04.1.01 - Penyelenggaraan Kebandarudaraan	2.15.04.1.01.05 - Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan Kebandarudaraan yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Volume Timbunan Tanah Bandar Udara Panggema di Yahukimo	500 M3	
107.				82 Pembangunan Bandar Udara Ninia di Kabupaten Yahukimo									
					Panjang Runway	0,00	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	2.15.04.1.01 - Penyelenggaraan Kebandarudaraan	2.15.04.1.01.05 - Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan Kebandarudaraan yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Panjang Runway Bandar Udara Ninia di Yahukimo	600 M1	
					Volume Timbunan Tanah	0,00	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	2.15.04.1.01 - Penyelenggaraan Kebandarudaraan	2.15.04.1.01.05 - Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan Kebandarudaraan yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Volume Timbunan Tanah Bandar Udara Ninia di Yahukimo	5000 M3	
108.				87 Peningkatan Bandar Udara Kustra di Kabupaten Mamberamo Raya									
					Panjang Runway	0,00	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	2.15.04.1.01 - Penyelenggaraan Kebandarudaraan	2.15.04.1.01.05 - Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan Kebandarudaraan yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Panjang Runway Bandar Udara Kustra di Mamberamo raya	600 M1	
					Volume Timbunan Tanah	0,00	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	2.15.04.1.01 - Penyelenggaraan Kebandarudaraan	2.15.04.1.01.05 - Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan Kebandarudaraan yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Volume Timbunan Tanah Bandar Udara Kustra di Mamberamo raya	200 M3	
109.				96 Pembangunan Bandar Udara Saminga di Kabupaten Yahukimo									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Panjang Runway	10.000.000.000,00	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	2.15.04.1.01 - Penyelenggaraan Kebandarudaraan	2.15.04.1.01.05 - Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan Kebandarudaraan yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Panjang Runway Bandar Udara Samingage di Yahukimo	600 M1	
					Volume Timbunan Tanah	0,00	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	2.15.04.1.01 - Penyelenggaraan Kebandarudaraan	2.15.04.1.01.05 - Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan Kebandarudaraan yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Volume Timbunan Tanah Bandar Udara Samingage di Yahukimo	300 M3	
110.				101 Peningkatan Bandar Udara Ewer di Kabupaten Asmat									
					Panjang Runway	0,00						0 M1	
111.				122 Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B di Kabupaten Jayawijaya									
					Panjang Pondasi	0,00	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.1.03 - Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	2.15.02.1.03.02 - Pembangunan Gedung Terminal	Panjang Pondasi Terminal Penumpang Tipe B di Jayawijaya	400 M1	
					Panjang Pagar	0,00	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.1.03 - Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	2.15.02.1.03.02 - Pembangunan Gedung Terminal	Panjang Pagar Terminal Penumpang Tipe B di Jayawijaya	400 M1	
					Luas Gedung Terminal	10.000.000.000,00	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.1.03 - Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	2.15.02.1.03.02 - Pembangunan Gedung Terminal	Luas Gedung Terminal Tipe B di Jayawijaya	875 M2	
112.				124 Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B di Kabupaten Merauke									
					Panjang Pagar	10.000.000.000,00	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.1.03 - Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	2.15.02.1.03.02 - Pembangunan Gedung Terminal	Panjang Pagar Terminal Tipe B di Merauke	500 M1	
113.				127 Pembangunan Dermaga Danau 4 (empat) Lokasi di Danau Sentani Kabupaten Jayapura									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Jumlah dermaga danau yang dibangun	7.000.000.000,00	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	2.15.03.1.10 - Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	2.15.03.1.10.02 - Pembangunan Pelabuhan Sungai dan danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah dermaga danau yang dibangun	2 Unit	
					Jumlah Tiang Pancang	0,00	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	2.15.03.1.10 - Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	2.15.03.1.10.02 - Pembangunan Pelabuhan Sungai dan danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Tiang Pancang dermaga danau Sentani di kab/kota Jayapura	60 Unit	
					Jumlah Titik Pemancangan	0,00	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	2.15.03.1.10 - Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	2.15.03.1.10.02 - Pembangunan Pelabuhan Sungai dan danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Titik Pemancangan dermaga Danau di Kab/kota jayapura	60 Titik	
					Panjang Trestle	0,00	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	2.15.03.1.10 - Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	2.15.03.1.10.02 - Pembangunan Pelabuhan Sungai dan danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Panjang Trestle Dermaga danau di Kab/kota Jayapura	600 M1	
					Panjang Dermaga	0,00	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	2.15.03.1.10 - Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	2.15.03.1.10.02 - Pembangunan Pelabuhan Sungai dan danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Panjang Dermaga danau sentani di Kab/kota jayapura	532 M1	
114.				132 Peningkatan Pelabuhan Laut Kimaam di Kabupaten Merauke									
115.				135 Pembangunan Kapal Cargo untuk Distribusi Beras/Barang Dalam Rangka Ketahanan Pangan di Provinsi Papua									
					Jumlah kapal cargo yang dibangun	0,00						0 Unit	
116.				142 Pembangunan Dermaga Sungai Bagusa di Kabupaten Mamberamo Raya									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Jumlah Tiang Pancang	0,00	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	2.15.03.1.10 - Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	2.15.03.1.10.02 - Pembangunan Pelabuhan Sungai dan danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Tiang Pancang Dermaga Sungai Bagusa di Mamberamo Raya	60 Unit	
					Jumlah Titik Pemancangan	0,00	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	2.15.03.1.10 - Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	2.15.03.1.10.02 - Pembangunan Pelabuhan Sungai dan danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Titik Pemancangan Dermaga Sungai Bagusa di Mamberamo Raya	80 Titik	
					Panjang Trestle	0,00	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	2.15.03.1.10 - Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	2.15.03.1.10.02 - Pembangunan Pelabuhan Sungai dan danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Panjang Trestle Dermaga Sungai Bagusa di Mamberamo Raya	60 M1	
					Panjang Dermaga	0,00	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	2.15.03.1.10 - Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	2.15.03.1.10.02 - Pembangunan Pelabuhan Sungai dan danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Panjang Dermaga Dermaga Sungai Bagusa di Mamberamo Raya	60 M1	
117.				152 Pembangunan Bandar Udara Kobakma di Kabupaten Mamberamo Tengah									
					Panjang Runway	10.000.000.000,00	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	2.15.04.1.01 - Penyelenggaraan Kebandarudaraan	2.15.04.1.01.05 - Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan Kebandarudaraan yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Panjang Runway Bandar Udara Kobakma di Mamberamo Tengah	600 M1	
118.				154 Pengembangan Pelabuhan Laut Kepi di Kabupaten Mappi									
					Panjang Dermaga	0,00	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	2.15.03.1.09 - Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpulan Regional	2.15.03.1.09.02 - Pembangunan Pelabuhan Pengumpulan Regional	Panjang Dermaga pelabuhan Kepi di Mappi	700 M1	
					Jumlah tiang pancang	0,00	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	2.15.03.1.09 - Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpulan Regional	2.15.03.1.09.02 - Pembangunan Pelabuhan Pengumpulan Regional	Jumlah tiang pancang pelabuhan Kepi di Mappi	100 Titik	
					Luas lantai dermaga yang dibangun	0,00	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	2.15.03.1.09 - Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpulan Regional	2.15.03.1.09.02 - Pembangunan Pelabuhan Pengumpulan Regional	Luas lantai dermaga yang dibangun Pelabuhan Kepi di Mappi	500 M2	
					Jumlah titik pondasi dermaga	0,00	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	2.15.03.1.09 - Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpulan Regional	2.15.03.1.09.02 - Pembangunan Pelabuhan Pengumpulan Regional	Jumlah titik pondasi dermaga Pelabuhan Kepi di Mappi	400 Titik	
119.				159 Pembangunan Bandar Udara Basal di Kabupaten Yahukimo									
120.				160 Pengadaan Alat Pemeliharaan dan Keselamatan Lapter-Lapter di Provinsi Papua									
					Jumlah alat pemeliharaan dan keselamatan lapter yang diadakan	700.000.000,00	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	2.15.04.1.01 - Penyelenggaraan Kebandarudaraan	2.15.04.1.01.01 - Penyelenggaraan Pelayanan Jasa Kebandarudaraan	Jumlah alat pemeliharaan dan keselamatan lapter yang diadakan di Papua	2 Unit	
121.				162 Pembangunan Pelabuhan Laut Pulau Wakde di Kabupaten Sarmi									
122.				163 Pembangunan Bandar Udara Sugapa di Kabupaten Intan Jaya									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
123.	Perhubungan	18 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Jumlah bandara pengumpul dengan skala pelayanan primer; Jumlah dermaga penyeberangan Kelas II; Jumlah pelabuhan strategis provinsi; Jumlah terminal Tipe B yang fungsional; Pertumbuhan arus penumpang angkutan laut; Pertumbuhan arus penumpang angkutan udara; Tersedianya sarana dan prasarana perhubungan	164 Pengembangan Fasilitas Bandar Udara Moses Kilangin di Kabupaten Mimika									
					Panjang taxiway yang	0,00						0 M1	
124.				165 Pengembangan Pelabuhan Laut Tanah Merah di Kabupaten Boven Digoel									
					Luas bangunan penunjang yang dikembangkan	0,00	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	2.15.03.1.09 - Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	2.15.03.1.09.02 - Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	Luas bangunan penunjang yang dikembangkan pada pelabuhan laut tanah merah di Boven Digoel	200 M2	
125.				166 Pembangunan bandar Udara Kuyawage di Kabupaten Lanny Jaya									
					Panjang Runway	10.000.000.000,00	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	2.15.04.1.01 - Penyelenggaraan Kebandarudaraan	2.15.04.1.01.05 - Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan Kebandarudaraan yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Panjang Runway Bandar Udara kuyawage di Lanny Jaya	600 M1	
126.				175 Peningkatan Bandar Udara Abenaho di Kabupaten Yalimo									
127.				176 Pembangunan Bandar Udara Taria di Kabupaten Mamberamo Tengah									
					Panjang Runway	0,00						0 M1	
128.				178 Pembangunan Dermaga Sungai Taria Kabupaten Mamberamo Tengah									
					Jumlah Tiang Pancang	0,00						0 Unit	
					Jumlah Titik Pemancangan	0,00						0 Titik	
					Panjang Trestle	0,00						0 M1	
					Panjang Dermaga	0,00						0 M1	
129.				179 Pembangunan Pelabuhan Laut Depapre									
					Panjang sheet pile	25.000.000.000,00	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	2.15.03.1.09 - Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	2.15.03.1.09.02 - Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	Panjang sheet pile Pelabuhan laut Depapre di Kabupaten Jayapura	200 M1	
130.				180 Peningkatan Bandar Udara Nob Goliat Dekai di Kabupaten Yahukimo									
					Panjang Runway	0,00	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	2.15.04.1.01 - Penyelenggaraan Kebandarudaraan	2.15.04.1.01.05 - Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan Kebandarudaraan yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Panjang Runway Bandar Udara Nob Goliat di Yahukimo	600 M1	
131.				181 Pembangunan Terminal Penumpang Type B di Kabupaten Sarmi									
132.				182 Pengerukan Kolam Pelabuhan Dermaga ASDP Samabusa di Kabupaten Nabire									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Jumlah volume pengerukan	5.500.000.000,00	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	2.15.03.1.10 - Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	2.15.03.1.10.02 - Pembangunan Pelabuhan Sungai dan danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah volume pengerukan Dermaga ASDP Samabusa di Kabupaten Nabire	1000 M3	
					Jumlah dokumen review design	0,00	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.1.13 - Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	2.15.02.1.13.01 - Fasilitas Penunjang Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah dokumen review design	1 Dokumen	
133.				183 Rehabilitasi Fasilitas Dermaga ASDP Samabusa di Kabupaten Nabire									
134.				184 Pembangunan Bandar Udara Kasonaweja Baru (Weri Bilasi) di Kabupaten Mamberamo Raya									
					Panjang Runway	25.000.000.000,00	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	2.15.04.1.01 - Penyelenggaraan Kebandarudaraan	2.15.04.1.01.05 - Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan Kebandarudaraan yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Panjang Runway Bandar Udara Kasonaweja di Mamberamo Raya	600 M1	
					Luas Apron	0,00	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	2.15.04.1.01 - Penyelenggaraan Kebandarudaraan	2.15.04.1.01.05 - Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan Kebandarudaraan yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Luas apron Bandar Udara Kasonaweja di Mamberamo Raya	200 M2	
					Luas land clearing	0,00	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	2.15.04.1.01 - Penyelenggaraan Kebandarudaraan	2.15.04.1.01.05 - Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan Kebandarudaraan yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Luas land clearing Bandar Udara Kasonaweja di Mamberamo Raya	1200 M2	
					Volume Timbunan Tanah	0,00	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	2.15.04.1.01 - Penyelenggaraan Kebandarudaraan	2.15.04.1.01.05 - Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan Kebandarudaraan yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Volume Timbunan Tanah Bandar Udara Kasonaweja di Mamberamo Raya	400 M3	
135.				185 Pembangunan pelabuhan Pepera di Kabupaten Asmat									
					Jumlah tiang pancang	0,00						0 Unit	
136.				186 Pembangunan pelabuhan Prabu Alaska di Kabupaten Boven Digoel									
					Jumlah tiang pancang	0,00						0 Unit	
137.				188 Pembangunan fasilitas pelabuhan Korido di Kabupaten Supiori									
138.				191 Pembangunan Bandar Udara Mbua di Kabupaten Nduga									
139.				192 Pembangunan Pelabuhan Rakyat Samber di Kabupaten Biak Numfor									
					Jumlah tiang pancang	0,00	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	2.15.03.1.09 - Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	2.15.03.1.09.02 - Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah tiang pancang Pelabuhan rakyat samber di Biak Numfor	100 Unit	
140.				193 Pembangunan Pelabuhan Rakyat Sanggei di Kabupaten Waropen									
					Jumlah tiang pancang	0,00						0 Unit	
141.				194 Pembangunan Pelabuhan Rakyat Windesi di Kabupaten Kepulauan Yapen									
142.				195 Pembangunan Pelabuhan Perintis Tagemon Kabupaten Mappi									
143.				196 Pembangunan Pelabuhan Perintis Kuatisore di Kabupaten Nabire									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
144.	Perhubungan	18 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Jumlah bandara pengumpul dengan skala pelayanan primer; Jumlah dermaga penyeberangan Kelas II; Jumlah pelabuhan strategis provinsi; Jumlah terminal Tipe B yang fungsional; Pertumbuhan arus penumpang angkutan laut; Pertumbuhan arus penumpang angkutan udara; Tersedianya sarana dan prasarana perhubungan	197 Peningkatan Bandar Udara Ilaga Kabupaten Puncak									
					Panjang Runway	0,00						0 M1	
					Volume Timbunan Tanah	0,00						0 M3	
145.				198 Pembangunan Bandar Udara Derapos di Kabupaten Puncak									
					Panjang Runway	0,00	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	2.15.04.1.01 - Penyelenggaraan Kebandarudaraan	2.15.04.1.01.05 - Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan Kebandarudaraan yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Panjang Runway Bandara Udara derapos di kabupaten Puncak	700 M1	
					Volume Timbunan Tanah	0,00	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	2.15.04.1.01 - Penyelenggaraan Kebandarudaraan	2.15.04.1.01.05 - Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan Kebandarudaraan yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Volume Timbunan Tanah Bandar Udara derapos di Kabupaten Puncak	1200 M3	
146.				199 Pembangunan Bandar Udara Apalapsili di Kabupaten Yalimo									
					Panjang Runway	0,00	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	2.15.04.1.01 - Penyelenggaraan Kebandarudaraan	2.15.04.1.01.05 - Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan Kebandarudaraan yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Panjang Runway Bandar Udara Apalapsili di Kabupaten Yalimo	700 M1	
147.				200 Pembangunan Bandar Udara Korupun di Yahukimo									
					Panjang Runway	0,00	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	2.15.04.1.01 - Penyelenggaraan Kebandarudaraan	2.15.04.1.01.05 - Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan Kebandarudaraan yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Panjang Runway Bandar Udara Korupun di Yahukimo	700 M1	
148.				201 Pembangunan Bandar Udara Okbibab di Kabupaten Pegunungan Bintang									
					Panjang Runway	0,00	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	2.15.04.1.01 - Penyelenggaraan Kebandarudaraan	2.15.04.1.01.05 - Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan Kebandarudaraan yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Panjang Runway Bandar Udara Okbibab di Kabupaten pegunungan Bintang	700 M1	
149.				202 Pembangunan Bandar Udara Bronggoli di Kabupaten Yahukimo									
					Panjang Runway	0,00						0 M1	
150.				203 Pembangunan Bandar Udara Sumo di Kabupaten Yahukimo									
					Panjang Runway	0,00						0 M1	
151.				204 Pembangunan Bandar Udara Poik di Kabupaten Yalimo									
					Panjang Runway	0,00	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	2.15.04.1.01 - Penyelenggaraan Kebandarudaraan	2.15.04.1.01.05 - Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan Kebandarudaraan yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Panjang Runway Bandar Udara Poik di Kabuapten yalimo	700 M1	
152.				205 Pembangunan Bandar Udara Okikah di Kabupaten Pegunungan Bintang									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Panjang Runway	25.000.000.000,00	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	2.15.04.1.01 - Penyelenggaraan Kebandarudaraan	2.15.04.1.01.05 - Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan Kebandarudaraan yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Panjang Runway Bandar Udara Okikah di Kabupaten Pegunungan Bintang	700 M1	
					Volume Timbunan Tanah	0,00	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	2.15.04.1.01 - Penyelenggaraan Kebandarudaraan	2.15.04.1.01.05 - Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan Kebandarudaraan yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Volume Timbunan Tanah Bandar Udara Okikah di Kabupaten pegunungan Bintang	1200 M3	
153.				206 Pembangunan Bandar Udara Kilit di Kabupaten Nduga									
					Panjang Runway	0,00	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	2.15.04.1.01 - Penyelenggaraan Kebandarudaraan	2.15.04.1.01.05 - Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan Kebandarudaraan yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Panjang Runway Bandar Udara Kilit di Kabupaten Nduga	700 M1	
154.				207 Pembangunan Bandar Udara Bioga di Kabupaten Puncak									
					Panjang Runway	0,00	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	2.15.04.1.01 - Penyelenggaraan Kebandarudaraan	2.15.04.1.01.05 - Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan Kebandarudaraan yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Panjang Runway Bandar udara Bioga Kabupaten Puncak	700 M1	
155.				208 pembangunan gudang-gudang logistik di lapangan terbang perintis									
					Luas bangunan	1.800.000.000,00	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	2.15.04.1.01 - Penyelenggaraan Kebandarudaraan	2.15.04.1.01.02 - Penetapan Kebijakan Besar Tarif, Personil, Sarana, dan Prasarana Penyelenggaraan Kebandarudaraan	Luas bangunan Gudang Logistik Bandar udara yang terbangun di Papua	40 M2	
156.				209 Pembangunan Dermaga Danau Bunauwo di Kabupaten Dogiyai									
					Luas dermaga yang dibangun	10.000.000.000,00	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	2.15.03.1.10 - Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	2.15.03.1.10.02 - Pembangunan Pelabuhan Sungai dan danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Luas dermaga Danau Bunauwo yang dibangun di Dogiyai	250 M2	
157.				210 Pengadaan Speed Boat dalam rangka pengawasan dan pengendalian transportasi laut									
					Jumlah speedboat yang diadakan	6.000.000.000,00	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	2.15.03.1.01 - Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi	2.15.03.1.01.01 - Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah speedboat yang diadakan	2 Unit	
158.				211 Peningkatan Fasilitas Lapangan Terbang Kenkeni di Kabupaten Yahukimo									
					Luas bangunan operasional yang terbangun	1.800.000.000,00	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	2.15.04.1.01 - Penyelenggaraan Kebandarudaraan	2.15.04.1.01.05 - Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan Kebandarudaraan yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Luas bangunan operasional yang terbangun pada Bandar Udara Kenkeni Kabupaten Yahukimo	120 M2	
159.		19 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Cakupan ketersediaan fasilitas Keselamatan Jalan	1 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas									
					Jumlah rambu lalu lintas yang diadakan/dipasang	3.000.000.000,00	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.1.05 - Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	2.15.02.1.05.02 - Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah rambu lalu lintas yang diadakan/dipasang di Kabupaten/Kota	1500 Unit	
160.				2 Pengadaan marka jalan									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Jumlah volume pengecatan marka	4.000.000.000,00	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.1.05 - Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	2.15.02.1.05.02 - Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah volume pengecatan marka pada ruas jalan Provinsi di Kabupaten/Kota	500 M'	
161.				5 Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Jalan									
					Jumlah pengadaan dan pemasangan fasilitas keselamatan jalan	500.000.000,00	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.1.05 - Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	2.15.02.1.05.02 - Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah pengadaan dan pemasangan fasilitas keselamatan jalan Warning Light dan Cermin Cembung di Kabupaten/Kota Prov. Papua	20 M'	
162.				7 Pengadaan dan Pemasangan Repiter Alat Komunikasi HT									
					Jumlah alat komunikasi yang diadakan	400.000.000,00	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.1.08 - Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	2.15.02.1.08.02 - Pengendali dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	Jumlah alat komunikasi yang diadakan	5 Unit	
163.				8 Pengadaan Kendaraan Operasional Hidrolik									
					Jumlah kendaraan operasional yang diadakan	0,00	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.1.05 - Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	2.15.02.1.05.02 - Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah kendaraan operasional yang diadakan	1 Unit	
164.				10 Pengadaan Kendaraan Roda 4 (empat) untuk Pengawasan LLAJ									
					Jumlah kendaraan roda 4 untuk pengawasan LLAJ	2.915.000.000,00	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.1.05 - Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	2.15.02.1.05.02 - Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah kendaraan roda 4 untuk pengawasan LLAJ di Papua	7 Unit	
165.				16 Pemasangan Guardrail									
					Panjang Guardrail yang dipasang	7.000.000.000,00	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.1.05 - Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	2.15.02.1.05.02 - Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Panjang Guardrail yang dipasang di Papua	1000 Meter	
166.				17 Survey Data Kendaraan dan Fasilitas Keselamatan Jalan di Provinsi Papua									
					Jumlah dokumen yang disusun	700.000.000,00	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.1.07 - Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	2.15.02.1.07.05 - Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah dokumen yang disusun	1 Dokumen	
167.				18 Pengadaan Kendaraan Roda 2 Patroli									
					Jumlah Kendaraan Roda 2 yang diadakan	1.310.000.000,00	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.1.05 - Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	2.15.02.1.05.04 - Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Kendaraan Roda 2 yang diadakan	15 Unit	
168.				19 Manajemen Rekayasa Lalu Lintas									
					Persentase kelancaran lalu lintas pada saat pelaksanaan PON XX	1.200.000.000,00	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.1.05 - Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	2.15.02.1.05.03 - Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Persentase kelancaran lalu lintas pada saat pelaksanaan PON XX	100 %	
169.		20 Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Jumlah balai/alat pengujian kendaraan bermotor yang beroperasi; Jumlah kendaraan bermotor yang dilakukan uji petik	4 Penyusunan PEP RAD-GRK dan Inventarisasi Emisi GRK sektor Transportasi									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Jumlah Dokumen PEP	234.400.000,00	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.1.07 - Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	2.15.02.1.07.02 - Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen PEP	1 Dokumen	
170.		22 Program Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur Perhubungan	Terlaksananya pengendalian pelaksanaan kegiatan infrastruktur perhubungan	1 Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur Perhubungan									
					Jumlah laporan pengendalian yang disusun	300.000.000,00						1 Laporan	
JUMLAH						443.994.275.000,00							

Mengetahui,
Kepala Bappeda Provinsi Papua

YOHANES WALILO, S.Sos, M.Si
NIP. 197007281997121001

JAYAPURA, 20 July 2020
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI PAPUA

REKY DOUGLAS AMBRAUW, S.Sos. M.Si
NIP. 19670701 199011 1 001

**REKAPITULASI PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021
SERTA KETERKAITAN DENGAN HASIL PEMETAAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019**

PROVINSI : Papua

PERANGKAT DAERAH : Dinas Komunikasi dan Informatika

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Komunikasi dan Informatika	1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	À Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	1 Penyediaan jasa surat menyurat									
					Jumlah surat yang disediakan	129.043.200,00		2.10.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.10.01.1.03 - Administrasi Umum	2.10.01.1.03.01 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang terkirim	1320 Surat	
2.				2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik									
					Jumlah Jasa Layanan berlangganan Listrik, Air, Telepon, Transponder	3.148.666.445,00		2.10.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.10.01.1.03 - Administrasi Umum	2.10.01.1.03.02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Layanan	12 Layanan	
3.				6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional									
					Jumlah Unit Mobil Dinas/Operasional yang terpelihara dan Terfasilitasi Perijinannya	16.500.000,00		2.10.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.10.01.1.03 - Administrasi Umum	2.10.01.1.03.06 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Unit Mobil Dinas/Operasional yang diservis dan dipelihara	21 Unit	
4.				8 Penyediaan jasa kebersihan kantor									
					Luas Gedung dan Halaman yang disediakan jasa kebersihan	0,00		2.10.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.10.01.1.03 - Administrasi Umum	2.10.01.1.03.08 - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	jumlah Gedung dan Halaman yang dibersihkan	0 M2	
					Jumlah tenaga kebersihan dan Fasilitas Pendukung kebersihan kantor	168.000.000,00		2.10.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.10.01.1.03 - Administrasi Umum	2.10.01.1.03.08 - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah tenaga kebersihan	4 Orang	
					Jumlah Jenis Bahan dan Alat Kebersihan	82.000.000,00		2.10.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.10.01.1.03 - Administrasi Umum	2.10.01.1.03.14 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Bahan dan Alat Kebersihan	50 Jenis	
5.				10 Penyediaan alat tulis kantor									
					Jumlah jenis ATK yang disediakan	103.200.355,00		2.10.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.10.01.1.03 - Administrasi Umum	2.10.01.1.03.10 - Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	100 Jenis	
6.				11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan									
					Jumlah barang cetakan	12.000.000,00		2.10.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.10.01.1.03 - Administrasi Umum	2.10.01.1.03.11 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan	5 Jenis	
					Jumlah penggandaan	10.000.000,00		2.10.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.10.01.1.03 - Administrasi Umum	2.10.01.1.03.11 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penggandaan	1000 Lembar	
					Jumlah Jenis Barang Cetak dan yang Disediakan	0,00		2.10.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.10.01.1.03 - Administrasi Umum	2.10.01.1.03.11 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0 Jenis	
					Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	0,00		2.10.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.10.01.1.03 - Administrasi Umum	2.10.01.1.03.11 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	0 Bulan	
7.				15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan									
					Jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	0,00		2.10.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.10.01.1.03 - Administrasi Umum	2.10.01.1.03.15 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	0 Jenis	
8.				17 Penyediaan makanan dan minuman									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Pelaksanaan penyediaan makan dan minum	0,00		2.10.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.10.01.1.03 - Administrasi Umum	2.10.01.1.03.17 - Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Porsi makan dan minum kegiatan yang tersedia	0 Kegiatan	
					Pelaksanaan makan minum tamu dan rapat	0,00		2.10.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.10.01.1.03 - Administrasi Umum	2.10.01.1.03.17 - Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Porsi makan dan minum yang tersedia	0 Kali Tahun	
					Pelaksanaan makan minum saat olah raga (hari Jumat)	0,00		2.10.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.10.01.1.03 - Administrasi Umum	2.10.01.1.03.17 - Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Porsi makan dan minum yang tersedia	0 Kali	
					Tersediannya Makanan dan Minuman	150.000.000,00		2.10.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.10.01.1.03 - Administrasi Umum	2.10.01.1.03.17 - Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Porsi makan dan minum yang tersedia	12 Bulan	
					Jumlah orang yang disediakan makan dan minuman	0,00		2.10.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.10.01.1.03 - Administrasi Umum	2.10.01.1.03.17 - Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Porsi makan dan minum yang tersedia	0 Orang	
9.				18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah									
					Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	750.000.000,00		2.10.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.10.01.1.03 - Administrasi Umum	2.10.01.1.03.18 - Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	15 Orang	
10.				19 Penyediaan Jasa Pengamanan									
					Pelaksanaan pembayaran insentif bagi tenaga operator dan penjaga X-Ray VIP Room Bandara Sentani	0,00		2.10.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.10.01.1.03 - Administrasi Umum	2.10.01.1.03.01 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa keamanan/security yang dibayarkan	0 Orang Bulan	
					Pelaksanaan pembayaran honor bagi satpam	0,00		2.10.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.10.01.1.03 - Administrasi Umum	2.10.01.1.03.01 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa keamanan/security yang dibayarkan	6 Orang Bulan	
					Pelaksanaan uang makan satpam	0,00		2.10.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.10.01.1.03 - Administrasi Umum	2.10.01.1.03.01 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa keamanan/security yang dibayarkan	0 Orang Bulan	
					Jumlah tenaga pengamanan	198.000.000,00		2.10.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.10.01.1.03 - Administrasi Umum	2.10.01.1.03.01 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa keamanan/security yang dibayarkan	6 Orang	
11.		2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	À Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	4 Pengadaan mobil jabatan									
					Jumlah mobil yang diadakan	0,00		2.10.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.10.01.1.03 - Administrasi Umum	2.10.01.1.03.20 - Pengadaan Mobil Jabatan	Jumlah mobil yang diadakan	0 Unit	
12.				5 Pengadaan kendaraan dinas/operasional									
					Jumlah kendaraan yang diadakan	0,00		2.10.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.10.01.1.03 - Administrasi Umum	2.10.01.1.03.21 - Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda 4	1 Unit	
					Jumlah kendaraan roda 2	600.000.000,00		2.10.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.10.01.1.03 - Administrasi Umum	2.10.01.1.03.21 - Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda 2	1 Unit	
13.				9 Pengadaan peralatan gedung kantor									
					Jumlah peralatan perlengkapan	250.000.000,00		2.10.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.10.01.1.03 - Administrasi Umum	2.10.01.1.03.25 - Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan/perlengkapan yang diadakan	10 Unit	
14.				10 Pengadaan mebeleur									
					Jumlah mebeleur yang diadakan	250.000.000,00		2.10.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.10.01.1.03 - Administrasi Umum	2.10.01.1.03.26 - Pengadaan Mebeleur	Jumlah mebeleur yang diadakan untuk 3 UPT	5 Unit	
15.				22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor									
					Jumlah gedung kantor yang dipelihara	750.000.000,00		2.10.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.10.01.1.03 - Administrasi Umum	2.10.01.1.03.29 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor	1 Unit	
					belanja sewa	0,00		2.10.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.10.01.1.03 - Administrasi Umum	2.10.01.1.03.29 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung yang disewa	0 Tahun	
16.				24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	75.000.000,00		2.10.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.10.01.1.03 - Administrasi Umum	2.10.01.1.03.31 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah dan Jenis perlengkapan/peralatan gedung kantor yang dipelihara	15 Unit	
					Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	0,00		2.10.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.10.01.1.03 - Administrasi Umum	2.10.01.1.03.31 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang	0 Unit	
					sewa kendaraan	0,00		2.10.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.10.01.1.03 - Administrasi Umum	2.10.01.1.03.31 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan yang diperbaiki/Service	0 Bulan	
17.				28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor									
					Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	400.000.000,00		2.10.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.10.01.1.03 - Administrasi Umum	2.10.01.1.03.35 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	20 Unit	
18.				29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur									
					Jumlah mebeleur yang dipelihara	0,00		2.10.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.10.01.1.03 - Administrasi Umum	2.10.01.1.03.36 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Jumlah mebeleur yang dipelihara	0 Unit	
19.				30 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor									
					Luas bangunan yang direhab	1.500.000.000,00		2.10.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.10.01.1.03 - Administrasi Umum	2.10.01.1.03.39 - Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Jumlah bangunan yang direhab	500 M2	
20.		3 Program peningkatan disiplin aparatur	À Meningkatnya disiplin aparatur	2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya									
					Jumlah pakaian dinas yang diadakan	500.000.000,00		2.10.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.10.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	2.10.01.1.04.02 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas sipil harian	100 Stel	
21.				5 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu									
					Jumlah pakaian khusus yang diadakan	0,00		2.10.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.10.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	2.10.01.1.04.05 - Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah pakaian Batik yang diadakan	0 Stel	
22.		5 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	À Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	1 Pendidikan dan pelatihan formal									
					Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	400.000.000,00		2.10.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.10.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	2.10.01.1.04.09 - Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparatur mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	3 Orang	
23.				2 Sosialisasi peraturan perundang-undangan									
					Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	0,00		2.10.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.10.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	2.10.01.1.04.10 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	0 Orang	
24.				4 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal									
					Jumlah aparatur yang terlatih	400.000.000,00		2.10.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.10.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	2.10.01.1.04.11 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	
25.		6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	À Meningkatnya kualitas akuntabilitas OPD	1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD									
					Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	50.000.000,00		2.10.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.10.01.1.02 - Administrasi Keuangan	2.10.01.1.02.06 - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan	8 Laporan	
					Laporan LAKIP SKPD	0,00		2.10.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.10.01.1.01 - Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.10.01.1.01.05 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan LAKIP SKPD	0 Dokumen	
26.				2 Penyusunan laporan keuangan semesteran									
					Jumlah pelaporan keuangan semesteran yang diselesaikan tepat waktu	0,00		2.10.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.10.01.1.02 - Administrasi Keuangan	2.10.01.1.02.07 - Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Jumlah dokumen laporan	0 Laporan	
27.				4 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	50.000.000,00		2.10.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.10.01.1.02 - Administrasi Keuangan	2.10.01.1.02.09 - Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	5 Laporan	
28.				5 Penyusunan Renja, RKA dan Perubahan APBD									
					Jumlah dokumen	50.000.000,00		2.10.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.10.01.1.01 - Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.10.01.1.01.01 - Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	8 Dokumen	
29.				12 Penyusunan RENSTRA									
					Jumlah Dokumen	0,00		2.10.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.10.01.1.01 - Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.10.01.1.01.01 - Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	0 Dokumen	
30.				13 Penyusunan SOP									
					Jumlah Dokumen	50.000.000,00		2.10.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.10.01.1.01 - Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.10.01.1.01.04 - Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	
31.		15 Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	Cakupan pemenuhan kebutuhan akses internet dalam pelaksanaan PON; Jumlah media cetak nasional yang mempublikasi hasil pembangunan Papua; Peningkatan kerjasama media dan publikasi pembangunan daerah ; Persentase penduduk yang mengakses internet	8 Pengembangan fasilitas multi media/display									
					Jumlah videotrone yang diadakan	2.000.000.000,00	2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.1.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	2.16.02.1.01.05 - Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah videotrone yang diadakan	1 Unit	
					Jumlah peralatan multi media yang diadakan	0,00	2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.1.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	2.16.02.1.01.05 - Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah peralatan multi media yang diadakan	1 Set	
32.				19 Pengembangan/pembangunan JARKOMDA di lingkungan pemerintah									
33.				84 Kerjasama Media Penyiaran Publik									
					Jumlah media penyiaran publik	0,00						0 Media	
34.				86 Pengamanan, Pengendalian dan Pembuatan Sistem Pelaporan Operasionalisasi JARKOMDA									
					Jumlah Pengamanan, Pengendalian Operasional dan Layanan Pelaporan Penggunaan Trafic JARKOMDA	550.000.000,00	2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.1.02 - Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	2.16.03.1.02.05 - Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Jumlah Pengamanan, Pengendalian Operasional dan Layanan Pelaporan Penggunaan Trafic JARKOMDA	1 Kegiatan	
					Jumlah unit PC	0,00	2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.1.02 - Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	2.16.03.1.02.05 - Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Jumlah unit PC	550 Unit	
35.				87 Pengelolaan Disaster Recovery Cebter (DRC) Provinsi Papua									
36.				88 Fasilitas Media Penyiaran Publik									
37.				89 Pengembangan Aplikasi e-Government									
					Jumlah Sistem Aplikasi dan pengembangan Sistem Aplikasi E-Government	550.000.000,00	2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.1.02 - Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	2.16.03.1.02.08 - Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Sistem Aplikasi dan pengembangan Sistem Aplikasi E-Government	8 Aplikasi	
38.				90 Pengembangan Sistem Website Pemerintah Provinsi Papua									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Jumlah Modul/Fitur dan Lisensi Website Pemprov Papua (www.papua.go.id)	0,00	2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.1.02 - Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	2.16.03.1.02.01 - Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Modul/Fitur dan Lisensi Website Pemprov Papua (www.papua.go.id)	0 Layanan	
					Jumlah website/content	550.000.000,00	2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.1.01 - Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Subdomain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	2.16.03.1.01.02 - Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah website/content	5 Website	
39.				91 Pembinaan Layanan e-Government									
					Jumlah SKPD yang dibina	0,00						0 SKPD	
					Jumlah Kabupaten/Kota yang dibina	0,00						0 Kabupaten	
					Jumlah unit layanan yang dibina	0,00						0 Unit	
40.				93 Pengelolaan dan Pemutahiran Data Website Provinsi									
					Jumlah jenis data yang dikelola dan dimutakhirkan	0,00						0 Jenis	
41.				101 Pembangunan BTS Telekomunikasi									
42.				102 Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi Melalui E Government Terintegrasi									
					Pembangunan / Pengembangan / Tersosialisasinya / Launcing / Bimtek / Workshop Sistem Aplikasi Elektronik Pemerintah Provinsi Papua	0,00	2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.1.02 - Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	2.16.03.1.02.01 - Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pembangunan / Pengembangan / Tersosialisasinya / Launcing / Bimtek / Workshop Sistem Aplikasi Elektronik Pemerintah Provinsi Papua	0 Kegiatan	
					Jumlah kegiatan pencegahan dan Pemberantasan Kourups Terintegrasi (PPKT) diPemprov Papua	3.000.000.000,00	2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.1.02 - Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	2.16.03.1.02.01 - Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah kegiatan pencegahan dan Pemberantasan Kourups Terintegrasi (PPKT) diPemprov Papua	5 Kegiatan	
43.				103 Pengelolaan Informasi Pemerintah melalui Media Online									
					Jumlah jenis informasi yang dikelola/dimutakhirkan	650.000.000,00	2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.1.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	2.16.02.1.01.05 - Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah jenis informasi yang dikelola/dimutakhirkan	5 Jenis	
44.				104 Pengembangan media layanan publik pemerintah									
					Jumlah media publik	0,00						0 Media	
45.		17 Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	Cakupan SDM Kominfo yang kompeten di bidang teknologi informasi ; Jumlah Kelompok Masyarakat yang memahami IT; Persentase SDM Aparatur yang memahami IT	2 Pelatihan SDM Bidang Informasi dan Komunikasi Bagi Aparatur dan Masyarakat									
					Jumlah aparatur dan masyarakat yang dilatih	0,00						0 Orang	
46.				6 Pelatihan bagi kelompok informasi masyarakat									
					Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang produktif	350.000.000,00	2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.1.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	2.16.02.1.01.12 - Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang produktif	5 Kelompok	
47.		18 Program kerjasama informasi dengan mas media	Cakupan Layanan PPID; Jumlah kerjasama media dalam mempublikasikan hasil pembangunan ; Tingkat pemanfaatan informasi & komunikasi	3 Pelatihan bagi kelompok informasi masyarakat									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
48.	Komunikasi dan Informatika	18 Program kerjasama informasi dengan mas media	Cakupan Layanan PPID; Jumlah kerjasama media dalam mempublikasikan hasil pembangunan ; Tingkat pemanfaatan informasi & komunikasi	9 Pelayanan informasi dan komunikasi melalui media tradisional									
					Jumlah pembinaan media tradisional pertunjukkan rakyat	0,00	2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.1.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	2.16.02.1.01.12 - Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah pembinaan media tradisional pertunjukkan rakyat	0 Kegiatan	
					Jumlah media tradisional yang digunakan	3.000.000.000,00	2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.1.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	2.16.02.1.01.12 - Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah media tradisional yang digunakan	5 Media	
49.				35 Pembangunan/Pengembangan Kampung IT									
					Jumlah Kampung IT yang terbangun	0,00						0 Kampung	
50.				38 Layanan Informasi PPID									
					Tingkat layanan informasi PPID	750.000.000,00	2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.1.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	2.16.02.1.01.06 - Pelayanan Informasi Publik	Tingkat layanan informasi PPID	70 %	
					Jumlah layanan informasi yang dilakukan	0,00	2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.1.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	2.16.02.1.01.06 - Pelayanan Informasi Publik	Jumlah layanan informasi yang dilakukan	0 Layanan	
51.				46 Forum Media Publik									
					Jumlah Forum Media Publik yang dilaksanakan	950.000.000,00	2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.1.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	2.16.02.1.01.06 - Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Forum Media Publik yang dilaksanakan	1 Kegiatan	
					Jumlah peserta	0,00	2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.1.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	2.16.02.1.01.06 - Pelayanan Informasi Publik	Jumlah peserta	100 Orang	
52.				47 Layanan Sarana Prasarana Pameran Pemerintah									
					Jumlah pameran pemerintah yang dilaksanakan	0,00						0 Kegiatan	
					Jumlah event/acara pameran yang difasilitasi	0,00						0 Acara	
53.				48 Layanan Opini Publik Pemerintah									
					Jumlah Opini Publik yang terpantau/terlayani	350.000.000,00	2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.1.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	2.16.02.1.01.02 - Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Opini Publik yang terpantau/terlayani	5 Layanan	
54.				50 Kerjasama Media Penyiaran Publik									
					Jumlah media penyiaran publik	0,00	2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.1.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	2.16.02.1.01.07 - Layanan Hubungan Media	Jumlah media penyiaran publik	2 Media	
					Jumlah peserta	850.000.000,00	2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.1.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	2.16.02.1.01.07 - Layanan Hubungan Media	Jumlah peserta	2 Orang	
55.				51 Fasilitas Media Penyiaran Publik									
					Jumlah layanan transponder yang disewa	0,00	2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.1.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	2.16.02.1.01.08 - Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah layanan transponder yang disewa	5 MHz/tahun	
56.				54 Pembangunan Media Center									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Luas ruang media center	0,00						0 M2	
57.				55 Fasilitasi Komisi Informasi Provinsi Papua (KIP)									
					Jumlah anggota KIP	0,00						0 Orang	
58.		20 Penyiapan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Cakupan wilayah yang terlayani jaringan telekomunikasi; Persentase jaringan teknologi informasi antar OPD yang terintegrasi	1 Pemb. BTS dan Penyediaan Akses Jaringan Telekomunikasi									
59.				2 Jasa Berlangganan Fasilitas Komunikasi Data Antar SKPD Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Dan Masyarakat									
					Jumlah SKPD yang terlayani (intranet & internet) secara online	0,00	2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.1.02 - Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	2.16.03.1.02.08 - Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah SKPD yang terlayani (intranet & internet) secara online	33 SKPD	
					Jumlah masyarakat yang terlayani (internet) secara online	0,00	2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.1.02 - Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	2.16.03.1.02.08 - Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah masyarakat yang terlayani (internet) secara online	250 Orang	
					Jumlah Layanan dan Lokasi Jasa Berlanggana Internet untuk Pemerintah dan Masyarakat	7.040.690.000,00	2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.1.02 - Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	2.16.03.1.02.08 - Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan dan Lokasi Jasa Berlanggana Internet untuk Pemerintah dan Masyarakat	132 Lokasi	
60.				3 Penyediaan Jaringan Telekomunikasi dan Internet									
					Jumlah Fasilitas Umum yang terlayani internet	0,00						0 Unit	
61.				4 Pengembangan Kampung IT									
					Jumlah Kampung IT yang terbangun	0,00						0 Kampung	
62.				5 Pengembangan/pembangunan JARKOMDA di lingkungan pemerintah									
					Tingkat konektivitas jaringan komunikasi data di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua	0,00	2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.1.01 - Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Subdomain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	2.16.03.1.01.03 - Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Tingkat konektivitas jaringan komunikasi data di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua	0 %	
					Jumlah Server yang dikelola dan SKPD/Fasilitas Lainnya pengguna JARKOMDA Pemprov Papua	660.000.000,00	2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.1.02 - Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	2.16.03.1.02.10 - Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Server yang dikelola dan SKPD/Fasilitas Lainnya pengguna JARKOMDA Pemprov Papua	110 Unit	
63.				6 Pengelolaan Disaster Recovery Ceber (DRC) Provinsi Papua									
					Jumlah server aktif di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua	0,00	2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.1.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	2.16.02.1.01.10 - Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah server aktif di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua	1 Unit	
64.				9 Layanan Monitoring Infrastruktur TIK di Papua									
					Jumlah layanan monitoring infrastruktur TIK	0,00						0 Layanan	
65.				10 Pembangunan Command Center PON XX									
					Jumlah Command Center di Pemprov Papua untuk mendukung PON XX	1.000.000.000,00	2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.1.02 - Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	2.16.03.1.02.03 - Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Command Center di Pemprov Papua untuk mendukung PON XX	1 Unit	
66.				11 Penyediaan Data Center PON XX									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Tersedianya Data Center PON XX	0,00						0 Unit	
67.				12 Pembangunan sistem aplikasi penyelenggaraan PON XX									
					Jumlah aplikasi PON yang dibangun	12.500.000.000,00	2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.1.02 - Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	2.16.03.1.02.07 - Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah aplikasi PON yang dibangun	5 Aplikasi	
68.				13 Pengadaan sistem informasi Web Portal PON XX									
69.				14 Penyediaan DRC PON XX									
					Tersedianya DRC PON XX	0,00						0 Unit	
70.				15 Pembangunan Menara / Tower Telekomunikasi Stadion Papua Bangkit									
					Terbangunnya Menara / Tower Telekomunikasi Stadion Papua Bangkit	0,00						0 Unit	
71.				16 Layanan Akses Internet/Intranet PON XX									
					Tersedianya Akses Internet/Intranet	0,00						0 Unit	
72.				17 Pengadaan Media Center Utama PON XX									
					Jumlah Pengadaan Media Center untuk mendukung penyelenggaraan PON XX	1.500.000.000,00	2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.1.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	2.16.02.1.01.06 - Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Pengadaan Media Center untuk mendukung penyelenggaraan PON XX	1 Lokasi	
73.				18 Pengadaan Media Center Cluster PON XX									
					Tersedianya Media Center Cluster PON XX	0,00	2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.1.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	2.16.02.1.01.05 - Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Tersedianya Media Center Cluster PON XX	1 Website	
74.				19 Pengadaan Infrastruktur TIK pada semua Bidang PON XX									
					Tersedianya Infrastruktur TIK pada semua bidang PON XX	0,00						0 Unit	
75.				20 Layanan Media PON XX									
					Jumlah Konten dan Digital Campaign PON XX	0,00						0 Konten	
76.				21 Audit Infrastruktur, Sistem Aplikasi, dan Sistem Keamanan Informasi Penyelenggaraan PON XX									
77.				22 Penyusunan Regulasi dan Tata Kelola TIK PON XX									
					Tersedianya Regulasi dan Tata Kelola TIK PON XX	0,00						0 Dokumen	
78.				23 Operasionalisasi bidang TIK pada penyelenggaraan PON XX									
79.				24 SDM TIK PON XX tahun 2020									
					Jumlah SDM yang terlatih	0,00						0 Orang	
80.	Statistik	15 Program Pengembangan data/informasi/statistik daerah	Cakupan ketersediaan data SIPD; Jumlah dokumen analisis kinerja pembangunan daerah yang berkualitas	7 Pembinaan Pengelolaan Statistik									
					Jumlah jenis data yang dikelola	550.000.000,00	2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	2.20.02.1.01 - Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	2.20.02.1.01.01 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah jenis data yang dikelola	1 Jenis	
81.				8 Pengembangan Layanan Statistik									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Jumlah jenis data/informasi yang dikelola/dimutakhirkan	0,00	2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	2.20.02.1.01 - Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	2.20.02.1.01.01 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah jenis data/informasi yang dikelola/dimutakhirkan	1 Jenis	
					Jumlah publikasi	0,00	2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	2.20.02.1.01 - Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	2.20.02.1.01.01 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah publikasi	0 Dokumen	
82.	Persandian	15 Program Pengelolaan dan Pengembangan Persandian Daerah	Cakupan penyelenggaraan pelayanan persandian daerah	1 Fasilitasi Sertifikasi Elektronik									
					Jumlah Dokumen MOU	0,00						0 Dokumen	
83.				2 Fasilitasi Pengamanan Signal									
					Jumlah Jammer tersertifikasi yang diadakan	0,00	2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	2.21.02.1.02 - Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Provinsi	2.21.02.1.02.01 - Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Jammer tersertifikasi yang diadakan	1 Unit	
					Frekuensi fasilitasi pengamanan signal	0,00	2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	2.21.02.1.01 - Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	2.21.02.1.01.04 - Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Frekuensi fasilitasi pengamanan signal	0 Kali	
					Jumlah ruangan yang difasilitasi	0,00	2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	2.21.02.1.01 - Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	2.21.02.1.01.04 - Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah ruangan yang difasilitasi	0 Unit	
84.				3 Fasilitasi Kontra Penginderaan									
					Jumlah peralatan kontra penginderaan tersertifikasi yang diadakan	550.000.000,00	2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	2.21.02.1.01 - Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	2.21.02.1.01.02 - Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah peralatan kontra penginderaan tersertifikasi yang diadakan	1 Unit	
					Jumlah ruangan yang difasilitasi	0,00	2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	2.21.02.1.01 - Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	2.21.02.1.01.04 - Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah ruangan yang difasilitasi	0 Unit	
85.				4 Fasilitasi Tim Persandian Daerah									
					Jumlah tim persandian daerah	0,00	2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	2.21.02.1.02 - Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Provinsi	2.21.02.1.02.01 - Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah tim persandian daerah	13 Orang	
JUMLAH						47.443.100.000,00							

Mengetahui,
Kepala Bappeda Provinsi Papua

YOHANES WALILO, S.Sos, M.Si
NIP. 197007281997121001

JAYAPURA, 20 July 2020
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

JERI AGUS YUDIANTO, S.Kom
NIP. 19730723 200112 1 004

**REKAPITULASI PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021
SERTA KETERKAITAN DENGAN HASIL PEMETAAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019**

PROVINSI : Papua

PERANGKAT DAERAH : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Penanaman Modal	1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	À Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	1 Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang disediakan	20.000.000,00		2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.12.01.1.03 - Administrasi Umum	2.12.01.1.03.01 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang terkirim	1000 Surat	
2.				2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Jasa Layanan berlangganan Listrik, Air, Telepon, Transponder	330.000.000,00		2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.12.01.1.03 - Administrasi Umum	2.12.01.1.03.02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Layanan	12 Layanan	
3.				6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Unit Mobil Dinas/Operasional yang terpelihara dan Terfasilitasi Perijinannya	28.000.000,00		2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.12.01.1.03 - Administrasi Umum	2.12.01.1.03.06 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Unit Mobil Dinas/Operasional yang diservis dan dipelihara	21 Unit	
4.				8 Penyediaan jasa kebersihan kantor	Luas Gedung dan Halaman yang disediakan jasa kebersihan	210.400.000,00		2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.12.01.1.03 - Administrasi Umum	2.12.01.1.03.08 - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	jumlah Gedung dan Halaman yang dibersihkan	21792 M2	
					Jumlah tenaga kebersihan dan Fasilitas Pendukung kebersihan kantor	252.000.000,00		2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.12.01.1.03 - Administrasi Umum	2.12.01.1.03.08 - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah tenaga kebersihan	7 Orang	
					Jumlah Jenis Bahan dan Alat Kebersihan	0,00		2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.12.01.1.03 - Administrasi Umum	2.12.01.1.03.14 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Bahan dan Alat Kebersihan	0 Jenis	
5.				10 Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	350.000.000,00		2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.12.01.1.03 - Administrasi Umum	2.12.01.1.03.10 - Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	50 Jenis	
6.				11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan	0,00		2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.12.01.1.03 - Administrasi Umum	2.12.01.1.03.11 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan	0 Jenis	
					Jumlah penggandaan	0,00		2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.12.01.1.03 - Administrasi Umum	2.12.01.1.03.11 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penggandaan	0 Lembar	
					Jumlah Jenis Barang Cetak dan yang Disediakan	150.000.000,00		2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.12.01.1.03 - Administrasi Umum	2.12.01.1.03.11 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	25 Jenis	
					Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	0,00		2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.12.01.1.03 - Administrasi Umum	2.12.01.1.03.11 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	0 Bulan	
7.				12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen Listrik yang disediakan	20.000.000,00		2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.12.01.1.03 - Administrasi Umum	2.12.01.1.03.12 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen alat pemeliharaan listrik dan genset yang disediakan	20 Buah	
8.				15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	21.000.000,00		2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.12.01.1.03 - Administrasi Umum	2.12.01.1.03.15 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12 Jenis	
9.				16 Penyediaan bahan logistik kantor									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Jumlah liter bahan bakar untuk kendaraan operasional	0,00		2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.12.01.1.03 - Administrasi Umum	2.12.01.1.03.16 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah liter bahan bakar untuk kendaraan operasional	0 Liter	
					jumlah mobilitas termasuk tenaga angkat dan turun beras ke kantor	10.200.000,00		2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.12.01.1.03 - Administrasi Umum	2.12.01.1.03.16 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah Pembelian Air Galon	1 Kali	
10.				17 Penyediaan makanan dan minuman									
					Pelaksanaan penyediaan makan dan minum	0,00		2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.12.01.1.03 - Administrasi Umum	2.12.01.1.03.17 - Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Porsi makan dan minum kegiatan yang tersedia	0 Kegiatan	
					Pelaksanaan makan minum tamu dan rapat	70.000.000,00		2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.12.01.1.03 - Administrasi Umum	2.12.01.1.03.17 - Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Porsi makan dan minum yang tersedia	50 Kali Tahun	
					Pelaksanaan makan minum saat olah raga (hari Jumat)	0,00		2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.12.01.1.03 - Administrasi Umum	2.12.01.1.03.17 - Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Porsi makan dan minum yang tersedia	0 Kali	
					Tersediannya Makanan dan Minuman	0,00		2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.12.01.1.03 - Administrasi Umum	2.12.01.1.03.17 - Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Porsi makan dan minum yang tersedia	0 Bulan	
					Jumlah orang yang disediakan makan dan minuman	0,00		2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.12.01.1.03 - Administrasi Umum	2.12.01.1.03.17 - Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Porsi makan dan minum yang tersedia	0 Orang	
11.				18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah									
					Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	1.531.000.000,00		2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.12.01.1.03 - Administrasi Umum	2.12.01.1.03.18 - Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	60 Orang	
12.				19 Penyediaan Jasa Pengamanan									
					Pelaksanaan pembayaran insentif bagi tenaga operator dan penjaga X-Ray VIP Room Bandara Sentani	0,00		2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.12.01.1.03 - Administrasi Umum	2.12.01.1.03.01 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa keamanan/security yang dibayarkan	0 Orang Bulan	
					Pelaksanaan pembayaran honor bagi satpam	408.000.000,00		2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.12.01.1.03 - Administrasi Umum	2.12.01.1.03.01 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa keamanan/security yang dibayarkan	10 Orang Bulan	
					Pelaksanaan uang makan satpam	40.000.000,00		2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.12.01.1.03 - Administrasi Umum	2.12.01.1.03.01 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa keamanan/security yang dibayarkan	48 Orang Bulan	
					Jumlah tenaga pengamanan	163.200.000,00		2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.12.01.1.03 - Administrasi Umum	2.12.01.1.03.01 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa keamanan/security yang dibayarkan	4 Orang	
13.		2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	À Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	5 Pengadaan kendaraan dinas/operasional									
					Jumlah kendaraan yang diadakan	0,00		2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.12.01.1.03 - Administrasi Umum	2.12.01.1.03.21 - Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda 4	1 Unit	
					Jumlah kendaraan roda 2	0,00		2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.12.01.1.03 - Administrasi Umum	2.12.01.1.03.21 - Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda 2	3 Unit	
14.				7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor									
					Jumlah pengadaan perlengkapan	100.000.000,00		2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.12.01.1.03 - Administrasi Umum	2.12.01.1.03.23 - Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan	25 Unit	
15.				9 Pengadaan peralatan gedung kantor									
					Jumlah peralatan perlengkapan	100.000.000,00		2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.12.01.1.03 - Administrasi Umum	2.12.01.1.03.25 - Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan/perlengkapan yang diadakan	25 Unit	
16.				10 Pengadaan mebeleur									
					Jumlah mebeleur yang diadakan	100.000.000,00		2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.12.01.1.03 - Administrasi Umum	2.12.01.1.03.26 - Pengadaan Mebeleur	Jumlah mebeleur yang diadakan untuk 3 UPT	40 Unit	
17.				22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor									
					Jumlah gedung kantor yang dipelihara	65.000.000,00		2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.12.01.1.03 - Administrasi Umum	2.12.01.1.03.29 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor	1 Unit	
					belanja sewa	0,00		2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.12.01.1.03 - Administrasi Umum	2.12.01.1.03.29 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung yang disewa	0 Tahun	

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18.	Penanaman Modal	2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	À Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional									
					Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	0,00		2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.12.01.1.03 - Administras Umum	2.12.01.1.03.31 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah dan Jenis perlengkapan/peralatan gedung kantor yang dipelihara	0 Unit	
					Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	350.000.000,00		2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.12.01.1.03 - Administras Umum	2.12.01.1.03.31 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang	27 Unit	
					sewa kendaraan	0,00		2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.12.01.1.03 - Administras Umum	2.12.01.1.03.31 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan yang d Perbaiki/Service	0 Bulan	
19.				26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor									
					Pelaksanaan pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	0,00		2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.12.01.1.03 - Administras Umum	2.12.01.1.03.27 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Jumlah Rumah Jabatan	0 Kegiatan	
					Jumlah Perlengkapan Gedung kantor yang terpelihara	25.000.000,00		2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.12.01.1.03 - Administras Umum	2.12.01.1.03.33 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung kantor yang dipelihara	10 Unit	
					Tersediannya biaya pemeliharaan gedung kantor	0,00		2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.12.01.1.03 - Administras Umum	2.12.01.1.03.39 - Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor	0 Bulan	
20.				28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor									
					Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	25.000.000,00		2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.12.01.1.03 - Administras Umum	2.12.01.1.03.35 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	60 Unit	
21.				29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur									
					Jumlah mebeleur yang dipelihara	20.000.000,00		2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.12.01.1.03 - Administras Umum	2.12.01.1.03.36 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Jumlah mebeleur yang dipelihara	10 Unit	
22.				46 Sewa gedung									
					Jumlah gedung kantor yang disewa	0,00		2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.12.01.1.03 - Administras Umum	2.12.01.1.03.27 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Jumlah rumah jabatan yang terpelihara	0 Unit Tahun	
					Sewa rumah jabatan	150.000.000,00		2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.12.01.1.03 - Administras Umum	2.12.01.1.03.27 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Jumlah Rumah Jabatan Yang disewa	2 Unit Tahun	
23.		3 Program peningkatan disiplin aparatur	À Meningkatnya disiplin aparatur	2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya									
					Jumlah pakaian dinas yang diadakan	73.000.000,00		2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.12.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	2.12.01.1.04.02 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas sipil harian	55 Stell	
24.				3 Pengadaan pakaian kerja lapangan									
					Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan	8.200.000,00		2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.12.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	2.12.01.1.04.03 - Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan	4 Stell	
25.				5 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu									
					Jumlah pakaian khusus yang diadakan	0,00		2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.12.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	2.12.01.1.04.05 - Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah pakaian Batik yang diadakan	65 Stell	
26.		5 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	À Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	1 Pendidikan dan pelatihan formal									
					Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	350.000.000,00		2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.12.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	2.12.01.1.04.09 - Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparatur mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	20 Orang	
27.		6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	À Meningkatnya kualitas akuntabilitas OPD	4 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun									
					Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	35.000.000,00		2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.12.01.1.02 - Administras Keuangan	2.12.01.1.02.09 - Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	5 Laporan	
28.				5 Penyusunan Renja, RKA dan Perubahan APBD									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Jumlah dokumen	35.000.000,00		2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.12.01.1.01 - Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.12.01.1.01.01 - Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	5 Dokumen	
29.		15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Frekwensi promosi potensi investasi Papua dalam ajang pameran tingkat nasional/internasional ; Meningkatnya jumlah perusahaan PMA/PMDN yang menanamkan modalnya di Papua; Persentase UMKM lokal yang bermitra dengan PMA/ PMDN; Persentase investasi yang direalisasikan dari ajang promosi nasional/internasional; Tingkat pertumbuhan nilai investasi sektor unggulan	1 Peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antar usaha besar dan Usaha Kecil Menengah									
					terlaksananya kerjasama strategis antar usaha besa	0,00	2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	2.18.02.1.01 - Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	2.18.02.1.01.02 - Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	JUmlah Pelaksanaan Evaluasi	2	
30.				2 Pengembangan potensi unggulan daerah									
					terlaksananya pengembangan potensi unggulan daerah	0,00	2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	2.18.02.1.02 - Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	2.18.02.1.02.02 - Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	tersedianya informasi potensi unggulan Papua	2	
					Jumlah wilayah adat yang telah memiliki informasi potensi unggulan daerah	500.000.000,00	2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	2.18.02.1.02 - Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	2.18.02.1.02.02 - Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	Jumlah wilayah adat yang telah memiliki informasi potensi unggulan daerah	1 Wilayah	
31.				3 Fasilitasi dan koordinasi percepatan pembangunan kawasan produksi daerah tertinggal (P2KPDT)									
					terlaksannya koordinasi antar lembaga dalam pegen	0,00	2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	2.18.05.1.01 - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	2.18.05.1.01.03 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	terlaksannya koordinasi antar lembaga dalam pegen	1	
32.				4 Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/ PMA									
33.				5 Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal									
					Terselenggaranya forum OPD bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu se Papua	300.000.000,00	2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	2.18.04.1.01 - Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.18.04.1.01.04 - koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Pertemuan yang terselenggara	1 Kali	
34.				6 Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha									
					Terlaksananya koodinasi dan kerjasama di bidang pe	0,00						0	
35.				7 Pengawasan dan evaluasi kinerja dan aparaturn Badan Penanaman Modal Daerah									
					Terlaksananya pengawasan dan evaluasi kinerja dan	0,00						0	
36.				8 Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal									
					Terlaksananya peningkatan pemantauan, pembinaan dan	0,00	2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	2.18.05.1.01 - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	2.18.05.1.01.02 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Terlaksananya peningkatan pemantauan, pembinaan dan	275 Kegiatan	
37.				9 Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan investasi									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					terlaksananya peningkatan Kualitas SDM guna pening	0,00	2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	2.18.04.1.01 - Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.18.04.1.01.01 - Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	terlaksananya peningkatan Kualitas SDM guna pening	10	
38.				10 Penyelenggaraan pameran investasi									
					Terlaksananya pameran investasi	1.000.000.000,00	2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	2.18.03.1.01 - Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	2.18.03.1.01.02 - Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Terlaksananya keikutsertaan Papua pada pameran investasi di dalam maupun luar negeri	10 Kegiatan	
39.				11 Monitoring, evaluasi dan pelaporan									
40.		16 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Proporsi biaya transaksi dalam total investasi	1 Penyusunan kebijakan investasi bagi pembangunan fasilitas infrastruktur									
					Tersusunya kebijakan Investasi bagi pembangunan fa	1.000.000.000,00	2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	2.18.02.1.01 - Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	2.18.02.1.01.01 - Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Tersusunya kebijakan Investasi bagi pembangunan fa	1 Dokumen	
41.				2 Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi									
					Terlaksananya Fasilitasi dan koordinasi kerjasam d	0,00						0 Kegiatan	
42.				3 Penyusunan Cetak Biru (Master Plan) pengembangan penanaman modal									
					tersedianya Dukumen master plan pengembangan penan	0,00	2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	2.18.02.1.02 - Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	2.18.02.1.02.01 - Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	
43.				4 Pengembangan System Informasi Penanaman Modal									
					Tesedianya system informasi penanaman modal	0,00	2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	2.18.06.1.01 - Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	2.18.06.1.01.01 - Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Aplikasi	1 Dokumen	
44.				5 Penyusunan sistem informasi penanaman modal di daerah									
45.				6 Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal									
					Tersedianya Dokumen prosedur perijinan dan peningk	0,00	2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	2.18.04.1.01 - Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.18.04.1.01.01 - Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah dokumen perizinan dan nonperizinan yang diterbitkan oleh PTSP	1 Dokumen	
46.				7 Kajian Kebijakan penanaman modal									
					tersedianya data kajian kebijakan penanaman modal	250.000.000,00	2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	2.18.02.1.01 - Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	2.18.02.1.01.01 - Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	
47.				8 Pemberian insentif investasi di wilayah tertinggal									
					terlaksananya pemberian insentif infestasi di wila	1.000.000.000,00	2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	2.18.02.1.01 - Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	2.18.02.1.01.01 - Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	jumlah jenis insentif infestasi di wilayah tertinggal	1	
48.				9 Monitoring, evaluasi dan pelaporan									
					Terlaksananya Monitoring, evaluasi dan pelaporan.	0,00						0 Kegiatan	

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
49.	Penanaman Modal	18 Program Peningkatan Pelayanan Perizinan Penanaman Modal	Lama waktu penerbitan izin investasi; Skor indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perijinan	1 Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Penanaman Modal Melalui PTSP									
					Jumlah jenis ijin yang diterbitkan PTSP	500.000.000,00	2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	2.18.04.1.02 - Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangn Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	2.18.04.1.02.01 - Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah jenis perizinan dan nonperizinan yang diterbitkan PTSP	1200 Jenis	
50.				4 Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Perijinan dan Non Peijinan diBidang Penanaman Modal									
					Jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	400.000.000,00	2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	2.18.04.1.02 - Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangn Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	2.18.04.1.02.03 - Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	Jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	20 Buah	
51.				5 survey indeks kepuasan masyarakat terhadap perijinan									
					Jumlah perijinan dan non perijinan yang diterbitkan PTSP sesuai ketentuan/SOP	0,00	2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	2.18.04.1.02 - Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangn Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	2.18.04.1.02.03 - Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	Jumlah perijinan dan non perijinan yang diterbitkan PTSP sesuai ketentuan/SOP	1200 Buah	
52.				6 Penyediaan Informasi Perijinan									
					Jumlah jenis informasi perijinan di bidang penanaman modal yang tersedia	200.000.000,00	2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	2.18.04.1.02 - Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangn Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	2.18.04.1.02.01 - Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah jenis informasi perijinan di bidang penanaman modal yang tersedia	5 Jenis	
53.				8 Pendataan Perijinan dan Non Perijinan di Kabupaten/Kota se Papua									
					Tersedianya data calon pemohon dari perorangan, perusahaan dan koperasi yang belum melakukan proses pendaftaran ijin dan non ijin IUPHHK	250.000.000,00	2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	2.18.04.1.02 - Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangn Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	2.18.04.1.02.02 - Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	
54.		19 Program Peningkatan Daya Saing Investasi	Pertumbuhan nilai investasi	4 Penyusunan Regulasi dan Insentif Investasi									
					Jumlah draf Perda/Pergub tentang penanaman modal	200.000.000,00	2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	2.18.02.1.01 - Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	2.18.02.1.01.01 - Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah draf Perda/Pergub tentang penanaman moda	1 Buah	
55.		20 Program Peningkatan, Pengawasan, Pengendalian Penanaman Modal	Persentase hasil pemantauan perusahaan investasi yang ditindaklanjuti	1 Koordinasi Fasilitasi Penyelesaian Hambatan Pelaksanaan Penanaman Modal									
					Jumlah permasalahan investasi yang ditindaklanjuti	0,00	2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	2.18.05.1.01 - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	2.18.05.1.01.02 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah permasalahan investasi yang ditindaklanjuti	20 Buah	
56.				2 Pemantauan Perkembangan Realisasi Perusahaan Penanaman Modal									
					Jumlah PMA/PMDN yang beroperasi sesuai ketentuan	700.000.000,00	2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	2.18.05.1.01 - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	2.18.05.1.01.01 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah PMA/PMDN yang beroperasi sesuai ketentuan	260 Perusahaan	
57.				3 Bimbingan Pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal Kepada Masyarakat Dunia Usaha									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Jumlah PMA/PMDN yang mengikuti bimbingan	300.000.000,00	2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	2.18.05.1.01 - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	2.18.05.1.01.02 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah PMA/PMDN yang mengikuti bimbingan	100 Perusahaan	
58.				4 Pengelaaan Data dan Sistem Informasi Penanaman modal									
					Jumlah sistem informasi yang terbangun	0,00	2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	2.18.06.1.01 - Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	2.18.06.1.01.01 - Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah sistem informasi yang terbangun	1 Sistem	
59.				5 Temu Usaha dan Dialog Investasi									
					Terselenggaranya dialog investasi	400.000.000,00	2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	2.18.05.1.01 - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	2.18.05.1.01.02 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Koordinasi	1 Kali	
JUMLAH						12.460.000.000,00							

Mengetahui,
Kepala Bappeda Provinsi Papua

YOHANES WALILO, S.Sos, M.Si
NIP. 197007281997121001

JAYAPURA, 20 July 2020
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JHONI WAY S.Hut.M.Si
NIP. 19690625 199703 1 009

**REKAPITULASI PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021
SERTA KETERKAITAN DENGAN HASIL PEMETAAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019**

PROVINSI : Papua

PERANGKAT DAERAH : Dinas Olah Raga dan Pemuda

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Kepemudaan dan Olah Raga	1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	À Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	1 Penyediaan jasa surat menyurat									
					Jumlah surat yang disediakan	150.000.000,00		2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.13.01.1.03 - Administrasi Umum	2.13.01.1.03.01 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang terkirim	1500 Surat	
2.				2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik									
					Jumlah Jasa Layanan berlangganan Listrik, Air, Telepon, Transponder	200.000.000,00		2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.13.01.1.03 - Administrasi Umum	2.13.01.1.03.02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Layanan	3 Layanan	
3.				3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor									
					Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	250.000.000,00		2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.13.01.1.03 - Administrasi Umum	2.13.01.1.03.03 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	25 Unit	
4.				6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional									
					Jumlah Unit Mobil Dinas/Operasional yang terpelihara dan Terfasilitasi Perijinannya	100.000.000,00		2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.13.01.1.03 - Administrasi Umum	2.13.01.1.03.06 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Unit Mobil Dinas/Operasional yang diservis dan dipelihara	10 Unit	
5.				8 Penyediaan jasa kebersihan kantor									
					Luas Gedung dan Halaman yang disediakan jasa kebersihan	0,00		2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.13.01.1.03 - Administrasi Umum	2.13.01.1.03.08 - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	jumlah Gedung dan Halaman yang dibersihkan	1000 M2	
					Jumlah tenaga kebersihan dan Fasilitas Pendukung kebersihan kantor	252.000.000,00		2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.13.01.1.03 - Administrasi Umum	2.13.01.1.03.08 - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah tenaga kebersihan	6 Orang	
					Jumlah Jenis Bahan dan Alat Kebersihan	0,00		2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.13.01.1.03 - Administrasi Umum	2.13.01.1.03.14 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Bahan dan Alat Kebersihan	0 Jenis	
6.				10 Penyediaan alat tulis kantor									
					Jumlah jenis ATK yang disediakan	450.000.000,00		2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.13.01.1.03 - Administrasi Umum	2.13.01.1.03.10 - Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	25 Jenis	
7.				11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan									
					Jumlah barang cetakan	250.000.000,00		2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.13.01.1.03 - Administrasi Umum	2.13.01.1.03.11 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan	15 Jenis	
					Jumlah penggandaan	0,00		2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.13.01.1.03 - Administrasi Umum	2.13.01.1.03.11 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penggandaan	8000 Lembar	
					Jumlah Jenis Barang Cetak dan yang Disediakan	0,00		2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.13.01.1.03 - Administrasi Umum	2.13.01.1.03.11 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0 Jenis	
					Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	0,00		2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.13.01.1.03 - Administrasi Umum	2.13.01.1.03.11 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	0 Bulan	
8.				12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor									
					Jumlah Komponen Listrik yang disediakan	150.000.000,00		2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.13.01.1.03 - Administrasi Umum	2.13.01.1.03.12 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen alat pemeliharaan listrik dan genset yang disediakan	200 Buah	
9.				13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Jumlah peralatan dan Perlengkapan	350.000.000,00		2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.13.01.1.03 - Administrasi Umum	2.13.01.1.03.25 - Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah penggantian peralatan kantor yang disediakan	25 Unit	
10.				15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan									
					Jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	150.000.000,00		2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.13.01.1.03 - Administrasi Umum	2.13.01.1.03.15 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	400 Jenis	
11.				17 Penyediaan makanan dan minuman									
					Pelaksanaan penyediaan makan dan minum	200.000.000,00		2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.13.01.1.03 - Administrasi Umum	2.13.01.1.03.17 - Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Porsi makan dan minum kegiatan yang tersedia	12 Kegiatan	
					Pelaksanaan makan minum tamu dan rapat	200.000.000,00		2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.13.01.1.03 - Administrasi Umum	2.13.01.1.03.17 - Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Porsi makan dan minum yang tersedia	60 Kali Tahun	
					Pelaksanaan makan minum saat olah raga (hari Jumat)	150.000.000,00		2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.13.01.1.03 - Administrasi Umum	2.13.01.1.03.17 - Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Porsi makan dan minum yang tersedia	56 Kali	
					Tersediannya Makanan dan Minuman	0,00		2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.13.01.1.03 - Administrasi Umum	2.13.01.1.03.17 - Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Porsi makan dan minum yang tersedia	0 Bulan	
					Jumlah orang yang disediakan makan dan minuman	100.000.000,00		2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.13.01.1.03 - Administrasi Umum	2.13.01.1.03.17 - Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Porsi makan dan minum yang tersedia	48 Orang	
12.				18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah									
					Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	5.000.000.000,00		2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.13.01.1.03 - Administrasi Umum	2.13.01.1.03.18 - Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	150 Orang	
13.				19 Penyediaan Jasa Pengamanan									
					Pelaksanaan pembayaran insentif bagi tenaga operator dan penjaga X-Ray VIP Room Bandara Sentani	0,00		2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.13.01.1.03 - Administrasi Umum	2.13.01.1.03.01 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa keamanan/security yang dibayarkan	0 Orang Bulan	
					Pelaksanaan pembayaran honor bagi satpam	250.000.000,00		2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.13.01.1.03 - Administrasi Umum	2.13.01.1.03.01 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa keamanan/security yang dibayarkan	72 Orang Bulan	
					Pelaksanaan uang makan satpam	0,00		2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.13.01.1.03 - Administrasi Umum	2.13.01.1.03.01 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa keamanan/security yang dibayarkan	0 Orang Bulan	
					Jumlah tenaga pengamanan	0,00		2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.13.01.1.03 - Administrasi Umum	2.13.01.1.03.01 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa keamanan/security yang dibayarkan	0 Orang	
14.		2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	À Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	5 Pengadaan kendaraan dinas/operasional									
					Jumlah kendaraan yang diadakan	2.000.000.000,00		2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.13.01.1.03 - Administrasi Umum	2.13.01.1.03.21 - Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda 4	5 Unit	
					Jumlah kendaraan roda 2	450.000.000,00		2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.13.01.1.03 - Administrasi Umum	2.13.01.1.03.21 - Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda 2	15 Unit	
15.				10 Pengadaan mebeleur									
					Jumlah mebeleur yang diadakan	750.000.000,00		2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.13.01.1.03 - Administrasi Umum	2.13.01.1.03.26 - Pengadaan Mebeleur	Jumlah mebeleur yang diadakan untuk 3 UPT	3 Unit	
16.				24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional									
					Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	0,00		2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.13.01.1.03 - Administrasi Umum	2.13.01.1.03.31 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah dan Jenis perlengkapan/peralatan gedung kantor yang dipelihara	0 Unit	
					Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	200.000.000,00		2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.13.01.1.03 - Administrasi Umum	2.13.01.1.03.31 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang	6 Unit	
					sewa kendaraan	0,00		2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.13.01.1.03 - Administrasi Umum	2.13.01.1.03.31 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan yang diperbaiki/Service	0 Bulan	
17.		3 Program peningkatan disiplin aparatur	À Meningkatnya disiplin aparatur	2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Jumlah pakaian dinas yang diadakan	230.000.000,00		2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.13.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	2.13.01.1.04.02 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas sipil harian	150 Stell	
18.				3 Pengadaan pakaian kerja lapangan									
					Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan	0,00		2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.13.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	2.13.01.1.04.03 - Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan	150 Stell	
19.				4 Pengadaan pakaian KORPRI									
					jumlah pakaian KORPRI yang diadakan	133.000.000,00		2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.13.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	2.13.01.1.04.04 - Pengadaan Pakaian Korpri	Jumlah pakaian KORPRI yang diadakan	133 Stell	
20.				5 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu									
					Jumlah pakaian khusus yang diadakan	99.750.000,00		2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.13.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	2.13.01.1.04.05 - Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah pakaian Batik yang diadakan	133 Stell	
21.		5 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	À Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	1 Pendidikan dan pelatihan formal									
					Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	300.000.000,00		2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.13.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	2.13.01.1.04.09 - Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparatur mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	8 Orang	
22.				2 Sosialisasi peraturan perundang-undangan									
					Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	0,00		2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.13.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	2.13.01.1.04.10 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	150 Orang	
23.				3 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan									
					Jumlah peserta bimbingan teknis tentang implementasi peraturan perundang-undangan	200.000.000,00		2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.13.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	2.13.01.1.04.11 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta bimbingan teknis tentang implementasi peraturan perundang-undangan	133 Orang	
24.				4 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal									
					Jumlah aparatur yang terlatih	200.000.000,00		2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.13.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	2.13.01.1.04.11 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	
25.		6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	À Meningkatnya kualitas akuntabilitas OPD	1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD									
					Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	25.000.000,00		2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.13.01.1.02 - Administrasi Keuangan	2.13.01.1.02.06 - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan	1 Laporan	
					Laporan LAKIP SKPD	0,00		2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.13.01.1.01 - Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.13.01.1.01.05 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan LAKIP SKPD	0 Dokumen	
26.				2 Penyusunan laporan keuangan semesteran									
					Jumlah pelaporan keuangan semesteran yang diselesaikan tepat waktu	25.000.000,00		2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.13.01.1.02 - Administrasi Keuangan	2.13.01.1.02.07 - Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Jumlah dokumen laporan	1 Laporan	
27.				3 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran									
					Jumlah pelaporan prognosis realisasi anggaran yang diselesaikan tepat waktu	50.000.000,00		2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.13.01.1.02 - Administrasi Keuangan	2.13.01.1.02.08 - Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah pelaporan prognosis realisasi anggaran yang diselesaikan tepat waktu	2 Laporan	
28.				4 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun									
					Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	50.000.000,00		2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.13.01.1.02 - Administrasi Keuangan	2.13.01.1.02.09 - Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	1 Laporan	

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29.	Kepemudaan dan Olah Raga	6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	A Meningkatnya kualitas akuntabilitas OPD	5 Penyusunan Renja, RKA dan Perubahan APBD									
					Jumlah dokumen	75.000.000,00		2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.13.01.1.01 - Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.13.01.1.01.01 - Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	1 Dokumen	
30.				10 Forum SKPD Provinsi Papua									
					Jumlah Peserta Forum	0,00		2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.13.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	2.13.01.1.04.10 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Forum	0 Orang	
31.				12 Penyusunan RENSTRA									
					Jumlah Dokumen	25.000.000,00		2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.13.01.1.01 - Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.13.01.1.01.01 - Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	
32.				13 Penyusunan SOP									
					Jumlah Dokumen	150.000.000,00		2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.13.01.1.01 - Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.13.01.1.01.04 - Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	
33.				14 Peningkatan Kapasitas PPID									
					Jumlah orang	0,00		2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.13.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	2.13.01.1.04.09 - Pendidikan dan Pelatihan Formal	Pembinaan Administrasi Kepegawaian	15 Orang	
34.		16 Program peningkatan peran serta kepemudaan	Cakupan pengusaha muda asli Papua yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa pemerintah daerah; Jumlah organisasi kepemudaan; Jumlah pemuda yang dilatih dalam kepemimpinan, kepeloporan dan kewirausahaan	1 Pembinaan organisasi kepemudaan									
					Terbinanya organisasi kepemudaan yang mandiri	500.000.000,00	2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	2.19.02.1.02 - Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	2.19.02.1.02.02 - Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi	Jumlah organisasi kepemudaan yang mandiri	50 Organisasi	
35.				2 Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan									
					Terlaksananya pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan bagi pemuda	500.000.000,00	2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	2.19.02.1.02 - Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	2.19.02.1.02.02 - Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi	Jumlah orang yang mengikuti Kapasitas Daya Saing wirausahaan	125 Orang	
36.				3 Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan									
					Jumlah peserta fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan	0,00	2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	2.19.02.1.01 - Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	2.19.02.1.01.06 - Pemberian Penghargaan kepada Pemuda dan Organisasi Pemuda Provinsi yang Berprestasi	Jumlah peserta fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan dalam rangka pemberian penghargaan Pemuda Papua Award	100 Orang	
37.				10 Pertukaran Pemuda antar Negara dan Provinsi									
					Jumlah peserta pertukaran pemuda antar negara dan provinsi	1.750.000.000,00	2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	2.19.02.1.01 - Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	2.19.02.1.01.01 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi	Jumlah peserta pertukaran pemuda antar negara dan provinsi pada pelaksanaan International Papuan Student Meeting Forum	35 Orang	
38.				11 Pembinaan PASKIBRAKA Provinsi dan Nasional									
					Jumlah peserta pembinaan PASKIBRAKA Provinsi dan Nasional	750.000.000,00	2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	2.19.02.1.01 - Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	2.19.02.1.01.04 - Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah peserta pembinaan PASKIBRAKA Provinsi dan Nasional	35 Orang	

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
39.	Kepemudaan dan Olah Raga	16 Program peningkatan peran serta kepemudaan	Cakupan pengusaha muda asli Papua yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa pemerintah daerah; Jumlah organisasi kepemudaan; Jumlah pemuda yang dilatih dalam kepemimpinan, kepeloporan dan kewirausahaan	14 Jambore Pemuda Daerah									
					Jumlah peserta jambore pemuda daerah	0,00	2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	2.19.04.1.01 - Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	2.19.04.1.01.05 - Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Provinsi	Jumlah peserta jambore pemuda daerah 5 wilayah adat	2500 Orang	
40.		17 Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Cakupan pengusaha muda asli Papua yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa pemerintah daerah	1 Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda Menuju PON XX Tahun 2020 di Papua									
					Jumlah peserta pelatihan kewirausahaan pemuda	500.000.000,00	2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	2.19.02.1.01 - Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	2.19.02.1.01.02 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi	Jumlah orang yang mengikuti pelatihan kewirausahaan pemuda menuju PON XX tahun 2021	25 Orang Kegiatan	
					Jumlah peserta pelatihan kewirausahaan bagi pemuda	0,00	2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	2.19.02.1.01 - Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	2.19.02.1.01.02 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi	Jumlah peserta pelatihan kewirausahaan bagi pemuda	0 Orang Kegiatan	
41.				2 Pelatihan keterampilan bagi pemuda									
					Jumlah peserta pelatihan keterampilan bagi pemuda	0,00	2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	2.19.02.1.01 - Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	2.19.02.1.01.02 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi	Jumlah peserta pelatihan keterampilan bagi pemuda	75 Orang	
42.				5 Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Menuju PON XX Tahun 2020 Di Papua									
					Jumlah peserta pengembangan kewirausahaan pemuda	0,00	2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	2.19.02.1.02 - Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	2.19.02.1.02.01 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Jumlah peserta pengembangan wirausaha muda pemula	100 Orang Kegiatan	
43.		19 Porgram Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga	Cakupan monitoring atlet berprestasi ; Jumlah organisasi olahraga yang dibina	1 Peningkatan mutu organisasi dan tenaga keolahragaan									
					Jumlah pengurus organisasi dan tenaga keolahragaan yang mengikuti kegiatan peningkatan mutu	600.000.000,00	2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.19.03.1.04 - Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	2.19.03.1.04.01 - Standardisasi Organisasi Keolahragaan	Jumlah pengurus organisasi dan tenaga keolahragaan yang mengikuti kegiatan peningkatan mutu dan sertifikasi	100 Orang Kegiatan	
44.				3 Pengembangan perencanaan olah raga terpadu									
					Terlaksananya pengembangan perencanaan olahraga terpadu	500.000.000,00	2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.19.03.1.04 - Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	2.19.03.1.04.02 - Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Terlaksananya pengembangan perencanaan olahraga terpadu	48 Organisasi	
45.				5 Pembinaan manajemen organisasi olahraga									
					Terlaksananya pembinaan manajemen organisasi olahraga	500.000.000,00	2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.19.03.1.01 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	2.19.03.1.01.01 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang diselenggarakan oleh masyarakat dan dunia usaha	Terlaksananya pembinaan manajemen organisasi olahraga dalam rangka penyusunan Masterplan pengembangan cabang olahraga unggulan dan berprestasi serta penyusunan Masterplan pembibitan, pengembangan dan pengelolaan PPLP Papua	1 Organisasi	

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
46.	Kepemudaan dan Olah Raga	19 Porgram Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga	Cakupan monitoring atlet berprestasi ; Jumlah organisasi olahraga yang dibina	8 Pendataan dan Pelaporan Keolahragaan dan Kepemudaan									
					Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas	200.000.000,00	2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA	2.19.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	2.19.04.1.01 - Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	2.19.04.1.01.01 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan keolahragaan dan kepemudaan	2 Dokumen	
47.				12 Forum OPD									
					Jumlah peserta Rapat Kerja Teknis (Forum OPD) Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua	1.000.000.000,00	2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA	2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.19.03.1.01 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	2.19.03.1.01.03 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi	Jumlah peserta Rapat Kerja Teknis/Cofee Morning dalam rangka sosialisasi kesiapan pelaksanaan POXX dan PEPARNAS XVI	120 Orang Kegiatan	
48.				20 Try out cabor unggulan daerah bagi siswa PPLP dan atlit diluar PPLP									
					Jumlah peserta studi banding pembinaan olahraga prestasi ke luar provinsi dan ke luar negeri	2.000.000.000,00	2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA	2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.19.03.1.03 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi	2.19.03.1.03.03 - Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi	Jumlah peserta studi banding pembinaan olahraga prestasi ke luar provinsi dan ke luar negeri	150 Orang Lokasi	
49.				21 Atlet Monitoring Sistem (AMS)									
					Jumlah Atlet Monitoring Sistem	500.000.000,00	2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA	2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.19.03.1.03 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi	2.19.03.1.03.02 - Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Atlet Monitoring Sistem	7500 Orang	
					Jumlah Atlet yang termonitor melalui Aplikasi Atlet Monitoring Sistyem	0,00	2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA	2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.19.03.1.03 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi	2.19.03.1.03.05 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah Atlet yang termonitor melalui Aplikasi Atlet Monitoring Sistyem	0 Kegiatan	
50.		20 Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Cakupan atlet yang diseleksi untuk mengikuti berbagai event olahraga nasional maupun internasional	2 Pelaksanaan identifikasi dan pengembangan olahraga unggulan daerah									
					Jumlah atlet berbakat dan potensial usia dini yang teridentifikasi dan dikembangkan prestasinya	1.500.000.000,00	2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA	2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.19.03.1.03 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi	2.19.03.1.03.03 - Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi	Jumlah atlet berbakat dan potensial usia dini yang teridentifikasi dan dikembangkan prestasinya	750 Orang Lokasi	
51.				3 Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat									
					Jumlah atlet usia dini yang berbakat dan potensial yang mendapatkan pembinaan dan pelatihan di PPLP Papua	10.000.000.000,00	2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA	2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.19.03.1.03 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi	2.19.03.1.03.03 - Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi	Jumlah atlet usia dini yang berbakat dan potensial yang mendapatkan pembinaan dan pelatihan di PPLP Papua	150 Orang Hari	
52.				5 Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi									
					Jumlah peserta kegiatan peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi	1.000.000.000,00	2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA	2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.19.03.1.03 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi	2.19.03.1.03.03 - Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi	Jumlah peserta kegiatan peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi	1000 Orang	
53.				6 Penyelenggaraan kompetisi olahraga									
					Jumlah peserta dan event kompetisi yang dilaksanakan	5.000.000.000,00	2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA	2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.19.03.1.02 - Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	2.19.03.1.02.01 - Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi	Jumlah peserta dan event kompetisi yang dilaksanakan	2000 Orang Kegiatan	
54.				9 Pengembangan dan Pemanfaatan IPTEK olahraga sebagai pendorong peningkatan pretasi olahraga									
					Jumlah peserta pengembangan dan pemanfaatan IPTEK olahraga sebagai	500.000.000,00	2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA	2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.19.03.1.03 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi	2.19.03.1.03.05 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah peserta pengembangan dan pemanfaatan IPTEK olahraga	250 Orang Kegiatan	
					Jumlah peserta pengembangan dan pemanfaatan IPTEK Olahraga sebagai pendorong peningkatan prestasi olahraga	0,00	2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA	2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.19.03.1.03 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi	2.19.03.1.03.05 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah peserta pengembangan dan pemanfaatan IPTEK Olahraga sebagai pendorong peningkatan prestasi olahraga	0 Orang Kegiatan	
55.				10 Pengembangan olahraga lanjut usia termasuk penyandang cacat									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Jumlah peserta pengembangan olahraga lanjut usia	1.000.000.000,00	2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLARHAGA	2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.19.03.1.03 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi	2.19.03.1.03.03 - Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi	Jumlah peserta pengembangan olahraga lanjut usia termasuk penyandang cacat	100 Orang Kegiatan	
					jumlah peserta pengembangan olahraga bagi penyandang cacat	0,00	2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLARHAGA	2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.19.03.1.03 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi	2.19.03.1.03.03 - Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi	jumlah peserta pengembangan olahraga bagi penyandang cacat	0 Orang Kegiatan	
56.				14 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat									
					Jumlah peserta pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	1.000.000.000,00						2000 Orang	
57.				22 Pelaksanaan Sosialisasi PON XX 2020									
					Terlaksananya sosialisasi PON XX 2020	1.000.000.000,00	2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLARHAGA	2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.19.03.1.03 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi	2.19.03.1.03.04 - Pemberian Penghargaan Olahraga Provinsi	Terlaksananya sosialisasi PON XX 2020	6000 Orang Lokasi	
58.				24 Peningkatan SDM Industri Olahraga									
					Jumlah peserta peningkatan SDM Industri Olahraga	500.000.000,00	2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLARHAGA	2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.19.03.1.01 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	2.19.03.1.01.01 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang diselenggarakan oleh masyarakat dan dunia usaha	Jumlah peserta peningkatan SDM Industri Olahraga	50 Orang	
59.		21 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Cakupan penyelesaian sarana dan prasarana PON Papua ; Cakupan venue berstandar internasional ; Jumlah gedung olahraga standar internasional yang terbangun; Jumlah lapangan olahraga standar internasional yang terbangun	2 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga									
					Jumlah peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga	15.000.000.000,00	2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLARHAGA	2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.19.03.1.01 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	2.19.03.1.01.03 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi	Jumlah peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga	4 Lokasi	
60.				3 Pemantauan dan evaluasi pembangunan sarana dan prasarana olahraga									
					Jumlah lokasi pembangunan sarana dan prasarana olahraga yang terpantau dan dievaluasi	18.000.000.000,00	2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLARHAGA	2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.19.03.1.01 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	2.19.03.1.01.03 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi	Pemeliharaan dan Perawatan Venue PON XX dan PEPARNAS XVI di Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura, Kab Mimika dan Kab Merauke	4 Orang Lokasi	
61.				4 Pembangunan sarana dan prasarana olahraga penunjang PON XX Tahun 2020									
					Jumlah sarana dan prasarana olahraga penunjang PON XX 2020 yang terbangun	30.000.000.000,00	2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLARHAGA	2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.19.03.1.01 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	2.19.03.1.01.03 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi	Jumlah sarana dan prasarana olahraga penunjang PON XX 2020 yang terbangun	4 Lokasi	
62.				7 Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga									
					Jumlah Venue - Venue PON yang terpelihara	20.000.000.000,00	2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLARHAGA	2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.19.03.1.01 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	2.19.03.1.01.03 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi	Jumlah Venue - Venue PON yang terpelihara	17 Unit	
63.				8 Rehabilitasi dan Renovasi Sarana dan Prasarana olahraga									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Terlaksananya rehabilitasi dan renovasi sarana dan prasarana olahraga	30.000.000.000,00	2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.19.03.1.01 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	2.19.03.1.01.03 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi	Terlaksananya rehabilitasi dan renovasi sarana dan prasarana olahraga	10 Unit	
64.				11 Pengadaan Kelengkapan atlit PPLP Papua									
					Jumlah pengadaan kelengkapan atlet PPLP Papua	0,00	2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.19.03.1.01 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	2.19.03.1.01.03 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi	Jumlah pengadaan kelengkapan atlet PPLP Papua	100100 Set	
65.				12 Pengadaan Peralatan atlit PPLP PPLM									
					Jumah pegadaan peralatan atlet PPLP, PPLM	1.000.000.000,00	2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.19.03.1.03 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi	2.19.03.1.03.03 - Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi	Jumah pegadaan peralatan atlet PPLP, PPLM yang diadakan	100 Orang Paket	
66.				13 Pengadaan kelengkapan dan perlengkapan atlit									
					Jenis kelengkapan dan perlengkapan atlet yang diadakan	1.000.000.000,00	2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.19.03.1.03 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi	2.19.03.1.03.03 - Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi	Jumlah kelengkapan dan perlengkapan atlet yang diadakan	100 Orang Paket	
67.				22 Pembangunan Taman Cirkuit Training									
					Terbangunnya sarana dan prasarana latihan Circuit Training di tempat terbuka	0,00	2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.19.03.1.01 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	2.19.03.1.01.03 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi	Terbangunnya sarana dan prasarana	2 Lokasi	
68.				39 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Latihan dan Pertandingan bagi Atlet dan Pelatih POPWIL, POPNAS, Kejumas, PON Remaja dan PON									
					Tersedianya peralatan dan perlengkapan latihan dan pertandingan bagi atlet dan pelatih POPNAS, Kejumas, PON Remaja, PON XX 2020	15.000.000.000,00	2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.19.03.1.01 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	2.19.03.1.01.03 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi	Tersedianya peralatan dan perlengkapan latihan dan pertandingan bagi atlet dan pelatih POPNAS, Kejumas, PON Remaja, PON XX 2020	250 Orang Paket	
69.				40 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan bagi Atlet PPLP Papua									
					Jumlah pengadaan perlengkapan dan peralatan bagi atlet PPLP	5.000.000.000,00	2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.19.03.1.01 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	2.19.03.1.01.03 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi	Jumlah pengadaan perlengkapan dan peralatan bagi atlet PPLP	150 Orang Paket	
70.				42 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Latihan dan Pertandingan bagi Pelatih dan Atlet Penyandang Cacat									
					Jumlah peralatan dan perlengkapan latihan dan pertandingan bagi atlet penyandang cacat	3.000.000.000,00	2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.19.03.1.03 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi	2.19.03.1.03.03 - Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi	Jumlah peralatan dan perlengkapan latihan dan pertandingan bagi atlet penyandang cacat	20 Orang Paket	
71.				43 Pengadaan Tanah Pembangunan Asrama PPLP Papua									
					tersedianya lahan arama PPLP Papua yang representatif	0,00						0 Lokasi	
72.				66 Pembangunan sarana dan pra sarana olahraga PON XX									
					Terbangunnya sarana dan prasarana olahraga sebagai Penunjang Penyelenggaraan PON XX 2020	50.000.000.000,00	2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.19.03.1.01 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	2.19.03.1.01.03 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi	Terbangunnya sarana dan prasarana olahraga sebagai Penunjang Penyelenggaraan PON XX 2021 Gedung PABBASI Mandala, Wisma Atlit Kampung Harapan dan Wisma Atlit Doyo Baru	3 Lokasi	

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
73.	Kepemudaan dan Olah Raga	21 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Cakupan penyelesaian sarana dan prasarana PON Papua ; Cakupan venue berstandar internasional ; Jumlah gedung olahraga standar internasional yang terbangun; Jumlah lapangan olahraga standar internasional yang terbangun	67 Pembangunan Arena Aquatik									
					Terbangunnya Arena Aquatik sebagai Penunjang Penyelenggaraan PON XX 2020	0,00						0 Unit	
74.				68 Pembangunan Kawasan PPLP									
					Terbangunnya kawasan PPLP	0,00	2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLARHAGA	2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.19.03.1.01 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	2.19.03.1.01.03 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi	Terbangunnya kawasan PPLP	1 Lokasi	
75.				69 Pembangunan Gedung Olahraga STT GIDI di Kabupaten Jayapura									
					Terbangunnya Gedung Olahraga RINDAM sebagai Penunjang Penyelenggaraan PON XX 2020	11.481.058.973,00	2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLARHAGA	2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.19.03.1.02 - Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	2.19.03.1.02.01 - Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi	Jumlah GOR Yang terbangun untuk menunjang Penyelenggaraan PON XX 2021	1 Lokasi	
76.				70 Pembangunan Gedung Olahraga Volley									
					Terbangunnya GOR Volley (Padepokan) sebagai Penunjang Penyelenggaraan PON XX 2020	40.043.463.179,00	2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLARHAGA	2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.19.03.1.02 - Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	2.19.03.1.02.01 - Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi	Jumlah GOR Volley (Padepokan) yang dibangun untuk menunjang Penyelenggaraan PON XX 2021	1 Lokasi	
77.				71 Rehabilitasi Gedung Olahraga Cenderawasih									
					Terlaksananya rehab Gedung Olahraga Cenderawasih	10.000.000.000,00	2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLARHAGA	2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.19.03.1.01 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	2.19.03.1.01.03 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi	Terlaksananya rehab Gedung Olahraga SGO di Kota Jayapura	1 Lokasi	
78.				72 Pembangunan Gedung Olahraga Istora Papua									
					Terbangunnya Istora Papua sebagai Penunjang Penyelenggaraan PON XX 2020	0,00						0 Lokasi	
79.				73 Pembangunan Gedung Olahraga Senam									
					Terbangunnya Gedung Olahraga Senam sebagai Penunjang Penyelenggaraan PON XX 2020	0,00						0 Lokasi	
80.				74 Pembangunan Gedung Olahraga Tinju									
					Terbangunnya GOR Tinju sebagai Penunjang Penyelenggaraan PON XX 2020	0,00						0 Lokasi	
81.				75 Pembangunan Arena Panjat Tebing									
					Terbangunnya Arena Panjat Tebing sebagai Penunjang Penyelenggaraan PON XX 2020	0,00						0 Lokasi	
82.				96 Pembangunan Fasilitas Lapangan Olah Raga Mandala									
					Terbangunnya sarana dan prasarana Olahraga di Stadion Mandala sebagai Penunjang Penyelenggaraan PON XX 2020	0,00						0 Lokasi	

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
83.	Kepemudaan dan Olah Raga	21 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Cakupan penyelesaian sarana dan prasarana PON Papua ; Cakupan venue berstandar internasional ; Jumlah gedung olahraga standar internasional yang terbangun; Jumlah lapangan olahraga standar internasional yang terbangun	100 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Cabang Olahraga PON XX/2020									
					Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan Cabang Olahraga PON XX/2020	0,00						0 Jenis	
84.				101 Studi Identifikasi Peralatan dan Perlengkapan Cabang Olahraga PON XX/2020									
					Terlaksananya studi identifikasi peralatan dan perlengkapan cabang Olahraga PON XX/2020	0,00						0 Dokumen	
85.				102 Pembangunan GOR Otonom									
					Terbangunnya Gedung Olahraga OTONOM sebagai Penunjang Penyelenggaraan PON XX 2020	0,00						0 Lokasi	
86.				103 Pembangunan Asrama PPLP Papua									
					Jumlah Asrama PPLP Ppaua	0,00						0 Unit	
87.				104 Peningkatan sarana dan prasarana olah raga									
					Jumlah Sarana Prasarana Olahraga yang dibangun	0,00						0 Unit	
88.				105 Penyediaan Gudang Peralatan di Kota Jayapura									
					Tersediannya Gudang Peralatan	0,00						0 Lokasi	
89.				106 Pembangunan Gudang Peralatan Olahraga									
					Tersediannya Gudang Peralatan	0,00						0 Unit	
90.				107 Pembangunan Gudang Peralatan di Kampung Harapan Kabupaten Jayapura									
					Tersediannya Gudang Peralatan	0,00						0 Unit	
91.				108 Pengadaan Gudang Peralatan di Kota Jayapura									
					Tersediannya Gudang Peralatan	0,00						0 Unit	
92.				121 Pemeliharaan Stadion Utama Lukas Enembe di Kampung Harapan									
					Terpeliharanya Stadion Utama Lukas Enembe di Kampung Harapan	0,00						0 Bulan	
93.		24 Pengembangan Prasarana PON	Cakupan penyelesaian Stadion utama untuk mendukung penyelenggaraan PON XX	1 Pembangunan Stadion Utama									
					Jumlah stadion	0,00						0 Tempat	
94.		25 Program Penyelenggaraan Kompetisi/Pekan Olahraga/Kejuaraan Olahraga	Frekwensi penyelenggaraan even olahraga persiapan PON XX yang berjalan sukses	1 Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Penyelenggaraan Kompetisi / Pekan Olahraga / Kejuaraan Daerah									
					Terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan kompetisi/pekan olahraga/ kejuaraan olahraga daerah dan nasional	0,00	2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.19.03.1.02 - Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	2.19.03.1.02.03 - Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event	Terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan kompetisi/pekan olahraga/ kejuaraan olahraga daerah dan nasional	5 Orang Kegiatan	
95.				2 Penyelenggaraan Kompetisi/Pekan Olahraga/Kejuaraan di Wilayah Adat									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Jumlah peserta kompetisi/pekan olahraga/kejuaraan di 5 wilayah adat	10.000.000.000,00	2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLARHAGA	2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.19.03.1.02 - Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	2.19.03.1.02.01 - Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi	Jumlah peserta kompetisi/pekan olahraga/kejuaraan di 5 wilayah adat	10000 Orang Kegiatan	
96.				4 Penyelenggaraan POPNAS dan PEPARPENAS									
					Jumlah peserta dalam rangka POPNAS dan PEPARPENAS 2019	0,00						0 Peserta	
					Jumlah event kompetisi yang dilaksanakan dalam rangka POPNAS dan PEPARPENAS	0,00						0 Acara	
					Terselenggaranya POPNAS dan PEPARPENAS	0,00						0 Orang Kegiatan	
97.				5 Penyelenggaraan Test Event PON XX Tahun 2020									
					Jumlah Peserta dalam rangka Test Event PON XX Tahun 2020	0,00						0 Peserta	
					Jumlah Event yang dilaksanakan dalam rangka Test Event PON XX Tahun 2020	0,00						0 Acara	
					Jumlah peserta Test Event PON XX Tahun 2020	0,00						0 Orang Kegiatan	
98.		26 Program Peningkatan Koordinasi dan Sinergitas untuk Penyelenggaraan PON XX/2020	Persentase hasil koordinasi penyelenggaraan PON XX yang ditindaklanjuti	2 Pembinaan dan Peningkatan Mutu SDM Pertandingan Pendukung PON XX/2020									
					Jumlah peserta pembinaan dan peningkatan mutu SDM Pertandingan Penunjang PON XX 2020	0,00						0 Orang	
99.				3 Pembinaan dan Peningkatan Mutu SDM Non Pertandingan Pendukung PON XX/2020									
					Jumlah peserta pembinaan dan peningkatan mutu SDM Non Pertandingan penunjang PON XX/2020	0,00						0 Orang Kegiatan	
100.				4 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Teknis Kesiapan Penyelenggaraan PON XX/2020 di 5 Cluster									
					Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi teknis kesiapan penyelenggaraan PON di 5 cluster	0,00						0 Orang Lokasi	
101.				5 Pelaksanaan Sosialisasi PON XX/2020 di Dalam Provinsi dan Luar Provinsi									
					Jumlah lokasi dan peserta Sosialisasi PON XX/2020 di dalam provinsi dan luar	0,00						0 Lokasi	
102.				6 Fasilitasi dan Advokasi Persiapan Penyelenggaraan PON XX / 2020									
					Terlaksananya fasilitasi dan advokasi persiapan penyelenggaraan PON XX/2020	0,00						0 Orang Bulan	
103.				7 Penyusunan dan Penggandaan Technical Handbook Cabang Olahraga PON XX/2020 dan Bidang-bidang Pendukung PON XX/2020									
					Penyusunan dan penggandaan technical handbook Cabang Olahraga PON XX/2020	0,00						0 Eksemplar	
104.		27 Program Pembangunan dan Pengembangan sarana dan prasarana olahraga yang berstandar nasional dan Internasional	Jumlah venue PON XX yang berstandar internasional	1 Pembangunan GOR Mandala									
					Terlaksananya pembangunan GOR Mandala	0,00						0 Lokasi	
105.				2 Pembangunan Gedung Olahraga (GOR) Otonom									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Terlaksananya pembangunan gedung olahraga (GOR) Otonom	0,00						0 Lokasi	
106.				3 Pembangunan Arena Menembak									
					Terlaksananya pembangunan arena Menembak	18.770.647.459,00	2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.19.03.1.02 - Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	2.19.03.1.02.01 - Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi	Jumlah Lapangan Tembak Yang terbangun untuk menunjang Penyelenggaraan PON XX 2021	1 Lokasi	
107.				5 Pembangunan Lapangan Hockey Indoor dan Outdoor									
					Terbangunnya Lapangan Hockey Indoor dan Outdoor sebagai Penunjang Penyelenggaraan PON XX 2020	0,00						0 Lokasi	
108.				6 Pembangunan Lapangan Sepak Bola Milik Masyarakat Pendukung PON XX / 2020									
					Terbangunnya lapangan sepak bola Milik Masyarakat sebagai Penunjang Penyelenggaraan PON XX 2020	0,00	2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.19.03.1.01 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	2.19.03.1.01.03 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi	Terbangunnya lapangan sepak bola Milik Masyarakat sebagai Penunjang Penyelenggaraan PON XX 2020	7 Lokasi	
109.				7 Sertifikasi Peralatan dan Perlengkapan Olahraga serta Sarana dan Prasarana Olahraga Penunjang PON XX/2020									
					Jumlah peralatan dan perlengkapan olahraga serta sarana dan prasarana olahraga PON XX/2020 yang tersertifikasi	0,00						0 Jenis	
110.				8 Pembangunan Lapangan Tenis									
					Terbangunnya Lapangan Tenis sebagai Penunjang Penyelenggaraan PON XX 2020	33.902.326.962,00	2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.19.03.1.02 - Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	2.19.03.1.02.01 - Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi	Jumlah Lapangan Tenis Yang terbangun untuk menunjang Penyelenggaraan PON XX 2021	1 Lokasi	
111.				9 Pembangunan Lapangan Softball dan Baseball									
					Terbangunnya Softball dan Baseball sebagai Penunjang Penyelenggaraan PON XX 2020	21.932.777.692,00	2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.19.03.1.02 - Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	2.19.03.1.02.01 - Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi	Jumlah Lapangan Softball dan Baseball Yang terbangun untuk menunjang Penyelenggaraan PON XX 2021	1 Lokasi	
112.				12 Pembangunan Lapangan Cricke									
					Jumlah Lapangan cricket yang berstandar Nasional	0,00						0 Lokasi	
113.				15 Pembangunan GOR Bowling									
114.				17 Pembangunan Arena Cabang Olahraga Paralayang									
					Jumlah Arena Paralayang yang dibangun	15.000.000.000,00	2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.19.03.1.01 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	2.19.03.1.01.03 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi	Jumlah Arena Paralayang yang dibangun	1 Unit	
115.				18 Pembangunan Arena Cabang Olahraga Gantole									
					Jumlah Arena Gantole yang dibangun	7.500.000.000,00	2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.19.03.1.01 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	2.19.03.1.01.03 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi	Jumlah Arena Gantole yang dibangun	1 Unit	
116.				19 Pembangunan Lapangan Rugby									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Jumlah Lapangan Rugby yang dibangun	20.000.000.000,00	2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.19.03.1.01 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	2.19.03.1.01.03 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi	Jumlah Lapangan Rugby yang dibangun	1 Unit	
117.				20 Pembangunan Arena Cabang Olahraga Layar									
					Jumlah Arena Layar yang dibangun	15.000.000.000,00	2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.19.03.1.01 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	2.19.03.1.01.03 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi	Jumlah Arena Layar yang dibangun	1 Unit	
118.				21 Pembangunan Arena Selam Laut									
					Jumlah Arena Selam yang dibangun	5.000.000.000,00	2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.19.03.1.01 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	2.19.03.1.01.03 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi	Jumlah Arena Selam yang dibangun	1 Unit	
119.		28 Program mendorong partisipasi dan peran aktif pemuda dalam berbagai bidang pembangunan	Persentase pengarusutamaan pemuda dalam perencanaan pembangunan	1 Pemberdayaan Pemuda Peduli PON XX/2020									
					Jumlah peserta pengembangan dan pemberdayaan pemuda peduli	0,00						0 Orang Kegiatan	
120.				2 Upacara Peringatan Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) dan Hari Sumpah Pemuda Tingkat Provinsi Papua									
					Jumlah peserta upacara peringatan HAORNAS dan Hari Sumpah Pemuda	500.000.000,00	2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	2.19.02.1.01 - Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	2.19.02.1.01.06 - Pemberian Penghargaan kepada Pemuda dan Organisasi Pemuda Provinsi yang Berprestasi	Jumlah pemberian penghargaan kepada mantan atlet berprestasi	10000 Orang	
121.		29 Program Pembinaan Atlet Muda dan Olahraga Prestasi	Persentase atlet muda Pelatda (Pusat Pelatihan Daerah) yang berprestasi nasional	1 Pembinaan dan Peningkatan Prestasi Atlet pada Event POPNAS dan PEPARPENAS									
					Terlaksananya pembinaan dan peningkatan prestasi atlet dalam menghadapi event-event tertentu	0,00	2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.19.03.1.02 - Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	2.19.03.1.02.03 - Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event	Terlaksananya pembinaan dan peningkatan prestasi atlet dalam menghadapi event-event tertentu	300 Orang	
122.				2 Penyelenggaraan Pekan Olahraga Junior Tingkat Provinsi Papua									
					Jumlah peserta Pekan Olahraga Junior Tingkat Provinsi Papua	5.000.000.000,00	2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.19.03.1.02 - Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	2.19.03.1.02.01 - Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi	Jumlah peserta yang mengikuti Pekan Olahraga Junior Tingkat Provinsi Papua	750 Orang Hari	
123.				3 Pembinaan dan Peningkatan Prestasi Atlet melalui TC Jangka Panjang Persiapan PON XX/2020									
					Jumlah peserta pembinaan dan peningkatan prestasi atlet melalui TC Jangka Panjang menuju PON XX/2020	0,00						0 Orang Hari	
124.		30 Program Persiapan Penyelenggaraan PON XX 2020	Persentase persiapan PON XX	1 Pendidikan dan Pelatihan Penggunaan, Perawatan, dan Penyimpanan Peralatan dan Perlengkapan Olahraga PON XX/2020									
					Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan penggunaan, perawatan, dan pemeliharaan serta penyimpanan peralatan dan perlengkapan olahraga	0,00						0 Orang Kegiatan	
125.				2 Pelaksanaan Magang SDM Pengelola Sarana dan Prasarana Olahraga PON XX/2020									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Terlaksananya magang SDM pengelola sarana dan prasarana olahraga PON XX/2020	0,00						0 Orang Lokasi	
126.				3 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Olahraga Penunjang PON XX / 2020									
					Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan olahraga penunjang PON XX/2020	0,00						0 Jenis	
127.				4 Pengembangan dan Peningkatan Mutu SDM Pengelola Peralatan dan Perlengkapan Olahraga Penunjang PON XX 2020									
					Jumlah peserta pengembangan dan peningkatan mutu SDM Pengelola Peralatan Olahraga	0,00						0 Orang Kegiatan	
128.				5 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Olahraga untuk Latihan dan Pertandingan bagi Kontingen Papua menuju PON XX/2020									
					Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan olahraga untuk latihan dan pertandingan Kontingen Papua Menuju PON XX/2020	0,00						0 Jenis	
129.				6 Sosialisasi Logo, Maskot dan Jingle PON XX Tahun 2020									
					Tersedianya Logo dan Mascot PON XX Tahun 2020 yang telah dipatenkan menjadi Hak Cipta Pemerintah Provinsi Papua	0,00						0 Dokumen	
130.				7 Penyiapan Logo, Mascot dan Jingle PEPARNAS XVI Tahun 2020									
					Tersedianya Logo dan Mascot PEPARNAS XVI 2020 yang telah dipatenkan menjadi Hak Cipta Pemerintah Provinsi Papua	0,00						0 Dokumen	
131.				8 Penyediaan Jasa Konsultan Sponsor PON XX Tahun 2020 Papua									
					Terlaksananya Pengadaan Kegiatan Konsultan Sponsor PON XX Tahun 2020 Papua	0,00						0 Kegiatan	
132.				9 Penyediaan Jasa Client Service PON XX Tahun 2020 Papua									
					Jumlah Penyediaan Jasa Client Service PON XX Tahun 2020 Papua	0,00						0 Kelompok	
133.				10 Penyediaan Digital Campaign Sosialisasi PON XX Tahun 2020 Papua									
					Terlaksananya Penyediaan Digital Campaign Sosialisasi PON XX Tahun 2020 Papua	0,00						0 Iklan	
134.				11 Penyediaan Smart Office PON XX Tahun 2020 Papua									
					Tersedianya Smart Office PON XX Tahun 2020	0,00						0 Organisasi	
135.				12 Koordinasi Penyiapan Venues dan Persiapan Penyelenggaraan PON XX									
					Terwujudnya tata laksana Bidang Pertandingan PB.PON XX	0,00						0 Bulan	
136.				13 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Cabang Olahraga PON XX Tahun 2020									
					Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Cabang Olahraga PON XX Tahun 2020 yang diadakan	0,00						0 Alat	

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
137.	Kepemudaan dan Olah Raga	30 Program Persiapan Penyelenggaraan PON XX 2020	Persentase persiapan PON XX	14 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Cabang Olahraga PEPARNAS Tahun 2020									
					Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Cabang Olahraga yang diadakan untuk menunjang PEPARNAS Tahun 2020	0,00						0 Alat	
138.				16 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Cabang Olahraga POPNAS Tahun 2019									
					Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Cabang Olahraga POPNAS Tahun 2019 yang diadakan	0,00						0 Alat	
139.				17 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Cabang Olahraga PEPARPENAS 2019									
					Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Cabang Olahraga PEPARPENAS Tahun 2019 yang diadakan	0,00						0 Alat	
JUMLAH						446.095.024.265,00							

Mengetahui,
Kepala Bappeda Provinsi Papua

YOHANES WALILO, S.Sos, M.Si
NIP. 197007281997121001

JAYAPURA, 20 July 2020
Pit. KEPALA DINAS OLAHRAGA DAN PEMUDA PROVINSI PAPUA

ALEXANDER K.Y. KAPISA, ST
NIP. 19781126 200502 1 002

**REKAPITULASI PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021
SERTA KETERKAITAN DENGAN HASIL PEMETAAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019**

PROVINSI : Papua

PERANGKAT DAERAH : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Kebudayaan	1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	À Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	1 Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang disediakan	150.000.000,00		2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.16.01.1.03 - Administrasi Umum	2.16.01.1.03.01 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang terkirim	1000 Surat	
2.				2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Jasa Layanan berlangganan Listrik, Air, Telepon, Transponder	40.000.000,00		2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.16.01.1.03 - Administrasi Umum	2.16.01.1.03.02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Layanan	12 Layanan	
3.				3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	0,00		2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.16.01.1.03 - Administrasi Umum	2.16.01.1.03.03 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	0 Unit	
4.				7 Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Honor yang terbayarkan	144.000.000,00		2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.16.01.1.03 - Administrasi Umum	2.16.01.1.03.07 - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pegawai yang membuat laporan	4 Orang	
5.				8 Penyediaan jasa kebersihan kantor	Luas Gedung dan Halaman yang disediakan jasa kebersihan	150.766.000,00		2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.16.01.1.03 - Administrasi Umum	2.16.01.1.03.08 - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	jumlah Gedung dan Halaman yang dibersihkan	12 M2	
					Jumlah tenaga kebersihan dan Fasilitas Pendukung kebersihan kantor	0,00		2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.16.01.1.03 - Administrasi Umum	2.16.01.1.03.08 - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah tenaga kebersihan	0 Orang	
					Jumlah Jenis Bahan dan Alat Kebersihan	0,00		2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.16.01.1.03 - Administrasi Umum	2.16.01.1.03.14 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Bahan dan Alat Kebersihan	0 Jenis	
6.				9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	0,00		2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.16.01.1.03 - Administrasi Umum	2.16.01.1.03.09 - Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	0 Unit	
7.				10 Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	200.000.000,00		2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.16.01.1.03 - Administrasi Umum	2.16.01.1.03.10 - Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	12 Jenis	
8.				11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan	0,00		2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.16.01.1.03 - Administrasi Umum	2.16.01.1.03.11 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan	0 Jenis	
					Jumlah penggandaan	0,00		2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.16.01.1.03 - Administrasi Umum	2.16.01.1.03.11 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penggandaan	0 Lembar	
					Jumlah Jenis Barang Cetak dan yang Disediakan	0,00		2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.16.01.1.03 - Administrasi Umum	2.16.01.1.03.11 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0 Jenis	
					Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	50.000.000,00		2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.16.01.1.03 - Administrasi Umum	2.16.01.1.03.11 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	12 Bulan	
9.				15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	200.000.000,00		2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.16.01.1.03 - Administrasi Umum	2.16.01.1.03.15 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	100 Jenis	

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10.	Kebudayaan	1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	À Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	17 Penyediaan makanan dan minuman									
					Pelaksanaan penyediaan makan dan minum	0,00		2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.16.01.1.03 - Administrasi Umum	2.16.01.1.03.17 - Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Porsi makan dan minum kegiatan yang tersedia	0 Kegiatan	
					Pelaksanaan makan minum tamu dan rapat	0,00		2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.16.01.1.03 - Administrasi Umum	2.16.01.1.03.17 - Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Porsi makan dan minum yang tersedia	0 Kali Tahun	
					Pelaksanaan makan minum saat olah raga (hari Jumat)	0,00		2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.16.01.1.03 - Administrasi Umum	2.16.01.1.03.17 - Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Porsi makan dan minum yang tersedia	0 Kali	
					Tersediannya Makanan dan Minuman	218.680.000,00		2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.16.01.1.03 - Administrasi Umum	2.16.01.1.03.17 - Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Porsi makan dan minum yang tersedia	12 Bulan	
					Jumlah orang yang disediakan makan dan minuman	0,00		2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.16.01.1.03 - Administrasi Umum	2.16.01.1.03.17 - Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Porsi makan dan minum yang tersedia	0 Orang	
11.				18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah									
					Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	207.850.000,00		2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.16.01.1.03 - Administrasi Umum	2.16.01.1.03.18 - Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	12 Orang	
12.		2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	À Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	4 Pengadaan mobil jabatan									
					Jumlah mobil yang diadakan	650.000.000,00		2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.16.01.1.03 - Administrasi Umum	2.16.01.1.03.20 - Pengadaan Mobil Jabatan	Jumlah mobil yang diadakan	1 Unit	
13.				7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor									
					Jumlah pengadaan perlengkapan	100.000.000,00		2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.16.01.1.03 - Administrasi Umum	2.16.01.1.03.23 - Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan	72 Unit	
14.				9 Pengadaan peralatan gedung kantor									
					Jumlah peralatan perlengkapan	150.000.000,00		2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.16.01.1.03 - Administrasi Umum	2.16.01.1.03.25 - Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan/perlengkapan yang diadakan	316 Unit	
15.				10 Pengadaan mebeleur									
					Jumlah mebeleur yang diadakan	150.000.000,00		2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.16.01.1.03 - Administrasi Umum	2.16.01.1.03.26 - Pengadaan Mebeleur	Jumlah mebeleur yang diadakan untuk 3 UPT	256 Unit	
16.				20 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan									
					Jumlah rumah jabatan yg terpelihara	160.000.000,00		2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.16.01.1.03 - Administrasi Umum	2.16.01.1.03.37 - Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan	Jumlah rumah jabatan yg terpelihara	1 Unit Tahun	
17.				22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor									
					Jumlah gedung kantor yang dipelihara	100.000.000,00		2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.16.01.1.03 - Administrasi Umum	2.16.01.1.03.29 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor	3 Unit	
					belanja sewa	100.000.000,00		2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.16.01.1.03 - Administrasi Umum	2.16.01.1.03.29 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung yang disewa	3 Tahun	
18.				24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional									
					Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	0,00		2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.16.01.1.03 - Administrasi Umum	2.16.01.1.03.31 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah dan Jenis perlengkapan/peralatan gedung kantor yang dipelihara	0 Unit	
					Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	160.000.000,00		2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.16.01.1.03 - Administrasi Umum	2.16.01.1.03.31 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang	11 Unit	
					sewa kendaraan	0,00		2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.16.01.1.03 - Administrasi Umum	2.16.01.1.03.31 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan yang diperbaiki/Service	0 Bulan	
19.				26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Pelaksanaan pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	0,00		2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.16.01.1.03 - Administrasi Umum	2.16.01.1.03.27 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Jumlah Rumah Jabatan	0 Kegiatan	
					Jumlah Perlengkapan Gedung kantor yang terpelihara	50.000.000,00		2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.16.01.1.03 - Administrasi Umum	2.16.01.1.03.33 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung kantor yang dipelihara	40 Unit	
					Tersediannya biaya pemeliharaan gedung kantor	0,00		2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.16.01.1.03 - Administrasi Umum	2.16.01.1.03.39 - Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor	0 Bulan	
20.		3 Program peningkatan disiplin aparatur	À Meningkatnya disiplin aparatur	2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya									
					Jumlah pakaian dinas yang diadakan	100.000.000,00		2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.16.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	2.16.01.1.04.02 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas sipil harian	119 Stell	
21.				3 Pengadaan pakaian kerja lapangan									
					Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan	0,00		2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.16.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	2.16.01.1.04.03 - Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan	0 Stell	
22.				4 Pengadaan pakaian KORPRI									
					jumlah pakaian KORPRI yang diadakan	100.000.000,00		2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.16.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	2.16.01.1.04.04 - Pengadaan Pakaian Korpri	Jumlah pakaian KORPRI yang diadakan	119 Stell	
23.				5 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu									
					Jumlah pakaian khusus yang diadakan	100.000.000,00		2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.16.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	2.16.01.1.04.05 - Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah pakaian Batik yang diadakan	82 Stell	
24.		5 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	À Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	1 Pendidikan dan pelatihan formal									
					Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	50.000.000,00		2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.16.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	2.16.01.1.04.09 - Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparatur mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	5 Orang	
25.				2 Sosialisasi peraturan perundang-undangan									
					Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	100.000.000,00		2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.16.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	2.16.01.1.04.10 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	10 Orang	
26.				3 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan									
					Jumlah peserta bimbingan teknis tentang implementasi peraturan perundang-undangan	150.000.000,00		2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.16.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	2.16.01.1.04.11 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta bimbingan teknis tentang implementasi peraturan perundang-undangan	119 Orang	
27.		6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	À Meningkatnya kualitas akuntabilitas OPD	1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD									
					Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	100.000.000,00		2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.16.01.1.02 - Administrasi Keuangan	2.16.01.1.02.06 - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan	4 Laporan	
					Laporan LAKIP SKPD	0,00		2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.16.01.1.01 - Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.16.01.1.01.05 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan LAKIP SKPD	0 Dokumen	
28.				2 Penyusunan laporan keuangan semesteran									
					Jumlah pelaporan keuangan semesteran yang diselesaikan tepat waktu	95.000.000,00		2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.16.01.1.02 - Administrasi Keuangan	2.16.01.1.02.07 - Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Jumlah dokumen laporan	6 Laporan	
29.				3 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran									
					Jumlah pelaporan prognosis realisasi anggaran yang diselesaikan tepat waktu	101.500.000,00		2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.16.01.1.02 - Administrasi Keuangan	2.16.01.1.02.08 - Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah pelaporan prognosis realisasi anggaran yang diselesaikan tepat waktu	12 Laporan	

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30.	Kebudayaan	6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	A Meningkatnya kualitas akuntabilitas OPD	4 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun									
					Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	100.000.000,00		2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.16.01.1.02 - Administrasi Keuangan	2.16.01.1.02.09 - Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	10 Laporan	
31.				5 Penyusunan Renja, RKA dan Perubahan APBD									
					Jumlah dokumen	105.000.000,00		2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.16.01.1.01 - Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.16.01.1.01.01 - Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	3 Dokumen	
32.				10 Forum SKPD Provinsi Papua									
					Jumlah Peserta Forum	736.000.000,00		2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.16.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	2.16.01.1.04.10 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Forum	100 Orang	
33.				12 Penyusunan RENSTRA									
					Jumlah Dokumen	95.000.000,00		2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.16.01.1.01 - Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.16.01.1.01.01 - Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	
34.				13 Penyusunan SOP									
					Jumlah Dokumen	75.000.000,00		2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.16.01.1.01 - Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.16.01.1.01.04 - Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	6 Dokumen	
35.		16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Cakupan Cagar budaya yang ditetapkan; Cakupan budaya tak benda yang ditetapkan; Cakupan kelompok seni dan budaya asli Papua yang dibina ; Frekwensi Festival Kebudayaan Malanesia yang berstandar internasional; Frekwensi pertunjukan, festival, lomba karya seni budaya, pameran dan perfilman yang berstandar nasional; Lembaga Pengelola kekayaan budaya	1 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya									
					Jumlah Kegiatan Fasilitasi Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya	200.000.000,00						100 Kegiatan	
					Jumlah Kelompok Masyarakat yang difasilitasi dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya	0,00						0 Kelompok	
36.				4 Penyuluhan Nilai-Nilai Budaya									
					Jumlah Masyarakat yang memahami nilai budaya	200.000.000,00					Jumlah Masyarakat yang memahami nilai budaya	1 Kegiatan	
37.				6 Monitoring dan Pemeliharaan Cagar Budaya, Pemilihan Direktori Lembaga Budaya di 5 Wilayah Adat									
					Jumlah Situs Cagar Budaya yang dipelihara	300.000.000,00						5 Kegiatan	
38.				9 Penataan Koleksi Karya Seni Rumah Taman Budaya Papua									
					Jumlah Penataan Koleksi Karya Seni Rumah Taman Budaya	0,00						0 Kegiatan	
39.				23 Pembuatan Pagar Situs Dinas Kebudayaan									
					Terpeliharanya Peninggalan Sejarah yang ada di situs situs	200.000.000,00						28 Unit	
40.				24 Pembuatan MCK Situs Mackatur									
					Adanya Pelayanan yang baik	200.000.000,00						1 Unit	
41.				25 Survey Potensi Sejarah Dan Peninggalan Bawah Air									
					Jumlah Situs Sejarah dan Peninggalan Bawah Air	200.000.000,00						1 Laporan	

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
42.	Kebudayaan	16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Cakupan Cagar budaya yang ditetapkan; Cakupan budaya tak benda yang ditetapkan; Cakupan kelompok seni dan budaya asli Papua yang dibina ; Frekwensi Festival Kebudayaan Malanesia yang berstandar internasional; Frekwensi pergelaran, festival, lomba karya seni budaya, pameran dan perfilman yang berstandar nasional; Lembaga Pengelola kekayaan budaya	26 Inventarisasi Cagar Budaya Papua									
					Jumlah Cagar Budaya Di Papua	300.000.000,00						5 M2	
43.				28 Survey Potensi Cagar Budaya di 29 Kabupaten/Kota									
					Jumlah Data yang Tersedia	400.000.000,00						2 Data	
44.				29 Pemeliharaan Koleksi Museum Negeri Papua									
					Jumlah Situs yang di rawat	150.000.000,00						1 Jenis	
45.				30 Pemeliharaan situs Cagar Budaya									
					Jumlah Situs Cagar Budaya	0,00						0 Jenis	
46.				31 Perawatan dan Pemeliharaan Koleksi Museum di TMII Jakarta.									
					Jumlah jenis koleksi museum di TMII yang dipelihara	0,00						0 Jenis	
47.				32 Supervisi dan Pengadaan Koleksi Benda Budaya Museum Negeri Papua									
					Jumlah koleksi benda budaya yang diadakan	0,00						0 Jenis	
48.				33 Pelatihan Seni di Taman Budaya									
					Jumlah pelatihan kegiatan kesenian yang dilakukan	0,00						0 Kali Tahun	
49.				34 Pembuatan Audiovisual Tokoh Pahlawan Nasional asal Papua									
					Jumlah dokumentasi audiovisual yang dibuat	0,00						0 Dokumen	
50.		17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya		1 Festival Seni Kreasi Papua									
					Jumlah Peserta yang mengikuti Festival Seni Kreasi Papua	700.000.000,00	2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	2.22.03.1.01 - Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.22.03.1.01.01 - Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Peserta yang mengikuti Festival Seni Kreasi Papua	800 Orang	
					Jumlah Keikutsertaan Kabupaten/Kota pada Kegiatan Festival Seni Kreasi Papua	0,00	2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	2.22.03.1.01 - Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.22.03.1.01.01 - Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Keikutsertaan Kabupaten/Kota pada Kegiatan Festival Seni Kreasi Papua	29 Kabupaten	
51.				2 Pesta Budaya Papua									
					Jumlah Peserta yang mengikuti Pesta Budaya	700.000.000,00						Jumlah Peserta yang mengikuti Pesta Budaya	29 Kabupaten
					Jumlah Peserta yang mengikuti Kegiatan Pesta Budaya	0,00						Jumlah Peserta yang mengikuti Kegiatan Pesta Budaya	29 Orang
52.				3 Lomba Seni Anak, Remaja dan Lomba Cerita Rakyat Tingkat Anak dan Remaja di 5 Wilayah Adat									
					Jumlah Peserta yang mengikuti Lomba Seni Anak, Remaja dan Lomba Cerita Rakyat Tingkat Anak dan Remaja di 5 Wilayah Adat	600.000.000,00	2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.22.02.1.01 - Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	2.22.02.1.01.02 - Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta yang mengikuti Lomba Seni Anak, Remaja dan Lomba Cerita Rakyat Tingkat Anak dan Remaja di 5 Wilayah Adat	29 Kabupaten	

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
53.	Kebudayaan	17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya		4 Temu Karya Seni Daerah, Pergelaran dan Pameran Seni Kreasi Baru Daerah Papua (Taman Budaya)									
					Jumlah Kegiatan Temu Karya Seni Daerah, Pegelaran dan Pameran Seni Kreasi Baru Daerah (Taman Budaya)	300.000.000,00					Jumlah Kegiatan Temu Karya Seni Daerah, Pegelaran dan Pameran Seni Kreasi Baru Daerah (Taman Budaya)	1 Kegiatan	
					Jumlah Kelompok Peserta yang mengikuti Temu Karya Seni Daerah, Pegelaran Seni Kreasi Baru Daerah Papua	0,00					Jumlah Kelompok Peserta yang mengikuti Temu Karya Seni Daerah, Pegelaran Seni Kreasi Baru Daerah Papua	29 Kelompok	
54.				5 Prametting Kegiatan Pesta Budaya									
					Jumlah Peserta Kabupaten/ Kota yang terlibat pada Prameeting Kegiatan Pesta Budaya Ke	700.000.000,00					Jumlah Peserta Kabupaten/ Kota yang terlibat pada Prameeting Kegiatan Pesta Budaya Ke	29 Kabupaten	
55.				7 Peningkatan Kompetensi Pengelola Cagar Budaya Papua									
					Jumlah Pengolah Cagar Budaya yang ditingkatkan kompetensinya	400.000.000,00	2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	2.22.05.1.01 - Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	2.22.05.1.01.05 - Peningkatan Mutu dan Kapasitas Tenaga Cagar Budaya	Jumlah Pengolah Cagar Budaya yang ditingkatkan kompetensinya	28 Orang	
56.				8 Temu Taman Budaya Tingkat Nasional									
					Jumlah Peserta yang mengikuti Temu Taman Budaya Tingkat Nasional	300.000.000,00					Jumlah Peserta yang mengikuti Temu Taman Budaya Tingkat Nasional	23 Orang	
57.		18 Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya	Jumlah kerjasama dengan pihak potensial dalam pengembangan seni dan budaya Papua	1 Fasilitasi Pengembangan kemitraan dengan LSM dan perusahaan swasta									
58.				2 Gita Bahana Nusantara di 5 Wilayah Adat									
					Jumlah Peserta Kabupaten Kota yang ikut kegiatan Gina Bahana Nusantara	400.000.000,00						29 Kabupaten	
					Jumlah Peserta yang mengikuti Audisi Gita Bahana Nusantara	0,00						0 Orang	
59.				3 Membangun Kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah									
					Jumlah Kegiatan membangun kemitraan Pengelolaan Kebudayaan Antar Daerah Papua	350.000.000,00						10 Kegiatan	
60.				4 Monitoring, evaluasi dan pelaporan									
					Jumlah kegiatan Monev dan pelaporan yang dilakukan	250.000.000,00						5 Kegiatan	
61.				8 Pelatihan Tata Panggung di UPTD Taman Budaya									
					Jumlah orang Pelatihan Tata Panggung di UPTD Taman Budaya	250.000.000,00						15 Orang	
62.				9 Kajian Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Papua									
63.				10 Publikasi Materi Kebudayaan Papua									
64.				11 Studi Banding Kebudayaan									
65.				12 Pembentukan Kampung Budaya									
66.				13 Pemberian Penghargaan Kepada Pelaku Budaya dan Seni Daerah Papua									
67.				14 Serasehan Tata Kelola Lembaga Adat									
68.				15 Publikasi Materi Kebudayaan Papua pada Fasilitas Umum Milik Pemerintah, Swasta dan Perorangan									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
69.	Kebudayaan	18 Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya	Jumlah kerjasama dengan pihak potensial dalam pengembangan seni dan budaya Papua	16 Pengadaan Perlengkapan Studio Rekaman Dinas Kebudayaan Provinsi Papua									
70.				17 Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Bidang Budaya OAP Bendawi dan Non Bendawi									
					Jumlah Peraturan Gubernur yang di Buat	500.000.000,00						1 Dokumen	
71.				18 Duta Budaya Papua ke Belanda dalam Rangka Penataan Sejarah Budaya Orang Asli Papua (OAP)									
					Jumlah Peserta yang mengikuti kegiatan Duta Kebudayaan Ke Belanda	700.000.000,00						10 Orang	
72.				19 Forum OPD Bidang Kebudayaan se Provinsi Papua									
					Jumlah Peserta yang mengikuti Forum OPD Bidang Kebudayaan Se Provinsi Papua	600.000.000,00						65 Orang	
73.				20 Membangun Kemitraan Pengelolaan Kebudayaan antar Daerah									
					Jumlah tenaga Pengelola	0,00						0 Orang	
74.				21 Inventarisasi dan Dokumentasi Lembaga Seni dan Budaya di Papua									
					Jumlah Buku Cetakan	0,00						0 Buku	
75.				22 Penyuluhan Bidang Lembaga Seni dan Budaya Papua									
					Jumlah Peserta Penyuluhan	0,00						0 Orang	
76.				23 Penguatan Kapasitas Pelaku Seni dan Budaya									
					Jumlah Peserta Kreasi Pngiat Seni dan Budaya	0,00						0 Orang	
77.				24 Lawatan Bagi Pegiat Seni dan Budaya Manado dan Melanesia									
					Jumlah Peserta yang dilatih	0,00						0 Orang	
78.		34 Program Pengembangan Nilai-Nilai Budaya		1 Pameran Keliling Museum									
79.				2 Penyuluhan Nilai-Nilai Budaya Bagi Masyarakat, Adat, Remaja, Pemuda dan Temu Wicara Budaya Papua Tk.Nasional									
80.				3 Pameran Alat Musik dan Kain Tenun Tingkat Nasional									
81.				4 Pameran Khusus Koleksi Museum									
82.				5 Kajian Pengembangan Kurikulum Bahasa Ibu di 5 Wilayah Adat									
83.				6 Peningkatan Kompetensi Guru Kesenian, Guru Muatan Lokal/Kir Taman Budaya									
84.				7 Pengadaan dan Distribusi Buku dan RPP/Silabus Nopken Sebagai Muatan Lokal ke SMA dan SMK									
85.				8 Pengadaan Alat Musik Bes SMA/SMK di 18 Sekolah									
86.				9 Desain Tata Busana Pakain Daerah di 5 Wilayah Adat									
87.				10 Lomba Tata Busana Pakain Daerah di 5 Wilayah Adat									
88.				11 Pertemuan Teknis Temu Taman Budaya Se-Indonesia									
89.				12 Evaluasi dan Pelestarian Noken Sebagai Warisan Dunia									
90.				13 Pengembangan, Perawatan dan Perbaikan Lab. Budaya Papua									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
91.	Kebudayaan	34 Program Pengembangan Nilai-Nilai Budaya		14 Pengembangan Aplikasi Data Khusus Kebudayaan									
92.				15 Pelatihan Audiovisual bagi Pelajar									
					Jumlah Peserta yang di latih	0,00						0 Orang	
93.				16 Pelatihan Bagi Juru Pelihara Situs dan Museum									
					Jumlah Peserta Pelatihan	300.000.000,00						30 Orang	
94.				17 Pembuatan Audiovisual Tokoh Pahlwan Nasional Asal Papua									
					Jumlah Dokumentasi	250.000.000,00						1 Film/Video	
95.		41 Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Cakupan partisipasi Papua dalam festival seni dan budaya tingkat nasional maupun internasional; Jumlah Pengelolaan Keragaman Budaya ; Lembaga Pengelola kekayaan budaya	1 Festival Seni Kreasi Papua									
					Jumlah kreasi baru kesenian papua yang dihasilkan	700.000.000,00						800 Jenis	
96.				2 Pesta Budaya Papua									
					Jumlah Pegiat budaya yang mengikuti Pesta budaya	700.000.000,00						29 Kelompok	
97.				3 Lomba Seni Anak, Remaja dan Lomba Cerita Rakyat Tk. Anak dan Remaja di 5 Wilayah Adat									
98.				4 Temu Karya Seni Daerah Papua (Taman Budaya)									
99.				5 Prametiting Kegiatan Pesta Budaya									
100.				6 Penulisan dan Percetakan Kamus Bahasa Daerah-Indonesia									
101.				7 Peningkatan Kompetensi Pengelola Cagar Budaya Papua									
102.				8 Temu Taman Budaya Tingkat Nasional									
103.				9 Lomba Cerita Rakyat Tingkat Anak dan Remaja									
104.				10 Pembuatan Film Dokumenter Kebudayaan Papua									
					Jumlah Film Dokumenter yang dibuat	100.000.000,00						2 Bh	
105.				11 Pelatihan Personal Group Ben Sekolah di 18 Sekolah dan 4 Kab. Penyelenggara PON									
					Jumlah Peserta yang terlibat dalam Pelatihan Band Sekolah di 4 Kabupaten pelaksana Pon 2020	0,00						0 Peserta	
106.				12 Festival Seni Tingkat Nasional									
					Jumlah Peserta yang terlibat dalam Festival Seni Tingkat Nasional	600.000.000,00						30 Orang	
107.				13 Pelatihan Kesenian di Kampung									
					Jumlah Seniman yang terlibat dalam kegiatan Pelatihan Kesenian di Kampung	300.000.000,00						50 Orang	
108.				14 Pameran Seni Rupa Tingkat Provinsi Papua									
					Jumlah Siswa SLTA yang mengikuti Festival Teater tingkat SLTA se Provinsi Papua	500.000.000,00						500 Orang	
109.				15 Festival Budaya Saireri									
					Jumlah seniman dari Provinsi yang terlibat dalam kegiatan Festival Saereri (Munara Wampasi)	300.000.000,00						500 Orang	

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
110.	Kebudayaan	41 Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Cakupan partisipasi Papua dalam festival seni dan budaya tingkat nasional maupun internasional; Jumlah Pengelolaan Keragaman Budaya ; Lembaga Pengelola kekayaan budaya	16 Inventarisasi dan Penulisan Noken Papua									
111.				17 Pergelaran dan Pameran Seni Kreasi baru daerah Pap								29 Kabupaten	
					Jumlah Peserta yang terlibat dalam Pameran Seni Kreasi Baru Papua	500.000.000,00							
112.				18 Dokumentasi materi kesenian bidang tari dan musik									
					Jumlah Dokumen materi Kesenian Bidang Tari dan Musik yang dibuat	300.000.000,00						100 Dokumen	
113.				19 Parade musik daerah Papua									
					Jumlah Peserta yang terlibat dalam Parade Musik Daerah Papua	350.000.000,00						10 Group	
114.				20 Pameran seni rupa nasional									
					Jumlah Peserta yang terlibat pada Kegiatan Pameran Seni Rupa Tingkat Nasional	400.000.000,00						15 Orang	
115.				21 Duta Seni Daerah Papua									
					Jumlah Orang yang terlibat dalam Kegiatan Duta Seni Daerah Papua	500.000.000,00						20 Orang	
116.				22 Penyuluhan bahasa dan sastra daerah bagi masy adat									
					Jumlah orang yang mengikuti kegiatan Penyuluhan Bahasa dan Sastra Daerah Bagi Masyarakat Adat	300.000.000,00						70 Orang	
117.	Pariwisata	15 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan PON yang terlayani	5 Pemilihan Putera Puteri Pariwisata Papua									
					Jumlah peserta pemilihan putra putri pariwisata Papua	400.000.000,00					Jumlah peserta pemilihan putra putri pariwisata Papua	30 Orang	
118.				10 Dukungan dan Penguatan Pada Festival Wisata Daerah									
					Jumlah kabupaten/ kota yang memperoleh dukungan dan penguatan	500.000.000,00						5 Kabupaten	
119.				14 Workshop Pengembangan Produk dan pemasaran									
					Jumlah peserta workshop pengembangan produk dan pemasaran	0,00						0 Orang	
120.				27 Pengadaan Bahan Promosi									
					Jumlah bahan promosi yang diadakan	0,00						0 Lembar	
121.				41 Pembangunan Pagar Hotel Mapia									
					Luas pagar hotel Mapia yang dibangun	0,00						0 M2	
					Panjang Keliling Pagar yang dibangun	0,00						0 Meter	
122.				50 Pemilihan Duta Wisata Indonesia									
					Jumlah peserta pemilihan duta wisata Indonesia	250.000.000,00						2 Orang	
123.				54 Pelaksanaan promosi pariwisata daerah dalam dan luar negeri									
					Terlaksananya promosi pariwisata daerah dalam dan luar negeri	850.000.000,00						1 Kegiatan	
124.				56 Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran objek pariwisata									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Tersusunnya analisa pasar untuk promosi dan pemasaran objek wisata	0,00						0 Dokumen	
125.				57 Survey dan data penyusunan data analisa pasar									
					Jumlah Data analisa pasar	250.000.000,00						1 Dokumen	
126.				58 TOT Analisa Pasar Wisata									
					Jumlah orang yang mengikuti TOT analisa pasar	250.000.000,00						10 Orang	
127.				59 Renovasi Hotel Numbay dan Mapia									
					Luas Bangunan yang direnovasi	1.000.000.000,00						4800 M2	
128.				60 Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Promosi Wisata									
					Jumlah media teknologi informasi yang dimanfaatkan	0,00						0 Media	
129.		16 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Destinasi wisata unggulan yang berkembang; Kawasan wisata yang berstandar internasional	5 Pelatihan pengelolaan akomodasi									
					Jumlah peserta pelatihan pengelolaan akomodasi	0,00						0 Orang	
130.				6 Pelatihan pramuwisata selam									
131.				7 Penyuluhan dan penguatan kelompok sadar wisata									
					Jumlah peserta penyuluhan dan penguatan kelompok sadar wisata	600.000.000,00						50 Orang	
132.				15 Pembangunan Kawasan Wisata (Tourism Resort)									
					Jumlah daerah tujuan wisata yang dikembangkan di 5 wilayah adat	0,00						0 Kabupaten	
133.				74 pengembangan objek pariwisata unggulan									
					Jumlah Sarana Obyek Wisata yang dikembangkan	1.000.000.000,00						2 Unit	
134.				75 peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata									
					Meningkatnya pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	1.000.000.000,00						2 Lokasi	
135.				76 pengembangan daerah tujuan wisata									
					Berkembangnya jumlah daerah tujuan wisata	0,00						0 Lokasi	
					Jumlah daerah tujuan wisata Kab/Kota yang dikembangkan	0,00						0 Kabupaten	
136.				79 Pengembangan daerah tujuan wisata									
					Jumlah Daerah tujuan wisata yang dikembangkan	550.000.000,00	3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.26.02.1.01 - Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	3.26.02.1.01.03 - Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Jumlah Daerah tujuan wisata yang dikembangkan	1 Lokasi	
137.				81 Penataan Daya Tarik Wisata dan Amenitas Pariwisata (DAK)									
					Jumlah lokasi tempat wisata yang tertata	5.000.000.000,00						5 Lokasi	
138.				82 Pelatihan Pengelola Daya Tarik Wisata (DTW)									
					Jumlah peserta pelatihan	500.000.000,00						40 Orang	
139.				83 Pengembangan dan Penataan Kampung Wisata									
					Jumlah Kampung yang dikembangkan	1.000.000.000,00						1 Kampung	
140.				84 Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) dan Perdasi tentang Kepariwisata									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Jumlah Dokumen RIPPDA dan Perdasi Kepariwisataaan yang disusun	2.000.000.000,00						2 Dokumen	
141.		17 Program Pengembangan Kemitraan	Cakupan mitra pelaku usaha wisata dan ekonomi kreatif	3 Pelatihan ekonomi kreatif									
					Jumlah peserta pelatihan ekonomi kreatif	300.000.000,00						30 Orang	
142.				4 Pelatihan desain batik									
					Jumlah peserta pelatihan desain batik	300.000.000,00						30 Orang	
143.				27 Pelatihan Seni Kerajinan Tangan (anyam noken, gerabah, ukir)									
					Jumlah peserta pelatihan seni kerajinan tangan	300.000.000,00						30 Orang	
144.				31 Pengadaan Ruang Kreatif									
					Jumlah ruang kreatif yang diadakan	500.000.000,00						1 Unit	
145.				38 Pelatihan Seni Kerajinan Ukiran									
					Jumlah peserta pelatihan seni kerajinan ukiran	0,00						0 Orang	
146.				40 Pelatihan media kreatif (fotografi dan animasi)									
					Jumlah orang yang mengikuti pelatihan media kreatif	350.000.000,00						30 Orang	
147.				41 Pameran pekan budaya dan seni kreatif									
					jumlah peserta yang mengikuti pekan budaya dan seni kreatif	500.000.000,00						10 Peserta	
148.				42 Pengadaan Peralatan Ruang Kreatif									
					Jumlah alat ruang kreatif yang diadakan	100.000.000,00						50 Buah	
149.		19 program pengembangan kapasitas	Cakupan pelaku usaha wisata yang dibina; Tingkat partisipasi Papua dalam promosi pariwisata di tingkat regional dan internasional	1 Road show kepariwisataan Papua									
					jumlah orang yang mengikuti show	400.000.000,00						15 Orang	
					10	0,00						0 Orang	
150.				2 workshop mitra usaha pariwisata									
					jumlah orang yang mengikuti workshop	300.000.000,00						60 Orang	
151.				3 Pelatihan sertifikasi SDM bagi Karyawan hotel dan restoran									
					Jumlah orang yang mengikuti pelatihan sertifikasi	300.000.000,00						30 Orang	
152.				4 Pelatihan SDM bagi pemandu pariwisata									
					jumlah pemandu wisata yang mengikuti pelatihan	400.000.000,00	3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	3.26.05.1.01 - Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	3.26.05.1.01.03 - Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (Tour Guide) Tingkat Lanjutan	jumlah pemandu wisata yang mengikuti pelatihan	30 Orang	
153.				5 Pelatihan pengembangan SDM kepariwisataan									
					Jumlah orang yang mengikuti pelatihan pengembangan SDM	300.000.000,00						30 Orang	
JUMLAH						50.338.796.000,00							

Mengetahui,
Kepala Bappeda Provinsi Papua

YOHANES WALILO, S.Sos, M.Si
NIP. 197007281997121001

JAYAPURA, 20 July 2020
KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI
PAPUA

YIMIN WEYA, S.Pd.,M.AP
NIP. 19720327 199711 1 001

**REKAPITULASI PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021
SERTA KETERKAITAN DENGAN HASIL PEMETAAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019**

PROVINSI : Papua

PERANGKAT DAERAH : Dinas Kelautan dan Perikanan

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Kelautan dan Perikanan	1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	À Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	1 Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang disediakan	50.000.000,00		3.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.01.01.1.03 - Administrasi Umum	3.01.01.1.03.01 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang terkirim	650 Surat	
2.				2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Jasa Layanan berlangganan Listrik, Air, Telepon, Transponder	400.000.000,00		3.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.01.01.1.03 - Administrasi Umum	3.01.01.1.03.02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Layanan	12 Layanan	
3.				3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	210.000.000,00		3.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.01.01.1.03 - Administrasi Umum	3.01.01.1.03.03 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	10 Unit	
4.				6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Unit Mobil Dinas/Operasional yang terpelihara dan Terfasilitasi Perijinannya	575.000.000,00		3.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.01.01.1.03 - Administrasi Umum	3.01.01.1.03.06 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Unit Mobil Dinas/Operasional yang diservis dan dipelihara	56 Unit	
5.				8 Penyediaan jasa kebersihan kantor	Luas Gedung dan Halaman yang disediakan jasa kebersihan	225.000.000,00		3.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.01.01.1.03 - Administrasi Umum	3.01.01.1.03.08 - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	jumlah Gedung dan Halaman yang dibersihkan	3000 M2	
					Jumlah tenaga kebersihan dan Fasilitas Pendukung kebersihan kantor	0,00		3.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.01.01.1.03 - Administrasi Umum	3.01.01.1.03.08 - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah tenaga kebersihan	0 Orang	
					Jumlah Jenis Bahan dan Alat Kebersihan	0,00		3.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.01.01.1.03 - Administrasi Umum	3.01.01.1.03.14 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Bahan dan Alat Kebersihan	0 Jenis	
6.				9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	75.000.000,00		3.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.01.01.1.03 - Administrasi Umum	3.01.01.1.03.09 - Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	20 Unit	
7.				10 Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	175.000.000,00		3.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.01.01.1.03 - Administrasi Umum	3.01.01.1.03.10 - Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	80 Jenis	
8.				11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan	50.000.000,00		3.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.01.01.1.03 - Administrasi Umum	3.01.01.1.03.11 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan	25 Jenis	
					Jumlah penggandaan	0,00		3.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.01.01.1.03 - Administrasi Umum	3.01.01.1.03.11 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penggandaan	0 Lembar	
					Jumlah Jenis Barang Cetak dan yang Disediakan	0,00		3.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.01.01.1.03 - Administrasi Umum	3.01.01.1.03.11 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0 Jenis	
					Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	0,00		3.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.01.01.1.03 - Administrasi Umum	3.01.01.1.03.11 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	0 Bulan	
9.				12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Jumlah Komponen Listrik yang disediakan	65.000.000,00		3.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.01.01.1.03 - Administrasi Umum	3.01.01.1.03.12 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen alat pemeliharaan listrik dan genset yang disediakan	30 Buah	
10.				13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor									
					Jumlah peralatan dan Perlengkapan	200.000.000,00		3.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.01.01.1.03 - Administrasi Umum	3.01.01.1.03.25 - Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan peralatan kantor yang disediakan	12 Unit	
11.				15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan									
					Jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	65.000.000,00		3.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.01.01.1.03 - Administrasi Umum	3.01.01.1.03.15 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	50 Jenis	
12.				17 Penyediaan makanan dan minuman									
					Pelaksanaan penyediaan makan dan minum	65.000.000,00		3.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.01.01.1.03 - Administrasi Umum	3.01.01.1.03.17 - Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Porsi makan dan minum kegiatan yang tersedia	12 Kegiatan	
					Pelaksanaan makan minum tamu dan rapat	30.000.000,00		3.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.01.01.1.03 - Administrasi Umum	3.01.01.1.03.17 - Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Porsi makan dan minum yang tersedia	20 Kali Tahun	
					Pelaksanaan makan minum saat olah raga (hari Jumat)	66.000.000,00		3.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.01.01.1.03 - Administrasi Umum	3.01.01.1.03.17 - Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Porsi makan dan minum yang tersedia	48 Kali	
					Tersediannya Makanan dan Minuman	30.000.000,00		3.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.01.01.1.03 - Administrasi Umum	3.01.01.1.03.17 - Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Porsi makan dan minum yang tersedia	12 Bulan	
					Jumlah orang yang disediakan makan dan minuman	0,00		3.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.01.01.1.03 - Administrasi Umum	3.01.01.1.03.17 - Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Porsi makan dan minum yang tersedia	0 Orang	
13.				18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah									
					Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	1.100.000.000,00		3.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.01.01.1.03 - Administrasi Umum	3.01.01.1.03.18 - Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	60 Orang	
14.				19 Penyediaan Jasa Pengamanan									
					Pelaksanaan pembayaran insentif bagi tenaga operator dan penjaga X-Ray VIP Room Bandara Sentani	0,00		3.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.01.01.1.03 - Administrasi Umum	3.01.01.1.03.01 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa keamanan/security yang dibayarkan	0 Orang Bulan	
					Pelaksanaan pembayaran honor bagi satpam	234.000.000,00		3.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.01.01.1.03 - Administrasi Umum	3.01.01.1.03.01 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa keamanan/security yang dibayarkan	6 Orang Bulan	
					Pelaksanaan uang makan satpam	180.000.000,00		3.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.01.01.1.03 - Administrasi Umum	3.01.01.1.03.01 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa keamanan/security yang dibayarkan	6 Orang Bulan	
					Jumlah tenaga pengamanan	0,00		3.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.01.01.1.03 - Administrasi Umum	3.01.01.1.03.01 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa keamanan/security yang dibayarkan	0 Orang	
15.		2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	À Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	4 Pengadaan mobil jabatan									
					Jumlah mobil yang diadakan	0,00		3.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.01.01.1.03 - Administrasi Umum	3.01.01.1.03.20 - Pengadaan Mobil Jabatan	Jumlah mobil yang diadakan	0 Unit	
16.				5 Pengadaan kendaraan dinas/operasional									
					Jumlah kendaraan yang diadakan	350.000.000,00		3.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.01.01.1.03 - Administrasi Umum	3.01.01.1.03.21 - Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda 4	1 Unit	
					Jumlah kendaraan roda 2	200.000.000,00		3.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.01.01.1.03 - Administrasi Umum	3.01.01.1.03.21 - Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda 2	5 Unit	
17.				6 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas									
					Jumlah perlengkapan rumah jabatan	75.000.000,00		3.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.01.01.1.03 - Administrasi Umum	3.01.01.1.03.24 - Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah Pengadaan Peralatan	2 Unit	
18.				9 Pengadaan peralatan gedung kantor									
					Jumlah peralatan perlengkapan	40.000.000,00		3.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.01.01.1.03 - Administrasi Umum	3.01.01.1.03.25 - Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan/perlengkapan yang diadakan	2 Unit	

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19.	Kelautan dan Perikanan	2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	À Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	10 Pengadaan mebeleur									
					Jumlah mebeleur yang diadakan	1.985.000.000,00		3.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.01.01.1.03 - Administras Umum	3.01.01.1.03.26 - Pengadaan Mebeleur	Jumlah mebeleur yang diadakan untuk 3 UPT	2 Unit	
20.				20 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan									
					Jumlah rumah jabatan yg terpelihara	75.000.000,00		3.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.01.01.1.03 - Administras Umum	3.01.01.1.03.37 - Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan	Jumlah rumah jabatan yg terpelihara	1 Unit Tahun	
21.				23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan									
					jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	0,00		3.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.01.01.1.03 - Administras Umum	3.01.01.1.03.30 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	0 Unit	
22.				24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional									
					Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	0,00		3.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.01.01.1.03 - Administras Umum	3.01.01.1.03.31 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah dan Jenis perlengkapan/peralatan gedung kantor yang dipelihara	0 Unit	
					Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	680.000.000,00		3.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.01.01.1.03 - Administras Umum	3.01.01.1.03.31 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang	64 Unit	
					sewa kendaraan	0,00		3.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.01.01.1.03 - Administras Umum	3.01.01.1.03.31 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan yang diperbaiki/Service	0 Bulan	
23.				30 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor									
					Luas bangunan yang direhab	3.000.000.000,00		3.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.01.01.1.03 - Administras Umum	3.01.01.1.03.39 - Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Jumlah bangunan yang direhab	1500 M2	
24.		3 Program peningkatan disiplin aparatur	À Meningkatnya disiplin aparatur	2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya									
					Jumlah pakaian dinas yang diadakan	246.000.000,00		3.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.01.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	3.01.01.1.04.02 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas sipil harian	164 Stell	
25.				3 Pengadaan pakaian kerja lapangan									
					Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan	164.000.000,00		3.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.01.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	3.01.01.1.04.03 - Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan	164 Stell	
26.				4 Pengadaan pakaian KORPRI									
					jumlah pakaian KORPRI yang diadakan	0,00		3.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.01.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	3.01.01.1.04.04 - Pengadaan Pakaian Korpri	Jumlah pakaian KORPRI yang diadakan	0 Stell	
27.		5 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	À Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	1 Pendidikan dan pelatihan formal									
					Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	500.000.000,00		3.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.01.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	3.01.01.1.04.09 - Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparatur mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	70 Orang	
28.				2 Sosialisasi peraturan perundang-undangan									
					Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	100.000.000,00		3.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.01.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	3.01.01.1.04.10 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	150 Orang	
29.				3 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan									
					Jumlah peserta bimbingan teknis tentang implementasi peraturan perundang-undangan	150.000.000,00		3.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.01.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	3.01.01.1.04.11 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta bimbingan teknis tentang implementasi peraturan perundang-undangan	10 Orang	
30.				4 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal									
					Jumlah aparatur yang terlatih	350.000.000,00		3.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.01.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	3.01.01.1.04.11 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100 Orang	

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31.	Kelautan dan Perikanan	6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	A Meningkatnya kualitas akuntabilitas OPD	1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD									
					Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	15.000.000,00		3.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.01.01.1.02 - Administrasi Keuangan	3.01.01.1.02.06 - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan	1 Laporan	
					Laporan LAKIP SKPD	0,00		3.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.01.01.1.01 - Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.01.01.1.01.05 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan LAKIP SKPD	0 Dokumen	
32.				2 Penyusunan laporan keuangan semesteran									
					Jumlah pelaporan keuangan semesteran yang diselesaikan tepat waktu	15.000.000,00		3.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.01.01.1.02 - Administrasi Keuangan	3.01.01.1.02.07 - Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Jumlah dokumen laporan	1 Laporan	
33.				4 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun									
					Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	15.000.000,00		3.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.01.01.1.02 - Administrasi Keuangan	3.01.01.1.02.09 - Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	1 Laporan	
34.				5 Penyusunan Renja, RKA dan Perubahan APBD									
					Jumlah dokumen	20.000.000,00		3.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.01.01.1.01 - Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.01.01.1.01.01 - Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	3 Dokumen	
35.				10 Forum SKPD Provinsi Papua									
					Jumlah Peserta Forum	500.000.000,00		3.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.01.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	3.01.01.1.04.10 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Forum	150 Orang	
36.				12 Penyusunan RENSTRA									
					Jumlah Dokumen	0,00		3.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.01.01.1.01 - Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.01.01.1.01.01 - Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	0 Dokumen	
37.				13 Penyusunan SOP									
					Jumlah Dokumen	15.000.000,00		3.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.01.01.1.01 - Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.01.01.1.01.04 - Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	
38.				14 Peningkatan Kapasitas PPID									
					Jumlah orang	75.000.000,00		3.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.01.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	3.01.01.1.04.09 - Pendidikan dan Pelatihan Formal	Pembinaan Administrasi Kepegawaian	3 Orang	
39.		16 Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan	Cakupan kabupaten/kota yang memiliki POKMASWAS berfungsi ; Meningkatnya Pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan ; Persentase meningkatnya kemampuan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan	1 Pembentukan kelompok masyarakat swakarsa pengamanan sumberdaya kelautan									
					Terbentuknya Masyarakat swakarsa pengamanan sumberdaya kelautan	0,00						0 Kelompok	
40.				2 Pengawasan Perikanan Tangkap dan Budidaya									
					Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	0,00						0 Kabupaten	
41.				3 Pengawasan dan Pemantauan Kawasan Konservasi									
					Jumlah Dokumen hasil pengawasan dan Pemantauan	110.000.000,00	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.25.04.1.05 - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	3.25.04.1.05.07 - Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola Oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen hasil pengawasan dan Pemantauan	1 Dokumen	

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
42.	Kelautan dan Perikanan	16 Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan	Cakupan kabupaten/kota yang memiliki POKMASWAS berfungsi ; Meningkatnya Pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan ; Persentase meningkatnya kemampuan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan	4 Pembinaan Kelompok Sistem Pengawas Masyarakat									
					Jumlah kelompok Pengawas Masyarakat Yang Terbina	300.000.000,00	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	3.25.02.1.03 - Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau- pulau kecil	3.25.02.1.03.03 - Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah kelompok Pengawas Masyarakat Yang Terbina	60 Kelompok	
43.				5 Patroli Rutin Perairan									
					Jumlah Petroli Rutin Perairan	1.000.000.000,00	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.05 - PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.05.1.01 - Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil	3.25.05.1.01.01 - Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah Petroli Rutin Perairan	100 Kali	
44.				6 Pengadaan Speed Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (DAK)									
					Jumlah speed yang diadakan	3.000.000,00	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.05 - PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.05.1.01 - Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil	3.25.05.1.01.01 - Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah speed yang diadakan	1 Unit	
45.				7 Pembangunan Garasi (Stayger) speed board Pengawasan SDKP (DAK)									
					Volume garasi yang terbangun	1.575.000.000,00	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.05 - PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.05.1.01 - Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil	3.25.05.1.01.01 - Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil	Volume garasi yang terbangun	500 M3	
46.				8 Pembangunan Gedung Pengawasan SDKP (DAK)									
					Volume Gedung yang terbangun	325.000.000,00	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.05 - PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.05.1.01 - Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil	3.25.05.1.01.01 - Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil	Volume Gedung yang terbangun	100 M3	
47.				9 Pengadaan Peralatan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) (DAK)									
					Jumlah peralatan yang diadakan	350.000.000,00	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	3.25.02.1.03 - Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau- pulau kecil	3.25.02.1.03.03 - Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah peralatan yang diadakan	60 Unit	
48.				10 Pembentukan kelompok masyarakat pengamanan sumberdaya kelautan									
					Jumlah Kelompok Masyarakat yang terbentuk	300.000.000,00	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	3.25.02.1.03 - Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau- pulau kecil	3.25.02.1.03.03 - Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Kelompok Masyarakat yang terbentuk	60 Kelompok	
49.		18 Program peningkatan mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut	Cakupan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana alam laut	1 Kajian mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut									
					Tersusunnya Kajian Mitigasi Bencana alam laut dan	1.000.000.000,00	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	3.25.02.1.01 - Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	3.25.02.1.01.04 - Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Tersusunnya Kajian Mitigasi Bencana alam laut dan	1 Dokumen	
50.		20 Program pengembangan budidaya perikanan	Produksi perikanan budidaya; terwujudnya pengembangan budidaya perikanan	1 Pengembangan bibit ikan unggul									
					Tersedianya bibit ikan unggulan	0,00						0 Bibit	
51.				2 Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					TerlaksananyaPendampingan pada kelompok tani dan p	350.000.000,00	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.25.04.1.05 - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	3.25.04.1.05.06 - Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	TerlaksananyaPendampingan pada kelompok tani dan p	100 Kelompok	
52.				3 Pembinaan dan pengembangan perikanan									
					Jumlah pembudidaya yang terbina	300.000.000,00	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.25.04.1.05 - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	3.25.04.1.05.07 - Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola Oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah pembudidaya yang terbina	100 Orang	
53.				11 Bantuan sarana produksi kolam/karamba masyarakat									
					Jumlah Kelompok penerima bantuan	2.100.000.000,00	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.25.04.1.05 - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	3.25.04.1.05.05 - Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan Oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok penerima bantuan	100 Kelompok	
54.				12 Optimalisasi fungsi serta pelayanan BBIP									
					Jumlah pelaksanaan kegiatan operasional	0,00						0 Kegiatan	
55.				29 Bantuan Saprodi Kepada Pembudidaya Bandeng									
					Jumlah kelompok pembudidaya yang menerima bantuan	600.000.000,00	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.25.04.1.05 - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	3.25.04.1.05.05 - Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan Oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok pembudidaya yang menerima bantuan	10 Kelompok	
56.				42 Pencetakan Kolam Dengan Alat Berat Becho									
					Pembuatan Kolam Baru	100.000.000,00	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.25.04.1.05 - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	3.25.04.1.05.05 - Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan Oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pembuatan Kolam Baru	30 Kolom	
57.				43 Optimalisasi Lahan Usaha Pembudidaya Pemula									
					kelompok yang disasar	1.000.000.000,00	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.25.04.1.05 - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	3.25.04.1.05.05 - Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan Oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	kelompok yang disasar	100 Kelompok	
58.				44 Bantuan Bibit Ikan dan Pakan kepada Pembudidaya Air Tawar									
					10 kelompok pembudidaya	2.100.000.000,00	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.25.04.1.05 - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	3.25.04.1.05.03 - Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien Apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	100 kelompok pembudidaya	100 Kelompok	
59.				46 Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudidaya Ikan									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Jumlah kelompok pembudidaya yang dikembangkan	500.000.000,00	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.25.04.1.05 - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	3.25.04.1.05.09 - Pengembangan Pemanfaatan Air Untuk Pembudidayaan Ikan lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provins	Jumlah kelompok pembudidaya yang dikembangkan	25 Kelompok	
60.				49 Penguatan Kelembagaan Pembudidaya Ikan Serta Optimalisasi Tenaga Pendamping Teknis (TPT)									
61.				51 Rapat Evaluasi Pengembangan Budidaya Rumput Laut									
					Evaluasi Pengembangan Budidaya Rumput Laut	75.000.000,00	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	3.25.02.1.03 - Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil	3.25.02.1.03.01 - Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Temu Usaha Kelompok Budidaya Rumput Laut	1 Kegiatan	
62.				52 Bantuan Saprodi Kepada Pembudidaya Bandeng									
63.				53 Pengadaan Sarana Produksi Keramba Jaring Apung untuk Pembudidaya Ikan									
					Jumlah kelompok pembudidaya ikan penerima keramba jaring apung	2.500.000.000,00	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.25.04.1.05 - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	3.25.04.1.05.04 - Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah kelompok pembudidaya ikan penerima keramba jaring apung	5 Kelompok	
64.				54 Pengembangan Calon Induk Ikan Unggul									
					Jumlah Calon Induk Ikan unggul	600.000.000,00	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.25.04.1.05 - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	3.25.04.1.05.04 - Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Calon Induk Ikan unggul	10000 Ekor	
65.				55 Pengembangan Budidaya Rumput Laut									
					Jumlah Pembudidaya Yang dikembangkan	2.000.000.000,00	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.25.04.1.05 - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	3.25.04.1.05.04 - Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Pembudidaya Yang dikembangkan	30 Kelompok	
66.		21 Program Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	Produksi perikanan tangkap	1 Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap									
					Jumlah kelompok yang mendapat pendampingan	250.000.000,00	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	3.25.02.1.03 - Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil	3.25.02.1.03.04 - Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah kelompok yang mendapat pendampingan	50 Kelompok	
67.				3 Pemeliharaan rutin/berkala tempat pelelangan ikan									
					Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala tempat pe	0,00						0 Lokasi	
68.				5 Pengembangan lembaga usaha perdagangan perikanan tangkap									
					Jumlah lembaga usaha perdagang perikanan tangkap yang dikembangkan	100.000.000,00	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.1.01 - Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	3.25.03.1.01.02 - Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah lembaga usaha perdagang perikanan tangkap yang dikembangkan	20 Kelompok	
69.				16 Pelatihan Penangkapan Ikan									
					Jumlah kelompok nelayan yang terlatih dalam menangkap ikan dengan menggunakan teknologi penangkapan yang modern	200.000.000,00	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.1.01 - Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	3.25.03.1.01.02 - Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah kelompok nelayan yang terlatih dalam menangkap ikan dengan menggunakan teknologi penangkapan yang modern	50 Kelompok	
70.				17 Pelatihan Mesin Motor Perikanan									
					Jumlah nelayan yang terlatih	100.000.000,00	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	3.25.02.1.03 - Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil	3.25.02.1.03.04 - Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah nelayan yang terlatih	25 Orang	
71.				18 Pelatihan Pembuatan Rumpon									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Jumlah SDM Yang Terlatih	75.000.000,00	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	3.25.02.1.03 - Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil	3.25.02.1.03.04 - Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM Yang Terlatih	20 Kelompok	
72.				19 Pelatihan Cek Fisik Kapal dan Mesin Kapal									
					Jumlah Aparatur Petugas Cek Fisik dan Mesin Kapal yang terlatih	200.000.000,00	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	3.25.02.1.03 - Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil	3.25.02.1.03.04 - Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Aparatur Petugas Cek Fisik dan Mesin Kapal yang terlatih	5 Orang	
73.				26 Monitoring PPI Se- Papua									
					Terlaksananya Monitoring PPI di Kab/Kota Se-Papua	250.000.000,00	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.1.06 - Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	3.25.03.1.06.03 - Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Terlaksananya Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	8 Kabupaten	
74.				32 Motorisasi perahu nelayan /armada kapal kecil									
					Jumlah Kelompok penerima bantuan	3.800.000.000,00	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.1.02 - Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	3.25.03.1.02.02 - Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Kelompok penerima bantuan	30 Kelompok	
75.				35 Bantuan Sarana Penangkapan Ikan (Rumpun)									
					Jumlah Kelompok penerima bantuan	800.000.000,00	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.1.01 - Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	3.25.03.1.01.03 - Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Kelompok penerima bantuan	6 Kelompok	
76.				38 Fasilitasi Pelayanan Perizinan dan Pengendalian Usaha Perikanan Tangkap									
					Jumlah Perizinan Perikanan Tangkap yang dikeluarkan	125.000.000,00	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.1.04 - Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan dimiliki oleh Nelayan Kecil	3.25.03.1.04.02 - Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang Bukan dimiliki oleh Nelayan Kecil	Jumlah Perizinan Perikanan Tangkap yang dikeluarkan	150 Dokumen	
77.				40 Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Perairan Pedalaman									
					Jumlah Lokasi sumber daya ikan PUD di Pedalaman yang teridentifikasi	700.000.000,00	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.25.04.1.05 - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	3.25.04.1.05.03 - Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien Apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi sumber daya ikan PUD di Pedalaman yang teridentifikasi	2 Wilayah	
78.				41 Apresiasi Inovasi Kajian Teknologi Penangkapan Ikan									
					Jumlah SDM Nelayan	0,00						0 Orang Modul	
79.				42 Restocking Ikan di Perairan Umum dan Danau									
					Jumlah Benih ikan yang ditebarkan	500.000.000,00	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.25.04.1.05 - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	3.25.04.1.05.06 - Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Benih ikan yang ditebarkan	150000 Ekor	
80.		22 Program pengembangan sistem penyuhan perikanan	Cakupan penyuluh fungsional yang mempunyai kompetensi memadai ; Persentase meningkatnya penyuluh perikanan lapangan	3 Revitalisasi dan penyelenggaraan penyuluhan									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
81.	Kelautan dan Perikanan	22 Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan	Cakupan penyuluh fungsional yang mempunyai kompetensi memadai ; Persentase meningkatnya penyuluhan perikanan lapangan	4 Lomba Penyuluh Teladan									
82.				5 Pelatihan Penyuluh Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua									
					terlaksananya pelatihan bagi penyuluh	350.000.000,00	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	3.25.02.1.03 - Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau- pulau kecil	3.25.02.1.03.04 - Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	terlaksananya pelatihan bagi penyuluh	25 Orang	
83.				8 Penataan Kelembagaan Penyuluh dan Distribusi Tenaga Penyuluh									
					terdistribusinya penyuluh perikanan	0,00	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	3.25.02.1.03 - Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau- pulau kecil	3.25.02.1.03.04 - Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	terdistribusinya penyuluh perikanan	0 Orang	
					Jumlah Penyuluh Yang terlatih dan terdistribusi	120.000.000,00	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	3.25.02.1.03 - Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau- pulau kecil	3.25.02.1.03.01 - Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Penyuluh Swadaya yang dibina	20 Orang	
84.		23 Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	Persentase kenaikan pemasaran hasil produksi perikanan	1 Kajian optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan									
					Tersedianya Dokumen pengelolaan dan Pemasaran Prod	0,00						0 Dokumen	
85.				3 Optimalisasi fungsi dan pelayanan BPPMHP									
					berjalannya pelayanan bppmhp	0,00						0 Sistem	
86.				4 Rehabilitasi unit Pengolahan Ikan (UPI) Skala Kecil - DAK									
					Tersedianya sarana dan Prasarana	850.000,00	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	3.25.06.1.02 - Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	3.25.06.1.02.01 - Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Tersedianya sarana dan Prasarana	2 Unit	
87.		24 Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar	Produksi perikanan budidaya	2 Pengadaan Sarana Produksi Keramba Jaring Apung untuk Pembudidaya Ikan									
					Tersedianya Sarana dan Prasarana	4.895.000.000,00	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.25.04.1.05 - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	3.25.04.1.05.02 - Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Tersedianya Sarana dan Prasarana	1 Unit	
88.		25 Program Pengembangan Data dan Informasi	Cakupan ketersediaan data perikanan dan kelautan	1 Visualisasi Informasi Berbasis Website dan Internet Dinas									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Jumlah pelaksanaan kegiatan Visualisasi Informasi Berbasis Website dan Internet Dinas	100.000.000,00	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.1.02 - Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	3.25.03.1.02.01 - Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah pelaksanaan kegiatan Visualisasi Informasi Berbasis Website dan Internet Dinas	1 Kegiatan	
					Pemasangan jaringan internet internal Dinas	0,00	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.1.02 - Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	3.25.03.1.02.01 - Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Pemasangan jaringan internet internal Dinas	0 Spot	
					Langganan internet 12 Bulan	0,00	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.1.02 - Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	3.25.03.1.02.01 - Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Langganan internet 12 Bulan	0 Bulan	
					Pemasangan CCTV	0,00	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.1.02 - Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	3.25.03.1.02.01 - Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Pemasangan CCTV	0 Buah	
					Pengadaan Televisi	0,00	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.1.02 - Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	3.25.03.1.02.01 - Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Pengadaan Televisi	0 Unit	
					Cetak Majalah Perikanan	0,00	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.1.02 - Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	3.25.03.1.02.01 - Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Cetak Majalah Perikanan	0 Buah	
89.				2 Pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan kelautan dan perikanan									
					Jumlah Aparatur Pengumpul Data yang melakukan perjalanan	250.000.000,00	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.1.02 - Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	3.25.03.1.02.01 - Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Aparatur Pengumpul Data yang melakukan perjalanan	20 Orang	
90.				4 Penghimpunan data statistik perikanan dan kelautan									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Jumlah Buku Data Statistik Perikanan dan Kelautan Yang terhimpun	300.000.000,00	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.1.02 - Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	3.25.03.1.02.01 - Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Buku Data Statistik Perikanan dan Kelautan Yang terhimpun	50 Buku	
					Perjalanan Pengumpulan Data	0,00	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.1.02 - Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	3.25.03.1.02.01 - Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Perjalanan Pengumpulan Data	0 Orang Tahun	
					Pengadaan Sarana Statistik	0,00	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.1.02 - Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	3.25.03.1.02.01 - Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Pengadaan Sarana Statistik	0 Unit	
					Perjalanan Koordinasi Satu Data ke Pusat	0,00	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.1.02 - Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	3.25.03.1.02.01 - Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Perjalanan Koordinasi Satu Data ke Pusat	0 Orang Tahun	
					Jumlah Buku Data Statistik Perikanan dan Kelautan Yang terhimpun	0,00	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.1.02 - Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	3.25.03.1.02.01 - Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Buku Data Statistik Perikanan dan Kelautan Yang terhimpun	0 Buku	
91.		26 Program Peningkatan Mutu Produksi Nelayan, Pengelolaan dan Pemasaran	Nilai ekspor produk perikanan; Nilai investasi sektor perikanan yang direalisasikan	2 Pembangunan Cold Storage di Sentra-Sentra Nelayan									
					Jumlah Cold Storage Yang terbangun	4.500.000.000,00	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.1.01 - Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	3.25.03.1.01.02 - Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Cold Storage Yang terbangun	1 Unit	
92.				3 Pengembangan Mutu Olahan Nelayan Kecil									
					Jumlah kelompok yang terlatih dalam meningkatkan mutu olahan ikan	0,00						0 Kelompok	
93.				4 Pembinaan Mutu Produksi Perikanan									
					Jumlah kelompok yang terlatih dalam menciptakan Hasil Olahan Perikanan yang Bermutu Tinggi	220.000.000,00	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	3.25.06.1.02 - Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	3.25.06.1.02.02 - Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitas, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman Untuk dikonsumsi Atau digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah kelompok yang terlatih dalam menciptakan Hasil Olahan Perikanan yang Bermutu Tinggi	10 Kelompok	
94.				5 Ekspose dan Promosi Investasi Kelautan dan Perikanan									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Jumlah pelaksanaan kegiatan Promosi Hasil Perikanan Papua	450.000.000,00	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	3.25.06.1.03 - Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	3.25.06.1.03.02 - Pemberian Insentif dan Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pelaku Usaha Yang difasilitasi	2 Kegiatan	
					Pameran Produk Kelautan dan Perikanan Tingkat Nasional	0,00	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	3.25.06.1.02 - Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	3.25.06.1.02.02 - Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitas, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman Untuk dikonsumsi Atau digunakan, dan Berdaya Saing	Pameran Produk Kelautan dan Perikanan Tingkat Nasional	0 Kali	
					Study Banding / Pameran Promosi Produk Kelautan dan Perikanan di Luar Negeri	0,00	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	3.25.06.1.02 - Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	3.25.06.1.02.02 - Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitas, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman Untuk dikonsumsi Atau digunakan, dan Berdaya Saing	Study Banding / Pameran Promosi Produk Kelautan dan Perikanan di Luar Negeri	0 Kegiatan	
95.					7 Kemitraan Usaha Pengolahan Ikan								
					Jumlah Kegiatan Bimbingan Teknis Kepada Kelompok Usaha Pengolah Hasil Perikanan	220.000.000,00	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	3.25.06.1.02 - Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	3.25.06.1.02.02 - Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitas, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman Untuk dikonsumsi Atau digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah Usaha Pengolah Hasil Perikanan yang di bina	2 Kegiatan	
96.					8 Lomba Masak Serba Ikan Tk. Provinsi dan Nasional								
					Jumlah Kegiatan Lomba Masak Serba Ikan	500.000.000,00	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	3.25.06.1.02 - Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	3.25.06.1.02.02 - Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitas, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman Untuk dikonsumsi Atau digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah Kegiatan Lomba Masak Serba Ikan	2 Kegiatan	
					Lomba Inovasi Bahan Baku Ikan	0,00	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	3.25.06.1.02 - Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	3.25.06.1.02.02 - Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitas, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman Untuk dikonsumsi Atau digunakan, dan Berdaya Saing	Lomba Inovasi Bahan Baku Ikan	0 Orang	
97.					9 Pelatihan Pengolahan hasil perikanan								
					Pembinaan Manajemen Mutu Terpadu (PMMT)	0,00	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	3.25.06.1.02 - Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	3.25.06.1.02.02 - Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitas, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman Untuk dikonsumsi Atau digunakan, dan Berdaya Saing	Pembinaan Manajemen Mutu Terpadu (PMMT)	0 Kegiatan	
					Jumlah Kelompok usaha hasil olahan yang terlatih	250.000.000,00	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	3.25.02.1.03 - Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil	3.25.02.1.03.04 - Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok usaha hasil olahan yang terlatih	25 Kelompok	
98.					10 Pemantauan dan Sosialisasi Bahaya Penggunaan Bahan Kimia Dalam Penanganan Produksi Perikanan								
99.					11 Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Pemasaran bagi Nelayan								

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Pemasaran untuk Nelayan	750.000.000,00	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.1.02 - Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	3.25.03.1.02.03 - Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengolahan ikan	75 Unit	
100.				12 Bimtek Kemitraan Usaha Pengolahan Ikan									
					Bimtek Pengolah Ikan	0,00						0 Kelompok	
101.				21 Pelaksanaan Peringatan Hari Nusantara dan HARKANAS,									
					Peringatan Hari Nusantara	0,00	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.05 - PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.05.1.02 - Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	3.25.05.1.02.03 - Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Peringatan Hari Nusantara	0 Kegiatan	
					Peringatan HARKANAS (Hari Ikan Nasional)	0,00	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.05 - PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.05.1.02 - Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	3.25.05.1.02.03 - Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Peringatan HARKANAS (Hari Ikan Nasional)	0 Kegiatan	
					Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Hari Nusantara dan HARKANAS	150.000.000,00	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.05 - PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.05.1.02 - Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	3.25.05.1.02.03 - Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Hari Nusantara dan HARKANAS	2 Kegiatan	
102.		27 Program Optimalisasi dan Pembangunan Prasarana Perikanan Tangkap	Cakupan unit pengembangan pelabuhan perikanan yang berfungsi	5 Penunjang Kegiatan PPI di Kab/Kota									
					Jumlah Kegiatan penunjang Optimalisasi PPI di Kab/Kota	3.200.000.000,00	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.1.06 - Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	3.25.03.1.06.03 - Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Jumlah Kegiatan penunjang Optimalisasi PPI di Kab/Kota	8 Kegiatan	
103.				6 Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Fasilitas Pokok dan Fungsional Pelabuhan Perikanan (DAK)									
					Peningkatan Kinerja Pelabuhan Perikanan dalam melayani Nelayan	600.000.000,00	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.1.06 - Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	3.25.03.1.06.02 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Peningkatan Kinerja Pelabuhan Perikanan dalam melayani Nelayan	85 %	
					Jumlah Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Perikanan	8.000.000.000,00	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.1.06 - Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	3.25.03.1.06.02 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Perikanan	3 Lokasi	
104.				7 Pembangunan Cold Storage (DAK)									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Volume cold storage yang terbangun	1.000.000,00	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	3.25.06.1.02 - Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	3.25.06.1.02.02 - Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman Untuk dikonsumsi Atau digunakan, dan Berdaya Saing	Volume cold storage yang terbangun	1 M3	
					Kapasitas Cold Storage yang terbangun	0,00	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	3.25.06.1.02 - Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	3.25.06.1.02.02 - Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman Untuk dikonsumsi Atau digunakan, dan Berdaya Saing	Kapasitas Cold Storage yang terbangun	0 Ton	
105.				8 PPI OMOR (DAK)									
					Tersedianya Sarana dan Prasarana	1.000.000,00	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.1.06 - Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	3.25.03.1.06.02 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Tersedianya Sarana dan Prasarana	1 Unit	
106.				9 PPI Nabire (DAK)									
					Tersedianya Sarana dan Prasarana	30.000,00	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.1.06 - Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	3.25.03.1.06.02 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Tersedianya Sarana dan Prasarana	1 Unit	
107.				10 PPI Hamadi (DAK)									
					Tersedianya Sarana dan Prasarana	1.000.000.000,00	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.1.06 - Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	3.25.03.1.06.02 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Tersedianya Sarana dan Prasarana	1 Unit	
108.				11 PPI Fandoi (DAK)									
					Tersedianya Sarana dan Prasarana	1.000.000.000,00	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.1.06 - Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	3.25.03.1.06.02 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Tersedianya Sarana dan Prasarana	1 Unit	
109.				12 PPI POMAKO (DAK)									
					Tersedianya Sarana dan Prasarana	1.000.000,00	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.1.06 - Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	3.25.03.1.06.02 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Tersedianya Sarana dan Prasarana	1 Unit	
110.				13 PPI Kab Jayapura (DAK)									
					Tersedianya Sarana dan Prasarana	3.000.000,00	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.1.06 - Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	3.25.03.1.06.02 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Tersedianya Sarana dan Prasarana	1 Unit	
111.		28 Program Optimalisasi Fungsi dan Pelayanan Uni Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD)	Cakupan peningkatan kinerja UPTD Perikanan	1 Penunjang Kegiatan Balai Benih Ikan Sentra Berap- Kab. Jayapura									
					Jumlah pelaksanaan Kegiatan optimalisasi Pelayanan Pada BBIS Berap	1.000.000.000,00	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.25.04.1.05 - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	3.25.04.1.05.05 - Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan Oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan Kegiatan optimalisasi Pelayanan Pada BBIS Berap	5 Kegiatan	
112.				6 Optimalisasi Fungsi Balai Benih Ikan Partai (BBIP) Bosnik Biak									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Terlaksana Kegiatan serta Optimalnya Pelayanan Pada BBIP Biak	1.000.000.000,00	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.25.04.1.05 - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	3.25.04.1.05.03 - Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien Apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksana Kegiatan serta Optimalnya Pelayanan Pada BBIP Biak	5 Tahun	
113.				7 Optimalisasi Fungsi dan Pelayanan BPPMHP Merauke									
					Jumlah pelaksanaan Kegiatan optimalisasi Pelayanan Pada BPPMHP Merauke	1.000.000.000,00	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	3.25.06.1.02 - Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	3.25.06.1.02.02 - Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman Untuk dikonsumsi Atau digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah pelaksanaan Kegiatan optimalisasi Pelayanan Pada BPPMHP Merauke	4 Kegiatan	
114.				8 Optimalisasi Fungsi dan Pelayanan BPPMHP Biak									
					Terlaksana Kegiatan serta Optimalnya Pelayanan Pada BPPMHP Biak	1.000.000.000,00	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	3.25.06.1.02 - Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	3.25.06.1.02.02 - Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman Untuk dikonsumsi Atau digunakan, dan Berdaya Saing	Terlaksana Kegiatan serta Optimalnya Pelayanan Pada BPPMHP Biak	5 Tahun	
					Jumlah pelaksanaan Kegiatan optimalisasi Pelayanan Pada BPPMHP Biak	0,00	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	3.25.06.1.02 - Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	3.25.06.1.02.02 - Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman Untuk dikonsumsi Atau digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah pelaksanaan Kegiatan optimalisasi Pelayanan Pada BPPMHP Biak	0 Kegiatan	
115.				9 Optimalisasi Fungsi dan Pelayanan BPPMHP Jayapura									
					Terlaksana Kegiatan serta Optimalnya Pelayanan Pada BPPMHP Jayapura	750.000.000,00	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	3.25.06.1.02 - Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	3.25.06.1.02.02 - Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman Untuk dikonsumsi Atau digunakan, dan Berdaya Saing	Terlaksana Kegiatan serta Optimalnya Pelayanan Pada BPPMHP Jayapura	5 Tahun	
					Jumlah pelaksanaan Kegiatan optimalisasi Pelayanan Pada BPPMHP Jayapura	0,00	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	3.25.06.1.02 - Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	3.25.06.1.02.02 - Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman Untuk dikonsumsi Atau digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah pelaksanaan Kegiatan optimalisasi Pelayanan Pada BPPMHP Jayapura	0 Kegiatan	
116.				13 Pembangunan dan Pengembangan BBIS (DAK)									
					Jumlah Produksi Calon Induk	1.000.000,00	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.25.04.1.05 - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	3.25.04.1.05.03 - Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien Apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Produksi Calon Induk	10000 Ekor	
					Peningkatan Kapasitas Produksi Calon Induk	0,00	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.25.04.1.05 - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	3.25.04.1.05.03 - Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien Apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Produksi Calon Induk	0 %	
117.				14 Pembangunan dan Pengembangan BBIP (DAK)									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Jumlah Produksi Calon Induk	3.000.000,00	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.25.04.1.05 - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	3.25.04.1.05.03 - Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien Apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Produksi Calon Induk	15000 Ekor	
					Peningkatan Kapasitas Produksi Calon Induk	0,00	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.25.04.1.05 - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	3.25.04.1.05.03 - Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien Apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Produksi Calon Induk	0 %	
118.				16 Paket Pengukuran dan Pemeriksaan Kesehatan ikan BBIP Biak (DAK)									
					tersedianya kualitas air	3.000.000,00	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.25.04.1.05 - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	3.25.04.1.05.03 - Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien Apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	tersedianya kualitas air	2 Kegiatan	
119.		29 Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	Cakupan nelayan OAP yang memiliki Kartu Nelayan; Cakupan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil	1 Pemberdayaan Masyarakat Pulau-Pulau Terluar									
					Pemberdayaan Masyarakat di Pulau Terluar	0,00	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	3.25.02.1.03 - Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau- pulau kecil	3.25.02.1.03.01 - Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Pemberdayaan Masyarakat di Pulau Terluar	0 Kegiatan	
					Jumlah kelompok masyarakat pesisir penerima Bantuan	400.000.000,00	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	3.25.02.1.03 - Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau- pulau kecil	3.25.02.1.03.01 - Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah kelompok masyarakat pesisir penerima Bantuan	3 Kelompok	
120.				3 Peningkatan Perananan Konsorsium Mitra Bahari dalam Penanganan Masalah Pesisir									
					Meningkatnya peran Konsorsium Mitra Bahari dalam Penanganan Masalah Pesisir	0,00	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	3.25.02.1.01 - Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	3.25.02.1.01.02 - Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Meningkatnya peran Konsorsium Mitra Bahari dalam Penanganan Masalah Pesisir	0 Tahun	
					Jumlah PertemuanKonsorsium Mitra Bahari dalam Penanganan Masalah Pesisir	150.000.000,00	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	3.25.02.1.01 - Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	3.25.02.1.01.02 - Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Jumlah PertemuanKonsorsium Mitra Bahari dalam Penanganan Masalah Pesisir	3 Kegiatan	
121.				4 Dukungan Terhadap Coremap									
					Penunjang Kegiatan COREMAP	150.000.000,00	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	3.25.02.1.01 - Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	3.25.02.1.01.02 - Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Penunjang Kegiatan COREMAP	2 Tahun	
122.				7 Pengembangan sistem Budidaya Wanamina sebagai mata pencaharian alternatif									
					Jumlah Kelompok penerima bantuan Budidaya Wanamina	300.000.000,00	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	3.25.02.1.01 - Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	3.25.02.1.01.02 - Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Jumlah Kelompok penerima bantuan Budidaya Wanamina	4 Kelompok	

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
123.	Kelautan dan Perikanan	29 Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	Cakupan nelayan OAP yang memiliki Kartu Nelayan; Cakupan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil	8 Percepatan Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil									
					Penyusunan Rencana Strategis Pembangunan Wilayah Pesisir dan	0,00						0 Dokumen	
					Jumlah Dokumen Rencana Zonasi Pembangunan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) yang tersusun	0,00						0 Dokumen	
124.				9 Pelatihan Selam/Diving									
					Pelatihan Selam Diving Bagi Masyarakat dan Aparatur	0,00						0 Kegiatan	
					Jumlah Masyarakat dan Aparatur yang terlatih	0,00						0 Orang	
125.				12 Bantuan Sarana Produksi Penangkapan Ikan Perairan Umum di Pegunungan									
					Tersedianya Sarana dan Prasarana Penangkapan di Kab. Pegunungan	0,00						0 Unit	
126.				15 Pembangunan Gedung Kantor Pengelola Kawasan Konservasi (DAK)									
					Luas Gedung Kantor yang terbangun	0,00						0 M2	
127.				16 Pembangunan Tambatan Perahu di Pulau-pulau Kecil (DAK)									
					Volume Tambatan Perahu yang terbangun	100.000,00	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	3.25.02.1.01 - Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	3.25.02.1.01.02 - Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Volume Tambatan Perahu yang terbangun	400 M3	
128.				17 Transplantasi Terumbu Karang									
					Jumlah Transplantasi Karang yang terpasang	100.000.000,00	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	3.25.02.1.01 - Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	3.25.02.1.01.02 - Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Jumlah Transplantasi Karang yang terpasang	1 Unit	
129.				18 Pondok Jaga Kawasan Konservasi (DAK)									
					Tersedianya sarana dan Prasarana	350.000,00	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	3.25.02.1.01 - Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	3.25.02.1.01.02 - Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Tersedianya sarana dan Prasarana	500 Unit	
130.				19 Alat Komunikasi Lapangan Pengelolaan Kawasan Konservasi (DAK)									
					Tersedianya sarana dan Prasarana	3.000.000,00	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	3.25.02.1.01 - Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	3.25.02.1.01.02 - Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Tersedianya sarana dan Prasarana	50 Unit	
131.				20 Pengadaan Alat Selam (DAK)									
					Tersedianya sarana dan Prasarana	1.000.000,00	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	3.25.02.1.01 - Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	3.25.02.1.01.02 - Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Tersedianya sarana dan Prasarana	2 Unit	
JUMLAH						69.376.330.000,00							

Mengetahui,
Kepala Bappeda Provinsi Papua

YOHANES WALILO, S.Sos, M.Si
NIP. 197007281997121001

JAYAPURA, 20 July 2020
KEPALA DINAS

Drs. FRANSISCUS X. MOTE, M.Si
NIP. 197202221996031002

**REKAPITULASI PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021
SERTA KETERKAITAN DENGAN HASIL PEMETAAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019**

PROVINSI : Papua

PERANGKAT DAERAH : Dinas Pertanian dan Pangan

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Pangan	16 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	Cakupan penanganan daerah rawan pangan; Prevalensi penduduk OAP dengan kerawanan pangan sedang; Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan ; Skor PPH	1 Penanganan daerah rawan pangan									
					daerah rawan pangan yg tertangani	1.750.000.000,00	2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	2.09.04.1.02 - Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	2.09.04.1.02.02 - Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	daerah rawan pangan yg tertangani	28 Lokasi	
						0,00	2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	2.09.04.1.02 - Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	2.09.04.1.02.02 - Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	daerah rawan pangan yang tertangani	0	
					daerah rawan pangan yg tertangani	0,00	2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	2.09.04.1.02 - Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	2.09.04.1.02.02 - Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	daerah rawan pangan yg tertangani	0 Wilayah	
					Tersusunnya Peta Kerawanan dan Kerentanan Pangan	0,00	2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	2.09.04.1.01 - Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	2.09.04.1.01.01 - Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Tersusunnya Peta Kerawanan dan Kerentanan Pangan	0 Dokumen	
					Jumlah pengambilan data dan pembuatan peta	0,00	2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	2.09.04.1.01 - Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	2.09.04.1.01.01 - Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah pengambilan data dan pembuatan peta	1 Dokumen	
2.				13 Pengembangan cadangan pangan daerah									
					daerah yang memiliki ketahanan pangan	0,00	2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.1.02 - Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	2.09.03.1.02.03 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	daerah yang memiliki ketahanan pangan	0 Wilayah	
					Tersedianya Cadangan Pangan Daerah	3.000.000.000,00	2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.1.02 - Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	2.09.03.1.02.03 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Tersedianya Cadangan Pangan Daerah	500 Ton	
					tersedianya cadangan pangan	0,00	2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.1.02 - Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	2.09.03.1.02.03 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	tersedianya cadangan pangan	0 Ton	
3.				14 Pengembangan desa mandiri pangan									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					jml desa yang memiliki ketahanan pangan daerah	0,00	2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.1.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	2.09.03.1.01.02 - Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	jml desa yang memiliki ketahanan pangan daerah	0 Lokasi	
					jumlah desa yang sudah mandiri pangan	0,00	2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.1.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	2.09.03.1.01.02 - Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	jumlah desa yang sudah mandiri pangan	0 Kecamatan	
					Pelaksanaan Sosialisasi Kawasan Mandiri Pangan	0,00	2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.1.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	2.09.03.1.01.02 - Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pelaksanaan Sosialisasi Kawasan Mandiri Pangan	0 Kabupaten	
					Pelaksanaan Sosialisasi dan Bantuan Paket Desa Mandiri Pangan	0,00	2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.1.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	2.09.03.1.01.02 - Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pelaksanaan Sosialisasi dan Bantuan Paket Desa Mandiri Pangan	0 Kabupaten	
					Terselenggaranya Evaluasi dan Kajian Dampak Kampung/Kawasan Mandiri Pangan	0,00	2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.1.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	2.09.03.1.01.02 - Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Terselenggaranya Evaluasi dan Kajian Dampak Kampung/Kawasan Mandiri Pangan	0 Kabupaten	
					Jumlah kampung yang tertangani menjadi kampung mandiri pangan lestari	0,00	2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.1.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	2.09.03.1.01.02 - Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah kampung yang tertangani menjadi kampung mandiri pangan lestari	0 Kampung	
					Jumlah Kampung mandiri pangan yang mendukung PON XX	1.500.000.000,00	2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.1.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	2.09.03.1.01.02 - Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Kampung mandiri pangan yang mendukung PON XX	8 Kampung	
4.				31 Monitoring, evaluasi, dan pelaporan									
					jumlah pelaksanaan monev	0,00						0 Kali Tahun	
					Terpantaunya kegiatan ketahanan pangan di kabupaten/kota	0,00						0 Kabupaten	
5.				49 Validasi/Update Data Ketahanan Pangan									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					dok data ketahanan pangan	350.000.000,00	2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.1.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	2.09.03.1.01.01 - Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	dok data ketahanan pangan	2 Dokumen	
					Jumlah validasi data ketahanan pangan	550.000.000,00	2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	2.09.04.1.01 - Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	2.09.04.1.01.01 - Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah validasi data ketahanan pangan	2 Dokumen	
					Tersusunnya buku analisis konsumsi pangan	0,00	2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	2.09.04.1.01 - Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	2.09.04.1.01.01 - Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Tersusunnya buku analisis konsumsi pangan	0 Buku	
					Tersusunnya buku analisis ketersediaan pangan dan NBM	0,00	2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	2.09.04.1.01 - Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	2.09.04.1.01.01 - Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Tersusunnya buku analisis ketersediaan pangan dan NBM	0 Buku	
6.				89 Pengembangan Pemanfaatan Pekarangan oleh Kelompok Wanita Tani									
					tersedianya pkrng yang bermanfaat dikelola kelompo	0,00	2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.1.04 - Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provins	2.09.03.1.04.02 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	tersedianya pkrng yang bermanfaat dikelola kelompo	0 Kampung	
					Tersalurnya Bantuan Paket bagi KWT	0,00	2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.1.04 - Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provins	2.09.03.1.04.02 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Tersalurnya Bantuan Paket bagi KWT	0 Kabupaten	
7.				90 Sosialisasi Pemantapan Ketahanan Pangan									
					pelaksanaan sosialisasi	0,00	2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.1.04 - Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provins	2.09.03.1.04.03 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	pelaksanaan sosialisasi	0 Kampung	
					Pelaksanaan Rapat Dewan Ketahanan Pangan	500.000.000,00	2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.1.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	2.09.03.1.01.03 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok Dan Pangan Lainnya	Pelaksanaan Rapat Dewan Ketahanan Pangan	1 Kali Tahun	
8.				95 Pengembangan Kebun Bibit Hortikultura									
9.				101 Pengembangan Perlindungan lahan pertanian pangan pokok dan mitigasi gas rumah kaca									
10.				108 Peningkatan Produksi Benih Tanaman Pangan									
					peningkatan produksi benih	0,00						0 Komoditi	
11.				109 Peningkatan Produksi Benih Tanaman Hortikultura									
12.				122 Peningkatan Produktivitas Kawasan Palawija									
13.				124 Peningkatan Produktivitas Kawasan Umbi-umbian									
14.				137 Pengembangan Diversifikasi Pangan									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Terselenggaranya Lomba Cipta Menu Tingkat Provinsi Papua	0,00	2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.1.04 - Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi	2.09.03.1.04.01 - Promosi Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Terselenggaranya Lomba Cipta Menu Tingkat Provinsi Papua	0 Kali	
					Meningkatnya Produksi Pangan Lokal dan Jumlah Usaha Kelompok UMKM Tingkat Kabupaten	0,00	2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.1.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	2.09.03.1.01.02 - Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Meningkatnya Produksi Pangan Lokal dan Jumlah Usaha Kelompok UMKM Tingkat Kabupaten	0 Kabupaten	
					Meningkatnya Jumlah Hasil Olahan Pangan Lokal	2.000.000.000,00	2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.1.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	2.09.03.1.01.02 - Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Meningkatnya Jumlah Hasil Olahan Pangan Lokal	17 Kali	
					Jumlah Usaha Kelompok UMKM Tingkat Kabupaten	0,00	2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.1.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	2.09.03.1.01.02 - Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Usaha Kelompok UMKM Tingkat Kabupaten	0 Kelompok	
15.				138 Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan									
					Tersusunnya Buku Analisis Konsumsi Pangan	0,00	2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.1.04 - Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi	2.09.03.1.04.02 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Tersusunnya Buku Analisis Konsumsi Pangan	0 Buku	
					Meningkatnya Ketersediaan Pangan Tingkat Rumah Tangga Melalui Pemanfaatan Pekarangan Oleh Kelompok Wanita Tani	2.600.000.000,00	2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.1.04 - Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi	2.09.03.1.04.02 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Meningkatnya Ketersediaan Pangan Tingkat Rumah Tangga Melalui Pemanfaatan Pekarangan Oleh Kelompok Wanita Tani	250 Kelompok	
16.				139 Analisis Ketersediaan Pangan									
					Tersusunnya Buku Analisis Ketersediaan Pangan dan NBM	0,00	2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.1.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	2.09.03.1.01.01 - Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Tersusunnya Buku Analisis Ketersediaan Pangan dan NBM	0 Buku	
					Terlatihnya Aparat Provinsi/Kabupaten/Kota Dalam Melakukan Analisis Ketersediaan Pangan	0,00	2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	2.09.04.1.01 - Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	2.09.04.1.01.01 - Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Terlatihnya Aparat Provinsi/Kabupaten/Kota Dalam Melakukan Analisis Ketersediaan Pangan	0 Kabupaten	
					Pelatihan penyusunan buku analisis ketersediaan pangan dan NBM	0,00	2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.1.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	2.09.03.1.01.01 - Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Pelatihan penyusunan buku analisis ketersediaan pangan dan NBM	0 Orang	
					Tersusunnya buku analisis ketersediaan pangan, NBM dan PPH	500.000.000,00	2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.1.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	2.09.03.1.01.01 - Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Tersusunnya buku analisis ketersediaan pangan, NBM dan PPH	3 Buku	

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17.	Pangan	16 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	Cakupan penanganan daerah rawan pangan; Prevalensi penduduk OAP dengan kerawanan pangan sedang; Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan ; Skor PPH	140 Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Segar									
					Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Keamanan Pangan	1.000.000.000,00	2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	2.09.05.1.01 - Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.09.05.1.01.04 - Rekomendas Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Keamanan Pangan	29 Kabupaten	
					Terselenggaranya Sosialisasi Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Segar	0,00	2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	2.09.05.1.01 - Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.09.05.1.01.01 - Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi	Terselenggaranya Sosialisasi Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Segar	0 Kali	
					Terlaksananya Uji Test Pestisida dan Formalin	0,00	2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	2.09.05.1.01 - Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.09.05.1.01.04 - Rekomendas Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Uji Test Pestisida dan Formalin	0 Jenis	
					Berkembangnya Desa Pertanian Organik	0,00	2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	2.09.05.1.01 - Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.09.05.1.01.04 - Rekomendas Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Berkembangnya Desa Pertanian Organik	0 Kampung	
					Berkembangnya Kampung Pertanian Organik	800.000.000,00	2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	2.09.05.1.01 - Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.09.05.1.01.04 - Rekomendas Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Berkembangnya Kampung Pertanian Organik	3 Kabupaten	
18.				141 Pemantauan Harga dan Distribusi Pangan									
					Terselenggaranya Apresiasi Panel Harga	0,00						0 Kali	
					Terpantauanya Harga Pangan	0,00						0 Kabupaten	
					Terselenggaranya Sosialisasi Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM)	0,00						0 Kali	
19.				142 Penyelenggaraan Hari Pangan Sedunia (HPS)									
					Terlaksananya Peringatan Hari Pangan Sedunia Tingkat Provinsi Papua	500.000.000,00	2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.1.04 - Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi	2.09.03.1.04.01 - Promosi Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Terlaksananya Peringatan Hari Pangan Sedunia Tingkat Provinsi Papua	1 Kali	
					jumlah Stand Pameran yang mengikuti HPS	0,00	2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.1.04 - Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi	2.09.03.1.04.01 - Promosi Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	jumlah Stand Pameran yang mengikuti HPS	0 Stan	
20.				143 Pengembangan Kelembagaan Keamanan dan Mutu Pangan Segar									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Terlaksananya pengumpulan sampel pada pelaku usaha/petani dan uji sampel pangan segar asal tumbuhan (PSAT)	500.000.000,00	2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	2.09.05.1.01 - Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.09.05.1.01.01 - Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi	Terlaksananya pengumpulan sampel pada pelaku usaha/petani dan uji sampel pangan segar asal tumbuhan (PSAT)	10 Sampel	
					Jumlah sampel pangan segar asal tumbuhan	0,00	2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	2.09.05.1.01 - Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.09.05.1.01.01 - Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi	Jumlah sampel pangan segar asal tumbuhan	0 Sampel	
					Jumlah sampel pangan segar asal Tumbuhan yang tidak terkotamniasi di lokasi PON XX	700.000.000,00	2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	2.09.05.1.01 - Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.09.05.1.01.04 - Rekomendas Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sampel pangan segar asal Tumbuhan yang tidak terkotamniasi di lokasi PON XX	15 Sampel	
					Jumlah petugas pengawas keamanan pangan yang berkompeten	150.000.000,00	2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	2.09.05.1.01 - Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.09.05.1.01.01 - Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi	Jumlah petugas pengawas keamanan pangan yang berkompeten	5 Orang	
					Meningkatnya jumlah petugas pengawas keamanan pangan yang berkompeten di 29 kabupaten/kota	0,00	2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	2.09.05.1.01 - Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.09.05.1.01.01 - Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi	Meningkatnya jumlah petugas pengawas keamanan pangan yang berkompeten di 29 kabupaten/kota	0 Orang	
21.				146 Penguatan Kelembagaan Mutu Keamanan Pangan Segar (Gerbangmas)									
					Terlaksananya Pembinaan kelembagaan Mutu Keamanan pangan Segar pertanian organik	0,00						0 Kelompok	
22.				147 Intervensi Pelaksanaan Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Gerbangmas)									
					Tersusunnya Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	0,00						0 Laporan	
23.				148 Peningkatan Pola Konsumsi Pangan B2SA (Gerbangmas)									
					Terlaksananya Pemberian makanan Tambahan Bagi Anak Sekolah	0,00						0 Orang	
					jumlah makanan tambahan	0,00						0 Porsi	
					Meningkatnya gizi anak sekolah dasar melalui PMTAS	0,00						0 Porsi	
24.				150 Pengembangan Distribusi dan Cadangan Pangan melalui Pola PUPM/TTI dan CPP (Gerbangmas)									
					Terlaksananya pengembangan model distribusi pangan yang efisien	0,00						0 Kegiatan	
					Terlaksananya pengembangan Gudang Cadangan Pangan yang efisien	0,00						0 Kegiatan	
					Jumlah gudang cadangan pangan dan kios tani yang dibangun	0,00						0 Unit	
					Terbangunnya TTI dan gudang CPP untuk memperpendek rantai distribusi pangan di berbagai wilayah	0,00						0 Unit	
25.				153 Pembangunan Gedung dan Laboratorium OKKPD (DAK)									
					Jumlah Gedung dan Laboratorium yang dibangun	4.750.000.000,00	2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	2.09.05.1.01 - Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.09.05.1.01.05 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah Gedung dan Laboratorium yang dibangun	1 Unit	
26.				154 Pengembangan Distribusi dan Cadangan Pangan melalui Pola PUPM/TTI dan CPP									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Jumlah Kios Tani dan Gedung Cadangan Pangan yang dibangun	4.450.000.000,00	2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.1.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	2.09.03.1.01.04 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Jenis Bahan Pokok dan Pangan Lokal yang tersedia	7 Unit	
27.				155 Peningkatan Pola Konsumsi Pangan B2SA									
					Jumlah Siswa yang diberikan PMTAS	4.100.000.000,00	2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.1.04 - Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi	2.09.03.1.04.02 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Jumlah Siswa yang diberikan PMTAS	1500 Orang	
28.				156 Sarana dan Prasarana Gedung OKKPD (DAK)									
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung yang diadakan	0,00	2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	2.09.05.1.01 - Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.09.05.1.01.05 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung yang diadakan	0 Unit	
29.				157 Sarana dan Prasarana Laboratorium OKKPD (DAK)									
					Jumlah Sarana dan Prasarana Laboratorium yang diadakan	0,00	2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	2.09.05.1.01 - Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.09.05.1.01.05 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah Sarana dan Prasarana Laboratorium yang diadakan	0 Unit	
30.		36 Program Peningkatan Diversifikasi Panganekaragaman dan Keamanan Pangan	Cakupan penanganan daerah rawan pangan; Skor PPH	1 Percepatan Diversifikasi Pangan									
					pangan berbahan lokal	0,00	2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.1.04 - Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi	2.09.03.1.04.02 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	pangan berbahan lokal	0 Produk	
					pelatihan pembuatan pangan bahan lokal	0,00	2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.1.04 - Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi	2.09.03.1.04.02 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	pelatihan pembuatan pangan bahan lokal	0 Orang Kali	
					lomba produk pangan berbahan lokal	0,00	2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.1.04 - Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi	2.09.03.1.04.01 - Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	lomba produk pangan berbahan lokal	0 Kali	
					Meningkatnya Skor PPH	0,00	2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.1.04 - Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi	2.09.03.1.04.03 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Meningkatnya Skor PPH	0 %	
					Terlaksananya Lomba Cipta Menu Tingkat Provinsi	0,00	2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.1.04 - Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi	2.09.03.1.04.01 - Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Terlaksananya Lomba Cipta Menu Tingkat Provinsi	0 Kabupaten	
31.				2 Pemantauan Harga, Distribusi dan Akses Pangan									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					29	0,00	2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.1.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	2.09.03.1.01.04 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	29	0 Wilayah	
					Tersedianya Data, Informasi dan Akses Pangan	0,00	2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.1.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	2.09.03.1.01.03 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok Dan Pangan Lainnya	Tersedianya Data, Informasi dan Akses Pangan	0 Kabupaten	
32.				3 Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan									
					pengawasan di kabupaten di 5 wilayah adat	0,00	2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	2.09.05.1.01 - Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.09.05.1.01.04 - Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	pengawasan di kabupaten di 5 wilayah adat	0 Wilayah	
33.				4 Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Segar									
34.				5 Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan									
35.				6 percepatan penganekekaragaman dan konsumsi pangan									
					Terbinanya kelompok Usaha Pengolahan Pangan lokal di Kab/Kota	0,00	2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.1.04 - Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi	2.09.03.1.04.01 - Promosi Penganekekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Terbinanya kelompok Usaha Pengolahan Pangan lokal di Kab/Kota	0 Kelompok	
					Terbinanya kelompok usaha pengolahan pangan lokal sagu dan umbi umbian mendukung PON XX	2.000.000.000,00	2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.1.04 - Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi	2.09.03.1.04.01 - Promosi Penganekekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Terbinanya kelompok usaha pengolahan pangan lokal sagu dan umbi umbian mendukung PON XX	5 Kelompok	
					Berkembangnya Unit Pengolah Hasil (UPH) Pangan Lokal Sagu dan Umbi-Umbian	500.000.000,00	2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.1.04 - Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi	2.09.03.1.04.01 - Promosi Penganekekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Berkembangnya Unit Pengolah Hasil (UPH) Pangan Lokal Sagu dan Umbi-Umbian	2 Unit	
36.				7 Penerapan Sertifikasi, Pelabelan serta Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)									
					Jumlah sertifikasi prima PSAT yang diterbitkan	2.600.000.000,00	2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	2.09.05.1.01 - Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.09.05.1.01.02 - Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sertifikasi prima PSAT yang diterbitkan	70 Produk	
					Registrasi dan Sertifikasi Prima 3 dan Prima 2 bagi Pelaku Usaha	800.000.000,00	2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	2.09.05.1.01 - Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.09.05.1.01.03 - Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku usaha Pangan Segar Asal Tumbuhan yang teregistrasi	50 UMKM	
37.				8 Penerapan Registrasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)									
					Jumlah komoditas PSAT yang diregistrasi keamanan dan mutu pangannya	0,00	2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	2.09.05.1.01 - Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.09.05.1.01.03 - Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah komoditas PSAT yang diregistrasi keamanan dan mutu pangannya	0 Komoditi	
38.	Pertanian	1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	À Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	1 Penyediaan jasa surat menyurat									
					Jumlah surat yang disediakan	50.000.000,00		3.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.03.01.1.03 - Administrasi Umum	3.03.01.1.03.01 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang terkirim	200 Surat	

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
39.	Pertanian	1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	A Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik									
				Jumlah Jasa Layanan berlangganan Listrik, Air, Telepon, Transponder	1.500.000.000,00			3.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.03.01.1.03 - Administrasi Umum	3.03.01.1.03.02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Layanan	12 Layanan	
40.				3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor									
				Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	0,00			3.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.03.01.1.03 - Administrasi Umum	3.03.01.1.03.03 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	15 Unit	
41.				6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional									
				Jumlah Unit Mobil Dinas/Operasional yang terpelihara dan Terfasilitasi Perizinannya	75.000.000,00			3.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.03.01.1.03 - Administrasi Umum	3.03.01.1.03.06 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Unit Mobil Dinas/Operasional yang diservis dan dipelihara	85 Unit	
42.				7 Penyediaan jasa administrasi keuangan									
				Jumlah Honor yang terbayarkan	50.000.000,00			3.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.03.01.1.03 - Administrasi Umum	3.03.01.1.03.07 - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pegawai yang membuat laporan	82 Orang	
43.				8 Penyediaan jasa kebersihan kantor									
				Luas Gedung dan Halaman yang disediakan jasa kebersihan	300.000.000,00			3.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.03.01.1.03 - Administrasi Umum	3.03.01.1.03.08 - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Gedung dan Halaman yang dibersihkan	1350 M2	
				Jumlah tenaga kebersihan dan Fasilitas Pendukung kebersihan kantor	650.000.000,00			3.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.03.01.1.03 - Administrasi Umum	3.03.01.1.03.08 - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah tenaga kebersihan	16 Orang	
				Jumlah Jenis Bahan dan Alat Kebersihan	0,00			3.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.03.01.1.03 - Administrasi Umum	3.03.01.1.03.14 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Bahan dan Alat Kebersihan	0 Jenis	
44.				9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja									
				Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	150.000.000,00			3.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.03.01.1.03 - Administrasi Umum	3.03.01.1.03.09 - Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	50 Unit	
45.				10 Penyediaan alat tulis kantor									
				Jumlah jenis ATK yang disediakan	200.000.000,00			3.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.03.01.1.03 - Administrasi Umum	3.03.01.1.03.10 - Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	50 Jenis	
46.				11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan									
				Jumlah barang cetakan	45.000.000,00			3.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.03.01.1.03 - Administrasi Umum	3.03.01.1.03.11 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan	75 Jenis	
				Jumlah penggandaan	20.000.000,00			3.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.03.01.1.03 - Administrasi Umum	3.03.01.1.03.11 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah penggandaan	10000 Lembar	
				Jumlah Jenis Barang Cetak dan yang Disediakan	40.000.000,00			3.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.03.01.1.03 - Administrasi Umum	3.03.01.1.03.11 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	20 Jenis	
				Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	100.000.000,00			3.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.03.01.1.03 - Administrasi Umum	3.03.01.1.03.11 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	12 Bulan	
47.				12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor									
				Jumlah Komponen Listrik yang disediakan	0,00			3.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.03.01.1.03 - Administrasi Umum	3.03.01.1.03.12 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen alat pemeliharaan listrik dan genset yang disediakan	0 Buah	
48.				13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor									
				Jumlah peralatan dan Perlengkapan	500.000.000,00			3.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.03.01.1.03 - Administrasi Umum	3.03.01.1.03.25 - Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan peralatan kantor yang disediakan	25 Unit	
49.				15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan									
				Jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	150.000.000,00			3.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.03.01.1.03 - Administrasi Umum	3.03.01.1.03.15 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	100 Jenis	

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
50.	Pertanian	1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	À Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	16 Penyediaan bahan logistik kantor									
					Jumlah liter bahan bakar untuk kendaraan operasional	175.000.000,00		3.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.03.01.1.03 - Administrasi Umum	3.03.01.1.03.16 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah liter bahan bakar untuk kendaraan operasional	2500 Liter	
					jumlah mobilitas termasuk tenaga angkat dan turun beras ke kantor	37.500.000,00		3.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.03.01.1.03 - Administrasi Umum	3.03.01.1.03.16 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah Pembelian Air Galon	1 Kali	
51.				17 Penyediaan makanan dan minuman									
					Pelaksanaan penyediaan makan dan minum	20.000.000,00		3.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.03.01.1.03 - Administrasi Umum	3.03.01.1.03.17 - Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Porsi makan dan minum kegiatan yang tersedia	12 Kegiatan	
					Pelaksanaan makan minum tamu dan rapat	20.000.000,00		3.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.03.01.1.03 - Administrasi Umum	3.03.01.1.03.17 - Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Porsi makan dan minum yang tersedia	12 Kali Tahun	
					Pelaksanaan makan minum saat olah raga (hari Jumat)	75.000.000,00		3.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.03.01.1.03 - Administrasi Umum	3.03.01.1.03.17 - Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Porsi makan dan minum yang tersedia	70 Kali	
					Tersediannya Makanan dan Minuman	100.000.000,00		3.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.03.01.1.03 - Administrasi Umum	3.03.01.1.03.17 - Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Porsi makan dan minum yang tersedia	12 Bulan	
					Jumlah orang yang disediakan makan dan minuman	125.000.000,00		3.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.03.01.1.03 - Administrasi Umum	3.03.01.1.03.17 - Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Porsi makan dan minum yang tersedia	150 Orang	
52.				18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah									
					Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	1.500.000.000,00		3.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.03.01.1.03 - Administrasi Umum	3.03.01.1.03.18 - Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	30 Orang	
53.				19 Penyediaan Jasa Pengamanan									
					Pelaksanaan pembayaran insentif bagi tenaga operator dan penjaga X-Ray VIP Room Bandara Sentani	0,00		3.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.03.01.1.03 - Administrasi Umum	3.03.01.1.03.01 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa keamanan/security yang dibayarkan	0 Orang Bulan	
					Pelaksanaan pembayaran honor bagi satpam	0,00		3.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.03.01.1.03 - Administrasi Umum	3.03.01.1.03.01 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa keamanan/security yang dibayarkan	0 Orang Bulan	
					Pelaksanaan uang makan satpam	0,00		3.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.03.01.1.03 - Administrasi Umum	3.03.01.1.03.01 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa keamanan/security yang dibayarkan	0 Orang Bulan	
					Jumlah tenaga pengamanan	15.000.000,00		3.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.03.01.1.03 - Administrasi Umum	3.03.01.1.03.01 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa keamanan/security yang dibayarkan	12 Orang	
54.		2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	À Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	2 Pembangunan rumah dinas									
					Terbangunnya rumah dinas	2.500.000.000,00		3.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.03.01.1.03 - Administrasi Umum	3.03.01.1.03.38 - Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas	Terbangunnya rumah dinas	5 Unit	
55.				3 Pembangunan gedung kantor									
					Luas bangunan yang dibangun	0,00		3.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.03.01.1.03 - Administrasi Umum	3.03.01.1.03.39 - Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Luas bangunan yang dibangun	0 M2	
					Tersedianya desain perencanaan bangunan	0,00		3.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.03.01.1.03 - Administrasi Umum	3.03.01.1.03.39 - Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Tersedianya desain perencanaan bangunan	0 Dokumen	
56.				5 Pengadaan kendaraan dinas/operasional									
					Jumlah kendaraan yang diadakan	450.000.000,00		3.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.03.01.1.03 - Administrasi Umum	3.03.01.1.03.21 - Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda 4	1 Unit	
					Jumlah kendaraan roda 2	300.000.000,00		3.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.03.01.1.03 - Administrasi Umum	3.03.01.1.03.21 - Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda 2	10 Unit	
57.				6 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas									
					Jumlah perlengkapan rumah jabatan	75.000.000,00		3.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.03.01.1.03 - Administrasi Umum	3.03.01.1.03.24 - Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah Pengadaan Peralatan	1 Unit	
58.				7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Jumlah pengadaan perlengkapan	200.000.000,00		3.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.03.01.1.03 - Administrasi Umum	3.03.01.1.03.23 - Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan	15 Unit	
59.				9 Pengadaan peralatan gedung kantor									
					Jumlah peralatan perlengkapan	500.000.000,00		3.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.03.01.1.03 - Administrasi Umum	3.03.01.1.03.25 - Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan/perlengkapan yang diadakan	50 Unit	
60.				10 Pengadaan mebeleur									
					Jumlah mebeleur yang diadakan	500.000.000,00		3.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.03.01.1.03 - Administrasi Umum	3.03.01.1.03.26 - Pengadaan Mebeleur	Jumlah mebeleur yang diadakan untuk 3 UPT	20 Unit	
61.				11 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga									
					Jumlah peralatan dan perlengkapan rumah tangga yang diadakan	200.000.000,00		3.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.03.01.1.03 - Administrasi Umum	3.03.01.1.03.14 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan dan perlengkapan rumah tangga yang diadakan	2 Unit	
					Jumlah peralatan dan perlengkapan rumah tangga yang diadakan	0,00		3.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.03.01.1.03 - Administrasi Umum	3.03.01.1.03.14 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan dan perlengkapan rumah tangga yang diadakan	0 Set	
62.				20 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan									
					Jumlah rumah jabatan yg terpelihara	75.000.000,00		3.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.03.01.1.03 - Administrasi Umum	3.03.01.1.03.37 - Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan	Jumlah rumah jabatan yg terpelihara	1 Unit Tahun	
63.				22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor									
					Jumlah gedung kantor yang dipelihara	250.000.000,00		3.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.03.01.1.03 - Administrasi Umum	3.03.01.1.03.29 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor	20 Unit	
					belanja sewa	0,00		3.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.03.01.1.03 - Administrasi Umum	3.03.01.1.03.29 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung yang disewa	0 Tahun	
64.				23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan									
					jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	100.000.000,00		3.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.03.01.1.03 - Administrasi Umum	3.03.01.1.03.30 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	1 Unit	
65.				24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional									
					Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	0,00		3.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.03.01.1.03 - Administrasi Umum	3.03.01.1.03.31 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah dan Jenis perlengkapan/peralatan gedung kantor yang dipelihara	0 Unit	
					Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	1.500.000.000,00		3.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.03.01.1.03 - Administrasi Umum	3.03.01.1.03.31 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang	200 Unit	
					sewa kendaraan	0,00		3.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.03.01.1.03 - Administrasi Umum	3.03.01.1.03.31 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan yang diperbaiki/Service	0 Bulan	
66.				28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor									
					Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	100.000.000,00		3.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.03.01.1.03 - Administrasi Umum	3.03.01.1.03.35 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	50 Unit	
67.				30 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor									
					Luas bangunan yang direhab	500.000.000,00		3.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.03.01.1.03 - Administrasi Umum	3.03.01.1.03.39 - Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Jumlah bangunan yang direhab	2300 M2	
68.				45 Pembangunan gedung beras									
69.				46 Sewa gedung									
					Jumlah gedung kantor yang disewa	0,00		3.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.03.01.1.03 - Administrasi Umum	3.03.01.1.03.27 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Jumlah rumah jabatan yang terpelihara	0 Unit Tahun	
					Sewa rumah jabatan	0,00		3.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.03.01.1.03 - Administrasi Umum	3.03.01.1.03.27 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Jumlah Rumah Jabatan Yang disewa	0 Unit Tahun	
70.		3 Program peningkatan disiplin aparatur	À Meningkatnya disiplin aparatur	1 Pengadaan mesin/kartu absensi									
					Jumlah Mesin /Kartu Apsensi yang tersedia	50.000.000,00		3.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.03.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	3.03.01.1.04.01 - Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Jumlah Mesin /Kartu Absensi yang tersedia	5 Bh	

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
71.	Pertanian	3 Program peningkatan disiplin aparatur	À Meningkatnya disiplin aparatur	2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya									
					Jumlah pakaian dinas yang diadakan	800.000.000,00		3.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.03.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	3.03.01.1.04.02 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas sipil harian	530 Stell	
72.				3 Pengadaan pakaian kerja lapangan									
					Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan	350.000.000,00		3.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.03.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	3.03.01.1.04.03 - Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan	530 Stell	
73.				4 Pengadaan pakaian KORPRI									
					jumlah pakaian KORPRI yang diadakan	0,00		3.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.03.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	3.03.01.1.04.04 - Pengadaan Pakaian Korpri	Jumlah pakaian KORPRI yang diadakan	0 Stell	
74.				5 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu									
					Jumlah pakaian khusus yang diadakan	350.000.000,00		3.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.03.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	3.03.01.1.04.05 - Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah pakaian Batik yang diadakan	530 Stell	
75.		4 Program fasilitas pindah/purna tugas PNS	À Meningkatnya kualitas penanganan pindah/purna tugas PNDS	1 Pemulangan pegawai yang pensiun									
					Jumlah pegawai pensiun yang difasilitasi	45.000.000,00		3.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.03.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	3.03.01.1.04.06 - Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah pegawai pensiun yang difasilitasi	3 Orang	
76.		5 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	À Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	1 Pendidikan dan pelatihan formal									
					Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	500.000.000,00		3.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.03.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	3.03.01.1.04.09 - Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparatur mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	50 Orang	
77.				2 Sosialisasi peraturan perundang-undangan									
					Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	75.000.000,00		3.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.03.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	3.03.01.1.04.10 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	50 Orang	
78.				3 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan									
					Jumlah peserta bimbingan teknis tentang implementasi peraturan perundang-undangan	45.000.000,00		3.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.03.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	3.03.01.1.04.11 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta bimbingan teknis tentang implementasi peraturan perundang-undangan	20 Orang	
79.				4 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal									
					Jumlah aparatur yang terlatih	250.000.000,00		3.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.03.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	3.03.01.1.04.11 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25 Orang	
80.				7 Peningkatan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa									
81.		6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	À Meningkatnya kualitas akuntabilitas OPD	1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD									
					Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	500.000.000,00		3.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.03.01.1.02 - Administrasi Keuangan	3.03.01.1.02.06 - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan	1 Laporan	
					Laporan LAKIP SKPD	0,00		3.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.03.01.1.01 - Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.03.01.1.01.05 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan LAKIP SKPD	0 Dokumen	
82.				2 Penyusunan laporan keuangan semesteran									
					Jumlah pelaporan keuangan semesteran yang diselesaikan tepat waktu	100.000.000,00		3.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.03.01.1.02 - Administrasi Keuangan	3.03.01.1.02.07 - Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Jumlah dokumen laporan	1 Laporan	

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
83.	Pertanian	6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	A Meningkatnya kualitas akuntabilitas OPD	3 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran									
					Jumlah pelaporan prognosis realisasi anggaran yang diselesaikan tepat waktu	500.000.000,00		3.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.03.01.1.02 - Administrasi Keuangan	3.03.01.1.02.08 - Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah pelaporan prognosis realisasi anggaran yang diselesaikan tepat waktu	1 Laporan	
84.				4 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun									
					Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	100.000.000,00		3.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.03.01.1.02 - Administrasi Keuangan	3.03.01.1.02.09 - Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	1 Laporan	
85.				5 Penyusunan Renja, RKA dan Perubahan APBD									
					Jumlah dokumen	2.000.000.000,00		3.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.03.01.1.01 - Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.03.01.1.01.01 - Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	3 Dokumen	
86.				10 Forum SKPD Provinsi Papua									
					Jumlah Peserta Forum	1.000.000.000,00		3.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.03.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	3.03.01.1.04.10 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Forum	150 Orang	
87.				11 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran									
					Jumlah laporan yang disusun	50.000.000,00		3.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.03.01.1.02 - Administrasi Keuangan	3.03.01.1.02.07 - Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Jumlah laporan yang disusun	1 Laporan	
88.				12 Penyusunan RENSTRA									
					Jumlah Dokumen	100.000.000,00		3.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.03.01.1.01 - Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.03.01.1.01.01 - Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	
89.				13 Penyusunan SOP									
					Jumlah Dokumen	100.000.000,00		3.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.03.01.1.01 - Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.03.01.1.01.04 - Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	10 Dokumen	
90.				14 Peningkatan Kapasitas PPID									
					Jumlah orang	200.000.000,00		3.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.03.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	3.03.01.1.04.09 - Pendidikan dan Pelatihan Formal	Pembinaan Administrasi Kepegawaian	5 Orang	
91.				15 Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM)									
					Jumlah Dokumen yang disusun	150.000.000,00		3.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.03.01.1.01 - Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.03.01.1.01.05 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen yang disusun	5 Dokumen	
92.				16 Penyusunan Dokumen Rencana Umum Pengadaan (RUP)									
					Jumlah Dokumen Rencana Umum Pengadaan (RUP)	50.000.000,00		3.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.03.01.1.01 - Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.03.01.1.01.04 - Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Umum Pengadaan (RUP)	1 Dokumen	
93.		15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Cakupan bina kelompok tani; NTP peternakan; NTP tanaman pangan	1 Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis									
					jumlah petani yang dilatih	1.000.000.000,00	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	3.27.07.1.02 - Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	3.27.07.1.02.02 - Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	jumlah petani yang dilatih	60 Orang	
					Jumlah kelompok tani ternak yang dilatih	0,00	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	3.27.07.1.02 - Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	3.27.07.1.02.02 - Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah kelompok tani ternak yang dilatih	0 Kelompok	
					Jumlah Pelaku Agribisnis yang dilatih	0,00	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	3.27.07.1.02 - Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	3.27.07.1.02.02 - Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Pelaku Agribisnis yang dilatih	0 Orang	
94.				2 Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Jumlah pelaksanaan penyuluhan dan pendampingan kelompok tani	2.000.000.000,00	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	3.27.07.1.02 - Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	3.27.07.1.02.02 - Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah pelaksanaan penyuluhan dan pendampingan kelompok tani	10 Kegiatan	
					Jumlah peserta pelaksanaan PEDTA	0,00	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	3.27.07.1.02 - Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	3.27.07.1.02.02 - Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah peserta pelaksanaan PEDTA	0 Orang	
95.				3 Peningkatan kemampuan lembaga petani									
					tersedia lembaga petani mandiri	2.000.000.000,00	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	3.27.07.1.03 - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	3.27.07.1.03.01 - Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani	tersedia lembaga petani mandiri	2 Lembaga	
					Jumlah kelembagaan petani peternak	0,00	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	3.27.07.1.03 - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	3.27.07.1.03.01 - Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani	Jumlah kelembagaan petani peternak	20 Kelompok	
96.				4 Peningkatan sistem insentif dan disinsentif bagi petani/kelompok tani									
					Terlaksananya sistem insentif dan disinsentif bagi petani/kelompok tani	0,00						0 Kelompok	
97.				5 Penyuluhan dan bimbingan pemanfaatan dan produktivitas lahan tidur									
					Jumlah Kelompok tani yang mengikuti sosialisasi bimbingan pemanfaatan dan produktivitas lahan tidur	0,00						0 Kelompok	
					tergrapnya lahan tidur	0,00						0 Ha	
98.				13 Sosialisasi Pembangunan Peternakan									
					Jumlah informasi peternakan yang dipublikasi	0,00						0 Edisi	
99.				15 Pekan Daerah (PEDA)/Nasional (PENAS) Pertemuan Kontak Tani Nelayan Andalan Nasional									
					Jumlah Peserta Pelaksanaan PEDTA	5.000.000.000,00	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	3.27.07.1.02 - Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	3.27.07.1.02.02 - Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Peserta Pelaksanaan PENAS	1250 Orang	
100.		16 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	Cakupan komoditi pangan lokal berkualitas; Cakupan pengembangan agroindustri terpadu hortikultura; Luas kawasan pertanian pangan berkelanjutan; Produktifitas komoditas tanaman pangan dan hortikultura utama; Tingkat swasembada pangan	1 Penanganan daerah rawan pangan									
101.				9 Pemanfaatan perkarangan untuk pengembangan pangan									
102.				11 Pemantauan dan analisis akses harga pangan pokok									
103.				12 Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian									
					Jumlah unit pengolahan hasil pertanian yang ditingkatkan	0,00						0 Unit	
104.				13 Pengembangan cadangan pangan daerah									
105.				14 Pengembangan desa mandiri pangan									
106.				15 Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija									
					jumlah luas lahan padi dan palawija yang terintensifikasi	5.000.000.000,00	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.1.01 - Penataan Prasarana Pertanian	3.27.03.1.01.02 - Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	jumlah luas lahan padi dan palawija yang terintensifikasi	1000 Hektar	
107.				16 Pengembangan diversifikasi tanaman									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
108.	Pertanian	16 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	Cakupan komoditi pangan lokal berkualitas; Cakupan pengembangan agroindustri terpadu hortikultura; Luas kawasan pertanian pangan berkelanjutan ; Produktifitas komoditas tanaman pangan dan hortikultura utama; Tingkat swasembada pangan	17 Pengembangan pertanian pada lahan kering									
					Jumlah kawasan terpadu tanaman pangan dan hortikultura petani asli Papua yang dikembangkan	0,00	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.1.01 - Penataan Prasarana Pertanian	3.27.03.1.01.01 - Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah kawasan terpadu tanaman pangan dan hortikultura yang dikembangkan	0 Wilayah	
					Jumlah kawasan terpadu tanaman pangan dan hortikultura petani asli Papua yang dikembangkan	0,00	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.1.01 - Penataan Prasarana Pertanian	3.27.03.1.01.01 - Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah kawasan terpadu tanaman pangan dan hortikultura yang dikembangkan	0 Lokasi	
					Perluasan /Pengembangan Lahan kering Hortikultura mendukung PON XX	7.500.000.000,00	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.1.01 - Penataan Prasarana Pertanian	3.27.03.1.01.02 - Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Pengembangan Lahan Kering Hortikultura mendukung PON XX	750 Ha	
109.				18 Pengembangan lumbung pangan desa									
110.				19 Pengembangan model distribusi pangan yang efisien									
111.				20 Pengembangan perbenihan/perbibitan									
					Luas areal penangkaran benih	10.000.000.000,00	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.1.01 - Penataan Prasarana Pertanian	3.27.03.1.01.10 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Jumlah sarana dan prasarana perbenihan di BBI yang dibangun	100 Ha	
					Jumlah lokasi areal perbenihan yang diawasi	0,00	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.1.01 - Penataan Prasarana Pertanian	3.27.03.1.01.10 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Isarana dan prasarana perbenihan di BBI yang dibangun	0 Lokasi	
112.				21 Pengembangan sistem informasi pasar									
					Jumlah dokumen informasi pasar yang disusun	0,00						0 Dokumen	
113.				22 Peningkatan mutu dan keamanan pangan									
114.				29 Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian									
					Terlaksanannya peningkatan produktivitas hasil perkebunan	375.000.000,00						1 Kegiatan	
115.				33 Pengembangan Kawasan Lahan Pertanian Pangan Pokok Berkelanjutan dan GRK									
					Jumlah lokasi pemantauan implementasi Perdasi LP3B	500.000.000,00	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	3.27.05.1.01 - Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	3.27.05.1.01.02 - Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah lokasi pemantauan implementasi Perdasi LP3B	5 Lokasi	
					Jumlah laporan implementasi RAD-GRK sektor Pertanian	250.000.000,00	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	3.27.05.1.01 - Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	3.27.05.1.01.02 - Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah laporan implementasi RAD-GRK sektor Pertanian	5 Laporan	
116.				34 Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman Pangan dan Hortikultura									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Luas pengamatan OPT TPH	0,00	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	3.27.05.1.01 - Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	3.27.05.1.01.01 - Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Luas pengamatan OPT TPH	0 Kabupaten	
					Luas areal pengendalian OPT tanaman pangan dan hortikultura	1.000.000.000,00	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	3.27.05.1.01 - Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	3.27.05.1.01.01 - Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Luas areal pengendalian OPT tanaman pangan dan hortikultura	500 Ha	
117.				35 Pengembangan Laboratorium Pegamat hama dan penyakit									
					Sosialisasi Pergub LP3B	0,00	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	3.27.05.1.01 - Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	3.27.05.1.01.01 - Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Sosialisasi Pergub LP3B	0 Kegiatan	
					Bimbingan Penyusunan LP3B	0,00	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	3.27.05.1.01 - Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	3.27.05.1.01.01 - Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Bimbingan Penyusunan LP3B	0 Kegiatan	
					Inventarisasi GRK	0,00	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	3.27.05.1.01 - Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	3.27.05.1.01.01 - Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Inventarisasi GRK	0 Kegiatan	
					Jumlah sarana dan prasarana laboratorium yang tersedia	1.000.000.000,00	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.1.01 - Penataan Prasarana Pertanian	3.27.03.1.01.10 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Jumlah sarana dan prasarana laboratorium yang tersedia	1 Unit	
118.				36 Pengembangan Pupuk dan Alsint Pertanian									
					Pengawasan pupuk subsidi	2.500.000.000,00	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.1.01 - Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	3.27.02.1.01.01 - Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Kabupaten yang terawasi sebaran pupuk subsidi	12 Kegiatan	
119.				37 Peningkatan produksi dan produktivitas kawasan Tanaman pangan									
					Luas areal intensifikasi tanaman pangan	0,00						0 Ha	
					Luas Intensifikasi tanaman pangan mendukung PON XX	0,00						0 Ha	
120.				38 Pengembangan Balai Mekanisasi Pertanian									
					Intensifikasi kedelai	0,00						0 Ha	
					Intensifikasi Ubi Jalar	0,00						0 Ha	
					Pelatihan teknologi budidaya	0,00						0 Kegiatan	
121.				39 Pengembangan Balai Benih Palawija									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Perbanyakkan benih sumber palawija	3.000.000.000,00	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.1.02 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	3.27.02.1.02.03 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Jumlah benih bibit sumber palawija	1500 Ha	
					Operasional BBI Palawija	0,00	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.1.02 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	3.27.02.1.02.03 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Operasional BBI Palawija	0 Kegiatan	
					Rehab gudang saprodi	0,00	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.1.02 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	3.27.02.1.02.03 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Rehab gudang saprodi	0 Unit	
					Pembangunan lantai jemur	0,00	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.1.02 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	3.27.02.1.02.03 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Pembangunan lantai jemur	0 M	
					Pengadaan mesin pengering	0,00	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.1.02 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	3.27.02.1.02.03 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Pengadaan mesin pengering	0 Unit	
					Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia	0,00	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.1.02 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	3.27.02.1.02.03 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia	2 Unit	
122.				40 Pengembangan Balai Benih Hortikultura									
					Perbanyakkan benih sumber hortikultura	1.500.000.000,00	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.1.02 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	3.27.02.1.02.02 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Jumlah benih sumber hortikultura yang diperbanyak	5000 Kegiatan	
					Operasional BBI Hortikultura	0,00	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.1.02 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	3.27.02.1.02.02 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Operasional BBI Hortikultura	0 Kegiatan	
					Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia	0,00	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.1.02 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	3.27.02.1.02.02 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia	1 Unit	
123.				41 Pengembangan Kebun Bibit Hortikultura									
					Perbanakan benih hortikultura	700.000.000,00	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.1.02 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	3.27.02.1.02.02 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Jumlah benih yang tersedia	3000 Kegiatan	
					Operasional Kebun bibit hortikultura	0,00	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.1.02 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	3.27.02.1.02.02 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Operasional Kebun bibit hortikultura	1 Kegiatan	
					Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia	0,00	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.1.02 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	3.27.02.1.02.02 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia	1 Unit	
124.				42 Pengembangan Produksi Benih Tanaman Pangan									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Penangkaran benih padi	1.000.000.000,00	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.1.02 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	3.27.02.1.02.03 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Penangkaran benih padi	50 Ha	
					Penangkaran Benih kedelai	1.000.000.000,00	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.1.02 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	3.27.02.1.02.03 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Penangkaran Benih kedelai	50 Ha	
					Temu lapang penangkar benih	0,00	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.1.02 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	3.27.02.1.02.03 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Temu lapang penangkar benih	50 Kali	
125.				43 Pengembangan Produksi Benih Hortikultura									
					Penangkaran benih buah-buahan	1.500.000.000,00	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.1.02 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	3.27.02.1.02.02 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Jumlah Produksi Benih Hortikultura	5000 Ha	
					Penangkaran benih sayuran	0,00	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.1.02 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	3.27.02.1.02.02 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Penangkaran benih sayuran	5 Ha	
126.				44 Pengembangan Laboratorium Benih									
					Sertifikasi benih Tanaman pangan dan hortikultura	0,00	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.1.02 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	3.27.02.1.02.01 - Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Sertifikasi benih Tanaman pangan dan hortikultura	6 Kabupaten	
					Jumlah sarana dan prasarana laboratorium yang tersedia	2.000.000.000,00	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.1.01 - Penataan Prasarana Pertanian	3.27.03.1.01.10 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Jumlah sarana dan prasarana laboratorium yang tersedia	1 Unit	
127.				45 Pengembangan Balai Benih Padi									
					Perbanyak benih sumber padi	1.000.000.000,00	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.1.02 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	3.27.02.1.02.03 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Jumlah benih sumber padi	25 Ha	
					Operasional BBI Padi	0,00	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.1.02 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	3.27.02.1.02.03 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Operasional BBI Padi	0 Kegiatan	
					Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia	0,00	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.1.02 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	3.27.02.1.02.03 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia	2 Unit	
128.				46 Peningkatan Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura									
					Pengawasan benih tanaman pangan dan hortikultura	1.000.000.000,00	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.1.02 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	3.27.02.1.02.01 - Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah Benih yang tersertifikasi	12 Kabupaten	
129.				47 DAK Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura									
					Jumlah kegiatan yang dibiayai DAK	2.500.000.000,00	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.1.01 - Penataan Prasarana Pertanian	3.27.03.1.01.10 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Jumlah kegiatan yang dibiayai DAK	5 Kegiatan	

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
130.	Pertanian	17 Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Meningkatnya pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan; Cakupan kelompok binaan tani lokal pemasok kebutuhan makanan sektor pertambangan yang berkembang; Frekwensi promosi produk perkebunan; Frekwensi promosi produk pertanian; Persentase hasil produk tanaman pangan lokal berkualitas yang terserap; Tingkat kemampuan petani lokal dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat	1 Penelitian dan pengembangan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan									
131.				7 Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah									
					Banyaknya event promosi yang diadakan/diikuti	1.500.000.000,00	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.1.01 - Penataan Prasarana Pertanian	3.27.03.1.01.01 - Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Banyaknya event promosi yang diadakan/diikuti	18 Kali	
132.				9 Pembangunan pusat-pusat penampungan produksi hasil pertanian/perkebunan masyarakat yang akan dipasarkan									
					Jumlah pembangunan Pusat Penampungan Hasil Produksi	1.500.000.000,00	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.1.01 - Penataan Prasarana Pertanian	3.27.03.1.01.01 - Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah pembangunan Pusat Penampungan Hasil Produksi	8 Unit	
					Pembangunan gudang beras	0,00	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.1.01 - Penataan Prasarana Pertanian	3.27.03.1.01.01 - Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Pembangunan gudang beras	0 Kegiatan	
133.				11 Penyuluhan distribusi pemasaran atas hasil produksi pertanian/perkebunan masyarakat									
					Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan sosialisasi distribusi atas hasil produksi (Kopi, Kakako, Kelapa, Karet)	500.000.000,00	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	3.27.07.1.01 - Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	3.27.07.1.01.01 - Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN	Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan sosialisasi distribusi atas hasil produksi (Kopi, Kakako, Kelapa, Karet)	5 Kelompok	
134.				12 Penyuluhan kualitas dan teknis kemasan hasil produksi pertanian/perkebunan yang akan dipasarkan									
					Jumlah Pelaksanaan kegiatan peningkatan mutu hasil produk olahan perkebunan (Kopi)	500.000.000,00	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.1.01 - Penataan Prasarana Pertanian	3.27.03.1.01.01 - Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Pelaksanaan kegiatan peningkatan mutu hasil produk olahan perkebunan (Kopi)	4 Kegiatan	
135.				16 Pembangunan Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan									
					Terbangunnya Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan	5.000.000.000,00	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.1.01 - Penataan Prasarana Pertanian	3.27.03.1.01.10 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan yang terbangun	15 Unit	
136.				17 Investasi dan Perijinan Usaha Perkebunan									
					Terselenggaranya proses investasi dan rekomendasi perijinan usaha perkebunan	500.000.000,00	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.06 - PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	3.27.06.1.01 - Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.27.06.1.01.03 - Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Terselenggaranya proses investasi dan rekomendasi perijinan usaha perkebunan	7 Kegiatan	
137.				18 Bimbingan Usaha Perkebunan									
					Jumlah kelompok yang diberikan pembinaan usaha perkebunan	1.100.000.000,00	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.06 - PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	3.27.06.1.01 - Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.27.06.1.01.03 - Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah kelompok yang diberikan pembinaan usaha perkebunan	13 Kelompok	
138.				19 Pemantauan Stabilitas Harga Komoditi Perkebunan									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Jumlah laporan pemantauan stabilitas harga komoditas perkebunan (TBS Kelapa Sawit)	475.000.000,00	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.06 - PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	3.27.06.1.01 - Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.27.06.1.01.03 - Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah laporan pemantauan stabilitas harga komoditas perkebunan (TBS Kelapa Sawit)	10 Laporan	
139.				20 Pengembangan Bioindustri Pangan Lokal									
					Pengembangan unit pengolahan beras analog	1.000.000.000,00	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.1.01 - Penataan Prasarana Pertanian	3.27.03.1.01.02 - Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Pengembangan unit pengolahan tanaman pangan	1 Unit	
					Peningkatan Unit pengolahan keladi	700.000.000,00	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.1.01 - Penataan Prasarana Pertanian	3.27.03.1.01.02 - Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Peningkatan unit pengolahan tanaman pangan	2 Unit	
					Pengembangan Unit Pengolahan Ubijalar	500.000.000,00	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.1.01 - Penataan Prasarana Pertanian	3.27.03.1.01.02 - Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Pengembangan unit pengolahan ubijalar	2 Unit	
					Sosialisasi Skrim Kredit	0,00	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.1.01 - Penataan Prasarana Pertanian	3.27.03.1.01.02 - Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Sosialisasi Skrim Kredit	0 Kegiatan	
					Pengembangan Produk turunan buah merah mendukung PON XX	0,00	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.1.01 - Penataan Prasarana Pertanian	3.27.03.1.01.02 - Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Pengembangan Produk turunan buah merah mendukung PON XX	0 Jenis	
140.				21 Pengembangan Agroindustri terpadu hortikultura									
					Peningkatan Unit pengolahan buah merah	2.000.000.000,00	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.1.01 - Penataan Prasarana Pertanian	3.27.03.1.01.02 - Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Peningkatan unit pengolahan hortikultura	4 Unit	
					Pengembangan unit pengolahan jeruk	1.000.000.000,00	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.1.01 - Penataan Prasarana Pertanian	3.27.03.1.01.02 - Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Pengembangan unit pengolahan hortikultura	2 Unit	
					Peningkatan unit engolahan pisang	500.000.000,00	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.1.01 - Penataan Prasarana Pertanian	3.27.03.1.01.02 - Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Peningkatan unit pengolahan pisang	1 Unit	
141.				22 Pengembangan Pemasaran Hasil pertanian									
					Jumlah Pelaksanaan kegiatan pasar tani, pameran dan informasi pasar	450.000.000,00	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.1.01 - Penataan Prasarana Pertanian	3.27.03.1.01.02 - Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Pelaksanaan kegiatan pasar tani, pameran dan informasi pasar	6 Kegiatan	
142.		18 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Cakupan teknologi pertanian/perkebunan rakyat tepat guna yang diterapkan	1 Penelitian dan pengembangan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna									
					Jumlah objek penelitian dan pengembangan perbenihan	750.000.000,00	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.1.03 - Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	3.27.02.1.03.04 - Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Jumlah objek penelitian plasmanutuf lokal papua	1 Unit	
143.				2 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna									
					Jumlah Sarpras teknologi pertanian untuk 5 komoditas	200.000.000,00	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.1.01 - Penataan Prasarana Pertanian	3.27.03.1.01.01 - Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah sarana dan prasarana teknologi pertanian yang dikembangkan/diadakan	2 Unit	
					Jumlah alat dan mesin pertanian yang diadakan	2.000.000.000,00	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.1.01 - Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	3.27.02.1.01.01 - Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah alat dan mesin pertanian yang diadakan	50 Unit	

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
144.	Pertanian	18 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Cakupan teknologi pertanian/perkebunan rakyat tepat guna yang diterapkan	4 Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna									
					terlaksananya penyuluhan di wil lapago	0,00						0 Kali	
145.				5 Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/perkebunan tepat guna									
					Jumlah petani yang terlatih melakukan inovasi penerapan teknologi perkebunan tepat guna	1.300.000.000,00	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	3.27.07.1.02 - Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	3.27.07.1.02.01 - Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah petani yang terlatih melakukan inovasi penerapan teknologi perkebunan tepat guna	300 Orang	
146.				6 Pelatihan penerapan teknologipertanian/perkebunan modern bercocok tanam									
147.				7 Monitoring, evaluasi dan pelaporan									
					Terkendalinya pelaksanaan program kegiatan perkebunan	0,00						0 Laporan	
148.				23 Pelatihan Pengoperasian Teknologi Perkebunan Tepat Guna									
149.				25 Pencegahan masuknya organisme pengganggu tumbuhan karantina									
					Sosialisasi Organisme Pengganggu tumbuhan karantina potensial dan pengendaliannya	0,00						0 Kegiatan	
150.		19 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Meningkatnya produksi komoditas perkebunan; Tingkat produktifitas tanaman perkebunan; Tingkat produktifitas tanaman pertanian	1 Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan									
					Jumlah Tenaga Penyuluh yang terlatih	0,00	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	3.27.07.1.02 - Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	3.27.07.1.02.02 - Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Tenaga Penyuluh yang terlatih	0 Orang	
151.				2 Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan									
					Jumlah bantuan sarana produksi (Alat Pertanian Kecil) ke masyarakat	450.000.000,00	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.1.01 - Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	3.27.02.1.01.01 - Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah bantuan sarana produksi (Alat Pertanian Kecil) ke masyarakat	200 Unit	
					Terbangunnya jalan produksi Pada areal perkebunan unggulan	850.000.000,00	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.1.01 - Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	3.27.02.1.01.01 - Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	Terbangunnya jalan produksi Pada areal perkebunan unggulan	2 KM2	
					Jumlah pupuk organik bagi petani yang disalurkan	475.000.000,00	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.1.01 - Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	3.27.02.1.01.01 - Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah pupuk organik bagi petani yang disalurkan	200 Liter	
					Jumlah bantuan Alat Pertanian Kecil (APK)	500.000.000,00	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.1.01 - Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	3.27.02.1.01.01 - Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah bantuan Alat Pertanian Kecil (APK)	100 Unit	
152.				3 Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan									
					Bertambahnya Unit penangkar bibit unggul	175.000.000,00	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.1.02 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Tanaman	3.27.02.1.02.02 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Bertambahnya Unit penangkar bibit unggul	4 Unit	
					Luas areal perbanyak benih	250.000.000,00	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.1.02 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Tanaman	3.27.02.1.02.04 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	Luas areal perbanyak benih	50 Ha	
153.				6 Monitoring, evaluasi dan pelaporan									
					Terkendalinya program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	0,00						0 Laporan	
154.				8 Intensifikasi Tanaman Perkebunan									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Luas Areal kebun masyarakat yang terintensifikasi	5.000.000.000,00	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	3.27.05.1.01 - Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	3.27.05.1.01.01 - Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Luas Areal kebun masyarakat yang terintensifikasi	500 Hektar	
155.				31 Perluasan Areal Komoditas Perkebunan									
					Luas areal kebun yang terbangun	8.550.000.000,00	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.1.01 - Penataan Prasarana Pertanian	3.27.03.1.01.01 - Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Luas areal kebun yang terbangun	2500 Hektar	
156.				33 Pembinaan Petani									
					Jumlah petani yang dibina	1.500.000.000,00	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	3.27.07.1.03 - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	3.27.07.1.03.04 - Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani	Jumlah petani yang dibina	100 Orang	
157.				36 Pemeliharaan Kebun Benih Tanaman Perkebunan									
					Terpeliharanya kebunbenih tanaman perkebunan	1.000.000.000,00	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.1.02 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	3.27.02.1.02.04 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	Terpeliharanya kebunbenih tanaman perkebunan	25 Hektar	
					Tersedianya Benih dan Bibit Unggul	450.000.000,00	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.1.02 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	3.27.02.1.02.04 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	Tersedianya Benih dan Bibit Unggul	10000 Bibit	
					Terlaksanannya peningkatan produktivitas hasil perkebunan	350.000.000,00	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.1.02 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	3.27.02.1.02.04 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	Terlaksanannya peningkatan produktivitas hasil perkebunan	10 Hektar	
158.				40 Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman Perkebunan									
					Luas areal kebun yang dikendalikan	3.500.000.000,00	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	3.27.05.1.01 - Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	3.27.05.1.01.01 - Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Luas areal kebun yang dikendalikan	1500 Hektar	
159.				41 Pengembangan kebun benih									
160.				43 Pengelolaan lahan dan air									
161.				44 Penggunaan pupuk organik cair									
162.				45 Penyediaan sarana prasarana perbenihan									
163.				46 Pembangunan UPTD/Balai Perbenihan Perkebunan									
					Luas bangunan yang dibangun	2.000.000,00	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.1.01 - Penataan Prasarana Pertanian	3.27.03.1.01.10 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Luas bangunan yang dibangun	100 M2	
164.				47 Perbaikan UPTD/Balai Perbenihan Perkebunan									
					Luas perbaikan UPTD/Balai	1.000.000.000,00	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.1.01 - Penataan Prasarana Pertanian	3.27.03.1.01.10 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Luas perbaikan UPTD/Balai	25 M2	
165.				48 Penyediaan Perlengkapan dan Sarana Perkantoran UPTD/Balai Perbenihan/Produksi									
					Jumlah perlengkapan dan sarana yang disediakan	1.750.000.000,00	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.1.01 - Penataan Prasarana Pertanian	3.27.03.1.01.10 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Jumlah perlengkapan dan sarana yang disediakan	10 Alat	
166.				49 Peningkatan Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Jumlah Benih/Bibit yang tersertifikasi	1.500.000.000,00	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.1.02 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	3.27.02.1.02.01 - Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah Benih/Bibit yang tersertifikasi	300000 Bibit	
167.				50 Pelaksanaan Fasilitasi, Identifikasi, Pengelolaan Lahan dan Air									
					Luas lahan yang difasilitasi	10.000.000.000,00	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.1.01 - Penataan Prasarana Pertanian	3.27.03.1.01.01 - Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Luas lahan yang difasilitasi	500 Ha	
168.		20 Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	Cakupan penyuluh fungsional yang mempunyai kompetensi memadai	1 Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan									
					Jumlah tenaga penyuluh yang ditingkatkan kapasitasnya	6.900.000.000,00	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	3.27.07.1.01 - Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	3.27.07.1.01.02 - Kerja Sama Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta	Jumlah tenaga penyuluh yang ditingkatkan kapasitasnya	100 Orang	
169.				2 Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian/perkebunan									
					tersedianya insentif penyuluh	3.500.000.000,00	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	3.27.07.1.01 - Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	3.27.07.1.01.01 - Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN	Jumlah penyuluh yang mendapat insentif	827 Kegiatan	
170.				3 Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan									
					Jumlah sarana penyuluhan BPP Model yang diadakan	2.500.000.000,00	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	3.27.07.1.01 - Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	3.27.07.1.01.01 - Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN	Jumlah Penyuluh yang didampingi	500 Unit	
171.				4 Pengembangan sistem data dan informasi penyuluhan pertanian									
					Sosialisasi SIMLUHTAN	0,00	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	3.27.07.1.02 - Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	3.27.07.1.02.01 - Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Sosialisasi SIMLUHTAN	0 Kali	
					Fasilitasi perangkat sistem informasi data dan informasi pertanian	1.500.000.000,00	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	3.27.07.1.02 - Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	3.27.07.1.02.01 - Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah desiminasi informasi teknologi pertanian	7 Unit	
172.				5 Peningkatan kapasitas kelembagaan pertanian									
					Peningkatan kapasitas kelembagaan petani	5.600.000.000,00	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	3.27.07.1.03 - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	3.27.07.1.03.01 - Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani	Jumlah Lembaga Pertanian yang ditingkatkan	4 Unit	
					Peingkatan kapasitas kelembagaan penyuluh	5.000.000.000,00	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	3.27.07.1.02 - Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	3.27.07.1.02.02 - Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Peingkatan kapasitas kelembagaan penyuluh	10 Unit	
173.		21 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Cakupan pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak; Terlaksananya upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak.	1 Pendataan masalah peternakan									
					terlaksananya pendataan ternak di 29 kabupaten	0,00						0 Kali	
174.				2 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					terlaksananya pencegahan penyakit menular hewan	0,00	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	3.27.04.1.01 - Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	3.27.04.1.01.01 - Pengendalian Resiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	terlaksananya pencegahan penyakit menular hewan	0 Kali Tahun	
					Terlaksananya Pemeliharaan Kesehatan dan Penyakit Menular Ternak	700.000.000,00	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	3.27.04.1.01 - Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	3.27.04.1.01.01 - Pengendalian Resiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Terlaksananya Pemeliharaan Kesehatan dan Penyakit Menular Ternak	10 Lokasi	
175.				3 Pemusnahan ternak yang terjangkit penyakit endemik									
					Jumlah Pemusnahan Ternak yang Terjangkit Penyakit Zoonosis	700.000.000,00	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	3.27.04.1.01 - Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	3.27.04.1.01.03 - Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Pemusnahan Ternak yang Terjangkit Penyakit Zoonosis	500 Dosis	
176.				4 Pengawasan perdagangan ternak antar daerah									
177.				7 Penelitian Identifikasi penyakit Hewann									
					Terlaksananya pelayanan pasif, semi aktif dan aktif penyakit hewan di masyarakat	700.000.000,00	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	3.27.04.1.01 - Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	3.27.04.1.01.01 - Pengendalian Resiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah hewan yang terlayani kesehatannya	2700 Kegiatan	
					Jumlah sampel bahan pangan asal hewan yang diperiksa	350.000.000,00	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	3.27.04.1.03 - Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	3.27.04.1.03.03 - Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah sampel bahan pangan asal hewan yang diperiksa	450 Sampel	
178.				8 Peningkatan Sumberdaya Kelembagaan Kesehatan Hewan									
					Jumlah puskesmas	1.500.000.000,00	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.1.01 - Penataan Prasarana Pertanian	3.27.03.1.01.06 - Pembangunan dan Pemeliharaan Pos Pemeriksaan Kesehatan Hewan	Jumlah puskesmas yang ditingkatkan	11 Unit	
179.				13 Pencegahan, pengendalian, Pemberantasan penyakit hewan menular dan gangguan penyakit reproduksi ternak									
					Jumlah pencegahan dan Pengendalian penyakit ternak	2.000.000.000,00	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	3.27.04.1.01 - Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	3.27.04.1.01.01 - Pengendalian Resiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah pencegahan dan Pengendalian penyakit ternak	10000 Dosis	
180.		22 Program peningkatan produksi hasil peternakan	Meningkatnya produksi hasil peternakan; Produksi hasil ternak besar/kecil/unggas	1 Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak									
					Tersedianya sarana pembibitan ternak	0,00	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.1.01 - Penataan Prasarana Pertanian	3.27.03.1.01.10 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Tersedianya sarana pembibitan ternak	3 Unit	
					Jumlah sarana pembibitan ternak UPTD	7.000.000.000,00	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.1.01 - Penataan Prasarana Pertanian	3.27.03.1.01.10 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Jumlah sarana pembibitan ternak UPTD	6 Unit	

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
181.	Pertanian	22 Program peningkatan produksi hasil peternakan	Meningkatnya produksi hasil peternakan; Produksi hasil ternak besar/kecil/unggas	2 Pembibitan dan perawatan ternak									
					Terlaksananya Pelayanan Pembibitan Ternak UPTD	5.000.000.000,00	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.1.04 - Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	3.27.02.1.04.02 - Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Tersedianya Indukan/Bibit Ternak Sapi/Babi/Ungas dan aneka ternak serta pengembangan ternak di UPTD Pembibitan Ternak	400 Kegiatan	
					JUmlah Pakan Ternak	1.000.000.000,00	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.1.04 - Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	3.27.02.1.04.02 - Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pakan Ternak di UPTD Pembibitan Ternak	45000 Kg	
182.				3 Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat									
					tersalurnya bibit kepada masyarakat	0,00						0 Bibit	
183.				4 Penyuluhan pengelolaan bibit ternak yang didistribusikan kepada masyarakat									
					pelaksanaan penyuluhan pengelolaan bibit	0,00						0 Kali Tahun	
					Jumlah kelompok yang mendapat penyuluhan	0,00						0 Kelompok	
184.				6 Pembelian dan pendistribusian vaksin dan pakan ternak									
					Jumlah Ketersediaan Vaksin	0,00						0 Dosis	
					Jumlah Pakan Ternak	0,00						0 Kg	
185.				7 Penyuluhan kualitas gizi dan pakan ternak									
					Jumlah Penyuluhan	0,00						0 Kali Tahun	
186.				8 Pengembangan agribisnis peternakan									
					tersedianya lokasi agribisnis ternak	1.500.000.000,00	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.1.07 - Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	3.27.02.1.07.01 - Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah Ternak Ayam yang diadakan	2500 Lokasi	
					Jumlah Ternak yang diadakan	7.500.000.000,00	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.1.07 - Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	3.27.02.1.07.01 - Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah Ternak sapi bakalan yang diadakan	300 Ekor	
187.				10 Penyusunan Database potensi peternakan									
188.				11 Penguatan Kelembagaan Inseminasi Buatan									
					Terlaksananya pelayanan IB ternak sapi	3.000.000.000,00	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.1.03 - Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	3.27.02.1.03.03 - Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	Terlaksananya pelayanan IB ternak sapi	3000 Dosis	
					Jumlah ternak sapi yang di IB	0,00	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.1.02 - Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Wilayahnya Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	3.27.03.1.02.01 - Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah ternak sapi yang di IB	0 Dosis	
189.				12 Pengembangan sarana dan prasarana produksi ternak									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Tersedianya sarana prsarana produksi ternak di masyarakat	5.000.000.000,00	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.1.01 - Penataan Prasarana Pertanian	3.27.03.1.01.09 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Tersedianya sarana prasarana produksi ternak di masyarakat	15 Unit	
					Jumlah sarana prasarana produksi ternak di masyarakat	0,00	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.1.01 - Penataan Prasarana Pertanian	3.27.03.1.01.09 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Jumlah sarana prasarana produksi ternak di masyarakat	1 Unit	
190.				17	Pengembangan ternak besar								
					Terlaksananya pengembangan ternak sapi di masyarakat	12.500.000.000,00	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.1.07 - Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	3.27.02.1.07.01 - Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Terlaksananya pengembangan ternak sapi di masyarakat	500 Kelompok	
					Jumlah kelompok peternak sapi yang dibantu	0,00	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.1.07 - Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	3.27.02.1.07.01 - Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah kelompok peternak sapi yang dibantu	0 Kelompok	
191.				18	Pengembangan ternak kecil								
					Terlaksananya pengembangan ternak kecil di masyarakat	7.000.000.000,00	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.1.04 - Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	3.27.02.1.04.02 - Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Terlaksananya pengembangan ternak kecil di masyarakat	40 Kelompok	
					Terlaksananya pengembangan aneka ternak (kelinci dan lebah madu)	0,00	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.1.03 - Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	3.27.02.1.03.03 - Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	Terlaksananya pengembangan aneka ternak (kelinci dan lebah madu)	0 Kelompok	
					Jumlah kelompok ternak kecil yang dibantu	0,00	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.1.04 - Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	3.27.02.1.04.02 - Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah kelompok ternak kecil yang dibantu	0 Kelompok	
192.				19	pengembangan aneka ternak								
193.		23 Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	Jumlah Hasil Produksi Peternakan yang dipasarkan; Tingkat kemampuan peternakan lokal dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat	3	Pembangunan sarana dan prasarana pasar produksi hash peternakan								
					Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana produksi hasil peternakan	0,00						0 Unit	
194.				7	Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah.								
					Jumlah pameran promosi yang dikutkan	750.000.000,00	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.1.01 - Penataan Prasarana Pertanian	3.27.03.1.01.02 - Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah pameran promosi yang dikutkan	8 Kegiatan	
195.				8	Penyuluhan pemasaran produksi peternakan								
					Jumlah keilompok yang mendapat penyuluhan pemasaran	500.000.000,00	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	3.27.07.1.02 - Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	3.27.07.1.02.02 - Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah keilompok yang mendapat penyuluhan pemasaran	20 Kelompok	
196.				9	Pembangunan pusat-pusat penampungan produksi hasil peternakan masyarakat								
					Jumlah sarana penampungan produksi hasil peternakan	0,00						0 Unit	
197.				10	Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi peternakan masyarakat								

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Data Informasi pasar hasil produksi peternakan	500.000.000,00	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	3.27.07.1.02 - Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	3.27.07.1.02.01 - Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Data Informasi pasar hasil produksi peternakan	12 Edisi	
198.				11 Penyuluhan distribusi pemasaran atas hasil produksi peternakan masyarakat									
					Jumlah penyuluhan yang dilakukan	0,00	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	3.27.07.1.02 - Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	3.27.07.1.02.02 - Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah penyuluhan yang dilakukan	1 Kegiatan	
199.				12 Penyuluhan kualitas dan teknis kemasan hasil produksi peternakan yang akan dipasarkan									
					Jumlah pelaku usaha yang terlatih	400.000.000,00	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	3.27.07.1.02 - Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	3.27.07.1.02.02 - Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah pelaku usaha yang terlatih	20 Orang	
					Jumlah Kelompok penerima pengembangan usaha ternak lebah madu	600.000.000,00	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.1.01 - Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	3.27.02.1.01.02 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Kelompok penerima pengembangan usaha ternak lebah madu	5 Kelompok	
200.				14 Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Usaha Peternakan									
					Jumlah pengembangan kelembagaan usaha peternakan	0,00						0 Kelompok	
201.		24 Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	Cakupan teknologi peternakan tepat guna yang diterapkan	2 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna									
					Jumlah pengadaan sarana teknologi peternakan tepat guna	0,00						0 Unit	
202.				4 Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi peternakan tepat guna									
203.				5 Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi peternakan tepat guna									
					Jumlah tenaga lapangan yang dilatih	0,00						0 Orang	
204.				7 Pemanfaatan bioteknologi dlm olah limbah ternak									
					Pembuatan biogas ternak sapi	0,00						0 Unit	
205.		26 Program Perencanaan Pembangunan	Terlaksananya rapat evaluasi OPD se-Provinsi Papua, konsultasi, dan monitoring kegiatan; Tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi pelaporan	9 Monitoring, evaluasi dan pelaporan									
					Tersedianya laporan	0,00						0 Laporan	
206.				10 Rapat Kerja Teknis									
					Terlaksananya rapat Forum OPD	700.000.000,00	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.1.01 - Penataan Prasarana Pertanian	3.27.03.1.01.01 - Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Terlaksananya rapat Forum OPD	1 Kegiatan	
207.				11 Rapat Evaluasi									
					Terlaksananya rapat evaluasi OPD se-Provinsi Papua	650.000.000,00						1 Kegiatan	
208.				13 Penyusunan Program dan Anggaran Rencana Kerja/Teknis/Program									
					Pelaksanaan penyusunan anggaran	1.500.000.000,00	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.1.01 - Penataan Prasarana Pertanian	3.27.03.1.01.09 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Pelaksanaan penyusunan anggaran	1 Kegiatan	
209.				22 Penyusunan Data Statistik Peternakan dan Kesehatan Hewan									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Tersusunya data statistik peternakan	800.000.000,00	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.1.01 - Penataan Prasarana Pertanian	3.27.03.1.01.01 - Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Tersusunya data statistik peternakan	1 Dokumen	
					Pertemuan Pra Aram	0,00	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.1.01 - Penataan Prasarana Pertanian	3.27.03.1.01.01 - Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Tersusunnya data statistik pertanian	0 Kegiatan	
					Bimbingan SMS Gateway SIM TP	0,00	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.1.01 - Penataan Prasarana Pertanian	3.27.03.1.01.01 - Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Bimbingan SMS Gateway SIM TP	0 Kegiatan	
210.				23 Penyusunan PEP RAD-GRK dan Inventarisasi Emisi GRK sektor Pertanian									
					Jumlah Dokumen PEP	1.000.000.000,00	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	3.27.05.1.01 - Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	3.27.05.1.01.02 - Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah Dokumen PEP-GRK Sektor Pertanian	1 Dokumen	
					Inventarisasi GRK	0,00	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.1.01 - Penataan Prasarana Pertanian	3.27.03.1.01.02 - Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Inventarisasi GRK	0 Kegiatan	
211.				24 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah									
					Pelaksanaan SPIP	500.000.000,00	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.1.01 - Penataan Prasarana Pertanian	3.27.03.1.01.09 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Pelaksanaan SPIP	1 Kegiatan	
					Jumlah program prioritas pemerintah yang dikendalikan	0,00	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.1.01 - Penataan Prasarana Pertanian	3.27.03.1.01.01 - Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah program prioritas pemerintah yang dikendalikan	0 Kegiatan	
212.				25 Pengelolaan Statistik Tanaman Pangan dan Hortikultura									
					Jumlah jenis data TPH yang dikelola	500.000.000,00	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.1.01 - Penataan Prasarana Pertanian	3.27.03.1.01.01 - Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah jenis data TPH yang dikelola	2 Jenis	
213.				26 Forum OPD dan Rapat Teknis									
					Pelaksanaan Forum OPD	0,00						0 Kegiatan	
					Pelaksanaan Rapat Teknis	0,00						0 Kegiatan	
214.				27 Penyusunan Data Statistik Komoditas Perkebunan									
					Tersedianya data komoditas perkebunan se papua	700.000.000,00	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.1.01 - Penataan Prasarana Pertanian	3.27.03.1.01.01 - Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Tersedianya data komoditas perkebunan se papua	1 Laporan	
215.		33 Program Kerangka Regulasi	Meningkatnya cakupan regulasi	3 Pembuatan dan Penyusunan Juknis/Juklak									
					Tersusunya petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan	0,00						0 Dokumen	
216.		40 Program Peningkatan Sumberdaya Pertanian	Persentase peningkatan kemampuan penyuluh pertanian melalui Diklat	1 Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian									
					Terlaksananya sumberdaya dan pengetahuan petugas	0,00	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	3.27.07.1.01 - Pengembangan Ketenagaan Penyuluh Pertanian	3.27.07.1.01.01 - Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN	Terlaksananya sumberdaya dan pengetahuan petugas	0 Kegiatan	
217.				8 Peningkatan Sarana Prasarana Diklat Pertanian									
					Luas Sarana Balai Diklat yang disediakan	4.000.000.000,00	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.1.01 - Penataan Prasarana Pertanian	3.27.03.1.01.10 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Luas Sarana Balai Diklat yang disediakan	400 M2	

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
218.	Pertanian	40 Program Peningkatan Sumberdaya Pertanian	Persentase peningkatan kemampuan penyuluh pertanian melalui Diklat	9 Peningkatan SDM Aparatur dan Non Aparatur Sekolah Pertanian									
					Jumlah SDM Aparatur dan Non Aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya	6.000.000.000,00	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.1.01 - Penataan Prasarana Pertanian	3.27.03.1.01.10 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Jumlah SDM Aparatur dan Non Aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya	450 Orang	
219.				10 Peningkatan Sarana Prasarana Sekolah Pertanian									
					Luas Bangunan Sekolah yang dibangun/ditingkatkan	7.000.000.000,00	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.1.01 - Penataan Prasarana Pertanian	3.27.03.1.01.10 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Luas Bangunan Sekolah yang dibangun/ditingkatkan	250 M2	
220.				11 Pekan Nasinal (PENAS) Petani Nelayan									
221.				17 Peningkatan SDM Aparatur dan Non Aparatur Balai Diklat Pertanian									
					Jumlah Aparatur dan Non Aparatur Balai Diklat yang mengikuti pelatihan	5.000.000.000,00	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	3.27.07.1.01 - Pengembangan Ketenagaan Penyuluh Pertanian	3.27.07.1.01.01 - Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN	Jumlah Aparatur dan Non Aparatur Balai Diklat yang mengikuti pelatihan	250 Orang	
222.				22 Pekan Daerah (PEDA) Kontak Tani dan dan Nelayan Papua									
					Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia	0,00						0 Unit	
223.		44 Program Peningkatan keamanan pangan dan ketahanan pangan asal hewan	Cakupan penerapan standar keamanan pangan asal hewan	1 Peningkatan mutu keamanan pangan asal hewan									
					tersedianya pangan asal hewan yang bermutu	0,00	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	3.27.04.1.05 - Kesejahteraan Hewan	3.27.04.1.05.01 - Pengelolaan Penerbitan sertifikat kesejahteraan hewan dan Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	tersedianya pangan asal hewan yang bermutu	0 Produk	
					Terlaksananya pengawasan bahan pangan asal hewan di masyarakat	0,00	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	3.27.04.1.05 - Kesejahteraan Hewan	3.27.04.1.05.01 - Pengelolaan Penerbitan sertifikat kesejahteraan hewan dan Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	Terlaksananya pengawasan bahan pangan asal hewan di masyarakat	0 Kegiatan	
					Jumlah Pengawasan bahan pangan asal hewan di masyarakat	500.000.000,00	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	3.27.04.1.05 - Kesejahteraan Hewan	3.27.04.1.05.01 - Pengelolaan Penerbitan sertifikat kesejahteraan hewan dan Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	Jumlah Pelaku usaha yang disertifikasi	10 Kali	
224.				2 Penangan pasca panen produk pangan asal hewan (PPAH) dan bahan pangan asal hewan (BPAH)									
					Jumlah pemeriksaan kualitas produk pangan asal hewan dimasyarakat	0,00						0 Sampel	
					Jumlah penangan produk pangan asal hewan di unit usaha	0,00						0 Unit	
225.				3 Pelayanan Pengujian bahan Pangan asal Hewan									
					Jumlah sampel dan pemeriksaan uji sampel produk bahan pangan asal hewan	0,00						0 Sampel	
226.		46 Pengembangan Tanaman Spesifik Lokal	Cakupan pengembangan kawasan tanaman pangan dan hortikultura	1 Ekstensifikasi Lahan Pertanian Hortikultura Spesif									
					Luas areal pengembangan lahan pertanian hortikultura spesifik	17.500.000.000,00	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.1.01 - Penataan Prasarana Pertanian	3.27.03.1.01.02 - Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Luas areal pengembangan lahan pertanian hortikultura spesifik	200 Ha	
227.				3 Penyediaan Sarana Prasarana Produksi Pertanian									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Tersedianya Sarana Prasarana Produksi Pertanian	5.000.000.000,00	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.1.01 - Penataan Prasarana Pertanian	3.27.03.1.01.01 - Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Tersedianya Sarana Prasarana Produksi Pertanian	5 Jenis	
228.				5 Penyediaan Kebun bibit komoditas unggulan pertania									
					Pembangunan Kebun Bibit Komoditas unggulan petani	5.000.000.000,00	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.1.01 - Penataan Prasarana Pertanian	3.27.03.1.01.10 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Pembangunan Kebun Bibit Komoditas unggulan petani	2 Bibit	
229.				6 penyediaan kebun bibit komodity unggulan									
					tersedianya kebun bibit	0,00						0 Unit	
230.				10 Pengembangan Kawasan Tanaman Pangan dan Hortikultura Mendukung Gerbangmas Hasrat Papua									
					Model Pengembangan rambutan	0,00						0 Ha	
					Model Pengembangan sayuran	0,00						0 Ha	
					Model Pengembangan keladi	0,00						0 Ha	
					Model Pengembangan bawang putih	0,00						0 Ha	
					Jumlah model pengembangan Kawasan TPH	0,00						0 Unit	
231.				11 Pengembangan Kawasan Konservasi Lahan									
					Jumlah Kawasan Konservasi yang dikembangkan	10.000.000.000,00	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.1.01 - Penataan Prasarana Pertanian	3.27.03.1.01.01 - Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Kawasan Konservasi yang dikembangkan/replikasi kegiatan SADP	5 Lokasi	
					Perluasan/Pengembangan Kawasan konservasi lahan	0,00	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.1.01 - Penataan Prasarana Pertanian	3.27.03.1.01.01 - Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Perluasan/Pengembangan Kawasan konservasi lahan	0 Ha	
232.		48 Penggunaan Pupuk Organik		1 Pembangunan unit pengolahan pupuk organik									
					Tersedianya pupuk organik bagi petani	0,00						0 Kg	
233.		49 Program Peningkatan Kelembagaan Penyuluh	Jumlah kelembagaan penyuluh yang meningkat kapasitasnya	1 Pendataan Kelembagaan Penyuluh									
					Jumlah lokasi pendataan kelembagaan penyuluh	450.000.000,00						9 Kabupaten	
234.				2 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Tenaga Penyuluh									
					Jumlah lembaga penyuluh yang ditingkatkan kapasitasnya	1.000.000.000,00						10 Lembaga	
235.				3 Fasilitasi Operasional Penyuluh Peternakan									
					Jumlah penyuluh peternakan yang difasilitasi	500.000.000,00						40 Orang	
236.		50 Program Peningkatan Kelembagaan Petani	Prosentase peningkatan kinerja kelembagaan petani	1 Pendataan Kelembagaan Petani Ternak									
					Jumlah lokasi pendataan kelembagaan petani ternak	350.000.000,00						5 Kabupaten	
237.				2 Peningkatan Kapsitas Kelembagaan Peternak									
					Jumlah lembaga peternak yang ditingkatkan kapasitasnya	700.000.000,00						10 Lembaga	
JUMLAH						340.784.500.000,00							

Mengetahui,
Kepala Bappeda Provinsi Papua

YOHANES WALILO, S.Sos, M.Si
NIP. 197007281997121001

JAYAPURA, 20 July 2020
KEPALA DINAS

Ir. SEMUEL SIRIWA, M. Si
NIP. 196507071989031015

**REKAPITULASI PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021
SERTA KETERKAITAN DENGAN HASIL PEMETAAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019**

PROVINSI : Papua

PERANGKAT DAERAH : Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Lingkungan Hidup	15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Cakupan pengelolaan sampah di kawasan strategis dan perkotaan; Penyediaan prasarana dan sarana TPA/TPST/SPA lintas kabupaten/kota; Persentase sampah yang terangkut ke TPA; Tersedianya kebijakan penanganan persampahan	13 Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga									
					Jumlah dokumen yang disusun	300.000.000,00	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.1.01 - Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	2.11.11.1.01.01 - Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional	Jumlah dokumen yang disusun	1 Dokumen	
2.		16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Cakupan lokasi pemantauan dan pengendalian kualitas udara ; Cakupan pemantauan dan pengendalian kualitas air ; Proporsi degradasi lahan yang tercemar; Tingkat ketaatan pemegang ijin lingkungan	1 Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura									
					Jumlah kab/kota yang mengikuti penilaian adipura	600.000.000,00	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	2.11.09.1.01 - Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	2.11.09.1.01.01 - Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah kab/kota yang mengikuti penilaian adipura	4 Kabupaten	
					Jumlah Kabupaten/Kota Yang Mengikuti Program Adipura	0,00	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	2.11.08.1.01 - Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	2.11.08.1.01.02 - Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Kabupaten/Kota Yang Mengikuti Program Adipura	0 Kabupaten	
					Jumlah Kabupaten Yang mengikuti Penilaian Kota Sehat/Adipura	0,00	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	2.11.09.1.01 - Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	2.11.09.1.01.01 - Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Kabupaten Yang mengikuti Penilaian Kota Sehat/Adipura	0 Kabupaten	
3.				19 Pembinaan dan Pengawasan Limbah B3									
					Jumlah Kegiatan/Usaha yang dibina dan diawasi/awasinya limbah B3 di Provinsi Papua	300.000.000,00	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	2.11.05.1.01 - Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	2.11.05.1.01.02 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Rumah Sakit yang diawasi	13 Unit	
4.				23 Pengembangan Sekolah Berbudaya Lingkungan (Adiwiyata)									
					Jumlah sekolah yang mengikuti program adiwiyata	300.000.000,00	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	2.11.08.1.01 - Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	2.11.08.1.01.02 - Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah sekolah yang mengikuti program adiwiyata	40 Sekolah	
5.				28 Peningkatan Kapasitas Komisi AMDAL Provinsi Papua									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					jumlah orang yang meningkat kapasitasnya	0,00	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	2.11.06.1.01 - Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	2.11.06.1.01.02 - Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	jumlah orang yang meningkat kapasitasnya	20 Orang	
6.				43 Pengawasan Lingkungan Hidup									
					Jumlah usaha/kegiatan yang diawasi	2.000.000.000,00	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	2.11.06.1.01 - Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	2.11.06.1.01.03 - Pengawasan usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah usaha/kegiatan yang diawasi	15 Perusahaan	
7.				56 Peningkatan dan Pengembangan Laboratorium BPLH									
					Melaksanakan kegiatan pengujian sample	1.000.000.000,00	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2.11.03.1.01.01 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah Sampel Yang diuji	65 Unit	
					Pembinaan Laboratorium LH Kab/Kota	0,00	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2.11.03.1.01.01 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Pembinaan Laboratorium LH Kab/Kota	0 Kabupaten	
					Jumlah aktivitas/pelayanan operasional laboratorium	0,00	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2.11.03.1.01.01 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah aktivitas/pelayanan operasional laboratorium	0 Kegiatan	
					Jumlah parameter akreditasi labororium yang tercapai	0,00	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2.11.03.1.01.01 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah parameter akreditasi labororium yang tercapai	0 Parameter	
8.				58 Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Air Sungai di Provinsi Papua									
					Jumlah Sungai yang dipantau dan dikendalikan	350.000.000,00	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2.11.03.1.01.01 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah Sungai yang dipantau dan dikendalikan	7 Kabupaten	
9.				59 Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Udara Ambien									
					Jumlah daerah yang dipantau dan dikendalikan kualitas udara	550.000.000,00	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2.11.03.1.01.01 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah daerah yang dipantau dan dikendalikan kualitas udara	6 Kabupaten	
10.				60 Pemantauan RKL/RPL									
					Jumlah Perusahaan yang dipantau	400.000.000,00	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	2.11.06.1.01 - Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	2.11.06.1.01.04 - Koordinasi dan sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Jumlah Perusahaan yang dipantau	15 Perusahaan	
11.				61 Validasi KLHS RPJMD Kab/Kota									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Jumlah Dokumen RPJMD Kab/Kota yang tervalidasi	0,00	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.02.1.02 - Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	2.11.02.1.02.02 - Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen RPJMD Kab/Kota yang tervalidasi	0 Kabupaten	
12.				62 Penyusunan RPPLH									
					Tersusunnya RPPLH Provinsi Papua	1.000.000.000,00	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.02.1.01 - Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	2.11.02.1.01.01 - Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi	Jumlah Dokumen RPPLH Provinsi Papua	1 Dokumen	
13.				63 Penyediaan Sistem Pemantauan Kualitas Air Secara Kontinyu, otomatis dan online (DAK)									
					Jumlah alat pemantau kualitas air otomatis	0,00						0 Unit	
14.				64 Validasi KLHS									
					Jumlah Dokumen	0,00	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.02.1.02 - Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	2.11.02.1.02.01 - Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Yang divalidasi	7 Dokumen	
15.		17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Cakupan lokasi perlindungan dan konservasi sumber daya alam	1 Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air									
					Jumlah sumber-sumber air yang dilindungi	300.000.000,00	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2.11.03.1.01.01 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah sumber-sumber air yang dilindungi	5	
16.				18 Penyelamatan Danau di Papua									
					Jumlah Danau yang dipantau	0,00						0 Danau	
17.		19 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Cakupan akses informasi LH yang berkualitas	3 Penyusunan neraca sumberdaya alam (NSDA)									
					Jumlah Dokumen Yang Disusun	500.000.000,00	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.02 - Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2.11.03.1.02.01 - Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Dokumen Yang Disusun	1 Dokumen	
18.				7 Penyebarluasan Informasi Lingkungan Hidup									
					Jumlah penyebarluasan informasi LH yang ditayangkan	150.000.000,00	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.02 - Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2.11.03.1.02.01 - Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah penyebarluasan informasi LH yang ditayangkan	2 Tayang	
					Jumlah media	0,00	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.02 - Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2.11.03.1.02.01 - Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah media	0 Media	
19.				13 Pekan Lingkungan Hidup Papua									
					Terlaksananya Pekan Lingkungan Hidup Papua	300.000.000,00						2 Kegiatan	
					Jumlah orang yang berpartisipasi	0,00						0 Orang	
					Banyaknya event/acara yang diikuti/diselenggarakan dalam Pekan Lingkungan Hidup	0,00						0 Acara	
20.				16 Penyusunan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan (DDDTL)									
					Jumlah Dokumen yang disusun	500.000.000,00	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	2.11.04.1.01 - Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Provinsi	2.11.04.1.01.01 - Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen yang disusun	1 Dokumen	
21.				17 Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Jumlah Dokumen yang dihasilkan	300.000.000,00	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.07 - PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	2.11.07.1.01 - Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	2.11.07.1.01.01 - Koordinasi, sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen yang dihasilkan	2 Dokumen	
22.				18 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)									
					Jumlah dokumen KLHS yang disusun	0,00	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.02.1.02 - Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	2.11.02.1.02.01 - Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah dokumen KLHS yang disusun	2 Dokumen	
23.		21 Program pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan dikawasan-kawasan konservasi laut dan hutan	Cakupan kawasan ekowisata dan jasa lingkungan yang dikembangkan	1 Pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan di kawasan konservasi									
					Jumlah lokasi yang dikembangkan untuk ekowisata dan atau jasa lingkungan	0,00	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	2.11.04.1.01 - Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Provinsi	2.11.04.1.01.01 - Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati	Jumlah lokasi yang dikembangkan untuk ekowisata dan atau jasa lingkungan	0 Lokasi	
24.				4 Pemberdayaan Masyarakat Asli Papua dalam ekowisata di Provinsi Papua									
					Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Asli Papua dalam Ekowisata	400.000.000,00	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.07 - PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	2.11.07.1.02 - Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	2.11.07.1.02.01 - Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Kampung Masyarakat Asli Papua yang diberdayakan dalam Ekowisata	2 Kampung	
25.				6 Penyelamatan Danau di Papua									
					Data kualitas air danau di paniai dan sentani	300.000.000,00	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2.11.03.1.01.01 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	jumlah Dokumen kualitas air danau	2 Kabupaten	
26.		26 Program Mitigasi dan Adaptasi Dampak Perubahan Iklim	Peningkatan implementasi RAD-GRK Provinsi Papua; Persentase kontribusi sektor energi terhadap penurunan emisi; Persentase kontribusi sektor lahan terhadap penurunan emisi; Persentase kontribusi sektor limbah terhadap penurunan emisi	6 Identifikasi Gas Rumah Kaca									
					Data penduduk, Data TPA/TPST, jumlah sampah terangkut dan terolah di 1 kota dan 6 kab	300.000.000,00	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2.11.03.1.01.02 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Data penduduk, Data TPA/TPST, jumlah sampah terangkut dan terolah di 1 kota dan 6 kab	5 Kabupaten	
					Jumlah laporan	0,00	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2.11.03.1.01.02 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah laporan	0 Laporan	
27.				9 Pengolahan Sampah di Kab/kota (Pilot Project)									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Jumlah Tempat Sampah organik-anorganik	400.000.000,00	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.1.01 - Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	2.11.11.1.01.06 - Kerjasama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah Tempat Sampah organik-anorganik	40 Unit	
					Sosialisasi bank sampah di 7 kab/kota	0,00	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.1.01 - Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	2.11.11.1.01.06 - Kerjasama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Sosialisasi bank sampah di 7 kab/kota	0 Orang	
					Perlengkapan lapangan pengelola sampah	0,00	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.1.01 - Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	2.11.11.1.01.06 - Kerjasama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Perlengkapan lapangan pengelola sampah	0 Unit	
					Jumlah alat/mesin pengalihan sampah	350.000.000,00	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.1.01 - Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	2.11.11.1.01.06 - Kerjasama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah alat/mesin pengalihan sampah	2 Unit	
28.				10 Kampung Iklim Kabupaten/Kota di Provinsi Papua									
					Jumlah Kampung Iklim	400.000.000,00	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	2.11.09.1.01 - Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	2.11.09.1.01.01 - Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Kampung Iklim	10 Kampung	
29.				17 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan									
					Jumlah penyebab gas rumah kaca yang teridentifikasi	800.000.000,00	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.02.1.02 - Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	2.11.02.1.02.01 - Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah penyebab gas rumah kaca yang teridentifikasi	1 Dokumen	
30.				18 Fasilitasi Penyusunan Jakstrada Kabupaten/Kota									
					Jumlah Dokumen yang disusun	300.000.000,00	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.1.01 - Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	2.11.11.1.01.01 - Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional	Jumlah Dokumen yang disusun	1 Dokumen	
					Jumlah kabupaten yang difasilitasi	0,00	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.1.01 - Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	2.11.11.1.01.01 - Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional	Jumlah kabupaten yang difasilitasi	0 Kabupaten	
31.		27 Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan SDA dan LH	Jumlah PPLHD yang dilatih dan bina; Jumlah SDM bidang LH yang tersertifikasi	3 Pemberdayaan Masyarakat Adat Sadar Hukum Lingkungan									
					Jumlah kelompok masyarakat sadar hukum lingkungan	0,00	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.07 - PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	2.11.07.1.02 - Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	2.11.07.1.02.01 - Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah kelompok masyarakat sadar hukum lingkungan	0 Kelompok	
32.				6 Pembentukan Pos Pengaduan Lingkungan Hidup									
					Jumlah pos pengaduan LH	150.000.000,00	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.10.1.01 - Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	2.11.10.1.01.01 - Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi	Jumlah pos pengaduan LH	1 Unit	
33.				22 Forum SKPD Lingkungan Hidup Se- Provinsi Papua									
					Jumlah Kabupaten yang mengikuti forum SKPD LH	700.000.000,00	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2.11.03.1.01.02 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Kabupaten yang mengikuti forum SKPD LH	20 Kabupaten	
34.				33 Peningkatan Kapasitas Aparatur Lingkungan Hidup									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan	500.000.000,00	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	2.11.04.1.01 - Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	2.11.04.1.01.06 - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan	50 Orang	
					Terselenggaranya Bimtek KLHS Kab/Kota	0,00	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	2.11.04.1.01 - Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	2.11.04.1.01.06 - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Terselenggaranya Bimtek KLHS Kab/Kota	0 Orang	
					Terselenggaranya Diklat PPLHD Kab/Kota	0,00	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	2.11.04.1.01 - Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	2.11.04.1.01.06 - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Terselenggaranya Diklat PPLHD Kab/Kota	0 Orang	
					Terselenggaranya Bimtek Pengolahan Sampah Kab/Kota	0,00	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	2.11.04.1.01 - Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	2.11.04.1.01.06 - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Terselenggaranya Bimtek Pengolahan Sampah Kab/Kota	0 Orang	
					Kursus Penyusunan AMDAL B	0,00	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	2.11.04.1.01 - Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	2.11.04.1.01.06 - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Kursus Penyusunan AMDAL B	0 Orang	
					Kursus PROPER	0,00	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	2.11.04.1.01 - Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	2.11.04.1.01.06 - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Kursus PROPER	0 Orang	
					Kursus UKL-UPL	0,00	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	2.11.04.1.01 - Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	2.11.04.1.01.06 - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Kursus UKL-UPL	0 Orang	
					Kursus Penilai Amdal	0,00	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	2.11.04.1.01 - Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	2.11.04.1.01.06 - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Kursus Penilai Amdal	0 Orang	
					Kursus Auditor Lingkungan	0,00					Kursus Auditor Lingkungan	0 Orang	
					Kursus Pengolahan Limbah B3	0,00	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	2.11.04.1.01 - Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	2.11.04.1.01.06 - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Kursus Pengolahan Limbah B3	0 Orang	
					Kursus Pelaporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan	0,00	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	2.11.04.1.01 - Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	2.11.04.1.01.06 - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Kursus Pelaporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan	0 Orang	
					Jumlah peserta	500.000.000,00	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	2.11.04.1.01 - Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	2.11.04.1.01.06 - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah peserta	50 Orang	
35.				37 Penilaian Dokumen Lingkungan Hidup Kegiatan Wajib Amdal									
					Jumlah dokumen amdal yang dinilai	500.000.000,00	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.02.1.01 - Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	2.11.02.1.01.01 - Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi	Jumlah dokumen amdal yang dinilai	50 Dokumen	
36.				38 Penyusunan Produk Hukum									
					Jumlah Produk Hukum	500.000.000,00						1 Dokumen	
37.				40 Kampanye Go Adipura PON 20 di 5 Wilayah Adat									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Jumlah Kabupaten yang terlaksana pemantauan dan penilaian adipura	300.000.000,00	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	2.11.08.1.01 - Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	2.11.08.1.01.02 - Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Kabupaten yang terlaksana pemantauan dan penilaian adipura	2 Kabupaten	
					Kab/Kota yang berhasil dalam kebersihan dan pengelolaan lingkungan hidup	0,00	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	2.11.08.1.01 - Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	2.11.08.1.01.02 - Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Kab/Kota yang berhasil dalam kebersihan dan pengelolaan lingkungan hidup	0 Kabupaten	
38.		28 Program Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Terfasilitasi kegiatan peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	2 Pembinaan dan Penilaian Kalpataru									
					Jumlah orang yang mendapat penghargaan	500.000.000,00	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	2.11.09.1.01 - Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	2.11.09.1.01.01 - Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah orang yang mendapat penghargaan	3 Orang	
39.	Kehutanan	1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	À Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	1 Penyediaan jasa surat menyurat									
					Jumlah surat yang disediakan	130.000.000,00		3.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.04.01.1.03 - Administrasi Umum	3.04.01.1.03.01 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang terkirim	1600 Surat	
40.				2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik									
					Jumlah Jasa Layanan berlangganan Listrik, Air, Telepon, Transponder	850.000.000,00		3.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.04.01.1.03 - Administrasi Umum	3.04.01.1.03.02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Layanan	40 Layanan	
41.				3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor									
					Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	600.000.000,00		3.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.04.01.1.03 - Administrasi Umum	3.04.01.1.03.03 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	50 Unit	
42.				6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional									
					Jumlah Unit Mobil Dinas/Operasional yang terpelihara dan Terfasilitasi Perizinannya	50.000.000,00		3.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.04.01.1.03 - Administrasi Umum	3.04.01.1.03.06 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Unit Mobil Dinas/Operasional yang diservis dan dipelihara	44 Unit	
43.				7 Penyediaan jasa administrasi keuangan									
					Jumlah Honor yang terbayarkan	750.000.000,00		3.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.04.01.1.03 - Administrasi Umum	3.04.01.1.03.07 - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pegawai yang membuat laporan	38 Orang	
44.				8 Penyediaan jasa kebersihan kantor									
					Luas Gedung dan Halaman yang disediakan jasa kebersihan	0,00		3.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.04.01.1.03 - Administrasi Umum	3.04.01.1.03.08 - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	jumlah Gedung dan Halaman yang dibersihkan	0 M2	
					Jumlah tenaga kebersihan dan Fasilitas Pendukung kebersihan kantor	1.200.000.000,00		3.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.04.01.1.03 - Administrasi Umum	3.04.01.1.03.08 - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah tenaga kebersihan	49 Orang	
					Jumlah Jenis Bahan dan Alat Kebersihan	0,00		3.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.04.01.1.03 - Administrasi Umum	3.04.01.1.03.14 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Bahan dan Alat Kebersihan	0 Jenis	
45.				9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja									
					Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	150.000.000,00		3.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.04.01.1.03 - Administrasi Umum	3.04.01.1.03.09 - Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	40 Unit	
46.				10 Penyediaan alat tulis kantor									
					Jumlah jenis ATK yang disediakan	250.000.000,00		3.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.04.01.1.03 - Administrasi Umum	3.04.01.1.03.10 - Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	3912 Jenis	
47.				11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Jumlah barang cetakan	270.000.000,00		3.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.04.01.1.03 - Administrasi Umum	3.04.01.1.03.11 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan	7933 Jenis	
					Jumlah penggandaan	0,00		3.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.04.01.1.03 - Administrasi Umum	3.04.01.1.03.11 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penggandaan	500000 Lembar	
					Jumlah Jenis Barang Cetak dan yang Disediakan	0,00		3.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.04.01.1.03 - Administrasi Umum	3.04.01.1.03.11 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0 Jenis	
					Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	0,00		3.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.04.01.1.03 - Administrasi Umum	3.04.01.1.03.11 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	0 Bulan	
48.				12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor									
					Jumlah Komponen Listrik yang disediakan	200.000.000,00		3.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.04.01.1.03 - Administrasi Umum	3.04.01.1.03.12 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen alat pemeliharaan listrik dan genset yang disediakan	100 Buah	
49.				13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor									
					Jumlah peralatan dan Perlengkapan	250.000.000,00		3.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.04.01.1.03 - Administrasi Umum	3.04.01.1.03.25 - Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah penggandaan peralatan kantor yang disediakan	50 Unit	
50.				14 Penyediaan peralatan rumah tangga									
					Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	100.000.000,00		3.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.04.01.1.03 - Administrasi Umum	3.04.01.1.03.14 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	5 Unit	
51.				15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan									
					Jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	20.000.000,00		3.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.04.01.1.03 - Administrasi Umum	3.04.01.1.03.15 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	2796 Jenis	
52.				17 Penyediaan makanan dan minuman									
					Pelaksanaan penyediaan makan dan minum	300.000.000,00		3.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.04.01.1.03 - Administrasi Umum	3.04.01.1.03.17 - Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Porsi makan dan minum kegiatan yang tersedia	350 Kegiatan	
					Pelaksanaan makan minum tamu dan rapat	40.000.000,00		3.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.04.01.1.03 - Administrasi Umum	3.04.01.1.03.17 - Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Porsi makan dan minum yang tersedia	201 Kali Tahun	
					Pelaksanaan makan minum saat olah raga (hari Jumat)	0,00		3.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.04.01.1.03 - Administrasi Umum	3.04.01.1.03.17 - Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Porsi makan dan minum yang tersedia	0 Kali	
					Tersediannya Makanan dan Minuman	0,00		3.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.04.01.1.03 - Administrasi Umum	3.04.01.1.03.17 - Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Porsi makan dan minum yang tersedia	0 Bulan	
					Jumlah orang yang disediakan makan dan minuman	0,00		3.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.04.01.1.03 - Administrasi Umum	3.04.01.1.03.17 - Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Porsi makan dan minum yang tersedia	0 Orang	
53.				18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah									
					Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	1.200.000.000,00		3.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.04.01.1.03 - Administrasi Umum	3.04.01.1.03.18 - Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	49 Orang	
54.				19 Penyediaan Jasa Pengamanan									
					Pelaksanaan pembayaran insentif bagi tenaga operator dan penjaga X-Ray VIP Room Bandara Sentani	0,00		3.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.04.01.1.03 - Administrasi Umum	3.04.01.1.03.01 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa keamanan/security yang dibayarkan	0 Orang Bulan	
					Pelaksanaan pembayaran honor bagi satpam	57.000.000,00		3.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.04.01.1.03 - Administrasi Umum	3.04.01.1.03.01 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa keamanan/security yang dibayarkan	2 Orang Bulan	
					Pelaksanaan uang makan satpam	15.000.000,00		3.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.04.01.1.03 - Administrasi Umum	3.04.01.1.03.01 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa keamanan/security yang dibayarkan	2 Orang Bulan	
					Jumlah tenaga pengamanan	911.000.000,00		3.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.04.01.1.03 - Administrasi Umum	3.04.01.1.03.01 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa keamanan/security yang dibayarkan	33 Orang	
55.		2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	À Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	2 Pembangunan rumah dinas									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Terbangunnya rumah dinas	0,00		3.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.04.01.1.03 - Administrasi Umum	3.04.01.1.03.38 - Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas	Terbangunnya rumah dinas	0 Unit	
56.				3 Pembangunan gedung kantor									
					Luas bangunan yang dibangun	4.000.000.000,00		3.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.04.01.1.03 - Administrasi Umum	3.04.01.1.03.39 - Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Luas bangunan yang dibangun	3125 M2	
					Tersedianya desain perencanaan bangunan	0,00		3.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.04.01.1.03 - Administrasi Umum	3.04.01.1.03.39 - Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Tersedianya desain perencanaan bangunan	0 Dokumen	
57.				5 Pengadaan kendaraan dinas/operasional									
					Jumlah kendaraan yang diadakan	2.000.000.000,00		3.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.04.01.1.03 - Administrasi Umum	3.04.01.1.03.21 - Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda 4	15 Unit	
					Jumlah kendaraan roda 2	0,00		3.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.04.01.1.03 - Administrasi Umum	3.04.01.1.03.21 - Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda 2	0 Unit	
58.				7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor									
					Jumlah pengadaan perlengkapan	300.000.000,00		3.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.04.01.1.03 - Administrasi Umum	3.04.01.1.03.23 - Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan	20 Unit	
59.				9 Pengadaan peralatan gedung kantor									
					Jumlah peralatan perlengkapan	500.000.000,00		3.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.04.01.1.03 - Administrasi Umum	3.04.01.1.03.25 - Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan/perlengkapan yang diadakan	2 Unit	
60.				10 Pengadaan mebeleur									
					Jumlah mebeleur yang diadakan	500.000.000,00		3.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.04.01.1.03 - Administrasi Umum	3.04.01.1.03.26 - Pengadaan Mebeleur	Jumlah mebeleur yang diadakan untuk 3 UPT	100 Unit	
61.				21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas									
					Jumlah rumah dinas yang dipelihara	0,00		3.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.04.01.1.03 - Administrasi Umum	3.04.01.1.03.28 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Jumlah rumah dinas yang dipelihara	2 Unit	
62.				22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor									
					Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1.000.000.000,00		3.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.04.01.1.03 - Administrasi Umum	3.04.01.1.03.29 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor	6 Unit	
					belanja sewa	0,00		3.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.04.01.1.03 - Administrasi Umum	3.04.01.1.03.29 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung yang disewa	0 Tahun	
63.				24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional									
					Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	0,00		3.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.04.01.1.03 - Administrasi Umum	3.04.01.1.03.31 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah dan Jenis perlengkapan/peralatan gedung kantor yang dipelihara	0 Unit	
					Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	500.000.000,00		3.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.04.01.1.03 - Administrasi Umum	3.04.01.1.03.31 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang	40 Unit	
					sewa kendaraan	0,00		3.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.04.01.1.03 - Administrasi Umum	3.04.01.1.03.31 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan yang diperbaiki/Service	0 Bulan	
64.				26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor									
					Pelaksanaan pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	750.000.000,00		3.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.04.01.1.03 - Administrasi Umum	3.04.01.1.03.27 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Jumlah Rumah Jabatan	6 Kegiatan	
					Jumlah Perlengkapan Gedung kantor yang terpelihara	0,00		3.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.04.01.1.03 - Administrasi Umum	3.04.01.1.03.33 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung kantor yang dipelihara	0 Unit	
					Tersedianya biaya pemeliharaan gedung kantor	0,00		3.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.04.01.1.03 - Administrasi Umum	3.04.01.1.03.39 - Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor	0 Bulan	
65.				29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur									
					Jumlah mebeleur yang dipelihara	200.000.000,00		3.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.04.01.1.03 - Administrasi Umum	3.04.01.1.03.36 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Jumlah mebeleur yang dipelihara	50 Unit	

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
66.	Kehutanan	2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	À Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	30 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor									
					Luas bangunan yang direhab	0,00		3.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.04.01.1.03 - Administrasi Umum	3.04.01.1.03.39 - Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Jumlah bangunan yang direhab	1500 M2	
67.				41 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas									
					Luas bangunan yang direhab	0,00		3.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.04.01.1.03 - Administrasi Umum	3.04.01.1.03.38 - Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas	Luas bangunan yang direhab	0 M2	
68.				44 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional									
69.				46 Sewa gedung									
					Jumlah gedung kantor yang disewa	1.200.000.000,00		3.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.04.01.1.03 - Administrasi Umum	3.04.01.1.03.27 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Jumlah rumah jabatan yang terpelihara	32 Unit Tahun	
					Sewa rumah jabatan	0,00		3.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.04.01.1.03 - Administrasi Umum	3.04.01.1.03.27 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Jumlah Rumah Jabatan Yang disewa	0 Unit Tahun	
70.		3 Program peningkatan disiplin aparatur	À Meningkatnya disiplin aparatur	1 Pengadaan mesin/kartu absensi									
					Jumlah Mesin /Kartu Absensi yang tersedia	0,00		3.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.04.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	3.04.01.1.04.01 - Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Jumlah Mesin /Kartu Absensi yang tersedia	0 Bh	
71.				2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya									
					Jumlah pakaian dinas yang diadakan	0,00		3.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.04.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	3.04.01.1.04.02 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas sipil harian	0 Stell	
72.				3 Pengadaan pakaian kerja lapangan									
					Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan	0,00		3.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.04.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	3.04.01.1.04.03 - Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan	0 Stell	
73.				4 Pengadaan pakaian KORPRI									
					jumlah pakaian KORPRI yang diadakan	0,00		3.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.04.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	3.04.01.1.04.04 - Pengadaan Pakaian Korpri	Jumlah pakaian KORPRI yang diadakan	0 Stell	
74.				5 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu									
					Jumlah pakaian khusus yang diadakan	787.000.000,00		3.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.04.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	3.04.01.1.04.05 - Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah pakaian Batik yang diadakan	787 Stell	
75.		4 Program fasilitas pindah/purna tugas PNS	À Meningkatnya kualitas penangan pindah/purna tugas PNDNS	1 Pemulangan pegawai yang pensiun									
					Jumlah pegawai pensiun yang difasilitasi	300.000.000,00		3.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.04.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	3.04.01.1.04.06 - Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah pegawai pensiun yang difasilitasi	10 Orang	
76.				3 Jumlah pegawai di fasilitasi Pemindahan tugas									
					Jumlah pegawai yang difasilitasi	300.000.000,00		3.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.04.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	3.04.01.1.04.08 - Pemindahan Tugas PNS	Jumlah pegawai yang difasilitasi	10 Orang	
77.		5 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	À Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	1 Pendidikan dan pelatihan formal									
					Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	300.000.000,00		3.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.04.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	3.04.01.1.04.09 - Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparatur mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	10 Orang	
78.				2 Sosialisasi peraturan perundang-undangan									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	300.000.000,00		3.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.04.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	3.04.01.1.04.10 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	30 Orang	
79.				3 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan									
					Jumlah peserta bimbingan teknis tentang implementasi peraturan perundang-undangan	400.000.000,00		3.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.04.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	3.04.01.1.04.11 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta bimbingan teknis tentang implementasi peraturan perundang-undangan	35 Orang	
80.				4 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal									
					Jumlah aparatur yang terlatih	300.000.000,00		3.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.04.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	3.04.01.1.04.11 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	
81.		6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	À Meningkatnya kualitas akuntabilitas OPD	1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD									
					Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	120.000.000,00		3.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.04.01.1.02 - Administrasi Keuangan	3.04.01.1.02.06 - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan	30 Laporan	
					Laporan LAKIP SKPD	0,00		3.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.04.01.1.01 - Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.04.01.1.01.05 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan LAKIP SKPD	0 Dokumen	
82.				2 Penyusunan laporan keuangan semesteran									
					Jumlah pelaporan keuangan semesteran yang diselesaikan tepat waktu	5.000.000,00		3.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.04.01.1.02 - Administrasi Keuangan	3.04.01.1.02.07 - Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Jumlah dokumen laporan	5 Laporan	
83.				3 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran									
					Jumlah pelaporan prognosis realisasi anggaran yang diselesaikan tepat waktu	5.000.000,00		3.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.04.01.1.02 - Administrasi Keuangan	3.04.01.1.02.08 - Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah pelaporan prognosis realisasi anggaran yang diselesaikan tepat waktu	10 Laporan	
84.				4 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun									
					Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	100.000.000,00		3.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.04.01.1.02 - Administrasi Keuangan	3.04.01.1.02.09 - Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	30 Laporan	
85.				5 Penyusunan Renja, RKA dan Perubahan APBD									
					Jumlah dokumen	200.000.000,00		3.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.04.01.1.01 - Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.04.01.1.01.01 - Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	30 Dokumen	
86.				12 Penyusunan RENSTRA									
					Jumlah Dokumen	0,00		3.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.04.01.1.01 - Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.04.01.1.01.01 - Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	0 Dokumen	
87.				13 Penyusunan SOP									
					Jumlah Dokumen	1.000.000.000,00		3.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.04.01.1.01 - Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.04.01.1.01.04 - Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	5 Dokumen	
88.				14 Peningkatan Kapasitas PPID									
					Jumlah orang	200.000.000,00		3.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.04.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	3.04.01.1.04.09 - Pendidikan dan Pelatihan Formal	Pembinaan Administrasi Kepegawaian	10 Orang	
89.				16 Penyusunan Dokumen Rencana Umum Pengadaan (RUP)									
					Jumlah Dokumen Rencana Umum Pengadaan (RUP)	5.000.000,00		3.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.04.01.1.01 - Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.04.01.1.01.04 - Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Umum Pengadaan (RUP)	10 Dokumen	

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
90.	Kehutanan	15 Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan	Cakupan pengembangan industri kayu masyarakat adat ; Nilai produksi sumber daya kehutanan	1 Pembentukan kesatuan pengelolaan hutan produksi									
91.				2 Pengembangan hutan tanaman									
					Luas Hutan Rakyat yang Dikembangkan	0,00	3.28 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.03 - PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.04 - Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	3.28.03.1.04.02 - Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dikembangkan	1 Ha	
92.				3 Pengembangan hasil hutan non-kayu									
					Peningkatan dan pengembangan HHBK di Papua	0,00	3.28 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.03 - PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.06 - Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	3.28.03.1.06.03 - Pembudidayaan Hasil Hutan bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Peningkatan dan pengembangan HHBK di Papua	1 Unit	
					Jumlah pemengan ijin HHBK	0,00	3.28 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.03 - PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.06 - Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	3.28.03.1.06.03 - Pembudidayaan Hasil Hutan bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Jumlah pemengan ijin HHBK	1 Unit	
93.				4 Perencanaan dan pengembangan hutan kemasyarakatan									
94.				5 Optimalisasi PNBPN									
					Tersedianya PNBPN secara lengkap	0,00	3.28 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.03 - PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.03 - Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	3.28.03.1.03.04 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Tersedianya PNBPN secara lengkap	180000000000 Kegiatan	
95.				6 Pengelolaan dan pemanfaatan hutan									
96.				7 Pengembangan industri dan pemasaran hasil hutan									
					tertib pengolahan hasil hutan kayu	0,00	3.28 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.03 - PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.07 - Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	3.28.03.1.07.02 - Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	tertib pengolahan hasil hutan kayu	1 Perusahaan	
					Jumlah ijin yang diterbitkan	0,00	3.28 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.03 - PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.07 - Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	3.28.03.1.07.02 - Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah ijin yang diterbitkan	1 Unit	
97.				8 Pengembangan pengujian dan pengendalian peredaran hasil hutan									
					Jumlah Unit Usaha yang di Monitoring	0,00	3.28 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.03 - PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.03 - Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	3.28.03.1.03.04 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Unit Usaha yang di Monitoring	1 Unit	
98.				12 Peningkatan kinerja pemanfaatan hasil hutan Kayu									
					Optimalisasi Produksi Hasil Hutan	0,00	3.28 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.03 - PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.03 - Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	3.28.03.1.03.06 - Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi	Optimalisasi Produksi Hasil Hutan	0 Perusahaan	
					Meningkatnya kinerja pengolahan kayu bagi pemegang izin	600.000.000,00	3.28 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.03 - PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.03 - Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	3.28.03.1.03.06 - Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Perusahaan Pemegang Ijin	20 Perusahaan	
99.				15 Pembangunan Hutan Tanaman Masyarakat Hukum Adat									
					tersedianya hutan tanaman masy hukum adat	0,00	3.28 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.03 - PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.04 - Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	3.28.03.1.04.02 - Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	tersedianya hutan tanaman masy hukum adat	1 Ha	
100.				16 Pameran pembangunan kehutanan Papua									
					Jumlah Event Yang diikuti	1.500.000.000,00	3.28 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.03 - PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.06 - Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	3.28.03.1.06.01 - Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati	Jumlah komoditi HHBK yang di pameran	10 Komoditi	
					Jumlah Pameran/Promosi kehutanan yang diikuti	0,00	3.28 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.03 - PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.06 - Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	3.28.03.1.06.01 - Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati	Jumlah Pameran/Promosi kehutanan yang diikuti	0 Kegiatan	

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
101.	Kehutanan	15 Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan	Cakupan pengembangan industri kayu masyarakat adat ; Nilai produksi sumber daya kehutanan	19 Pembinaan dan Pengendalian Industri Primer Hasil Hutan									
					Jumlah Unit Industri Pengelola Hasil Hutan yang dibina	500.000.000,00	3.28 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.03 - PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.07 - Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	3.28.03.1.07.02 - Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Unit Industri Pengelola Hasil Hutan yang dibina	25 Unit	
102.				20 Peningkatan Tertib Produksi dan Peredaran Hasil Hutan									
					Jumlah Ijin yang diterbitkan	1.200.000.000,00	3.28 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.03 - PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.03 - Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	3.28.03.1.03.04 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Ijin yang diterbitkan	20 Perusahaan	
103.				23 Peningkatan Penatausahaan Iuran Kehutanan									
					Tertib Penatausahaan Iuran Kehutanan	0,00	3.28 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.03 - PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.03 - Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	3.28.03.1.03.04 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Tertib Penatausahaan Iuran Kehutanan	0 Perusahaan	
					Jumlah iuran kehutanan yang masuk ke kas negara	0,00	3.28 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.03 - PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.03 - Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	3.28.03.1.03.04 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah pemegang izin yang membayar iuran	180000000000 Rupiah	
					Jumlah pemegang izin yang membayar iuran	1.000.000.000,00	3.28 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.03 - PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.03 - Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	3.28.03.1.03.04 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah pemegang izin usaha yang membayar iuran	20 Perusahaan	
104.				24 Pemetaan Partisipatif Masyarakat Adat Pemilik Hak Ulayat									
					Jumlah Wilayah Hutan Adat yang dilakukan pemetaan partisipatif	1.000.000.000,00	3.28 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.03 - PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.03 - Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	3.28.03.1.03.01 - Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah wilayah Hutan adat yang dipetakan	2 Lokasi	
					Jumlah Lokasi Hutan Masyarakat Adat yang dipetakan	0,00	3.28 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	3.28.05.1.01 - Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	3.28.05.1.01.02 - Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Lokasi Hutan Masyarakat Adat yang dipetakan	0 Lokasi	
105.				25 Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Silvikultur pada IUPHHK-HA									
					Jumlah IUPHHK-HA yang dibina pelaksanaan silvikultur	400.000.000,00	3.28 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.03 - PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.03 - Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	3.28.03.1.03.06 - Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah IUPHHK-HA yang dibina pelaksanaan silvikultur	15 Perusahaan	
106.				26 Peningkatan Tertib Produksi dan Peredaran Hasil Hutan									
					Tersedia Laporan monitoring dan pengendalian peredaran hasil hutan	0,00						15 Unit	
107.				28 Pengembangan Usaha Pemanfaatan Kayu Masyarakat Hukum Adat									
					Jumlah Usaha pemanfaatan kayu masyarakat hukum adat	1.000.000.000,00	3.28 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.03 - PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.06 - Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	3.28.03.1.06.04 - Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan bukan Kayu	Jumlah Usaha pengolahan hasil hutan masyarakat hukum adat	10 Unit	
					Jumlah Kelompok masyarakat yang berkembang usaha pemanfaatan kayu	0,00	3.28 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.03 - PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.06 - Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	3.28.03.1.06.04 - Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan bukan Kayu	Jumlah Usaha pengolahan hasil hutan masyarakat hukum adat	10 Kelompok	
108.				29 Pengembangan Industri Kayu Masyarakat Hukum Adat									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Jumlah Industri Kayu Rakyat yang dibangun	600.000.000,00	3.28 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.03 - PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.03 - Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	3.28.03.1.03.04 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Industri Kayu Rakyat yang dibangun	5 Unit	
109.				31 Pengembangan Sarana dan Prasarana Usaha Ekonomi Produktif melalui Kelompok Tani Hutan (KTH) (DAK)									
					Jumlah Kelompok Tani Hutan	500.000.000,00	3.28 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	3.28.06.1.01 - Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kab/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	3.28.06.1.01.04 - Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Jumlah Kelompok Tani Hutan	10 Kelompok	
					Jumlah sarana pengembangan hasil hutan	0,00	3.28 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	3.28.06.1.01 - Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kab/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	3.28.06.1.01.04 - Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Jumlah sarana pengembangan hasil hutan	0 Unit	
110.		16 Program rehabilitasi hutan dan lahan	Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan; Rasio pencapaian restorasi lahan gambut; Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	1 Koordinasi penyelenggaraan reboisasi dan penghijauan hutan									
					Rehabilitasi Hutan dan Tanaman Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	3.500.000.000,00	3.28 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.03 - PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.04 - Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	3.28.03.1.04.09 - Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Luas areal yang dilakukan rehabilitasi hutan dan penghijauan	100 Ha	
111.				2 Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan									
112.				3 Penanaman pohon pada kawasan hutan industri dan hutan wisata									
113.				4 Pemeliharaan kawasan hutan industri dan hutan wisata									
114.				6 Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan									
					Tesedianya Peningkatan peran	0,00	3.28 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	3.28.06.1.01 - Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kab/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	3.28.06.1.01.04 - Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Jumlah masyarakat/kelompok tani yang terlibat dalam kegiatan RHL	4 Kegiatan	
					Jumlah kelompok masyarakat yang ditingkatkan perannya dalam RHL	1.000.000.000,00	3.28 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	3.28.06.1.01 - Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kab/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	3.28.06.1.01.04 - Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Jumlah masyarakat/kelompok tani yang terlibat dalam kegiatan RHL	6 Kelompok	
115.				9 Pengembangan perbenihan tanaman hutan									
					Jumlah sumber benih dan kebun benih yang bersertifikat	0,00	3.28 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.03 - PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.04 - Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	3.28.03.1.04.06 - Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Jumlah sumber benih dan kebun benih yang bersertifikat	0 Bibit	
					Luas kebun benih yang dibangun dan dikelola	700.000.000,00	3.28 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.03 - PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.04 - Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	3.28.03.1.04.06 - Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Luas kebun benih yang dibangun dan dikelola	2 Ha	
					Jumlah sumber benih yang di sertifikat	0,00	3.28 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.03 - PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.04 - Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	3.28.03.1.04.06 - Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Jumlah sumber benih dan kebun benih yang bersertifikat	2 Lokasi	
					Luas areal sumberdaya genetik (ASDG) yang dikonservasi	0,00	3.28 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.03 - PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.04 - Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	3.28.03.1.04.06 - Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Jumlah sumber benih dan kebun benih yang bersertifikat	2 Ha	

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
116.	Kehutanan	16 Program rehabilitasi hutan dan lahan	Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan; Rasio pencapaian restorasi lahan gambut; Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	10 Pengembangan pembibitan tanaman hutan Papua									
117.				12 Kampanye Papua Menanam									
					Luas areal yang dilakukan penanaman	700.000.000,00	3.28 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.03 - PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.04 - Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	3.28.03.1.04.09 - Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Luas areal yang dilakukan penanaman	5 Lokasi	
					Jumlah kegiatan kampanye yang dilakukan	0,00	3.28 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.03 - PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.04 - Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	3.28.03.1.04.09 - Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah kegiatan kampanye yang dilakukan	0 Kali	
118.				13 Pembinaan kawasan Cagar Alam Cycloop									
					Luas kawasan CA Cycloop yang dilakukan penanaman	0,00						0 Hektar	
119.				15 Pengembangan kawasan hutan mangrove									
					Luas wilayah Hutan Mangrove yang dikelola	1.200.000.000,00	3.28 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.04 - PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	3.28.04.1.03 - Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	3.28.04.1.03.04 - Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah	Luas Hutan Mangrove yang direhabilitasi dan kelompok pengelola hutan mangrove	60 Hektar	
120.				16 Pengelolaan Balai Perbenihan Tanaman Hutan									
					Kinerja pengelolaan UPTD BPTH dalam produksi bibit dan benih tanaman hutan	0,00						0 Persentase	
					Jumlah unit UPTD pengelola perbenihan dan persemaian tanaman hutan	0,00						0 Unit	
					Jumlah pengelola sumber benih dan persemaian yang ditingkatkan kapasitasnya	0,00						0 Orang	
121.				17 Pengembangan Aneka Usaha Kehutanan									
					Peningkatan Kapasitas Kelompok Usaha Masyarakat	2.500.000.000,00	3.28 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.03 - PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.06 - Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	3.28.03.1.06.03 - Pembudidayaan Hasil Hutan bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Jumlah kelompok usaha budidaya dan pengembangan komoditi Hasil Hutan Bukan Kayu	10 Kelompok	
					Jumlah komoditi hasil hutan yang dikembangkan	0,00	3.28 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.03 - PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.06 - Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	3.28.03.1.06.03 - Pembudidayaan Hasil Hutan bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Jumlah komoditi hasil hutan yang dikembangkan	0 Komoditi	
122.				18 Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan									
					Terpeliharanya Tanaman Masy dgn Jenis Tanaman Unggulan	500.000.000,00	3.28 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.03 - PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.04 - Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	3.28.03.1.04.09 - Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Kelompok penyelenggara kegiatan RHL yang dibina	5 Ha	
123.				21 Pengelolaan Balai Perbenihan tanaman Hutan									
124.				22 Pengembangan Persemaian Tanaman hutan									
					Jumlah bibit tanaman hutan yang diproduksi	1.000.000.000,00	3.28 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.03 - PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.04 - Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	3.28.03.1.04.06 - Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Jumlah bibit tanaman hutan yang diproduksi	100000 Bibit	
125.				28 Pembinaan dan Pengembangan Penyuluh									
					Peningkatan Kapasitas Penyuluh	0,00						20 Orang	
					terlaksananya diklat penyuluh kehutanan	0,00						0 Orang	
126.				37									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
127.	Kehutanan	16 Program rehabilitasi hutan dan lahan	Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan; Rasio pencapaian restorasi lahan gambut; Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	38 Peningkatan Kapasitas Penyuluh Kehutanan/PKSM									
					Jumlah penyuluh kehutanan yang ditingkatkan kapasitasnya	250.000.000,00	3.28 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	3.28.05.1.01 - Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	3.28.05.1.01.01 - Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah penyuluh kehutanan yang ditingkatkan kapasitasnya	15 Orang	
128.				39 Pembinaan dan Pengembangan Penyuluhan dan Kelompok Tani Hutan									
					Jumlah Penyuluh dan Kelompok Tani Hutan yang dibina dan dikembangkan	200.000.000,00	3.28 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	3.28.05.1.01 - Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	3.28.05.1.01.02 - Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Penyuluh dan Kelompok Tani Hutan yang dibina dan dikembangkan	15 Kelompok	
129.				40 Sertifikasi areal sumber benih									
					Jumlah areal sumber benih yang tersertifikasi	250.000.000,00	3.28 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.03 - PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.09 - Perbenihan Tanaman Hutan	3.28.03.1.09.02 - Sertifikasi Sumber Benih	Jumlah sumber benih yang tersertifikasi	2 Lokasi	
130.				41 Pengembangan area sumber daya genetik									
					Jumlah lokasi area sumber daya genetik yang di kembangkan	250.000.000,00	3.28 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.03 - PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.04 - Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	3.28.03.1.04.06 - Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Luas areal sumber daya genetik yang di konservasi	2 Lokasi	
131.		17 Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan	Luasan tutupan kawasan konservasi	1 Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan									
					terbentuknya kelompok masyarakat peduli api (MPA)	0,00	3.28 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.03 - PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.04 - Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	3.28.03.1.04.08 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	terbentuknya kelompok masyarakat peduli api (MPA)	0 Group	
					Jumlah kelompok masyarakat peduli api yang terbentuk	0,00	3.28 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.03 - PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.04 - Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	3.28.03.1.04.08 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah kelompok masyarakat peduli api yang terbentuk	0 Kelompok	
132.				2 Sosialisasi pencegahan dan dampak kebakaran hutan dan lahan									
					Terlaksananya sosialisasi pada kelompok masyarakat peduli Api	0,00	3.28 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.03 - PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.04 - Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	3.28.03.1.04.08 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Terlaksananya sosialisasi pada kelompok masyarakat peduli Api	0 Orang	
					Jumlah kelompok yang tersosialisai	0,00	3.28 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.03 - PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.04 - Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	3.28.03.1.04.08 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah kelompok yang tersosialisai	0 Kelompok	
133.				3 Bimbingan teknis pengendalian kebakaran hutan dan lahan									
					Terlaksananya bimbingan teknis dan simulasi penanganan kebakaran hutan oleh SATGASDAKARLUT	0,00	3.28 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.03 - PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.04 - Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	3.28.03.1.04.08 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Terlaksananya bimbingan teknis dan simulasi penanganan kebakaran hutan oleh SATGASDAKARLUT	0 Orang	
					Jumlah peserta BIMTEK dan simulasi penanganan kebakaran	544.500.000,00	3.28 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.03 - PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.04 - Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	3.28.03.1.04.08 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah peserta BIMTEK dan simulasi penanganan kebakaran	200 Orang	
134.				4 Penanggulangan kebakaran baton dan lahan									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Terbentuknya daerah operasi pengendalian kebakaran hutan	2.750.000.000,00	3.28 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.03 - PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.04 - Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	3.28.03.1.04.08 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah wilayah yang tertangulangi	1 Lokasi	
					Terbentuknya daops dalkarhut	0,00	3.28 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.03 - PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.04 - Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	3.28.03.1.04.08 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Terbentuknya daops dalkarhut	0 Unit	
135.				5 Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak perusakan hutan									
					Jumlah anggota Pramuka (Saka Wanabhakti) dalam keterlibatan Peduli Hutan	0,00	3.28 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.03 - PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.05 - Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	3.28.03.1.05.01 - Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Jumlah anggota Pramuka (Saka Wanabhakti) dalam keterlibatan Peduli Hutan	0 Kelompok	
					Terlibatnya kelembagaan masyarakat adat dalam penanganan dampak Kerusakan hutan	0,00	3.28 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.03 - PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.05 - Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	3.28.03.1.05.01 - Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Terlibatnya kelembagaan masyarakat adat dalam penanganan dampak Kerusakan hutan	0 Kegiatan	
					Jumlah kelompok masyarakat yang tersuluh	500.000.000,00	3.28 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.03 - PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.05 - Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	3.28.03.1.05.02 - Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Jumlah kelompok masyarakat yang tersuluh	5 Kelompok	
136.				7 Pengelolaan wisata alam di kawasan konservasi									
					Usaha wisata alam	450.000.000,00	3.28 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.04 - PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	3.28.04.1.03 - Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	3.28.04.1.03.06 - Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Kelompok yang dibina	5 Unit	
					Usaha wisata alam	0,00	3.28 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.04 - PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	3.28.04.1.03 - Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	3.28.04.1.03.06 - Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Usaha wisata alam	0 Lokasi	
137.				8 Operasi pengamanan hutan terpadu									
					Menurunnya Kasus Ilegal Logging yang di tangani	0,00	3.28 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.03 - PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.05 - Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	3.28.03.1.05.01 - Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Menurunnya Kasus Ilegal Logging yang di tangani	0 Kasus	
					Terselenggaranya operasi pengamanan hutan	2.500.000.000,00	3.28 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.03 - PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.05 - Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	3.28.03.1.05.01 - Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Jumlah wilayah operasi pengamanan hutan	6 Lokasi	
					Jumlah operasi pengamanan hutan yang dilaksanakan	0,00	3.28 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.03 - PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.05 - Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	3.28.03.1.05.01 - Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Jumlah operasi pengamanan hutan yang dilaksanakan	0 Kali	
138.				10 Penyidikan kasus bidang kehutanan									
					Jumlah kasus Kehutanan yang di proses penyidikan	334.125.000,00	3.28 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.03 - PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.05 - Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	3.28.03.1.05.02 - Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Jumlah kasus Kehutanan yang di proses penyidikan	2 Kasus	
139.				12 Pengelolaan Taman Burung dan Taman Anggrek (TBTA) Biak									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Meningkatnya kinerja penangkaran satwa burung dan flora anggrek sebagai media pengembangan konservasi , iptek	700.000.000,00	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	2.11.04.1.01 - Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Provinsi	2.11.04.1.01.02 - Pengelolaan Taman Keaneekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Meningkatnya kinerja penangkaran satwa burung dan flora anggrek sebagai media pengembangan konservasi , iptek	1 Persentase	
					Peningkatan pengelolaan 1 unit taman burung dan taman angrek	0,00	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	2.11.04.1.01 - Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Provinsi	2.11.04.1.01.02 - Pengelolaan Taman Keaneekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Peningkatan pengelolaan 1 unit taman burung dan taman angrek	0 Unit	
140.				13 Pengelolaan Kebun Botani Kehutanan Papua									
					Kinerja Pengelolaan Kebun Botani/Raya Papua	0,00						0 Persentase	
					peningkatan pengelolaan 1 unit kebun botani papua	0,00						0 Unit	
141.				18 Pengembangan jasa lingkungan									
					Pengembangan model secara voluntary mitigasi perubahan iklim	0,00						0 Lokasi	
					Jumlah model secara voluntary mitigasi perubahan iklim	0,00						0 Lokasi	
142.				21 Pembinaan Masyarakat Adat di dalam Kawasan Konservasi									
					meningkatnya peran serta masyarakat dalam Konservasi Kawasan	0,00	3.28 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.04 - PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	3.28.04.1.03 - Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	3.28.04.1.03.05 - Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	meningkatnya peran serta masyarakat dalam Konservasi Kawasan	0 Kegiatan	
					Terselenggaranya pembinaan masyarakat adat di dalam kawasan konservasi	550.000.000,00	3.28 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.04 - PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	3.28.04.1.03 - Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	3.28.04.1.03.05 - Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah kelompok masyarakat adat yang dibina	3 Lokasi	
143.				27 Pembentukan PAmhut Masyarakat Hukum Adat									
					Jumlah Kelompok pengeamanan hutan masyarakat adat ynung dibentuk	0,00	3.28 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.04 - PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	3.28.04.1.03 - Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	3.28.04.1.03.05 - Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Kelompok pengeamanan hutan masyarakat adat ynung dibentuk	0 Kelompok	
					Jumlah kelompok pamhut masyarakat ada yang di bentuk	618.094.000,00	3.28 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.04 - PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	3.28.04.1.03 - Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	3.28.04.1.03.05 - Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah kelompok pamhut masyarakat ada yang di bentuk	4 Kelompok	
144.				29 Perlindungan Hutan dan Pengelolaan Kawasan Konservasi									
					Meningkatnya pengembangan kawasan Wisata alam di Kawasan Konservasi	700.000.000,00	3.28 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.03 - PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.05 - Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	3.28.03.1.05.04 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah kawasan yang dikelola	3 Kabupaten	
					meningkatnya pengelolaan kawasan wisata alam	0,00	3.28 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.03 - PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.05 - Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	3.28.03.1.05.04 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	meningkatnya pengelolaan kawasan wisata alam	0 Lokasi	
145.				36 Pengembangan Koleksi Satwa dan Anggrek di TBTA									
					Tersedianya Koleksi Satwa dan anggrek	300.000.000,00	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	2.11.04.1.01 - Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Provinsi	2.11.04.1.01.02 - Pengelolaan Taman Keaneekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Jumlah Koleksi Satwa dan anggrek	5 Kegiatan	
146.				37 Pengembangan Wisata di TBTA Biak									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					meningkatnya PAD	300.000.000,00	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	2.11.04.1.01 - Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Provinsi	2.11.04.1.01.02 - Pengelolaan Taman Keaneekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Jumlah PAD	1 Kegiatan	
147.				39 Pengelolaan Kawasan Gambut dan Rawa									
					Jumlah Lokasi Pengelolaan Gambut dan Rawa	350.000.000,00	3.28 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.04 - PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	3.28.04.1.03 - Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	3.28.04.1.03.03 - Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Lahar Basah	Jumlah Lokasi Pengelolaan Gambut dan Rawa	2 Lokasi	
148.				40 Pengkajian PEP PPRK (Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon)									
					Jumlah Dokumen PPRK yang dikaji	175.000.000,00						1 Dokumen	
149.				41 Peningkatan Kapasitas Polisi Kehutanan dan PPNS Kehutanan									
					Jumlah Polisi dan PPNS Kehutanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2.583.394.000,00	3.28 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	3.28.05.1.01 - Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	3.28.05.1.01.01 - Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Polisi dan PPNS Kehutanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	20 Orang	
150.				42 Pengembangan Data dan Informasi Cagar Alam Cycloop dan Danau Sentani									
					Jumlah Dokumen Data dan Informasi Cagar Alam Cycloop dan Danau Sentani	500.000.000,00	3.28 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.03 - PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.03 - Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	3.28.03.1.03.02 - Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Cagar Alam Cycloop dan Danau Sentani	1 Dokumen	
151.				43 Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial									
					Jumlah Lokasi Kawasan Esensial yang dikelola	500.000.000,00	3.28 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.04 - PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	3.28.04.1.03 - Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	3.28.04.1.03.01 - Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Karst	Jumlah Lokasi Kawasan Esensial yang dikelola	1 Lokasi	
152.				44 Perlindungan Hutan dan Pengelolaan Kawasan Penyangga Konservasi									
					Jumlah Hutan dan Kawasan Penyangga Konservasi yang dilindungi	550.000.000,00	3.28 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.03 - PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.05 - Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	3.28.03.1.05.04 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Hutan dan Kawasan Penyangga Konservasi yang dilindungi	3 Lokasi	
153.				45 Penyediaan Sarana dan Prasarana Ekowisata									
					Jumlah Sarana dan Prasarana Ekowisata	1.500.000.000,00	3.28 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.04 - PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	3.28.04.1.03 - Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	3.28.04.1.03.01 - Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Karst	Jumlah Sarana dan Prasarana Ekowisata	1 Unit	
154.				46 Pelatihan Pengelola Ekowisata									
					Jumlah Pelatihan	450.000.000,00	3.28 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.04 - PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	3.28.04.1.03 - Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	3.28.04.1.03.05 - Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Pelatihan	5 Kegiatan	
155.				47 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelengkap Kebun Raya Koya Koso									
					Jumlah Sarana dan Prasarana yang tersedia	1.000.000.000,00	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	2.11.04.1.01 - Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Provinsi	2.11.04.1.01.07 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keaneekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana yang tersedia	2 Unit	

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
156.	Kehutanan	17 Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan	Luasan tutupan kawasan konservasi	48 Pembebasan Lahan/Tanah Kebun Raya Koya Koso									
					Luas Tanah yang dibebaskan	1.000.000.000,00	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	2.11.04.1.01 - Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Provinsi	2.11.04.1.01.07 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keaneekaragaman Hayati	Luas Tanah yang dibebaskan	100 Hektar	
157.		20 Program perencanaan dan pengembangan hutan	Persentase luas usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem	1 Pengembangan hutan masyarakat adat									
					Terbangunnya Demplot (Luas Demplot)	0,00	3.28 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.03 - PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.04 - Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	3.28.03.1.04.02 - Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Terbangunnya Demplot (Luas Demplot)	0 Ha	
					terlaksananya pengembangan hutan masyarakat adat	0,00	3.28 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.03 - PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.04 - Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	3.28.03.1.04.02 - Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	terlaksananya pengembangan hutan masyarakat adat	0 Lokasi	
					terlaksananya pengembangan hutan masyarakat adat	0,00	3.28 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	3.28.06.1.01 - Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kab/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	3.28.06.1.01.04 - Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	terlaksananya pengembangan hutan masyarakat adat	2 Lokasi	
					Fasilitasi hasil - hasil produksi dan pengembangan usaha masyarakat hukum adat	0,00	3.28 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.04 - PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	3.28.04.1.03 - Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	3.28.04.1.03.05 - Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Fasilitasi hasil - hasil produksi dan pengembangan usaha masyarakat hukum adat	0 Unit	
					Bimbingan Teknis kehutanan bagi masyarakat hukum adat	0,00	3.28 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.04 - PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	3.28.04.1.03 - Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	3.28.04.1.03.05 - Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Bimbingan Teknis kehutanan bagi masyarakat hukum adat	0 Orang	
158.				2 Pendampingan kelompok usaha perhutanan rakyat									
					Jumlah Kelompok Usaha yang didampingi	0,00	3.28 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.04 - PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	3.28.04.1.03 - Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	3.28.04.1.03.05 - Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Kelompok Usaha yang didampingi	2 Kelompok	
159.				12 Pengelolaan Cabang Dinas Kehutanan di Provinsi Papua									
					Fasilitas pengembangan Cabang Dinas Kehutanan	0,00						0 Kabupaten	
160.				13 Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Provinsi Papua									
					Terealisasinya Pengelolaan 14 KPH	0,00						0 Unit	
					terbangunnya 5 Unit KPH	0,00						0 Unit	
					Evaluasi monitoring dan pengendalian	0,00						0 Unit	
161.				14 Rapat Kerja Teknis Kehutanan Provinsi									
					Penyusunan rencana dan sinkronisasi program pembangunan kehutanan	1.000.000.000,00						1 Orang	
					Jumlah pelaksanaan Rapat Kerja Teknis	0,00						0 Kali	
162.				15 Pengembangan Sistem Informasi Geografis									
					Peralatan dan Peta potensi hutan	500.000.000,00	3.28 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.04 - PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	3.28.04.1.03 - Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	3.28.04.1.03.01 - Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Karst	Peralatan dan Peta potensi hutan	1 Unit	

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
163.	Kehutanan	20 Program perencanaan dan pengembangan hutan	Persentase luas usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem	17 Inventarisasi, Identifikasi dan Pemetaan Potensi									
					Peta Citra Landsat cakupan Papua	300.000.000,00	3.28 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.03 - PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.03 - Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	3.28.03.1.03.01 - Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Peta Citra Landsat cakupan Papua	2 Lembar	
164.				18 Pengawasan dan Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan									
					Laporan pengawasan dan pengendalian penggunaan kawasan hutan	500.000.000,00	3.28 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.03 - PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.03 - Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	3.28.03.1.03.04 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Laporan pengawasan dan pengendalian penggunaan kawasan hutan	5 Lokasi	
165.				19 Pengembangan Data dan Informasi Kehutanan									
					Data dan Informasi pelaksanaan pembangunan Kehutanan	350.000.000,00	3.28 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.03 - PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.03 - Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	3.28.03.1.03.01 - Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi yang disediakan	275 Laporan	
					Jumlah data dan informasi yang disediakan	350.000.000,00	3.28 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.03 - PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.03 - Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	3.28.03.1.03.02 - Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah data dan informasi yang disediakan	275 Laporan	
166.				21 Pengembangan dan Pembangunan KPH									
					Monitornig dan evaluasi rancang bangun KPH	487.500.000,00	3.28 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.03 - PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.02 - Rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	3.28.03.1.02.01 - Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah DOKumen Monitornig dan evaluasi kinerja KPH	14 Unit	
					Terbangunnya kantor KPH	0,00	3.28 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.03 - PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.02 - Rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	3.28.03.1.02.01 - Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Terbangunnya kantor KPH	0 Unit	
167.				24 Pembangunan Sarana dan Prasarana Operasional KPH (DAK)									
					Tersedianya Sarana Prasarana Operasional KPH	0,00						0 Unit	
					Tersedianya sarana dan prasarana pengembangan HPHK di KPH	0,00						0 Unit	
168.				25 Pengelolaan Hutan pada Cabang Dinas Kehutanan Jayapura									
					Pengelolaan Cabang Dinas Kehutanan di Kabupaten Jayapura	0,00						0 %	
169.				26 Pengelolaan Hutan pada Cabang Dinas Kehutanan Sarmi									
					Pengelolaan Cabang Dinas Kehutanan di Kabupaten Sarmi	0,00						0 %	
170.				27 Pengelolaan Hutan pada Cabang Dinas Kehutanan Keerom									
					Pengelolaan Cabang Dinas Kehutanan di Kabupaten Keerom	0,00						0 %	
171.				28 Pengelolaan Hutan pada Cabang Dinas Kehutanan Mamberamo Raya									
					Pengelolaan Cabang Dinas Kehutanan di Kabupaten Mamberamo Raya	0,00						0 %	
172.				29 Pengelolaan Hutan pada Cabang Dinas Kehutanan Nabire									
					Pengelolaan Cabang Dinas Kehutanan di Kabupaten Nabire	0,00						0 %	
173.				30 Pengelolaan Hutan pada Cabang Dinas Kehutanan MIMIKA									
					Pengelolaan Cabang Dinas Kehutanan Mimika	0,00						0 %	

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
174.	Kehutanan	20 Program perencanaan dan pengembangan hutan	Persentase luas usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem	31 Pengelolaan Hutan pada Cabang Dinas Kehutanan ASMAT									
					Pengelolaan Hutan Cabang Dinas Kehutanan Asmat	0,00						0 %	
175.				32 Pengelolaan Hutan pada Cabang Dinas Kehutanan MAPPI									
					Pengelolaan Hutan Cabang Dinas Kehutanan Mappi	0,00						0 %	
176.				33 Pengelolaan Hutan pada Cabang Dinas Kehutanan Merauke									
					Pengelolaan Hutan Cabang Dinas Kehutanan Merauke	0,00						0 %	
177.				34 Pengelolaan Hutan pada Cabang Dinas Kehutanan Boven Digoel									
					Pengelolaan Cabang Dinas Kehutanan Boven Digoel	0,00						0 %	
178.				35 Pengelolaan Hutan pada Cabang Dinas Kehutanan Yalimo									
					Pengelolaan Hutan Cabang Dinas Kehutanan Yalimo	0,00						0 %	
179.				36 Pengelolaan Hutan pada Cabang Dinas Kehutanan Yahukimo									
					Pengelolaan Hutan Cabang Dinas Kehutanan Yahukimo	0,00						0 %	
180.				37 Pengelolaan Hutan pada Cabang Dinas Kehutanan Dogiyai									
					Pengelolaan Hutan Cabang Dinas Kehutanan Dogiyai	0,00						0 %	
181.				38 Pengelolaan Hutan pada Cabang Dinas Kehutanan Intan Jaya									
					Pengelolaan Hutan Cabang Dinas Kehutanan Intan Jaya	0,00						0 %	
182.				39 Pengelolaan Hutan pada Cabang Dinas Kehutanan Membramo Tengah									
					Terealisasinya Pengelolaan Kawasan hutan	0,00						0 Kabupaten	
183.				40 Pengelolaan Hutan pada Cabang Dinas Kehutanan Paniai									
					Terealisasinya Pengelolaan Kawasan hutan	0,00						0 Kabupaten	
184.				41 Pengelolaan Hutan pada Cabang Dinas Kehutanan Tolikara									
					Terealisasinya Pengelolaan Kawasan hutan	0,00						0 Kabupaten	
185.				42 Pengelolaan Hutan pada Cabang Dinas Kehutanan Puncak Jaya									
					Terealisasinya Pengelolaan Kawasan hutan	0,00						0 Kabupaten	
186.				43 Pengelolaan Hutan pada Cabang Dinas Kehutanan Puncak									
					Terealisasinya Pengelolaan Kawasan hutan	0,00						0 Kabupaten	
187.				44 Pengelolaan Hutan pada KPHP Unit XXI Lintas Sarmi-Membramo									
					Terealisasinya Pengelolaan Kawasan hutan	0,00						0 Kabupaten	
188.				45 Pengelolaan Hutan pada KPHP Unit XIX Kep Yapen									
					Terealisasinya Pengelolaan Kawasan hutan	0,00						0 Kabupaten	
189.				46 Pengelolaan Hutan pada KPHL Unit XX Biak Numfor									
					Terealisasinya Pengelolaan Kawasan hutan	0,00						0 Kabupaten	
190.				47 Pengelolaan Hutan pada KPHP Unit XVII Waropen									
					Terealisasinya Pengelolaan Kawasan hutan	0,00						0 Kabupaten	

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
191.	Kehutanan	20 Program perencanaan dan pengembangan hutan	Persentase luas usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem	48 Pengelolaan Hutan pada KPHP Unit XXIX Keerom	Terealisasinya Pengelolaan Kawasan hutan	0,00						0 Kabupaten	
192.				49 Pengelolaan Hutan pada KPHP Unit XLIII Nduga	realisasi Pengelolaan Kawasan hutan	0,00						0 Kabupaten	
193.				50 Pengelolaan Hutan pada KPHP Unit VI Mimika	Terealisasinya Pengelolaan Kawasan hutan	0,00						0 Kabupaten	
194.				51 Pengelolaan Hutan pada KPHP Unit XLII Jayawijaya	Terealisasinya Pengelolaan Kawasan hutan	0,00						0 Kabupaten	
195.				52 Pengelolaan Hutan pada KPHP Unit XXXV Peng Bintang	Terealisasinya Pengelolaan Kawasan hutan	0,00						0 Kabupaten	
196.				53 Pengelolaan Hutan pada KPHL Unit XLII Lanny Jaya	Terealisasinya Pengelolaan Kawasan hutan	0,00						0 Kabupaten	
197.				54 Pengelolaan Hutan pada KPHP Unit XXVIII Kota Jayapura	Fasilitas Pengembangan hutan	0,00						0 Kabupaten	
198.				55 Pengelolaan Hutan pada KPHL Unit II Nabire	Fasilitas Pengembangan hutan	0,00						0 Kabupaten	
199.				56 Pengelolaan Hutan pada KPHP Unit LIII Boven Digoel	Fasilitas Pengembangan hutan	0,00						0 Kabupaten	
200.				57 Pengelolaan Hutan pada KPHP Unit XXIII Sarmi	Fasilitas Pengembangan hutan	0,00						0 Kabupaten	
201.				59 Pengelolaan Hutan pada KPHP Unit XVII Waropen	Fasilitas Pengembangan hutan	0,00						0 Kabupaten	
202.				60 Inventarisasi dan Identifikasi Potensi Hasil Hutan Bukan Kayu	Jumlah Data Potensi Hasil Hutan Bukan Kayu	300.000.000,00	3.28 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.03 - PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.03 - Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	3.28.03.1.03.02 - Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Data Potensi Hasil Hutan Bukan Kayu	2 Dokumen	
203.				61 Peningkatan Kinerja Pemanfaatan Hasil Hutan	Jumlah Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan	200.000.000,00	3.28 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.03 - PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.03 - Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	3.28.03.1.03.06 - Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan	4 Dokumen	
204.				62 Inventarisasi dan Identifikasi Potensi Jasa Lingkungan	Jumlah Data Potensi Jasa Lingkungan	300.000.000,00	3.28 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.03 - PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.03 - Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	3.28.03.1.03.02 - Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Data Potensi Jasa Lingkungan	1 Dokumen	
205.				63 Pengembangan Regulasi Kehutanan Daerah	Jumlah Regulasi Kehutanan Daerah	200.000.000,00						2 Peraturan	
206.		26 Program Penguatan Kelembagaan Pengelola Hutan	Jumlah Cabang Dinas Kehutanan (CDK) dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); Luasan hutan yang dikelola melalui Cabang Dinas Kehutanan (CDK) dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)	1 Pembentukan Kelembagaan CDK dan KPH									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Jumlah Dokumen	0,00						0 Dokumen	
207.				2 Pengurusan pemanfaatan hutan pada CDK Jayapura									
					Luas kelola pemanfaatan hutan pada CDK Jayapura	750.000.000,00	3.28 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.03 - PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.04 - Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	3.28.03.1.04.09 - Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang dibina	1 Hektar	
208.				3 Pengurusan pemanfaatan hutan pada CDK Sarmi									
					Luas Kelola pemanfaatan hutan pada CDK Sarmi	750.000.000,00	3.28 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.03 - PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.04 - Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	3.28.03.1.04.09 - Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang dibina	1 Hektar	
209.				4 Pengurusan pemanfaatan hutan pada CDK Keerom									
					Luas kelola pemanfaatan hutan pada CDK Keerom	750.000.000,00	3.28 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.03 - PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.04 - Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	3.28.03.1.04.09 - Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang dibina	1 Hektar	
210.				5 Pengurusan pemanfaatan hutan pada CDK Mamberamo Raya									
					Luas kelola pemanfaatan hutan pada CDK Mamberamo Raya	750.000.000,00	3.28 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.03 - PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.04 - Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	3.28.03.1.04.09 - Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Kelompok Tani yang dibina	1 Hektar	
211.				6 Pengurusan pemanfaatan hutan pada CDK Nabire									
					Luas kelola pemanfaatan hutan pada CDK Nabire	750.000.000,00	3.28 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.03 - PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.04 - Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	3.28.03.1.04.09 - Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Kelompok Tani yang dibina	1 Hektar	
212.				7 Pengurusan pemanfaatan hutan pada CDK Mimika									
					Luas kelola pemanfaatan hutan pada CDK Mimika	750.000.000,00	3.28 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.03 - PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.04 - Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	3.28.03.1.04.09 - Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Kelompok Tani yang dibina	1 Hektar	
213.				8 Pengurusan pemanfaatan hutan pada CDK Asmat									
					Luas kelola pemanfaatan hutan pada CDK Asmat	750.000.000,00	3.28 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.03 - PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.04 - Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	3.28.03.1.04.09 - Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang dibina	1 Hektar	
214.				9 Pengurusan pemanfaatan hutan pada CDK Mappi									
					Luas kelola pemanfaatan hutan pada CDK Mappi	750.000.000,00	3.28 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.03 - PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.04 - Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	3.28.03.1.04.09 - Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang dibina	1 Hektar	
215.				10 Pengurusan pemanfaatan hutan pada CDK Merauke									
					Luas kelola pemanfaatan hutan pada CDK Merauke	750.000.000,00	3.28 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.03 - PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.04 - Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	3.28.03.1.04.09 - Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang dibina	1 Hektar	
216.				11 Pengurusan pemanfaatan hutan pada CDK Boven Digoel									
					Luas kelola pemanfaatan hutan pada CDK Boven Digoel	750.000.000,00	3.28 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.03 - PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.04 - Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	3.28.03.1.04.09 - Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang dibina	1 Hektar	
217.				12 Pengurusan pemanfaatan hutan pada CDK Yalimo									
					Luas kelola pemanfaatan hutan	0,00	3.28 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.03 - PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.04 - Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	3.28.03.1.04.09 - Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Luas kelola pemanfaatan hutan	1 Ha	
					Luas kelola pemanfaatan hutan pada CDK Yalimo	500.000.000,00	3.28 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.03 - PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.04 - Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	3.28.03.1.04.09 - Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Luas kelola pemanfaatan hutan pada CDK Yalimo	1 Hektar	
218.				13 Pengurusan pemanfaatan hutan pada CDK Yahukimo									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Luas kelola pemanfaatan hutan	0,00	3.28 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.03 - PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.04 - Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	3.28.03.1.04.09 - Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang dibina	1 Ha	
					Luas kelola pemanfaatan hutan pada CDK Yahukimo	750.000.000,00	3.28 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.03 - PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.04 - Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	3.28.03.1.04.09 - Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang dibina	1 Hektar	
219.				14 Pengurusan pemanfaatan hutan pada CDK Dogiyai - Deyai									
					Luas kelola pemanfaatan hutan	0,00	3.28 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.03 - PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.04 - Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	3.28.03.1.04.09 - Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang dibina	1 Ha	
					Luas kelola pemanfaatan hutan pada CDK Dogiyai - Deyai	750.000.000,00	3.28 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.03 - PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.04 - Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	3.28.03.1.04.09 - Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang dibina	1 Hektar	
220.				15 Pengurusan pemanfaatan hutan pada CDK Intan Jaya									
					Luas kelola pemanfaatan hutan pada CDK Intan Jaya	750.000.000,00	3.28 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.03 - PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.04 - Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	3.28.03.1.04.09 - Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang dibina	1 Hektar	
221.				16 Pengurusan pemanfaatan hutan pada CDK Mamberamo Tengah									
					Luas kelola pemanfaatan hutan pada CDK Mamberamo Tengah	750.000.000,00	3.28 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.03 - PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.04 - Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	3.28.03.1.04.09 - Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang dibina	1 Hektar	
222.				17 Pengurusan pemanfaatan hutan pada CDK Paniai									
					Luas kelola pemanfaatan hutan pada CDK Paniai	750.000.000,00	3.28 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.03 - PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.04 - Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	3.28.03.1.04.09 - Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang dibina	1 Hektar	
223.				18 Pengurusan pemanfaatan hutan pada CDK Tolikara									
					Luas kelola pemanfaatan hutan pada CDK Tolikara	750.000.000,00	3.28 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.03 - PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.04 - Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	3.28.03.1.04.09 - Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang dibina	1 Hektar	
224.				19 Pengurusan pemanfaatan hutan pada CDK Puncak Jaya									
					Luas kelola pemanfaatan hutan pada CDK Puncak Jaya	750.000.000,00	3.28 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.03 - PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.04 - Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	3.28.03.1.04.09 - Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang dibina	1 Hektar	
225.				20 Pengurusan pemanfaatan hutan pada CDK Puncak									
					Luas kelola pemanfaatan hutan pada CDK Puncak	500.000.000,00	3.28 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.03 - PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.04 - Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	3.28.03.1.04.09 - Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang dibina	1 Hektar	
226.				21 Pengelolaan kawasan hutan pada UPTD KPHL Unit II Nabire									
					Luas kelola kawasan hutan pada UPTD KPHL Unit II Nabire	500.000.000,00	3.28 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.03 - PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.06 - Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	3.28.03.1.06.03 - Pembudidayaan Hasil Hutan bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang dibina	1 Hektar	
227.				22 Pengelolaan kawasan hutan pada UPTD KPHL Unit VI Mimika									
					Luas kelola kawasan hutan pada UPTD KPHL Unit VI Mimika	500.000.000,00	3.28 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.03 - PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.01 - Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) kewenangan Provinsi	3.28.03.1.01.02 - Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang dibina	1 Hektar	
228.				23 Pengelolaan kawasan hutan pada UPTD KPHP Unit XVII Waropen									
					Luas kelola kawasan hutan pada UPTD KPHP Unit XVII Waropen	500.000.000,00	3.28 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.03 - PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.06 - Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	3.28.03.1.06.03 - Pembudidayaan Hasil Hutan bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang dibina	1 Hektar	

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
229.	Kehutanan	26 Program Penguatan Kelembagaan Pengelolaan Hutan	Jumlah Cabang Dinas Kehutanan (CDK) dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); Luasan hutan yang dikelola melalui Cabang Dinas Kehutanan (CDK) dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)	24 Pengelolaan kawasan hutan pada UPTD KPHP Unit XXI Lintas Sarmi - Mamberamo Raya									
					Luas kelola kawasan hutan pada UPTD KPHP Unit XXI Lintas Sarmi -Mamberamo Raya	500.000.000,00	3.28 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.03 - PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.06 - Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	3.28.03.1.06.03 - Pembudidayaan Hasil Hutan bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang dibina	1 Hektar	
230.				25 Pengelolaan kawasan hutan pada UPTD KPHP Unit XXIII Sarmi									
					Luas kelola kawasan hutan pada UPTD KPHP Unit XXIII Sarmi	500.000.000,00	3.28 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.03 - PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.06 - Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	3.28.03.1.06.03 - Pembudidayaan Hasil Hutan bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang dibina	1 Hektar	
231.				26 Pengelolaan kawasan hutan pada UPTD KPHP Unit XIX Kep. Yapen									
					Luas kelola kawasan hutan pada UPTD KPHP Unit XIX Kep. Yapen	500.000.000,00	3.28 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.03 - PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.06 - Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	3.28.03.1.06.03 - Pembudidayaan Hasil Hutan bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang dibina	1 Hektar	
232.				27 Pengelolaan kawasan hutan pada UPTD KPHL Unit XX Biak									
					Luas kelola kawasan hutan pada UPTD KPHL Unit XX Biak	500.000.000,00	3.28 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.03 - PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.06 - Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	3.28.03.1.06.03 - Pembudidayaan Hasil Hutan bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang dibina	1 Hektar	
233.				28 Pengelolaan kawasan hutan pada UPTD KPHP Unit XXVIII Kota Jayapura									
					Luas kelola kawasan hutan pada UPTD KPHP Unit XXVIII Kota Jayapura	500.000.000,00	3.28 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.03 - PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.06 - Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	3.28.03.1.06.03 - Pembudidayaan Hasil Hutan bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang dibina	1 Hektar	
234.				29 Pengelolaan kawasan hutan pada UPTD KPHP Unit XXIX Keerom									
					Luas kelola kawasan hutan pada UPTD KPHP Unit XXIX Keerom	500.000.000,00	3.28 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.03 - PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.06 - Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	3.28.03.1.06.03 - Pembudidayaan Hasil Hutan bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang dibina	1 Hektar	
235.				30 Pengelolaan kawasan hutan pada UPTD KPHL Unit XXXV Pegunungan Bintang									
					Luas kelola kawasan hutan pada UPTD KPHL Unit XXXV Pegunungan Bintang	500.000.000,00	3.28 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.03 - PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.06 - Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	3.28.03.1.06.03 - Pembudidayaan Hasil Hutan bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang dibina	1 Hektar	
236.				31 Pengelolaan kawasan hutan pada UPTD KPHL Unit XLII A Jayawijaya									
					Luas kelola kawasan hutan pada UPTD KPHL Unit XLII A Jayawijaya	500.000.000,00	3.28 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.03 - PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.06 - Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	3.28.03.1.06.03 - Pembudidayaan Hasil Hutan bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang dibina	1 Hektar	
237.				32 Pengelolaan kawasan hutan pada UPTD KPHL Unit XLII B Lanny Jaya									
					Luas kelola kawasan hutan pada UPTD KPHL Unit XLII B Lanny Jaya	500.000.000,00	3.28 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.03 - PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.06 - Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	3.28.03.1.06.03 - Pembudidayaan Hasil Hutan bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang dibina	1 Hektar	
238.				33 Pengelolaan kawasan hutan pada UPTD KPHL Unit XLIII Nduga									
					Luas kelola kawasan hutan pada UPTD KPHL Unit XLIII Nduga	500.000.000,00	3.28 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.03 - PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.06 - Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	3.28.03.1.06.03 - Pembudidayaan Hasil Hutan bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang dibina	1 Hektar	
239.				34 Pengelolaan kawasan hutan pada UPTD KPHP Unit LIII Boven Digoel									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Luas kelola kawasan hutan pada UPTD KPHP Unit LIII Boven Digoel	500.000.000,00	3.28 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.03 - PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.06 - Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	3.28.03.1.06.03 - Pembudidayaan Hasil Hutan bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang dibina	1 Hektar	
240.				35 Pengembangan perbenihan tanaman hutan									
					Jumlah pengembangan sarana dan prasarana perbenihan tanaman hutan	950.000.000,00	3.28 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.03 - PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.04 - Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	3.28.03.1.04.06 - Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Jumlah pengembangan sarana dan prasarana perbenihan tanaman hutan	5 Unit	
241.				36 Pengembangan koleksi Taman Burung dan Taman Anggrek									
					Jumlah koleksi burung dan anggrek yang dikembangkan	200.000.000,00	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	2.11.04.1.01 - Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	2.11.04.1.01.02 - Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Jumlah koleksi burung dan anggrek yang dikembangkan	40 Jenis	
242.				37 Pengembangan tanaman koleksi Kebun Raya Koya Koso									
					Jumlah Tanaman Koleksi yang dikembangkan	700.000.000,00	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	2.11.04.1.01 - Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	2.11.04.1.01.03 - Pengelolaan Kebun Raya	Jumlah Tanaman Koleksi yang dikembangkan	7 Komoditi	
JUMLAH						104.757.613.000,00							

Mengetahui,
Kepala Bappeda Provinsi Papua

YOHANES WALILO, S.Sos, M.Si
NIP. 197007281997121001

JAYAPURA, 20 July 2020
KEPALA OPD DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI PAPUA

JAN JAP L ORMUSERAY, SH, M.Si
NIP. 19640716 199003 1 009

**REKAPITULASI PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021
SERTA KETERKAITAN DENGAN HASIL PEMETAAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019**

PROVINSI : Papua

PERANGKAT DAERAH : Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Energi dan Sumberdaya Mineral	1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	À Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	1 Penyediaan jasa surat menyurat									
					Jumlah surat yang disediakan	10.000.000,00		3.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.05.01.1.03 - Administras Umum	3.05.01.1.03.01 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang terkirim	2000 Surat	
2.				2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik									
					Jumlah Jasa Layanan berlangganan Listrik,Air, Telepon, Transponder	60.000.000,00		3.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.05.01.1.03 - Administras Umum	3.05.01.1.03.02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Layanan	48 Layanan	
3.				3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor									
					Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	0,00		3.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.05.01.1.03 - Administras Umum	3.05.01.1.03.03 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	1 Unit	
4.				8 Penyediaan jasa kebersihan kantor									
					Luas Gedung dan Halaman yang disediakan jasa kebersihan	0,00		3.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.05.01.1.03 - Administras Umum	3.05.01.1.03.08 - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	jumlah Gedung dan Halaman yang dibersihkan	200 M2	
					Jumlah tenaga kebersihan dan Fasilitas Pendukung kebersihan kantor	0,00		3.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.05.01.1.03 - Administras Umum	3.05.01.1.03.08 - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah tenaga kebersihan	7 Orang	
					Jumlah Jenis Bahan dan Alat Kebersihan	10.000.000,00		3.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.05.01.1.03 - Administras Umum	3.05.01.1.03.14 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Bahan dan Alat Kebersihan	10 Jenis	
5.				9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja									
					Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	0,00		3.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.05.01.1.03 - Administras Umum	3.05.01.1.03.09 - Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	1 Unit	
6.				10 Penyediaan alat tulis kantor									
					Jumlah jenis ATK yang disediakan	181.500.000,00		3.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.05.01.1.03 - Administras Umum	3.05.01.1.03.10 - Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	70 Jenis	
7.				11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan									
					Jumlah barang cetakan	0,00		3.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.05.01.1.03 - Administras Umum	3.05.01.1.03.11 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan	3 Jenis	
					Jumlah penggandaan	0,00		3.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.05.01.1.03 - Administras Umum	3.05.01.1.03.11 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah penggandaan	1 Lembar	
					Jumlah Jenis Barang Cetakkan yang Disediakan	0,00		3.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.05.01.1.03 - Administras Umum	3.05.01.1.03.11 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetakkan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Jenis	
					Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	60.000.000,00		3.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.05.01.1.03 - Administras Umum	3.05.01.1.03.11 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	12 Bulan	
8.				13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor									
					Jumlah peralatan dan Perlengkapan	0,00		3.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.05.01.1.03 - Administras Umum	3.05.01.1.03.25 - Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah penggandaan peralatan kantor yang disediakan	0 Unit	
9.				15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan									
					Jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	21.000.000,00		3.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.05.01.1.03 - Administras Umum	3.05.01.1.03.15 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	2100 Jenis	

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10.	Energi dan Sumberdaya Mineral	1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	À Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	16 Penyediaan bahan logistik kantor									
					Jumlah liter bahan bakar untuk kendaraan operasional	70.000.000,00		3.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.05.01.1.03 - Administras Umum	3.05.01.1.03.16 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah liter bahan bakar untuk kendaraan operasional	700 Liter	
					jumlah mobilitas termasuk tenaga angkat dan turun beras ke kantor	45.600.000,00		3.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.05.01.1.03 - Administras Umum	3.05.01.1.03.16 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah Pembelian Air Galon	12 Kali	
11.				17 Penyediaan makanan dan minuman									
					Pelaksanaan penyediaan makan dan minum	0,00		3.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.05.01.1.03 - Administras Umum	3.05.01.1.03.17 - Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Porsi makan dan minum kegiatan yang tersedia	0 Kegiatan	
					Pelaksanaan makan minum tamu dan rapat	120.000.000,00		3.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.05.01.1.03 - Administras Umum	3.05.01.1.03.17 - Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Porsi makan dan minum yang tersedia	50 Kali Tahun	
					Pelaksanaan makan minum saat olah raga (hari Jumat)	48.000.000,00		3.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.05.01.1.03 - Administras Umum	3.05.01.1.03.17 - Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Porsi makan dan minum yang tersedia	48 Kali	
					Tersediannya Makanan dan Minuman	0,00		3.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.05.01.1.03 - Administras Umum	3.05.01.1.03.17 - Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Porsi makan dan minum yang tersedia	12 Bulan	
					Jumlah orang yang disediakan makan dan minuman	0,00		3.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.05.01.1.03 - Administras Umum	3.05.01.1.03.17 - Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Porsi makan dan minum yang tersedia	0 Orang	
12.				18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah									
					Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	2.546.474.000,00		3.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.05.01.1.03 - Administras Umum	3.05.01.1.03.18 - Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	98 Orang	
13.				19 Penyediaan Jasa Pengamanan									
					Pelaksanaan pembayaran insentif bagi tenaga operator dan penjaga X-Ray VIP Room Bandara Sentani	326.000.000,00		3.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.05.01.1.03 - Administras Umum	3.05.01.1.03.01 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa keamanan/security yang dibayarkan	84 Orang Bulan	
					Pelaksanaan pembayaran honor bagi satpam	0,00		3.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.05.01.1.03 - Administras Umum	3.05.01.1.03.01 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa keamanan/security yang dibayarkan	24 Orang Bulan	
					Pelaksanaan uang makan satpam	0,00		3.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.05.01.1.03 - Administras Umum	3.05.01.1.03.01 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa keamanan/security yang dibayarkan	1 Orang Bulan	
					Jumlah tenaga pengamanan	96.000.000,00		3.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.05.01.1.03 - Administras Umum	3.05.01.1.03.01 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa keamanan/security yang dibayarkan	2 Orang	
14.		2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	À Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	3 Pembangunan gedung kantor									
					Luas bangunan yang dibangun	0,00		3.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.05.01.1.03 - Administras Umum	3.05.01.1.03.39 - Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Luas bangunan yang dibangun	1 M2	
					Tersedianya desain perencanaan bangunan	0,00		3.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.05.01.1.03 - Administras Umum	3.05.01.1.03.39 - Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Tersedianya desain perencanaan bangunan	1 Dokumen	
15.				5 Pengadaan kendaraan dinas/operasional									
					Jumlah kendaraan yang diadakan	0,00		3.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.05.01.1.03 - Administras Umum	3.05.01.1.03.21 - Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda 4	1 Unit	
					Jumlah kendaraan roda 2	0,00		3.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.05.01.1.03 - Administras Umum	3.05.01.1.03.21 - Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda 2	1 Unit	
16.				7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor									
					Jumlah pengadaan perlengkapan	250.000.000,00		3.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.05.01.1.03 - Administras Umum	3.05.01.1.03.23 - Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan	12 Unit	
17.				10 Pengadaan mebeleur									
					Jumlah mebeleur yang diadakan	300.000.000,00		3.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.05.01.1.03 - Administras Umum	3.05.01.1.03.26 - Pengadaan Mebeleur	Jumlah mebeleur yang diadakan untuk 3 UPT	105 Unit	
18.				22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Jumlah gedung kantor yang dipelihara	100.000.000,00		3.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.05.01.1.03 - Administrasi Umum	3.05.01.1.03.29 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor	1 Unit	
					belanja sewa	0,00		3.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.05.01.1.03 - Administrasi Umum	3.05.01.1.03.29 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung yang disewa	1 Tahun	
19.				24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional									
					Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	0,00		3.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.05.01.1.03 - Administrasi Umum	3.05.01.1.03.31 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah dan Jenis perlengkapan/peralatan gedung kantor yang dipelihara	0 Unit	
					Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	150.000.000,00		3.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.05.01.1.03 - Administrasi Umum	3.05.01.1.03.31 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang	30 Unit	
					sewa kendaraan	0,00		3.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.05.01.1.03 - Administrasi Umum	3.05.01.1.03.31 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan yang diperbaiki/Service	0 Bulan	
20.		3 Program peningkatan disiplin aparatur	À Meningkatnya disiplin aparatur	2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya									
					Jumlah pakaian dinas yang diadakan	210.000.000,00		3.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.05.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	3.05.01.1.04.02 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas sipil harian	140 Stel	
21.				5 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu									
					Jumlah pakaian khusus yang diadakan	280.000.000,00		3.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.05.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	3.05.01.1.04.05 - Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah pakaian Batik yang diadakan	140 Stel	
22.		5 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	À Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	1 Pendidikan dan pelatihan formal									
					Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	1.060.000.000,00		3.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.05.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	3.05.01.1.04.09 - Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparatur mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	40 Orang	
23.				2 Sosialisasi peraturan perundang-undangan									
					Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	0,00		3.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.05.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	3.05.01.1.04.10 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	0 Orang	
24.		6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	À Meningkatnya kualitas akuntabilitas OPD	1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD									
					Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	50.000.000,00		3.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.05.01.1.02 - Administrasi Keuangan	3.05.01.1.02.06 - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan	6 Laporan	
					Laporan LAKIP SKPD	0,00		3.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.05.01.1.01 - Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.05.01.1.01.05 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan LAKIP SKPD	0 Dokumen	
25.				2 Penyusunan laporan keuangan semesteran									
					Jumlah pelaporan keuangan semesteran yang diselesaikan tepat waktu	50.000.000,00		3.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.05.01.1.02 - Administrasi Keuangan	3.05.01.1.02.07 - Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Jumlah dokumen laporan	2 Laporan	
26.				4 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun									
					Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	30.000.000,00		3.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.05.01.1.02 - Administrasi Keuangan	3.05.01.1.02.09 - Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	1 Laporan	
27.				5 Penyusunan Renja, RKA dan Perubahan APBD									
					Jumlah dokumen	50.000.000,00		3.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.05.01.1.01 - Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.05.01.1.01.01 - Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	3 Dokumen	
28.				12 Penyusunan RENSTRA									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Jumlah Dokumen	0,00		3.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.05.01.1.01 - Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.05.01.1.01.01 - Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	0 Dokumen	
29.		15 Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan	Cakupan kelompok penambang mineral non logam dan batuan yang dibina; Cakupan pemetaan kawasan potensi bencana berbasis geologi; Persentase hasil pengendalian dan pengawasan yang ditindaklanjuti oleh pengusaha pertambangan; Persentase penambangan ilegal yang ditertibkan; Persentase pengembangan Sistem informasi sumber daya mineral	1 Penyusunan regulasi mengenai kegiatan penambangan bahan galian C									
30.				2 Sosialisasi regulasi mengenai kegiatan penambangan bahan galian C	Jumlah kegiatan Sosialisasi Regulasi yang dilaksanakan	0,00						0 Kegiatan	
31.				3 Monitoring dan pengendalian kegiatan penambangan bahan galian C									
					jumlah pengawasan keteknikan keselamatan kerja dan lingkungan minerba	0,00						0 Lokasi	
32.				4 Koordinasi dan pendataan tentang hasil produksi dibidang pertambangan									
					dokumen data hasil produksi	0,00						0 Dokumen	
33.				5 Pengawasan teritadap pelaksanaan kegiatan penambangan galian C									
34.				6 Monitoring, evaluasi dan pelaporan									
					terlaksana keg monev 5 wilayah adat	0,00						0 Wilayah	
35.				7 Pengawasan thrdap pelaksanaan kegiatan penambangan									
					terlaksananya pengawasan di 10 lokasi	0,00						0 Lokasi	
36.				8 Pengawasan IUP dan IUPK Explorasi dan operasi produksi ijin usaha jasa pertambangan dan sura keterangan terdaftar									
					Jumlah laporan IUP dan IUPK	0,00						0 Buku	
37.				9 Pembinaan dan Pengawasan ijin usaha jasa pertambangan (IUJP)									
					Jumlah laporan UJP	133.375.000,00	3.29 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.03 - PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	3.29.03.1.06 - Penatausahaan Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	3.29.03.1.06.03 - Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Pertambangan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah laporan Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Pertambangan	1 Buku	
38.				10 Monitoring dan pengendalian kegiatan penambangan mineral bukan logam dan batuan									
					Jumlah Kegiatan pengawasan keteknikan keselamatan kerja dan lingkungan minerba	0,00						0 Kegiatan	
39.		18 Program evaluasi dan koordinasi perencanaan program pembangunan		3 Monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan bidang ESDM									
					Jumlah lokasi kegiatan	800.000.000,00					Jumlah laporan	10 Lokasi	
40.				6 Sinkronisasi Program Kegiatan Sektor ESDM Berbasis Wilayah Adat									
					Jumlah peserta	0,00					Jumlah peserta	50 Orang	

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41.	Energi dan Sumberdaya Mineral	20 Program pembinaan dan pemutakhiran sistem data dan informasi energi dan sumber daya mineral	Meningkatnya jumlah investor untuk berinvestasi di bidang pertambangan dan energi	3 Promosi potensi energi dan sumber daya mineral di dalam dan luar negeri									
					Jumlah lokasi promosi	600.000.000,00					Jumlah laporan	2 Lokasi	
42.				5 Kegiatan Pemutakhiran Database Rumah Tangga Berlistrik dan Belum Berlistrik									
					Jumlah Dokumen	0,00					Jumlah Dokumen	10 Dokumen	
43.				6 Kegiatan Pengembangan Informasi Bidang ESDM									
					Jumlah pengembangan Sistem informasi sumber daya mineral	0,00					Jumlah pengembangan Sistem informasi sumber daya mineral	1 Sistem	
44.		22 Program Pelayanan Air Bersih	Cakupan keterlayanan air bersih pedesaan (50 %); Cakupan keterlayanan air minum dan sanitasi	2 Pemanfaatan dan pengelolaan mata air untuk mendukung program pemberdayaan masyarakat kampung sulit air bersih (PROSPEK)									
					Cakupan keterlayanan air bersih pedesaan (50 %)ju	0,00	3.29 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	3.29.02.1.02 - Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	3.29.02.1.02.03 - Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pengeboran, Penggalian, Pemakaian, dan Pengusahaan Air Tanah	Cakupan keterlayanan air bersih pedesaan (50 %)ju	0 %	
					Jumlah Intake	1.384.050.000,00	3.29 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	3.29.02.1.02 - Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	3.29.02.1.02.03 - Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pengeboran, Penggalian, Pemakaian, dan Pengusahaan Air Tanah	Jumlah Intake	3 Titik	
					Jumlah lokasi	0,00	3.29 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	3.29.02.1.02 - Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	3.29.02.1.02.03 - Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pengeboran, Penggalian, Pemakaian, dan Pengusahaan Air Tanah	Jumlah lokasi	3 Lokasi	
45.				7 Pemboran air bawah tanah untuk masyarakat kampung sulit air bersih									
					Tersedianya air bawah tanah untuk masyarakat	0,00	3.29 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	3.29.02.1.02 - Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	3.29.02.1.02.03 - Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pengeboran, Penggalian, Pemakaian, dan Pengusahaan Air Tanah	Tersedianya air bawah tanah untuk masyarakat	20 Lokasi	
					Jumlah sumur bor	9.998.000.000,00	3.29 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	3.29.02.1.02 - Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	3.29.02.1.02.03 - Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pengeboran, Penggalian, Pemakaian, dan Pengusahaan Air Tanah	Jumlah sumur bor	20 Titik	
46.				15 Survey detail pemanfaatan dan pengelolaan mataair									
					jumlah bangunan penurapan air	1.194.250.000,00	3.29 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	3.29.02.1.03 - Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	3.29.02.1.03.01 - Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah	Jumlah Dokumen Survey	2 Unit	
47.				16 Kegiatan Pemantauan Pemanfaatan Air Pada PT Freeport Indonesia									
					jumlah Dokumen Pemantauan Pemanfaatan Air Tanah	398.275.000,00	3.29 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	3.29.02.1.03 - Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	3.29.02.1.03.03 - Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	jumlah Dokumen Pemantauan Pemanfaatan Air Tanah	1 Dokumen	
48.				17 Kegiatan Pengawasan dan Penertiban Air Tanah									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Jumlah Laporan Pengawasan	246.000.000,00	3.29 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLAGIAN	3.29.02.1.03 - Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	3.29.02.1.03.03 - Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	2 Laporan	
49.		26 Program Pembinaan, Pengawasan, Pengusahaan Mineral dan Batubara	Cakupan Pengawasan dan Penertiban Penambang Emas Tanpa Ijin (PETI); Meningkatkan pendapatan masyarakat adat pemilik hak ulayat	6 Pengawasan dan pembinaan pertambangan rakyat									
					Jumlah kelompok binaan	399.375.000,00	3.29 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.03 - PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	3.29.03.1.04 - Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	3.29.03.1.04.04 - Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Jumlah laporan pengawasan dan pembinaan pertambangan rakyat	3 Kelompok	
50.				9 Pengawasan dan Pembinaan Usaha Pertambangan para Pemegang IUP Mineral dan Batubara									
					Jumlah pemegang IUP Minerba	398.675.000,00	3.29 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.03 - PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	3.29.03.1.02 - Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam Atau Batubara dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut	3.29.03.1.02.03 - Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah	Jumlah laporan	3 Perusahaan	
51.				10 Pengawasan Usaha Pertambangan Kontrak Karya									
					Jumlah usaha pertambangan kontrak karya	0,00	3.29 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.03 - PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	3.29.03.1.04 - Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	3.29.03.1.04.04 - Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Jumlah usaha pertambangan kontrak karya	0 Perusahaan	
52.				12 Penyediaan Peralatan Teknis Bantuan kepada Masyarakat Penambang									
					Jumlah peralatan bantuan	0,00					Jumlah peralatan bantuan	4 Unit	
53.				13 Pembinaan dan Pengawasan Produksi Pertambangan Mineral Non Logam dan Batuan									
					Jumlah kelompok binaan	415.700.000,00	3.29 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.03 - PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	3.29.03.1.03 - Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut	3.29.03.1.03.04 - Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut	Jumlah laporan	4 Kelompok	
54.				14 Pengawasan dan Penertiban Penambang Emas Tanpa Ijin (PETI)									
					Jumlah lokasi penambangan	2.263.700.000,00	3.29 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.03 - PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	3.29.03.1.04 - Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	3.29.03.1.04.04 - Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Jumlah Laporan	5 Lokasi	

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
55.	Energi dan Sumberdaya Mineral	26 Program Pembinaan, Pengawasan, Pengusahaan Mineral dan Batubara	Cakupan Pengawasan dan Penertiban Penambang Emas Tanpa Ijin (PETI); Meningkatkan pendapatan masyarakat adat pemilik hak ulayat	16 Evaluasi Pertambangan Logam dan Batubara									
					Jumlah Lokasi Kegiatan Evaluasi Pertambangan Logam dan Batubara	0,00	3.29 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.03 - PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	3.29.03.1.04 - Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	3.29.03.1.04.01 - Penetapan Prosedur dan Pesyaratan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Jumlah Lokasi Kegiatan Evaluasi Pertambangan Logam dan Batubara	1 Lokasi	
56.		27 Program Penelitian, Mitigasi dan Pelayanan Geologi	Cakupan penelitian dan survey pelayanan geologi ; Meningkatnya jumlah Wilayah/Kawasan Pemetaan Geologi Bersistem dan Bertema	3 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara									
					Jumlah dokumen	1.191.650.000,00					Jumlah dokumen	3 Dokumen	
					Jumlah lokasi survey	0,00					Jumlah lokasi survey	3 Lokasi	
57.				12 Survey Geologi Lingkungan dan Mitigasi Bencana Geologi									
					Jumlah lokasi mitigasi bencana	995.125.000,00					Jumlah laporan mitigasi bencana	2 Lokasi	
58.				17 Survey Potensi Sumber Daya Mineral									
					Jumlah dokumen pemetaan pencadangan wilayah pertambangan skala 1:50.000	709.100.000,00					Jumlah dokumen	3 Dokumen	
59.				18 Penyusunan PEP RAD-GRK dan Inventarisasi Emisi GRK sektor Energi									
					Jumlah Dokumen PEP	0,00						0 Dokumen	
60.		28 Program Pengelolaan Listrik dan Pemanfaatan Energi	Cakupan ketersediaan energi murah dan ramah lingkungan; Cakupan pemenuhan listrik dalam pelaksanaan PON; Persentase kampung terakses listrik; Tingkat elektrifikasi	2 Pembinaan Keselamatan dan Lindungan Lingkungan Ketenagalistrikan serta Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik									
					Jumlah peserta Bimtek ketenagalistrikan	0,00	3.29 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.06 - PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	3.29.06.1.01 - Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	3.29.06.1.01.01 - Penetapan Prosedur dan Pesyaratan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah peserta Bimtek ketenagalistrikan	1 Orang	
61.				4 Pengawasan Keselamatan dan Lindungan Lingkungan Ketenagalistrikan serta Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik									
					Jumlah kelompok usaha jasa ketenagalistrikan	0,00	3.29 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.06 - PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	3.29.06.1.01 - Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	3.29.06.1.01.03 - Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah kelompok usaha jasa ketenagalistrikan	1 Kelompok	
62.				5 Penyediaan dan Pengelolaan Energi Baru Terbarukan									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Jumlah rumah yang terlayani PLTS	0,00	3.29 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.06 - PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	3.29.06.1.06 - Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	3.29.06.1.06.06 - Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah rumah yang terlayani PLTS	1 Unit	
					PLTMH yang terbangun	0,00	3.29 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.06 - PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	3.29.06.1.06 - Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	3.29.06.1.06.06 - Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	PLTMH yang terbangun	1 Unit	
					Jumlah PLTS yang terbangun	0,00	3.29 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.06 - PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	3.29.06.1.06 - Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	3.29.06.1.06.06 - Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah PLTS yang terbangun	1 Unit	
63.				22 Penyusunan DED PLTMH									
					Jumlah Dokumen DED PLTMH	0,00	3.29 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.06 - PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	3.29.06.1.06 - Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	3.29.06.1.06.04 - Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Dokumen DED PLTMH	1 Dokumen	
64.				23 Penyusunan DED PLTS									
					Jumlah Dokumen DED PLTS	0,00	3.29 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.06 - PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	3.29.06.1.06 - Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	3.29.06.1.06.04 - Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Dokumen DED PLTS	1 Dokumen	
65.				53 FGD Teknis Pengelolaan Subsidi Listrik 405-900 VA Ketenagalistrikan									
					Jumlah peserta FGD	0,00	3.29 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.06 - PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	3.29.06.1.04 - Persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik Dari Pemegang Izin yang Ditetapkan Oleh Daerah Provinsi	3.29.06.1.04.01 - Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik Dari Pemegang Izin yang Ditetapkan Oleh Daerah Provinsi	Jumlah peserta FGD	1 Orang	
66.				54 Penyusunan Rencana Umum Energi Daerah Papua (RUED-P)									
					Jumlah Dokumen	1.000.000.000,00	3.29 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.05 - PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	3.29.05.1.04 - Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	3.29.05.1.04.01 - Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	
67.				55 Kegiatan Pengadaan Listrik Mobile									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Jumlah Pengadaan Listrik Mobile	0,00	3.29 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.06 - PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	3.29.06.1.06 - Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	3.29.06.1.06.06 - Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Pengadaan Listrik Mobile	1 Unit	
68.				56 Kegiatan Pelatihan Tenaga Teknik Operator Ketenagalistrkan Dan Energi Baru Terbarukan									
					Jumlah peserta pelatihan operator PLTD, PLTMH, PLTS	801.700.000,00	3.29 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.05 - PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	3.29.05.1.04 - Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	3.29.05.1.04.03 - Sosialisasi secara Menyeluruh dan Komprehensif untuk Penggunaan Teknologi yang Menerapkan Konservasi Energi	Jumlah peserta pelatihan operator PLTD, PLTMH, PLTS	60 Orang	
69.				57 Kegiatan Pembinaan Dan Pengawasan Penyedia Dan Usaha Jasa Penunjang Ketenagalistrkan									
					Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan	500.300.000,00	3.29 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.05 - PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	3.29.05.1.02 - Penatausahaan Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	3.29.05.1.02.03 - Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan	3 Laporan	
70.				58 Kegiatan Sosialisasi Pengaturan Keselamatan Operasi Dan Kelayakan Teknik									
					Jumlah Peserta Sosialisasi Pengaturan Keselamatan Operasi Dan Kelayakan Teknik	501.000.000,00	3.29 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.05 - PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	3.29.05.1.04 - Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	3.29.05.1.04.03 - Sosialisasi secara Menyeluruh dan Komprehensif untuk Penggunaan Teknologi yang Menerapkan Konservasi Energi	Jumlah Peserta Sosialisasi Pengaturan Keselamatan Operasi Dan Kelayakan Teknik	60 Orang	
71.		29 Program Penelitian dan Pengembangan Balai Latihan dan Laboratorium Pertambangan	Meningkatnya Jumlah Penelitian dan Pengembangan Laboratorium Pertambangan	2 Pendidikan dan Pelatihan Teknis Geologi, Tambang dan Energi Bagi Aparat, Mahasiswa dan SMK									
					Jumlah peserta siswa/i SMK dan Mahasiswa Praktek Kerja Industri	800.000.000,00					Jumlah peserta siswa/i SMK dan Mahasiswa Praktek Kerja Industri	50 Orang	
72.				3 Analisis Batuan, Tanah dan Airtanah									
					Jumlah dokumen analisis	0,00						0 Dokumen	
73.				8 Pengolahan percontohan air bersih									
					Jumlah lokasi percontohan air bersih	0,00						0 Lokasi	
74.				9 Kegiatan Pengadaan Instrumen Kimia Laboratorium Pertambangan									
					Jumlah Bahan Kimia	0,00					Jumlah Bahan Kimia	0 Pcs	
75.		31 Program pengawasan penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) dan bahan bakar gas (BBG)	Harga BBM premium dan pertalite yang terkendali; Meningkatnya ketersediaan bbm untuk nelayan	2 Kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan BBM dan BBG di Papua									
					Jumlah Dokumen Pengawasan atas penyelenggaraan BBM dan BBG	799.700.000,00						9 Dokumen	
76.				3 Pengawasan Keselamatan dan Lindungan Lingkungan Minyak dan Gas									
					Jumlah Dokumen Pengawasan Keselamatan dan lingkungan Migas	796.000.000,00						9 Dokumen	
77.				4 Studi kelayakan pembangunan Depot BBM									
					Jumlah dokumen studi kelayakan pembangunan depot BBM	0,00						0 Dokumen	
78.				5 Pengadaan Peralatan dan Pembangunan SPBN									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Jumlah unit SPBN yang terbangun	0,00						0 Unit	
					jumlah laporan inventarisasi yang dilakukan	0,00						0 Laporan	
79.				6 Inventarisasi Sebaran Sumur-sumur Tua Minyak di Papua									
					Jumlah Laporan Inventarisasi	249.600.000,00						2 Laporan	
80.		33 Pengembangan & Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan	Jumlah RT yang terlayani PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro); Jumlah RT yang terlayani PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya); Jumlah kampung yang memanfaatkan sumber daya energi terbarukan; Jumlah/cakupan pengembangan dan pemanfaatan energy baru terbarukan	1 Pembangunan Solar Cell Terpusat									
					Jumlah unit solar cell	0,00	3.29 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.06 - PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	3.29.06.1.06 - Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	3.29.06.1.06.06 - Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah unit solar cell	9 Unit	
81.				2 Penyusunan Dokumen Perencanaan DED PLTMH									
					Jumlah Dokumen	0,00	3.29 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.06 - PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	3.29.06.1.06 - Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	3.29.06.1.06.04 - Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	
82.				3 Pembangunan PLTMH									
					Jumlah RT yang terlayani Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH)	31.889.282.254,00	3.29 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.06 - PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	3.29.06.1.06 - Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	3.29.06.1.06.06 - Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah unit Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH)	750 RT	
83.				4 Pembangunan PLTS Terpusat (DAK)									
					Jumlah PLTS Terpusat yang terbangun	0,00	3.29 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.06 - PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	3.29.06.1.06 - Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	3.29.06.1.06.06 - Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah PLTS Terpusat yang terbangun	0 Unit	
84.				5 Pembangunan PLTMH (DAK)									
					Jumlah PLTMH yang terbangun	0,00	3.29 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.06 - PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	3.29.06.1.06 - Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	3.29.06.1.06.06 - Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah PLTMH yang terbangun	0 Unit	
					Besaran Daya PLTMH yang terbangun	0,00					Besaran Daya PLTMH yang terbangun	0 Kwh	
85.				6 Penunjang DAK Penugasan Energi Skala Kecil									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Perencanaan pembangunan energi skala kecil	0,00	3.29 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.06 - PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	3.29.06.1.06 - Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	3.29.06.1.06.05 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Perencanaan pembangunan energi skala kecil	0 Laporan	
86.				23 Kegiatan Pembangunan PLTS Terpusat									
					Jumlah RT yang terlayani Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	48.513.348.892,00	3.29 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.06 - PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	3.29.06.1.06 - Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	3.29.06.1.06.06 - Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Unit Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	750 RT	
87.				24 Kegiatan Survey dan Perencanaan Teknis Potensi Tenaga Air									
					Jumlah Dokumen Survey dan Perencanaan Teknis Potensi Tenaga Air	1.881.600.000,00	3.29 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.06 - PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	3.29.06.1.06 - Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	3.29.06.1.06.04 - Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Dokumen Survey dan Perencanaan Teknis Potensi Tenaga Air	5 Dokumen	
88.				25 Kegiatan Survey dan Perencanaan Teknis Potensi Tenaga Surya									
					Jumlah Dokumen Survey dan Perencanaan Teknis Potensi Tenaga Surya	1.843.250.000,00	3.29 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.06 - PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	3.29.06.1.06 - Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	3.29.06.1.06.04 - Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Dokumen Survey dan Perencanaan Teknis Potensi Tenaga Surya	5 Dokumen	
89.				26 Kegiatan Revitalisasi PLTMH / PLTS									
					Jumlah unit PLTMH/PLTS	1.000.000.000,00	3.29 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.06 - PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	3.29.06.1.06 - Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	3.29.06.1.06.06 - Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah unit PLTMH/PLTS	3 Unit	
90.				27 Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS)									
					Jumlah titik PJUTS	1.500.000.000,00	3.29 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.06 - PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	3.29.06.1.06 - Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	3.29.06.1.06.06 - Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah titik PJUTS	50 Unit	
91.		34 Program Pengembangan ESDM	Tersedianya dokumen sebagai sumber Data	1 Kegiatan Pelayanan Kantor Cabang Dinas									
					Jumlah Pelayanan Kantor Cabang Dinas	8.000.000.000,00					Jumlah Pelayanan Kantor Cabang Dinas	10 Cabang	
92.				2 Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Mineral dan Geologi									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Jumlah Rumah Tangga Terlayani Air Bersih	7.500.000.000,00	3.29 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	3.29.02.1.02 - Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	3.29.02.1.02.03 - Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pengeboran, Penggalian, Pemakaian, dan Pengusahaan Air Tanah	Jumlah Rumah Tangga Terlayani Air Bersih	500 RT	
					Jumlah Laporan Pengembangan Sumber Daya Mineral	3.000.000.000,00	3.29 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.03 - PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	3.29.03.1.04 - Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	3.29.03.1.04.04 - Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Jumlah Laporan Pengembangan Sumber Daya Mineral	10 Laporan	
93.				3 Kegiatan Pengembangan Energi Listrik									
					Jumlah Laporan Pengembangan Energi Listrik	3.000.000.000,00	3.29 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.06 - PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	3.29.06.1.06 - Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	3.29.06.1.06.04 - Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Laporan Pengembangan Energi Listrik	10 Laporan	
					Jumlah Unit Terbangun	37.941.069.854,00	3.29 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.06 - PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	3.29.06.1.06 - Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	3.29.06.1.06.06 - Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Unit Terbangun	10 Unit	
JUMLAH						178.768.700.000,00							

Mengetahui,
Kepala Bappeda Provinsi Papua

YOHANES WALILO, S.Sos, M.Si
NIP. 197007281997121001

JAYAPURA, 20 July 2020
Pit. KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI PAPUA

FRETS JAMES BORAY, SE, M.Si
NIP. 19670218 198912 1 002

**REKAPITULASI PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021
SERTA KETERKAITAN DENGAN HASIL PEMETAAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019**

PROVINSI : Papua

PERANGKAT DAERAH : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Tenaga Kerja	15 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Frekuensi promosi bursa tenaga kerja; Meningkatnya Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja; Meningkatnya kualitas Pencari Kerja; Persentase Balai Latihan Kerja (BLK) kabupaten/kota yang terakreditasi; Persentase kenaikan UMP; Persentase lulusan balai diklat tenaga kerja yang terserap; Persentase pekerja/buruh yang menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan; Persentase peserta pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi yang terserap dalam lapangan kerja	6 Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja									
					Jumlah Pencari Kerja yang ditingkatkan kualitasnya.	2.500.000.000,00	2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.07.03.1.01 - Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	2.07.03.1.01.01 - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Pencari Kerja yang ditingkatkan kualitasnya.	500 Orang	
2.				8 Monitoring, evaluasi dan pelaporan									
					Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pasca Pelatihan Komoditas Unggulan	1.500.000.000,00	2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.07.03.1.01 - Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	2.07.03.1.01.01 - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pasca Pelatihan	10 Laporan	
3.				33 Penetapan Kurikulum dan kesiswaan BLKI Provinsi Papua									
					Jumlah kurikulum yang disusun sesuai dengan kebutuhan pasar kerja	0,00	2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.07.03.1.01 - Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	2.07.03.1.01.01 - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah kurikulum yang disusun sesuai dengan kebutuhan pasar kerja	0 Dokumen	
4.				54 Sosialisasi Standarisasi dan Sertifikasi Kompetensi Kerja									
					Jumlah sektor lapangan kerja yang memiliki standar dan kompetensi kerja	300.000.000,00	2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.07.03.1.01 - Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	2.07.03.1.01.01 - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah sektor lapangan kerja yang memiliki standar dan kompetensi kerja	40 Kelompok	
					Jumlah peserta sosialisasi dan standarisasi Kompetensi Kerja	300.000.000,00	2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.07.03.1.01 - Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	2.07.03.1.01.01 - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah peserta sosialisasi dan standarisasi Kompetensi Kerja	40 Orang	
5.				62 Quality Managenent System (QMS) BLTKI									
					Jumlah aparatur yang dilatih manajemen pengelolaan balai pelatihan	0,00	2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.07.03.1.01 - Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	2.07.03.1.01.01 - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah aparatur yang dilatih manajemen pengelolaan balai pelatihan	30 Orang	
6.				64 Pembinaan dan Pengukuran Produktivitas									
					Jumlah Kabupaten yang dilakukan pembinaan dan Pengukuran Produktivitas	0,00	2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.07.03.1.04 - Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	2.07.03.1.04.01 - Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Kabupaten yang dilakukan pembinaan dan Pengukuran Produktivitas	5 Kabupaten	
7.				65 Pelatihan Produktivitas dan Kewirausahaan									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Jumlah yang dilatih produktivitas dan kewirausahaan	0,00	2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.07.03.1.04 - Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	2.07.03.1.04.01 - Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah yang dilatih produktivitas dan kewirausahaan	40 Orang	
					Jumlah Peserta Pelatihan Ketrampilan Pengolahan Kayu dan Kopi	1.500.000.000,00	2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.07.03.1.01 - Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	2.07.03.1.01.01 - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Peserta Pelatihan Ketrampilan Pengolahan Kayu dan Kopi	120 Orang	
8.				88 Bimtek Metodologi Instruktur									
					Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek Metodologi Instruktur	0,00	2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.07.03.1.01 - Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	2.07.03.1.01.01 - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek Metodologi Instruktur	0 Orang	
9.				93 Monitoring Pengupahan									
					Tersedianya data kebutuhan hidup layak dan kemampuan perusahaan	0,00	2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	2.07.02.1.01 - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	2.07.02.1.01.02 - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Tersedianya data kebutuhan hidup layak dan kemampuan perusahaan	5 Kabupaten	
10.				94 Pemasaran hasil Lulusan BLKI Provinsi Papua									
					Jumlah lulusan yang diserap pasar kerja	0,00	2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	2.07.04.1.03 - Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	2.07.04.1.03.03 - Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah lulusan yang diserap pasar kerja	200 Orang	
11.				105 Magang/Training Bagi Pemenang ASC (Asean Skill Copetition)									
					Terlaksananya Magang/Taning	0,00						0 Orang	
12.				106 Pengumpulan Data Bidang Pelatihan dan Produktivitas									
					Terlaksananya Pelatihan Pengumpulan Data	0,00	2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.07.03.1.04 - Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	2.07.03.1.04.01 - Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Terlaksananya Pelatihan Pengumpulan Data	1 Orang	
					jumlah dokumen	0,00	2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.07.03.1.04 - Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	2.07.03.1.04.01 - Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	jumlah dokumen	0 Dokumen	
13.				107 Pelatihan Teknologi Informatika (IT) bagi Pencari Kerja									
					terlaksananya Pelatihan IT	0,00	2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.07.03.1.04 - Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	2.07.03.1.04.01 - Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	terlaksananya Pelatihan IT	40 Orang	
14.				108 Pelatihan Fasion Teknologi bagi Pencari Kerja									
					Terlaksananya Pelatihan Fasion	0,00	2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.07.03.1.01 - Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	2.07.03.1.01.01 - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Terlaksananya Pelatihan Fasion	0 Orang	
15.				109 Pemagangan Luar Negeri									
					terlaksananya Magang Luar Negeri	0,00	2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	2.07.04.1.01 - Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.07.04.1.01.01 - Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja	terlaksananya Magang Luar Negeri	0 Orang	
16.				110 Seleksi Daerah (SELEKDA) calon Kompetitor Asean Skill Competition (ASC)									
					Jumlah orang yang mengikuti seleksi	500.000.000,00	2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.07.03.1.01 - Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	2.07.03.1.01.01 - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah orang yang mengikuti seleksi	50 Orang	
17.				111 Sosialisasi Program Pemagangan									
					jumlah peserta sosialisasi	0,00	2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	2.07.04.1.01 - Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.07.04.1.01.03 - Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Bagi Pencari Kerja	jumlah peserta sosialisasi	50 Orang	
18.				113 Forum Komunikasi jejaring Pemagangan (FKJP)									
					jumlah peserta FKJP	0,00	2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	2.07.02.1.01 - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	2.07.02.1.01.02 - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	jumlah peserta FKJP	50 Orang	

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19.	Tenaga Kerja	15 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Frekuensi promosi bursa tenaga kerja; Meningkatnya Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja; Meningkatnya kualitas Pencari Kerja; Persentase Balai Latihan Kerja (BLK) kabupaten/kota yang terakreditasi; Persentase kenaikan UMP; Persentase lulusan balai diklat tenaga kerja yang terserap; Persentase pekerja/buruh yang menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan; Persentase peserta pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi yang terserap dalam lapangan kerja	114 Pelatihan Mengemudi Bagi Pencari kerja									
					Jumlah peserta pelatihan	0,00	2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.07.03.1.01 - Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	2.07.03.1.01.01 - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah peserta pelatihan	50 Orang	
20.				115 Pelatihan Pembuatan Souvenir (Mendukung PON XX)									
					Jumlah peserta pelatihan	0,00	2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.07.03.1.01 - Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	2.07.03.1.01.01 - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah peserta pelatihan	50 Orang	
21.				116 Penyusunan Dokumen Survey angkatan kerja daerah (SAKERDA)									
					Jumlah Dokumen	0,00	2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.07.03.1.02 - Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja	2.07.03.1.02.01 - Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	
22.				117 Penyusunan RTKD									
					Jumlah dokumen RTKD	0,00	2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	2.07.02.1.01 - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	2.07.02.1.01.01 - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah dokumen RTKD	0 Dokumen	
23.				119 BIMTEK peningkatan Mutu LPK									
					jumlah orang yang mengikuti bimtek mutu LPK	0,00	2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.07.03.1.02 - Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja	2.07.03.1.02.01 - Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja	jumlah orang yang mengikuti bimtek mutu LPK	25 Orang	
24.				120 Revitalisasi BLK/Balatkop/Balai Pengujian Mutu									
					Jumlah Gedung yang dibangun	65.000.000.000,00	2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.07.03.1.01 - Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	2.07.03.1.01.02 - Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Gedung yang dibangun	3 Unit	
25.				121 Pengembangan SDM Pengelola Komoditas Unggulan Daerah (Sagu, Kopi, Ikan dan Buah Merah)									
					Jumlah Peserta Pelatihan Operasional Mesin/Peralatan Pengolahan Sagu, Kopi, Ikan dan Buah Merah	1.500.000.000,00	2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.07.03.1.01 - Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	2.07.03.1.01.01 - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Peserta Pelatihan Operasional Mesin/Peralatan Pengolahan Sagu, Kopi, Ikan dan Buah Merah	120 Orang	
26.		16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Tingkat partisipasi angkatan kerja ; Tingkat pengangguran terbuka	8 Padat Karya Pedesaan									
					Jumlah penganggur dan setengah penganggur yang mengikuti padat karya infrastruktur	0,00						0 Orang	
					Jumlah Penganggur dan setengah penganggur yang mengikuti padat karya pedesaan	0,00						0 Orang	

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27.	Tenaga Kerja	16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Tingkat partisipasi angkatan kerja ; Tingkat pengangguran terbuka	10 Pamerran Bursa Tenaga Kerja (JOB FAIR) Provinsi Papua									
					Jumlah perusahaan yang mengikuti Job Fair	567.000.000,00	2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	2.07.04.1.03 - Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	2.07.04.1.03.03 - Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah perusahaan yang mengikuti Job Fair	40 Perusahaan	
28.				29 Pembekalan Wirausaha Baru (WUB)									
					Jumlah peserta yang mengikuti pembekalan wira usaha baru (WUB)	0,00	2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	2.07.04.1.01 - Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.07.04.1.01.03 - Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Bagi Pencari Kerja	Jumlah peserta yang mengikuti pembekalan wira usaha baru (WUB)	0 Orang	
29.				30 Perluasan Kerja melalui sistem Padat Karya Produktif									
					Jumlah perluasan kerja melalui sistem padat karya produktif	400.000.000,00	2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.07.03.1.01 - Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	2.07.03.1.01.01 - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Kelompok yang terlatih	3 Orang	
30.				32 Pendataan dan Cheking TKA di Perusahaan Pengguna TKA									
					Jumlah pendataan dan cheking TKA di Perusahaan Pengguna TKA	596.000.000,00	2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	2.07.04.1.05 - Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang tidak mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	2.07.04.1.05.01 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA yang Tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perusahaan yang menggunakan TKA	50 Perusahaan	
31.				38 Pembekalan Teknologi Tepat Guna									
					Terlaksananya Pembekalan teknologi pada masyarakat	0,00	2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.07.03.1.03 - Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Menengah	2.07.03.1.03.01 - Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah	Terlaksananya Pembekalan teknologi pada masyarakat	0 Orang	
32.				39 Penyebarluasan Informasi Pasar Kerja (IPK) di 20 Kab/Kota									
					Tersebarinya informasi Pasar Saham di beberapa Kabupaten/Kota	723.800.000,00	2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	2.07.04.1.03 - Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	2.07.04.1.03.03 - Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Kabupaten Yang mendapat Informasi Pasar Kerja	15 Kabupaten	
33.				40 Bimtek Petugas Antar Kerja									
					Terlaksananya Bimbingan Petugas	0,00	2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	2.07.04.1.01 - Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.07.04.1.01.01 - Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja	Terlaksananya Bimbingan Petugas	0 Orang	
34.				41 BIMTEK penyuluhan dan bimbingan jabatan									
					jumlah peserta yang mengikuti bimtek	0,00	2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	2.07.04.1.01 - Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.07.04.1.01.03 - Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Bagi Pencari Kerja	jumlah peserta yang mengikuti bimtek	0 Orang	
35.				42 Penyuluhan Bursa kerja Bagi kabupaten/Kota									
					jumlah peserta penyuluhan	0,00	2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	2.07.04.1.01 - Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.07.04.1.01.03 - Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Bagi Pencari Kerja	jumlah peserta penyuluhan	0 Orang	
36.				43 BVIMTEK Petugas Lapangan Teknologi Tepat Guna									
37.				44 Bimbingan Teknis Pemandu Wirausaha									
					jumlah peserta yang mengikuti bimtek	0,00	2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.07.03.1.01 - Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	2.07.03.1.01.01 - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	jumlah peserta yang mengikuti bimtek	0 Orang	
38.				45 BIMTEK Petugas Lapangan Padat Karya									
					jumlah peserta yang mengikuti bimtek	0,00	2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.07.03.1.01 - Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	2.07.03.1.01.02 - Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	jumlah peserta yang mengikuti bimtek	0 Orang	
39.				46 BIMTEK Petugas Lapangan Tenaga Kerja Sukarela									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					jumlah peserta yang mengikuti bimtek	0,00	2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.07.03.1.01 - Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	2.07.03.1.01.01 - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	jumlah peserta yang mengikuti bimtek	0 Orang	
40.				47 Perluasan kerja melalui Sistem padat Karya Infrastruktur									
41.				48 Pembekalan Tenaga Kerja Sektor Informal									
					jumlah peserta	0,00	2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.07.03.1.01 - Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	2.07.03.1.01.01 - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	jumlah peserta	0 Orang	
42.				49 Sosialisasi Peraturan Tenaga Kerja Asing									
					jumlah peserta sosialisasi	0,00	2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	2.07.04.1.05 - Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang tidak mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	2.07.04.1.05.01 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA yang Tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	jumlah peserta sosialisasi	0 Orang	
43.				50 Sosialisasi Peraturan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI)									
					jumlah peserta sosialisasi	0,00						0 Orang	
44.				51 Sosialisasi Peningkatan produktivitas sektor Pendidikan									
					jumlah peserta sosialisasi	0,00	2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.07.03.1.01 - Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	2.07.03.1.01.01 - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	jumlah peserta sosialisasi	0 Orang	
45.		25 Program Pengawasan Ketenagakerjaan	Cakupan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial; Cakupan Perusahaan yang Menerapkan Norma K3	12 Bimtek Kesehatan Kerja									
					jumlah peserta yang mengikuti bimtek kesehatan kerja	476.000.000,00	2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.06 - PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	2.07.06.1.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	2.07.06.1.01.03 - Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Jumlah perusahaan yang mengikuti Sosialisasi K3	50 Orang	
46.				13 Pelatihan ahli K3 dari perusahaan									
					Jumlah Ahli K3 di Perusahaan	0,00	2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.07.03.1.02 - Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja	2.07.03.1.02.01 - Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Ahli K3 di Perusahaan	30 Orang	
47.				14 Pembinaan Penyelesaian Perselisihan di perselisihan									
					Jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi Penyelesaian Perselisihan	500.000.000,00	2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	2.07.05.1.02 - Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Provinsi	2.07.05.1.02.02 - Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah penyelesaian kasus-kasus hubungan industrial	40 Perusahaan	
48.				19 Penetapan Upah Minimum Provinsi papua									
					Jumlah dokumen UMP	400.000.000,00	2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	2.07.05.1.03 - Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektorial Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektorial Kabupaten/Kota (UMSK)	2.07.05.1.03.01 - Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	Jumlah dokumen UMP	1 Dokumen	
49.				20 Sosialisasi Program jaminan Sosial di Perusahaan dan Kepesertaan Jaminan Sosial									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					jumlah peserta sosialisasi	200.000.000,00	2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	2.07.05.1.01 - Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (Satu) Kabupaten/Kota	2.07.05.1.01.03 - Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Jumlah peserta Jaminan Sosial Tenaga Kerja	30 Orang	
50.				21 Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja									
					Jumlah Perusahaan yang diawasi dalam Penerapan Norma Kerja	600.000.000,00	2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.06 - PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	2.07.06.1.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	2.07.06.1.01.01 - Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang diawasi dalam Penerapan Norma Kerja	40 Perusahaan	
51.		26 Program Peningkatan Kinerja Organisasi	Persentase peningkatan Kinerja Organisasi Ketengakerjaan	3 Sosialisasi peraturan perundang-undangan kepegawaian									
					Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi Peraturan Kepegawaian	150.000.000,00	2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	2.07.02.1.01 - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	2.07.02.1.01.02 - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja Makro yang disusun	75 Orang	
52.	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	15 Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Persentase penumbuhan wirausaha baru; Terlaksananya penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah	1 Penyusunan kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah									
53.				2 Sosialisasi kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah									
54.				3 Fasilitasi kemudahan formalisasi badan Usaha Kecil Menengah									
					Jumlah UKM yang difasilitasi	0,00	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.02 - PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	2.17.02.1.02 - Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	2.17.02.1.02.01 - Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah UKM yang difasilitasi	0 Perusahaan	
55.				4 Pendirian unit penanganan pengaduan									
56.				5 Pengkajian dampak regulasi/ kebijakan nasional									
57.				6 Perencanaan, koordinasi dan pengembangan Usaha Kecil Menengah									
					Jumlah dokumen Perencanaan, koordinasi dan pengembangan Usaha Kecil Menengah	0,00	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.17.07.1.01 - Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	2.17.07.1.01.01 - Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah dokumen Perencanaan, koordinasi dan pengembangan Usaha Kecil Menengah	3 Dokumen	
58.				7 Pengembangan jaringan infrastruktur Usaha Kecil Menengah									
59.				8 Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah									
60.				9 Fasilitasi Permasalahan proses produksi Usaha Kecil Menengah									
61.				10 Pemberian Fasilitasi Pengamanan kawasan Usaha Kecil Menengah									
62.				11 Monitoring, evaluasi dan pelaporan									
63.				13 Koordinasi Perencanaan Program/Kegiatan Bidang KUMKM									
					Jumlah dokumen Perencanaan Program/Kegiatan Bidang KUMKM	0,00	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	2.17.08.1.01 - Pengembangan Usaha Kecil Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	2.17.08.1.01.01 - Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah dokumen Perencanaan Program/Kegiatan Bidang KUMKM	5 Dokumen	

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
64.	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Cakupan UMKM lokal yang bermitra dalam pelaksanaan PON; Cakupan usaha mikro dan kecil yang mandiri dikelola pengusaha muda; Jumlah UMKM yang mandiri dalam kompetisi usaha; Persentase Pertumbuhan Jumlah Wirausaha Baru; Persentase peningkatan pengembangan UMKM keolahragaan	1 Fasilitasi pengembangan inkubator teknologi dan bisnis									
					Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan inkubator tek	0,00	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	2.17.06.1.01 - Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	2.17.06.1.01.01 - Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan inkubator tek	0 Kegiatan	
65.				2 Memfasilitasi peningkatan kemitraan investasi Usaha Kecil Menengah dengan perusahaan asing									
					Terlaksananya Fasilitasi Peningkatan kemitraan inv	0,00	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	2.17.06.1.01 - Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	2.17.06.1.01.01 - Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Terlaksananya Fasilitasi Peningkatan kemitraan inv	0 Kegiatan	
66.				3 Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah									
					Terfasilitasinya Peningkatan Kemitraan bagi Usaha kecil	500.000.000,00	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.17.07.1.01 - Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	2.17.07.1.01.01 - Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah UKM yang difasilitasi kemitraannya	60 Unit	
67.				4 Peningkatan kerjasama di bidang HAKI									
					Terlaksananya Peningkatan kerjasama di bidang HAKI	0,00	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.02 - PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	2.17.02.1.02 - Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	2.17.02.1.02.02 - Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Terlaksananya Peningkatan kerjasama di bidang HAKI	0 Kegiatan	
68.				5 Fasilitasi Pengembangan sarana promosi hasil produksi									
					Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan saran Promos	0,00						0 Kegiatan	
69.				6 Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan (DAK)									
					Jumlah yang mengikuti pelatihan	0,00						0 Orang	
70.				7 Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/KUD (DAK)									
					Jumlah Peserta Pelatihan	0,00						0 Orang	
71.				8 Sosialisasi HAKI kepada Usaha Mikro Kecil Menengah									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Terlaksananya Sosialisasi HAKI dan UMKM	0,00	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.17.07.1.01 - Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	2.17.07.1.01.01 - Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Terlaksananya Sosialisasi HAKI dan UMKM	0 Kegiatan	
					Jumlah peserta sosialisasi HAKI kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah	0,00	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.17.07.1.01 - Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	2.17.07.1.01.01 - Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah peserta sosialisasi HAKI kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah	120 Orang	
72.				9 Sosialisasi dan pelatihan pola pengelolaan limbah industri dalam menjaga kelestarian kawasan Usaha Mikro Kecil Menengah									
					Terlaksananya Sosialisasi dan Pelatihan pola penge	0,00						0 Kegiatan	
73.				10 Monitoring, evaluasi dan pelaporan									
					Terlaksananya Monitoring, evaluasi dan pelaporan.	0,00	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	2.17.04.1.01 - Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	2.17.04.1.01.01 - Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi	Terlaksananya Monitoring, evaluasi dan pelaporan.	0 Kegiatan	
74.				13 Pengembangan UMKM Pengelola sumber daya Lokal									
					Jumlah UKM pengelola sumber daya lokal yang akan dikembangkan	434.800.000,00	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	2.17.08.1.01 - Pengembangan Usaha Kecil Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	2.17.08.1.01.01 - Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah UKM yang dikembangkan	100 UMKM	
75.				16 Penumbuhan dan Pengembangan kewirausahaan									
					Jumlah Peserta penumbuhan dan Pengembangan KEwirausahaan	0,00	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.17.07.1.01 - Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	2.17.07.1.01.01 - Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Peserta penumbuhan dan Pengembangan KEwirausahaan	100 Unit	
76.				28 Pelatihan Kewirausahaan Bagi Mama-Mama Asli Papua									
					Jumlah Peserta Pelatihan	0,00	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.17.07.1.01 - Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	2.17.07.1.01.01 - Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Peserta Pelatihan	200 Orang	
77.				30 Pelatihan Kewirausahaan bagi Usaha Kecil (DAK Non Fisik)									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Jumlah unit usaha kecil peserta pelatihan kewirausahaan	0,00	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.17.07.1.01 - Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	2.17.07.1.01.01 - Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah unit usaha kecil peserta pelatihan kewirausahaan	0 Unit	
					Jumlah pengusaha kecil peserta pelatihan kewirausahaan	1.550.000.000,00	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.17.07.1.01 - Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	2.17.07.1.01.01 - Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah UKM yang dilatih	250 Orang	
78.				31 Pelatihan Kewirausahaan Berbasis Potensi Lokal Bagi UMKM									
					Jumlah Peserta Pelatihan	2.400.000.000,00	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	2.17.05.1.01 - Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	2.17.05.1.01.01 - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah peserta pelatihan	180 Orang	
79.				32 Gerakan Kewirausahaan bagi Mahasiswa									
					Jumlah Peserta	0,00	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.17.07.1.01 - Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	2.17.07.1.01.01 - Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Peserta	100 Orang	
80.				33 Pelatihan Peningkatan Keterampilan Produk Unggulan Daerah Potensi Ekspor (Vokasional)									
					Jumlah Peserta Pelatihan	0,00	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.17.07.1.01 - Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	2.17.07.1.01.01 - Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Peserta Pelatihan	200 Orang	
81.				34 Pelatihan Perkoperasian dan Kewirausahaan Bagi Koperasi Sektor Aneka Jasa									
					Jumlah Peserta Pelatihan	0,00	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.17.07.1.01 - Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	2.17.07.1.01.01 - Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Peserta Pelatihan	200 Orang	
82.				35 Pelatihan Perkoperasian dan Kewirausahaan Bagi Koperasi Sektor Industri Kerajinan, Perikanan, Kehutanan, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan									
					Jumlah Peserta Pelatihan	0,00	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.17.07.1.01 - Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	2.17.07.1.01.01 - Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Peserta Pelatihan	30 Orang	

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
83.	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Cakupan UMKM lokal yang bermitra dalam pelaksanaan PON; Cakupan usaha mikro dan kecil yang mandiri dikelola pengusaha muda; Jumlah UMKM yang mandiri dalam kompetisi usaha; Persentase Pertumbuhan Jumlah Wirausaha Baru; Persentase peningkatan pengembangan UMKM keolahragaan	36 Pelatihan Keterampilan Produksi Handycraft dan Souvenir									
					Jumlah Kelompok Usaha yang dilatih	0,00						0 Kelompok	
84.				37 Penguatan Usaha Ekonomi Produktif UKM Melalui Sarana Produksi Berbasis Komoditi Unggulan Daerah									
					Jumlah kelompok UMKM yang diberi Penguatan	3.000.000.000,00	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.17.07.1.01 - Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	2.17.07.1.01.01 - Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah kelompok UMKM yang diberi Penguatan	30 Kelompok	
85.				38 Pelatihan Manajemen bagi Usaha Kecil									
					Jumlah peserta pelatihan	1.000.000.000,00	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.17.07.1.01 - Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	2.17.07.1.01.01 - Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah peserta pelatihan	200 Orang	
86.				39 Pelatihan Kewirausahaan berbasis teknologi informasi									
					Jumlah peserta pelatihan	1.450.000.000,00	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	2.17.05.1.01 - Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	2.17.05.1.01.01 - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah peserta pelatihan e-commerce	160 Orang	
87.				40 Pelatihan Enterpreneuship bagi UKM Pengelola Komoditas Unggulan (Sagu, Kopi, Ikan dan Buah Merah)									
					Jumlah Peserta Pelatihan	0,00						0 Orang	
88.				41 Peningkatan dan Pengembangan Kualitas Produk UKM									
					Jumlah Produk UKM yang ditingkatkan	0,00						0 Produk	
89.		17 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Cakupan fasilitasi pemasaran produk UMKM unggulan daerah; Penyaluran kredit UMKM dari sektor perbankan; Persentase Peningkatan Jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM); Tingkat Partisipasi dalam pameran gelar produk KUMKM dalam negeri	1 Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Jumlah Peserta Sosialisasi	0,00	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.17.07.1.01 - Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	2.17.07.1.01.01 - Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Peserta Sosialisasi	100 Orang	
90.				2 Pengembangan klaster bisnis									
91.				3 Koordinasi pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk Usaha Kecil Menengah dan Koperasi									
					Jumlah UKM yang difasilitasi oleh Pemerintah	0,00						0 Orang	
92.				4 Koordinasi penggunaan dana pemerintahan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah									
					Jumlah UKM yang mendapat dana pemerintah	0,00						0 Orang	
93.				5 Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah									
94.				6 Pengembangan sarana pemasaran produk Usaha Mikro Kecil Menengah									
					Jumlah sarana pemasaran	4.500.000.000,00	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	2.17.08.1.01 - Pengembangan Usaha Kecil Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	2.17.08.1.01.01 - Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Produk UMKM	1 Unit	
95.				7 Peningkatan jaringan kerjasama antar lembaga									
96.				8 Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangg, industri kecil dan industri menengah									
97.				9 Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah									
					Jumlah peserta pameran	1.000.000.000,00	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.17.07.1.01 - Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	2.17.07.1.01.01 - Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah peserta pameran	30 Orang	
98.				10 Pengembangan Kebijakan dan program peningkatan ekonomi lokal									
					Jumlah Peserta Pengembangan Kebijakan dan Program Peningkatan Ekonomi	6.000.000.000,00	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.17.07.1.01 - Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	2.17.07.1.01.01 - Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Kampung yang dikembangkan	3 Orang	
99.				11 Monitoring, evaluasi dan pelaporan									
					Jumlah kegiatan yang dipantau, dievaluasi dan dilaporkan	0,00	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	2.17.08.1.01 - Pengembangan Usaha Kecil Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	2.17.08.1.01.01 - Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah kegiatan yang dipantau, dievaluasi dan dilaporkan	29 Laporan	
100.				22 Partisipasi pameran gelar produk KUMKM									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Jumlah peserta pameran gelar produk KUKM	0,00	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.17.07.1.01 - Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	2.17.07.1.01.01 - Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah peserta pameran gelar produk KUKM	8 Orang	
101.				23 Seleksi Tenaga Pendamping Bagi Koperasi dan UMKM (DAK Non Fisik)									
					Jumlah tenaga pendamping bagi koperasi dan UKM yang diseleksi	500.000.000,00	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	2.17.05.1.01 - Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	2.17.05.1.01.01 - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperas	Jumlah tenaga pendamping bagi koperasi dan UKM yang diseleksi	50 Orang	
102.				25 Pendataan UKM									
					Jumlah UKM yang didata	525.800.000,00	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.17.07.1.01 - Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	2.17.07.1.01.01 - Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah UKM yang didata	1000 Unit	
103.				26 Peningkatan Usaha UMKM Melalui Jaringan Kemitraan									
					Jumlah UMKM yang Bermitra	0,00	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.17.07.1.01 - Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	2.17.07.1.01.01 - Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah UMKM yang Bermitra	60 UMKM	
104.				27 Gebyar gelar produk unggulan daerah									
					Jumlah peserta gebyar gelar produk unggulan daerah	0,00						0 Orang	
105.				28 Partisipasi Pameran Gelar Produk KUKM di SMESCO									
					Jumlah peserta Pameran Gelar Produk KUKM di SMESCO	2.000.000.000,00	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.17.07.1.01 - Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	2.17.07.1.01.01 - Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah peserta Pameran Gelar Produk KUKM di SMESCO	10 Orang	
106.		18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase Koperasi Sehat (Koperasi Sehat Yang Melaksanakan RAT); Persentase koperasi aktif dan berkembang; jumlah kelompok pra koperasi yang akan di fasilitasi menjadi koperasi	1 Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi									
					Jumlah dokumen Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi	0,00	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	2.17.06.1.01 - Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	2.17.06.1.01.01 - Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah dokumen Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi	3 Dokumen	
107.				2 Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan perkoperasian									
108.				3 Pembangunan sistem informasi perencanaan pengembangan Perkoperasian									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
109.	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase Koperasi Sehat (Koperasi Sehat Yang Melaksanakan RAT); Persentase koperasi aktif dan berkembang; jumlah kelompok pra koperasi yang akan di fasilitasi menjadi koperasi	4 Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian									
					Jumlah Peserta Sosialisasi	0,00	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	2.17.05.1.01 - Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	2.17.05.1.01.01 - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah Peserta Sosialisasi	500 Orang	
110.				5 Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi									
					Jumlah Koperasi yang dibina	0,00	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	2.17.03.1.01 - Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	2.17.03.1.01.02 - Peningkatan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	Jumlah Koperasi yang dibina	0 Unit	
111.				6 Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi									
					Jumlah Usaha Koperasi yang ditingkatkan	958.000.000,00	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	2.17.06.1.01 - Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	2.17.06.1.01.01 - Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Usaha Koperasi yang ditingkatkan	30 Unit	
112.				7 Penyebaran model-model pola pengembangan koperasi									
					Jumlah model koperasi	0,00	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	2.17.04.1.01 - Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	2.17.04.1.01.02 - Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi	Jumlah model koperasi	0 Unit	
113.				8 Rintisan penerapan teknologi sederhana/ manajemen modern pada jenis-jenis usaha koperasi									
114.				9 Monitoring, evaluasi dan pelaporan									
					Jumlah laporan monev	740.000.000,00	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	2.17.04.1.01 - Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	2.17.04.1.01.01 - Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi	Jumlah laporan monev	29 Dokumen	
115.				20 Identifikasi Keragaman Koperasi									
					Jumlah Koperasi yang diidentifikasi	500.000.000,00	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	2.17.03.1.01 - Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	2.17.03.1.01.01 - Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat	Jumlah Koperasi yang diidentifikasi	75 Unit	
116.				21 Monitoring Pengawasan Koperasi Pelaksanaan RAT									
					Jumlah Koperasi yang melaksanakan RAT	0,00						0 Unit	
117.				26 Sosialisasi Tata Cara Pendirian Koperasi									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
118.	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase Koperasi Sehat (Koperasi Sehat Yang Melaksanakan RAT); Persentase koperasi aktif dan berkembang; jumlah kelompok pra koperasi yang akan di fasilitasi menjadi koperasi	33 Pembinaan, pemantauan, pengendalian, pengawasan, dan penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi									
					Jumlah KSP /USP yang diawasi dan dinilai kesehatannya	0,00						0 Unit	
119.				41 Sosialisasi penyaluran kredit pembiayaan melalui LPDB KUMKM									
					Jumlah peserta sosialisasi penyaluran Kredit Pembiayaan melalui LPDB-KUMKM	0,00	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	2.17.06.1.01 - Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	2.17.06.1.01.01 - Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah peserta sosialisasi penyaluran Kredit Pembiayaan melalui LPDB-KUMKM	130 Orang	
120.				43 Identifikasi kebutuhan pelatihan dan money pasca pelatihan									
					Jumlah laporan data identifikasi kebutuhan pelatihan bagi koperasi dan money pasca pelatihan	788.000.000,00	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	2.17.05.1.01 - Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	2.17.05.1.01.01 - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperas	Jumlah laporan data identifikasi kebutuhan pelatihan bagi koperasi dan money pasca pelatihan	10 Unit	
121.				45 Pelatihan Perkoperasian Bagi Pengurus Koperasi di Lingkungan Gereja									
122.				46 Orientasi Layanan Pembentukan Badan Layanan Umum Daerah Dana Bergulir (BLUD-DB)									
					Jumlah peserta orientasi pembentukan badan layanan umum daerah dana bergulir (BLUD)	0,00	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	2.17.03.1.02 - Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	2.17.03.1.02.01 - Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat	Jumlah peserta orientasi pembentukan badan layanan umum daerah dana bergulir (BLUD)	0 Orang	
					Jumlah UMKM peserta orientasi pembentukan badan layanan umum daerah dana bergulir (BLUD)	0,00	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	2.17.03.1.01 - Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	2.17.03.1.01.01 - Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat	Jumlah UMKM peserta orientasi pembentukan badan layanan umum daerah dana bergulir (BLUD)	0 Unit	
123.				48 Pelatihan Perkoperasian bagi Pengurus / Pengelola Koperasi (DAK Non Fisik)									
					Jumlah pengurus/pengelola koperasi peserta pelatihan perkoperasian	500.000.000,00	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	2.17.05.1.01 - Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	2.17.05.1.01.01 - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperas	Jumlah pengurus/pengelola koperasi peserta pelatihan perkoperasian	50 Orang	
124.				49 Pelatihan Perkoperasian dan Kewirausahaan bagi Pendamping (DAK Non Fisik)									
					Jumlah pendamping peserta pelatihan perkoperasian dan kewirausahaan	1.800.000.000,00	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	2.17.05.1.01 - Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	2.17.05.1.01.01 - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperas	Jumlah pendamping peserta pelatihan dan kewirausahaan	50 Orang	
125.				51 Bimtek KSP/USP dengan Peralatan Kerja									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Jumlah KSP/USP peserta bimtek	0,00	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	2.17.05.1.01 - Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	2.17.05.1.01.01 - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperas	Jumlah KSP/USP peserta bimtek	60 Unit	
126.				60 Pengawasan dan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi									
					Jumlah KSP/USP koperasi yang diawasi dan dinilai kesehatan	734.800.000,00	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	2.17.04.1.01 - Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	2.17.04.1.01.02 - Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi	Jumlah KSP/USP koperasi yang diawasi dan dinilai kesehatan	75 Orang	
127.				61 Pembinaan, Pemantauan, Pengendalian KSP/USP Koperasi									
					Jumlah KSP/USP koperasi yang dibina	0,00	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	2.17.03.1.01 - Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	2.17.03.1.01.01 - Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat	Jumlah KSP/USP koperasi yang dibina	0 Orang	
128.				62 Bimtek Pembuatan Laporan Keuangan bagi Koperasi									
					Jumlah Peserta Bimtek Pembuatan Laporan Keuangan	0,00	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	2.17.03.1.01 - Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	2.17.03.1.01.01 - Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimtek Pembuatan Laporan Keuangan	200 Orang	
129.				63 Memfasilitasi Kemudahan Formalisasi Usaha Kecil Menengah menjadi Koperasi									
					Jumlah kelompok pra koperasi yang akan difasilitasi menjadi koperasi	0,00	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.02 - PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	2.17.02.1.02 - Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	2.17.02.1.02.02 - Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah kelompok pra koperasi yang akan difasilitasi menjadi koperasi	125 Unit	
130.				64 Meningkatkan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi									
					Jumlah Koperasi yang membntuk jaringan kerjasama usaha	0,00	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	2.17.03.1.02 - Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	2.17.03.1.02.01 - Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat	Jumlah Koperasi yang membntuk jaringan kerjasama usaha	0 Unit	
131.				65 Monitoring dan Pengawasan Koperasi Aktif									
					Jumlah Koperasi aktif yang diawasi	750.000.000,00	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	2.17.03.1.01 - Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	2.17.03.1.01.02 - Peningkatan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	Jumlah Koperasi aktif yang diawasi	145 Unit	
132.				66 Revitalisasi Kelembagaan Koperasi Yang Tidak Aktif									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Jumlah koperasi yang usahanya ditingkatkan	0,00	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	2.17.03.1.01 - Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	2.17.03.1.01.01 - Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat	Jumlah koperasi yang usahanya ditingkatkan	10 Unit	
133.				67 Bimtek tata cara pendirian koperasi									
					Jumlah akta pendirian koperasi	1.500.000.000,00	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	2.17.05.1.01 - Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	2.17.05.1.01.01 - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperas	Jumlah akta pendirian koperasi	120 Unit	
134.				68 Sosialisasi perkoperasian bagi Koperasi orang asli papua									
					Jumlah orang asli papua peserta sosialisasi perkoperasi	0,00	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	2.17.05.1.01 - Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	2.17.05.1.01.01 - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperas	Jumlah orang asli papua peserta sosialisasi perkoperasi	100 Orang	
135.				69 Pengawasan dan Pemeringkatan koperasi berprestasi									
					Tersedianya data peringkat koperasi di papua	600.000.000,00	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	2.17.04.1.01 - Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	2.17.04.1.01.01 - Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi	Jumlah Koperasi yang diberikan peringkat	30 Unit	
136.				70 Fasilitasi pembentukan koperasi sekunder di provinsi papua									
					Jumlah koperasi sekunder yang dibentuk	0,00	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.02 - PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	2.17.02.1.02 - Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	2.17.02.1.02.02 - Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah koperasi sekunder yang dibentuk	3 Unit	
137.				71 Sosialisasi Penyaluran Rencana Tindak KUR dan Dana dari Lembaga Keuangan Lainnya									
					Jumlah peserta sosialisasi	0,00	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	2.17.06.1.01 - Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	2.17.06.1.01.01 - Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah peserta sosialisasi	25 Orang	
138.				72 Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/KUD									
					Jumlah peserta pelatihan	0,00	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	2.17.05.1.01 - Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	2.17.05.1.01.01 - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperas	Jumlah peserta pelatihan	100 Orang	
139.				73 Pelatihan Pengelolaan koperasi pemuda/mahasiswa/sekolah									
					Jumlah koperasi yang dilatih	0,00	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	2.17.05.1.01 - Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	2.17.05.1.01.01 - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperas	Jumlah koperasi yang dilatih	60 Unit	

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
140.	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase Koperasi Sehat (Koperasi Sehat Yang Melaksanakan RAT); Persentase koperasi aktif dan berkembang; jumlah kelompok pra koperasi yang akan di fasilitasi menjadi koperasi	74 Pelatihan perkoperasian dan kewirausahaan koperasi di lingkungan gereja									
					Jumlah pengurus/pengelola koperasi gereja yang dilatih	0,00	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	2.17.05.1.01 - Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	2.17.05.1.01.01 - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah pengurus/pengelola koperasi gereja yang dilatih	200 Orang	
141.				75 Pelatihan pengelolaan keuangan bagi koperasi									
					Jumlah pengurus/pengelola koperasi gereja yang dilatih	0,00	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	2.17.05.1.01 - Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	2.17.05.1.01.01 - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah pengurus/pengelola koperasi gereja yang dilatih	100 Orang	
142.				76 Pendataan Koperasi									
					Tersedianya data koperasi	650.000.000,00	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	2.17.03.1.01 - Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	2.17.03.1.01.02 - Peningkatan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	Tersedianya data koperasi	500 Dokumen	
143.				77 Pembentukan Koperasi Primer (Koperasi Serba Usaha)									
					Jumlah Koperasi Primer yang dibentuk	550.000.000,00	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	2.17.06.1.01 - Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	2.17.06.1.01.02 - Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Koperasi Primer yang dibentuk	1 Lembaga	
144.				78 Dukungan Fasilitasi Permodalan Usaha bagi Koperasi dan UKM									
					Jumlah Koperasi dan UKM yang mendapatkan Dukungan Modal	1.500.000.000,00	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	2.17.06.1.01 - Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	2.17.06.1.01.01 - Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Koperasi dan UKM yang mendapatkan Dukungan Modal	100 Lembaga	
145.	Perdagangan	1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	À Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	1 Penyediaan jasa surat menyurat									
					Jumlah surat yang disediakan	347.900.000,00		3.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.06.01.1.03 - Administrasi Umum	3.06.01.1.03.01 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang terkirim	1500 Surat	
146.				2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik									
					Jumlah Jasa Layanan berlangganan Listrik, Air, Telepon, Transponder	821.700.000,00		3.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.06.01.1.03 - Administrasi Umum	3.06.01.1.03.02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Layanan	12 Layanan	
147.				3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor									
					Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	0,00		3.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.06.01.1.03 - Administrasi Umum	3.06.01.1.03.03 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	0 Unit	
148.				5 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah									
					Jumlah jasa jaminan	0,00						0 Unit Tahun	
149.				6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Jumlah Unit Mobil Dinas/Operasional yang terpelihara dan Terfasilitasi Perijinannya	0,00		3.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.06.01.1.03 - Administrasi Umum	3.06.01.1.03.06 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Unit Mobil Dinas/Operasional yang diservis dan dipelihara	44 Unit	
150.				8 Penyediaan jasa kebersihan kantor									
					Luas Gedung dan Halaman yang disediakan jasa kebersihan	0,00		3.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.06.01.1.03 - Administrasi Umum	3.06.01.1.03.08 - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	jumlah Gedung dan Halaman yang dibersihkan	55000 M2	
					Jumlah tenaga kebersihan dan Fasilitas Pendukung kebersihan kantor	514.000.000,00		3.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.06.01.1.03 - Administrasi Umum	3.06.01.1.03.08 - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah tenaga kebersihan	12 Orang	
					Jumlah Jenis Bahan dan Alat Kebersihan	0,00		3.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.06.01.1.03 - Administrasi Umum	3.06.01.1.03.14 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Bahan dan Alat Kebersihan	14 Jenis	
151.				9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja									
					Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	0,00		3.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.06.01.1.03 - Administrasi Umum	3.06.01.1.03.09 - Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	10 Unit	
152.				10 Penyediaan alat tulis kantor									
					Jumlah jenis ATK yang disediakan	489.000.000,00		3.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.06.01.1.03 - Administrasi Umum	3.06.01.1.03.10 - Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	60 Jenis	
153.				11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan									
					Jumlah barang cetakan	0,00		3.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.06.01.1.03 - Administrasi Umum	3.06.01.1.03.11 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan	20 Jenis	
					Jumlah penggandaan	301.282.000,00		3.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.06.01.1.03 - Administrasi Umum	3.06.01.1.03.11 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penggandaan	3200 Lembar	
					Jumlah Jenis Barang Cetak dan yang Disediakan	0,00		3.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.06.01.1.03 - Administrasi Umum	3.06.01.1.03.11 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	20 Jenis	
					Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	0,00		3.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.06.01.1.03 - Administrasi Umum	3.06.01.1.03.11 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	12 Bulan	
154.				12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor									
					Jumlah Komponen Listrik yang disediakan	350.000.000,00		3.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.06.01.1.03 - Administrasi Umum	3.06.01.1.03.12 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen alat pemeliharaan listrik dan genset yang disediakan	250 Buah	
155.				13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor									
					Jumlah peralatan dan Perlengkapan	0,00		3.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.06.01.1.03 - Administrasi Umum	3.06.01.1.03.25 - Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah penggandaan peralatan kantor yang disediakan	5 Unit	
156.				15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan									
					Jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	290.000.000,00		3.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.06.01.1.03 - Administrasi Umum	3.06.01.1.03.15 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	250 Jenis	
157.				17 Penyediaan makanan dan minuman									
					Pelaksanaan penyediaan makan dan minum	0,00		3.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.06.01.1.03 - Administrasi Umum	3.06.01.1.03.17 - Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Porsi makan dan minum kegiatan yang tersedia	12 Kegiatan	
					Pelaksanaan makan minum tamu dan rapat	0,00		3.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.06.01.1.03 - Administrasi Umum	3.06.01.1.03.17 - Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Porsi makan dan minum yang tersedia	12 Kali Tahun	
					Pelaksanaan makan minum saat olah raga (hari Jumat)	0,00		3.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.06.01.1.03 - Administrasi Umum	3.06.01.1.03.17 - Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Porsi makan dan minum yang tersedia	12 Kali	
					Tersediannya Makanan dan Minuman	0,00		3.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.06.01.1.03 - Administrasi Umum	3.06.01.1.03.17 - Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Porsi makan dan minum yang tersedia	12 Bulan	
					Jumlah orang yang disediakan makan dan minuman	548.000.000,00		3.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.06.01.1.03 - Administrasi Umum	3.06.01.1.03.17 - Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Porsi makan dan minum yang tersedia	70 Orang	
158.				18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	2.661.000.000,00		3.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.06.01.1.03 - Administrasi Umum	3.06.01.1.03.18 - Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	30 Orang	
159.				19 Penyediaan Jasa Pengamanan									
					Pelaksanaan pembayaran insentif bagi tenaga operator dan penjaga X-Ray VIP Room Bandara Sentani	0,00		3.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.06.01.1.03 - Administrasi Umum	3.06.01.1.03.01 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa keamanan/security yang dibayarkan	0 Orang Bulan	
					Pelaksanaan pembayaran honor bagi satpam	0,00		3.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.06.01.1.03 - Administrasi Umum	3.06.01.1.03.01 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa keamanan/security yang dibayarkan	0 Orang Bulan	
					Pelaksanaan uang makan satpam	0,00		3.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.06.01.1.03 - Administrasi Umum	3.06.01.1.03.01 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa keamanan/security yang dibayarkan	0 Orang Bulan	
					Jumlah tenaga pengamanan	787.200.000,00		3.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.06.01.1.03 - Administrasi Umum	3.06.01.1.03.01 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa keamanan/security yang dibayarkan	16 Orang	
160.		2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	À Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	3 Pembangunan gedung kantor									
					Luas bangunan yang dibangun	10.000.000.000,00		3.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.06.01.1.03 - Administrasi Umum	3.06.01.1.03.39 - Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Luas bangunan yang dibangun	1 M2	
					Tersedianya desain perencanaan bangunan	0,00		3.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.06.01.1.03 - Administrasi Umum	3.06.01.1.03.39 - Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Tersedianya desain perencanaan bangunan	0 Dokumen	
161.				4 Pengadaan mobil jabatan									
					Jumlah mobil yang diadakan	0,00		3.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.06.01.1.03 - Administrasi Umum	3.06.01.1.03.20 - Pengadaan Mobil Jabatan	Jumlah mobil yang diadakan	0 Unit	
162.				5 Pengadaan kendaraan dinas/operasional									
					Jumlah kendaraan yang diadakan	1.000.000.000,00		3.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.06.01.1.03 - Administrasi Umum	3.06.01.1.03.21 - Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda 4	3 Unit	
					Jumlah kendaraan roda 2	0,00		3.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.06.01.1.03 - Administrasi Umum	3.06.01.1.03.21 - Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda 2	0 Unit	
163.				7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor									
					Jumlah pengadaan perlengkapan	900.000.000,00		3.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.06.01.1.03 - Administrasi Umum	3.06.01.1.03.23 - Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan	10 Unit	
164.				9 Pengadaan peralatan gedung kantor									
					Jumlah peralatan perlengkapan	900.000.000,00		3.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.06.01.1.03 - Administrasi Umum	3.06.01.1.03.25 - Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan/perlengkapan yang diadakan	10 Unit	
165.				22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor									
					Jumlah gedung kantor yang dipelihara	570.000.000,00		3.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.06.01.1.03 - Administrasi Umum	3.06.01.1.03.29 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor	10 Unit	
					belanja sewa	0,00		3.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.06.01.1.03 - Administrasi Umum	3.06.01.1.03.29 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung yang disewa	0 Tahun	
166.				24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional									
					Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	0,00		3.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.06.01.1.03 - Administrasi Umum	3.06.01.1.03.31 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah dan Jenis perlengkapan/peralatan gedung kantor yang dipelihara	4 Unit	
					Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	424.000.000,00		3.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.06.01.1.03 - Administrasi Umum	3.06.01.1.03.31 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang	4 Unit	
					sewa kendaraan	0,00		3.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.06.01.1.03 - Administrasi Umum	3.06.01.1.03.31 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan yang diperbaiki/Service	0 Bulan	
167.				26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Pelaksanaan pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	0,00		3.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.06.01.1.03 - Administrasi Umum	3.06.01.1.03.27 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Jumlah Rumah Jabatan	25 Kegiatan	
					Jumlah Perlengkapan Gedung kantor yang terpelihara	250.000.000,00		3.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.06.01.1.03 - Administrasi Umum	3.06.01.1.03.33 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung kantor yang dipelihara	13 Unit	
					Tersediannya biaya pemeliharaan gedung kantor	0,00		3.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.06.01.1.03 - Administrasi Umum	3.06.01.1.03.39 - Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor	12 Bulan	
168.				28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor									
					Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	0,00		3.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.06.01.1.03 - Administrasi Umum	3.06.01.1.03.35 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	12 Unit	
169.				30 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor									
					Luas bangunan yang direhab	20.100.000.000,00		3.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.06.01.1.03 - Administrasi Umum	3.06.01.1.03.39 - Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Jumlah bangunan yang direhab	10000 M2	
170.		3 Program peningkatan disiplin aparatur	À Meningkatnya disiplin aparatur	2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya									
					Jumlah pakaian dinas yang diadakan	2.448.000.000,00		3.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.06.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	3.06.01.1.04.02 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas sipil harian	306 Stell	
171.				4 Pengadaan pakaian KORPRI									
					jumlah pakaian KORPRI yang diadakan	0,00		3.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.06.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	3.06.01.1.04.04 - Pengadaan Pakaian Korpri	Jumlah pakaian KORPRI yang diadakan	99 Stell	
172.				5 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu									
					Jumlah pakaian khusus yang diadakan	4.590.000.000,00		3.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.06.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	3.06.01.1.04.05 - Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah pakaian Batik yang diadakan	306 Stell	
173.		5 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	À Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	1 Pendidikan dan pelatihan formal									
					Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	1.000.000.000,00		3.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.06.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	3.06.01.1.04.09 - Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparatur mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	3 Orang	
174.				2 Sosialisasi peraturan perundang-undangan									
					Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	0,00		3.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.06.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	3.06.01.1.04.10 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	50 Orang	
175.				3 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan									
					Jumlah peserta bimbingan teknis tentang implementasi peraturan perundang-undangan	0,00		3.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.06.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	3.06.01.1.04.11 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta bimbingan teknis tentang implementasi peraturan perundang-undangan	2 Orang	
176.				4 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal									
					Jumlah aparatur yang terlatih	1.500.000.000,00		3.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.06.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	3.06.01.1.04.11 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang	
177.		6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	À Meningkatnya kualitas akuntabilitas OPD	1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD									
					Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	150.000.000,00		3.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.06.01.1.02 - Administrasi Keuangan	3.06.01.1.02.06 - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan	20 Laporan	
					Laporan LAKIP SKPD	0,00		3.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.06.01.1.01 - Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.06.01.1.01.05 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan LAKIP SKPD	0 Dokumen	
178.				2 Penyusunan laporan keuangan semesteran									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Jumlah pelaporan keuangan semesteran yang diselesaikan tepat waktu	359.300.000,00		3.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.06.01.1.02 - Administrasi Keuangan	3.06.01.1.02.07 - Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Jumlah dokumen laporan	7 Laporan	
179.				3 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran									
					Jumlah pelaporan prognosis realisasi anggaran yang diselesaikan tepat waktu	0,00		3.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.06.01.1.02 - Administrasi Keuangan	3.06.01.1.02.08 - Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah pelaporan prognosis realisasi anggaran yang diselesaikan tepat waktu	1 Laporan	
180.				4 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun									
					Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	238.000.000,00		3.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.06.01.1.02 - Administrasi Keuangan	3.06.01.1.02.09 - Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	20 Laporan	
181.				5 Penyusunan Renja, RKA dan Perubahan APBD									
					Jumlah dokumen	258.000.000,00		3.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.06.01.1.01 - Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.06.01.1.01.01 - Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	20 Dokumen	
182.				10 Forum SKPD Provinsi Papua									
					Jumlah Peserta Forum	879.000.000,00		3.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.06.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	3.06.01.1.04.10 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Forum	200 Orang	
183.				12 Penyusunan RENSTRA									
					Jumlah Dokumen	0,00		3.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.06.01.1.01 - Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.06.01.1.01.01 - Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	0 Dokumen	
184.				13 Penyusunan SOP									
					Jumlah Dokumen	0,00		3.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.06.01.1.01 - Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.06.01.1.01.04 - Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	5 Dokumen	
185.				14 Peningkatan Kapasitas PPID									
					Jumlah orang	0,00		3.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.06.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	3.06.01.1.04.09 - Pendidikan dan Pelatihan Formal	Pembinaan Administrasi Kepegawaian	5 Orang	
186.				15 Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM)									
					Jumlah Dokumen yang disusun	0,00		3.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.06.01.1.01 - Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.06.01.1.01.05 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen yang disusun	5 Dokumen	
187.				16 Penyusunan Dokumen Rencana Umum Pengadaan (RUP)									
					Jumlah Dokumen Rencana Umum Pengadaan (RUP)	0,00		3.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.06.01.1.01 - Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.06.01.1.01.04 - Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Umum Pengadaan (RUP)	5 Dokumen	
188.		15 Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan	Cakupan pengawasan peredaran barang dan jasa; Cakupan penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen; Persentase kenaikan pengeluaran per kapita perbulan rumahtangga; Rata-rata margin perdagangan barang-barang kebutuhan pokok; Terlaksananya Perlindungan Konsumen dan pengamanan	1 Koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen									
					Terlaksananya Koordinasi Peningkatan hubungan kerja	150.000.000,00	3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	3.30.06.1.01 - Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	3.30.06.1.01.02 - Peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen	Terlaksananya Koordinasi Peningkatan hubungan kerja dgn lembaga Perlindungan Konsumen	1 Kegiatan	
189.				2 Fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Terlaksananya Penyelesaian permasalahan-permasalahan	0,00	3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	3.30.04.1.02 - Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada pelaku usaha distribusi barang lintas kabupaten/ kota yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan	3.30.04.1.02.02 - Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Fasilitas Penyelesaian permasalahan-permasalahan Pengaduan Konsumen	10 Kegiatan	
					teratasinya tingkat permasalahan yang merugikan konsumen	0,00	3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	3.30.04.1.02 - Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada pelaku usaha distribusi barang lintas kabupaten/ kota yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan	3.30.04.1.02.01 - Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	teratasinya tingkat permasalahan yang merugikan konsumen	0 Kasus	
190.				3 Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa									
					Terlaksananya Pengawasan peredaran barang dan jasa	500.000.000,00	3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	3.30.06.1.03 - Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	3.30.06.1.03.01 - Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa Sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	Jumlah jenis barang dan jasa yang diawasi	5 Kegiatan	
191.				4 operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrolagian daerah									
					Tersediannya operasional dan pengembangan UPT Keme	600.000.000,00	3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	3.30.06.1.02 - Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	3.30.06.1.02.04 - Pengembangan Layanan Kalibrasi	Jumlah Peralatan Kalibrasi	1 Unit	
192.				5 Pengawasan dan monitoring BBM di Kab/Kota									
					terpantaunya harga BBM yang beredar di Masyarakat	0,00	3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	3.30.06.1.02 - Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	3.30.06.1.02.04 - Pengembangan Layanan Kalibrasi	Terpantaunya harga BBM yang beredar di Masyarakat	1500 Ltr	
193.				6 Pengawas terhadap barang dan jasa bagi masyarakat									
					meningkatnya jaminan keamanan pengguna barang dan jasa	800.000.000,00	3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	3.30.04.1.02 - Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada pelaku usaha distribusi barang lintas kabupaten/ kota yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan	3.30.04.1.02.02 - Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Komoditi yang diawasi	5 Komoditi	
194.				7 Kegiatan sosialisasi undang-undang perlindungan konsumen dan perdas no. 15 tahun 2013									
					peningkatan pemahaman tentang hak-hak dari konsumen untuk mendapatkan perlindungan	500.000.000,00	3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	3.30.06.1.01 - Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	3.30.06.1.01.01 - Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Jumlah peserta sosialisasi	5 Kabupaten	
195.				8 Kegiatan sosialisasi tentang UU No. 23 tahun 2014 terkait pelimpahan kewenangan kemetrolagian ke Kab/Kota									
196.				9 Pengadaan papan display advertising di kota Jayapura									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					tersedia informasi dan data harga sembako dan BAPOKTING	0,00	3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	3.30.03.1.01 - Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta pasar lelang komoditas	3.30.03.1.01.01 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	tersedia informasi dan data harga sembako dan BAPOKTING	0 Buah	
197.				10 Sosialisasi pemberdayaan konsumen cerdas didaerah dalam rangka hari konsumen nasional									
					Tercapainya pemahaman dan peran konsumen dalam memilih produk yang di beli	500.000.000,00	3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	3.30.06.1.01 - Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	3.30.06.1.01.01 - Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	50 Kegiatan	
198.				11 fasilitasi penyelesaian permasalahan pengaduan konsumen									
					Teratasinya permasalahan antara pelaku usaha dan konsumen	0,00	3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	3.30.06.1.01 - Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	3.30.06.1.01.03 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	Teratasinya permasalahan antara pelaku usaha dan konsumen	25 Kasus	
199.				12 pengawasan dan sidang barang kadaluarsa bagi pelaku usaha									
					terawasnya barang kadaluarsa yang berdampak bagi konsumen	0,00	3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	3.30.06.1.03 - Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	3.30.06.1.03.02 - Fasilitasi Penanganan Terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen	terawasnya barang kadaluarsa yang berdampak bagi konsumen	5 Kegiatan	
200.				13 sosialisasi dan fasilitasi pembentukan BPSK di Provinsi dan Kabupaten/Kota									
					Terbentuknya lembaga perlindungan konsumen didaerah	0,00	3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	3.30.06.1.01 - Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	3.30.06.1.01.02 - Peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen	Terbentuknya lembaga perlindungan konsumen didaerah	5 Lembaga	
201.				14 Pelatihan Kewirausahaan bagi pedagang kaki lima dan asongan									
					tercapainya manajemen kewirausahaan bagi pedagang	0,00	3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	3.30.06.1.01 - Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	3.30.06.1.01.01 - Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	tercapainya manajemen kewirausahaan bagi pedagang	20 Orang	
202.				15 Pengawasan Alat Kalibrasi di Kab/Kota									
					Jumlah Alat Kalibrasi di Kab/Kota yang diawasi	750.000.000,00	3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	3.30.06.1.02 - Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	3.30.06.1.02.04 - Pengembangan Layanan Kalibrasi	Jumlah Alat Kalibrasi di Kab/Kota yang diawasi	50 Alat	
203.				16 Sosialisasi dan Penerapan Standarisasi Pengujian									
					Jumlah Peserta Sosialisasi yang mengikuti Standarisasi Pengujian	800.000.000,00	3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	3.30.06.1.02 - Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	3.30.06.1.02.02 - Pengembangan Layanan Pengujian	Jumlah Peserta Sosialisasi yang mengikuti Standarisasi Pengujian	40 Orang	
204.				17 Pengawasan dan Pengujian Mutu									
					Jumlah Laporan Objek Pengawasan dan Pengujian yang dilaksanakan	850.000.000,00	3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	3.30.06.1.02 - Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	3.30.06.1.02.02 - Pengembangan Layanan Pengujian	Jumlah Laporan Objek Pengawasan dan Pengujian yang dilaksanakan	2 Laporan	
205.		17 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Nilai ekspor Non Migas Papua ; Prosentase Meningkatnya Wirausaha baru dan UMKM yang kompetitif; Terlaksananya Peningkatan dan Pengembangan Ekspor; prosentase Peningkatan Pengembangan Ekspor	1 Penyusunan Kajian Prosedur dan dokumen ekspor dan									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Terlaksananya Penyusunan Kajian Prosedur dan dokume	0,00	3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	3.30.02.1.04 - Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	3.30.02.1.04.01 - Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Terlaksananya Penyusunan Kajian Prosedur dan dokume	5 Dokumen	
206.				2 Pengembangan informasi peluang pasar perdagangan luar negeri									
					tersedianya informasi mengenai peluang pasar perdagangan luar negeri	500.000.000,00	3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.07 - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	3.30.07.1.03 - Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	3.30.07.1.03.03 - Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah informasi peluang pasar perdagangan luar negeri	5 Dokumen	
207.				3 Peningkatan Kapasitas Lab.Penguji mutu barang eks									
					Meningkatnya Kapasitas Lab.Penguji mutu barang eksp	0,00	3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	3.30.06.1.02 - Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	3.30.06.1.02.02 - Pengembangan Layanan Pengujian	Jumlah Layanan Komoditi Ekspor yang dilakukan pengujian	5	
208.				4 Pengembangan data base informasi potensi unggulan									
					Terlaksananya Data base informasi potensi unggulan	0,00	3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.07 - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	3.30.07.1.03 - Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	3.30.07.1.03.03 - Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah Sistem dan Jaringan Informasi potensi unggulan yang di sediakan	5 Dokumen	
					Tersedianya Sistem Infprmasi Data base Informasi Potensi Unggulan	0,00	3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.07 - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	3.30.07.1.03 - Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	3.30.07.1.03.03 - Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Tersedianya Sistem Infprmasi Data base Informasi Potensi Unggulan	4 Komoditi	
209.				5 kerjasama standarisasi mutu produk baik nasional, bilateral, regional, dan internasional									
					Terlaksananya Standarisasi mutu produk baik nasion	0,00	3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	3.30.02.1.04 - Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	3.30.02.1.04.02 - Fasilitasi pemenuhan komitmen Penerbitan API melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Terlaksananya Standarisasi mutu produk baik nasion	2 Kegiatan	
210.				6 Kerjasama dengan lembaga internasional dalam rangka pengembangan produk									
					Terlaksananya Kerjasama dengan lembag Internasiona	0,00	3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	3.30.05.1.01 - Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah kabupaten/kota	3.30.05.1.01.05 - Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Terlaksananya Kerjasama dengan lembag Internasiona	1 Kegiatan	
211.				7 Koordinasi penyelesaian masalah produksi dan distribusi sektor industri									
					Terlaksananya Koordinasi penyelesaian masalah prod	0,00	3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	3.30.04.1.01 - Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	3.30.04.1.01.02 - Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Terlaksananya Koordinasi penyelesaian masalah prod	1 Kegiatan	
212.				8 Membangun jejaring dengan eksportir									
					Tersedianya jejaring dengan eksportir	0,00	3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	3.30.05.1.01 - Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah kabupaten/kota	3.30.05.1.01.05 - Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor Yang dilakukan Pembinaan	1 Kegiatan	
213.				9 Koordinasi program pengembangan ekspor dengan instansi terkait									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Terlaksananya Koordinasi Program pengembangan eks	0,00	3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	3.30.05.1.01 - Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah kabupaten/kota	3.30.05.1.01.05 - Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Terlaksananya Koordinasi Program pengembangan ekspor dengan instansi terkait di daerah	1 Kegiatan	
214.				10 Pengembangan kluster produk ekspor									
					Terbentuknya Pengembangan kluster produksi ekspor	0,00	3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	3.30.05.1.01 - Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah kabupaten/kota	3.30.05.1.01.05 - Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Terbentuknya Pengembangan kluster produksi ekspor	1	
					terbentuknya sinergitas kelompok usaha produk ekspor	0,00	3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	3.30.05.1.01 - Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah kabupaten/kota	3.30.05.1.01.05 - Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	terbentuknya sinergitas kelompok usaha produk ekspor	0 Kelompok	
215.				11 peningkatan kapasitas lab penguji mutu barang ekspor dan impor									
216.				12 Pembangunan promosi perdagangan internasional									
					terbentuknya sistem akses promosi perdagangan internasional	0,00	3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.07 - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	3.30.07.1.01 - Pelaksanaan Promosi Produk dalam Negeri	3.30.07.1.01.01 - Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah Pelaku Ekspor yang difasilitasi Promosi produk	1 Dokumen	
217.				13 Peningkatan dan pengembangan ekspor									
					Menikatkan Pendapatan dan Devisa Negara	0,00	3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	3.30.05.1.01 - Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah kabupaten/kota	3.30.05.1.01.05 - Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku Ekspor yang dibina	10 Rupiah	
218.				14 Dukungan marketing poin didaerah perbatasan RI/PNG									
					adanya kontak dagang di perbatasan	850.000.000,00	3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	3.30.05.1.01 - Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah kabupaten/kota	3.30.05.1.01.03 - Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah orang yang melakukan kontak dagang	2 Dokumen	
219.				15 Melakukan join even pameran bersama di daerah perbatasan RI/PNG									
					Terlaksana Promosi Produk Indonesia di Daerah Perbatasan	1.000.000.000,00	3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	3.30.05.1.01 - Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah kabupaten/kota	3.30.05.1.01.01 - Pameran Dagang Internasional/Nasional	Jumlah peserta berpartisipasi	5 Laporan	
220.				16 Melakukan sosialisasi penggunaan rupiah di daerah perbatasan RI/PNG									
					Tercapainya pemahaman tentang penggunaan nilai tukar rupiah di daerah perbatasan	0,00	3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.07 - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	3.30.07.1.03 - Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	3.30.07.1.03.02 - Sosialisasi peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri	Tercapainya pemahaman tentang penggunaan nilai tukar rupiah di daerah perbatasan	5 Dokumen	
221.				17 Pembentukan panitia tetap ekspor daerah di provinsi papua TA.2018									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Terlaksananya Panitia Tetap Ekspor Daerah	0,00					Terlaksananya Panitia Tetap Ekspor Daerah	4 Dokumen	
222.				18 Pameran dalam dan luar negeri dalam rangka promosi komoditi ekspor daerah									
					Promosi dan Perluasan pasar produk ekspor Papua	2.000.000.000,00	3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	3.30.05.1.01 - Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah kabupaten/kota	3.30.05.1.01.01 - Pameran Dagang Internasional/Nasional	Jumlah Promosi Yang diikuti	3 Dokumen	
223.				19 Publikasi dan promosi produk ekspor daerah secara online									
					Terlaksana Promosi Produk Daerah Secara Online	0,00	3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	3.30.05.1.01 - Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah kabupaten/kota	3.30.05.1.01.03 - Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Terlaksana Promosi Produk Daerah Secara Online	2 Produk	
224.				20 Monitoring, Pendataan dan Penyusunan Program Perdagangan luar Negeri di Daerah									
					updating data realisasi program dan laporan kebutuhan penyusunan program	700.000.000,00	3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	3.30.05.1.01 - Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah kabupaten/kota	3.30.05.1.01.03 - Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	updating data realisasi program dan laporan kebutuhan penyusunan program	2 Dokumen	
225.				21 Penyusunan Kajian dan Prosedur Ekspor									
					ketersediaan informasi dan pemahaman prosedur ekspor dan impor	0,00	3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.07 - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	3.30.07.1.03 - Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	3.30.07.1.03.03 - Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	ketersediaan informasi dan pemahaman prosedur ekspor dan impor	5 Dokumen	
226.				22 Pelatihan teknis ekspor dan simulasi bagi dunia usaha dan aparat									
					Peningkatan keahlian teknis dunia usaha dan aparat dalam pelaksanaan tata niaga ekspor/impor	0,00	3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.07 - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	3.30.07.1.03 - Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	3.30.07.1.03.03 - Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Peningkatan keahlian teknis dunia usaha dan aparat dalam pelaksanaan tata niaga ekspor/impor	50 Orang	
227.				23 sinkronisasi program penyusunan perdagangan luar negeri antara pusat dan daerah									
					Kesesuaian Program pusat dan daerah sesuai regulasi yang berlaku	0,00	3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	3.30.04.1.01 - Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	3.30.04.1.01.01 - Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Kesesuaian Program pusat dan daerah sesuai regulasi yang berlaku	4 Dokumen	
228.		18 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri	Persentase peningkatan pemasaran komoditas unggulan Provinsi Papua; Rata-rata margin harga bahan-bahan makanan kabupaten/kota terhadap ibu kota provinsi; Terlaksananya Peningkatan Efisiensi Pedagangan Dalam Negeri	1 Penyempurnaan perangkat peraturan, kebijakan dan pelaksanaan operasional									
229.				2 Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan usaha									
					tersedianya fasilitas perijinan bagi pelaku usaha	0,00					tersedianya fasilitas perijinan bagi pelaku usaha	2 Dokumen	
230.				3 Pengembangan pasar dan distribusi barang / produk									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Terbangunnya 3 pasar	5.000.000.000,00	3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	3.30.03.1.01 - Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta pasar lelang komoditas	3.30.03.1.01.03 - Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas	Jumlah Pasar yang dikembangkan	2 Unit	
					Jumlah Pasar yang dibangun	0,00						0 Unit	
231.				4 Pengembangan kelembagaan kerjasama kemitraan									
					terbentuknya MOU dengan mitra dagang	500.000.000,00	3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	3.30.06.1.01 - Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	3.30.06.1.01.02 - Peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen	Jumlah MOU dengan mitra dagang	2 Kelompok	
232.				5 Pengembangan pasar lelang daerah									
					Terlaksananya Pengembangan Pasar lelang Daerah	0,00					Jumlah Pasar Lelan Daerah dilakukan	1 Kegiatan	
233.				6 Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan									
					Terlaksananya Peningkatan sistem dan jaringan info	0,00	3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.07 - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	3.30.07.1.03 - Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	3.30.07.1.03.03 - Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah Sistem Jaringan Informasi Perdagangan Yang Terbagun	1 Kegiatan	
					tersedianya informasi data harga,data pasar bagi publik	0,00	3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	3.30.04.1.02 - Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada pelaku usaha distribusi barang lintas kabupaten/ kota yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan	3.30.04.1.02.01 - Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Data Informasi Perdagangan Yang di Sediakan	0 Dokumen	
					tersedianya digital display	0,00	3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.07 - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	3.30.07.1.03 - Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	3.30.07.1.03.03 - Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah Media Informasi yang disediakan	0 Bh	
234.				7 Sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri									
					Terlaksananya Sosialisasi peningkatan penggunaan p	500.000.000,00	3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.07 - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	3.30.07.1.03 - Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	3.30.07.1.03.02 - Sosialisasi peningkatan penggunaan produk Dalam Negeri	Jumlah Peserta Sosialisasi peningkatan penggunaan produk Dalam Negeri	1 Kegiatan	
235.				8 Pemberian bantuan sarana usaha perdagangan bagi orang asli papua di daerah pesisir dan pulau terluar									
					Tersedianya fasilitas sarana usaha perdagangan bagi orang asli papua	0,00					Tersedianya fasilitas sarana usaha perdagangan bagi orang asli papua	150 Unit	
					120 pedagang kecil asli papua di daerah pesisir pulau terluar yang menerima bantuan	0,00					120 pedagang kecil asli papua di daerah pesisir pulau terluar yang menerima bantuan	120 Orang	
236.				9 Pembinaan, pendampingan dalam pengembangan usaha dan kewirausahaan terutama UMKM									
					terbinan dan terlatihnya manajemen wirausaha pedagang lokal	0,00	3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	3.30.06.1.01 - Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	3.30.06.1.01.02 - Peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen	terbinan dan terlatihnya manajemen wirausaha pedagang lokal	20 Orang	
237.				11 Promosi produk pangan									
238.				12 Promosi produk pangan kerajinan dan unggulan									
239.				13 Pelaksanaan pasar murah di lima wilayah adat									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat menjelang HBK dengan harga terjangkau	1.000.000.000,00	3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	3.30.04.1.02 - Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada pelaku usaha distribusi barang lintas kabupaten/ kota yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan	3.30.04.1.02.02 - Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pelaksanaan Pasar Murah dalam rangka stabilitas Harga Bapok menjelang HBKN	5 Kabupaten	
240.				14 Pengendalian bongkar muat barang di pelabuhan dan bandar udara									
					terpantaunya aktifitas bongkar muat di pelabuhan dan bandar udara	750.000.000,00	3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	3.30.04.1.03 - Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	3.30.04.1.03.01 - Pemeriksaan Dokumen Perizinan Kegiatan Distribusi	Jumlah Pelabuhan Dan Bandara dilakukan pengawasan pengendalian bongkar muat barang	5 Kabupaten	
241.				15 Pembangunan Gedung Penyediaan Logistik									
					Jumlah Gedung Penyedia Sembako yang dibangun	3.000.000.000,00	3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	3.30.03.1.01 - Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta pasar lelang komoditas	3.30.03.1.01.01 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Jumlah Gedung Penyedia Sembako yang dibangun	2 Unit	
242.				16 Pembangunan Galeri									
					Jumlah Galeri yang dibangun	3.000.000.000,00	3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	3.30.03.1.01 - Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta pasar lelang komoditas	3.30.03.1.01.01 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Jumlah Galeri yang dibangun	1 Unit	
243.				17 Pemberdayaan BUMD									
					Jumlah BUMD yang ditingkatkan Kualitasnya	1.000.000.000,00	3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	3.30.03.1.01 - Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta pasar lelang komoditas	3.30.03.1.01.01 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Jumlah BUMD yang ditingkatkan Kualitasnya	1 Lembaga	
244.		20 Pengembangan industri kecil dan menengah		2 fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumberdaya alam									
					terlaksananya fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumberdaya alam	3.000.000.000,00	3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	3.30.03.1.01 - Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta pasar lelang komoditas	3.30.03.1.01.01 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Jumlah Kelompok IKM yang difasilitasi	4 Kelompok	
245.				3 pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan cluster industri									
					pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan cluster industri	850.000.000,00	3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.07 - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	3.30.07.1.02 - Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	3.30.07.1.02.01 - Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk dalam Negeri di Tingkat Provinsi	pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan cluster industri	200 Kelompok	
246.				4 penyusunan kebijakan industri terkait dan penunjang industri kecil dan menengah									
					penyusunan kebijakan industri terkait dan penunjang industri kecil dan menengah	500.000.000,00	3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	3.30.06.1.03 - Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	3.30.06.1.03.02 - Fasilitasi Penanganan Terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen	penyusunan kebijakan industri terkait dan penunjang industri kecil dan menengah	2 Dokumen	
247.				5 pemberian kemudahan ijin usaha industri kecil menengah									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					memberikan fasilitas kemudahan izin usaha industri kecil menengah	600.000.000,00	3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	3.30.02.1.02 - Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi	3.30.02.1.02.01 - Fasilitas Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	memberikan fasilitas kemudahan izin usaha industri kecil menengah	30 Kelompok	
248.				6 fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro kecil dengan swasta									
					fasilitasi kerja sama kemitraan industri mikro kecil dengan swasta	500.000.000,00	3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.07 - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	3.30.07.1.03 - Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	3.30.07.1.03.01 - Fasilitas Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri di Tingkat Provinsi	fasilitasi kerja sama kemitraan industri mikro kecil dengan swasta	20 Kelompok	
249.				8 Pembantuan peralatan VCO									
					4	0,00	3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	3.30.02.1.01 - Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) Bagi Distributor	3.30.02.1.01.01 - Fasilitas pemenuhan komitmen SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Rekomendasi SIUP-MB Bagi Distributor melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	4	5 Kelompok	
250.				9 Peningkatan produk buah merah									
					2	2.300.000.000,00	3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	3.30.06.1.02 - Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	3.30.06.1.02.02 - Pengembangan Layanan Pengujian	Jumlah produksi yang dikembangkan	1 Kelompok	
251.				11 Sertifikasi HaKI									
					terbitnya sertifikat haki bagi pelaku IKM	450.000.000,00	3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	3.30.06.1.02 - Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	3.30.06.1.02.03 - Pengembangan Layanan sertifikasi	terbitnya sertifikat haki bagi pelaku IKM	15 Dokumen	
252.				12 Bimtek aneka kerajinan noken									
253.				14 Pengembangan kopi di wilayah pegunungan									
					6	1.000.000.000,00	3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.07 - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	3.30.07.1.03 - Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	3.30.07.1.03.01 - Fasilitas Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah kelompok pengelola kopi yang dilatih	15 Kelompok	
254.				16 Pengembangan fungsi laboratorium dan pengawasan penerapan standarisasi									
					Meningkatnya pelayanan pengujian mutu produk	1.500.000.000,00	3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	3.30.06.1.02 - Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	3.30.06.1.02.02 - Pengembangan Layanan Pengujian	Meningkatnya pelayanan pengujian mutu produk	6 Layanan	
255.				17 Desiminasi dan uji coba pembuatan/pengolahan snack emping dari jagung									
					difersifikasi produk emping jagung	0,00	3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	3.30.02.1.02 - Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi	3.30.02.1.02.02 - Fasilitas pemenuhan komitmen Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	difersifikasi produk emping jagung	20 Produk	
256.				18 Desiminasi dan uji coba/pembuatan pengolahan nata de coco									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					difersifikasi produk enata de coco oleh pengrajin	0,00	3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	3.30.02.1.03 - Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar	3.30.02.1.03.01 - Fasilitas pemenuhan komitmen Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	difersifikasi produk enata de coco oleh pengrajin	20 Orang	
257.				19 Desiminasi dan uji coba pembuatan/pengolahan tepung tapioka									
					diversifikasi	0,00	3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	3.30.02.1.02 - Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi	3.30.02.1.02.01 - Fasilitas Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	diversifikasi	8 Produk	
258.				20 Desiminasi dan uji coba pembuatan/pengolahan sabun dan shampo dari buah merah skala laboratorium									
					deversifikasi pengolahan buah merah	500.000.000,00	3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	3.30.06.1.02 - Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	3.30.06.1.02.02 - Pengembangan Layanan Pengujian	Jumlah produk yang dihasilkan	5 Produk	
259.				21 Pengkajian Teknologi Pangan									
					meningkatnya sdm	0,00	3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	3.30.02.1.02 - Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi	3.30.02.1.02.02 - Fasilitas pemenuhan komitmen Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	meningkatnya sdm	6 Kelompok	
260.				22 Bimbingan dan penerapan Teknologi Produk IKM									
					8	0,00	3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	3.30.02.1.02 - Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi	3.30.02.1.02.01 - Fasilitas Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	8	0 Kelompok	
					Meningkatnya sumber daya manusia	0,00	3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	3.30.02.1.02 - Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi	3.30.02.1.02.01 - Fasilitas Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Meningkatnya sumber daya manusia	30 Kelompok	
261.				23 Pembinaan Industri dalam rangka SPPT SNI									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					1	0,00	3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	3.30.02.1.01 - Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) Bagi Distributor	3.30.02.1.01.01 - Fasilitas pemenuhan komitmen SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Rekomendasi SIUP-MB Bagi Distributor melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	1	5 Kelompok	
262.				24 Pengembangan teknologi Pengolahan buah merah									
					2	0,00	3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.07 - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	3.30.07.1.03 - Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	3.30.07.1.03.01 - Fasilitas Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah kelompok pengolah buah merah yang dilatih	10 Kelompok	
263.				25 Sosialisasi pemanfaatan laboratorium untuk pengujian produk industri dan komoditi ekspor									
					meningkatnya pemahaman manfaat dari laboratorium pengujian dalam upaya peningkatan mutu	200.000.000,00	3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	3.30.06.1.02 - Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	3.30.06.1.02.02 - Pengembangan Layanan Pengujian	meningkatnya pemahaman manfaat dari laboratorium pengujian dalam upaya peningkatan mutu	50 Orang	
264.	Perindustrian	16 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Cakupan Industri kecil dan Menengah OAP yang dibina ; Cakupan Industri kecil dan Menengah yang dibina ; Jumlah IKM yang menerapkan teknologi tepat guna; Jumlah Jenis Komoditas Industri lokal yang dilabeli HAKI ; Jumlah sentra industri rakyat; Kawasan sentra industri rakyat yang berfungsi; Persentase IKM yang memiliki sertifikasi mutu barang	1 Fasilitas bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya									
					Jumlah kerajinan noken yang tersedia untuk PON XX Papua 2020	0,00	3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	3.31.02.1.01 - Penyusunan dan Evaluasi Rencana pembangunan Industri Provinsi	3.31.02.1.01.03 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Pelatihan Bagi IKM Dalam Pemanfaatan SDA	0 Buah	
265.				2 Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan kluster industri									
					Terlaksananya Pembinaan Industri Kcil dan Menengah d	0,00	3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	3.31.04.1.01 - Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	3.31.04.1.01.01 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Terlaksananya Pembinaan IKM	10	
					Terlaksananya Pembinaan IKM dalam Memperkuat Jaringan Kluster Industri	3.500.000.000,00	3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	3.31.02.1.01 - Penyusunan dan Evaluasi Rencana pembangunan Industri Provinsi	3.31.02.1.01.01 - Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Terlaksananya Pembinaan IKM untuk komoditi ubi	1 Kelompok	
					Terlaksananya Pembinaan IKM terkait Kluster Industri	0,00	3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	3.31.02.1.01 - Penyusunan dan Evaluasi Rencana pembangunan Industri Provinsi	3.31.02.1.01.03 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sumber Daya Industri	Terlaksananya pembinaan IKM	1 Kelompok	
					Jumlah IKM yang memiliki Nilai Tambah Industri	0,00	3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	3.31.02.1.01 - Penyusunan dan Evaluasi Rencana pembangunan Industri Provinsi	3.31.02.1.01.03 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah IKM yang memiliki Nilai Tambah Industri	0 IKM	
266.				3 Penyusunan kebijakan industri terkait dan industri penunjang industri kecil dan menengah									
					Terlaksananya Kebijakan Industri terkait dan Indus	500.000.000,00	3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	3.31.02.1.01 - Penyusunan dan Evaluasi Rencana pembangunan Industri Provinsi	3.31.02.1.01.01 - Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah Kabupaten yang disosialisasi RPIP	1 Kegiatan	
267.				4 Pemberian kemudahan izin usaha industri kecil dan menengah									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					terlaksannnya pemberian Kemudahan izin industri ke	0,00	3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	3.31.03.1.01 - Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	3.31.03.1.01.01 - Fasilitas Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	terlaksannnya pemberian Kemudahan izin industri ke	30 Kegiatan	
					Terbitnya IUI bagi IKM OAP	0,00	3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	3.31.03.1.01 - Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	3.31.03.1.01.01 - Fasilitas Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Terbitnya IUI bagi IKM OAP	0 Kelompok	
268.				5 Pemberian fasilitas kemudahan akses perbankan bagi industri kecil dan menengah									
					Terlaksananya Pemberian Fasilitas kemudahan akses	0,00	3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	3.31.02.1.01 - Penyusunan dan Evaluasi Rencana pembangunan Industri Provinsi	3.31.02.1.01.04 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Sarana dan Prasarana Industri	Terlaksananya Pemberian Fasilitas kemudahan akses	10 Kegiatan	
269.				6 Fasilitas kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta									
					Terlaksananya Fasilitas Kerjasama Kemitraan indus	2.700.000.000,00	3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	3.31.02.1.01 - Penyusunan dan Evaluasi Rencana pembangunan Industri Provinsi	3.31.02.1.01.05 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah IKM yang difasilitasi	3 Kegiatan	
					Terlaksananya pameran Dekranasda bagi perajin OAP	0,00	3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	3.31.02.1.01 - Penyusunan dan Evaluasi Rencana pembangunan Industri Provinsi	3.31.02.1.01.06 - Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Terlaksananya pameran, rakerda dan rakernas Dekranasda bagi perajin OAP	25 Kelompok	
					Jumlah IKM yang dapat mempromosikan Produk dalam Pameran Dekranasda	0,00	3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	3.31.03.1.01 - Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	3.31.03.1.01.03 - Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penganaman dan Penyelamatan Industri	Jumlah IKM yang dapat mempromosikan Produk dalam Pameran Dekranasda	0 IKM	
270.				7 Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Prov.Papua									
					Tersusunnya Rencana Induk Pengembangan Industri P	0,00	3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	3.31.02.1.01 - Penyusunan dan Evaluasi Rencana pembangunan Industri Provinsi	3.31.02.1.01.02 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Kebijakan dalam Rangka Mendukung Penguatan Industri Nasional dan Perwilayahan Industri	Tersusunnya Rencana Induk Pengembangan Industri P	0 Dokumen	
					Terbitnya PERDASI RPIP/RPIK di Provinsi Papua Tahun 2019-2039	0,00	3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	3.31.02.1.01 - Penyusunan dan Evaluasi Rencana pembangunan Industri Provinsi	3.31.02.1.01.02 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Kebijakan dalam Rangka Mendukung Penguatan Industri Nasional dan Perwilayahan Industri	Terbitnya PERDASI RPIP/RPIK di Provinsi Papua Tahun 2019-2039	0 Dokumen	
271.				8 Pembangunan Sentra IKM (DAK Reguler)									
					Jumlah Sentra IKM yang terbangun	0,00	3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	3.31.02.1.01 - Penyusunan dan Evaluasi Rencana pembangunan Industri Provinsi	3.31.02.1.01.05 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Sentra IKM yang terbangun	1 Unit	
					Tersedianya Srana Senta IKM	0,00	3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	3.31.02.1.01 - Penyusunan dan Evaluasi Rencana pembangunan Industri Provinsi	3.31.02.1.01.05 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Tersedianya Sarana Sentra IKM	0 Tempat	
272.				9 Pembangunan Laboratorium									
					Jumlah Lab yang dibangun	4.500.000.000,00	3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	3.31.02.1.01 - Penyusunan dan Evaluasi Rencana pembangunan Industri Provinsi	3.31.02.1.01.04 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Lab yang dibangun	1 Unit	
273.				10 Monitoring dan Evaluasi IKM									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Jumlah Pelaku IKM yang dimonitoring dan dievaluasi	850.000.000,00	3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	3.31.02.1.01 - Penyusunan dan Evaluasi Rencana pembangunan Industri Provinsi	3.31.02.1.01.06 - Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Pelaku IKM yang dimonitoring dan dievaluasi	100 IKM	
274.				11 Pelatihan Pengemasan dan Labeling									
					Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan dan Labeling	500.000.000,00	3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	3.31.02.1.01 - Penyusunan dan Evaluasi Rencana pembangunan Industri Provinsi	3.31.02.1.01.05 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan dan Labeling	50 Orang	
275.				12 Revitalisasi Lingkungan Industri Kayu (LIK)									
					Jumlah LIK yang Operasional	2.000.000.000,00	3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	3.31.02.1.01 - Penyusunan dan Evaluasi Rencana pembangunan Industri Provinsi	3.31.02.1.01.06 - Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah LIK yang Operasional	1 Unit	
276.		17 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Cakupan Penggunaan Teknologi Industri; Jumlah industri yang menerapkan teknologi tepat guna	1 Pembinaan kemampuan teknologi industri									
					Jumlah IKM yang mengikuti Bimtek	1.000.000.000,00	3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	3.31.02.1.01 - Penyusunan dan Evaluasi Rencana pembangunan Industri Provinsi	3.31.02.1.01.02 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Kebijakan dalam Rangka Mendukung Penguatan Industri Nasional dan Perwilayahan Industri	pengembangan fungsi laboratorium dan pengawasan/ penerapan standarisasi mutu	26 Kelompok	
					Jumlah IKM yang dibina kemampuan dibidang teknologi industri	500.000.000,00	3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	3.31.02.1.01 - Penyusunan dan Evaluasi Rencana pembangunan Industri Provinsi	3.31.02.1.01.02 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Kebijakan dalam Rangka Mendukung Penguatan Industri Nasional dan Perwilayahan Industri	Jumlah IKM yang dibina kemampuan dibidang teknologi industri	1 Kabupaten	
277.				2 Pengembangan dan pelayanan teknologi industri									
278.				3 Perluasan penerapan SNI untuk mendorong daya saing industri manufaktur									
279.				4 Perluasan penerapan standar produk industri manufaktur									
280.		18 Program Penataan Struktur Industri	Cakupan penataan struktur industri	1 Kebijakan keterkaitan industri hulu-hilir									
					Terlaksananya Kebijakan keterkaitan industri hulu	0,00	3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	3.31.02.1.01 - Penyusunan dan Evaluasi Rencana pembangunan Industri Provinsi	3.31.02.1.01.05 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Terlaksananya Kebijakan keterkaitan industri hulu	50	
281.				2 Penyediaan sarana maupun prasarana klaster industri									
					Terlaksananya Saran maupun prasarana klaster indus	2.000.000.000,00	3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	3.31.02.1.01 - Penyusunan dan Evaluasi Rencana pembangunan Industri Provinsi	3.31.02.1.01.02 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Kebijakan dalam Rangka Mendukung Penguatan Industri Nasional dan Perwilayahan Industri	Jumlah Sarpras yang di serahkan	10	
282.				3 Pembinaan keterkaitan produksi industri hulu hingga ke hilir									
					Terlaksananya Pembinaan keterkaitan produksi indus	1.000.000.000,00	3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	3.31.02.1.01 - Penyusunan dan Evaluasi Rencana pembangunan Industri Provinsi	3.31.02.1.01.03 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Jenis Produk kayu yang dikembangkan	20 Orang	
283.		19 Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial	Cakupan Industri kecil dan Menengah yang dibina ; Jumlah kawasan sentra industri rakyat; Persentase IKM yang memiliki sertifikasi mutu barang	1 Pembangunan akses transportasi sentra-sentra industri potensial									
					Terbangun-nya jalan industri ke kawasan sentra IKM	0,00	3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	3.31.02.1.01 - Penyusunan dan Evaluasi Rencana pembangunan Industri Provinsi	3.31.02.1.01.06 - Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	jumlah Terbangun-nya jalan industri ke kawasan sentra IKM	0 KM2	
284.				2 penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat									
285.				3 Pengembangan Kampung Binaan									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Jumlah Kampung Binaan yang dikembangkan	12.000.000.000,00	3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	3.31.02.1.01 - Penyusunan dan Evaluasi Rencana pembangunan Industri Provinsi	3.31.02.1.01.01 - Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah Kampung Binaan yang dikembangkan	4 Kampung	
286.	Transmigrasi	15 Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Pertumbuhan ekonomi wilayah transmigrasi	2 Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi									
					Jumlah Kabupaten pengembangan kawasan transmigrasi	300.000.000,00	3.32 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	3.32.03 - PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	3.32.03.1.01 - Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	3.32.03.1.01.01 - Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi pengembangan kawasan transmigrasi	1 Kabupaten	
287.				9 Pengukuran dan Pemetaan Lahan Lokasi Transmigrasi									
					Jumlah Lokasi yang diukur dan dipetakan	1.500.000.000,00	3.32 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	3.32.03 - PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	3.32.03.1.01 - Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	3.32.03.1.01.02 - Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi Bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	Jumlah Lokasi yang diukur dan dipetakan	4 Lokasi	
288.		16 Program Transmigrasi Lokal	Jumlah Transmigran Lokal yang Ditempatkan	1 Penyuluhan Transmigrasi Lokal									
					Jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi/penyuluhan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Lokal	250.000.000,00	3.32 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	3.32.02 - PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	3.32.02.1.01 - Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	3.32.02.1.01.02 - Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan	Jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi/penyuluhan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Lokal	100 Orang	
289.				2 Pelatihan transmigrasi lokal									
					Jumlah Transmigran Lokal yang mengikuti Pelatihan	300.000.000,00	3.32 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	3.32.03 - PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	3.32.03.1.01 - Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	3.32.03.1.01.06 - Pelatihan Transmigrasi Lokal	Jumlah Transmigran Lokal yang mengikuti Pelatihan	150 Orang	
290.				3 Penyelesaian Izin Prinsip Pelepasan Kawasan Hutan (IPPKH)									
					Jumlah Lokasi yang di Ukur	6.000.000.000,00	3.32 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	3.32.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	3.32.04.1.01 - Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan	3.32.04.1.01.02 - Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam Rangka Pemantapan Satuan Permukiman	Jumlah Lokasi yang di Ukur	3 Lokasi	
JUMLAH						243.120.582.000,00							

Mengetahui,
Kepala Bappeda Provinsi Papua

YOHANES WALILO, S.Sos, M.Si
NIP. 197007281997121001

JAYAPURA, 20 July 2020
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI
UKM DAN TENAGA KERJA

Ir. OMAH LADUANI LADAMAY, M.Si
NIP. 19650820 199202 1 002

**REKAPITULASI PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021
SERTA KETERKAITAN DENGAN HASIL PEMETAAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019**

PROVINSI : Papua

PERANGKAT DAERAH : Sekretariat Daerah

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Administrasi Pemerintahan	1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	À Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	1 Penyediaan jasa surat menyurat									
					Jumlah surat yang disediakan	1.000.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administras Umum	4.01.01.1.03.01 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang terkirim	5500 Surat	
2.				2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik									
					Jumlah Jasa Layanan berlangganan Listrik, Air, Telepon, Transponder	1.200.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administras Umum	4.01.01.1.03.02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Layanan	180 Layanan	
3.				6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional									
					Jumlah Unit Mobil Dinas/Operasional yang terpelihara dan Terfasilitasi Perijinannya	1.712.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administras Umum	4.01.01.1.03.06 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Unit Mobil Dinas/Operasional yang diservis dan dipelihara	30 Unit	
4.				8 Penyediaan jasa kebersihan kantor									
					Luas Gedung dan Halaman yang disediakan jasa kebersihan	0,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administras Umum	4.01.01.1.03.08 - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	jumlah Gedung dan Halaman yang dibersihkan	0 M2	
					Jumlah tenaga kebersihan dan Fasilitas Pendukung kebersihan kantor	0,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administras Umum	4.01.01.1.03.08 - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah tenaga kebersihan	0 Orang	
					Jumlah Jenis Bahan dan Alat Kebersihan	1.200.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administras Umum	4.01.01.1.03.14 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Bahan dan Alat Kebersihan	500 Jenis	
5.				10 Penyediaan alat tulis kantor									
					Jumlah jenis ATK yang disediakan	1.200.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administras Umum	4.01.01.1.03.10 - Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	100 Jenis	
6.				11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan									
					Jumlah barang cetakan	2.000.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administras Umum	4.01.01.1.03.11 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan	30 Jenis	
					Jumlah penggandaan	450.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administras Umum	4.01.01.1.03.11 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penggandaan	35000 Lembar	
					Jumlah Jenis Barang Cetak dan yang Disediakan	0,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administras Umum	4.01.01.1.03.11 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0 Jenis	
					Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	0,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administras Umum	4.01.01.1.03.11 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	0 Bulan	
7.				12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor									
					Jumlah Komponen Listrik yang disediakan	1.200.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administras Umum	4.01.01.1.03.12 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen alat pemeliharaan listrik dan genset yang disediakan	1000 Buah	
8.				15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan									
					Jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	240.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administras Umum	4.01.01.1.03.15 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	24 Jenis	
9.				17 Penyediaan makanan dan minuman									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Pelaksanaan penyediaan makan dan minum	17.262.031.680,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.17 - Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Porsi makan dan minum kegiatan yang tersedia	450 Kegiatan	
					Pelaksanaan makan minum tamu dan rapat	0,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.17 - Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Porsi makan dan minum yang tersedia	0 Kali Tahun	
					Pelaksanaan makan minum saat olah raga (hari Jumat)	0,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.17 - Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Porsi makan dan minum yang tersedia	0 Kali	
					Tersediannya Makanan dan Minuman	0,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.17 - Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Porsi makan dan minum yang tersedia	0 Bulan	
					Jumlah orang yang disediakan makan dan minuman	0,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.17 - Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Porsi makan dan minum yang tersedia	0 Orang	
10.				18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah									
					Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	11.724.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.18 - Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	250 Orang	
11.		2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	À Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	1 Pembangunan rumah jabatan									
					Luas bangunan yang dibangun	0,00						0 M2	
12.				5 Pengadaan kendaraan dinas/operasional									
					Jumlah kendaraan yang diadakan	2.000.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.21 - Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda 4	4 Unit	
					Jumlah kendaraan roda 2	0,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.21 - Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda 2	0 Unit	
13.				7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor									
					Jumlah pengadaan perlengkapan	371.750.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.23 - Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan	10 Unit	
14.				9 Pengadaan peralatan gedung kantor									
					Jumlah peralatan perlengkapan	1.000.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.25 - Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan/perlengkapan yang diadakan	200 Unit	
15.				20 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan									
					Jumlah rumah jabatan yg terpelihara	3.050.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.37 - Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan	Jumlah rumah jabatan yg terpelihara	4 Unit Tahun	
16.				24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional									
					Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	0,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.31 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah dan Jenis perlengkapan/peralatan gedung kantor yang dipelihara	0 Unit	
					Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	3.150.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.31 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang	100 Unit	
					sewa kendaraan	0,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.31 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan yang diperbaiki/Service	0 Bulan	
17.		3 Program peningkatan disiplin aparatur	À Meningkatnya disiplin aparatur	2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya									
					Jumlah pakaian dinas yang diadakan	1.284.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	4.01.01.1.04.02 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas sipil harian	150 Stel	
18.				5 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu									
					Jumlah pakaian khusus yang diadakan	366.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	4.01.01.1.04.05 - Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah pakaian Batik yang diadakan	100 Stel	
19.		6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	À Meningkatnya kualitas akuntabilitas OPD	1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	30.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.02 - Administrasi Keuangan	4.01.01.1.02.06 - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan	3 Laporan	
					Laporan LAKIP SKPD	0,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.01 - Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.01.01.1.01.05 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan LAKIP SKPD	0 Dokumen	
20.				2 Penyusunan laporan keuangan semesteran									
					Jumlah pelaporan keuangan semesteran yang diselesaikan tepat waktu	22.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.02 - Administrasi Keuangan	4.01.01.1.02.07 - Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Jumlah dokumen laporan	120 Laporan	
21.				4 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun									
					Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	30.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.02 - Administrasi Keuangan	4.01.01.1.02.09 - Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	3 Laporan	
22.				5 Penyusunan Renja, RKA dan Perubahan APBD									
					Jumlah dokumen	60.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.01 - Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.01.01.1.01.01 - Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	3 Dokumen	
23.		16 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	Cakupan pelayanan Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan	1 Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan									
					Terlaksananya kegiatan dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan, anggota organisasi sosial dan kemasayarakatan	108.411.200.000,00	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	4.01.04 - PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM	4.01.04.1.03 - Pelaksanaan Administrasi Pimpinan	4.01.04.1.03.04 - Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Terlaksananya kegiatan dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan, anggota organisasi sosial dan kemasayarakatan	20 Kali Tahun	
24.				2 Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri									
					Terlaksananya pelayanan bagi pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri	66.600.000.000,00	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	4.01.04 - PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM	4.01.04.1.03 - Pelaksanaan Administrasi Pimpinan	4.01.04.1.03.07 - Fasilitasi Tamu	Terlaksananya pelayanan bagi pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri	12 Kali Tahun	
25.				3 Rapat koordinasi unsur MUSPIDA									
					Terlaksananya koordinasi unsur muspida dalam menyamakan pola pandang dan pola tindak demi meningkatkan terhadap masyarakat	3.757.400.000,00	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	4.01.04 - PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM	4.01.04.1.03 - Pelaksanaan Administrasi Pimpinan	4.01.04.1.03.04 - Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Terlaksananya koordinasi unsur muspida dalam menyamakan pola pandang dan pola tindak demi meningkatkan terhadap masyarakat	12 Kali	
26.				4 Rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah									
					Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat	9.204.000.000,00	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	4.01.04 - PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM	4.01.04.1.03 - Pelaksanaan Administrasi Pimpinan	4.01.04.1.03.06 - Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat	12 Kali Tahun	
27.				5 Kunjungan kerja / inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah									
					Terlaksananya kunjungan kerja/inspeksi KDH dan WKDH	109.827.368.320,00	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	4.01.04 - PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM	4.01.04.1.03 - Pelaksanaan Administrasi Pimpinan	4.01.04.1.03.04 - Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Terlaksananya kunjungan kerja/inspeksi KDH dan WKDH	12 Kali Tahun	
28.				6 Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya									
					Jumlah Kunjungan Kedinasan Kepala Daerah ke Jakarta	60.560.000.000,00	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	4.01.04 - PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM	4.01.04.1.03 - Pelaksanaan Administrasi Pimpinan	4.01.04.1.03.04 - Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Kunjungan Kedinasan Kepala Daerah ke Jakarta	12 Bulan	
29.				7 Penyediaan jasa pemeliharaan kesehatan KDH / WKDH / SEKDA									
					Terlaksananya jasa pemeliharaan kesehatan KDH/WKDH	4.000.000.000,00	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	4.01.04 - PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM	4.01.04.1.02 - Pelaksanaan Administrasi Umum	4.01.04.1.02.03 - Pengelolaan Urusan Kesekretariatan Daerah	Terlaksananya jasa pemeliharaan kesehatan KDH/WKDH	12 Bulan	

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30.	Administrasi Pemerintahan	16 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	Cakupan pelayanan Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan	8 Penyediaan jasa rumah tangga KDH / Wakil KDH / SEKDA									
					Terlaksananya jasa kegiatan jasa rumah tangga/KDH/WKDH/SEKDA	118.420.000.000,00	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	4.01.04 - PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM	4.01.04.1.02 - Pelaksanaan Administrasi Umum	4.01.04.1.02.03 - Pengelolaan Urusan Kesekretariatan Daerah	Terlaksananya jasa kegiatan jasa rumah tangga/KDH/WKDH/SEKDA	12 Bulan	
31.				9 Peningkatan Tugas-tugas Pemerintahan Umum dan Stabilitas Daerah									
					Terlaksananya peningkatan tugas-tugas pemerintahan umum dan stabilitas daerah	60.000.000.000,00	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	4.01.04 - PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM	4.01.04.1.02 - Pelaksanaan Administrasi Umum	4.01.04.1.02.06 - Penggunaan, Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Sekretariat Daerah	Terlaksananya peningkatan tugas-tugas pemerintahan umum dan stabilitas daerah	12 Kali Tahun	
JUMLAH						591.331.750.000,00							

Mengetahui,
Kepala Bappeda Provinsi Papua

YOHANES WALILO, S.Sos, M.Si
NIP. 197007281997121001

JAYAPURA, 20 July 2020
SEKRETARIS DAERAH

DR. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE, MM
NIP. 19641014 198603 1 016

**REKAPITULASI PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021
SERTA KETERKAITAN DENGAN HASIL PEMETAAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019**

PROVINSI : Papua

PERANGKAT DAERAH : Biro Tata Pemerintahan dan Otonomi Khusus

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Administrasi Pemerintahan	1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	À Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	1 Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang disediakan	0,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.01 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang terkirim	0 Surat	
2.				2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Jasa Layanan berlangganan Listrik, Air, Telepon, Transponder	0,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Layanan	0 Layanan	
3.				6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Unit Mobil Dinas/Operasional yang terpelihara dan Terfasilitasi Perijinannya	0,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.06 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Unit Mobil Dinas/Operasional yang diservis dan dipelihara	0 Unit	
4.				10 Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	120.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.10 - Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	40 Jenis	
5.				11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan	30.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.11 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan	4 Jenis	
					Jumlah penggandaan	10.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.11 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penggandaan	45000 Lembar	
					Jumlah Jenis Barang Cetak dan yang Disediakan	0,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.11 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0 Jenis	
					Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	100.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.11 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	12 Bulan	
6.				12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen Listrik yang disediakan	0,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.12 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen alat pemeliharaan listrik dan genset yang disediakan	30 Buah	
7.				15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	0,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.15 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	10 Jenis	
8.				17 Penyediaan makanan dan minuman									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Pelaksanaan penyediaan makan dan minum	150.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.17 - Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Porsi makan dan minum kegiatan yang tersedia	12 Kegiatan	
					Pelaksanaan makan minum tamu dan rapat	1.500.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.17 - Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Porsi makan dan minum yang tersedia	60 Kali Tahun	
					Pelaksanaan makan minum saat olah raga (hari Jumat)	0,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.17 - Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Porsi makan dan minum yang tersedia	0 Kali	
					Tersediannya Makanan dan Minuman	0,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.17 - Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Porsi makan dan minum yang tersedia	0 Bulan	
					Jumlah orang yang disediakan makan dan minuman	0,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.17 - Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Porsi makan dan minum yang tersedia	0 Orang	
9.				18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah									
					Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	2.000.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.18 - Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	250 Orang	
10.				26 Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (BPK,IRJEN dan INSPEKTORAT)									
11.		2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	À Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	5 Pengadaan kendaraan dinas/operasional									
					Jumlah kendaraan yang diadakan	700.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.21 - Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda 4	1 Unit	
					Jumlah kendaraan roda 2	0,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.21 - Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda 2	0 Unit	
12.				7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor									
					Jumlah pengadaan perlengkapan	200.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.23 - Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan	20 Unit	
13.				9 Pengadaan peralatan gedung kantor									
					Jumlah peralatan perlengkapan	120.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.25 - Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan/perlengkapan yang diadakan	10 Unit	
14.				24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional									
					Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	0,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.31 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah dan Jenis perlengkapan/peralatan gedung kantor yang dipelihara	0 Unit	
					Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	125.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.31 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang	15 Unit	
					sewa kendaraan	0,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.31 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan yang diperbaiki/Service	0 Bulan	
15.				26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor									
					Pelaksanaan pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	0,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.27 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Jumlah Rumah Jabatan	0 Kegiatan	
					Jumlah Perlengkapan Gedung kantor yang terpelihara	50.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.33 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung kantor yang dipelihara	20 Unit	
					Tersediannya biaya pemeliharaan gedung kantor	0,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.39 - Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor	0 Bulan	
16.				28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor									
					Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	200.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.35 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	30 Unit	
17.				30 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Luas bangunan yang direhab	100.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.39 - Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Jumlah bangunan yang direhab	0 M2	
18.		3 Program peningkatan disiplin aparatur	À Meningkatnya disiplin aparatur	2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya									
					Jumlah pakaian dinas yang diadakan	50.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	4.01.01.1.04.02 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas sipil harian	60 Stell	
19.				4 Pengadaan pakaian KORPRI									
					jumlah pakaian KORPRI yang diadakan	50.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	4.01.01.1.04.04 - Pengadaan Pakaian Korpri	Jumlah pakaian KORPRI yang diadakan	60 Stell	
20.				5 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu									
					Jumlah pakaian khusus yang diadakan	130.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	4.01.01.1.04.05 - Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah pakaian Batik yang diadakan	2 Stell	
21.		5 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	À Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	1 Pendidikan dan pelatihan formal									
					Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	0,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	4.01.01.1.04.09 - Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparatur mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	0 Orang	
22.				4 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal									
					Jumlah aparatur yang terlatih	150.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	4.01.01.1.04.11 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	
23.		6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	À Meningkatnya kualitas akuntabilitas OPD	1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD									
					Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	30.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.02 - Administrasi Keuangan	4.01.01.1.02.06 - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan	1 Laporan	
					Laporan LAKIP SKPD	0,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.01 - Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.01.01.1.01.05 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan LAKIP SKPD	0 Dokumen	
24.				2 Penyusunan laporan keuangan semesteran									
					Jumlah pelaporan keuangan semesteran yang diselesaikan tepat waktu	15.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.02 - Administrasi Keuangan	4.01.01.1.02.07 - Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Jumlah dokumen laporan	1 Laporan	
25.				4 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun									
					Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	30.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.02 - Administrasi Keuangan	4.01.01.1.02.09 - Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	1 Laporan	
26.				5 Penyusunan Renja, RKA dan Perubahan APBD									
					Jumlah dokumen	40.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.01 - Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.01.01.1.01.01 - Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	1 Dokumen	
27.				12 Penyusunan RENSTRA									
					Jumlah Dokumen	30.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.01 - Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.01.01.1.01.01 - Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	
28.				13 Penyusunan SOP									
					Jumlah Dokumen	20.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.01 - Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.01.01.1.01.04 - Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	
29.				14 Peningkatan Kapasitas PPID									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Jumlah orang	20.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	4.01.01.1.04.09 - Pendidikan dan Pelatihan Formal	Pembinaan Administrasi Kepegawaian	10 Orang	
30.		57 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase ASN peserta diklat teknis fungsional yang lulus dengan Predikat Memuaskan; Terlaksananya peningkatan kompetensi teknis/fungsional aparatur melalui pembinaan dan pengembangan	13 Pengembangan kualitas SDM Aparatur									
					Jumlah peserta mengikuti diklat	300.000.000,00	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	4.01.03.1.02 - Pengadaan Barang dan Jasa	4.01.03.1.02.08 - Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah peserta mengikuti bimbingan teknis	5 Orang	
31.		67 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Jumlah Perdasi tentang pemerintahan yang ditetapkan	1 Bimtek Penyusunan Pedoman Kerja bagi Kepala Distrik se Provinsi Papua									
					Jumlah peserta	0,00					Jumlah peserta	0 Orang	
					Jumlah Peserta	0,00					Jumlah Peserta	0 Orang	
					Terlaksananya BIMTEK	0,00					Terlaksananya BIMTEK	0 Orang	
32.				2 Bimtek bagi para Kepala Distrik Non latarbelakang Ilmu Pemerintahan di Provinsi Papua									
					Jumlah peserta	0,00					Jumlah peserta	0 Orang	
33.				3 RAKERDA Bupati dan Walikota se Provinsi Papua									
					Jumlah peserta	1.500.000.000,00	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.01.02.1.01 - Pemantauan Pelaksanaan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	4.01.02.1.01.02 - Fasilitas Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Jumlah peserta	800 Orang	
					Jumlah Peserta	0,00	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.01.02.1.01 - Pemantauan Pelaksanaan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	4.01.02.1.01.02 - Fasilitas Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Jumlah Peserta	0 Orang	
34.				11 RAKER Distrik Se Provinsi Papua									
					Jumlah peserta	0,00					Jumlah peserta	560 Orang	
35.				12 Sosialisasi PERGUB Klasifikasi Pelimpahan Kewenangan dari Kabupaten/Kota ke Distrik									
36.				13 Penyusunan PERDASI tentang Kampung Adat dan Kampung Administrasi									
					Jumlah dokumen	0,00					Jumlah dokumen	5 Dokumen	
37.				16 Bimtek Penyusunan Pedoman Kerja Bagi para Kepala Distrik Non latarbelakang Ilmu Pemerintahan di Provinsi Papua									
					Jumlah Peserta	0,00					Jumlah Peserta	560 Orang	
38.		68 Program Pembinaan dan Penataan Administrasi Pemerintahan	Cakupan pembinaan dan Penataan Administrasi Pemerintahan	2 Sosialisasi Prosedur dan Mekanisme Proses Pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB)									
					Terlaksananya Sosialisasi Prosedur dan Mekanisme Proses Pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB)	1.500.000.000,00	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.01.02.1.01 - Pemantauan Pelaksanaan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	4.01.02.1.01.02 - Fasilitas Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Terlaksananya Sosialisasi Prosedur dan Mekanisme Proses Pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB)	6 Kabupaten	
39.				3 Fasilitas Pensiun Pejabat Negara dan PAW DPRP/DPRD									
					Jumlah Pejabat Negara yang Pensiun	1.000.000.000,00	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.01.02.1.01 - Pemantauan Pelaksanaan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	4.01.02.1.01.02 - Fasilitas Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Jumlah Pejabat Negara yang Pensiun	10 Orang	
40.				5 Percepatan Penyerahan Aset dari Kabupaten Induk ke Kabupaten Pemekaran									
					Jumlah Aset yang diserahkan	1.000.000.000,00	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.01.02.1.01 - Pemantauan Pelaksanaan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	4.01.02.1.01.02 - Fasilitas Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Jumlah Aset yang diserahkan	29 Dokumen	

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41.	Administrasi Pemerintahan	68 Program Pembinaan dan Penataan Administrasi Pemerintahan	Cakupan pembinaan dan Penataan Administrasi Pemerintahan	6 Rapat Koordinasi Teknis Bidang Pemerintahan									
					Jumlah koordinasi dan konsultasi dalam daerah yang dilakukan	1.000.000.000,00	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.01.02.1.01 - Pemantauan Pelaksanaan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	4.01.02.1.01.02 - Fasilitas Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Jumlah koordinasi dan konsultasi dalam daerah yang dilakukan	100 Kegiatan	
42.				8 Fasilitas Persiapan Pelantikan Kepala Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua									
					Jumlah Kepala Daerah yang dilantik	1.000.000.000,00	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	4.01.04 - PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM	4.01.04.1.01 - Penataan Organisasi	4.01.04.1.01.07 - Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Jumlah Kepala Daerah yang dilantik	10 Orang	
43.				9 Bimtek Palcakan Titik Koordinat Batas Wilayah									
44.				10 Monitoring dan Rapat Koordinas Penegasan Batas Wilayah									
					Jumlah berkas	1.500.000.000,00	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.01.02.1.01 - Pemantauan Pelaksanaan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	4.01.02.1.01.01 - Pengelolaan Administrasi Pemerintahan dan Fasilitas Penataan Wilayah	Jumlah Dokumen	10 Dokumen	
45.				12 Fasilitas Pelatikan Bupati/Walikota se Provinsi Papua									
					Kepala daerah	1.000.000.000,00	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.01.02.1.01 - Pemantauan Pelaksanaan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	4.01.02.1.01.02 - Fasilitas Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Kepala daerah	10 Dokumen	
46.				13 Penyusunan dan Pemetaan Peta dasar Rupa Bumi									
47.				15 Pembuatan Peta Provinsi Papua									
					Jumlah peta	100.000.000,00	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.01.02.1.01 - Pemantauan Pelaksanaan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	4.01.02.1.01.05 - Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah peta	10 Dokumen	
					1	0,00	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	4.01.04 - PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM	4.01.04.1.01 - Penataan Organisasi	4.01.04.1.01.07 - Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	1	0 Dokumen	
					Dokumen	0,00	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.01.02.1.01 - Pemantauan Pelaksanaan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	4.01.02.1.01.02 - Fasilitas Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Dokumen	0 Dokumen	
48.				17 Penyelesaian Perselisihan Batas Daerah Provinsi Papua									
					Jumlah permasalahan	1.500.000.000,00	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.01.02.1.01 - Pemantauan Pelaksanaan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	4.01.02.1.01.02 - Fasilitas Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Jumlah permasalahan	10 Lokasi	
49.				18 Monitoring dan Koordinasi Penegasan Batas Wilayah									
					Jumlah Dokumen	1.000.000.000,00	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.01.02.1.01 - Pemantauan Pelaksanaan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	4.01.02.1.01.01 - Pengelolaan Administrasi Pemerintahan dan Fasilitas Penataan Wilayah	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	
50.		102 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Kampung di Provinsi Papua	Cakupan kampung mandiri dalam penyelenggaraan pemerintahannya ; Jumlah aparatur kampung dan distrik yang mendapatkan pelatihan pemerintahan kampung	1 Rakornis Pemerintahan Kampung									
					Jumlah peserta	1.500.000.000,00	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	4.01.04 - PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM	4.01.04.1.01 - Penataan Organisasi	4.01.04.1.01.07 - Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Jumlah peserta	200 Orang	
51.				2 Pembinaan Manajemen Pemerintahan Kampung									
					Jumlah peserta	1.500.000.000,00	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.01.02.1.01 - Pemantauan Pelaksanaan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	4.01.02.1.01.08 - Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah peserta	500 Orang	
52.				4 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kepala Kampung dan Bamuskam di Provinsi Papua									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Jumlah peserta	2.000.000.000,00	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.01.02.1.01 - Pemantauan Pelaksanaan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	4.01.02.1.01.06 - Fasilitas Kerjasama Antar Pemerintah	Jumlah peserta	500 Orang	
53.				11 Pemetaan Hak Ulayat di Kawasan Perbatasan									
54.				17 Monitoring dan Pendampingan Administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung									
					Jumlah dokumen	500.000.000,00	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	4.01.04 - PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM	4.01.04.1.01 - Penataan Organisasi	4.01.04.1.01.07 - Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Jumlah dokumen	1 Dokumen	
					Jumlah Peserta	500.000.000,00	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	4.01.04 - PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM	4.01.04.1.01 - Penataan Organisasi	4.01.04.1.01.07 - Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Jumlah Peserta	1 Orang	
55.				19 Bimtek Sekretaris Kampung se Provinsi Papua									
					Jumlah Peserta	700.000.000,00	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.01.02.1.01 - Pemantauan Pelaksanaan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	4.01.02.1.01.02 - Fasilitas Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Jumlah Peserta	500 Orang	
56.				20 Finalisasi PERGUB tentang pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan kampung									
					Dokumen	0,00						0 Dokumen	
57.		103 Program Peningkatan Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Cakupan LPPD kabupaten/kota yang berpredikat Sangat Tinggi	12 Monitoring Penyelenggaraan Otonomi Khusus di Provinsi Papua dan 29 Kab/Kota									
					Terdinya Laporan Penyelenggaraan Otonomi Khusus	300.000.000,00	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.01.02.1.01 - Pemantauan Pelaksanaan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	4.01.02.1.01.01 - Pengelolaan Administrasi Pemerintahan dan Fasilitas Penataan Wilayah	Terdinya Laporan Penyelenggaraan Otonomi Khusus	6 Buku	
58.				14 Rapat Koordinasi Tentang Efektifitas Perdasi/Perdusus									
					Terlaksananya Rapat Koordinasi Perdasi/Perdusus	300.000.000,00	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.01.02.1.01 - Pemantauan Pelaksanaan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	4.01.02.1.01.04 - Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Terlaksananya Rapat Koordinasi Perdasi/Perdusus	3 Kali	
59.				17 Bimbingan Teknis dan Pendampingan Penyusunan LPPD Provinsi Papua dan 29 Kabupaten/Kota									
					Jumlah Peserta	300.000.000,00	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.01.02.1.01 - Pemantauan Pelaksanaan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	4.01.02.1.01.04 - Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Jumlah Peserta	60 Orang	
60.				19 Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) bagi Tim Daerah									
					Dokumen	1.500.000.000,00	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.01.02.1.01 - Pemantauan Pelaksanaan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	4.01.02.1.01.04 - Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Dokumen	29 Dokumen	
61.				21 Pemetaan Lima Wilayah Adat di Provinsi Papua									
					Tersedianya Dokumen Penetaan Wilayah Adat di Provinsi Papua	500.000.000,00	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.01.02.1.01 - Pemantauan Pelaksanaan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	4.01.02.1.01.01 - Pengelolaan Administrasi Pemerintahan dan Fasilitas Penataan Wilayah	Tersedianya Dokumen Penetaan Wilayah Adat di Provinsi Papua	6 Dokumen	
62.				22 Rapat Koordinasi Forum Desentralisasi Asimetris Lima Provinsi Papua									
					Jumlah orang/peserta Rapat Koordinasi Forum Desentralisasi Asimetris Lima Provinsi Papua	500.000.000,00	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.01.02.1.01 - Pemantauan Pelaksanaan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	4.01.02.1.01.04 - Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Jumlah orang/peserta Rapat Koordinasi Forum Desentralisasi Asimetris Lima Provinsi Papua	200 Kegiatan	
63.				23 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Penyelenggaran Otonomi Khusus									
					Meningkatnya Administrasi Penyelenggaraan Otonomi Khusus	500.000.000,00	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.01.02.1.01 - Pemantauan Pelaksanaan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	4.01.02.1.01.04 - Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Meningkatnya Administrasi Penyelenggaraan Otonomi Khusus	3 Dokumen	
64.				25 Inventarisasi Sarana dan Prasarana Otonomi Khusus									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Meningkatnya Jumlah data Sarana dan Prasarana Otonomi Khusus	470.000.000,00	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.01.02.1.01 - Pemantauan Pelaksanaan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	4.01.02.1.01.04 - Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Meningkatnya Jumlah data Sarana dan Prasarana Otonomi Khusus	6 Kabupaten	
65.				30 Koordinasi Kerja sama Pengembangan Sumber Daya Manusia Papua									
					Tersedianya Perjanjian Kerjasama Pengembangan SDM Papua	500.000.000,00	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.01.02.1.01 - Pemantauan Pelaksanaan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	4.01.02.1.01.04 - Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Tersedianya Perjanjian Kerjasama Pengembangan SDM Papua	50 Dokumen	
66.		113 Program Peningkatan Kapasitas SDM Papua		1 Penyediaan Beasiswa bagi Mahasiswa Asli Papua (Pendidikan Dalam Negeri)									
					Jumlah Mahasiswa Penerima Beasiswa	52.200.000.000,00	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.01.02.1.01 - Pemantauan Pelaksanaan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	4.01.02.1.01.01 - Pengelolaan Administrasi Pemerintahan dan Fasilitasi Penataan Wilayah	Jumlah Mahasiswa Penerima Beasiswa	500 Orang	
67.				2 Penyediaan Beasiswa bagi Mahasiswa Asli Papua (Pendidikan Luar Negeri)									
					Jumlah Penerima Beasiswa	392.000.000.000,00	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.01.02.1.01 - Pemantauan Pelaksanaan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	4.01.02.1.01.01 - Pengelolaan Administrasi Pemerintahan dan Fasilitasi Penataan Wilayah	Jumlah Penerima Beasiswa	632 Orang	
68.				3 Pendayagunaan SDM Papua									
					Jumlah Peserta magang dan pelatihan	4.000.000.000,00	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.01.02.1.01 - Pemantauan Pelaksanaan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	4.01.02.1.01.01 - Pengelolaan Administrasi Pemerintahan dan Fasilitasi Penataan Wilayah	Jumlah Peserta magang dan pelatihan	200 Orang	
JUMLAH						478.140.000.000,00							

Mengetahui,
Kepala Bappeda Provinsi Papua

YOHANES WALILO, S.Sos, M.Si
NIP. 197007281997121001

JAYAPURA, 20 July 2020
KEPALA BIRO TATA PEMERINTAHAN DAN OTONOMI KHUSUS

JIMMY S. WANIMBO, SH., M.Ec.Dev
NIP. 19790304 200312 1 001

**REKAPITULASI PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021
SERTA KETERKAITAN DENGAN HASIL PEMETAAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019**

PROVINSI : Papua
PERANGKAT DAERAH : Biro Hukum

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Administrasi Pemerintahan	1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	À Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	1 Penyediaan jasa surat menyurat									
					Jumlah surat yang disediakan	300.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.01 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang terkirim	1000 Surat	
2.				9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja									
					Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	189.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.09 - Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	25 Unit	
3.				10 Penyediaan alat tulis kantor									
					Jumlah jenis ATK yang disediakan	600.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.10 - Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	50 Jenis	
4.				11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan									
					Jumlah barang cetakan	0,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.11 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan	0 Jenis	
					Jumlah penggandaan	0,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.11 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penggandaan	0 Lembar	
					Jumlah Jenis Barang Cetak dan yang Disediakan	0,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.11 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0 Jenis	
					Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	450.600.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.11 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	12 Bulan	
5.				13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor									
					Jumlah peralatan dan Perlengkapan	350.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.25 - Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah penggandaan peralatan kantor yang disediakan	15 Unit	
6.				15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan									
					Jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	30.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.15 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	50 Jenis	
7.				17 Penyediaan makanan dan minuman									
					Pelaksanaan penyediaan makan dan minum	0,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.17 - Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Porsi makan dan minum kegiatan yang tersedia	0 Kegiatan	
					Pelaksanaan makan minum tamu dan rapat	0,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.17 - Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Porsi makan dan minum yang tersedia	0 Kali Tahun	
					Pelaksanaan makan minum saat olah raga (hari Jumat)	0,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.17 - Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Porsi makan dan minum yang tersedia	0 Kali	
					Tersediannya Makanan dan Minuman	0,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.17 - Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Porsi makan dan minum yang tersedia	0 Bulan	
					Jumlah orang yang disediakan makan dan minuman	450.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.17 - Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Porsi makan dan minum yang tersedia	2000 Orang	
8.				18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah									
					Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	3.500.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.18 - Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	150 Orang	

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9.	Administrasi Pemerintahan	2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	À Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional									
					Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	0,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administras Umum	4.01.01.1.03.31 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah dan Jenis perlengkapan/peralatan gedung kantor yang dipelihara	0 Unit	
					Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	450.400.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administras Umum	4.01.01.1.03.31 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang	20 Unit	
					sewa kendaraan	0,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administras Umum	4.01.01.1.03.31 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan yang d Perbaiki/Service	0 Bulan	
10.		3 Program peningkatan disiplin aparatur	À Meningkatnya disiplin aparatur	2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya									
					Jumlah pakaian dinas yang diadakan	100.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	4.01.01.1.04.02 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas sipil harian	100 Stell	
11.		5 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	À Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	1 Pendidikan dan pelatihan formal									
					Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	1.000.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	4.01.01.1.04.09 - Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparatur mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	10 Orang	
12.				4 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal									
					Jumlah aparatur yang terlatih	0,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	4.01.01.1.04.11 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	
13.		6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	À Meningkatnya kualitas akuntabilitas OPD	1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD									
					Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	0,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.02 - Administras Keuangan	4.01.01.1.02.06 - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan	0 Laporan	
					Laporan LAKIP SKPD	0,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.01 - Perencanaan dan Evaluas Kinerja Perangkat Daerah	4.01.01.1.01.05 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan LAKIP SKPD	0 Dokumen	
14.				2 Penyusunan laporan keuangan semesteran									
					Jumlah pelaporan keuangan semesteran yang diselesaikan tepat waktu	0,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.02 - Administras Keuangan	4.01.01.1.02.07 - Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Jumlah dokumen laporan	0 Laporan	
15.				4 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun									
					Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	0,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.02 - Administras Keuangan	4.01.01.1.02.09 - Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	0 Laporan	
16.				5 Penyusunan Renja, RKA dan Perubahan APBD									
					Jumlah dokumen	50.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.01 - Perencanaan dan Evaluas Kinerja Perangkat Daerah	4.01.01.1.01.01 - Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	12 Dokumen	
17.		26 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Perdasi/Perdasus yang ditetapkan	22 Pembentukan Produk Hukum Daerah									
					Tersedianya Produk Hukum Daerah	2.500.000.000,00	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.01.02.1.03 - Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah	4.01.02.1.03.01 - Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Daerah	Tersedianya Produk Hukum Daerah	500 Dokumen	
					Jumlah Perdasi/Perdasus yang dibentuk	0,00	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.01.02.1.03 - Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah	4.01.02.1.03.01 - Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Perdasi/Perdasus yang dibentuk	0 Berkas	
18.				32 Pengkajian Produk Hukum Daerah Provinsi									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Jumlah Produk Hukum yang di evaluasi	734.600.000,00	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.01.02.1.03 - Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah	4.01.02.1.03.01 - Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum yang di evaluasi	25 Dokumen	
19.		41 Program Peningkatan Pemberian Bantuan Hukum dan Penegakan Perda	Cakupan kasus hukum warga miskin yang memperoleh pendampingan ; Pemberian bantuan hukum dan penegakan perda	11 Penanganan Perkara di Lembaga Peradilan									
					Meningkatnya Pemahaman Aparatur dan Masyarakat	1.824.000.000,00	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.01.02.1.03 - Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah	4.01.02.1.03.04 - Fasilitas Penyelesaian Masalah Hukum	Meningkatnya Pemahaman Aparatur dan Masyarakat	15 Perkara	
20.				13 Penyusunan RANHAM									
					Pemahaman Aparatur dan Masyarakat Terhadap HAM	350.000.000,00	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.01.02.1.03 - Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah	4.01.02.1.03.04 - Fasilitas Penyelesaian Masalah Hukum	Pemahaman Aparatur dan Masyarakat Terhadap HAM	1 Kegiatan	
21.		75 Program Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum	Persentase Produk Hukum Kabupaten/Kota se Papua yang difasilitasi ; Terlaksananya Penegakan hukum; Terlaksananya kegiatan pengawasan produk hukum kab/kota	1 Pembinaan dan Pengkajian Produk Hukum Kabupaten/Kota se Papua									
					Terlaksananya Pembinaan dan Pengkajian Produk Hukum Kab/Kota	1.000.000.000,00	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.01.02.1.03 - Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah	4.01.02.1.03.03 - Evaluasi Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan dan Pengkajian Produk Hukum Kab/Kota	29 Kabupaten	
22.				9 Forum SKPD Bidang Hukum									
					Terlaksananya RAKONTEK Bidang Hukum	0,00	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.01.02.1.03 - Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah	4.01.02.1.03.03 - Evaluasi Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya RAKONTEK Bidang Hukum	0 Kegiatan	
					Jumlah Aparatur yang mengikuti Forum SKPD Bidang Hukum	700.000.000,00	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.01.02.1.03 - Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah	4.01.02.1.03.03 - Evaluasi Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur yang mengikuti Forum SKPD Bidang Hukum	68 Orang	
23.				10 Konsultasi Ranperda Kabupaten/Kota									
					Terlaksananya Konsultasi, Koordinasi, Klarifikasi Produk Hukum Kab/Kota	594.400.000,00	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.01.02.1.03 - Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah	4.01.02.1.03.03 - Evaluasi Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Konsultasi, Koordinasi, Klarifikasi Produk Hukum Kab/Kota	12 Bulan	
24.				11 Penyusunan Pelaporan TP2K SKPD									
					Tersusunnya Laporan TP2K SKPD	0,00						0 Buku	
25.				12 Penyusunan LAKIP dan LPPD									
					Tersusunnya Laporan LAKIP dan LPPD	0,00						0 Bulan	
26.		76 Program Dokumentasi dan Informasi Hukum	Cakupan produk hukum daerah yang didesiminasi ; Terlaksananya dokumentasi dan informasi hukum	1 Penyuluhan Hukum									
					Meningkatnya Pemahaman Hukum Terhadap Masyarakat	0,00						0 Orang	
					Jumlah masyarakat yang disuluh	0,00						0 Orang	
					Meningkatnya pengetahuan tentang hukum	0,00						0 Orang	
27.				7 Updating dan Pengembangan Website Biro Hukum									
					Pengelolaan dan Pemeliharaan Web Site Biro Hukum	510.500.000,00	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.01.02.1.03 - Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah	4.01.02.1.03.02 - Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Pengelolaan dan Pemeliharaan Web Site Biro Hukum	1 Kegiatan	
					Jumlah data informasi yang di update	0,00	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.01.02.1.03 - Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah	4.01.02.1.03.02 - Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Jumlah data informasi yang di update	0 Dokumen	
28.				9 Penyediaan Bahan Pustaka dan Penataan Dokumen									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Tersedianya Bahan Hukum dan Dokumen Hukum	200.000.000,00	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	4.01.04 - PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM	4.01.04.1.02 - Pelaksanaan Administrasi Umum	4.01.04.1.02.09 - Pengelolaan Persuratan dan Arsip	Tersedianya Bahan Hukum dan Dokumen Hukum	100 Buku	
JUMLAH						15.883.500.000,00							

Mengetahui,
Kepala Bappeda Provinsi Papua

YOHANES WALILO, S.Sos, M.Si
NIP. 197007281997121001

JAYAPURA, 20 July 2020
KEPALA BIRO HUKUM SETDA PROVINSI PAPUA

Y. DEREK HEGEMUR, SH.,MH
NIP. 19661202 198603 1 002

**REKAPITULASI PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021
SERTA KETERKAITAN DENGAN HASIL PEMETAAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019**

PROVINSI : Papua

PERANGKAT DAERAH : Biro Organisasi

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Administrasi Pemerintahan	1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	À Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	1 Penyediaan jasa surat menyurat									
					Jumlah surat yang disediakan	65.100.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.01 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang terkirim	917 Surat	
2.				6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional									
					Jumlah Unit Mobil Dinas/Operasional yang terpelihara dan Terfasilitasi Perijinannya	8.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.06 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Unit Mobil Dinas/Operasional yang diservis dan dipelihara	13 Unit	
3.				9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja									
					Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	50.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.09 - Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	49 Unit	
4.				10 Penyediaan alat tulis kantor									
					Jumlah jenis ATK yang disediakan	143.200.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.10 - Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	57 Jenis	
5.				11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan									
					Jumlah barang cetakan	150.800.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.11 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan	21 Jenis	
					Jumlah penggandaan	165.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.11 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah penggandaan	145000 Lembar	
					Jumlah Jenis Barang Cetak dan yang Disediakan	0,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.11 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	20 Jenis	
					Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	0,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.11 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	20 Bulan	
6.				13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor									
					Jumlah peralatan dan Perlengkapan	0,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.25 - Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah penggandaan peralatan kantor yang disediakan	16 Unit	
7.				15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan									
					Jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	23.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.15 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	3 Jenis	
8.				17 Penyediaan makanan dan minuman									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Pelaksanaan penyediaan makan dan minum	38.900.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administras Umum	4.01.01.1.03.17 - Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Porsi makan dan minum kegiatan yang tersedia	389 Kegiatan	
					Pelaksanaan makan minum tamu dan rapat	153.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administras Umum	4.01.01.1.03.17 - Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Porsi makan dan minum yang tersedia	1500 Kali Tahun	
					Pelaksanaan makan minum saat olah raga (hari Jumat)	0,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administras Umum	4.01.01.1.03.17 - Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Porsi makan dan minum yang tersedia	0 Kali	
					Tersediannya Makanan dan Minuman	0,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administras Umum	4.01.01.1.03.17 - Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Porsi makan dan minum yang tersedia	0 Bulan	
					Jumlah orang yang disediakan makan dan minuman	0,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administras Umum	4.01.01.1.03.17 - Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Porsi makan dan minum yang tersedia	0 Orang	
9.				18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah									
					Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	755.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administras Umum	4.01.01.1.03.18 - Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	26 Orang	
10.		2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	À Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	5 Pengadaan kendaraan dinas/operasional									
					Jumlah kendaraan yang diadakan	0,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administras Umum	4.01.01.1.03.21 - Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda 4	3 Unit	
					Jumlah kendaraan roda 2	0,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administras Umum	4.01.01.1.03.21 - Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda 2	2 Unit	
11.				7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor									
					Jumlah pengadaan perlengkapan	0,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administras Umum	4.01.01.1.03.23 - Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan	18 Unit	
12.				10 Pengadaan mebeleur									
					Jumlah mebeleur yang diadakan	0,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administras Umum	4.01.01.1.03.26 - Pengadaan Mebeleur	Jumlah mebeleur yang diadakan untuk 3 UPT	8 Unit	
13.				24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional									
					Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	0,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administras Umum	4.01.01.1.03.31 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah dan Jenis perlengkapan/peralatan gedung kantor yang dipelihara	0 Unit	
					Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	145.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administras Umum	4.01.01.1.03.31 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang	13 Unit	
					sewa kendaraan	0,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administras Umum	4.01.01.1.03.31 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan yang diperbaiki/Service	0 Bulan	
14.				26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor									
					Pelaksanaan pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	30.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administras Umum	4.01.01.1.03.27 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Jumlah Rumah Jabatan	5 Kegiatan	
					Jumlah Perlengkapan Gedung kantor yang terpelihara	0,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administras Umum	4.01.01.1.03.33 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung kantor yang dipelihara	6 Unit	
					Tersediannya biaya pemeliharaan gedung kantor	0,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administras Umum	4.01.01.1.03.39 - Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor	1 Bulan	
15.				46 Sewa gedung									
					Jumlah gedung kantor yang disewa	0,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administras Umum	4.01.01.1.03.27 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Jumlah rumah jabatan yang terpelihara	0 Unit Tahun	
					Sewa rumah jabatan	0,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administras Umum	4.01.01.1.03.27 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Jumlah Rumah Jabatan Yang disewa	1 Unit Tahun	
16.		3 Program peningkatan disiplin aparatur	À Meningkatnya disiplin aparatur	1 Pengadaan mesin/kartu absensi									
					Jumlah Mesin /Kartu Apsensi yang tersedia	5.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	4.01.01.1.04.01 - Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Jumlah Mesin /Kartu Absensi yang tersedia	1 Bh	

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17.	Administrasi Pemerintahan	3 Program peningkatan disiplin aparatur	À Meningkatnya disiplin aparatur	2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya									
					Jumlah pakaian dinas yang diadakan	68.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	4.01.01.1.04.02 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas sipil harian	44 Stell	
18.				5 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu									
					Jumlah pakaian khusus yang diadakan	35.100.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	4.01.01.1.04.05 - Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah pakaian Batik yang diadakan	13 Stell	
19.		5 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	À Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	1 Pendidikan dan pelatihan formal									
					Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	130.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	4.01.01.1.04.09 - Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparatur mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	3 Orang	
20.				2 Sosialisasi peraturan perundang-undangan									
					Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	0,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	4.01.01.1.04.10 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	130 Orang	
21.				4 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal									
					Jumlah aparatur yang terlatih	299.800.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	4.01.01.1.04.11 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	
22.		6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	À Meningkatnya kualitas akuntabilitas OPD	1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD									
					Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	15.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.02 - Administrasi Keuangan	4.01.01.1.02.06 - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan	3 Laporan	
					Laporan LAKIP SKPD	0,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.01 - Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.01.01.1.01.05 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan LAKIP SKPD	0 Dokumen	
23.				2 Penyusunan laporan keuangan semesteran									
					Jumlah pelaporan keuangan semesteran yang diselesaikan tepat waktu	15.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.02 - Administrasi Keuangan	4.01.01.1.02.07 - Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Jumlah dokumen laporan	2 Laporan	
24.				4 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun									
					Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	15.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.02 - Administrasi Keuangan	4.01.01.1.02.09 - Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	1 Laporan	
25.				5 Penyusunan Renja, RKA dan Perubahan APBD									
					Jumlah dokumen	15.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.01 - Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.01.01.1.01.01 - Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	3 Dokumen	
26.				12 Penyusunan RENSTRA									
					Jumlah Dokumen	0,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.01 - Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.01.01.1.01.01 - Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	
27.		55 Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan	Cakupan OPD Provinsi Papua yang sudah dilakukan analisis dan/atau evaluasi jabatan; Persentase OPD yang memiliki SOP yang berkaitan dengan kinerja utama; Persentase OPD yang memiliki data uraian jabatan; Persentase Rekomendasi dari Analisa Beban Kerja yang ditindaklanjuti	8 Penataan Kelembagaan Provinsi Papua									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Jumlah OPD Pemerintah Provinsi yang tepat fungsi dan Tepat Ukuran	800.000.000,00	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	4.01.04 - PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM	4.01.04.1.01 - Penataan Organisasi	4.01.04.1.01.01 - Fasilitas Penataan Kelembagaan Provinsi	Jumlah OPD Pemerintah Provinsi yang tepat fungsi dan Tepat Ukuran	35 SKPD	
					Jumlah Rekomendasi yang disepakati dan ditindaklanjuti	0,00	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	4.01.04 - PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM	4.01.04.1.01 - Penataan Organisasi	4.01.04.1.01.01 - Fasilitas Penataan Kelembagaan Provinsi	Jumlah Rekomendasi yang disepakati dan ditindaklanjuti	1 rekomendasi	
					Jumlah PERDA dan PERGUB di Bidang Kelembagaan	0,00	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	4.01.04 - PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM	4.01.04.1.01 - Penataan Organisasi	4.01.04.1.01.01 - Fasilitas Penataan Kelembagaan Provinsi	Jumlah PERDA dan PERGUB di Bidang Kelembagaan	55 Peraturan	
28.				9 Rapat Koordinasi Teknis Bidang Organisasi se Provinsi Papua									
					Jumlah Rekomendasi yang disepakati dan ditindakan	550.000.000,00	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	4.01.04 - PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM	4.01.04.1.01 - Penataan Organisasi	4.01.04.1.01.01 - Fasilitas Penataan Kelembagaan Provinsi	Jumlah Rekomendasi yang disepakati dan ditindakan	1 Dokumen	
29.				11 Rapat Kerja Pembinaan Kelembagaan Kabupaten/Kota se Papua									
					Jumlah Rekomendasi yang disepakati dan ditindakan	600.000.000,00	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	4.01.04 - PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM	4.01.04.1.01 - Penataan Organisasi	4.01.04.1.01.02 - Fasilitas Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi yang disepakati dan ditindakan	1 Dokumen	
30.				12 Penyusunan Uraian Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua									
					Persentase OPD yang memiliki data uraian jabatan	0,00	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	4.01.04 - PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM	4.01.04.1.01 - Penataan Organisasi	4.01.04.1.01.03 - Penataan Analisis Jabatan	Persentase OPD yang memiliki data uraian jabatan	25 %	
31.				13 Bimtek Penyusunan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua									
					Presentase SKPD yang memiliki ABK di Provinsi Papua	0,00	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	4.01.04 - PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM	4.01.04.1.01 - Penataan Organisasi	4.01.04.1.01.03 - Penataan Analisis Jabatan	Presentase SKPD yang memiliki ABK di Provinsi Papua	80 %	
					Presentase Rekomendasi ABK yang di tindaklanjuti	400.000.000,00	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	4.01.04 - PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM	4.01.04.1.01 - Penataan Organisasi	4.01.04.1.01.03 - Penataan Analisis Jabatan	Presentase Rekomendasi ABK yang di tindaklanjuti	100 %	
32.				36 Bimtek Fasilitas Penerapan Rencana Standart Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua									
					Jumlah Urusan yang memiliki Standar Pelayanan Minimal	0,00						0 Bidang	
33.				38 Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua									
					jumlah SPP yang telah disusun dan diterapkan pada SKPD Provinsi dan SKPD Kab/Kota se Papua	0,00	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	4.01.04 - PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM	4.01.04.1.01 - Penataan Organisasi	4.01.04.1.01.08 - Fasilitas Peningkatan Pelayanan Publik	Persentase SPP yang telah disusun dan diterapkan pada SKPD Provinsi dan SKPD Kab/Kota se Papua	75 Dokumen	
					Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	0,00	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	4.01.04 - PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM	4.01.04.1.01 - Penataan Organisasi	4.01.04.1.01.08 - Fasilitas Peningkatan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	70 %	
					Persentase SKPD yang telah melaksanakan SPP	600.000.000,00	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	4.01.04 - PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM	4.01.04.1.01 - Penataan Organisasi	4.01.04.1.01.08 - Fasilitas Peningkatan Pelayanan Publik	Persentase SKPD yang telah melaksanakan SPP	50 %	
					Persentase Provinsi dan Kab/Kota yang taat melaksanakan Tata Naskah	500.000.000,00	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	4.01.04 - PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM	4.01.04.1.01 - Penataan Organisasi	4.01.04.1.01.08 - Fasilitas Peningkatan Pelayanan Publik	Persentase SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menggunakan TND dengan benar	75 %	
					Evaluasi intern dan ekstern SPP	0,00	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	4.01.04 - PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM	4.01.04.1.01 - Penataan Organisasi	4.01.04.1.01.08 - Fasilitas Peningkatan Pelayanan Publik	Evaluasi intern dan ekstern SPP	70 Dokumen	
					Persentase SKPD yang mendapat penilaian indeks pelayanan baik	0,00	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	4.01.04 - PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM	4.01.04.1.01 - Penataan Organisasi	4.01.04.1.01.08 - Fasilitas Peningkatan Pelayanan Publik	Persentase SKPD yang mendapat penilaian indeks pelayanan baik	6 %	
34.				39 Penyusunan Standart Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					SK. Gubernur tentang nama, kode dan judul SOP	0,00	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	4.01.04 - PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM	4.01.04.1.01 - Penataan Organisasi	4.01.04.1.01.07 - Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	SK. Gubernur tentang nama, kode dan judul SOP	20 Dokumen	
					SK. Gubernur dalam bentuk Flowchat	0,00	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	4.01.04 - PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM	4.01.04.1.01 - Penataan Organisasi	4.01.04.1.01.07 - Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	SK. Gubernur dalam bentuk Flowchat	20 Dokumen	
					Persentase OPD yang memiliki SOP yang berkaitan dengan kinerja utama	0,00	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	4.01.04 - PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM	4.01.04.1.01 - Penataan Organisasi	4.01.04.1.01.07 - Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Persentase OPD yang memiliki SOP yang berkaitan dengan kinerja utama	20 SKPD	
					Jumlah Analisis Standard Kompetensi SKPD	0,00	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	4.01.04 - PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM	4.01.04.1.01 - Penataan Organisasi	4.01.04.1.01.07 - Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Jumlah Analisis Standard Kompetensi SKPD	20 Orang	
					Persentase skpd yang memiliki SOP dan telah ditetapkan dengan SK gubernur	200.000.000,00	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	4.01.04 - PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM	4.01.04.1.01 - Penataan Organisasi	4.01.04.1.01.07 - Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Jumlah SKPD yang memiliki SOP dan telah ditetapkan dengan SK gubernur	35 SKPD	
					Jumlah skpd yang dievaluasi penerapan SOP-nya	0,00	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	4.01.04 - PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM	4.01.04.1.01 - Penataan Organisasi	4.01.04.1.01.07 - Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Jumlah SKPD yang dievaluasi penerapan SOP-nya	20 SKPD	
35.				40 Fasilitasi Indikator Kinerja Utama dan Penetapan Kinerja SKPD yang terkakuntabilitas dan terintegrasi dalam iku pemerintah provinsi papua									
					Jumlah Dokumen IKU KPD	0,00	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	4.01.04 - PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM	4.01.04.1.01 - Penataan Organisasi	4.01.04.1.01.07 - Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Jumlah Dokumen IKU dan PK SKPD yang terkakuntabilitas	35 Dokumen	
					Persentase IKU dan PK SKPD yang terkakuntabilitas dan terintegrasi dalam IKU Pemerintah Provinsi Papua	200.000.000,00	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	4.01.04 - PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM	4.01.04.1.01 - Penataan Organisasi	4.01.04.1.01.07 - Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Persentase IKU dan PK SKPD yang terkakuntabilitas dan terintegrasi dalam IKU Pemerintah Provinsi Papua	100 %	
36.				41 Penataan dan Penyusunan pedoman tata ruang kantor Pemerintah Provinsi Papua									
					Persentase SKPD yang menempati ruang sesuai PERGUB tentang tataruang kantor di Provinsi Papua	0,00	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	4.01.04 - PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM	4.01.04.1.01 - Penataan Organisasi	4.01.04.1.01.07 - Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Persentase SKPD yang menempati ruang sesuai PERGUB tentang tataruang kantor di Provinsi Papua	100 %	
					Persentase sarana dan prasarana kerja sesuai dengan standarisasi	0,00	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	4.01.04 - PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM	4.01.04.1.01 - Penataan Organisasi	4.01.04.1.01.07 - Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Persentase sarana dan prasarana kerja sesuai dengan standarisasi	70 %	
37.				45 Penyusunan Data Kompetensi Sumber Daya Aparatur di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua									
					Jumlah Data Kompetensi Sumber Daya Aparatur	0,00	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	4.01.04 - PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM	4.01.04.1.01 - Penataan Organisasi	4.01.04.1.01.07 - Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Jumlah Data Kompetensi Sumber Daya Aparatur	35 Dokumen	
38.				70 Monitoring dan Evaluasi Data kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota									
					jumlah hasil evaluasi data kelembagaan pada 29 Ka	400.000.000,00	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	4.01.04 - PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM	4.01.04.1.01 - Penataan Organisasi	4.01.04.1.01.02 - Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	jumlah hasil evaluasi data kelembagaan pada 29 Ka	12 Dokumen	
					jumlah data evaluasi kelembagaan pada 29 Kab/Kota di se-Papua	0,00	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	4.01.04 - PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM	4.01.04.1.01 - Penataan Organisasi	4.01.04.1.01.02 - Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	jumlah data evaluasi kelembagaan pada 29 Kab/Kota di se-Papua	12 Kabupaten	
					Cakupan Monitoring dan Evaluasi Data Kelembagaan Perangkat Daerah Kab/Kota	0,00	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	4.01.04 - PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM	4.01.04.1.01 - Penataan Organisasi	4.01.04.1.01.02 - Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Cakupan Monitoring dan Evaluasi Data Kelembagaan Perangkat Daerah Kab/Kota	12 Kabupaten	
39.				73 Pengumpulan dan Penyusunan Data Analisis Kebutuhan Jabatan Fungsional tertentu SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua									
					jumlah jabatan fungsional tertentu pada SKPD di Provinsi Papua	0,00	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	4.01.04 - PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM	4.01.04.1.01 - Penataan Organisasi	4.01.04.1.01.03 - Penataan Analisis Jabatan	jumlah jabatan fungsional tertentu pada SKPD di Provinsi Papua	35 Dokumen	
40.				74 Penyusunan LAKIP di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Jumlah SKPD yang mengumpulkan LAKIP di Provinsi dan Kab/kota	0,00	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	4.01.04 - PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM	4.01.04.1.01 - Penataan Organisasi	4.01.04.1.01.05 - Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Jumlah SKPD yang mengumpulkan LAKIP di Provinsi dan Kab/kota tepat waktu	35 Dokumen	
					Nilai Evaluasi AKIP Provinsi Papua oleh Kementerian PAN dan RB	300.000.000,00	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	4.01.04 - PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM	4.01.04.1.01 - Penataan Organisasi	4.01.04.1.01.05 - Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Nilai Evaluasi AKIP Provinsi Papua oleh Kementerian PAN dan RB	80 Persentase	
					Presentase SKPD Provinsi Papua serta Kab/kota yang menerapkan SAKIP	0,00	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.01.02.1.01 - Pemantauan Pelaksanaan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	4.01.02.1.01.05 - Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Presentase SKPD Provinsi Papua serta Kab/kota yang menerapkan SAKIP	75 %	
					Nilai LAKIP Biro Organisasi oleh Inspektorat	0,00	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.01.02.1.01 - Pemantauan Pelaksanaan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	4.01.02.1.01.05 - Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai LAKIP Biro Organisasi oleh Inspektorat	90 %	
41.				75 Evaluasi jabatan dilingkungan pemerintah Provinsi Papua									
					jumlah aparatur perngevaluasi Jabatan di lingkungan pemerintah Provinsi	500.000.000,00	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	4.01.04 - PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM	4.01.04.1.01 - Penataan Organisasi	4.01.04.1.01.03 - Penataan Analisis Jabatan	Jumlah SKPD yang memiliki data uraian jabatan	35 SKPD	
42.				76 Bimtek analisis jabatan dilingkungan pemerintah Provinsi Papua									
					jumlah penganalisis jabatan di lingkungan Kab/Kota	450.000.000,00	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	4.01.04 - PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM	4.01.04.1.01 - Penataan Organisasi	4.01.04.1.01.03 - Penataan Analisis Jabatan	jumlah penganalisis jabatan di OPD Provinsi Papua	35 SKPD	
					Cakupan OPD yang sudah dilakukan analisis dan/atau evaluasi jabatan	700.000.000,00	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	4.01.04 - PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM	4.01.04.1.01 - Penataan Organisasi	4.01.04.1.01.03 - Penataan Analisis Jabatan	Cakupan OPD yang sudah dilakukan analisis dan/atau evaluasi jabatan	35 %	
					Presentase OPD yang memiliki data uraian jabatan	0,00	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	4.01.04 - PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM	4.01.04.1.01 - Penataan Organisasi	4.01.04.1.01.03 - Penataan Analisis Jabatan	Presentase OPD yang memiliki data uraian jabatan	35 %	
43.				78 Penataan standarisasi sarana dan prasarana kerja									
					jumlah papan nama pejabat struktural yang telah dipasang	300.000.000,00	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	4.01.04 - PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM	4.01.04.1.01 - Penataan Organisasi	4.01.04.1.01.07 - Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	jumlah papan nama pejabat struktural yang telah dipasang	332 Orang	
					Presentase pemasangan papan nama pejabat struktural yang terpasang	0,00	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	4.01.04 - PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM	4.01.04.1.01 - Penataan Organisasi	4.01.04.1.01.07 - Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Presentase pemasangan papan nama pejabat struktural yang terpasang	5 %	
44.				79 Sosialisasi Pakaian Dinas PNS dilingkungan pemerintah Provinsi Papua									
					pesertase PNS yang mengenakan pakaian dinas sesuai aturan	0,00	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	4.01.04 - PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM	4.01.04.1.01 - Penataan Organisasi	4.01.04.1.01.07 - Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	pesertase PNS yang mengenakan pakaian dinas sesuai aturan	95 %	
45.				81 Pengelolaan Data Kinerja Organisasi pada Web Side Biro Organisasi									
					jumlah jenis data dalam website	100.000.000,00	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	4.01.04 - PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM	4.01.04.1.01 - Penataan Organisasi	4.01.04.1.01.07 - Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	jumlah jenis data dalam website	6 Dokumen	
46.				82 Rapat Koordinasi Teknis Bidang Ketatalaksanaan se Provinsi Papua									
					Jumlah Rekomendasi yang disepakati dan ditindakan	0,00	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	4.01.04 - PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM	4.01.04.1.01 - Penataan Organisasi	4.01.04.1.01.07 - Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Jumlah Rekomendasi yang disepakati dan ditindakan	1 Dokumen	
					jumlah peserta dari Provinsi dan Kab/Kota	0,00	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	4.01.04 - PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM	4.01.04.1.01 - Penataan Organisasi	4.01.04.1.01.07 - Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	jumlah peserta dari Provinsi dan Kab/Kota	200 Orang	
					Jumlah Peraturan Per Undang-undangan dibidang ketatalaksanaan Pemerintah Provinsi Papua	0,00	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	4.01.04 - PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM	4.01.04.1.01 - Penataan Organisasi	4.01.04.1.01.07 - Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Jumlah Peraturan Per Undang-undangan dibidang ketatalaksanaan Pemerintah Provinsi Papua	4 Peraturan	
					Jumlah aparatur di bagian ketatalaksanaan yang mampu melaksanakan tugas sesuai Tusi	0,00	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	4.01.04 - PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM	4.01.04.1.01 - Penataan Organisasi	4.01.04.1.01.07 - Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Jumlah aparatur di bagian ketatalaksanaan yang mampu melaksanakan tugas sesuai Tusi	9 Orang	
47.				84 Bimtek penyusunan Formasi Jabatan dilingkungan pemerintah Provinsi Papua									
					jumlah hasil formasi jabatan pada SKPD di Provinsi Papua	0,00	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	4.01.04 - PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM	4.01.04.1.01 - Penataan Organisasi	4.01.04.1.01.03 - Penataan Analisis Jabatan	jumlah hasil formasi jabatan pada SKPD di Provinsi Papua	35 Orang	

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
48.	Administrasi Pemerintahan	55 Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan	Cakupan OPD Provinsi Papua yang sudah dilakukan analisis dan/atau evaluasi jabatan; Persentase OPD yang memiliki SOP yang berkaitan dengan kinerja utama; Persentase OPD yang memiliki data uraian jabatan; Persentase Rekomendasi dari Analisa Beban Kerja yang ditindaklanjuti	85 Penyusunan Data Formasi Jabatan dilingkungan Pemerintah Provinsi Papua									
					Persentase SKPD yang memiliki data formasi jabatan	600.000.000,00	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	4.01.04 - PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM	4.01.04.1.01 - Penataan Organisasi	4.01.04.1.01.03 - Penataan Analisis Jabatan	Persentase SKPD yang memiliki data formasi jabatan	100 Persentase	
49.				86 Bimtek pengembangan jabatan fungsional (umum dan tertentu) penilaian angka kredit dan insentif pusat dan daerah dilingkungan pemerintah Provinsi Papua									
					jumlah tenaga penilaian angka kredit dan insentif pusat dan Daerah	0,00	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	4.01.04 - PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM	4.01.04.1.01 - Penataan Organisasi	4.01.04.1.01.03 - Penataan Analisis Jabatan	jumlah tenaga penilaian angka kredit dan insentif pusat dan Daerah	35 Orang	
50.				89 Bimtek Evaluasi jabatan dilingkungan Pemerintah Provinsi Papua									
					jumlah peserta yang mengikuti bimtek	0,00	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	4.01.04 - PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM	4.01.04.1.01 - Penataan Organisasi	4.01.04.1.01.03 - Penataan Analisis Jabatan	jumlah peserta yang mengikuti bimtek	70 Orang	
					Jumlah penganalisis jabatan SKPD	500.000.000,00	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	4.01.04 - PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM	4.01.04.1.01 - Penataan Organisasi	4.01.04.1.01.03 - Penataan Analisis Jabatan	Jumlah penganalisis jabatan SKPD di Provinsi Papua	70 Orang	
					Jumlah SKPD yang sudah di evaluasi jabatan	0,00	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	4.01.04 - PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM	4.01.04.1.01 - Penataan Organisasi	4.01.04.1.01.03 - Penataan Analisis Jabatan	Jumlah SKPD yang sudah di evaluasi jabatan	35 SKPD	
51.				90 Bimtek SAKIP dilingkungan Pemerintah Provinsi Papua									
					jumlah peserta BIMTEK SAKIP dilingkungan pemerintah Provinsi Papua	0,00	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	4.01.04 - PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM	4.01.04.1.01 - Penataan Organisasi	4.01.04.1.01.05 - Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	jumlah peserta BIMTEK SAKIP dilingkungan pemerintah Provinsi Papua	150 Orang	
52.				93 Penyusunan data analisis kebutuhan jabatan fungsional tertentu SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua									
					jumlah jabatan fungsional tertentu pada SKPD di Provinsi Papua	0,00	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	4.01.04 - PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM	4.01.04.1.01 - Penataan Organisasi	4.01.04.1.01.03 - Penataan Analisis Jabatan	jumlah jabatan fungsional tertentu pada SKPD di Provinsi Papua	0 SKPD	
53.				95 Penyusunan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Papua									
					Jumlah IKU SKPD	0,00	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	4.01.04 - PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM	4.01.04.1.01 - Penataan Organisasi	4.01.04.1.01.07 - Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Jumlah IKU SKPD	35 Dokumen	
					Jumlah IKU dan PK SKPD yang terakuntabilitas dan terintegrasi dalam IKU Pemerintah Provinsi Papua	0,00	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	4.01.04 - PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM	4.01.04.1.01 - Penataan Organisasi	4.01.04.1.01.07 - Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Jumlah IKU dan PK SKPD yang terakuntabilitas dan terintegrasi dalam IKU Pemerintah Provinsi Papua	35 SKPD	
54.				97 Sosialisasi reformasi birokrasi dilingkungan pemerintah Provinsi Papua									
					Persentase SKPD Provinsi dan 29 Kabupaten/Kota yang menerapkan Reformasi Birokrasi	400.000.000,00	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	4.01.04 - PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM	4.01.04.1.01 - Penataan Organisasi	4.01.04.1.01.04 - Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Persentase SKPD Provinsi dan 29 Kabupaten/Kotxxa yang menerapkan Reformasi Birokrasi	60 %	
JUMLAH						10.424.900.000,00							

Mengetahui,
Kepala Bappeda Provinsi Papua

YOHANES WALILO, S.Sos, M.Si
NIP. 197007281997121001

JAYAPURA, 20 July 2020
Kepala Biro

Linda S. Onibala, S.Sos.MM
NIP. 19720911 199112 2 001

**REKAPITULASI PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021
SERTA KETERKAITAN DENGAN HASIL PEMETAAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019**

PROVINSI : Papua

PERANGKAT DAERAH : Biro Umum dan Protokol

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Administrasi Pemerintahan	1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	À Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	1 Penyediaan jasa surat menyurat									
					Jumlah surat yang disediakan	1.404.784.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administras Umum	4.01.01.1.03.01 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang terkirim	1350 Surat	
2.				2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik									
					Jumlah Jasa Layanan berlangganan Listrik, Air, Telepon, Transponder	7.056.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administras Umum	4.01.01.1.03.02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Layanan	7 Layanan	
3.				6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional									
					Jumlah Unit Mobil Dinas/Operasional yang terpelihara dan Terfasilitasi Perijinannya	586.500.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administras Umum	4.01.01.1.03.06 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Unit Mobil Dinas/Operasional yang diservis dan dipelihara	121 Unit	
4.				8 Penyediaan jasa kebersihan kantor									
					Luas Gedung dan Halaman yang disediakan jasa kebersihan	0,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administras Umum	4.01.01.1.03.08 - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	jumlah Gedung dan Halaman yang dibersihkan	0 M2	
					Jumlah tenaga kebersihan dan Fasilitas Pendukung kebersihan kantor	9.157.486.800,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administras Umum	4.01.01.1.03.08 - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah tenaga kebersihan	186 Orang	
					Jumlah Jenis Bahan dan Alat Kebersihan	9.492.513.200,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administras Umum	4.01.01.1.03.14 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Bahan dan Alat Kebersihan	45 Jenis	
5.				10 Penyediaan alat tulis kantor									
					Jumlah jenis ATK yang disediakan	744.200.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administras Umum	4.01.01.1.03.10 - Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	59 Jenis	
6.				11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan									
					Jumlah barang cetakan	471.665.800,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administras Umum	4.01.01.1.03.11 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan	22 Jenis	
					Jumlah penggandaan	55.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administras Umum	4.01.01.1.03.11 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penggandaan	2500000 Lembar	
					Jumlah Jenis Barang Cetak dan yang Disediakan	0,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administras Umum	4.01.01.1.03.11 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0 Jenis	
					Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	0,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administras Umum	4.01.01.1.03.11 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	12 Bulan	
7.				12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor									
					Jumlah Komponen Listrik yang disediakan	719.773.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administras Umum	4.01.01.1.03.12 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen alat pemeliharaan listrik dan genset yang disediakan	22675 Buah	
8.				13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor									
					Jumlah peralatan dan Perlengkapan	100.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administras Umum	4.01.01.1.03.25 - Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah penggandaan peralatan kantor yang disediakan	24 Unit	
9.				15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	66.240.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.15 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	10 Jenis	
10.				16 Penyediaan bahan logistik kantor									
					Jumlah liter bahan bakar untuk kendaraan operasional	2.921.088.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.16 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah liter bahan bakar untuk kendaraan operasional	337984 Liter	
					jumlah mobilitas termasuk tenaga angkat dan turun beras ke kantor	46.303.200,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.16 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah Pembelian Air Galon	12 Kali	
11.				17 Penyediaan makanan dan minuman									
					Pelaksanaan penyediaan makan dan minum	600.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.17 - Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Porsi makan dan minum kegiatan yang tersedia	2 Kegiatan	
					Pelaksanaan makan minum tamu dan rapat	0,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.17 - Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Porsi makan dan minum yang tersedia	0 Kali Tahun	
					Pelaksanaan makan minum saat olah raga (hari Jumat)	0,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.17 - Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Porsi makan dan minum yang tersedia	0 Kali	
					Tersediannya Makanan dan Minuman	0,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.17 - Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Porsi makan dan minum yang tersedia	0 Bulan	
					Jumlah orang yang disediakan makan dan minuman	0,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.17 - Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Porsi makan dan minum yang tersedia	0 Orang	
12.				18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah									
					Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	1.595.750.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.18 - Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	75 Orang	
13.				20 Pembuatan Aplikasi e-Surat									
					Jumlah sistem informasi	0,00						0 Aplikasi	
14.		2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	À Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	3 Pembangunan gedung kantor									
					Luas bangunan yang dibangun	32.840.009.880,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.39 - Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Luas bangunan yang dibangun	1506 M2	
					Tersedianya desain perencanaan bangunan	0,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.39 - Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Tersedianya desain perencanaan bangunan	0 Dokumen	
15.				5 Pengadaan kendaraan dinas/operasional									
					Jumlah kendaraan yang diadakan	8.500.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.21 - Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda 4	10 Unit	
					Jumlah kendaraan roda 2	0,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.21 - Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda 2	0 Unit	
16.				6 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas									
					Jumlah perlengkapan rumah jabatan	0,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.24 - Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah Pengadaan Peralatan	25 Unit	
17.				7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor									
					Jumlah pengadaan perlengkapan	5.500.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.23 - Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan	20 Unit	
18.				9 Pengadaan peralatan gedung kantor									
					Jumlah peralatan perlengkapan	300.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.25 - Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan/perlengkapan yang diadakan	8 Unit	
19.				10 Pengadaan mebeleur									
					Jumlah mebeleur yang diadakan	0,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.26 - Pengadaan Mebeleur	Jumlah mebeleur yang diadakan untuk 3 UPT	0 Unit	
20.				20 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Jumlah rumah jabatan yg terpelihara	3.582.775.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.37 - Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan	Jumlah rumah jabatan yg terpelihara	6 Unit Tahun	
21.				22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor									
					Jumlah gedung kantor yang dipelihara	10.284.910.120,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.29 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor	4 Unit	
					belanja sewa	0,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.29 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung yang disewa	0 Tahun	
22.				24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional									
					Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	0,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.31 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah dan Jenis perlengkapan/peralatan gedung kantor yang dipelihara	0 Unit	
					Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	1.547.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.31 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang	121 Unit	
					sewa kendaraan	0,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.31 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan yang diperbaiki/Service	0 Bulan	
23.				25 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas									
24.				26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor									
					Pelaksanaan pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	0,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.27 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Jumlah Rumah Jabatan	0 Kegiatan	
					Jumlah Perlengkapan Gedung kantor yang terpelihara	982.080.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.33 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung kantor yang dipelihara	792 Unit	
					Tersediannya biaya pemeliharaan gedung kantor	0,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.39 - Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor	0 Bulan	
25.				28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor									
					Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	856.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.35 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	38 Unit	
26.				29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur									
					Jumlah mebeleur yang dipelihara	0,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.36 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Jumlah mebeleur yang dipelihara	12 Unit	
27.				30 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor									
					Luas bangunan yang direhab	11.860.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.39 - Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Jumlah bangunan yang direhab	0 M2	
28.		3 Program peningkatan disiplin aparatur	À Meningkatnya disiplin aparatur	2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya									
					Jumlah pakaian dinas yang diadakan	390.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	4.01.01.1.04.02 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas sipil harian	300 Stell	
29.				4 Pengadaan pakaian KORPRI									
					jumlah pakaian KORPRI yang diadakan	360.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	4.01.01.1.04.04 - Pengadaan Pakaian Korpri	Jumlah pakaian KORPRI yang diadakan	300 Stell	
30.				5 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu									
					Jumlah pakaian khusus yang diadakan	360.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	4.01.01.1.04.05 - Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah pakaian Batik yang diadakan	300 Stell	
31.		5 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	À Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	1 Pendidikan dan pelatihan formal									
					Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	155.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	4.01.01.1.04.09 - Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparatur mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	6 Orang	

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32.	Administrasi Pemerintahan	5 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	À Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	4 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal									
					Jumlah aparatur yang terlatih	485.225.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	4.01.01.1.04.11 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang	
33.		6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	À Meningkatnya kualitas akuntabilitas OPD	1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD									
					Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	200.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.02 - Administrasi Keuangan	4.01.01.1.02.06 - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan	3 Laporan	
					Laporan LAKIP SKPD	0,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.01 - Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.01.01.1.01.05 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan LAKIP SKPD	0 Dokumen	
34.				2 Penyusunan laporan keuangan semesteran									
					Jumlah pelaporan keuangan semesteran yang diselesaikan tepat waktu	32.500.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.02 - Administrasi Keuangan	4.01.01.1.02.07 - Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Jumlah dokumen laporan	1 Laporan	
35.				4 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun									
					Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	127.500.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.02 - Administrasi Keuangan	4.01.01.1.02.09 - Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	1 Laporan	
36.				5 Penyusunan Renja, RKA dan Perubahan APBD									
					Jumlah dokumen	105.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.01 - Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.01.01.1.01.01 - Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	3 Dokumen	
37.				12 Penyusunan RENSTRA									
					Jumlah Dokumen	0,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.01 - Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.01.01.1.01.01 - Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	0 Dokumen	
38.		16 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	Cakupan pelayanan Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan	10 Monitoring dan evaluasi keprotokolan bagi 5 wilayah adat									
					Jumlah lokasi monitoring dan evaluasi keprotokolan	120.000.000,00	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.01.02.1.01 - Pemantauan Pelaksanaan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	4.01.02.1.01.02 - Fasilitas Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Jumlah lokasi monitoring dan evaluasi keprotokolan	29 Kabupaten	
39.				11 Pelayanan Keprotokolan Pemerintah Provinsi Papua									
					Frekuensi pelayanan keprotokolan	250.000.000,00	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.01.02.1.01 - Pemantauan Pelaksanaan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	4.01.02.1.01.02 - Fasilitas Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Jumlah pelayanan keprotokolan	581 Kali	
40.				12 Sosialisasi Penyesuaian Nomor Urut Kendaraan Dinas Forkompimda Provinsi Papua									
					Jumlah peserta sosialisasi	150.000.000,00	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.01.02.1.01 - Pemantauan Pelaksanaan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	4.01.02.1.01.02 - Fasilitas Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Jumlah peserta sosialisasi	50 Orang	
41.		78 Program Pelayanan Informasi	Tingkat pelayanan informasi publik pemerintah Provinsi Papua	6 Penyusunan Regulasi penyelenggaraan pelayanan publik									
					Jumlah dokumen regulasi dan pedoman pelaksanaan	0,00						0 Dokumen	
42.				7 Pengembangan Sistem Informasi Publik melalui media									
					Jumlah media informasi publik yang disiapkan	250.000.000,00	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.01.02.1.01 - Pemantauan Pelaksanaan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	4.01.02.1.01.02 - Fasilitas Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Jumlah media informasi publik yang disiapkan	5 Media	

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
43.	Administrasi Pemerintahan	78 Program Pelayanan Informasi	Tingkat pelayanan informasi publik pemerintah Provinsi Papua	8 Peningkatan Kapasitas Pelayanan Pengaduan Publik e-Lapor									
					Jumlah peserta bimtek/pelatihan	150.000.000,00	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.01.02.1.01 - Pemantauan Pelaksanaan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	4.01.02.1.01.02 - Fasilitas Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Jumlah peserta bimtek/pelatihan	15 Orang	
44.				9 Peningkatan Sarana dan Prasarana Publikasi									
					Jumlah papan iklan/informasi yang disediakan	0,00						0 Unit	
45.				10 Supervisi Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi									
					Jumlah unit pengelola data informasi publik yang disupervisi (dikontrol)	0,00						0 Unit	
46.				11 Peningkatan Kapasitas dan Monitoring PPID Utama Provinsi Papua									
					Jumlah PPID yang dipantau dan dibina	250.000.000,00	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.01.02.1.01 - Pemantauan Pelaksanaan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	4.01.02.1.01.02 - Fasilitas Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Jumlah PPID yang dipantau dan dibina di Sekretariat	6 Unit	
47.		111 Program Pengembangan Komunikasi, Informatika dan Media Massa	Jumlah media cetak nasional yang mempublikasi hasil pembangunan Papua	1 Penguatan Peran Bakohumas Provinsi Papua dan Kab/Kota									
					Jumlah peserta	200.000.000,00	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.01.02.1.01 - Pemantauan Pelaksanaan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	4.01.02.1.01.02 - Fasilitas Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Jumlah peserta	100 Orang	
48.				2 Publikasi Kebijakan Pemda Provinsi Papua									
					Frekuensi Dialog Interaktif	300.000.000,00	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.01.02.1.01 - Pemantauan Pelaksanaan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	4.01.02.1.01.02 - Fasilitas Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Jumlah Dialog Interaktif	18 Kali	
49.				3 Liputan Luar Negeri									
					Jumlah petugas Liputan	0,00						0 Orang	
50.				4 Pembuatan film Dokumenter									
					Jumlah film dokumenter Jejak rekam Pembangunan	250.000.000,00	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.01.02.1.01 - Pemantauan Pelaksanaan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	4.01.02.1.01.02 - Fasilitas Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Jumlah film dokumenter Jejak rekam Pembangunan	1 Film/Video	
51.				5 Sayembara Foto Pembangunan									
					Jumlah hasil foto yang disayembarakan	0,00						0 Buah	
52.				6 Penyelenggaraan Rakor Kehumasan, Pelayanan Informasi Publik serta Keprotokolan se Papua									
					Jumlah Peserta Rakor	300.000.000,00	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.01.02.1.01 - Pemantauan Pelaksanaan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	4.01.02.1.01.02 - Fasilitas Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Jumlah Peserta Rakor	150 Orang	
53.				7 Pendokumentasian Sambutan/Pidato Gubernur									
					Jumlah Sambutan/Pidato Gubernur	180.000.000,00	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.01.02.1.01 - Pemantauan Pelaksanaan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	4.01.02.1.01.02 - Fasilitas Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Jumlah Sambutan/Pidato Gubernur	240 Dokumen	
54.				8 Pengembangan Hubungan Kerjasama dengan Unsur Pers dan Lembaga Lainnya									
					Jumlah kerjasama dengan pers/lembaga	100.000.000,00	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.01.02.1.01 - Pemantauan Pelaksanaan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	4.01.02.1.01.02 - Fasilitas Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Jumlah kerjasama dengan pers/lembaga	18 Lembaga	
55.				9 Peliputan dan Pendokumentasian Kegiatan Pemerintah Provinsi Papua									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Frekuensi peliputan kegiatan	200.000.000,00	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.01.02.1.01 - Pemantauan Pelaksanaan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	4.01.02.1.01.02 - Fasilitas Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Frekuensi peliputan kegiatan	250 Kali	
56.				10 Publikasi Media Luar Ruang									
					Jumlah media publikasi luar ruang	0,00	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.01.02.1.01 - Pemantauan Pelaksanaan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	4.01.02.1.01.02 - Fasilitas Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Jumlah media publikasi luar ruang	0 Unit	
					Frekuensi publikasi luar ruang	350.000.000,00	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.01.02.1.01 - Pemantauan Pelaksanaan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	4.01.02.1.01.02 - Fasilitas Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Jumlah publikasi luar ruang	500 Kali	
57.				11 Pameran Pembangunan/Bakohumas									
					Jumlah peserta pameran	150.000.000,00	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	4.01.04 - PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM	4.01.04.1.03 - Pelaksanaan Administrasi Pimpinan	4.01.04.1.03.04 - Fasilitas Komunikasi Pimpinan	Jumlah peserta pameran	8 Orang	
58.				12 Publikasi Visi Misi Pemerintah dan Hasil2 Pembangunan									
					Jumlah media cetak atau media promosi lainnya	200.000.000,00	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.01.02.1.01 - Pemantauan Pelaksanaan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	4.01.02.1.01.02 - Fasilitas Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Jumlah media cetak atau media promosi lainnya	3500 Eksemplar	
59.				13 Penerbitan Buletin Kabar Papua									
					Jumlah cetakan buletin	200.000.000,00	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.01.02.1.01 - Pemantauan Pelaksanaan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	4.01.02.1.01.02 - Fasilitas Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Jumlah cetakan buletin	1800 Eksemplar	
60.				14 Kerjasama Media Cetak									
					Jumlah kerjasama	1.000.000.000,00	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.01.02.1.01 - Pemantauan Pelaksanaan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	4.01.02.1.01.02 - Fasilitas Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Jumlah kerjasama	15 Media	
61.				15 Penayangan Iklan dan Advertorial Provinsi Papua di Media Cetak									
					Frekuensi Iklan dan Advertorial di Media	200.000.000,00	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.01.02.1.01 - Pemantauan Pelaksanaan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	4.01.02.1.01.02 - Fasilitas Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Frekuensi Iklan dan Advertorial di Media	8 Kali	
62.				16 Penayangan Siaran Langsung di Media Elektronik									
					Frekuensi Siaran Langsung	150.000.000,00	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.01.02.1.01 - Pemantauan Pelaksanaan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	4.01.02.1.01.02 - Fasilitas Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Frekuensi Siaran Langsung	5 Kali	
63.				17 Kerjasama Media Elektronik									
					Jumlah kerjasama media elektronik	500.000.000,00	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.01.02.1.01 - Pemantauan Pelaksanaan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	4.01.02.1.01.02 - Fasilitas Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Jumlah kerjasama media elektronik	4 Media	
64.				18 Produksi Iklan layanan Masyarakat									
					Jumlah iklan layanan masyarakat yang diproduksi	130.000.000,00	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.01.02.1.01 - Pemantauan Pelaksanaan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	4.01.02.1.01.02 - Fasilitas Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Jumlah iklan layanan masyarakat yang diproduksi	3 Iklan	
65.				19 Penayangan Iklan Layanan masyarakat di media elektronik									
					Frekuensi tayang iklan layanan masyarakat di media elektronik	150.000.000,00	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.01.02.1.01 - Pemantauan Pelaksanaan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	4.01.02.1.01.02 - Fasilitas Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Frekuensi tayang iklan layanan masyarakat di media elektronik	184 Kali	
66.				20 Pengelolaan Analisis Informasi melalui Media Cetak dan Online									
					Jumlah kliping berita	200.000.000,00	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.01.02.1.01 - Pemantauan Pelaksanaan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	4.01.02.1.01.02 - Fasilitas Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Jumlah kliping berita	200 Kliping	
67.				21 Temu Wicara Pimpinan Daerah dengan Publik Melalui Para-para Publik									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Jumlah peserta audiens	200.000.000,00	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.01.02.1.01 - Pemantauan Pelaksanaan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	4.01.02.1.01.02 - Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Jumlah peserta audiens	150 Orang	
						JUMLAH	120.065.304.000,00						

Mengetahui,
Kepala Bappeda Provinsi Papua

JAYAPURA, 20 July 2020
KEPALA BIRO UMUM SETDA PROVINSI PAPUA

YOHANES WALILO, S.Sos, M.Si
NIP. 197007281997121001

EMI ENEMBE, S.IP, M.Si
NIP. 19600705 198603 1 041

**REKAPITULASI PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021
SERTA KETERKAITAN DENGAN HASIL PEMETAAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019**

PROVINSI : Papua

PERANGKAT DAERAH : Biro Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Administrasi Pemerintahan	1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	À Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	1 Penyediaan jasa surat menyurat									
					Jumlah surat yang disediakan	636.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.01 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang terkirim	1000 Surat	
2.				8 Penyediaan jasa kebersihan kantor									
					Luas Gedung dan Halaman yang disediakan jasa kebersihan	0,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.08 - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	jumlah Gedung dan Halaman yang dibersihkan	0 M2	
					Jumlah tenaga kebersihan dan Fasilitas Pendukung kebersihan kantor	180.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.08 - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah tenaga kebersihan	3 Orang	
					Jumlah Jenis Bahan dan Alat Kebersihan	120.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.14 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Bahan dan Alat Kebersihan	10 Jenis	
3.				10 Penyediaan alat tulis kantor									
					Jumlah jenis ATK yang disediakan	1.000.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.10 - Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	24 Jenis	
4.				11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan									
					Jumlah barang cetakan	0,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.11 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan	0 Jenis	
					Jumlah penggandaan	500.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.11 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penggandaan	15000 Lembar	
					Jumlah Jenis Barang Cetak dan yang Disediakan	250.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.11 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Jenis	
					Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	0,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.11 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	0 Bulan	
5.				15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan									
					Jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	150.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.15 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	5 Jenis	
6.				17 Penyediaan makanan dan minuman									
					Pelaksanaan penyediaan makan dan minum	0,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.17 - Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Porsi makan dan minum kegiatan yang tersedia	0 Kegiatan	
					Pelaksanaan makan minum tamu dan rapat	1.500.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.17 - Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Porsi makan dan minum yang tersedia	11000 Kali Tahun	
					Pelaksanaan makan minum saat olah raga (hari Jumat)	0,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.17 - Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Porsi makan dan minum yang tersedia	0 Kali	
					Tersediannya Makanan dan Minuman	0,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.17 - Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Porsi makan dan minum yang tersedia	0 Bulan	
					Jumlah orang yang disediakan makan dan minuman	200.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.17 - Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Porsi makan dan minum yang tersedia	1000 Orang	
7.				18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah									
					Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	2.600.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.18 - Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	100 Orang	

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8.	Administrasi Pemerintahan	1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	À Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	19 Penyediaan Jasa Pengamanan									
					Pelaksanaan pembayaran insentif bagi tenaga operator dan penjaga X-Ray VIP Room Bandara Sentani	0,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.01 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa keamanan/security yang dibayarkan	0 Orang Bulan	
					Pelaksanaan pembayaran honor bagi satpam	288.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.01 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa keamanan/security yang dibayarkan	48 Orang Bulan	
					Pelaksanaan uang makan satpam	0,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.01 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa keamanan/security yang dibayarkan	0 Orang Bulan	
					Jumlah tenaga pengamanan	0,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.01 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa keamanan/security yang dibayarkan	0 Orang	
9.		2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	À Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	5 Pengadaan kendaraan dinas/operasional									
					Jumlah kendaraan yang diadakan	1.500.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.21 - Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda 4	4 Unit	
					Jumlah kendaraan roda 2	0,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.21 - Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda 2	0 Unit	
10.				7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor									
					Jumlah pengadaan perlengkapan	300.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.23 - Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan	10 Unit	
11.				9 Pengadaan peralatan gedung kantor									
					Jumlah peralatan perlengkapan	400.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.25 - Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan/perlengkapan yang diadakan	10 Unit	
12.				10 Pengadaan mebeleur									
					Jumlah mebeleur yang diadakan	350.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.26 - Pengadaan Mebeleur	Jumlah mebeleur yang diadakan untuk 3 UPT	10 Unit	
13.				22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor									
					Jumlah gedung kantor yang dipelihara	0,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.29 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor	0 Unit	
					belanja sewa	250.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.29 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung yang disewa	2 Tahun	
14.				24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional									
					Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	0,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.31 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah dan Jenis perlengkapan/peralatan gedung kantor yang dipelihara	0 Unit	
					Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	300.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.31 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang	8 Unit	
					sewa kendaraan	350.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.31 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan yang diperbaiki/Service	12 Bulan	
15.				26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor									
					Pelaksanaan pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	350.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.27 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Jumlah Rumah Jabatan	1 Kegiatan	
					Jumlah Perlengkapan Gedung kantor yang terpelihara	0,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.33 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung kantor yang dipelihara	0 Unit	
					Tersediannya biaya pemeliharaan gedung kantor	0,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.39 - Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor	0 Bulan	
16.				42 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor									
					Terlaksananya rehabilitasi gedung	600.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.39 - Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Terlaksananya rehabilitasi gedung	200 M2	

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17.	Administrasi Pemerintahan	3 Program peningkatan disiplin aparatur	À Meningkatnya disiplin aparatur	2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya									
					Jumlah pakaian dinas yang diadakan	300.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	4.01.01.1.04.02 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas sipil harian	200 Stell	
18.		5 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	À Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	1 Pendidikan dan pelatihan formal									
					Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	80.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	4.01.01.1.04.09 - Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparatur mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	2 Orang	
19.				2 Sosialisasi peraturan perundang-undangan									
					Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	450.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	4.01.01.1.04.10 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	400 Orang	
20.				3 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan									
					Jumlah peserta bimbingan teknis tentang implementasi peraturan perundang-undangan	450.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	4.01.01.1.04.11 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta bimbingan teknis tentang implementasi peraturan perundang-undangan	400 Orang	
21.				4 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal									
					Jumlah aparatur yang terlatih	3.200.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	4.01.01.1.04.11 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	120 Orang	
22.				11 Pendampingan Pengusaha OAP									
					Jumlah Orang	2.500.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	4.01.01.1.04.11 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang	400 Orang Bulan	
					Jumlah Peserta Forum	0,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	4.01.01.1.04.11 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Forum	0 Orang	
23.		6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	À Meningkatnya kualitas akuntabilitas OPD	1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD									
					Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	30.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.02 - Administrasi Keuangan	4.01.01.1.02.06 - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan	12 Laporan	
					Laporan LAKIP SKPD	0,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.01 - Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.01.01.1.01.05 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan LAKIP SKPD	0 Dokumen	
24.				2 Penyusunan laporan keuangan semesteran									
					Jumlah pelaporan keuangan semesteran yang diselesaikan tepat waktu	15.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.02 - Administrasi Keuangan	4.01.01.1.02.07 - Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Jumlah dokumen laporan	2 Laporan	
25.				3 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran									
					Jumlah pelaporan prognosis realisasi anggaran yang diselesaikan tepat waktu	15.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.02 - Administrasi Keuangan	4.01.01.1.02.08 - Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah pelaporan prognosis realisasi anggaran yang diselesaikan tepat waktu	2 Laporan	
26.				4 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun									
					Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	30.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.02 - Administrasi Keuangan	4.01.01.1.02.09 - Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	1 Laporan	
27.				5 Penyusunan Renja, RKA dan Perubahan APBD									
					Jumlah dokumen	30.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.01 - Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.01.01.1.01.01 - Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	3 Dokumen	

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28.	Administrasi Pemerintahan	6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	A Meningkatkan kualitas akuntabilitas OPD	12 Penyusunan RENSTRA									
					Jumlah Dokumen	0,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.01 - Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.01.01.1.01.01 - Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	0 Dokumen	
29.		57 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase ASN peserta diklat teknis fungsional yang lulus dengan Predikat Memuaskan; Terlaksananya peningkatan kompetensi teknis/fungsional aparatur melalui pembinaan dan pengembangan	110 Pendampingan hukum dan sanggah									
					Terlaksananya Pendampingan Hukum dan Sanggah	0,00						0 Bulan	
30.				111 Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa									
					terlaksananya monitoring dan evaluasi pengadaan barang dan jasa pemerintahan	0,00						0 Bulan	
31.				112 Peningkatan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa									
					Terlaksananya Pengadaan Barang jasa yang transparan	0,00						0 Bulan	
32.		115 Program peningkatan kapasitas kelembagaan barang dan jasa	Cakupan pengadaan barang dan jasa melalui ULP; Koordinasi	1 Peningkatan pelayanan Pengadaan barang dan jasa									
					jumlah user barang dan jasa yang terlayani	5.000.000.000,00	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	4.01.03.1.02 - Pengadaan Barang dan Jasa	4.01.03.1.02.02 - Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	jumlah user barang dan jasa yang terlayani	35 Unit	
33.				2 peningkatan pelayanan pengadaan jasa konstruksi dan konsultasi									
					jumlah user jasa konstruksi dan konsultasi yang terlayani	26.500.000.000,00	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	4.01.03.1.02 - Pengadaan Barang dan Jasa	4.01.03.1.02.02 - Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	jumlah user jasa konstruksi dan konsultasi yang terlayani	35 Unit	
34.				3 Pendampingan hukum dan sanggah									
					jumlah masalah hukum yang didampingi	1.500.000.000,00	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	4.01.03.1.02 - Pengadaan Barang dan Jasa	4.01.03.1.02.08 - Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	jumlah masalah hukum yang didampingi	12 Laporan	
35.				4 Penyusunan peraturan tentang kode etik dan majelis etik dalam penyelenggaraan pengadaan									
					Jumlah Peraturan	500.000.000,00	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	4.01.03.1.02 - Pengadaan Barang dan Jasa	4.01.03.1.02.02 - Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Peraturan	1 Peraturan	
36.				5 Monitoring dan evaluasi (MONEV) Pengadaan barang/Jasa									
					Jumlah Monitoring yang dilaksanakan	1.500.000.000,00	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	4.01.03.1.02 - Pengadaan Barang dan Jasa	4.01.03.1.02.03 - Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Monitoring yang dilaksanakan	29 Lokasi	
37.				6 Pendampingan perencanaan pengadaan									
					Jumlah dokumen perencanaan yang dihasilkan	1.500.000.000,00	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	4.01.03.1.02 - Pengadaan Barang dan Jasa	4.01.03.1.02.08 - Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah dokumen perencanaan yang dihasilkan	35 Dokumen	
38.				7 Klinik pengadaan barang/jasa									
					jumlah konsultasi	500.000.000,00	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	4.01.03.1.02 - Pengadaan Barang dan Jasa	4.01.03.1.02.08 - Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	jumlah konsultasi	60 Kali	
39.				8 Pembinaan UKPBJ									
					Jumlah UKPBJ yang dibina	1.500.000.000,00	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	4.01.03.1.02 - Pengadaan Barang dan Jasa	4.01.03.1.02.07 - Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah UKPBJ yang dibina	29 Unit	
40.				10 Peningkatan Kapasitas LPSE									
					Jumlah Aparatur LPSE yang ditingkatkan	3.000.000.000,00	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	4.01.03.1.02 - Pengadaan Barang dan Jasa	4.01.03.1.02.04 - Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Aparatur LPSE yang ditingkatkan	25 Orang	

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41.	Administrasi Pemerintahan	115 Program peningkatan kapasitas kelembagaan barang dan jasa	Cakupan pengadaan barang dan jasa melalui ULP; Koordinasi	11 Pengembangan Registrasi dan Verifikasi Pengguna SPSE									
					Jumlah Perusahaan Pengguna SPSE yang Teregistrasi dan Terverifikasi	500.000.000,00	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	4.01.03.1.02 - Pengadaan Barang dan Jasa	4.01.03.1.02.04 - Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Perusahaan Pengguna SPSE yang Teregistrasi dan Terverifikasi	3500 Perusahaan	
42.				12 Pelaksanaan Administrasi Sistem Elektronik									
					Jumlah SKPD Pengguna SPSE yang terlayani	500.000.000,00	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	4.01.03.1.02 - Pengadaan Barang dan Jasa	4.01.03.1.02.05 - Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah SKPD Pengguna SPSE yang terlayani	35 SKPD	
43.				13 Pelatihan Pengisian Sistem Rencana Umum Pengadaan (SiRUP)									
					Jumlah Orang yang dilatih	300.000.000,00	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	4.01.03.1.02 - Pengadaan Barang dan Jasa	4.01.03.1.02.05 - Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang dilatih	35 Orang	
JUMLAH						61.724.000.000,00							

Mengetahui,
Kepala Bappeda Provinsi Papua

YOHANES WALILO, S.Sos, M.Si
NIP. 197007281997121001

JAYAPURA, 20 July 2020
Kepala Biro Layanan Pengadaan Barang dan Jasa

YOREM B. WANIMBO, SPi., MM
NIP. 19700118 199203 1 006

**REKAPITULASI PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021
SERTA KETERKAITAN DENGAN HASIL PEMETAAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019**

PROVINSI : Papua

PERANGKAT DAERAH : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Administrasi Pemerintahan	1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	À Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	1 Penyediaan jasa surat menyurat									
					Jumlah surat yang disediakan	300.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.01 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang terkirim	150 Surat	
2.				2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik									
					Jumlah Jasa Layanan berlangganan Listrik, Air, Telepon, Transponder	2.737.460.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Layanan	12 Layanan	
3.				3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor									
					Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	0,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.03 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	0 Unit	
4.				4 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS									
5.				6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional									
					Jumlah Unit Mobil Dinas/Operasional yang terpelihara dan Terfasilitasi Perijinannya	171.325.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.06 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Unit Mobil Dinas/Operasional yang diservis dan dipelihara	85 Unit	
6.				7 Penyediaan jasa administrasi keuangan									
					Jumlah Honor yang dibayarkan	1.750.086.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.07 - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pegawai yang membuat laporan	45 Orang	
7.				8 Penyediaan jasa kebersihan kantor									
					Luas Gedung dan Halaman yang disediakan jasa kebersihan	0,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.08 - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	jumlah Gedung dan Halaman yang dibersihkan	45969 M2	
					Jumlah tenaga kebersihan dan Fasilitas Pendukung kebersihan kantor	2.500.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.08 - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah tenaga kebersihan	47 Orang	
					Jumlah Jenis Bahan dan Alat Kebersihan	1.600.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.14 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Bahan dan Alat Kebersihan	45 Jenis	
8.				9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja									
					Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	0,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.09 - Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	0 Unit	
9.				10 Penyediaan alat tulis kantor									
					Jumlah jenis ATK yang disediakan	2.625.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.10 - Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	45 Jenis	
10.				11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Jumlah barang cetakan	0,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.11 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan	1300 Jenis	
					Jumlah penggandaan	1.953.477.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.11 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penggandaan	18000 Lembar	
					Jumlah Jenis Barang Cetak dan yang Disediakan	0,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.11 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0 Jenis	
					Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	0,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.11 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	0 Bulan	
11.				12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor									
					Jumlah Komponen Listrik yang disediakan	340.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.12 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen alat pemeliharaan listrik dan genset yang disediakan	35 Buah	
12.				13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor									
					Jumlah peralatan dan Perlengkapan	0,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.25 - Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah penggandaan peralatan kantor yang disediakan	12 Unit	
13.				14 Penyediaan peralatan rumah tangga									
					Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	540.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.14 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	100 Unit	
14.				15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan									
					Jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	505.296.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.15 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1020 Jenis	
15.				16 Penyediaan bahan logistik kantor									
					Jumlah liter bahan bakar untuk kendaraan operasional	1.930.500.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.16 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah liter bahan bakar untuk kendaraan operasional	16000 Liter	
					jumlah mobilitas termasuk tenaga angkat dan turun beras ke kantor	0,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.16 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah Pembelian Air Galon	12 Kali	
16.				17 Penyediaan makanan dan minuman									
					Pelaksanaan penyediaan makan dan minum	9.534.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.17 - Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Porsi makan dan minum kegiatan yang tersedia	2801 Kegiatan	
					Pelaksanaan makan minum tamu dan rapat	0,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.17 - Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Porsi makan dan minum yang tersedia	85 Kali Tahun	
					Pelaksanaan makan minum saat olah raga (hari Jumat)	0,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.17 - Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Porsi makan dan minum yang tersedia	52 Kali	
					Tersediannya Makanan dan Minuman	0,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.17 - Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Porsi makan dan minum yang tersedia	12 Bulan	
					Jumlah orang yang disediakan makan dan minuman	0,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.17 - Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Porsi makan dan minum yang tersedia	500 Orang	
17.				18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah									
					Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	6.517.362.500,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.18 - Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	112 Orang	
18.				19 Penyediaan Jasa Pengamanan									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Pelaksanaan pembayaran insentif bagi tenaga operator dan penjaga X-Ray VIP Room Bandara Sentani	0,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.01 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa keamanan/security yang dibayarkan	0 Orang Bulan	
					Pelaksanaan pembayaran honor bagi satpam	0,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.01 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa keamanan/security yang dibayarkan	45 Orang Bulan	
					Pelaksanaan uang makan satpam	0,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.01 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa keamanan/security yang dibayarkan	45 Orang Bulan	
					Jumlah tenaga pengamanan	3.131.034.700,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.01 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa keamanan/security yang dibayarkan	45 Orang	
19.				20 Pembuatan Aplikasi e-Surat									
					Jumlah sistem informasi	0,00						0 Aplikasi	
20.		2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	À Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	1 Pembangunan rumah jabatan									
					Luas bangunan yang dibangun	0,00						0 M2	
21.				2 Pembangunan rumah dinas									
					Terbangunnya rumah dinas	11.004.400.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.38 - Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas	Terbangunnya rumah dinas	3 Unit	
22.				3 Pembangunan gedung kantor									
					Luas bangunan yang dibangun	5.000.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.39 - Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Luas bangunan yang dibangun	2801 M2	
					Tersedianya desain perencanaan bangunan	0,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.39 - Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Tersedianya desain perencanaan bangunan	0 Dokumen	
23.				6 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas									
					Jumlah perlengkapan rumah jabatan	3.944.888.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.24 - Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah Pengadaan Peralatan	119 Unit	
24.				7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor									
					Jumlah pengadaan perlengkapan	4.500.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.23 - Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan	30 Unit	
25.				8 Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas									
26.				9 Pengadaan peralatan gedung kantor									
					Jumlah peralatan perlengkapan	2.251.400.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.25 - Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan/perlengkapan yang diadakan	50 Unit	
27.				10 Pengadaan mebeleur									
					Jumlah mebeleur yang diadakan	3.251.400.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.26 - Pengadaan Mebeleur	Jumlah mebeleur yang diadakan untuk 3 UPT	152 Unit	
28.				20 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan									
					Jumlah rumah jabatan yg terpelihara	5.000.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.37 - Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan	Jumlah rumah jabatan yg terpelihara	5 Unit Tahun	
29.				22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor									
					Jumlah gedung kantor yang dipelihara	2.588.400.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.29 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor	2 Unit	
					belanja sewa	0,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.29 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung yang disewa	0 Tahun	
30.				24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	1.336.600.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.31 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah dan Jenis perlengkapan/peralatan gedung kantor yang dipelihara	60 Unit	
					Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	0,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.31 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang	55 Unit	
					sewa kendaraan	0,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.31 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan yang diperbaiki/Service	12 Bulan	
31.				26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor									
					Pelaksanaan pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	1.600.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.27 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Jumlah Rumah Jabatan	12 Kegiatan	
					Jumlah Perlengkapan Gedung kantor yang terpelihara	0,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.33 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung kantor yang dipelihara	9 Unit	
					Tersediannya biaya pemeliharaan gedung kantor	0,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.39 - Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor	12 Bulan	
32.				28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor									
					Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	540.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.35 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	4 Unit	
33.				30 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor									
					Luas bangunan yang direhab	0,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.39 - Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Jumlah bangunan yang direhab	0 M2	
34.				40 Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan									
35.				41 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas									
					Luas bangunan yang direhab	0,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.38 - Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas	Luas bangunan yang direhab	0 M2	
36.				42 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor									
					Terlaksananya rehabilitasi gedung	0,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.39 - Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Terlaksananya rehabilitasi gedung	0 M2	
37.				44 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional									
38.				46 Sewa gedung									
					Jumlah gedung kantor yang disewa	0,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.27 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Jumlah rumah jabatan yang terpelihara	0 Unit Tahun	
					Sewa rumah jabatan	0,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.27 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Jumlah Rumah Jabatan Yang disewa	0 Unit Tahun	
39.				51 Pembebasan Lahan Gedung Kantor									
					Luas lahan yang dibebaskan	0,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.39 - Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Luas lahan yang dibebaskan	0 Ha	
40.		3 Program peningkatan disiplin aparatur	À Meningkatnya disiplin aparatur	2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya									
					Jumlah pakaian dinas yang diadakan	1.678.500.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	4.01.01.1.04.02 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas sipil harian	250 Stel	
41.				3 Pengadaan pakaian kerja lapangan									
					Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan	0,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	4.01.01.1.04.03 - Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan	0 Stel	
42.				4 Pengadaan pakaian KORPRI									
					jumlah pakaian KORPRI yang diadakan	0,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	4.01.01.1.04.04 - Pengadaan Pakaian Korpri	Jumlah pakaian KORPRI yang diadakan	0 Stel	

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
43.	Administrasi Pemerintahan	3 Program peningkatan disiplin aparatur	À Meningkatnya disiplin aparatur	5 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu									
					Jumlah pakaian khusus yang diadakan	1.422.500.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	4.01.01.1.04.05 - Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah pakaian Batik yang diadakan	250 Stel	
44.		5 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	À Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	1 Pendidikan dan pelatihan formal									
					Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	130.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	4.01.01.1.04.09 - Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparatur mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	5 Orang	
45.				2 Sosialisasi peraturan perundang-undangan									
					Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	593.500.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	4.01.01.1.04.10 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	25 Orang	
46.				3 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan									
					Jumlah peserta bimbingan teknis tentang implementasi peraturan perundang-undangan	650.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	4.01.01.1.04.11 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta bimbingan teknis tentang implementasi peraturan perundang-undangan	35 Orang	
47.				4 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal									
					Jumlah aparatur yang terlatih	2.559.750.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	4.01.01.1.04.11 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	125 Orang	
48.		6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	À Meningkatnya kualitas akuntabilitas OPD	1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD									
					Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	5.211.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.02 - Administrasi Keuangan	4.01.01.1.02.06 - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan	12 Laporan	
					Laporan LAKIP SKPD	0,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.01 - Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.01.01.1.01.05 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan LAKIP SKPD	0 Dokumen	
49.				2 Penyusunan laporan keuangan semesteran									
					Jumlah pelaporan keuangan semesteran yang diselesaikan tepat waktu	406.800.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.02 - Administrasi Keuangan	4.01.01.1.02.07 - Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Jumlah dokumen laporan	6 Laporan	
50.				3 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran									
					Jumlah pelaporan prognosis realisasi anggaran yang diselesaikan tepat waktu	150.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.02 - Administrasi Keuangan	4.01.01.1.02.08 - Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah pelaporan prognosis realisasi anggaran yang diselesaikan tepat waktu	12 Laporan	
51.				4 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun									
					Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	316.700.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.02 - Administrasi Keuangan	4.01.01.1.02.09 - Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	12 Laporan	
52.				5 Penyusunan Renja, RKA dan Perubahan APBD									
					Jumlah dokumen	2.216.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.01 - Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.01.01.1.01.01 - Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	6 Dokumen	
53.				12 Penyusunan RENSTRA									
					Jumlah Dokumen	115.600.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.01 - Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.01.01.1.01.01 - Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	5 Dokumen	
54.				13 Penyusunan SOP									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Jumlah Dokumen	350.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.01 - Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.01.01.1.01.04 - Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	10 Dokumen	
55.				14 Peningkatan Kapasitas PPID									
					Jumlah orang	440.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	4.01.01.1.04.09 - Pendidikan dan Pelatihan Formal	Pembinaan Administrasi Kepegawaian	35 Orang	
56.				15 Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM)									
					Jumlah Dokumen yang disusun	152.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.01 - Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.01.01.1.01.05 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen yang disusun	16 Dokumen	
57.		15 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Jumlah Perdasi dan Perdasus yang ditetapkan; Pembahasan APBD Tepat Waktu sesuai dengan jadwal yang ditetapkan ; Persentase Raperda yang ditindaklanjuti dalam rapat paripurna; Persentase penetapan perdasi dan perdasus berdasarkan prolegda; Tingkat kehadiran Anggota dewan	1 Pembahasan rancangan peraturan daerah									
					Jumlah Perda yang dihasilkan	6.408.713.200,00	4.02 - SEKRETARIAT DPRD	4.02.03 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	4.02.03.1.01 - Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	4.02.03.1.01.02 - Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Perda yang dihasilkan	15 Produk	
58.				2 Hearing/dialog dan koordinasi Pimpinan DPRD dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama									
					Terlaksananya hearing/dialog dan koordinasi Pimpinan dengan masyarakat/ tokoh agama	18.596.000.000,00	4.02 - SEKRETARIAT DPRD	4.02.04 - PROGRAM SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPIA **)	4.02.04.1.01 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah (**)	4.02.04.1.01.01 - Dialog Dan Koordinasi Pimpinan DPRD dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama **)	Terlaksananya hearing/dialog dan koordinasi Pimpinan dengan masyarakat/ tokoh agama	175 Kegiatan	
59.				3 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan									
					Terlaksananya fasilitasi rapat-rapat alat kelengkapan dewan	17.200.000.000,00	4.02 - SEKRETARIAT DPRD	4.02.02 - PROGRAM LAYANAN DAN ADMINISTRASI KEUANGAN	4.02.02.1.01 - Layanan Administrasi DPRD	4.02.02.1.01.03 - Penyediaan Fasilitasi Fraksi DPRD	Terlaksananya fasilitasi rapat-rapat alat kelengkapan dewan	500 Kali	
60.				4 Rapat-rapat paripurna									
					Terlaksananya rapat paripurna penetapan DPRD	8.443.280.000,00	4.02 - SEKRETARIAT DPRD	4.02.02 - PROGRAM LAYANAN DAN ADMINISTRASI KEUANGAN	4.02.02.1.01 - Layanan Administrasi DPRD	4.02.02.1.01.02 - Fasilitasi Rapat DPRD	Terlaksananya rapat paripurna penetapan DPRD	8 Kali	
61.				5 Kegiatan reses									
					Terlaksananya kegiatan Reses Anggota DPRD	33.129.000.000,00	4.02 - SEKRETARIAT DPRD	4.02.03 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	4.02.03.1.05 - Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	4.02.03.1.05.03 - Pelaksanaan Reses	Terlaksananya kegiatan Reses Anggota DPRD	3 Kali	
62.				6 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah									
					Terlaksananya kunjungan kerja dalam daerah	30.250.000.000,00	4.02 - SEKRETARIAT DPRD	4.02.03 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	4.02.03.1.05 - Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	4.02.03.1.05.01 - Kunjungan Kerja dalam Daerah	Terlaksananya kunjungan kerja dalam daerah	69 Orang	
63.				7 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD									
					Terlaksananya keikutsertaan Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Seminar, Sosialisasi, studi banding	13.340.400.000,00	4.02 - SEKRETARIAT DPRD	4.02.03 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	4.02.03.1.04 - Peningkatan Kapasitas DPRD	4.02.03.1.04.02 - Bimbingan Teknis DPRD	Terlaksananya keikutsertaan Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Seminar, Sosialisasi, studi banding	11 Kali Tahun	
64.				9 Peningkatan Peran dan Fungsi Pengawasan PERDASI/ PERDASUS Provinsi Papua									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Terlaksananya fungsi pengawasan PERDASI/PERDASUS	49.980.000.000,00	4.02 - SEKRETARIAT DPRD	4.02.03 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	4.02.03.1.03 - Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	4.02.03.1.03.01 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Terlaksananya fungsi pengawasan PERDASI/PERDASUS	12 Kali	
65.				10 Hearing/ dialog dan Koordinasi Anggota DPRP dengan Pejabat Pemerintah daerah dan Tokoh masyarakat/ Tokoh Agama									
					Terlaksananya hearing/dialog dan koordinasi Anggota DPRP dengan Tokoh Masyarakat/Tokoh Adat	39.600.000.000,00	4.02 - SEKRETARIAT DPRD	4.02.04 - PROGRAM SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPIA **)	4.02.04.1.01 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah **)	4.02.04.1.01.01 - Dialog Dan Koordinasi Pimpinan DPRD dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama **)	Terlaksananya hearing/dialog dan koordinasi Anggota DPRP dengan Tokoh Masyarakat/Tokoh Adat	100 Kali Tahun	
66.				11 Pelayanan Formal Pimpinan dan Anggota DPR Papua									
					Tersedianya pelayanan formal Pimpinan dan Anggota DPRP	41.250.000.000,00	4.02 - SEKRETARIAT DPRD	4.02.03 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	4.02.03.1.04 - Peningkatan Kapasitas DPRD	4.02.03.1.04.06 - Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Tersedianya pelayanan formal Pimpinan dan Anggota DPRP	4 Kali Tahun	
67.				14 Publikasi Kinerja Pimpinan dan Anggota DPR Papua									
					Tersedianya publikasi kinerja Pimpinan dan Anggota DPR Papua	3.083.750.000,00	4.02 - SEKRETARIAT DPRD	4.02.03 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	4.02.03.1.04 - Peningkatan Kapasitas DPRD	4.02.03.1.04.03 - Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Tersedianya publikasi kinerja Pimpinan dan Anggota DPR Papua	12 Bulan	
68.				15 Rapat - Rapat Koordinasi Pimpinan dan Anggota DPR Papua									
					Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	30.772.700.000,00	4.02 - SEKRETARIAT DPRD	4.02.03 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	4.02.03.1.08 - Fasilitas Tugasi Pimpinan DPRD	4.02.03.1.08.01 - Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	12 Kali	
69.				16 Peningkatan Peran dan Fungsi Serta Kinerja Kinerja Alat - Alat Kelengkapan Dewan									
					Meningkatnya peran dan fungsi serta kinerja Alat - alat Kelengkapan Dewan	26.464.579.000,00	4.02 - SEKRETARIAT DPRD	4.02.03 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	4.02.03.1.04 - Peningkatan Kapasitas DPRD	4.02.03.1.04.06 - Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Meningkatnya peran dan fungsi serta kinerja Alat - alat Kelengkapan Dewan	69 Orang	
70.				17 Sosialisasi PERDASI/ PERDASUS dan Peraturan Perundang - undangan									
71.				19 Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Papua									
					Terwujudnya tingkat kesejahteraan masyarakat Papua	3.255.000.000,00						10 Kegiatan	
72.				21 Pelayanan Medical Check Up Pimpinan dan Anggota DPRP									
					Tersedianya Pelayanan Medical Check Up bagi Pimpinan dan Anggota DPR Papua	690.000.000,00	4.02 - SEKRETARIAT DPRD	4.02.02 - PROGRAM LAYANAN DAN ADMINISTRASI KEUANGAN	4.02.02.1.02 - Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	4.02.02.1.02.03 - Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Tersedianya Pelayanan Medical Check Up bagi Pimpinan dan Anggota DPR Papua	69 Orang	
73.				23 Publik Hearing Rancangan Peraturan Perundang-Undangan									
					Terlaksananya kegiatan Publik Hearing Rancangan Peraturan Perundang - undangan kepada masyarakat	24.074.400.000,00	4.02 - SEKRETARIAT DPRD	4.02.03 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	4.02.03.1.04 - Peningkatan Kapasitas DPRD	4.02.03.1.04.06 - Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Terlaksananya kegiatan Publik Hearing Rancangan Peraturan Perundang - undangan kepada masyarakat	1500 Kegiatan	
74.				86 Pembahasan LKPJ dan Rencana Kerja Tahunan									
					Terlaksananya Pembahasan LKPJ dan Tersusunnya Rencana Kerja Tahunan	2.404.000.000,00	4.02 - SEKRETARIAT DPRD	4.02.04 - PROGRAM SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPIA **)	4.02.04.1.01 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah **)	4.02.04.1.01.02 - Penyusunan LKPJ dan Rencana Kerja **)	Terlaksananya Pembahasan LKPJ dan Tersusunnya Rencana Kerja Tahunan	2 Kegiatan	
75.				88 Pengawasan Persiapan PON XX Tahun 2020									
					Terlaksananya Pengawasan Persiapan PON XX Tahun 2020	2.484.000.000,00	4.02 - SEKRETARIAT DPRD	4.02.03 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	4.02.03.1.03 - Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	4.02.03.1.03.02 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Terlaksananya Pengawasan Persiapan PON XX Tahun 2020	12 Kegiatan	

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
76.	Administrasi Pemerintahan	15 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Jumlah Perdasi dan Perdasus yang ditetapkan; Pembahasan APBD Tepat Waktu sesuai dengan jadwal yang ditetapkan ; Persentase Raperda yang ditindaklanjuti dalam rapat paripurna; Persentase penetapan perdasi dan perdasus berdasarkan prolegda; Tingkat kehadiran Anggota dewan	89 Pembahasan Rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja(APBD), perubahan APBD dan pertanggung jawaban APBD									
					Jumlah Rapat yang diadakan	12.375.652.800,00	4.02 - SEKRETARIAT DPRD	4.02.03 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	4.02.03.1.02 - Pembahasan Kebijakan Anggaran	4.02.03.1.02.06 - Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Rapat yang diadakan	40 Kegiatan	
77.				91 Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan Peraturan serta Kebijakan Lainnya									
					Terlaksananya kegiatan Monitoring, Evaluasi, Pengawasan dan Peraturan serta kegiatan lainnya	9.290.400.000,00	4.02 - SEKRETARIAT DPRD	4.02.02 - PROGRAM LAYANAN DAN ADMINISTRASI KEUANGAN	4.02.02.1.01 - Layanan Administrasi DPRD	4.02.02.1.01.07 - Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan Lain Yang Terkait dengan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya kegiatan Monitoring, Evaluasi, Pengawasan dan Peraturan serta kegiatan lainnya	12 Kegiatan	
78.				93 Pembekalan Anggota DPR Papua Kursi Otonomi Khusus									
					Jumlah Anggota yang mengikuti Pembekalan	0,00						0 Orang	
79.				94 Rapat Forum Komunikasi Sekretaris DPRD se Indonesia									
					Jumlah Peserta yang mengikuti Forkom	3.073.425.000,00	4.02 - SEKRETARIAT DPRD	4.02.03 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	4.02.03.1.08 - Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	4.02.03.1.08.01 - Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Peserta yang mengikuti Forkom	150 Orang	
80.				99 Rapat ADPSI dan Rapat Forum Komunikasi Sekretaris DPRD Se Indonesia									
					Jumlah Peserta	0,00						0 Orang	
JUMLAH						469.860.279.200,00							

Mengetahui,
Kepala Bappeda Provinsi Papua

YOHANES WALILO, S.Sos, M.Si
NIP. 197007281997121001

JAYAPURA, 20 July 2020
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA

Dr. JULIANA J. WAROMI, SE., M.Si
NIP. 19660314 198603 2 017

**REKAPITULASI PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021
SERTA KETERKAITAN DENGAN HASIL PEMETAAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019**

PROVINSI : Papua

PERANGKAT DAERAH : Badan Penghubung Daerah

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Administrasi Pemerintahan	1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	À Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	1 Penyediaan jasa surat menyurat									
					Jumlah surat yang disediakan	970.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.01 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang terkirim	500 Surat	
2.				2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik									
					Jumlah Jasa Layanan berlangganan Listrik, Air, Telepon, Transponder	1.500.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Layanan	12 Layanan	
3.				8 Penyediaan jasa kebersihan kantor									
					Luas Gedung dan Halaman yang disediakan jasa kebersihan	0,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.08 - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	jumlah Gedung dan Halaman yang dibersihkan	0 M2	
					Jumlah tenaga kebersihan dan Fasilitas Pendukung kebersihan kantor	585.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.08 - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah tenaga kebersihan	15 Orang	
					Jumlah Jenis Bahan dan Alat Kebersihan	0,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.14 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Bahan dan Alat Kebersihan	0 Jenis	
4.				9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja									
					Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	159.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.09 - Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	90 Unit	
5.				10 Penyediaan alat tulis kantor									
					Jumlah jenis ATK yang disediakan	250.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.10 - Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	90 Jenis	
6.				11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan									
					Jumlah barang cetakan	0,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.11 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan	0 Jenis	
					Jumlah penggandaan	0,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.11 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penggandaan	0 Lembar	
					Jumlah Jenis Barang Cetak dan yang Disediakan	0,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.11 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0 Jenis	
					Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	250.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.11 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	12 Bulan	
7.				12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor									
					Jumlah Komponen Listrik yang disediakan	50.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.12 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen alat pemeliharaan listrik dan genset yang disediakan	90 Buah	
8.				13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor									
					Jumlah peralatan dan Perlengkapan	50.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.25 - Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan peralatan kantor yang disediakan	30 Unit	
9.				17 Penyediaan makanan dan minuman									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Pelaksanaan penyediaan makan dan minum	100.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.17 - Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Porsi makan dan minum kegiatan yang tersedia	2 Kegiatan	
					Pelaksanaan makan minum tamu dan rapat	100.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.17 - Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Porsi makan dan minum yang tersedia	48 Kali Tahun	
					Pelaksanaan makan minum saat olah raga (hari Jumat)	50.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.17 - Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Porsi makan dan minum yang tersedia	48 Kali	
					Tersediannya Makanan dan Minuman	100.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.17 - Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Porsi makan dan minum yang tersedia	12 Bulan	
					Jumlah orang yang disediakan makan dan minuman	50.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.17 - Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Porsi makan dan minum yang tersedia	60 Orang	
10.				18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah									
					Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	2.274.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.18 - Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	325 Orang	
11.				19 Penyediaan Jasa Pengamanan									
					Pelaksanaan pembayaran insentif bagi tenaga operator dan penjaga X-Ray VIP Room Bandara Sentani	0,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.01 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa keamanan/security yang dibayarkan	0 Orang Bulan	
					Pelaksanaan pembayaran honor bagi satpam	0,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.01 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa keamanan/security yang dibayarkan	0 Orang Bulan	
					Pelaksanaan uang makan satpam	0,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.01 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa keamanan/security yang dibayarkan	0 Orang Bulan	
					Jumlah tenaga pengamanan	156.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.01 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa keamanan/security yang dibayarkan	4 Orang	
12.		2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	À Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	4 Pengadaan mobil jabatan									
					Jumlah mobil yang diadakan	0,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.20 - Pengadaan Mobil Jabatan	Jumlah mobil yang diadakan	1 Unit	
13.				5 Pengadaan kendaraan dinas/operasional									
					Jumlah kendaraan yang diadakan	0,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.21 - Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda 4	2 Unit	
					Jumlah kendaraan roda 2	0,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.21 - Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda 2	2 Unit	
14.				7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor									
					Jumlah pengadaan perlengkapan	50.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.23 - Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan	10 Unit	
15.				9 Pengadaan peralatan gedung kantor									
					Jumlah peralatan perlengkapan	270.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.25 - Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan/perlengkapan yang diadakan	10 Unit	
16.				10 Pengadaan mebeleur									
					Jumlah mebeleur yang diadakan	150.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.26 - Pengadaan Mebeleur	Jumlah mebeleur yang diadakan untuk 3 UPT	5 Unit	
17.				22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor									
					Jumlah gedung kantor yang dipelihara	200.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.29 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor	4 Unit	
					belanja sewa	0,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.29 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung yang disewa	0 Tahun	
18.				23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	100.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.30 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	2 Unit	
19.				24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional									
					Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	0,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.31 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah dan Jenis perlengkapan/peralatan gedung kantor yang dipelihara	0 Unit	
					Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	250.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.31 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang	19 Unit	
					sewa kendaraan	0,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.31 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan yang diperbaiki/Service	0 Bulan	
20.				28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor									
					Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	125.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.35 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	15 Unit	
21.				30 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor									
					Luas bangunan yang direhab	1.000.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.39 - Rehabilitasi Sederhana/Berat Rumah Gedung Kantor	Jumlah bangunan yang direhab	1000 M2	
22.		3 Program peningkatan disiplin aparatur	À Meningkatnya disiplin aparatur	2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya									
					Jumlah pakaian dinas yang diadakan	51.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	4.01.01.1.04.02 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas sipil harian	60 Stell	
23.				4 Pengadaan pakaian KORPRI									
					jumlah pakaian KORPRI yang diadakan	0,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	4.01.01.1.04.04 - Pengadaan Pakaian Korpri	Jumlah pakaian KORPRI yang diadakan	38 Stell	
24.				5 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu									
					Jumlah pakaian khusus yang diadakan	60.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	4.01.01.1.04.05 - Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah pakaian Batik yang diadakan	100 Stell	
25.		5 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	À Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	1 Pendidikan dan pelatihan formal									
					Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	100.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	4.01.01.1.04.09 - Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparatur mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	10 Orang	
26.				4 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal									
					Jumlah aparatur yang terlatih	200.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	4.01.01.1.04.11 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	38 Orang	
27.		6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	À Meningkatnya kualitas akuntabilitas OPD	1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD									
					Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	15.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.02 - Administrasi Keuangan	4.01.01.1.02.06 - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan	2 Laporan	
					Laporan LAKIP SKPD	0,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.01 - Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.01.01.1.01.05 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan LAKIP SKPD	0 Dokumen	
28.				2 Penyusunan laporan keuangan semesteran									
					Jumlah pelaporan keuangan semesteran yang diselesaikan tepat waktu	15.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.02 - Administrasi Keuangan	4.01.01.1.02.07 - Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Jumlah dokumen laporan	2 Laporan	
29.				3 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Jumlah pelaporan prognosis realisasi anggaran yang diselesaikan tepat waktu	30.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.02 - Administrasi Keuangan	4.01.01.1.02.08 - Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah pelaporan prognosis realisasi anggaran yang diselesaikan tepat waktu	1 Laporan	
30.				4 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun									
					Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	15.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.02 - Administrasi Keuangan	4.01.01.1.02.09 - Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	2 Laporan	
31.				5 Penyusunan Renja, RKA dan Perubahan APBD									
					Jumlah dokumen	30.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.01 - Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.01.01.1.01.01 - Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	1 Dokumen	
32.		16 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	Cakupan pelayanan Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan	6 Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya									
					Jumlah Kunjungan Kedinasan Kepala Daerah ke Jakarta	500.000.000,00	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	4.01.04 - PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM	4.01.04.1.03 - Pelaksanaan Administrasi Pimpinan	4.01.04.1.03.04 - Fasilitas Komunikasi Pimpinan	Jumlah Kunjungan Kedinasan Kepala Daerah ke Jakarta	12 Bulan	
33.		57 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase ASN peserta diklat teknis fungsional yang lulus dengan Predikat Memuaskan; Terlaksananya peningkatan kompetensi teknis/fungsional aparatur melalui pembinaan dan pengembangan	13 Pengembangan kualitas SDM Aparatur									
					Jumlah peserta mengikuti diklat	250.000.000,00	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	4.01.03.1.02 - Pengadaan Barang dan Jasa	4.01.03.1.02.08 - Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah peserta mengikuti bimbingan teknis	38 Orang	
34.				34 Diklat Bahasa Inggris bagi Aparatur									
					Jumlah peserta mengikuti diklat	0,00	5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	5.04.02.1.01 - Pengembangan Kompetensi Teknis	5.04.02.1.01.03 - Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah peserta mengikuti diklat	0 Orang	
					Jumlah peserta mengikuti diklat BAHASA asing	0,00	5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	5.04.02.1.01 - Pengembangan Kompetensi Teknis	5.04.02.1.01.03 - Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah peserta mengikuti diklat BAHASA asing	38 Orang	
35.				89 Diklat Pengelolaan Aset Daerah									
					Jumlah peserta mengikuti diklat	0,00	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	4.01.04 - PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM	4.01.04.1.02 - Pelaksanaan Administrasi Umum	4.01.04.1.02.05 - Pengelolaan Akuntansi dan Penatausahaan Aset	Jumlah peserta mengikuti diklat	15 Orang	
36.				99 Diklat Perencanaan dan Penganggaran									
					Jumlah peserta mengikuti diklat	0,00	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	4.01.04 - PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM	4.01.04.1.03 - Pelaksanaan Administrasi Pimpinan	4.01.04.1.03.01 - Perencanaan dan Pelaporan Tugas	Jumlah peserta mengikuti diklat	15 Orang	
37.		61 Program Pengembangan Penataan dan Pentas Anjungan	Persentase peningkatan jumlah pengunjung Pentas Anjungan Papua	1 Promosi Budaya 5 Wilayah Adat Papua ditingkat Nasional/Internasional									
					Jumlah media promosi yang disediakan	0,00	5.06 - PENGHUBUNG	5.06.02 - PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	5.06.02.1.01 - Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	5.06.02.1.01.03 - Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Jumlah media promosi yang disediakan	0 Media	
					Frekuensi penyelenggaraan event promosi budaya	250.000.000,00	5.06 - PENGHUBUNG	5.06.02 - PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	5.06.02.1.01 - Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	5.06.02.1.01.03 - Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Frekuensi penyelenggaraan event promosi budaya	6 Kali	

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
38.	Administrasi Pemerintahan	61 Program Pengembangan Penataan dan Pentas Anjungan	Persentase peningkatan jumlah pengunjung Pentas Anjungan Papua	2 Promosi Objek Wisata 5 Wilayah Adat Papua ditingkat Nasional/Internasional									
					Jumlah media promosi yang disediakan	0,00	5.06 - PENGHUBUNG	5.06.02 - PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	5.06.02.1.01 - Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	5.06.02.1.01.03 - Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Jumlah media promosi yang disediakan	0 Media	
					Frekuensi penyelenggaraan event promosi	0,00	5.06 - PENGHUBUNG	5.06.02 - PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	5.06.02.1.01 - Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	5.06.02.1.01.03 - Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Frekuensi penyelenggaraan event promosi	6 Kali	
39.				3 Optimalisasi Pengelolaan Anjungan Daerah Papua di TMII sebagai Pusat Promosi Papua									
					Jumlah media promosi pada Anjungan yang dikelola	250.000.000,00	5.06 - PENGHUBUNG	5.06.02 - PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	5.06.02.1.01 - Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	5.06.02.1.01.03 - Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Jumlah media promosi pada Anjungan yang dikelola	12 Media	
40.				4 Rapat Koordinasi dan Komunikasi dengan Kementerian/Lembaga atau Pemerintah Daerah dalam Rangka Kerjasama Daerah									
					Frekuensi pertemuan	50.000.000,00	5.06 - PENGHUBUNG	5.06.02 - PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	5.06.02.1.01 - Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	5.06.02.1.01.05 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Frekuensi pertemuan	24 Kali	
					Jumlah peserta rapat	0,00	5.06 - PENGHUBUNG	5.06.02 - PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	5.06.02.1.01 - Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	5.06.02.1.01.05 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Jumlah peserta rapat	0 Orang	
41.				5 Pembuatan Media Promosi tentang Potensi Sumber Daya Alam, Objek Pariwisata dan Budaya Papua									
					Jumlah media promosi yang disediakan	50.000.000,00	5.06 - PENGHUBUNG	5.06.02 - PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	5.06.02.1.01 - Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	5.06.02.1.01.03 - Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Jumlah media promosi yang disediakan	12 Media	
42.		77 Program Pembinaan Kemasyarakatan dan Kemahasiswaan	Jumlah konsultasi dan konsolidasi pembinaan OAP dan Kemasyarakatan di Jakarta	1 Konsultasi dan Konsolidasi									
					Jumlah konsultasi dan konsolidasi pembinaan OAP dan Kemasyarakatan	250.000.000,00	5.06 - PENGHUBUNG	5.06.02 - PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	5.06.02.1.01 - Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	5.06.02.1.01.01 - Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Bagi Aparatur dan Masyarakat	Jumlah konsultasi dan konsolidasi pembinaan OAP dan Kemasyarakatan	12 Kegiatan	
43.		78 Program Pelayanan Informasi	Tingkat pelayanan informasi publik pemerintah Provinsi Papua	5 Penyebarluasan Informasi Pelaksanaan PON XX Tahun 2020 di Papua									
					Jumlah penyebarluasan informasi Pelaksanaan PON XX tahun 2020	250.000.000,00	5.06 - PENGHUBUNG	5.06.02 - PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	5.06.02.1.01 - Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	5.06.02.1.01.01 - Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Bagi Aparatur dan Masyarakat	Jumlah penyebarluasan informasi Pelaksanaan PON XX tahun 2020	12 Kegiatan	
					Jumlah penyebarluasan informasi/Media Promosi	0,00	5.06 - PENGHUBUNG	5.06.02 - PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	5.06.02.1.01 - Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	5.06.02.1.01.01 - Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Bagi Aparatur dan Masyarakat	Jumlah penyebarluasan informasi/Media Promosi	12 Kegiatan	
44.				13 Penyediaan Data dan Informasi Potensi Sumber Daya Alam, Pariwisata dan Budaya di Wilayah Adat Papua									
					Jumlah Data Informasi Potensi Sumber Daya Alam, Pariwisata dan Budaya	250.000.000,00	5.06 - PENGHUBUNG	5.06.02 - PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	5.06.02.1.01 - Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	5.06.02.1.01.01 - Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Bagi Aparatur dan Masyarakat	Jumlah Data Informasi Potensi Sumber Daya Alam, Pariwisata dan Budaya	5 Dokumen	
45.				14 Penyelenggaraan Focus Group Discussion/Workshop/Seminar "Papua Update"									
					Jumlah peserta FGD	250.000.000,00	5.06 - PENGHUBUNG	5.06.02 - PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	5.06.02.1.01 - Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	5.06.02.1.01.01 - Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Bagi Aparatur dan Masyarakat	Jumlah peserta FGD	500 Orang	
46.				15 Pengadaan dan Pengelolaan Jaringan Website/Internet									
					Jumlah data informasi yang dikelola dalam Website/Internet	0,00	5.06 - PENGHUBUNG	5.06.02 - PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	5.06.02.1.01 - Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	5.06.02.1.01.01 - Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Bagi Aparatur dan Masyarakat	Jumlah data informasi yang dikelola dalam Website/Internet	2 Data	
					Jumlah konten jaringan website yang dikelola	0,00	5.06 - PENGHUBUNG	5.06.02 - PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	5.06.02.1.01 - Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	5.06.02.1.01.01 - Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Bagi Aparatur dan Masyarakat	Jumlah konten jaringan website yang dikelola	2 Konten	

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
47.	Administrasi Pemerintahan	78 Program Pelayanan Informasi	Tingkat pelayanan informasi publik pemerintah Provinsi Papua	16 Strategi Komunikasi Terpadu dalam Rangka Penyebarluasan Informasi tentang Papua									
					Terlaksananya Komunikasi dan Penyebarluasan Informasi	250.000.000,00	5.06 - PENGHUBUNG	5.06.02 - PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	5.06.02.1.01 - Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	5.06.02.1.01.01 - Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Bagi Aparatur dan Masyarakat	Terlaksananya Komunikasi dan Penyebarluasan Informasi	12 Dokumen	
JUMLAH						11.905.000.000,00							

Mengetahui,
Kepala Bappeda Provinsi Papua

YOHANES WALILO, S.Sos, M.Si
NIP. 197007281997121001

JAYAPURA, 20 July 2020
KEPALA BADAN PENGHUBUNG DAERAH

ALEXANDER K.Y.KAPISA,ST
NIP. 197811262005021002

**REKAPITULASI PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021
SERTA KETERKAITAN DENGAN HASIL PEMETAAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019**

PROVINSI : Papua

PERANGKAT DAERAH : Sekretariat Majelis Rakyat Papua

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Administrasi Pemerintahan	1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	À Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	1 Penyediaan jasa surat menyurat									
					Jumlah surat yang disediakan	200.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.01 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang terkirim	1500 Surat	
2.				2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik									
					Jumlah Jasa Layanan berlangganan Listrik, Air, Telepon, Transponder	200.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Layanan	12 Layanan	
3.				6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional									
					Jumlah Unit Mobil Dinas/Operasional yang terpelihara dan Terfasilitasi Perijinannya	100.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.06 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Unit Mobil Dinas/Operasional yang diservis dan dipelihara	30 Unit	
4.				7 Penyediaan jasa administrasi keuangan									
					Jumlah Honor yang terbayarkan	50.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.07 - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pegawai yang membuat laporan	10 Orang	
5.				8 Penyediaan jasa kebersihan kantor									
					Luas Gedung dan Halaman yang disediakan jasa kebersihan	200.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.08 - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	jumlah Gedung dan Halaman yang dibersihkan	1500 M2	
					Jumlah tenaga kebersihan dan Fasilitas Pendukung kebersihan kantor	0,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.08 - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah tenaga kebersihan	0 Orang	
					Jumlah Jenis Bahan dan Alat Kebersihan	0,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.14 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Bahan dan Alat Kebersihan	0 Jenis	
6.				10 Penyediaan alat tulis kantor									
					Jumlah jenis ATK yang disediakan	200.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.10 - Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	65 Jenis	
7.				11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan									
					Jumlah barang cetakan	0,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.11 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan	0 Jenis	
					Jumlah penggandaan	0,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.11 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penggandaan	0 Lembar	
					Jumlah Jenis Barang Cetak dan yang Disediakan	0,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.11 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0 Jenis	
					Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	200.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.11 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	12 Bulan	
8.				12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor									
					Jumlah Komponen Listrik yang disediakan	50.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.12 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen alat pemeliharaan listrik dan genset yang disediakan	150 Buah	
9.				15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	200.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.15 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	250 Jenis	
10.				16 Penyediaan bahan logistik kantor									
					Jumlah liter bahan bakar untuk kendaraan operasional	0,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.16 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah liter bahan bakar untuk kendaraan operasional	0 Liter	
					jumlah mobilitas termasuk tenaga angkat dan turun beras ke kantor	70.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.16 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah Pembelian Air Galon	12 Kali	
11.				17 Penyediaan makanan dan minuman									
					Pelaksanaan penyediaan makan dan minum	0,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.17 - Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Porsi makan dan minum kegiatan yang tersedia	0 Kegiatan	
					Pelaksanaan makan minum tamu dan rapat	0,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.17 - Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Porsi makan dan minum yang tersedia	0 Kali Tahun	
					Pelaksanaan makan minum saat olah raga (hari Jumat)	0,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.17 - Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Porsi makan dan minum yang tersedia	0 Kali	
					Tersediannya Makanan dan Minuman	0,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.17 - Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Porsi makan dan minum yang tersedia	0 Bulan	
					Jumlah orang yang disediakan makan dan minuman	450.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.17 - Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Porsi makan dan minum yang tersedia	1500 Orang	
12.				18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah									
					Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	700.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.18 - Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	60 Orang	
13.				19 Penyediaan Jasa Pengamanan									
					Pelaksanaan pembayaran insentif bagi tenaga operator dan penjaga X-Ray VIP Room Bandara Sentani	0,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.01 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa keamanan/security yang dibayarkan	0 Orang Bulan	
					Pelaksanaan pembayaran honor bagi satpam	250.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.01 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa keamanan/security yang dibayarkan	16 Orang Bulan	
					Pelaksanaan uang makan satpam	200.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.01 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa keamanan/security yang dibayarkan	16 Orang Bulan	
					Jumlah tenaga pengamanan	0,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.01 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa keamanan/security yang dibayarkan	0 Orang	
14.		2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	À Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	4 Pengadaan mobil jabatan									
					Jumlah mobil yang diadakan	900.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.20 - Pengadaan Mobil Jabatan	Jumlah mobil yang diadakan	5 Unit	
15.				7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor									
					Jumlah pengadaan perlengkapan	250.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.23 - Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan	6 Unit	
16.				9 Pengadaan peralatan gedung kantor									
					Jumlah peralatan perlengkapan	150.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.25 - Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan/perlengkapan yang diadakan	10 Unit	
17.				10 Pengadaan mebeleur									
					Jumlah mebeleur yang diadakan	150.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.26 - Pengadaan Mebeleur	Jumlah mebeleur yang diadakan untuk 3 UPT	25 Unit	
18.				21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas									
					Jumlah rumah dinas yang dipelihara	175.800.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.28 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Jumlah rumah dinas yang dipelihara	3 Unit	

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19.	Administrasi Pemerintahan	2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	À Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor									
					Jumlah gedung kantor yang dipelihara	350.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administras Umum	4.01.01.1.03.29 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor	4 Unit	
					belanja sewa	0,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administras Umum	4.01.01.1.03.29 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung yang disewa	0 Tahun	
20.				24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional									
					Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	150.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administras Umum	4.01.01.1.03.31 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah dan Jenis perlengkapan/peralatan gedung kantor yang dipelihara	1 Unit	
					Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	150.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administras Umum	4.01.01.1.03.31 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang	30 Unit	
					sewa kendaraan	0,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administras Umum	4.01.01.1.03.31 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan yang diperbaiki/Service	0 Bulan	
21.				26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor									
					Pelaksanaan pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	0,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administras Umum	4.01.01.1.03.27 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Jumlah Rumah Jabatan	0 Kegiatan	
					Jumlah Perlengkapan Gedung kantor yang terpelihara	350.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administras Umum	4.01.01.1.03.33 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung kantor yang dipelihara	30 Unit	
					Tersediannya biaya pemeliharaan gedung kantor	0,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administras Umum	4.01.01.1.03.39 - Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor	0 Bulan	
22.				29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur									
					Jumlah mebeleur yang dipelihara	220.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administras Umum	4.01.01.1.03.36 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Jumlah mebeleur yang dipelihara	110 Unit	
23.		3 Program peningkatan disiplin aparatur	À Meningkatnya disiplin aparatur	2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya									
					Jumlah pakaian dinas yang diadakan	150.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	4.01.01.1.04.02 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas sipil harian	120 Stell	
24.				5 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu									
					Jumlah pakaian khusus yang diadakan	150.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	4.01.01.1.04.05 - Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah pakaian Batik yang diadakan	120 Stell	
25.		5 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	À Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	1 Pendidikan dan pelatihan formal									
					Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	150.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	4.01.01.1.04.09 - Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparatur mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	15 Orang	
26.				4 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal									
					Jumlah aparatur yang terlatih	150.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	4.01.01.1.04.11 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	81 Orang	
27.		6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	À Meningkatnya kualitas akuntabilitas OPD	1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD									
					Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	150.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.02 - Administras Keuangan	4.01.01.1.02.06 - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan	3 Laporan	
					Laporan LAKIP SKPD	0,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.01 - Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.01.01.1.01.05 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan LAKIP SKPD	0 Dokumen	

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28.	Administrasi Pemerintahan	6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	A Meningkatnya kualitas akuntabilitas OPD	2 Penyusunan laporan keuangan semesteran									
					Jumlah pelaporan keuangan semesteran yang diselesaikan tepat waktu	100.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.02 - Administrasi Keuangan	4.01.01.1.02.07 - Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Jumlah dokumen laporan	2 Laporan	
29.				3 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran									
					Jumlah pelaporan prognosis realisasi anggaran yang diselesaikan tepat waktu	100.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.02 - Administrasi Keuangan	4.01.01.1.02.08 - Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah pelaporan prognosis realisasi anggaran yang diselesaikan tepat waktu	6 Laporan	
30.				4 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun									
					Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	100.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.02 - Administrasi Keuangan	4.01.01.1.02.09 - Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	5 Laporan	
31.				5 Penyusunan Renja, RKA dan Perubahan APBD									
					Jumlah dokumen	200.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.01 - Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.01.01.1.01.01 - Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	3 Dokumen	
32.		43 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga MRP	Jumlah perdasi dan perdusus yang mendapatkan rekomendasi oleh MRP; Persentase Rancangan Perdasi dan Perdusus yang ditindaklanjuti; Tingkat kehadiran Anggota MRP	2 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah									
					Sosialisasi Raperdusus Bagi Pimpinan dan anggota MRP	8.500.000.000,00	4.02 - SEKRETARIAT DPRD	4.02.05 - PROGRAM SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA (MRP **)	4.02.05.1.02 - Pelaksanaan Hak dan Kewajiban	4.02.05.1.02.03 - Pelaksanaan Hak Dalam Peninjauan Kembali Perdasi	Sosialisasi Raperdusus Bagi Pimpinan dan anggota MRP	1 Tahun	
33.				3 Rapat-Rapat Alat Kelengkapan MRP									
					Kegiatan Rapat-rapat Kelompok Kerja MRP	32.000.000.000,00	4.02 - SEKRETARIAT DPRD	4.02.05 - PROGRAM SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA (MRP **)	4.02.05.1.01 - Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Anggota MRP **)	4.02.05.1.01.07 - Peningkatan Kinerja Alat Kelengkapan MRP **)	Kegiatan Rapat-rapat Kelompok Kerja MRP	1 Tahun	
34.				4 Rapat-Rapat Pleno									
					Rapat-rapat Pleno MRP	35.000.000.000,00	4.02 - SEKRETARIAT DPRD	4.02.05 - PROGRAM SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA (MRP **)	4.02.05.1.01 - Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Anggota MRP **)	4.02.05.1.01.05 - Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota MRP **)	Rapat-rapat Pleno MRP	1 Tahun	
35.				5 Kegiatan Reses									
					Jumlah kegiatan reses	50.000.000.000,00	4.02 - SEKRETARIAT DPRD	4.02.03 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	4.02.03.1.05 - Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	4.02.03.1.05.03 - Pelaksanaan Reses	Jumlah kegiatan reses	4 Kali	
36.				7 Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama									
					Heraring /dialog dan koordinasi dengan pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama	35.500.000.000,00	4.02 - SEKRETARIAT DPRD	4.02.05 - PROGRAM SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA (MRP **)	4.02.05.1.01 - Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Anggota MRP **)	4.02.05.1.01.03 - Fasilitasi dan penyelesaian permasalahan berdasarkan aspirasi dan pengaduan masyarakat adat, umat beragama, kaum perempuan, dan masyarakat pada umumnya	Heraring /dialog dan koordinasi dengan pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama	1 Tahun	
37.				8 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota MRP									
					Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota MRP	35.000.000.000,00	4.02 - SEKRETARIAT DPRD	4.02.03 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	4.02.03.1.05 - Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	4.02.03.1.05.01 - Kunjungan Kerja dalam Daerah	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota MRP	1 Tahun	
38.				12 Pelayanan Informal Pimpinan MRP									
					Pelayanan Informasi Pimpinan MRP	15.000.000.000,00	4.02 - SEKRETARIAT DPRD	4.02.05 - PROGRAM SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA (MRP **)	4.02.05.1.01 - Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Anggota MRP **)	4.02.05.1.01.04 - Pelayanan Informal Pimpinan MRP **)	Pelayanan Informasi Pimpinan MRP	1 Tahun	

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
39.	Administrasi Pemerintahan	43 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga MRP	Jumlah perdasi dan perdusus yang mendapatkan rekomendasi oleh MRP; Persentase Rancangan Perdasi dan Perdusus yang ditindaklanjuti; Tingkat kehadiran Anggota MRP	14 Panitia Khusus (PANSUS) Masalah-Masalah di Tanah Papua									
					Panitia Khusus (PANSUS) Masalah-masalah di Tanah Papua	20.000.000.000,00	4.02 - SEKRETARIAT DPRD	4.02.05 - PROGRAM SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA (MRP **)	4.02.05.1.01 - Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Anggota MRP **)	4.02.05.1.01.06 - Panitia Khusus (PANSUS) Penyelesaian Masalah Papua **)	Panitia Khusus (PANSUS) Masalah-masalah di Tanah Papua	1 Tahun	
40.				15 Peningkatan Kinerja Alat Kelengkapan MRP									
					Peningkatan Kinerja Alat Kelengkapan MRP	15.000.000.000,00	4.02 - SEKRETARIAT DPRD	4.02.05 - PROGRAM SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA (MRP **)	4.02.05.1.01 - Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Anggota MRP **)	4.02.05.1.01.05 - Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota MRP **)	Peningkatan Kinerja Alat Kelengkapan MRP	1 Tahun	
JUMLAH						253.165.800.000,00							

Mengetahui,
Kepala Bappeda Provinsi Papua

YOHANES WALILO, S.Sos, M.Si
NIP. 197007281997121001

JAYAPURA, 20 July 2020
SEKRETARIS MAJELIS RAKYAT PAPUA

Drs. WASUOK DEMIANUS SIEP
NIP. 19661125 198903 1 013

**REKAPITULASI PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021
SERTA KETERKAITAN DENGAN HASIL PEMETAAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019**

PROVINSI : Papua

PERANGKAT DAERAH : Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Administrasi Pemerintahan	1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	À Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	1 Penyediaan jasa surat menyurat									
					Jumlah surat yang disediakan	10.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.01 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang terkirim	1000 Surat	
2.				2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik									
					Jumlah Jasa Layanan berlangganan Listrik, Air, Telepon, Transponder	1.440.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Layanan	5 Layanan	
3.				8 Penyediaan jasa kebersihan kantor									
					Luas Gedung dan Halaman yang disediakan jasa kebersihan	1.161.600.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.08 - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	jumlah Gedung dan Halaman yang dibersihkan	300000 M2	
					Jumlah tenaga kebersihan dan Fasilitas Pendukung kebersihan kantor	0,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.08 - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah tenaga kebersihan	0 Orang	
					Jumlah Jenis Bahan dan Alat Kebersihan	0,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.14 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Bahan dan Alat Kebersihan	0 Jenis	
4.				10 Penyediaan alat tulis kantor									
					Jumlah jenis ATK yang disediakan	300.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.10 - Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	35 Jenis	
5.				11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan									
					Jumlah barang cetakan	0,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.11 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan	0 Jenis	
					Jumlah penggandaan	0,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.11 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penggandaan	0 Lembar	
					Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	250.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.11 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 Jenis	
					Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	0,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.11 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	0 Bulan	
6.				12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor									
					Jumlah Komponen Listrik yang disediakan	50.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.12 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen alat pemeliharaan listrik dan genset yang disediakan	500 Buah	
7.				15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan									
					Jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	50.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.15 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	3000 Jenis	
8.				16 Penyediaan bahan logistik kantor									
					Jumlah liter bahan bakar untuk kendaraan operasional	0,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.16 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah liter bahan bakar untuk kendaraan operasional	0 Liter	
					jumlah mobilitas termasuk tenaga angkat dan turun beras ke kantor	25.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.16 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah Pembelian Air Galon	12 Kali	
9.				17 Penyediaan makanan dan minuman									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Pelaksanaan penyediaan makan dan minum	0,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.17 - Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Porsi makan dan minum kegiatan yang tersedia	0 Kegiatan	
					Pelaksanaan makan minum tamu dan rapat	350.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.17 - Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Porsi makan dan minum yang tersedia	50 Kali Tahun	
					Pelaksanaan makan minum saat olah raga (hari Jumat)	0,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.17 - Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Porsi makan dan minum yang tersedia	0 Kali	
					Tersediannya Makanan dan Minuman	0,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.17 - Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Porsi makan dan minum yang tersedia	0 Bulan	
					Jumlah orang yang disediakan makan dan minuman	0,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.17 - Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Porsi makan dan minum yang tersedia	0 Orang	
10.				18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah									
					Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	1.500.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.18 - Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	60 Orang	
11.				19 Penyediaan Jasa Pengamanan									
					Pelaksanaan pembayaran insentif bagi tenaga operator dan penjaga X-Ray VIP Room Bandara Sentani	0,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.01 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa keamanan/security yang dibayarkan	0 Orang Bulan	
					Pelaksanaan pembayaran honor bagi satpam	0,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.01 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa keamanan/security yang dibayarkan	0 Orang Bulan	
					Pelaksanaan uang makan satpam	0,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.01 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa keamanan/security yang dibayarkan	0 Orang Bulan	
					Jumlah tenaga pengamanan	0,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.01 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa keamanan/security yang dibayarkan	2 Orang	
12.		2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	À Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	3 Pembangunan gedung kantor									
					Luas bangunan yang dibangun	18.000.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.39 - Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Luas bangunan yang dibangun	3185 M2	
					Tersedianya desain perencanaan bangunan	0,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.39 - Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Tersedianya desain perencanaan bangunan	0 Dokumen	
13.				5 Pengadaan kendaraan dinas/operasional									
					Jumlah kendaraan yang diadakan	850.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.21 - Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda 4	1 Unit	
					Jumlah kendaraan roda 2	0,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.21 - Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda 2	0 Unit	
14.				7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor									
					Jumlah pengadaan perlengkapan	2.500.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.23 - Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan	100 Unit	
15.				9 Pengadaan peralatan gedung kantor									
					Jumlah peralatan perlengkapan	3.000.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.25 - Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan/perlengkapan yang diadakan	50 Unit	
16.				22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor									
					Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1.000.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.29 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor	10 Unit	
					belanja sewa	0,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.29 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung yang disewa	0 Tahun	
17.				24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	0,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.31 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah dan Jenis perlengkapan/peralatan gedung kantor yang dipelihara	0 Unit	
					Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	800.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.31 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang	20 Unit	
					sewa kendaraan	0,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.31 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan yang diperbaiki/Service	0 Bulan	
18.				26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor									
					Pelaksanaan pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	0,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.27 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Jumlah Rumah Jabatan	0 Kegiatan	
					Jumlah Perlengkapan Gedung kantor yang terpelihara	150.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.33 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung kantor yang dipelihara	200 Unit	
					Tersediannya biaya pemeliharaan gedung kantor	0,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.39 - Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor	0 Bulan	
19.				28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor									
					Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	150.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.35 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	50 Unit	
20.				30 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor									
					Luas bangunan yang direhab	1.000.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.39 - Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Jumlah bangunan yang direhab	9118 M2	
21.				42 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor									
					Terlaksananya rehabilitasi gedung	0,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.39 - Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Terlaksananya rehabilitasi gedung	1 M2	
22.		3 Program peningkatan disiplin aparatur	À Meningkatnya disiplin aparatur	2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya									
					Jumlah pakaian dinas yang diadakan	661.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	4.01.01.1.04.02 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas sipil harian	150 Stel	
23.		5 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	À Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	1 Pendidikan dan pelatihan formal									
					Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	500.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	4.01.01.1.04.09 - Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparatur mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	10 Orang	
24.				4 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal									
					Jumlah aparatur yang terlatih	500.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	4.01.01.1.04.11 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	
25.		6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	À Meningkatnya kualitas akuntabilitas OPD	1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD									
					Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	30.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.02 - Administrasi Keuangan	4.01.01.1.02.06 - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan	3 Laporan	
					Laporan LAKIP SKPD	0,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.01 - Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.01.01.1.01.05 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan LAKIP SKPD	0 Dokumen	
26.				2 Penyusunan laporan keuangan semesteran									
					Jumlah pelaporan keuangan semesteran yang diselesaikan tepat waktu	17.500.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.02 - Administrasi Keuangan	4.01.01.1.02.07 - Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Jumlah dokumen laporan	1 Laporan	
27.				4 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	17.500.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.02 - Administrasi Keuangan	4.01.01.1.02.09 - Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	1 Laporan	
28.				5 Penyusunan Renja, RKA dan Perubahan APBD									
					Jumlah dokumen	30.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.01 - Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.01.01.1.01.01 - Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	3 Dokumen	
29.				12 Penyusunan RENSTRA									
					Jumlah Dokumen	0,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.01 - Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.01.01.1.01.01 - Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	0 Dokumen	
30.		57 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase ASN peserta diklat teknis fungsional yang lulus dengan Predikat Memuaskan; Terlaksananya peningkatan kompetensi teknis/fungsional aparatur melalui pembinaan dan pengembangan	18 Evaluasi Pasca Diklat Pim									
					Jumlah alumnus diklat pim yang menindaklanjuti proyek perubahan	500.000.000,00	5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	5.04.02.1.01 - Pengembangan Kompetensi Teknis	5.04.02.1.01.04 - Pembinaan, Pengukoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah alumnus diklat pim yang menindaklanjuti proyek perubahan	40 Orang	
31.				23 Rakornis Bidang Kediklatan									
					Jumlah peserta mengikuti Rakornis	650.000.000,00	5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	5.04.02.1.02 - Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	5.04.02.1.02.08 - Pembinaan, Pengukoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, Serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah peserta mengikuti Rakornis	150 Orang	
32.				34 Diklat Bahasa Inggris bagi Aparatur									
					Jumlah peserta mengikuti diklat	500.000.000,00	5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	5.04.02.1.01 - Pengembangan Kompetensi Teknis	5.04.02.1.01.03 - Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah peserta mengikuti diklat	80 Orang	
					Jumlah peserta mengikuti diklat BAHASA asing	0,00	5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	5.04.02.1.01 - Pengembangan Kompetensi Teknis	5.04.02.1.01.03 - Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah peserta mengikuti diklat BAHASA asing	0 Orang	
33.				41 Diklat Teknis Penulisan Karya Ilmiah									
					Jumlah peserta mengikuti diklat	0,00						0 Laporan	
					Jumlah kerjasama penyelenggaraan diklat	0,00						0 Dokumen	
34.				56 Pengembangan Kapasitas SDM Aparatur									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Jumlah peserta mengikuti diklat	1.500.000.000,00	5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	5.04.02.1.01 - Pengembangan Kompetensi Teknis	5.04.02.1.01.03 - Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah peserta mengikuti diklat	15 Orang	
35.				57 Pengembangan Kerjasama Penyelenggaraan Diklat									
					Jumlah kerjasama penyelenggaraan diklat	2.500.000.000,00	5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	5.04.02.1.02 - Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	5.04.02.1.02.05 - Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga	Jumlah kerjasama penyelenggaraan diklat	1 Dokumen	
36.				58 Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional									
					Jumlah penilaian angka kredit jabatan fungsional WI	500.000.000,00	5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	5.04.02.1.02 - Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	5.04.02.1.02.04 - Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Jumlah penilaian angka kredit jabatan fungsional WI	35 Orang	
					Jumlah laporan hasil penilaian angka kredit jabatan fungsional WI	0,00	5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	5.04.02.1.02 - Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	5.04.02.1.02.04 - Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Jumlah laporan hasil penilaian angka kredit jabatan fungsional WI	0 Orang	
37.				75 Bantuan Pendidikan Program S2 bagi Aparatur									
					Jumlah pegawai yang mendapat bantuan studi program S2 bidang aset	0,00					Jumlah pegawai yang mendapat bantuan studi program S2 bidang aset	20 Orang	
38.				77 TOT Diklat Revolusi Mental dalam Pelayanan Publik									
39.				78 Pelatihan Bina Damai bagi Pegawai ASN									
40.				87 Pengembangan Data dan Informasi Diklat									
					Jumlah dokumen data dan informasi yang siap di akses	600.000.000,00	5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	5.04.02.1.02 - Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	5.04.02.1.02.04 - Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Jumlah dokumen data dan informasi yang siap di akses	1 Dokumen	
41.				89 Diklat Pengelolaan Aset Daerah									
					Jumlah peserta mengikuti diklat	500.000.000,00	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	4.01.04 - PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM	4.01.04.1.02 - Pelaksanaan Administrasi Umum	4.01.04.1.02.05 - Pengelolaan Akuntansi dan Penatausahaan Aset	Jumlah peserta mengikuti diklat	30 Orang	
42.				91 Diklat Penatausahaan Keuangan Daerah									
					Jumlah peserta mengikuti diklat	0,00					Jumlah peserta mengikuti diklat	30 Orang	
43.				94 Diklat TOT Subtansi WI									
					Jumlah peserta mengikuti diklat	500.000.000,00	5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	5.04.02.1.02 - Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	5.04.02.1.02.04 - Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Jumlah peserta mengikuti diklat	30 Orang	
44.				95 Analisis Kebutuhan Diklat									
					Jumlah dokumen hasil analisis kebutuhan diklat	400.000.000,00	5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	5.04.02.1.01 - Pengembangan Kompetensi Teknis	5.04.02.1.01.02 - Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah dokumen hasil analisis kebutuhan diklat	1 Dokumen	
45.				96 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Diklat									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan diklat di kab/kota	400.000.000,00	5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	5.04.02.1.01 - Pengembangan Kompetensi Teknis	5.04.02.1.01.04 - Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan diklat di kab/kota	1 Laporan	
46.				97 Diklat Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIP)									
					Jumlah peserta mengikuti diklat	0,00						0 Orang	
47.				98 Diklat Penyusunan Standard Operating Procedure (SOP)									
					Jumlah peserta mengikuti diklat	500.000.000,00	5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	5.04.02.1.01 - Pengembangan Kompetensi Teknis	5.04.02.1.01.03 - Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah peserta mengikuti diklat	30 Orang	
48.				99 Diklat Perencanaan dan Penganggaran									
					Jumlah peserta mengikuti diklat	500.000.000,00	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	4.01.04 - PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM	4.01.04.1.03 - Pelaksanaan Administrasi Pimpinan	4.01.04.1.03.01 - Perencanaan dan Pelaporan Tugas	Jumlah peserta mengikuti diklat	30 Orang	
49.				103 Diklat MOT bagi Pengelola Diklat									
					Jumlah peserta mengikuti diklat	500.000.000,00	5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	5.04.02.1.01 - Pengembangan Kompetensi Teknis	5.04.02.1.01.03 - Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah peserta mengikuti diklat	30 Orang	
50.				113 Monitoring Persiapan Sarana dan Prasarana Penyelenggaraan Diklat di Kabupaten/Kota									
					Jumlah Kab/Kota yang menyelenggarakan diklat	300.000.000,00	5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	5.04.02.1.02 - Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	5.04.02.1.02.08 - Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, Serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Kab/Kota yang menyelenggarakan diklat	10 Kabupaten	
51.				115 Workshop Standarisasi dan Sertifikasi Kompetensi di Bidang Pengembangan SDM Provinsi Papua									
					Jumlah Peserta yang mengikuti Workshop	0,00					Jumlah Peserta yang mengikuti Workshop	75 Orang	
52.				116 Diklat TOC bagi Penyelenggara Diklat									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Jumlah Peserta mengikuti Diklat	1.000.000.000,00	5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	5.04.02.1.01 - Pengembangan Kompetensi Teknis	5.04.02.1.01.03 - Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Peserta mengikuti Diklat	60 Orang	
53.				119 Perencanaan dan Pembinaan Diklat Aparatur									
					Laporan hasil perencanaan dan Pembinaan diklat aparatur	500.000.000,00	5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	5.04.02.1.01 - Pengembangan Kompetensi Teknis	5.04.02.1.01.01 - Penyusunan Kebijakan Teknis Dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Laporan hasil perencanaan dan Pembinaan diklat aparatur	1 Laporan	
54.				120 Pengembangan Standarisasi dan Sertifikasi Kompetensi ASN									
					Laporan hasil pengembangan kompetensi standarisasi dan sertifikasi ASN	500.000.000,00	5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	5.04.02.1.02 - Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	5.04.02.1.02.03 - Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Laporan hasil pengembangan kompetensi standarisasi dan sertifikasi ASN	1 Laporan	
55.				121 Koordinasi Persiapan Penyelenggaraan Diklat di Kabupaten/Kota									
					Jumlah Kabupaten/Kota Penyelenggara	0,00					Jumlah Kabupaten/Kota Penyelenggara	10 Kabupaten	
56.				125 Diklat WI Berjenjang									
					Jumlah peserta mengikuti diklat	0,00					Jumlah peserta mengikuti diklat	30 Orang	
57.				126 Diklat Kepamongprajaan									
					Jumlah peserta mengikuti diklat	1.000.000.000,00	5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	5.04.02.1.01 - Pengembangan Kompetensi Teknis	5.04.02.1.01.03 - Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah peserta mengikuti diklat	60 Orang	
58.				127 Diklat Pengelolaan Keuangan Desa									
					Jumlah peserta mengikuti diklat	1.000.000.000,00	5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	5.04.02.1.01 - Pengembangan Kompetensi Teknis	5.04.02.1.01.03 - Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah peserta mengikuti diklat	60 Orang	
59.				129 Workshop Pengembangan Kompetensi ASN									
					Jumlah peserta mengikuti Workshop	600.000.000,00	5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	5.04.02.1.01 - Pengembangan Kompetensi Teknis	5.04.02.1.01.01 - Penyusunan Kebijakan Teknis Dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah peserta mengikuti Workshop	80 Orang	
60.				135 Fasilitasi Penyelenggaraan Diklat Pim II									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Jumlah Peserta Diklat yang difasilitasi	1.500.000.000,00	5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	5.04.02.1.02 - Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	5.04.02.1.02.07 - Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Peserta Diklat yang difasilitasi	60 Orang	
61.		62 Program Pendidikan Kedinasan		1 Diklat Pim Tingkat III									
					Jumlah peserta mengikuti diklat	1.750.000.000,00	5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	5.04.02.1.02 - Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	5.04.02.1.02.07 - Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah peserta mengikuti diklat	40 Orang	
62.				5 Diklat Pim Tingkat IV									
					Jumlah peserta mengikuti diklat	1.550.000.000,00	5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	5.04.02.1.02 - Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	5.04.02.1.02.07 - Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah peserta mengikuti diklat	40 Orang	
63.				7 Diklat Pim Tingkat IV bagi Kabupaten/Kota									
					Jumlah peserta mengikuti diklat	4.200.000.000,00	5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	5.04.02.1.02 - Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	5.04.02.1.02.07 - Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah peserta mengikuti diklat	120 Orang	
64.				8 Diklat Pim Tingkat II									
					Jumlah peserta mengikuti diklat	1.770.660.000,00	5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	5.04.02.1.02 - Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	5.04.02.1.02.07 - Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah peserta mengikuti diklat	60 Orang	
65.				9 Diklat Pim Tingkat III bagi Kabupaten/Kota									
					Jumlah peserta mengikuti diklat	4.560.000.000,00	5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	5.04.02.1.02 - Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	5.04.02.1.02.07 - Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah peserta mengikuti diklat	120 Orang	
66.				10 Diklat Pimpemdagri Jabatan Administrator									
					Jumlah Peserta mengikuti diklat	0,00					Jumlah Peserta mengikuti diklat	40 Orang	
67.				11 Diklat Pimpemdagri Jabatan Pengawas									
					Jumlah Peserta mengikuti diklat	0,00					Jumlah Peserta mengikuti diklat	40 Orang	
68.				12 Diklat Prajabatan CPNS									
					Jumlah Peserta mengikuti diklat	0,00					Jumlah Peserta mengikuti diklat	120 Orang	
69.				13 Pelatihan Dasar CPNS									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Jumlah Peserta mengikuti pelatihan	1.200.000.000,00	5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	5.04.02.1.02 - Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	5.04.02.1.02.07 - Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Peserta mengikuti pelatihan	80 Orang	
70.		113 Program Peningkatan Kapasitas SDM Papua		1 Penyediaan Beasiswa bagi Mahasiswa Asli Papua (Pendidikan Dalam Negeri)									
					Jumlah Mahasiswa Penerima Beasiswa	15.000.000.000,00	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.01.02.1.01 - Pemantauan Pelaksanaan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	4.01.02.1.01.01 - Pengelolaan Administrasi Pemerintahan dan Fasilitas Penataan Wilayah	Jumlah Mahasiswa Penerima Beasiswa	936 Orang	
71.				2 Penyediaan Beasiswa bagi Mahasiswa Asli Papua (Pendidikan Luar Negeri)									
					Jumlah Penerima Beasiswa	18.000.000.000,00	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.01.02.1.01 - Pemantauan Pelaksanaan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	4.01.02.1.01.01 - Pengelolaan Administrasi Pemerintahan dan Fasilitas Penataan Wilayah	Jumlah Penerima Beasiswa	457 Orang	
72.				3 Pendayagunaan SDM Papua									
					Jumlah Peserta magang dan pelatihan	2.000.000.000,00	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.01.02.1.01 - Pemantauan Pelaksanaan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	4.01.02.1.01.01 - Pengelolaan Administrasi Pemerintahan dan Fasilitas Penataan Wilayah	Jumlah Peserta magang dan pelatihan	100 Orang	
73.				4 Penyediaan Beasiswa dan Uang bagi Mahasiswa Asli Papua (Pendidikan dalam Negeri)									
					Jumlah Mahasiswa Asli Papua Penerima Beasiswa dan Biaya Hidup Pendidikan dalam Negeri	0,00					Jumlah Mahasiswa Asli Papua Penerima Beasiswa dan Biaya Hidup Pendidikan dalam Negeri	20 Orang	
74.				5 Penyediaan Beasiswa dan Uang Saku bagi Mahasiswa Asli Papua (Pendidikan Luar Negeri)									
					Jumlah Mahasiswa Asli Papua Penerima Beasiswa dan Biaya Hidup Pendidikan Luar Negeri	0,00					Jumlah Mahasiswa Asli Papua Penerima Beasiswa dan Biaya Hidup Pendidikan Luar Negeri	5 Orang	
JUMLAH						100.823.260.000,00							

Mengetahui,
Kepala Bappeda Provinsi Papua

YOHANES WALILO, S.Sos, M.Si
NIP. 197007281997121001

JAYAPURA, 20 July 2020
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

ARYOKO A.F. RUMAROPEN, SP, M.Eng
NIP. 19760213 200003 1 002

**REKAPITULASI PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021
SERTA KETERKAITAN DENGAN HASIL PEMETAAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019**

PROVINSI : Papua

PERANGKAT DAERAH : Badan Pengelola Perbatasan dan Kerja Sama

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Administrasi Pemerintahan	1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	À Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	1 Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang disediakan	50.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.01 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang terkirim	500 Surat	
2.				2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Jasa Layanan berlangganan Listrik, Air, Telepon, Transponder	200.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Layanan	24 Layanan	
3.				3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	0,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.03 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	0 Unit	
4.				6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Unit Mobil Dinas/Operasional yang terpelihara dan Terfasilitasi Perijinannya	52.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.06 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Unit Mobil Dinas/Operasional yang diservis dan dipelihara	42 Unit	
5.				7 Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Honor yang terbayarkan	330.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.07 - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pegawai yang membuat laporan	8 Orang	
6.				8 Penyediaan jasa kebersihan kantor	Luas Gedung dan Halaman yang disediakan jasa kebersihan	0,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.08 - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	jumlah Gedung dan Halaman yang dibersihkan	0 M2	
					Jumlah tenaga kebersihan dan Fasilitas Pendukung kebersihan kantor	150.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.08 - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah tenaga kebersihan	3 Orang	
					Jumlah Jenis Bahan dan Alat Kebersihan	50.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.14 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Bahan dan Alat Kebersihan	20 Jenis	
7.				9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	0,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.09 - Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	0 Unit	
8.				10 Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	250.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.10 - Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	30 Jenis	
9.				11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan	100.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.11 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan	15 Jenis	
					Jumlah penggandaan	50.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.11 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penggandaan	120000 Lembar	
					Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.11 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0 Jenis	
					Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	0,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.11 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	0 Bulan	

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10.	Administrasi Pemerintahan	1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	À Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor									
					Jumlah Komponen Listrik yang disediakan	50.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.12 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen alat pemeliharaan listrik dan genset yang disediakan	10 Buah	
11.				13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor									
					Jumlah peralatan dan Perlengkapan	0,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.25 - Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah penggandaan peralatan kantor yang disediakan	30 Unit	
12.				15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan									
					Jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	50.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.15 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	2000 Jenis	
13.				16 Penyediaan bahan logistik kantor									
					Jumlah liter bahan bakar untuk kendaraan operasional	0,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.16 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah liter bahan bakar untuk kendaraan operasional	0 Liter	
					jumlah mobilitas termasuk tenaga angkat dan turun beras ke kantor	10.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.16 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah Pembelian Air Galon	12 Kali	
14.				17 Penyediaan makanan dan minuman									
					Pelaksanaan penyediaan makan dan minum	0,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.17 - Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Porsi makan dan minum kegiatan yang tersedia	0 Kegiatan	
					Pelaksanaan makan minum tamu dan rapat	500.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.17 - Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Porsi makan dan minum yang tersedia	240 Kali Tahun	
					Pelaksanaan makan minum saat olah raga (hari Jumat)	100.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.17 - Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Porsi makan dan minum yang tersedia	54 Kali	
					Tersediannya Makanan dan Minuman	0,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.17 - Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Porsi makan dan minum yang tersedia	0 Bulan	
					Jumlah orang yang disediakan makan dan minuman	0,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.17 - Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Porsi makan dan minum yang tersedia	0 Orang	
15.				18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah									
					Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	1.500.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.18 - Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	70 Orang	
16.				19 Penyediaan Jasa Pengamanan									
					Pelaksanaan pembayaran insentif bagi tenaga operator dan penjaga X-Ray VIP Room Bandara Sentani	0,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.01 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa keamanan/security yang dibayarkan	0 Orang Bulan	
					Pelaksanaan pembayaran honor bagi satpam	0,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.01 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa keamanan/security yang dibayarkan	0 Orang Bulan	
					Pelaksanaan uang makan satpam	0,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.01 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa keamanan/security yang dibayarkan	0 Orang Bulan	
					Jumlah tenaga pengamanan	0,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.01 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa keamanan/security yang dibayarkan	0 Orang	
17.		2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	À Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	3 Pembangunan gedung kantor									
					Luas bangunan yang dibangun	36.502.908.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.39 - Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Luas bangunan yang dibangun	0 M2	
					Tersedianya desain perencanaan bangunan	0,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.39 - Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Tersedianya desain perencanaan bangunan	0 Dokumen	
18.				5 Pengadaan kendaraan dinas/operasional									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Jumlah kendaraan yang diadakan	600.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administras Umum	4.01.01.1.03.21 - Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda 4	1 Unit	
					Jumlah kendaraan roda 2	0,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administras Umum	4.01.01.1.03.21 - Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda 2	0 Unit	
19.				7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor									
					Jumlah pengadaan perlengkapan	100.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administras Umum	4.01.01.1.03.23 - Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan	15 Unit	
20.				9 Pengadaan peralatan gedung kantor									
					Jumlah peralatan perlengkapan	300.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administras Umum	4.01.01.1.03.25 - Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan/perlengkapan yang diadakan	20 Unit	
21.				10 Pengadaan mebeleur									
					Jumlah mebeleur yang diadakan	0,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administras Umum	4.01.01.1.03.26 - Pengadaan Mebeleur	Jumlah mebeleur yang diadakan untuk 3 UPT	0 Unit	
22.				22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor									
					Jumlah gedung kantor yang dipelihara	200.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administras Umum	4.01.01.1.03.29 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor	3 Unit	
					belanja sewa	0,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administras Umum	4.01.01.1.03.29 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung yang disewa	0 Tahun	
23.				24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional									
					Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	0,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administras Umum	4.01.01.1.03.31 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah dan Jenis perlengkapan/peralatan gedung kantor yang dipelihara	0 Unit	
					Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	500.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administras Umum	4.01.01.1.03.31 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang	50 Unit	
					sewa kendaraan	0,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administras Umum	4.01.01.1.03.31 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan yang diperbaiki/Service	0 Bulan	
24.				26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor									
					Pelaksanaan pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	50.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administras Umum	4.01.01.1.03.27 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Jumlah Rumah Jabatan	1 Kegiatan	
					Jumlah Perlengkapan Gedung kantor yang terpelihara	0,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administras Umum	4.01.01.1.03.33 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung kantor yang dipelihara	0 Unit	
					Tersediannya biaya pemeliharaan gedung kantor	0,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administras Umum	4.01.01.1.03.39 - Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor	0 Bulan	
25.				28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor									
					Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	100.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administras Umum	4.01.01.1.03.35 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	20 Unit	
26.				29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur									
					Jumlah mebeleur yang dipelihara	50.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administras Umum	4.01.01.1.03.36 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Jumlah mebeleur yang dipelihara	20 Unit	
27.				42 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor									
					Terlaksananya rehabilitasi gedung	0,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administras Umum	4.01.01.1.03.39 - Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Terlaksananya rehabilitasi gedung	0 M2	
28.				44 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional									
29.				46 Sewa gedung									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Jumlah gedung kantor yang disewa	1.000.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.27 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Jumlah rumah jabatan yang terpelihara	1 Unit Tahun	
					Sewa rumah jabatan	0,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.03 - Administrasi Umum	4.01.01.1.03.27 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Jumlah Rumah Jabatan Yang disewa	0 Unit Tahun	
30.		3 Program peningkatan disiplin aparatur	À Meningkatnya disiplin aparatur	1 Pengadaan mesin/kartu absensi									
					Jumlah Mesin /Kartu Absensi yang tersedia	15.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	4.01.01.1.04.01 - Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Jumlah Mesin /Kartu Absensi yang tersedia	2 Bh	
31.				2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya									
					Jumlah pakaian dinas yang diadakan	200.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	4.01.01.1.04.02 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas sipil harian	100 Stell	
32.				3 Pengadaan pakaian kerja lapangan									
					Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan	200.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	4.01.01.1.04.03 - Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan	100 Stell	
33.				4 Pengadaan pakaian KORPRI									
					jumlah pakaian KORPRI yang diadakan	150.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	4.01.01.1.04.04 - Pengadaan Pakaian Korpri	Jumlah pakaian KORPRI yang diadakan	100 Stell	
34.				5 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu									
					Jumlah pakaian khusus yang diadakan	100.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	4.01.01.1.04.05 - Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah pakaian Batik yang diadakan	100 Stell	
35.		5 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	À Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	1 Pendidikan dan pelatihan formal									
					Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	500.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	4.01.01.1.04.09 - Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparatur mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	5 Orang	
36.				2 Sosialisasi peraturan perundang-undangan									
					Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	175.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	4.01.01.1.04.10 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	150 Orang	
37.				3 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan									
					Jumlah peserta bimbingan teknis tentang implementasi peraturan perundang-undangan	0,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	4.01.01.1.04.11 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta bimbingan teknis tentang implementasi peraturan perundang-undangan	0 Orang	
38.				4 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal									
					Jumlah aparatur yang terlatih	300.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	4.01.01.1.04.11 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	
39.		6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	À Meningkatnya kualitas akuntabilitas OPD	1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD									
					Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	25.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.02 - Administrasi Keuangan	4.01.01.1.02.06 - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan	3 Laporan	
					Laporan LAKIP SKPD	0,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.01 - Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.01.01.1.01.05 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan LAKIP SKPD	0 Dokumen	
40.				2 Penyusunan laporan keuangan semesteran									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Jumlah pelaporan keuangan semesteran yang diselesaikan tepat waktu	15.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.02 - Administrasi Keuangan	4.01.01.1.02.07 - Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Jumlah dokumen laporan	2 Laporan	
41.				3 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran									
					Jumlah pelaporan prognosis realisasi anggaran yang diselesaikan tepat waktu	100.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.02 - Administrasi Keuangan	4.01.01.1.02.08 - Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah pelaporan prognosis realisasi anggaran yang diselesaikan tepat waktu	12 Laporan	
42.				4 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun									
					Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	7.500.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.02 - Administrasi Keuangan	4.01.01.1.02.09 - Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	1 Laporan	
43.				5 Penyusunan Renja, RKA dan Perubahan APBD									
					Jumlah dokumen	45.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.01 - Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.01.01.1.01.01 - Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	3 Dokumen	
44.				10 Forum SKPD Provinsi Papua									
					Jumlah Peserta Forum	500.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	4.01.01.1.04.10 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Forum	50 Orang	
45.				12 Penyusunan RENSTRA									
					Jumlah Dokumen	0,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.01 - Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.01.01.1.01.01 - Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	0 Dokumen	
46.				13 Penyusunan SOP									
					Jumlah Dokumen	0,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.01 - Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.01.01.1.01.04 - Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	0 Dokumen	
47.				14 Peningkatan Kapasitas PPID									
					Jumlah orang	50.000.000,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	4.01.01.1.04.09 - Pendidikan dan Pelatihan Formal	Pembinaan Administrasi Kepegawaian	10 Orang	
48.				15 Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM)									
					Jumlah Dokumen yang disusun	0,00		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.01.01.1.01 - Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.01.01.1.01.05 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen yang disusun	0 Dokumen	
49.		100 Program Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan	Cakupan Ketersediaan Sarana Prasarana Infrastruktur dasar di perbatasan ; Cakupan Ketersediaan Sarana Prasarana Kesehatan di perbatasan ; Cakupan Ketersediaan Sarana Prasarana ekonomi di perbatasan ; Cakupan Ketersediaan guru di perbatasan ; Cakupan Ketersediaan kelas di perbatasan ; Cakupan Ketersediaan sekolah di perbatasan ; Cakupan Pos Lintas Batas yang berstandar internasional; Cakupan koordinasi pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan	1 Pembangunan Pos Pengamanan Batas RI-PNG									
					Tersedianya Pos Pengamanan Batas RI-PNG	500.000.000,00	5.07 - PENGELOAAN PERBATASAN	5.07.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	5.07.02.1.01 - Pelaksanaan Kewilayah Perbatasan	5.07.02.1.01.01 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Perbatasan	Tersedianya Pos Pengamanan Batas RI-PNG	1 Unit	
50.				2 Penataan dan Pemeliharaan Lingkungan PPLBN									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Tertata dan terpeliharanya lingkungan Pemeriksaan Pos Lintas Batas Negara (PPLBN)	300.000.000,00	5.07 - PENGELOAAN PERBATASAN	5.07.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	5.07.02.1.01 - Pelaksanaan Kewilayah Perbatasan	5.07.02.1.01.01 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Perbatasan	Tertata dan terpeliharanya lingkungan Pemeriksaan Pos Lintas Batas Negara (PPLBN)	2 Lokasi	
51.				7 Pembangunan Pasar Tradisional di Kawasan Perbatasan									
					Tersedia Pasar Tradisional di Kawasan Perbatasan	0,00						0 Unit	
					Tersedianya 2 (dua) unit pasar tradisional yang dibangun di kawasan perbatasan	0,00						0 Unit	
52.				8 Pembangunan Balai Kampung di Kawasan Perbatasan									
					Tersedianya Balai Kampung di Kawasan Perbatasan	1.500.000.000,00	5.07 - PENGELOAAN PERBATASAN	5.07.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	5.07.02.1.01 - Pelaksanaan Kewilayah Perbatasan	5.07.02.1.01.01 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Perbatasan	Tersedianya Balai Kampung di Kawasan Perbatasan	2 Unit	
					Tersedianya 1 (satu) unit balai kampung di kawasan perbatasan	0,00	5.07 - PENGELOAAN PERBATASAN	5.07.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	5.07.02.1.01 - Pelaksanaan Kewilayah Perbatasan	5.07.02.1.01.01 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Perbatasan	Tersedianya 1 (satu) unit balai kampung di kawasan perbatasan	0 Unit	
					Tersedianya balai pertemuan di kawasan perbatasan	0,00	5.07 - PENGELOAAN PERBATASAN	5.07.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	5.07.02.1.01 - Pelaksanaan Kewilayah Perbatasan	5.07.02.1.01.01 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Perbatasan	Tersedianya balai pertemuan di kawasan perbatasan	0 Unit	
53.				9 Pemetaan Tata Ruang dan Hak Ulayat di Kawasan Perbatasan									
					Terlaksananya Pemetaan Tata Ruang dan Hak Ulayat di Kawasan Perbatasan	750.000.000,00	5.07 - PENGELOAAN PERBATASAN	5.07.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	5.07.02.1.01 - Pelaksanaan Kewilayah Perbatasan	5.07.02.1.01.01 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Perbatasan	Terlaksananya Pemetaan Tata Ruang dan Hak Ulayat di Kawasan Perbatasan	3 Dokumen	
					Tersedianya dokumen pemetaan tata ruang dan hak ulayat di kawasan perbatasan	0,00	5.07 - PENGELOAAN PERBATASAN	5.07.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	5.07.02.1.01 - Pelaksanaan Kewilayah Perbatasan	5.07.02.1.01.01 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Perbatasan	Tersedianya dokumen pemetaan tata ruang dan hak ulayat di kawasan perbatasan	0 Dokumen	
54.				11 Peningkatan Keterampilan Home Industry bagi Masyarakat Kawasan Perbatasan									
					Terlatihnya keterampilan home industri bagi masyarakat pebatasan	0,00	5.07 - PENGELOAAN PERBATASAN	5.07.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	5.07.02.1.01 - Pelaksanaan Kewilayah Perbatasan	5.07.02.1.01.01 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Perbatasan	Terlatihnya keterampilan home industri bagi masyarakat pebatasan	20 Orang	
					Terlatihnya 20 orang yang mengikuti keterampilan home industri	0,00	5.07 - PENGELOAAN PERBATASAN	5.07.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	5.07.02.1.01 - Pelaksanaan Kewilayah Perbatasan	5.07.02.1.01.01 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Perbatasan	Terlatihnya 20 orang yang mengikuti keterampilan home industri	0 Orang	
55.				12 Pembangunan Balai Pertemuan									
					Jumlah gedung/unit yang terbangun	0,00	5.07 - PENGELOAAN PERBATASAN	5.07.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	5.07.02.1.01 - Pelaksanaan Kewilayah Perbatasan	5.07.02.1.01.01 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Perbatasan	Jumlah gedung/unit yang terbangun	2 Unit	
56.				13 Koordinasi Pengembangan Infrastruktur kawasan perbatasan									
					Tersedianya laporan hasil kordinasi pengembangan infrastruktur kawasan perbatasan	150.000.000,00	5.07 - PENGELOAAN PERBATASAN	5.07.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	5.07.02.1.01 - Pelaksanaan Kewilayah Perbatasan	5.07.02.1.01.01 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Perbatasan	Tersedianya laporan hasil kordinasi pengembangan infrastruktur kawasan perbatasan	1 Kegiatan	
					Jumlah kawasan perbatasan yang dikoordinasikan	0,00	5.07 - PENGELOAAN PERBATASAN	5.07.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	5.07.02.1.01 - Pelaksanaan Kewilayah Perbatasan	5.07.02.1.01.01 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Perbatasan	Jumlah kawasan perbatasan yang dikoordinasikan	0 Dokumen	
57.				14 Pengadaan Pemenuhan Air Bersih di kawasan perbatasan									
					Jumlah pemuhan air bersih dikawasan perbatasan	0,00	5.07 - PENGELOAAN PERBATASAN	5.07.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	5.07.02.1.01 - Pelaksanaan Kewilayah Perbatasan	5.07.02.1.01.01 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Perbatasan	Jumlah pemuhan air bersih dikawasan perbatasan	0 Lokasi	
					Tersedianya pemenuhan air bersih di kawasan perbatasan	0,00	5.07 - PENGELOAAN PERBATASAN	5.07.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	5.07.02.1.01 - Pelaksanaan Kewilayah Perbatasan	5.07.02.1.01.01 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Perbatasan	Tersedianya pemenuhan air bersih di kawasan perbatasan	0 Lokasi	
58.				15 Pengadaan dan pemasangan PLTS bagi Masyarakat Perbatasan									
					Jumlah solar cell yang diadakan	1.000.000.000,00	5.07 - PENGELOAAN PERBATASAN	5.07.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	5.07.02.1.01 - Pelaksanaan Kewilayah Perbatasan	5.07.02.1.01.01 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Perbatasan	Jumlah solar cell yang diadakan	1 Lokasi	
59.				16 Inventarisasi dan Pemutakhiran data infrastruktur kawasan perbatasan									
					jumlah laporan	0,00	5.07 - PENGELOAAN PERBATASAN	5.07.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	5.07.02.1.01 - Pelaksanaan Kewilayah Perbatasan	5.07.02.1.01.01 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Perbatasan	jumlah laporan	2 Laporan	
60.				17 Pembangunan Gedung Koperas di Wlayah Perbatasan									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Jumlah Gedung Koperasi yang dibangun	0,00	5.07 - PENGELOAAN PERBATASAN	5.07.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	5.07.02.1.01 - Pelaksanaan Kewilayah Perbatasan	5.07.02.1.01.01 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Perbatasan	Jumlah Gedung Koperasi yang dibangun	2 Unit	
61.				18 Pembangunan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat di Kawasan Perbatasan									
					Jumlah Rumah yang Terbangun	10.000.000.000,00	5.07 - PENGELOAAN PERBATASAN	5.07.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	5.07.02.1.01 - Pelaksanaan Kewilayah Perbatasan	5.07.02.1.01.01 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Perbatasan	Jumlah Rumah yang Terbangun	20 Unit	
62.				20 Penataan dan Pemeliharaan Lingkungan Pos Lintas Batas (PPLB)									
					Jumlah pos lintas batas yang dilakukan penataan	300.000.000,00	5.07 - PENGELOAAN PERBATASAN	5.07.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	5.07.02.1.01 - Pelaksanaan Kewilayah Perbatasan	5.07.02.1.01.01 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Perbatasan	Jumlah pos lintas batas yang dilakukan penataan	2 Unit	
63.				21 Pembangunan Rumah Adat di Kawasan Perbatasan									
					Jumlah rumah adat yang terbangun	250.000.000,00	5.07 - PENGELOAAN PERBATASAN	5.07.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	5.07.02.1.01 - Pelaksanaan Kewilayah Perbatasan	5.07.02.1.01.01 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Perbatasan	Jumlah rumah adat yang terbangun	1 Unit	
64.				22 Inventarisasi dan Pemutakhiran Data Infrastruktur Kawasan Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil Terluar (PPKT)									
					Jumlah dokumen	0,00	5.07 - PENGELOAAN PERBATASAN	5.07.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	5.07.02.1.01 - Pelaksanaan Kewilayah Perbatasan	5.07.02.1.01.01 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Perbatasan	Jumlah dokumen	0 Dokumen	
65.				23 Perencanaan Peningkatan Jalan Non Status di wilayah Perbatasan									
					Jumlah Dokumen	0,00	5.07 - PENGELOAAN PERBATASAN	5.07.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	5.07.02.1.01 - Pelaksanaan Kewilayah Perbatasan	5.07.02.1.01.01 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Perbatasan	Jumlah Dokumen	0 Dokumen	
66.				24 Pembangunan Rumah Penampungan (singgah) sementara bagi Repatrian dan Warga yang Bermasalah									
					Jumlah rumah yang terbangun	2.000.000.000,00	5.07 - PENGELOAAN PERBATASAN	5.07.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	5.07.02.1.01 - Pelaksanaan Kewilayah Perbatasan	5.07.02.1.01.01 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Perbatasan	Jumlah rumah yang terbangun	1 Unit	
67.				25 Pembangunan Pos Terpadu Perbatasan (Pos PLB) Laut dan Darat di Merauke, Bouven Digoel dan Kota Jayapura									
					Jumlah Pos Perbatasan yang terbangun	1.500.000.000,00	5.07 - PENGELOAAN PERBATASAN	5.07.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	5.07.02.1.01 - Pelaksanaan Kewilayah Perbatasan	5.07.02.1.01.01 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Perbatasan	Jumlah Pos Perbatasan yang terbangun	1 Unit	
68.				26 Monitoring dan Evaluasi Pembangunan di Kawasan Perbatasan RI-PNG									
					Jumlah Dokumen	500.000.000,00	5.07 - PENGELOAAN PERBATASAN	5.07.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	5.07.02.1.01 - Pelaksanaan Kewilayah Perbatasan	5.07.02.1.01.01 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Perbatasan	Jumlah Dokumen	5 Dokumen	
69.				27 Pembangunan Gapura Perbatasan dan Tower Pemantau di Kawasan RI-PNG									
					Jumlah unit yang terbangun	0,00	5.07 - PENGELOAAN PERBATASAN	5.07.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	5.07.02.1.01 - Pelaksanaan Kewilayah Perbatasan	5.07.02.1.01.01 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Perbatasan	Jumlah unit yang terbangun	0 Unit	
70.				28 Penyusunan Grand Design Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan dan PPKT									
					Jumlah Dokumen	0,00	5.07 - PENGELOAAN PERBATASAN	5.07.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	5.07.02.1.01 - Pelaksanaan Kewilayah Perbatasan	5.07.02.1.01.01 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Perbatasan	Jumlah Dokumen	0 Dokumen	
71.				29 Peningkatan Keterampilan Masyarakat di Bidang Ekonomi di Kawasan Perbatasan									
					Jumlah yang terlatih	500.000.000,00	5.07 - PENGELOAAN PERBATASAN	5.07.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	5.07.02.1.01 - Pelaksanaan Kewilayah Perbatasan	5.07.02.1.01.01 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Perbatasan	Jumlah yang terlatih	20 Orang	
72.				30 Pembinaan Sanggar Budaya di Kawasan Perbatasan									
					Jumlah Sanggar Budaya yang terbina	250.000.000,00	5.07 - PENGELOAAN PERBATASAN	5.07.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	5.07.02.1.01 - Pelaksanaan Kewilayah Perbatasan	5.07.02.1.01.01 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Perbatasan	Jumlah Sanggar Budaya yang terbina	1 Kelompok	

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
73.	Administrasi Pemerintahan	100 Program Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan	Cakupan Ketersediaan Sarana Prasarana Infrastruktur dasar di perbatasan ; Cakupan Ketersediaan Sarana Prasarana Kesehatan di perbatasan ; Cakupan Ketersediaan Sarana Prasarana ekonomi di perbatasan ; Cakupan Ketersediaan guru di perbatasan ; Cakupan Ketersediaan kelas di perbatasan ; Cakupan Ketersediaan sekolah di perbatasan ; Cakupan Pos Lintas Batas yang berstandar internasional; Cakupan koordinasi pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan	31 Pameran Pembangunan dan Budaya Perbatasan									
					Jumlah Pameran	300.000.000,00	5.07 - PENGELOAAN PERBATASAN	5.07.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	5.07.02.1.01 - Pelaksanaan Kewilayah Perbatasan	5.07.02.1.01.01 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Perbatasan	Jumlah Pameran	1 Kegiatan	
74.				32 RTRW Kawasan Perbatasan dan PPKT									
					Jumlah Dokumen	0,00	5.07 - PENGELOAAN PERBATASAN	5.07.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	5.07.02.1.01 - Pelaksanaan Kewilayah Perbatasan	5.07.02.1.01.01 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Perbatasan	Jumlah Dokumen	0 Dokumen	
75.				33 Inventarisasi dan Pemutakhiran Data Potensi Kawasan Perbatasan dan PPKT									
					Jumlah Dokumen	400.000.000,00	5.07 - PENGELOAAN PERBATASAN	5.07.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	5.07.02.1.01 - Pelaksanaan Kewilayah Perbatasan	5.07.02.1.01.01 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Perbatasan	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	
76.				34 Penyusunan Naskah Akademik dan Raperdas Tata Ruang dan Hak Ulayat di Kawasan Perbatasan									
					Jumlah Dokumen	300.000.000,00	5.07 - PENGELOAAN PERBATASAN	5.07.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	5.07.02.1.01 - Pelaksanaan Kewilayah Perbatasan	5.07.02.1.01.01 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Perbatasan	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	
77.				35 Rapat Koordinasi Pembangunan dan Peningkatan Jalan Koridor Perbatasan yang Menghubungkan setiap Kab/Kota pada Wilayah Konsentrasi Pengembangan (WKP)									
					Jumlah Rapat Koordinasi	300.000.000,00	5.07 - PENGELOAAN PERBATASAN	5.07.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	5.07.02.1.01 - Pelaksanaan Kewilayah Perbatasan	5.07.02.1.01.01 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Perbatasan	Jumlah Rapat Koordinasi	2 Kegiatan	
78.				36 Penyusunan RDTR Seluruh LOKPRI di Kawasan Perbatasan									
					Jumlah Dokumen	1.000.000.000,00	5.07 - PENGELOAAN PERBATASAN	5.07.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	5.07.02.1.01 - Pelaksanaan Kewilayah Perbatasan	5.07.02.1.01.01 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Perbatasan	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	
79.				37 Penyusunan RTBL Seluruh LOKPRI di Kawasan Perbatasan PPKT									
					Jumlah Dokumen	0,00	5.07 - PENGELOAAN PERBATASAN	5.07.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	5.07.02.1.01 - Pelaksanaan Kewilayah Perbatasan	5.07.02.1.01.01 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Perbatasan	Jumlah Dokumen	0 Dokumen	
80.				38 Pembebasan SD Lahan yang dipakai untuk Sarana dan Prasarana Infrastruktur Perbatasan									
					Jumlah lahan yang dibebaskan	0,00	5.07 - PENGELOAAN PERBATASAN	5.07.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	5.07.02.1.01 - Pelaksanaan Kewilayah Perbatasan	5.07.02.1.01.01 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Perbatasan	Jumlah lahan yang dibebaskan	0 Ha	
81.				39 Perencana Tapak Kawasan (Rencana Teknis Ruang Struktural) atau DED Pos Terpadu Perbatasan									
					Jumlah Dokumen	0,00	5.07 - PENGELOAAN PERBATASAN	5.07.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	5.07.02.1.01 - Pelaksanaan Kewilayah Perbatasan	5.07.02.1.01.01 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Perbatasan	Jumlah Dokumen	0 Dokumen	
82.				40 Pembangunan Pasar Tradisional Pada masing-masing distrik LOKPRI									
					Jumlah pasar yang terbangun	800.000.000,00	5.07 - PENGELOAAN PERBATASAN	5.07.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	5.07.02.1.01 - Pelaksanaan Kewilayah Perbatasan	5.07.02.1.01.01 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Perbatasan	Jumlah pasar yang terbangun	1 Unit	

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
83.	Administrasi Pemerintahan	100 Program Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan	Cakupan Ketersediaan Sarana Prasarana Infrastruktur dasar di perbatasan ; Cakupan Ketersediaan Sarana Prasarana Kesehatan di perbatasan ; Cakupan Ketersediaan Sarana Prasarana ekonomi di perbatasan ; Cakupan Ketersediaan guru di perbatasan ; Cakupan Ketersediaan kelas di perbatasan ; Cakupan Ketersediaan sekolah di perbatasan ; Cakupan Pos Lintas Batas yang berstandar internasional; Cakupan koordinasi pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan	41 Pembangunan Fasilitas Pendukung Pasar (Terminal dan Pergudangan)									
					Jumlah pasar yang tersedia fasilitasnya	750.000.000,00	5.07 - PENGELOAAN PERBATASAN	5.07.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	5.07.02.1.01 - Pelaksanaan Kewilayah Perbatasan	5.07.02.1.01.01 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Perbatasan	Jumlah pasar yang tersedia fasilitasnya	1 Unit	
84.				42 Pembangunan Lokasi Pariwisata Sesuai dengan ODTW di Kawasan Perbatasan dan PPKT									
					Jumlah lokasi yang dikembangkan	500.000.000,00	5.07 - PENGELOAAN PERBATASAN	5.07.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	5.07.02.1.01 - Pelaksanaan Kewilayah Perbatasan	5.07.02.1.01.01 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Perbatasan	Jumlah lokasi yang dikembangkan	1 Lokasi	
85.				43 Pembangunan Pasar-pasar induk dan Tradisional di Kawasan Perbatasan									
					Jumlah pasar yang terbangun	1.000.000.000,00	5.07 - PENGELOAAN PERBATASAN	5.07.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	5.07.02.1.01 - Pelaksanaan Kewilayah Perbatasan	5.07.02.1.01.01 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Perbatasan	Jumlah pasar yang terbangun	1 Unit	
86.				44 Pembangunan Jalan Yetetkun (RI) - Ambaga (PNG), merupakan aksesibilitas perdagangan Perbatasan antar negara									
					Panjang jalan yang terbangun	0,00	5.07 - PENGELOAAN PERBATASAN	5.07.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	5.07.02.1.01 - Pelaksanaan Kewilayah Perbatasan	5.07.02.1.01.01 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Perbatasan	Panjang jalan yang terbangun	0 Km	
87.				45 Sosialisasi Perpres No 32 tahun 2015 tentang rencana tata ruang kawasan perbatasan di Provinsi Papua									
					Jumlah orang mendapatkan sosialisasi	0,00	5.07 - PENGELOAAN PERBATASAN	5.07.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	5.07.02.1.01 - Pelaksanaan Kewilayah Perbatasan	5.07.02.1.01.01 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Perbatasan	Jumlah orang mendapatkan sosialisasi	0 Orang	
88.				46 Rapat Koordinasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan kawasan Perbatasan dan Pulau-pulau terluar antar negara di Provinsi Papua									
					Jumlah peserta rapat koordinasi	500.000.000,00	5.07 - PENGELOAAN PERBATASAN	5.07.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	5.07.02.1.01 - Pelaksanaan Kewilayah Perbatasan	5.07.02.1.01.01 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Perbatasan	Jumlah peserta rapat koordinasi	50 Orang	
89.				47 Pembangunan Tambatan Perahu/Dermaga di kabupaten/Kota perbatasan PPKT									
					Tersedianya Dermaga di kabupaten/kota perbatasan PPKT	2.500.000.000,00	5.07 - PENGELOAAN PERBATASAN	5.07.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	5.07.02.1.01 - Pelaksanaan Kewilayah Perbatasan	5.07.02.1.01.01 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Perbatasan	Tersedianya Dermaga di kabupaten/kota perbatasan PPKT	1 Unit	
					Jumlah tambatan perahu/dermaga kabupaten/kota perbatasan dan PPPKT	0,00	5.07 - PENGELOAAN PERBATASAN	5.07.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	5.07.02.1.01 - Pelaksanaan Kewilayah Perbatasan	5.07.02.1.01.01 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Perbatasan	Jumlah tambatan perahu/dermaga kabupaten/kota perbatasan dan PPPKT	0 Lokasi	
90.		101 Program Pengelolaan Batas Wilayah dan Lintas Batas	Cakupan Ketersediaan Sarana Prasarana Infrastruktur dasar di perbatasan ; Cakupan Ketersediaan Sarana Prasarana ekonomi di perbatasan ; Cakupan koordinasi pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan	3 Sosialisasi Basic Agreement Bagi Masyarakat Perbatasan									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang peraturan lintas batas	500.000.000,00	5.07 - PENGELOAAN PERBATASAN	5.07.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	5.07.02.1.01 - Pelaksanaan Kewilayah Perbatasan	5.07.02.1.01.01 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Perbatasan	Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang peraturan lintas batas	100 Orang Lokasi	
91.				5 Joint Verifikasi Pelintas Batas Wilayah RI-PNG									
					Jumlah pelintas batas yang diverifikasi	500.000.000,00	5.07 - PENGELOAAN PERBATASAN	5.07.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	5.07.02.1.01 - Pelaksanaan Kewilayah Perbatasan	5.07.02.1.01.01 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Perbatasan	Jumlah pelintas batas yang diverifikasi	200 Orang	
					Jumlah pelintas batas yang di verifikasi	0,00	5.07 - PENGELOAAN PERBATASAN	5.07.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	5.07.02.1.01 - Pelaksanaan Kewilayah Perbatasan	5.07.02.1.01.01 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Perbatasan	Jumlah pelintas batas yang di verifikasi	0 Orang	
92.				13 Penataran Pengelola Perbatasan Satu Atap									
					Meningkatkan pola pikir dan pola tindak pejabat pengelola perbatasan dalam implementasi kebijakan perbatasan	500.000.000,00	5.07 - PENGELOAAN PERBATASAN	5.07.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	5.07.02.1.01 - Pelaksanaan Kewilayah Perbatasan	5.07.02.1.01.01 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Perbatasan	Meningkatkan pola pikir dan pola tindak pejabat pengelola perbatasan dalam implementasi kebijakan perbatasan	50 Orang	
93.				14 Border Liasion Meeting (BLM) RI-PNG									
					Rekoendasi hasil perundingan RI-PNG	0,00	5.07 - PENGELOAAN PERBATASAN	5.07.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	5.07.02.1.01 - Pelaksanaan Kewilayah Perbatasan	5.07.02.1.01.01 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Perbatasan	Rekoendasi hasil perundingan RI-PNG	0 Dokumen	
94.				15 Border Liasion Officer Meeting (BLOM) RI-PNG									
					Kesepakatan penanganan perbatasan	0,00						0 Dokumen	
95.				16 Penjajakan Kerjasama Luar Negeri									
					Terlaksananya penjajakan kerjasama luar negeri	0,00						0 Dokumen	
96.				17 Border Trade RI-PNG dan Negara Pasifik Selatan									
					Meningkatnya Border Trade Fair RI-PNG dan Negara Pasifik Selatan	750.000.000,00	5.07 - PENGELOAAN PERBATASAN	5.07.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	5.07.02.1.01 - Pelaksanaan Kewilayah Perbatasan	5.07.02.1.01.01 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Perbatasan	Meningkatnya Border Trade Fair RI-PNG dan Negara Pasifik Selatan	1 Kegiatan	
97.				18 Pelayanan Kunjungan Tamu Negara									
					Meningkatnya pelayanan kunjungan tamu negara	0,00	5.07 - PENGELOAAN PERBATASAN	5.07.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	5.07.02.1.01 - Pelaksanaan Kewilayah Perbatasan	5.07.02.1.01.01 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Perbatasan	Meningkatnya pelayanan kunjungan tamu negara	0 Kali	
					Terlayannya 12 kali kunjungan tamu negara	0,00	5.07 - PENGELOAAN PERBATASAN	5.07.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	5.07.02.1.01 - Pelaksanaan Kewilayah Perbatasan	5.07.02.1.01.01 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Perbatasan	Terlayannya 12 kali kunjungan tamu negara	0 Kali	
98.				19 Joint Verifikasi pencemaran sungai Fly RI-PNG									
					Diketuainya upaya penyelesaian pencemaran sungai fly RI-PNG	0,00						0 Dokumen	
99.				20 Joint Verifikasi permasalahan perbatasan RI-PNG									
					Diketuainya upaya penyelesaian permasalahan perbatasan RI-PNG	500.000.000,00	5.07 - PENGELOAAN PERBATASAN	5.07.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	5.07.02.1.01 - Pelaksanaan Kewilayah Perbatasan	5.07.02.1.01.01 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Perbatasan	Diketuainya upaya penyelesaian permasalahan perbatasan RI-PNG	1 Dokumen	
100.				21 Penataran manajemen tingkat dasar, lanjut dan mahir pembina garda batas									
					Meningkatnya SDM Pembina Garda Batas Tk. Dasar, Lanjut dan Mahir	300.000.000,00	5.07 - PENGELOAAN PERBATASAN	5.07.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	5.07.02.1.01 - Pelaksanaan Kewilayah Perbatasan	5.07.02.1.01.01 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Perbatasan	Meningkatnya SDM Pembina Garda Batas Tk. Dasar, Lanjut dan Mahir	50 Orang	
101.				22 Pendataan dan Verifikasi WNI asal Papua di PNG									
					Terdatanya WNI asal Papua di PNG	500.000.000,00	5.07 - PENGELOAAN PERBATASAN	5.07.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	5.07.02.1.01 - Pelaksanaan Kewilayah Perbatasan	5.07.02.1.01.01 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Perbatasan	Terdatanya WNI asal Papua di PNG	1 Dokumen	
102.				23 Pemeliharaan Pilar batas RI-PNG									
					Tertata dan Terpeliharanya Pilar Batas Negara RI-PNG	300.000.000,00	5.07 - PENGELOAAN PERBATASAN	5.07.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	5.07.02.1.01 - Pelaksanaan Kewilayah Perbatasan	5.07.02.1.01.01 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Perbatasan	Tertata dan Terpeliharanya Pilar Batas Negara RI-PNG	1 Lokasi	
103.				24 Pembinaan pelintas batas tradisional yang kembali ke RI									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Terbinanya pelintas batas tradisional yang kembali ke RI	500.000.000,00	5.07 - PENGELOAAN PERBATASAN	5.07.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	5.07.02.1.01 - Pelaksanaan Kewilayah Perbatasan	5.07.02.1.01.01 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Perbatasan	Terbinanya pelintas batas tradisional yang kembali ke RI	50 Orang	
104.				25 Penanganan pemulangan repartran asal Indonesia									
					Tertangannya repatrian asal Indonesia	500.000.000,00	5.07 - PENGELOAAN PERBATASAN	5.07.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	5.07.02.1.01 - Pelaksanaan Kewilayah Perbatasan	5.07.02.1.01.01 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Perbatasan	Tertangannya repatrian asal Indonesia	50 Orang	
					Jumlah repatrian asal indonesia yang tertangani	0,00	5.07 - PENGELOAAN PERBATASAN	5.07.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	5.07.02.1.01 - Pelaksanaan Kewilayah Perbatasan	5.07.02.1.01.01 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Perbatasan	Jumlah repatrian asal indonesia yang tertangani	0 Orang	
105.				26 Pelatihan penanganan bencana alam dan kecelakaan RI-PNG									
					Meningkatnya aparatur SDM paratur dalam penanganan bencana alam dan kecelakaan RI-PNG	300.000.000,00	5.07 - PENGELOAAN PERBATASAN	5.07.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	5.07.02.1.01 - Pelaksanaan Kewilayah Perbatasan	5.07.02.1.01.01 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Perbatasan	Meningkatnya aparatur SDM paratur dalam penanganan bencana alam dan kecelakaan RI-PNG	50 Orang	
					Meningkatnya hubungan kerjasama penanganan bencana alam RI-PNG	0,00	5.07 - PENGELOAAN PERBATASAN	5.07.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	5.07.02.1.01 - Pelaksanaan Kewilayah Perbatasan	5.07.02.1.01.01 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Perbatasan	Meningkatnya hubungan kerjasama penanganan bencana alam RI-PNG	0 Ton	
106.				27 Rakornis Pengelola Perbatasan RI-PNG									
					Rekomendasi hsil Rakornis Pengelolaan Perbatasan	500.000.000,00	5.07 - PENGELOAAN PERBATASAN	5.07.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	5.07.02.1.01 - Pelaksanaan Kewilayah Perbatasan	5.07.02.1.01.01 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Perbatasan	Rekomendasi hsil Rakornis Pengelolaan Perbatasan	1 Dos	
107.				28 Pameran Pembangunan dan Budaya Kawasan Perbatasan									
					Terinformasinya hasil pembangunan dan budaya kawasan perbatasan	500.000.000,00	5.07 - PENGELOAAN PERBATASAN	5.07.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	5.07.02.1.01 - Pelaksanaan Kewilayah Perbatasan	5.07.02.1.01.01 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Perbatasan	Terinformasinya hasil pembangunan dan budaya kawasan perbatasan	1 Kegiatan	
108.				29 Penyusunan pelaporan TP2K OPD									
					Tersedianya laporan TP2K OPD	100.000.000,00	5.07 - PENGELOAAN PERBATASAN	5.07.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	5.07.02.1.01 - Pelaksanaan Kewilayah Perbatasan	5.07.02.1.01.01 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Perbatasan	Tersedianya laporan TP2K OPD	12 Dokumen	
109.				30 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan OPD									
					Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kegiatan OPD	500.000.000,00	5.07 - PENGELOAAN PERBATASAN	5.07.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	5.07.02.1.01 - Pelaksanaan Kewilayah Perbatasan	5.07.02.1.01.01 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Perbatasan	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kegiatan OPD	1 Dokumen	
110.				31 Peningkatan Keerampilan Home Industry bagi Masyarakat Kawasan Perbatasan									
111.				32 Sosialisasi Pengelola Perbatasan Satu Atap									
112.				33 Sosialisasi Pengelolaan Perbatasan Satu Atap									
					Jumlah Peserta	300.000.000,00	5.07 - PENGELOAAN PERBATASAN	5.07.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	5.07.02.1.01 - Pelaksanaan Kewilayah Perbatasan	5.07.02.1.01.01 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Perbatasan	Jumlah Peserta	1 Orang	
113.				34 Pelatihan Manajemen Tingkat Dasar, Lanjut dan Mahir Pembina Garda Batas									
					Jumlah Peserta	300.000.000,00	5.07 - PENGELOAAN PERBATASAN	5.07.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	5.07.02.1.01 - Pelaksanaan Kewilayah Perbatasan	5.07.02.1.01.01 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Perbatasan	Jumlah Peserta	50 Orang	
114.				35 Forum SKPD Pengelolaan Perbatasan									
					Jumlah Peserta Forum	0,00	5.07 - PENGELOAAN PERBATASAN	5.07.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	5.07.02.1.01 - Pelaksanaan Kewilayah Perbatasan	5.07.02.1.01.01 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Perbatasan	Jumlah Peserta Forum	0 Orang	
115.				36 Kegiatan Pembuatan Media Informasi Peraturan Lintas Batas									
					Jumlah Media Informasi Peraturan Lintas Batas	0,00						0 Media	
116.				37 Evaluasi dan Pendampingan ke Daerah Perbatasan									
					Jumlah Orang Yang Melakukan Pendampingan	500.000.000,00	5.07 - PENGELOAAN PERBATASAN	5.07.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	5.07.02.1.01 - Pelaksanaan Kewilayah Perbatasan	5.07.02.1.01.01 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Perbatasan	Jumlah Orang Yang Melakukan Pendampingan	1 Orang	
117.		112 Program Peningkatan Hubungan Kerjasama Luar Negeri	Cakupan kerjasama antara negara di kawasan perbatasan yang diimplementasikan	1 Border Liaison Meeting (BLM)									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Jumlah Liaison Meeting	1.000.000.000,00	5.07 - PENGELOAAN PERBATASAN	5.07.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	5.07.02.1.01 - Pelaksanaan Kewilayah Perbatasan	5.07.02.1.01.01 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Perbatasan	Jumlah Liaison Meeting	1 Kali Tahun	
					Jumlah kesepakatan	0,00	5.07 - PENGELOAAN PERBATASAN	5.07.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	5.07.02.1.01 - Pelaksanaan Kewilayah Perbatasan	5.07.02.1.01.01 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Perbatasan	Jumlah kesepakatan	0 Dokumen	
118.				2 Border Liaison Officer Meeting (BLOM)									
					Jumlah Liaison Officer Meeting	800.000.000,00	5.07 - PENGELOAAN PERBATASAN	5.07.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	5.07.02.1.01 - Pelaksanaan Kewilayah Perbatasan	5.07.02.1.01.01 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Perbatasan	Jumlah Liaison Officer Meeting	0 Kali Tahun	
					Jumlah kesepakatan	0,00	5.07 - PENGELOAAN PERBATASAN	5.07.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	5.07.02.1.01 - Pelaksanaan Kewilayah Perbatasan	5.07.02.1.01.01 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Perbatasan	Jumlah kesepakatan	0 Dokumen	
119.				3 Penjajakan Kerjasama Luar Negeri									
					Jumlah Kerjasama	500.000.000,00	5.07 - PENGELOAAN PERBATASAN	5.07.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	5.07.02.1.01 - Pelaksanaan Kewilayah Perbatasan	5.07.02.1.01.01 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Perbatasan	Jumlah Kerjasama	1 Kali Tahun	
120.				4 Border Trade RI - PNG dan Negera Passfik Selatan									
					Jumlah Peserta Pameran	750.000.000,00	5.07 - PENGELOAAN PERBATASAN	5.07.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	5.07.02.1.01 - Pelaksanaan Kewilayah Perbatasan	5.07.02.1.01.01 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Perbatasan	Jumlah Peserta Pameran	100 Orang Kegiatan	
121.				5 Pelayanan Kunjungan Tamu Negeri									
					Jumlah kunjungan	300.000.000,00	5.07 - PENGELOAAN PERBATASAN	5.07.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	5.07.02.1.01 - Pelaksanaan Kewilayah Perbatasan	5.07.02.1.01.01 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Perbatasan	Jumlah kunjungan	24 Kali Tahun	
122.				6 Pendataan dan Verifikasi WNI asal Papua di PNG									
					Jumlah WNI asal Papua di PNG	0,00	5.07 - PENGELOAAN PERBATASAN	5.07.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	5.07.02.1.01 - Pelaksanaan Kewilayah Perbatasan	5.07.02.1.01.01 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Perbatasan	Jumlah WNI asal Papua di PNG	0 Orang	
123.				8 Peningkatan Kerjasama Ekonomi dan Sosial Budaya Masyarakat Perbatasan									
					Jumlah Kerjasama	300.000.000,00	5.07 - PENGELOAAN PERBATASAN	5.07.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	5.07.02.1.01 - Pelaksanaan Kewilayah Perbatasan	5.07.02.1.01.01 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Perbatasan	Jumlah Kerjasama	1 Kegiatan	
124.				9 Peningkatan Kerjasama Luar Negeri									
					Jumlah Kerjasama Luar Negeri	300.000.000,00	5.07 - PENGELOAAN PERBATASAN	5.07.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	5.07.02.1.01 - Pelaksanaan Kewilayah Perbatasan	5.07.02.1.01.01 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Perbatasan	Jumlah Kerjasama Luar Negeri	1 Kegiatan	
125.				10 Riset dan Pengembangan Konektivitas antar Wilayah dan Kawasan									
					Jumlah Dokumen Yang di Hasilkan	500.000.000,00	5.07 - PENGELOAAN PERBATASAN	5.07.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	5.07.02.1.01 - Pelaksanaan Kewilayah Perbatasan	5.07.02.1.01.01 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Perbatasan	Jumlah Dokumen Yang di Hasilkan	1 Dokumen	
126.				14 Peningkatan Kerjasama Sister Province Papua - Yamagata Prefecture									
					Jumlah kerjasama	600.000.000,00	5.07 - PENGELOAAN PERBATASAN	5.07.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	5.07.02.1.01 - Pelaksanaan Kewilayah Perbatasan	5.07.02.1.01.01 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Perbatasan	Jumlah kerjasama	1 Dokumen	
127.				15 Peningkatan Kerjasama Sister Province									
					Jumlah kerjasama	0,00	5.07 - PENGELOAAN PERBATASAN	5.07.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	5.07.02.1.01 - Pelaksanaan Kewilayah Perbatasan	5.07.02.1.01.01 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Perbatasan	Jumlah kerjasama	0 Dokumen	
128.				17 Penyusunan MoU Kerjasama Sister Province dengan West Sepik, Madang, Morobe									
					Jumlah MoU	400.000.000,00	5.07 - PENGELOAAN PERBATASAN	5.07.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	5.07.02.1.01 - Pelaksanaan Kewilayah Perbatasan	5.07.02.1.01.01 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Perbatasan	Jumlah MoU	1 Dokumen	
129.				18 Pendataan dan Verifikasi Masyarakat Papua yang Berada di Papua Ner Guinea									
					Jumlah dokumen data dan verifikasi	0,00	5.07 - PENGELOAAN PERBATASAN	5.07.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	5.07.02.1.01 - Pelaksanaan Kewilayah Perbatasan	5.07.02.1.01.01 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Perbatasan	Jumlah dokumen data dan verifikasi	0 Dokumen	
130.				19 Festival Budaya Melanesia									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Jumlah Acara	0,00	5.07 - PENGELOAAN PERBATASAN	5.07.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	5.07.02.1.01 - Pelaksanaan Kewilayah Perbatasan	5.07.02.1.01.01 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Perbatasan	Jumlah Acara	0 Kegiatan	
131.				20 Penyusunan Naskah Akademik dan Raperdas Grand Design Pemulangan Pelintas Batas dari Luar Negeri									
					Jumlah Dokumen	500.000.000,00	5.07 - PENGELOAAN PERBATASAN	5.07.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	5.07.02.1.01 - Pelaksanaan Kewilayah Perbatasan	5.07.02.1.01.01 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Perbatasan	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	
132.				21 Rakornis Pengelola Perbatasan									
					Jumlah Rapat Koordinasi	0,00	5.07 - PENGELOAAN PERBATASAN	5.07.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	5.07.02.1.01 - Pelaksanaan Kewilayah Perbatasan	5.07.02.1.01.01 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Perbatasan	Jumlah Rapat Koordinasi	1 Kegiatan	
133.				22 Peningkatan Kualitas Aparatur Pengelola Perbatasan									
					Jumlah aparatur	0,00	5.07 - PENGELOAAN PERBATASAN	5.07.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	5.07.02.1.01 - Pelaksanaan Kewilayah Perbatasan	5.07.02.1.01.01 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Perbatasan	Jumlah aparatur	0 Orang	
134.				23 Sosialisasi Basic Agreement Bagi Masyarakat Perbatasan									
					Jumlah Dokumen Kerjasama	0,00	5.07 - PENGELOAAN PERBATASAN	5.07.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	5.07.02.1.01 - Pelaksanaan Kewilayah Perbatasan	5.07.02.1.01.01 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Perbatasan	Jumlah Dokumen Kerjasama	100 Dokumen	
					Jumlah peserta kegiatan	0,00	5.07 - PENGELOAAN PERBATASAN	5.07.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	5.07.02.1.01 - Pelaksanaan Kewilayah Perbatasan	5.07.02.1.01.01 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Perbatasan	Jumlah peserta kegiatan	0 Orang	
135.				24 Pembuatan Media Informasi Peraturan Lintas Batas									
					Jumlah Media Informasi	0,00	5.07 - PENGELOAAN PERBATASAN	5.07.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	5.07.02.1.01 - Pelaksanaan Kewilayah Perbatasan	5.07.02.1.01.01 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Perbatasan	Jumlah Media Informasi	0 Dokumen	
136.				25 Joint Verifikasi Pelintas Batas dan Permasalahan Wilayah Perbatasan RI-PNG									
					Jumlah Dokumen Pelintas batas	0,00	5.07 - PENGELOAAN PERBATASAN	5.07.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	5.07.02.1.01 - Pelaksanaan Kewilayah Perbatasan	5.07.02.1.01.01 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Perbatasan	Jumlah Dokumen Pelintas batas	1 Dokumen	
137.				26 Joint Verifikasi Pencemaran Sungai Fly RI-PNG									
					Jumlah Dokumen Pencemaran sungai	0,00	5.07 - PENGELOAAN PERBATASAN	5.07.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	5.07.02.1.01 - Pelaksanaan Kewilayah Perbatasan	5.07.02.1.01.01 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Perbatasan	Jumlah Dokumen Pencemaran sungai	0 Dokumen	
138.				27 Penanganan Masyarakat Pelintas Batas RI-PNG yang Terkena Musibah									
					Jumlah Masyarakat yang tertangani	0,00	5.07 - PENGELOAAN PERBATASAN	5.07.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	5.07.02.1.01 - Pelaksanaan Kewilayah Perbatasan	5.07.02.1.01.01 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Perbatasan	Jumlah Masyarakat yang tertangani	1 Orang	
139.				29 Pembinaan Pelintas Batas Tradisional yang Kembali ke RI									
					Jumlah Pelintas batas yang dibina	0,00	5.07 - PENGELOAAN PERBATASAN	5.07.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	5.07.02.1.01 - Pelaksanaan Kewilayah Perbatasan	5.07.02.1.01.01 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Perbatasan	Jumlah Pelintas batas yang dibina	50 Orang	
140.				30 Pelatihan Penanganan Bencana Alam dan Kecelakaan di RI-PNG									
					Jumlah Peserta	0,00	5.07 - PENGELOAAN PERBATASAN	5.07.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	5.07.02.1.01 - Pelaksanaan Kewilayah Perbatasan	5.07.02.1.01.01 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Perbatasan	Jumlah Peserta	20 Orang	
141.				31 Penyusunan Grand Design Penanganan Pelintas Batas yang kembali dari negara lain									
					Jumlah Dokumen Grand Design	0,00	5.07 - PENGELOAAN PERBATASAN	5.07.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	5.07.02.1.01 - Pelaksanaan Kewilayah Perbatasan	5.07.02.1.01.01 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Perbatasan	Jumlah Dokumen Grand Design	1 Dokumen	
142.				32 Pengadaan Sarana Prasarana Pengamanan Perbatasan RI-PNG									
					Jumlah Prasarana pengamanan Perbatasan	1.000.000.000,00	5.07 - PENGELOAAN PERBATASAN	5.07.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	5.07.02.1.01 - Pelaksanaan Kewilayah Perbatasan	5.07.02.1.01.01 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Perbatasan	Jumlah Prasarana pengamanan Perbatasan	2 Unit	
JUMLAH						87.927.408.000,00							

Mengetahui,
Kepala Bappeda Provinsi Papua

YOHANES WALILO, S.Sos, M.Si
NIP. 197007281997121001

JAYAPURA, 20 July 2020
Kepala Biro Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi
Papua

Suzana D. Wanggai, S.Pd, MSocSc
NIP. 196808211996102001

**REKAPITULASI PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021
SERTA KETERKAITAN DENGAN HASIL PEMETAAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019**

PROVINSI : Papua
PERANGKAT DAERAH : Inspektorat

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Pengawasan	1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	À Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	1 Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang disediakan	15.000.000,00		4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.02.01.1.03 - Administrasi Umum	4.02.01.1.03.01 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang terkirim	800 Surat	
2.				2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Jasa Layanan berlangganan Listrik, Air, Telepon, Transponder	50.995.720,00		4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.02.01.1.03 - Administrasi Umum	4.02.01.1.03.02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Layanan	3 Layanan	
3.				6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Unit Mobil Dinas/Operasional yang terpelihara dan Terfasilitasi Perijinannya	22.500.000,00		4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.02.01.1.03 - Administrasi Umum	4.02.01.1.03.06 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Unit Mobil Dinas/Operasional yang diservis dan dipelihara	30 Unit	
4.				7 Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Honor yang terbayarkan	170.400.000,00		4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.02.01.1.03 - Administrasi Umum	4.02.01.1.03.07 - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pegawai yang membuat laporan	5 Orang	
5.				8 Penyediaan jasa kebersihan kantor	Luas Gedung dan Halaman yang disediakan jasa kebersihan	0,00		4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.02.01.1.03 - Administrasi Umum	4.02.01.1.03.08 - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	jumlah Gedung dan Halaman yang dibersihkan	145 M2	
					Jumlah tenaga kebersihan dan Fasilitas Pendukung kebersihan kantor	14.000.000,00		4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.02.01.1.03 - Administrasi Umum	4.02.01.1.03.08 - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah tenaga kebersihan	2 Orang	
					Jumlah Jenis Bahan dan Alat Kebersihan	0,00		4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.02.01.1.03 - Administrasi Umum	4.02.01.1.03.14 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Bahan dan Alat Kebersihan	15 Jenis	
6.				10 Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	310.000.000,00		4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.02.01.1.03 - Administrasi Umum	4.02.01.1.03.10 - Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	80 Jenis	
7.				11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan	100.000.000,00		4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.02.01.1.03 - Administrasi Umum	4.02.01.1.03.11 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan	6 Jenis	
					Jumlah penggandaan	0,00		4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.02.01.1.03 - Administrasi Umum	4.02.01.1.03.11 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penggandaan	1000 Lembar	
					Jumlah Jenis Barang Cetak dan yang Disediakan	0,00		4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.02.01.1.03 - Administrasi Umum	4.02.01.1.03.11 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 Jenis	
					Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	0,00		4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.02.01.1.03 - Administrasi Umum	4.02.01.1.03.11 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	12 Bulan	
8.				15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	39.340.000,00		4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.02.01.1.03 - Administrasi Umum	4.02.01.1.03.15 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	7800 Jenis	
9.				17 Penyediaan makanan dan minuman									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Pelaksanaan penyediaan makan dan minum	0,00		4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.02.01.1.03 - Administrasi Umum	4.02.01.1.03.17 - Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Porsi makan dan minum kegiatan yang tersedia	50 Kegiatan	
					Pelaksanaan makan minum tamu dan rapat	0,00		4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.02.01.1.03 - Administrasi Umum	4.02.01.1.03.17 - Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Porsi makan dan minum yang tersedia	2500 Kali Tahun	
					Pelaksanaan makan minum saat olah raga (hari Jumat)	0,00		4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.02.01.1.03 - Administrasi Umum	4.02.01.1.03.17 - Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Porsi makan dan minum yang tersedia	40 Kali	
					Tersediannya Makanan dan Minuman	0,00		4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.02.01.1.03 - Administrasi Umum	4.02.01.1.03.17 - Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Porsi makan dan minum yang tersedia	12 Bulan	
					Jumlah orang yang disediakan makan dan minuman	450.000.000,00		4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.02.01.1.03 - Administrasi Umum	4.02.01.1.03.17 - Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Porsi makan dan minum yang tersedia	700 Orang	
10.				18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah									
					Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	2.063.000.000,00		4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.02.01.1.03 - Administrasi Umum	4.02.01.1.03.18 - Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	35 Orang	
11.				19 Penyediaan Jasa Pengamanan									
					Pelaksanaan pembayaran insentif bagi tenaga operator dan penjaga X-Ray VIP Room Bandara Sentani	0,00		4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.02.01.1.03 - Administrasi Umum	4.02.01.1.03.01 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa keamanan/security yang dibayarkan	0 Orang Bulan	
					Pelaksanaan pembayaran honor bagi satpam	36.000.000,00		4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.02.01.1.03 - Administrasi Umum	4.02.01.1.03.01 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa keamanan/security yang dibayarkan	2 Orang Bulan	
					Pelaksanaan uang makan satpam	0,00		4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.02.01.1.03 - Administrasi Umum	4.02.01.1.03.01 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa keamanan/security yang dibayarkan	0 Orang Bulan	
					Jumlah tenaga pengamanan	18.000.000,00		4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.02.01.1.03 - Administrasi Umum	4.02.01.1.03.01 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa keamanan/security yang dibayarkan	2 Orang	
12.		2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	À Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	3 Pembangunan gedung kantor									
					Luas bangunan yang dibangun	0,00		4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.02.01.1.03 - Administrasi Umum	4.02.01.1.03.39 - Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Luas bangunan yang dibangun	0 M2	
					Tersedianya desain perencanaan bangunan	0,00		4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.02.01.1.03 - Administrasi Umum	4.02.01.1.03.39 - Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Tersedianya desain perencanaan bangunan	0 Dokumen	
13.				5 Pengadaan kendaraan dinas/operasional									
					Jumlah kendaraan yang diadakan	1.298.000.000,00		4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.02.01.1.03 - Administrasi Umum	4.02.01.1.03.21 - Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda 4	4 Unit	
					Jumlah kendaraan roda 2	117.000.000,00		4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.02.01.1.03 - Administrasi Umum	4.02.01.1.03.21 - Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda 2	3 Unit	
14.				7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor									
					Jumlah pengadaan perlengkapan	187.290.120,00		4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.02.01.1.03 - Administrasi Umum	4.02.01.1.03.23 - Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan	50 Unit	
15.				9 Pengadaan peralatan gedung kantor									
					Jumlah peralatan perlengkapan	416.280.000,00		4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.02.01.1.03 - Administrasi Umum	4.02.01.1.03.25 - Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan/perlengkapan yang diadakan	44 Unit	
16.				10 Pengadaan mebeleur									
					Jumlah mebeleur yang diadakan	112.860.000,00		4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.02.01.1.03 - Administrasi Umum	4.02.01.1.03.26 - Pengadaan Mebeleur	Jumlah mebeleur yang diadakan untuk 3 UPT	50 Unit	
17.				21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas									
					Jumlah rumah dinas yang dipelihara	100.000.000,00		4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.02.01.1.03 - Administrasi Umum	4.02.01.1.03.28 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Jumlah rumah dinas yang dipelihara	1 Unit	
18.				24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	0,00		4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.02.01.1.03 - Administrasi Umum	4.02.01.1.03.31 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah dan Jenis perlengkapan/peralatan gedung kantor yang dipelihara	0 Unit	
					Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	500.000.000,00		4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.02.01.1.03 - Administrasi Umum	4.02.01.1.03.31 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang	23 Unit	
					sewa kendaraan	0,00		4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.02.01.1.03 - Administrasi Umum	4.02.01.1.03.31 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan yang diperbaiki/Service	3 Bulan	
19.				26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor									
					Pelaksanaan pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	0,00		4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.02.01.1.03 - Administrasi Umum	4.02.01.1.03.27 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Jumlah Rumah Jabatan	1 Kegiatan	
					Jumlah Perlengkapan Gedung kantor yang terpelihara	134.000.000,00		4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.02.01.1.03 - Administrasi Umum	4.02.01.1.03.33 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung kantor yang dipelihara	20 Unit	
					Tersediannya biaya pemeliharaan gedung kantor	0,00		4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.02.01.1.03 - Administrasi Umum	4.02.01.1.03.39 - Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor	0 Bulan	
20.				28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor									
					Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	50.000.000,00		4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.02.01.1.03 - Administrasi Umum	4.02.01.1.03.35 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	35 Unit	
21.		3 Program peningkatan disiplin aparatur	À Meningkatnya disiplin aparatur	2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya									
					Jumlah pakaian dinas yang diadakan	250.000.000,00		4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.02.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	4.02.01.1.04.02 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas sipil harian	110 Stel	
22.				5 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu									
					Jumlah pakaian khusus yang diadakan	120.000.000,00		4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.02.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	4.02.01.1.04.05 - Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah pakaian Batik yang diadakan	1110 Stel	
23.		5 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	À Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	1 Pendidikan dan pelatihan formal									
					Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	420.000.000,00		4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.02.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	4.02.01.1.04.09 - Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparatur mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	3 Orang	
24.				4 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal									
					Jumlah aparatur yang terlatih	120.000.000,00		4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.02.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	4.02.01.1.04.11 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40 Orang	
25.		6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	À Meningkatnya kualitas akuntabilitas OPD	1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD									
					Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	47.000.000,00		4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.02.01.1.02 - Administrasi Keuangan	4.02.01.1.02.06 - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan	12 Laporan	
					Laporan LAKIP SKPD	0,00		4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.02.01.1.01 - Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.02.01.1.01.05 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan LAKIP SKPD	0 Dokumen	
26.				2 Penyusunan laporan keuangan semesteran									
					Jumlah pelaporan keuangan semesteran yang diselesaikan tepat waktu	5.000.000,00		4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.02.01.1.02 - Administrasi Keuangan	4.02.01.1.02.07 - Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Jumlah dokumen laporan	2 Laporan	
27.				4 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun									
					Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	7.500.000,00		4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.02.01.1.02 - Administrasi Keuangan	4.02.01.1.02.09 - Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	1 Laporan	
28.				5 Penyusunan Renja, RKA dan Perubahan APBD									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Jumlah dokumen	22.000.000,00		4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.02.01.1.01 - Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.02.01.1.01.01 - Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	3 Dokumen	
29.				12 Penyusunan RENSTRA									
					Jumlah Dokumen	0,00		4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.02.01.1.01 - Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.02.01.1.01.01 - Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	0 Dokumen	
30.		21 Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Cakupan tenaga pemeriksa yang telah memiliki sertifikat kompetensi	3 Diklat sertifikasi jabatan fungsional bagi aparatur									
					Pejabat yang tersertifikasi	1.137.200.000,00	6.01 - INSPEKTORAT DAERAH	6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	6.01.03.1.01 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	6.01.03.1.01.01 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Pejabat yang bersertifikan bidang Pengawasan	45 Orang	
31.				4 Diklat Pengembangan Profesi Pengawasan									
					Jumlah Jabatan Fungsional yang mengikuti Pelatihan Peningkatan Pengetahuan Substantif Aparat Pengawasan	3.716.500.000,00	6.01 - INSPEKTORAT DAERAH	6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	6.01.03.1.01 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	6.01.03.1.01.02 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Jabatan Fungsional yang mengikuti Pelatihan Peningkatan Pengetahuan Substantif Aparat Pengawasan	40 Orang	
32.				7 Pelatihan Peningkatan Kapasitas Inspektorat									
					Jumlah Pelatihan Peningkatan Kapasitas Inspektorat	190.000.000,00	6.01 - INSPEKTORAT DAERAH	6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	6.01.03.1.01 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	6.01.03.1.01.02 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Peserta Pelatihan Singkat di Kantor Sendiri	85 Orang	
33.		24 Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Cakupan pengaduan dan gugatan masyarakat yang ditindaklanjuti	2 Penanganan kasus pengaduan masyarakat/ Non PKPT di Lingkungan Pemerintah Daerah									
					Tertanganinya Kasus Pengaduan Masyarakat/Aparatur di Lingkungan Pemerintah Daerah	2.244.200.000,00	6.01 - INSPEKTORAT DAERAH	6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	6.01.03.1.02 - Asistensi dan Pendampingan	6.01.03.1.02.01 - Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat	Jumlah Pengaduan Yang ditindaklanjuti	10 Laporan	
34.		29 Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur	Cakupan jumlah temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti ; Persentase Rekomendasi Auditor Eksternal Terhadap Pengelolaan APBD Provinsi yang Berindikasi Kerugian Daerah	1 Pemeriksaan Reguler sesuai PKPT									
					Jumlah Pembinaan dan Pengawasan SKPD Provinsi Papua	10.125.350.000,00	6.01 - INSPEKTORAT DAERAH	6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	6.01.02.1.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal	6.01.02.1.01.01 - Audit Kinerja dan Keuangan	Jumlah Laporan Pembinaan Pengawasan SKPD sesuai PKPT	35 SKPD	
					Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Kabupaten dalam PKPT	5.000.000.000,00	6.01 - INSPEKTORAT DAERAH	6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	6.01.02.1.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal	6.01.02.1.01.01 - Audit Kinerja dan Keuangan	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Kabupaten sesuai PKPT	22 Laporan	
35.				6 Pemeriksaan Dana Otonomi Khusus (OTSUS)									
					Jumlah SKPD dan Kab/Kota Pengelola Dana OTSUS	5.618.400.000,00	6.01 - INSPEKTORAT DAERAH	6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	6.01.02.1.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal	6.01.02.1.01.01 - Audit Kinerja dan Keuangan	Jumlah laporan Pemeriksaan Pengelola Dana OTSUS	16 Laporan	
36.		58 Program Peningkatan Kinerja Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan	Cakupan Implementasi SPIP pada perangkat Daerah di Lingkungan Pemprov Papua ; Cakupan tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan; Persentase OPD dengan nilai SAKIP B	1 Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Papua, Inspektorat Jenderal Departemen dan BPK RI									
					Jumlah Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi, Irjen, Kementerian dan BPK RI pada 52 SKPD dan 29 Kabupaten/Kota	2.172.450.000,00	6.01 - INSPEKTORAT DAERAH	6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	6.01.02.1.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal	6.01.02.1.01.03 - Pemantauan Kinerja dan Keuangan	Jumlah Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi, Irjen, Kementerian dan BPK RI pada 52 SKPD dan 29 Kabupaten/Kota	70 Laporan	

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37.	Pengawasan	58 Program Peningkatan Kinerja Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan	Cakupan Implementasi SPIP pada perangkat Daerah di Lingkungan Pemprov Papua ; Cakupan tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan; Persentase OPD dengan nilai SAKIP B	7 Tuntutan perbendaharaan ganti rugi keuangan dan barang daerah									
					Jumlah Sidang Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Oleh Majelis Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah Melalui Sidang MP TP-TGR	300.580.000,00	6.01 - INSPEKTORAT DAERAH	6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	6.01.02.1.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal	6.01.02.1.01.03 - Pemantauan Kinerja dan Keuangan	Jumlah Sidang Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Oleh Majelis Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah Melalui Sidang MP TP-TGR	6 Dokumen	
38.				9 Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Ke Dalam Aplikasi SIM HP									
					Jumlah Dokumen/TLHP yang diinput ke dalam Aplikasi SIM HP	247.200.000,00	6.01 - INSPEKTORAT DAERAH	6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	6.01.02.1.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal	6.01.02.1.01.03 - Pemantauan Kinerja dan Keuangan	Jumlah Dokumen/TLHP yang diinput ke dalam Aplikasi SIM HP	1 Dokumen	
39.				10 Monitoring Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)									
					Jumlah Pemantauan SPIP di SKPD Provinsi Papua	579.000.000,00	6.01 - INSPEKTORAT DAERAH	6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	6.01.02.1.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal	6.01.02.1.01.03 - Pemantauan Kinerja dan Keuangan	Jumlah Laporan Pemantauan SPIP di SKPD Provinsi Papua	35 SKPD	
40.				14 Rapat Koordinasi Pengawasan Nasional									
					Jumlah Rapat Koordinasi Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) antara Inspektorat Provinsi Papua dengan Irjen Kementerian	488.250.000,00	6.01 - INSPEKTORAT DAERAH	6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	6.01.03.1.01 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	6.01.03.1.01.02 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Laporan Kegiatan	1 Kegiatan	
41.				15 Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Tingkat Regional dan Provinsi									
					Terlaksananya Rapat Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Inspektorat Provinsi Papua, Kabupaten/Kota se Provinsi Papua dan Rapat Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) antara Inspektorat Provinsi Papua dan Irjend. Kementerian	1.617.183.750,00	6.01 - INSPEKTORAT DAERAH	6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	6.01.02.1.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal	6.01.02.1.01.03 - Pemantauan Kinerja dan Keuangan	Laporan Data Hasil Pemutakhiran	2 Dokumen	
42.				16 Forum SKPD Tingkat Provinsi									
					Jumlah Kab/Kota yang mengikuti Forum Pembahasan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) antara Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota se Provinsi Papua	892.757.400,00	6.01 - INSPEKTORAT DAERAH	6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	6.01.03.1.01 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	6.01.03.1.01.02 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Laporan Kegiatan Pembahasan	29 Kabupaten	
43.				17 Operasionalisasi Unit Sapu Bersih Pungutan Liar (SABER PUNGLI)									
					Jumlah Kab/Kota Operasi SABER PUNGLI	2.000.000.000,00	6.01 - INSPEKTORAT DAERAH	6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	6.01.02.1.02 - Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	6.01.02.1.02.01 - Audit Kinerja dan Keuangan	Laporan Operasi Saber Pungli	29 Kabupaten	
44.				18 Pengelolaan LHKPN									
					Jumlah Pelaporan LHKPN	170.000.000,00	6.01 - INSPEKTORAT DAERAH	6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	6.01.02.1.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal	6.01.02.1.01.03 - Pemantauan Kinerja dan Keuangan	Jumlah Pelaporan LHKPN	1 Laporan	
45.				19 Monitoring dan Evaluasi Laporan Gratifikasi									
					Jumlah SKPD yang di Monev	150.000.000,00	6.01 - INSPEKTORAT DAERAH	6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	6.01.02.1.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal	6.01.02.1.01.03 - Pemantauan Kinerja dan Keuangan	Jumlah SKPD yang di Monev	15 SKPD	
46.				20 Pembinaan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Jumlah SKPD yang masuk Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)	385.564.880,00	6.01 - INSPEKTORAT DAERAH	6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	6.01.02.1.02 - Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	6.01.02.1.02.03 - Pemantauan Kinerja dan Keuangan	Jumlah SKPD yang masuk Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)	8 SKPD	
47.				21 Evaluasi Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi									
					Jumlah Persentase Evaluasi Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi yang dinilai	300.000.000,00	6.01 - INSPEKTORAT DAERAH	6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	6.01.02.1.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal	6.01.02.1.01.04 - Evaluasi Kinerja dan Keuangan	Persentase Penilaian Evaluasi Mandiri Reformasi Birokrasi	50 %	
48.				22 Pengadaan Aplikasi									
					Jumlah Aplikasi e-Audit yang diadakan	0,00						0 Aplikasi	
49.				23 Peningkatan Level Kapabilitas APIP									
					Jumlah APIP yang ditingkatkan Kapabilitasnya	140.000.000,00	6.01 - INSPEKTORAT DAERAH	6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	6.01.02.1.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal	6.01.02.1.01.03 - Pemantauan Kinerja dan Keuangan	Level Kapabilitas APIP	3 Orang	
50.				24 Pemantauan Penerapan Disiplin Pegawai di SKPD									
					Jumlah Persentase Penerapan Disiplin Pegawai	500.000.000,00	6.01 - INSPEKTORAT DAERAH	6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	6.01.02.1.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal	6.01.02.1.01.03 - Pemantauan Kinerja dan Keuangan	Jumlah Persentase Penerapan Disiplin Pegawai	40 %	
JUMLAH						45.170.801.870,00							

Mengetahui,
Kepala Bappeda Provinsi Papua

YOHANES WALILO, S.Sos, M.Si
NIP. 197007281997121001

JAYAPURA, 20 July 2020
INSPEKTUR PROVINSI PAPUA

Drs. ANGIAT SITUMORANG, M.Si., Ak.,CA.,QIA.,CFrA
NIP. 19601229 198803 1 001

**REKAPITULASI PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021
SERTA KETERKAITAN DENGAN HASIL PEMETAAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019**

PROVINSI : Papua

PERANGKAT DAERAH : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Perencanaan	1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	À Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	1 Penyediaan jasa surat menyurat									
					Jumlah surat yang disediakan	250.000.000,00		4.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.03.01.1.03 - Administrasi Umum	4.03.01.1.03.01 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang terkirim	2000 Surat	
2.				2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik									
					Jumlah Jasa Layanan berlangganan Listrik, Air, Telepon, Transponder	200.000.000,00		4.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.03.01.1.03 - Administrasi Umum	4.03.01.1.03.02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Layanan	3 Layanan	
3.				3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor									
					Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	0,00		4.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.03.01.1.03 - Administrasi Umum	4.03.01.1.03.03 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	60 Unit	
4.				4 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS									
5.				6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional									
					Jumlah Unit Mobil Dinas/Operasional yang terpelihara dan Terfasilitasi Perijinannya	100.000.000,00		4.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.03.01.1.03 - Administrasi Umum	4.03.01.1.03.06 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Unit Mobil Dinas/Operasional yang diservis dan dipelihara	9 Unit	
6.				7 Penyediaan jasa administrasi keuangan									
					Jumlah Honor yang dibayarkan	60.000.000,00		4.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.03.01.1.03 - Administrasi Umum	4.03.01.1.03.07 - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pegawai yang membuat laporan	2 Orang	
7.				8 Penyediaan jasa kebersihan kantor									
					Luas Gedung dan Halaman yang disediakan jasa kebersihan	50.000.000,00		4.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.03.01.1.03 - Administrasi Umum	4.03.01.1.03.08 - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	jumlah Gedung dan Halaman yang dibersihkan	600 M2	
					Jumlah tenaga kebersihan dan Fasilitas Pendukung kebersihan kantor	14.400.000,00		4.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.03.01.1.03 - Administrasi Umum	4.03.01.1.03.08 - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah tenaga kebersihan	2 Orang	
					Jumlah Jenis Bahan dan Alat Kebersihan	100.000.000,00		4.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.03.01.1.03 - Administrasi Umum	4.03.01.1.03.14 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Bahan dan Alat Kebersihan	12 Jenis	
8.				9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja									
					Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	0,00		4.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.03.01.1.03 - Administrasi Umum	4.03.01.1.03.09 - Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	30 Unit	
9.				10 Penyediaan alat tulis kantor									
					Jumlah jenis ATK yang disediakan	1.000.000.000,00		4.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.03.01.1.03 - Administrasi Umum	4.03.01.1.03.10 - Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	50 Jenis	
10.				11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Jumlah barang cetakan	0,00		4.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.03.01.1.03 - Administrasi Umum	4.03.01.1.03.11 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan	0 Jenis	
					Jumlah penggandaan	0,00		4.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.03.01.1.03 - Administrasi Umum	4.03.01.1.03.11 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penggandaan	0 Lembar	
					Jumlah Jenis Barang Cetak dan yang Disediakan	0,00		4.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.03.01.1.03 - Administrasi Umum	4.03.01.1.03.11 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0 Jenis	
					Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	300.000.000,00		4.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.03.01.1.03 - Administrasi Umum	4.03.01.1.03.11 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	12 Bulan	
11.				12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor									
					Jumlah Komponen Listrik yang disediakan	30.400.000,00		4.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.03.01.1.03 - Administrasi Umum	4.03.01.1.03.12 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen alat pemeliharaan listrik dan genset yang disediakan	220 Buah	
12.				13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor									
					Jumlah peralatan dan Perlengkapan	365.000.000,00		4.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.03.01.1.03 - Administrasi Umum	4.03.01.1.03.25 - Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah penggandaan peralatan kantor yang disediakan	10 Unit	
13.				15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan									
					Jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	50.000.000,00		4.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.03.01.1.03 - Administrasi Umum	4.03.01.1.03.15 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	5 Jenis	
14.				17 Penyediaan makanan dan minuman									
					Pelaksanaan penyediaan makan dan minum	0,00		4.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.03.01.1.03 - Administrasi Umum	4.03.01.1.03.17 - Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Porsi makan dan minum kegiatan yang tersedia	0 Kegiatan	
					Pelaksanaan makan minum tamu dan rapat	0,00		4.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.03.01.1.03 - Administrasi Umum	4.03.01.1.03.17 - Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Porsi makan dan minum yang tersedia	0 Kali Tahun	
					Pelaksanaan makan minum saat olah raga (hari Jumat)	0,00		4.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.03.01.1.03 - Administrasi Umum	4.03.01.1.03.17 - Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Porsi makan dan minum yang tersedia	0 Kali	
					Tersediannya Makanan dan Minuman	2.000.000.000,00		4.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.03.01.1.03 - Administrasi Umum	4.03.01.1.03.17 - Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Porsi makan dan minum yang tersedia	12 Bulan	
					Jumlah orang yang disediakan makan dan minuman	200.000.000,00		4.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.03.01.1.03 - Administrasi Umum	4.03.01.1.03.17 - Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Porsi makan dan minum yang tersedia	55 Orang	
15.				18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah									
					Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	2.500.000.000,00		4.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.03.01.1.03 - Administrasi Umum	4.03.01.1.03.18 - Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	12 Orang	
16.				19 Penyediaan Jasa Pengamanan									
					Pelaksanaan pembayaran insentif bagi tenaga operator dan penjaga X-Ray VIP Room Bandara Sentani	0,00		4.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.03.01.1.03 - Administrasi Umum	4.03.01.1.03.01 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa keamanan/security yang dibayarkan	0 Orang Bulan	
					Pelaksanaan pembayaran honor bagi satpam	0,00		4.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.03.01.1.03 - Administrasi Umum	4.03.01.1.03.01 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa keamanan/security yang dibayarkan	0 Orang Bulan	
					Pelaksanaan uang makan satpam	0,00		4.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.03.01.1.03 - Administrasi Umum	4.03.01.1.03.01 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa keamanan/security yang dibayarkan	0 Orang Bulan	
					Jumlah tenaga pengamanan	177.600.000,00		4.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.03.01.1.03 - Administrasi Umum	4.03.01.1.03.01 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa keamanan/security yang dibayarkan	4 Orang	
17.		2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	À Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	3 Pembangunan gedung kantor									
					Luas bangunan yang dibangun	0,00		4.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.03.01.1.03 - Administrasi Umum	4.03.01.1.03.39 - Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Luas bangunan yang dibangun	0 M2	
					Tersedianya desain perencanaan bangunan	0,00		4.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.03.01.1.03 - Administrasi Umum	4.03.01.1.03.39 - Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Tersedianya desain perencanaan bangunan	0 Dokumen	

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18.	Perencanaan	2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	À Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	5 Pengadaan kendaraan dinas/operasional									
					Jumlah kendaraan yang diadakan	3.000.000.000,00		4.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.03.01.1.03 - Administras Umum	4.03.01.1.03.21 - Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda 4	6 Unit	
					Jumlah kendaraan roda 2	0,00		4.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.03.01.1.03 - Administras Umum	4.03.01.1.03.21 - Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda 2	0 Unit	
19.				7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor									
					Jumlah pengadaan perlengkapan	350.000.000,00		4.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.03.01.1.03 - Administras Umum	4.03.01.1.03.23 - Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan	5 Unit	
20.				9 Pengadaan peralatan gedung kantor									
					Jumlah peralatan perlengkapan	250.000.000,00		4.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.03.01.1.03 - Administras Umum	4.03.01.1.03.25 - Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan/perlengkapan yang diadakan	7 Unit	
21.				22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor									
					Jumlah gedung kantor yang dipelihara	112.000.000,00		4.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.03.01.1.03 - Administras Umum	4.03.01.1.03.29 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor	4 Unit	
					belanja sewa	0,00		4.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.03.01.1.03 - Administras Umum	4.03.01.1.03.29 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung yang disewa	0 Tahun	
22.				23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan									
					jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	173.400.000,00		4.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.03.01.1.03 - Administras Umum	4.03.01.1.03.30 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	14 Unit	
23.				24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional									
					Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	0,00		4.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.03.01.1.03 - Administras Umum	4.03.01.1.03.31 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah dan Jenis perlengkapan/peralatan gedung kantor yang dipelihara	0 Unit	
					Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	1.000.000.000,00		4.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.03.01.1.03 - Administras Umum	4.03.01.1.03.31 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang	25 Unit	
					sewa kendaraan	0,00		4.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.03.01.1.03 - Administras Umum	4.03.01.1.03.31 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan yang diperbaiki/Service	0 Bulan	
24.				26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor									
					Pelaksanaan pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	0,00		4.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.03.01.1.03 - Administras Umum	4.03.01.1.03.27 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Jumlah Rumah Jabatan	0 Kegiatan	
					Jumlah Perlengkapan Gedung kantor yang terpelihara	0,00		4.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.03.01.1.03 - Administras Umum	4.03.01.1.03.33 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung kantor yang dipelihara	0 Unit	
					Tersediannya biaya pemeliharaan gedung kantor	0,00		4.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.03.01.1.03 - Administras Umum	4.03.01.1.03.39 - Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor	0 Bulan	
25.				28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor									
					Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	100.000.000,00		4.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.03.01.1.03 - Administras Umum	4.03.01.1.03.35 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	7 Unit	
26.				29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur									
					Jumlah mebeleur yang dipelihara	0,00		4.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.03.01.1.03 - Administras Umum	4.03.01.1.03.36 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Jumlah mebeleur yang dipelihara	30 Unit	
27.				30 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor									
					Luas bangunan yang direhab	0,00		4.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.03.01.1.03 - Administras Umum	4.03.01.1.03.39 - Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Jumlah bangunan yang direhab	100 M2	
28.				46 Sewa gedung									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Jumlah gedung kantor yang disewa	250.000.000,00		4.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.03.01.1.03 - Administrasi Umum	4.03.01.1.03.27 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Jumlah rumah jabatan yang terpelihara	1 Unit Tahun	
					Sewa rumah jabatan	0,00		4.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.03.01.1.03 - Administrasi Umum	4.03.01.1.03.27 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Jumlah Rumah Jabatan Yang disewa	0 Unit Tahun	
29.		3 Program peningkatan disiplin aparatur	À Meningkatnya disiplin aparatur	2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya									
					Jumlah pakaian dinas yang diadakan	0,00		4.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.03.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	4.03.01.1.04.02 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas sipil harian	0 Stell	
30.				4 Pengadaan pakaian KORPRI									
					jumlah pakaian KORPRI yang diadakan	200.000.000,00		4.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.03.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	4.03.01.1.04.04 - Pengadaan Pakaian Korpri	Jumlah pakaian KORPRI yang diadakan	36 Stell	
31.				5 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu									
					Jumlah pakaian khusus yang diadakan	0,00		4.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.03.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	4.03.01.1.04.05 - Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah pakaian Batik yang diadakan	0 Stell	
32.		5 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	À Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	1 Pendidikan dan pelatihan formal									
					Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	0,00		4.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.03.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	4.03.01.1.04.09 - Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparatur mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	30 Orang	
33.				2 Sosialisasi peraturan perundang-undangan									
					Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	0,00		4.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.03.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	4.03.01.1.04.10 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	60 Orang	
34.				3 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan									
					Jumlah peserta bimbingan teknis tentang implementasi peraturan perundang-undangan	100.000.000,00		4.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.03.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	4.03.01.1.04.11 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta bimbingan teknis tentang implementasi peraturan perundang-undangan	10 Orang	
35.				4 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal									
					Jumlah aparatur yang terlatih	0,00		4.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.03.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	4.03.01.1.04.11 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	
36.		6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	À Meningkatnya kualitas akuntabilitas OPD	1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD									
					Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	200.000.000,00		4.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.03.01.1.02 - Administrasi Keuangan	4.03.01.1.02.06 - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan	1 Laporan	
					Laporan LAKIP SKPD	0,00		4.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.03.01.1.01 - Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.03.01.1.01.05 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan LAKIP SKPD	0 Dokumen	
37.				2 Penyusunan laporan keuangan semesteran									
					Jumlah pelaporan keuangan semesteran yang diselesaikan tepat waktu	250.000.000,00		4.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.03.01.1.02 - Administrasi Keuangan	4.03.01.1.02.07 - Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Jumlah dokumen laporan	1 Laporan	
38.				3 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran									
					Jumlah pelaporan prognosis realisasi anggaran yang diselesaikan tepat waktu	20.000.000,00		4.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.03.01.1.02 - Administrasi Keuangan	4.03.01.1.02.08 - Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah pelaporan prognosis realisasi anggaran yang diselesaikan tepat waktu	2 Laporan	
39.				4 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	250.000.000,00		4.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.03.01.1.02 - Administrasi Keuangan	4.03.01.1.02.09 - Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	1 Laporan	
40.				5 Penyusunan Renja, RKA dan Perubahan APBD									
					Jumlah dokumen	750.000.000,00		4.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.03.01.1.01 - Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.03.01.1.01.01 - Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	3 Dokumen	
41.				10 Forum SKPD Provinsi Papua									
					Jumlah Peserta Forum	2.000.000.000,00		4.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.03.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	4.03.01.1.04.10 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Forum	200 Orang	
42.				12 Penyusunan RENSTRA									
					Jumlah Dokumen	750.000.000,00		4.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.03.01.1.01 - Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.03.01.1.01.01 - Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	
43.				13 Penyusunan SOP									
					Jumlah Dokumen	0,00		4.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.03.01.1.01 - Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.03.01.1.01.04 - Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	0 Dokumen	
44.				14 Peningkatan Kapasitas PPID									
					Jumlah orang	1.000.000.000,00		4.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.03.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	4.03.01.1.04.09 - Pendidikan dan Pelatihan Formal	Pembinaan Administrasi Kepegawaian	10 Orang	
45.		15 Program Pengembangan data/informasi	Cakupan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan ; Cakupan ketersediaan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan	1 Pengumpulan, updating dan analisis data informasi capaian target kinerja Pembangunan									
					Jumlah Jenis Data/Informasi	0,00	5.01 - PERENCANAAN	5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.02.1.02 - Koordinasi Perencanaan Pendanaan Pembangunan Daerah	5.01.02.1.02.03 - Analisa dan Pengkajian Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Jenis Data/Informasi	0 Jenis	
					Jumlah Dokumen Indikator yang disusun	550.000.000,00	5.01 - PERENCANAAN	5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.02.1.01 - Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.02.1.01.09 - Pengumpulan dan Analisis Data dan Informasi Pembangunan untuk Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Pembangunan	1 Dokumen	
46.				2 Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan									
					Jumlah kasus yang di sidik	0,00						0 Kasus	
					Jumlah Dokumen Data Perencanaan	0,00						0 Dokumen	
47.				4 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pusat Data dan Analisa Pembangunan									
					Jumlah unit yang ditingkatkan	500.000.000,00	5.01 - PERENCANAAN	5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.02.1.01 - Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.02.1.01.08 - Pengamanan Data Informasi Pembangunan Daerah	Jumlah unit yang ditingkatkan	80 Unit	
					Jumlah Yang Terlatih Pengolahan Data dan Analisa Pembangunan	0,00	5.01 - PERENCANAAN	5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.02.1.01 - Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.02.1.01.07 - Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah	Jumlah Yang Terlatih Pengolahan Data dan Analisa Pembangunan	0 Orang	
48.				5 Sistem Manajemen Pengelolaan Data dan Analisa Pembangunan									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Jumlah Elemen Data yang tersedia	1.500.000.000,00	5.01 - PERENCANAAN	5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.02.1.01 - Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.02.1.01.09 - Pengumpulan dan Analisis Data dan Informasi Pembangunan untuk Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Elemen Data yang tersedia	230 Buah	
49.				6 Peningkatan pelayanan informasi dan komunikasi pembangunan									
					jumlah data/informasi yang dipublikasikan	700.000.000,00	5.01 - PERENCANAAN	5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.02.1.01 - Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.02.1.01.07 - Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah	jumlah data/informasi yang dipublikasikan	3 Dokumen	
50.				7 Data dan fakta pembangunan papua									
					jumlah kegiatan	1.000.000.000,00	5.01 - PERENCANAAN	5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.02.1.02 - Koordinasi Perencanaan Pendanaan Pembangunan Daerah	5.01.02.1.02.03 - Analisa dan Pengkajian Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah	jumlah kegiatan	2 Kegiatan	
					jumlah data/fakta yang didokumentasikan	0,00	5.01 - PERENCANAAN	5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.02.1.02 - Koordinasi Perencanaan Pendanaan Pembangunan Daerah	5.01.02.1.02.03 - Analisa dan Pengkajian Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah	jumlah data/fakta yang didokumentasikan	0 Kegiatan	
51.				8 Pengembangan data dan informasi Biro Perekonomian dan SDA									
					Terlaksananya pengembangan data dan informasi biro	0,00						0 Dokumen	
52.				9 Peningkatan Kapasitas LPSE									
					Terwujudnya layanan SPSE	0,00					Terwujudnya layanan SPSE	31 Orang	
53.				10 Peningkatan Jaringan dan Jasa Layanan SPSE									
					Terlaksananya Pelelangan secara Elektronik	0,00					Terlaksananya Pelelangan secara Elektronik	12 Bulan	
54.				11 Rapat Koordinasi Teknis LPSE Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua									
					Terbentuknya LPSE di Kab/Kota	0,00					Terbentuknya LPSE di Kab/Kota	29 Kabupaten	
55.				12 Pengembangan Registrasi dan Verifikasi Pengguna SPSE									
					Terkendalinya Pelaksanaan SPSE (Jumlah user)	300.000.000,00						3500 Unit	
					Jumlah Perusahaan yang Teregister dan Terverifikasi pada LPSE Provinsi Papua	0,00						3500 Perusahaan	
56.				13 Pendampingan dan Layanan Pengguna SPSE (VENDOR)									
					Meningkatnya dukungan Layanan dan Pendampingan (Jumlah user)	300.000.000,00						300 Unit	
57.				14 Pelaksanaan Administrasi Sistem Elektronik									
					Terlaksananya Penataan Administrasi Ketatausahaan	350.000.000,00						12 Bulan	
58.				15 Pelatihan/Sosialisasi Aparatur dan Vendor									
					Meningkatnya Sumber Daya Manusia (Vendor)	350.000.000,00						300 Unit	
59.				16 Penggunaan dan Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua									
					Jumlah SKPD dan Kabupaten dalam pengelolaan SIPPD	2.000.000.000,00	5.01 - PERENCANAAN	5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.02.1.01 - Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.02.1.01.07 - Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah	Jumlah SKPD dan Kabupaten dalam pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan	45 Unit	

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
60.	Perencanaan	15 Program Pengembangan data/informasi	Cakupan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan ; Cakupan ketersediaan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan	17 Penyediaan Data SDGs sbagai alat ukur capaian pembangunan daerah									
					Tingkat Ketersediaan Data	1.000.000.000,00	5.01 - PERENCANAAN	5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.02.1.01 - Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.02.1.01.09 - Pengumpulan dan Analisis Data dan Informasi Pembangunan untuk Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Data SDGs	80 %	
61.				18 Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) LPSE									
					Jumlah Aparatur LPSE yang mengikuti RAKERNAS	750.000.000,00						20 Orang	
62.				20 Pembinaan dan Monev LPSE Kab/Kota									
					Jumlah Monev LPSE Kab/Kota yang dibina	350.000.000,00						22 Kabupaten	
63.				21 Koordinasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik									
					Jumlah Laporan Koordinasi yang dilaksanakan	600.000.000,00						1 Laporan	
64.				22 Bimbingan Teknis Aplikasi SPSE untuk ASN LPSE									
					Jumlah ASN LPSE yang mengikuti Bimtek	350.000.000,00						25 Orang	
65.		17 Program Pengembangan Kawasan	Cakupan pengembangan kawasan peruntukan khusus	32 Perencanaan Program Pengembangan Kawasan dan Penataan Ruang									
					Jumlah Koordinasi ke Kab/Kota dan luar Provinsi	500.000.000,00						10 Sektor	
66.				33 Koordinasi Perencanaan Pengembangan Wilayah									
					Jumlah Koordinasi ke Kab/Kota dan luar Provinsi	350.000.000,00						10 Kali	
67.				36 Koordinasi penetapan rencana tata ruang perbatasan									
68.				38 Penyusunan Profil Wilayah Perbatasan Merauke									
					Tersusnya Dokumen Profil Perbatasan	1.000.000.000,00						1 Dokumen	
69.				39 Perencanaan Koridor Pengembangan Infrastruktur Wilayah Adat Mepago									
					Jumlah Koridor yang direncanakan	1.500.000.000,00						2 Dokumen	
					Jumlah perencanaan koridor	0,00						0 Dokumen	
70.				40 Penyusunan Rencana Harmonisasi Pengembangan Kawasan Adat di 5 Wilayah Adat									
					Jumlah Kawasan Adat yang di kembangkan	1.500.000.000,00						2 Wilayah	
71.				41 Pengembangan Kapasitas Perencana Pengembangan Wilayah									
					Jumlah ASN	0,00						0 Orang	
72.				42 Penyusunan Rencana Strategis Pengembangan Kerjasama antar Pemerintah pada 5 Kawasan Adat									
					Jumlah Kawasan/Wilayah Adat	1.000.000.000,00						1 Wilayah	
73.		18 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh	Cakupan implementasi perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	71 Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis									
					Jumlah Koordinasi ke Kab/Kota dan Luar Provinsi	350.000.000,00	5.01 - PERENCANAAN	5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.02.1.01 - Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.02.1.01.05 - Pengintegrasian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Rencana Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Lainnya	Jumlah Koordinasi ke Kab/Kota dan Luar Provinsi	10 Kali	

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
74.	Perencanaan	18 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh	Cakupan implementasi perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	73 Pemetaan Kawasan Wilayah Adat									
					Jumlah Pemetaan Wilayah Adat yang dilaksanakan	1.500.000.000,00	5.01 - PERENCANAAN	5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.02.1.01 - Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.02.1.01.05 - Pengintegrasian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Rencana Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Lainnya	Jumlah Pemetaan Wilayah Adat yang dilaksanakan	2 Dokumen	
					Jumlah Wilayah Adat yang dipetakan	0,00	5.01 - PERENCANAAN	5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.02.1.01 - Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.02.1.01.05 - Pengintegrasian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Rencana Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Lainnya	Jumlah Wilayah Adat yang dipetakan	0 Dokumen	
75.				74 Sosialisasi kebijakan pemerintah dalam Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh									
					Jumlah peserta sosialisasi	0,00						0 Peserta	
76.				75 Penyusunan perencanaan kawasan cepat tumbuh wilayah adat									
					Jumlah Dokumen rencana kawasan cepat tumbuh yang disusun	1.000.000.000,00	5.01 - PERENCANAAN	5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.02.1.01 - Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.02.1.01.05 - Pengintegrasian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Rencana Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Lainnya	Jumlah Dokumen rencana kawasan cepat tumbuh yang disusun	1 Dokumen	
77.				76 Pendamping Program Gerbangmas									
					Jumlah pendamping Gerbangmas Hasrat Papua yang difasilitasi	0,00						0 Orang	
78.				77 Koordinasi dan sinkronisasi program Gerbangmas Hasrat Papua									
					Tersusunnya program gerbangmas kab/kota dan provinsi	0,00						0 Dokumen	
79.				78 Pemetaan Hak Ulayat									
					Luas Hak Ulayat yang dipetakan	0,00						0 Kecamatan	
80.				79 Penyusunan Kawasan Cepat Tumbuh Wilayah Adat									
					jumlah dokumen	0,00						0 Dokumen	
81.				80 Penyusunan Perencanaan Pengembangan Kawasan Cepat Tumbuh									
					Jumlah Dokumen rencana kawasan cepat tumbuh yang disusun	0,00						0 Dokumen	
82.				81 Rapat Koordinasi Penyelesaian Batas Wilayah Adat									
					Jumlah Kabupaten	0,00						0 Kabupaten	
83.		20 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Cakupan peningkatan kapasitas SDM Perencanaan pembangunan	1 Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana									
					Jumlah Aparatur Fungsional Perencana	0,00						0 Orang	
84.				4 Pelatihan Penyusunan Renstra Bagi Aparatur Bappeda Provinsi Papua									
					Jumlah Aparatur Bappeda yang mengikuti pelatihan penyusunan Renstra	0,00						0 Orang	
85.				5 Bimbingan Teknis Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Aparatur Bappeda Provinsi Papua									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Jumlah Aparatur Bappeda yang mengikuti Bimtek Money	0,00						0 Orang	
86.				6 Peningkatan Kapasitas SDM Perencanaan Pembangunan Infrastruktur									
					Jumlah Aparatur yang mengikuti pelatihan	0,00						0 Orang	
87.		21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Cakupan Evaluasi RKPDP Kabupaten/Kota se Papua; Cakupan Evaluasi RPJMD Kabupaten/Kota se Papua; Cakupan fasilitasi asistensi Musrenbang Kabupaten ; Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPDP; Penjabaran konsistensi Program RKPDP kedalam APBD; Penyusunan LKPJ tepat Waktu ; Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP) Provinsi Papua tepat waktu ; Tingkat capaian realisasi program-program Otsus yang direncanakan ; Tingkat keterwakilan stakeholder dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua (MUSRENBANGDA)	37 Asistensi Musrenbang Kabupaten/Kota Dalam Rangka Penjaringan Asmara									
					Jumlah Kabupaten/Kota yang di Assistensi	1.100.000.000,00	5.01 - PERENCANAAN	5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.02.1.01 - Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.02.1.01.03 - Koordinasi Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota yang di Assistensi	29 Kabupaten	
88.				38 Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua (MUSRENBANGDA)									
					Jumlah Usulan Kegiatan yang disepakati	1.500.000.000,00	5.01 - PERENCANAAN	5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.02.1.01 - Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.02.1.01.03 - Koordinasi Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Jumlah Usulan Kegiatan yang disepakati	160 Kegiatan	
					Jumlah Dokumen Usulan Kegiatan yang disepakati	0,00	5.01 - PERENCANAAN	5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.02.1.01 - Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.02.1.01.03 - Koordinasi Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Jumlah Dokumen Usulan Kegiatan yang disepakati	0 Dokumen	
89.				39 Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (MUSRENBANGNAS)									
					Jumlah Dokumen Usulan Kegiatan yang diusulkan	1.200.000.000,00	5.01 - PERENCANAAN	5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.02.1.01 - Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.02.1.01.03 - Koordinasi Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Jumlah Dokumen Usulan Kegiatan yang diusulkan	1 Dokumen	
90.				40 Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP) Provinsi Papua									
					Jumlah Dokumen RKPDP	1.500.000.000,00	5.01 - PERENCANAAN	5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.02.1.01 - Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.02.1.01.01 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPDP) Provinsi	Jumlah Program dan kegiatan	1000 Dokumen	
91.				41 Penyusunan Direktori Bappeda Provinsi Papua									
92.				42 Penyusunan Draft RPJMD Teknokrat									
93.				43 Koordinasi Perencanaan Interna Bappeda									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan	800.000.000,00						1 Kegiatan	
94.				44 Penyusunan Dokumen Perencanaan Internal Bappeda									
					Jumlah Dokumen yang disusun	500.000.000,00						5 Dokumen	
95.				45 Penyusunan SOP Bappeda Provinsi Papua									
					Jumlah Dokumen SOP yang disusun	0,00						0 Dokumen	
96.				46 Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Provinsi Papua									
					jumlah dokumen	1.270.000.000,00						1 Dokumen	
97.				49 Pembahasan URD/RD Otsus Provinsi Papua									
					Jumlah URD/RD Kab kota yang dibahas	0,00						29 Dokumen	
98.				51 Temu Konsultasi Pengendalian Administrasi Program Pembangunan di 5 (lima) Wilayah Adat									
					Jumlah Dokumen	0,00						0 Dokumen	
99.				52 Peningkatan Pengendalian Administrasi Program Pembangunan									
					Jumlah Pertemuan dan Koordinasi	0,00						0 Laporan	
100.				53 Penyusunan Pedoman Pengendalian Program/Kegiatan APBD 2018									
101.				54 Pengendalian Rencana Pelaksanaan Otonomi Khusus Khusus Provinsi Papua									
102.				55 Peningkatan dan Asistensi Pelaporan Pembangunan									
					Jumlah koordinasi pelaporan pembangunan	0,00						0 Kali	
103.				56 Sistem Informasi Monitoring, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan APBD Provinsi Papua (TP2K)									
					Jumlah SKPD yang dilakukan pengendalian program dan kegiatan melalui TP2K	0,00						0 SKPD	
104.				57 Penyusunan Laporan Pelaksanaan Pembangunan Otonomi Khusus di Provinsi Papua									
					6 dokumen laporan	0,00						0 Dokumen	
105.				58 Penyusunan Laporan Kegiatan APBN dan DAK di Provinsi Papua									
					Jumlah dokumen	1.500.000.000,00	5.01 - PERENCANAAN	5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.02.1.03 - Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah	5.01.02.1.03.04 - Penyusunan Pelaporan Capaian Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan DAK	1 Dokumen	
106.				60 Asistensi Monitoring dan Pelaporan Pembangunan Daerah									
					Jumlah Kab/Kota yang di Asistensi Monev	2.000.000.000,00	5.01 - PERENCANAAN	5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.02.1.03 - Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah	5.01.02.1.03.01 - Monitoring Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Kab/Kota yang di Asistensi Monev	29 Kabupaten	
107.				61 Pelaksanaan Monitoring Kolaborasi Kegiatan Pembangunan OTSUS dan APBD Provinsi Papua									
					Jumlah Dokumen hasil Monitoring	5.000.000.000,00	5.01 - PERENCANAAN	5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.02.1.03 - Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah	5.01.02.1.03.01 - Monitoring Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen hasil Monitoring	1 Dokumen	

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
108.	Perencanaan	21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Cakupan Evaluasi RKPd Kabupaten/Kota se Papua; Cakupan Evaluasi RPJMD Kabupaten/Kota se Papua; Cakupan fasilitasi asistensi Musrenbang Kabupaten ; Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPd; Penjabaran konsistensi Program RKPd kedalam APBD; Penyusunan LKPJ tepat Waktu ; Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPd) Provinsi Papua tepat waktu ; Tingkat capaian realisasi program-program Otsus yang direncanakan ; Tingkat keterwakilan stakeholder dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua (MUSRENBANGDA)	62 Evaluasi Otonomi Khusus 80%, 20% dan Urusan Bersama									
109.				63 Penyusunan Evaluasi Kinerja Otonomi Khusus dan APBD									
110.				65 Evaluasi Kebijakan OTSUS Bidang Pendidikan dan Kesehatan Periode Tahun 2013-2016									
111.				66 Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan									
					Jumlah koordinasi kab/kota	0,00						0 Kali	
112.				68 Seminar Hasil Pembangunan Otonomi Khusus (OTSUS)									
113.				69 Musrenbang Kawasan Wilayah Adat									
114.				70 Exsise Strategi Otonomi Khusus (OTSUS) Provinsi Papua									
115.				72 Rapat Kerja Teknis									
116.				73 Penyusunan Program dan Anggaran									
117.				74 Forum SKPD									
118.				75 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)									
119.				76 Pengelolaan Statistik Tanaman Pangan dan Hortikultura									
120.				80 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan									
121.				81 Rapat Kerja Teknis RAKERNIS) Perkebunan Se Provinsi Papua									
122.				135 Peningkatan Mutu Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran									
123.				136 penyusunan standar operasional prosedur kordinasi perencanaan Kabupaten/Kota									
					jumlah dokumen	0,00						0 Dokumen	
124.				137 Penyusunan RPJMD Provinsi Papua 2019-2024									
					Jumlah Dokumen yang disusun	0,00	5.01 - PERENCANAAN	5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.02.1.01 - Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.02.1.01.01 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPd) Provinsi	Jumlah Dokumen yang disusun	0 Dokumen	
125.				138 pelatihan penyusunan RPJMD bagi aparatur Bappeda									
					jumlah orang	0,00						0 Orang	
126.				139 pelatihan penyusunan RENSTRA bagi aparatur Bappeda Provinsi Papua									
					jumlah orang	0,00						0 Orang	

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
127.	Perencanaan	21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Cakupan Evaluasi RKPd Kabupaten/Kota se Papua; Cakupan Evaluasi RPJMD Kabupaten/Kota se Papua; Cakupan fasilitasi asistensi Musrenbang Kabupaten ; Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPd; Penjabaran konsistensi Program RKPd kedalam APBD; Penyusunan LKPJ tepat Waktu ; Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPd) Provinsi Papua tepat waktu ; Tingkat capaian realisasi program-program Otsus yang direncanakan ; Tingkat keterwakilan stakeholder dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua (MUSRENBANGDA)	140 Pembahasan RKA Program/Kegiatan Sumberdana Otonomi Khusus									
128.				141 bimbingan teknis monitoring dan evaluasi bagi aparatatur Bappeda Provinsi Papua	jumlah orang	0,00						0 Orang	
129.				142 bimbingan teknis tata cara penyusunan Lakip hubungannya dengan, RENSTRA dan RENJA sesuai permenpan No.29 Tahun 2010 dan permenpan No.25 Tahun 2012	jumlah orang	0,00						0 Orang	
130.				143 Evaluasi RPJMD Kab/Kota	Tersedianya evaluasi dokumen	0,00						0 Dokumen	
131.				144 Monitoring, Evaluasi dan Pengembangan Fungsional pembangunan	Jumlah dokumen	0,00						0 Dokumen	
132.				145 Bimtek Monitoring dan Evaluasi bagi SKPD Provinsi	jumlah peserta bintek	0,00						0 Orang	
133.				146 Evaluasi APBD Kabupaten/Kota	jumlah kabupaten/kota	0,00						0 Dokumen	
134.				147 Evaluasi RKPd Kabupaten/Kota	jumlah kabupaten/kota	0,00						0 Dokumen	
135.				148 Evaluasi RPJMD Provinsi Papua 2013 - 2018	Jumlah dokumen	0,00						0 Dokumen	
136.				149 Evaluasi Pemanfaatan Sumberdana APBN	Jumlah dokumen	0,00						0 Dokumen	
137.				150 Pengendalian Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua	pertemuan dan laporan	0,00						0 Laporan	
138.				151 Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Rencana (Kabupaten/Kota)	Jumlah dokumen perencanaan kab/kota	0,00						0 Dokumen	
139.				152 Pengendalian dan Evaluasi RKPd Provinsi Papua Tahun 2017	Jumlah dokumen	0,00						0 Dokumen	
140.				153 Pengendalian dan Evaluasi Pemanfaatan Dana-Dana APBN (Dekon dan TP)									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Jumlah dokumen	0,00						0 Dokumen	
141.				154 Pengendalian Renstra OPD Provinsi Papua									
					Jumlah dokumen	0,00						0 Dokumen	
142.				155 Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Renja SKPD Provinsi Papua									
					Jumlah dokumen	0,00						0 Dokumen	
143.				156 Sosialisasi Format Laporan Otsus dan Laporan Kinerja Otsus Kab/Kota									
					Jumlah dokumen	0,00						0 Dokumen	
144.				157 Fasilitasi Perencanaan Bidang Sosial Budaya									
					Jumlah Perencanaan SKPD lingkup sosial budaya yang terfasilitasi perencanaannya	0,00						0 SKPD	
145.				158 aplikasi SIMONEP									
					Aplikasi Simonep	0,00						0 Dokumen	
146.				159 pelaksanaan monitoring/pemantau pelaksanaan kegiatan pembangunan APBD Provinsi Papua									
					jumlah monitoring yang dilaksanakan	5.000.000.000,00	5.01 - PERENCANAAN	5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.02.1.03 - Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah	5.01.02.1.03.01 - Monitoring Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	jumlah monitoring yang dilaksanakan	29 Laporan	
147.				160 pelaksanaan pengendalian program dan kegiatan APBD Provinsi Papua									
					Jumlah dokumen	1.500.000.000,00	5.01 - PERENCANAAN	5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.02.1.01 - Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.02.1.01.07 - Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen TP2K	1 Dokumen	
148.				161 penyusunan laporan evaluasi kinerja (EKKP) evaluasi RKP									
					Jumlah dokumen	0,00						0 Dokumen	
149.				162 forum konsultasi bidang pengendalian									
					jumlah Aparatur dan Stakeholder terkait yang ikut RAKOR	0,00						0 Orang	
150.				163 sosialisasi Pergub pedoman perencanaan, pengendalian dan evaluasi serta pengawasan dana Otonomi Khusus Provinsi Papua									
					jumlah orang	0,00						0 Orang	
151.				164 monitoring kolaborasi kegiatan Pembangunan OTSUS Provinsi Papua									
					jumlah monitoring yang dilaksanakan	0,00						0 Dokumen	
152.				165 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Penggunaan Dana Otsus									
					100	0,00						0 Laporan	
153.				166 Pengembangan Sistem dan Kelembagaan Generasi Emas dan Keluarga Sejahtera (BANGGA PAPUA)									
					Jumlah pengembangan yang dilaksanakan	1.000.000.000,00					Jumlah pengembangan yang dilaksanakan	15 Kegiatan	
154.				167 Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Gubernur Periode Tahun 2013-2018									
					Jumlah Dokumen	0,00						0 Dokumen	

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
155.	Perencanaan	21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Cakupan Evaluasi RKPd Kabupaten/Kota se Papua; Cakupan Evaluasi RPJMD Kabupaten/Kota se Papua; Cakupan fasilitasi asistensi Musrenbang Kabupaten ; Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPd; Penjabaran konsistensi Program RKPd kedalam APBD; Penyusunan LKPJ tepat Waktu ; Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPd) Provinsi Papua tepat waktu ; Tingkat capaian realisasi program-program Otsus yang direncanakan ; Tingkat keterwakilan stakeholder dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua (MUSRENBANGDA)	169 Reproduksi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah									
					Jumlah dokumen perencanaan yang di reproduksi	0,00						0 Dokumen	
156.				170 Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan									
					Jumlah koordinasi	0,00						0 Kali	
157.				171 Fasilitasi Penyusunan Dana Alokasi Khusus Provinsi Papua									
					Jumlah Dokumen DAK	1.500.000.000,00	5.01 - PERENCANAAN	5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.02.1.02 - Koordinasi Perencanaan Pendanaan Pembangunan Daerah	5.01.02.1.02.01 - Koordinasi Penyusunan Pagu Indikatif Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen DAK	1 Dokumen	
158.				173 Penyusunan Laporan Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Otsus di Provinsi Papua (Otsus 80% Kab/Kota, Otsus 20% Provinsi dan Tambahan Infrastruktur)									
					Jumlah Dokumen/Laporan	0,00						0 Dokumen	
159.				174 Penyusunan laporan kinerja program/kegiatan APBD Provinsi Papua									
					Jumlah Dokumen	500.000.000,00	5.01 - PERENCANAAN	5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.02.1.03 - Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah	5.01.02.1.03.04 - Penyusunan Pelaporan Capaian Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	
160.				175 Evaluasi Dokumen Perencanaan (RPJPD, RPJMD, RKPd Kab/Kota)									
					Jumlah Dokumen	1.000.000.000,00	5.01 - PERENCANAAN	5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.02.1.01 - Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.02.1.01.02 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPd) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Kab/Kota	29 Dokumen	
161.				176 Evaluasi RKPd Provinsi Papua									
					Jumlah Dokumen Evaluasi RKPd	1.000.000.000,00	5.01 - PERENCANAAN	5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.02.1.01 - Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.02.1.01.01 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPd) Provinsi	Jumlah Dokumen Evaluasi RKPd	1 Dokumen	
162.				177 Penyusunan Juknis Evaluasi Dokumen Perencanaan									
					Jumlah Dokumen Perencanaan Kab/Kota	0,00						0 Dokumen	
163.				178 Pengendalian Pemantauan dan Supervisi RPJMD Kab/Kota se- Provinsi Papua									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Terkendalinya pelaksanaan RPJMD Kab/Kota se- Provinsi Papua	0,00						0 Kali	
164.				179 Pembinaan Pengendalian dan Evaluasi RKPD Provinsi, Kab/Kota se- Provinsi Papua									
					Terkendalinya pelaksanaan RKPD Kab/Kota se- Provinsi Papua	500.000.000,00	5.01 - PERENCANAAN	5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.02.1.01 - Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.02.1.01.01 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Provinsi	Terkendalinya pelaksanaan RKPD Kab/Kota se- Provinsi Papua	100 Laporan	
165.				180 Penyusunan/Pembahasan Pedoman APBD 2020									
					Jumlah Dokumen	0,00						0 Buku	
166.				181 Evaluasi Kebijakan Hibah dalam APBD Provinsi Papua kepada beberapa Lembaga PUBLIK (KAPP, Lembaga Agama, KONI, dll)									
					Jumlah Dokumen	0,00						0 Dokumen	
167.				182 Musrenbang Otsus di 5 Wilayah Adat Provinsi Papua									
					Jumlah Pelaksanaan Musrenbang Otsus dan Kendali Usulan	3.000.000.000,00	5.01 - PERENCANAAN	5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.02.1.01 - Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.02.1.01.03 - Koordinasi Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Jumlah program dan kegiatan yang disepakati	500 Wilayah	
168.				183 Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Bappeda									
					Jumlah Unit Pelayanan	0,00						0 Unit	
169.				184 Peningkatan Pelayanan Administrasi Keuangan dan Perlengkapan Bappeda									
					Jumlah Unit Pelayanan	0,00						0 Unit	
170.				185 Koordinasi Perencanaan Program Bappeda									
					Jumlah Unit Pelayanan	0,00						0 Unit	
171.		22 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Cakupan hasil kajian yang dijadikan sebagai pengambilan keputusan kebijakan ekonomi ; Persentase ketercapaian sasaran pembangunan bidang ekonomi	57 Forum Koordinasi SKPD Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam									
					Adanya forum koordinasi SKPD Bidang Perekonomian dan SDA	0,00						0 Dokumen	
172.				58 Forum Koordinasi BUMN, BUMS dan Perbankan									
					Jumlah peserta forum	0,00	5.01 - PERENCANAAN	5.01.04 - PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	5.01.04.1.02 - Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Ekonomi Kreatif	5.01.04.1.02.03 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Ekonomi Kreatif	Jumlah peserta forum	0 Orang	
173.				61 Pembinaan dan Fasilitasi Bagi Pelaku Usaha Ekonomi									
					Jumlah pelaku usaha yang dibina dan difasilitasi	0,00						0 Orang	
174.				65 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi									
					jumlah laporan koordinasi yang dilakukan	500.000.000,00	5.01 - PERENCANAAN	5.01.04 - PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	5.01.04.1.01 - Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian	5.01.04.1.01.01 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian	jumlah laporan koordinasi yang dilakukan	1 Laporan	
175.				67 Koordinasi Urusan Wajib Sub Bidang Dunia Usaha, Investasi dan Keuangan									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					jumlah laporan koordinasi yang dilakukan	300.000.000,00	5.01 - PERENCANAAN	5.01.04 - PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	5.01.04.1.02 - Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Ekonomi Kreatif	5.01.04.1.02.02 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPd) Bidang Ekonomi Kreatif	jumlah laporan koordinasi sub bidang dunia usaha, investasi dan keuangan	1 Laporan	
					Jumlah SKPD yang diasistensi	0,00	5.01 - PERENCANAAN	5.01.04 - PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	5.01.04.1.02 - Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Ekonomi Kreatif	5.01.04.1.02.01 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPd) Bidang Ekonomi Kreatif	Jumlah SKPD yang diasistensi	1 SKPD	
					Jumlah SKPD yang di monev	0,00	5.01 - PERENCANAAN	5.01.04 - PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	5.01.04.1.02 - Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Ekonomi Kreatif	5.01.04.1.02.03 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPd) Bidang Ekonomi Kreatif	Jumlah SKPD yang di monev	1 SKPD	
176.				70 Penyusunan Buku Indikator Data Pembangunan dan Analisis Makro Ekonomi Provinsi Papua									
					jumlah dokumen perencanaan yang dihasilkan	500.000.000,00	5.01 - PERENCANAAN	5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.02.1.01 - Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.02.1.01.02 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPd) Kabupaten/Kota	jumlah dokumen perencanaan indikator pembangunan dan analisis makro ekonomi	2 Dokumen	
177.				73 Koordinasi Urusan Wajib Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan, Pariwisata									
					jumlah laporan koordinasi yang dilakukan	300.000.000,00	5.01 - PERENCANAAN	5.01.04 - PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	5.01.04.1.02 - Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Ekonomi Kreatif	5.01.04.1.02.01 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPd) Bidang Ekonomi Kreatif	jumlah laporan koordinasi perencanaan bidang perindustrian, perdagangan, pariwisata	1 Laporan	
					Jumlah SKPD yang diasistensi	0,00	5.01 - PERENCANAAN	5.01.04 - PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	5.01.04.1.02 - Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Ekonomi Kreatif	5.01.04.1.02.02 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPd) Bidang Ekonomi Kreatif	Jumlah SKPD yang diasistensi	2 SKPD	
					Jumlah SKPD yang di Monev	0,00	5.01 - PERENCANAAN	5.01.04 - PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	5.01.04.1.02 - Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Ekonomi Kreatif	5.01.04.1.02.02 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPd) Bidang Ekonomi Kreatif	Jumlah SKPD yang di Monev	2 SKPD	
178.				74 Forum koordinasi OPD bidang SDA									
					jumlah laporan koordinasi yang dilakukan	0,00						0 Laporan	
179.				76 Rapat Kerja Terbatas Pembangunan Bidang Ekonomi Papua									
					jumlah laporan hasil rakertas yang dilakukan	1.200.000.000,00	5.01 - PERENCANAAN	5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.02.1.01 - Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.02.1.01.04 - Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	jumlah laporan hasil rakertas perencanaan pembangunan bidang ekonomi	1 Laporan	
180.				77 Penyusunan Perencanaan Pengembangan Potensi Pariwisata Papua									
181.				86 Sosialisasi dan Pembinaan BUMD dan Anak Perusahaan Daerah									
					Terlaksananya Sosialisasi dan Pembinaan BUMD dan Anak Perusahaan Daerah	0,00	5.01 - PERENCANAAN	5.01.04 - PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	5.01.04.1.02 - Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Ekonomi Kreatif	5.01.04.1.02.01 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPd) Bidang Ekonomi Kreatif	jumlah lembaga yang dibina	0 Lembaga	
182.				96 penyusunan Perencanaan pengembangan kawasan wisata di kawasan Saereri dan Mamta									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					jumlah dokumen yang dihasilkan	0,00	5.01 - PERENCANAAN	5.01.04 - PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	5.01.04.1.02 - Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Ekonomi Kreatif	5.01.04.1.02.01 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Ekonomi Kreatif	jumlah dokumen yang dihasilkan	0 Dokumen	
					jumlah dokumen	0,00	5.01 - PERENCANAAN	5.01.04 - PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	5.01.04.1.02 - Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Ekonomi Kreatif	5.01.04.1.02.01 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Ekonomi Kreatif	jumlah dokumen yang dihasilkan	0 Dokumen	
183.				97 penyusunan profil perencanaan pembangunan koperasi dan UKM di 5 wilayah adat									
					jumlah dokumen perencanaan yang dihasilkan	0,00						0 Dokumen	
184.				99 penyusunan perencanaan pengembangan produksi perikanan air tawar di kawasan lapago									
					jumlah dokumen perencanaan yang dihasilkan	0,00						0 Dokumen	
185.				102 penyusunan perencanaan pengembangan kawasan industri pengolahan komoditas unggulan di 5 wilayah adat									
					jumlah dokumen perencanaan yang dihasilkan	0,00						0 Dokumen	
186.				103 penyusunan perencanaan pengembangan sektor informal dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi papua									
					jumlah dokumen perencanaan yang dihasilkan	0,00						0 Dokumen	
187.				113 Koordinasi Perencanaan Sektor Pertanian									
					jumlah kordinasi	0,00	5.01 - PERENCANAAN	5.01.04 - PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	5.01.04.1.03 - Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Alam	5.01.04.1.03.01 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Alam	jumlah kordinasi	0 Kegiatan	
					jumlah kegiatan	250.000.000,00	5.01 - PERENCANAAN	5.01.04 - PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	5.01.04.1.03 - Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Alam	5.01.04.1.03.02 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Alam	jumlah laporan kegiatan bidang pertanian	3 Kegiatan	
188.				114 Penyusunan Profil Pembangunan Ekonomi Rumpun Pertanian									
					jumlah dokumen	500.000.000,00	5.01 - PERENCANAAN	5.01.04 - PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	5.01.04.1.03 - Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Alam	5.01.04.1.03.01 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Alam	jumlah dokumen yang dihasilkan	5 Dokumen	
189.				116 Rencana Aksi Daerah (RAD) Pangan dan Gizi Provinsi Papua									
					Jumlah Dokumen yang disusun	0,00						0 Dokumen	
190.				117 kajian potensi sumber PAD pengelolaan pelabuhan									
					jumlah kajian yg dihasilkan	0,00	5.01 - PERENCANAAN	5.01.04 - PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	5.01.04.1.01 - Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian	5.01.04.1.01.02 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian	jumlah kajian yg dihasilkan	0 Dokumen	
191.				118 penyusunan regulasi pengelolaan pelabuhan									
					jumlah regulasi	0,00	5.01 - PERENCANAAN	5.01.04 - PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	5.01.04.1.02 - Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Ekonomi Kreatif	5.01.04.1.02.02 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Ekonomi Kreatif	jumlah regulasi yang dihasilkan	0 Dokumen	
192.				119 penyusunan regulasi pengembangan komoditi kakao di provinsi papua									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					jumlah dokumen	500.000.000,00	5.01 - PERENCANAAN	5.01.04 - PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	5.01.04.1.03 - Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Alam	5.01.04.1.03.01 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Alam	jumlah dokumen yang dihasilkan	1 Dokumen	
					jumlah regulasi	0,00	5.01 - PERENCANAAN	5.01.04 - PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	5.01.04.1.03 - Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Alam	5.01.04.1.03.01 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Alam	jumlah dokumen yang dihasilkan	1 Dokumen	
193.				120 kajian komoditi kopi untuk penyusunan regulasi di kabupaten dogiyai dan kabupaten jayawijaya									
					jumlah dokumen kajian	500.000.000,00	5.01 - PERENCANAAN	5.01.04 - PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	5.01.04.1.03 - Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Alam	5.01.04.1.03.02 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Alam	jumlah dokumen yang dihasilkan	1 Dokumen	
194.				121 penyusunan regulasi pengembangan komoditi sagu di provinsi papua									
195.				122 peningkatan kapasitas kelembagaan BUMD									
					jumlah lembaga	0,00						0 Lembaga	
196.				123 studi tiru BUMD di DKI Jakarta dan surabaya									
					jumlah BUMD	0,00						0 Lembaga	
197.				124 Penyusunan Profile Capaian Pelaksanaan Gerbang Mas Hasrat Papua									
					Tersedianya Dokumen Capaian Pelaksanaan Gerbang Mas Hasrat Papua untuk sektor pertanian	0,00						0 Dokumen	
198.				125 Penyusunan Profile Capaian Pembangunan Sub Sector Perikanan Provinsi Papua									
					Tersedianya Dokumen Profile Capaian Pelaksanaan pembangunan sub sektor perikanan provinsi Papua	500.000.000,00	5.01 - PERENCANAAN	5.01.04 - PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	5.01.04.1.03 - Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Alam	5.01.04.1.03.02 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Alam	Tersedianya Dokumen Profile Capaian Pelaksanaan pembangunan sub sektor perikanan provinsi Papua	1 Dokumen	
199.				126 Pembinaan dan Fasilitasi Bagi UKM dan IKM									
					Jumlah UKM dan IKM yang dibina	0,00						0 Lembaga	
200.				127 Penyusunan Perencanaan Pengembangan Kemitraan Dunia Usaha dalam Mendukung Perekonomian Daerah									
					Jumlah dokumen perencanaan yang dihasilkan	500.000.000,00	5.01 - PERENCANAAN	5.01.04 - PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	5.01.04.1.03 - Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Alam	5.01.04.1.03.02 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah dokumen perencanaan yang dihasilkan	1 Dokumen	
201.				128 Penyusunan Perencanaan Pengembangan Investasi dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Papua									
					Jumlah dokumen perencanaan yang dihasilkan	0,00						0 Dokumen	
202.				129 peningkatan kompetensi sumber daya perencana bidang ekonomi									
					jumlah perencana	0,00						0 Orang	
203.				130 Penyusunan Analisis Input Output Provinsi Papua									
					Jumlah Dokumen	0,00						0 Dokumen	

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
204.	Perencanaan	22 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Cakupan hasil kajian yang dijadikan sebagai pengambilan keputusan kebijakan ekonomi ; Persentase ketercapaian sasaran pembangunan bidang ekonomi	131 Penyusunan master plan pertumbuhan Ekonomi Hijau Provinsi Papua									
					Jumlah Dokumen	0,00						0 Dokumen	
205.		23 Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Persentase ketercapaian sasaran pembangunan bidang sosbud	7 Rapat koordinasi dan sinkronisasi kesejahteraan rakyat sekabupaten/kota									
206.				58 Pengembangan Perencanaan Bidang Sosial Budaya									
207.				68 Koordinasi Pembinaan Program Subbid. Kesehatan, Kependudukan dan Kesejahteraan Sosial									
					Jumlah laporan koordinasi yang dilakukan	0,00						0 Laporan	
					Jumlah SKPD yang diasistensi	0,00						0 SKPD	
					Jumlah SKPD yang diMonev	0,00						0 SKPD	
208.				71 Koordinasi Pembinaan Program Subbid Pemerintahan dan Otonomi Khusus									
					Jumlah laporan koordinasi yang dilakukan	0,00						0 Laporan	
					Jumlah SKPD yang diasistensi	0,00						0 SKPD	
					Jumlah SKPD yang di monev	0,00						0 SKPD	
209.				79 fasilitasi perencanaan Bidang Sosial Budaya									
					Jumlah Kab/Kota koordinasi Bidang Sosial Budaya	500.000.000,00	5.01 - PERENCANAAN	5.01.03 - PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	5.01.03.1.03 - Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kesejahteraan Masyarakat	5.01.03.1.03.01 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPd) Bidang Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Kab/Kota koordinasi Bidang Sosial Budaya	29 Kabupaten	
210.				80 Rapat Forum OPD Bidang Sosial Budaya Se-Propinsi Papua									
					jumlah kesepakatan yang di hasilkan Rapat Forum Pembangunan Bidang Sosial Budaya	500.000.000,00	5.01 - PERENCANAAN	5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.02.1.01 - Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.02.1.01.04 - Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	jumlah kesepakatan yang di hasilkan Rapat Forum Pembangunan Bidang Sosial Budaya	0 Kabupaten	
211.				81 Koordinasi percepatan pelaksanaan PON XX									
					jumlah koordinasi pelaksanaan PON XX	0,00						0 Kali	
212.				83 Koordinasi Mitra Pembangunan Bidang Sosial Budaya									
					jumlah koordinasi Mitra Pembangunan Sosial Budaya	700.000.000,00						1 Persentase	
213.				84 Koordinasi perencanaan pembangunan Pendidikan, Kebudayaan, dan Pemuda									
					Terjadinya Koordinasi dan Sinkronisasi program pembangunan Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga dan Pemuda ke SKPD Provinsi dan Kab/Kota	500.000.000,00	5.01 - PERENCANAAN	5.01.03 - PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	5.01.03.1.02 - Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia	5.01.03.1.02.01 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPd) Bidang Pembangunan Manusia	Terjadinya Koordinasi dan Sinkronisasi program pembangunan Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga dan Pemuda ke SKPD Provinsi dan Kab/Kota	29 Kabupaten	
214.				85 Rapat Koordinasi Pengelolaan kolose Pendidikan Guru (GPK)									
					jumlah peserta rapat koordinas	0,00						0 Orang	
215.				86 Penyusunan Profil Pembangunan Pendidikan di Provinsi Papua									
					Jumlah Dokumen	0,00						0 Dokumen	
216.				87 Analisis Pelaksanaan SPM Bidang Pendidikan									
					jumlah SPM bidang pendidikan yang terevaluasi	0,00						0 Kabupaten	

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
217.	Perencanaan	23 Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Persentase ketercapaian sasaran pembangunan bidang sosbud	88 Fasilitasi dan koordinasi pembinaan program Subbid kesehatan, Kependudukan dan Kesejahteraan Sosial									
					jumlah aparatur yang memahami perencanaan kesehatan	500.000.000,00	5.01 - PERENCANAAN	5.01.03 - PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	5.01.03.1.03 - Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kesejahteraan Masyarakat	5.01.03.1.03.01 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kesejahteraan Masyarakat	jumlah aparatur yang memahami perencanaan kesehatan	29 Orang	
218.				89 Analisis Pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan									
					jumlah SPM Bidang Kesehatan yang terimplementasi	0,00						0 Kabupaten	
219.				90 Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pengendalian Penduduk di Provinsi Papua									
					jumlah kesepakatan (Dokumen) Pengendalian Penduduk di Papua	0,00						0 Dokumen	
220.				92 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pemerintahan Umum dan Otonomi khusus									
					Jumlah aparatur yang memahami Perencanaan Pemerintahan dan Otonomi Khusus	0,00						0 Orang	
221.				93 Musrenbang Otsus di 5 Wilayah Adat Provinsi Papua									
					jumlah pelaksanaan Musrenbang Otsus dan kendali usulan	2.000.000.000,00	5.01 - PERENCANAAN	5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.02.1.01 - Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.02.1.01.03 - Koordinasi Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	jumlah pelaksanaan Musrenbang Otsus dan kendali usulan	5 Wilayah	
222.				95 Pembahasan RKA Program/Kegiatan Sumber Dana Otonomi Khusus									
					jumlah hasil evaluasi pelaksanaan pemerintahan dan desentralisasi	500.000.000,00						29 Kabupaten	
223.				98 Kajian Awal Visium Pembangunan Papua Tahun 2020-2045									
					Jumlah Dokumen Kajian Awal Visium Pembangunan Papua	0,00						0 Dokumen	
224.				99 Kerjasama Mitra Pembangunan Papua									
					Jumlah Kab/Kota Mitra Pembangunan Papua	0,00						0 Kabupaten	
225.				100 Branchmarking Otonomi Khusus Provinsi Papua di Guangxi China									
					Jumlah orang	0,00						0 Orang	
226.				101 Fasilitasi dan Koordinasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGS)									
					meningkatnya koordinasi	350.000.000,00	5.01 - PERENCANAAN	5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.02.1.02 - Koordinasi Perencanaan Pendanaan Pembangunan Daerah	5.01.02.1.02.02 - Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Penganggaran di daerah	Jumlah Dokumen SDGS	1 Kegiatan	
227.		26 Program Perencanaan Pembangunan Fisik Prasarana dan Lingkungan Hidup	Persentase ketercapaian sasaran pembangunan bidang fispra	19 Rapat Koordinasi Pembangunan Infrastruktur									
					Jumlah orang yang mengikuti Rakor Pembangunan Infrastruktur	350.000.000,00	5.01 - PERENCANAAN	5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.02.1.01 - Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.02.1.01.04 - Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Rakor Pembangunan Infrastruktur	110 Orang	
228.				32 Perencanaan dan Pengembangan Program Fisik Prasarana									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Jumlah Dokumen yang disusun	350.000.000,00	5.01 - PERENCANAAN	5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.02.1.01 - Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.02.1.01.04 - Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Fispra	1 Dokumen	
229.				33 Perencanaan dan Pengembangan Program Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (SDA dan LH)									
					Peningkatan Kinerja Perencanaan dan Pengembangan sektor SDA, LH dan Pengairan	350.000.000,00	5.01 - PERENCANAAN	5.01.05 - PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	5.01.05.1.01 - Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	5.01.05.1.01.01 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPd) Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	Peningkatan Kinerja Perencanaan dan Pengembangan sektor SDA, LH dan Pengairan	100 %	
230.				34 Perencanaan dan Pengembangan Program Infrastruktur Transportasi, Cipta Karya									
					Jumlah Dokumen yang disusun	350.000.000,00	5.01 - PERENCANAAN	5.01.05 - PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	5.01.05.1.03 - Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Keciptakaryaan dan Kewilayahan	5.01.05.1.03.01 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPd) Bidang Keciptakaryaan dan Kewilayahan	Jumlah Dokumen yang disusun	1 Dokumen	
231.				36 Perencanaan dan Pengembangan Program Telekomunikasi dan Kelistrikan									
					Jumlah Dokumen yang disusun	35.000.000,00	5.01 - PERENCANAAN	5.01.05 - PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	5.01.05.1.02 - Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan	5.01.05.1.02.01 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPd) Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan	Jumlah Dokumen yang disusun	1 Dokumen	
232.				45 Pembinaan POKJA Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD GRK) Provinsi Papua									
					Jumlah sektor pokja RAD GRK	0,00						0 Sektor	
233.				48 Penyusunan Neraca Sumberdaya Alam Daerah Papua									
					Jumlah Dokumen yang dihasilkan	0,00						0 Dokumen	
234.				50 Peningkatan kapasitas Perencana Pembangunan Rendah Emisi									
					Jumlah aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas	0,00						0 Orang	
235.				55 Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur									
					Tersedianya dokumen pembangunan infrastruktur	1.500.000.000,00	5.01 - PERENCANAAN	5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.02.1.01 - Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.02.1.01.04 - Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pembangunan infrastruktur	1 Dokumen	
236.				57 Perencanaan dan Pengembangan Program Perhubungan dan Telekomunikasi									
237.		28 Program Perencanaan Tata Ruang	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan tata ruang mandatoris yang telah ditetapkan	34 Koordinasi Perencanaan Penyelenggaraan Penataan Ruang									
					Tersusunnya Perencanaan Tata Ruang Provinsi dan Kab/Kota	0,00						0 Dokumen	
238.				36 Sinkronisasi dan Koordinasi BKPRD Provinsi Papua									
					Jumlah Rapat BKPRD	500.000.000,00						2 Kali	
239.				37 Penetapan kebijakan tentang RTRK									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Jumlah Peraturan Tata Ruang	1.500.000.000,00	5.01 - PERENCANAAN	5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.02.1.01 - Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.02.1.01.05 - Pengintegrasian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Rencana Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Lainnya	Jumlah Peraturan Tata Ruang	1 Dokumen	
240.				39 Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang									
					Jumlah Peserta Rapat Koordinasi	500.000.000,00	5.01 - PERENCANAAN	5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.02.1.01 - Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.02.1.01.05 - Pengintegrasian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Rencana Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Lainnya	Jumlah Peserta Rapat Koordinasi Tata Ruang	100 Orang	
241.				40 Revisi rencana tata ruang wilayah									
					Tersusunnya Perda RTRWP Papua	0,00						0 Dokumen	
242.				42 Monitoring, evaluasi dan pelaporan rencana tata ruang									
					tersedianya laporan hasil pelaksanaan tata ruang	500.000.000,00						2 Dokumen	
243.				43 Sinkronisasi Perencanaan Kawasan dan Tata Ruang									
					Jumlah Koordinasi ke Kab/Kota dan luar Provinsi	350.000.000,00						15 Sektor	
244.				45 Perencanaan program pengembangan kawasan									
					Jumlah bidang yang dikoordinasikan	0,00						0 Bidang	
245.				46 Penyusunan Peraturan Zonasi RTRWP Provinsi Papua									
					Tersusunnya Draf Perda Peraturan Zonasi RTRWP	750.000.000,00						1 Dokumen	
246.				47 Sinkronisasi dan Koordinasi Pengelolaan Geoportal SIMTARU									
					Tersusunnya Program Pengembangan Kawasan dan Tata Ruang	0,00						0 Dokumen	
					Jumlah portal yang dapat mempublikasi data spasial dalam simpul jaringan nasional	600.000.000,00						2 Website	
247.				48 Penetapan Kebijakan RTR Kawasan Strategis Kawasan Merauke dan sekitarnya									
					Jumlah Dokumen	500.000.000,00						0 Dokumen	
248.				49 Finalisasi Peninjauan Kembali RTRW Provinsi Papua tahun 2013-2033									
					Dokumen PK RTRW	0,00						0 Dokumen	
249.		30 Program Peningkatan Kinerja BUMD		1 Fasilitasi penyimpanan regulasi BUMN									
					Adanya dokumen dan informasi	0,00						0 Dokumen	
250.				2 Fasilitasi Pertemuan Forum Koordinasi Mitra BUMD									
					Meningkatnya kapasitas pengelola BUMD	200.000.000,00						9 Lembaga	
251.				3 Koordinasi dan evaluasi kinerja BUMD									
					Meningkatnya kapasitas pengelola BUMD	250.000.000,00						19 Kabupaten	
252.				4 Fasilitasi penyiapan regulasi pengelolaan SDA									
					Tersedianya regulasi pengelolaan SDA	250.000.000,00						3 Dokumen	
253.				5 Fasilitasi Kemitraan Swasta dan Pelaku Ekonomi									
					Adanya forum koordinasi BUMN, BUMS dan Perbankan	200.000.000,00						9 Lembaga	
254.		31 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang		3 Pengawasan pemanfaatan ruang									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Jumlah Kabupaten yang terlaksana Pengawasan Pemanfaatan Ruang	750.000.000,00	5.01 - PERENCANAAN	5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.02.1.01 - Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.02.1.01.05 - Pengintegrasian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Rencana Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Lainnya	Jumlah Kabupaten yang terlaksana Pengawasan Pemanfaatan Ruang	2 Kabupaten	
255.				4 Koordinasi dan fasilitasi pengendalian pemanfaatan ruang lintas kabupaten/kota									
					Jumlah lintas kabupaten yang difasilitasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang	750.000.000,00	5.01 - PERENCANAAN	5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.02.1.01 - Koordinasi Pembangunan Daerah	5.01.02.1.01.05 - Pengintegrasian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Rencana Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Lainnya	Jumlah lintas kabupaten yang difasilitasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang	3 Kabupaten	
256.				5 Monitoring, evaluasi dan pelaporan rencana tata ruang									
257.	Penelitian dan Pengembangan	15 Program Pengembangan Mutu Penelitian dan Pengembangan	Jumlah hasil kelitbangan yang terpilih untuk mendukung kebijakan pembangunan daerah	1 Analisis Disparitas Harga di Provinsi Papua Pasca Standarisasi harga BBM									
					Stadarisasi Harga	0,00						0 Dokumen	
					Jumlah Dokumen	0,00						0 Dokumen	
258.				2 Analisis Kebangkitan Pertumbuhan Ekonomi pada pemanfaatan ruas jalan nasional di Papua									
					Pertumbuhan Ekonomi pada Ruas Jalan Nasional	0,00	5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	5.05.02.1.03 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi Dan Pembangunan	5.05.02.1.03.09 - Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Identifikasi lokasi pertumbuhan ekonomi	1 Dokumen	
					Jumlah Hasil Kajian	0,00	5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	5.05.02.1.03 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi Dan Pembangunan	5.05.02.1.03.09 - Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Identifikasi lokasi pertumbuhan ekonomi	1 Dokumen	
259.				3 Analisis Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat									
					Tingkat kesejahteraan masyarakat	0,00						0 Dokumen	
					Jumlah Hasil Penelitian	0,00						0 Dokumen	
260.				4 Kajian pengembangan transportasi intermoda di Papua									
					Strategi pengembangan transportasi sungai dan antar pulau	0,00	5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	5.05.02.1.03 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi Dan Pembangunan	5.05.02.1.03.10 - Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Hasil Kajian tentang rekomendasi pengembangan transportasi Intermoda di Papua	1 Dokumen	
					Jumlah Hasil Kajian	0,00	5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	5.05.02.1.03 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi Dan Pembangunan	5.05.02.1.03.10 - Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Hasil Kajian tentang rekomendasi pengembangan transportasi Intermoda di Papua	1 Dokumen	
261.				5 Kajian pengembangan tata niaga komunitas unggulan di Provinsi Papua									
					Strategi pemasaran	0,00						0 Dokumen	
					Jumlah Hasil Kajian	0,00						0 Dokumen	
262.				8 Analisis Sinergitas Percepatan pembangunan Provinsi Papua									
					Sinergitas Percepatan	505.000.000,00	5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	5.05.02.1.01 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	5.05.02.1.01.01 - Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah dokumen	1 Dokumen	
					Jumlah Hasil Kajian	0,00	5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	5.05.02.1.02 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	5.05.02.1.02.01 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Jumlah Hasil Kajian	0 Dokumen	
263.				9 Pembangunan sistem jaringan informasi hasil - hasil penelitian di Papua									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Jaringan Informasi	0,00						0 Sistem	
					Jumlah Sitem	0,00						0 Sistem	
264.				13 analisis kebutuhan jabatan struktural/ fungsional dan ASN di Provinsi Papua									
					Kebutuhan Diklat Struktural dan Fungsional di Provinsi Papua	0,00						0 Dokumen	
					Jumlah Hasil Penelitian	0,00						0 Dokumen	
265.				15 Kajian Kelayakan Relokasi Pemindahan Ibu Kota Provinsi Papua									
					Kelayakan Relokasi Pemindahan Ibu Kota Provinsi Papua	0,00	5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	5.05.02.1.01 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	5.05.02.1.01.02 - Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen kelayakan relokasi Ibu kota Provinsi Papua	1 Dokumen	
					Jumlah Hasil Kajian	0,00	5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	5.05.02.1.01 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	5.05.02.1.01.01 - Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Hasil Kajian	0 Dokumen	
266.				16 analisis pemberdayaan ekonomi terhadap mama mama pedagang asli papua									
					Pemanfaatan Dana OTSUS	0,00						0 Dokumen	
					Jumlah Hasil Kajian	0,00						0 Dokumen	
267.				19 Lomba karya tulis ilmiah bidang IPTEK dan Inovasi Teknologi									
					Jumlah Peserta	0,00	5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	5.05.02.1.04 - Pengembangan Inovasi dan Teknologi	5.05.02.1.04.01 - Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Peserta	20 Peserta	
268.				21 Kajian dan Analisis Dampak Ekonomi terhadap pelaksanaan PON XX di Provinsi Papua									
					Jumlah Hasil Kajian	0,00						0 Dokumen	
269.				22 Penguatan Jaringan penelitian daerah di Provinsi Papua									
					Jumlah Pertemuan	400.000.000,00	5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	5.05.02.1.01 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	5.05.02.1.01.03 - Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Jumlah Peserta	90 Kegiatan	
270.				23 Pembangunan Model Cluster Inovasi unggulan komoditas unggulan daerah bekerja sama dengan Perguruan Tinggi dan Kementerian Riset & Dikti									
					Tersedia model cluster inovasi daerah	0,00						0 Dokumen	
271.				24 Forum Desiminasi Hasil Riset dan Inovasi Daerah									
					Terlaksananya Forum Diseminasi Hasil Riset daerah	0,00	5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	5.05.02.1.04 - Pengembangan Inovasi dan Teknologi	5.05.02.1.04.03 - Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Terlaksananya Forum Diseminasi Hasil Riset daerah	1 Dokumen	
272.				25 Penelitian Mandiri Fungsional									
					Terlaksananya Penelitian Mandiri Fungsional	500.000.000,00	5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	5.05.02.1.03 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi Dan Pembangunan	5.05.02.1.03.08 - Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	Jumlah Dokumen Penelitian	1 Dokumen	
273.				26 Diklat Fungsional dan Calon Fungsional Litbang (KTI/IS/RD, Metodologi, Pengolaan Data)									
					Terlaksananya Diklat kelitbangan	0,00						0 Dokumen	
274.				27 Peningkatan kemampuan dan Sinergitas Inovasi Litbang Aparatur Balitbangda Provinsi Papua									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Terlaksananya peningkatan kemampuan dan sinergitas litbang	0,00						0 Dokumen	
275.				29 Kajian Terhadap Rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Papua berdasarkan wilayah adat									
					Tersedianya rekomendasi pengembangan IPM Papua	500.000.000,00	5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	5.05.02.1.01 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	5.05.02.1.01.01 - Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Tersedianya dokumen kajian	1 Dokumen	
276.				30 Studi Model Percontohan Pengembangan Klaster Industri Produk Unggulan Ubi jalar di Pprovinsi Papua									
					Tersedianya model percontohan pengembangan produk unggulan ubi jalar	0,00						0 Dokumen	
277.				31 kajian akademis tentang regulas pengembangan komoditas unggulan									
					Jumlah Hasil Kajian	500.000.000,00	5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	5.05.02.1.01 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	5.05.02.1.01.01 - Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah perdasus yang dilakukan evaluasi	10 Dokumen	
278.				32 fasilitasi pembangunan model pengelolaan industri sagu rakyat di provinsi papua									
					Jumlah Kilang sagu yang terbangun	0,00						0 Unit	
279.				33 uji coba pengembangan konstruksi jalan dengan memanfaatkan batang sagu/nibong/kelapa									
					Jumlah Hasil Kajian	0,00						0 Dokumen	
280.				34 kajian identifikasi tingkat produktifitas dan nilai tambah komoditas unggulan di provinsi papua									
					Jumlah Hasil Kajian	800.000.000,00	5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	5.05.02.1.03 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi Dan Pembangunan	5.05.02.1.03.04 - Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Identifikasi	1 Dokumen	
281.				35 Pengembangan Kampung Inovasi Berbasis Komoditas Lokal									
					Jumlah Kampung	705.000.000,00	5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	5.05.02.1.03 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi Dan Pembangunan	5.05.02.1.03.01 - Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah dokumen	1 Kampung	
282.		16 Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK	Jumlah Teknologi Tepat Guna dalam Mendukung Penguatan Sistem Inovasi Daerah	1 Evaluasi dan Pelaporan hasil - hasil kerja Tahunan									
					Jumlah Hasil Kerja	0,00	5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	5.05.02.1.01 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	5.05.02.1.01.04 - Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah laporan berdasarkan dokumen	0 Dokumen	
283.				2 Sosialisasi hasil kerja Balitbangda Provinsi Papua									
					Jumlah Bahan	0,00	5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	5.05.02.1.04 - Pengembangan Inovasi dan Teknologi	5.05.02.1.04.04 - Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Peserta	1 Buku	
284.				3 fasilitasi pembinaan tim kelitbangan papua									
					Jumlah TIM	0,00	5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	5.05.02.1.04 - Pengembangan Inovasi dan Teknologi	5.05.02.1.04.05 - Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah TIM	7 Tim	
285.				4 Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna di Provinsi Papua									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Jumlah Hasil Kajian	0,00	5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	5.05.02.1.04 - Pengembangan Inovasi dan Teknologi	5.05.02.1.04.01 - Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Hasil Kajian	1 Dokumen	
286.				5 Kajian dan Pengembangan Taman Teknologi Energi Terbarukan									
					Jumlah Hasil Kajian	0,00	5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	5.05.02.1.04 - Pengembangan Inovasi dan Teknologi	5.05.02.1.04.02 - Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Hasil Kajian	1 Dokumen	
287.				6 Fasilitasi Pameran Pengembangan IPTEK di Provinsi Papua									
					Jumlah Kegiatan	600.000.000,00	5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	5.05.02.1.04 - Pengembangan Inovasi dan Teknologi	5.05.02.1.04.04 - Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Kegiatan 1	1 Kegiatan	
288.				7 Pengembangan Teknologi tepat guna untuk mendukung penguatan sistem inovasi daerah									
					Jumlah Model	905.000.000,00	5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	5.05.02.1.04 - Pengembangan Inovasi dan Teknologi	5.05.02.1.04.01 - Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Jumlah Model	1 Unit	
289.		17 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Tingkat pemanfaatan teknologi Informasi dalam Mendukung Penguatan Sistem Inovasi Daerah	1 FGD Isu-isu Aktual di Provinsi Papua									
					Jumlah Kegiatan	400.000.000,00	5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	5.05.02.1.01 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	5.05.02.1.01.02 - Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen	4 Kegiatan	
290.		18 Program Kerjasama Antar Pemerintah Daerah		1 Penguatan Kelembagaan SIDA (Sistem Inovasi Daerah)									
					Jumlah Kegiatan	0,00	5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	5.05.02.1.01 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	5.05.02.1.01.05 - Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Kegiatan	1 Kegiatan	
291.				2 Rapat Koordinasi Bidang Penelitian dan Pengembangan se Provinsi Papua									
					Jumlah Kegiatan	705.000.000,00	5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	5.05.02.1.01 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	5.05.02.1.01.02 - Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah rapat koordinasi penelitian dan pengembangan	20 Kegiatan	
292.				4 Forum Desiminasi Hasil Riset dan Inovasi Daerah									
					Jumlah peserta forum	0,00	5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	5.05.02.1.01 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	5.05.02.1.01.02 - Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah peserta forum	120 Orang	
JUMLAH						96.977.800.000,00							

Mengetahui,
Kepala Bappeda Provinsi Papua

YOHANES WALILO, S.Sos, M.Si
NIP. 197007281997121001

JAYAPURA, 20 July 2020
Kepala Bappeda Provinsi Papua

YOHANES WALILO, S.Sos, M.Si
NIP. 197007281997121001

**REKAPITULASI PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021
SERTA KETERKAITAN DENGAN HASIL PEMETAAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019**

PROVINSI : Papua

PERANGKAT DAERAH : Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Keuangan	1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	À Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	1 Penyediaan jasa surat menyurat									
					Jumlah surat yang disediakan	967.000.000,00		4.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.04.01.1.03 - Administrasi Umum	4.04.01.1.03.01 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang terkirim	1000 Surat	
2.				2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik									
					Jumlah Jasa Layanan berlangganan Listrik, Air, Telepon, Transponder	1.576.000.000,00		4.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.04.01.1.03 - Administrasi Umum	4.04.01.1.03.02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Layanan	12 Layanan	
3.				6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional									
					Jumlah Unit Mobil Dinas/Operasional yang terpelihara dan Terfasilitasi Perijinannya	78.000.000,00		4.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.04.01.1.03 - Administrasi Umum	4.04.01.1.03.06 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Unit Mobil Dinas/Operasional yang diservis dan dipelihara	60 Unit	
4.				8 Penyediaan jasa kebersihan kantor									
					Luas Gedung dan Halaman yang disediakan jasa kebersihan	0,00		4.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.04.01.1.03 - Administrasi Umum	4.04.01.1.03.08 - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	jumlah Gedung dan Halaman yang dibersihkan	0 M2	
					Jumlah tenaga kebersihan dan Fasilitas Pendukung kebersihan kantor	1.061.000.000,00		4.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.04.01.1.03 - Administrasi Umum	4.04.01.1.03.08 - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah tenaga kebersihan	16 Orang	
					Jumlah Jenis Bahan dan Alat Kebersihan	0,00		4.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.04.01.1.03 - Administrasi Umum	4.04.01.1.03.14 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Bahan dan Alat Kebersihan	0 Jenis	
5.				10 Penyediaan alat tulis kantor									
					Jumlah jenis ATK yang disediakan	1.349.000.000,00		4.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.04.01.1.03 - Administrasi Umum	4.04.01.1.03.10 - Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	150 Jenis	
6.				11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan									
					Jumlah barang cetakan	864.000.000,00		4.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.04.01.1.03 - Administrasi Umum	4.04.01.1.03.11 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan	80025 Jenis	
					Jumlah penggandaan	0,00		4.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.04.01.1.03 - Administrasi Umum	4.04.01.1.03.11 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penggandaan	0 Lembar	
					Jumlah Jenis Barang Cetak dan yang Disediakan	0,00		4.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.04.01.1.03 - Administrasi Umum	4.04.01.1.03.11 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0 Jenis	
					Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	0,00		4.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.04.01.1.03 - Administrasi Umum	4.04.01.1.03.11 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	0 Bulan	
7.				15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan									
					Jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	208.000.000,00		4.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.04.01.1.03 - Administrasi Umum	4.04.01.1.03.15 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	100 Jenis	
8.				17 Penyediaan makanan dan minuman									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Pelaksanaan penyediaan makan dan minum	0,00		4.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.04.01.1.03 - Administrasi Umum	4.04.01.1.03.17 - Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Porsi makan dan minum kegiatan yang tersedia	0 Kegiatan	
					Pelaksanaan makan minum tamu dan rapat	0,00		4.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.04.01.1.03 - Administrasi Umum	4.04.01.1.03.17 - Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Porsi makan dan minum yang tersedia	0 Kali Tahun	
					Pelaksanaan makan minum saat olah raga (hari Jumat)	0,00		4.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.04.01.1.03 - Administrasi Umum	4.04.01.1.03.17 - Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Porsi makan dan minum yang tersedia	0 Kali	
					Tersediannya Makanan dan Minuman	1.234.000.000,00		4.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.04.01.1.03 - Administrasi Umum	4.04.01.1.03.17 - Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Porsi makan dan minum yang tersedia	12 Bulan	
					Jumlah orang yang disediakan makan dan minuman	0,00		4.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.04.01.1.03 - Administrasi Umum	4.04.01.1.03.17 - Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Porsi makan dan minum yang tersedia	0 Orang	
9.				18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah									
					Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	3.550.000.000,00		4.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.04.01.1.03 - Administrasi Umum	4.04.01.1.03.18 - Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	36 Orang	
10.				19 Penyediaan Jasa Pengamanan									
					Pelaksanaan pembayaran insentif bagi tenaga operator dan penjaga X-Ray VIP Room Bandara Sentani	0,00		4.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.04.01.1.03 - Administrasi Umum	4.04.01.1.03.01 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa keamanan/security yang dibayarkan	0 Orang Bulan	
					Pelaksanaan pembayaran honor bagi satpam	0,00		4.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.04.01.1.03 - Administrasi Umum	4.04.01.1.03.01 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa keamanan/security yang dibayarkan	0 Orang Bulan	
					Pelaksanaan uang makan satpam	0,00		4.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.04.01.1.03 - Administrasi Umum	4.04.01.1.03.01 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa keamanan/security yang dibayarkan	0 Orang Bulan	
					Jumlah tenaga pengamanan	599.000.000,00		4.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.04.01.1.03 - Administrasi Umum	4.04.01.1.03.01 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa keamanan/security yang dibayarkan	12 Orang	
11.		2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	À Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	5 Pengadaan kendaraan dinas/operasional									
					Jumlah kendaraan yang diadakan	0,00		4.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.04.01.1.03 - Administrasi Umum	4.04.01.1.03.21 - Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda 4	1 Unit	
					Jumlah kendaraan roda 2	0,00		4.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.04.01.1.03 - Administrasi Umum	4.04.01.1.03.21 - Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda 2	2 Unit	
12.				6 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas									
					Jumlah perlengkapan rumah jabatan	0,00		4.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.04.01.1.03 - Administrasi Umum	4.04.01.1.03.24 - Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah Pengadaan Peralatan	1 Unit	
13.				7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor									
					Jumlah pengadaan perlengkapan	187.000.000,00		4.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.04.01.1.03 - Administrasi Umum	4.04.01.1.03.23 - Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan	10 Unit	
14.				8 Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas									
15.				9 Pengadaan peralatan gedung kantor									
					Jumlah peralatan perlengkapan	0,00		4.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.04.01.1.03 - Administrasi Umum	4.04.01.1.03.25 - Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan/perlengkapan yang diadakan	0 Unit	
16.				10 Pengadaan mebeleur									
					Jumlah mebeleur yang diadakan	0,00		4.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.04.01.1.03 - Administrasi Umum	4.04.01.1.03.26 - Pengadaan Mebeleur	Jumlah mebeleur yang diadakan untuk 3 UPT	0 Unit	
17.				20 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan									
					Jumlah rumah jabatan yg terpelihara	78.000.000,00		4.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.04.01.1.03 - Administrasi Umum	4.04.01.1.03.37 - Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan	Jumlah rumah jabatan yg terpelihara	1 Unit Tahun	
18.				22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Jumlah gedung kantor yang dipelihara	388.000.000,00		4.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.04.01.1.03 - Administras Umum	4.04.01.1.03.29 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor	2 Unit	
					belanja sewa	0,00		4.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.04.01.1.03 - Administras Umum	4.04.01.1.03.29 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung yang disewa	0 Tahun	
19.				24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional									
					Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	0,00		4.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.04.01.1.03 - Administras Umum	4.04.01.1.03.31 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah dan Jenis perlengkapan/peralatan gedung kantor yang dipelihara	0 Unit	
					Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	2.318.000.000,00		4.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.04.01.1.03 - Administras Umum	4.04.01.1.03.31 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang	88 Unit	
					sewa kendaraan	0,00		4.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.04.01.1.03 - Administras Umum	4.04.01.1.03.31 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan yang diperbaiki/Service	0 Bulan	
20.				25 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas									
21.				26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor									
					Pelaksanaan pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	78.000.000,00		4.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.04.01.1.03 - Administras Umum	4.04.01.1.03.27 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Jumlah Rumah Jabatan	1 Kegiatan	
					Jumlah Perlengkapan Gedung kantor yang terpelihara	388.000.000,00		4.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.04.01.1.03 - Administras Umum	4.04.01.1.03.33 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung kantor yang dipelihara	1 Unit	
					Tersediannya biaya pemeliharaan gedung kantor	400.000.000,00		4.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.04.01.1.03 - Administras Umum	4.04.01.1.03.39 - Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor	1 Bulan	
22.				28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor									
					Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	208.000.000,00		4.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.04.01.1.03 - Administras Umum	4.04.01.1.03.35 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	350 Unit	
23.				40 Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan									
24.		3 Program peningkatan disiplin aparatur	À Meningkatnya disiplin aparatur	2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya									
					Jumlah pakaian dinas yang diadakan	338.000.000,00		4.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.04.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	4.04.01.1.04.02 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas sipil harian	170 Stell	
25.				5 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu									
					Jumlah pakaian khusus yang diadakan	400.000.000,00		4.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.04.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	4.04.01.1.04.05 - Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah pakaian Batik yang diadakan	170 Stell	
26.		5 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	À Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	1 Pendidikan dan pelatihan formal									
					Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	421.000.000,00		4.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.04.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	4.04.01.1.04.09 - Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparatur mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	30 Orang	
27.				4 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal									
					Jumlah aparatur yang terlatih	541.000.000,00		4.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.04.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	4.04.01.1.04.11 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang	
28.		6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	À Meningkatnya kualitas akuntabilitas OPD	1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD									
					Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	44.000.000,00		4.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.04.01.1.02 - Administras Keuangan	4.04.01.1.02.06 - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan	60 Laporan	
					Laporan LAKIP SKPD	0,00		4.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.04.01.1.01 - Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.04.01.1.01.05 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan LAKIP SKPD	0 Dokumen	

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29.	Keuangan	6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	A Meningkatnya kualitas akuntabilitas OPD	2 Penyusunan laporan keuangan semesteran									
					Jumlah pelaporan keuangan semesteran yang diselesaikan tepat waktu	139.000.000,00		4.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.04.01.1.02 - Administrasi Keuangan	4.04.01.1.02.07 - Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Jumlah dokumen laporan	220 Laporan	
30.				4 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun									
					Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	78.000.000,00		4.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.04.01.1.02 - Administrasi Keuangan	4.04.01.1.02.09 - Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	2 Laporan	
31.				5 Penyusunan Renja, RKA dan Perubahan APBD									
					Jumlah dokumen	68.000.000,00		4.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.04.01.1.01 - Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.04.01.1.01.01 - Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	5 Dokumen	
32.				12 Penyusunan RENSTRA									
					Jumlah Dokumen	62.000.000,00		4.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.04.01.1.01 - Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.04.01.1.01.01 - Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	5 Dokumen	
33.				13 Penyusunan SOP									
					Jumlah Dokumen	0,00		4.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.04.01.1.01 - Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.04.01.1.01.04 - Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	
34.		17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Cakupan Implementasi Analisis Standar Belanja Daerah ; Kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah ; Opini Pemeriksaan BPK; Penyampaian LKPD Tepat Waktu ; Persentase aset daerah yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan retribusi; Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah; Tersusunnya APBD dan Perubahan APBD secara tepat waktu dan berkualitas ; Tertib Administrasi BMD	6 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD									
					Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	2.514.000.000,00	5.02 - KEUANGAN	5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.01 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	5.02.02.1.01.10 - Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Perencanaan Anggaran	50 Dokumen	
35.				7 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD									
					Tersusunnya Dokumen rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD Provinsi Papua	473.000.000,00	5.02 - KEUANGAN	5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.01 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	5.02.02.1.01.05 - Penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD	Jumlah rancangan peraturan	50 Dokumen	
36.				8 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD									
					Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	2.277.000.000,00	5.02 - KEUANGAN	5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.01 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	5.02.02.1.01.06 - Penyusunan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Perubahan APBD	Jumlah dokumen Peraturan daerah tentang perubahan APBD	50 Dokumen	
37.				9 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD									
					Tersusunnya Dokumen rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD Provinsi Papua	473.000.000,00	5.02 - KEUANGAN	5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.01 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	5.02.02.1.01.06 - Penyusunan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Dokumen rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD Provinsi Papua	50 Dokumen	
38.				10 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Tersusunnya Rancangan PERDA tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1.040.000.000,00	5.02 - KEUANGAN	5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.04 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	5.02.02.1.04.02 - Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Rancangan PERDA tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	50 Dokumen	
39.				14 Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah									
					Terlaksananya Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	0,00	5.02 - KEUANGAN	5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.02 - Pembinaan Pengelolaan Keuangan daerah Kabupaten/Kota	5.02.02.1.02.06 - Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan	Jumlah Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	1 Kegiatan	
40.				19 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah									
					Terlaksananya Rapat dan Koordinasi	0,00	5.02 - KEUANGAN	5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	5.02.04.1.01 - Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	5.02.04.1.01.02 - Penyusunan Kebijakan Tentang Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Terlaksananya Rapat dan Koordinasi	1 Kegiatan	
41.				20 Pemeliharaan sistem informasi pengelolaan aset daerah									
					Terpeliharanya Sistem Informasi Pengelolaan Aset	598.000.000,00	5.02 - KEUANGAN	5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	5.02.03.1.01 - Pengelolaan Barang Milik Daerah	5.02.03.1.01.04 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Pemeliharaan/Perawatan Barang Milik Daerah	Jumlah Aset yang terpelihara	510 Unit	
42.				23 Pemeliharaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah									
					Terlaksananya upaya-upaya Pengembangan Aplikasi dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	474.000.000,00	5.02 - KEUANGAN	5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	5.02.03.1.01 - Pengelolaan Barang Milik Daerah	5.02.03.1.01.04 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Pemeliharaan/Perawatan Barang Milik Daerah	Jumlah Aplikasi yang terpelihara	5 Aplikasi	
43.				24 Revaluasi/appraisal aset/barang daerah									
					Terlaksananya Penilaian terhadap Aset Daerah PEMPROV Papua	0,00					Jumlah Penilaian Dokumen Aset Daerah PEMPROV Papua	1 Dokumen	
44.				25 Pengembangan Aplikasi Gaji									
					Terlaksananya Pengembangan Aplikasi Gaji	0,00	5.02 - KEUANGAN	5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	5.02.04.1.01 - Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	5.02.04.1.01.01 - Penyusunan Kebijakan Teknis Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah	Terlaksananya Pengembangan Aplikasi Gaji	1 Kegiatan	
45.				26 Pengembangan Aplikasi Suplemen									
					Terlaksananya Pengembangan Aplikasi Suplemen	0,00	5.02 - KEUANGAN	5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	5.02.04.1.01 - Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	5.02.04.1.01.01 - Penyusunan Kebijakan Teknis Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah	Terlaksananya Pengembangan Aplikasi Suplemen	1 Kegiatan	
46.				27 Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi Data Kas Daerah									
					Tersusunnya Laporan dan Rekondiliasi Data Kas Daerah	364.000.000,00	5.02 - KEUANGAN	5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.03 - Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	5.02.02.1.03.06 - Koordinasi Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan dan Rekondiliasi Data Kas Daerah	110 Laporan	
47.				32 Pengembangan Sistem Informasi dan Basis Data Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota se Papua									
					Tersedianya Informasi Data Pengelolaan Keuangan Daerah	0,00	5.02 - KEUANGAN	5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	5.02.04.1.01 - Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	5.02.04.1.01.01 - Penyusunan Kebijakan Teknis Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah	Tersedianya Informasi Data Pengelolaan Keuangan Daerah	1 Kegiatan	
48.				33 Pembinaan, Pengawasan Asset Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Terbinanya Pengawasan tentang Aset	0,00	5.02 - KEUANGAN	5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	5.02.03.1.01 - Pengelolaan Barang Milik Daerah	5.02.03.1.01.13 - Koordinasi dan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah peserta Pengawasan tentang Aset	85 Orang Triwulan	
49.				34 Peningkatan Kapasitas Perencanaan dan Penganggaran									
					Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Aparat Perencanaan Anggaran	0,00	5.02 - KEUANGAN	5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.01 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	5.02.02.1.01.11 - Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Aparat Perencanaan Anggaran	1 Orang Hari	
50.				35 Penyusunan Standar Satuan Harga									
					Tersedianya Data dan Keseragaman Standar Satuan Harga	0,00	5.02 - KEUANGAN	5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	5.02.03.1.01 - Pengelolaan Barang Milik Daerah	5.02.03.1.01.01 - Koordinasi dan Penyusunan Standar Harga Berdasarkan Jenis dan Tipe Barang	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	
51.				36 Penyusunan Analisa Standar Belanja									
					Tersedianya Data dan Keseragaman Standar Belanja	0,00	5.02 - KEUANGAN	5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	5.02.03.1.01 - Pengelolaan Barang Milik Daerah	5.02.03.1.01.02 - Koordinasi dan Penyusunan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Tersedianya Data dan Keseragaman Standar Belanja	1 Dokumen	
52.				37 Pengamanan, Penertiban Asset Pemerintah Daerah di Dalam dan Luar Provinsi Papua									
					Tersedianya Data dan Aset Daerah yang terdapat di luar Daerah	319.000.000,00	5.02 - KEUANGAN	5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	5.02.03.1.01 - Pengelolaan Barang Milik Daerah	5.02.03.1.01.07 - Koordinasi Pelaksanaan Pengamanan Fisik, Administrasi dan Hukum Barang Milik Daerah	Jumlah Barang	1 Dokumen	
53.				38 Inventarisasi Sekolah Menengah Umum, Sekolah menengah kejuruan Kab/Kota Sepapua									
					Terlaksananya Inventarisasi Sekolah Sekolah Menengah Umum, Sekolah Menengah Kab/Kota se Papua	0,00	5.02 - KEUANGAN	5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	5.02.03.1.01 - Pengelolaan Barang Milik Daerah	5.02.03.1.01.06 - Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Inventarisasi Sekolah Sekolah Menengah Umum, Sekolah Menengah Kab/Kota se Papua	1 Kegiatan	
54.				39 Integrasi Database Aplikasi MKPP dengan Aplikasi SIMDA Keuangan									
					Terwujudnya Data Keuangan yang Representatif	0,00					Terwujudnya Data Keuangan yang Representatif	1 Kegiatan	
55.				71 Penyusunan/Pembahasan Peraturan Pengelolaan keuangan Daerah									
					Tersusunnya Juklak/Juknis Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	500.000.000,00	5.02 - KEUANGAN	5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.01 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	5.02.02.1.01.10 - Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Laporan Yang disusun	2 Dokumen	
56.				77 Pembahasan RKA SKPD									
					Terbahasnya Program Kegiatan SKPD oleh TAPD	977.000.000,00	5.02 - KEUANGAN	5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.01 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	5.02.02.1.01.03 - Penyusunan dan Review RKA SKPD / Perubahan RKA SKPD	Jumlah RKA yang terbahas	36 SKPD	
57.				84 Rapat Kerja Keuangan Daerah se Provinsi Papua									
					Terlaksananya Rapat Kerja Keuangan Daerah se Provinsi Papua	0,00	5.02 - KEUANGAN	5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.02 - Pembinaan Pengelolaan Keuangan daerah Kabupaten/Kota	5.02.02.1.02.06 - Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan	Terlaksananya Rapat Kerja Keuangan Daerah se Provinsi Papua	1 Kegiatan	
58.				86 Penyusunan KUA / PPAS									
					Tersusunnya KUA/PPAS	1.040.000.000,00	5.02 - KEUANGAN	5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.01 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	5.02.02.1.01.01 - Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen yang tersusun	1 Dokumen	
59.				89 Pelatihan bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Terlaksananya Pelatihan bagi pejabat Penatausahaan Keuangan dan Bendahara Pengeluaran di lingkungan PEMPROV Papua guna meningkatkan kemampuan dalam Penatausahaan Keuangan Daerah	415.000.000,00	5.02 - KEUANGAN	5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.04 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	5.02.02.1.04.12 - Pelaksanaan Pembinaan dan Sosialisasi Tentang Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Peserta Pelatihan bagi pejabat Penatausahaan Keuangan dan Bendahara Pengeluaran di lingkungan PEMPROV Papua guna meningkatkan kemampuan dalam Penatausahaan Keuangan Daerah	200 Orang	
60.				90 Pelatihan Pengelolaan Administrasi Penggajian PNS									
					Terlatihnya Aparatur Pengelola Administrasi Penggajian PNS	264.000.000,00	5.02 - KEUANGAN	5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.03 - Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	5.02.02.1.03.05 - Koordinasi Pelaksanaan dan Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP dan SPM, Pemberian Pembebanan Rincian Penggunaan Atas Pengesahan SPJ Gaji dan Non Gaji, Serta Penerbitan SKPP	Jumlah Aparatur Pengelola Administrasi Penggajian PNS	72 Orang	
61.				91 Monitoring dan Evaluasi Realisasi SP2D di setiap SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua									
					Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Realisasi SP2D di setiap SKPD di lingkungan PEMPROV Papua	572.000.000,00	5.02 - KEUANGAN	5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.03 - Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	5.02.02.1.03.04 - Pemrosesan, Penerbitan dan Pendistribusian Lembar SP2D	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Realisasi SP2D di setiap SKPD di lingkungan PEMPROV Papua	36 SKPD	
62.				93 Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi Data Bidang Akuntansi									
					Tersusunnya Laporan dan Rekonsiliasi Data Bidang Akuntansi	520.000.000,00	5.02 - KEUANGAN	5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.04 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	5.02.02.1.04.12 - Pelaksanaan Pembinaan dan Sosialisasi Tentang Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen Laporan keuangan dan Rekonsiliasi Data Bidang Akuntansi	50 Dokumen	
63.				102 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Pemerintah Provinsi Papua									
					Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran PEMPROV Papua	519.000.000,00	5.02 - KEUANGAN	5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.04 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	5.02.02.1.04.03 - Koordinasi dan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemerintah Provinsi	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran PEMPROV Papua	50 Dokumen	
64.				103 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Pemerintah Provinsi Papua									
					Tersusunnya Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	2.341.000.000,00	5.02 - KEUANGAN	5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.04 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	5.02.02.1.04.03 - Koordinasi dan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemerintah Provinsi	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	200 Dokumen	
65.				201 Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran - DPA									
					Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran	961.000.000,00	5.02 - KEUANGAN	5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.01 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	5.02.02.1.01.04 - Penyusunan dan Review DPA SKPD / Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran - DPA	60 Dokumen	
66.				202 Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran - DPPA									
					Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran	481.000.000,00	5.02 - KEUANGAN	5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.01 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	5.02.02.1.01.04 - Penyusunan dan Review DPA SKPD / Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran	60 Dokumen	
67.				203 Monitoring dan Evaluasi Hibah, Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Papua									
					Tersedianya Data tentang Dana Hibah dan BANSOS	676.000.000,00	5.02 - KEUANGAN	5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.05 - Kegiatan Penunjang Urusan	5.02.02.1.05.03 - Pelaksanaan Alokasi dan Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus	Jumlah Laporan Evaluasi BANSOS	1 Laporan	
68.				204 Pengembangan Aplikasi Cash Management System									
					Terlaksana Pengembangan Aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah	0,00							

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
69.	Keuangan	17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Cakupan Implementasi Analisis Standar Belanja Daerah ; Kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah ; Opini Pemeriksaan BPK; Penyampaian LKPD Tepat Waktu ; Persentase aset daerah yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan retribusi; Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah; Tersusunnya APBD dan Perubahan APBD secara tepat waktu dan berkualitas ; Tertib Administrasi BMD	208 Pembahasan RKA Perubahan SKPD									
					Tersedianya Dokumen Rencana Kebutuhan Anggaran Perubahan	494.000.000,00	5.02 - KEUANGAN	5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.01 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	5.02.02.1.01.03 - Penyusunan dan Review RKA SKPD / Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Anggaran Perubahan	60 Dokumen	
70.				209 Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan									
					Meningkatnya Pengelolaan Keuangan	3.371.000.000,00	5.02 - KEUANGAN	5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.03 - Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	5.02.02.1.03.02 - Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Laporan	36 Dokumen	
71.				210 Pengelolaan Aplikasi TPB dan Aplikasi TP2K									
					Terlaksananya Pengelola Aplikasi TPB dan TP2K	0,00						0 Dokumen	
72.				211 Penyusunan Laporan Sasaran Kinerja Pegawai/Kenaikan Pangkat/Kenaikan Gaji Berkala pada BPKAD									
					Tersusunnya Laporan Sasaran Kinerja Pegawai/Kenaikan Pangkat/Kenaikan Gaji Berkala pada BPKAD	0,00						0 Dokumen	
73.				212 Pengelolaan Penataan Arsip pada Gudang BPKAD									
					Tertatanya Arsip BPKAD	0,00						0 Kegiatan	
74.				214 Pengelolaan SIRUP pada BPKAD									
					Terlaksananya Penginputan Rencanan Pengadaan ke dalam Aplikasi	0,00					Jumlah kegiatan yang di input pada Aplikasi SIRUP	76 Dokumen	
75.				215 Penyediaan Jasa Listrik dan Air bagi Asrama Mahasiswa Pemda Provinsi Papua di Luar Papua									
					Tersedianya Pelayanan Listrik dan Air Pada Asrama Mahasiswa di Luar Papua	0,00	5.02 - KEUANGAN	5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	5.02.03.1.01 - Pengelolaan Barang Milik Daerah	5.02.03.1.01.05 - Penatausahaan Barang Milik Daerah	Tersedianya Pelayanan Listrik dan Air Pada Asrama Mahasiswa di Luar Papua	16 Bulan	
76.				216 Penyusunan Laporan Pemeliharaan dan Penghapusan Aset Daerah									
					Tersusunnya Laporan Usulan Pemeliharaan dan Penghapusan SKPD	371.000.000,00	5.02 - KEUANGAN	5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	5.02.03.1.01 - Pengelolaan Barang Milik Daerah	5.02.03.1.01.09 - Koordinasi, pengawasan dan pengendalian atas Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Tersusunnya Laporan Usulan Pemeliharaan dan Penghapusan SKPD	2 Dokumen	
77.				217 Penyusunan Laporan Mutasi Barang									
					Tersusunnya Laporan Mutasi Barang	156.000.000,00	5.02 - KEUANGAN	5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	5.02.03.1.01 - Pengelolaan Barang Milik Daerah	5.02.03.1.01.05 - Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Mutasi Barang	1 Dokumen	
78.				218 Penyusunan Laporan Pengurus dan Penyimpan Barang									
					Tersusunnya Laporan bagi Pengurus dan Pembantu Pengurus Barang BPKAD	0,00	5.02 - KEUANGAN	5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	5.02.03.1.01 - Pengelolaan Barang Milik Daerah	5.02.03.1.01.12 - Konsolidasi Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah dari SKPD	Tersusunnya Laporan bagi Pengurus dan Pembantu Pengurus Barang BPKAD	10 Dokumen	
79.				219 Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi Data Asset BPKAD									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Tersusunnya Laporan dan Rekonsiliasi Data Aset	177.000.000,00	5.02 - KEUANGAN	5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	5.02.03.1.01 - Pengelolaan Barang Milik Daerah	5.02.03.1.01.11 - Koordinasi Pelaksanaan Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Tersusunnya Laporan dan Rekonsiliasi Data Aset	2 Dokumen	
80.				220 Penyusunan Laporan Realisasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Papua									
					Tersusunnya Laporan Hasil Pengadaan Barang/Jasa SKPD	0,00	5.02 - KEUANGAN	5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	5.02.03.1.01 - Pengelolaan Barang Milik Daerah	5.02.03.1.01.11 - Koordinasi Pelaksanaan Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Tersusunnya Laporan Hasil Pengadaan Barang/Jasa SKPD	60 Dokumen	
81.				221 Penyusunan Laporan Realisasi SP2D dan Penataan Arsip SP2D									
					Tersusunnya Laporan Realisasi SP2D dan Terlaksananya Penataan Arsip SP2D	395.000.000,00	5.02 - KEUANGAN	5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.03 - Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	5.02.02.1.03.04 - Pemrosesan, Penerbitan dan Pendistribusian Lembar SP2D	Tersusunnya Laporan Realisasi SP2D dan Terlaksananya Penataan Arsip SP2D	36 Dokumen	
82.				222 Penyusunan RKBMD dan RKPBM SKPD									
					Tersusunnya Himpunan RKBMD dan RKPBM SKPD	83.000.000,00	5.02 - KEUANGAN	5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	5.02.03.1.01 - Pengelolaan Barang Milik Daerah	5.02.03.1.01.04 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Pemeliharaan/Perawatan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen Himpunan RKBMD dan RKPBM SKPD	51 Dokumen	
83.				223 Penyusunan Laporan Bendahara Penerimaan BPKAD Prov. Papua									
					Tersusunnya Laporan Angsuran Penerimaan Pembayaran Rumah Dinas, Kendaraan Dinas	88.000.000,00	5.02 - KEUANGAN	5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.03 - Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	5.02.02.1.03.08 - Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait	Tersusunnya Laporan Angsuran Penerimaan Pembayaran Rumah Dinas, Kendaraan Dinas	10 Dokumen	
84.				224 Pengintegrasian SIMDA Perencanaan, SIMDA Keuangan dan SIMDA BMD dan Pendapatan Berkerjasama dgn BPKP Papua									
					Terintegrasinya Data SIMDA Pemerintah Provinsi Papua	0,00					Terintegrasinya Data SIMDA Pemerintah Provinsi Papua	1 Kegiatan	
85.				225 Penataan Sistem Informasi Kearsipan di Lingkungan BPKAD Provinsi Papua									
					Tersedianya Data Arsip Yang Transparan dan Akuntabel	0,00					Tersedianya Data Arsip Yang Transparan dan Akuntabel	1 Dokumen	
86.				226 Peningkatan Kapasitas SDM di Bidang Pengelolaan Asset Daerah									
					Meningkatnya Kapasitas Aparatur di Bidang Pengelolaan Aset	0,00	5.02 - KEUANGAN	5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	5.02.03.1.01 - Pengelolaan Barang Milik Daerah	5.02.03.1.01.12 - Konsolidasi Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah dari SKPD	Jumlah Aparatur Bidang Aset Yang mengikuti Pelatihan	1 Orang	
87.				228 Penyusunan KUPA dan PPAS									
					Tersusunnya KUPA dan PPAS	884.000.000,00	5.02 - KEUANGAN	5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.01 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	5.02.02.1.01.01 - Penyusunan KUA dan PPAS	Tersusunnya KUPA dan PPAS	100 Buku	
88.				229 Koordinasi, Konsultasi dan Pelaporan Dana Alokasi Khusus (DAK)									
					Terlaksananya Kegiatan Koordinasi, Konsultasi dan Pelaporan Dana Alokasi Khusus	830.000.000,00	5.02 - KEUANGAN	5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.03 - Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	5.02.02.1.03.03 - Koordinasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Laporan Koordinasi Dana Alokasi Khusus (DAK)	1 Laporan	
89.				230 Revisi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah									
					Tersusunnya Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	0,00	5.02 - KEUANGAN	5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.02 - Pembinaan Pengelolaan Keuangan daerah Kabupaten/Kota	5.02.02.1.02.06 - Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan	Jumlah Buku Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	20 Buku	
90.				231 Inventarisasi Asrama di 19 kota Studi									
					Tersedianya Data Asrama di 19 Kota Studi	0,00	5.02 - KEUANGAN	5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	5.02.03.1.01 - Pengelolaan Barang Milik Daerah	5.02.03.1.01.06 - Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Inventaris	0 Dokumen	
91.				232 Sensus Barang Milik Daerah									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Tertibnya Penatausahaan Barang Milik Daerah	0,00	5.02 - KEUANGAN	5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	5.02.03.1.01 - Pengelolaan Barang Milik Daerah	5.02.03.1.01.03 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Tertibnya Penatausahaan Barang Milik Daerah	51 SKPD	
92.				233 Appraisal/Penilaian									
					Tersedianya Penilaian Data Asset Provinsi Papua	0,00	5.02 - KEUANGAN	5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	5.02.03.1.01 - Pengelolaan Barang Milik Daerah	5.02.03.1.01.08 - Koordinasi Hasil Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah aset yang di nilai	10 Dokumen	
93.				234 Pengembangan Layanan E-Payment Pemerintah Provinsi Papua									
					Terlaksananya Pelayanan E-Payment Pemerintah Provinsi Papua	104.000.000,00	5.02 - KEUANGAN	5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	5.02.04.1.01 - Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	5.02.04.1.01.06 - Perumusan Kebijakan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Yang Berbasis Teknologi Informasi	Jumlah SKPD yang terlayani	36 SKPD	
94.				235 Pengembangan Layanan Pendapatan Online Pemerintah Provinsi Papua									
					Terlaksananya Pelayanan Pendapatan Online Pemerintah Provinsi Papua	104.000.000,00	5.02 - KEUANGAN	5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	5.02.04.1.01 - Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	5.02.04.1.01.06 - Perumusan Kebijakan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Yang Berbasis Teknologi Informasi	Jumlah SKPD yang terlayani	36 SKPD	
95.				238 Pengembangan Sistem Informasi Hibah dan Bantuan Sosial									
					Terbangunnya Sistem Informasi Hibah dan bantuan Sosial	83.000.000,00	5.02 - KEUANGAN	5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.04 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	5.02.02.1.04.10 - Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hibah dan bantuan Sosial	1 Laporan	
96.		18 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota	Cakupan evaluasi laporan pertanggungjawaban APBD kabupaten/kota Kabupaten/Kota Se Papua; Cakupan implementasi regulasi pengelolaan dana Otsus; Cakupan jumlah kabupaten/kota yang menyusun APBD secara tepat waktu dan berkualitas ; Jumlah Kabupaten/kota yang melakukan pengelolaan keuangan secara baik; Persentase penerapan Sistem Informasi Data Pengelolaan Keuangan Otsus	1 Evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD kabupaten/kota									
					Terselenggaranya Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD 29 Kab/Kota	1.833.000.000,00	5.02 - KEUANGAN	5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.02 - Pembinaan Pengelolaan Keuangan daerah Kabupaten/Kota	5.02.02.1.02.02 - Evaluasi APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen APBD Kabupaten/Kota	29 Dokumen	
97.				7 Evaluasi rancangan peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban APBD kabupaten/kota									
					Terselenggaranya Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban APBD di 29 Kab/Kota	1.116.000.000,00	5.02 - KEUANGAN	5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.02 - Pembinaan Pengelolaan Keuangan daerah Kabupaten/Kota	5.02.02.1.02.04 - Evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen	29 Dokumen	
98.				8 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan APBD Kabupaten/ Kota se Provinsi Papua									
					Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan APBD Kab/Kota se Provinsi Papua	303.000.000,00	5.02 - KEUANGAN	5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.02 - Pembinaan Pengelolaan Keuangan daerah Kabupaten/Kota	5.02.02.1.02.02 - Evaluasi APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Monitoring Evaluasi	29 Dokumen	
99.				70 Koordinasi dan Sinkronisasi Sumber Dana OTSUS									
					Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Dana DAK dan OTSUS	1.065.000.000,00	5.02 - KEUANGAN	5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.03 - Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	5.02.02.1.03.03 - Koordinasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Laporan Yang Tersusun	29 Laporan	
100.				71 Sosialisasi Pedoman Penyusunan APBD									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Meningkatnya Kualitas Penyusunan APBD di Kabupaten/kota	260.000.000,00	5.02 - KEUANGAN	5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.02 - Pembinaan Pengelolaan Keuangan daerah Kabupaten/Kota	5.02.02.1.02.06 - Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Sosialisasi	200 Orang	
101.				72 Pelatihan Teknis Tatacara Evaluasi RAPBD Kabupaten/Kota									
					Meningkatnya Kualitas Pembahasan RAPBD Kabupaten/Kota	0,00	5.02 - KEUANGAN	5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.02 - Pembinaan Pengelolaan Keuangan daerah Kabupaten/Kota	5.02.02.1.02.06 - Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan	Meningkatnya Kualitas Pembahasan RAPBD Kabupaten/Kota	1 Kabupaten	
102.				73 Pengarsipan Dokumen APBD Kabupaten/Kota									
					Tersedianya Informasi APBD Kabupaten/Kota	0,00	5.02 - KEUANGAN	5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.02 - Pembinaan Pengelolaan Keuangan daerah Kabupaten/Kota	5.02.02.1.02.05 - Asistensi Pengeloan Keuangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pengarsipan Dokumen APBD Kab/Kota	29 Kabupaten	
JUMLAH						47.137.000.000,00							

Mengetahui,
Kepala Bappeda Provinsi Papua

YOHANES WALILO, S.Sos, M.Si
NIP. 197007281997121001

JAYAPURA, 20 July 2020
Pit.KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET
DAERAH

Dr. NUS WEYA, S.PAK., SE., MM
NIP. 19780908 200502 1 006

**REKAPITULASI PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021
SERTA KETERKAITAN DENGAN HASIL PEMETAAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019**

PROVINSI : Papua

PERANGKAT DAERAH : Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Keuangan	1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	À Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	1 Penyediaan jasa surat menyurat									
					Jumlah surat yang disediakan	380.000.000,00		4.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.04.01.1.03 - Administrasi Umum	4.04.01.1.03.01 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang terkirim	4000 Surat	
2.				2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik									
					Jumlah Jasa Layanan berlangganan Listrik, Air, Telepon, Transponder	1.700.000.000,00		4.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.04.01.1.03 - Administrasi Umum	4.04.01.1.03.02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Layanan	12 Layanan	
3.				6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional									
					Jumlah Unit Mobil Dinas/Operasional yang terpelihara dan Terfasilitasi Perijinannya	2.100.000.000,00		4.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.04.01.1.03 - Administrasi Umum	4.04.01.1.03.06 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Unit Mobil Dinas/Operasional yang diservis dan dipelihara	112 Unit	
4.				7 Penyediaan jasa administrasi keuangan									
					Jumlah Honor yang terbayarkan	1.368.000.000,00		4.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.04.01.1.03 - Administrasi Umum	4.04.01.1.03.07 - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pegawai yang membuat laporan	38 Orang	
5.				8 Penyediaan jasa kebersihan kantor									
					Luas Gedung dan Halaman yang disediakan jasa kebersihan	0,00		4.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.04.01.1.03 - Administrasi Umum	4.04.01.1.03.08 - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	jumlah Gedung dan Halaman yang dibersihkan	0 M2	
					Jumlah tenaga kebersihan dan Fasilitas Pendukung kebersihan kantor	972.000.000,00		4.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.04.01.1.03 - Administrasi Umum	4.04.01.1.03.08 - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah tenaga kebersihan	27 Orang	
					Jumlah Jenis Bahan dan Alat Kebersihan	300.000.000,00		4.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.04.01.1.03 - Administrasi Umum	4.04.01.1.03.14 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Bahan dan Alat Kebersihan	18 Jenis	
6.				10 Penyediaan alat tulis kantor									
					Jumlah jenis ATK yang disediakan	1.380.000.000,00		4.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.04.01.1.03 - Administrasi Umum	4.04.01.1.03.10 - Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	31 Jenis	
7.				11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan									
					Jumlah barang cetakan	0,00		4.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.04.01.1.03 - Administrasi Umum	4.04.01.1.03.11 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan	0 Jenis	
					Jumlah penggandaan	0,00		4.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.04.01.1.03 - Administrasi Umum	4.04.01.1.03.11 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penggandaan	0 Lembar	
					Jumlah Jenis Barang Cetak dan yang Disediakan	0,00		4.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.04.01.1.03 - Administrasi Umum	4.04.01.1.03.11 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0 Jenis	
					Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	1.400.000.000,00		4.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.04.01.1.03 - Administrasi Umum	4.04.01.1.03.11 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	12 Bulan	
8.				12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor									
					Jumlah Komponen Listrik yang disediakan	150.000.000,00		4.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.04.01.1.03 - Administrasi Umum	4.04.01.1.03.12 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen alat pemeliharaan listrik dan genset yang disediakan	8 Buah	
9.				15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	83.000.000,00		4.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.04.01.1.03 - Administrasi Umum	4.04.01.1.03.15 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	2 Jenis	
10.				17 Penyediaan makanan dan minuman									
					Pelaksanaan penyediaan makan dan minum	0,00		4.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.04.01.1.03 - Administrasi Umum	4.04.01.1.03.17 - Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Porsi makan dan minum kegiatan yang tersedia	0 Kegiatan	
					Pelaksanaan makan minum tamu dan rapat	0,00		4.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.04.01.1.03 - Administrasi Umum	4.04.01.1.03.17 - Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Porsi makan dan minum yang tersedia	0 Kali Tahun	
					Pelaksanaan makan minum saat olah raga (hari Jumat)	0,00		4.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.04.01.1.03 - Administrasi Umum	4.04.01.1.03.17 - Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Porsi makan dan minum yang tersedia	0 Kali	
					Tersediannya Makanan dan Minuman	3.000.000.000,00		4.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.04.01.1.03 - Administrasi Umum	4.04.01.1.03.17 - Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Porsi makan dan minum yang tersedia	12 Bulan	
					Jumlah orang yang disediakan makan dan minuman	0,00		4.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.04.01.1.03 - Administrasi Umum	4.04.01.1.03.17 - Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Porsi makan dan minum yang tersedia	0 Orang	
11.				18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah									
					Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	8.000.000.000,00		4.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.04.01.1.03 - Administrasi Umum	4.04.01.1.03.18 - Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	300 Orang	
12.				19 Penyediaan Jasa Pengamanan									
					Pelaksanaan pembayaran insentif bagi tenaga operator dan penjaga X-Ray VIP Room Bandara Sentani	0,00		4.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.04.01.1.03 - Administrasi Umum	4.04.01.1.03.01 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa keamanan/security yang dibayarkan	0 Orang Bulan	
					Pelaksanaan pembayaran honor bagi satpam	0,00		4.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.04.01.1.03 - Administrasi Umum	4.04.01.1.03.01 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa keamanan/security yang dibayarkan	0 Orang Bulan	
					Pelaksanaan uang makan satpam	0,00		4.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.04.01.1.03 - Administrasi Umum	4.04.01.1.03.01 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa keamanan/security yang dibayarkan	0 Orang Bulan	
					Jumlah tenaga pengamanan	756.000.000,00		4.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.04.01.1.03 - Administrasi Umum	4.04.01.1.03.01 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa keamanan/security yang dibayarkan	21 Orang	
13.		2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	À Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	2 Pembangunan rumah dinas									
					Terbangunnya rumah dinas	800.000.000,00		4.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.04.01.1.03 - Administrasi Umum	4.04.01.1.03.38 - Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas	Terbangunnya rumah dinas	2 Unit	
14.				3 Pembangunan gedung kantor									
					Luas bangunan yang dibangun	10.000.000.000,00		4.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.04.01.1.03 - Administrasi Umum	4.04.01.1.03.39 - Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Luas bangunan yang dibangun	20800 M2	
					Tersedianya desain perencanaan bangunan	0,00		4.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.04.01.1.03 - Administrasi Umum	4.04.01.1.03.39 - Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Tersedianya desain perencanaan bangunan	0 Dokumen	
15.				5 Pengadaan kendaraan dinas/operasional									
					Jumlah kendaraan yang diadakan	450.000.000,00		4.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.04.01.1.03 - Administrasi Umum	4.04.01.1.03.21 - Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda 4	1 Unit	
					Jumlah kendaraan roda 2	350.000.000,00		4.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.04.01.1.03 - Administrasi Umum	4.04.01.1.03.21 - Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda 2	10 Unit	
16.				7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor									
					Jumlah pengadaan perlengkapan	400.000.000,00		4.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.04.01.1.03 - Administrasi Umum	4.04.01.1.03.23 - Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan	80 Unit	
17.				9 Pengadaan peralatan gedung kantor									
					Jumlah peralatan perlengkapan	5.950.000.000,00		4.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.04.01.1.03 - Administrasi Umum	4.04.01.1.03.25 - Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan/perlengkapan yang diadakan	328 Unit	
18.				10 Pengadaan mebeleur									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Jumlah mebeleur yang diadakan	700.000.000,00		4.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.04.01.1.03 - Administras Umum	4.04.01.1.03.26 - Pengadaan Mebeleur	Jumlah mebeleur yang diadakan untuk 3 UPT	272 Unit	
19.				21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas									
					Jumlah rumah dinas yang dipelihara	190.000.000,00		4.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.04.01.1.03 - Administras Umum	4.04.01.1.03.28 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Jumlah rumah dinas yang dipelihara	19 Unit	
20.				22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor									
					Jumlah gedung kantor yang dipelihara	852.500.000,00		4.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.04.01.1.03 - Administras Umum	4.04.01.1.03.29 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor	18 Unit	
					belanja sewa	0,00		4.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.04.01.1.03 - Administras Umum	4.04.01.1.03.29 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung yang disewa	1 Tahun	
21.				26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor									
					Pelaksanaan pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	0,00		4.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.04.01.1.03 - Administras Umum	4.04.01.1.03.27 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Jumlah Rumah Jabatan	150 Kegiatan	
					Jumlah Perlengkapan Gedung kantor yang terpelihara	145.000.000,00		4.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.04.01.1.03 - Administras Umum	4.04.01.1.03.33 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung kantor yang dipelihara	150 Unit	
					Tersediannya biaya pemeliharaan gedung kantor	0,00		4.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.04.01.1.03 - Administras Umum	4.04.01.1.03.39 - Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor	150 Bulan	
22.				28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor									
					Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	435.000.000,00		4.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.04.01.1.03 - Administras Umum	4.04.01.1.03.35 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	60 Unit	
23.				30 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor									
					Luas bangunan yang direhab	500.000.000,00		4.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.04.01.1.03 - Administras Umum	4.04.01.1.03.39 - Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Jumlah bangunan yang direhab	1000 M2	
24.				41 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas									
					Luas bangunan yang direhab	321.000.000,00		4.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.04.01.1.03 - Administras Umum	4.04.01.1.03.38 - Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas	Luas bangunan yang direhab	9 M2	
25.				46 Sewa gedung									
					Jumlah gedung kantor yang disewa	150.000.000,00		4.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.04.01.1.03 - Administras Umum	4.04.01.1.03.27 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Jumlah rumah jabatan yang terpelihara	1 Unit Tahun	
					Sewa rumah jabatan	0,00		4.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.04.01.1.03 - Administras Umum	4.04.01.1.03.27 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Jumlah Rumah Jabatan Yang disewa	0 Unit Tahun	
26.		3 Program peningkatan disiplin aparatur	À Meningkatnya disiplin aparatur	1 Pengadaan mesin/kartu absensi									
					Jumlah Mesin /Kartu Apsensi yang tersedia	100.000.000,00		4.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.04.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	4.04.01.1.04.01 - Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Jumlah Mesin /Kartu Absensi yang tersedia	17 Bh	
27.				2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya									
					Jumlah pakaian dinas yang diadakan	357.000.000,00		4.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.04.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	4.04.01.1.04.02 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas sipil harian	255 Stell	
28.				5 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu									
					Jumlah pakaian khusus yang diadakan	252.450.000,00		4.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.04.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	4.04.01.1.04.05 - Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah pakaian Batik yang diadakan	255 Stell	
29.		4 Program fasilitas pindah/purna tugas PNS	À Meningkatnya kualitas penangan pindah/purna tugas PNDNS	3 Jumlah pegawai di fasikitasi Pemindahan tugas									
					Jumlah pegawai yang difasilitasi	586.500.000,00		4.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.04.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	4.04.01.1.04.08 - Pemindahan Tugas PNS	Jumlah pegawai yang difasilitasi	75 Orang	

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30.	Keuangan	5 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	À Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	1 Pendidikan dan pelatihan formal									
					Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	289.000.000,00		4.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.04.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	4.04.01.1.04.09 - Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparatur mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	5 Orang	
31.				4 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal									
					Jumlah aparatur yang terlatih	1.100.000.000,00		4.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.04.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	4.04.01.1.04.11 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	125 Orang	
32.		6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	À Meningkatnya kualitas akuntabilitas OPD	2 Penyusunan laporan keuangan semesteran									
					Jumlah pelaporan keuangan semesteran yang diselesaikan tepat waktu	25.900.000,00		4.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.04.01.1.02 - Administrasi Keuangan	4.04.01.1.02.07 - Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Jumlah dokumen laporan	5 Laporan	
33.				4 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun									
					Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	30.000.000,00		4.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.04.01.1.02 - Administrasi Keuangan	4.04.01.1.02.09 - Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	1 Laporan	
34.				5 Penyusunan Renja, RKA dan Perubahan APBD									
					Jumlah dokumen	80.000.000,00		4.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.04.01.1.01 - Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.04.01.1.01.01 - Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	3 Dokumen	
35.				12 Penyusunan RENSTRA									
					Jumlah Dokumen	0,00		4.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.04.01.1.01 - Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.04.01.1.01.01 - Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	0 Dokumen	
36.		17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Cakupan Implementasi Analisis Standar Belanja Daerah ; Kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah ; Opini Pemeriksaan BPK; Penyampaian LKPD Tepat Waktu ; Persentase aset daerah yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan retribusi; Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah; Tersusunnya APBD dan Perubahan APBD secara tepat waktu dan berkualitas ; Tertib Administrasi BMD	19 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah									
					Terlaksananya Rapat dan Koordinasi	0,00	5.02 - KEUANGAN	5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	5.02.04.1.01 - Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	5.02.04.1.01.02 - Penyusunan Kebijakan Tentang Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Terlaksananya Rapat dan Koordinasi	0 Kegiatan	
37.				40 Rekonsiliasi Pendapatan Daerah									
					Terlaksananya Rekonsiliasi Pendapatan Daerah	0,00						0 Dokumen	
38.				100 Intensifikasi Penerimaan Retribusi Daerah (Retribusi)									
					Terlaksananya Evaluasi Penerimaan Retribusi Daerah	0,00						0 Dokumen	
39.				239 Koordinasi Peningkatan Kontribusi BUMD									
					Jumlah kesepakatan koordinasi dengan Perusahaan/BUMD	0,00	5.02 - KEUANGAN	5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	5.02.04.1.01 - Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	5.02.04.1.01.01 - Penyusunan Kebijakan Teknis Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah	Jumlah kesepakatan koordinasi dengan Perusahaan/BUMD	1 Dokumen	

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
40.	Keuangan	17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Cakupan Implementasi Analisis Standar Belanja Daerah ; Kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah ; Opini Pemeriksaan BPK; Penyampaian LKPD Tepat Waktu ; Persentase aset daerah yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan retribusi; Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah; Tersusunnya APBD dan Perubahan APBD secara tepat waktu dan berkualitas ; Tertib Administrasi BMD	240 Koordinasi/ Konsultasi Penanaman Modal/Saham									
					Jumlah kesepakatan koordinasi/konsultasi penanaman modal/saham	0,00	5.02 - KEUANGAN	5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	5.02.04.1.01 - Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	5.02.04.1.01.01 - Penyusunan Kebijakan Teknis Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah	Jumlah kesepakatan koordinasi/konsultasi penanaman modal/saham	4 Dokumen	
41.		20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Peningkatan Efektifitas pendapatan asli daerah	1 Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala									
					Terlaksananya Pengawasan Evaluasi Laporan dan Rapat Evaluasi Kinerja	0,00	5.02 - KEUANGAN	5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	5.02.04.1.01 - Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	5.02.04.1.01.11 - Monitoring dan Evaluasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Terlaksananya Pengawasan Evaluasi Laporan dan Rapat Evaluasi Kinerja	0 Dokumen	
					Jumlah Dokumen Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelayanan dan Kinerja SAMSAT	2.885.385.000,00	5.02 - KEUANGAN	5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	5.02.04.1.01 - Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	5.02.04.1.01.11 - Monitoring dan Evaluasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelayanan dan Kinerja SAMSAT	18 Laporan	
					Dokumen Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelayanan dan Kinerja Samsat	0,00	5.02 - KEUANGAN	5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	5.02.04.1.01 - Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	5.02.04.1.01.11 - Monitoring dan Evaluasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Dokumen Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelayanan dan Kinerja Samsat	0 Dokumen	
42.				2 Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat									
					Jumlah Samsat yang melaksanakan pengukuran IKM	550.000.000,00	5.02 - KEUANGAN	5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	5.02.04.1.01 - Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	5.02.04.1.01.05 - Perumusan Kebijakan Strategi Penyuluhan dan Penyebarluasan Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Masyarakat	Jumlah Samsat yang melaksanakan pengukuran IKM	10 Unit	
					Jumlah Samsat yang menjalankan SOP	0,00	5.02 - KEUANGAN	5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	5.02.04.1.01 - Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	5.02.04.1.01.04 - Penyusunan dan Evaluasi Kebijakan Tentang Sistem Administrasi Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Samsat yang menjalankan SOP	10 Unit	
43.				3 Kegiatan Penyusunan Peraturan Perundang Undangan									
					Jumlah rancangan peraturan yang disusun	600.000.000,00	5.02 - KEUANGAN	5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	5.02.04.1.01 - Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	5.02.04.1.01.02 - Penyusunan Kebijakan Tentang Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah rancangan peraturan yang disusun	2 Dokumen	
44.		104 Program Peningkatan Pendapatan Daerah	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah; Prosentase Peningkatan Kontribusi UPTB dalam pungutan Pendapatan Asli Daerah	1 Kajian Identifikasi Potensi Pendapatan Daerah									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					terlaksananya Kajian Terhadap Potensi Pendapatan Asli Daerah	0,00	5.02 - KEUANGAN	5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	5.02.04.1.01 - Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	5.02.04.1.01.02 - Penyusunan Kebijakan Tentang Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	terlaksananya Kajian Terhadap Potensi Pendapatan Asli Daerah	0 Dokumen	
					Jumlah Dokumen Kajian Potensi Sumber - Sumber Pendapatan	500.000.000,00	5.02 - KEUANGAN	5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	5.02.04.1.01 - Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	5.02.04.1.01.02 - Penyusunan Kebijakan Tentang Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Kajian Potensi Sumber - Sumber Pendapatan	1 Dokumen	
					Jumlah Dokumen Kajian Potensi Sumber-Sumber Pendapatan	0,00	5.02 - KEUANGAN	5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	5.02.04.1.01 - Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	5.02.04.1.01.02 - Penyusunan Kebijakan Tentang Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Kajian Potensi Sumber-Sumber Pendapatan	0 Dokumen	
45.				2 Rapat Koordinasi Teknis									
					Terlaksananya Rapat Koordinasi Teknis	0,00	5.02 - KEUANGAN	5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	5.02.04.1.01 - Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	5.02.04.1.01.02 - Penyusunan Kebijakan Tentang Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Terlaksananya Rapat Koordinasi Teknis	1 Dokumen	
46.				3 Pengembangan Data dan Informasi Pendapatan Daerah									
					Tersedianya Data dan Sistem Informasi Pendapatan Daerah	0,00	5.02 - KEUANGAN	5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	5.02.04.1.01 - Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	5.02.04.1.01.08 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Tersedianya Data dan Sistem Informasi Pendapatan Daerah	0 Sistem	
					Jumlah Sistem yang tersedia untuk Pengelolaan dan Penatausahaan Pendapatan Daerah	5.850.000.000,00	5.02 - KEUANGAN	5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	5.02.04.1.01 - Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	5.02.04.1.01.08 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Sistem yang tersedia untuk Pengelolaan dan Penatausahaan Pendapatan Daerah	11 Sistem	
					Jumlah Sistem Yang Tersedia Untuk Pengelolaan dan Penatausahaan Pendapatan Daerah	0,00	5.02 - KEUANGAN	5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	5.02.04.1.01 - Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	5.02.04.1.01.08 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Sistem Yang Tersedia Untuk Pengelolaan dan Penatausahaan Pendapatan Daerah	0 Sistem	
47.				4 Sosialisasi dan Penagihan Pajak Daerah									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Jumlah Tempat Baru dalam Pembayaran Pajak	330.000.000,00	5.02 - KEUANGAN	5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	5.02.04.1.01 - Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	5.02.04.1.01.05 - Perumusan Kebijakan Strategi Penyuluhan dan Penyebarluasan Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Masyarakat	Jumlah Tempat Baru dalam Pembayaran Pajak	6 Tempat	
					Jumlah Masyarakat Pemanfaat Penghapusan Denda	0,00	5.02 - KEUANGAN	5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	5.02.04.1.01 - Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	5.02.04.1.01.05 - Perumusan Kebijakan Strategi Penyuluhan dan Penyebarluasan Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Masyarakat	Jumlah Masyarakat Pemanfaat Penghapusan Denda	0 Orang	
					Jumlah Reward yang diberikan kepada Masyarakat	0,00	5.02 - KEUANGAN	5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	5.02.04.1.01 - Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	5.02.04.1.01.05 - Perumusan Kebijakan Strategi Penyuluhan dan Penyebarluasan Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Masyarakat	Jumlah Reward yang diberikan kepada Masyarakat	0 Unit	
					Jumlah Perusahaan yang disosialisasi Pajak Daerah	350.000.000,00	5.02 - KEUANGAN	5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	5.02.04.1.01 - Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	5.02.04.1.01.05 - Perumusan Kebijakan Strategi Penyuluhan dan Penyebarluasan Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Masyarakat	Jumlah Perusahaan yang disosialisasi Pajak Daerah	10 Perusahaan	
					Jumlah Wilayah Baru yang disosialisasi	275.000.000,00	5.02 - KEUANGAN	5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	5.02.04.1.01 - Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	5.02.04.1.01.05 - Perumusan Kebijakan Strategi Penyuluhan dan Penyebarluasan Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Masyarakat	Jumlah Wilayah Baru yang disosialisasi	1 Wilayah	
					Jumlah Sosialisasi dan Pemberitahuan Pajak Melalui Media Massa	1.800.000.000,00	5.02 - KEUANGAN	5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	5.02.04.1.01 - Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	5.02.04.1.01.05 - Perumusan Kebijakan Strategi Penyuluhan dan Penyebarluasan Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Masyarakat	Jumlah Sosialisasi dan Pemberitahuan Pajak Melalui Media Massa	7 Media	
					Jumlah Penagihan Pajak	0,00	5.02 - KEUANGAN	5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	5.02.04.1.01 - Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	5.02.04.1.01.05 - Perumusan Kebijakan Strategi Penyuluhan dan Penyebarluasan Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Masyarakat	Jumlah Penagihan Pajak	68 Titik	
48.				5 Koordinasi Pemungutan Pajak Daerah									
					Jumlah kesepakatan koordinasi kesamsatan	2.600.000.000,00	5.02 - KEUANGAN	5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	5.02.04.1.01 - Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	5.02.04.1.01.04 - Penyusunan dan Evaluasi Kebijakan Tentang Sistem Administrasi Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah kesepakatan koordinasi kesamsatan	4 Laporan	
					Jumlah dokumen rekonsiliasi Samsat	0,00	5.02 - KEUANGAN	5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	5.02.04.1.01 - Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	5.02.04.1.01.04 - Penyusunan dan Evaluasi Kebijakan Tentang Sistem Administrasi Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen rekonsiliasi Samsat	2 Laporan	
					Jumlah dokumen rekonsiliasi wajib pungut PBB KB	0,00	5.02 - KEUANGAN	5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	5.02.04.1.01 - Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	5.02.04.1.01.04 - Penyusunan dan Evaluasi Kebijakan Tentang Sistem Administrasi Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen rekonsiliasi wajib pungut PBB KB	2 Laporan	
49.				6 Intensifikasi penerimaan retribusi daerah									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Jumlah dokumen hasil rekonsiliasi/evaluasi OPD pemungut	850.000.000,00	5.02 - KEUANGAN	5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	5.02.04.1.01 - Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	5.02.04.1.01.07 - Konsultasi dan Pendampingan Wajib Pajak dan Retribusi	Jumlah dokumen hasil rekonsiliasi/evaluasi OPD pemungut	4 Laporan	
					Jumlah OPD/UPT yang didampingi dalam pemungutan retribusi	0,00	5.02 - KEUANGAN	5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	5.02.04.1.01 - Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	5.02.04.1.01.07 - Konsultasi dan Pendampingan Wajib Pajak dan Retribusi	Jumlah OPD/UPT yang didampingi dalam pemungutan retribusi	15 SKPD	
					Jumlah OPD yang menerima reward sesuai target	0,00	5.02 - KEUANGAN	5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	5.02.04.1.01 - Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	5.02.04.1.01.07 - Konsultasi dan Pendampingan Wajib Pajak dan Retribusi	Jumlah OPD yang menerima reward sesuai target	14 SKPD	
50.				7 Pendataan Potensi Retribusi di Provinsi Papua									
					Jumlah potensi retribusi yang terdata	600.000.000,00	5.02 - KEUANGAN	5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	5.02.04.1.01 - Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	5.02.04.1.01.09 - Pemeliharaan dan Pemutakhiran Basis Data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah potensi retribusi yang terdata	4 Dokumen	
					Jumlah angkutan yang terdata	0,00	5.02 - KEUANGAN	5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	5.02.04.1.01 - Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	5.02.04.1.01.09 - Pemeliharaan dan Pemutakhiran Basis Data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah angkutan yang terdata	250 Unit	
JUMLAH						62.843.735.000,00							

Mengetahui,
Kepala Bappeda Provinsi Papua

YOHANES WALILO, S.Sos, M.Si
NIP. 197007281997121001

JAYAPURA, 20 July 2020
KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

MB. SETIYO WAHYUDI, SE., MM
NIP. 19660423 198709 1 001

**REKAPITULASI PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021
SERTA KETERKAITAN DENGAN HASIL PEMETAAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019**

PROVINSI : Papua

PERANGKAT DAERAH : Badan Kepegawaian Daerah

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Kepegawaian	1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	À Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	1 Penyediaan jasa surat menyurat									
					Jumlah surat yang disediakan	675.570.000,00		4.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.05.01.1.03 - Administrasi Umum	4.05.01.1.03.01 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang terkirim	7000 Surat	
2.				2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik									
					Jumlah Jasa Layanan berlangganan Listrik, Air, Telepon, Transponder	887.430.000,00		4.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.05.01.1.03 - Administrasi Umum	4.05.01.1.03.02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Layanan	12 Layanan	
3.				3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor									
					Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	0,00		4.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.05.01.1.03 - Administrasi Umum	4.05.01.1.03.03 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	0 Unit	
4.				8 Penyediaan jasa kebersihan kantor									
					Luas Gedung dan Halaman yang disediakan jasa kebersihan	20.000.000,00		4.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.05.01.1.03 - Administrasi Umum	4.05.01.1.03.08 - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	jumlah Gedung dan Halaman yang dibersihkan	1000 M2	
					Jumlah tenaga kebersihan dan Fasilitas Pendukung kebersihan kantor	429.000.000,00		4.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.05.01.1.03 - Administrasi Umum	4.05.01.1.03.08 - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah tenaga kebersihan	13 Orang	
					Jumlah Jenis Bahan dan Alat Kebersihan	19.000.000,00		4.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.05.01.1.03 - Administrasi Umum	4.05.01.1.03.14 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Bahan dan Alat Kebersihan	20 Jenis	
5.				10 Penyediaan alat tulis kantor									
					Jumlah jenis ATK yang disediakan	350.000.000,00		4.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.05.01.1.03 - Administrasi Umum	4.05.01.1.03.10 - Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	12 Jenis	
6.				11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan									
					Jumlah barang cetakan	30.000.000,00		4.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.05.01.1.03 - Administrasi Umum	4.05.01.1.03.11 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan	20 Jenis	
					Jumlah penggandaan	30.000.000,00		4.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.05.01.1.03 - Administrasi Umum	4.05.01.1.03.11 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penggandaan	7000 Lembar	
					Jumlah Jenis Barang Cetak dan yang Disediakan	330.000.000,00		4.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.05.01.1.03 - Administrasi Umum	4.05.01.1.03.11 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	20 Jenis	
					Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	20.000.000,00		4.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.05.01.1.03 - Administrasi Umum	4.05.01.1.03.11 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	12 Bulan	
7.				12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor									
					Jumlah Komponen Listrik yang disediakan	110.000.000,00		4.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.05.01.1.03 - Administrasi Umum	4.05.01.1.03.12 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen alat pemeliharaan listrik dan genset yang disediakan	75 Buah	
8.				17 Penyediaan makanan dan minuman									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Pelaksanaan penyediaan makan dan minum	150.000.000,00		4.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.05.01.1.03 - Administrasi Umum	4.05.01.1.03.17 - Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Porsi makan dan minum kegiatan yang tersedia	12 Kegiatan	
					Pelaksanaan makan minum tamu dan rapat	200.000.000,00		4.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.05.01.1.03 - Administrasi Umum	4.05.01.1.03.17 - Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Porsi makan dan minum yang tersedia	12 Kali Tahun	
					Pelaksanaan makan minum saat olah raga (hari Jumat)	100.000.000,00		4.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.05.01.1.03 - Administrasi Umum	4.05.01.1.03.17 - Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Porsi makan dan minum yang tersedia	12 Kali	
					Tersediannya Makanan dan Minuman	100.000.000,00		4.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.05.01.1.03 - Administrasi Umum	4.05.01.1.03.17 - Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Porsi makan dan minum yang tersedia	12 Bulan	
					Jumlah orang yang disediakan makan dan minuman	100.000.000,00		4.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.05.01.1.03 - Administrasi Umum	4.05.01.1.03.17 - Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Porsi makan dan minum yang tersedia	99 Orang	
9.				18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah									
					Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	1.400.500.000,00		4.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.05.01.1.03 - Administrasi Umum	4.05.01.1.03.18 - Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	60 Orang	
10.				20 Pembuatan Aplikasi e-Surat									
					Jumlah sistem informasi	0,00						0 Aplikasi	
11.		2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	À Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor									
					Jumlah pengadaan perlengkapan	350.000.000,00		4.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.05.01.1.03 - Administrasi Umum	4.05.01.1.03.23 - Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan	25 Unit	
12.				9 Pengadaan peralatan gedung kantor									
					Jumlah peralatan perlengkapan	500.000.000,00		4.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.05.01.1.03 - Administrasi Umum	4.05.01.1.03.25 - Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan/perlengkapan yang diadakan	36 Unit	
13.				10 Pengadaan mebeleur									
					Jumlah mebeleur yang diadakan	200.000.000,00		4.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.05.01.1.03 - Administrasi Umum	4.05.01.1.03.26 - Pengadaan Mebeleur	Jumlah mebeleur yang diadakan untuk 3 UPT	10 Unit	
14.				24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional									
					Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	150.000.000,00		4.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.05.01.1.03 - Administrasi Umum	4.05.01.1.03.31 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah dan Jenis perlengkapan/peralatan gedung kantor yang dipelihara	20 Unit	
					Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	75.000.000,00		4.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.05.01.1.03 - Administrasi Umum	4.05.01.1.03.31 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang	20 Unit	
					sewa kendaraan	75.000.000,00		4.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.05.01.1.03 - Administrasi Umum	4.05.01.1.03.31 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan yang diperbaiki/Service	12 Bulan	
15.				26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor									
					Pelaksanaan pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	0,00		4.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.05.01.1.03 - Administrasi Umum	4.05.01.1.03.27 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Jumlah Rumah Jabatan	0 Kegiatan	
					Jumlah Perlengkapan Gedung kantor yang terpelihara	150.000.000,00		4.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.05.01.1.03 - Administrasi Umum	4.05.01.1.03.33 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung kantor yang dipelihara	20 Unit	
					Tersediannya biaya pemeliharaan gedung kantor	0,00		4.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.05.01.1.03 - Administrasi Umum	4.05.01.1.03.39 - Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor	0 Bulan	
16.				28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor									
					Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	50.000.000,00		4.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.05.01.1.03 - Administrasi Umum	4.05.01.1.03.35 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	12 Unit	
17.		3 Program peningkatan disiplin aparatur	À Meningkatnya disiplin aparatur	2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya									
					Jumlah pakaian dinas yang diadakan	200.000.000,00		4.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.05.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	4.05.01.1.04.02 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas sipil harian	300 Stel	
18.		5 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	À Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	1 Pendidikan dan pelatihan formal									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	400.000.000,00		4.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.05.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	4.05.01.1.04.09 - Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparatur mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	110 Orang	
19.				2 Sosialisasi peraturan perundang-undangan									
					Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	150.000.000,00		4.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.05.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	4.05.01.1.04.10 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	150 Orang	
20.				3 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan									
					Jumlah peserta bimbingan teknis tentang implementasi peraturan perundang-undangan	150.000.000,00		4.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.05.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	4.05.01.1.04.11 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta bimbingan teknis tentang implementasi peraturan perundang-undangan	150 Orang	
21.				4 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal									
					Jumlah aparatur yang terlatih	0,00		4.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.05.01.1.04 - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	4.05.01.1.04.11 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	
22.		6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	À Meningkatnya kualitas akuntabilitas OPD	1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD									
					Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	50.000.000,00		4.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.05.01.1.02 - Administrasi Keuangan	4.05.01.1.02.06 - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan	5 Laporan	
					Laporan LAKIP SKPD	0,00		4.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.05.01.1.01 - Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.05.01.1.01.05 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan LAKIP SKPD	0 Dokumen	
23.				2 Penyusunan laporan keuangan semesteran									
					Jumlah pelaporan keuangan semesteran yang diselesaikan tepat waktu	50.000.000,00		4.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.05.01.1.02 - Administrasi Keuangan	4.05.01.1.02.07 - Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Jumlah dokumen laporan	5 Laporan	
24.				4 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun									
					Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	50.000.000,00		4.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.05.01.1.02 - Administrasi Keuangan	4.05.01.1.02.09 - Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	5 Laporan	
25.				5 Penyusunan Renja, RKA dan Perubahan APBD									
					Jumlah dokumen	75.000.000,00		4.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.05.01.1.01 - Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.05.01.1.01.01 - Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	5 Dokumen	
26.		38 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Cakupan penyelesaian administrasi kepegawaian yang tepat waktu	2 Pelaksanaan Mutasi, Kenaikan Pangkat dan Pindah									
					Jumlah PNS	1.237.377.000,00	5.03 - KEPEGAWAIAN	5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN	5.03.02.1.02 - Administrasi Kepegawaian	5.03.02.1.02.10 - Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah PNS	4000 Orang	
27.				4 Peningkatan Pelayanan Administrasi PNS									
					Jumlah Pelayanan Administrasi PNS	526.988.000,00	5.03 - KEPEGAWAIAN	5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.1.02 - Administrasi Kepegawaian	5.03.02.1.02.03 - Penyelesaian Penempatan, Pengangkatan, Mutasi, Dan Kepangkatan	Jumlah Pelayanan Administrasi PNS	3500 Orang	
28.				5 Pelaksanaan Ujian Penyesuaian Ijazah bagi PNS									
29.				6 Peningkatan Pelayanan Administrasi Pensiun									
					Jumlah PNS yang pensiun	300.000.000,00	5.03 - KEPEGAWAIAN	5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.1.02 - Administrasi Kepegawaian	5.03.02.1.02.05 - Pelaksanaan Proses Pemberhentian Pegawai	Jumlah PNS yang pensiun	190 Orang	
30.				7 Pemberian penghargaan bagi pegawai purna tugas									
					Jumlah peserta purna tugas yang diberikan penghargaan	1.500.000.000,00	5.03 - KEPEGAWAIAN	5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.1.02 - Administrasi Kepegawaian	5.03.02.1.02.04 - Penyelesaian Pemberhentian dan Pemberian Pensiun	Jumlah peserta purna tugas yang diberikan penghargaan	150 Orang	

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31.	Kepegawaian	41 Program Peningkatan Pemberian Bantuan Hukum dan Penegakan Perda	Persentase kasus pendampingan hukum yang didampingi	1 Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Peraturan Perundang-Undangan Bidang Kepegawaian									
					Jumlah pengawasan dan pengendalian peraturan	296.700.000,00	5.03 - KEPEGAWAIAN	5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.1.05 - Pembinaan ASN	5.03.02.1.05.03 - Penegakkan Disiplin, Pemberian Penghargaan dan Perlindungan	Jumlah pengawasan dan pengendalian peraturan	25 Kali	
32.				2 Sosialisasi Raperdasu Tentang Kebijakan Kepegawaian di Provinsi Papua									
					Jumlah sosialisasi Raperdasu	150.000.000,00	5.03 - KEPEGAWAIAN	5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.1.03 - Peningkatan Kapasitas ASN	5.03.02.1.03.01 - Peningkatan Kapasitas ASN	Jumlah Sosialisasi Raperdasu	150 Kali	
33.				3 Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil									
					Jumlah sosialisasi	150.000.000,00	5.03 - KEPEGAWAIAN	5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.1.03 - Peningkatan Kapasitas ASN	5.03.02.1.03.01 - Peningkatan Kapasitas ASN	Jumlah sosialisasi	150 Kali	
34.				4 Sosialisasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara									
					Jumlah Sosialisasi Undang-Undang	150.000.000,00	5.03 - KEPEGAWAIAN	5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.1.03 - Peningkatan Kapasitas ASN	5.03.02.1.03.01 - Peningkatan Kapasitas ASN	Jumlah Sosialisasi Undang-Undang	1 Kali	
35.				7 Penyelenggaraan Uji Kompetensi									
36.				8 Pelaksanaan Penerimaan Calon Praja IPDN									
37.				9 Penyelenggaraan Ujian Dinas									
38.				10 Fasilitasi perlindungan PNS									
					Jumlah PNS yang difasilitasi	150.000.000,00	5.03 - KEPEGAWAIAN	5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.1.05 - Pembinaan ASN	5.03.02.1.05.03 - Penegakkan Disiplin, Pemberian Penghargaan dan Perlindungan	Jumlah PNS yang difasilitasi	150 Orang	
39.				11 Pengambilan Sumpah/Janji PNS									
					Frekuensi pengambilan sumpah/janji	100.000.000,00	5.03 - KEPEGAWAIAN	5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.1.03 - Peningkatan Kapasitas ASN	5.03.02.1.03.01 - Peningkatan Kapasitas ASN	Frekuensi pengambilan sumpah/janji	1 Kali	
					Jumlah unit kerja	50.000.000,00	5.03 - KEPEGAWAIAN	5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.1.03 - Peningkatan Kapasitas ASN	5.03.02.1.03.01 - Peningkatan Kapasitas ASN	Jumlah unit kerja	35 SKPD	
40.		57 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek sesuai tupoksinya	1 Pengembangan Kualitas SDM									
					Jumlah SDM	10.080.123.000,00	5.03 - KEPEGAWAIAN	5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.1.03 - Peningkatan Kapasitas ASN	5.03.02.1.03.07 - Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah SDM	150 Orang	
41.				2 Penyelenggaraan Seleksi Pendidikan dan Latihan Aparatur									
					Jumlah Aparatur	700.000.000,00	5.03 - KEPEGAWAIAN	5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.1.03 - Peningkatan Kapasitas ASN	5.03.02.1.03.06 - Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Aparatur	400 Orang	
42.				3 Bimbingan Teknis Penyusunan Perhitungan Jumlah Kebutuhan PNS Daerah									
					Jumlah Bimbingan Teknis	150.000.000,00	5.03 - KEPEGAWAIAN	5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.1.03 - Peningkatan Kapasitas ASN	5.03.02.1.03.01 - Peningkatan Kapasitas ASN	Jumlah Bimbingan Teknis	150 Kali	
43.				5 Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas									
					Jumlah eselon yang diuji	150.000.000,00	5.03 - KEPEGAWAIAN	5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.1.02 - Administrasi Kepegawaian	5.03.02.1.02.08 - Pengelolaan Penempatan Dalam Jabatan ASN	Jumlah eselon yang diuji	5 Eselon	
44.				6 Seleksi Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama									
					Jumlah pejabat yang mengikuti seleksi	0,00						0 Orang	
45.				7 Seleksi Penerimaan Calon PNS									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Jumlah pelamar CPNS	200.000.000,00	5.03 - KEPEGAWAIAN	5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.1.02 - Administrasi Kepegawaian	5.03.02.1.02.01 - Penyusunan Analisis Kebutuhan, Formasi, dan Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah pelamar CPNS	3000 Orang	
46.				8 Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN									
					Jumlah bantuan bagi penerimaan Praja IPDN	1.600.000.000,00	5.03 - KEPEGAWAIAN	5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.1.02 - Administrasi Kepegawaian	5.03.02.1.02.06 - Fasilitas Pengadaan dan Pemberhentian.	Jumlah bantuan bagi penerimaan Praja IPDN	4 Lembaga	
47.				9 Penilaian potensi dan kompetensi jabatan pimpinan tinggi, administrasi dan pegawai									
					Jumlah kompetensi jabatan pimpinan tinggi	300.000.000,00	5.03 - KEPEGAWAIAN	5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.1.03 - Peningkatan Kapasitas ASN	5.03.02.1.03.07 - Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah kompetensi jabatan pimpinan tinggi	4000 Orang	
48.				10 Bintek Aplikasi Dupak Jabatan Fungsional									
					Jumlah peserta Bintek	0,00						0 Orang	
49.				11 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan TPP PNS									
					Jumlah PNS	50.000.000,00	5.03 - KEPEGAWAIAN	5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.1.03 - Peningkatan Kapasitas ASN	5.03.02.1.03.02 - Pengembangan Penilaian Kinerja ASN	Jumlah PNS	7000 Orang	
50.				12 Pelaksanaan penerimaan calon praja IPDN									
					Jumlah pelamar calon Praja IPDN	700.000.000,00	5.03 - KEPEGAWAIAN	5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.1.02 - Administrasi Kepegawaian	5.03.02.1.02.01 - Penyusunan Analisis Kebutuhan, Formasi, dan Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah pelamar calon Praja IPDN	1000 Orang	
51.				13 Penyelenggaraan Ujian Dinas									
					Terlaksananya Ujian Dinas	689.630.000,00						250 Orang	
52.				14 Pembangunan Stasion Cat (Computer Assisted Test)									
					Terlaksananya Pembangunan Station Cat	400.000.000,00						50 Unit	
53.				15 Pengendalian Jabatan									
					Terlaksananya Pengendalian abatan di lingkungan Pemerintah Papua	150.000.000,00	5.03 - KEPEGAWAIAN	5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.1.04 - Pengembangan Karir ASN	5.03.02.1.04.01 - Pengembangan Karir dan Promosi ASN	Terlaksananya Pengendalian abatan di lingkungan Pemerintah Papua	51 SKPD	
54.				16 Evaluasi Jpt, Administrator Dan Pengawas									
					Terlaksananya Evaluasi dan administrator Pengawas	150.000.000,00						51 SKPD	
55.				17 Penyusunan Profil Jpt, Administrator Dan Pengawas									
					terlaksananya Penyusunan Profit	150.000.000,00						51 SKPD	
56.				18 Perhitungan Formasi Jabatan Fungsional									
					Terlaksananya Perhitungan Formasi abatan Fungsional	150.000.000,00						51 SKPD	
57.				19 Sumpah dan Janji PNS									
					Jumlah Pegawai yang diambil sumpah dan janji pegawai	0,00						0 Orang	
58.				20 Bimtek Penilaian Prestasi Kerja PNS									
					Jumlah orang yang mengikuti Bimtek	0,00						0 Orang	
59.				21 Bimtek Fasilitas Profesi ASN									
					Jumlah peserta yang mengikuti bimtek fasilitas profesi ASN	0,00						0 Orang	
60.				22 Bimtek Manajemen Kepegawaian									
					Jumlah orang yang mengikuti Bimtek	0,00						0 Orang	
61.		58 Program Pengembangan Data dan Informasi		1 Pengembangan Database dan Pengupdate Data CPNS, PNS, Jabatan Struktur dan Fungsional									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Prosentase Database	150.000.000,00	5.03 - KEPEGAWAIAN	5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.1.01 - Pengelolaan Data dan Informasi ASN	5.03.02.1.01.03 - Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Prosentase Database	80 %	
62.				2 Pemutahiran Data Kepegawaian dan Pengembangan Sistem Informasi Berbasis Web									
					Prosesntase Pemutahiran Data Kepegawaian	360.370.000,00	5.03 - KEPEGAWAIAN	5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.1.01 - Pengelolaan Data dan Informasi ASN	5.03.02.1.01.04 - Pengelolaan Data Kepegawaian	Prosesntase Pemutahiran Data Kepegawaian	90 %	
63.				4 Pengadaan Aplikasi E-Surat									
					tersedianya aplikasi E-Surat	150.000.000,00	5.03 - KEPEGAWAIAN	5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.1.01 - Pengelolaan Data dan Informasi ASN	5.03.02.1.01.01 - Pengembangan Sistem Informasi Manajemen ASN dan Manajemen Naskah dan Dokumen ASN	tersedianya aplikasi E-Surat	1 Unit	
64.		59 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		1 Pendidikan dan Pelatihan Formal									
					Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Formal	0,00						0 Kali	
65.				2 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan kepegawaian									
66.				3 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan tentang Kepegawaian									
					Jumlah peserta bimtek	0,00						0 Orang	
67.				5 Bimtek Pemberhentian dan Pensiun PNS									
					Jumlah peserta bimtek	150.000.000,00	5.03 - KEPEGAWAIAN	5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.1.03 - Peningkatan Kapasitas ASN	5.03.02.1.03.01 - Peningkatan Kapasitas ASN	Jumlah peserta bimtek	150 Orang	
68.				6 Peningkatan dan Pengendalian Jabatan PNS									
69.				7 Bimtek Sasaran Kerja Pegawai (SKP)									
70.				8 Bimtek Aplikasi DUPAK Jabatan Fungsional PNS									
71.				9 Pemberian SatyaLancana Karya Satya bagi PNS									
					Jumlah pegawai yang mendapatkan Satya Lancana Karya Satya	300.000.000,00	5.03 - KEPEGAWAIAN	5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.1.05 - Pembinaan ASN	5.03.02.1.05.03 - Penegakkan Disiplin, Pemberian Penghargaan dan Perlindungan	Jumlah pegawai yang mendapatkan Satya Lancana Karya Satya	700 Orang	
72.				10 Rapat Koordinasi Teknis									
					Jumlah peserta rapat	1.000.000.000,00	5.03 - KEPEGAWAIAN	5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.1.03 - Peningkatan Kapasitas ASN	5.03.02.1.03.01 - Peningkatan Kapasitas ASN	Jumlah peserta rapat	250 Orang	
73.				12 Sosialisasi Perdasi Pns									
					Jumlah PNS yang mendapat fasilitas perlindungan	50.000.000,00	5.03 - KEPEGAWAIAN	5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.1.03 - Peningkatan Kapasitas ASN	5.03.02.1.03.01 - Peningkatan Kapasitas ASN	Jumlah PNS yang mendapat Sosialisasi Perdasi PNS	150 Orang	
74.				13 Bimtek Penilaian Prestasi Kerja Pns									
					Jumlah peraturan yang diimplementasikan	0,00						0 Peraturan	
75.				14 Bimtek Fasilitasi Profesi Asn									
					Jumlah PNS Bimtek yang terfasilitasi	0,00						0 Orang	
76.				15 Bimtek Manajemen Kepegawaian									
					terlaksananya Bimtek Manajemen PNS	0,00						0 Orang	
77.				16 Rapat Koordinasi Teknis Bidang Kepegawaian									
					Terlaksananya Rapat Koordinasi Bidang	0,00						0 Orang	
78.				17 Bimtek Administrasi Kenaikan Pangkat									
					Terlaksananya Bimtek Administrasi Kenaikan Pangkat	0,00						0 Orang	
79.				18 Pemberian Satya Lencana Karya Satya Bagi Pns									

No.	BIDANG	PROGRAM	OUTCOME / TARGET	KEGIATAN	OUTPUT / TARGET	PAGU KEGIATAN	NOMENKLATUR PMDN NO. 90 TAHUN 2019						KET
							BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Terlaksananya Pemberian Penghargaan Satya Lencana Karya Satya	0,00						0 Orang	
80.				19 Implementasi Peraturan Perundang-Undangan									
					Jumlah Peserta	0,00						0 Orang	
81.				20 Sosialisasi Jabatan Fungsional									
					Jumlah Peserta Sosialisasi Jabatan Fungsional	0,00						0 Orang	
82.		60 Program Pendidikan Kedinasan	Jenis Diklat yang terakreditasi A; Persentase ASN peserta Diklat Kepemimpinan II yang Lulus dengan Kualifikasi Sangat Memuaskan; Persentase ASN peserta Diklat Kepemimpinan III yang Lulus dengan Kualifikasi Sangat Memuaskan; Persentase ASN peserta Diklat Kepemimpinan IV yang Lulus dengan Kualifikasi Sangat Memuaskan	1 Pendidikan dan Latihan Kepemimpinan Tingkat II									
					Jumlah Aparatur Pim Tk. II	75.000.000,00	5.03 - KEPEGAWAIAN	5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.1.04 - Pengembangan Karir ASN	5.03.02.1.04.01 - Pengembangan Karir dan Promosi ASN	Jumlah Aparatur Pim Tk. II	1 Orang	
83.				2 Pendidikan dan Latihan Kepemimpinan Tingkat III									
					Jumlah Aparatur Pim Tk. III	110.000.000,00	5.03 - KEPEGAWAIAN	5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.1.04 - Pengembangan Karir ASN	5.03.02.1.04.01 - Pengembangan Karir dan Promosi ASN	Jumlah Aparatur Pim Tk. III	2 Orang	
84.				3 Pendidikan dan Latihan Kepemimpinan Tingkat IV									
					Jumlah Aparatur Pim Tk. IV	70.000.000,00	5.03 - KEPEGAWAIAN	5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.1.04 - Pengembangan Karir ASN	5.03.02.1.04.01 - Pengembangan Karir dan Promosi ASN	Jumlah Aparatur Pim Tk. IV	2 Orang	
JUMLAH						30.272.688.000,00							

Mengetahui,
Kepala Bappeda Provinsi Papua

YOHANES WALILO, S.Sos, M.Si
NIP. 197007281997121001

JAYAPURA, 20 July 2020
KEPALA BADAN

Drs.NICOLAUS WENDA,MM
NIP. 19621010 199303 1 001

